

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. KINERJA PEMBANGUNAN INDONESIA

Di tengah situasi global yang tidak pasti, Indonesia terus mencapai kemajuan di berbagai bidang. Pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan terus didorong pada empat jalur (*track*) yaitu pro-pertumbuhan (*pro-growth*), pro-lapangan kerja (*pro-job*), pro-pengurangan kemiskinan (*pro-poor*), dan pro-lingkungan (*pro-environment*) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia. Pro-lingkungan, yang ditambahkan sejak tahun 2009, penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dijalankan menjamin keberlanjutan demi masa depan yang lebih baik.

Dalam tahun 2011, perekonomian Indonesia tumbuh 6,5 persen, lebih tinggi dari tahun 2010 (6,2 persen), di tengah perlambatan ekonomi dunia, krisis utang Eropa, perubahan iklim dan bencana alam di tingkat global, serta ketegangan politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Stabilitas ekonomi terkendali dengan laju inflasi terjaga sebesar 3,8 persen, nilai tukar rupiah yang relatif stabil, serta cadangan devisa yang meningkat menjadi USD 110,1 miliar. Ketahanan fiskal tetap terjaga dengan defisit anggaran sebesar 1,2 persen PDB dan stok utang menurun menjadi 24,3 persen PDB.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 terutama ditopang oleh ketahanan domestik berupa investasi yang meningkat dan daya beli masyarakat yang terjaga serta ekspor barang dan jasa yang tetap tumbuh. Pada tahun 2012, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 6,5 persen didukung oleh permintaan domestik yang lebih baik dengan risiko eksternal berupa tingginya harga energi dan melambatnya ekonomi dunia.

Membaiknya ekonomi juga diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Tingkat kemiskinan terus menurun dari 16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 13,3 persen pada tahun 2009 dan 12,4 persen pada tahun 2011. Perurunan kemiskinan dipercepat dengan program untuk rakyat miskin dalam jumlah yang terus meningkat dengan persentase yang lebih luas. Lapangan kerja terus meningkat melebihi pertambahan angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 9,9 persen pada tahun 2004 menjadi 7,9 persen pada tahun 2009 dan 6,3 persen pada tahun 2012.

Pembangunan SDM juga semakin membaik ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan berbagai indikator SDM dalam MDG. IPM meningkat dari 0,572 menjadi 0,617. Pembangunan pendidikan dan kesehatan menempati posisi penting dalam pembangunan nasional yang diupayakan melalui peningkatan kualitas dan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Dalam rangka mewujudkan keadilan yang lebih merata, perhatian khusus terus diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam memperoleh pelayanan

pendidikan dan kesehatan. Melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, anak-anak berusia 7 – 15 tahun diberi kesempatan yang luas untuk menempuh pendidikan dasar. Demikian pula masyarakat yang tidak mampu diberi kemudahan untuk memperoleh pelayanan kesehatan melalui berbagai program.

Stabilitas politik dan sosial terus terjaga. Di bidang politik, Indonesia merupakan negara demokrasi nomor tiga terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk. Demokrasi, modernitas, dan agama, berdampingan secara harmonis. Proses konsolidasi demokrasi terus dimantapkan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan jumlah pemerintah daerah sekitar 530, Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah dua kali pada tahun 2004 dan 2009 secara jujur, adil, dan aman.

Di bidang hukum, Pemerintah memberikan komitmen penuh untuk menegakkan prinsip negara hukum melalui penegakan *rule of law*, supremasi hukum, dan kesetaraan di depan hukum sebagai pelaksanaan mandat konstitusional. Tata kelola pemerintahan menuju Pemerintah yang bersih dan bebas KKN terus diperbaiki. Opini WTP BPK atas Laporan Keuangan K/L pusat meningkat dari 41 persen pada tahun 2009 menjadi 63 persen pada tahun 2011. Jumlah PTP di daerah meningkat dari 360 menjadi 420. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa diskriminasi terus diperkuat dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terus membaik dari 2,0 pada tahun 2004 menjadi 2,8 pada tahun 2010 dan 3,0 pada tahun 2011. Selain itu, strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi yang sedang disusun pemerintah diharapkan dapat memberi gambaran yang lengkap dan terarah tentang langkah-langkah percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi ke depan.

Situasi keamanan dalam negeri terus terjaga dengan baik. Kegiatan aksi terorisme terus ditingkatkan melalui penangkapan teroris dan pengungkapan jaringannya. Gangguan kamtibmas menurun dengan meningkatnya upaya pencegahan potensi gangguan keamanan, baik kualitas maupun kuantitas. Di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin meningkat kemampuan dan profesionalitasnya. Pembangunan TNI ditujukan untuk mengemban TNI yang tidak saja terlatih, namun juga memiliki tingkat kesiapan yang tinggi dalam perugasan, didukung dengan upaya modernisasi kekuatan dan alat utama sistem persenjataan.

Pada tatanan hubungan internasional, peranan dan sumbangan Indonesia terus meningkat dalam penentuan tatakelola global dan pemecahan permasalahan global. Langkah ini sejalan dengan upaya Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di berbagai forum internasional. Indonesia bersama dengan negara-negara sehaluan terus menyuarakan pentingnya reformasi tatakelola pemerintahan global, termasuk agar PBB lebih berkeadilan dan mencerminkan realitas internasional dewasa ini. Dalam kerangka ekonomi, Indonesia mendorong upaya reformasi sistem moneter internasional untuk membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi global yang kuat, seimbang, dan berkelanjutan. Ketetuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011 telah memberi manfaat positif bagi kemajuan ASEAN dan bagi terciptanya stabilitas keamanan di wilayah Asia Tenggara.

Dalam tahun 2012, upaya pembangunan terus ditingkatkan untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Di bidang ekonomi, prioritas diberikan pada upaya untuk menjaga

pertumbuhan ekonomi dan ketahanan fiskal, memperluas lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan ketersediaan pangan. Di bidang kesejahteraan rakyat, prioritas diberikan pada upaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta percepatan pencapaian MDG dan pengurangan kemiskinan. Adapun di bidang politik, hukum, dan keamanan, prioritas diberikan pada upaya untuk memberantas korupsi, mempercepat reformasi birokrasi, serta menangani konflik horisontal dan eksekutif pemilukada.

2. TEMA, PRIORITAS, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2013

Dalam tahun 2013, kondisi perekonomian global tetap dibayangi oleh ketidakpastian. Krisis utang negara-negara maju terutama Eropa, ketegangan politik di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Semenanjung Korea, perubahan iklim dan potensi bencana alam di tingkat global, serta harga energi yang tinggi dapat mempengaruhi stabilitas keuangan global dan pemulihan ekonomi dunia yang pada gilirannya akan berpengaruh pada perekonomian nasional.

Perekonomian dunia tahun 2013 diperkirakan hanya tumbuh 4,1 persen, lebih rendah dari tahun 2011 (5,3 persen) dengan resiko pemulihan ekonomi yang lambat di negara-negara maju dan perlambatan ekonomi di Asia. Situasi tersebut berpotensi meningkatkan proteksi pada banyak negara serta langkah tidak sehat untuk mempertahankan pasar domestik dan eksportnya. Persaingan antar negara untuk memenangkan pasar perdagangan dan investasi semakin ketat. Keseluruhan ini menuntut penguatan perekonomian domestik serta peningkatan daya saing baik di tingkat global maupun di dalam negeri.

Dalam pada itu, kemajuan pembangunan ekonomi telah mendorong harapan yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dengan tuntutan dan aspirasi rakyat terhadap kesejahteraan semakin tinggi. Pengurangan jumlah penganggur terbuka dan jumlah penduduk miskin yang pada tahun 2011 sebesar 7,7 juta orang dan 29,9 juta orang akan dipercepat. Selanjutnya kesenjangan kesejahteraan baik antar kelompok masyarakat maupun antar daerah akan dikurangi melalui upaya peningkatan dan sekaligus perluasan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai, potensi yang dimiliki, tantangan dan masalah yang dihadapi serta keinginan untuk mencapai sasaran RPJMN 2010 – 2014 yaitu Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan, TEMA RKP tahun 2013 adalah :

MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Sebagaimana RKP pada tahun-tahun sebelumnya, Tema RKP 2013 dituangkan lebih lanjut ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;

5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik;
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi;
12. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan lainnya;
13. Bidang Perekonomian lainnya;
14. Bidang Kesejahteraan Rakyat lainnya.

Berdasarkan tema RKP 2013 serta mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki, fokus dari kegiatan 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya ditekankan kepada penanganan isu-isu strategis sebagai berikut.

PENINGKATAN DAYA SAING

1. Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha;
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
3. Peningkatan Pembangunan Industri di Berbagai Koridor Ekonomi;
4. Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya Tenaga Kerja Muda;

PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI

5. Peningkatan Ketahanan Pangan: Menuju Pencapaian Surplus Beras 10 juta ton;
6. Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Konversi Energi;

PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

7. Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia;
8. Percepatan Pengurangan Kemiskinan: Sinergi Klaster I-IV;

PEMANTAPAN STABILITAS SOSIAL POLITIK

9. Persiapan Pemilu 2014;
10. Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi;
11. Percepatan Pembangunan *Minimum Essential Force*.

Daya saing ekonomi Indonesia pada tahun 2013 akan lebih ditingkatkan guna menghadapi perlambatan perekonomian dunia dan persaingan global yang semakin ketat. Potensi perekonomian domestik yang besar akan lebih ditumbuhkembangkan. Investasi terus didorong, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Hambatan perekonomian, terutama birokrasi dan korupsi, akan ditangani secara serius agar tercipta iklim investasi dan usaha yang sehat. Pembangunan infrastruktur akan dipercepat untuk memperkuat *national connectivity*, ketahanan energi dan ketahanan pangan, melalui pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan kerjasama pemerintah dan swasta. Pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan sangat penting untuk mendorong produktivitas ekonomi.

Daya saing nasional juga ditingkatkan pada sektor-sektor produksi, utamanya industri, pertanian, dan pariwisata. Pembangunan industri didorong untuk meningkatkan nilai tambah berbagai komoditi unggulan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya koridor-koridor ekonomi

dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Selanjutnya penciptaan kesempatan kerja khususnya Tenaga Kerja Muda akan ditingkatkan guna meningkatkan daya saing perekonomian.

Dengan situasi perekonomian dunia yang tetap tidak pasti, daya tahan perekonomian terus diperkuat. Kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan terus dimatikan untuk memperkuat fundamental ekonomi. Sektor pertanian ditingkatkan dengan memperkuat ketahanan pangan nasional dalam rangka mencapai sasaran surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 serta meningkatkan produksi berbagai komoditi pangan lainnya, diversifikasi pangan dan stabilisasi harga pangan dalam negeri, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Dengan tingginya harga minyak mentah dunia, ketahanan energi diperkuat melalui perluasan penyediaan listrik terutama non BBM, konversi BBM ke BRT untuk transportasi, serta pemantapan berbagai potensi energi (diversifikasi energi) terutama energi terbarukan.

Pembangunan terus didorong untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan memperluas pemerataan pembangunan. Derajat kesehatan, status gizi, dan taraf pendidikan akan terus ditingkatkan. Pembangunan pendidikan diprioritaskan pada pemenuhan layanan pendidikan dasar yang berkualitas, perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi agar dapat melahirkan lulusan perguruan tinggi yang berdaya saing untuk menjawab tantangan dalam persaingan global, serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru yang disertai oleh upaya pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

Upaya peningkatan kesehatan penduduk terutama diprioritaskan pada peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyebab lingkungan; peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata; peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan; peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri; serta peningkatan akses pelayanan KB yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan dan memperluas kesejahteraan rakyat, penurunan pengangguran dan kemiskinan akan dipercepat. Kesenjangan pembangunan, baik antar golongan masyarakat maupun antar daerah, yang relatif masih tinggi akan disurangi. Upaya penurunan pengangguran dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja formal, terutama didorong pembangunan industri dalam kerangka MP3EI. Perhatian khusus diberikan untuk mengatasi pengangguran usia muda yang tingkatnya jauh lebih besar dari tingkat pengangguran secara umum. Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui peningkatan sinergi dan efektivitas program klaster I – IV serta konsolidasi anggaran di berbagai kementerian/lembaga, dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI). Kebijakan ini merupakan langkah terobosan yang secara fundamental dapat menurunkan kemiskinan, sekaligus memperkuat ekonomi rakyat Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan stabilitas sosial politik, tata kelola Pemerintahan akan ditingkatkan. Reformasi birokrasi akan dituntaskan di tingkat pusat dan diperluas ke Pemerintah

Daerah. Kualitas reformasi birokrasi juga semakin ditingkatkan melalui pelaksanaan *quality assurance*, penyelenggaraan forum *knowledge management* dan *change management*, serta pelatihan *regional leader academy* untuk membekali pemimpin di lingkungan birokrasi pemerintah. Sejalan hal tersebut, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi ditingkatkan, agar terwujud pelayanan public yang berkualitas.

Efektivitas pemberantasan korupsi terus ditingkatkan melalui koordinasi dan kerjasama yang kuat antara lembaga penegak hukum. Regulasi antikorupsi akan terus disempurnakan. Lembaga-lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, akan terus diperkuat dan didukung efektivitas kerjanya.

Keberlanjutan pembangunan secara menyeluruh tidak terlepas dari stabilitas sosial, politik, dan keamanan yang mantap serta kecanggihan pertahanan dalam menjaga kepentingan nasional terhadap berbagai ancaman dari luar. Keamanan dalam negeri terus diperkuat, untuk menciptakan situasi aman dan damai. Dalam rangka memantapkan konsolidasi demokrasi, pelaksanaan Pemilu Umum Tahun 2014 akan dipersiapkan sebaik-baiknya sejak tahun 2013. Untuk memperkuat pertahanan nasional, pembangunan *Minimum Essential Force* akan dipercepat.

Pembangunan nasional secara menyeluruh tetap memperhatikan daya dukung ekosistem, efisiensi penggunaan sumber daya, serta penerapan teknologi dan cara produksi yang ramah lingkungan guna menjamin tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

3. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS TAHUN 2013

Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Pada tanggal 27 Mei 2011 Pemerintah meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Pelaksanaan MP3EI diharapkan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah di seluruh tanah air. Dalam kurun waktu 15 tahun ke depan akan dikembangkan klaster-klaster industri, baik untuk meningkatkan keterkaitan antara industri hulu dan hilir, maupun antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah penyangganya. Industri unggulan di berbagai wilayah dibangun untuk memperkuat struktur perekonomian domestik. Dalam kaitan itu ditawarkan insentif yang tepat kepada dunia usaha, dan dengan memperbaiki iklim investasi di daerah-daerah.

MP3EI dilaksanakan melalui tiga strategi besar. Pertama, mengembangkan 6 (enam) koridor ekonomi Indonesia, yang meliputi: koridor ekonomi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan koridor Papua-Maluku. Kedua, memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional. Ketiga, mempercepat kemampuan SDM dan IPTEK, untuk mendukung pengembangan program utama, dengan meningkatkan nilai tambah di setiap koridor ekonomi.

MP3EI merupakan produk dari hasil kerja sama dan kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta, dan akademisi. Sementara itu, pendanaan kegiatan MP3EI dilakukan melalui keterpadatan pendanaan dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, serta pihak swasta dan masyarakat. Pelaksanaan MP3EI ini semaksimal mungkin memberikan peran yang besar kepada pelaku usaha domestik terutama untuk meningkatkan nilai tambah pemanfaatan sumberdaya dalam negeri. Agar pelaksanaan MP3EI berjalan efektif, anggaran yang tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga benar-benar diarahkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan MP3EI. BUMN diharapkan dapat menjadi pilar dan kontributor utama investasi dalam pelaksanaan MP3EI.

Dalam rangka mengawal secara intensif pelaksanaan MP3EI, Pemerintah telah membentuk Komite Percepatan dan Perluasan Pemaangan Ekonomi Indonesia (KPPSEI) yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Anggota komite tersebut terdiri dari unsur unsur pemerintah pusat dan daerah, BUMN, akademisi/para pakar, dan dunia usaha. Untuk membaruku pelaksanaan Logas KPPSEI telah dibentuk Tim Kerja yang terdiri dari 3 Tim Kerja Lintas Sektor yaitu Tim Kerja Regulasi, Tim Kerja Konektivitas, dan Tim Kerja SDM dan IPTEK, serta 6 Tim Kerja Koridor Ekonomi yaitu Tim Kerja KE Sumatera, Tim Kerja KE Jawa, Tim Kerja KE Kalimantan, Tim Kerja KE Sulawesi, Tim Kerja KE Bali-Nusa Tenggara, dan Tim Kerja KE Papua-Nepulauan Maluku.

Sejak MP3EI diluncurkan sampai akhir Desember 2011 telah dilaksanakan *groundbreaking* sebanyak 94 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur dengan total nilai investasi Rp 499,5 triliun yang terdiri dari nilai investasi untuk sektor riil Rp 354,8 triliun (56 proyek) dan infrastruktur Rp 141,7 triliun (30 proyek), yang akan dibiayai oleh Pemerintah senilai Rp 71,6 triliun (24 proyek), BUMN senilai Rp 131,0 triliun (24 proyek), swasta senilai Rp 168,6 triliun (30 proyek) dan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS senilai Rp 128,3 triliun (8 proyek).

Pada tahun 2012 akan dilakukan *groundbreaking* terhadap 04 proyek yang terdiri dari investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur dengan nilai total Rp 536,3 triliun, yang akan dibiayai oleh Pemerintah Rp 66,2 triliun (15 proyek), BUMN Rp 90,3 triliun (20 proyek), Swasta Rp 301,6 triliun (38 proyek), campuran Rp 78,2 triliun (11 proyek).

Selain pembangunan infrastruktur, pada tahun 2012 akan dilakukan sejumlah kegiatan untuk mendukung penguatan SDM dan IPTEK di setiap koridor ekonomi. Terkait dengan penguatan SDM telah direncanakan sebanyak 76 program dengan nilai total investasi Rp 500 miliar. Sedangkan untuk pengembangan IPTEK, direncanakan 134 program dengan nilai total investasi Rp 3,8 triliun.

Selain itu, Pemerintah akan terus melakukan sejumlah perbaikan iklim investasi, antara lain melalui *debottlenecking* regulasi (*deregulasi*) terhadap peraturan yang dinilai menjadi penghambat bagi pelaksanaan investasi. Sejak MP3EI diluncurkan, Pemerintah telah selesai melakukan revisi terhadap 28 regulasi dan saat ini sedang menyelesaikan 18 regulasi lainnya. Upaya-upaya *debottlenecking* perlu didukung oleh pemerintah daerah terutama untuk memperbaiki iklim investasi di daerah masing-masing dengan memastikan penetapan peraturan-peraturan daerah yang mendukung terciptanya iklim investasi dan kepastian berusaha.

Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 2012-2025

MP3KI merupakan kebijakan afirmatif untuk mempercepat dan memperluas upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia. MP3KI akan berperan di dalam mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya dalam mengkomodifikasi keterlibatan masyarakat miskin dan marjinal untuk dapat terlibat langsung dan menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan demikian, MP3KI dan MP3EI saling memperkuat dan melengkapi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang *pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment*.

MP3KI merjabarkan secara khusus konsep dan desain, arca kebijakan, dan strategi penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang (2012-2025), termasuk menggambarkan transformasi dari program-program penanggulangan kemiskinan yang telah ada saat ini menuju terwujudnya sistem jaminan Sosial yang menyeluruh. MP3KI juga menguraikan konsep dan desain pengembangan *sustainable livelihood* (mata pencaharian yang mapan) bagi masyarakat untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dengan MP3KI program-program penanggulangan kemiskinan pada klaster I-IV akan dilaksanakan secara sinergi dengan target yang jelas.

Seluruh program penanggulangan kemiskinan akan bertransformasi ke dalam bentuk program yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari seluruh masyarakat secara merata termasuk menjamin terciptanya pemerataan pendapatan masyarakat (*income generating*) secara berkesinambungan, sinergi dari seluruh kelompok program (klaster) penanggulangan kemiskinan dan menjembatani transisi antar waktu, serta mewujudkan sistem jaminan sosial yang menyeluruh.

MP3KI juga menggambarkan pola kerjasama yang optimal dari para pihak (kementerian/lembaga, daerah, swasta, dan masyarakat) dalam mendayagunakan berbagai sumber dayanya untuk mendukung penanggulangan kemiskinan.

Keberadaan program-program penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini, mulai dari klaster I (bantuan dan perlindungan sosial), klaster II (pemberdayaan masyarakat), klaster III (pengembangan usaha kecil dan mikro), dan klaster IV (program pro-rakyat) selama rentang waktu menengah dan panjang akan dikelola sedemikian rupa, sehingga efektifitasnya dalam menurunkan angka kemiskinan di masing masing wilayah menjadi semakin tinggi.

Wilayah/kawasan yang secara khusus memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan tingkat sosial ekonomi masyarakat yang rendah akan menjadi konsentrasi utama dari kebijakan afirmatif yang dilakukan dalam waktu dekat, seperti: kawasan-kawasan tertinggal, pesisir, dan perbatasan. Keunggulan wilayah/kawasan akan dikelola melalui kerjasama para pihak sehingga dapat mengangkat dan mengembangkan potensi-potensi wilayah/kawasan tersebut dan selanjutnya dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan ekonomi wilayah yang bertujuan untuk pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai hasil sinergi dengan konsep dan desain MP3EI akan dikembangkan dalam MP3KI dengan klaster wilayah: Sumatera-Jawa, Bali, NTT-NTB, Kalimantan, Sulawesi,

Maluku-Papua-Papua Barat. Pengembangan wilayah ini dengan menitikberatkan keterlibatan masyarakat miskin dan marginal dalam proses pembangunan wilayah maupun dalam pemanfaatan hasil pembangunannya.

Dalam waktu yang bersamaan, pendekatan pembangunan kewilayahan juga diarahkan pada berbagai kebijakan dan program alternatif untuk penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pada wilayah-wilayah pedesaan, perkotaan, perbatasan, terpencil dan tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Kondisi kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat yang masih jauh tertinggal dibanding wilayah lainnya telah mendorong Pemerintah menetapkan kebijakan khusus bagi percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Kebijakan ini telah dimulai sejak tahun 2009, dan diperbaharui pada tahun 2011.

Permasalahan penting yang dihadapi dalam pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat terutama adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang masih rendah yang berujung pada rendahnya kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta keterisolasian daerah yang hingga saat ini belum ditembus jalur transportasi darat. Kondisi ini menyababkan ekonomi biaya tinggi untuk pasokan bahan-bahan kebutuhan dasar. Keterisolasian wilayah juga menghambat akses masyarakat ke pusat-pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kegiatan ekonomi masyarakat asli cenderung lebih subsisten, sehingga peran masyarakat asli Papua dalam kegiatan ekonomi semakin terdesak oleh masyarakat pendatang.

Persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami kecenderungan menurun setiap tahunnya. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat tertinggi dibandingkan 31 provinsi lainnya. Pada hulan September 2011, tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat masing-masing sebesar 31,2 persen dan 28,5 persen, jauh lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional (12,4 persen).

Langkah percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang telah dilakukan selama tahun 2011 adalah : (i) penyusunan Kebijakan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (ii) pembentukan kelembagaan yang melakukan "pengawasan" kebijakan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) melalui Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B); (iii) serta mensahkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang merupakan lampiran Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Untuk melanjutkan upaya percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat maka pada tahun 2012 beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan adalah : (i) melakukan sosialisasi peran dan fungsi UP4B dalam memperkuat badan perencanaan provinsi dalam mensinkronkan program pusat

dan daerah, (ii) melakukan koordinasi 248 di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, (iii) melakukan komunikasi konstruktif dengan kelompok-kelompok masyarakat asli Papua, (iv) koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ketahanan pangan, upaya menyediakan kuota pendidikan tinggi putra putri asli Papua dan dalam penerimaan anggota TNI/POLRI/PNS, (v) koordinasi dan konsolidasi lintas sektor untuk pelaksanaan program *quick wins*, serta, (vi) mempercepat pembangunan prasarana transportasi dalam rangka membuka keterisolasian di Pegunungan Tengah. Pada tahun 2012, melalui APJN P 2012, telah diingkulkan alokasi dana bagi pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat.

Dengan memperhitungkan tingginya kesenjangan hasil pembangunan di semua provinsi, dengan provinsi-provinsi lainnya serta mengacu kepada Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2013, dan bersifat cepat tercapai (*quick wins*) adalah: (i) pengurangan angka kemiskinan melalui peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat; (ii) peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan prioritas penanganan penyedia layanan kesehatan bergerak (*mobile clinic*), dan penyediaan tenaga medik dan paramedik; (iii) penyediaan pendidikan berpoli asrama dan pemberian tambahan materi di luar waktu sekolah; (iv) penyediaan tenaga pengajar berkualitas, dengan sertifikasi tenaga pengajar dan pemberian jaminan keabadian dasar bagi pengajar yang ditempatkan di kedua provinsi; (v) pembangunan dan peningkatan beberapa ruas jalan darat yang menembus dari pesisir selatan hingga ke pegunungan tengah, utamanya dari Agats, Kabupaten Asmat, menuju ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya; (vi) pembangunan pusat distribusi Bahan Bakar Minyak (*Logistic Center*) untuk meningkatkan transportasi sungai; (vii) pembangunan Pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga yang terbarukan seperti PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin), untuk memenuhi kebutuhan energi tingkat rumah tangga dan industri kecil rumah tangga; (viii) kegiatan yang bersifat keberpihakan kepada masyarakat asli Papua (*affirmative actions*) berupa penerimaan masyarakat asli Papua di instansi pendidikan tinggi unggulan di luar Papua, penerimaan masyarakat asli Papua di instansi-instansi pemerintah strategis seperti Kepolisian dan Militer, serta penerimaan masyarakat asli Papua untuk program pemagangan di instansi-instansi pemerintah di luar Papua.

Pengarusutamaan Pembangunan yang Berkelanjutan: RAN-GRK dan REDD+

Sebagai tindak lanjut komitmen nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), telah disusun rencana pelaksanaan penurunan emisi yang diterbitkan melalui Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK. Landasan penurunan emisi ini diiringi dengan Perpres No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional. Kedua dokumen ini menjadi landasan pelaksanaan penurunan emisi yang dilakukan di 5 (lima) sektor utama yaitu: (i) kehutanan dan lahan gambut; (ii) pertanian; (iii) energi dan transportasi; (iv) industri; dan (v) limbah. Perpres RAN-GRK tersebut mengidentifikasi alokasi penurunan emisi pada 5 (lima) sektor utama tersebut dan mengidentifikasi program serta kegiatan pemerintah yang akan dilakukan dan kegiatan untuk mendorong penurunan emisi oleh pelaku usaha dan masyarakat. Sebagai bagian terbesar dari penurunan emisi GRK, untuk penurunan emisi di sektor kehutanan dan

lahan gambut telah disusun Strategi Nasional Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Stranas REDD+) yang pelaksanaannya akan dikordinasikan oleh Satgas REDD+. Untuk mendukung penurunan emisi di sektor kehutanan dan lahan gambut, telah dikeluarkan Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Pemindaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (moratorium izin baru). Pemindaan izin baru dilakukan untuk 2 (dua) tahun 2012-2013 yang diiringi dengan perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut.

Selanjutnya, pada tahun 2012 telah diselesaikan Buku Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang akan menjadi pedoman pelaksanaan penurunan emisi di daerah. Sosialisasi kepada 33 provinsi telah dilakukan. Selanjutnya akan segera dikeluarkan pedoman teknis area K/1 yang bertanggungjawab terhadap 5 (lima) sektor utama tersebut, untuk membantu Pemda Provinsi menyelesaikan penyusunan RAD-GRK. Pada akhir tahun 2012 seluruh RAD GRK di 33 Provinsi sudah dapat diselesaikan dan diterbitkan sebagai Peraturan Gubernur. Dengan selesainya RAD GRK, maka penjabaran komitmen penurunan emisi ke dalam program dan langkah konkrit baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sudah akan terwujud. Dengan demikian, kerangka kerja, program, kegiatan dan kelembagaan pelaksanaan penurunan emisi dapat dikordinasikan secara kurunlunyu dalam jangka menengah. Dalam kaitan dengan REDD+, pada tahun 2012, sedang dipersiapkan pula konsep lembaga REDD+, lembaga pendanaan serta lembaga pemantauan dan verifikasi penurunan emisi (MRY).

Pada tahun 2013, diharapkan pelaksanaan penurunan emisi sebagaimana ditargetkan dalam RAN-GRK dan RAD-GRK dapat dilaksanakan secara terukur dan dapat dipantau dengan baik. Selanjutnya, untuk pelaksanaan REDD+ akan dilakukan penyempurnaan peraturan pendukung REDD+ termasuk berdirinya lembaga REDD+ dan lembaga pendukung pelaksanaannya, serta pengarusutamaan kegiatan REDD+ dalam berbagai dokumen perencanaan di pusat dan daerah. Dalam pengelolaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) yang menjadi bagian penting dari ekosistem dan merupakan aset untuk pembentukan ekonomi hijau ke depan, akan dilakukan pemutakhiran Rencana Aksi Nasional Keanekaragaman Hayati (IBSAP) 2003-2020 untuk menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

4. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013

Dengan berbagai langkah kebijakan yang akan ditempuh serta memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal, perekonomian diperkirakan tumbuh sekitar 7 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inflasi yang terjaga sekitar 5 persen, tingkat pengangguran terbuka akan menurun menjadi 5,8 – 6,1 persen dan kemiskinan menjadi 9,5 – 10,5 persen pada tahun 2013.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 didorong dengan meningkatkan investasi, menjaga daya saing ekspor nonmigas, menumbuhkan daya beli masyarakat, serta memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara terutama dengan mempertajam belanja negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Dari sisi pengeluaran, investasi berupa pembelian modal tetap bruto serta ekspor barang dan jasa didorong untuk tumbuh masing-masing sekitar 12,1 persen dan 11,9 persen. Dengan meningkatnya investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh sekitar 13,7 persen. Adapun konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh sekitar 5,0 persen dan pengeluaran pemerintah diperkirakan meningkat sekitar 6,9 persen.

Dari sisi produksi, sektor pertanian diperkirakan tumbuh sekitar 3,9 persen, dan sektor industri pengolahan diperkirakan meningkat sekitar 6,7 persen dengan industri pengolahan nonmigas diperkirakan tumbuh sekitar 7,2 persen. Sektor tersier yang meliputi listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan, real estat, dan jasa penunjang; serta jasa-jasa diperkirakan tumbuh berturut-turut sekitar 6,8 persen; 7,7 persen; 9,1 persen; 12,3 persen; 6,3 persen; serta 6,2 persen.

Dalam tahun 2013, berbagai pembangunan yang strategis akan ditangani secara sungguh-sungguh. Dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian, investasi pada tahun 2013 ditingkatkan mencapai Rp 407,1 triliun. Pemerintah berusaha akan ditingkatkan dengan mengurangi waktu memulai usaha, perijinan, akses listrik, dan pedaftaran properti. Pembangunan infrastruktur akan didorong antara lain dengan meningkatkan kondisi martap jalan nasional menjadi 92,5 persen. Selanjutnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi akan ditingkatkan agar sektor industri terutama industri nonmigas terus berperan sebagai penggerak ekonomi. Kualitas tenaga kerja terutama tenaga kerja muda ditingkatkan melalui peningkatan keahlian teknis, kualitas penugangan, dan kewirausahaan.

Daya tahan ekonomi akan diperluas. Ketahanan pangan ditingkatkan untuk menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 dengan produksi padi mencapai 72,1 juta ton GKG pada tahun 2013 didukung terutama oleh penanaman sawah baru. Rasio elektrifikasi ditingkatkan menjadi 77,6 persen dengan rasio desa berlistrik sub-satur 97,8 persen pada tahun 2013. Konversi gas terus didorong melalui pembangunan distribusi gas untuk rumah tangga dan sambungan gas ke rumah tangga.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas ditingkatkan menjadi 8,25 tahun pada tahun 2013 dengan angka partisipasi sekolah yang meningkat untuk semua jenjang pendidikan. Akses pelayanan kesehatan dan gizi berkualitas bagi ibu dan anak diperluas. Penyakit menular dan tidak menular terus dikendalikan. Demografi plus akses pelayanan KB terus diperluas secara merata.

Dalam rangka mempercepat pengurangan kemiskinan, sinergi klaster I – IV akan ditingkatkan. Pada klaster I, penerima PKH ditingkatkan menjadi 2,4 juta RTSM sesuai dengan data PPLS 2011, dengan diupayakan peningkatan sasaran dan besaran bantuan tetap. Selanjutnya Jamkesmas diperluas menjadi 9,33 juta RTS, serta beasiswa miskin ditingkatkan untuk semua jenjang pendidikan. Pada klaster II, PNPM Perdesaan dan Perkotaan diperluas berturut-turut menjadi 5.230 kecamatan dan 10.922 desa/kelurahan. Pada klaster III, Kredit Usaha Rakyat terus diperluas pada semua provinsi. Adapun pada klaster IV, pembangunan perumahan swadaya/rumah sangat murah ditingkatkan sebesar 298,25 ribu.

Dalam tahun 2013 stabilitas sosial politik terus dimantapkan. Pemilihan umum akan dipersiapkan sebaik-baiknya agar tingkat partisipasi politik pada tahun 2014 meningkat menjadi 75 persen. Upaya pemberantasan korupsi terus didorong dengan indeks persepsi korupsi diupayakan meningkat menjadi

4,0 pada tahun 2013. Perbaikan kinerja birokrasi terus ditingkatkan melalui percepatan reformasi birokrasi.

Selanjutnya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam negeri, rasio polisi terhadap masyarakat ditingkatkan menuju 1 : 575 pada tahun 2014. Kemampuan pertahanan ditingkatkan dengan percepatan pembangunan Minimum Essential Force baik untuk matra darat, matra laut, maupun matra udara. Secara rinci sasaran strategis pembangunan tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran 1.

5. KEBIJAKAN BELANJA NEGARA DAN ALOKASI PAGU INDIKATIF

Pada tahun 2013, pemerintah merencanakan belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 539,1 triliun atau lebih tinggi Rp 30,8 triliun dari belanja Kementerian/Lembaga APBN Tahun 2012. Dengan kebutuhan pembangunan yang besar, pemerintah pada tahun 2013 akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja. Untuk itu, pemerintah melaksanakan kebijakan *flat policy* belanja operasional. Dengan kebijakan ini belanja operasional diproyeksikan turun dibandingkan tahun 2012. Alokasi belanja operasional tahun 2013 mencapai Rp 164,2 triliun. Sementara itu, belanja non-operasional diarahkan guna memenuhi sasaran pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional.

Alokasi pagu indikatif Kementerian/Lembaga direncanakan berdasarkan prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Dengan demikian, tidak semua Kementerian/Lembaga mendapat kenaikan anggaran. Secara agregat, alokasi Kementerian/Lembaga untuk prioritas nasional sebesar Rp 255,1 triliun yang hanya mencakup alokasi pada program/kegiatan yang mendapat perhatian khusus. Penekanan alokasi pada prioritas diarahkan mengacu pada tema pembangunan tahun 2013 dan isu strategis. Rincian alokasi belanja menurut prioritas pembangunan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Di dalam prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola, penekanan diberikan pada upaya untuk menciptakan *good governance* pada instansi pusat dan daerah termasuk dukungan pendanaan untuk peningkatan kapasitas penegakan hukum. Prioritas ini terkait dengan kerangka regulasi.

Prioritas pendidikan mencakup kegiatan peningkatan akses pendidikan berupa pemberian BOS, penyelesaian rehabilitasi sekolah, pemberian tunjangan guru, serta dukungan pendanaan kepada perguruan tinggi yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Di dalam prioritas kesehatan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas sarana pelayanan kesehatan dengan memberikan bantuan operasional kesenatan (BOK) untuk puskesmas termasuk di dalamnya dukungan terhadap ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan kesehatan untuk ibu bersalin (jampersal) ditujukan untuk mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan. Untuk mendukung pencapaian target MDG's dilakukan peningkatan pelayanan air minum untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, langkah-langkah keberpihakan kepada penduduk miskin dipertahankan seperti meneruskan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin (Jamkesmas), bantuan siswa miskin, mempertahankan PNPB yang meliputi pedesaan dan perkotaan, memperbesar penerimaan PKH dari 1,5 juta RTSM pada tahun 2012 menjadi 2,4 juta

RTSM dengan diupayakan peningkatan sasaran dan besaran bantuan tetap pada tahun 2013 serta menyediakan anggaran untuk pemberdayaan koperasi dan DMKM, termasuk penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Untuk pergediaan pangan, pemerintah tetap mengalokasikan penyediaan beras untuk seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan jumlah yang memadai dalam satu tahun. Disamping itu program-program pada Klaster IV penanggulangan ketidaksihan seperti pemberian bantuan rumah murah dan sangat murah tetap diteruskan.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan, pemerintah merencanakan untuk mencapai surplus beras 10 juta ton pertahun pada tahun 2014. Untuk itu langkah-langkah konkret seperti upaya meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan luasan areal pertanian baru terus dilakukan. Peningkatan kapasitas sarana prasarana pertanian juga diprioritaskan terutama pada kapasitas jaringan irigasi dan waduk. Peningkatan produktivitas pertanian dilakukan dengan kebijakan sekolah lapangan yang akan memberikan penyuluhan kepada para petani sekaligus menerapkannya pada areal tanam.

Pembangunan infrastruktur nasional merupakan prioritas yang mendapat alokasi terbesar. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan *domestic connectivity* dan pengembangan koridor ekonomi menjadi fokus utama. Penyelasiaan jalur ganda Semarang – Surabaya, peningkatan kapasitas pelabuhan Basubeni – Merak, peningkatan kapasitas pelabuhan udara dan laut di Indonesia Timur dan Barat serta peningkatan kapasitas jalan nasional diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kenaikan anggaran untuk Kementerian Perhubungan dan Pekerjaan Umum diharapkan untuk memenuhi kebutuhan *domestic connectivity* dan pengembangan koridor ekonomi. Untuk meningkatkan pelayanan dasar, pemerintah merencanakan pembangunan rusunawa dan jenis rumah lainnya, termasuk untuk personel TNI/Polri, buruh/pekerja, mahasiswa, pondok pesantren, dan penanganan kawasan kumuh. Selanjutnya penyelesaian kewajiban Pemerintah terhadap masyarakat yang terkena dampak Lumpur Sidoarjo (65 RT) dilakukan melalui anggaran 3PLS.

Dalam prioritas iklim investasi dan usaha, kerangka regulasi akan diperajam untuk mendorong partisipasi masyarakat dan kepastian investasi bagi masyarakat berupa peraturan terkait investasi, keenagakerjaan, dan pertanahan. Sebagai bagian dari kerjasama pemerintah – swasta, pemerintah juga memfasilitasi pengembang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan nasional, prioritas energi difokuskan pada langkah untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi disamping upaya untuk meningkatkan diversifikasi energi dan pengembangan energi terbarukan.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan (*sustainable development*), di dalam prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, pemerintah melakukan upaya pencegahan dan konservasi terhadap hutan dan lahan kritis. Hal ini juga terkait dengan dukungan terhadap dampak perubahan iklim. Untuk menanggulangi bencana, dilakukan peningkatan kapasitas mitigasi bencana seperti penyediaan sarana dan data meteorologi, klimatologi dan geofisika yang cepat dan akurat terus ditingkatkan termasuk pemanfaatan iptek dalam mitigasi bencana. Selanjutnya dalam upaya menghindari dampak korban bencana yang besar akan diupayakan pembangunan jalur evakuasi bencana serta bangunan tempat perlindungan (*shelter*) diberbagai wilayah rawan bencana dimulai

dengan wilayah pantai barat Sumatera.

Prioritas pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik memuat kebijakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana daerah tertinggal baik sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat maupun pembuka akses daerah tertinggal. Pada tahun 2013 akan dilanjutkan pembangunan rumah, sarana dan prasarana, permukiman serta kegiatan ekonomi lokal bagi Warga Baru di NTT dan penduduk lokal di sekitarnya. Salah satu isu di dalam daerah tertinggal, terdepan dan terluar adalah distribusi tenaga pendidikan dan medis. Untuk itu, pemerintah memberikan tunjangan khusus bagi pendidik dan kebijakan lainnya agar pelayanan dasar dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

Pembangunan kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi pada tahun 2013 merupakan lanjutan dari program yang telah ada sebelumnya, seperti konservasi cagar budaya, pendidikan kebudayaan nasional dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kelas untuk pengembangan inovasi teknologi, pemerintah akan melakukan revitalisasi sarana penelitian di Puspitek Serpong. Selain itu akan diluncurkan kegiatan riset untuk mendukung ketahanan pangan antara lain padi unggul, pengembangan kendaraan ramah lingkungan (*green car*), serta riset untuk pengobatan penyakit tertentu.

Untuk memperkuat ketahanan nasional, di dalam prioritas bidang politik, hukum dan keamanan, pemerintah mendorong tercapainya *Minimum Essential Force (MEF)* TNI mata darat, laut, dan udara. Untuk keamanan dan ketertiban dalam negeri, kapasitas Kepolisian Republik Indonesia diperkuat dengan penambahan personel menuju peningkatan rasio Polisi terhadap masyarakat menuju 1 : 575 di tahun 2014 disamping untuk peningkatan Almasus. Pemerintah juga telah mempersiapkan pendanaan persiapan pelaksanaan Pemilu 2014. Di bidang hukum, dukungan pendanaan kepada instansi otonom untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum khususnya tindak pidana korupsi tetap dilanjutkan.

Di dalam prioritas lainnya bidang perekonomian, pemerintah mendorong akselerasi industrialisasi melalui perumbuhan industri perolah hasil tambang, perumbuhan industri perolah hasil pertanian, serta pertumbuhan industri padat karya. Untuk mendorong peningkatan industri kendaraan ramah lingkungan akan dikembangkan kebijakan insentif yang diperlukan. Disamping itu pemerintah terus mempersiapkan pencapaian komitmen Indonesia dalam *ASEAN Economic Community 2015*. Untuk ketenagakerjaan, disamping memperkuat perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, pemerintah juga meningkatkan kapasitas tenaga kerja termasuk tenaga kerja muda. Dalam pengembangan koperasi dan UMKM (KUMKM), pemerintah mendorong peningkatan daya saing KUMKM melalui Pusat Layanan Terpadu (PLUT) KUMKM, revitalisasi sarana pemasaran, konsolidasi kargo UKM ekspor, kemitraan usaha, peningkatan standar produk, dan revitalisasi koperasi.

Sedangkan di dalam prioritas lainnya bidang kesejahteraan rakyat, pemerintah terus meningkatkan pelayanan pelaksanaan haji dan pengembangan olahraga nasional melalui pembinaan olahragawan. Untuk mendorong sektor pariwisata, pengembangan destinasi baru dan pencitraan pariwisata Indonesia terus dilanjutkan disamping pengembangan ekonomi kreatif.

LAMPIRAN 1
SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2013

ISU STRATEGIS	2011	2012	2013
PENINGKATAN DAYA SAING			
1. Peningkatan Kualitas Investasi dan Usaha			
a. Peningkatan Investasi (LZ)	8,6	10,9	11,1
b. Tingkat Kontribusi Berusaha (Ease of Doing Business):			
• Peningkatan Jumlah Usaha (ribu)	45	86	80
• Penjualan Menengah-Besaran (juta)	156	145	137
• Pendaftaran Guna Usaha (juta)	100	106	96
• Pendaftaran Pajak (juta)	22	22	20
2. Peningkatan Daya Daya dan Efisiensi Produk Industri (Manufacturing)			
a. Efisiensi MacLip (Juta Nasional (%))	58,50	60,50	64,50
b. Peningkatan Lebur Energi (juta)	11	11,8	12
c. Peningkatan KA Energi (%)	1	2	3
d. Peningkatan KA Penunjang (termasuk Total Anggaran Lunas (%))	6	8	10
e. Peningkatan Pemenuhan, Angkutan Udara Dalam Negeri (%/tahun)	9,76	10,50	11,50
f. Pemenuhan Pemenuhan, Angkutan Udara Luar Negeri (%/tahun)	13,40	13,50	14,00
g. Indeks Kualitas Pelayanan (layanan) (juta/ribu) (%/tahun)	66	76	83
3. Peningkatan Pemertayaan dan Efisiensi Fasilitas Karyawan			
a. Peningkatan Indeks Pemertayaan (%)	6,2	6,2	6,7
b. Peningkatan Indeks Pemertayaan (juta)	6,6	6,6	7,2
4. Peningkatan Kemampuan Kerja Masyarakat (Terdapat Kerja Baru)			
— Peningkatan Kemampuan Kerja (%)	6,6	6,4-6,6	6,9-6,1
a. Peningkatan Keahlian dan Bakat (juta)	443.090	376.434	502.840
b. Peningkatan Jumlah Pemertayaan, dan Keahlian dan Industri (juta)	34.750	50.510	34.750
c. Peningkatan Akses Berusaha dan Pemertayaan bagi Terdiri Kerja Mula (juta)	40.367	37.540	50.680
PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI			
5. Peningkatan Ketahanan Pangan: Menuju Pencapaian Surplus Beras 10 juta ton			
a. Produksi Padi (juta ton GRG)	65,7	67,8	72,1
b. Penurunan Konsumsi Beras (%/tahun)	1,5	1,5	1,5
c. Peningkatan Sawah Baru (ribu ha)	62,1	100	100
6. Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Konversi Energi			
a. Peningkatan Rasio Elektrifikasi			
a. Rasio Elektrifikasi (%)	72,95	75,90	77,60

ISU STRATEGIS	2011	2012	2013
b. Rasio Desa Berlistrik (%)	96,02	96,70	97,80
c. Kapasitas Pembangkit (MW)	37.353	43.653	49.555
10. Pelaksanaan Konversi Gas			
a. Pembangunan Jaringan Distribusi Gas untuk Rumah Tangga (Jetta)	5	5	4
b. Sambungan Gas ke Rumah Tangga	17.529	18.000	16.000
PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
7. Peningkatan dan Perluasan Suku Harta Masyarakat			
Mutu Hidup			
a. Rata-rata Lama Sekolah (Sesudah Usia 15 Tahun ke Atas Tahun)	7,83 (%)	8,05	8,25
b. Angka Buta Aksara Rendah (data 15 tahun ke atas) (%)	5,02 (%)	4,8	4,7
c. APH SD/SDLE/MI/Faket A (%)	95,55	93,7	95,0
d. APH SMP/SMPL/MTs/Fase B (%)	72,71	75,6	81,0
e. AFR SD/SDLE/MI/Faket A (%)	115,43	128,2	128,6
f. AFR SMP/SMPL/MTs/Fase B (%)	10,47	10,9	10,68
g. AFR SMA/SMK/MA/Teknik (%)	76,59	79,0	82,0
h. AFR PT (usia 15 ke Atas) (%)	27,09	27,7	28,7
i. AP5 Penduduk Usia 7-12 Tahun (%)	90,03 (%)	90,7	99,0
j. AP5 Penduduk Usia 13-15 Tahun (%)	65,24 (%)	53,6	95,0
Kecepatan			
a. Peningkatan Akses Terhadap Kesejahteraan yang Berkeadilan Suku Lendah Anak			
— Peningkatan Rasio Rata-rata yang Mendukung Tercapainya Kesehatan Sekolah (saluran PM)	65,7	69	69
— Peningkatan Bagi Usia 0-11 Tahun yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap	84,7	85	80
— Peningkatan Balita Didukung Berat Badanya (DyS)	71,7	75	69
— Jumlah Puskesmas yang Mencapai Standar Operasional Kesehatan	8.698	9.756	9.333
b. Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Penyakit Tidak Menular			
— Persentase Kasus Baru TB Paru (BTA positif) yang Disembuhkan	86,2	87	87
— Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk	1,75	1,5	1,25
— Persentase Provinsi yang memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	63,6	80	90
— Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	6.235	11.000	16.000
c. Peningkatan Profesionalisme dan Peningkatan Tenaga Kesehatan yang Merata			
— Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Aparatur (PNS dan PTT)	62,2	80	85

ISU STRATEGIS	2011	2012	2013
— Jumlah Tenaga Kesehatan yang Didagapack dan Fleet Trace II di DTKS dan di PER	1.376	3.020	5.320
6. Peningkatan Jumlah Perbaikan Kesehatan			
— Jumlah TT Zelus HES yang Digunakan untuk Pelayanan Kesehatan (per kabupaten)			16.500
— Jumlah Puskesmas yang Menamban Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Pemukiman Kibasin	9.128	9.266	9.324
7. Peningkatan Keefektifan, Efisiensi, Ketercapaian, Jumlah, Keamanan, Kualitas, Mutu, dan Mutu, Obat, Alat Kesehatan, dan Makanan, serta Daya Saing Produk Dalam Negeri			
— Persentase Keefektifan Obat dan Makanan	80	90	90
8. Peningkatan Status Pelayanan KIA Keluarga yang Mandiri			
— Jumlah Peserta KB dari Keluarga Miskin (KPM dan K3-1) yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan dan Kontribusi (jika ada peserta)	4.200	3.200	3.900
— Jumlah Klinik KB Pemecintah dan Swasta yang Mendapatkan Dukungan Ners dan Pramu atau Pelayanan KI	4.700	4.700	4.700
— Jumlah Klinik KB Pemecintah dan Swasta yang Mendapat Dukungan Peningkatan Pelayanan KB	23.500	23.500	23.500
— Persentase Kompleksi BUK dan Sogalan KB yang Dilayani	0,11	0,11	0,11
— Jumlah PK, PK, PK, PK dan PK yang Menyediakan Dukungan Konvensional dan Makro dan Operasional Lapangan	-	50.090	70.490
— Jumlah Peserta KB yang Berasal dari Anggota Keluarga PK yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas RKS dan Peningkatan Keterampilan RKS (RKS K3 dan RKS)			
KB Sipil, Raskin			142
KB Sipil, Peripurna			104
— Jumlah provinsi sebagai model manajemen pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (program KE Kesehatan) (Mesa Luangwe)			4
B. Peningkatan Pengurangan Ketidaksihan dan Stigma Klaster HIV			
a. Berbasis Angka Ketidaksihan (%)	12,5	10,5-11,5	9,5-10,5
a) Klaster I			
• PKH (juta RTS)	1,16	1,516	2,4
• Raskin (juta RTS)	17,5	17,5 (Jan-Jun, PPLS 2008) 15,5 (Jul-Des, PPLS 2011)	15,5
• Jamkesmas (juta jiwa)	76,4	76,4	86,4
• Beasiswa Miskin			
— SD/MI s/d SMA/MA/SMK (ribu siswa)	4.950,5	7.698,6	14.068,0
— PT Umum dan Islam (ribu mahasiswa)	239,5	303,9	162,0

ISU STRATEGIS	2011	2012	2013
b) Kelas II			
• JSPK (Pelayanan Kesehatan)	4.020	4.100	5.290
• JSPK Perkotaan (Desa/Kecamatan)	10.948	10.948	10.933
c) Kelas III			
• Ditanggung Anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR)			
— Persentase jumlah daya anggarannya dijamin oleh KUR (Persen)	100	100	100
• Penunjang Kredit Usaha Rakyat			
— Jumlah Provinsi yang mendapat sosialisasi program KUR (persen)	33	33	33
— Jumlah UMKM yang didaftarkan untuk mengakses KUR (RUMAH)	-	27.520	27.520
• Peningkatan dan Penguatan Akses Permodalan bagi Koperasi dan UKM			
— Jumlah Kaplanet permodalan dan akses yang disediakan bersama desa (juta)	1.370	1.250	1.320
— Jumlah lembaga pendulu yang mendapat akses program (juta)	-	-	3.000
• Penguatan bagan sarana usaha penunjang KUR/UMK			
— Jumlah dukungan revitalisasi sarana penunjang di daerah tertinggal/peserta usaha mikro (juta)	2	3	25
• Revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan UKM			
— Jumlah UKM koperasi dan UMK yang mengikuti diklat (juta)	5.527	33.502	5.700
d) Kelas IV			
• Pembangunan Pemukiman Swadaya/Bumih Sempit Merah (juta/m ²)		60	290,25
• Pembangunan Ekodukap Belanja (PDR)	100	100	100
PEMANTAPAN STABILITAS SOSIAL-POLITIK			
9. Rencana Pemilu 2014			
— Tingkat Partisipasi Elektoral Tahun 2014 (%)			85%
10. Peningkatan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi			
a. Indeks Persepsi Korupsi	3,0	3,5	4,0
b. Open W Portal Layanan Masyarakat (%)			
d. Kementerian/Lembaga	63	80	100
e. Provinsi	18	40	60
f. Kabupaten/Kota	8,5	20	40
c. Integritas Pelayanan Publik (Pusat)	7,07	7,25	7,5
d. Integritas Pelayanan Publik (Daerah)	6,00	6,5	7,0
e. Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah (%)	85	90	100
f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%)			
g. Kementerian/Lembaga	21	80	100

ISU STRATEGIS	2011	2012	2013
h. Prosentasi	-	104	100
i. Kabupaten/Kota	-	15	40
g. Instansi Pemerintah yg. Akumulasi (%)			
j. Kementerian/Lembaga	82,93	65	90
k. Provincial	53,33	65	70
l. Kabupaten/Kota	17,78	30	50
11. Peningkatan Pembangunan Minimum Essential Service			
Peningkatan Alutsara (6)			
a. Mata Darat	17	30	37
b. Mata Laut	15	15	20
c. Mata Udara	23	24	31

Catatan:

*) Merupakan capaian tahun 2010.

**) Merupakan sasaran yang ingin dicapai pada Pemilu Tahun 2014. Tahun 2013 adalah tahun untuk mempersiapkan tercapainya sasaran tersebut.

LAMPIRAN 2
ALOKASI BELANJA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013

PRIORITAS/SUBSISTEM/UNIT	2013			TOTAL
	ALOKASI K/L	SUBSIDI/ PSO	BELANJA LAIN-LAIN	
PRIORITAS 1	9.200	0,0	0,0	9.200
PRIORITAS 2	54.190,2	0,0	0,0	54.190,2
PRIORITAS 3	20.170,1	0,0	0,0	20.170,1
PRIORITAS 4	56.270,0	1.680,0	20.000	58.114,0
PRIORITAS 5	26.698,6	1.6143,5	0,0	42.711,1
PRIORITAS 6	64.478	2.093,3	0,0	66.571,3
PRIORITAS 7	1.845,9	0,0	0,0	1.845,9
PRIORITAS 8	13.298,5	0,0	0,0	13.298,5
PRIORITAS 9	4.990,0	0,0	0,0	4.990,0
PRIORITAS 10	11.170,3	0,0	0,0	11.170,3
PRIORITAS 11	1.126,8	0,0	0,0	1.126,8
PRIORITAS LAINNYA	16.856,5	0,0	0,0	16.856,5
PRIORITAS LAINNYA	5.239,0	0,0	0,0	5.239,0
PRIORITAS LAINNYA	2.451,9	0,0	0,0	2.451,9
TOTAL ALOKASI PADA PRIORITAS	255.141,1	35.008,8	2.000,0	292.149,9

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Melalui Undang-undang nomor 17 tahun 2007, ditetapkan bahwa Visi Indonesia tahun 2025 adalah INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah yang masing-masing dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berjangka tahunan. Saat ini pelaksanaan pembangunan mengikuti arah yang digariskan dalam RPJMN 2010-2014 yang merupakan penjabaran Visi Indonesia tahun 2014 yaitu INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN.

Kebijakan pembangunan yang diuraikan dalam RKP Tahun 2013 disusun berdasarkan arahan visioner, perubahan lingkungan strategis, serta arahan Presiden di berbagai kesempatan. Di samping memuat prioritas pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2010-2014, RKP 2013 juga memuat beberapa prakarsa dalam menjawab isu strategis pembangunan nasional.

Di samping visi di atas, penyusunan RKP tahun 2013 juga mempertimbangkan dinamika perubahan di lingkungan strategis baik eksternal maupun internal.

Di tengah ketidakpastian global antara lain kekuatiran terhadap krisis utang Eropa dan Amerika Serikat, perlambatan ekonomi dunia, perubahan iklim dan bencana alam, ketegangan politik di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta tingginya harga energi dan pangan, perekonomian Indonesia pada tahun 2011 tetap mampu menjaga momentum pertumbuhan serta menaruhkan pengangguran dan kemiskinan.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2011 tumbuh 6,5 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya (6,2 persen) dengan investasi dan industri pengolahan sebagai penggerakannya. Neraca pembayaran mencatat surplus baik pada neraca transaksi berjalan maupun neraca modal dan finansial. Cadangan devisa meningkat menjadi USD 110,1 miliar.

Stabilitas ekonomi tahun 2011 tetap terjaga. Nilai tukar rupiah kembali menguat dan kembali stabil setelah melemah oleh kekuatiran terhadap imbas krisis utang Eropa pada bulan September dan Oktober 2011. Laju inflasi tahun 2011 terkendali sebesar 3,8 persen.

Stabilitas ekonomi yang terjaga dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Pada bulan September 2011, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan turun menjadi 29,9 juta orang (12,4 persen) dan lapangan kerja formal bertambah 3,96 juta dari Februari 2011 – Februari 2012.

Dalam tahun 2012 dan 2013, situasi ekonomi dunia diperkirakan masih belum menentu. Meskipun *confidence* terhadap krisis utang Eropa membaik, sistem keuangan global tetap rentan terhadap beban utang negara-negara maju yang berat. Perlambatan ekonomi dunia, termasuk di kawasan Asia, juga diperkirakan belum dapat dipulihkan dalam waktu yang singkat. Perubahan iklim dan potensi bencana alam diperkirakan juga masih mewarnai perekonomian dunia. Ketegangan politik di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Semenanjung Korea dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia.

Di dalam negeri, dengan kemajuan yang dicapai hingga tahun 2011, banyak tantangan yang harus dihadapi. Jumlah penganggur dan penduduk di bawah garis kemiskinan yang masih besar harus dikurangi. Daerah-daerah tertinggal harus didorong lebih cepat agar mampu mengejar ketertinggalannya dari daerah yang sudah lebih dahulu maju. Berbagai ganjalan yang menghambat perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi harus dibenahi dengan cepat. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang terbatas harus ditingkatkan termasuk dengan mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam perbaikannya. Birokrasi yang rumit akan ditangani agar pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat. Demikian pula penegakan hukum, termasuk dalam pemberantasan korupsi, akan ditingkatkan agar memberi keadilan yang seluas-luasnya bagi rakyat.

Strategi pembangunan ekonomi diarahkan pada empat *track*. Pertama, membikin ekonomi tumbuh, *pro pertumbuhan (pro growth)*. Di samping tumbuh, pengangguran harus berkurang atau *pro penciptaan lapangan pekerjaan (pro job)*. Selain itu, berikut dan biasanya kelanjutannya dari yang pertama dan kedua adalah *pro pengurangan kemiskinan (pro poor)*. Kemudian, ketiga hal itu meningkatkan pertumbuhan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengurangi kemiskinan tidak boleh dengan cara-cara yang merusak lingkungan kita, jadi *pro lingkungan (pro environment)*.

Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena kalau ekonomi tumbuh, pengangguran berkurang, yang tadinya menganggur mendapatkan pekerjaan, yang bersangkutan akan mendapatkan penghasilan. Makin banyak yang mendapatkan penghasilan, atau makin banyak yang penghasilannya meningkat, kemiskinan pasti turun. Ditambah lagi, jika ekonomi dan dunia usaha tumbuh, negara dan pemerintah, atau negara dalam hal ini pemerintah, mendapatkan penerimaan yang lebih banyak, yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan membiayai kehidupan bernegara, bukan hanya membiayai jalannya pemerintahan umum, tapi segala aktivitas dalam kehidupan bernegara.

Situasi global yang tidak pasti juga tercermin dari berbagai ketegangan politik dan potensi konflik di berbagai kawasan dunia yang dapat

berpengaruh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu kemampuan pertahanan perlu ditingkatkan guna menjaga kepentingan nasional dan keamanan regional.

Stabilitas sosial politik dan keamanan terus dijaga agar momentum pembangunan terus berlanjut. Pemilihan umum tahun 2014 perlu dipersiapkan sebaik-baiknya.

A. TUJUAN

RKP Tahun 2013 disusun agar menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013, di mana kebijakan APBN ditetapkan secara bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di samping itu, RKP Tahun 2013 juga disusun agar menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat/Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. SISTEMATIKA

RKP 2013 memuat 3 (tiga) buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing memuat hal-hal sebagai berikut:

- Buku I memuat Tema Pembangunan Tahun 2013 dan Prioritas Nasional yang terdiri dari 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Nasional lainnya dari RPJMN 2010-2014 serta Isi Strategis menuju terwujudnya Visi, Misi dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
- Buku II memuat rencana pembangunan di semua bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2005—2025 dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2013 yang tercantum dalam Buku I.
- Buku III memuat rencana pembangunan kewilayahan dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2013 yang tercantum dalam Buku I.

Dalam rangka menjabarkan Tema Pembangunan ke dalam rencana aksi berupa program dan kegiatan yang menjadi Prioritas Nasional tahun 2013, Buku I disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II KONDISI UMUM
 - A. Pencapaian Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012
 - B. Masalah dan Tantangan Tahun 2013
- BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
 - A. Kondisi dan Tantangan Perekonomian Nasional
 - B. Sasaran Ekonomi Makro
- BAB IV TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL
 - A. Arah pembangunan
 - B. Tema Pembangunan
- BAB V PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. Isu Strategis Nasional
- B. Sasaran Utama Pembangunan Nasional
- C. Prioritas Pembangunan Nasional
- D. Arah Pembangunan Bidang, Pengarusutamaan, dan Lintas Bidang
- E. Arah Pembangunan Lewatlayahan
- F. Pembiayaan Pembangunan dan Kebijakan Transfer ke Daerah

BAB VI. PENUTUP

- A. Kalimat Penutup
- B. Tindak Lanjut

BAB II KONDISI UMUM

A. Pencapaian Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012

Dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 yaitu PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH, pertumbuhan ekonomi tahun 2011 meningkat 6,5 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya (6,2 persen). Kemajuan ekonomi yang dicapai tahun 2011 telah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam tahun 2012, Tema RKP yaitu PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS, INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT diarahkan untuk tetap menjaga momentum pembangunan ekonomi di tengah berbagai ketidakpastian global untuk mampu terus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Secara ringkas pencapaian pembangunan tahun 2011 dan perkiraan tahun 2012 berdasarkan prioritas pembangunan RPJM 2010 - 2014 adalah sebagai berikut.

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pencapaian pembangunan dalam prioritas ini pada tahun 2011 dan perkiraannya tahun 2012 adalah sebagai berikut.

1. Sampai dengan tahun 2011, sebanyak 16 Kementerian/Lembaga (K/L) telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan 20 K/L sedang dalam proses persetujuan. Pada tahun 2012, diharapkan K/L yang telah mengusulkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diproses. Perluasan reformasi birokrasi di daerah pada tahun 2012 mulai dilaksanakan di 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota.
2. Sampai dengan akhir tahun 2011, kebijakan penataan daerah terus dilakukan melalui moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dan penyusunan Desain Besar Penataan Daerah (Desertada). Dalam rangka peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah, sebanyak 30 provinsi telah memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan 25 provinsi telah optimal dalam melakukan penyerapan DAK. Selain itu, sebanyak 18 provinsi memiliki proporsi belanja langsung yang lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung, dan berdasarkan data BPK Semester I terdapat 32 daerah (provinsi/kab/kota) atau sebesar 9% yang memiliki laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2010 dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2012 ditargetkan pemanfaatan DAK sesuai juklak, optimalisasi

penyerapan DAK, kualitas belanja daerah serta pertanggungjawaban keuangan daerah makin meningkat.

3. RUI Aparatur Sipil Negara (ASN) disusun dalam rangka untuk membenahan SDM Aparatur secara mendasar untuk menggantikan UU No. 43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan. Di samping itu, pemerintah telah menerbitkan kebijakan moratorium Penyerapan PNS melalui Peraturan Bersama antara Menteri PAN & RB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan tentang Peraturan Sementara Penyerapan Calon Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan ini berlaku mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Pada tahun 2012 ditargetkan dapat dilatih sebanyak 4.125 SDM tenaga Analisa jabatan di K/L dan Pemda.
4. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui pengkajian terhadap 3000 Perda, dimana ditemukan 351 Perda bermasalah. Pada tahun 2012, ditargetkan dilakukan kajian terhadap 3000 Perda dan terdapat rekomendasi tindak lanjut dari hasil pengkajian tersebut baik disetujui, direvisi, maupun dibatalkan.
5. Hingga tahun 2011 telah ditetapkan 15 Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk diterapkan dan menjadi acuan penyediaan pelayanan publik dasar di daerah. Hingga saat ini telah terakumulasi 10 SPM yang telah disosialisasikan dan difasilitasi penerapannya di daerah. Selain itu, telah diterbitkan SE Kemendagri No. 100/1023/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah. Pada tahun 2012 ditargetkan penerapan 9 SPM di tingkat Urusan Pemerintahan Daerah I dan 6 SPM di Tingkat Urusan Pemerintahan Daerah II.
6. Sampai tahun 2011, telah dibentuk 420 pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di instansi pemerintah daerah, dan selanjutnya terus ditingkatkan kualitasnya, baik aspek SDM, pemanfaatan TIK, pemyederhanan prosedur dan kepuasan dalam pelayanan. Pada tahun 2012, diperkuat dengan penyusunan sistem pengaduan pelayanan, penerapan replikasi inovasi pelayanan publik, dan pemeringkatan pelayanan publik di K/L dan Pemda sebagai *best practices* pemyenggaraan pelayanan.
7. Dalam hal pemerataan administrasi penduduk melalui pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK), dari target 67,29 juta penduduk di 497 kabupaten/kota pada tahun 2011, perekaman e-KTP sampai dengan tanggal 12 April 2012 adalah sebanyak 57.561.894 penduduk, sedangkan e-KTP yang telah diterbitkan sampai dengan tanggal 11 April 2012 yaitu sebanyak 9.671.575 lembar e-KTP. Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi setiap penduduk yang ditargetkan terlaksana di 497 kab/kota, telah diberikan kepada penduduk di 497 kab/kota, dengan perincian pada tahun 2010 sebanyak 330 kab/kota dan tahun 2011 sebanyak 167 kab/kota. Pada tahun 2012, ditargetkan terbitnya e-KTP untuk 100,51 juta jiwa di 300 kab/kota dan

ditambah sisa yang tidak terlaksana di tahun 2011 sejumlah 40 juta jiwa.

2. Pendidikan

Partisipasi pendidikan penduduk di semua jenjang terus meningkat. Pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 7,92 tahun, meningkat dari 7,24 tahun pada tahun 2004. Jika capaian ini dapat terus ditingkatkan, maka pada tahun 2012 capaian rata-rata lama sekolah diperkirakan akan mencapai 8 tahun.

Dalam rangka menyediakan layanan pendidikan dasar yang merata, pada tahun 2011 telah disediakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk seluruh siswa SD/MI/Salafiyah Ula dan SMP/MTs/Salafiyah Wastha untuk lebih dari 42,1 juta orang.

Guna mendukung penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pemerintah menaikan satuan biaya program BOS pada jenjang SD/MI/Salafiyah Ula dari Rp 397 ribu (kabupaten) dan Rp 400 ribu (kota) pada periode 2009-2011 menjadi Rp 580 ribu/siswa/tahun pada tahun 2012, yang mencakup 31,37 juta siswa. Adapun pada jenjang SMP/MTs/Salafiyah Wastha satuan biaya dinaikkan dari Rp 570 ribu (kabupaten) dan Rp 575 ribu (kota) menjadi Rp 710 ribu/siswa/tahun, yang mencakup 13,38 juta siswa.

Kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial ekonomi menurun sejalan dengan penerapan kebijakan *pro-poor* secara penuh melalui peningkatan jumlah penerima bantuan siswa miskin.

Pada tahun 2011, jumlah penerima bantuan siswa miskin di semua jenjang pendidikan hampir mencapai 8,2 juta siswa. Pemberian bantuan siswa miskin telah menurunkan persentase jumlah siswa putus sekolah dan lulusan tidak melanjutkan. Distribusi jumlah penerima bantuan siswa miskin di daerah tertinggal, terpendek, kawasan nelayan, dan daerah sentra pengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) ditingkatkan untuk mempercepat peningkatan partisipasi siswa, serta mengurangi kesenjangan dengan daerah yang lebih maju.

Dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang bermutu, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan secara memadai, termasuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat. Data Kemdikbud tahun 2011 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 173.344 ruang kelas jenjang SD dan SMP dalam kondisi rusak berat.

Untuk itu, pada tahun 2011 telah dilakukan rehabilitasi 19.325 ruang kelas jenjang SD/MI dan 5.205 ruang kelas jenjang SMP/MTs dalam kondisi rusak berat. Kegiatan rehabilitasi ini dilanjutkan pada tahun 2012 dengan mencakup 137.509 ruang kelas jenjang SD/MI dan 44.826 ruang kelas jenjang SMP/MTs sehingga diperkirakan seluruh ruang kelas jenjang pendidikan dasar yang dalam kondisi rusak berat dapat tuntas pada tahun 2012.

Jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan terus ditingkatkan.

Proporsi jumlah guru yang telah memiliki kualifikasi minimal S1/D4 meningkat menjadi 58,0 persen dan guru yang telah tersertifikasi meningkat menjadi 45,9 persen. Capaian tersebut diperkirakan terus meningkat menjadi 71,0 persen guru memenuhi kualifikasi minimal S1/D4 dan 60,1 persen guru memiliki sertifikat profesi pendidik pada tahun 2012.

Meningkatnya kinerja pendidikan telah didukung oleh meningkatnya anggaran pendidikan yang sesuai dengan amanat Konstitusi minimal sebesar 20 persen dari APBN. Pada tahun 2012, anggaran pendidikan mencapai sebesar Rp 289,96 triliun atau sekitar 20,20 persen dari APBN. Anggaran ini dialokasikan melalui belanja Pemerintah Pusat di 20 Kementerian/Lembaga sebesar Rp 102,52 triliun, melalui transfer ke daerah sebesar Rp 186,44 triliun, serta melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp 1,00 triliun.

3. Kesehatan

Status kesehatan dan gizi masyarakat membaik dengan meningkatnya umur harapan hidup (UHH) menjadi 71,1 tahun pada tahun 2011. Keberhasilan pokok lainnya yang dicapai sebagai berikut.

1. Membaiknya pelayanan terhadap ibu hamil melalui peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil K1 menjadi 72,3 persen, cakupan K4 menjadi 61,4 persen, peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi 82,2 persen (2010) dan pemberian zat besi gizi (Zn) untuk ibu hamil menjadi 92,2 persen (2007).
2. Membaiknya status kesehatan anak dengan cakupan imunisasi lengkap (DPT, Polio, DPT-HB, DPT-HB dan Campak) pada anak usia 12-23 bulan meningkat mencapai 53,8 persen dan yang mendapat imunisasi campak mencapai 74,4 persen (RISKESDAS, 2010). Kunjungan neonatal pertama (KN1) meningkat menjadi 71,4 persen (2010); cakupan pelayanan kesehatan bayi meningkat menjadi 85,16 persen; dan cakupan pelayanan kesehatan balia meningkat menjadi 80,95 persen (2011).
3. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada balita menjadi sebesar 17,9 persen, serta menurunnya prevalensi anak balia pendek (*stunting*) menjadi sebesar 35,6 persen.
4. Meningkatnya pengendalian penyakit menular terutama pada pengendalian penyakit HIV dan AIDS, tuberkulosis (TB), dan malaria. Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV sebanyak 548.256 orang, persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan dan disembuhkan meningkat menjadi 75,26 persen dan 86,22 persen, dan angka penemuan kasus malaria *annual parasite index* (API) sebesar 1,75 per 1.000 penduduk (2011).
5. Meningkatnya penyediaan akses sumber air minum dan sanitasi layak dengan telah dilakukan fasilitasi pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di 171 ibukota kecamatan, 67 kawasan khusus, dan 1.807 desa, yang didukung peningkatan sarana/prasarana air baku

- kapasitas 6,31 m³/detik di 28 provinsi; dan fasilitasi pembangunan sistem pengolahan air limbah sistem *off-site* dan *on-site* di 119 kawasan.
6. Meningkatnya pelayanan kesehatan preventif terpadu didukung oleh penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada 9.321 puskesmas, penguatan promosi kesehatan, peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) melalui posyandu dan poskesdes.
 7. Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan terus ditingkatkan. Sampai dengan tahun 2010, tenaga kesehatan strategis dengan status PTT aktif yang bertugas di daerah dengan kriteria biasa, terpencil, dan sangat terpencil sebanyak 32.978 tenaga kesehatan, terdiri atas dokter spesialis, dokter spesialis gigi, dokter umum, dokter gigi, dan bidan.
 8. Meningkatnya cakupan jaminan pembiayaan kesehatan, jumlah kepesertaan Jamkesmas, jumlah rumah sakit yang melayani pasien Jamkesmas, meningkatnya jumlah tempat tidur (TT) kelas III rumah sakit yang digunakan, meningkatnya pelayanan pasien Jamkesmas di puskesmas, serta penyediaan layanan jaminan ibu hamil dan bersalin melalui Jampersal.
 9. Meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap obat, ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan menjadi 67 persen. Di samping itu, pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan terus ditingkatkan.
 10. Meningkatnya jumlah peserta KB baru menjadi 9,58 juta dan pencapaian jumlah peserta KB aktif menjadi 34,67 juta. Pada tahun 2012 jumlah peserta KB baru diperkirakan meningkat sebanyak 7,3 juta; dan jumlah peserta KB aktif sebanyak 28,2 juta.

4. Penanggulangan Kemiskinan

Pada bulan Maret 2011 tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi 12,49 persen dari 13,33 persen pada bulan Maret 2010. Dalam bulan September 2011, tingkat kemiskinan dapat diturunkan lebih lanjut menjadi 12,36 persen, lihat Gambar 2.1.

GAMBAR 2.1
TINGKAT KEMISKINAN INDONESIA TAHUN 2004-2011



Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan didukung oleh pelaksanaan 3 (tiga) klaster program penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2011, hasil pelaksanaan program-program dari Klaster I yaitu kelompok program-program bantuan sosial yang ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak-hak dasarnya adalah sebagai berikut.

1. Program Raskin telah diberikan kepada 17,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 15 kg/bulan selama satu tahun dengan jumlah pagu beras pada tahun 2011 sebanyak 3,15 juta ton dengan biaya Rp. 1.600,;
2. Cakupan asuransi kesehatan telah mencapai 62,94 persen pada bulan Juni 2011 (termasuk di dalamnya seluruh keluarga miskin). Bersait dengan asuransi kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah mengulasikan perumusan kebijakan dan sinkronisasi perundang-undangan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
3. Disalurkannya 99,8 persen alokasi Bantuan Siswa Miskin (BSM), pada awalnya bantuan disalurkan untuk 5,1 juta siswa, kemudian meningkat lagi menjadi 8 juta siswa dari semua jenjang pendidikan; serta
4. Peningkatan target peserta Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 1.116.000 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di 25 provinsi yang juga mencakup wilayah Indonesia Bagian Timur khususnya provinsi Maluku Utara. Pada program Keluarga Berencana (KB), hasil-hasil yang dicapai pada tahun 2011 antara lain meningkatnya jumlah peserta KB, yaitu: (i) meningkatnya peserta KB baru miskin (keluarga pra-sejahtera/KPS dan keluarga sejahtera I/KS 1) dan rentan lainnya, sebanyak 4,29 juta; dan (ii) meningkatnya jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya menjadi sebanyak 14,6 juta.

Pada tahun 2012 sasaran target penerima program Raskin selama enam bulan pertama menggunakan data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PP.S) tahun 2008 dan akan diperbaharui pada enam bulan terakhir (mulai bulan Juli 2012) menggunakan hasil tahun 2011. Data PP.S tahun 2011 ini juga menjadi target sasaran bagi semua program peranguangan kemiskinan (*target database*). Penyediaan Jamkesmas terus dilakukan sebagai upaya kuratif dan direncanakan akan melayani 67,5 persen penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin). Selanjutnya, Beasiswa Siswa Miskin akan diberikan kepada 7,8 juta siswa baik di sekolah dan perguruan tinggi umum maupun madrasah dan perguruan tinggi Islam. Jumlah penerima PKH pada tahun 2012 ditingkatkan menjadi 1.516.000 RTSM yang tersebar di 33 provinsi. Pada program KB, pada tahun 2012 jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya diharapkan meningkat sebanyak 3,89 juta dan peserta KB aktif miskin (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya meningkat sebanyak 12,5 juta.

Pelaksanaan program Klaster II, yaitu kelompok program-program pemberdayaan masyarakat yang dikoordinasikan dalam Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sampai dengan tahun 2011 telah berhasil membangun sebanyak 5.020 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan pada PNPM Perdesaan; penerapan dan penguatan PNPM Mandiri Perdesaan di 5.020 kecamatan pada 32 provinsi; pembangunan sebanyak 10.948 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan 224.674 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui PNPM Mandiri Perkotaan. Pada tahun 2011, PNPM ini sudah berhasil dilaksanakan di 6.622 kecamatan dan akan terus diperluas pada tahun 2012 menjadi 6.680 kecamatan dengan menempatkan sebanyak 26.356 fasilitator. Realisasikan perkembangan pelaksanaan PNPM Mandiri, secara umum penggunaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagian besar untuk infrastruktur transportasi (49,6 persen), kesehatan (15,1 persen), pendidikan (13,3 persen), dan kegiatan ekonomi (13 persen).

Dalam upaya meningkatkan usaha ekonomi perdesaan, hasil-hasil yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun 2011 adalah terlaksananya pengembangan usaha ekonomi masyarakat di daerah tertinggal, melalui PNPM Program Pengembangan Daerah Tertinggal dan Khusus (PNPM-P2DTK) dan PNPM Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) di 9 provinsi. Sementara itu, upaya meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana di wilayah perdesaan, hasil-hasil yang telah dicapai sampai dengan pertengahan tahun 2011 adalah terlaksananya PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP), dengan fokus pada penanganan lingkungan perdesaan dan penyediaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di 12 kabupaten di 11 provinsi. Pada tahun 2011, kegiatan PNPM Agribisnis, yaitu Program Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dapat terlaksana bagi 9.110 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau sebesar 91 persen dari target sasaran 10.000 Gapoktan.

Hasil pelaksanaan program-program di Kluster III terkait pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2011 antara lain penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 29,0 triliun untuk lebih dari 1,9 juta UMKM dan koperasi, dengan rata-rata kredit pembiayaan sebesar Rp. 15,12 juta. Tingkat pengembalian KUR cukup baik dengan kredit macet hanya sebesar 2,1 persen. Volume penyaluran KUR tersebut dapat dicapai dengan dukungan dana penjaminan kredit secara penuh pada tahun 2011.

Hasil-hasil pelaksanaan kegiatan lainnya di Kluster III pada tahun 2011 adalah:

(i) meningkatnya kapasitas 360 Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KSP/KJKS); (ii) meningkatnya jumlah lembaga keuangan mikro (LKM) yang bertransformasi menjadi KSP/USP-Koperasi/KJKS/UJKS-Koperasi sebanyak 100 LKM; (iii) meningkatnya kapasitas 500 UMKM yang dapat mengakses kredit pembiayaan melalui program linkage; (iv) meningkatnya kapasitas permodalan 1.370 koperasi perdesaan dan perkotaan; (v) meningkatnya kapasitas 100 LKM dalam pemanfaatan jasa keuangan; (vi) meningkatnya kapasitas penjaminan kredit daerah dan lembaga modal ventura daerah dalam memberikan fasilitasi pembiayaan bagi koperasi dan UMKM; (vii) meningkatnya

pemahaman dan pengetahuan perkoperasian sebanyak 750 peserta bimbingan teknis perkoperasian; (viii) meningkatnya kapasitas dan kompetensi sebanyak 900 orang pengelola LKJ/KSP/HSK yang memperoleh advokasi, diklat dan sertifikasi; (ix) meningkatnya dulangan sarana pembaruan di daerah tertinggal melalui revitalisasi 6 (enam) unit pasar tradisional yang dikelola koperasi; serta (x) meningkatnya penyebaran informasi program KUR pada pelaku UMKM, koperasi dan aparat pemerintah daerah di 33 provinsi.

Dalam kerangka pengurangan ketimpangan kepemilikan tanah telah dilakukan reforma agraria melalui kegiatan redistribusi tanah. Pada tahun 2011 telah dilakukan redistribusi tanah sebanyak 140.365 bidang, sedangkan pada tahun 2012, target untuk kegiatan redistribusi tanah sebanyak 149.600 bidang.

5. Ketahanan Pangan

Padi sebagai bahan pangan utama di Indonesia mengalami penurunan produksi dari 66,47 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) pada tahun 2010 menjadi 65,74 juta ton GKG pada tahun 2011 (Angka Sementara). Tertekannya produksi padi 1,1 persen tersebut disebabkan oleh turunnya produktivitas padi 0,7 persen dari 50,15 kg per hektar (ha) pada tahun 2010 menjadi hanya 49,80 kg per ha pada tahun 2011. Kondisi iklim ekstrim yang ditunjukkan dengan peralihan musim dan meningkatnya serangan hama dan penyakit menyebabkan produktivitas padi tersebut turun. Selain itu, menurunnya luasan panen 0,38 persen dari 13,25 juta ha pada tahun 2010 menjadi 13,20 juta ha pada tahun 2011 turut mendorong penurunan produksi padi nasional.

Perurunan produksi juga terjadi untuk jagung dan kedelai yang masing-masing mencapai 3,81 persen atau menjadi 1,63 juta ton dan 6,97 persen atau menjadi 843,8 ribu ton dari 907,0 ribu ton. Insentif yang relatif lebih kecil pada usaha tani kedua komoditi tersebut mendorong petani beralih ke usahatani padi. Sementara itu, kondisi iklim yang basah menyebabkan produksi tebu jawa menurun 3,01 persen menjadi 2,22 juta ton pada tahun 2011 dari 2,29 juta ton pada tahun sebelumnya.

Kondisi yang relatif baik ditunjukkan dengan peningkatan produksi daging sapi dan ikan pada tahun 2011 dimana masing-masing meningkat 5,9 persen dan 6,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, produksi daging sapi dan ikan masing-masing mencapai 465,8 ribu ton dan 12,38 juta ton yang terdiri dari 5,41 juta ton perikanan tangkap dan 6,97 juta ton perikanan budidaya. Upaya Pemerintah di dalam menjaga populasi sapi betina produktif serta penyediaan bibit sapi pada beberapa tahun terakhir diperkirakan berdampak di dalam peningkatan produksi daging sapi. Sementara itu, peningkatan produksi ikan pada tahun 2011 didominasi oleh perikanan budidaya, khususnya untuk rumput laut, bandeng, *catfish* (patin dan lele), udang, dan nila. Untuk perikanan tangkap, masih relatif sama dengan tahun lalu.

Di dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim tersebut, Pemerintah telah meningkatkan dukungan di dalam mendorong keberlanjutan produksi

bahan pangan. Salah satu langkah yang diambil adalah menyediakan air irigasi melalui peringkasan dan rehabilitasi jaringan irigasi, yang pada tahun 2011, telah dilakukan peningkatan jaringan irigasi seluas 58,5 ribu ha dan rehabilitasi seluas 284,1 ribu ha. Selain itu, Pemerintah telah berupaya dalam mengedukasi alih fungsi tanah pertanian untuk menjamin keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Selain infrastruktur dasar, Pemerintah juga telah mengupayakan ketersediaan pupuk dan benih bersubsidi terutama bagi produksi padi dan palawija. Penyediaan dan pemberian informasi terkait kondisi perairan laut untuk kelainan penangkapan ikan kepada nelayan; pemberian bantuan kapal penangkap ikan dengan ukuran yang lebih besar (> 30 GT); perbaikan saluran tambak dan penanaman mangrove; serta penyediaan alternatif pekerjaan di darat, bantuan bahan pangan (sembako), serta fasilitasi asuransi bagi nelayan.

Tidak tercapainya peringkasan produksi beberapa bahan pangan tersebut di atas turut mendorong naiknya harga pangan di pasar dalam negeri. Beras merupakan komoditas pangan dengan harga yang cenderung meningkat sejak awal tahun 2011. Harga beras cenderung terus meningkat hingga menembus harga Rp. 10.000,- per kg pada akhir tahun 2011. Kondisi yang sama juga ditunjukkan dengan harga beras termurah yang cenderung terus meningkat hingga mencapai Rp. 8.103,- per kg pada akhir tahun 2011.

Sementara itu, harga kedelai di dalam negeri cenderung stabil pada tingkat rata-rata Rp. 8.644,- per kg, karena tercakupnya sejumlah dalam negeri oleh kedelai impor. Kondisi serupa ditunjukkan oleh gula, dimana harga gula dalam negeri relatif stabil pada kisaran rata-rata Rp. 10.144,- per kg. Selanjutnya, untuk harga daging sapi cenderung meningkat sejak pertengahan tahun 2011 yang mencapai kisaran Rp. 69.924,- per kg akibat meningkatnya permintaan daging sapi pada saat hari besar keagamaan. Sementara itu, harga ikan selama kurun waktu 2011 secara umum mengalami kenaikan, karena pasokan ikan (terutama yang berasal dari laut) mengalami penurunan akibat perubahan iklim dan semakin banyak baru nelayan tidak dapat melaut.

Pada tingkat rumah tangga, rata-rata konsumsi kalori penduduk pada tahun 2010 mencapai 1957 kkal per kapita per tahun dengan skor Pada Pangan Harapan (PPH) mencapai 80,6. Dominasi konsumsi beras (padi-padian) masih cukup besar yaitu 60,9 persen dari angka ideal sebesar 50,00 persen dari Angka Kecukupan Gizi (AKG). Sementara itu, konsumsi ikan meningkat dari 30,48 kg/kapita/tahun pada tahun 2010 menjadi 31,64 kg/kapita/tahun pada tahun 2011. Terjaganya tingkat konsumsi tersebut diperkirakan karena relatif terjaganya daya beli masyarakat, tercapainya pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), serta tercapainya fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran produk perikanan dalam negeri.

Pada tingkat makro, produksi bahan pangan dalam negeri tersebut selain dapat menjamin ketersediaan pangan bagi penduduk, juga diharapkan

mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Nilai Tukar Petani/Nelayan (NTP/NTN). Pada tahun 2011, PDB sektor pertanian secara luas mampu tumbuh 3,0 persen. NTP dan NTN masing-masing mencapai 105,73 dan 106,74. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dimana NTP dan NTN masing-masing mencapai 100,8 dan 105,5.

6. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur mencakup pembangunan sarana dan prasarana pengairan dan irigasi; transportasi; perumahan dan permukiman; komunikasi dan informatika; serta pertanahan dan penataan ruang. Fokus prioritas pembangunan infrastruktur adalah peningkatan dukungan daya saing sektor riil dan penyediaan infrastruktur dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengairan dan Irigasi. Pada tahun 2011 telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi prasarana pengendali banjir sepanjang 540 km meliputi: (i) normalisasi dan pengerukan secara *multiyears* di WS Giliwung dan Citarum; (ii) pembangunan Jabung *Ring Dike* Bengawan Solo, dan (iii) normalisasi Kali Garang Semarang. Disamping itu, juga dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengendali lahar/sedimen sebanyak 61 buah pada daerah-daerah rawan bencana.

Pada tahun 2012 kegiatan yang akan dilakukan antara lain: (i) penyelesaian pembangunan Bendung Gerak/Bojonegara Barrage sebagai salah satu instrumen pengendali banjir di Bengawan Solo Hilir, (ii) pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 426,9 km dan pembangunan dan rehabilitasi pengaman pantai sepanjang 72,28 km, dan (iii) pembangunan dan rehabilitasi pengendali lahar/sedimen gunung berapi sejumlah total 90 buah.

Dalam rangka penyediaan infrastruktur dasar pengairan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pencapaian target MDGs, pada tahun 2011 telah dicapai peningkatan kapasitas air baku sebesar 8.60 m³/detik, diantaranya di Pidie, Palangkaraya, Palingkara-Kapuas, dan Plosoyanga-Gorontalo. Pada tahun 2012, diperkirakan pembangunan sarana/prasarana air baku akan dapat meningkatkan kapasitas sebesar 14,66 m³/detik antara lain Air Baku Teluk Lering Samarinda, Telagawaja Bali, Tasikmalaya, Maron-Pacitan, lanjutan Palingkara, Manukwari, dan air baku regional Bregas (Brebes-Tegal-Selatani).

Transportasi. Pembangunan infrastruktur transportasi mencakup transportasi jalan, perkeretaapian, transportasi laut dan udara. Selama tahun 2011 telah diselesaikan antara lain preservasi jalan sepanjang 36.347 Km dan jembatan sepanjang 215.638 m; peningkatan kapasitas jalan (pelebaran) sepanjang 3.160 km dan jembatan sepanjang 8.180 m. Selain itu, dalam rangka mengembangkan sistem transportasi massal berbasis bus, telah dilaksanakan program pengembangan *Bus Rapid Transit* (BRT) di 13 lokasi, yaitu Bogor, Yogyakarta, Pekanbaru, Manado, Palembang, Gorontalo, Batam, Semarang, Bandung, Solo, Tangerang,

Provinsi Maluku dan Bali, serta pengadaan dan pemasangan *converter kit* untuk 33T.

Untuk mendukung program penyediaan sarana transportasi antar-roda darat antar-pulau yang terintegrasi (*national connectivity*) telah dilaksanakan pembangunan Terminal Tipe A (antar propinsi) dan terminal antarlintas batas negara yang tersebar di 3 lokasi dari 11 lokasi yang direncanakan. Di samping itu, telah dilaksanakan pembangunan 15 unit dermaga penyeberangan baru, 38 unit dermaga penyeberangan lanjutan dan 11 unit dermaga penyeberangan yang telah selesai pembangunannya yang tersebar di 12 lokasi. Disamping itu, pada transportasi laut telah dilaksanakan pembangunan pelabuhan baru sebanyak 18 kegiatan dan untuk lanjutan pembangunan pelabuhan sebanyak 133 pelabuhan, serta terdapat tujuh pelabuhan strategis yang telah dibangun dan dikembangkan antara lain: Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Proholinggo, Pelabuhan Kariangan, Pelabuhan Pantulan, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ternate dan Pelabuhan Arar-Sorong. Selain itu telah diselesaikan pembangunan pelabuhan di 5 lokasi (Boo-Lirung-Sulawesi Utara, Kasorolang-Lirung-Sulawesi Utara, Belang Sulawesi Utara, Karimunjawa Jawa Tengah, dan Iwak-Maluku).

Capaian kinerja pemangunan infrastruktur perkeretaapian pada tahun 2011 adalah penataan kawasan jalur KA pada lintas Jakarta Kota - Tanjung Priok dan Tanjung Priok - Pasar Senen; Elektrifikasi jalur KA eksisting antara Serpong - Parungpanjang sepanjang 11,7 km; rehabilitasi dan peringsatan jalur KA sepanjang 292,4 Km/sp dari target sepanjang 310,9 Km/sp; pembangunan jalur KA baru termasuk jalur Ganda sepanjang 140,98 km/sp; serta peningkatan kapasitas lintas dan kualitas persinyalan KA lintas Medan - Belawan. Sementara itu, untuk meningkatkan pelayanan pada jalur akses bandara Soekarno-Hatta, telah diterbitkan Pepras No.83 Tahun 2011 tentang pengasasan PI KA untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana KA Bandara Utara Soela dan Jalur Lingsar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi.

Untuk meningkatkan pelayanan penerbangan, telah dilaksanakan pembangunan dan pengembangan bandara udara (bandara) strategis yaitu Bandara Juanda Surabaya, Bandara Kuala Namu Medan Baru, dan Bandara Samarinda Baru. Capaian lainnya adalah telah beroperasinya bandara internasional Lombok pada 1 Oktober 2011, serta pengadaan 459 unit peralatan Fasilitas Keamanan Penerbangan dan rehabilitasi 16 unit peralatan Fasilitas Keamanan Penerbangan (*Xray Baggage Dual View, Walkthroughmetal detector*, pengadaan kendaraan PKP-PK dan lain lain) untuk meningkatkan keselamatan transportasi udara; dan percepatan pelaksanaan pembangunan bandara baru di 24 lokasi.

Dalam rangka penyediaan infrastruktur dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk mendukung pelayanan transportasi di wilayah terpencil dan perbatasan, pembangunan jalan di wilayah terpencil, terluar dan perbatasan sepanjang 294 km telah dilakukan penetapan 157 trayek angkutan jalan perintis di 25 provinsi (tumbuh 9,8 persen dari tahun 2010); penyelesaian pembangunan 17

kapal berupa kapal penyeberangan, perintis baru dan kapal kerja; penyelesaian pembangunan 9 kapal penyeberangan perintis lanjutan; penyelesaian perharungan *breakwater*, yaitu di pelabuhan penyeberangan Kendal, Lamongan, Waiaceo dan Neral.

Perumahan dan Permukiman. Dalam rangka penyediaan infrastruktur dasar serta untuk mendukung pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs), pada tahun 2011 Pemerintah telah membangun 65 *Twin Blok* (TB) rumah susun sederhana sewa (rusunawa); fasilitasi pembangunan rumah swadaya sebanyak 12.353 unit dan peningkatan kualitas perumahan swadaya sebanyak 35.738 unit; serta penyediaan fasilitasi likuiditas Perumahan dan Permukiman untuk 109.614 unit. Selanjutnya pada tahun 2012 diperkirakan dapat dicapai pembangunan 191 TB rusunawa; fasilitasi pembangunan rumah swadaya sebanyak 26.250 unit; fasilitasi peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 48.750 unit; dan penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 150 Ha dan 170 kawasan.

Komunikasi dan Informatika. Pemerintah telah menetapkan kegiatan di sektor komunikasi dan informatika untuk memperkuat konektivitas nasional, yaitu (i) penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia. Bagian Timur sebelum tahun 2013 dan (ii) memaksimalkan tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat tahun 2014.

Hasil pelaksanaan kedua kegiatan tersebut pada tahun 2011 adalah (i) penyediaan layanan *broadband* di 66 persen ibukota kabupaten/kota atau 27 Telkom; (ii) penyelesaian konsep UCI Fund sebagai satu sumber pendanaan pembangunan jaringan serat optik (Palapa Ring); (iii) beroperasi akses telekomunikasi (Desa Berdering) di 30.413 desa atau 91,7 persen dari target dan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di 5.706 desa ibukota kecamatan atau 99,3 persen dari target sebagai bagian dari program *Universal Service Obligation* (USO). Sedangkan perkiraan pencapaian tahun 2012 infrastruktur komunikasi dan informatika adalah (i) penyediaan layanan *broadband* di 76 persen ibukota kabupaten/kota; (ii) penyelesaian proyek Palapa Ring bagian timur Indonesia; (iii) penyelesaian penyediaan jasa akses telekomunikasi dan internet Program USO sehingga target 33.186 desa (Desa Berdering) dan 5.748 desa ibukota kecamatan (PLIK) terpenuhi.

Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Dalam rangka pelaksanaan skema kerjasama pemerintah swasta (KPS), pada tahun 2011 telah digulirkan berbagai proyek dengan perkiraan investasi sebesar US\$ 53 milyar atau sekitar Rp 500 triliun. Kemajuan perkembangan pelaksanaan beberapa proyek KPS antara lain: (i) telah mulai dilakukan pembebasan lahan untuk 6 ruas proyek jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Manado-Bitung, Pandaan-Malang, Pekanbaru-Kandis-Dumai, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, dan

Srengeng-Pasirkoja; (ii) telah dimulainya proses transaksi untuk 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta ; (iii) telah disiapkannya dokumen pra-studi kelayakan untuk 3 proyek Pelebaran yaitu di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan serta 1 proyek yang telah masuk tahap pelelangan yaitu Tanah Argo Cruise Terminal di Karang Asem Bali dengan perkiraan total investasi sebesar Rp 500 milyar; (iv) telah disiapkannya dokumen pra-studi kelayakan untuk 3 proyek bandara di Jawa dan Bali; (v) telah disiapkannya dokumen pra-studi kelayakan 2 proyek terminal terpadu di Sumatera dan Jawa; (vi) telah disiapkannya dokumen pra-studi kelayakan pembangun kereta api Bandara Soekarno-Hatta-Manggareja; (vii) sedang disiapkannya dokumen pra-studi kelayakan 9 proyek air minum di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi; (viii) sedang disiapkannya dokumen pra-studi kelayakan 2 proyek persampahan dan sanitasi di Jawa; serta (ix) sedang disiapkannya pra-studi kelayakan 3 proyek listrik di Sumatera dan Sulawesi.

Pertanahan. Dalam rangka memberi kepastian hukum terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah ditetapkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Terhinya UU tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pengadaan tanah yang selama ini dipandang sebagai pengambat (*debtfinancing*) pembangun infrastruktur, dan disisi lain dapat lebih menjamin kepastian luas masyarakat atas tanah tersebut. Disamping itu telah dilaksanakan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4U) dengan jumlah 280.244 bidang tanah, dan telah disusun rencana penatagunaan tanah untuk 99 kabupaten/kota.

Pada tahun 2012 diperkirakan terlaksana neraca penatagunaan tanah di 100 kabupaten/kota; inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4U) sejumlah 50.000 bidang tanah; dan terselusnya Perpres tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Tata Ruang. Pencapaian yang telah dicapai dalam penyelenggaraan peraturan ruang yang mendukung pembangunan infrastruktur pada Tahun 2011 dan awal Tahun 2012 adalah: (i) ditetapkannya 4 (empat) RTR Pulau yaitu Perpres 88/2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi, Perpres 3/2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan, Perpres 13/2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, dan Perpres 28/2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali; (ii) ditetapkannya 4 (empat) RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu Perpres 45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita), Perpres 55/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata), Perpres 62/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro), dan Perpres

07/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Dalam, Hutan dan Karimun (RTRK); (iii) ditetapkan 4 RTRW Provinsi, 89 RTRW Kabupaten dan 31 RTRW Kota yang disusur dengan merujuk pada UU 26/2007 dan PP 26/2008 tentang RTRWN.

Adapun perkiraan pencapaian penyelenggaraan peraturan ruang tahun 2012 dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan MP3EI pada enam koridor antara lain adalah: (i) ditetapkannya 3 Raperpres RTR Pulau/Kepulauan, yaitu RTR Kepulauan Maluku, RTR Kepulauan Nusa Tenggara, dan RTR Pulau Papua; (ii) ditetapkannya 10 Raperpres RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN); (iii) legalisasi 11 RTR KSN; (iv) disetujuinya substansi teknis RTRW untuk 64 kabupaten dan 47 kota oleh BKPRN.

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Kinerja investasi terus meningkat. Pada triwulan IV/2011, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto meningkat 11,5 persen dan dalam keseluruhan tahun 2011 naik 8,8 persen. Rasio investasi terhadap PDB pada tahun 2011 terjaga sebesar 35,7 persen. Membaiknya iklim investasi dan iklim usaha juga tercermin dari arus *foreign direct investment* (FDI). Investasi langsung di Indonesia pada tahun 2011 meningkat menjadi USD 18,2 miliar terutama pada sektor nonmigas yang naik menjadi USD 17,5 miliar. Realisasi investasi melalui BKPM baik PMA maupun PMDN pada tahun 2011 meningkat Rp 251,0 triliun atau naik 20,6 persen. Membaiknya iklim investasi dan iklim usaha juga tercermin dari berbagai indikator antara lain meningkatnya kredit investasi, impor barang modal serta bahan baku/perolong, dan penjualan semen di dalam negeri. Indeks Tendensi Bisnis yang dicatat oleh BPS juga menunjukkan kecenderungan meningkat.

Kepercayaan terhadap iklim investasi dan iklim usaha di Indonesia yang meningkat juga tercermin dari perbaikan peringkat utang Indonesia. Lembaga pemeringkat internasional telah meningkatkan peringkat utang Indonesia pada akhir tahun 2011 menjadi layak investasi (*investment grade*) dari 3B+ menjadi BBB- dengan *outlook stable*. Demikian pula lembaga pemeringkat Moody's meningkatkan peringkat utang Indonesia menjadi layak investasi, dari Ba1 menjadi Ba3 setara dengan India.

Dengan berbagai upaya untuk terus meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha, termasuk dukungan investasi pemerintah antara lain dalam pembangunan infrastruktur, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto pada tahun 2012 diperkirakan meningkat 10,9 persen.

8. Energi

Pada tahun 2011, produksi energi fosil mencapai 5,78 juta *barrel oil equivalent per day* (BOEPD) yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 902 ribu BOEPD, gas bumi sebesar 1.516 ribu BOEPD, dan batu bara sebesar 3.364 BOEPD. Jumlah produksi ini meningkat sekitar 1,8 persen dibandingkan produksi energi tahun 2010 yang mencapai 5,69 juta BOEPD. Pada tahun 2012, produksi energi diupayakan dapat mencapai 6,16 juta BOEPD yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 930 ribu BOEPD, gas bumi sebesar 1.590 ribu BOEPD, dan batu bara sebesar 3.818

riku (JOEPO).

Sesuai arah kebijakan energi nasional, pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai sumber daya energi terus didorong dan dikembangkan, terutama pemanfaatan panas bumi. Pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik (P.TP) berdasarkan kapasitas terpasang mengalami peningkatan sebesar 37 MW. Bila pada tahun 2010, kapasitas terpasang P.TP sebesar 1.089 MW maka pada tahun 2011 kapasitasnya dapat ditingkatkan menjadi 1.226 MW. Pada tahun 2012, kapasitas terpasang tenaga listrik yang bersumber dari panas bumi diupayakan dapat mencapai 1.341 MW.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik, sedang dilaksanakan percepatan program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap I, dan 10.000 MW tahap II, dan IPP. Rasio elektrifikasi pada tahun 2011 mencapai 72,95 persen atau mengalami peningkatan sebesar 4,2 persen dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 67,2 persen. Rasio elektrifikasi diupayakan dapat meningkat menjadi 75,9 persen pada akhir tahun 2012.

Rasio elektrifikasi yang meningkat didukung dengan ketersediaan kapasitas terpasang pembangkit listrik melalui penambahan rata-rata sebesar 3.000 MW per tahunnya. Pada tahun 2011, kapasitas terpasang pembangkit listrik bertambah sebesar 3.430 MW yaitu dari 33.923 MW pada tahun 2010 menjadi 37.353 MW. Kapasitas terpasang tersebut diupayakan dapat bertambah sekitar 6.300 MW pada akhir tahun 2012.

Untuk mendorong investasi di bidang energi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 yang memberi fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah, yang antara lain mencakup 15 sektor di bidang energi dan sumber daya mineral.

Selain itu, untuk mendorong penyediaan sumber energi terbarukan khususnya energi yang berasal dari nabati (*biofuel*), telah pula dilakukan inventarisasi dan identifikasi tanah terlantar.

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Sebagai wujud komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2020, pada bulan September 2011 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Rencana aksi tersebut mencakup berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. Untuk mendukung pelaksanaan RAN-GRK tersebut, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional serta diluncurkan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang akan menjadi panduan bagi daerah dalam menyusun RAD-GRK. Sesuai Perpres 61 tahun 2011, dalam kurun waktu 12 bulan sejak RAN-GRK diterbitkan, maka seluruh provinsi telah

selesai menyusur RAD-GRK dan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

Berbagai upaya di sektor kehutanan juga telah dilakukan dan akan dilanjutkan dalam rangka pengendalian laju kerusakan sumber daya alam dan penurunan emisi gas rumah kaca, yaitu melalui (i) peraturan batas kawasan hutan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); (ii) pengendalian kebakaran hutan; (iii) rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS prioritas dan pengembangan perburuan sosial; serta (iv) peningkatan dan pengembangan penyubuhan keutamaan. Dalam hal pengakuan hutan sampai dengan tahun 2011 telah diselesaikan secara kumulatif total batas kawasan hutan sepanjang 3.148,03 km dan beroperasi 40 unit KPH. Sampai dengan tahun 2011 kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan telah dilaksanakan dengan capaian sebesar 705.562 ha. Upayarehabilitasi hutan dan lahan ini juga didukung dengan kegiatan lain dalam rangka peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti pengembangan Hutan Komunitas dan Hutan Desa dengan capaian seluas 508.170 ha.

Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan. Untuk itu pada tahun 2011 telah dilaksanakan berbagai upaya, antara lain: (i) pemantauan dan pengawasan percaatan terhadap 1.000 perusahaan, melalui mekanisme Program Peningkatan Kinerja Perusahaan (PROPEK); (ii) pengelolaan sampah serta pemantauan lingkup pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup melalui pelaksanaan program Adipura di 380 kota; (iii) pemantauan dan pengawasan percaatan terhadap 100 industri, melalui mekanisme Program Keti Bersih (PROKASIH); (iv) pemantauan kualitas udara di 26 kota besar/metropolitan dan kualitas air di 27 kota besar/metropolitan; (v) pengelutair 33 dan limbah 33; (vi) pelaksanaan sistem pencegahan pemadaman, dan penanggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan, serta (vii) pelaksanaan pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas.

Dalam rangka memelihara ekosistem wilayah pesisir dan lautan guna menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan biota lainnya, pada tahun 2011 telah dilakukan rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, antara lain melalui: (i) penetapan kawasan konservasi perairan seluas 15,4 juta hektar, dengan luas kawasan perairan yang terkelola secara efektif sebesar 2,5 juta hektar; (ii) dilaksanakannya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang pada 16 kabupaten/kota di 8 provinsi; serta (iii) pengembangan kerjasama antar negara tetangga dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut, antara lain *Coral Triangle Initiatives (CTI)*, *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME)*, *Arafura and Timor Seas Action (ATSEA)*, dan *Mangrove For the Future (MFF)*. Pada tahun 2012 kawasan perairan yang dikonservasi diperkirakan semakin terkelola melalui penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan dan peningkatan pengawasan kawasan konservasi perairan.

Pada tahun 2011, pencapaian lain yang dihasilkan adalah terkelolanya Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS), Sistem Peringatan Dini Iklim

(GEWS), serta Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) meliputi antara lain, (i) jaringan *Seismik Broadband*; (ii) sistem desiminasi sirene TEWS di 3 lokasi; (iii) meta data Itra TEWS di BMKG Pusat; (iv) *client citra Multifunctional Transport Satellite (METSAT)*; (v) sistem sarana analisa parameter cuaca; (vi) sistem penganutan radar dan cuaca bergerak; (vii) sistem Ground Receiver Satellite NOAA di 3 lokasi; (viii) integrasi radar cuaca lanjutan 5 set; (ix) Stasiun Meteorologi Pertanian, Kausus di 2 lokasi; (x) Stasiun Cuaca Otomatis atau *Automatic Weather Station (AWS)* 4 unit; (xi) Alat Pengukur Hujan Otomatis atau *Automatic Rain Gauge (ARG)* 7 unit; serta (xii) penguatan pusat regional.

Dalam rangka pengendalian kebakaran hutan, penurunan jumlah *hotspot* di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi terus dipantau. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 jumlah *hotspot* berkurang menjadi 28.474 titik atau menurun sebesar 51,65 persen dari rerata *hotspot* tahun 2005-2009 (58.890 titik). Pada tahun 2012, jumlah *hotspot* ditekan sebesar 48,80 persen. Seiring dengan penurunan jumlah *hotspot*, luas kawasan hutan yang terbakar berhasil ditekan pada tahun 2011 adalah sebesar 42,22 persen (7.090,38 ha) dari rerata luas kebakaran hutan tahun 2005-2009 (12.272,67 ha).

Upaya penanggulangan bencana, pada tahun 2011 dilakukan melalui peringatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan pelaksanaan tanggap darurat bencana, dengan pencapaian antara lain: (i) pemenuhan dan pendistribusian logistik dan peralatan penanggulangan bencana di 33 Provinsi dan 265 Kabupaten/Kota; (ii) peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di 28 provinsi, penyusunan rencana kontingensi di 8 provinsi, penyusunan peta risiko bencana dan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana di 33 provinsi; dan (iii) peningkatan kapasitas Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PC) melalui penempatan teknis, gadi penanggulangan bencana dan gelar kesiapsiagaan SRC-PC. Sementara untuk penanganan wilayah pasca bencana, pada tahun 2011 telah dilaksanakan penanganan darurat bencana banjir di 10 provinsi, darurat bencana gunung api di 0 provinsi, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, serta penanganan darurat banjir lahar dingin erupsi Gunung Merapi di Provinsi D. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sementara perkiraan pencapaian tahun 2012 antara lain adalah: (i) peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, melalui pemenuhan dan pendistribusian logistik dan peralatan penanggulangan bencana di 33 Provinsi; (ii) dukungan dan fasilitasi penyusunan rencana kontingensi dan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana di 33 provinsi; dan (iii) pelaksanaan tanggap darurat yang efektif dan efisien di wilayah rawan dan pasca bencana.

10. Daerah Tertinggal, Terluar, dan Pasca Konflik

Pembangunan daerah tertinggal telah menunjukkan hasil yang lebih baik khususnya dibidang perekonomian dan pembangunan manusia, yang secara rinci disajikan dalam Tabel 2.1.

Salah satu upaya mempercepat pembangunan perekonomian wilayah di daerah tertinggal, adalah melalui perumusan kebijakan pengembangan

kawasan perdesaan di daerah tertinggal secara holistik berbasis pengembangan komoditas unggulan daerah yang berlokasi di 12 kabupaten. Selain itu telah dilakukan pembangunan daerah tertinggal yang berorientasi cluster (cluster based), melalui kerjasama antardaerah tertinggal dan antara daerah tertinggal dengan kawasan strategis untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik serta mengembangkan kapasitas pengembangan ekonomi di daerah tertinggal secara lebih efisien sebanyak 6 (enam) Regional Management.

TABEL 2.1
KEMAJUAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

INDIKATOR	2011	Perkiraan 2012
PDRB	Rp. 3.600 trilya	Rp. 3.664 trilya
Pertumbuhan PDRB	6,7 persen	6,1 persen
Angka Kemiskinan	17,6 persen	16,6 persen
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,6	69,9

Sumber: BPS (2011), diolah

Keseragaman antar wilayah dan keteringgalan suatu daerah masih menjadi isu yang harus diatasi sejalan dengan lajun pembangunan nasional. Salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 adalah perhatian terhadap daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik.

Kecenderungan wilayah perbatasan di beberapa daerah belum tersentuh oleh dinamika pembangunan sehingga pembangunan dan masyarakatnya pada umumnya tergolong miskin dan banyak yang menggantungkan hidupnya kepada negara tetangga, terutama dalam segi ekonomi. Upaya penegasan dan pengamanan batas wilayah negara (BWN) serta pengembangan kawasan perbatasan (KP) pada tahun 2011 telah dilakukan dengan penyediaan akses infrastruktur dan sosial ekonomi masyarakat telah diwujudkan dengan dilaksanakannya pembukaan akses beberapa ruas jalan menuju lokpri di 8 kabupaten perbatasan Kalimantan melalui DAK; tersusunnya 39 profil lokasi prioritas (kecamatan terluar) perbatasan sebagai bahan dasar pemetaan potensi dan indikasi program pengelolaan BWN dan KP. Selain itu, sampaisaat ini telah terbangun 206 pos pertahanan dari total kebutuhan minimal sebanyak 395 pos pertahanan. Sementara itu dari 92 pulau kecil terluar, baru 12 pulau yang dibangun pos pengamanan. Pada tahun 2011 pencapaian mengenai pengelolaan batas wilayah antara lain: tersusunnya 94 wilayah penataan batas provinsi/kabupaten/kota; tersusunnya 40 *Border Sign Post* RI-RDTL, tersusunnya 77 pilar; terdiri dari 12 pilar batas RI-Malaysia; lima pilar batas RI-PNG, 60 pilar batas RI-RDTL; tersusunnya 94 wilayah penataan batas provinsi/kabupaten/kota.

Upaya pembangunan di kawasan perbatasan telah mendapat keberpihakan dari Kementerian/Lembaga terutama dari bidang infrastruktur dan pelayanan dasar yang tak hanya tercantum dalam alokasi anggaran dan

kegiatan pada Prioritas Nasional 10 yaitu Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik serta Prioritas Nasional lainnya terutama pada Bidang Pendidikan, Kesehatan, Peranggungan Kemiskinan, Infrastruktur, dan Energi.

Dalam rangka menyelesaikan masalah perbatasan dengan Negara tetangga yang berbatasan langsung, Indonesia telah mengupayakan penyelesaian perundingan yaitu: terlaksananya enam perundingan (tiga kali perundingan teknis batas darat, tiga kali perundingan teknis batas maritim) dan tersusunnya dua dokumen kajian (satu kajian LKI > 200 NM dan satu dokumen pengkajian dan penelitian batas Negara dan geopolitik dengan Timor Leste (batas darat), Malaysia (batas darat dan laut), Singapura (batas laut wilayah segitiga timur), Filipina (batas ZEE dan landas kontinental), Palau, Vietnam, Thailand dan India (batas ZEE)).

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Kawasan perbatasan sejak tahun 2011 dilaksanakan melalui rintisan pembangunan Kawasan perkotaan baru melalui skema Kota Terpadu Mandiri (KTM) di 5 kawasan yaitu 2 kawasan di Pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), 2 kawasan di Provinsi Papua, dan 1 kawasan di Provinsi N.T.T. Dalam merencanakan rintisan pembangunan kawasan perkotaan baru dengan skema Kota Terpadu Mandiri, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan akan disinkronikan melalui pembangunan infrastruktur pemerintahan di 41 Kecamatan terdiri atas 39 Kecamatan (Tahap Lanjutan) dan 32 Kecamatan (Tahap Awal).

Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Mulai tahun 2011 telah diumumkan upaya percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, sebagai penyempurnaan kebijakan percepatan melalui Inpres 5/2007 yang dipandang belum berhasil melakukan akselerasi dan sinkronisasi program pembangunan di segala bidang di provinsi paling timur Indonesia tersebut. Capaian strategis pada Tahun 2011 yang telah dilakukan mengawali kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
2. Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B).
3. Telah disusun Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai lampiran Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
4. Dibentuknya Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dengan Kepres Nomor 153/M tahun 2011, tertanggal 13 Oktober 2011 tentang penetapan Kepala UP4B, dan Keppres No 185/M Tahun 2011 tentang penunjukan Wakil Kepala UP4B dan lima Deputi.
5. Dengan terbentuknya UP4B dan rencana aksi diharapkan upaya akselerasi pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat

terwujud dengan program-program bersifat *quick wins* (cepat terwujud dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat).

Selain pemberahan dalam sisi regulasi, upaya percepatan melalui DAK Perdagangan juga dilakukan di kabupaten/kota yang termasuk ke dalam program Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B) untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung pasokan dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok) sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Kegiatan DAK Perdagangan yang telah dilaksanakan di Papua dan Papua Barat pada tahun 2012 adalah: (i) Pembangunan dan pengembangan Sarana Distribusi perdagangan (pasar tradisional); (ii) Perbaikan dan peningkatan sarana metrologi legal; dan (iii) Pembangunan Gudang, fasilitas, dan peralatan penunjangnya dalam kerangka S3G.

Perdekatan yang digunakan untuk membangun Papua tidak hanya pendekatan dari aspek sosial, politik, budaya, dan ekonomi namun juga aspek hukum, budaya dan kultural, sehingga tetap berjalan sesuai dengan semangat percepatan yakni keberpihakan dan penitikan terhadap orang asli Papua. Upaya pembangunan merupakan terlintas dari program Kementerian/Lembaga dalam mengalokasikan anggaran dan kegiatan infrastruktur dan pelayanan dasar yang tertera dalam Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat mendapat tempat khusus dalam fungsi pembangunan, sehingga menjadi bagian dari Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik serta juga merupakan bagian penting dalam prioritas nasional lainnya terutama pada Bidang Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Infrastruktur, dan Energi.

11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

Pembangunan kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi pada tahun 2011 telah menunjukkan berbagai kemajuan yang ditandai antara lain dengan semakin meningkatnya upaya pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya. Pencapaian pembangunan kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, antara lain: (i) pengelolaan terpadu cagar budaya: Kawasan Candi Borobudur, Kawasan Candi Prambanan dan Kawasan Situs Manusia Purba Sangiran; (ii) rehabilitasi dan penataan 19 museum serta penyusunan 6 (enam) masterplan pembangunan museum; (iii) peningkatan layanan jasa perpustakaan dan informasi di 33 perpustakaan provinsi, 300 perpustakaan kabupaten/kota, 3.102 perpustakaan desa, dan penyediaan 55 mobil perpustakaan keliling; (iv) fasilitasi penyediaan sarana seni budaya di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota; (v) pelaksanaan 21 penelitian bidang kebudayaan dan 155 penelitian bidang arkeologi; (vi) fasilitasi penyelenggaraan 33 pertunjukan, pameran, festival, workshop dan lomba, 11 event festival film di dalam dan di luar negeri, sensor film 42.200 judul film/video/iklan; (vii) fasilitasi peningkatan kreativitas dan kapasitas di bidang iptek dan imtaq bagi 3.180 orang dan di bidang seni, budaya, dan industri kreatif bagi 3.180 orang.

12. Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pertahanan

Politik. Demokrasi Indonesia sudah melewati sejumlah ujian tidak ringan sejak penyelenggaraan pemilu nasional terakhir 2009, baik berupa permasalahan dari sisi kebebasan sipil, hak-hak politik maupun lembaga demokrasi, termasuk persoalan sengketa antar kelompok masyarakat dalam kehidupan sosial politik dan konflik pasca pemilukada, ancaman terorisme, persoalan partisipasi masyarakat sipil, maupun persoalan fungsi parpol. Pada tahun 2013, di tengah berbagai realitas sosial politik yang ada, Indonesia bersiap memasuki pemilu 2014 dengan segala kompleksitas dan dinamika penyelenggaraannya.

Kebebasan sipil berada pada tingkat yang relatif sangat baik, dengan pengecualian sejumlah tindakan kekerasan sektarian dan konflik agraria yang mendapat sorotan luas, karena adanya penghilangan nyawa orang, pembakaran rumah ibadah, dan sebagainya. Pemenuhan hak-hak politik warga membaik walaupun masih terganggu oleh hak memilih dan dipilih yang bermasalah pada pemilu nasional dan daerah. Kinerja lembaga demokrasi lebih rendah dibandingkan kinerja pada aspek kebebasan sipil. Kinerja yang lebih rendah ini salah satunya disumbang oleh masih rendahnya kapasitas dan kredibilitas partai politik seperti digambarkan oleh data indeks demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2009.

Ada gap besar antara aspek Kebebasan Sipil dengan Hak Politik dan Lembaga Demokrasi yang secara umum terjadi di hampir semua provinsi. Angka indeks menunjukkan tingkat kebebasan Sipil yang sangat tinggi, tidak diimbangi dengan kemampuan lembaga demokrasi, yang masih sangat lemah. Warga sangat aktif melaporkan seluhan-keluhan merupakan *civil discontent*. Jika *civil discontent* ini tidak mampu direspon dengan baik oleh lembaga demokrasi dan pemenuhan hak politik, akan bisa bergeser ke yang lain-lain yang lebih merepotkan, seperti etnik, agama, *regional discontent*. Jika gap terus menerus tinggi, Pemerintah dan masyarakat harus bersiap siap untuk munculnya berbagai *discontent* tersebut.

Hukum. Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, telah dilakukan pengkajian terhadap 9100 Perda. Dari hasil kajian tersebut ditemukan sebanyak 351 Perda bermasalah. Pada tahun 2012, ditargetkan dilakukan kajian terhadap 3000 Perda dan terdapat rekomendasi tindak lanjut dari hasil pengkajian tersebut baik disetujui, direvisi, maupun dibatalkan.

Pencapaian dalam kurun waktu tahun 2012 terkait perlindungan hukum, diperibatkan melalui pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyediaan jaminan pelayanan terhadap masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk disalurkan melalui organisasi penyedia jasa bantuan hukum yang telah terakreditasi dan lolos verifikasi.

Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan khususnya di tingkat peraturan daerah maka pada tahun 2011 telah dilakukan fasilitasi perancangan peraturan daerah. Melalui penghimpunan dan pengkajian telah dihimpun/dikaji sebanyak 393 Peraturan Daerah dan juga telah dilakukan kunjungan ke 25 Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan konsultasi dan pendampingan

dalam rangka penyusunan perda di wilayah masing-masing. Disamping itu Kementerian Hukum dan HAM juga membuka kesempatan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan konsultasi langsung terkait dengan penyusunan peraturan daerah dimana pada periode 2011 telah dilakukan konsultasi dan mediasi terhadap 44 Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memberikan tanggapan, analisis dan memberikan masukan terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah serta permasalahan hukum lainnya.

Pemberantasan Korupsi. Dalam rangka mendorong Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, telah ditetapkan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang 2012-2025 dan menengah 2012-2014 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi setiap tahunnya. Di bidang legislasi pencegahan dan pemberantasan korupsi terus dilakukan penyesuaian dengan Konvensi Anti Korupsi PBB, 2003.

Upaya penindakan terhadap Tindak Pidana Korupsi (TPK) ditingkatkan melalui koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK kepada Kejaksaan dan Kepolisian. Selama tahun 2011, KPK telah melakukan strategi peningkatan koordinasi dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK dengan instansi terkait, melaksanakan 447 kegiatan supervisi terhadap persara TPK yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian melalui pelaksanaan gelar perkara, analisis perkara dan pelimpahan perkara ke Kepolisian dan Kejaksaan serta meminta informasi tentang perkembangan penanganan perkara TPK kepada Kepolisian dan Kejaksaan melalui permintaan Surat Perintah Dimulainya Pengidikan (SPD²).

Pertahanan dan Keamanan. Dari sisi keamanan, terutama dalam penanggulangan terorisme, pemerintah semakin bertaksi dalam mengungkap, mencegah, melumpuhkan, dan menangkap pelaku serta jaringan terorisme. Keberhasilan ini telah meningkatkan rasa tenteram di masyarakat dan dunia usaha, sehingga apresiasi tidak hanya datang dari dalam negeri, namun juga dari dunia internasional. Pada tahun 2011, aparat berhasil mengungkap 10 kasus aksi terorisme, diantaranya adalah bom masjid Polres Cirebon, bom buku di Jakarta, bom di ponpres Umar bin Khalab Bima, dan huan gereja Jethel Solo. Sedangkan dari sisi pertahanan, terutama dalam pemberdayaan industri pertahanan, peran industri pertahanan dalam negeri Polri semakin meningkat. Pada tahun 2011, akuisisi Alutsista TNI hasil produksi industri pertahanan dalam negeri mencapai 13.7%, dan akuisisi Alut Polri hasil produksi industri pertahanan dalam negeri mencapai 12.5 %. Diharapkan pada tahun 2012, akuisisinya meningkat menjadi 15.8 % untuk Alutsista TNI dan 14.3 % untuk Alut Polri. Upaya pemberdayaan industri pertahanan ini merupakan upaya menciptakan kemandirian alutsista TNI dan Alut Polri serta sebagai salah satu strategi pemenuhan minimum essential force (MEF).

Dalam rangka pembenahan kinerja penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, telah dilaksanakan penguatan fungsi Reserse dengan meningkatkan kompetensi penyidik, diantaranya melalui penyusunan dan revisi piranti lunak; penguatan dan pemberdayaan peran pengawas penyidikan; pelatihan

terprogram dan berkesinambungan guna mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien bagi penyidik; dan penanganan tindak pidana dilaksanakan secara transparan, akuntabel, proporsional dan profesional yang dilandasi aspek moral dan mentalitas para penyidik. Selanjutnya dalam rangka pelayanan prima, telah dilaksanakan transparansi pelayanan masyarakat sebagai salah satu program *quick wins* bidang Reserse. Terlaksananya transparansi pelayanan masyarakat tersebut didukung dengan tersedianya pedoman transparansi penyidikan berupa buku pedoman pengawasan penyidikan, buku sistem reaksi cepat Reserse, SOP sistem pengawasan penyidikan elektronik, SOP penerimaan dan penanganan komplain masyarakat, dan SOP penanganan dan pelayanan terhadap saksi pada fungsi Reskrim. Dari 296.146 kasus kriminalitas yang terjadi pada tahun 2011, telah diselesaikan sebanyak 156.018 kasus dengan *clearance rate* sebesar 52,38 persen. Seiring dengan peningkatan kinerja Polri sebagai hasil pelaksanaan reformasi birokrasi Polri gelombang II, diharapkan akan terjadi peningkatan penyelesaian kasus-kasus tindak pidana.

13. Bidang Perekonomian

Industri Pengolahan Non Migas. Sejak triwulan II/2011 kinerja industri pengolahan nonmigas membaik dan kembali menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam keseluruhan tahun 2011, industri pengolahan nonmigas tumbuh 6,8 persen dengan sumbangan yang makin besar pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan industri nonmigas yang tinggi pada tahun 2011 terutama didorong oleh subsektor industri logam dasar, besi, dan baja; makanan, minuman, dan minuman; tekstil, barang kulit, dan alas kaki; semen dan barang galian dari logam; serta alat angkut, mesin, dan peralatan. Kemajuan industri pengolahan ini membangkitkan optimisme akan bangkitnya kembali sektor industri sebagai penggerak perekonomian (reindustrialisasi) setelah sejak tahun 2006 industri pengolahan nonmigas tumbuh lebih lambat dari PDB.

Ketenagakerjaan. Selain itu, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada TKI dan calon TKI sampai tahun 2012 Pemerintah telah membangun infrastruktur dan aplikasi sistem informasi layanan pekerja migran/TKI (SIM TKI) dan uji coba pengintegrasian sistem informasi yang dimiliki oleh kementerian/lembaga terkait yang mendukung pelayanan dan perlindungan TKI telah dilaksanakan di tiga kabupaten/kota. Pusat layanan pengaduan TKI 24 jam (*hotline service*) yang terbentuk sejak 2011 telah beroperasi, meskipun mekanisme penyelesaian masalah yang diadakan masyarakat masih perlu disempurnakan. Namun demikian, jumlah TKI yang menghadapi masalah saat bekerja di luar negeri juga masih tinggi, sehingga tantangan pokok lainnya kedepan adalah meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sampai dengan tingkat kecamatan dan menyempurnakan mekanisme penyelesaian masalah.

14. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Kepariwisata. Pada tahun 2011, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai sebesar 7,65 juta orang atau meningkat 9,24 persen dibanding tahun 2010. Jumlah penerimaan devisa diperkirakan sebesar USD 8,55 miliar atau meningkat 12,51 persen dari penerimaan devisa

tahun 2010 yang sebesar USD 7,60 miliar. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnas) pada tahun 2011 mencapai 172,92 juta perjalanan (trivulan III), dengan pengeluaran wisnas sebesar Rp. 114,59 triliun. Sementara itu, daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global juga mengalami peningkatan. Berdasarkan *The Travel and Tourism Competitiveness Report 2011* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum (WEF)*, peringkat daya saing pariwisata Indonesia pada tahun 2011 meringkat menjadi posisi 74 dari 139 negara, dari peringkat 81 dari 138 negara pada tahun 2009.

Kepercayaan dan Keolahragaan. Pembangunan pemuda pada tahun 2011 telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, ditandai dengan:

1. Disahkannya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Gerakan Pramuka; dan
2. Peningkatan *character building* pemuda melalui fasilitasi:
 - a. peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan;
 - b. pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program;
 - c. pemuda leader kewirausahaan; dan
 - d. fasilitasi pemuda dalam pendidikan kepramukaan. Sementara itu, pembangunan olahraga pada tahun 2011 merupakan momentum bagi kebangkitan prestasi olahraga nasional yang ditandai dengan tercapainya peringkat ke-1 (Juara Umum) pada kejuaraan SEA Games XXVI tahun 2011 dan peringkat ke-2 pada kejuaraan ASEAN Paragames VI tahun 2011 di Indonesia.

Kehidupan Beragama. Kualitas kehidupan beragama di kalangan masyarakat sangatlah beragam. Sebagian besar kelompok masyarakat telah memiliki semangat dan kemauan kuat untuk memahami, menghayati, dan menjalankan kehidupan sesuai ajaran agamanya, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang belum menghayati dan mengamalkan ajaran agama, sehingga tidak dijumpai masih terdapat penyimpangan ajaran agama yang muncul ditengah-tengah masyarakat.

Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Pada tahun 2011 peningkatan kesetaraan gender di tingkat nasional dan daerah antara lain ditandai dengan: (i) 11 kementerian/lembaga di tingkat nasional telah melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan pada tahun 2012 PPRG tersebut akan diterapkan pada 28 K/L; (ii) 3 Pemerintah Daerah Provinsi telah melaksanakan PPRG atas inisiatif sendiri, dan pada tahun 2012 PPRG tersebut akan diterapkan pada 10 provinsi, dengan dukungan dana dekonsentrasi. Sedangkan untuk melayani perempuan dan anak korban kekerasan, telah tersedia antara lain: (i) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 24 provinsi dan 157 kabupaten/kota; (ii) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres yang tersebar di seluruh Indonesia; (iii) 22 Pusat Krisis Terpadu/PKT di Rumah Sakit Umum Daerah dan Vertikal, dan 43 Pusat

15. Pelaksanaan MP3EI

Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Polri; dan (iv) 33 Rumah Perlindungan *Trauma Center* (RPTC), 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan 1 Rumah Perlindungan Sosial Wanita).

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan oleh Presiden pada 27 Mei 2011, merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas dan berkelanjutan. Pelaksanaan MP3EI diharapkan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah di seluruh wilayah tanah air.

Dalam kurun waktu 15 tahun ke depan, akan dikembangkan klaster-klaster industri, baik untuk meningkatkan keterkaitan antara industri hulu dan hilir, maupun antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah penyangganya. Industri unggulan di berbagai wilayah dibangun untuk memperkuat struktur perekonomian domestik. Dalam kaitan itu ditawarkan insentif yang tepat kepada dunia usaha, dan dengan memperbaiki iklim investasi dan iklim usaha di daerah-daerah.

Tujuan dari pelaksanaan MP3EI adalah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang meliputi: sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi dan pengembangan kawasan strategis nasional.

Fokus dari 8 (delapan) program utama tersebut meliputi 22 (dua puluh dua) kegiatan utama yaitu: industri besi-baja, makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, perikanan, nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, karet, kakao, peternakan, perikanan, *food estate*, pariwisata, telematika, batubara, alutsista, minyak dan gas, serta pengembangan Metropolitan Jاهدetaهد dan pembangunan Kawasan Selat Sunda.

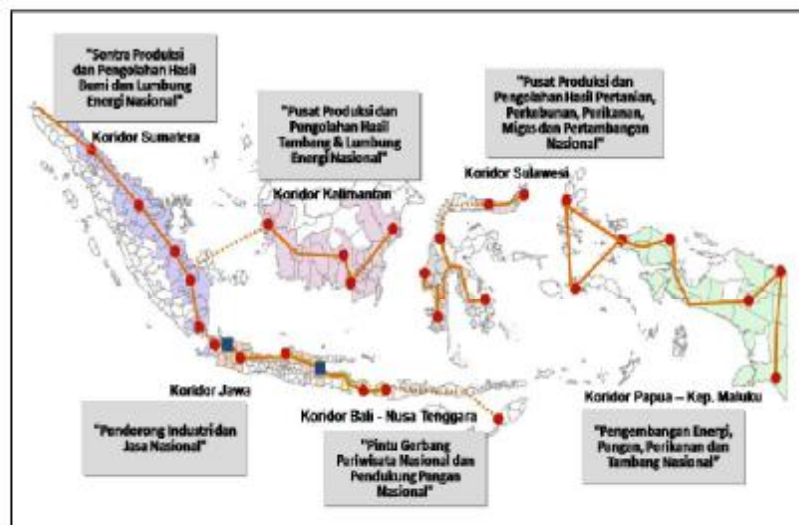
Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan terobosan (*breakthrough*) bukan *Business As Usual*, melalui pertama, pihak swasta akan diberikan peran penting dalam pengembangan MP3EI, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, Pemerintah akan melakukan deregulasi (*de-bottlenecking*) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi di 8 (delapan) program utama. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh Pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal.

Kedua, dalam rangka penguatan kebijakan, pemerintah akan melakukan penguatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga dan antara Kementerian/Lembaga dengan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan MP3EI, dunia usaha akan menjadi aktor utama dalam kegiatan investasi, produksi dan distribusi.

Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu:

1. Mengembangkan 6 (enam) koridor ekonomi Indonesia, yaitu: Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali – Nusa Tenggara, dan Koridor Papua – Kepulauan Maluku. Pembangunan 6 (enam) koridor ekonomi dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor dengan mengembangkan klaster industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berbasis sumber daya unggulan di setiap koridor ekonomi, sebagaimana tertuang dalam Gambar 2.2.
2. Memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional (*locally integrated, internationally connected*). Penguatan konektivitas nasional ditujukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, dan mengurangi biaya transaksi (*transaction cost*) logistik. Hal ini akan dilakukan melalui:
 - a. Penguatan konektivitas intra dan antar pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
 - b. Penguatan konektivitas antar koridor (pulau) untuk memperlancar pengumpulan dan pendistribusian (*collection and distribution*) bahan baku, bahan setengah jadi dan produk akhir dari dan keluar koridor (pulau) dan;
 - c. Penguatan konektivitas internasional sebagai pintu keluar dan masuk perdagangan dan pariwisata antar negara;

GAMBAR 2.2
PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMI INDONESIA



3. Mempercepat peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Elemen utama untuk percepatan kemampuan SDM dan IPTEK meliputi:
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan tinggi, kejuruan, dan pelatihan terutama untuk yang terkait dengan pengembangan program utama.
 - b. Meningkatkan kompetensi teknologi dan keterampilan/ keahlian tenaga kerja.
 - c. Meningkatkan kegiatan dan menibangun pusat-pusat pengembangan R & D di pusat-pusat pertumbuhan (KEK dan Klaster Industri) di setiap koridor ekonomi melalui kolaborasi antar Pemerintah, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi.
 - d. Mengembangkan institusi sistem inovasi nasional yang berkelanjutan.

MP3EI merupakan produk dari hasil kerja sama dan sinergian antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta, dan akademisi. Sementara itu, pendanaan kegiatan MP3EI dilakukan melalui keterpaduan pendanaan dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, serta pihak swasta dan masyarakat. Pelaksanaan MP3EI ini semaksimal mungkin memberikan peran yang besar kepada pelaku usaha dan sikontermitanya untuk dapat meningkatkan nilai tambah pemanfaatan sumberdaya dalam negeri. Agar pelaksanaan MP3EI berjalan efektif, anggaran yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, benar-benar diarahkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan MP3EI. BUMN diharapkan dapat menjadi pilar dan kontributor utama investasi dalam pelaksanaan MP3EI.

Dalam rangka mengawal secara intensif pelaksanaan MP3EI, Pemerintah telah membentuk Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI). Komite dimaksud dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Anggota komite tersebut terdiri dari unsur-unsur pemerintah pusat dan daerah, BUMN, akademisi/para pakar, dan dunia usaha. Untuk membantu pelaksanaan tugas KP3EI, telah dibentuk Tim Kerja yang terdiri dari 3 Tim Kerja Lintas Sektor yaitu Tim Kerja Regulasi, Tim Kerja Konektivitas, dan Tim Kerja SDM dan IPTEK, serta 6 Tim Kerja Koridor Ekonomi yaitu Tim Kerja KE Sumatera, Tim Kerja KI Jawa, Tim Kerja KI Kalimantan, Tim Kerja KE Sulawesi, Tim Kerja KE Bali-Nusa Tenggara, dan Tim Kerja KE Papua-Kepulauan Maluku.

Sejak MP3EI diluncurkan sampai dengan akhir Desember 2011, telah dilaksanakan *groundbreaking* sebanyak 94 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur dengan total nilai investasi Rp. 499,5 Triliun yang terdiri dari nilai investasi untuk sektor riil Rp. 357,8 Triliun (56 proyek) dan infrastruktur Rp. 141,7 (38 proyek), yang akan dibiayai oleh Pemerintah senilai Rp. 71,6 Triliun (24 proyek), BUMN senilai Rp. 131 Triliun (24 proyek), swasta senilai Rp. 168,6 Triliun (38 proyek) dan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS senilai Rp. 128,3 Triliun (8

proyek]. Selengkapnya rekapitulasi kegiatan MP3EI yang telah di *groundbreaking* hingga Desember 2011 terdapat dalam tabel 2.2.

TABEL 2.2.
REKAPITULASI KEGIATAN MP3EI YANG TELAH DIGROUND BREAKING
SAMPAI DENGAN AKHIR DESEMBER 2011

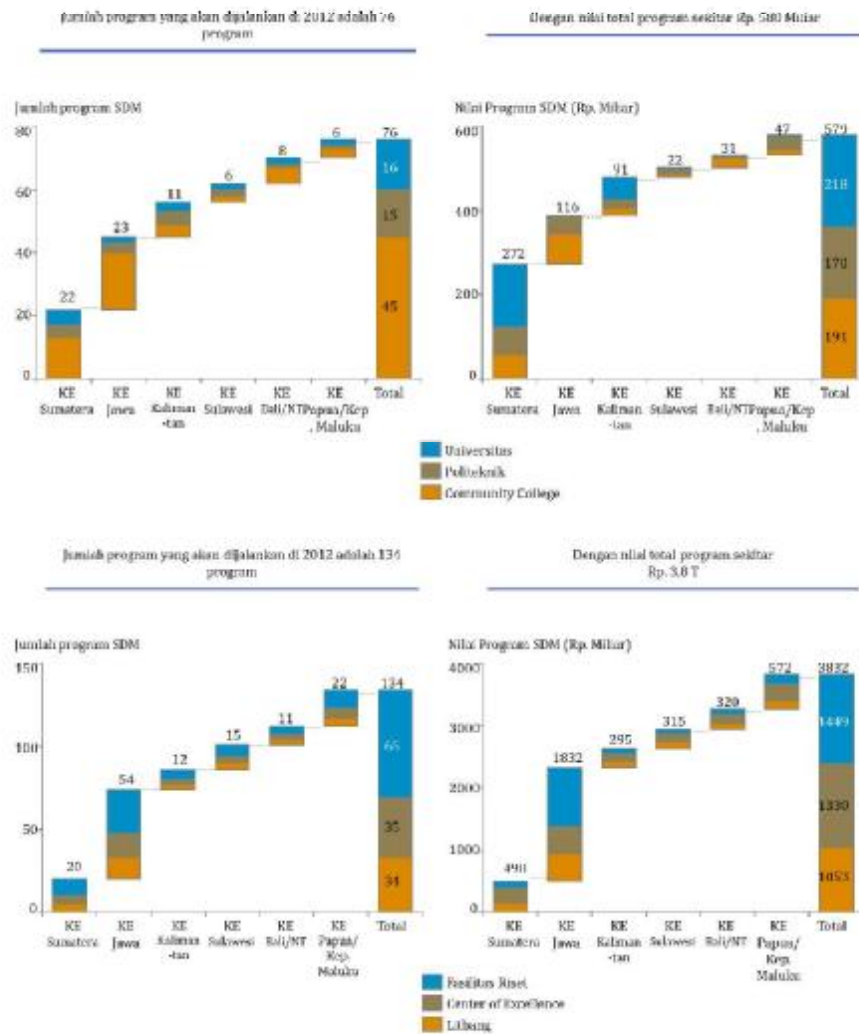
Koridor Ekonomi	Jumlah Proyek		Nilai Investasi		Total Proyek	Total Investasi (Rp. Miliar)
	Infrastruktur	Sektor Riil	Infrastruktur (Rp. Miliar)	Sektor Riil (Rp. Miliar)		
Sumatera	17	2	34.729	42.504	19	77.233
Jawa	8	5	61.673	71.357	13	133.031
Kaliamatan	3	12	1.586	14.644	15	16.230
Sulawesi	1	36	3400	142.357	37	145.757
Raih-NT	6	1	36.065	829	7	36.894
Papua-kep. Maluku	3	7	1.811	46.129	10	47.941
Total	38	56	141.265	352.762	94	494.027

Pada tahun 2012, telah direncanakan akan dilakukan *groundbreaking* terhadap 81 proyek yang terdiri dari investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur dengan nilai total Rp. 336,3 Triliun, yang akan dibiayai oleh Pemerintah Rp. 66,2 Triliun (15 proyek), BUMN Rp. 90,3 Triliun (20 proyek), Swasta Rp. 301,6 Triliun (38 proyek), campuran Rp. 78,2 Triliun (11 proyek).

Selain pembangunan infrastruktur, pada tahun 2012 telah direncanakan akan dilakukan sejumlah kegiatan untuk mendukung penguatan SDM dan IPTEK di setiap koridor ekonomi. Terkait dengan penguatan SDM telah direncanakan sebanyak 76 program dengan nilai total investasi Rp. 580 Miliar. Sedangkan untuk pengembangan IPTEK, direncanakan 134 program dengan nilai total investasi Rp. 3,8 Triliun. Selengkapnya jumlah dan Nilai Program Bidang SDM IPTEK di setiap Koridor Ekonomi terdapat dalam gambar 2.3.

Selain itu, Pemerintah akan terus melakukan sejumlah perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, antara lain melalui *debottlenecking* regulasi (*deregulasi*) terhadap peraturan yang dinilai menjadi penghambat bagi pelaksanaan investasi. Sejak MP3EI diluncurkan, Pemerintah telah selesai melakukan revisi terhadap 28 regulasi dan saat ini sedang menyelesaikan 18 regulasi lainnya. Upaya-upaya *debottlenecking* di atas tentunya tidak akan berhasil tanpa ada dukungan dari pemerintah daerah terutama untuk melakukan upaya *debottlenecking* guna memperbaiki iklim investasi dan iklim usaha di daerah masing-masing. Hal ini juga terkait untuk memastikan penetapan peraturan-peraturan daerah yang dapat mendukung terciptanya iklim investasi dan kepastian berusaha.

GAMBAR 2.3
JUMLAH DAN NILAI PROGRAM BIDANG SDM IPTEK
DI SETIAP KORIDOR EKONOMI



B. MASALAH DAN TANTANGAN

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pada aspek penataan struktur birokrasi, masalah mendasar yang dihadapi diantaranya adalah belum sepenuhnya tertata kelembagaan birokrasi pemerintah yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi, tepat ukuran dan posturnya, kewenangan dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu, masih terdapat kecenderungan bahwa pembentukan organisasi/instansi baru tanpa didasarkan pada hasil evaluasi dan pengkajian (audit organisasi) secara mendalam. Tantangannya ke depan adalah penggantian dan perubahan suatu organisasi birokrasi pemerintah harus diselarasikan dengan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien, serta mengantisipasi dinamika lingkungan strategisnya (daerah, nasional dan global).

Dalam penataan otonomi daerah, permasalahan yang dihadapi adalah masih banyak usulan pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB), walaupun pemerintah telah melakukan moratorium DOB. Sementara itu, permasalahan terkait kapasitas keuangan pemerintah daerah yaitu (i) kualitas belanja APBD dan pengeloaan anggaran yang masih rendah; (ii) penguraian dana perimbangan yang belum efektif dan efisien seperti penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum optimal di beberapa daerah dan pelaksanaan DAK yang belum sesuai dengan petunjuk teknis (juktis), keterlambatan informasi pengalokasian DAK ke daerah, maupun proses administrasi seperti masalah tender pekerjaan, kontrak; (c) pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal, salah satunya ditunjukkan oleh proporsi belanja pegawai yang relatif besar. Tantangan ke depan, diperlukan komitmen bersama untuk melakukan moratorium DOB dan peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Pada aspek SDM Aparatur, permasalahan yang dihadapi antara lain belum tertatanya secara baik jumlah, distribusi dan kualitas PNS di instansi pemerintah pusat dan daerah. Permasalahan lainnya, adalah sistem seleksi/rekrutmen belum terstandarisasi dengan baik; profesionalisme, integritas dan netralitas PNS perlu ditingkatkan; dan kinerja pegawai harus diarahkan pada peningkatan citra institusi. Atas hal tersebut, penyempurnaan manajemen kepegawaian harus terus ditingkatkan agar tercipta PNS sebagai aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional dan melayani.

Terkait regulasi, permasalahannya yaitu dalam proses percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, masih ditemukannya Perda yang bermasalah yang membutuhkan pengkajian dan tindak lanjut. Tantangannya adalah diperlukan peningkatan kualitas pembentukan regulasi baru sehingga terwujud sistem hukum yang sederhana dan tertib. Reformasi regulasi perlu diterapkan di semua tingkat regulasi baik di pusat maupun daerah.

Pelaksanaan sinergi pusat dan daerah, permasalahan yang dihadapi antara lain belum terintegrasinya SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; penerapan SPM yang belum diimbangi dengan

kemampuan aparat pemerintah daerah (pemda) dan keuangan daerah; serta implementasi SIM yang belum sampai pada tahap *costing*. Sedangkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, menghadapi masalah yang berkaitan dengan kompetensi SDM pelaksana; kurangnya sosialisasi standar dan prosedur pelayanan sehingga masyarakat belum mengerti hak dan kewajibannya secara baik; dan penanganan pengaduan yang kurang responsif. Integritas dan budaya melayani, masih harus ditingkatkan. Sehingga menjadi tantangan ke depan, untuk memprioritaskan penyelesaian permasalahan tersebut.

2. Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang terjangkau, berkualitas, relevan dan efisien, beberapa permasalahan yang masih harus diselesaikan antara lain: (i) masih belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan; (ii) masih rendahnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan; (iii) masih rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru; (iv) masih terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan; (v) belum optimalnya pendidikan karakter bangsa; (vi) belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan; dan (vii) belum terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan.

Tantangan dalam peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, antara lain: (i) meningkatkan pemerataan akses pendidikan di semua jenjang, termasuk akses terhadap pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; (ii) meningkatkan tingkat keberaksaraan; (iii) meningkatkan kesiapan anak bersekolah; (iv) meningkatkan kemampuan kognitif, karakter, dan *soft-skill* lulusan; (v) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; menanggapi sesuai dengan kebutuhan pembangunan; (vi) meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi termasuk kualitas penelitiannya untuk mendukung kebutuhan pembangunan; dan (vii) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Tantangan pada aspek ketenagaan serta sarana dan prasarana pendidikan, antara lain: (i) meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru; (ii) meningkatkan pemerataan distribusi guru; (iii) mempercepat penuntasan rehabilitasi gedung sekolah dan ruang kelas yang rusak; (iv) meningkatkan ketersediaan bahan ajar yang murah dan berkualitas; (v) meningkatkan ketersediaan prasarana peningkatan mutu seperti laboratorium dan perpustakaan; serta (vi) meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan.

Sedangkan tantangan dalam mewujudkan manajemen, tatakelola, serta pembiayaan pendidikan yang berkeadilan, antara lain: (i) meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan; (ii) melakukan penyelarasan dalam penerapan otonomi perguruan tinggi; (iii) meningkatkan kemitraan publik dan swasta dalam sektor pendidikan; dan (iv) memantapkan alokasi dan mekanisme penyaluran dana pendidikan yang efisien, efektif, dan akuntabel.

3. Kesehatan

Beberapa permasalahan ke depan yang memerlukan perhatian di bidang kesehatan, antara lain: (i) masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas yang ditandai dengan masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak dan status gizi masyarakat; (ii) belum optimalnya upaya pengendalian penyakit yang ditandai dengan lingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan; (iii) masih rendahnya profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan; (iv) masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan pekerja sektor informal; (v) masih rendahnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat, mutu obat dan makanan, alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri; dan (vi) masih rendah dan tidak signifikannya cakupan pemakaian kontrasepsi. Kesemuanya ini merupakan tantangan dalam tahun 2013 untuk dapat dilaksi.

Permasalahan yang dihadapi pembangunan KB antara lain:

1. Belum meratanya akses pelayanan KB yang ditandai dengan:
 - a. masih rendah dan tidak signifikannya cakupan pemakaian kontrasepsi (CPR), serta masih lingginya disparitas CPR antar-provinsi, antar-wilayah desa-kota, dan antar-kelompok sosial ekonomi;
 - b. masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak/belum terpenuhi (unmet need) dengan disparitas yang tinggi antarprovinsi, antarwilayah desa-kota, dan antar-kelompok sosial ekonomi; dan
 - c. masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB;
2. Rendahnya kualitas pelayanan KB yang ditandai dengan:
 - a. masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB;
 - b. kurang efektifnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang/KKJP; dan
 - c. masih tingginya angka drop-out (termasuk kegagalan dan komplikasi) dalam pemakaian alat kontrasepsi;
3. Masih lemahnya pelaksanaan advokasi serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang ditandai oleh masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan pasangan usia subur tentang KB dan kesehatan reproduksi;
4. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketenagaan program KKB;
5. Masih lemahnya pembinaan dan pemberdayaan keluarga dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kesertaan ber-KB, serta meningkatkan kesertaan KB mandiri.

4. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam upaya mencapai target penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2013, yaitu sebesar 9,5-10,5 persen, masalah pokok yang dihadapi adalah melambatnya penurunan kemiskinan secara nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan dan yang sangat rentan untuk jatuh ke dalam garis kemiskinan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan pada tahun 2013 antara lain masih tingginya disparitas jumlah dan persentase penduduk miskin antara daerah Jawa/Bali dengan daerah lainnya di Indonesia serta masih tingginya disparitas tingkat kemiskinan antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

Permasalahan lainnya adalah ketidaktepatan penetapan sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan. Hal ini disebabkan antara lain adanya perbedaan data yang digunakan sebagai dasar alokasi dengan kondisi lapangan yang cukup dinamis, terjadi karena kelahiran, perpindahan/mobilitas, kematian, dan kondisi ekonomi. Keterbatasan jangkauan atau cakupan manfaat bantuan program pemerintah juga masih menjadi masalah. Hal ini disebabkan kuantitas atau alokasi dana yang kurang memadai dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat miskin. Keterlambatan penyaluran dana bantuan seperti pada program Jamkesmas, PKH, dan Bantuan Siswa Miskin juga menyebabkan masyarakat miskin tidak dapat memanfaatkan bantuan pada saat dibutuhkan.

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah adalah semakin berkurangnya jumlah Tanah Obyek Reforma Agraria yang berada tanah terlantar dan kawasan hutan. Tantangan yang dihadapi pada tahun 2013 terutama adalah upaya inventarisasi dan identifikasi tanah terlantar untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya. Untuk kawasan hutan, tantangannya adalah perlunya koordinasi yang intensif dengan pihak Kementerian Kehutanan untuk membahas mengenai perubahan fungsi kawasan hutan menjadi non hutan.

Untuk itu pada tahun 2013 pembangunan diharapkan dapat: (i) mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif; (ii) memperluas kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia produktif; (iii) memperluas usaha *off farm* yang memberikan peluang diversifikasi usaha dan peningkatan pendapatan penduduk perdesaan; serta (iv) memperluas jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin terutama di daerah perbatasan, terpencil, dan tertinggal.

Berkaitan dengan telah dimulainya pelaksanaan kegiatan pada Kluster IV Program Pro-Rakyat di tahun 2012, beberapa permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2013 antara lain adalah: (i) belum adanya kesesuaian antara sisi permintaan (kelompok sasaran program) dan sisi penawaran (fasilitas yang akan dibangun); (ii) belum sepenuhnya penentuan lokasi Program Rumah Murah dan Sangat Murah untuk masyarakat nelayan dan miskin perkotaan, serta (iii) belum adanya keterpaduan dan sinergi antara Program Rumah Murah dan Sangat Murah

dengan program terkait lainnya, seperti penyediaan PSU (listrik, air minum, sanitasi, jalan, sarana sosial, sarana ekonomi), kredit mikro perumahan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5. Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan ke depan masih akan dihadapkan kepada berbagai permasalahan dan tantangan yang terkait dengan: (i) ketersediaan lahan dan air irigasi yang semakin terbatas untuk pengembangan komoditas pangan dan perikanan, (ii) terjadinya *overfishing*, (iii) sistem penyediaan input produksi seperti pupuk, induk dan benih, bibit ternak/ikan, serta pakan, yang masih perlu disempurnakan, (iv) dukungan infrastruktur pertanian, perikanan dan kelautan yang relatif masih terbatas dan terkendala dengan kondisi iklim ekstrim, (v) masih lemahnya penerapan dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan pertanian dan perikanan dalam mendukung peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah produk, (vi) aksesibilitas petani terhadap sumber pembiayaan masih lemah dan cenderung terkendala dengan persyaratan administratif, (vii) dampak perubahan iklim yang mempengaruhi budidaya dan hasil produksi, dan (viii) peran penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan yang masih rendah terhadap upaya diseminasi dan peningkatan produksi.

Permasalahan dan tantangan selanjutnya adalah: (i) distribusi bahan pangan antar wilayah yang terkendala dengan kondisi geografis dan iklim, (ii) aksesibilitas masyarakat miskin terhadap bahan pangan sangat rentan dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan, dan (iii) kerentanan penduduk terhadap rawan pangan akibat ancaman kegagalan produksi dan terhambatnya distribusi, dan (iv) proses diversifikasi pangan yang berjalan lambat, yang diantaranya ditunjukkan masih tingginya konsumsi beras penduduk per kapita serta rendahnya tingkat konsumsi bahan pangan sumber protein.

6. Infrastruktur

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan dukungan infrastruktur diantaranya adalah sebagai berikut: Permasalahan dalam hal pengendalian banjir adalah semakin meningkatnya resiko kejadian banjir/rob di daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman dan industri. Pada daerah perkotaan, banjir umumnya disebabkan oleh hal berikut : (i) berkurangnya kapasitas pengaliran sistem drainase makro dan mikro, baik akibat sampah, sedimentasi maupun kenaikan muka air laut; (ii) perubahan tata guna lahan sehingga meningkatkan debit pengaliran air permukaan (*run-off*) yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas saluran; (iii) buruknya sistem drainase mikro yang tidak terintegrasi dengan sistem drainase makro; (iv) adanya *land subsidence*, terutama di daerah-daerah pantai dengan volume pengambilan air tanah yang cukup tinggi seperti DKI Jakarta dan Semarang.

Pada tahun 2013 penyediaan air baku menghadapi beberapa permasalahan seperti: (i) belum optimalnya sinkronisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan pembangunan infrastruktur air baku di Indonesia yang tercermin dari minimnya akses masyarakat terhadap sistem air minum-air baku yang hanya sekitar 9 persen (Susenas 2010), (ii) tingginya penggunaan

air tanah di daerah-daerah pusat industri di Pulau Jawa terutama di DKI, Semarang, Ciligor dan Bandung akibat minimnya penyediaan air baku yang bandal, dan (iii) masih dijumpai beberapa "an.spr." kekeringan perikanan yaitu di Jawa Barat, NAD, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, NTB dan NTT.

Terkait dengan pembangunan transportasi, masih dihadapkan pada permasalahan : (i) masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi dalam menunjang konektivitas dan sistem logistik nasional, khususnya di wilayah terpencil, perbatasan, perdataman dan wilayah tertinggal; (ii) masih rendahnya tingkat keselamatan transportasi nasional; (iii) keterlambatan upaya percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur akibat pembebasan lahan yang berlarat; serta (iv) tingginya tingkat kemacetan dan buruknya manajemen transportasi di wilayah perkotaan.

Dari sisi perumahan, upaya tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Beberapa permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi dalam pembangunan perumahan antara lain adalah: (i) terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap penguasaan dan legalitas lahan; (ii) terbatasnya akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan; (iii) belum optimal dan tersedianya selengkap-lengkapnya penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman; (iv) belum mantapnya pasar primer dan pembiayaan sekunder perumahan; (v) masih rendah efisiensi dalam pembangunan perumahan; serta (vi) belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perumahan dan permukiman.

Permasalahan sektor komunikasi dan informatika tahun 2013 di antaranya adalah (i) rusak dan usangnya sebagian besar infrastruktur yang dimiliki oleh Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebagai Lembaga Penyiaran Publik sehingga jangkauan dan kualitas siaran menurun dan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi; (ii) terbatasnya infrastruktur *broadband* dan belum terahungnya pulau Maluku dan Papua dalam jaringan *backbone* serat optik nasional; (iii) terbatasnya ketersediaan spektrum frekuensi radio yang saat ini merupakan moda utama bagi penyediaan layanan telekomunikasi dan penyiaran; (iv) masih rendahnya kemampuan masyarakat di bidang TIK (e-literasi); (v) masih rendahnya *e leadership*, kesadaratan, dan keterbukaan instansi pemerintah untuk saling berbagi data/informasi sehingga menyulitkan penguatan sistem *back office* pemerintah yang terpadu termasuk pertukaran dan validasi data; dan (vi) masih rentannya dunia maya nasional terhadap kejahatan dan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Permasalahan dan tantangan terkait dengan penyediaan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) antara lain: (i) masih adanya keengganan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk memasukkan anggaran penyiapan dan transaksi proyek KPS kedalam pagu anggarannya masing-masing, tetapi masih mengharapkan on-top dari pagu anggaran yang sudah ada atau dari PHLN maupun badan usaha lain seperti melalui Bantuan PDF IRSDP Bappenas dan PT. Sarana Multi Infrastruktur; (ii) masih rendahnya komitmen Penanggung Jawab proyek Kerjasama (PJK) dalam melakukan KPS dimana dalam perkembangan

penyiapan dan transaksi, ada beberapa PPK yang mengalihkan Proyek KPS-nya untuk dikerjakan Pemerintah melalui APBN dan PHN serta melalui penugasan kepada BUMN; (iii) proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan melalui skema KPS merupakan proyek yang bukan prioritas sehingga proyek tersebut memiliki kelayakan keuangan yang rendah; serta (iv) masih banyak PPK potensial yang belum tersosialisasikan tentang KPS sehingga pemahaman mengenai pelaksanaan proyek KPS masih sangat rendah.

Permasalahan yang dihadapi oleh APN dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Prioritas 6 adalah: (i) belum semua kabupaten/kota menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); (ii) masih rendahnya minat masyarakat untuk melakukan inventarisasi P4T.

Mengingat pencapaian kinerja Prioritas Bidang Penyelenggaraan Peraturan Ruang pada Tahun 2011 dan awal Tahun 2012, permasalahan yang paling mendesak untuk ditangani pada Tahun 2012 adalah: (i) belum diketapkannya seluruh peraturan perundangan pelaksanaan UU 26/2007 termasuk Rencana Tata Ruang Pulau, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan MP3EI; (ii) belum mantapnya keambagaaan peraturan ruang yang diharapkan dapat menyerasikan rencana pembangunan, termasuk di dalamnya materi MP3EI 2011-2025, dengan Rencana Tata Ruang.

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Permasalahan dan tantangan pokok pada tahun 2013 untuk iklim investasi dan iklim usaha terbagi ke dalam dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Permasalahan dan tantangan dari sisi eksternal terutama adalah (i) kondisi perekonomian dunia tahun 2013 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2012, namun masih akan diliputi dengan resiko. Hal ini terutama karena proses penanganan krisis hutang di negara Uni Eropa terutama Yunani, Italia, dan Spanyol masih belum menunjukkan prospek yang lebih baik; (ii) Permintaan dunia diperkirakan akan lebih baik dari tahun 2012, tetapi belum sepenuhnya pulih. Hal ini menyebabkan aktivitas produksi dan harga komoditas/produk diperkirakan belum pulih, bahkan relatif belum stabil; serta (iii) Harga minyak dunia yang cenderung naik karena konflik di Iran.

Sementara itu, tantangan utama internal yang pertama adalah rendahnya peringkat Indonesia dalam survei *Doing Business* dari IFC Bank Dunia dan peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) yang pada tahun 2012 menurun menjadi 129 dari yang sebelumnya berada pada posisi 126. Beberapa komponen yang menyebabkan rendahnya peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) adalah prosedur memulai usaha (*starting a business*), memperoleh listrik (*getting electricity*), memperoleh kredit (*getting credit*), dan *enforcing contract* (Tabel 2.3).

TABEL 2.3
PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA

Komponen Kemudahan Berusaha	Peringkat	
	2011	2012
TOTAL	126	129
Mulai Usaha	156	155
Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan	71	71
Pendaftaran Properti	96	89
Mempoleh Kredit	116	126
Perindungan Terhadap Investor	41	46
Pendanaan Pajak	180	131
Pendanaan Usaha Ratas	78	79
Pencetakan dan kewajiban administratif	156	156
Pencetakan Perseorangan	148	146
Mempoleh Lisensi	158	161

Sumber: IFC, Kuala Lumpur

Kemudahan, tantangan kedua adalah masih tingginya biaya logistik antar wilayah di Indonesia yang menjadi salah satu faktor inefisiensi ekonomi, sehingga ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang memadai akan terus menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi dan ditingkatkan; terutama melalui program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3IE).

Ketiga adalah kondisi pasar kerja yang belum menunjukkan perbaikan yang diindikasikan oleh tingginya biaya redundansi, kekakuan lapangan kerja, penerimaan dan pemutusan kerja, fleksibilitas penentuan upah dan hubungan karyawan pengusaha. Daya saing efisien pasar tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4
PERINGKAT EFISIENSI PASAR TENAGA KERJA

No	Indikator Indeks Daya Saing	2008	2009	2010	2011
1	Biaya redundansi	117	119	127	131
2	Kekakuan lapangan kerja (PHK, kontrak kerja, outsourcing)	87	82	100	104
3	Praktek penerimaan dan pemutusan kerja	19	34	36	51
4	Fleksibilitas penentuan upah	79	92	98	113
5	Kerjasama hubungan karyawan pengusaha	19	42	47	68

Sumber: Indeks Daya Saing dalam *Global Competitiveness Report, World Economic Forum (142 negara)*

8. Energi

Masalah dan tantangan pembangunan di bidang energi pada tahun 2013 bermuara kepada empat isu strategis yaitu (i) peningkatan ketersediaan energi; (ii) diversifikasi energi; (iii) efisiensi penggunaan energi; dan (iv) pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Ketersediaan energi masih sangat tergantung kepada produksi minyak bumi yang telah digunakan sebagai sumber daya energi sebesar 49,7 persen dalam bauran energi. Masalahnya adalah adanya kecenderungan produksi minyak bumi terus menurun dalam lima tahun terakhir ini. Bila pada tahun 2006, produksi minyak bumi dapat mencapai sekitar 1 juta BOPD maka pada tahun 2011 hanya mampu diproduksi sebesar 902 ribu BOPD. Selain itu, kapasitas kilang dalam negeri yang saat ini sebesar 1.157 ribu BOPD, dengan kemampuan produksi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 704 ribu BOPD belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri yang diperkirakan mencapai 1.194 ribu BOPD. Kondisi ini menyebabkan kebijakan impor BBM tidak dapat dihindari guna memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Ketergantungan akan impor BBM akan berpotensi mengancam ketersediaan energi mengingat rata-rata harga minyak (Indonesian Crude Price/ICP) cenderung berfluktuasi dan meningkat tinggi.

Potensi diversifikasi energi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan panas bumi sebagai sumber daya energi. Potensi cadangan gas bumi terbukti sebesar 104,7 triliun kaki kubik dan energi panas bumi sebesar 29.177 MWe. Tantangannya adalah menetapkan harga gas bumi yang kompetitif dan menarik bagi dunia usaha. Sedangkan untuk ketersediaan infrastruktur, tantangannya adalah adanya jaminan kepastian pasokan gas bumi dan pemberian insentif bagi dunia usaha untuk berinvestasi.

Sementara itu, potensi panas bumi masih menghadapi masalah utama dalam hal terjadinya konflik lahan. Saat ini, sesuai UU No. 27/2003 pemanfaatan panas bumi dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan sehingga kegiatannya dapat dilakukan apabila telah memperoleh izin usaha pertambangan. Izin usaha sangat sulit untuk didapatkan karena kegiatan pertambangan berada di dalam kawasan hutan konservasi yang menyimpan sekitar 70 persen potensi panas bumi. Daerah yang memiliki potensi panas bumi yang berpotensi terjadi tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan mencapai sekitar 42 persen atau setara 12.254 MW.

Permasalahan dan tantangan berikutnya adalah meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Indikator efisiensi penggunaan energi dapat dilihat dari seberapa besar angka elastisitas dan intensitas energi. Saat ini, elastisitas

energi masih tinggi yaitu sebesar 1,6. Artinya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, maka konsumsi energi Indonesia harus naik rata-rata 1,6 persen. Sedangkan intensitas energi sebesar 565 TOE (ton oil equivalent) per US\$ 1 juta. Artinya, untuk menghasilkan nilai tambah (GDP) US\$ 1 juta, Indonesia membutuhkan energi sebesar 565 TOE. Angka elastisitas dan intensitas energi ini masih relatif tinggi, bila

dibandingkan dengan negara ASEAN, misalnya elastisitas energi Thailand 1,16 dan intensitas energi Malaysia 439 TOE/juta US\$.

Potensi energi baru dan terbarukan (EBT) belum secara optimal dapat dimanfaatkan. Bauran energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan pada tahun 2011 mencapai sekitar 5,7 persen. Panas bumi dan tenaga air relatif lebih besar peranannya dibandingkan bioenergi, tenaga surya, tenaga angin, dan mikro hidro. Biaya investasi awal yang tinggi menjadi kendala utama dalam pengembangan EBT. Teknologi yang digunakan masih relatif mahal dan belum berkembang secara komersial di Indonesia. Di samping itu, hambatan lainnya adalah pasar EBT masih terbatas dan harganya belum dapat bersaing dengan harga energi fosil yang masih mendapatkan subsidi.

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Beberapa permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi dalam upaya penanggulangan perubahan iklim, antara lain adalah: (i) kurang lengkapnya ketersediaan data dan informasi sebagai basis penghitungan status tingkat emisi GRK; (ii) rendahnya kesiapan institusi dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia di daerah dalam menyusun dan melaksanakan rencana aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca; (iii) kurangnya kebijakan dan peraturan yang berpihak pada pelaksana kegiatan di bidang perubahan iklim; (iv) terbatasnya sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan perangaran dampak perubahan iklim; (v) belum terciptanya sistem dan mekanisme insentif/disinsentif, serta (vi) lingkungannya luas, lahan kritis di DAS prioritas. Dari aspek pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, masalah dan tantangan pokok yang dihadapi adalah: (i) kecenderungan meningkatnya pencemaran lingkungan; (ii) meningkatnya luas wilayah yang tercemar dan rusak berat; (iii) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola serta masih rendahnya kesadaran masyarakat; (iv) belum selesainya tata batas seluruh kawasan hutan; (v) tidak adanya KPH yang operasional terutama pada kawasan hutan yang *open access*; (vi) rendahnya jumlah dan kapasitas penyuluh kehutanan; (vii) belum terpadunya kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati dan potensi timbulnya konflik antar daerah dalam pemanfaatan dan pengelolannya, bertambahnya lahan kritis dan kerusakan hutan; (viii) perlunya peningkatan koordinasi dalam pengelolaan hutan dan kawasan konservasi; (ix) pengawasan pemantauan ruang; serta (x) pengelolaan terumbu karang, lamun dan *mangrove* yang perlu terus ditingkatkan.

Masalah dan tantangan pokok dalam sistem peringatan dini adalah tetap terkelolanya Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS), Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS), serta Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) sehingga data dan informasi yang diperoleh dapat segera disampaikan kepada masyarakat secepatnya. Selanjutnya, dari sisi penanggulangan bencana, permasalahan dan tantangan pada tahun 2013, berdasarkan hasil pencapaian pembangunan sebelumnya, adalah sebagai berikut: (i) kapasitas kelembagaan bencana daerah sampai tingkat kabupaten/kota, masih perlu ditingkatkan, terutama ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat;

(ii) peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana yang sinergi antara pusat dan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan, (iii) peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan Satuan Reaksi Cepat Penganggulangan Bencana (SRC-23) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai dan (iv) penyesuaian dan keberlanjutan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana Kepulauan Mentawai dan erupsi Gunung Merapi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.

10. Daerah Tertinggal, Terluar, dan Pasca Konflik

Tantangan pembangunan ke depan adalah melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik. Namun demikian upaya ini tidak mudah karena berbagai permasalahan yang dihadapi. Salah satu diantaranya adalah rendahnya kinerja perekonomian daerah dan rendahnya kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari rendahnya akses terhadap pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan air bersih.

Permasalahan dan tantangan pokok dalam pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan antara lain:

1. Masih tingginya kondisi keterisolasian wilayah kecamatan terluar perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) berbasis lokasi prioritas yang menghambat aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan orang, serta pertumbuhan perekonomian lokal;
2. Belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas koordinasi kementerian/lembaga dalam rangka pengelolaan batas wilayah negara dan pengembangan kawasan perbatasan;
3. Minimnya akses keterjangkauan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT, sehingga kecenderungan masyarakat perbatasan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang lebih memadai diperoleh di negara tetangga;
4. Belum terselesaikannya beberapa segmen batas wilayah dalam rangka penetapan batas wilayah negara memerlukan koordinasi antar tim perundingan batas. Terkait dengan pelaksanaan perundingan perbatasan dengan Negara tetangga yang berbatasan langsung, tantangan yang dihadapi adalah masih adanya perbedaan pandangan dan kepentingan dalam penggunaan dasar penetapan perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan, serta diantara tim perundingan batas sendiri juga memiliki data dan persepsi yang belum sama;
5. Selain itu, belum memadainya pospengamanan perbatasan guna mendukung kekuatan pemeliharaan batas wilayah negara karena rata-rata jarak antara satu pos dengan pos lain masih berkisar 50 km, demikian juga dengan pos pulau terdepan (terluar) baru terbangun di 12 pulau saat ini. Kualitas pelayanan kepabeanan, karantina, keimigrasian, dan keamanan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar masih cenderung rendah sehingga masih terjadi kegiatan ilegal lintas batas antar negara.

Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Permasalahan krusial yang masih dihadapi terutama adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi, pelayanan pendidikan dan kesehatan belum memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan SUM. Permasalahan ini semakin komplek dengan adanya kendala keterisolasian wilayah dan masyarakat yang tinggal di kampung-kampung yang sulit menjangkau pusat-pusat pelayanan kesehatan dan sekolah. Keterbatasan SDM untuk melakukan kegiatan ekonomi masyarakat karena minimnya pendampingan, sehingga kegiatan petani dan nelayan lebih cenderung subsisten dan kegiatan ekonomi semakin terdesak oleh masyarakat pendatang.

TABEL 2.5
TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT

Area	2007	2008	2009	2010	2011 (Sept)
Papua (%)	40,8	41,1	39,5	36,8	31,2
Papua Barat (%)	39,3	35,1	35,7	34,5	28,5
Nasional	19,6	17,5	14,1	13,1	11,7

Dalam tabel 2.5 di atas, terlihat bahwa Persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami kecenderungan penurunan setiap tahunnya, namun dibandingkan rata-rata nasional masih menjadi dua provinsi paling tinggi persentase penduduk miskinnya dibandingkan 31 provinsi lain.

11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, meliputi : (i) memperkuat karakter dan jati diri bangsa; (ii) meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya; (iii) meningkatkan pengelolaan museum dan perpustakaan sebagai edukasi, informasi, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan; (iv) meningkatkan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana seni budaya; (v) meningkatkan kemampuan sumber daya penelitian; (vi) meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya serta perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HKI); dan (vii) meningkatkan kapasitas dan kreativitas sumber daya pembangunan iptek dan kepemudaan.

12. Politik, Hukum dan Keamanan

Penegakan Hukum. Peran dari kementerian Hukum dan HAM sebagai Kementerian yang bertanggungjawab terhadap masalah peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dengan telah ditetapkannya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini tentunya juga harus didukung dengan kemampuan SDM yang menguasai ilmu perundang-undangan (*legislative drafter*) tidak hanya di level kementerian akan tetapi juga perlu juga peningkatan SDM di tingkat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, sehingga dalam rangka

melakukan konsultasi terkait dengan penyusunan peraturan daerah maka pemerintah daerah tidak harus langsung ke Kementerian Hukum dan HAM akan tetapi dapat berkonsultasi dengan Kantor wilayah yang ada pada setiap ibu kota provinsi.

Pembahasan suatu rancangan undang-undang sangat terkait dengan kesepakatan dengan DPR meskipun beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan sudah masuk dalam Prolegnas 2012 namun tantangan yang cukup besar adalah untuk dapat menyelesaikan beberapa RUU tersebut dalam jangka waktu satu tahun mengingat materi dari RUU KUHP dan RUU KUHLAP cukup berat.

Selain dibidang legislasi, tantangan dalam memberantas TPK juga akan semakin besar. Hal tersebut ditandai masih banyaknya perkara korupsi yang ditoris rendah (berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2010 sebanyak 60,68% kasus korupsi ditukum 1-2 tahun), penanganan kasus korupsi yang berbelit-belit oleh aparat penegak hukum serta masih kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum yang menyebabkan perambatan dalam penanganan kasus korupsi diantara lembaga penegak hukum masih berbeda-beda. Selain itu fungsi koordinasi dan supervisi KPK juga masih belum maksimal dilaksanakan sehingga sampai dengan saat ini belum ada kerjasama yang efektif diantara lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi.

Penegakan hukum secara tegas dalam penanggulangan terorisme nampaknya belum dapat menyurutkan aktivitas terorisme. Aksi-aksi teror dikawatirkan masih akan terjadi dan akan menjadi salah satu kendala dalam persiapan dan pelaksanaan pemilu 2014. Pelaku tidak lagi hanya berasal dari kalangan pendidikan keagamaan atau keterbatasan ekonomi, tetapi banyak tersangka yang berasal dari kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu. Adanya gerakan atau ormas keagamaan yang bersifat eksklusif dan radikal memberikan ruang untuk perekrutan pelaku teror baru.

Pertahanan dan Keamanan. Selanjutnya, hasil industri pertahanan dalam negeri secara gradual memang semakin mewarnai variasi dan jumlah Alutsista TNI dan Alutsista Polri. Secara konsep dan desain, SDM industri pertahanan Indonesia tidak kalah dengan SDM asing. Namun ketika memasuki tahap produksi, besarnya komponen impor masih menjadi kendala dalam menghasilkan produk yang berdaya saing. Di samping itu, pasar dalam negeri yang masih sangat terbatas (*by order*), menjadikan hasil industri pertahanan dalam negeri sulit mencapai skala ekonomi.

13. Bidang Perekonomian

Industri pengolahan non migas. Meskipun perekonomian mengalami kemajuan yang cukup berarti dalam tahun 2011, perekonomian Indonesia akan menghadapi tantangan perlambatan pertumbuhan perekonomian dunia. Khusus mengenai industri pengolahan masih menghadapi berbagai kendala yaitu: (i) belum kuatnya postur populasi usaha industri; (ii) struktur industri belum kuat; dan (iii) masih rendahnya produktivitas usaha industri. Untuk menyelesaikan permasalahan ini akan dilakukan

pembangunan industri pengolahan yang berbasis kepada (i) hasil tambang; (ii) hasil pertanian; dan (iii) penyedia lapangan kerja domestik.

Pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam penciptaan TKI adalah pemalsuan dokumen dan penipuan yang jumlah kasusnya mencapai hampir 50 persen dari kasus TKI yang ada. Hal ini terjadi karena proses pengurusan dokumen TKI sebagian besar dilakukan oleh "sponsor" atau calo. Permasalahan ini seharusnya dapat diselesaikan di tingkat kabupaten/kota oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, tantangan pokok yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah kepada calon TKI, antara lain dengan mendekatkan pelayanan kepada calon TKI dengan cara membangun pos-pos pelayanan di tingkat kecamatan di wilayah kantong TKI. Untuk itu, diperlukan pembagian kewenangan antar institusi yang jelas dan peningkatan peran pemerintah daerah dalam fasilitasi dan pendampingan TKI sampai di tingkat kabupaten/kota.

14. Kesejahteraan Rakyat

Kepariwisata. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan kepariwisataan antara lain: (i) destinasi pariwisata belum sepenuhnya siap bersaing di pasar global; (ii) belum efektifnya pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata; (iii) terbatasnya daya saing sumber daya pariwisata; dan (iv) belum optimalnya sinergi antarpemangku kepentingan di pusat maupun di daerah dalam mendukung pembangunan kepariwisataan. Dengan demikian tantangan pembangunan kepariwisataan pada tahun 2013 adalah: (i) meningkatkan daya saing destinasi pariwisata; (ii) meningkatkan promosi dan pemasaran berbasis teknologi informasi dan teknologi; (iii) meningkatkan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat (*public private partnership*) dan kerja sama lintas bidang dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat; dan (iv) meningkatkan profesionalisme dan kemampuan (*skill*) SDM di bidang pariwisata dalam menghadapi persaingan global dan liberalisasi tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan pelayanan prima kepada wisatawan dan meningkatkan kualitas hasil penelitian.

Kepemudaan dan Keolahragaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, antara lain: (i) rendahnya partisipasi pemuda dalam pendidikan; (ii) tingkat Pengangguran Terbuka (PTT) pemuda; (iii) rendahnya kesadaran pemuda terhadap bahaya penyalagunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) lainnya, HIV dan AIDS serta kekerasan di kalangan pemuda; (iv) belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan pemuda; (v) terbatasnya prasarana dan sarana kepemudaan untuk mengembangkan kapasitas, kompetensi, kreativitas dan inovasi pemuda; (vi) terbatasnya prasarana dan sarana keolahragaan untuk meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga; (vii) terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan; (viii) belum optimalnya penerapan teknologi olahraga dan kesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi; (ix) terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga dan pembina keolahragaan; (x) rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi

olahraga dan tenaga keolahragaan yang berprestasi. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan keperguruan dan keislaman pada tahun 2013 adalah: (i) meningkatkan kualitas pelayanan keperguruan dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; dan (ii) meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga yang didukung oleh prasarana dan sarana keolahragaan, serta penerapan dan pemanfaatan iptek.

Kehidupan Beragama. Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan beragama adalah upaya peningkatan kerukunan beragama dan peningkatan penyelenggaraan haji yang dikaitkan dengan pelaksanaan haji yang tertib dan lancar. Beberapa permasalahan dari dua fokus prioritas di tahun 2013 tersebut antara lain kehidupan bernilai masyarakat belum sepenuhnya terwujud, yang ditandai dengan: (i) masih terdapat gejala eksklusivisme dalam beragama pada sebagian masyarakat; (ii) belum optimalnya penerapan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait peningkatan kerukunan umat beragama; (iii) kurang maksimalnya pengelolaan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan kearifan lokal sebagai sistem perekat sosial; dan (iv) sampai batas-batas tertentu penerapan antisipasi dini dan penanganan konflik belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan. Dalam penyelenggaraan haji, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya kualitas pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji sejak persiapan, operasional dan pasca penyelenggaraan haji. Selain itu, terkait dengan dana haji, sampai saat ini masih belum dikelola secara optimal, mengingat UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji belum mencantumkan pasal tentang pengelolaan dana haji.

Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Berbagai kemajuan hasil pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah banyak dicapai. Namun masih ada permasalahan yang dihadapi, antara lain: (i) masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan; (ii) masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan; (iii) masih lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender; (iv) masih kurang terlindunginya anak-anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; (v) masih rendahnya kapasitas kelembagaan perlindungan anak; (vi) masih rendahnya pemahaman keluarga dan masyarakat tentang hak-hak anak; dan (vii) pengetahuan dan keterampilan keluarga tentang pengasuhan yang baik juga masih rendah. Oleh sebab itu pada tahun 2013 tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan: (i) kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; (ii) perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan; (iii) ketersediaan data dan informasi; (iv) koordinasi pelaksanaan antar pemangku kepentingan, dan (v) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO 2013

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 memberi gambaran tentang perkembangan ekonomi makro tahun 2011, perkiraannya pada tahun 2012, sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai pada tahun 2013, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran tahun 2013 tersebut dicapai melalui berbagai kegiatan dan kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah digariskan.

A. GAMBARAN UMUM

1. Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012

Kondisi ekonomi makro tahun 2011 dan perkiraannya pada tahun 2012 lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemajuan tersebut antara lain ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan stabilitas yang terjaga.

Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,5 persen pada tahun 2011 lebih tinggi dari tahun 2010 (6,2 persen). Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 terutama ditopang oleh ketahanan domestik berupa investasi yang meningkat dan daya beli masyarakat yang terjaga serta ekspor barang dan jasa yang tetap tumbuh.

Pada tahun 2011, investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), konsumsi masyarakat dan ekspor barang dan jasa meningkat masing-masing sebesar 8,8 persen, 4,7 persen, dan 13,6 persen. Pada tahun 2012, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 6,5 persen didukung oleh permintaan domestik yang lebih baik dengan resiko eksternal dan tingginya harga energi.

Stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2011 masih terjaga dalam menghadapi tekanan berat ekonomi dunia berupa melambatnya perekonomian dunia, berlanjutnya krisis keuangan Eropa, gangguan cuaca dan iklim, serta ketegangan politik di Timur Tengah dan Iran.

Pada tahun 2011, rata-rata harian nilai tukar Rupiah mencapai Rp 8.779 per dolar AS atau menguat 3,4 persen dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya. Cadangan devisa mencapai USD 110,1 miliar, bertambah USD 13,9 miliar dibandingkan tahun 2010. Laju inflasi pada tahun 2011 terkendali pada 3,8 persen, jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya (7,0 persen). Pada tahun 2012 dengan beberapa risiko eksternal seperti masih rentannya krisis utang Eropa; ketegangan politik Timur Tengah dan Iran; serta ketidakpastian cuaca dan iklim, stabilitas ekonomi nasional diperkirakan tetap terjaga.

Momentum pertumbuhan dan terjaganya stabilitas ekonomi mendorong

peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Hal ini dicerminkan oleh menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pada bulan September 2011, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 29,9 juta orang (12,4 persen) atau berkurang sebesar 130 ribu orang dibandingkan Maret 2011. Jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 7,6 juta orang (6,3 persen) atau berkurang sebesar 510 ribu orang dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, kualitas pertumbuhan diupayakan lebih baik dari tahun sebelumnya.

2. Ekonomi Dunia

Sampai dengan awal tahun 2012, kondisi ekonomi global belum membaik dengan krisis utang Eropa yang masih rentan dan perlambatan ekonomi negara-negara maju dan *emerging market*. Krisis yang dialami negara-negara Eropa terkait utang dan defisit fiskal masih belum teratasi sehingga meningkatkan ketidakpastian, sementara pemulihan ekonomi AS masih rentan. Perdagangan global yang menurun berdampak pada penurunan ekonomi negara-negara *emerging market*. Sejalan dengan aktivitas ekonomi global yang melemah, harga komoditas global non-energi cenderung menurun, yang mendorong penurunan tekanan inflasi global.

Dalam keseluruhan tahun 2011, perekonomian dunia tumbuh sebesar 3,9 persen lebih rendah dari tahun 2010 yang besarnya 5,3 persen. Perlambatan ekonomi dunia pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh: (i) lambatnya proses pemulihan ekonomi AS; (ii) berlanjutnya krisis keuangan Eropa dengan kelikawaliran penularan negara Eropa lainnya maupun global; serta (iii) menurunnya kemampuan negara-negara Asia sebagai penopang ekonomi dunia.

Pada tahun 2011, ekonomi AS tumbuh sebesar 1,7 persen lebih rendah dari tahun 2010 yang besarnya 3,0 persen. Perekonomian kawasan Eropa tumbuh 1,4 persen, lebih lambat dari tahun 2010 yang tumbuh sebesar 1,9 persen. Pada tahun 2011, Jerman dan Perancis sebagai penopang utama kawasan Eropa tumbuh masing-masing 3,1 persen dan 1,7 persen lebih lambat, dan lebih tinggi dari tahun 2010 yang masing-masing sebesar 3,6 persen dan 1,4 persen. Kondisi fiskal Yunani, Portuga, dan Italia yang semakin berat menekan perekonomian ketiga negara tersebut dari tumbuh masing-masing 3,5 persen, 1,4 persen dan 1,8 persen, menjadi 0,9 persen, -1,5 persen, dan 0,4 persen. Sedangkan perekonomian Spanyol tumbuh sebesar 0,7 persen, pada tahun 2011 setelah pada tahun sebelumnya menurun sebesar 0,1 persen. Upaya untuk meringkaskan ketahanan fisika di Kawasan Eropa diperkirakan membutuhkan waktu lama dan akan dicermati mengingat potensinya cukup membahayakan bagi stabilitas keuangan global. Negara penopang utama kawasan Asia, Cina dan India, pada tahun 2011 masing-masing tumbuh sebesar 9,2 persen dan 7,2 persen, lebih lambat dari tahun 2010 yang masing-masing tumbuh 10,4 persen dan 10,6 persen. Sedangkan pada tahun 2011 perekonomian Jepang menurun sebesar 0,7 persen, paska tsunami Maret 2011, setelah tumbuh sebesar 4,4 persen pada tahun 2010.

Harga komoditi dunia tetap tinggi pada tahun 2011, walaupun komoditi non-energi cenderung menurun pada akhir tahun yang didorong oleh penurunan permintaan negara-negara maju. Perubahan iklim global yang

tidak menentu serta ketegangan politik Timur Tengah dan Iran mendorong harga komoditi terutama komoditi energi tetap tinggi pada tahun 2011. Indeks harga komoditi non-energi yang meringkas sejak pertengahan tahun 2010 menurun pada akhir tahun 2011 hingga Januari 2012. Pada bulan April 2012, indeks harga komoditi non-energi turun 12,6 persen (y-o-y) dengan adanya penurunan pada harga komoditi pangan dan komoditi bahan baku industri. Sementara itu, keterbatasan suplai minyak mentah yang disebabkan ketegangan politik Timur Tengah dan Iran mendorong harga minyak mentah tetap tinggi hingga awal tahun 2012. Harga rata-rata minyak mentah (Brent, Dubai, dan WTI) per bulan pada tahun 2011 mencapai USD 104,0 per barel dan mencapai USD 113,7 per barel pada April 2012.

Seiring dengan penurunan harga komoditi dunia terutama komoditi non-energi serta perlambatan ekonomi dunia, inflasi menurun pada beberapa negara dunia. Laju inflasi Cina menurun dari 6,5 persen (y-o-y) pada bulan Juli 2011 menjadi 4,1 persen (y-o-y) pada bulan Desember 2011. Demikian juga pada negara-negara lainnya, termasuk negara maju. Pada keseluruhan tahun 2011, laju inflasi di Kawasan Eropa mencapai 2,7 persen, sedangkan Jepang mengalami deflasi sebesar 0,3 persen.

Perlambatan ekonomi dunia serta ketidakpastian penyelesaian krisis keuangan Eropa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan global pada tahun 2011. Indeks perdagangan saham baik di Eropa maupun Asia menurun pada akhir tahun 2011 dibandingkan akhir tahun 2010. Pada akhir tahun 2011, indeks perdagangan saham di London, Tokyo, Singapura, Malaysia, Hongkong masing-masing mencapai 5.639, 8.435, 2.773, 1.489, 18.343 lebih rendah dari akhir tahun 2010 yang masing-masing mencapai 5.900, 10.229, 3.190, 1.519, dan 23.035. Namun demikian, sejak awal tahun 2012, kepercayaan terhadap sistem keuangan baik di AS, Eropa maupun Asia membaik seiring dengan keputusan pemberian dana bailout sebesar 130 triliun Euro kepada Yunani pada awal tahun 2012. Pada tanggal 2 Mei 2012, indeks Nikkei Tokyo, Hangseng Hongkong, ST Singapura, dan Malaysia, mencapai 9.880, 21.309, 3.006, dan 1.582. Sedangkan indeks FTSE 100 London serta DJIA New York masing-masing mencapai 5.753, dan 13.115.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2012 diperkirakan melambat menjadi 3,5 persen (IMF, *World Economic Outlook*, April 2012) disebabkan oleh proses pemulihan AS yang rentar, keberlanjutan krisis keuangan Eropa, serta kemampuan ekonomi Asia yang menurun.

3. Moneter, Perbankan dan Pasar Modal.

Kebijakan moneter pada tahun 2011 diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mengendalikan inflasi pada tingkat yang diharapkan dan kondusif. Penguatan nilai tukar terus berlangsung seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan masuknya dana luar negeri. Rata-rata bulanan nilai tukar Rupiah menguat dari Rp 8.991,- per dolar AS pada bulan Desember 2010 menjadi Rp 8.578,- per dolar AS pada bulan Agustus 2011. Pada bulan September 2011 nilai tukar Rupiah melemah didorong oleh sentimen negatif terhadap keberlanjutan krisis utang Eropa serta kebutuhan

pembiayaan impor dan peluncuran uang oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Pada akhir tahun rupiah melemah menjadi Rp 2.068,- per dolar AS.

Arah kebijakan suku bunga (BI rate) disesuaikan dengan perkembangan harga-harga di dalam negeri. Inflasi pada bulan Januari 2011 yang mencapai 7,0 persen (y-o-y) diantisipasi dengan kenaikan BI rate dari 6,50 persen menjadi 6,75 persen pada bulan Februari 2011. Dengan kecenderungan penurunan harga bahan pangan dan komoditas inti, serta inflasi yang mencapai 4,4 persen (y-o-y) pada bulan Oktober 2011, BI rate diturunkan bertahap menjadi 6,5 persen pada bulan Oktober 2011, dan 5,75 persen pada bulan Februari 2012 yang bertahan sampai dengan April 2012. Kebijakan penurunan BI rate mendorong penurunan suku bunga kredit dan peningkatan fungsi intermediasi perbankan yang tercermin pada peningkatan penyediaan kredit menjadi Rp2.200,1 triliun pada tahun 2011 atau tumbuh sebesar 24,6 persen (y-o-y).

Pada keseluruhan tahun 2011, laju inflasi dapat terjaga rendah yaitu sebesar 3,8 persen (y-o-y). Rendahnya inflasi pada tahun 2011 didukung oleh terjaganya inflasi inti sebesar 4,3 persen, inflasi harga barang dan jasa yang hergejolak (*volatile*) sebesar 5,4 persen, dan inflasi harga dan jasa yang harganya ditentukan oleh Pemerintah (*administered prices*) sebesar 2,8 persen. Inflasi inti yang stabil selain didukung oleh kebijakan moneter juga dipengaruhi oleh stabilitas nilai tukar, rendahnya daya dorong inflasi dari barang impor, serta terjaganya ekspektasi inflasi. Pada awal tahun 2012, inflasi masih terjaga rendah. Pada bulan April 2012, inflasi mencapai 0,21 persen (m-t-m), 1,09 (y-t-d) dan 4,50 persen (y-o-y). Kinerja sektor perbankan Indonesia masih terjaga dalam tekanan krisis keuangan Eropa. Indikator rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio - CAR*) pada akhir tahun 2011 dan Februari 2012 masing-masing berada pada tingkat 16,1 persen dan 18,4 persen, di atas batas minimal 8,0 persen yang disyaratkan. Rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan - NPL*), hanya sebesar 2,2 persen pada akhir 2011 dan 2,3 persen pada Februari 2012, yang merupakan tingkat NPL terendah sejak enam tahun terakhir. Total aset bank bank umum pada tahun 2011 tumbuh sebesar 21,4 persen atau tertinggi selama lima tahun terakhir.

Kondisi pasar modal Indonesia juga sempat mengalami tekanan akibat kekhawatiran investor global, akar krisis utang Eropa. Pada semester pertama tahun 2011 kinerja IHSG cenderung meningkat mencapai 4.130,8 pada bulan Juli 2011, dan menurun mencapai 3.549,0 pada bulan September 2011. Penurunan IHSG pada bulan September 2011 dipicu oleh kepanikan sementara investor dan pergerakan indeks regional terkait kekhawatiran terhadap krisis utang Eropa. IHSG kembali meningkat menjadi 4.180,7 pada bulan April 2012, ditunjang oleh kondisi fundamental ekonomi yang baik seperti prospek pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkatnya peringkat investasi menjadi peringkat layak investasi (*investment grade*).

4. Neraca Pembayaran.

Pada tahun 2011, total penerimaan ekspor mencapai USD 200,6 miliar, naik 26,9 persen dibandingkan tahun 2010. Kenaikan tersebut didorong oleh

ekspor migas dan nonmigas yang meningkat masing-masing sebesar 32,1 persen dan 25,7 persen.

Pada tahun 2011, pengeluaran impor mencapai USD 166,6 miliar, naik 30,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Impor migas dan nonmigas naik masing-masing sebesar 32,3 persen dan 23,4 persen. Dengan defisit jasa-jasa (termasuk pendapatan dan transfer berjalan) sebesar USD 32,2 miliar, surplus neraca transaksi berjalan tahun 2011 mencapai USD 1,3 miliar.

Pada tahun 2011, investasi langsung asing (neto) mencapai USD 11,1 miliar dan investasi portfolio USD 4,5 miliar. Dalam keseluruhan tahun 2011, neraca transaksi modal dan finansial mengalami surplus sebesar USD 14,0 lebih rendah dibanding tahun 2010, yaitu 26,6 miliar. Cadangan devisa pada akhir tahun 2011 mencapai USD 110,1 miliar atau cukup untuk membiayai sebulan 6,5 bulan impor.

Pada triwulan I tahun 2012, neraca pembayaran mengalami defisit neraca transaksi berjalan sebesar USD 2,9 miliar dan surplus neraca transaksi modal dan finansial sebesar USD 2,2 miliar. Pada neraca transaksi berjalan, ekspor barang dan jasa mencapai USD 48,2 miliar didorong oleh ekspor migas dan nonmigas yang meningkat 22,6 persen dan 3,6 persen. Sedangkan impor mencapai USD 44,7 miliar dengan impor migas dan nonmigas yang meningkat masing-masing 28,5 persen dan 19,1 persen. Defisit jasa-jasa mencapai USD 6,4 miliar. Pada neraca transaksi modal dan finansial, investasi langsung asing (neto), investasi portfolio, dan investasi lainnya (neto) masing-masing mencapai USD 2,0 miliar, USD 2,8 miliar dan defisit USD 2,6 miliar. Pada bulan April 2012 cadangan devisa mencapai USD 116,4 miliar, cukup untuk memenuhi kebutuhan 6,4 bulan impor.

Perkembangan ekonomi dunia serta ketidakpastian krisis utang Eropa diperkirakan masih berlanjut sepanjang tahun 2012. Penerimaan ekspor diperkirakan mencapai USD 221,6 miliar dengan ekspor migas dan ekspor non migas yang diperkirakan tumbuh masing-masing sebesar 4,4 persen dan 11,3 persen. Sedangkan impor diperkirakan mencapai USD 186,1 miliar dengan impor migas dan impor non migas diperkirakan tumbuh masing-masing sebesar 0,02 persen dan 12,0 persen. Dengan defisit jasa-jasa yang meliputi pendapatan dan transfer, neraca transaksi berjalan diperkirakan mengalami surplus sebesar USD 0,3 miliar atau turun sebesar 14,9 persen.

Daya tarik investasi ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia diperkirakan tetap tinggi. Pada tahun 2012, investasi langsung asing (neto), investasi portfolio (neto), serta investasi lainnya masing-masing diperkirakan surplus sebesar USD 13,3 miliar, surplus sebesar USD 4,6 miliar, dan defisit sebesar USD 6,1 miliar, dengan cadangan devisa mencapai USD 122,2 miliar, atau cukup untuk membiayai 6,3 bulan impor.

5. Keuangan Negara

Kebijakan fiskal pada tahun 2011 diarahkan untuk memberikan dorongan kepada perekonomian dan sekaligus memantapkan pemerataan dalam rangka menjaga ketahanan fiskal yang sehat, efektif, dan berkelanjutan, dengan tiga sasaran pokok, yaitu: mengendalikan tingkat defisit,

menurunkan rasio utang terhadap PDB, dan menjaga keseimbangan primer.

Realisasi pendapatan negara dan hibah pada tahun 2011 mencapai Rp 1.119,5 triliun (16,9 persen PDB). Sementara itu, belanja negara pada tahun 2011 mencapai Rp 1.209,6 triliun (18,1 persen PDB), lebih rendah Rp 31,2 triliun dari APBN P 2011. Kurang optimalnya penyerapan alokasi belanja negara tersebut disebabkan oleh rendahnya penyerapan terutama belanja pemerintah.

Dengan perkembangan tersebut, defisit anggaran tahun 2011 sebesar Rp 90,4 triliun (1,3 persen PDB), lebih rendah dari yang direncanakan (2,09 persen PDB). Utang pemerintah pada tahun 2011 menurun menjadi 25,4 persen PDB.

Dalam tahun 2012, kebijakan fiskal diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, mengoptimalkan pengelolaan pembiayaan secara hati-hati, serta meningkatkan pemanfaatannya untuk kegiatan yang lebih produktif.

Dengan arah dan strategi kebijakan fiskal tersebut, posur pendapatan negara dan penerimaan hibah pada APBN-P tahun 2012 direncanakan mencapai Rp 1.358,2 triliun naik sebesar Rp 158,7 triliun dari realisasi APBN tahun 2011, didorong terutama dari penerimaan perpajakan. Total belanja negara direncanakan sebesar Rp 1.548,3 triliun naik sebesar Rp 258,7 triliun dibanding realisasi tahun 2011. Sementara itu pos belanja subsidi BBM, LPG, dan BBN pada tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp137,4 triliun. Disisi lain, besaran anggaran subsidi listrik tahun 2012 direncanakan sebesar Rp65,0 triliun.

Dalam tahun 2012, defisit anggaran diperkirakan Rp 190,1 triliun (2,2 persen PDB). Defisit ini akan dibiayai dari sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 190,1 triliun, sedangkan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp 4,4 triliun.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Stabilitas ekonomi yang didorong oleh daya tahan domestik yang kuat di saat perekonomian dunia mengalami perlambatan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2011 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,5 persen, lebih tinggi dari tahun 2010 yang besarnya 6,2 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 terutama didorong oleh daya tarik investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) serta ekspor barang dan jasa yang tumbuh masing-masing sebesar 8,8 persen dan 13,6 persen. Daya beli yang terjaga mendorong konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah tumbuh masing-masing sebesar 4,7 persen dan 3,2 persen. Sedangkan sejalan dengan peningkatan investasi, impor barang dan jasa meningkat sebesar 13,3 persen.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen terutama bersumber dari pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas, sektor pertanian, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh masing-masing

sebesar 6,8 persen, 3,0 persen, 9,2 persen, dan 10,7 persen. Sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor konstruksi, sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa masing-masing tumbuh sebesar 1,4 persen, 4,8 persen, 6,7 persen, 6,0 persen, dan 6,7 persen.

Pada triwulan I 2012, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,3 persen (y-o-y). Dari sisi produksi, sektor pengangkutan dan komunikasi; perdagangan, hotel dan restoran serta keuangan, real estate dan jasa perusahaan merupakan faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang masing-masing tumbuh sebesar 10,3 persen; 8,5 persen; dan 6,3 persen. Sedangkan sektor pertanian dan industri pengalihan masing-masing tumbuh sebesar 3,9 persen dan 5,7 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi terutama didorong pembentukan modal tetap bruto (PMTB) serta ekspor barang dan jasa yang masing-masing tumbuh sebesar 9,9 persen dan 7,8 persen. Sejalan dengan peningkatan investasi, impor barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar 3,2 persen. Adapun pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah meningkat masing-masing sebesar 4,9 persen dan 5,9 persen.

Perlambatan ekonomi dunia dan meningkatnya ketidakpastian pada akhir-akhir ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yang dapat dicapai lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan yaitu sebesar 6,7 persen. Namun demikian, dengan stabilitas ekonomi yang terjaga disertai upaya penguatan ekonomi domestik diperkirakan dapat mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen. Dari sisi pengeluaran, investasi, konsumsi masyarakat serta konsumsi pemerintah didorong sebagai penggerak perekonomian dengan perkiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 10,9 persen, 4,9 persen, dan 6,8 persen. Ekspor barang dan jasa diproyeksikan dapat tetap tumbuh dalam menghadapi perlambatan ekonomi dunia. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh industri pengolahan yang diperkirakan tumbuh 6,1 persen seiring dengan perbaikan iklim investasi dan lain usaha; sektor pertanian tumbuh 3,5 persen; sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 2,0 persen; serta sektor tersier yaitu listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan; persewaan, jasa usaha; serta jasa-jasa yang meningkat masing-masing 6,2 persen; 7,0 persen; 8,9 persen; 11,2 persen; 6,3 persen; dan 6,2 persen.

7. Pengangguran dan Kemiskinan.

Momentum pertumbuhan ekonomi yang terjaga pada tahun 2011 telah menciptakan lapangan kerja yang cukup besar dan sekaligus menurunkan pengangguran terbuka. Pada Februari 2012, jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 7,6 juta orang (6,3 persen) dan jumlah penduduk miskin pada September 2011 menurun menjadi 29,9 juta orang (12,5 persen).

B. KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2013

1. Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun 2013	<p>Pada tahun 2013, perekonomian dunia diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibanding tahun 2012, dengan asumsi perekonomian eropa yang mulai membaik dan ekonomi AS yang telah berangsur pulih. Namun demikian masih terdapat risiko global yang perlu diwaspadai yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Risiko tersebut diantaranya adalah: (i) krisis utang Eropa terus berlanjut dan pemulihan ekonomi AS berlangsung lambat; (ii) krisis politik di Afrika Utara dan Timur Tengah tidak membaik, serta (iii) meningkatnya perubahan iklim global.</p>
	<p>Dalam situasi ini, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain: (i) penguatan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat (ii) meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait dengan prioritas belanja negara infrastruktur, serta (iii) peningkatan efektivitas penerimaan negara dengan sekaligus pengurangan defisit anggaran. Dengan langkah-langkah ini, secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada tahun 2011 dapat dipertahankan pada tahun 2012, dan dapat ditingkatkan pada tahun 2013.</p>
2. Tantangan Pokok	<p>Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2011 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi hingga tahun 2012, tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2013 adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MENDORONG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI. Dorongan akan diberikan pada peningkatan investasi, industri pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, peningkatan efektivitas penerimaan negara, penguatan penyerapan belanja negara, serta pemantapan ketahanan pangan dan energi. 2. MENJAGA STABILITAS EKONOMI. Perhatian akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar, yang dihadapkan pada tingginya resiko harga komoditi baik migas maupun non-migas, serta pengendalian arus modal yang dapat membahayakan perekonomian. 3. MEMPERCEPAT PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN. Langkah-langkah akan dipusatkan pada upaya-upaya yang mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta menjangkau masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan yang tepat.
3. Arah Kebijakan Ekonomi Makro	<p>Kebijakan ekonomi makro pada tahun 2013 diarahkan sejalan dengan tema pembangunan nasional RKP 2013. Pelaksanaan kebijakan ekonomi makro didasarkan pada prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Bab 2 Buku I RKP tahun 2013.</p>

4. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2013

Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2013 diperkirakan sekitar 7,0 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, pengangguran terbuka akan menurun menjadi berkisar antara 5,8 – 6,1 persen dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 9,5 – 10,5 persen pada tahun 2013.

5. Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 didorong dengan upaya meningkatkan investasi, menjaga ekspor nonmigas, serta memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara dengan mempertahankan belanja negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Pada tahun 2013, perekonomian diperkirakan tumbuh sekitar 7,0 persen, lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan tahun 2012 yang besarnya 6,5 persen.

Dari sisi pengeluaran, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing-masing sekitar 12,1 persen dan 11,9 persen. Dengan meningkatnya investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh sekitar 13,7 persen. Dalam keseluruhan tahun 2013, dengan terjaganya stabilitas ekonomi konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh sekitar 5,0 persen, sedangkan pengeluaran pemerintah diperkirakan tumbuh sekitar 6,9 persen.

Dari sisi produksi, sektor pertanian diperkirakan tumbuh sekitar 3,9 persen, sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sekitar 6,7 persen dan sektor pertambangan dan pengalihan diperkirakan tumbuh sekitar 3,0 persen. Sektor tersier yang meliputi listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan, real estate, dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa diperkirakan tumbuh berturut-turut sekitar 6,8 persen; 7,7 persen; 9,1 persen; 12,3 persen; 6,3 persen; serta 6,2 persen.

Secara keseluruhan, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 7,0 persen pada tahun 2013 membutuhkan investasi sebesar Rp 4.071,1 triliun. Perkiraan investasi diperkirakan sekitar 10,2 persen berasal dari pemerintah dan 89,8 persen berasal dari masyarakat termasuk swasta.

6. Moneter

Kebijakan moneter terus diarahkan untuk menjaga likuiditas perekonomian agar sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian. Efektivitas kebijakan moneter akan terus ditingkatkan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah. Dengan nilai tukar Rupiah yang stabil serta pasokan kebutuhan pokok masyarakat yang terjaga, laju inflasi pada tahun 2013 diperkirakan sekitar 5,0 persen.

7. Neraca Pembayaran

Penerimaan ekspor tahun 2013 diperkirakan meningkat sekitar 15,8 persen, didorong oleh peningkatan ekspor migas dan non-migas yang masing-masing naik sekitar 14,0 persen dan 16,0 persen. Sementara itu impor non-

migas dan migas diperkirakan naik masing-masing sekitar 10,8 persen dan 15,6 persen. Dengan defisit sektor jasa-jasa yang diperkirakan masih tetap tinggi, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2013 diperkirakan defisit sebesar USD 1,9 miliar.

Sementara itu surplus neraca modal dan finansial diperkirakan sebesar USD 21,6 miliar didorong oleh meningkatnya investasi langsung asing (neto) sebesar USD 18,6 miliar dan investasi portfolio (neto) sebesar USD 5,4 miliar, sedangkan investasi lainnya (neto) diperkirakan defisit sebesar USD 2,5 miliar.

Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran pada tahun 2013 diperkirakan mencapai USD 19,6 miliar dan cadangan devisa diperkirakan mencapai USD 141,7 miliar atau cukup untuk membiayai sekitar 6,2 bulan impor termasuk pembayaran utang luar negeri pemerintah.

8. Pengangguran dan Kemiskinan

Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka menurun. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi sekitar 9,5 – 10,5 persen dan pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi berkisar antara 5,8 – 6,1 persen dari angkatan kerja.

Gambaran ekonomi makro dan neraca pembayaran tahun 2013 dapat dilihat pada Tabe. 3.1 dan Tabe. 3.2.

TABEL 3.1
PERKEMBANGAN DAN SASARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2012 – 2013

	2010	2011	2012	2013
PERTUMBUHAN EKONOMI (persen)	6,3	6,5	6,5	6,6 - 7,2
Sisi Pengeluaran				
Konsumsi Masyarakat	4,7	4,7	4,9	4,8 - 5,2
Konsumsi Pemerintah	0,3	3,3	6,9	6,7 - 7,1
P2TE	8,4	8,8	10,9	11,9 - 12,3
Ekspor Barang dan Jasa	15,3	13,6	9,9	11,7 - 12,1
Impor Barang dan Jasa	17,3	14,9	11,4	13,5 - 13,9
Sisi Produksi				
Pertanian	3,1	3,0	3,4	3,2 - 4,1
Pertambangan	3,6	1,4	2,0	2,8 - 3,2
Industri Pengolahan	4,7	6,2	6,1	6,5 - 6,9
Listrik, Gas, dan Air Bersih	5,3	4,8	6,2	6,6 - 7,0
Bangunan	7,0	6,7	7,0	7,5 - 7,9
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	8,7	9,2	8,9	8,9 - 9,3
Pengangkutan dan Komunikasi	13,4	10,7	11,2	12,1 - 12,5
Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha	5,7	6,8	6,3	6,1 - 6,5
Jasa-jasa	6,0	6,7	6,2	6,0 - 6,4
LAJU INFLASI (persen)	7,0	3,8	6,8	4,5 - 5,5
PENGANGGURAN TERBUKA (persen)	7,1	6,6	6,4-6,6	5,8-6,1
PENDUDUK MISKIN (persen)	13,3	12,5	10,5-11,5	9,5-10,5

TABEL 3.2
PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI NERACA PEMBAYARAN TAHUN 2012 – 2013
(USD MILIAH)

	2010	2011	2012 Proyeksi	2013 Proyeksi
Transaksi Berjalan	5,1	1,8	-1,4	-7,9
Ekspor	188,7	200,6	221,6	250,4
Migas	20,7	37,9	40,0	35,0
Non-migas	129,4	162,7	181,6	215,4
Impor	-111,9	-106,6	-109,1	-124,2
Migas	-25,9	-38,7	-38,3	-44,3
Non-migas	-82,0	-72,9	-74,7	-80,5
Jasa (neto) ¹⁾	24,5	32,2	39,2	38,1
Transaksi Moneter dan Finansial	26,5	14,0	11,5	21,6
Transaksi Moneter	6,1	6,0	9,1	6,7
Transaksi Finansial	20,4	14,0	11,7	21,5
Investasi Langsung (neto)	11,1	11,1	13,3	16,0
Investasi Portofolio	13,3	9,5	9,6	5,4
Investasi Lainnya (neto)	2,8	-1,6	-6,1	-2,5
Total	31,8	15,7	12,1	15,6
Salah Berutang	-1,5	-3,9	-0,0	0,0
Manajemen Devisa	30,3	11,9	12,1	15,6
Salangan Devisa	30,2	110,1	122,2	141,7

1) Termasuk pendapatan (neto) dan transfer

BAB IV TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL

A. ARAHAN PEMBANGUNAN

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 menetapkan bahwa Visi Indonesia tahun 2025 adalah INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Visi tersebut diarahkan mencapai tingkat kesejahteraan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut, berbagai tantangan harus dihadapi baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari lingkungan global. Langkah-langkah penguatan disusun dan ditempuh untuk menghadapi dinamika yang berkembang. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, diperlukan langkah-langkah terobosan (*breakthrough*) untuk mempercepat perwujudan visi pembangunan. Perekonomian didorong dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh Indonesia. Arahan ini diuraikan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025. Pengentasan kemiskinan dipercepat dengan melibatkan langsung masyarakat miskin dan marginal. Arahan ini tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengentasan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 2011 - 2025.

RKI Tahun 2013 disusun mengikuti arah dan kebijakan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dengan Visi Indonesia tahun 2014 yaitu INDONESIA YANG SELAMAT, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN.

Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2010-2014 yang harus dicapai pada tahun 2013 adalah:

1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi paling tidak 7 persen, pengangguran terbuka menurun menjadi 6,0—6,4 persen, dan tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,5—10,5 persen.
2. Dalam rangka pembangunan demokrasi, Indeks Demokrasi Indonesia mencapai kisaran 68 - 70.
3. Dalam rangka pembangunan hukum, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mencapai 4,0.

B. TEMA PEMBANGUNAN

Dalam tahun 2013, kondisi perekonomian global tetap dibayangi oleh ketidakpastian. Krisis utang negara-negara maju terutama Eropa, ketegangan politik di Timur Tengah dan Afrika Utara, perubahan iklim dan potensi bencana alam di tingkat global, serta harga energi yang tinggi dapat mempengaruhi stabilitas keuangan global dan pemulihan ekonomi dunia yang pada gilirannya akan berpengaruh pada perekonomian nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi di atas 6 persen sejak tahun 2007 kecuali tahun 2009 oleh resesi global, perlu didorong dengan kemampuan pemerataan pembangunan yang lebih luas. Kesenjangan pembangunan, baik antar golongan masyarakat maupun antar daerah yang relatif masih tinggi akan diurangi.

Dalam kaitan itu potensi perekonomian domestik yang besar, terutama investasi akan diwujudkan dan pembangunan guna menghadapi perlambatan perekonomian dunia. Investasi terus didorong, baik dari dalam maupun dari luar negeri, didukung oleh pembangunan infrastruktur dan ketahanan energi yang kuat baik dengan perluasan penyedia listrik dan diversifikasi negeri.

Hambatan perekonomian, terutama birokrasi dan korupsi akan dikurangi agar tercipta iklim investasi dan iklim usaha yang sehat. Pembangunan infrastruktur, pengantar selubung, serta peningkatan kesetaraan dan pendidikan ditingkatkan untuk mendorong produktivitas ekonomi.

Pembangunan ekonomi lebih diarahkan bagi pemerataan pembangunan terutama bagi pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Langkah-langkah percepatan akan ditempuh untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Daya saing perekonomian terus diperkuat. Kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan terus diarahkan untuk memperkuat fundamental ekonomi. Daya saing nasional ditingkatkan pada sektor-sektor produksi, utamanya industri, pertanian, dan pariwisata. Pembangunan industri didorong pada berbagai koridor ekonomi. Sektor pertanian ditingkatkan dengan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Keberlanjutan pembangunan secara menyeluruh tidak terlepas dari stabilitas sosial, politik, dan keamanan serta kemampuan pertahanan dalam menjaga kepentingan nasional terhadap berbagai ancaman dari luar. Pemilihan Umum Tahun 2014 akan dipersiapkan sebaik-baiknya sejak tahun 2013 serta pembangunan Minimum Essential Force akan dipercepat.

Kerangka pikir penetapan tema pembangunan tahun 2013 ditunjukkan pada Gambar 4.1.

GAMBAR 4.1
KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN TEMA

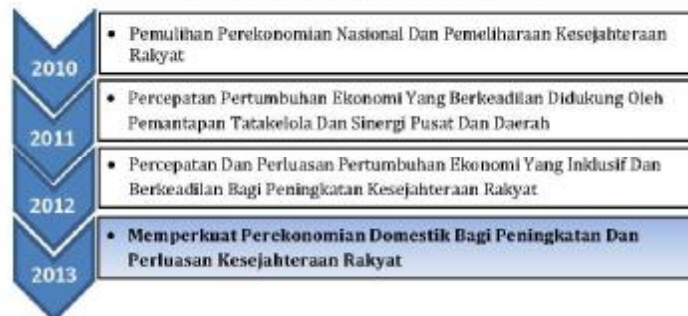


Dengan memperhatikan kata kunci tema dalam gambar di atas maka tema RKP tahun 2013 adalah:

MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dengan demikian kronologis tema RKP dari tahun 2010 hingga 2013 (pelaksanaan RPJMN 2010-2014) dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 4.2
KRONOLOGIS TEMA RKP 2010-2013



C. ISU STRATEGIS

Dengan masalah dan tantangan tersebut, 11 isu strategis nasional yang akan dihadapi pada tahun 2013 adalah sebagai berikut.

PENINGKATAN DAYA SAING

1. Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha (*Base of Doing Business*);
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur: *National Connectivity*;
3. Peningkatan Pembangunan Industri di Berbagai Koridor Ekonomi;
4. Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya Tenaga Kerja Muda;

PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI

5. Peningkatan Ketahanan Pangan: Menuju Pencapaian Surplus Beras 10 juta ton;
6. Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Konversi Energi;

PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESRA

7. Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia;
8. Percepatan Pengurangan Kemiskinan: Sinergi Kluster I-IV;

PEMANTAPAN STABILITAS SOSPOL

9. Persiapan Pemilu 2014;
10. Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi;
11. Percepatan Pembangunan *Minimal Essential State*.

Dalam melaksanakan berbagai isu strategis tersebut, terutama dalam rangka Peningkatan Daya Saing dan Peningkatan Daya Tahan Ekonomi, akan memperhatikan daya dukung ekosistem, efisiensi penggunaan sumber daya serta penerapan teknologi dan cara produksi yang ramah lingkungan

1. Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha

Kemampuan dan potensi investasi di Indonesia meningkat. Investasi berupa pembentukan modal tetap bruto dalam kecenderungan meningkat sampai triwulan IV/2011 didukung oleh penanaman modal asing dan dalam negeri yang kuat. Rasio investasi terhadap PDB pada tahun 2010 dan 2011 terjaga sekitar 35,7 persen.

Ekspektasi yang tinggi terhadap perekonomian Indonesia, jumlah penduduk yang besar, daya beli masyarakat yang meningkat, dan ketersediaan sumber daya alam yang merupakan potensi yang besar untuk menarik investasi. Meningkatnya peranan Asia dengan Indonesia sebagai bagian penting dari Asia berpotensi mendorong investasi ke Indonesia.

Turunnya peringkat hutang negara maju terutama negara-negara Eropa, pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada negara-negara *emerging* Asia, serta meningkatnya upah buruh di negara-negara berkembang seperti Cina, India, Malaysia, dan Thailand memberikan peluang kepada Indonesia untuk menarik investasi asing terutama dalam bentuk investasi langsung.

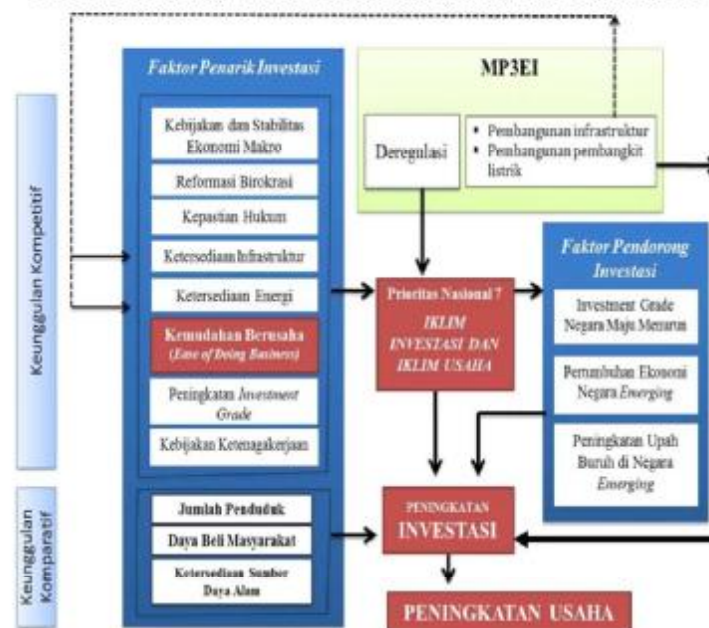
Secara umum investasi dipengaruhi oleh dua faktor besar yaitu: faktor penarik (*pull factors*) dan faktor pendorong (*push factors*) sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 4.3.

Kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia akan terus dijaga. Reformasi

Birokrasi terus dilanjutkan untuk memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Terbitnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Publik merupakan langkah penting dalam meningkatkan kepastian hukum, yang menjadi faktor penentu bagi investor dalam investasi dan perluasan usaha.

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur penting dalam menciptakan iklim investasi dan iklim usaha, terutama: (i) jaringan infrastruktur transportasi penghubung antar dan menuju koridor ekonomi dan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi (jalan, pelabuhan, pelabuhan udara); serta (ii) kapasitas sarana dan prasarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi. Penyediaan energi juga akan diperluas untuk memenuhi kebutuhan perekonomian yang meningkat.

GAMBAR 4.3
KERANGKA PEMBANGUNAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA



Dalam kaitan itu isu strategis untuk peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha pada tahun 2013 dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan kemudahan investasi dan berusaha, melalui: (i) penyederhanaan prosedur investasi dan prosedur berusaha; (ii) peningkatan efisiensi logistik nasional; (iii) pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK); dan (iv) harmonisasi kebijakan ketenagakerjaan.

2. Percepatan Pembangunan infrastruktur (Domestic Connectivity)

Konektivitas nasional memiliki empat elemen kebijakan yang terintegrasi yaitu Sistem Logistik Nasional, Sistem Transportasi Nasional, Pengembangan Wilayah, dan Sistem Informasi dan Komunikasi dengan visi Terintegrasi secara Lokal, Terhubung Secara Global (*locally integrated, globally connected*). Konektivitas nasional menghubungkan pusat perekonomian regional dan dunia (global) secara efektif, efisien, dan terpadu.

Penguatan konektivitas nasional ditujukan untuk memastikan mobilisasi penumpang/barang/jasa/informasi berjalan secara lancar, aman, handal, dan efisien. Strategi yang ditempuh adalah Optimalisasi (*Value-Creation*) dan Pembangunan Baru (*Asset-Creation*). Strategi Optimalisasi meliputi (i) penguatan kerangka kerja konektivitas nasional melalui sinkronisasi dan integrasi transportasi, logistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pengembangan koridor/KEK/Klaster Industri; (ii) pengembangan upaya debottlenecking melalui reformasi kebijakan dan regulasi; serta (iii) peningkatan produktivitas prasarana yang tersedia. Adapun Strategi Pembangunan Baru meliputi pengembangan proyek konektivitas yang terintegrasi dengan kebutuhan industri dan pembangunan proyek *debottlenecking*.

Fase Penguatan Konektivitas Nasional 2005-2025 secara garis besar dibagi dalam tiga tahap. Pembangunan Fase I (2011-2012) difokuskan kepada *quickwins* baik upaya *debottlenecking* (peraturan dan pembangunan fisik) maupun *showcase kawasan/proyek* strategis. Pembangunan Fase II (2013-2014) difokuskan kepada pembangunan konektivitas baru untuk mendukung koridor/KEK dan pencapaian kembali program RPJMN 2010-2014. Adapun pembangunan Fase III (2015-2025) diarahkan kepada proyek konektivitas jangka panjang.

Dalam rangka penguatan konektivitas nasional, pembangunan infrastruktur difokuskan kepada dua sektor yaitu transportasi dan komunikasi dan informatika. Agenda pembangunan sektor transportasi meliputi: (i) penyelesaian peraturan terkait sistem jaringan lalu lintas angkutan jalan darat; (ii) penerapan *performance-based contract* untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jalan; (iii) penanganan *overloading*; (iv) preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional termasuk pembangunan jalur tol berbagai ruas sebagai bentuk peningkatan pelayanan jalan; (v) pengembangan perkeretaapian; (vi) pengembangan transportasi perkotaan Jabodetabek; (vii) peningkatan pelayanan penerbangan; (viii) revitalisasi pelayanan angkutan penyeberangan antar pulau/Ita-Ito dan optimalisasi subsidi perintis serta pemberian *Public Service Obligation* (PSO); (ix) meningkatkan produktivitas terminal kontainer internasional Tanjung Priok dan mempercepat pembangunan pelabuhan alternatif Tanjung Priok (*Deep Water Port*); (x) pengembangan Pelabuhan Utama di Belawan, Kuala Tanjung, dan Bitung; (xi) penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional termasuk dalam rangka penentuan pelabuhan *hub* internasional; (xii) penyelesaian praktek monopoli Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM); (xiii) restrukturisasi PBM (seleksi PBM yang memenuhi persyaratan kualitas teknis dan permodalan).

Adapun pembangunan sektor komunikasi dan informatika difokuskan

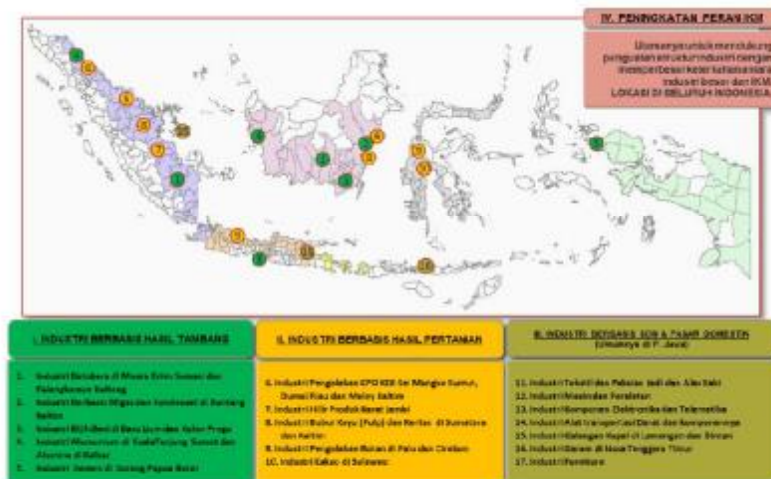
kepada tiga agenda yaitu (i) menggalang pemanfaatan *Information and Communication Technology (ICT) Fund*; (ii) mempercepat penyelesaian pembangunan jaringan *backbone* serat optik Palapa Ring di wilayah timur Indonesia; dan (iii) mengintegrasikan sistem komunikasi dan informasi instansi pemerintah.

3. Peningkatan Pembangunan Industri di Berbagai Koridor Ekonomi

Di dalam MP3EI ditetapkan beberapa komoditi unggulan sebagai penghela perekonomian di setiap koridor melalui peningkatan nilai tambah hasil-tambang dan atau hasil-hasil pertanian. Untuk mempercepat industrialisasi diperlukan investasi yang besar, baik dalam bentuk pembangunan pabrik baru, peremajaan mesin dan peralatan produksi, pembaruan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia industri. Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam hal ketersediaan bahan mentah hasil tambang dan hasil pertanian serta jumlah penduduk yang besar.

Keunggulan komparatif ini secara bertahap ditransformasikan menjadi keunggulan kompetitif dengan meningkatkan nilai tambah dari setiap produk unggulan yang ada di koridor ekonomi. Kebijakan akselerasi industrialisasi ditujukan untuk: (i) menumbuhkan industri berbasis hasil tambang; (ii)menumbuhkan industri pengolahan hasil pertanian; (iii) menumbuhkan industri berbasis SDM (padat karya) dan penyedia kebutuhan pasar domestik; (iv) mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) yang kuat, sehat, dan mandiri, yang ditunjukkan oleh meningkatnya populasi IKM, berkembangnya inovasi pada IKM, tumbuhnya industri kreatif dan berkembangnya IKM sebagai pemasok bagi industri besar. Lokasi pembangunan kluster industri di seluruh Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.4

GAMBAR 4.4
PEMBANGUNAN KLUSTER INDUSTRI DALAM KORIDOR EKONOMI

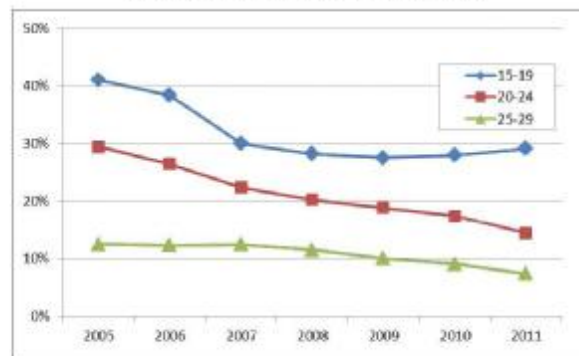


4. Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya Tenaga Kerja Muda

Jumlah penganggur secara keseluruhan cenderung menurun termasuk penganggur usia muda. Pengangguran usia 15-29 tahun menurun dari 15,99 persen pada tahun 2010 menjadi 14,57 persen pada tahun 2011. Meskipun menurun, jumlahnya masih besar, yaitu sekitar 5,3 juta (lihat Gambar 4.5). Di perkotaan jumlah penganggur untuk kelompok usia muda lebih besar dibandingkan perdesaan. Rata-rata tingkat pendidikan penganggur usia muda adalah SD dan SLTP mencapai 49 persen.

Tingginya persentase penganggur berpendidikan SD dan SLTP menunjukkan fenomena penganggur usia muda berpendidikan rendah. Fenomena ini muncul oleh kecenderungan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia 15-19 tahun yang meningkat sejak tahun 2009 hingga 2011. Kelompok usia yang seharusnya masih berada di bangku sekolah banyak yang memasuki pasar kerja karena yang drop-out dan tidak mampu melanjutkan. Tahun 2010 (menurut Data Kemendikbud) sekitar 1,2 juta siswa keluar dari sekolah dan masuk pasar kerja. Indikasi ini tercermin pada penambahan angkatan kerja baru yang berpendidikan SD dan SLTP, sekitar 0,9 juta orang rata-rata per tahun.

GAMBAR 4.5
TPT MENURUT KELOMPOK UMUR



Sumber: BPS

Sasaran yang hendak dicapai di tahun 2013 adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi di sekitar 5,8-6,1 persen. Kesempatan kerja diperkirakan bertambah 2,5-2,7 juta dan angkatan kerja baru bertambah 2,2-2,5 juta. Untuk menurunkan jumlah penganggur usia muda lebih cepat, pada tahun 2013 program-program penciptaan lapangan kerja secara khusus diarahkan pada kaum muda.

Strategi di dalam penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda adalah sebagai berikut.

1. Angkatan kerja yang berpendidikan rendah diberikan prioritas untuk memperoleh keahlian yang diperlukan oleh industri. Mereka yang masih bersekolah dipersiapkan dengan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri.

2. Tenaga kerja muda yang sudah berada di pasar kerja diberikan pelatihan berbasis kompetensi, praktek kerja (*internship*), program magang (*apprenticeship*), dan pengembangan karir di dalam perusahaan.
3. Keterbatasan keahlian manajerial dan profesionalitas diatasi dengan kurikulum dalam pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan di tempat kerja. Jumlah lembaga pelatihan berbasis kompetensi ditingkatkan bekerjasama dengan industri, asosiasi para profesional, lembaga sertifikasi yang difasilitasi oleh pemerintah.
4. Menyiapkan anak-anak putus sekolah atau yang tidak mampu melanjutkan untuk kembali ke sekolah atau ditawarkan pendidikan siap kerja, pelatihan, magang, dan praktek kerja.
5. Kaum muda yang berminat diberikan akses pelatihan kewirausahaan. Pendekatan kewirausahaan difokuskan kepada keterampilan praktis dan perencanaan untuk memulai bisnis, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi manajemen usaha, serta memberikan stimulasi keterampilan dan cara-cara berpikir yang berwawasan kewirausahaan.
6. Bagi kaum muda, terutama mereka yang berada di pedesaan, diberikan program-program pemberdayaan, seperti membangun kelompok usaha bersama, atau pelatihan pelatihan praktis.

Sasaran program antara lain: (i) 502.880 kaum muda mendapat pelatihan berbasis kompetensi, (ii) 600.000 orang mendapat sertifikat kompetensi yang diakui industri, (iii) 34.750 kaum muda menjadi peserta magang dan memperoleh sertifikat kompetensi, (iv) 52.080 kaum muda diberikan akses berusaha dan berwirausaha serta memperluas jaringan bagi kaum muda untuk memperoleh layanan informasi pasar kerja. Program ini akan dilaksanakan oleh berbagai Kementerian/Lembaga (lihat Gambar 4.6).

GAMBAR 4.6
STRATEGI PENURUNAN TPT USIA MUDA



5. Ketahanan pangan: menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton

Peningkatan produksi pangan, termasuk upaya menuju surplus beras 10 juta ton per tahun mulai tahun 2014 serta pencapaian produksi perikanan 22,39 juta ton pada tahun 2014. Kebutuhan penyediaan pangan terus meningkat baik jumlah maupun kualitasnya seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahun dan peningkatan pendapatan masyarakat. Penyediaan pangan pokok seperti beras tidak bisa mengandalkan dari pasar luar negeri. Produksi dalam negeri harus ditingkatkan. Di lain pihak upaya peningkatan produksi pangan mengalami berbagai tantangan dan kendala terutama dalam meningkatkan dan mempertahankan areal pertanian, meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta menghadapi terjadinya perubahan iklim. Luas areal pertanian produktif setiap tahun terus berkurang akibat terjadinya konversi ke non pertanian, sedangkan perluasan areal pertanian baru semakin sulit karena semakin terbatas. Peningkatan produktivitas hasil pertanian dan indeks penanaman juga mengalami banyak kendala, selain lambatnya untuk menghasilkan suatu teknologi juga disebabkan karena banyaknya infrastruktur irigasi yang masih rusak serta terganggunya penyediaan input produksi (benih dan pupuk) baik dalam jumlah, mutu dan ketepatan waktu. Untuk itu diperlukan dukungan dari seluruh pihak, termasuk swasta/BUMN untuk meningkatkan produksi pangan. Sasaran utama dari isu strategis ini adalah:

1. Peningkatan produksi padi sebesar 6,25 persen atau dengan tingkat produksi sebesar 72,1 juta ton GKG.
2. Pertumbuhan produksi bahan pangan lainnya: jagung 3,3 persen, kedelai 18,4 persen, gula 9,2 persen, daging sapi dan kerbau 9,5 persen.
3. Meningkatnya produksi perikanan menjadi 18,49 juta ton yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 5,47 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 13,02 juta ton.

Pengembangan diversifikasi pangan. Konsumsi pangan pokok masyarakat Indonesia sebagian besar tergantung pada beras. Diversifikasi konsumsi yang masih relatif rendah menyebabkan kualitas konsumsi masyarakat Indonesia masih di bawah yang diharapkan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2011 baru mencapai 80,1 dari nilai 100. Upaya peningkatan pangankaragaman konsumsi pangan di masyarakat masih berjalan lambat. Sasaran yang ingin dicapai dengan mengatasi isu strategis tersebut adalah:

1. Penurunan konsumsi beras sebesar 1,5 persen per tahun.
2. Peningkatan konsumsi ikan 33,17 kg perkapita per tahun.
3. Peningkatan produksi pangan olahan berbasis pangan lokal.
4. Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi sekitar 91,5

Stabilisasi harga bahan pangan dalam negeri. Gangguan produksi pertanian bahan pangan di dalam negeri disertai meningkatnya permintaan serta terganggunya distribusi pangan akibat iklim yang buruk dan kurang baiknya sarana dan prasarana transportasi mengganggu stabilitas harga

pangan di dalam negeri. Inflasi bahan pangan sangat berpengaruh terhadap inflasi karena kontribusi inflasi bahan pangan cukup besar terhadap tingkat inflasi secara umum. Sasaran yang diharapkan dengan teratasinya isu strategis tersebut adalah:

1. Terjaganya stabilitas harga pangan terutama beras di dalam negeri.
2. Terpenuhinya stok beras dalam negeri, terutama cadangan beras pemerintah minimal satu juta ton.
3. Lancarnya distribusi pangan antar wilayah dan antar musim.
4. Terkendalinya impor bahan pangan terutama beras.

Peningkatan kesejahteraan petani yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks nilai tukar petani (NTP) di atas 105. Keberhasilan dalam peningkatan produksi pangan tidak selalu diiringi dengan peningkatan kesejahteraan petani sebagai produsen pangan. Penerimaan petani dari usahatani akan didorong lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya produksi usahatannya.

6. Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi

Rasio Elektrifikasi (RE) Nasional pada tahun 2011 sebesar 72,95 persen, meningkat dari tahun 2010 (67,2 persen). Peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2011 didukung oleh program gerakan sejuta sambungan oleh PT. PLN yang menggunakan anggaran PT. PLN. Pada tahun 2012, rasio elektrifikasi diperkirakan mencapai 75,9 persen, melebihi target RKP Tahun 2012 sebesar 73,6 persen.

Target rasio elektrifikasi tahun 2013 adalah sebesar 77,6 persen. Sasaran ini akan dicapai melalui perluasan jangkauan pelayanan dengan pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk yang didukung oleh beroperasinya beberapa pembangkit listrik baru dalam program percepatan 10.000 MW tahap 1.

Selain itu, dilakukan pula melalui pengembangan jaringan distribusi listrik perdesaan dan pembangunan pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan energi terbarukan. Secara keseluruhan pembangunan ketenagalistrikan ditujukan untuk mencapai target rasio elektrifikasi pada akhir tahun 2014 sebesar 80 persen. Target dan pencapaian rasio elektrifikasi dapat dilihat pada Gambar 4.7.

GAMBAR 4.7
TARGET DAN PENCAPAIAN RASIO ELEKTRIFIKASI NASIONAL



Konversi energi dilaksanakan sebagai upaya untuk : (i) mengurangi ketergantungan terhadap BBM; (ii) mengurangi subsidi energi; (iii) meningkatkan aksesibilitas terhadap infrastruktur energi, dan (iv) meningkatkan pasokan energi domestik. Dalam kaitan itu, pemerintah telah membangun jaringan distribusi gas untuk rumah tangga / jaringan gas kota pada tahun 2011 di 5 kota yaitu rumah susun Jabodetabek, Bontang, Sergkang, Sidoarjo (lanjutan) dan Bekasi (lanjutan) untuk 17.939 sambungan rumah dan pembangunan 4 SPBG dan 1 bengkel di kota Palembang.

Pada tahun 2012 pembangunan infrastruktur energi yang terkait dengan program konversi energi dipersiapkan dapat dicapai, yaitu: (i) pengembangan jaringan Distribusi Gas di 4 kota (Prabumulih, Bugar, Jambi, Cirebon) dan 1 kota Sidoarjo (lanjutan tahun sebelumnya), dengan 16.000 sambungan rumah; serta FEED dan DEDC di 4 kota (Subang, Sorong, Lhokseumawe, Balikpapan); (ii) pembangunan infrastruktur BBG untuk transportasi (SPBG) di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo serta FEED Pembangunan SPBG di Balikpapan dan Cilegon; (iii) pemanfaatan potensi energi lokal dengan memanfaatkan EBT terutama di daerah perdesaan termasuk kegiatan diseminasi dan *capacity building* guna mendukung pelaksanaan Desa Mandiri Energi (DME); dan (iv) persiapan dan pengembangan infrastruktur gas untuk transportasi.

Pada tahun 2013 direncanakan pembangunan infrastruktur energi pada: (i) pengembangan Jaringan Distribusi Gas di 4 kota (Subang,

Sorong, Ogan Komering Ilir, Bora) dengan 16.000 sambungan rumah; serta FEED dan DEED di 4 kota (Samarinda, Muara Enim, Prabumulih, Lampung); (ii) pembangunan infrastruktur RRG untuk transportasi (SPRG) di Bali serta FEED Pembangunan SPRG di Medan, Cilegon, Balikpapan, dan (iii) penyediaan dan pemasangan *converter kit* untuk kendaraan angkutan umum di Jawa dan Bali.

7. Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas SDM dimulai sejak dalam kandungan sampai lanjut usia dan meliputi manusia sebagai insan dan manusia sebagai sumberdaya. Kualitas SDM ditentukan oleh derajat kesehatan dan status gizi serta tingkat pendidikan penduduk. Kerangka pikir pembangunan SDM dapat dilihat pada Gambar 4.8.

GAMBAR 4.8
KERANGKA PIKIR PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA



Isu-isu strategis untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang pendidikan adalah: (i) pemenuhan layanan pendidikan dasar yang berkualitas; (ii) peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan; (iii) peningkatan akses pendidikan tinggi yang berkualitas, berdaya saing, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan; serta (iv) peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

Keempat isu strategis nasional tersebut adalah dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien bagi penduduk Indonesia, sehingga dapat menjadi manusia yang cerdas, terampil, produktif dan memiliki kemandirian,

keluhuran budi pekerti dan karakter bangsa yang kuat.

Isu-isu strategis untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang kesehatan adalah: (i) peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; (ii) peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyakit lingkungan; (iii) peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata; (iv) peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan; (v) peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri; (vi) peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata. Keenam isu strategis tersebut dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan dan KB yang berkualitas, merata, terjangkau dan terlindungi bagi penduduk Indonesia, sehingga dapat menjadi manusia yang sehat, bergizi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta sejahtera.

8. Percepatan Pengurangan Kemiskinan: Sinergi Klaster I - IV

Tantangan pokok pengentasan kemiskinan adalah melambatnya penurunan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2013 diperlukan berbagai strategi dan kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan, antara lain adalah: (i) stabilisasi makro untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; (ii) pelaksanaan program pembangunan pro-rakyat yang memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta (iii) peningkatan keberpihakan terhadap masyarakat miskin (*affirmative policy*).

Di samping strategi dan kebijakan secara makro tersebut, isu strategis penanggulangan kemiskinan pada tahun 2013 adalah:

1. Perluasan cakupan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan peningkatan sinergi program-program perlindungan sosial dengan menggunakan *unified database* dari data PPLS 2011, yang diharapkan dapat menyempurnakan kualitas penentuan sasaran (*targeting*).
2. Perkuatan integrasi perencanaan partisipatif ke dalam perencanaan reguler melalui penguatan partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas tenaga pendamping, dan peningkatan intensitas koordinasi lintas bidang. Beberapa isu strategis program-program pemberdayaan masyarakat yang terdapat dalam Klaster II adalah: (i) penajaman distribusi BLM dengan meningkatkan kriteria kesulitan wilayah, dan (ii) pengembangan insentif bagi kabupaten/kota yang telah melakukan perkuatan integrasi perencanaan partisipatif dan berpihak pada masyarakat.
3. Peningkatan kualitas pelaksanaan program pemberdayaan UMKM pada Klaster III melalui penajaman dan perluasan kegiatan-kegiatan yang mencakup pengelompokan kegiatan-kegiatan yang ada dalam lima strategi, yaitu: (i) peningkatan akses ke permodalan, khususnya bagi usaha mikro dan kecil; (ii)

- peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UMKM; (iii) peningkatan akses pemasaran; (iv) peningkatan kualitas produksi; dan (v) penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro dan kecil antara lain melalui revitalisasi koperasi. Perluasan cakupan kegiatan-kegiatan di Kluster III dititikberatkan pada pemberdayaan usaha mikro yang dilaksanakan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi.
4. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelaksanaan program-program Pro-Rakyat. Program-program Pro-Rakyat yang terdapat dalam Kluster IV diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas program-program yang ditujukan untuk masyarakat marginal dan berprestasi rendah.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 2011-2025 merupakan dokumen pelengkap Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. MP3EI bertujuan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia melalui peningkatan investasi untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

MP3KI diarahkan untuk mendorong perwujudan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan marginal sehingga dapat terlibat langsung dan menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. MP3KI merupakan kebijakan afirmatif dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang *pro-growth*, *pro-poor*, *pro-job*, dan *pro-environment*. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.9.

GAMBAR 4.9
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA



MP3KI memberi gambaran transformasi dari program-program penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini selama periode 2012-2025 serta menilikberatkan pada pengembangan mata pencaharian (livelihood) masyarakat melalui berbagai desain kebijakan. Program-program penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini akan bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat secara merata termasuk untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (income generating), sinergi dan transisi dari seluruh kluster program penanggulangan kemiskinan, serta untuk mewujudkan sistem jaminan sosial yang menyeluruh.

MP3KI juga menggambarkan pola kerja yang paling optimal dari para pihak (kementerian/lembaga, daerah, swasta, dan masyarakat) yang secara bersama-sama akan mendayagunakan sumberdaya untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam kaitan itu program-program penanggulangan kemiskinan akan ditingkatkan efektivitasnya guna mempercepat dan meningkatkan penurunan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayah.

9. Persiapan Pemilu 2014

Kegiatan persiapan pemilu dimulai pentahapannya pada pertengahan 2012 dan terus berlangsung sepanjang tahun 2013. Sesuai dengan amanat RPJMN 2010-2014, salah satu sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri adalah terlaksananya Pemilu 2014 yang adil dan demokratis, yang ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi politik rakyat mencapai rata-rata 75 persen.

Pada satu sisi, tantangan penyelenggaraan pemilu sangat besar dan masyarakat menaruh harapan luar biasa pada penyelenggara pemilu agar dapat menunaikan tugasnya secara baik. Pada lain pihak, kapasitas penyelenggara KPU masih relatif lemah untuk menunaikan tugas yang sangat besar menyelenggarakan pemilu yang adil dan demokratis.

Seleksi dan peresmian anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hampir bersamaan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2014 membutuhkan waktu untuk memahami ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perputakhiran data pemilih dan verifikasi parpol, peserta Pemilu Tahun 2014 beserta implementasi teknisnya.

KPU yang baru nanti memikul beban yang sangat berat untuk mengerjakan berbagai proses yang diperlukan agar tidak terjadi lagi pengalaman pemilu 2009 dengan banyaknya para pemilih yang berhak memilih tapi tidak terdaftar dalam DPT, gugatan parpol yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan banyaknya gugatan/keberatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap hasil penghitungan suara.

KPU memiliki tugas berat karena peraturan perundang-undangan politik dan pemilu yang terlambat diselesaikan, berpotensi

menyebabkan lumpang indah dalam pelaksanaan berbagai proses yang dibutuhkan menjelang pemilu 2014. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu akan memberi perhatian pada peraturan perundangannya, manajemen pelaksanaan, kelembagaannya, dan sumber daya manusia serta proses penganggarannya.

10. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Reformasi birokrasi dan tata kelola terus ditingkatkan dalam tahun 2011 dan 2012 dengan berpedoman pada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Sampai dengan tahun 2011, sebanyak 16 Kementerian/Lembaga (K/L) telah melaksanakan RB dan 20 K/L sedang dalam proses persetujuan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2012, diharapkan K/L yang telah mengusulkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diproses. Sedangkan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, dimulai di 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota.

Reformasi birokrasi di daerah sejalan dengan pematapan penataan otonomi daerah agar kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah makin meningkat, khususnya dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam rangka percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2011 telah diterbitkan 15 SPM dan pada tahun 2012 dapat diterapkan di daerah.

Pembinaan dana perimbangan dan pengelolaan anggaran daerah terus ditingkatkan agar terwujud kualitas belanja daerah. Diperkuat pula pembinaan dan fasilitasi pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah, untuk pengeluaran keuangan daerah yang akuntabel menuju tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit BPK.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC).

Selanjutnya pada tahun 2012, diterbitkan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Jumlah aksi yang tertuang dalam Inpres Nomor 17/2011 adalah 106 aksi dengan 13 fokus kegiatan; dan 6 strategi dengan melibatkan 24 kementerian/lembaga, dengan titik berat pada Strategi Pencegahan sebanyak 82 aksi. Dengan upaya ini diharapkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dapat meningkat dari 3,0 pada tahun 2011 menjadi 3,2 pada tahun 2012, lihat Gambar 4.10.

CAMBAR 4.10
PERKEMBANGAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) INDONESIA



11. Percepatan Pembangunan Minimum Essential Force dan Pengembangan Polri

Pembangunan pertahanan skala *minimum essential force (MEF)* pada tahun 2011 telah mencapai 21,00 persen atau meningkat 9 persen dari tahun 2010. Diharapkan pada tahun 2012 akan mencapai 28,67 persen dari rencana pencapaian postur MEF sebesar 43,67 persen pada tahun 2014.

Pencapaian tersebut berdampak pada kesiapan Alutsista TNI pada setiap angkatan. Kekuatan Alutsista untuk matra darat kesiapannya rata-rata mencapai 81,13 persen; matra laut kesiapannya rata-rata mencapai 43,25 persen; dan matra udara kesiapannya rata-rata mencapai 71 persen. Peningkatan postur tersebut belum memadai karena di satu sisi terjadi penambahan Alutsista, tetapi di sisi lain terjadi pengurangan akibat berakhirnya usia pakai Alutsista.

Salah satu strategi pembangunan untuk mendukung pencapaian MEF dan memenuhi kebutuhan Almatsus Polri, adalah meningkatkan peran industri pertahanan dalam negeri. Pada tahun 2011 akuisi Alutsista TNI hasil produksi industri pertahanan dalam negeri mencapai 13,7 persen, dan akuisisi Almatsus Polri hasil produksi industri pertahanan dalam negeri mencapai 12,5 persen. Diharapkan pada tahun 2012, akuisisinya meningkat menjadi 15,8 persen untuk Alutsista TNI dan 14,3 persen untuk Almatsus Polri.

Dari aspek kebijakan, akselerasi industri pertahanan dalam negeri telah didukung dengan seperangkat peraturan perundang-undangan. Di samping telah dibentuk komite kebijakan industri pertahanan (KKIP), saat ini juga telah dibentuk *high level committee (HLC)* yang berwenang dalam menentukan jenis dan produk alutisista yang akan diproduksi di dalam negeri. Diharapkan pada tahun 2012, RUU Revitalisasi Industri Pertahanan

dapat disabkan sehingga kendala seperti sinergi antar kelembagaan, mekanisme pengadaan, partisipasi industri dalam negeri, insentif fiskal, pengembangan SDM, dan jaminan pembiayaan dapat diselesaikan dan diatasi dengan baik.

Dengan meningkatnya peran serta dan disiapkannya perangkat peraturan perundangan yang terkait dengan industri pertahanan dalam negeri, pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri perlu diupayakan untuk mencapai kemandirian pemenuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri, lihat Gambar 4.11.



Keamanan dalam negeri terus ditingkatkan terhadap berbagai tindak kriminal, potensi konflik menjelang pelaksanaan pemilu anggota legislatif dan presiden pada 2014, kejahatan konvensional seperti premanisme, pencurian dengan kekerasan, penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak, masalah perburuan, terorisme, narkoba, perdagangan manusia, dan unjuk rasa yang berpotensi anarkhis. Kondisi-kondisi seperti ini memerlukan perhatian yang lebih serius dengan langkah-langkah antisipasi yang lebih baik dan memadai.

Polri sebagai lembaga yang bertanggung memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat senantiasa dikembangkan secara terus menerus, baik pada aspek personal, sarana pengendali massa dan transportasi pergerakan pasukan, maupun kecukupan rasio personel Polri terhadap jumlah penduduk, lihat Gambar 4.12.

GAMBAR 4.12
PENGEMBANGAN POLRI



BAB V PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

A. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013

Tema pembangunan tahun 2013 dijabarkan ke dalam rencana aksi yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Rencana Aksi 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Nasional Lainnya;
2. Rencana Aksi Bidang-bidang Pembangunan; dan
3. Rencana Aksi Pembangunan Kewilayahan.

Masing-masing rencana aksi dilengkapi dengan target tahun 2013 dan diarahkan untuk mencapai Sasaran Utama RPJMN 2010-2014. Rincian 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas nasional lainnya dapat dilihat pada Gambar 5.1.

GAMBAR 5.1
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2010-2014



Rincian sasaran dan arah kebijakan masing-masing prioritas nasional adalah sebagai berikut:

PRIORITAS 1: REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

- SASARAN :**
1. Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku dengan indikator antara lain:
 - a. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapai 4,0
 - b. Opini WTP atas Laporan Keuangan mencapai 100% untuk KL, 60% untuk Provinsi, dan 40% untuk Kabupaten/Kota
 - c. Instansi yang telah melaksanakan reformasi birokrasi mencapai 100% untuk K/L dan Provinsi, dan 40% untuk Kabupaten/Kota.
 - d. Instansi pemerintah yang akuntabel mencapai 90% untuk K/L, 70% untuk provinsi dan 50% untuk kabupaten/kota
 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, SDM berintegritas, dan penerapan standar pelayanan minimal, dengan indikator antara lain:
 - a. Integritas Pelayanan Publik, mencapai 7,5 untuk unit pelayanan instansi pusat dan 7,0 untuk instansi daerah
 - b. Jumlah pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di daerah telah mencapai 100%.
 3. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain didukung manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik dan meningkatnya kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan indikator antara lain:
 - a. Diterapkannya 15 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, 9 SPV di UPD I dan 6 SPV di UPD II;
 - b. Daerah yang menerapkan DAK sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis (juklak/juknis) mencapai 85%
 - c. Daerah yang telah optimal (100%) menyerap DAK mencapai 85%
 - d. Tersusunnya 1 Permenagri di bidang dana perimbangan dan dana transfer lainnya
 - e. Daerah provinsi, yang belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung mencapai 55%
 - f. Persentase belanja mada terhadap total belanja daerah mencapai 29%
 - g. Jumlah APBD yang disahkan tepat waktu mencapai 85%
 - h. Daerah Provinsi, yang ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian Status WTP mencapai 75%.
 - i. Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu mencapai 80%.
- ARAH KEBIJAKAN :**
1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana

(*business process*), pengenhangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal;

2. Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (kabupaten/kota di 33 provinsi) untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM;
3. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;
4. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
5. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

PRIORITAS 2: PENDIDIKAN

SASARAN :

1. Pemenuhan Layanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas
 - a. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A menjadi 95,80 persen;
 - b. Meningkatnya APM dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs/Paket B masing-masing menjadi 80,10 persen dan APK SMP 106,8 persen;
 - c. Meningkatnya APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi 49,00 persen;
 - d. Menurunnya angka putus sekolah di SD/ sederajat dan SMP/ sederajat;
 - e. Meningkatnya angka melanjutkan dari SD/ sederajat ke SMP/ sederajat dan dari SMP/ sederajat ke SMA/ sederajat;
 - f. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan dasar yang memenuhi SPM;
 - g. Tercapainya Standar Pendidikan Nasional (SPN) pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di satuan pendidikan dasar; dan
 - a. Terlaksananya pendidikan karakter bangsa di satuan pendidikan dasar.
2. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah yang Berkualitas dan Selaras dengan Kebutuhan Pembangunan
 - a. Meningkatnya APK SMA/SMK/SMLB/MA/Paket C menjadi 82,00 persen;
 - b. Menurunnya angka putus sekolah di SMA/ sederajat;
 - c. Meningkatnya angka melanjutkan dari SMA/ sederajat ke Perguruan Tinggi;
 - d. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan menengah yang berakreditasi minimal B;
 - e. Meningkatnya relevansi lulusan pendidikan menengah dengan kebutuhan pembangunan, termasuk untuk pelaksanaan MP3EI di 6 Koridor Ekonomi;

- f. Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di satuan pendidikan menengah; dan
 - g. Teraksananya pendidikan karakter bangsa di satuan pendidikan menengah.
3. Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi yang Berkualitas, Berdaya Saing, dan Sejaras dengan Kebijakan Pembangunan
 - a. Meningkatnya APK P1 usia 19-23 tahun menjadi 20,70 persen;
 - b. Meningkatnya persentase dosen Perguruan Tinggi Pemerintah (PTP) program sarjana/diploma/profesi berkualifikasi S2 menjadi 94,5 persen;
 - c. Meningkatnya persentase dosen Perguruan Tinggi Masyarakat (PTM) program sarjana/diploma/profesi berkualifikasi S2 menjadi 75,0 persen;
 - d. Meningkatnya persentase dosen PTP program pascasarjana berkualifikasi S3 menjadi 26,5 persen;
 - e. Meningkatnya persentase dosen PTM program pascasarjana berkualifikasi S3 menjadi 5,6 persen;
 - f. Meningkatnya kualitas penelitian di perguruan tinggi; dan
 - g. Meningkatnya relevansi lulusan pendidikan tinggi dengan kebutuhan pembangunan.
 4. Peningkatan Profesionalisme dan Pemerataan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - a. Meningkatnya proporsi guru yang berkualifikasi minimal S1/D4:
 - i. SD/SDLB/MI menjadi 68,0 persen;
 - ii. SMP/SMPLB/MTs menjadi 92,3 persen;
 - iii. SMA/SMALB/MA menjadi 92,3 persen;
 - iv. SMK menjadi 95,4 persen.
 - b. Meningkatnya persentase guru yang tersertifikasi:
 - i. SD/SDLB/MI menjadi 67,5 persen
 - ii. SMP/SMPLB/MTs menjadi 68,0 persen
 - iii. SMA/SMALB/MA menjadi 79,0 persen
 - iv. SMK menjadi 78,0 persen

ARAH KEBIJAKAN:

1. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata;
2. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah universal;
3. Peningkatan kualitas, referensi dan daya saing pendidikan tinggi;
4. Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan;
5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal;
6. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;
7. Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional;
8. Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan;
9. Penguatan tata kelola pendidikan; dan
10. Peningkatan pendidikan karakter.

PRIORITAS 3: KESEHATAN

SASARAN :

1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak
 - a. Meningkatnya cakupan balita yang ditimbang berat badannya (D/S) di Posyandu menjadi 80 persen;
 - b. Meningkatnya cakupan bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap menjadi 88 persen;
 - c. Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil ke empat (K4) menjadi 95 persen;
 - d. Meningkatnya cakupan persalinan yang dikolong oleh tenaga kesehatan terlatih menjadi 89 persen;
 - e. Meningkatnya cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) menjadi 89 persen;
 - f. Meningkatnya puskesmas yang mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) menjadi 90 persen;
 - g. Meningkatnya Rumah Sakit yang mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONER) menjadi 9,5 persen; dan
 - h. Meningkatnya jumlah puskesmas yang mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) menjadi 9.328 puskesmas.
2. Peringsatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan
 - a. Meningkatnya cakupan Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang mendapatkan *Anti Retroviral Treatment* (ART) menjadi 45 persen;
 - b. Meningkatnya jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV menjadi 600.000 orang;
 - c. Meningkatnya persentase TB Para (3TA Positif) yang disembuhkan menjadi 87 persen;
 - d. Meningkatnya persentase provinsi yang melakukan pembinaan, pencegahan, dan penanggulangan penyakit tidak menular menjadi 90 persen; dan
 - e. Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 16.000 desa;
 - f. Memfasilitasi pembangunan air minum di 417 kawasan, 1.610 desa dan 157 IKK serta pembangunan sanitasi (air limbah dan drainase serta persampahan) di 737 kawasan dan 70 Kabupaten/Kota.
3. Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata
 - a. Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan di Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) menjadi 5.320 tenaga kesehatan; dan
 - b. Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan menjadi 9.000 orang.

4. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan
 - a. Meningkatnya persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jarakesmas menjadi 90 persen;
 - b. Meningkatnya jumlah tambahan tempat tidur (TT) Kelas II RS yang digunakan untuk pelayanan kesehatan sebanyak 10.544 unit;
 - c. Meningkatnya jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan Jarkesmas 9.323 puskesmas;
 - d. Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melayani program Jampersa menjadi 2.663 fasilitas.
5. Peningkatan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, mutu obat dan makanan alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri
 - a. Meningkatnya persentase produk alat kesehatan dan PKK yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat menjadi 90 persen;
 - b. Meningkatnya persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan menjadi 37 persen;
 - c. Meningkatnya persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan menjadi 18 persen; dan
 - d. Meningkatnya jumlah parameter Uji Obat dan Makanan untuk setiap sampel menjadi 10 parameter.
6. Peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata

Meningkatnya *contraceptive prevalence rate* (CPR) menjadi sebesar 63,8 persen; dan menurunnya *unmet need* menjadi sebesar 5,6 persen dengan sasaran :

 - a. Terselenggaranya peserta KB baru sebanyak 7,5 juta, peserta KB baru dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 13,2 persen, dan peserta KB baru pria sebesar 4,6 persen;
 - b. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif dari sasaran sebanyak 28,2 juta menjadi sebanyak 29,0 juta, dan peserta KB aktif dengan MKJP dari sebesar 25,9 persen menjadi sebesar 26,7 persen;
 - c. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KB secara bertahap bagi 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta untuk mendukung peringkasan akses dan kualitas pelayanan KB (4.700 klinik KB);
 - d. Meningkatnya pemahaman remaja dan pasangan usia subur serta keluarga tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan advokasi dari kie melalui berbagai media;
 - e. Memperkuatnya kapasitas tenaga lini lapangan KB, Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP), serta selernhagaan KB di daerah dalam rangka meningkatkan kesertaan dan kemandirian ber-KB.

ARAH KEBIJAKAN:

1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak;
2. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan;
3. Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata;
4. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan;
5. Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan

- keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri;
6. Peningkatan akses pelayanan Keluarga Berencana berkualitas yang merata.

PRIORITAS 4: PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SASARAN : Menurunnya tingkat kemiskinan pada kisaran 9,5-10,5 persen dari jumlah penduduk.

- ARAH KEBIJAKAN:**
1. Mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan padat karya (*pro-growth&pro-job*), khususnya pertumbuhan sektor-sektor usaha yang melibatkan orang miskin (*pro-poor*) sehingga berkontribusi secara ekonomis terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan;
 2. Menjaga kestabilan produksi dan ketersediaan stok bahan pangan agar tingkat konsumsi masyarakat miskin tidak jatuh sehingga kualitas kehidupan masyarakat miskin tidak semakin buruk. Hal ini sejalan dengan sasaran di Prioritas Nasional 5 Ketahanan Pangan;
 3. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui kemandirian ekonomi perdesaan, perbaikan pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas masyarakat miskin dalam aspek akses permodalan, akses pasar, keterampilan usaha, produksi, dan keembanagaan usaha melalui operasi, maupun pengoptimalan potensi daerah. Secara lebih rinci, arah kebijakan ini dijelaskan dalam Buku II Bab IX Bidang Wilayah dan Tata Ruang.
 4. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program pro-rakyat yang bertujuan untuk menyediakan akses fasilitas dasar bagi masyarakat nelayan, masyarakat miskin perkotaan, dan daerah tertinggal;
 5. Meningkatkan kualitas pelayanan jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut upaya penanggulangan kemiskinan difokuskan pada 5 (lima) hal, yaitu:

1. Peningkatan dan penyempurnaan kualitas program bantuan sosial berbasis keluarga;
2. Penyempurnaan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan INPM Mandiri;
3. Peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumber daya produktif;
4. Peningkatan dan perluasan program-program pro-rakyat;
5. Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan serta harmonisasi antar pelaku.

PRIORITAS 5: KETAHANAN PANGAN

- SASARAN:**
1. Peningkatan pertumbuhan produksi pangan, termasuk upaya menuju surplus beras 10 juta ton per tahun mulai tahun 2014 serta pencapaian produksi perikanan 22,39 juta ton pada tahun 2014, dengan sasaran:
 - a. Peningkatan produksi padi sebesar 6,25 persen atau dengan tingkat produksi sebesar 72,1 juta ton GKG;
 - b. Pertumbuhan produksi bahan pangan lainnya: jagung 8,3 persen, kedelai 10,4 persen, gula 9,2 persen, daging sapi dan kerbau 9,5 persen;
 - c. Meningkatnya produksi perikanan menjadi 18,49 juta ton yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 5,47 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 13,02 juta ton.
 2. Stabilisasi harga bahan pangan dalam negeri, dengan sasaran:
 - a. Terjaganya stabilitas harga pangan, terutama beras di dalam negeri;
 - b. Terperubinya stok beras dalam negeri, terutama cadangan beras pemerintah minimal satu (1) juta ton;
 - c. Lancarnya distribusi pangan antar wilayah dan antar musim;
 - d. Terkendalinya impor bahan pangan, terutama beras.
 3. Pengembangan diversifikasi pangan, dengan sasaran:
 - a. Peranan konsumsi beras sebesar 1,5 persen per tahun;
 - b. Konsumsi ikan 33,17 kg perkapita per tahun;
 - c. Peningkatan produksi pangan olahan berbasis pangan lokal;
 - d. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi sekitar 91,5.
 - e. Peningkatan kesejahteraan petani yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) di atas 105.

- ARAH KEBIJAKAN:**
1. Peningkatan Produksi Pangan, terutama menuju surplus beras 10 juta ton mulai tahun 2014
 - a. Peningkatan produktivitas tanaman pangan, khususnya padi dan palawija melalui penerapan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) dan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) dan peningkatan produktivitas peternakan dan perikanan;
 - b. Perluasan lahan pertanian dan perikanan, di antaranya melalui pencetakan sawah 100 ribu ha dalam program GP3K oleh BUMN;
 - c. Perlindungan produksi pertanian dan perikanan dari gangguan hama dan penyakit;
 - d. Peningkatan penyediaan input produksi (induk, benih, pakan, dan pupuk) serta prasarana pertanian dan perikanan;
 - e. Peningkatan mutu produksi pangan termasuk perikanan;
 - f. Peningkatan kapasitas penyuluhan, penelitian dan pengembangan untuk mendukung produksi pangan;
 - g. Peningkatan layanan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi.
 2. Peningkatan Keterjangkauan Harga dan Distribusi Pangan
 - a. Stabilisasi harga bahan pangan di dalam negeri;

- b. Peningkatan efisiensi distribusi dan logistik pangan antar wilayah dan antar musim;
 - c. Pengeralian ekspor-impor bahan pangan.
3. Pematapan Pergelangan Pangan Berbasis Pangan Lokal
- a. Percepatan pengangkutan konsumsi pangan masyarakat;
 - b. Peningkatan mutu dan jenis pangan olahan.
4. Perlindungan dan pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani melalui
- a. Perlindungan harga komoditi pertanian di tingkat petani;
 - b. Penyediaan sumber-sumber permodalan bagi petani disertai peningkatan akses petani terhadap sumber permodalan;
 - c. Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendidikan serta penyuluhan;
 - d. Peningkatan akses petani terhadap informasi dan pasar serta teknologi.

PRIORITAS 6: INFRASTRUKTUR

SASARAN :

1. Sumber Daya Air
 - a. Menurunnya tingkat kerawanan banjir akibat luapan sungai dan/atau pasang surut terutama di kota-kota besar dan pusat pertumbuhan MPSEI dan penuntasan penanganan resiko banjir lahar dan sedimen di Gunung Merapi dan Kawakarang;
 - b. Meningkatnya kapasitas layanan air baku untuk keperluan domestik dan industri terutama di daerah-daerah pusat pertumbuhan MPSEI, dan berkurangnya potensi krisis air jangka pendek di wilayah kepulauan kecil dan kantong kantong keteringgalan.
2. Transportasi
 - a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dalam mendukung penguatan konektivitas nasional, pada koridor ekonomi dan sistem logistik nasional, baik yang menghubungkan sentra-sentra produksi dan outlet nasional maupun di wilayah terpendek, perbatasan, perbatasan dan wilayah terluar;
 - b. Meningkatnya keselamatan transportasi jalan dengan berkurangnya tingkat fatalitas kecelakaan transportasi;
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi di wilayah perkotaan melalui penataan sistem jaringan transportasi di 6 kota besar.
3. Perumahan dan Permukiman

Pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) 121 *Twin Blok* (TB) untuk TNI/Polri, buruh di Jabodetabek, mahasiswa, pondok pesantren serta Kawasan Kumuh Ciliwung, fasilitasi pembangunan prasarana perumahan dan permukiman bagi 36.120 unit rumah serta fasilitasi dan stimulasi perumahan swadaya sebanyak 15.000 unit.
4. Komunikasi dan Informatika
 - a. Prosentase jumlah ibukota kabupaten/kota yang dilayani jaringan *broadband* mencapai sekurang-kurangnya 83 persen dari total ibukota kabupaten/kota.

- b. Prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan backbone serat optik nasional, 97 persen.
 - c. Lanjutan beroperasi fasilitas jasa akses telekomunikasi di 33.184 desa dan Pusat Layanan Internet Kecamatan di 5.748 desa ibukota kecamatan (100 persen dari target) sebagai bagian dari program Universal Service Obligation (USO).
5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)
- a. Terintegrasinya perencanaan proyek KPS ke dalam proses penyusunan RKPD;
 - b. Tersedianya dana dukungan pemerintah untuk sebagian konstruksi, pembelian lahan, persiapan proyek, transaksi proyek maupun *viability gap fund* (VGF);
 - c. Peningkatan dan peningkatan kelembagaan tim KPS (simpul KPS) baik di pusat maupun daerah melalui kegiatan *capacity building* maupun sosialisasi;
 - d. Penyempurnaan kerangka hukum yang mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS.
6. Pertanahan
- a. Pelaksanaan Neraca Peralagunaan Tanah di 100 kabupaten/kota;
 - b. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Pemantapan, dan Penggunaan Tanah (P4T) dengan jumlah 50.000 bidang tanah.
7. Penataan Ruang
- a. Penguatan kelembagaan dalam rangka paduserasi rencana pembangunan, termasuk MP3EI, dengan Rencana Tata Ruang (RTR);
 - b. Penyelesaian peraturan perundang-undangan amanat UU 26/2007, termasuk di dalamnya RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang juga dilakukan dalam rangka menunjang paduserasi rencana pembangunan dan RTR.

ARAH KEBIJAKAN:

Kebijakan pembangunan infrastruktur diarahkan pada:

1. Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
2. Peningkatan daya saing sektor riil, dan
3. Peningkatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Sasaran fokus prioritas adalah terjaminnya ketersediaan infrastruktur dasar sesuai dengan tingkat kinerja yang telah ditetapkan, dengan indikator presentase tingkat pelayanan sarana dan prasarana yang meliputi sarana dan prasarana sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman, energi dan ketenagalistrikan, serta komunikasi dan informatika.

Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai SPM:

1. Terkait sumber daya air: Mendukung upaya peningkatan akses penduduk terhadap air minum yang sehat sesuai target MDG's melalui:
 - a. Peningkatan keterpaduan antara pembangunan infrastruktur Air

Baku dan jaringan distribusi termasuk Sistem Penyediaan Air Murni (SPAM);

- a. Percepatan penyelesaian masterplan, studi kelayakan dan desain penyediaan air baku di kota-kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN) NPSE; serta
 - c. Pembangunan sumbu-sumbu air tanah untuk penyediaan air baku pedesaan, pulau-pulau dan kantong-kantong kekeringan.
2. Terkait pembangunan transportasi :
- a. meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan dan wilayah tertinggal melalui penyediaan subsidi operasi perintis dan PSO angkutan penumpang kereta api dan angkutan laut kelas ekonomi;
 - b. meningkatkan keselamatan transportasi melalui penyediaan fasilitas dan peralatan keselamatan serta penerapan sistem jaringan transportasi yang herkeselamatan;
 - c. meningkatkan pelayanan transportasi sesuai dengan SPM melalui penerapan regulasi dan manajemen pelayanan angkutan umum transportasi di wilayah perkotaan.
3. Terkait pembangunan perumahan permukiman :
- a. meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau;
 - b. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
4. Terkait pembangunan komunikasi dan informatika :
- a. revitalisasi infrastruktur Lembaga Penyiaran Publik RRI dan TVRI untuk menutup wilayah *blankspot*; serta
 - b. menyelesaikan pelaksanaan Program USO telekomunikasi untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan layanan di wilayah perbatasan, pedesaan, terpencil, dan wilayah non komersial lain.

Arah kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil diprioritaskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang mampu menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Sasaran fokus prioritas adalah meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana yang mendukung sektor riil, dengan indikator presentase peningkatan kapasitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana yang meliputi sarana dan prasarana sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman, energi dan ketenagalistrikan, serta komunikasi dan informatika.

Secara lebih rinci, arah kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil meliputi:

1. Terkait sumber daya air yaitu pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir, terutama pada daerah perkotaan dan pusat-pusat perekonomian melalui:
 - a. percepatan pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai guna penurunan tingkat kerawanan banjir

- a. akuih, luapan sungai dan/atau pasang surut air laut;
 - b. percepatan pelaksanaan perancangan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo secara terpadu sesuai dengan tahapan yang direncanakan;
 - c. memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana pengendalian banjir untuk pemulihan pasca bencana;
 - d. mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian banjir.
2. Terkait pembangunan transportasi:
- a. perancangan jaringan infrastruktur transportasi penghubung antar darat menuju koridor ekonomi dan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi (jalan, pelabuhan, pelabuhan udara) untuk mendukung penguatan konektivitas dan sistem logistik nasional;
 - b. memperluas jangkauan pelayanan infrastruktur transportasi ke daerah marginal dengan penyediaan angkutan umum murah, penyediaan aksesibilitas dan kegiatan keperawatan baik transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara;
 - c. meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi *backlog* maupun *bottleneck* kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi.
3. Terkait pembangunan komunikasi dan informatika:
- a. pembanguan jaringan *backbone* serat optik di bagian timur Indonesia dengan pendanaan *ICT Fund*;
 - b. mempercepat penetrasi siaran televisi digital;
 - c. memperkuat pengembangan e-government nasional baik dalam bentuk kerangka regulasi maupun investasi dan koordinasi lintas sementarian;
 - d. meningkatkan e-literasi melalui peningkatan kualitas SDK TIK termasuk aparatur pemerintah.
4. Terkait bidang pertanahan adalah penataan pertanahan berwawasan lingkungan yang berkeadilan serta tersedianya informasi ketersediaan tanah untuk kegiatan pemangunan. Sedangkan terkait penyelenggaraan penataan ruang antara lain:
- a. penyelesaian materi teknis peraturan perundangan amana: UU 26/2007 antara lain penyusunan dan penetapan RTR KSN;
 - b. penyerasian peraturan pelaksanaan UU 26/2007 dengan peraturan pelaksana UU sektoral terkait; serta
 - c. penguatan kelembagaan penataan ruang, salah satunya melalui pelatihan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) adalah:

1. Melanjutkan reformasi strategis kelembagaan dan peraturan perundang-undangan pada sektor dan lintas sektor yang mendorong pelaksanaan KPS,
2. Mempersiapkan proyek KPS yang terintegrasi agar dapat diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara matang sehingga dapat menekan biaya

transaksi yang tidak perlu.

3. Melakukan pengujian peran kelembagaan KPS untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pelaksanaan KPS dalam menyusun strategi perencanaan dan prioritas sektor yang akan dikerjasamakan, dan
4. Menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung investasi dalam pembangunan dan pengoperasian proyek KPS, termasuk menyediakan dana pendukung di dalam APBN.

Strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Pembukaan peluang usaha bagi badan usaha secara kompetitif, tidak diskriminatif, dan transparan dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan penyelenggaraan televisi digital;
2. Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pembangunan badan usaha penyelenggara.

PRIORITAS 7: IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

- SASARAN :**
1. Meningkatnya investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sekitar 12,1 persen;
 2. Meningkatnya tingkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*):
 - a. Waktu untuk memulai usaha: 20 hari
 - b. Perijinan mendirikan bangunan: 137 hari
 - c. Perolehan listrik: 90 hari
 - d. Pendaftaran properti: 20 hari

- ARAH KEBIJAKAN:**
1. Penyederhanaan dan percepatan prosedur investasi dan prosedur berusaha, dengan biaya yang lebih efisien dan transparan;
 2. Penyederhanaan aturan terkait implementasi proyek-proyek KPS;
 3. Peningkatan efisiensi sistem logistik nasional, melalui perluasan pelaksanaan *National Single Window (NSW)* serta pengembangan jalur dan sarana distribusi;
 4. Pengembangan kawasan ekonomi khusus di koridor-koridor ekonomi yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi sebagai penampung kegiatan industri, ekspor-impor, dan kegiatan ekonomi lainnya;
 5. Peningkatan iklim ketenagakerjaan dan penguatan kelembagaan hubungan industrial, melalui: harmonisasi peraturan ketenagakerjaan dengan sinergi kebijakan pusat dan daerah, meningkatkan kemampuan negosiasi bagi serikat pekerja dan pengusaha, memperkuat kerjasama tripartit di daerah, serta meningkatkan profesionalisme ahli-ahli hubungan industrial dan hakim pengadilan hubungan industrial.

PRIORITAS 8: ENERGI**SASARAN:**

1. Meningkatnya produksi minyak bumi menjadi 920 ribu BOPD;
2. Meningkatnya produksi gas bumi menjadi 1.320 ribu BOEPD;
3. Meningkatnya produksi batubara sebesar 337 juta ton;
4. Bertambahnya kapasitas pembangkit listrik sebesar 3.000 MW, baik oleh pemerintah maupun oleh badan usaha; dan
5. Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 77,6 persen.

ARAH KEBIJAKAN:

Kebijakan dalam rangka peningkatan ketersediaan energi ditujukan untuk:

1. Meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dan
2. Meningkatkan produksi dan pemanfaatan batubara dalam negeri.

Kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan guna meningkatkan produksi minyak dan gas bumi adalah:

1. Mempercepat pengambilan dan pengolahan data potensi sumber daya minyak dan gas bumi melalui pengolahan data seismik 2D, terutama di daerah lepas pantai dan remote;
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui pengelolaan, penyediaan serta penyebarluasan data dan informasi geologi sumber daya minyak dan gas bumi;
3. Meningkatkan daya tarik investasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
4. Menyiapkan dan mempromosikan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi;
5. Meminimalisasi jumlah *unplanned shutdown*;
6. Mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi tinggi seperti EOR (*Enhanced Oil Recovery*) terutama untuk peningkatan produksi di sumbu-sumbu yang sudah *late/marginal*; dan
7. Meningkatkan kualitas *monitoring volume* produksi minyak dan gas bumi. Khusus untuk minyak bumi telah ditetapkan kebijakan melalui Instruksi Presiden No. 2/2012 dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah produksi dan mencapai target produksi paling sedikit rata-rata 1,01 juta BOPD pada tahun 2014.

Peningkatan produksi dan pemanfaatan batubara dalam negeri dilakukan melalui:

1. Mendorong pembangunan rel kereta api pengangkutan batubara;
2. Menjamin keamanan pasokan batubara dalam negeri melalui *Domestic Market Obligation* (DMO) sebesar 25 persen;
3. Mengatur harga batubara di dalam negeri dengan mengacu kepada indeks harga batubara ekspor;
4. Memberikan kepastian dan transparansi di dalam kegiatan usaha

pertanahan dengan regulasi pendukung UU No. 4/2009;

5. Melaksanakan peningkatan pembinaan dan pengawasan;
6. Mengupayakan pengembangan nilai tambah kredit/tambang; dan
7. Mendorong peningkatan penerimaan negara dan investasi.

Kebijakan dalam rangka diversifikasi energi ditujukan untuk:

1. Meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
2. Meningkatkan kapasitas terpasang panas bumi; dan
3. Mengurangi subsidi BBM dan listrik secara bertahap.

Kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri adalah:

1. Meningkatkan pasokan alokasi gas bumi untuk kebutuhan pembangkit listrik, pupuk/ruan-pupuk, industri petrokimia, rumah tangga, dan transportasi;
2. Membangun *Small Scale LNG Receiving Terminal* guna menerima dan menimbun pasokan/penyediaan gas pembangkit listrik, dan kilang mini LPG untuk memasok gas rumah tangga;
3. Membangun sistem jaringan distribusi gas (SIRG) untuk angkutan umum dan jaringan distribusi pipa gas kota untuk melayani rumah tangga; dan
4. Pengembangan penggunaan bahan bakar gas untuk transportasi.

Peningkatan kapasitas terpasang panas bumi dilakukan melalui:

1. Penyediaan *revolving fund* terkait dengan pembangunan PLTP;
2. Peningkatan kualitas *data reserves*;
3. Prosedur pelelangan WKP (Wilayah Kerja Pertambangan) panas bumi yang jelas;
4. Pelaksanaan kesepakatan mengenai PPA (*Power Purchase Agreement*); dan
5. Penyelesaian konflik tumpang tindih lahan antara kawasan hutan dengan WKP panas bumi.

Untuk mengurangi subsidi BBM dan listrik secara bertahap dilakukan melalui:

1. Meningkatkan penggunaan bahan bakar gas di sektor ketenagalistrikan, transportasi, industri, dan rumah tangga;
2. Meningkatkan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas, batubara, dan panas bumi; dan
3. Meningkatkan bahan bakar nabati dan non nabati sebagai sumber daya energi.

Kebijakan dalam rangka efisiensi penggunaan energi dan pemanfaatan

energi baru dan terbarukan ditujukan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran perilaku hemat energi bagi aparat pemerintah, badan usaha, dan masyarakat dan
2. Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan guna meningkatkan kesadaran perilaku hemat energi bagi aparat pemerintah, badan usaha, dan masyarakat adalah:

1. Fasilitasi bantuan pinjaman finansial yang murah melalui bank lokal bagi pelaksanaan efisiensi energi untuk badan usaha dan masyarakat;
2. Penerapan insentif dan disinsentif bagi sektor industri termasuk labelisasi hemat dan audit energi dalam rangka mendukung mandatori manajemen dan pengamatan energi; dan
3. Penguatan kerjasama bilateral dan multilateral dalam rangka mitigasi perubahan iklim guna mendukung green energy dan green growth. Kebijakan penghematan energi bagi instansi pemerintah, badan usaha dan masyarakat juga diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden No. 13/2011 tentang Penghematan Energi dan Air.

Peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dilakukan melalui

1. Pengembangan regulasi untuk mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan terutama pemberian insentif dan kebijakan harga agar dapat bersaing dengan energi konvensional;
2. Peningkatan investasi untuk pengembangan dan pembangunan energi baru dan terbarukan; dan
3. Pengembangan industri dan jasa pendukung.

PRIORITAS 9: LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

SASARAN:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Perubahan Iklim, 2. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 3. Peningkatan Sistem Peringatan Dini 4. Penanggulangan Bencana
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARAH KEBIJAKAN:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan perubahan iklim, antara lain adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan tingkat status emisi dan baseline penurunan emisi serta tahapan penurunannya; b. pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca sesuai dengan Rencana Aksi Nasional penurunan emisi gas rumah kaca; c. berkurangnya lahan kritis dan meningkatnya perhutanan sosial; d. peningkatan pengelolaan lahan gambut; e. rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir; serta f. peningkatan kapasitas dan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, arah dan kebijakan yang akan dikembangkan adalah pengendalian laju kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan. Pada tahun 2013, arah kebijakan tersebut terus dilanjutkan dan difokuskan pada:
 - a. pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
 - b. pemutakhiran (*updating*) Rencana Aksi Nasional Keanekaragaman Hayati (*Indonesia Biodiversity Strategy Action Plan / IBSAP*) dan penetapan target/sasaran pembangunan keanekaragaman hayati secara jelas;
 - c. pengendalian pencemaran manufaktur, prasarana dan jasa;
 - d. pengendalian pencemaran pertambangan, energi dan nugas;
 - e. pengendalian pencemaran udara sumber bergerak;
 - f. percepatan penyelesaian kasus-kasus lingkungan;
 - g. penghilangan kawasan konservasi dan penambahan luas kawasan konservasi perairan;
 - h. peningkatan pengawasan pemanfaatan sumber daya selutak dan perairan, termasuk pencemaran laut;
 - i. penegakan hukum pidana lingkungan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
 - j. penguatan sistem pengujian pemadamair, penanggulangan, dan dampak kebakaran hutan dan lahan;
 - k. pengukuhan kawasan hutan dan beroperasinya wilayah selok KPH;
 - l. peningkatan sistem pencegahan pemadamair, penanggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan; serta
 - m. peningkatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehataman.
3. Peningkatan sistem peringatan dini adalah
 - a. penyediaan sarana, data, dan informasi meteorologi publik, gempa bumi dan tsunami, serta iklim agroklimat, dan iklim maritim;
 - b. pemenuhan kebutuhan dan redistribusi logistik dan peralatan di daerah rawan bencana;
 - c. peningkatan koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat di pusat dan daerah;
 - d. penyediaan rencana kontijensi di daerah rawan bencana;
 - e. penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana, serta
 - f. peningkatan ketahanan kawasan pesisir terhadap ancaman kerusakan bencana dan perubahan iklim.
4. Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana adalah:
 - a. pengintegrasian kebijakan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas pembangunan nasional dan daerah;
 - b. penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah;
 - c. peningkatan keterlibatan dan partisipasi lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana;
 - d. penanganan kedaruratan yang efektif dan efisien melalui peningkatan kapasitas sumber daya penanggulangan bencana daerah yang dilengkapi dengan peralatan dan logistik yang

- memadai; serta
- e. percepatan dan penyelesaian pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.

PRIORITAS 10: DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK

SASARAN:	<p>Pembangunan Daerah Tertinggal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,9 persen pada tahun 2012; 2. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal hingga mencapai rata-rata sebesar 15,4 persen pada tahun 2012; 3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang diindikasikan oleh rata-rata Indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2012 menjadi 71,2 <p>Pembangunan Kawasan Perbatasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya keterisolasian wilayah kecamatan terluar perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar/PPKT (lokasi Prioritas) yang menghambat aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan orang, serta pertumbuhan perekonomian lokal; 2. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan energi (listrik dan bahan bakar) di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas); 3. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi prioritas); 4. Tersusunnya rencana strategis berbasis lokpri sebagai instrumen operasional, mensinergikan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; 5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Batas Wilayah Negara di Kecamatan Lokpri dan PPKT. <p>Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2013 yang harus cepat terwujud dan dirasakan dampaknya bagi masyarakat, terutama adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengembangan peternakan di Kawasan Pegunungan Tengah, Humbani, dan Kebar; 2. Tersedianya permukiman UMKM usaha pertanian, perikanan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat melalui PNTM Mandiri, KUR, dan Respek; 3. Terbangunnya industri pengolahan sagu rakyat; 4. Tersedianya pendidikan gratis sampai SMU hingga menjangkau seluruh distrik dan kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat; 5. Tersedianya pelayanan kesehatan gratis hingga menjangkau seluruh distrik dan kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat; 6. Tersedianya sumber energi alternatif terbarukan (PLTMH, PLTS) dan terbangunnya pabrik semen di Timika dan Manokwari; 7. Pemberian kuota khusus bagi putra-putri asli Papua.
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARAH KEBIJAKAN: Percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, serta percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat memerlukan dukungan dari lintas sektor.

Arah kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah penguatan perekonomian lokal di daerah tertinggal melalui peningkatan kapasitas, produktivitas dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal secara berkesinambungan beserta sarana prasarana pendukungnya yang dijabarkan ke dalam upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal untuk mengoptimalkan potensi unggulan melalui pendekatan klaster;
2. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal;
3. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal;
4. Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal;
5. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.

Untuk mewujudkan perbatasan sebagai halaman depan negara yang memiliki fungsi dan nilai strategis terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan maka pengelolaan batas wilayah negara dan pengembangan kawasan perbatasan akan diarahkan beberapa upaya-upaya strategis sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (Lokasi Prioritas) dengan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan pusat pertumbuhan lainnya;
2. Pemberian kemudahan regulasi pengangkutan bahan makanan pokok dan barang kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (Lokasi Prioritas) yang terisolasi;
3. Pengembangan sistem keberlanjutan pengadaan logistik (stok pangan) di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (Lokasi Prioritas) yang terisolasi;
4. Penyusunan rencana strategis (cetak biru) dan rencana detail tata ruang kecamatan lokasi prioritas dan PPKT;
5. Pengembangan Potensi Laut dan Potensi Darat dengan dukungan infrastruktur ekonomi dan pemerintahan di Kecamatan Lokasi Prioritas dan PPKT;
6. Penyediaan bangunan sekolah yang memadai beserta kelengkapan sarana belajar mengajar, penyediaan tenaga pengajar berkualitas beserta insentifnya (rumah dinas, tunjangan khusus) di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT, dan pembangunan sekolah satu atap berasrama di kecamatan-kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (Lokasi Prioritas);
7. Penyediaan tenaga kesehatan berkualitas beserta insentifnya (rumah dinas, tunjangan khusus), pembangunan puskesmas rawat inap di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (Lokasi Prioritas);

8. Penyediaan pembangkit energi listrik alternatif dan distribusi BSM hingga menjangkau di kecamatan-kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (Asasi Prioritas);
9. Penebasan dan Pembangunan Batas Wilayah Negara di Kecamatan Lokpri dan PPKT;
10. Peningkatan Kualitas Pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana pengamanan Batas Wilayah Negara di Kecamatan Lokpri dan PPKT.

Arah kebijakan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat dalam rangka akan dilakukan dengan upaya upaya strategis yang bersifat cepat terwujud (*quick wins*) sebagai berikut:

1. Penguatan ketahanan pangan.
2. Peranggu anggaran kemiskinan.
3. Pengembangan ekonomi rakyat.
4. Peningkatan pelayanan pendidikan.
5. Peningkatan pelayanan kesehatan.
6. Pengembangan infrastruktur dasar.
7. Pemihakan terhadap masyarakat asli Papua dan Papua Barat.
8. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertanahan.
9. Keamanan dan ketertiban.
10. Pengembangan kapasitas kelembagaan.

Selain melalui dukungan program-program di atas, Percepatan Pembangunan Provinsi Papua, juga didukung program-program yang terkait dengan agenda pelaksanaan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025, koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku.

PRIORITAS 11: KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI

- | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SASARAN: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya; 2. Terselenggaranya revitalisasi museum dan perpustakaan; 3. Terselenggaranya fasilitasi penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten; 4. Terselenggaranya penelitian dan pengembangan (Litbang) bidang kebudayaan dan bidang arkeologi dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan; 5. Meningkatnya apresiasi, kreativitas, dan produktivitas para pelaku seni; 6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi film nasional dan layanan lembaga sensor film; 7. Meningkatnya kapasitas dan kreativitas pemuda di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan taqwa, seni, budaya, dan industri kreatif; 8. Terselenggaranya paket-paket riset dasar, riset terapan, dan paket riset insentif. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ARAH KEBIJAKAN:**
1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap arti penting pembangunan karakter dan jati diri bangsa;
 2. Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya;
 3. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya;
 4. Peningkatan kapasitas sumber daya kebudayaan; dan
 5. Peningkatan dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

- SASARAN :**
1. Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia, yang diwujudkan melalui upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat, serta peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran dan pemanfaatan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas.
 2. Meningkatnya kemampuan memantau, mendeteksi secara dini ancaman bahaya serangan terorisme dan meningkatnya efektivitas proses deradikalisasi.
 3. Terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan. Pencapaian sasaran ini secara optimal akan meningkatkan kemandirian alutsista TNI dan alat utama Polri baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun variasinya.
 4. Meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia.
 5. Meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan upaya peningkatan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia di berbagai bidang.

- ARAH KEBIJAKAN:**
1. Menyempurnakan tata kelola koordinasi pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan terorisme, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme.
 2. Melaksanakan pendidikan politik untuk penanaman nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan kepada masyarakat luas.
 3. Meningkatkan pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui peningkatan pengadaan alutsista TNI dan Alut Polri, dan secara simultan meningkatkan penelitian dan pengembangan, serta dukungan pendanaannya.
 4. Meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan perdamaian dunia melalui peningkatan kerja sama multilateral di bidang kejahatan lintas negara dan terorisme.
 5. Peningkatan koordinasi penanganan perkara Tipikor dan upaya penyelamatan aset hasil Tipikor diantara penegak hukum.
 6. Peningkatan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG PEREKONOMIAN

Industri Pengolahan NonMigas

SASARAN: Sektor industri pengolahan non migas tumbuh 7,2 persen.

ARAH KEBIJAKAN: Akselerasi industrialisasi melalui penumbuhan industri pengolah hasil tambang, hasil pertanian, padat karya dan penyedia kebutuhan domestik, serta IKM yang sehat, kuat dan mandiri. Secara umum arah kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dalam rangka dukungan pembangunan infrastruktur produksi dan jaringan distribusi;
2. Peningkatan kepastian regulasi dan pelayanan birokrasi yang lebih efektif;
3. Peningkatan ketersediaan bahan baku;
4. Peningkatan ketersediaan energi;
5. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan;
6. Peningkatan ketersediaan Sumberdaya Manusia yang handal;
7. Peningkatan kemampuan teknologi baik produk maupun proses produksi;
8. Peningkatan akses ke pasar domestik dan ekspor.

Kerjasama Ekonomi Internasional

SASARAN:

1. Sasaran dalam rangka peningkatan pencapaian komitmen Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 adalah pemenuhan *scorecard* MEA sebesar 90 persen.
2. Sasaran dalam rangka penguatan peran dan kinerja diplomasi Indonesia di bidang ekonomi adalah menyukseskan penyelenggaraan ketuanrumahan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO IX dan penyelenggaraan keketuaan dan ketuanrumahan Indonesia dalam APEC 2013.

ARAH KEBIJAKAN:

1. Memanfaatkan Momentum Keketuaan dan Ketuanrumahan Indonesia pada kedua pertemuan tersebut untuk membawa kepentingan nasional dan mendorong aktivitas perekonomian domestik;
2. Mendorong terciptanya sistem perdagangan multilateral dan regional yang saling menguntungkan dan non-diskriminatif, dengan tetap mengedepankan kepentingan untuk meningkatkan ekonomi nasional;
3. Meningkatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk mendorong pencapaian *Scorecard* MEA;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian *scorecard* MEA secara berkala secara internal oleh Pemerintah Indonesia.

Ketenagakerjaan

	A. Tenaga Kerja Muda
SASARAN :	Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2013 sebesar 5,8-6,1 persen
ARAH KEBIJAKAN:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian kesempatan kedua kepada siswa yang meninggalkan sekolah lebih awal 2. Peningkatan keahlian untuk dapat bekerja 3. Peningkatan kualitas pemagangan berdasarkan kebutuhan perusahaan 4. Perluasan kesempatan bagi kaum muda untuk berusaha 5. Peningkatan akses layanan informasi peluang kerja
	B. Tenaga Kerja Indonesia
SASARAN :	Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2013 adalah meningkatnya kualitas pelayanan dan perlindungan kepada TKI, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, jumlah TKI yang bermasalah di luar negeri dapat ditekan. Meningkatnya kualitas pelayanan dan perlindungan tersebut antara lain ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran pemerintah daerah dalam penyiapan keberangkatan calon TKI; 2. Terwujudnya pos pelayanan TKI di kecamatan di 123 kabupaten/kota daerah kantong TKI; 3. terselesaikannya seluruh masalah pengaduan yang diterima oleh hotline service; dan 4. Terdaftarinya seluruh TKI yang bekerja di luar negeri sesuai nomor induk kependudukan (NIK). Diperkirakan jumlah TKI yang dilayani Pemerintah pada tahun 2013 akan mencapai 600.000 orang.
ARAH KEBIJAKAN:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan pos pelayanan TKI satu atap tingkat kecamatan di 123 kabupaten/kota kantong TKI; 2. Pendelegasian kewenangan pelayanan penempatan calon TKI kepada pemerintah daerah

Pengembangan Koperasi dan UMKM

SASARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kontribusi pemberdayaan UMKM dalam upaya pengurangan angka kemiskinan; 2. Meningkatnya daya saing UMKM yang ditunjukkan antara lain oleh meningkatnya (i) produktivitas UMKM sebesar 5,0 persen; (ii) penyerapan tenaga kerja sebesar 2,0 persen; dan (iii) sumbangan UMKM pada pembentukan PDB sebesar 6,0 persen; dan (iv) nilai ekspor produk UMKM sebesar 15,0 persen; dan 3. Meningkatnya kapasitas dan kualitas koperasi yang ditunjukkan antara lain oleh meningkatnya (i) proporsi jumlah koperasi aktif menjadi 77,0 persen dari total koperasi; (ii) proporsi jumlah koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan menjadi 53,0 persen dari koperasi aktif; dan (iii) volume usaha koperasi sebesar 20,0 persen.
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARAH KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan peraturan perundang-undangan, 2. Pengembangan sistem informasi koperasi dan UMKM (KUMKM) salah satunya melalui Survey Nasional KUMKM; 3. Pengembangan sarana dan prasarana usaha koperasi dan UMKM melalui pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM dan dukungan sarana pemasaran melalui pembangunan pasar percontohan dan pasar tradisional; 4. Pengembangan dan perluasan pasar ekspor melalui pengembangan sistem informasi konsolidasi kargo UKM ekspor, dan ujicobanya di pelabuhan laut utama; 5. Pengembangan kemitraan koperasi dan UMKM melalui penyiapan KUMKM sebagai mitra investasi; 6. Peningkatan produktivitas dan mutu; 7. Peningkatan daya saing KUMKM yang berpotensi ekspor dan berbasis inovasi; dan 8. Revitalisasi koperasi.
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kepariwisataan

SASARAN:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,0 juta orang dan jumlah pergerakan wisatawan nusantara menjadi 250 juta perjalanan; 2. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional menjadi 8,35 juta orang; 3. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDB menjadi sebesar 4,2 persen; 4. Meningkatnya nilai investasi terhadap nilai investasi nasional menjadi 4,64 persen; 5. Meningkatnya perolehan devisa yang diperoleh dari kunjungan wisman menjadi USD 10,35 miliar; 6. Meningkatnya pengeluaran wisatawan nusantara menjadi sebesar Rp. 175,0 triliun; 7. Meningkatnya kontribusi PDB ekonomi kreatif terhadap PDB sebesar 7,38 persen; 8. Meningkatnya partisipasi tenaga kerja di bidang ekonomi kreatif sebesar 8,35 persen; 9. Meningkatnya kontribusi unit usaha di bidang ekonomi kreatif terhadap unit usaha nasional sebesar 7,31 persen; 10. Meningkatnya kuantitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja sebesar 1.443 orang; 11. Meningkatnya profesionalisme tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang di sertifikasi sebesar 9.000 orang.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARAH KEBIJAKAN:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 persen secara bertahap dalam 5 tahun; 2. Promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif;
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata;
4. Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan *hospitality management* yang kompetitif di kawasan Asia;
5. Peningkatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif industri berbasis kreativitas;
6. Peningkatan penghargaan atau apresiasi terhadap produk-produk berbasis kreativitas;
7. Peningkatan pemasaran dan promosi efektif dan terpadu untuk produk-produk kreatif unggulan;
8. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana bagi pengembangan ekonomi kreatif; dan
9. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.

Kepemudaan dan Keolahragaan

- | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SASARAN: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya; 2. Meningkatnya kapasitas, kompetensi, kreativitas dan inovasi pemuda; 3. Terlaksananya penyelenggaraan <i>Islamic Solidarity Games</i> tahun 2013 di Indonesia; dan 4. Dipertahankannya peringkat Juara Umum pada kejuaraan SEA Games XXVII tahun 2013 di Myanmar. |
| ARAH KEBIJAKAN: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; dan 2. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional. |

Kehidupan Beragama

- | | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SASARAN: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas dan kapasitas penyuluhan dan bimbingan tentang pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada keluarga dan masyarakat; 2. Terwujudnya harmoni sosial yang ditandai dengan meningkatnya dialog dan kerja sama antarumat beragama; 3. Meningkatnya kualitas dan Profesionalisme pelayanan ibadah haji yang ditandai dengan pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar; dan 4. Meningkatnya tata kelola pembangunan bidang agama. |
| ARAH KEBIJAKAN: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama melalui peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, peningkatan layanan keagamaan, peningkatan kualitas lembaga sosial keagamaan, serta penelitian dan pengembangan agama; 2. Peningkatan kerukunan umat beragama melalui penanganan daerah |

paska konflik, optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang kerukunan, kebijakan pemerintah tentang pelayanan umat agama khususnya, pengentenghar: sikap ilah perilsu keagamaan yang ir dasif dar toleran, *Interfaith Dialogue* dan perancangan kasus aliran serupadan; dan

3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji melalui pengembangan indikator kepuasan jemaah haji terhadap mutu penyelenggaraan haji, penyusunan rancangan undang-undang haji untuk pengelolaan dana haji, dan penerapan standar ISO untuk penyelenggaraan haji.

Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

- SASARAN:**
1. Tersusunnya kebijakan pelaksanaan PUG bidang politik dan pengambilan keputusan, serta ketenagakerjaan;
 2. Terlaksananya fasilitasi kebijakan pelaksanaan PUG dan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan;
 3. Terlaksananya penerapan sistem data terpilah gender; dan
 4. Terlaksananya fasilitasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak.

- ARAH KEBIJAKAN:**
1. Penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh kementerian dan lembaga, peningkatan koordinasi dan kerjasama lintasbidang, lintassektor, lintasprogram, lintaspelaku, dan lintaskementerian/lembaga (K/L), dan sistem manajemen data dan informasi gender, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; dan
 2. Peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.

B. ARAH PEMBANGUNAN BIDANG, PENGARUSUTAMAAN, DAN LINTAS BIDANG

Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu:

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Bidang Sarana dan Prasarana
5. Bidang Politik
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
7. Bidang Hukum dan Aparatur
8. Bidang Wilayah dan Tataruang
9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Arah dan kebijakan masing-masing bidang pembangunan tersebut diuraikan

dalam Buku II.

Sinergi antar bidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RKP 2013. Pada dasarnya, pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang, sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat.

Selanjutnya, di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RKP 2013 terdapat prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan, yang mencakup: (i) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (ii) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (iii) pengarusutamaan gender. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip pengarusutamaan ini, upaya-upaya mengatasi masalah dan tantangan pembangunan akan semakin efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat.

RKP 2013 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang meliputi: (i) penanggulangan kemiskinan; (ii) perubahan iklim global; (iii) pembangunan kelurahan berdimensi kerdasan; dan (iv) perlindungan anak. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antar bidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks.

C. ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, kebijakan pengembangan wilayah pulau-pulau besar diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Secara nasional, pembangunan kewilayahan pada tahun 2013 masih

dihadapkan pada permasalahan utama yaitu masih tingginya kesenjangan antar wilayah antara Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali, antara wilayah barat dan timur Indonesia, antara pusat-pusat pemerintahan utama dan antara kota-kota besar dan metropolitan dengan wilayah perdesaan terutama kesenjangan dalam perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Untuk itu, penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2013 memperimbangan berbagai hal, yaitu: (i) keterkaitan antar wilayah dari segi sosial, ekonomi, budaya dan politik sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (ii) kinerja pembangunan dan isu strategis di setiap wilayah; (iii) tujuan dan sasaran pembangunan setiap wilayah sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014; (iv) rencana tata ruang wilayah pulau dan pila pemanfaatan ruang yang optimal; (v) pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3.0; dan (vi) pelaksanaan program percepatan pengurangan kemiskinan, yaitu: Klaster 1 (pertama) Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga, Klaster 2 (kedua) Program Pemberdayaan Masyarakat, Klaster 3 (ketiga) Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro, dan Klaster 4 (keempat) Program Pro Itakya.

Pada tahun 2013 selain berbagai program dan kegiatan prioritas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial dasar di berbagai bidang, prioritas pemerataan wilayah juga dilakukan melalui pendekatan berbasis pulau-pulau besar secara terpadu.

Untuk menjaga momentum perubahan di wilayah Sumatera, prioritas pengembang wilayah tahun 2013 adalah untuk pengembang Kawasan Ekonomi Khusus Pengolahan Sawit Sei Mangkei; pengembang Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Banda Aceh Darussalam; pengembang mutu dan produksi perikanan di Aceh, Bengkulu, Riau, Lampung, dan Kepulauan Riau; pengembang pusat industri dan pengolahan perikanan di Sumatera Utara dan Lampung; pengembang sarana irigasi di Aceh, Kepulauan Riau, Riau, dan Sumatera Selatan, serta pengembang pariwisata di Bangka Belitung. Untuk meningkatkan keterkaitan antar wilayah dilakukan melalui pengembangan infrastruktur penghubung berupa jalan di Aceh, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara; pengembangan jalan tol di Riau dan Sumatera Utara; pengembang infrastruktur kereta api di Aceh dan Sumatera Barat; pengembang Bandara Sultan Thaha, Bandara Raja Haji Fisabilillah, Bandara Tanjung Pandan, Bandara Sultan Mahmud Badarudin, dan Bandara Sultan Syarif Kasim II. Selain itu juga pengembangan Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Merak-Bakaheuni, dan Pelabuhan Panjang.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali prioritas pengembangan wilayah pada tahun 2013 antara lain adalah melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung, pengembangan pertanian di Bali, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, pengembangan pengairan dan irigasi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain itu, untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah

dilakukan melalui pengembangan infrastruktur jalan di Bali, jalan Lintas Utara Jawa, dan Rute Semarang-Bawen-Yogyakarta, pengembangan jalur tol Tanjung Priok, Cisumdawu, dan Martungan-Sulu-Kertosono. Selanjutnya dilakukan pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, Pamukon, Taddar, Pusean, dan Bracia serta Pengembangan infrastruktur perkeretaapiian di jalandetahuk (elektrifikasi) dan *double track* lintas utara jawa.

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan prioritas pengembangan wilayah pada tahun 2013 dilaksanakan melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KET) Khatulistiwa, DAS Kabab, Sasamba, dan Batuicin, pengembangan mata dan produksi pertanian. Untuk mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan di wilayah Kalimantan dilaksanakan melalui pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: pengembangan Kota Arus, Japohabang, Nangahadai, Entikong, Jasa, Nurukat, Simanggaris, Long Midang, dan Long Pahangai. Selanjutnya, untuk peningkatan keterkaitan antar wilayah dilakukan peningkatan jaringan infrastruktur melalui pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan serta pengembangan jaringan pengairan dan irigasi.

Prioritas pengembangan wilayah Sulawesi sebagai salah satu wilayah potensi, di luar wilayah Jawa-Bali dan Sumatera pada tahun 2013 dilaksanakan melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KET) Manado-Bitung, Palopo, dan Parepare, serta pengembangan produktivitas dan mutu pertanian di semua provinsi. Selain itu juga dilakukan pengembangan infrastruktur jalan serta pengembangan jaringan pengairan dan irigasi. Untuk mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan serta meningkatkan jaringan infrastruktur di wilayah Sulawesi dilaksanakan melalui Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Marangane dan Tahana.

Untuk wilayah Nusa Tenggara dalam rangka meningkatkan daya saing daerah prioritas pengembangan wilayah pada tahun 2013 dilaksanakan dengan melakukan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KET) Bima dan Mbay; pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara, Alambua, Kalamenanu, dan Kalabahi. Terkait dengan peningkatan infrastruktur wilayah dilaksanakan melalui pengembangan infrastruktur jalan dan pelabuhan penyeberangan serta pengembangan pengairan dan irigasi. Secara khusus untuk percepatan pembangunan wilayah Nusa Tenggara Timur kegiatan prioritas tahun 2013 dilaksanakan melalui pengembangan pusat produksi dan pengolahan komoditas unggulan jagung dan kakao, pusat pembibitan dan produksi sapi dan cendana, pusat produksi dan pengolahan hasil-hasil perikanan, rumput laut; serta pusat produksi dan pengolahan garam, pengembangan pariwisata melalui pengembangan desa wisata terutama pengembangan Kawasan Wisata Alam Komodo dan seluruh lokasi potensial Kawasan Wisata Alam, Wisata Budaya dan Wisata minat khusus serta pengembangan infrastruktur yang menghubungkan antarkota, pulau-pulau, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil, dan pulau-pulau terpencil dan terdepan/terluar.

Dalam rangka peningkatan daya saing daerah dan pengembangan sektor-

sektor unggulan prioritas pengembangan wilayah Maluku pada tahun 2013 dilakukan melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Seram, pengembangan produksi dan pengolahan produk pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pengembangan Pariwisata Reaari. Untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan serta peningkatan jaringan infrastruktur wilayah Maluku dilaksanakan melalui Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Daruba, Dobo, Saumlaki, dan Lasaki, pengembangan infrastruktur jalan dan pengembangan Pelabuhan Ambar, Suli, dan Urae.

Untuk wilayah Papua, prioritas pengembangan wilayah dalam upaya meningkatkan daya saing daerah pada tahun 2013 dilakukan melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Teluk Cenderawasih, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pengurangan kemiskinan. Untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan prioritas pengembangan dilakukan melalui Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Jayapura, Tanah Merah, Merauke. Prioritas pengembangan untuk peningkatan jaringan infrastruktur dilakukan melalui pengembangan infrastruktur jalan, pengembangan pelabuhan Kaimana dan Agats, pengembangan bandara Sertani dan Saikat. Dalam rangka percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat beberapa prioritas pengembangan dilaksanakan melalui penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya, Lani Jaya, Paniai, Nabire, Bulikera, Pegunungan Jirang (Papua) dan Kabupaten Fak Fak dan Manokwari (Papua Barat), pengembangan peternakan di Kawasan Pegunungan Tengah, Bomberai, dan Keber, penanggulangan kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, pengembang ekonomi rakyat di Kabupaten Jayapura, Waropen, Yapen, Nabire, Mappi, Keerom, Asmat, Merauke, dan Mimika (Papua) dan Kabupaten Sorong Selatan, Kaimana, Fak Fak, dan Teluk Bintuni (Papua Barat), peningkatan pelayanan pendidikan gratis sampai SMU hingga menjangkau seluruh distrik dan kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat, peningkatan pelayanan kesehatan gratis sampai SMU hingga menjangkau seluruh distrik dan kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta pengembang infrastruktur dasar di seluruh Papua dan Papua Barat terutama pengembang sumber energi alternatif terbarukan (PLTMH, PLTS) dan parris serier di Timika dan Manokwari.

BAB VI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

A. Keuangan Negara

Kebijakan fiskal tahun 2013 akan diarahkan untuk mencapai anggaran berimbang (*zero deficit*) pada tahun 2014 dengan tetap memberikan dorongan terhadap perekonomian melalui langkah-langkah konsolidasi fiskal guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, adil, dan merata.

Pada tahun 2013 pendapatan negara dan hibah diperkirakan mencapai 14,9 persen terhadap PDB, yang didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar 11,5 persen terhadap PDB dan penerimaan bukan pajak sebesar 3,4 persen terhadap PDB. Sementara itu, belanja negara diperkirakan sebesar antara Rp1.400 triliun sampai Rp1.600 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,7 persen terhadap PDB dan transfer ke daerah sebesar 5,2 persen terhadap PDB.

Pemerintah merencanakan belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 539,1 triliun atau lebih tinggi Rp 30,8 triliun dari belanja Kementerian/Lembaga APBN Tahun 2012. Pemerintah melaksanakan kebijakan *flat policy* belanja operasional. Alokasi belanja operasional tahun 2013 mencapai Rp 164,2 triliun. Sementara itu, belanja non-operasional diarahkan guna memenuhi sasaran pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional.

Dengan perkiraan penerimaan dan belanja tersebut, ketahanan fiskal yang mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian diperkirakan tetap terjaga. Pada tahun 2013, defisit APBN diperkirakan sekitar 1 persen PDB, yang akan ditutup oleh pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Ketahanan fiskal yang terjaga juga tercermin dari stok utang pemerintah yang diperkirakan menurun menjadi 21 persen PDB pada tahun 2013.

B. Kebijakan Fiskal

Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, maka RAPBN Tahun Anggaran 2013, akan diarahkan untuk:

1. Mendukung upaya STIMULASI EKONOMI melalui pelaksanaan Empat Pilar Strategi Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan:
 - a. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas, inklusif dan berkeadilan (*Pro-Growth*);
 - b. Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran (*Pro-job*);
 - c. Pengentasan Kemiskinan (*Pro-Poor*), serta
 - d. Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan (*Pro Environment*) dengan tetap.

2. MENJAGA KESINAMBUNGAN FISKAL (*Fiscal Sustainability*) melalui langkah-langkah:

- a. Pengendalian dan/atau Pemutusan Defisit Anggaran;
- b. Penurunan secara bertahap rasio utang terhadap PDB.

Selanjutnya arah kebijakan ini dijabarkan ke arah kebijakan untuk masing-masing jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Modal, diarahkan untuk:

- a. Mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur dasar (infrastruktur energi, transportasi, irigasi, ketahanan pangan, perumahan, air bersih, dan komunikasi);
- b. Memperbesar peran belanja modal, terutama infrastruktur dalam mendukung MPREI, dalam meningkatkan investasi pemerintah;
- c. Mendukung stabilitas keamanan melalui percepatan pencapaian *minimum essential force (MEF)*;
- d. Mendukung pendanaan kegiatan multiyears dalam rangka menjaga kesinambungan program dan pendanaan perbarungan;
- e. Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif akibat perubahan iklim (*climate change*).

2. Belanja Pegawai, diarahkan untuk:

- a. Melakukan penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok PNS;
- b. Menurunkan pemberian gaji dan pensiun ke 13;
- c. Merampingkan kebutuhan anggaran remunerasi K/L terkait reformasi birokrasi;
- d. Mengelola jumlah PNS mengacu pada prinsip *zero growth*.

3. Belanja Barang diarahkan untuk:

- a. Menjaga kelancaran dan kualitas penyulenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi dan penggunaan belanja barang K/L:
 - i. Pelaksanaan kebijakan *fat policy* belanja barang operasional
 - ii. Efisiensi belanja perjalanan dinas
- c. Memperhilangkan peningkatan harga barang dan jasa, serta perkembangan organisasi;
- d. Meramping pengadaan aset yang akan diserahkan ke Pemerintah Daerah/masyarakat.
- e. Menampung alokasi untuk pemeliharaan rutin jalan/jembatan/aset infrastruktur lainnya, diklat, litbang, dan peningkatan capacity building dalam rangka mendukung program-program pembangunan nasional.

4. Belanja Subsidi, diarahkan untuk:

- a. Menata ulang kebijakan subsidi agar makin adil dan tepat sasaran,
- b. Menyusun sistem seleksi yang ketat untuk menentukan sasaran penerima subsidi yang tepat,
- c. Menggunakan basis data yang transparan,
- d. Menata ulang sistem penyaluran subsidi penyaluran subsidi yang

lebih akuntabel.

5. Bantuan Sosial diarahkan untuk:
 - a. Meningkatkan dan memperluas cakupan program-program perlindungan sosial melalui:
 - i. Jantlan Operasional Sekolah (JOS) Kementerian Agama yang berkeadilan dan merata untuk semua agama;
 - ii. Beasiswa untuk Siswa dan Mahasiswa Miskin;
 - iii. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) serta
 - iv. Program Keluarga Harapan (PKH)
 - b. Melanjutkan kesinambungan program pemberdayaan masyarakat melalui PNPX mandiri;
 - c. Menanggulangi risiko sosial akibat bencana alam melalui pengalokasian Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam; serta
 - d. Mendukung pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3E).
6. Belanja Lain-Lain diarahkan untuk:
 - a. Mengantisipasi perubahan asumsi ekonomi makro melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal.
 - b. Menyediakan alokasi anggaran untuk kontribusi kepada lembaga internasional;
 - c. Mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan dana cadangan beras Pemerintah (GRB), cadangan benih nasional (CBN), dan cadangan stabilisasi harga pangan;
 - d. Menyediakan alokasi anggaran tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2014.

Di samping kebijakan untuk masing-masing jenis belanja, maka arah kebijakan fiskal di atas juga dijabarkan menjadi pedoman bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas belanja K/L, yaitu dengan:

1. Meningkatkan efisiensi alokasi (*allocative efficiency*), yaitu alokasi antara:
 - a. Belanja operasional dan non operasional
 - b. Komposisi belanja prioritas non prioritas
 - c. Kegiatan prioritas K/L
2. Meningkatkan sinergi pusat daerah:
 - a. Kerangka pendanaan dan kerangka regulasi, termasuk DAK, dana desentralisasi, dan tugas pembantuan.
 - b. Sinergi alokasi K/L; pusat; daerah dan masyarakat.
3. Membatasi penggunaan belanja negara untuk membiayai:
 - a. Perjalanan dinas dalam dan luar negeri;
 - b. Rapat dan konsinyering di luar kantor;
 - c. Honorarium tim;
 - d. Pembangunan gedung baru yang tidak langsung menunjang tugas dan fungsi K/L (mess, wisma, rumah dinas, rumah jabatan, gedung pertemuan);
 - e. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali:
 - i. Kendaraan fungsional (ambulans untuk rumah sakit, kendaraan untuk tahanan, kendaraan roda dua untuk penyuluh)

C. Kebijakan Transfer ke Daerah

ii. Penggantian kendaraan yang rusak berat

f. Komponen lain yang sejenis atau serupa.

Pembiayaan pembangunan melalui dana transfer ke daerah merupakan bagian dari pendanaan pembangunan nasional yang bersumber dari APBN. Dana transfer daerah ditujukan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah melalui pembangunan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana transfer ke daerah merupakan wujud dukungan pemerintah pusat terhadap kegiatan pembangunan di daerah. Alokasi Dana Transfer mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan dan urusan yang diserahkan kepada daerah. Dana transfer terdiri atas: (i) Dana Perimbangan; dan (ii) Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.

Kebijakan pengalokasian Dana Transfer pada tahun 2013 diarahkan untuk mendukung kesinambungan pembangunan di daerah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Dana Transfer juga untuk pelaksanaan program/kegiatan prioritas nasional di daerah, dan upaya pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tujuan dari dana transfer ke daerah ini adalah untuk:

1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah;
2. Menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah seiring dengan penerapan SPN dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;
4. Meningkatkan daya saing daerah;
5. Mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro;
6. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal;
7. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional dan sinergi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
8. Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
9. Meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan pasca konflik.

Agar tujuan pembangunan di daerah terwujud maka pengelolaan Dana Transfer harus sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik yakni tepat sasaran, tepat waktu, efisien, adil, transparan, akuntabel, dan memiliki kinerja terukur.

1. Dana Perimbangan

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari Dana Perimbangan adalah untuk membantu Daerah dalam mendarai kewenangannya, mengurangi selisihan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah, dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah.

Dana Perimbangan terdiri atas (i) Dana Alokasi Umum (DAU), (ii) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan (iii) Dana Bagi Hasil (DBH). Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Penentuan daerah penerima dan besarnya alokasi dana ke setiap daerah dilakukan dengan menggunakan formula dan kriteria penghitungan tertentu sebagaimana yang dimunculkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Formula yang digunakan diharapkan tidak menjadi disinsentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas keuangan dan kinerja pembangunan daerah, termasuk mengoptimalkan penerimaan di luar Dana Transfer. Penyempurnaan dilakukan terhadap mekanisme Dana Perimbangan dengan harapan daerah dapat meningkatkan fungsi pemerintahan khususnya di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemanfaatan Dana Perimbangan harus dirancang sedemikian rupa agar mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama terdapat pelayanan dasar sesuai SPK.

Jumlah Dana Perimbangan secara total mengalami peningkatan untuk mengakomodasi peningkatan kebutuhan daerah dan mendukung agar pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangannya dengan baik. Peningkatan alokasi Dana Perimbangan harus disertai dengan peningkatan kualitas pengelolannya melalui penyempurnaan formula penghitungan alokasi, peningkatan koordinasi perencanaan Dana Perimbangan di antara para pemangku kepentingan, dan pemenuhan atas unsur tata kelola yang baik. Salah satu unsur terpenting dalam tata kelola Dana Perimbangan adalah transparansi dari tahap perencanaan dan pengalokasian oleh pemerintah pusat, hingga tahap pelaksanaan di daerah.

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendarai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Formulasi penghitungan dan mekanisme pengalokasian DAU diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Jumlah alokasi DAU sekurang-kurangnya 26 persen dari PDN neto dengan tetap memperhitungkan faktor pengurang.

Penentuan besar dana yang mencakup 'kebutuhan fiskal daerah' dalam rangka melaksanakan fungsi dasar layanan umum harus mengacu pada tujuan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata di daerah. Arah kebijakan DAU pada tahun 2013 adalah:

1. Melanjutkan formula DAD berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dengan tetap memperhatikan asas pemerataan dan adil dalam pembangunan yang berkualitas;
2. Meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAD yang bersumber dari lembaga/instansi yang berwenang. Salah satunya melalui koordinasi antar instansi terkait;
3. Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam melaksanakan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari DAD;
4. Menggunakan prinsip *non-hold harmless*;
5. Meningkatkan keterkaitan dengan Dana Perimbangan lainnya (DBH dan DAK) sehingga benar-benar efektif mengurangi ketimpangan horizontal dan vertikal. Ini sesuai dengan amanat UU No.33 tahun 2004 bahwa ketiga komponen Dana Perimbangan merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Bagi Hasil. Sesuai dengan UU No.33 tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini bersumber dari pajak (penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak bumi dan bangunan, serta cukai hasil tembakau) dan sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas dan panas bumi). DBH dialokasikan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal dalam kapasitas fiskal (*vertical fiscal imbalance*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketimpangan antar sektor. Setiap daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan DBH dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana tersebut.

Arah kebijakan DBH pada tahun 2013 adalah:

1. Menyempurnakan proses perhitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel. Langkah ini sejalan dengan RPJMN 2010-2014 yang menekankan pada pelaksanaan tata kelola keuangan yang tepat waktu, tepat sasaran, efisien, dan akuntabel;
2. Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNPB yang dibagikan ke daerah;
3. Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Negara Pajak;
4. Menjaga kesinambungan sistem penyaluran tepat waktu dan tepat jumlah melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dengan daerah penghasil.

Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional. Alokasi DAK ke daerah ditentukan berdasarkan tiga kriteria sebagai berikut: a) *Kriteria Umum*, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah; b) *Kriteria Khusus*, yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; c) *Kriteria Teknis*, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK, yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

Pada tahun 2013, Pemerintahan akan lebih meniadakan alokasi DAK ke daerah-daerah tertinggal dengan bersinergi dengan dana-dana pusat (kementerian dan lembaga), sambil melanjutkan pengalihan dana dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Dekon/TP) yang telah menjadi urusan daerah ke DAK.

Arah kebijakan DAK tahun 2013 secara umum adalah:

1. Aspek Perencanaan

- a. Mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKP 2013 termasuk program-program prioritas nasional yang bersifat lintas sektor/kewilayahan;
- b. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal (SPM), melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat, serta meningkatkan efektivitas belanja daerah;
- c. Menetapkan perencanaan DAK dengan mendorong pendekatan berbasis hasil (output/outcome), serta sesuai dengan kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*) dan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*);
- d. Menetapkan lokasi dan jumlah alokasi DAK secara jelas dan transparan, dan memberikan perhatian yang seimbang kepada kriteria-kriteria pengalokasian;
- e. Meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) sehingga lebih tepat sasaran;
- f. Meningkatkan akurasi data-data teknis sebagai basis kebijakan kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan ketajaman dan menghindari duplikasi kegiatan antar Bidang DAK;
- g. Membantu proses perencanaan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan di daerah dalam rangka mewujudkan *outcome* yang

- diharapkan;
- h. Penetapan lokasi diupayakan mencakup daerah tertinggal sesuai dengan bidang DAK yang dibutuhkan oleh daerah tertinggal tersebut.
2. Aspek Penganggaran
 - a. Meningkatkan kesesuaian alokasi dengan kebutuhan daerah, serta sesuai dengan siklus dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui koordinasi perencanaan dan pelaksanaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan (mulai dari Musrenbangda);
 - c. Mendorong Kementerian teknis untuk mengalirkan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan Daerah secara bertahap menjadi DAK (sesuai pasal 108 UU No.33 Tahun 2004).
 3. Aspek Pelaksanaan

Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah sehingga terwujud sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD (sumber-sumber pendanaan lainnya).
 4. Aspek Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Mendorong kementerian teknis untuk mengalihkan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan Daerah secara bertahap menjadi DAK (sesuai pasal 108 UU No.33 Tahun 2004);
 - b. Menerapkan kebijakan *disincentive* kepada daerah yang tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK di daerahnya, menggunakan kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengalokasian DAK.

Kebijakan bidang DAK tahun 2013 ditentukan berdasarkan pada: (i) dukungan terhadap pencapaian prioritas nasional dalam RPJMN dan RKP 2013; (ii) arah kebijakan DAK dalam RPJMN 2010-2014 yang fokus pada *outcome oriented* dan (iii) mendukung percepatan pembangunan daerah; dan (iv) mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat (SPM).

Selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka mendukung tema RKP 2013, maka dilakukan regrouping atas bidang DAK dengan mempertimbangkan efektivitas pencapaian sasaran nasional secara signifikan. Jumlah bidang DAK 2013 ditentukan sebanyak 19 bidang yang dikelompokkan menjadi 13 kelompok bidang.

Regrouping bidang dilakukan berdasarkan keterkaitan bidang DAK dengan (i) prioritas nasional; (ii) pendekatan outcome; (iii) kedekatan substansi teknis. Regrouping ini bertujuan untuk mewujudkan pematangan dan evaluasi DAK yang berbasis outcome serta meningkatkan koordinasi penyusunan pelunja teknis oleh K/L terkait sehingga tidak terjadi duplikasi. Meskipun dilakukan regrouping, namun tidak ada perubahan dalam tata kelola DAK.

TABEL 6.1
KELOMPOK BIDANG DAK 2013

Prioritas Nasional	Bidang DAK tahun 2012	Kelempok Bidang DAK tahun 2013	Bidang DAK tahun 2013
Kelembagaan, Bina Keadilan dan Tata Kelola, Pendidikan, Kesehatan	Prasarana Pemerintahan Daerah	1. Prasarana Pemerintahan Daerah	1. Prasarana Pemerintahan Daerah
	Pendidikan	2. Pendidikan	2. Pendidikan
	Kesehatan	3. Kesehatan	3. Kesehatan
	Keluarga Berencana	4. Keluarga Berencana	4. Keluarga Berencana
	Infrastruktur	5. Infrastruktur	5. Infrastruktur
Infrastruktur	Infrastruktur Air Minum		6. Infrastruktur Air Minum
	Infrastruktur Listrik		7. Infrastruktur Listrik
	Infrastruktur Jalan		8. Infrastruktur Jalan
	Kelembagaan dan Peningkatan Daerah	6. Peningkatan dan Pematangan	10. Peningkatan dan Pematangan
	Perumahan dan Permukiman	9. Perumahan dan Permukiman	11. Perumahan dan Permukiman
	Transportasi Perkotaan	7. Pembangunan Perkotaan	12. Transportasi Perkotaan
	Energi	13. Energi Perkotaan	13. Energi Perkotaan
Kelembagaan, Binaan	Perikanan	8. Perikanan	14. Perikanan
	Kelautan dan Perikanan	9. Kelautan dan Perikanan	14. Kelautan dan Perikanan
Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Kelautan	10. Kelautan	15. Kelautan
	Uyung dan Hidup	11. Uyung dan Hidup	16. Uyung dan Hidup
Kelembagaan dan Hilirisasi Usaha	Sarana Peningkatan	12. Peningkatan Usaha	17. Sarana dan Prasarana Peningkatan
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Prioritas Khusus	Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	11. Kawasan Perbatasan dan Tertinggal	18. Sarana dan Prasarana Daerah Perbatasan
	Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal		19. Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal

I. KELOMPOK BIDANG PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERDIRI ATAS DAK BIDANG PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH.

Arah kebijakan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Prioritas diberikan kepada daerah pemekaran, dan daerah tertinggal guna meningkatkan kualitas

pelayanan publik di daerah tersebut.

Lingkup kegiatan: (i) Pembangunan/pelebaran gedung kantor Bupati/Walikota; (ii) Pembangunan/pelebaran gedung kantor Setda Kab/Kota; (iii) Pembangunan/pelebaran gedung kantor DPRD Kab/Kota dan sekretariat DPRD Kab/Kota; dan (iv) Pembangunan/pelebaran gedung kantor SKPD Kab/Kota.

Sasaran DAK: Meningkatkan ketersediaan prasarana pemerintahan daerah sejajar dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

II. KELOMPOK BIDANG DAK PENDIDIKAN YANG TERDIRI ATAS DAK BIDANG PENDIDIKAN.

Arah kebijakan DAK Bidang Pendidikan adalah untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermula dan meraka dalam rangka memenuhi standar pelayanan minima (SPM) dan secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, kegiatan DAK Pendidikan 2013 juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan mencukupi. Kegiatan DAK Pendidikan tahun 2013 akan diprioritaskan untuk melaksanakan rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang belajar rusak sedang jenjang SD/SDLB dan SMP/SMPLB, rehabilitasi ruang belajar rusak berat jenjang SMA/SMK/SMLB, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Ruang Belajar Lain (RBL) beserta perabotnya bagi jenjang SMP/SMPLB, pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya, penyediaan buku referensi perpustakaan, pembangunan laboratorium bagi jenjang SMA/SMK/SMLB, dan penyediaan peralatan pendidikan. Sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2013 meliputi jenjang SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/SMLB, baik negeri maupun swasta.

Lingkup kegiatan DAK Bidang Pendidikan akan diprioritaskan untuk melaksanakan: (i) Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang jenjang SD/SDLB; (ii) Rehabilitasi ruang belajar rusak sedang jenjang SMP/SMPLB; (iii) Pembangunan ruang belajar jenjang SMP/SMPLB; (iv) Rehabilitasi ruang belajar rusak berat jenjang SMA/SMK/SMLB; (v) Pembangunan ruang kelas baru jenjang SMP/SMPLB; (vi) Pembangunan perpustakaan jenjang SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/SMLB; (vii) Pembangunan ruang Laboratorium jenjang SMA/SMK/SMLB; (viii) Pengadaan peralatan pendidikan jenjang SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/SMLB; dan (ix) Pengadaan buku teks pelajaran/ referensi jenjang SMP/SMPLB dan SMA/SMK/SMLB.

Sasaran tahun 2013 sebagai berikut: (i) Persentase Provinsi dengan Angka Partisipasi Murni (APM) SD >83,57% menjadi 84,4%; (ii) Persentase Provinsi dengan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP >58,17% menjadi 72,61%; (iii) Meningkatnya persentase SD yang memiliki perpustakaan menjadi 75%; (iv) Meningkatnya persentase SMP yang memiliki perpustakaan menjadi 95,9%; (v) Meningkatnya APK jenjang SD/SDLB dan SMP/SMPLB menjadi 85,19% dan 60,82%; (vi) Meningkatnya persentase ruang kelas SD/SDLB dan SMP/SMPLB dalam kondisi 100% baik; (vii) Meningkatnya persentase SMA yang memiliki perpustakaan menjadi 96,1%; (viii) Meningkatnya persentase SMK yang memiliki perpustakaan menjadi 80%; (ix) Meningkatnya APK jenjang SMA/SMLB/SMK menjadi 68,3%; (x) Meningkatnya persentase SMP yang memiliki ruang dan alat lab. bahasa menjadi 53,5%; (xi) Meningkatnya persentase SMP yang memiliki alat kesenian menjadi 85%; (xii) Meningkatnya persentase SMP yang memiliki alat peraga matematika menjadi 70%; (xiii) Meningkatnya persentase SMP yang memiliki alat peraga IPS menjadi 70%; (xiv) Meningkatnya persentase SMP yang memiliki laboratorium IPA menjadi 92,5%; (xv) Meningkatnya persentase SMA memiliki laboratorium Multimedia menjadi 68%; (xvi) Meningkatnya persentase SMA memiliki laboratorium IPA (kimia, fisika, biologi) menjadi 90%; (xvii) Meningkatnya persentase SMA memiliki laboratorium Komputer menjadi 92,9%; (xviii) Meningkatnya persentase SMK memiliki laboratorium sains yang relevan sesuai standar sarana prasarana SMK menjadi 86%; dan (xix) Meningkatnya persentase SMK memiliki laboratorium bahasa sesuai standar sarana prasarana SMK menjadi 89%.

III. KELOMPOK BIDANG DAK KESEHATAN YANG TERDIRI ATAS DAK BIDANG KESEHATAN.

Arah kebijakan DAK Bidang Kesehatan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi serta pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK), dengan dukungan penyediaan jaminan persalinan dan jaminan kesehatan di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan termasuk kelas III Rumah Sakit, penyediaan dan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin yang berkualitas, aman, bermutu dan bermanfaat, dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan 2014.

Lingkup kegiatan: (i) Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar: Pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan bagi Puskesmas dan jaringannya, meliputi: (a) Pembangunan Puskesmas Pamariti/Puskesmas di DTPK/Puskesmas Perawatan mampu DOND/instalasi pengolahan limbah puskesmas/pembangunan puskesmas/puskesmas; (b) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas perawatan di DTPK; (c) Rehabilitasi Puskesmas/rumah dinas dokter/dokter gigi/paramedis (Kopel); (d) Penyediaan sarana dan prasarana penyalangan jaringan air/pengadaan UKBM KII; (ii) Subbidang Pelayanan Kesehatan Rajukan: Pemenuhan/pengadaan sarana, prasarana, dan peralatan bagi Puskesmas dan jaringannya, meliputi: (a) Pengadaan sarana dan prasarana RS Sier PONDOK; (b) Penyediaan Fasilitas Tempat Tidur Kelas II RS; (c) Pembangunan IPI RS; (d) Pemenuhan peralatan UII RS/IDRS; (e) Pengadaan sarana dan prasarana IGD dan IGD; (iii) Subbidang Pelayanan Kelermasian, meliputi: (a) Pembangunan baru Instalasi Farmasi Kab/Kota; (b) Rehabilitasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota; (c) Pembangunan baru Instalasi Farmasi gugus kepulauan/satelit.

Sasaran: (i) Jumlah Puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk sebanyak 91 puskesmas; (ii) Persentase puskesmas mampu DOND 90 persen; (iii) Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin sebanyak 9.323 puskesmas; (iv) Persentase RS kab/kota yang melaksanakan PONDOK menjadi 95 persen; (v) Persentase IIS yang melayani pasien penduduk miskin peserta Program Jamkesmas menjadi 90 persen; dan (vi) Persentase ketersediaan obat dan vaksin menjadi 95 persen.

IV. KELOMPOK BIDANG DAK KELUARGA BERENCANA YANG TERDIRI ATAS DAK BIDANG KELUARGA BERENCANA.

Arah kebijakan DAK Bidang Keluarga Berencana adalah untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, yang dilakukan melalui (i) Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerak, pembinaan program KCI lini lapangan; (ii) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB; (iii) Peningkatan sarana pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB; (iv) Peningkatan sarana pembinaan tumbuh kembang anak; dan (v) Peningkatan pelaporan dan pengolahan data dan informasi berbasis teknologi informasi.

Lingkup kegiatan: (i) Penyediaan sarana kerja dan mobilitas serta sarana pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi bagi tenaga lini lapangan; (ii) Pemenuhan sarana pelayanan KB di klinik KB (statis), sarana dan prasarana pelayanan KB keliling dan pembangunan gudang alat/obat kontrasepsi; (iii) Penyediaan sarana dan prasarana Penerangan KB keliling, pengadaan *public address* dan

KII; Kit; (iv) Penyediaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit; dan (v) Pembangunan/renovasi balai penyuluhan KB tingkat kecamatan.

Sasaran: Untuk mendukung pencapaian sasaran dan target peningkatan akseptor KB baru sebanyak 7,5 juta dan peserta KB aktif sebanyak 29,0 juta, sasaran dan target input DAK KA adalah: (i) Tersedianya 109 unit kendaraan bermotor roda dua; (ii) Tersedianya 112 mobil unit pelayanan KB keliling; (iii) Tersedianya 58 mobil unit pelayanan KB; (iv) Tersedianya 1.508 set IUD Kit; 2.387 unit Obgyn Bed bagi klinik KB; (v) Tersedianya 17.947 set BKB Kit bagi kelompok BKB di tingkat desa/keurahan; (vi) Tersedianya 132 unit *public address* bagi PPLKB/Ka. UPT; (vii) Tersedianya 16.013 set KII, KIL bagi PKB/PLKB; (viii) Terbangunnya 80 gudang alat dan obat kontrasepsi di kota/kota; (ix) Terlaksananya pembangunan balai penyuluhan KB di tingkat kecamatan sebanyak 1.799 unit; (x) Tersedianya 4.787 set sarana kerja bagi PKB/PLKB dan PPLKB/Ka. UPT; dan (xi) Tersedianya 5.440 *personal computer* di kecamatan. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut diperuntukkan bagi unit yang menjalankan fungsi pelayanan KB di kabupaten/kota/kecamatan klinik pelayanan KB.

V. KELOMPOK BIDANG DAK INFRASTRUKTUR TERDIRI ATAS BEBERAPA BIDANG, YAKNI: (i) INFRASTRUKTUR AIR MINUM; (ii) INFRASTRUKTUR SANITASI; (iii) INFRASTRUKTUR IRIGASI; (iv) INFRASTRUKTUR JALAN; (v) KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT.

Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Air Minum adalah meningkatkan cakupan pelayanan air minum dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan air minum di kawasan perkotaan, perdesaan, termasuk daerah tertinggal.

Lingkup kegiatan: (i) Perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan bagi MBR perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki *idle capacity* yang memadai untuk dibangun SR perpipaan; dan (ii) Pemasangan master meter untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan; daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki *idle capacity* yang memadai untuk dibangun SR perpipaan; dan (iii) Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) perdesaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah desa-desa dengan sumber air baku yang relatif mudah.

Sasaran: Meningkatnya pelayanan air minum perpipaan melalui penambahan SR sebanyak 128.690 unit, penyediaan SR berbasis master meter (MM) sebanyak 648 MM dan pembangunan SPAM

sederhana di 064 desa.

Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi adalah untuk Meningkatkan cakupan dan kehandalar pelayan sanitasi, terutama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan secara komunal/terdesentralisasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) penyediaan sanitasi di kawasan daerah rawan sanitasi, termasuk daerah tertinggal.

Lingkup Kegiatan: (i) Subbidang air limbah: pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal; dan (ii) Subbidang persampahan: pembangunan dan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah dengan pola 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) di tingkat asruntal yang terhubung dengan sistem pengelolaan sampah di tingkat kota.

Sasaran: Meningkatnya pelayanan sanitasi melalui sarana sanitasi, melalui sanitas dan 3R bagi 375.000 jiwa penduduk.

Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam rangka mendukung pemenuhan sasaran Prioritas Nasional di Bidang Ketahanan Pangan, khususnya Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Menuju Surplus Beras 10 juta Ton Pada Tahun 2014. Untuk itu Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi TA 2013 diprioritaskan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota penghasil padi yang berkontribusi pada 90% produksi beras nasional (ARAB II BPS, 2011) termasuk daerah tertinggal.

Lingkup kegiatan: Diprioritaskan untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tidak merutup kemungkinan dimanfaatkan untuk kegiatan peningkatan jaringan irigasi. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan DAK Irigasi, kegiatan S/D dan O/P jaringan irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai kegiatan komplementer.

Sasaran: Alokasi DAK irigasi secara nasional dialokasikan untuk kegiatan perbaikan/peningkatan jaringan irigasi dalam rangka peningkatan kinerja layanan irigasi pada 312.705 ha daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota.

Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Jalan adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten dan kota serta menunjang aksesibilitas dan

keterhubungan wilayah (*domestic connectivity*) dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan.

Lingkup kegiatan: (i) pemeliharaan berskala jalan dan jembatan yang kewenangannya oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota; (ii) peringkasan dan pembaruan jalan yang kewenangannya oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota; (iii) penggantian dan pembangunan jembatan yang kewenangannya oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Sasaran: (i) meningkatkan kondisi jalan provinsi dari 51% menjadi 53,5%; dan (ii) meningkatkan kondisi jalan kabupaten/kota dari 54% menjadi 55%.

Arah kebijakan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat adalah meningkatkan kualitas pelayanan terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan di provinsi, kabupaten/kota guna menurunkan tingkat fatalitas (jumlah korban meninggal) akibat kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20% pada akhir tahun 2014 dan menurunkan jumlah korban luka-luka sebesar 50% hingga akhir tahun 2014.

Lingkup kegiatan: meliputi: (i) pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan transportasi darat; dan (ii) pengadaan dan pemasangan alat pengujian kendaraan bermotor.

Sasaran: adalah mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas (angka kematian) dari 5,8% hingga 3,4% per tahun.

VI. KELOMPOK DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TERDIRI ATAS DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

Arah kebijakan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman adalah Meningkatkan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menstimulasi pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBM/R) di Kabupaten/Kota termasuk kawasan tertinggal, rawan air dan rawan sanitasi.

Lingkup kegiatan: Membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik infrastruktur perumahan dan permukiman dalam rangka mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi: (i) Penyediaan jaringan pipa air minum; (ii) Sarana air limbah komunal; (iii) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); (iv) Jaringan distribusi listrik; dan (v) Penerangan jalan umum.

Sasaran: Terfasilitasinya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman sebanyak 31.500 unit atau 35% dari total kebutuhan sebesar 90.000 unit.

VII. KELOMPOK BIDANG DAK PEMBANGUNAN PERDESAAN YANG TERDIRI ATAS (i) BIDANG DAK TRANSPORTASI PERDESAAN; (ii) ENERGI PERDESAAN.

Arah kebijakan DAK Bidang Transportasi Perdesaan adalah (i) meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perdesaan, dan diharapkan dapat mengurangi keterisolasian dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya di daerah perdesaan; (ii) pengembangan sarana dan prasarana wilayah perdesaan yang memiliki nilai strategis dan diprioritaskan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan di kawasan strategis cepat tumbuh yang meliputi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri, energi dan sumberdaya mineral, kesehatan dan perdagangan.

Lingkup kegiatan: (i) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan poms desa; (ii) pengadaan sarana transportasi perdesaan.

Sasaran: meringkanya ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas masyarakat perdesaan terhadap pelayanan transportasi dari sentra-sentra produksi menuju outlet outlet pemasaran di tingkat lokal, nasional, internasional, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi di perdesaan.

Arah kebijakan DAK Bidang Energi Perdesaan adalah Diversifikasi energi memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan, termasuk masyarakat di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, terhadap energi modern.

Lingkup kegiatan: (i) Pembangunan PLTMH baru; (ii) Rehabilitasi PLTMH yang rusak; (iii) Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH; (iv) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dan PLTS tersebar (SITS); dan (v) Pembangunan instalasi biogas.

Sasaran: (1) Terwujudnya pembangkit listrik dari mikrohidro sebesar 11,38 MW; (2) Terwujudnya pembangkit listrik tenaga surya sebesar 24,69 MWp; dan (3) Terwujudnya biogas dengan kapasitas sebesar 16.000 m³.

VIII. KELOMPOK BIDANG DAK PERTANIAN TERDIRI ATAS DAK PERTANIAN.

Arah kebijakan DAK Bidang Pertanian adalah mendukung pengembangan prasarana dan sarana air, pengembangan prasarana dan sarana lahan, pembangunan dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian serta pengembangan lumbung pangan masyarakat dalam

rangka peningkatan produksi bahan pangan dalam negeri guna mendukung ketahanan pangan nasional..

Lingkup kegiatan: (i) Pengembangan Prasarana dan Sarana Air; (ii) Pengembangan Prasarana dan Sarana Laban; dan (iii) Pembangunan/rehabilitasi balai penyuluhan pertanian kecamatan; dan (iv) Pembangunan Lumbung pangan masyarakat..

Sasaran: Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian di tingkat desa/tingkat usaha tani. Jenis sarana dan prasarana difokuskan pada sarana dan prasarana fisik pertanian yang meliputi penyediaan sumber sumber air, perbaikan jalan aspal leleh, pembangunan lumbung pangan masyarakat dan pembangunan/rehabilitasi balai penyuluhan pertanian di kecamatan, dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang juga diamanatkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kelautan, maka infrastruktur fisik penyuluhan harus tersedia di setiap kecamatan berupa kantor penyuluhan pertanian.

IX. KELOMPOK DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TERDIRI ATAS DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Arah kebijakan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan adalah meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik dalam rangka mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan dan minapolitan, serta penyediaan sarana prasarana terkait dengan pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil.

Lingkup kegiatan: DAK KP PROVINSI: Penyediaan kapal perikanan > 30 GT; DAN KP KAB/KOTA: (i) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap; (ii) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya; (iii) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan; (iv) Pengembangan sarana dan prasarana dasar di pesisir dan pulau-pulau kecil; (v) Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; (vi) Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan; (vii) Pengembangan sarana penyediaan data statistik kelautan dan perikanan.

Sasaran: (i) Berkembangnya kegiatan industrialisasi KP dan kawasan Minapolitan. (ii) Tertata dan berfungsinya saluran irigasi tambak tersier di kab/kota secara optimal; (iii) Meningkatnya fasilitas dan beroperasinya balai benih ikan lokal dan balai benih udang lokal, serta meningkatnya kemampuan unit pembenihan rakyat (UPR) dalam menghasilkan benih ikan bermutu sesuai standar SNI; (iv) Berkembang dan berfungsinya PPI yang telah dibangun;

(v) Tersedianya armada dan alat penangkap ikan yang diijinkan dari ramah lingkungan; (vi) Beroperasinya pasar ikan tradisional/depo pemasaran, serta meningkatnya penggunaan sarana pengangkutan ikan dalam rangka pelaksanaan cold chain system; (vii) Meningkatnya prasarana pas pengawasan, serta sarana pengawasan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas); (viii) Meningkatnya sarana dan prasarana dasar perikanan di pulau-pulau kecil serta Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD); (ix) Tersedia dan beroperasinya pas dan sarana penyulutan perikanan; (x) Tersedia dan beroperasinya sarana pengolah data dan statistik perikanan di kabupaten/kota.

X. KELOMPOK BIDANG DAK KEHUTANAN TERDIRI ATAS DAK BIDANG KEHUTANAN.

Arah kebijakan DAK Bidang Kehutanan adalah pada peningkatan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah, mendukung komitmen presiden dalam penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Selain itu, DAK Bidang Kehutanan diarahkan untuk meningkatkan tata kelola kehutanan melalui pembentukan, operasionalisasi dan penguatan RPHP dan KPH yang menjadi tanggungjawab kabupaten/kota.

lingkup kegiatan: (i) Rehabilitasi hutan lindung dan lahan kritis di luar kawasan hutan (termasuk hutan rakyat, penghijauan lingkungan, turus jalan), kawasan mangrove, hutan pantai, Tahura dan Hutan Kota; (ii) Pengelolaan Tahura dan Hutan Kota termasuk pengamanan hutan; (iii) Pemeliharaan tanaman hasil rehabilitasi tabur sebelumnya; (iv) Perbaikan dan pemeliharaan bangunan sipil teknis (bangunan Konservasi Tanah dan Air/KTA) yang meliputi dam penahan, dam pengendali, *gully plug*, sumur resapan, embung dan bangunan konservasi tanah dan air lainnya; (v) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan; (vi) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penyulutan kehutanan; (vii) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH.

Sasaran yang akan dicapai DAK Bidang Kehutanan tahun 2013 adalah terehabilitasinya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan seluas 180.000 ha di: (i) Kawasan hutan lindung yang terdegradasi, Tahura dan Hutan Kota; (ii) Hutan produksi yang tidak dibebani hak; (iii) Kawasan hutan yang telah ditunjuk sebagai KPH; (iv) Lahan kritis di luar kawasan (termasuk hutan rakyat, penghijauan lingkungan, turus jalan); (v) Kawasan mangrove dan hutan pantai; (vi)

Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan TPA; (viii) Meningkatnya sarana dan prasarana pengolahan keehatan; dan (viii) Meningkatnya sarana dan prasarana operasionalisasi KPH.

XI. KELOMPOK BIDANG DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TERDIRI ATAS DAK LINGKUNGAN HIDUP.

Arah Kebijakan DAK Bidang Lingkungan Hidup adalah: (i) Diprioritaskan untuk merahantu Kab/Kota, dalam rangka mendanai kegiatan untuk memenuhi standar pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan daerah; dan upaya pencegahan perubahan iklim; (ii) Menunjang percepatan penanganan masalah lingkungan hidup di daerah; (iii) Memperkuat kapasitas kelembagaan/institusi pengelolaan LII di daerah; (iv) Mendukung penciptaan komitmen Pimpinan Daerah untuk memperbaiki dan atau mempertahankan kualitas lingkungan; (v) Mendorong pimpinan institusi LII Daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja kerjanya; (vi) Mendorong pengelabangan orientasi pengelolaan LII yang berbasis output dan outcome sebagai upaya pemecahan masalah lingkungan; (vii) Mendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kab/Kota, Propinsi dan KI 5; dan (viii) Mendorong peran Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) dan Provinsi dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan DAK Bidang LII di Kab/Kota guna peningkatan kinerja DAK Bidang LII.

Lingkup kegiatan: (i) Alat pemantauan dan pengawasan LII melalui kegiatan: pengadaan peralatan laboratorium (untuk laboratorium yang telah beroperasi) dan kendaraan operasional pemantauan dan pengawasan; (ii) Alat pengendalian pencemaran lingkungan melalui kegiatan: pembangunan IPAL, UCK, IPAL Medik, IPAL Komunal, dan unit pengolahan sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di fasilitas umum; (iii) Kegiatan pencegahan perubahan iklim melalui kegiatan: penghungan tamar hijau/kecapi dan instalasi biogas; dan (iv) Kegiatan perlindungan fungsi lingkungan melalui kegiatan: pembangunan sumbu resapan/biopor, pengolahan galma, pencegah banjir/larap, erosi, dan penanaman pohon.

Sasaran: Menurunnya beban pencemaran air, polusi mencapai 50% dan menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

XII. KELOMPOK BIDANG DAK PENGEMBANGAN USAHA TERDIRI ATAS DAK BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN.

Arah Kebijakan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung: (i) Pasokan dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok) sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat terutama di daerah-daerah tertinggal, perbatasan, daerah pemekaran, dan/atau daerah yang minim sarana perdagangannya serta (ii)

Pelaksanaan tertib ukur untuk mendukung upaya perlindungan konsumen dalam hal jaminan kebenaran hasil pengukuran terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi UTPP yang cukup besar dan belum dapat ditangani.

Lingkup kegiatan: (i) Perbaikan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar); (ii) Pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal, melalui pembaruan sarana metrologi legal yang meliputi pembangunan gedung Laboratorium Metrologi Legal dan pengadaan peralatan pelayaran tera/tera ulang (meliputi peralatan standar kerja, unit berjalan tera/tera ulang roda empat, unit fungsional pengawasan roda empat dan unit mobilitas roda dua); dan (iii) Pembangunan gudang komoditas pertanian dalam kerangka Sistem Rasi Gudang.

Sasaran: (i) Pembangunan dan pengembangan Sarana Distribusi perdagangan (pasar tradisional): 250 unit pasar tradisional; (ii) Pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal: 15 Sarana Metrologi Legal; dan (iii) Pembangunan Gudang, fasilitas dan peralatan penunjangnya dalam kerangka Sistem Rasi Gudang (SRG): 20 unit gudang.

XIII. KELOMPOK BIDANG DAK DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN YANG TERDIRI ATAS: (I) DAK BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL; DAN (ii) DAK BIDANG SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERBATASAN.

Arah kebijakan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal adalah untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013 yaitu pengembangan perekonomian lokal di daerah tertinggal melalui peningkatan kapasitas, produktivitas dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal secara berkesinambungan beserta sarana prasarana pendukungnya sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang relatif lebih maju.

Lingkup Kegiatan: (i) Penyediaan sarana transportasi umum darat dan air untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal; (ii) Pembangunan/rehabilitasi dermaga kecil/tambatan perahu; dan (iii) Pembangunan embung di daerah rawan air.

Sasaran: Sasaran lokasi daerah tertinggal yang memperoleh DAK SPDT 2013 diorientasikan untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal menjadi non tertinggal, sehingga sasaran lokasi yang memperoleh DAK SPDT Tahun 2013 yaitu 183 kabupaten tertinggal. Output yang diharapkan tahun 2013 sesuai dengan besaran dana yang diusulkan adalah: tersedianya sarana transportasi darat di 6.257 desa,

sarana transportasi perairan/kepulauan di 1.098 desa, tambahan perahu di 1.874 desa, dan embung di 643 desa

Arah kebijakan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan adalah mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang diamanatkan dalam RKP 2013 yaitu untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya penguatan batas wilayah, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan di kecamatan-kecamatan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Lingkup kegiatan: (i) Pembangunan/peningkatan kondisi permukiman jalan non-status yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatan di sekitarnya; (ii) Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak dilayani Kementerian Perhubungan; dan (iii) Penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan untuk meningkatkan arus orang, barang dan jasa.

Sasaran: Sasaran lokasi kawasan perbatasan yang memperoleh SPKP tahun 2013 diprioritaskan untuk mengatasi keterisolasian kawasan perbatasan di 17 Kabupaten yang terdiri dari 28 kecamatan Lokpri (21 Lokpri I dan 7 Lokpri II).

2. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus diberikan kepada tiga provinsi, yakni Provinsi Papua, provinsi Papua Barat dan provinsi Aceh. Pengalokasian Dana Otsus berlandaskan beberapa regulasi, yakni UU No.35 Tahun 2008 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang - undang, serta UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus.

Salah satu pendanaan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua (termasuk Provinsi Papua Barat) dan Provinsi Aceh adalah Dana Otonomi Khusus setara dengan 2 persen dari total DAU nasional, yang tujuan penggunaannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dialokasikan pula Dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Dalam konteks otonomi khusus baik Provinsi Papua, Papua Barat ataupun Provinsi Aceh, masih mendapatkan tambahan pembagian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari sektor Migas.

Arah kebijakan dari Dana Otonomi Khusus Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh Tahun 2013 adalah:

1. Meningkatkan kualitas rencana penggunaan dana Otonomi Khusus Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh;
2. Meningkatkan pengawasan atas penggunaan dana-dana tersebut, melalui monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 183 UU No.11 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Aceh, Dana Otsus Aceh diarahkan penggunaannya bagi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta penguatan pendidikan, sosial dan kesehatan. Pembangunan dapat dilakukan sepanjang wilayah bersangkutan dalam batas wilayah Aceh. Dana Otsus Aceh diherafkan selama 20 tahun sejak tahun anggaran 2008, yakni setara 2 (dua) persen pagu DAU nasional untuk tahun pertama hingga tahun kelima belas dan 1 (satu) persen pagu DAU nasional untuk tahun keenam belas hingga kedua puluh. Dasar pemantapan Dana Otsus Aceh harus memperhatikan keseimbangan antara: antar pembangunan antarkabupaten/kota.

3. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian merupakan komponen dana transfer ke daerah yang bertujuan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, penguatan desentralisasi fiskal, membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah, dan mendukung pencapaian atas target nasional. Dana penyesuaian diberikan kepada daerah yang layak dengan memenuhi kriteria-kriteria teknis tertentu. Dana Penyesuaian 2013 terdiri dari:

1. Tunjangan Profesi Guru (TPG)
Tunjangan ini diberikan kepada Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya.
2. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD diberikan kepada guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dari guru PNSD.
3. Dana Insentif Daerah (DID)
DID untuk tahun 2013 yang dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan fungsi kependidikan dengan mempertimbangkan kriteria daerah yang berprestasi yang telah memenuhi kriteria utama, kriteria kinerja, dan batas minimal kelulusan.
4. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)

P2D2 bertujuan untuk meningkatkan monitoring, pelaporan, penguatan mekanisme verifikasi output DAK di bidang infrastruktur, serta penguatan kemandirian dan peningkatan kapasitas pelaksana DAK di daerah. Manfaat yang ingin diperoleh dalam P2D2 adalah terlaksananya peningkatan akuntabilitas dan pelaporan DAK Bidang Infrastruktur meliputi pelaporan keuangan dan teknis, serta tersusunnya mekanisme monitoring dan verifikasi output yang efektif dan efisien.

Dana P2D2 itu sendiri merupakan bentuk penghargaan (insentif) kepada daerah percontohan atas keberhasilannya dalam melaksanakan kegiatan infrastruktur yang didanai melalui DAK dengan hasil (output) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (*eligible*). Adapun jumlah alokasi insentif yang akan diberikan adalah sebesar maksimal 10 % (sepuluh persen) dari *eligible output* yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi output yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Adapun kriteria *eligible output* adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pembangunan fisik proyek pada Sertifikat Penyelesaian Konstruksi sesuai dengan desain teknis dan spesifikasi teknis dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 (beserta perubahannya);
- c. Pelaksanaan pembangunan fisik proyek sesuai dengan Petunjuk Teknis terkait Pengamanan Lingkungan dan Sosial (*Environment and Social Safeguards*) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum;
- d. Tercantum pada daftar subproyek yang disampaikan oleh pemerintah daerah percontohan kepada BPKP untuk kemudian diverifikasi;
- e. Nilai subproyek tidak melebihi \$400.000 atau nilai yang setara;
- f. Dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang telah menyampaikan *Commitment Letter*.

5. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sesuai dengan PP No.38 tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan urusan daerah. Oleh sebab itu, pada tahun 2013 dana BOS akan tetap dialokasikan sebagai dana penyesuaian. Dana BOS dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai urusan daerah melalui penyaluran BOS ke RKUD Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pemberian dana BOS bertujuan untuk

membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain sehingga memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu dalam rangka pemertasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Dana BOS merupakan stimulus bagi daerah dan bukan pengganti (substitusi) dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan. Selanjutnya dengan itu pemberian dana BOS akan diikuti dengan peningkatan monitoring dan evaluasi untuk menghindari terjadinya penyimpangan sekaligus memastikan bahwa daerah tidak mengurangi alokasi anggaran untuk penyelenggaraan BOS Daerah (BOSDA). BOS akan dikelola oleh Tim Pusat, Tim Provinsi, dan Tim Kabupaten/Kota yang berkoordinasi secara teratur untuk menjamin agar pelaksanaan BOS mulai dari perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, monitoring dan evaluasi berjalan lancar dan dapat meminimalkan permasalahan.

BAB VII PENUTUP

A. Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing lembaga serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas).

RKP Tahun 2013 merupakan acuan bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKP 2013 sebagai berikut:

1. Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKP Tahun 2013 dengan sebaik-baiknya;
2. RKP Tahun 2013 menjadi acuan dan pedoman bagi Lembaga Negara, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-

masing instansi pemerintah (kementerian/lembaga), setelah menerima pagu sementara Tahun 2013, perlu menyesuaikan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) sebagai berikut:

- a. Uraian penggunaan APBN Tahun Anggaran 2013, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), atau Peraturan Menteri/Kepala Lembaga;
 - b. Uraian rencana penggunaan APBN Tahun Anggaran 2013, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (a) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau sudah menjadi kewenangan daerah;
 - d. Pemerintah wajib menyampaikan rancangan APBN Tahun Anggaran 2013 dari masing-masing lembaga negara, departemen, dan lembaga pemerintah non departemen, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, yang dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi, maupun yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan.
3. Bagi Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota), RKP Tahun 2013 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013. Untuk mengupayakan keefektifan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi daerah perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2013 sebagai berikut:
- a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2013, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota;
 - b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2013, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) diatas, perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, tugas

dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah pusat;

- d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2013 dari masing-masing instansi daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah.
4. Pemerintah Pusat, di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan mendapatkan masukan dari seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, merumuskan matriks rencana tindak pada setiap bidang pembangunan (matriks rencana tindak menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen RKPD Tahun 2013;
5. Pelaksana rencana tindak yang tertuang dalam RKPD ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan yaitu: (i) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (ii) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (iii) pengarusutamaan gender.
6. Masyarakat luas dapat berpartisipasi seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;

B. TINDAK LANJUT

Pada akhir tahun anggaran 2013, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**LAMPIRAN 1
Matriks Buku I RKP Tahun 2013**

PRIORITAS 1		REFORMASI Birokrasi dan Tata Kelola	
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas kinerja aparat terpadu, melalui tercapainya akreditasi Unit Layanan Pelanggan dan transparansi, berakhlakitas, dan berprestasi yang berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik dan peningkatan kualitas pelayanan	Menciptakan Tata Kelola pemerintahan yang lebih baik
2	Peningkatan Kinerja	Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Masyarakat	Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Masyarakat
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kelembutan Pelayanan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kelembutan Pelayanan

No.	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARUJUT TADDN 2013	PAGU CAPAIAN 2013 (Rp. milyar)	INDIKASI PELAKSANA
1.	STRUKTUR Penyediaan struktur organisasi yang sesuai dengan rencana strategis, serta meningkatkan kualitas layanan publik melalui tercapainya akreditasi Unit Layanan Pelanggan dan transparansi, berakhlakitas, dan berprestasi yang berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik dan peningkatan kualitas pelayanan					
1.	Penyediaan struktur organisasi yang sesuai dengan rencana strategis, serta meningkatkan kualitas layanan publik melalui tercapainya akreditasi Unit Layanan Pelanggan dan transparansi, berakhlakitas, dan berprestasi yang berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik dan peningkatan kualitas pelayanan	Perbaikan struktur organisasi yang sesuai dengan rencana strategis, serta meningkatkan kualitas layanan publik melalui tercapainya akreditasi Unit Layanan Pelanggan dan transparansi, berakhlakitas, dan berprestasi yang berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik dan peningkatan kualitas pelayanan		85%	2,3	Revisi SKN dan RS
4.	Penyediaan struktur organisasi yang sesuai dengan rencana strategis, serta meningkatkan kualitas layanan publik melalui tercapainya akreditasi Unit Layanan Pelanggan dan transparansi, berakhlakitas, dan berprestasi yang berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik dan peningkatan kualitas pelayanan	Perbaikan struktur organisasi yang sesuai dengan rencana strategis, serta meningkatkan kualitas layanan publik melalui tercapainya akreditasi Unit Layanan Pelanggan dan transparansi, berakhlakitas, dan berprestasi yang berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik dan peningkatan kualitas pelayanan		85%	1,32	SKN dan RS

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARHAT TAHUN 2013 (Rp. Miliar)	PAGU TAHUN 2013 (Rp. Miliar)	BENTUK PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peningkatan koordinasi, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	-	-	-
2.	Peningkatan koordinasi, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	-	-	-
3.	Peningkatan koordinasi, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	-	-	-
4.	Peningkatan koordinasi, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	-	-	-
5.	Peningkatan koordinasi, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	-	-	-
6.	Peningkatan koordinasi, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	-	-	-
7.	Peningkatan koordinasi, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	-	-	-
8.	Peningkatan koordinasi, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	-	-	-
9.	Peningkatan koordinasi, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program reformasi di lingkungan Mahkamah Agung.	-	-	-

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARUHAN TAHUN 2013 (Rp. Miliar)	DAGU TAHUN 2013 (Rp. Miliar)	INDUKSI PRAKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Pelaksanaan program dan evaluasi, termasuk pendampingan kegiatan regional dan nasional	Monitoring koordinasi program kerja, pelaksanaan pertemuan informasi, dan lain-lain	<p>1. Jumlah Poin, sebagai contoh, merupakan 100 Poin (100%)</p> <p>2. Jumlah Poin, sebagai contoh, adalah 100 Poin (100%)</p> <p>3. Jumlah Poin, sebagai contoh, adalah 100 Poin (100%)</p>	100 Poin (100%)	100 Poin (100%)	2013
10	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	Terdapat peningkatan jumlah kegiatan yang dilaksanakan	<p>1. Jumlah Poin, sebagai contoh, adalah 100 Poin (100%)</p> <p>2. Jumlah Poin, sebagai contoh, adalah 100 Poin (100%)</p> <p>3. Jumlah Poin, sebagai contoh, adalah 100 Poin (100%)</p>	100 Poin (100%)	100 Poin (100%)	2013
2.	<p>1. STRATEGI DASAR</p> <p>2. Strategi</p> <p>3. Strategi</p>	<p>1. Meningkatkan kemampuan</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan</p>	<p>1. Jumlah Poin, sebagai contoh, adalah 100 Poin (100%)</p> <p>2. Jumlah Poin, sebagai contoh, adalah 100 Poin (100%)</p> <p>3. Jumlah Poin, sebagai contoh, adalah 100 Poin (100%)</p>	100 Poin (100%)	100 Poin (100%)	2013

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	[2]	SASARAN	INDIKATOR	TARHET TAHUN 2013 (Rp. Miliar)	DAGI TAHUN 2013 (Rp. Miliar)	INSTRANSI PELAKSANA
(1)			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4.	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Pelayanan Masyarakat	<p>1. Jumlah pelayanan publik yang selesai ditangani oleh instansi pelayanan publik.</p> <p>2. Jumlah keluhan masyarakat yang ditanggapi oleh instansi pelayanan publik.</p> <p>3. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh instansi pelayanan publik.</p> <p>4. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh instansi pelayanan publik.</p>	<p>1. Jumlah pelayanan publik yang selesai ditangani oleh instansi pelayanan publik.</p> <p>2. Jumlah keluhan masyarakat yang ditanggapi oleh instansi pelayanan publik.</p> <p>3. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh instansi pelayanan publik.</p> <p>4. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh instansi pelayanan publik.</p>	100%	100%	Kementerian Dalam Negeri
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Pelayanan Masyarakat	<p>1. Jumlah pelayanan publik yang selesai ditangani oleh instansi pelayanan publik.</p> <p>2. Jumlah keluhan masyarakat yang ditanggapi oleh instansi pelayanan publik.</p> <p>3. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh instansi pelayanan publik.</p> <p>4. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh instansi pelayanan publik.</p>	<p>1. Jumlah pelayanan publik yang selesai ditangani oleh instansi pelayanan publik.</p> <p>2. Jumlah keluhan masyarakat yang ditanggapi oleh instansi pelayanan publik.</p> <p>3. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh instansi pelayanan publik.</p> <p>4. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh instansi pelayanan publik.</p>	100%	100%	Kementerian Dalam Negeri
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Pelayanan Masyarakat	<p>1. Jumlah pelayanan publik yang selesai ditangani oleh instansi pelayanan publik.</p> <p>2. Jumlah keluhan masyarakat yang ditanggapi oleh instansi pelayanan publik.</p> <p>3. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh instansi pelayanan publik.</p> <p>4. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh instansi pelayanan publik.</p>	<p>1. Jumlah pelayanan publik yang selesai ditangani oleh instansi pelayanan publik.</p> <p>2. Jumlah keluhan masyarakat yang ditanggapi oleh instansi pelayanan publik.</p> <p>3. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh instansi pelayanan publik.</p> <p>4. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditanggapi oleh instansi pelayanan publik.</p>	100%	100%	Kementerian Dalam Negeri

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARHET TAHUN 2013 (Rp. Miliar)	DAGI TAHUN 2013 (Rp. Miliar)	INDUKSI PERAKSIANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Peningkatan kompetensi dan kemampuan di bidang hukum serta pengembangan transkripsi ke Digital.	Siprus, Indonesia, Singapura dan Pasca Asia dan ASEAN sebagai wilayah. Berkompetensi dan profesionalitas dalam Transkripsi. Berkompetensi dan profesionalitas dalam Transkripsi ke Digital. Peningkatan kemampuan profesionalitas dan profesionalitas dalam Transkripsi ke Digital.	1. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas dalam Transkripsi ke Digital. 2. Peningkatan kemampuan profesionalitas dan profesionalitas dalam Transkripsi ke Digital. 3. Peningkatan kemampuan profesionalitas dan profesionalitas dalam Transkripsi ke Digital.			Kamudaya
8.	Peningkatan kompetensi dan kemampuan di bidang hukum serta pengembangan transkripsi ke Digital.	Siprus, Indonesia, Singapura dan Pasca Asia dan ASEAN sebagai wilayah. Berkompetensi dan profesionalitas dalam Transkripsi. Berkompetensi dan profesionalitas dalam Transkripsi ke Digital. Peningkatan kemampuan profesionalitas dan profesionalitas dalam Transkripsi ke Digital.	1. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas dalam Transkripsi ke Digital. 2. Peningkatan kemampuan profesionalitas dan profesionalitas dalam Transkripsi ke Digital. 3. Peningkatan kemampuan profesionalitas dan profesionalitas dalam Transkripsi ke Digital.			Kamudaya
3.	KEMERDEKAAN MUSAHA	Peningkatan kompetensi dan kemampuan di bidang hukum serta pengembangan transkripsi ke Digital.	1. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas dalam Transkripsi ke Digital. 2. Peningkatan kemampuan profesionalitas dan profesionalitas dalam Transkripsi ke Digital. 3. Peningkatan kemampuan profesionalitas dan profesionalitas dalam Transkripsi ke Digital.			Kamudaya
1.	Peningkatan kompetensi dan kemampuan di bidang hukum serta pengembangan transkripsi ke Digital.	Siprus, Indonesia, Singapura dan Pasca Asia dan ASEAN sebagai wilayah. Berkompetensi dan profesionalitas dalam Transkripsi. Berkompetensi dan profesionalitas dalam Transkripsi ke Digital. Peningkatan kemampuan profesionalitas dan profesionalitas dalam Transkripsi ke Digital.	1. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas dalam Transkripsi ke Digital. 2. Peningkatan kemampuan profesionalitas dan profesionalitas dalam Transkripsi ke Digital. 3. Peningkatan kemampuan profesionalitas dan profesionalitas dalam Transkripsi ke Digital.	38.871,50	5,68	Kawasan PAV dan 200

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARUHAN TAHUN 2013 (Rp. miliar)	PAGU TAHUN 2013 (Rp. miliar)	INDUKSI PERAKSIANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. SIKLUS KEHUTANAN DAN PERUMAHAN						
1.	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan	Terdapatnya pelayanan publik yang cepat, akurat, dan terjangkau	Terdapatnya pelayanan publik yang cepat, akurat, dan terjangkau	100%	11	Zona Perumahan dan Perkotaan
2.	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan	Terdapatnya pelayanan publik yang cepat, akurat, dan terjangkau	Terdapatnya pelayanan publik yang cepat, akurat, dan terjangkau	100%	3,4	Zona Perumahan dan Perkotaan
3.	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan	Terdapatnya pelayanan publik yang cepat, akurat, dan terjangkau	Terdapatnya pelayanan publik yang cepat, akurat, dan terjangkau	100%	3,16	Zona Perumahan dan Perkotaan
6. PANGSAKUALITAS						
1.	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan	Terdapatnya pelayanan publik yang cepat, akurat, dan terjangkau	Terdapatnya pelayanan publik yang cepat, akurat, dan terjangkau	100%	82,85	Zona Perumahan dan Perkotaan
2.	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan	Terdapatnya pelayanan publik yang cepat, akurat, dan terjangkau	Terdapatnya pelayanan publik yang cepat, akurat, dan terjangkau	100%	2	Zona Perumahan dan Perkotaan
3.	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan	Terdapatnya pelayanan publik yang cepat, akurat, dan terjangkau	Terdapatnya pelayanan publik yang cepat, akurat, dan terjangkau	100%	2,58	Zona Perumahan dan Perkotaan

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARUHAN TAHUN 2013 (Rp. Miliar)	DAFTAR TAHUN 2013 (Rp. Miliar)	INDUKSI PERSAMAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>1. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>2. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>3. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>4. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>5. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p>	75%		
6.	<p>6.1. Kegiatan pelatihan dan pembinaan.</p> <p>6.2. Kegiatan pelatihan dan pembinaan.</p> <p>6.3. Kegiatan pelatihan dan pembinaan.</p> <p>6.4. Kegiatan pelatihan dan pembinaan.</p> <p>6.5. Kegiatan pelatihan dan pembinaan.</p>	<p>6.1. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>6.2. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>6.3. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>6.4. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>6.5. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p>	<p>6.1. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>6.2. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>6.3. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>6.4. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>6.5. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p>	75%		
7.	<p>7.1. Kegiatan pelatihan dan pembinaan.</p> <p>7.2. Kegiatan pelatihan dan pembinaan.</p> <p>7.3. Kegiatan pelatihan dan pembinaan.</p> <p>7.4. Kegiatan pelatihan dan pembinaan.</p> <p>7.5. Kegiatan pelatihan dan pembinaan.</p>	<p>7.1. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>7.2. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>7.3. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>7.4. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>7.5. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p>	<p>7.1. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>7.2. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>7.3. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>7.4. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>7.5. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p>	75%		
8.	<p>8.1. Kegiatan pelatihan dan pembinaan.</p> <p>8.2. Kegiatan pelatihan dan pembinaan.</p> <p>8.3. Kegiatan pelatihan dan pembinaan.</p> <p>8.4. Kegiatan pelatihan dan pembinaan.</p> <p>8.5. Kegiatan pelatihan dan pembinaan.</p>	<p>8.1. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>8.2. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>8.3. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>8.4. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>8.5. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p>	<p>8.1. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>8.2. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>8.3. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>8.4. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>8.5. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p>	75%		
9.	<p>9.1. Kegiatan pelatihan dan pembinaan.</p> <p>9.2. Kegiatan pelatihan dan pembinaan.</p> <p>9.3. Kegiatan pelatihan dan pembinaan.</p> <p>9.4. Kegiatan pelatihan dan pembinaan.</p> <p>9.5. Kegiatan pelatihan dan pembinaan.</p>	<p>9.1. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>9.2. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>9.3. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>9.4. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>9.5. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p>	<p>9.1. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>9.2. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>9.3. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>9.4. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p> <p>9.5. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan pembinaan.</p>	75%		

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARUHAN TAHUN 2013	PAGU TAHUN 2013 (Rp. Miliar)	INDUKSI POKOK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kualitas SDM Berprestasi	Jumlah antara lain di yang mendapat nilai tambah zakat minimal 15	100%	5,1	Sembuhkembali
13.	Pelayanan dan Pengembangan	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	100%	13,4	Kembali Yakin
14.	Pengembangan dan Peningkatan	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	100%	11,1	Kembali
15.	Pengembangan dan Peningkatan	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	100%	11,2	Kembali

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU TAHUN 2013 (Rp. Miliar)	INDUKSI PRAKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan keluarga	Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat	Tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat	30	45,7	

5. **DATA PERFORMA INDIKATOR**
 Berdasarkan Rencana Kerja Nasional (RNK) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan dilaksanakan pada tahun 2013, maka target yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

MATRIKS BUKU RKP TAHUN 2013

PILIHAN 2		PROGRAM ASSI BIDANG HEADLINE				
Tema Prioritas		Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju saturasinya keseluruhan, tidak hanya komprehensif, kebutuhan hulu (pelajar), dan hulu (orang tua) yang akan berkembang dari keterpaparan, dan perhatian ekonomi yang dilakukan keseluruhan siklus ketidaksihingga rendahnya kemampuan. 2) Menedukasikan lapangan kerja atau kesetransparasian data 2)				
Peningkat/jawab		Masyarakat Pendidikan, sebagai kerangka				
Berjasama dengan		Masyarakat, Keluarga				
NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU TAJUK 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	AKSES PENDIDIKAN DASAR-MENDAGAI Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju saturasinya keseluruhan, tidak hanya komprehensif, kebutuhan hulu (pelajar), dan hulu (orang tua) yang akan berkembang dari keterpaparan, dan perhatian ekonomi yang dilakukan keseluruhan siklus ketidaksihingga rendahnya kemampuan. 2) Menedukasikan lapangan kerja atau kesetransparasian data 2)					
11	Pendidikan Dasar Layanan Pendidikan SD	Kecerdasan Kelulusan dan Keterampilan Dasar SD, dan Pembelajaran dan Keterampilan	AKSES SD/SLTP/SLTPA/SLTA	547.005	1.500.000	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Siswa SD/SLTP/SLTPA/SLTA	2.100.000		
			Persentase SD yang memiliki fasilitas internet	22,00%		
			Persentase SD yang memiliki fasilitas listrik	22,20%		
12	Peningkatan Kualitas	Peningkatan Kualitas	APK/SPES/SMPLT/SLTA 3	64.22%	2.000.5	Kementerian

NO	MUSYAWARAH / REGISTRASI PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012		INSTANSI
				TARGET	SAKSI	
(4)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Layanan Persepsi Tera-SAP	Kemudahan Akses SMP/ Binaan/ Siswa Berkebutuhan Khusus/ Siswa Disabilitas	Jumlah siswa SMA/ SMP/ Binaan/ BKS Berkebutuhan Khusus/ Siswa Disabilitas	506.22000		Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase SAP memulaila Fasilitas Ineraset	10,00%		
			Persentase SMP memulaila Fasilitas Ineraset	35,50%		
13	Pengembangan dan Peningkatan Layanan Persepsi Tera-SAP	Terwujudnya "Persepsi dan Persepsi" Berbasis akses dan Persepsi Berkebutuhan Khusus/ Siswa Disabilitas	APK/ SMA/ Pasaran	35.70%	1.800.0	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase APK/ SMA/ Pasaran	3,00%		
14	Pengembangan dan Peningkatan Layanan Persepsi Tera-SAP	Terwujudnya "Persepsi dan Persepsi" Berbasis akses dan Persepsi Berkebutuhan Khusus/ Siswa Disabilitas	APK/ SMA/ Pasaran	37,7%	2.015,7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Persentase APK/ SMA/ Pasaran/ Binaan/ BKS Berkebutuhan Khusus/ Siswa Disabilitas	4.022.000		
15	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Berkebutuhan Khusus/ Siswa Disabilitas	Meningkatkan akses dan mutu layanan/ siswa/ BKS Berkebutuhan Khusus/ Siswa Disabilitas	APK/ PT	3,00%	11.000,0	Kementerian Agama
			APK/ PTs	2,20%		
			APK/ SMA	0,50%		
			Persentase persentase BKS/ Siswa/ PT	3,300.000		
16	Pengembangan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Berkebutuhan Khusus/ Siswa Disabilitas	Meningkatkan akses dan mutu layanan/ siswa/ BKS Berkebutuhan Khusus/ Siswa Disabilitas	Jumlah Siswa/ Siswa/ PT/ Persentase BKS	2.726.000	2.726,000	Kementerian Agama

NO	MUSYAWARAH/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TADIR 2012	PAJAL TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
17	Keseluruhan dan Subsidi Pembayaran Keseluruhan Isihah	penelitian, pengembangan, penilaian dan evaluasi kebijakan kesehatan berdasarkan upaya sub nasional untuk penelitian dan pengembangan sistem Pembayaran dan Subsidi yang Berbasis dan Mandiri	Jumlah Siswa Siswa Kesehatan Penerapan PMS Pembinaan, masalah - aplikasi yang belum terlaya telah dibekalkan dengan total 261 (261 orang) Pembinaan masalah - aplikasi yang belum terlaya telah dibekalkan dengan total 47 (47 orang) Pembinaan untuk pelatihan SMA yang belum terlaya telah dibekalkan dengan total 96 (96 orang) Pembinaan untuk - aplikasi SMA yang belum terlaya telah dibekalkan dengan total 161 (161 orang) Total dari seluruh pelaksanaan	210.000	950	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
II	AGRES PENDORONG TINGGI					
18.1	Penyediaan dan Pembayaran dan Keseluruhan	Penyediaan dan Pembayaran dan Keseluruhan	Penyediaan dan Pembayaran dan Keseluruhan	25.000	13.500,0	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
18.2	Penyediaan dan Pembayaran dan Keseluruhan	Penyediaan dan Pembayaran dan Keseluruhan	Penyediaan dan Pembayaran dan Keseluruhan	10.000	1.000	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
III	ADOTODOLOGI					
	Penyediaan dan Pembayaran dan Keseluruhan	Penyediaan dan Pembayaran dan Keseluruhan	Penyediaan dan Pembayaran dan Keseluruhan			

NO	MUSYAWARAH / REGIYATIM PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TADIR 2012		PAGAL TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI
				(*)	(?)		
III.1	Peningkatan Kualitas Hasil Pembelajaran Pendidikan Pendidikan	Tersedianya Informatasi Pendidikan Kualitas PAUD, TK/PAK, SMP/PA, dan Pendidikan Orang Dewasa	(*) Jumlah model pembelajaran (?) Jumlah model pembelajaran berbasis kearifan lokal	(*) 3000	(?) 3000	3000	Kemendiknas Pendidikan dan Kebudayaan
III.2	Peningkatan Kualitas dan Sistem Pembelajaran dan Pembelajaran	Tersedianya Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Pembelajaran yang Pembelajaran	(*) Jumlah standar kompetensi (?) Jumlah standar kompetensi dan standar kompetensi	(*) 750000	(?) 750000	750000	Kemendiknas Pendidikan dan Kebudayaan
IV	PENGUJIAN Peningkatan Kualitas Hasil Pembelajaran dan Pembelajaran						
IV.1	Peningkatan Kualitas Hasil Pembelajaran dan Pembelajaran Pembelajaran dan Pembelajaran	Meningkatnya Kualitas Hasil Pembelajaran dan Pembelajaran	(*) Jumlah model pembelajaran (?) Jumlah model pembelajaran	(*) 750000	(?) 750000	750000	Kemendiknas Pendidikan dan Kebudayaan
IV.2	Peningkatan Kualitas Hasil Pembelajaran dan Pembelajaran	Meningkatnya Kualitas Hasil Pembelajaran dan Pembelajaran	(*) Jumlah model pembelajaran (?) Jumlah model pembelajaran	(*) 750000	(?) 750000	750000	Kemendiknas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	MUSYAWARAH / REGIUN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TADD	PACA TAHUN 2012		INSTANSI
				2002	(MILYAR RUPIAH)	PHARABANA	
(4)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			Persentase angka SMY/SME per juta di lingkungan industri yang optimal Persentase angka SMY/SME per juta di industri industri Persentase angka PT/SMP di area industri pers. akses ke semua Persentase angka SMY/SMP per juta di industri pers. akses ke semua Persentase angka SMY/SMP di industri pers. akses ke semua Persentase angka SMY/SMP di industri pers. akses ke semua	42.000 41.000 50.000 50.000 50.000			
Y	KORIDOR 3 Perancangan sekolah yang di lingkungan industri yang optimal Persentase angka SMY/SME per juta di industri industri yang optimal Persentase angka PT/SMP di area industri pers. akses ke semua Persentase angka SMY/SMP per juta di industri pers. akses ke semua Persentase angka SMY/SMP di industri pers. akses ke semua						
Y.1	Pengembangan Kurikulum Standar Nasional dan Pembelajaran	Pengembangan Kurikulum Sekolah dan Pembelajaran Pembelajaran	Jumlah model kurikulum SD/MI Jumlah model kurikulum SMP/MTs Jumlah model Kurikulum SMA/MA/SMK/STP Jumlah model Kurikulum SMK/MAK/STP Jumlah model pengembangan kurikulum dan pembelajaran Jumlah model pengembangan kurikulum dan pembelajaran	1 1 1 1 "	1 1 1 1	Tidak termasuk dalam anggaran	Kecepatan Pengalihan dan berdaya

NO	MUSYAWARAH /		SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012		INSTANSI
	KEGIATAN	PRIORITAS			TARGET	UNITAS	
(4)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	PELAKSANA
VI							
VI.1	Kelembagaan Layanan: Perencanaan, Supervisi, Pelaksanaan, dan Evaluasi	Kelembagaan Layanan: Perencanaan, Supervisi, Pelaksanaan, dan Evaluasi	Peningkatan layanan untuk semua lapisan masyarakat	Persentase PMU yang menerapkan standar internasional ISO 9001:2008 dan ISO 27001:2005	75,00%	20	Kepulauan Riau
VI.2	Kelembagaan Layanan: Perencanaan, Supervisi, Pelaksanaan, dan Evaluasi	Kelembagaan Layanan: Perencanaan, Supervisi, Pelaksanaan, dan Evaluasi	Peningkatan layanan untuk semua lapisan masyarakat	Persentase PMU yang menerapkan standar internasional ISO 9001:2008 dan ISO 27001:2005	75,00%	20	Kepulauan Riau
VI.3	Kelembagaan Layanan: Perencanaan, Supervisi, Pelaksanaan, dan Evaluasi	Kelembagaan Layanan: Perencanaan, Supervisi, Pelaksanaan, dan Evaluasi	Peningkatan layanan untuk semua lapisan masyarakat	Persentase PMU yang menerapkan standar internasional ISO 9001:2008 dan ISO 27001:2005	75,00%	20	Kepulauan Riau
VI.4	Kelembagaan Layanan: Perencanaan, Supervisi, Pelaksanaan, dan Evaluasi	Kelembagaan Layanan: Perencanaan, Supervisi, Pelaksanaan, dan Evaluasi	Peningkatan layanan untuk semua lapisan masyarakat	Persentase PMU yang menerapkan standar internasional ISO 9001:2008 dan ISO 27001:2005	75,00%	20	Kepulauan Riau

NO	MUSYAWARAH/ REGIYAH PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	PACA TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI
4	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
M15	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing serta Kompetisi Mahasiswa	Tercapainya layanan peminjaman dan pengembalian buku	Jumlah peminjaman buku di semua perpustakaan	3	tidak terdapat dalam laporan tahunan perguruan tinggi	Koordinator Peminjaman dan Pengembalian Buku
M16	Peningkatan kemampuan akademik dan keterampilan mahasiswa	Meningkatnya layanan peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan	Persentase S1 yang lulus pada saat pendaftaran ke perguruan tinggi	14,00%	3.173,7	Koordinator Peminjaman dan Pengembalian Buku
M17	Peningkatan kemampuan akademik dan keterampilan mahasiswa	Meningkatnya akses internet dan layanan peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan	Persentase S1 yang memiliki rasio S1 yang terakumulasi	24,00%		Koordinator Peminjaman dan Pengembalian Buku
M18	Peningkatan akses internet dan layanan peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan	Meningkatnya akses internet dan layanan peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan	Persentase S1 yang memiliki rasio S1 yang terakumulasi	90,00%	1.750,2	Koordinator Peminjaman dan Pengembalian Buku
M19	Peningkatan akses internet dan layanan peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan	Meningkatnya akses internet dan layanan peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan	Persentase S1 yang memiliki rasio S1 yang terakumulasi	90,00%		Koordinator Peminjaman dan Pengembalian Buku

Catatan:

* Indikator sudah tidak dipaparkan lagi pada R/1.

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2013

PRORITAS	PRIOURITI	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
<p>Tematik Prioritas</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</p>	<p>PRIOURITI</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</p>	<p>INDIKATOR</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</p>	<p>INDIKATOR</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</p>	<p>INDIKATOR</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</p>	<p>INDIKATOR</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</p>	<p>INDIKATOR</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</p>

NO	KELOMPOK/KEGIATAN/PROJEK	SUMBER	INDIKATOR	TAHAP TAHUN 2013	PALU TAHUN 2013 (MILYAR RUPIAH)	INDIKATOR PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	<p>KERUNTUNGAN MASYARAKAT</p> <p>Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan terbelakang</p> <p>Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan terbelakang</p> <p>Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan terbelakang</p>	<p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Sumber Daya Manusia</p>	<p>Indikator</p> <p>Indikator</p> <p>Indikator</p>	<p>Tahap Tahun 2013</p> <p>Tahap Tahun 2013</p> <p>Tahap Tahun 2013</p>	<p>Palu Tahun 2013 (Milyar Rupiah)</p> <p>Palu Tahun 2013 (Milyar Rupiah)</p> <p>Palu Tahun 2013 (Milyar Rupiah)</p>	<p>Indikator Pelaksanaan</p> <p>Indikator Pelaksanaan</p> <p>Indikator Pelaksanaan</p>
1.1	<p>Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan terbelakang</p> <p>Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan terbelakang</p> <p>Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan terbelakang</p>	<p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Sumber Daya Manusia</p>	<p>Indikator</p> <p>Indikator</p> <p>Indikator</p>	<p>Tahap Tahun 2013</p> <p>Tahap Tahun 2013</p> <p>Tahap Tahun 2013</p>	<p>Palu Tahun 2013 (Milyar Rupiah)</p> <p>Palu Tahun 2013 (Milyar Rupiah)</p> <p>Palu Tahun 2013 (Milyar Rupiah)</p>	<p>Indikator Pelaksanaan</p> <p>Indikator Pelaksanaan</p> <p>Indikator Pelaksanaan</p>
1.2	<p>Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan terbelakang</p> <p>Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan terbelakang</p> <p>Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan terbelakang</p>	<p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Sumber Daya Manusia</p>	<p>Indikator</p> <p>Indikator</p> <p>Indikator</p>	<p>Tahap Tahun 2013</p> <p>Tahap Tahun 2013</p> <p>Tahap Tahun 2013</p>	<p>Palu Tahun 2013 (Milyar Rupiah)</p> <p>Palu Tahun 2013 (Milyar Rupiah)</p> <p>Palu Tahun 2013 (Milyar Rupiah)</p>	<p>Indikator Pelaksanaan</p> <p>Indikator Pelaksanaan</p> <p>Indikator Pelaksanaan</p>

NO	KEMERDEKAAN/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDUSTRI	PAGU TAHUN		INSTANSI PELAKSANA
				2012	2013	
10		(4)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Manajemen	Meningkatkan kualitas manajemen melalui peningkatan kompetensi	1. Akreditasi balai uji mutu yang terakreditasi pemerintah 2. Akreditasi balai ditandatangani badan budidaya (BBB)	100	2000	Kemendagri Kesejahteraan
15	Baru, Operasional, Keselamatan (BOK)	Keselamatan, Operasional, Keselamatan (OKK)	1. Fasilitas keselamatan 2. Fasilitas keselamatan	94	1.220,6	Kemendagri Kesejahteraan
16	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas	Meningkatkan kualitas dan keselamatan kerja (KSK)	1. Fasilitas keselamatan 2. Fasilitas keselamatan	91 5.320	1000	Kemendagri Kesejahteraan
17	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas	Meningkatkan kualitas dan keselamatan kerja (KSK)	1. Fasilitas keselamatan 2. Fasilitas keselamatan	3.550	3.612	Kemendagri Kesejahteraan
18	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas	Meningkatkan kualitas dan keselamatan kerja (KSK)	1. Fasilitas keselamatan 2. Fasilitas keselamatan	655	2000	Kemendagri Kesejahteraan
19	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas	Meningkatkan kualitas dan keselamatan kerja (KSK)	1. Fasilitas keselamatan 2. Fasilitas keselamatan	100	1000	Kemendagri Kesejahteraan
20	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas	Meningkatkan kualitas dan keselamatan kerja (KSK)	1. Fasilitas keselamatan 2. Fasilitas keselamatan	14.000	14.000	Kemendagri Kesejahteraan
21	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas	Meningkatkan kualitas dan keselamatan kerja (KSK)	1. Fasilitas keselamatan 2. Fasilitas keselamatan	400.000	3.330,2	Kemendagri Kesejahteraan
22	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas	Meningkatkan kualitas dan keselamatan kerja (KSK)	1. Fasilitas keselamatan 2. Fasilitas keselamatan	100	1000	Kemendagri Kesejahteraan

11-20

NO	SEKSI/ANSI/UNIT/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	SYARUKA KESIPIATYAK Keterampilan dan pengetahuan masyarakat berkaitan dengan keselamatan kerja 3.1. Peningkatan kemampuan keselamatan kerja 3.2. Peningkatan kemampuan keselamatan kerja 3.3. Peningkatan kemampuan keselamatan kerja 3.4. Peningkatan kemampuan keselamatan kerja	(3)	1. Jumlah kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kerja 2. Jumlah kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kerja 3. Jumlah kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kerja 4. Jumlah kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kerja	7 95 91 90	40,5 25,4	Kepolisian Kementerian Kelautan dan Perikanan
1.	01031 Peningkatan taraf kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat 3.1. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat 3.2. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat 3.3. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat 3.4. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat	(3)	1. Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan kesehatan 2. Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan kesehatan 3. Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan kesehatan 4. Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan kesehatan	45 90 37 15	1.428,5 56,1 1.49,9	Kepolisian Kementerian Kelautan dan Perikanan
4.	ASURANSI KESEHATAN NASIONAL Peningkatan taraf kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat 4.1. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat	(3)	1. Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan kesehatan 2. Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan kesehatan 3. Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan kesehatan 4. Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan kesehatan	19 92,4	138,9	Kepolisian Kementerian Kelautan dan Perikanan

NO	SISTEMANSI/TI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKTOR	TU BAKT TAHUN 2012	PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)		INSTANSI PELAKSANA
					(5)	(6)	
4.3	Pelayanan Kesehatan Kulit, Jantung, dan Kulit (JAK) dan Kulit (JK)	(3) Meningkatkan pelayanan kesehatan kulit bagi penduduk di seluruh Provinsi	(4) Pelayanan 25 juta penduduk pasien, kondisi dan kualitas asuhan keperawatan	30	5.214,2	(7) Kesehatan Kulit	
4.3	Pelayanan Kesehatan Jantung, dan Kulit (JK)	Meningkatkan pelayanan kesehatan kulit bagi penduduk di seluruh Provinsi	Meningkatkan pelayanan kesehatan kulit bagi penduduk di seluruh Provinsi	30	1.000,0	Kesehatan Kulit	
4.4	Pelayanan Kesehatan Jantung, dan Kulit (JK)	Meningkatkan pelayanan kesehatan kulit bagi penduduk di seluruh Provinsi	Meningkatkan pelayanan kesehatan kulit bagi penduduk di seluruh Provinsi	30	1.583,6	Kesehatan Kulit	
4.5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas mandiri dan tugas tanggung jawab Fungsional	Meningkatkan pelayanan kesehatan kulit bagi penduduk di seluruh Provinsi	Meningkatkan pelayanan kesehatan kulit bagi penduduk di seluruh Provinsi	30	23,0	Kesehatan Kulit	
4.6	Pelayanan Kesehatan Jantung, dan Kulit (JK)	Meningkatkan pelayanan kesehatan kulit bagi penduduk di seluruh Provinsi	Meningkatkan pelayanan kesehatan kulit bagi penduduk di seluruh Provinsi	30	30	Kesehatan Kulit	
			Meningkatkan pelayanan kesehatan kulit bagi penduduk di seluruh Provinsi	50	50	Kesehatan Kulit	
			Meningkatkan pelayanan kesehatan kulit bagi penduduk di seluruh Provinsi	60	60	Kesehatan Kulit	
			Meningkatkan pelayanan kesehatan kulit bagi penduduk di seluruh Provinsi	30	30	Kesehatan Kulit	
			Meningkatkan pelayanan kesehatan kulit bagi penduduk di seluruh Provinsi	30	30	Kesehatan Kulit	

NO	SISTEMANSI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKTOR	TUJUAN TAHUN 2012	PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	KELUARGA BERKEMAKHUR					
5.1	Perilaku dan kualitas keluarga sebagai agen perubahan dan sumber tenaga kerja yang berkualitas	2.500 keluarga yang memiliki penghasilan rata-rata lebih dari Rp 10 juta per bulan	1. Jumlah peserta KB yang mengikuti kegiatan KB di tingkat desa/kelurahan	7,5 juta 28,0 juta	6.150	BKKBN
5.2	Perilaku dan kualitas keluarga sebagai agen perubahan dan sumber tenaga kerja yang berkualitas	2.500 keluarga yang memiliki penghasilan rata-rata lebih dari Rp 10 juta per bulan	2. Jumlah peserta KB yang mengikuti kegiatan KB di tingkat kecamatan	3,97 juta		
5.3	Perilaku dan kualitas keluarga sebagai agen perubahan dan sumber tenaga kerja yang berkualitas	2.500 keluarga yang memiliki penghasilan rata-rata lebih dari Rp 10 juta per bulan	3. Jumlah peserta KB yang mengikuti kegiatan KB di tingkat kabupaten/kota	4,97 juta		
5.4	Perilaku dan kualitas keluarga sebagai agen perubahan dan sumber tenaga kerja yang berkualitas	2.500 keluarga yang memiliki penghasilan rata-rata lebih dari Rp 10 juta per bulan	4. Jumlah peserta KB yang mengikuti kegiatan KB di tingkat provinsi	3,700 juta		
5.5	Perilaku dan kualitas keluarga sebagai agen perubahan dan sumber tenaga kerja yang berkualitas	2.500 keluarga yang memiliki penghasilan rata-rata lebih dari Rp 10 juta per bulan	5. Jumlah peserta KB yang mengikuti kegiatan KB di tingkat nasional	284 juta	640	BKKBN
5.6	Perilaku dan kualitas keluarga sebagai agen perubahan dan sumber tenaga kerja yang berkualitas	2.500 keluarga yang memiliki penghasilan rata-rata lebih dari Rp 10 juta per bulan	6. Jumlah peserta KB yang mengikuti kegiatan KB di tingkat internasional	3 juta		
5.7	Perilaku dan kualitas keluarga sebagai agen perubahan dan sumber tenaga kerja yang berkualitas	2.500 keluarga yang memiliki penghasilan rata-rata lebih dari Rp 10 juta per bulan	7. Jumlah peserta KB yang mengikuti kegiatan KB di tingkat internasional	3 juta		
5.8	Perilaku dan kualitas keluarga sebagai agen perubahan dan sumber tenaga kerja yang berkualitas	2.500 keluarga yang memiliki penghasilan rata-rata lebih dari Rp 10 juta per bulan	8. Jumlah peserta KB yang mengikuti kegiatan KB di tingkat internasional	3 juta		
5.9	Perilaku dan kualitas keluarga sebagai agen perubahan dan sumber tenaga kerja yang berkualitas	2.500 keluarga yang memiliki penghasilan rata-rata lebih dari Rp 10 juta per bulan	9. Jumlah peserta KB yang mengikuti kegiatan KB di tingkat internasional	3 juta		
5.10	Perilaku dan kualitas keluarga sebagai agen perubahan dan sumber tenaga kerja yang berkualitas	2.500 keluarga yang memiliki penghasilan rata-rata lebih dari Rp 10 juta per bulan	10. Jumlah peserta KB yang mengikuti kegiatan KB di tingkat internasional	3 juta		
5.11	Perilaku dan kualitas keluarga sebagai agen perubahan dan sumber tenaga kerja yang berkualitas	2.500 keluarga yang memiliki penghasilan rata-rata lebih dari Rp 10 juta per bulan	11. Jumlah peserta KB yang mengikuti kegiatan KB di tingkat internasional	3 juta		
5.12	Perilaku dan kualitas keluarga sebagai agen perubahan dan sumber tenaga kerja yang berkualitas	2.500 keluarga yang memiliki penghasilan rata-rata lebih dari Rp 10 juta per bulan	12. Jumlah peserta KB yang mengikuti kegiatan KB di tingkat internasional	3 juta		
5.13	Perilaku dan kualitas keluarga sebagai agen perubahan dan sumber tenaga kerja yang berkualitas	2.500 keluarga yang memiliki penghasilan rata-rata lebih dari Rp 10 juta per bulan	13. Jumlah peserta KB yang mengikuti kegiatan KB di tingkat internasional	3 juta		
5.14	Perilaku dan kualitas keluarga sebagai agen perubahan dan sumber tenaga kerja yang berkualitas	2.500 keluarga yang memiliki penghasilan rata-rata lebih dari Rp 10 juta per bulan	14. Jumlah peserta KB yang mengikuti kegiatan KB di tingkat internasional	3 juta		
5.15	Perilaku dan kualitas keluarga sebagai agen perubahan dan sumber tenaga kerja yang berkualitas	2.500 keluarga yang memiliki penghasilan rata-rata lebih dari Rp 10 juta per bulan	15. Jumlah peserta KB yang mengikuti kegiatan KB di tingkat internasional	3 juta		
5.16	Perilaku dan kualitas keluarga sebagai agen perubahan dan sumber tenaga kerja yang berkualitas	2.500 keluarga yang memiliki penghasilan rata-rata lebih dari Rp 10 juta per bulan	16. Jumlah peserta KB yang mengikuti kegiatan KB di tingkat internasional	3 juta		
5.17	Perilaku dan kualitas keluarga sebagai agen perubahan dan sumber tenaga kerja yang berkualitas	2.500 keluarga yang memiliki penghasilan rata-rata lebih dari Rp 10 juta per bulan	17. Jumlah peserta KB yang mengikuti kegiatan KB di tingkat internasional	3 juta		
5.18	Perilaku dan kualitas keluarga sebagai agen perubahan dan sumber tenaga kerja yang berkualitas	2.500 keluarga yang memiliki penghasilan rata-rata lebih dari Rp 10 juta per bulan	18. Jumlah peserta KB yang mengikuti kegiatan KB di tingkat internasional	3 juta		
5.19	Perilaku dan kualitas keluarga sebagai agen perubahan dan sumber tenaga kerja yang berkualitas	2.500 keluarga yang memiliki penghasilan rata-rata lebih dari Rp 10 juta per bulan	19. Jumlah peserta KB yang mengikuti kegiatan KB di tingkat internasional	3 juta		
5.20	Perilaku dan kualitas keluarga sebagai agen perubahan dan sumber tenaga kerja yang berkualitas	2.500 keluarga yang memiliki penghasilan rata-rata lebih dari Rp 10 juta per bulan	20. Jumlah peserta KB yang mengikuti kegiatan KB di tingkat internasional	3 juta		

NO	SISTEMASITIV/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKTOR	TUJUAN TAHUN 2012	PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Peningkatan kegiatan di tingkat Provinsi	Peningkatan kepedulian dan kepedulian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 2. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 3. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 4. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 5. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 2. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 3. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 4. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 5. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 		
6.	PENGENDALIAN PENTACIT MEXIDOLAR	Mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh pentacit Mexidolar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 2. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 3. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 4. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 5. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 2. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 3. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 4. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 5. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 2. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 3. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 4. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 5. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 	Kecamatan
6.1	Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan	Mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh pentacit Mexidolar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 2. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 3. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 4. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 5. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 2. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 3. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 4. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 5. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 2. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 3. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 4. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 5. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 	Kecamatan
6.2	Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan	Mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh pentacit Mexidolar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 2. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 3. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 4. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 5. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 2. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 3. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 4. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 5. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 2. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 3. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 4. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 5. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 	Kecamatan

NO	SISTEMISASI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDUSTRI	TARGET TAHUN 2012	PAGU TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
65	Bersumber-Energi Ternak	Peningkatan produktivitas ternak dan kesehatan akibat penyakit kultivar	2. Jajargan kesehatan ternak per 100.000 seekor/dulu 3. Peningkatan kesehatan ternak per 100.000 seekor/dulu 1. Peningkatan produktivitas ternak per 100.000 seekor/dulu dan kesehatan ternak per 100.000 seekor/dulu 2. Peningkatan kesehatan ternak per 100.000 seekor/dulu 3. Peningkatan kesehatan ternak per 100.000 seekor/dulu	52 45 40 40	66,7	Kesehatan Kesejahteraan Kesejahteraan

NO	SUBSISTEM/URUSAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU TAHUN 2013	JANGKA PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Kebijakan dan Strategi yang Dengan Keseluruhan	Melaksanakan kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang terdapat dalam kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan	Tingkat pencapaian anggaran yang telah direalisasikan dan dituangkan dalam laporan keuangan dan laporan kinerja	52,73	3088	Kerjasama Sosial
5.	Pengadaan subsidi biaya untuk kegiatan pelatihan (KEMHUKAM)	Pengadaan biaya untuk kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dengan cara subsidi	Rencana KPS perorangan Keadilan (KPS) yang dilaksanakan 12 tahun	15.497.523	1.027,0	Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM FPI FPI
6.	Pengembangan dan pemeliharaan website	Pengembangan dan pemeliharaan website	Layanan yang telah selesai dibuat	138.750	100,5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7.	Aperaturan yang berkaitan dengan Pendidikan	Aperaturan yang berkaitan dengan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat akses dan partisipasi masyarakat dalam akses	2.064.850	317,5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8.	Aperaturan yang berkaitan dengan Pendidikan	Aperaturan yang berkaitan dengan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat akses dan partisipasi masyarakat dalam akses	2.064.850	1.941,7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9.	Pengembangan dan pemeliharaan website	Pengembangan dan pemeliharaan website	Layanan yang telah selesai dibuat	1.066.650	1.031,7	Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan Kebudayaan
10.	Pengembangan dan pemeliharaan website	Pengembangan dan pemeliharaan website	Layanan yang telah selesai dibuat	693.187	659,1	Kementerian Koordinator Bidang Kebudayaan
11.	Pengembangan dan pemeliharaan website	Pengembangan dan pemeliharaan website	Layanan yang telah selesai dibuat	122.200	1.365,7	Kementerian Koordinator Bidang Kebudayaan
12.	Pengembangan dan pemeliharaan website	Pengembangan dan pemeliharaan website	Layanan yang telah selesai dibuat	1.435.445	645,9	Kementerian Koordinator

NO	SUBSANSI/URAIAN RINCIAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU TAMBAN 2013	JAWABANS PELAKSANA
11	Mandiri	Liputan siaran radio informasi di Kabupaten Bantul	Siaran radio informasi Bantul (Siara)	987.12	701,5	Kementerian Agama
13.	Meningkatkan akses, kualitas, kuantitas, dan efisiensi layanan kesehatan di Kabupaten Bantul	Meningkatkan akses, kualitas, kuantitas, dan efisiensi layanan kesehatan di Kabupaten Bantul	Meningkatkan akses, kualitas, kuantitas, dan efisiensi layanan kesehatan di Kabupaten Bantul	987.12	701,5	Kementerian Kesehatan
14.	Meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul	Meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul	Meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul	987.12	701,5	Kementerian Kesehatan
15.	Meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul	Meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul	Meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul	987.12	701,5	Kementerian Kesehatan
16.	Meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul	Meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul	Meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul	987.12	701,5	Kementerian Kesehatan
17.	Meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul	Meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul	Meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul	987.12	701,5	Kementerian Kesehatan

11-28

NO	SUBSANSI/UR/ RUCUN/ PROYEKSI	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU TAHUN 2013	JAS/MS/ PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	Pengkajian Kesiapan PPK Galuh (Pengkajian Kesiapan PPK Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon)	Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan studi kelayakan dan penganggaran serta pelaksanaan studi kelayakan	Jumlah pengantar PPK Galuh dan Kesiapan PPK Kabupaten Majalengka dan Cirebon yang dapat dilaksanakan	4	1,5	BRKKN
19.	Dokumentasi dan evaluasi	Menyusun dokumentasi dan evaluasi	Jumlah laporan evaluasi yang diserahkan	95,1 (dari 100.000)	2,1	BRKKN
20.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	24,7	BRKKN Prinsipal
21.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	28,6	Kecamatan
22.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	31,8	Kecamatan
23.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	34,9	Kecamatan
24.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	38,0	Kecamatan
25.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	41,1	Kecamatan
26.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	44,2	Kecamatan
27.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	47,3	Kecamatan
28.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	50,4	Kecamatan
29.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	53,5	Kecamatan
30.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	56,6	Kecamatan
31.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	59,7	Kecamatan
32.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	62,8	Kecamatan
33.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	65,9	Kecamatan
34.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	69,0	Kecamatan
35.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	72,1	Kecamatan
36.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	75,2	Kecamatan
37.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	78,3	Kecamatan
38.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	81,4	Kecamatan
39.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	84,5	Kecamatan
40.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	87,6	Kecamatan
41.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	90,7	Kecamatan
42.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	93,8	Kecamatan
43.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	96,9	Kecamatan
44.	Pengelolaan PPK Prinsip	Melaksanakan pengelolaan PPK Prinsip	Jumlah PPK Prinsip yang diserahkan	RELOHE	100,0	Kecamatan

NO (1)	SUBSANSI/LEBIH BERTINGKAT PRIORITY	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	TARGET TAHUN 2013 (5)	PAGU TAHUN 2013 (6)	LOKASI PELAKSANA (7)
3.	Kualitas Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pendidikan • Peningkatan kesejahteraan masyarakat • Peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 	910,5	414,5	
4.	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pendidikan • Peningkatan kesejahteraan masyarakat • Peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 	79	130,0	Kumuduh
5.	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pendidikan • Peningkatan kesejahteraan masyarakat • Peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 	2.620	770,1	Kumuduh
6.	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pendidikan • Peningkatan kesejahteraan masyarakat • Peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 	5.200,000	2,7	Kumuduh
7.	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pendidikan • Peningkatan kesejahteraan masyarakat • Peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 	567	7.11,7	Kumuduh
				275	3.930,7	
				1.210,000		
				3		

NO	SUBSISTEM/URAIAN RINCIAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU TAHUN 2013	LOKASI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Pengembangan Kelembagaan Organisasi, Pengembangan Sistem Kerja, dan Pengembangan Sistem Informasi (PIS) dan Pengembangan Sistem Manajemen (SM) dan Sistem Akuntansi (SA).	Melaksanakan abstrak jabatan/jabatan, pada sistem kerja/prosedur/kelembagaan organisasi, pengembangan sistem informasi, dan pengembangan sistem manajemen, dan pengembangan sistem akuntansi.	<p>1. Jumlah abstrak jabatan/jabatan yang diterbitkan</p> <p>2. Jumlah sistem kerja/prosedur/kelembagaan organisasi yang diterbitkan</p> <p>3. Jumlah sistem informasi yang diterbitkan</p> <p>4. Jumlah sistem manajemen yang diterbitkan</p> <p>5. Jumlah sistem akuntansi yang diterbitkan</p>	350	585,5	Kalsi Garut
4.	Pengembangan Kelembagaan Organisasi, Pengembangan Sistem Kerja, dan Pengembangan Sistem Informasi (PIS) dan Pengembangan Sistem Manajemen (SM) dan Sistem Akuntansi (SA).	Melaksanakan abstrak jabatan/jabatan, pada sistem kerja/prosedur/kelembagaan organisasi, pengembangan sistem informasi, dan pengembangan sistem manajemen, dan pengembangan sistem akuntansi.	<p>1. Jumlah abstrak jabatan/jabatan yang diterbitkan</p> <p>2. Jumlah sistem kerja/prosedur/kelembagaan organisasi yang diterbitkan</p> <p>3. Jumlah sistem informasi yang diterbitkan</p> <p>4. Jumlah sistem manajemen yang diterbitkan</p> <p>5. Jumlah sistem akuntansi yang diterbitkan</p>	10.000	500	RPT
10.	Pengembangan PIS dan SM dan SA.	Melaksanakan pengembangan dan abstrak jabatan/jabatan, prosedur/kelembagaan organisasi, sistem informasi, dan sistem manajemen.	<p>1. Jumlah abstrak jabatan/jabatan yang diterbitkan</p> <p>2. Jumlah sistem kerja/prosedur/kelembagaan organisasi yang diterbitkan</p> <p>3. Jumlah sistem informasi yang diterbitkan</p> <p>4. Jumlah sistem manajemen yang diterbitkan</p> <p>5. Jumlah sistem akuntansi yang diterbitkan</p>	503	1.201,5	Kalsi Garut
11.	Pengembangan PIS dan SM dan SA.	Melaksanakan pengembangan dan abstrak jabatan/jabatan, prosedur/kelembagaan organisasi, sistem informasi, dan sistem manajemen.	<p>1. Jumlah abstrak jabatan/jabatan yang diterbitkan</p> <p>2. Jumlah sistem kerja/prosedur/kelembagaan organisasi yang diterbitkan</p> <p>3. Jumlah sistem informasi yang diterbitkan</p> <p>4. Jumlah sistem manajemen yang diterbitkan</p> <p>5. Jumlah sistem akuntansi yang diterbitkan</p>	481	356,4	Kalsi Garut
12.	Pengembangan PIS dan SM dan SA.	Melaksanakan pengembangan dan abstrak jabatan/jabatan, prosedur/kelembagaan organisasi, sistem informasi, dan sistem manajemen.	<p>1. Jumlah abstrak jabatan/jabatan yang diterbitkan</p> <p>2. Jumlah sistem kerja/prosedur/kelembagaan organisasi yang diterbitkan</p> <p>3. Jumlah sistem informasi yang diterbitkan</p> <p>4. Jumlah sistem manajemen yang diterbitkan</p> <p>5. Jumlah sistem akuntansi yang diterbitkan</p>	1000	100	Kalsi Garut
13.	Pengembangan PIS dan SM dan SA.	Melaksanakan pengembangan dan abstrak jabatan/jabatan, prosedur/kelembagaan organisasi, sistem informasi, dan sistem manajemen.	<p>1. Jumlah abstrak jabatan/jabatan yang diterbitkan</p> <p>2. Jumlah sistem kerja/prosedur/kelembagaan organisasi yang diterbitkan</p> <p>3. Jumlah sistem informasi yang diterbitkan</p> <p>4. Jumlah sistem manajemen yang diterbitkan</p> <p>5. Jumlah sistem akuntansi yang diterbitkan</p>	3750	2401,5	Kalsi Garut

NO	SUBSISTEM/URUSAN/ RENCANA PROBLEMA	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU TAHUN 2013	LOKASI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	Pengembangan Masyarakat, Riset dan Pengabdian Masyarakat	Meningkatkan nilai investasi, meningkatkan dan memperluas pasar ekspor	Terdapat lebih pada kelas dan pelatihan dan workshop (WORKSHOP) yang dilakukan secara berkala dan sistematis, melalui pelatihan dan keterampilan yang kompeten dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat	200 kelas/workshop, 500 peserta	250	KCP
16.	Pengembangan Masyarakat, Riset dan Pengabdian Masyarakat	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan, meningkatkan usaha mikro dan kecil, meningkatkan peran dan peran aktif pemerintah	Terdapat lebih pada kelas dan pelatihan dan workshop (WORKSHOP) yang dilakukan secara berkala dan sistematis, melalui pelatihan dan keterampilan yang kompeten dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat	1000 kelas/workshop, 10000 peserta	700	KCP
<p>KREDIT USIAA LABYAT: Pelaksanaan program ini akan dilaksanakan oleh bagian RSP tahun 2013</p>						
1.	Dukungan Pelaksanaan Kredit Usaha	Zasadanya, asessment, penjaminan, dan Kredit	Dukungan dan asessment	100	2.000.000	Kantor RSP
2.	Konsultasi, Pelatihan, dan Kredit Usaha	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan, meningkatkan usaha mikro dan kecil, meningkatkan peran dan peran aktif pemerintah	Kelas dan pelatihan, pelatihan, dan keterampilan	70	4.5	Kantor RSP
3.	Pengembangan Masyarakat, Riset dan Pengabdian Masyarakat	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan, meningkatkan usaha mikro dan kecil, meningkatkan peran dan peran aktif pemerintah	Kelas dan pelatihan, pelatihan, dan keterampilan	4.000.000.000	300	Kantor RSP
4.	Pengembangan Masyarakat, Riset dan Pengabdian Masyarakat	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan, meningkatkan usaha mikro dan kecil, meningkatkan peran dan peran aktif pemerintah	Kelas dan pelatihan, pelatihan, dan keterampilan	500.000.000	500	Kantor RSP
5.	Pengembangan Masyarakat, Riset dan Pengabdian Masyarakat	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan, meningkatkan usaha mikro dan kecil, meningkatkan peran dan peran aktif pemerintah	Kelas dan pelatihan, pelatihan, dan keterampilan	100.000.000.000	100	Kantor RSP
6.	Pengembangan Masyarakat, Riset dan Pengabdian Masyarakat	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan, meningkatkan usaha mikro dan kecil, meningkatkan peran dan peran aktif pemerintah	Kelas dan pelatihan, pelatihan, dan keterampilan	1.000.000.000.000	100	Kantor RSP

NO (1)	SUBSANSI/URAIAN PRIORITY (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	TARGET TAHUN 2013 (5)	PAGU TAHUN 2013 (6)	JAWABSI PELAKSANA (7)
5.	Ditumbuhkannya peran serta produsen perikanan, MSZ/MSK/Kepri dan LRM MSZ/MSK/Kepri dan LRM Ditumbuhkannya peran serta produsen perikanan, MSZ/MSK/Kepri dan LRM Ditumbuhkannya peran serta produsen perikanan, MSZ/MSK/Kepri dan LRM	Meningkatkan kualitas keberagaman MSZ/MSK/Kepri dan LRM Meningkatkan kualitas keberagaman MSZ/MSK/Kepri dan LRM Meningkatkan kualitas keberagaman MSZ/MSK/Kepri dan LRM	<p>(1) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(2) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(3) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(4) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(5) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p>	100 MSZ/MSK/Kepri dan LRM	0,5	Kamer: WITCF
6.	Ditumbuhkannya peran serta produsen perikanan, MSZ/MSK/Kepri dan LRM MSZ/MSK/Kepri dan LRM Ditumbuhkannya peran serta produsen perikanan, MSZ/MSK/Kepri dan LRM	Meningkatkan kualitas keberagaman MSZ/MSK/Kepri dan LRM Meningkatkan kualitas keberagaman MSZ/MSK/Kepri dan LRM Meningkatkan kualitas keberagaman MSZ/MSK/Kepri dan LRM	<p>(1) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(2) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(3) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(4) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(5) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p>	500 MSZ/MSK/Kepri dan LRM	0,4	Kamer: XUSCC
7.	Ditumbuhkannya peran serta produsen perikanan, MSZ/MSK/Kepri dan LRM MSZ/MSK/Kepri dan LRM Ditumbuhkannya peran serta produsen perikanan, MSZ/MSK/Kepri dan LRM	Meningkatkan kualitas keberagaman MSZ/MSK/Kepri dan LRM Meningkatkan kualitas keberagaman MSZ/MSK/Kepri dan LRM Meningkatkan kualitas keberagaman MSZ/MSK/Kepri dan LRM	<p>(1) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(2) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(3) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(4) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(5) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p>	100 MSZ/MSK/Kepri dan LRM	0,4	Kamer: XUSCC
8.	Ditumbuhkannya peran serta produsen perikanan, MSZ/MSK/Kepri dan LRM MSZ/MSK/Kepri dan LRM Ditumbuhkannya peran serta produsen perikanan, MSZ/MSK/Kepri dan LRM	Meningkatkan kualitas keberagaman MSZ/MSK/Kepri dan LRM Meningkatkan kualitas keberagaman MSZ/MSK/Kepri dan LRM Meningkatkan kualitas keberagaman MSZ/MSK/Kepri dan LRM	<p>(1) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(2) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(3) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(4) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(5) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p>	100 MSZ/MSK/Kepri dan LRM	0,3	Kamer: XUSCC
9.	Ditumbuhkannya peran serta produsen perikanan, MSZ/MSK/Kepri dan LRM MSZ/MSK/Kepri dan LRM Ditumbuhkannya peran serta produsen perikanan, MSZ/MSK/Kepri dan LRM	Meningkatkan kualitas keberagaman MSZ/MSK/Kepri dan LRM Meningkatkan kualitas keberagaman MSZ/MSK/Kepri dan LRM Meningkatkan kualitas keberagaman MSZ/MSK/Kepri dan LRM	<p>(1) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(2) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(3) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(4) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(5) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p>	100 MSZ/MSK/Kepri dan LRM	0,3	Kamer: XUSCC
10.	Ditumbuhkannya peran serta produsen perikanan, MSZ/MSK/Kepri dan LRM MSZ/MSK/Kepri dan LRM Ditumbuhkannya peran serta produsen perikanan, MSZ/MSK/Kepri dan LRM	Meningkatkan kualitas keberagaman MSZ/MSK/Kepri dan LRM Meningkatkan kualitas keberagaman MSZ/MSK/Kepri dan LRM Meningkatkan kualitas keberagaman MSZ/MSK/Kepri dan LRM	<p>(1) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(2) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(3) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(4) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p> <p>(5) Jumlah MSZ/MSK/Kepri dan LRM yang aktif</p>	100 MSZ/MSK/Kepri dan LRM	0,3	Kamer: XUSCC

NO	SUBSANSI/URAI BERTITIKNYA PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU TAHUN 2013	JAWABANS PELAKSANA
11	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	Dewasakan sistem produksi, pelabuhan dan pengangkutan perikanan.	Lulusan sekolah Tercapainya sistem produksi, pelabuhan dan pengangkutan perikanan	(2) Jumlah lulusan di atas kapal ikan Jumlah awak kapal yang lulus dan terakreditasi Tingkat kesejahteraan	2.600 Diapung 600 Orang	4,5	Kamari EUCP Kamari MUSEC
12.	Peningkatan kompetensi SDM perikanan LKMP, KSP, MUSC, dan KUP	Meningkatnya kompetensi SDM perikanan LKMP, KSP, MUSC dan KUP	(3) Jumlah pelatihan yang diadakan (4) Jumlah pelatihan yang terakreditasi (5) Jumlah LKMP yang terakreditasi (6) Jumlah KUP yang terakreditasi	250 Orang 54 Diapung 2.500 MUSC 550 KUP	101 3,0 14,1 2,6	Kamari EUCP Kamari EUCP Kamari MUSEC Kamari EUCP
13.	Meningkatnya produktivitas dan efisiensi produksi	Meningkatnya produktivitas dan efisiensi produksi	Jumlah KUP yang terakreditasi dan terakreditasi	550 KUP	2,6	Kamari EUCP
14.	Dewasakan dan pengangkutan ikan yang produktif dan pelabuhan	Dewasakan dan pengangkutan ikan yang produktif dan pelabuhan	Jumlah KUP yang terakreditasi dan terakreditasi	550 KUP	2,6	Kamari EUCP
TIM KOTERIBUKAN PERANGKAT ANJALAN KEMERIKAN: Berikut ini Tim Kerja yang ditugaskan dalam melaksanakan kegiatan ini, sebagai berikut:						
1.	Meningkatkan produktivitas perikanan dan efisiensi produksi	Meningkatnya produktivitas dan efisiensi produksi	Jumlah KUP yang terakreditasi dan terakreditasi	550 KUP	2,6	Kamari EUCP

NO	SUBSANSI/URAI BERTITIK PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU TAHUN 2013	JAWABSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Skrupulasi dan hasil uji coba penerapan kebijakan "New Way of Working" di Mahkamah	Meliputinya hasil uji coba skrupulasi kebijakan "New Way of Working" di Mahkamah, baik penerapan maupun keberhasilan di tingkat pengadilan	Tingkat pencapaian kegiatan skrupulasi kebijakan "New Way of Working" di Mahkamah, baik penerapan maupun keberhasilan di tingkat pengadilan	9 Kegiatan	2,3	Kordinator Koordinator Bidang Penyelenggaraan Kegiatan
3.	Evaluasi, perbaikan, dan standardisasi prosedur	Meliputinya jumlah, jenis, dan kualitas prosedur yang ada di Mahkamah, baik penerapan maupun keberhasilan di tingkat pengadilan	Tingkat pencapaian kegiatan evaluasi, perbaikan, dan standardisasi prosedur di Mahkamah, baik penerapan maupun keberhasilan di tingkat pengadilan	10 Kegiatan	2,3	Kordinator Koordinator Bidang Penyelenggaraan Kegiatan
4.	Evaluasi, perbaikan, dan standardisasi prosedur	Meliputinya jumlah, jenis, dan kualitas prosedur yang ada di Mahkamah, baik penerapan maupun keberhasilan di tingkat pengadilan	Tingkat pencapaian kegiatan evaluasi, perbaikan, dan standardisasi prosedur di Mahkamah, baik penerapan maupun keberhasilan di tingkat pengadilan	11 Kegiatan	2,7	Kordinator Koordinator Bidang Penyelenggaraan Kegiatan
5.	Koordinasi pelaksanaan kegiatan	Meliputinya jumlah, jenis, dan kualitas kegiatan yang ada di Mahkamah, baik penerapan maupun keberhasilan di tingkat pengadilan	Tingkat pencapaian kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Mahkamah, baik penerapan maupun keberhasilan di tingkat pengadilan	11 Kegiatan	2,5	Kordinator Koordinator Bidang Penyelenggaraan Kegiatan

NO	SUBSANSI/URAIAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU TAMBANG 2013	JANGKA PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KLASIFIKASI PROGRAM/PROGRAM PRO-KORSIKAT						
1.	Pengembangan Kegiatan dan Program Serta Kegiatan/Program dan Kegiatan/Program	Pengembangan TPT	Lantai 2 Gedung Kantor Pengadilan Kabupaten Pangasinan dan Kantor Pengadilan Kabupaten Pangasinan	6 Kegiatan		Korupsi
2.	Pembinaan dan Pengembangan Perencanaan Swadaya/Program Swadaya	350.000 unit	Peningkatan jumlah dan kualitas pembangunan rumah dan perumahan swadaya	20.000	2.274,3	Kegiatan Perumahan Rakyat
3.	Kegiatan Donorship dan Bantuan Teknis, Fasilitas, dan/atau Pemeliharaan	2.000.000,00	Peningkatan jumlah dan kualitas pembangunan rumah dan perumahan swadaya	230.000		
4.	Kegiatan Pembangunan dan/atau Pemeliharaan	2.000.000,00	Peningkatan jumlah dan kualitas pembangunan rumah dan perumahan swadaya	26.250		
5.	Kegiatan Pembangunan dan/atau Pemeliharaan	2.000.000,00	Peningkatan jumlah dan kualitas pembangunan rumah dan perumahan swadaya	22.000	71	Kegiatan Perumahan Rakyat
6.	Kegiatan Pembangunan dan/atau Pemeliharaan	2.000.000,00	Peningkatan jumlah dan kualitas pembangunan rumah dan perumahan swadaya	21.000	71	Kegiatan Perumahan Rakyat

NO	SUBSANSI/LEMBAGA/ORGANISASI/PROGUNA	(2)	SASARAN	(3)	INDIKATOR	(4)	TARGET TAHUN 2013	(5)	PAGU TAMBUNG 2013	(6)	Jumlah MSU PELAKSANA
1.	5. Pengembangan Sistem Informasi Pembudayaan Iktas		Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi informasi		Tingkat kemampuan dan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi informasi (TKM) di tingkat MSU	5000 orang setiap tahun per kabupaten	500	500	500	500	500
2.	6. Fasilitas pendukung dan pengembangan sumber daya manusia dan investasi, pelatihan		Meningkatkan nilai investasi, kualitas pelayanan dan kemampuan kerja (kompetensi)		Tingkat keberhasilan investasi, kualitas pelayanan dan kemampuan kerja (kompetensi) (TKM) di tingkat MSU	5000 orang setiap tahun per kabupaten	500	500	500	500	500
3.	7. Pengembangan Masyarakat Persekolahan yang bertanggung jawab		Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi informasi		Tingkat kemampuan dan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi informasi (TKM) di tingkat MSU	5000 orang setiap tahun per kabupaten	500	500	500	500	500

Catatan:

- *) Maksud Rp 500.000.000,00 adalah Rp 500.000.000,00
- **) Target tahun pelaksanaan

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2013

PRIORITAS	PROGRAM ARSI DI BIDANG PARIWISATA
Tema Prioritas Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Perikanan	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Perikanan Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Perikanan

NO	SUBSTANSI/DESKRIPSI PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN	PAGU TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2013	2013	
				(MILIYAR RUPIAH)	(MILIYAR RUPIAH)	
1.	Kepuasan konsumen terhadap produk	Meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk	Persentase keluhan/konflik hasil transaksi jual beli yang terakumulasi akibat produk perikanan	40%	4,5	Marine dan Perikanan
2.	Kemudahan dalam melakukan pembelian	Meningkatnya kemudahan akses konsumen terhadap produk perikanan	Persentase keluhan/konflik akibat pelayanan konsumen	40%	2,2	Marine dan Perikanan
3.	Kemudahan dalam melakukan pembelian	Meningkatnya kemudahan akses konsumen terhadap produk perikanan	Persentase keluhan/konflik akibat pelayanan konsumen	40%	2,1	Marine dan Perikanan
4.	Peningkatan daya saing produk perikanan	Meningkatnya kualitas dan daya saing produk perikanan	Persentase produk ekspor yang memenuhi standar internasional	100	1.196,5	IPES

1. LALU LINTAS PERUMAHAN RUMAH KAWASAN DAIRY (LALU LINTAS PERUMAHAN)
 a. Peningkatan kualitas pelayanan konsumen terhadap produk perikanan

NO	SUBSTANTIVITY REGISTAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU BUDGET	
					2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
1.	Pengembangan Fasilitas Perunggan dan Gedung Pertahanan dan Militer yang Strategis	Terdapatnya pengembangan perumahan dan pemukiman di lingkungan sekitar Pangkajene-Dea	Jumlah paket rumah yang dibangun, termasuk pembangunan dan renovasi di lingkungan Pangkajene-Dea	1.000	6,2	BPK
		Terdapatnya pengembangan perumahan dan pemukiman di lingkungan Pangkajene-Dea	Jumlah paket rumah yang dibangun, termasuk pembangunan dan renovasi di lingkungan Pangkajene-Dea	2.000	4,0	
2.	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur perhubungan laut, udara, dan darat	Meningkatnya akses perhubungan laut, udara, dan darat	Terdapatnya peningkatan akses perhubungan laut, udara, dan darat	100.000	100,00	Kemendagri
		Meningkatnya akses perhubungan laut, udara, dan darat	Terdapatnya peningkatan akses perhubungan laut, udara, dan darat	100.000	100,00	
3.	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur perhubungan darat	Meningkatnya akses perhubungan darat	Terdapatnya peningkatan akses perhubungan darat	100.000	100,00	Kemendagri
		Meningkatnya akses perhubungan darat	Terdapatnya peningkatan akses perhubungan darat	100.000	100,00	
4.	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur perhubungan udara	Meningkatnya akses perhubungan udara	Terdapatnya peningkatan akses perhubungan udara	100.000	100,00	Kemendagri
		Meningkatnya akses perhubungan udara	Terdapatnya peningkatan akses perhubungan udara	100.000	100,00	

NO	SIMPULAN RINGKASAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU BUDGET 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
2.	INFRASTRUKTUR	Peningkatan dan pemeliharaan sarana transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional				
a.	Perbaikan dan pemeliharaan sarana transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	Indikator: Jumlah penumpang per kilometer yang dilayani oleh sarana transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	82,6	387,4	KRI
1.	Peningkatan dan pemeliharaan sarana transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	Indikator: Jumlah penumpang per kilometer yang dilayani oleh sarana transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	95		
2.	Peningkatan dan pemeliharaan sarana transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	Indikator: Jumlah penumpang per kilometer yang dilayani oleh sarana transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	23		
3.	Peningkatan dan pemeliharaan sarana transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	Indikator: Jumlah penumpang per kilometer yang dilayani oleh sarana transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	23		
4.	Peningkatan dan pemeliharaan sarana transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	Indikator: Jumlah penumpang per kilometer yang dilayani oleh sarana transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	23		
5.	Peningkatan dan pemeliharaan sarana transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	Indikator: Jumlah penumpang per kilometer yang dilayani oleh sarana transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	22		
6.	Peningkatan dan pemeliharaan sarana transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	Indikator: Jumlah penumpang per kilometer yang dilayani oleh sarana transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	6,50	5,42,0	KRI

NO	SIMPULAN/INTI REGISTRASI PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGUYUBAN 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
	penyediaan dan pelaksanaan kapal perikanan	yang mematuhi standar di setiap KPP	<p>dan di samping jumlah kapal >30 GT yang beroperasi melalui DAK</p> <p>jumlah alat perangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar (unit)</p> <p>jumlah awak kapal perikanan yang memenuhi kompetensi angka dan tersertifikasi (orang)</p>	175.000 kapal		
1.	Peningkatan dan pemeliharaan perikanan yang melanda di...	Meningkatnya kemampuan arifitas di...	<p>jumlah (unit) pengembang arifitas ar...</p> <p>penyediaan sumber air permukaan dan...</p> <p>jumlah (unit) pengembangan arifitas dan...</p> <p>jumlah (unit) pengembangan arifitas dan...</p>	1055	6.000	Komunitas
2.	Peningkatan dan pemeliharaan perikanan yang melanda di...	Meningkatnya kemampuan arifitas di...	<p>jumlah (unit) pengembang arifitas ar...</p> <p>penyediaan sumber air permukaan dan...</p> <p>jumlah (unit) pengembangan arifitas dan...</p> <p>jumlah (unit) pengembangan arifitas dan...</p>	5000	7.0	Komunitas

NO	SUBSTANSI/INTI REGISTAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU BUDGET 2013 (MILYAR RUPIAH)	STATUS PELAKSANA
4.	Pengembangan sistem pelayanan dan sarana kesehatan dan pemberdayaan	Tersedianya klinik layanan kesehatan keluarga yang memenuhi persyaratan dan sarana yang memadai	<p>jumlah klinik yang berhasil selesai tahun</p> <p>jumlah sarana pelayanan kesehatan yang dimiliki praarsas dan sarana yang memadai (kawasan pelayanan kesehatan lain)</p> <p>jumlah pengembangan sarana dan fasilitas kesehatan</p> <p>jumlah sarana pelayanan kesehatan yang dimiliki praarsas dan sarana yang memadai (kawasan pelayanan kesehatan lain)</p>	485.331	298,5	SKT
5.	Pengembangan dan pengembangan jaringan pelayanan kesehatan lainnya	Terdapatnya akses dan kesempatan pelayanan kesehatan di lokasi dan daerah rawan	<p>luas area yang di akses yang ditambahi</p> <p>luas area jaringan listrik yang ditambahi</p> <p>luas area jaringan kesehatan yang ditambahi</p> <p>luas area jaringan kesehatan ditambahi</p>	<p>55</p> <p>407.302 ha</p> <p>270.082 ha</p> <p>5.556.000 ha</p> <p>81.100 ha</p> <p>111.982 ha</p> <p>950.102 ha</p>	<p>23.32</p> <p>1.352,3</p> <p>517,2</p> <p>257,8</p> <p>482,4</p> <p>952,2</p>	<p>Ekstensi, PU</p> <p>Ekstensi, PU</p>

11-42

NO	STRATEGIS/INSTRUMEN/REGISTRASI/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGUYUBAN 2013 (MUTUAS RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
		risefilnas.	Jumlah sumbu air 40 yang dibangun	44 sumbu air selesai	45,7	
			Jumlah struktur air yang dibangun	203 struktur air selesai	242,5	
			Jumlah struktur air yang diperbaiki/dibina	50 struktur air selesai	33,5	
			Luas lahan yang dibangun	12.779 ha	75,8	
			Luas lahan yang diperbaiki/dibina	12.000 ha	81,7	
			Luas area air yang dibangun	21.650 ha	7,2	
4.	Fungsional dan Konstruksi Waduk, Bendungan, Situasi, Pengaliran, Pengaliran dan lainnya	Meningkatkan ketahanan dan ketidakefektifan bendungan di	Jumlah waduk yang dibangun	10 waduk dalam pelaksanaan pembangunan embung/embung dibangun	2.935,0	Kemum. PI
			Jumlah waduk yang diperbaiki/dibina	10 waduk yang diperbaiki/dibina	384,0	
			Jumlah kawasan perairan yang dikonservasi	25 kawasan	129,7	

NO	SISTEMASINTY, REGISTAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU BUDGET 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
3.	RESEARCH AND DEVELOPMENT - Penelitian upaya penulih dan pengembangan ilmu pengetahuan yang menunjang pertanian yang mampu meningkatkan hasil produksi dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi.	Meningkatkan kemampuan dan daya saing petani di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo	Jumlah petani yang di rangun di DAS Bengawan Solo	1 Waduk Bendi (Pondok); 1 Waduk Cendang; 1 Waduk (Sragen); 1 Waduk Buloh; 1 Waduk (Widagati); 1 Waduk Tug (Machan); 1 Waduk Grogong (Bekempore); 1 Waduk Tukul.	575,4	
4.	RESEARCH AND DEVELOPMENT - Penelitian dan pengembangan	Meningkatkan hasil produksi	Penelitian dan pengembangan	1 Waduk Bendi (Pondok); 1 Waduk Cendang; 1 Waduk (Sragen); 1 Waduk Buloh; 1 Waduk (Widagati); 1 Waduk Tug (Machan); 1 Waduk Grogong (Bekempore); 1 Waduk Tukul.	33,3	Kementan

NO	SUBSTANSI/INTEKSI/REGISTRASI/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TAHAP/TARICHT 2013	PAGU BUDJET 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
1.	Pengembangan	Berkas dan dan Vektor-Mendukung (15-28)-2212	TPP sebagai beksi	75	162,5	Kemendagri
			Jumlah inovasi teknologi peminatan dan penelitian terdapat	75		
2.	Penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia	Terdapatnya sumberdaya tenaga kerja, hardskill sumber dan pendidikan terapan berkualitas, terutama pada industri yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional	Jumlah SDR formal, TPP dan instrumen yang dikomponen dan dikalkulasikan	11	162,5	Kemendagri
			Jumlah ahli/ahli muda sumber peminatan UPT	11		
3.	Fasilitasi dan pengembangan sumberdaya manusia	Meningkatnya inovasi teknologi berteknologi tinggi dan daya saing dalam produk-produk pertanian yang berbasis pangan	Jumlah investasi teknologi komersial	15	162,5	Kemendagri
			Jumlah ahli/TPP yang diarahkan ke industri	15		
4.	Fasilitasi dan pengembangan sumberdaya manusia	Meningkatnya inovasi teknologi terapan yang mendukung daya saing dalam produk-produk pertanian yang berbasis pangan	Jumlah ahli/ahli muda sumber peminatan UPT	11	183,01	Kemendagri
			Jumlah ahli/ahli muda sumber peminatan UPT	11		

L-45

NO	SUBSTANSI/INTI/REGISTRASI PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU BUDGET 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
		Tumbuh tanaman perkebunan	produktifitas tanaman perkebunan	4013		
			jumlah akses SDBG - C (terbaca) yang terbaca/akses di: Eksternalisasi	4013		
			Jumlah sumber sumber: - Parameter perkebunan (Tun) - Jumlah bibit tahu melalui turunkan SR (Tun) dan Budker (Tun)	34% 27.000000		
5.	Penelitian dan pengembangan teknologi dan sumber daya genetik pertanian	Meningkatnya inovasi hasil penelitian dan peningkatan sumber daya genetik pertanian (SDG) untuk mendukung keberlanjutan pangan dan pemenuhan gizi sahagiproduktifitas	jumlah varietas atau jalur harapan komoditas perkuat jumlah akses SDBG yang dikomisi atau ditemuikan jumlah sumber daya genetik yang terkembangkan dan terakumulasi di: - zona mutasi bibit teyaka	360 4053 1560	4.1.0	Komnisan
6.	Peningkatan Kualitas Belayan/karantina Pertanian dan Penguasaan Keunggulan Ilmiah	Melayan karantina, perantara dan penguasaan keamanan karantina yang efektif	kebasah, tingkat efisiensi sertifikasi karantina dan penguasaan karantina tingkat kepatuhan, penguasaan karantina kepatuhan dan penguasaan kepatuhan kepatuhan kepatuhan, standar, akurasi dan metode yang diperbaiki	100% 100%	609,6	Kemendagri
7.	Fasilitasi dan pengembangan pemerintah dan swasta	Meningkatnya inovasi teknologi pemerintah dan swasta yang pemerintah dan swasta yang pemerintah dan swasta yang	jumlah inovasi teknologi pemerintah dan pengembangan hasil penelitian	15%	4.1.2	Komnisan

1.4-46

NO	SUBSTANSI/INTI/REGISTAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU BUDJET 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
8.	Pengawasan dan pemertama teknologi tanaman adaptif pertanian budidaya	<p>Respon dan pemertama teknologi dalam rangka pengawasan budidaya tanaman pertanian budidaya</p> <p>Terdapatnya Litbang LITEK yang mengasahikan petani LIT, produk litbang, kemampuan dan penguasaan LITEK dan budaya seluas-luasnya pengembalian perikanan budidaya.</p>	<p>jumlah demonstrasi teknologi dalam rangka pengawasan budidaya tanaman pertanian budidaya</p> <p>Teknologi inovatif budidaya budidaya perikanan</p> <p>jumlah rekomendasi dan bahan lokalitas untuk pengembangan perikanan budidaya</p> <p>jumlah pemberdayaan teknologi yang dilaksanakan/ direkomendasikan/ dilaksanakan untuk perikanan, serta data dan informasi untuk pengembangan produk ikan</p> <p>jumlah model perikanan budidaya perikanan budidaya</p>	71 1 4 13	371 2832 EKP EKP	EKP
9.	Penelitian dan pengembangan LITEK perikanan budidaya	<p>Terdapatnya Litbang LITEK yang mengasahikan petani LIT, produk litbang, kemampuan dan penguasaan LITEK dan budaya seluas-luasnya pengembalian perikanan budidaya.</p>	<p>jumlah rekomendasi/ produk perikanan budidaya</p> <p>jumlah rekomendasi/ produk perikanan budidaya</p> <p>jumlah pemberdayaan teknologi yang dilaksanakan/ direkomendasikan/ dilaksanakan untuk perikanan, serta data dan informasi untuk pengembangan produk ikan</p> <p>jumlah model perikanan budidaya perikanan budidaya</p>	7 5 4 3	437 EKP	EKP
11	Litbang Terkini/Regul Berbasis Biologi Kotoran	<p>Semua unggas, berbagai biologi molekuler</p>	<p>jumlah varian/ terbitan regulasi</p>	2	20	LIP1
12	Penelitian/Inovasi/Regul Berbasis Biologi Kotoran	<p>Terdapatnya hasil/ terbitan regulasi</p> <p>biologi molekuler modern</p>	<p>jumlah varian/ terbitan regulasi</p> <p>jumlah pemberdayaan teknologi yang dilaksanakan/ direkomendasikan/ dilaksanakan untuk perikanan, serta data dan informasi untuk pengembangan produk ikan</p> <p>jumlah model perikanan budidaya perikanan budidaya</p>	5 10 3	152 EKP	LIP1

NO	STRATEGIS/INTI, REGISTAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU BUDJET 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
15	Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi	Tersebaranya bentuk aplikasi dan paket aplikasi Isotop dan Radiasi	Jumlah Varietas Hasil Pengembangannya Ap. East Ulema-01 Isotop dan Radiasi	3	5,3	BPTP
		Diperolehnya Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi di bidang peternakan, keselamatan, dan industri	Tipe ... Substitusi ... Duplikasi ...	4 1 2		
16	Fasilitas dan Penguasaan Fasilitas dan Fasilitas dan Konstruksi Fasilitas Isotop dan Radiasi	Tersebaranya bentuk aplikasi dan paket aplikasi Isotop dan Radiasi	Jumlah Varietas Hasil Pengembangannya Ap. East Ulema-01 Isotop dan Radiasi	4	7,5	BKP
		Diperolehnya Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi di bidang peternakan, keselamatan, dan industri	Tipe ... Substitusi ... Duplikasi ...	4 1 2		
17	Fasilitas dan Penguasaan Fasilitas dan Fasilitas dan Konstruksi Fasilitas Isotop dan Radiasi	Tersebaranya bentuk aplikasi dan paket aplikasi Isotop dan Radiasi	Jumlah Varietas Hasil Pengembangannya Ap. East Ulema-01 Isotop dan Radiasi	4	7,5	BKP
		Diperolehnya Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi di bidang peternakan, keselamatan, dan industri	Tipe ... Substitusi ... Duplikasi ...	4 1 2		
18	Fasilitas dan Penguasaan Fasilitas dan Fasilitas dan Konstruksi Fasilitas Isotop dan Radiasi	Tersebaranya bentuk aplikasi dan paket aplikasi Isotop dan Radiasi	Jumlah Varietas Hasil Pengembangannya Ap. East Ulema-01 Isotop dan Radiasi	4	7,5	BKP
		Diperolehnya Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi di bidang peternakan, keselamatan, dan industri	Tipe ... Substitusi ... Duplikasi ...	4 1 2		
19	Fasilitas dan Penguasaan Fasilitas dan Fasilitas dan Konstruksi Fasilitas Isotop dan Radiasi	Tersebaranya bentuk aplikasi dan paket aplikasi Isotop dan Radiasi	Jumlah Varietas Hasil Pengembangannya Ap. East Ulema-01 Isotop dan Radiasi	4	7,5	BKP
		Diperolehnya Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi di bidang peternakan, keselamatan, dan industri	Tipe ... Substitusi ... Duplikasi ...	4 1 2		
20	Fasilitas dan Penguasaan Fasilitas dan Fasilitas dan Konstruksi Fasilitas Isotop dan Radiasi	Tersebaranya bentuk aplikasi dan paket aplikasi Isotop dan Radiasi	Jumlah Varietas Hasil Pengembangannya Ap. East Ulema-01 Isotop dan Radiasi	4	7,5	BKP
		Diperolehnya Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi di bidang peternakan, keselamatan, dan industri	Tipe ... Substitusi ... Duplikasi ...	4 1 2		
21	Fasilitas dan Penguasaan Fasilitas dan Fasilitas dan Konstruksi Fasilitas Isotop dan Radiasi	Tersebaranya bentuk aplikasi dan paket aplikasi Isotop dan Radiasi	Jumlah Varietas Hasil Pengembangannya Ap. East Ulema-01 Isotop dan Radiasi	4	7,5	BKP
		Diperolehnya Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi di bidang peternakan, keselamatan, dan industri	Tipe ... Substitusi ... Duplikasi ...	4 1 2		

NO	SIMPANNY/INSTRUMEN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013		PAGU BUDJET 2013 (MILYAR RUPIAH)	KASUS/PELAKSANA
				Indikator	Target		
2	Peningkatan produktivitas tanaman melalui pelaksanaan kegiatan (Sul dan. dan area	Meningkatkan produktivitas melalui pelaksanaan kegiatan (Sul dan. dan area	(T-ablet)	Indikator	455.111	534,33	Kerjasama
				Target	2		
3	Peningkatan sistem perikanan	Tersedianya sistem perikanan yang efisien dan berkelanjutan	Ketersediaan sistem perikanan yang efisien dan berkelanjutan	Indikator	112437	1000,07	Kerjasama
				Target	3900		
4	Peningkatan pasokan ikan	Meningkatkan ketersediaan ikan	Ketersediaan ikan	Indikator	14300	131,00	Kerjasama
				Target	13200		
5	Peningkatan produksi	Meningkatkan produksi	Produksi	Indikator	6000	117,00	Kerjasama
				Target	350		

NO	SUBSTANSI/INTEGRASI PRIORITY/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TAHAP/TAHAPIN 2013	PAGU/TAHAPIN 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
6	Produk Terapan Buah Berkeanekaragaman, Pengembangan Produk, dan Peningkatan Kualitas Produk, dan Peningkatan Kualitas Produk	<p>penyediaan buah, meningkatkan luas areal dan produktivitas tanaman buah, dan meningkatkan kemampuan petani dalam meningkatkan hasil produksi.</p> <p>Meningkatnya luas areal dan produktivitas tanaman buah melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Luas areal tanaman sayuran dan buah-buahan 2. Produktivitas tanaman sayuran dan buah-buahan 	<p>Realisasi pengalokasian pasca panen tanaman buah (Unit)</p> <p>Sawahan tanaman sayuran (ha)</p> <p>Luas areal tanaman buah (ha)</p> <p>Produksi tanaman sayuran (kg/ha)</p> <p>Produksi tanaman buah (kg/ha)</p> <p>Luas areal tanaman buah (ha)</p> <p>Produksi tanaman buah (kg/ha)</p>	<p>2</p> <p>4732</p> <p>730</p> <p>925</p> <p>525</p> <p>711315</p> <p>5196978</p> <p>13951</p> <p>1220416</p> <p>763</p>	114,08	Kementerian
7	Pengembangan sistem pertanian buah-buahan	<p>Meningkatnya luas areal tanaman sayuran dan buah-buahan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Luas areal tanaman sayuran dan buah-buahan 2. Produktivitas tanaman sayuran dan buah-buahan 	<p>Luas areal tanaman sayuran dan buah-buahan (ha)</p> <p>Produksi tanaman sayuran dan buah-buahan (kg/ha)</p> <p>Luas areal tanaman buah (ha)</p> <p>Produksi tanaman buah (kg/ha)</p>	<p>711315</p> <p>5196978</p> <p>13951</p> <p>1220416</p> <p>763</p>	243,4	Kementerian
8	Peningkatan produktivitas, produktivitas dan kualitas produk pertanian	<p>Meningkatnya luas areal tanaman sayuran dan buah-buahan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Luas areal tanaman sayuran dan buah-buahan 2. Produktivitas tanaman sayuran dan buah-buahan 	<p>Luas areal tanaman sayuran dan buah-buahan (ha)</p> <p>Produksi tanaman sayuran dan buah-buahan (kg/ha)</p> <p>Luas areal tanaman buah (ha)</p> <p>Produksi tanaman buah (kg/ha)</p>	<p>711315</p> <p>5196978</p> <p>13951</p> <p>1220416</p> <p>763</p>	691,06	Kementerian

NO	STRATEGIC PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU BUDGET 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
6	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu sumber daya manusia dan penguasaan teknologi	Meningkatkan hasil produksi dengan penguasaan teknologi	1. Kompleksitas asumsi perencanaan (Rak) a. Rantai b. Tasa c. Efisiensi d. Lokasi e. Penerimaan f. Pengembangan Komoditas g. Komoditas h. Kebijakan i. Anggaran	3540 1400 33380 940 3500	30.56	Komunitas
10	Peningkatan produksi, hasil dan produktivitas serta penguasaan sumber daya lokal	Tercapainya produktivitas produktif dan populasi lokal	a. Pengembangan Komoditas b. Kebijakan Komoditas c. Anggaran d. Logistik e. Pengembangan Kelahiran (Lula) atau skor f. Pengembangan Aspek Kualitas, termasuk Lintas g. Pengembangan budaya serta di h. Anggaran (Bombaray/Teknis) (Kor) i. Anggaran (Kor) (Kor)	1080 31 157629 4000	148.93	Kelurahan
11	Peningkatan produksi, hasil dan produktivitas serta penguasaan sumber daya lokal	Tercapainya pertumbuhan produktivitas dan penguasaan teknologi sumber daya lokal	a. Pengembangan Komoditas b. Kebijakan Komoditas c. Anggaran d. Logistik e. Pengembangan Kelahiran (Lula) atau skor f. Pengembangan Aspek Kualitas, termasuk Lintas g. Pengembangan budaya serta di h. Anggaran (Bombaray/Teknis) (Kor) i. Anggaran (Kor) (Kor)	10 262 222 11	148.40	Komunitas

NO	STRATEGIS/INITY, REGISTAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU BUDGET 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
			penyempitan lahan pertanian di petak pertanian konvensional dan konversi lahan tektual	33		
12	Peningkatan produktivitas sumberdaya pertanian	Meningkatkan produktivitas sumberdaya pertanian dan perikanan	Jumlah selubung, seremonial hasil PVT jumlah Yunda Bida, Varietas dan SDG Purabaya jumlah selubung, seremonial PVT jumlah selubung bida, seremonial jumlah rekayasa teknologi bidang pertanian jumlah sarana prasarana pertanian dan di kawasan perikanan (misal PVT)	15 200 49 1200 2000 4	22,00	Kemantan
13	Peningkatan pengalihan hasil pertanian	Meningkatkan usaha pengalihan hasil pertanian di tingkat desa	jumlah unit usaha pengalihan hasil pertanian jumlah unit usaha pengalihan hasil pertanian jumlah unit usaha pengalihan hasil pertanian	115 33 57 27	312,00	Kemantan
14	Peningkatan mutu dan standarisasi produk	Meningkatkan mutu hasil pertanian	jumlah panen SKI produk pertanian (selubung) jumlah unit usaha pengalihan hasil pertanian (misal) jumlah abotertua pedijian dan terdapat pendidikan kesehatan (unit/la) jumlah selubung seremonial dan konvensional (unit/la, seremonial)	27 200 33 6	1.000,00	Kemantan

1.1- 52

NO	SIGNIFICANT PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	PAGUYUBAN		INSTANSI PELAKSANA
				TAHAP TAHUN 2013	2013 (MILYAR RUPIAH)	
15	Pengembangan penunjang infrastruktur.	Meningkatkan pemetaan infrastruktur hasil pertanian	jumlah pengujian dan sertifikasi hasil: (unit/tonbaja)	235	34,00	Kemendagri
			jumlah pengemasan/ jumlah unit (unit)	31		
			jumlah lokasi posisi Desa sebagai Basis pertanahan dalam kegiatan kerjasama pemetaan dari kabupaten, regional dan multilateral, komunitas pertanian (japan)	35		
16	Pengembangan program: pascapanen komoditas perkebunan	Meningkatkan mutu produk perkebunan	jumlah partisipasi dalam pertemuan terkoordinasi bidang pertanian, trade meeting/jambore, pameran tahunan (pameran nasional, Indonesia, Jepang)	21	28,31	Kemendagri
			jumlah hasil panen dari ekspor dan impor komoditi perabahan serta data perdagangan lainnya yang di sertikan (ton/ton)	13		
			jumlah capaian yang dituna dalam rangka pembangunan ekspor (unit)	39		
			jumlah kelompok tani yang menerapkan pengemasan pascapanen sesuai GMP (kecapak tani)	120		
			jumlah Persebaran, terkebutat, Ke. apa dan Yang Terak. Masyarakat Perkebunan Sarifalab. CV)	210		
17	Pembuatan sistem penyediaan perikanan	Meningkatkan kualitas kelolaan perikanan penyediaan perikanan pemerintah	jumlah pengemasan hasil produksi usaha perikanan (unit/tonbaja)	33	65,12	Kemendagri
			jumlah sarana/ alat perikanan perikanan pemerintah yang di sertikan (unit/tonbaja, IFF, unit)	2080		
			jumlah sarana/ alat perikanan perikanan yang di sertikan (unit/tonbaja)	71345		

NO	SUBSTANSI/INTEGRITAS PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU BUDJET 2013 (MILYAR RUPIAH)	
					PAJAK	NON PAJAK
10	Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terapan Teknik dan Metode Karantina Pertanian	peserta	dan dilaksanakan (Cepkakan/Poster/Thot)			
		Menyediakan fasilitas pertemuan dan materi penyuluhan pertanian	jumlah dokumen program, materi dan informasi penyuluhan yang disebarluaskan dan dibagikan kepada jukel	4561		
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pengujian pertanian	jumlah dokumen laporan parameter per sistem pengujian parameter (Dok)	247		
		Menyediakan atau memperbaiki sarana pelayanan pertanian yang dikelola oleh instansi (P2A/T)	jumlah keanggotaan penyuluhan pertanian yang aktif dilibatkan penyuluhan pertanian (dewa)	776		
10	Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terapan Teknik dan Metode Karantina Pertanian	penyuluhan pertanian yang berkualitas dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani di semua kecamatan	penyuluhan pertanian hasil Uji Terapan yang dapat diterapkan secara langsung ke petani di kabupaten karantina	100%	30,00	Komunitas
10	Peningkatan sistem inspeksi dan pengawasan ULSN	penyuluhan pertanian yang berkualitas dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani di semua kecamatan	penyuluhan pertanian hasil Uji Terapan yang dapat diterapkan secara langsung ke petani di kabupaten karantina	100%		
		Menyediakan atau memperbaiki sarana pelayanan pertanian yang dikelola oleh instansi (P2A/T)	jumlah keanggotaan penyuluhan pertanian yang aktif dilibatkan penyuluhan pertanian (dewa)	776		

NO	SUBSTANSI/INTI/REGISTAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU BUDJET 2013 (MILYAR RUPIAH)	POSTANSI PELAKSANA
			Jumlah setiap kegiatan pertanaman budidaya (orang)	6.343.363		
20	Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan	Terdapatnya keajaiban pakan yang berkualitas untuk media budidaya yang terjangkau dan terjangkau dari standar produksi budidaya yang sesuai dan layak	Jumlah anak perahu budidaya ikan bersertifikasi dari instansi standar (unit)	7.000	203,2	3K2
21	Pembudidayaan usaha perikanan ikan dan perikanan akuakultur	Terdapatnya kawasan perikanan budidaya yang menjadi kawasan Mitra perikanan dengan aspek yang berkualitas, realisasi investasi usaha perikanan budidaya	jumlah kawasan budidaya perikanan (hektar)	43	442,0	3K1
			jumlah perahu budidaya bersertifikasi (unit)	1.400		
22	Peningkatan peran industri pengolahan hasil perikanan	Meningkatnya volume produksi industri perikanan	Nilai dan jumlah pangkalan hasil perikanan yang dihasilkan dari industri (ton)	2.25 (30 barak, 403 lapangan)	2.033,5	3K2
			jumlah perikanan dari perikanan (unit)	37 (3 barak, 32 lapangan)		
			jumlah perikanan dari perikanan (unit)	40 (10 barak, 14 lapangan)		
			jumlah perikanan dari perikanan (unit)	1.555		
23	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkapan yang efisien, murah, dan berkeadilan	Meningkatnya pelayanan perikanan dan perikanan budidaya perikanan tangkap sesuai ketentuan SPP dan SPP yang sesuai dengan waktu	jumlah pelayanan perikanan tangkap yang sesuai untuk perikanan budidaya (unit)	10.000	23,0	3K2
			jumlah pelayanan perikanan tangkap yang sesuai untuk perikanan budidaya (unit)	3.000		

NO	SIGNIFICANTY, REGISTAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU BUDJET 2013 (MILYAR RUPIAH)	STASIUN PELAKSANA
24	Peningkatan dan pengembangan sistem dan investasi pendanaan	Meningkatkan nilai investasi bilateral pengabdian dan pemantauan hasil penelitian	kegiatan yang ber- dan / orang; badan hukum)	6.222	25,0	SKP
			mulai sejak dan "pola" atau "sistem" atau "sistem" yang dipertahankan dan meningkatkan di WFP dan UNICEF (LMD)			
25	Peningkatan dan pengembangan sistem dan investasi pendanaan	Meningkatkan nilai investasi bilateral pengabdian dan pemantauan hasil penelitian	mulai sejak, skala, Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM), dan usaha skala besar (MSB) untuk meningkatkan dan pemantauan hasil penelitian yang dilakukan dan pemantauan usaha dan proyek pengembangan	2.222 US\$M; 40 US\$	13,5	SKP
			mulai sejak pengabdian dan pemantauan hasil penelitian yang dilakukan dan pemantauan usaha dan proyek pengembangan			
26	Peningkatan dan pengembangan sistem dan investasi pendanaan	Meningkatkan nilai investasi bilateral pengabdian dan pemantauan hasil penelitian	mulai sejak pengabdian dan pemantauan hasil penelitian yang dilakukan dan pemantauan usaha dan proyek pengembangan	5.000 dan 50 US\$	25,5	SKP
			mulai sejak pengabdian dan pemantauan hasil penelitian yang dilakukan dan pemantauan usaha dan proyek pengembangan			

1.1- 56

NO	SUBSTANSI/INTI REGISTAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU BUDGET 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
27	Pelayanan kesehatan dan pendidikan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan standar kompetensi dan struktur	jumlah seluruh perguruan tinggi, universitas yang mempunyai badan keahliatan pendidikan	12.000	2.383	SKP
			jumlah kelas/pengalaman yang sesuai standar kompetensi dan struktur	13.000 orang		
28	Keterampilan Perawatan Infeksi Kulit Dasar	Tercapainya standar struktur dan isi formasi dasar	jumlah aditer infeksi yang terakreditasi	1	Tahap PEL-13	Kemampuan
			jumlah SMF Infeksi Kulit Dasar	8		
29	Residensi dan Perawatan Infeksi Kulit Dasar, Infeksi Saluran Pernafasan Akut, Infeksi Saluran Kemih, dan Infeksi Sistem Sirkulasi	Meningkatnya mutu pelayanan	terakreditasi dan akreditasi khusus (R&H)	10-15	Tahap PEL-13	Kemampuan
			jumlah dokter umum yang terakreditasi	7		
30	Peningkatan produksi, distribusi dan mutu antibiotik	Meningkatnya daya awalan antibiotik	jumlah pabrik pupuk organik terakreditasi	27	21.271	Kemampuan
			jumlah pabrik pupuk organik baik proses	27		
31	Peningkatan mutu dan keamanan pangan dan minuman	Meningkatnya usaha, keamanan, kesehatan pangan dan minuman di seluruh	<ul style="list-style-type: none"> a. Kasus wabah penyakit <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyakit yang diteliti 2. Penyakit 3. Penyakit 4. Penyakit 5. Penyakit 6. Penyakit 7. Penyakit 8. Penyakit 9. Penyakit 10. Penyakit 11. Penyakit 12. Penyakit 13. Penyakit 14. Penyakit 15. Penyakit 16. Penyakit 17. Penyakit 18. Penyakit 19. Penyakit 20. Penyakit 21. Penyakit 22. Penyakit 23. Penyakit 24. Penyakit 25. Penyakit 26. Penyakit 27. Penyakit 28. Penyakit 29. Penyakit 30. Penyakit 31. Penyakit 32. Penyakit 33. Penyakit 34. Penyakit 35. Penyakit 36. Penyakit 37. Penyakit 38. Penyakit 39. Penyakit 40. Penyakit 41. Penyakit 42. Penyakit 43. Penyakit 44. Penyakit 45. Penyakit 46. Penyakit 47. Penyakit 48. Penyakit 49. Penyakit 50. Penyakit 51. Penyakit 52. Penyakit 53. Penyakit 54. Penyakit 55. Penyakit 56. Penyakit 57. Penyakit 58. Penyakit 59. Penyakit 60. Penyakit 61. Penyakit 62. Penyakit 63. Penyakit 64. Penyakit 65. Penyakit 66. Penyakit 67. Penyakit 68. Penyakit 69. Penyakit 70. Penyakit 71. Penyakit 72. Penyakit 73. Penyakit 74. Penyakit 75. Penyakit 76. Penyakit 77. Penyakit 78. Penyakit 79. Penyakit 80. Penyakit 81. Penyakit 82. Penyakit 83. Penyakit 84. Penyakit 85. Penyakit 86. Penyakit 87. Penyakit 88. Penyakit 89. Penyakit 90. Penyakit 91. Penyakit 92. Penyakit 93. Penyakit 94. Penyakit 95. Penyakit 96. Penyakit 97. Penyakit 98. Penyakit 99. Penyakit 100. Penyakit 	25	46,00	Kemampuan
			<ul style="list-style-type: none"> a. Kasus wabah penyakit <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyakit 2. Penyakit 3. Penyakit 4. Penyakit 5. Penyakit 6. Penyakit 7. Penyakit 8. Penyakit 9. Penyakit 10. Penyakit 11. Penyakit 12. Penyakit 13. Penyakit 14. Penyakit 15. Penyakit 16. Penyakit 17. Penyakit 18. Penyakit 19. Penyakit 20. Penyakit 21. Penyakit 22. Penyakit 23. Penyakit 24. Penyakit 25. Penyakit 26. Penyakit 27. Penyakit 28. Penyakit 29. Penyakit 30. Penyakit 31. Penyakit 32. Penyakit 33. Penyakit 34. Penyakit 35. Penyakit 36. Penyakit 37. Penyakit 38. Penyakit 39. Penyakit 40. Penyakit 41. Penyakit 42. Penyakit 43. Penyakit 44. Penyakit 45. Penyakit 46. Penyakit 47. Penyakit 48. Penyakit 49. Penyakit 50. Penyakit 51. Penyakit 52. Penyakit 53. Penyakit 54. Penyakit 55. Penyakit 56. Penyakit 57. Penyakit 58. Penyakit 59. Penyakit 60. Penyakit 61. Penyakit 62. Penyakit 63. Penyakit 64. Penyakit 65. Penyakit 66. Penyakit 67. Penyakit 68. Penyakit 69. Penyakit 70. Penyakit 71. Penyakit 72. Penyakit 73. Penyakit 74. Penyakit 75. Penyakit 76. Penyakit 77. Penyakit 78. Penyakit 79. Penyakit 80. Penyakit 81. Penyakit 82. Penyakit 83. Penyakit 84. Penyakit 85. Penyakit 86. Penyakit 87. Penyakit 88. Penyakit 89. Penyakit 90. Penyakit 91. Penyakit 92. Penyakit 93. Penyakit 94. Penyakit 95. Penyakit 96. Penyakit 97. Penyakit 98. Penyakit 99. Penyakit 100. Penyakit 	17		

NO	SIMPULAN/INTEGRITAS POKOK	SASARAN	INDIKATOR	TARICHT TAARIM 2013		PAGITTAHIM 2013 (MIDYAR RUPYAH)	INSTANSI PELAKSANA
				1	2		
		perhatian		10			
			Jumlah fasilitas kesehatan di seluruh pertanahan (apostasi)	10			
			Jumlah pemukiman, pramuka, ekotisi dan pemukiman dalam negeri maupun luar negeri (satu)	22			
b. Pengadaan pembiayaan yang terjangkau							
1	Pengadaan pembiayaan yang terjangkau	Tersedianya layanan asuransi yang terjangkau dan aman.	Tersedianya layanan asuransi kesehatan (ESBI) yang terjangkau dan aman.				Kementerian
2	Pengadaan pembiayaan yang terjangkau	Tersedianya layanan asuransi yang terjangkau dan aman.	Tersedianya layanan asuransi yang terjangkau dan aman.				Kementerian
c. Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan bahan varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau.							
1	Pengadaan subsidi bahan varietas unggul	Tersedianya bahan varietas unggul yang teruji.	Jumlah lahan tanam pangan beras (hektar)	76,9		227,7	Kementerian
2	Pengadaan subsidi pupuk	Tersedianya pupuk bersubsidi	Jumlah lahan tanam pangan beras (hektar)	7,3		13,924,3	Kementerian
3	Pengadaan subsidi sarana produksi dan pasca panen	Tersedianya sarana produksi dan pasca panen	Jumlah lahan tanam pangan beras (hektar)	1,3		2,03,7	SKP
			Jumlah lahan tanam pangan beras (hektar)	340			
			Jumlah lahan tanam pangan beras (hektar)	61			
			Jumlah lahan tanam pangan beras (hektar)	750,000			

NO	STRATAGY/INITY/REGISTRAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TAHAP/TAHUN 2013	PAGUYUBAN 2013 (MUTUAS KUPAH)	INSTANSI PELAKSANA
4	Pengyuluhan Sumbah Binas untuk Masyarakat Disabilitas (RASALY)	Pengyuluhan harus dilakukan melalui rumah caringa sasaran (RTST) dengan jumlah yang memadai dalam satu tahun.	Jumlah RTST penerima RASALY (Program 15 keperawatan) selama 12 bulan.	-	Tripartesial di PK 4	Komunitas asray Masyarakat BULOOG
3. PANGKAL TAYU GIZI						
Peningkatan Kualitas Gizi dan Kesehatan Masyarakat Melalui Pola Pangan Beraturan						
1	Peningkatan konsumsi pangan asal hewan yang aman dan berkualitas dalam program produksi bahan baku pangan	Terdapatnya pangan asal hewan yang AMSL, dan pemenuhan persyaratan praktik higienitas pangan produksi bahan baku pangan	-konduktur penyair zoosis dan keamanan serta pelayanan veteriner (uji), Uji Laba, pelepasan asal hewan, yang menjadi penyediaan bahan makanan, (uji), pengawasan keamanan dan nilai tambah produksi hewan (aportasi)	216 33 33	2013/14	Kemendagri
2	Peningkatan keterampilan pangan dan pengemasan sambutan pangan	Meningginya pemahaman konsumen pangan dan pengemasan pangan	Jumlah kegiatan literasi pangan/Perwakilan jumlah Peranginan dan masyarakat Jumlah Hasil Penyelidikan PPK jumlah hasil analisis keselamatan pangan jumlah laporan pelanggaran pangan yang dibandingkan pengendalian dan ketertarikan	1000 410 Kua 33 Prop 33 11	13/17	Komunitas
3	Peningkatan keterampilan pangan dan pengemasan sambutan pangan	Meningginya pemahaman pangan dan pengemasan pangan dan keamanan pangan	Jumlah desa yang dilaksanakan dalam PPK jumlah hasil pemantauan keamanan jumlah dan pertemuan bulanan PPK jumlah hasil pemantauan PPK jumlah hasil analisis hasil keamanan pangan jumlah hasil pemantauan dan pengawasan	17000 Desa 33 prop 11 prop 33 11	2017	Komunitas

NO	SUBSTANSI/INTI REGISTAR PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU BUDGET 2013 (MILYAR RUPIAH)	
					PAJAK	NON PAJAK
4	Pengembangan sistem Diserikat dan Badan Usaha Berbagi Keuntungan	Mengembangkan pemanfaatan diserikat dan berbagi pangar	keuntungan pada 2013	13 Grup	236,5	-
			jumlah aset pengembalian ul. dan pinjaman lokal	753		
			jumlah keagenan/Diserikat/Pangar Masyarakat (DPPM)	635		
			jumlah aset pinjol barang pokok/keagenan	15 Prop		
5	Pengembangan dan Pembinaan Pakarandaraan lokal	Meningkatnya implemansi keajaiban operasional Pakarandaraan lokal	jumlah aset pinjol barang pokok/keagenan dan Diserikat/Pangar dan pinjaman	33	15,4	0,00
			jumlah aset pinjol/pinjol/keagenan/keagenan	13 Prop		
			jumlah aset pinjol/pinjol/keagenan/keagenan	68		
			jumlah aset pinjol/pinjol/keagenan/keagenan	2 RKS, 3 Lali		
6	Pengembangan sistem keahlianan Mutu dan Keunggulan Mutu Produk	Mengembangkan keahlianan mutu dan keunggulan mutu produk	jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil mutunya yang bersertifikat ISO 9001	20 UPI	230	0,00
			jumlah aset yang terakreditasi hasil bahan pembuatnya serta laboratorium dan jasa uji yang terakreditasi	20 aset uji dan 5 jenis uji		
8	Fasilitasi pengujian dan pengembangan perusahaan dan industri di lingkungan	Mengembangkan Pakarandaraan lokal keajaiban	jumlah keagenan/pasar hasil pertanian dan non pertanian	7 keagenan	92,0	0,00
			jumlah keagenan/pasar hasil pertanian dan non pertanian	11,5 (20 keagenan dan 100 keagenan)		

NO	SUBSTANSI/INTI/REGISTAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGU BUDGET 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
5	Fermentasi biji-bijian lokal	Meningkatkan kualitas pirang-aman masalah, dan masyarakat	<p>-Desain pengembangan dan pembibitan pirang-aman kerjasama pemerintah lokal pertanian dalam negeri (Pestana)</p> <p>Persentase hasil uji mutu yang memenuhi persyaratan</p> <p>Persentase hasil uji mutu yang bermutu (K1)</p>	<p>33</p> <p>100</p> <p>80</p>	Dibekalkan di PK 3	Kemendagri
6. ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM						
<i>Peningkatan kapabilitas lembaga penelitian dan adaptasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim</i>						
1	Pengembangan sistem pertanian dan budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Terapainya kearifan lokal budidaya yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang aman dan berkelanjutan	<p>Jumlah petani/peternak yang terlatih dan terakreditasi pertaniannya</p> <p>Jumlah informasi/peta produksi sumberdaya lahan</p> <p>Jumlah lokasi teknologi pangan/terapan yang terakreditasi</p> <p>Jumlah petani/peternak yang terakreditasi</p>	<p>41</p> <p>71</p> <p>9</p> <p>8</p> <p>6</p>	57,9	KCP
2	Fermentasi/pengembangan sumberdaya lahan pertanian	Terapainya data, informasi dan pengetahuan tentang teknologi pengolahan sumberdaya lahan pertanian	<p>Jumlah informasi/peta produksi sumberdaya lahan</p> <p>Jumlah lokasi teknologi pangan/terapan yang terakreditasi</p> <p>Jumlah petani/peternak yang terakreditasi</p>	<p>9</p> <p>8</p> <p>6</p>	131,56	Kemendagri
3	Fermentasi dan pengemasan bahan pertanian	Meningkatnya produktivitas lahan pertanian lokal yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	<p>Jumlah petani/peternak yang terakreditasi</p> <p>Jumlah lokasi teknologi pangan/terapan yang terakreditasi</p> <p>Jumlah petani/peternak yang terakreditasi</p>	<p>200.000</p>	4.500	Kemendagri

NO	STRATEGIS/INTI/REGISTRAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TAHAP/TARUHM 2013	PAGU/TAHILIM 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
		Produksi serta peredaran obat untuk mencegah, meringankan, menyembuhkan peramalan				
3	Perawatan dan Sumber Daya (5.3)	Meningkatkan kapasitas pelayanan SBL sasaran, berakutansi	jumlah eksekutif Perilaku, Urutan, Durasi, dan (FUD) yang tersedia sumber daya ikannya, pionirasi	0	33,0	SK
			jumlah perawat dan terborial dan keperawatan yang terakutansi sumber daya keperawatan (WPP)	11		
			jumlah perawat dan terborial dan keperawatan yang terakutansi sumber daya keperawatan (WPP)	11		

1.1- 62

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2013

PRIORITAS 6	PROGAM AKSI DI BIDANG INFRASTRUKTUR
Tematik Prioritas	Perencanaan Infrastruktur Nasional yang memiliki daya dukung dari segi berhadapan permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat, khususnya kegiatan masyarakat umum di seluruh wilayah Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat
Perangko/Unit/lembaga	Minister Koordinator Bidang Pembangunan
Kelembagaan Dukung	Minister Koordinator Bidang Pembangunan Minister Koordinator Bidang Pembangunan Minister Koordinator Bidang Pembangunan

NO	SUBSTANSI/INDUKSI/DEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAKAI TAHUN 2013	KUANTITAS PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TAMBAH TATA RUANG					
1.1	Konsolidasi kegiatan pemangaman dan pemantapan tanah melalui kegiatan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengalokasian tata ruang secara komprehensif	Keseluruhan dan keseluruhan kegiatan pembangunan	Luas zona tata ruang yang telah diselaraskan dengan rencana induk	15 provinsi	0,0	Kantor PT
1.2	Perencanaan kawasan pemukiman di Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Kecamatan	Kelembagaan dan kelembagaan masyarakat pembangunan	Luas kawasan yang telah diselaraskan dengan rencana induk	15 provinsi	1,74	Kantor PT
1.3	Perencanaan kawasan pemukiman di Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Kecamatan	Kelembagaan dan kelembagaan masyarakat pembangunan	Luas kawasan yang telah diselaraskan dengan rencana induk	4,2 kabupaten/kota	84	BPN
1.4	Perencanaan kawasan pemukiman di Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Kecamatan	Kelembagaan dan kelembagaan masyarakat pembangunan	Luas kawasan yang telah diselaraskan dengan rencana induk	19,000 kabupaten/kota	353	BPN
1.5	Perencanaan kawasan pemukiman di Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Kecamatan	Kelembagaan dan kelembagaan masyarakat pembangunan	Luas kawasan yang telah diselaraskan dengan rencana induk	1 pulau	6,3	BPN
1.6	Perencanaan kawasan pemukiman di Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Kecamatan	Kelembagaan dan kelembagaan masyarakat pembangunan	Luas kawasan yang telah diselaraskan dengan rencana induk	66	1,5	Besutan/lembaga BIC
				1,10	4,7	

NO	SUBSTANSI/INTI/BERGILAIAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR (4)	TARGET TAMBAH 2012	PAKA TAHUN 2012	INSTANSI PELAKSANA
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1			1. Jumlah RUP yang diterima masyarakat 2. Jumlah RUP yang tidak terdistribusi ke bank 3. Jumlah RUP yang tidak terdistribusi ke bank 4. Jumlah RUP yang tidak terdistribusi ke bank	400 750 1 5.000 20.000 20.000	600 700 600	
1.2	1.2.1. Meningkatkan jumlah layanan dan kualitas layanan 1.2.2. Meningkatkan jumlah layanan dan kualitas layanan	1. Jumlah layanan yang diterima masyarakat 2. Jumlah layanan yang tidak terdistribusi ke bank 3. Jumlah layanan yang tidak terdistribusi ke bank 4. Jumlah layanan yang tidak terdistribusi ke bank	1. Jumlah layanan yang diterima masyarakat 2. Jumlah layanan yang tidak terdistribusi ke bank 3. Jumlah layanan yang tidak terdistribusi ke bank 4. Jumlah layanan yang tidak terdistribusi ke bank	500 1000 1000 1000	500 1000 1000 1000	1. Dinas Perbankan 2. Dinas Perbankan 3. Dinas Perbankan 4. Dinas Perbankan
1.3	1.3.1. Meningkatkan jumlah layanan dan kualitas layanan 1.3.2. Meningkatkan jumlah layanan dan kualitas layanan	1. Jumlah layanan yang diterima masyarakat 2. Jumlah layanan yang tidak terdistribusi ke bank 3. Jumlah layanan yang tidak terdistribusi ke bank 4. Jumlah layanan yang tidak terdistribusi ke bank	1. Jumlah layanan yang diterima masyarakat 2. Jumlah layanan yang tidak terdistribusi ke bank 3. Jumlah layanan yang tidak terdistribusi ke bank 4. Jumlah layanan yang tidak terdistribusi ke bank	100 200 200 200	100 200 200 200	1. Dinas Perbankan 2. Dinas Perbankan 3. Dinas Perbankan 4. Dinas Perbankan
1.4	1.4.1. Meningkatkan jumlah layanan dan kualitas layanan 1.4.2. Meningkatkan jumlah layanan dan kualitas layanan	1. Jumlah layanan yang diterima masyarakat 2. Jumlah layanan yang tidak terdistribusi ke bank 3. Jumlah layanan yang tidak terdistribusi ke bank 4. Jumlah layanan yang tidak terdistribusi ke bank	1. Jumlah layanan yang diterima masyarakat 2. Jumlah layanan yang tidak terdistribusi ke bank 3. Jumlah layanan yang tidak terdistribusi ke bank 4. Jumlah layanan yang tidak terdistribusi ke bank	100 200 200 200	100 200 200 200	1. Dinas Perbankan 2. Dinas Perbankan 3. Dinas Perbankan 4. Dinas Perbankan

11 JATIM

NO	SUBSTANSI/INDUKSI/BERGANTIAN/PALORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	PADA TAHUN 2012	INSTANSI PELAKSANA
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	<p>PERKAWINAN BAKYAT Pembinaan dan pembinaan terhadap keluarga miskin dan keluarga rentan yang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial.</p>	Keluarga miskin, keluarga rentan, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial, keluarga yang mengalami kesulitan sosial.				
IV	<p>PERKAWINAN BAKYAT Pembinaan dan pembinaan terhadap keluarga miskin dan keluarga rentan yang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial.</p>					
IV.1	Pembinaan dan pembinaan terhadap keluarga miskin dan keluarga rentan yang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial.	2000 keluarga	Jumlah kunjungan ke rumah keluarga miskin dan keluarga rentan	1200	2000	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
IV.2	Pembinaan dan pembinaan terhadap keluarga miskin dan keluarga rentan yang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial.	50000 keluarga	Jumlah kunjungan ke rumah keluarga miskin dan keluarga rentan	50000	50000	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
IV.3	Pembinaan dan pembinaan terhadap keluarga miskin dan keluarga rentan yang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial.	50000 keluarga	Jumlah kunjungan ke rumah keluarga miskin dan keluarga rentan	20000	20000	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
IV.4	Pembinaan dan pembinaan terhadap keluarga miskin dan keluarga rentan yang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial.	50000 keluarga	Jumlah kunjungan ke rumah keluarga miskin dan keluarga rentan	20000	20000	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
IV.5	Pembinaan dan pembinaan terhadap keluarga miskin dan keluarga rentan yang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial.	2000 keluarga	Jumlah kunjungan ke rumah keluarga miskin dan keluarga rentan	50000	50000	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
V	<p>PERKAWINAN BAKYAT Penyelenggaraan pembinaan dan pembinaan terhadap keluarga miskin dan keluarga rentan yang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial.</p>					
V.1	Penyelenggaraan pembinaan dan pembinaan terhadap keluarga miskin dan keluarga rentan yang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial.	2000 keluarga	Jumlah kunjungan ke rumah keluarga miskin dan keluarga rentan	100000	20000	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
V.2	Penyelenggaraan pembinaan dan pembinaan terhadap keluarga miskin dan keluarga rentan yang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial.	2000 keluarga	Jumlah kunjungan ke rumah keluarga miskin dan keluarga rentan	200000	20000	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
V.3	Penyelenggaraan pembinaan dan pembinaan terhadap keluarga miskin dan keluarga rentan yang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial.	2000 keluarga	Jumlah kunjungan ke rumah keluarga miskin dan keluarga rentan	100000	100000	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
V.4	Penyelenggaraan pembinaan dan pembinaan terhadap keluarga miskin dan keluarga rentan yang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial.	2000 keluarga	Jumlah kunjungan ke rumah keluarga miskin dan keluarga rentan	100000	100000	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
V.5	Penyelenggaraan pembinaan dan pembinaan terhadap keluarga miskin dan keluarga rentan yang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial.	2000 keluarga	Jumlah kunjungan ke rumah keluarga miskin dan keluarga rentan	100000	100000	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

No	Substansi/Unit/ Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2012	PADA TAHUN 2012	INSTANSI PELAKSANA
			(4)	(5)	(6)	(7)
1.1			<p>terdapat sarana/ prasarana pengangkutan air minum yang layak di wilayah target</p> <p>jumlah penduduk yang secara langsung menikmati akses layanan air minum yang layak</p> <p>jumlah sarana/ prasarana pengangkutan air minum yang layak</p> <p>jumlah penduduk yang menikmati layanan air minum yang layak</p> <p>jumlah sarana/ prasarana pengangkutan air minum yang layak</p>	<p>84 buah</p> <p>85 buah</p> <p>44.84 km</p> <p>11,17 km</p> <p>47,47 km</p> <p>jumlah km km</p>	<p>100,00</p> <p>1,055</p> <p>22,052</p> <p>45,21</p> <p>25,70</p> <p>7,527</p>	
1.2	Pengembangan Air Baku	<p>Terwujudnya pelayanan air minum yang layak di wilayah target</p> <p>Sungai Sragawon Sile</p>	<p>Terwujudnya pelayanan pengangkutan air minum yang layak</p> <p>Preparasi SDB</p>	<p>1.33 rd sup baik 5-6 bulan</p> <p>7.000 Pemasangan Waduk Sektor (TTK&S) Masyarakat Sile</p> <p>Preparasi Sungai Bersih Tinggi Sungai</p>	<p>10,000</p> <p>50</p> <p>45</p>	Kecamatan
		<p>Meningkatkan sarana/ prasarana air baku di wilayah target</p> <p>terdapat sarana/ prasarana air baku yang layak</p>	<p>terdapat sarana/ prasarana air baku yang layak</p> <p>Preparasi SDB</p>	<p>12,000 rd/2012</p> <p>1,399 rd/2012</p> <p>3,000 rd/2012</p>	<p>2,000</p> <p>2,000</p> <p>3,500</p>	Kecamatan

89-71

NO	SUBSTANSI/INTI/BERGAIAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	PAKA TAHUN 2012	INSTANSI PELAKSANA
1.1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
VI	TELEKOMUNIKASI					
VI.1	Peningkatan kemampuan jaringannya yang dapat melayani seluruh wilayah	Terdapat peningkatan akses ke layanan internet dan video di seluruh wilayah	Presentase pengguna internet yang menggunakan layanan internet	65%	31,9	Kementerian
VI.2	Pelayanan pelanggan yang ramah dan cepat	Terdapat peningkatan jumlah keluhan yang ditangani dan waktu penyelesaian	Presentase keluhan yang ditangani dan waktu penyelesaian	100%	8%	Kementerian
VI.2	Peningkatan pelayanan pelanggan	Terdapat peningkatan jumlah keluhan yang ditangani dan waktu penyelesaian	Presentase keluhan yang ditangani dan waktu penyelesaian	100%	17,9	Kementerian
VI.4	Peningkatan pelayanan pelanggan	Terdapat peningkatan jumlah keluhan yang ditangani dan waktu penyelesaian	Presentase keluhan yang ditangani dan waktu penyelesaian	100%	8%	Kementerian
VI.5	Peningkatan pelayanan pelanggan	Terdapat peningkatan jumlah keluhan yang ditangani dan waktu penyelesaian	Presentase keluhan yang ditangani dan waktu penyelesaian	100%	8%	Kementerian
VI.6	Peningkatan pelayanan pelanggan	Terdapat peningkatan jumlah keluhan yang ditangani dan waktu penyelesaian	Presentase keluhan yang ditangani dan waktu penyelesaian	100%	8%	Kementerian

NO	SUBSTANSI/INDIKATOR PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	PADA TAHUN 2012	INSTANSI PELAKSANA
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
VI.7	Pembinaan dan pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	Terdapat dan berkembangnya lembaga-lembaga komersial	Pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga komersial	6,4%	14,4	Kerjasama
VI.8	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pemerintahan	Kualitas regulasi, kinerja dan kualitas pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inovatif	Pembinaan dan pengembangan sistem pemerintahan	6,4%	14,4	Kerjasama
VI.9	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pemerintahan	Kualitas regulasi, kinerja dan kualitas pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inovatif	Pembinaan dan pengembangan sistem pemerintahan	6,4%	14,4	Kerjasama
VII	TRANSFORMASI PERGOYAHAN	Perbaikan sistem dan jaringan transportasi publik kota	Pembinaan dan pengembangan sistem transportasi publik kota	6,4%	14,4	Kerjasama
VII.1	Perbaikan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Terdapat dan berkembangnya lembaga-lembaga komersial	Pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga komersial	6,4%	14,4	Kerjasama

NO	SUBSTANSI/INDUKSI/BERGILAIAN PILORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TADIEN 2012	PAK TAHUN 2012	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
VIII	PENERJAN SURVEI/INSPEKSI	Terdapat orang-orang yang terdapat di Puskesmas	Jumlah Pengunjung yang Berhasil Terdaftar di Puskesmas Persentase Kesiapan Puskesmas			
VIII.1	PUSKESMAS				PUSKESMAS	Kendaraan
VIII.2	PUSKESMAS				PUSKESMAS	Kendaraan
VIII.3	PUSKESMAS				PUSKESMAS	Kendaraan
VIII.4	LISENSI/TAJUK				PUSKESMAS	Kendaraan

L-71

NO	SISTEMASI INTI / KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	PAJ. TUNJUK 2012 (Rth/Rp)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Kegiatan tahunan bagi para mahasiswa	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam bidang kefarmasian, farmakologi, dan farmasi lainnya.	<p>1. Pelaksanaan kegiatan tahunan bagi para mahasiswa</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan tahunan bagi para mahasiswa dalam bidang kefarmasian, farmakologi, dan farmasi lainnya.</p> <p>3. Pelaksanaan kegiatan tahunan bagi para mahasiswa dalam bidang kefarmasian, farmakologi, dan farmasi lainnya.</p> <p>4. Pelaksanaan kegiatan tahunan bagi para mahasiswa dalam bidang kefarmasian, farmakologi, dan farmasi lainnya.</p> <p>5. Pelaksanaan kegiatan tahunan bagi para mahasiswa dalam bidang kefarmasian, farmakologi, dan farmasi lainnya.</p> <p>6. Pelaksanaan kegiatan tahunan bagi para mahasiswa dalam bidang kefarmasian, farmakologi, dan farmasi lainnya.</p> <p>7. Pelaksanaan kegiatan tahunan bagi para mahasiswa dalam bidang kefarmasian, farmakologi, dan farmasi lainnya.</p> <p>8. Pelaksanaan kegiatan tahunan bagi para mahasiswa dalam bidang kefarmasian, farmakologi, dan farmasi lainnya.</p> <p>9. Pelaksanaan kegiatan tahunan bagi para mahasiswa dalam bidang kefarmasian, farmakologi, dan farmasi lainnya.</p> <p>10. Pelaksanaan kegiatan tahunan bagi para mahasiswa dalam bidang kefarmasian, farmakologi, dan farmasi lainnya.</p>	60%	88	Kerjasama
3	Peningkatan kemampuan bagi para mahasiswa	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam bidang kefarmasian, farmakologi, dan farmasi lainnya.	<p>1. Pelaksanaan kegiatan tahunan bagi para mahasiswa</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan tahunan bagi para mahasiswa dalam bidang kefarmasian, farmakologi, dan farmasi lainnya.</p> <p>3. Pelaksanaan kegiatan tahunan bagi para mahasiswa dalam bidang kefarmasian, farmakologi, dan farmasi lainnya.</p> <p>4. Pelaksanaan kegiatan tahunan bagi para mahasiswa dalam bidang kefarmasian, farmakologi, dan farmasi lainnya.</p> <p>5. Pelaksanaan kegiatan tahunan bagi para mahasiswa dalam bidang kefarmasian, farmakologi, dan farmasi lainnya.</p> <p>6. Pelaksanaan kegiatan tahunan bagi para mahasiswa dalam bidang kefarmasian, farmakologi, dan farmasi lainnya.</p> <p>7. Pelaksanaan kegiatan tahunan bagi para mahasiswa dalam bidang kefarmasian, farmakologi, dan farmasi lainnya.</p> <p>8. Pelaksanaan kegiatan tahunan bagi para mahasiswa dalam bidang kefarmasian, farmakologi, dan farmasi lainnya.</p> <p>9. Pelaksanaan kegiatan tahunan bagi para mahasiswa dalam bidang kefarmasian, farmakologi, dan farmasi lainnya.</p> <p>10. Pelaksanaan kegiatan tahunan bagi para mahasiswa dalam bidang kefarmasian, farmakologi, dan farmasi lainnya.</p>	60%	50	BKKP

NO	SISTEMASI INTI/ KEHATAN PRIORITY	SASARAN	INDICATOR	TARGET TAHUN 2012	PAJ. TUBUH 2012 (Miliar Rp)	INSTANSI PEKERJA
1.	Moral	[5] Melakukan upaya peningkatan daya rang... [6] Melakukan upaya peningkatan daya rang...	[4] Melakukan upaya peningkatan daya rang... [6] Melakukan upaya peningkatan daya rang...	[3] Melakukan upaya peningkatan daya rang...	[6] Melakukan upaya peningkatan daya rang...	[7] Melakukan upaya peningkatan daya rang...
4.	Peningkatan Perilaku Prilaku	[5] Meningkatkan perilaku... [6] Meningkatkan perilaku...	[4] Meningkatkan perilaku... [6] Meningkatkan perilaku...	[3] Meningkatkan perilaku...	[6] Meningkatkan perilaku...	[7] Meningkatkan perilaku...
5.	Peningkatan Perilaku Prilaku	[5] Meningkatkan perilaku... [6] Meningkatkan perilaku...	[4] Meningkatkan perilaku... [6] Meningkatkan perilaku...	[3] Meningkatkan perilaku...	[6] Meningkatkan perilaku...	[7] Meningkatkan perilaku...
6.	Peningkatan Perilaku Prilaku	[5] Meningkatkan perilaku... [6] Meningkatkan perilaku...	[4] Meningkatkan perilaku... [6] Meningkatkan perilaku...	[3] Meningkatkan perilaku...	[6] Meningkatkan perilaku...	[7] Meningkatkan perilaku...
7.	Peningkatan Data dan Informasi Kesehatan	[5] Meningkatkan data dan informasi... [6] Meningkatkan data dan informasi...	[4] Meningkatkan data dan informasi... [6] Meningkatkan data dan informasi...	[3] Meningkatkan data dan informasi...	[6] Meningkatkan data dan informasi...	[7] Meningkatkan data dan informasi...
<p>2. PELAYANAN PRIMER: Meningkatkan pelayanan primer... Meningkatkan pelayanan primer...</p>						
1.	Peningkatan Sistem Pelayanan Primer dan Pelayanan Kesehatan Sistem	[5] Meningkatkan sistem pelayanan... [6] Meningkatkan sistem pelayanan...	[4] Meningkatkan sistem pelayanan... [6] Meningkatkan sistem pelayanan...	[3] Meningkatkan sistem pelayanan...	[6] Meningkatkan sistem pelayanan...	[7] Meningkatkan sistem pelayanan...

NO	SURSTASI INTI/ KEHATAN PRIORITY	SASARAN	INDICATOR	TARGET TAHUN 2013 [Ribu Rp]	PAK. TBHUY 2013 [Ribu Rp]	INSTANSI PEKERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Peningkatan Partisipasi dalam Masyarakat	Mencapai proses sosialisasi di daerah	<p>1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi SP/PSI</p> <p>2. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi SP/PSI</p> <p>3. Jumlah daerah yang mematuhi SP/PSI</p> <p>4. Jumlah SP/PSI yang dapat terpenuhi</p> <p>5. Jumlah SP/PSI yang terpenuhi</p> <p>6. Jumlah SP/PSI yang terpenuhi</p> <p>7. Jumlah SP/PSI yang terpenuhi</p> <p>8. Jumlah SP/PSI yang terpenuhi</p> <p>9. Jumlah SP/PSI yang terpenuhi</p> <p>10. Jumlah SP/PSI yang terpenuhi</p>	<p>1. 1000 orang</p> <p>2. 1000 orang</p> <p>3. 1000 orang</p> <p>4. 1000 orang</p> <p>5. 1000 orang</p> <p>6. 1000 orang</p> <p>7. 1000 orang</p> <p>8. 1000 orang</p> <p>9. 1000 orang</p> <p>10. 1000 orang</p>	<p>1. 1000 orang</p> <p>2. 1000 orang</p> <p>3. 1000 orang</p> <p>4. 1000 orang</p> <p>5. 1000 orang</p> <p>6. 1000 orang</p> <p>7. 1000 orang</p> <p>8. 1000 orang</p> <p>9. 1000 orang</p> <p>10. 1000 orang</p>	<p>1. Dinas Kesehatan</p> <p>2. Dinas Kesehatan</p> <p>3. Dinas Kesehatan</p> <p>4. Dinas Kesehatan</p> <p>5. Dinas Kesehatan</p> <p>6. Dinas Kesehatan</p> <p>7. Dinas Kesehatan</p> <p>8. Dinas Kesehatan</p> <p>9. Dinas Kesehatan</p> <p>10. Dinas Kesehatan</p>
3.	Tradisi Recepton Investasi dan Fasilitas Pasar Modal	<p>1. Jumlah investasi yang masuk ke pasar modal</p> <p>2. Jumlah investasi yang masuk ke pasar modal</p> <p>3. Jumlah investasi yang masuk ke pasar modal</p> <p>4. Jumlah investasi yang masuk ke pasar modal</p> <p>5. Jumlah investasi yang masuk ke pasar modal</p> <p>6. Jumlah investasi yang masuk ke pasar modal</p> <p>7. Jumlah investasi yang masuk ke pasar modal</p> <p>8. Jumlah investasi yang masuk ke pasar modal</p> <p>9. Jumlah investasi yang masuk ke pasar modal</p> <p>10. Jumlah investasi yang masuk ke pasar modal</p>	<p>1. 1000 orang</p> <p>2. 1000 orang</p> <p>3. 1000 orang</p> <p>4. 1000 orang</p> <p>5. 1000 orang</p> <p>6. 1000 orang</p> <p>7. 1000 orang</p> <p>8. 1000 orang</p> <p>9. 1000 orang</p> <p>10. 1000 orang</p>	<p>1. 1000 orang</p> <p>2. 1000 orang</p> <p>3. 1000 orang</p> <p>4. 1000 orang</p> <p>5. 1000 orang</p> <p>6. 1000 orang</p> <p>7. 1000 orang</p> <p>8. 1000 orang</p> <p>9. 1000 orang</p> <p>10. 1000 orang</p>	<p>1. Dinas Kesehatan</p> <p>2. Dinas Kesehatan</p> <p>3. Dinas Kesehatan</p> <p>4. Dinas Kesehatan</p> <p>5. Dinas Kesehatan</p> <p>6. Dinas Kesehatan</p> <p>7. Dinas Kesehatan</p> <p>8. Dinas Kesehatan</p> <p>9. Dinas Kesehatan</p> <p>10. Dinas Kesehatan</p>	
4.	Keaktifan dan Partisipasi Ekspor dan Rezeki Investasi (PPI)	<p>1. Jumlah ekspor yang masuk ke pasar modal</p> <p>2. Jumlah ekspor yang masuk ke pasar modal</p> <p>3. Jumlah ekspor yang masuk ke pasar modal</p> <p>4. Jumlah ekspor yang masuk ke pasar modal</p> <p>5. Jumlah ekspor yang masuk ke pasar modal</p> <p>6. Jumlah ekspor yang masuk ke pasar modal</p> <p>7. Jumlah ekspor yang masuk ke pasar modal</p> <p>8. Jumlah ekspor yang masuk ke pasar modal</p> <p>9. Jumlah ekspor yang masuk ke pasar modal</p> <p>10. Jumlah ekspor yang masuk ke pasar modal</p>	<p>1. 1000 orang</p> <p>2. 1000 orang</p> <p>3. 1000 orang</p> <p>4. 1000 orang</p> <p>5. 1000 orang</p> <p>6. 1000 orang</p> <p>7. 1000 orang</p> <p>8. 1000 orang</p> <p>9. 1000 orang</p> <p>10. 1000 orang</p>	<p>1. 1000 orang</p> <p>2. 1000 orang</p> <p>3. 1000 orang</p> <p>4. 1000 orang</p> <p>5. 1000 orang</p> <p>6. 1000 orang</p> <p>7. 1000 orang</p> <p>8. 1000 orang</p> <p>9. 1000 orang</p> <p>10. 1000 orang</p>	<p>1. Dinas Kesehatan</p> <p>2. Dinas Kesehatan</p> <p>3. Dinas Kesehatan</p> <p>4. Dinas Kesehatan</p> <p>5. Dinas Kesehatan</p> <p>6. Dinas Kesehatan</p> <p>7. Dinas Kesehatan</p> <p>8. Dinas Kesehatan</p> <p>9. Dinas Kesehatan</p> <p>10. Dinas Kesehatan</p>	
5.	Keaktifan dan Partisipasi Ekspor dan Rezeki Investasi (PPI)	<p>1. Jumlah ekspor yang masuk ke pasar modal</p> <p>2. Jumlah ekspor yang masuk ke pasar modal</p> <p>3. Jumlah ekspor yang masuk ke pasar modal</p> <p>4. Jumlah ekspor yang masuk ke pasar modal</p> <p>5. Jumlah ekspor yang masuk ke pasar modal</p> <p>6. Jumlah ekspor yang masuk ke pasar modal</p> <p>7. Jumlah ekspor yang masuk ke pasar modal</p> <p>8. Jumlah ekspor yang masuk ke pasar modal</p> <p>9. Jumlah ekspor yang masuk ke pasar modal</p> <p>10. Jumlah ekspor yang masuk ke pasar modal</p>	<p>1. 1000 orang</p> <p>2. 1000 orang</p> <p>3. 1000 orang</p> <p>4. 1000 orang</p> <p>5. 1000 orang</p> <p>6. 1000 orang</p> <p>7. 1000 orang</p> <p>8. 1000 orang</p> <p>9. 1000 orang</p> <p>10. 1000 orang</p>	<p>1. 1000 orang</p> <p>2. 1000 orang</p> <p>3. 1000 orang</p> <p>4. 1000 orang</p> <p>5. 1000 orang</p> <p>6. 1000 orang</p> <p>7. 1000 orang</p> <p>8. 1000 orang</p> <p>9. 1000 orang</p> <p>10. 1000 orang</p>	<p>1. Dinas Kesehatan</p> <p>2. Dinas Kesehatan</p> <p>3. Dinas Kesehatan</p> <p>4. Dinas Kesehatan</p> <p>5. Dinas Kesehatan</p> <p>6. Dinas Kesehatan</p> <p>7. Dinas Kesehatan</p> <p>8. Dinas Kesehatan</p> <p>9. Dinas Kesehatan</p> <p>10. Dinas Kesehatan</p>	

NO	SURSTASI INTI/ KEHATI-HATI PRIORITAS	SASARAN	INDICATOR	TARGET TAHUN 2012	PAGU TAHUN 2012 (Miliar Rp)	INSTANSI PEKERJA
1	Peningkatan keselamatan kecelakaan akibat kesalahan prosedur dalam penanganan limbah B3	Terlaksananya sebagai keadilan dalam penanganan limbah B3 dan prosedur penanganan limbah B3 pada proses penanganan limbah B3	[4] Meningkatkan jumlah insiden keselamatan akibat kesalahan prosedur dalam penanganan limbah B3 Kata kunci: keselamatan kerja, limbah B3, prosedur penanganan limbah B3	[3] 0 insiden	[6] 62,0	Kantor Wilayah
2	Peningkatan keselamatan kecelakaan akibat kesalahan prosedur dalam penanganan limbah B3	Terlaksananya sebagai keadilan dalam penanganan limbah B3 dan prosedur penanganan limbah B3 pada proses penanganan limbah B3	[4] Meningkatkan jumlah insiden keselamatan akibat kesalahan prosedur dalam penanganan limbah B3 Kata kunci: keselamatan kerja, limbah B3, prosedur penanganan limbah B3	[3] 0 insiden	[6] 62,0	Kantor Wilayah
3.	Keselamatan penanganan dan pengangkutan limbah B3	Terlaksananya sebagai keadilan dalam penanganan limbah B3 dan prosedur penanganan limbah B3 pada proses penanganan limbah B3	[4] Meningkatkan jumlah insiden keselamatan akibat kesalahan prosedur dalam penanganan limbah B3 Kata kunci: keselamatan kerja, limbah B3, prosedur penanganan limbah B3	[3] 0 insiden	[6] 62,0	Kantor Wilayah
4.	Peningkatan keselamatan kecelakaan akibat kesalahan prosedur dalam penanganan limbah B3	Terlaksananya sebagai keadilan dalam penanganan limbah B3 dan prosedur penanganan limbah B3 pada proses penanganan limbah B3	[4] Meningkatkan jumlah insiden keselamatan akibat kesalahan prosedur dalam penanganan limbah B3 Kata kunci: keselamatan kerja, limbah B3, prosedur penanganan limbah B3	[3] 0 insiden	[6] 62,0	Kantor Wilayah

3. SISTRUM INDIKSI

Indikator kinerja utama (IKU) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis.

NO	INDICATOR	TARGET TAHUN 2012	PAGU TAHUN 2012 (Miliar Rp)
1	Peningkatan keselamatan kecelakaan akibat kesalahan prosedur dalam penanganan limbah B3	0 insiden	62,0

NO	SURTAHSA INTI/ KEHATI-HATIAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	PAGU TAHUN 2012 (Rp/Bar Rp)	INSTANSI PEKERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Peningkatan KAPASAH dan Penguasaan PTK oleh guru TK, SD, SMP dan SLTA	1. Menjalankan pembinaan, supervisi dan evaluasi yang dapat meningkatkan hasil belajar dan prestasi belajar di lingkungan masing-masing satuan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat luas 2. Meningkatkan profesionalitas dan penguasaan dan penerapan standar kompetensi, kompetensi dasar dan standar isi	1. Mula-mula, melaksanakan pembinaan, supervisi dan evaluasi yang dapat meningkatkan hasil belajar dan prestasi belajar di lingkungan masing-masing satuan pendidikan 2. Meningkatkan profesionalitas dan penguasaan dan penerapan standar kompetensi, kompetensi dasar dan standar isi	5 bar 16 bar 17 bar 5 bar		
3.	Kecerdasan Peningkatan dan Penguasaan standar KEM-2007	1. Menjalankan pembinaan, supervisi dan evaluasi yang dapat meningkatkan hasil belajar dan prestasi belajar di lingkungan masing-masing satuan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat luas 2. Meningkatkan profesionalitas dan penguasaan dan penerapan standar kompetensi, kompetensi dasar dan standar isi	1. Mula-mula, melaksanakan pembinaan, supervisi dan evaluasi yang dapat meningkatkan hasil belajar dan prestasi belajar di lingkungan masing-masing satuan pendidikan 2. Meningkatkan profesionalitas dan penguasaan dan penerapan standar kompetensi, kompetensi dasar dan standar isi	5 bar 16 bar 17 bar 5 bar		
5.	KEWAWASAN BERKEMAMUHAN (KEM)					
1.	Peningkatan KEM-2007 (KEM-2007) dan KEM-2007 (KEM-2007)	1. Menjalankan pembinaan, supervisi dan evaluasi yang dapat meningkatkan hasil belajar dan prestasi belajar di lingkungan masing-masing satuan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat luas 2. Meningkatkan profesionalitas dan penguasaan dan penerapan standar kompetensi, kompetensi dasar dan standar isi	1. Mula-mula, melaksanakan pembinaan, supervisi dan evaluasi yang dapat meningkatkan hasil belajar dan prestasi belajar di lingkungan masing-masing satuan pendidikan 2. Meningkatkan profesionalitas dan penguasaan dan penerapan standar kompetensi, kompetensi dasar dan standar isi	5 bar 16 bar 17 bar 5 bar		
2.	Peningkatan KEM-2007 (KEM-2007) dan KEM-2007 (KEM-2007)	1. Menjalankan pembinaan, supervisi dan evaluasi yang dapat meningkatkan hasil belajar dan prestasi belajar di lingkungan masing-masing satuan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat luas 2. Meningkatkan profesionalitas dan penguasaan dan penerapan standar kompetensi, kompetensi dasar dan standar isi	1. Mula-mula, melaksanakan pembinaan, supervisi dan evaluasi yang dapat meningkatkan hasil belajar dan prestasi belajar di lingkungan masing-masing satuan pendidikan 2. Meningkatkan profesionalitas dan penguasaan dan penerapan standar kompetensi, kompetensi dasar dan standar isi	5 bar 16 bar 17 bar 5 bar		

NO	SISTEMASI INTI/ KEHATI-HATI PRIORITY	SASARAN		INDICATOR	TARGET TAHUN 2012		PAJAL TAHUN 2012 (Miliar Rp)	INSTANSI PEKERJA
		[5]	[6]		[3]	[6]		
3.	Pengembangan Fasilitas Incident Response I	Penyusunan strategi dan sosialisasi dalam rangka penyusunan, sebarngun, revisi dan evaluasi	[5]	Penyusunan dan sosialisasi dalam rangka penyusunan, sebarngun, revisi dan evaluasi	[6]	2	29,1	Keamanan
4.	Pengembangan Fasilitas Incident Response II	Penyusunan strategi dan sosialisasi dalam rangka penyusunan, sebarngun, revisi dan evaluasi	[5]	Penyusunan dan sosialisasi dalam rangka penyusunan, sebarngun, revisi dan evaluasi	[6]	1	2,7	Keamanan
5.	Pengembangan Fasilitas Incident Response III	Penyusunan strategi dan sosialisasi dalam rangka penyusunan, sebarngun, revisi dan evaluasi	[5]	Penyusunan dan sosialisasi dalam rangka penyusunan, sebarngun, revisi dan evaluasi	[6]	1	13,5	Keamanan
6.	Pengembangan Fasilitas KIP, SIP, dan SIP	Penyusunan strategi dan sosialisasi dalam rangka penyusunan, sebarngun, revisi dan evaluasi	[5]	Penyusunan dan sosialisasi dalam rangka penyusunan, sebarngun, revisi dan evaluasi	[6]	1035	4,0	Korbankan
7.	Pengembangan Fasilitas KIP, SIP, dan SIP	Penyusunan strategi dan sosialisasi dalam rangka penyusunan, sebarngun, revisi dan evaluasi	[5]	Penyusunan dan sosialisasi dalam rangka penyusunan, sebarngun, revisi dan evaluasi	[6]	1035	4,4	Korbankan
8.	Pengembangan Fasilitas KIP, SIP, dan SIP	Penyusunan strategi dan sosialisasi dalam rangka penyusunan, sebarngun, revisi dan evaluasi	[5]	Penyusunan dan sosialisasi dalam rangka penyusunan, sebarngun, revisi dan evaluasi	[6]	1035	148,4	Korbankan
9.	Pengembangan Fasilitas KIP, SIP, dan SIP	Penyusunan strategi dan sosialisasi dalam rangka penyusunan, sebarngun, revisi dan evaluasi	[5]	Penyusunan dan sosialisasi dalam rangka penyusunan, sebarngun, revisi dan evaluasi	[6]	1035	0,7	Korbankan

IL-78

NO	SISTEMASI INTI/ KEHATI-HATIAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	PAJAL TAHUN 2012 (Miliar Rp)	INSTANSI PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Tingkat Kabupaten	Zona pelayanan dipadatkan dan pelayanan kesehatan terjangkau di seluruh kabupaten	Kualitas pelayanan kesehatan di tingkat Kabupaten	32 RSUD Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD	2,52	Dinas Kesehatan
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Tingkat Kabupaten	Zona pelayanan dipadatkan dan pelayanan kesehatan terjangkau di seluruh kabupaten	Mutu pelayanan kesehatan di tingkat Kabupaten	Mutu 100% Mutu 100%	100,0	Dinas Kesehatan

MATRIKS RKP TAHUN 2013

PRIORITY	PROGRAM AKSI BI HIDANG ENERGI
Tema/Prioritas	Penyediaan layanan energi listrik yang terjangkau, pemberdayaan masyarakat, ketahanan energi, peningkatan energi serta konservasi energi
Pembahasan/ASAS	Mengembangkan energi listrik yang terjangkau
Intermediasi/DAKSA	Ministry of Energy, Energy Business Regulation Board, Policy Planning Board, State Secretariat of Energy, Ministry of Finance

No.	SUBSTANSI INTI/ RINCIAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET/ADUAN 2013	PAGE TARGET 2013 (Rp. Milyar)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a.	KERJAKRAN Dewantara, dan lain-lain yang berkaitan dengan energi listrik dan sistem tenaga listrik. Yayasan dan lain-lain yang berkaitan dengan energi listrik. Kebudayaan - KESDM	(3) Meningkatkan energi listrik yang terjangkau, pemberdayaan masyarakat, ketahanan energi, peningkatan energi serta konservasi energi. Kebudayaan - KESDM Yayasan dan lain-lain yang berkaitan dengan energi listrik. Kebudayaan - KESDM	(4) Jumlah pelayanan masyarakat.	35	4,8	KESDM
b.	Peningkatan efisiensi dan pengoptimalan energi listrik dan lain-lain. Sektor: Ritel dan lain-lain. Tas. dan lain-lain. Peningkatan Efisiensi dan Pengoptimalan Energi Listrik dan lain-lain. Sektor: Ritel dan lain-lain. Tas. dan lain-lain. Peningkatan Efisiensi dan Pengoptimalan Energi Listrik dan lain-lain. Sektor: Ritel dan lain-lain. Tas. dan lain-lain.	Peningkatan efisiensi dan pengoptimalan energi listrik dan lain-lain. Sektor: Ritel dan lain-lain. Tas. dan lain-lain. Peningkatan Efisiensi dan Pengoptimalan Energi Listrik dan lain-lain. Sektor: Ritel dan lain-lain. Tas. dan lain-lain.	Jumlah pasokan gas untuk industri. Jumlah pasokan gas untuk industri.	70,6	4,8	KESDM
c.	Biaya dan Pengembangan Teknologi Energi dan lain-lain. Kebudayaan - KESDM	Biaya dan pengembangan energi listrik dan lain-lain. Kebudayaan - KESDM	Biaya dan pengembangan energi listrik dan lain-lain. Kebudayaan - KESDM	480 SP	5,1	DPN
d.	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Energi dan lain-lain. Kebudayaan - KESDM	Penelitian dan pengembangan energi listrik dan lain-lain. Kebudayaan - KESDM	Penelitian dan pengembangan energi listrik dan lain-lain. Kebudayaan - KESDM	2 Dasi, dan 15 Lelu.	35,0	KESDM
e.	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Energi dan lain-lain. Kebudayaan - KESDM	Penelitian dan pengembangan energi listrik dan lain-lain. Kebudayaan - KESDM	Penelitian dan pengembangan energi listrik dan lain-lain. Kebudayaan - KESDM	40	20,0	KESDM

No.	SUDUTANSA BINTI/ KURIGINTA/ PRIORITAS	MASYARAKAT	UMMAHATUK	TARBIH/PAJODIN 2013	PAGU/TAJODIN 2013 (Rp. 000.000)	INSTANSI PELAKSANA
1.	Pengalokasian dan Alokasi Sumber Daya Geologi	Mendukung upaya pemertanian wilayah Lampung dan Sumatra Barat	Jumlah mandor di setiap desa per tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015.	42 Mandor dan 77.998 Laka	2013	KESDM
2.	Suksesnya Pelaksanaan Geologi	Mendukung pemertanian wilayah Lampung dan Sumatra Barat	Mendukung pemertanian wilayah Lampung dan Sumatra Barat	750 Mandor	2013	KESDM
3.	Suksesnya Pelaksanaan Geologi	Mendukung pemertanian wilayah Lampung dan Sumatra Barat	Mendukung pemertanian wilayah Lampung dan Sumatra Barat	45 Mandor dan 210 Laka	2013	KESDM
KAPRIKAS KURIGINTA						
1.	Pengalokasian dan Alokasi Sumber Daya Geologi	Mendukung upaya pemertanian wilayah Lampung dan Sumatra Barat	Jumlah mandor di setiap desa per tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015.	1	1.000	KESDM
2.	Suksesnya Pelaksanaan Geologi	Mendukung pemertanian wilayah Lampung dan Sumatra Barat	Mendukung pemertanian wilayah Lampung dan Sumatra Barat	40 Mandor dan 210 Laka	1.000	KESDM
3.	Suksesnya Pelaksanaan Geologi	Mendukung pemertanian wilayah Lampung dan Sumatra Barat	Mendukung pemertanian wilayah Lampung dan Sumatra Barat	20 Mandor dan 105 Laka	1.000	KESDM

No.	SUDUTANSA BINTI/ KEGIATAN PRIORITY	MANSIRAN	UMMAKATUR	TARIF/PAJAK 2013	PAGU TAJUK 2013 (Rp. 000,000)	INSTANSI PELAKSANA
1.	<p>1. dan/2. Masalah ekonomi Takris Di Jab Seligi</p> <p>3. Peningkatan kedisiplinan dan Peningkatan Perilaku Pelanggaran Kelakuan Masyarakat</p>	<p>Meningkatkan jumlah usaha, efisiensi dan keberlanjutan bagi nelayan sebagai alternatif</p> <p>Peningkatan kedisiplinan dan Peningkatan Perilaku Pelanggaran Kelakuan Masyarakat</p>	<p>Jumlah pelaksanaan survey dan di wilayah laut</p> <p>Jumlah kegiatan, sosialisasi, pelatihan dan perawatan nelayan sebagai alternatif</p> <p>Jumlah dana kegiatan selagi dan selagi sebagai alternatif</p>	<p>11</p> <p>40 kegiatan, sosialisasi dan pelatihan sebagai alternatif</p> <p>426</p> <p>1.012.10</p>	<p>28</p> <p>1.822,5</p> <p>3.310,5</p>	<p>KESDM</p> <p>KESDM</p>
2.			<p>Transmisi, (air)</p> <p>Ged. Loka 25784</p> <p>Jabatan Managemen (evs)</p> <p>Loka Laut-Luar (MVS)</p> <p>Ruang belajar untuk pelatihan (pelatihan)</p> <p>Jumlah kegiatan, sosialisasi, pelatihan dan perawatan nelayan sebagai alternatif</p>	<p>4580</p> <p>9334,76</p> <p>216,86</p> <p>16,814</p> <p>1</p>	<p>1.071,9</p> <p>2.230,2</p> <p>464,9</p> <p>200,9</p> <p>0,6</p>	<p>KESDM</p> <p>KESDM</p> <p>KESDM</p> <p>KESDM</p>
3.	<p>Pembinaan dan Pengembangan Rantau</p>	<p>Kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan, khususnya perikanan</p>	<p>Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pelatihan perikanan</p>	<p>15</p>	<p>1,7</p>	<p>KESDM</p>
4.	<p>Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Visk dan Gas Bumi</p> <p>KEBERKUALIFIKASIAN</p>	<p>Peningkatan dan pengembangan teknologi visk dan gas bumi</p>	<p>Jumlah kegiatan, sosialisasi, pelatihan dan perawatan nelayan sebagai alternatif</p>	<p>43</p>	<p>2,521</p>	<p>KESDM</p>

L-L- 63

No.	SUDUTASAS BINTI/ KURANGNYA PRIORITAS	SASARAN	UMMAKATUR	TARIF/PERDUA 2013	PAGU TAJUK 2013 (Rp. 000.000)	INSTANSI PELAKSANA
a.	Peningkatan Pergerakan dan Pergerakan Wisatawan	Keterampilan pengabdian, pengabdian, pengabdian dan pengabdian	Dapat meningkatkan pengabdian dan pengabdian	25	35.1	RESDM / DTK
E.	Peningkatan Pergerakan dan Pergerakan Wisatawan	Keterampilan pengabdian, pengabdian, pengabdian dan pengabdian	Keterampilan pengabdian, pengabdian, pengabdian dan pengabdian	35	35.1	KESKUB / UAL
2.	Peningkatan Pergerakan dan Pergerakan Wisatawan	Keterampilan pengabdian, pengabdian, pengabdian dan pengabdian	Keterampilan pengabdian, pengabdian, pengabdian dan pengabdian	2	000	RESDM
				1	87.8	
3.	Peningkatan Pergerakan dan Pergerakan Wisatawan	Keterampilan pengabdian, pengabdian, pengabdian dan pengabdian	Keterampilan pengabdian, pengabdian, pengabdian dan pengabdian	1		
4.	Peningkatan Pergerakan dan Pergerakan Wisatawan	Keterampilan pengabdian, pengabdian, pengabdian dan pengabdian	Keterampilan pengabdian, pengabdian, pengabdian dan pengabdian	3	11.2	DITAN
5.	Peningkatan Pergerakan dan Pergerakan Wisatawan	Keterampilan pengabdian, pengabdian, pengabdian dan pengabdian	Keterampilan pengabdian, pengabdian, pengabdian dan pengabdian	3	20.0	DITAN
6.	Peningkatan Pergerakan dan Pergerakan Wisatawan	Keterampilan pengabdian, pengabdian, pengabdian dan pengabdian	Keterampilan pengabdian, pengabdian, pengabdian dan pengabdian	02.4	11	Kementerian Perikanan
7.	Peningkatan Pergerakan dan Pergerakan Wisatawan	Keterampilan pengabdian, pengabdian, pengabdian dan pengabdian	Keterampilan pengabdian, pengabdian, pengabdian dan pengabdian	05.4	11	
8.	Peningkatan Pergerakan dan Pergerakan Wisatawan	Keterampilan pengabdian, pengabdian, pengabdian dan pengabdian	Keterampilan pengabdian, pengabdian, pengabdian dan pengabdian	02.4	10.1	
9.	Peningkatan Pergerakan dan Pergerakan Wisatawan	Keterampilan pengabdian, pengabdian, pengabdian dan pengabdian	Keterampilan pengabdian, pengabdian, pengabdian dan pengabdian	2	10.1 dan 10.13	Kementerian

No.	SUDUTANSA BINTI/ KURANTYA PRIORITAS	SASARAN	UMMAKATUR	TARIF/PAJAK 2013 (Rp. 000.000)	INSTANSI PELAKSANA
a.	<p>KONVERSI MENUJU PENGADAMAN GAS Kebijakan untuk konversi rumah-rumah ke gas adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas. 2. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Sasaran: 1. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas. 2. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>1. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas. 2. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>1. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas. 2. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>KESDM</p>
b.	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>1. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>KESDM</p>
c.	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>1. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>KESDM</p>
d.	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>1. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>KESDM</p>
e.	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>1. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>KESDM</p>
f.	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>1. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>KESDM</p>
g.	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>1. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>KESDM</p>
h.	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>1. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>KESDM</p>
i.	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>1. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>KESDM</p>
j.	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>1. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>KESDM</p>
k.	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>1. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>KESDM</p>
l.	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>1. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>KESDM</p>
m.	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>1. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>KESDM</p>
n.	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>1. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>KESDM</p>
o.	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>1. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>KESDM</p>
p.	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>1. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>KESDM</p>
q.	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>1. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan gas.</p>	<p>KESDM</p>

No.	SUDUTANSA BINTI/ KURANTYA PRIORITAS	SASARAN	UMMAKATUR	TARGET/REKORD 2013	PAGU TAJUK 2013 (Rp. 000.000)	INSTANSI PELAKSANA
			Koridor	1	1,5	
a	Peningkatan Pemeliharaan, Pengawasan, Kebersihan, dan Pengoperasian Gas Rumah Kaca (GRK) di Kota Pekanbaru	Peningkatan aspek kesehatan masyarakat dengan upaya pengendalian GRK	<p>Jumlah kegiatan pemeliharaan dan pemeliharaan GRK (PMP)</p> <p>Jumlah rehabilitasi GRK</p> <p>Jumlah pemeliharaan GRK</p> <p>Jumlah pengoperasian GRK</p> <p>Jumlah pengoperasian GRK</p> <p>Jumlah kegiatan pemeliharaan GRK</p>	1	300	KESKUM
b	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru	Meningkatkan dan pemeliharaan infrastruktur jalan	<p>Jumlah kegiatan pemeliharaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan</p> <p>Jumlah kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan</p> <p>Jumlah kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan</p> <p>Jumlah kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan</p> <p>Jumlah kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan</p> <p>Jumlah kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan</p>	1	2500	Koridor

MATRIKS BUKU RKP TAHUN 2013

PRIORITAS	PROGRAM AKSI DAN UUD/AM/KEK/UY/AN/IB/BUP/ DAN PERUBAHAN BUCYWA Alokasi untuk pemeliharaan lingkungan hidup masyarakat di Kota Medan. Untuk itu akan mengeluarkan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan. Untuk memasukan program ini ke dalam RPD dan RTRW.
Temas Prioritas	
Peningkatan/Aspek	
Ukuran/luasannya	

NO	SURTAHSI/TI/KEGATAK/RIORITAS	ISSU/ASPEK	INDIKTOR	TARGET TAHUN 2013	PANG. TAMB. 2013 (MILLAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PERUBAHAN IKLIM	Perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas industri di Medan. Untuk itu akan mengeluarkan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan.	Perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas industri di Medan. Untuk itu akan mengeluarkan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan.	100.000 Ha	300	Kecamatan
1.1	Perencanaan, Pengendalian, dan Pemertanian DAS	Perencanaan, Pengendalian, dan Pemertanian DAS. Untuk itu akan mengeluarkan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan.	Perencanaan, Pengendalian, dan Pemertanian DAS. Untuk itu akan mengeluarkan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan.	2.000 Ha		
1.2	Perencanaan, Pengendalian, dan Pemertanian DAS	Perencanaan, Pengendalian, dan Pemertanian DAS. Untuk itu akan mengeluarkan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan.	Perencanaan, Pengendalian, dan Pemertanian DAS. Untuk itu akan mengeluarkan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan.	2.000 Ha	100.000	PUL

NO	STRATEGIS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKTUR	TARGET TAHUN 2013	PAGE TAHUN 2013 (MILAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
1.1	Pembinaan program kegiatan DAS	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2	Pembinaan program kegiatan DAS	Tercapainya program kegiatan DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	Mendukung upaya peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	11 DAS	154	Kecamatan
1.3	Pembinaan program kegiatan DAS	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	11 DAS 36 RPDA 500.000 Ha	210	Kecamatan
1.4	Pembinaan program kegiatan DAS	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	100 RPK 15 juta 5 RPK 30.000 Ha 0,0000	2.500,0	Kecamatan
1.5	Pembinaan program kegiatan DAS	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	500.000 Ha	500.000 Ha	Kecamatan
1.6	Pembinaan program kegiatan DAS	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	500.000 Ha	500.000 Ha	Kecamatan
1.7	Pembinaan program kegiatan DAS	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	500.000 Ha	500.000 Ha	Kecamatan
1.8	Pembinaan program kegiatan DAS	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	500.000 Ha	500.000 Ha	Kecamatan
1.9	Pembinaan program kegiatan DAS	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	500.000 Ha	500.000 Ha	Kecamatan
1.10	Pembinaan program kegiatan DAS	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	500.000 Ha	500.000 Ha	Kecamatan
1.11	Pembinaan program kegiatan DAS	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	500.000 Ha	500.000 Ha	Kecamatan
1.12	Pembinaan program kegiatan DAS	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	500.000 Ha	500.000 Ha	Kecamatan
1.13	Pembinaan program kegiatan DAS	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	500.000 Ha	500.000 Ha	Kecamatan
1.14	Pembinaan program kegiatan DAS	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	500.000 Ha	500.000 Ha	Kecamatan
1.15	Pembinaan program kegiatan DAS	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	500.000 Ha	500.000 Ha	Kecamatan
1.16	Pembinaan program kegiatan DAS	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	500.000 Ha	500.000 Ha	Kecamatan
1.17	Pembinaan program kegiatan DAS	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	500.000 Ha	500.000 Ha	Kecamatan
1.18	Pembinaan program kegiatan DAS	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	500.000 Ha	500.000 Ha	Kecamatan
1.19	Pembinaan program kegiatan DAS	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	500.000 Ha	500.000 Ha	Kecamatan
1.20	Pembinaan program kegiatan DAS	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	Mendukung kegiatan peningkatan kualitas DAS secara menyeluruh pada 160 provinsi	500.000 Ha	500.000 Ha	Kecamatan

KU	STRATEGIS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKTUR	TARGET TAHUN 2013	PAGE TAHUN 2013 (MILAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Perumahan Kersudam Hijau Mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan yang terjangkau dan layak huni Mendukung pemerataan dan diversifikasi ekonomi rakyat	Dalam ranah perencanaan/pengembangan, yaitu dalam rencana Jangka Panjang Dokumen Kebijakan, Kebijakan, Rencana Pengembangan, Rencana Hijau dan LH	5	4,02	KEMKOT
1.2	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Perumahan Kersudam Hijau Mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan yang terjangkau dan layak huni Mendukung pemerataan dan diversifikasi ekonomi rakyat	Dalam ranah perencanaan/pengembangan, yaitu dalam rencana Jangka Panjang Dokumen Kebijakan, Kebijakan, Rencana Pengembangan, Rencana Hijau dan LH	5	30,00	KEMKOT
1.1	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Perumahan Kersudam Hijau Mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan yang terjangkau dan layak huni Mendukung pemerataan dan diversifikasi ekonomi rakyat	Dalam ranah perencanaan/pengembangan, yaitu dalam rencana Jangka Panjang Dokumen Kebijakan, Kebijakan, Rencana Pengembangan, Rencana Hijau dan LH	5	4,02	KEMKOT
1.2	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Perumahan Kersudam Hijau Mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan yang terjangkau dan layak huni Mendukung pemerataan dan diversifikasi ekonomi rakyat	Dalam ranah perencanaan/pengembangan, yaitu dalam rencana Jangka Panjang Dokumen Kebijakan, Kebijakan, Rencana Pengembangan, Rencana Hijau dan LH	5	30,00	KEMKOT
1.3	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Perumahan Kersudam Hijau Mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan yang terjangkau dan layak huni Mendukung pemerataan dan diversifikasi ekonomi rakyat	Dalam ranah perencanaan/pengembangan, yaitu dalam rencana Jangka Panjang Dokumen Kebijakan, Kebijakan, Rencana Pengembangan, Rencana Hijau dan LH	5	4,02	KEMKOT
1.4	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Perumahan Kersudam Hijau Mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan yang terjangkau dan layak huni Mendukung pemerataan dan diversifikasi ekonomi rakyat	Dalam ranah perencanaan/pengembangan, yaitu dalam rencana Jangka Panjang Dokumen Kebijakan, Kebijakan, Rencana Pengembangan, Rencana Hijau dan LH	5	30,00	KEMKOT

NO	STRATEGIS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKTIF	TARGET TAHUN 2013	PAGE TAHUN 2013 DOLLAR RUPIAH	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T.5	Perbaikan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Tersedianya sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan dapat diakses secara real time	Melakukan uji coba sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan dapat diakses secara real time	3 Desember	100	KLI
T.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya data pelayanan publik yang akurat dan dapat diakses secara real time	Melakukan uji coba sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan dapat diakses secara real time	7 Desember	100	KLI
T.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya data pelayanan publik yang akurat dan dapat diakses secara real time	Melakukan uji coba sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan dapat diakses secara real time	10 Desember	100	KLI
T.8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya data pelayanan publik yang akurat dan dapat diakses secara real time	Melakukan uji coba sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan dapat diakses secara real time	10 Desember	100	KLI
T.9	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya data pelayanan publik yang akurat dan dapat diakses secara real time	Melakukan uji coba sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan dapat diakses secara real time	10 Desember	100	KLI
T.10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya data pelayanan publik yang akurat dan dapat diakses secara real time	Melakukan uji coba sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan dapat diakses secara real time	10 Desember	100	KLI

NO	STRATEGIS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKTIF	TARGET TAHUN 2013	PACU TAHUN 2013 (DILAKSANA RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1.1	Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan Penalaran Matematis	Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan penalaran matematis siswa dalam memecahkan masalah sehari-hari	Mendali perumputan belajar sebagai proses pembelajaran	125 unit	100	KLP
2.1.2	Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis	Meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa dalam menyampaikan informasi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah	Mendali penguasaan kompetensi literasi matematika dan kemampuan komunikasi matematis	2 dokumen 30 proses/kegiatan/tema	60	KLP
2.1.3	Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis	Meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa dalam menganalisis dan membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematis	Mendali penguasaan kompetensi literasi matematika dan kemampuan komunikasi matematis	43 pertemuan 43 pertemuan 33 pertemuan 66 pertemuan	21 x 8	KLP
2.1.4	Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis	Meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa dalam menganalisis dan membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematis	Mendali penguasaan kompetensi literasi matematika dan kemampuan komunikasi matematis	2	55	KLP
2.1.5	Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis	Meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa dalam menganalisis dan membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematis	Mendali penguasaan kompetensi literasi matematika dan kemampuan komunikasi matematis	1	1	KLP
2.1.6	Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis	Meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa dalam menganalisis dan membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematis	Mendali penguasaan kompetensi literasi matematika dan kemampuan komunikasi matematis	1	1	KLP
2.1.7	Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis	Meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa dalam menganalisis dan membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematis	Mendali penguasaan kompetensi literasi matematika dan kemampuan komunikasi matematis	100%	100%	KLP

NO	STRATEGIS/INSTRUKSI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKTIF	TARGET TAHUN 2013	PAGE TAHUN 2013 (DILAKUKAN RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Peningkatan kesadaran hukum masyarakat di tingkat kecamatan sebesar 75% per tahun. Berkembangnya publikasi literasi kawasan hukum secara nasional sebesar 75% per tahun. Tingkat partisipasi kawasan hukum nasional pada kegiatan peradilan sebesar 80% per tahun.	75% 75% 80%		
115	Perencanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi EPR dan Pengembangan Sistem Informasi EPR lainnya (KPIE)	Terwujudnya kegiatan sistem informasi EPR dan pengembangan sistem informasi EPR lainnya	Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan Keputusan Menteri Hukum dan Peradilan (KEMHUKAM) tentang Pengembangan Sistem Informasi EPR dan Pengembangan Sistem Informasi EPR lainnya (KPIE)	23 P. per tahun 23.000 unit	23.000	Kemendagri
116	Kelembagaan Organisasi Masyarakat dan Organisasi Persewaan Rumah Suku	Terwujudnya organisasi masyarakat dan organisasi persewaan rumah suku	Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan Keputusan Menteri Hukum dan Peradilan (KEMHUKAM) tentang Pengembangan Sistem Informasi EPR dan Pengembangan Sistem Informasi EPR lainnya (KPIE)	11.140 70%	11.140 70%	Kemendagri
117	Kelembagaan Organisasi Masyarakat dan Organisasi Persewaan Rumah Suku	Terwujudnya organisasi masyarakat dan organisasi persewaan rumah suku	Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan Keputusan Menteri Hukum dan Peradilan (KEMHUKAM) tentang Pengembangan Sistem Informasi EPR dan Pengembangan Sistem Informasi EPR lainnya (KPIE)	13.000 unit	13.000	Kemendagri
118	Kelembagaan Organisasi Masyarakat dan Organisasi Persewaan Rumah Suku	Terwujudnya organisasi masyarakat dan organisasi persewaan rumah suku	Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan Keputusan Menteri Hukum dan Peradilan (KEMHUKAM) tentang Pengembangan Sistem Informasi EPR dan Pengembangan Sistem Informasi EPR lainnya (KPIE)	17.300 unit 30 unit 292.204 93,4%	17.300 unit 30 unit 292.204 93,4%	Kemendagri
119	Kelembagaan Organisasi Masyarakat dan Organisasi Persewaan Rumah Suku	Terwujudnya organisasi masyarakat dan organisasi persewaan rumah suku	Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan Keputusan Menteri Hukum dan Peradilan (KEMHUKAM) tentang Pengembangan Sistem Informasi EPR dan Pengembangan Sistem Informasi EPR lainnya (KPIE)	8 (04005)	8 (04005)	Kemendagri
120	Kelembagaan Organisasi Masyarakat dan Organisasi Persewaan Rumah Suku	Terwujudnya organisasi masyarakat dan organisasi persewaan rumah suku	Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan Keputusan Menteri Hukum dan Peradilan (KEMHUKAM) tentang Pengembangan Sistem Informasi EPR dan Pengembangan Sistem Informasi EPR lainnya (KPIE)	93,4%	93,4%	Kemendagri

NO	STRATEGIS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKTIF	TARGET TAHUN 2013	PAGE TAHUN 2013 DOLLAR RUPIAH	INSTANSI PELAKSANA
1.1	Nasional	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.1	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	40%	11,50	Kementerian Kesehatan
1.1.2	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	30%	1,7	Kementerian Kesehatan
1.1.3	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	100%	5,00	Kementerian Kesehatan
1.1.4	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	100%	100	Kementerian Kesehatan
1.1.5	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	100%	100	Kementerian Kesehatan
1.1.6	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	100%	100	Kementerian Kesehatan
1.1.7	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	100%	100	Kementerian Kesehatan
1.1.8	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	100%	100	Kementerian Kesehatan
1.1.9	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	100%	100	Kementerian Kesehatan
1.1.10	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	100%	100	Kementerian Kesehatan
1.1.11	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	100%	100	Kementerian Kesehatan
1.1.12	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan	100%	100	Kementerian Kesehatan

NO	STRATEGIS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKTUR	TARGET TAHUN 2013	PAGE TAHUN 2013 (MILAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
1.2.3	Perbaikan Operasional Pelaksanaan dan Pelaksanaan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang Baik Operasional dan Pelaksanaan, serta meningkatkan kepuasan pengguna layanan yang menggunakan layanan	EMEG E-Pelayanan melalui E-misi Penerapan E-pid Fair dan E-pid Fair Operasional dan Pelaksanaan Berkas W.1.2.3.1	80%	36,5	Kemendagri
1.2.4	Kelembagaan Operasional dan Pelaksanaan	Meningkatkan Kelembagaan dan Pelaksanaan yang Baik dan Efektif	Penerapan E-pid Fair dan E-pid Fair Operasional dan Pelaksanaan Berkas W.1.2.4.1	80%	36,5	Kemendagri
1.2.5	Kelembagaan Operasional dan Pelaksanaan	Meningkatkan Kelembagaan dan Pelaksanaan yang Baik dan Efektif	Penerapan E-pid Fair dan E-pid Fair Operasional dan Pelaksanaan Berkas W.1.2.5.1	80%	36,5	Kemendagri
1.2.6	Kelembagaan Operasional dan Pelaksanaan	Meningkatkan Kelembagaan dan Pelaksanaan yang Baik dan Efektif	Penerapan E-pid Fair dan E-pid Fair Operasional dan Pelaksanaan Berkas W.1.2.6.1	80%	36,5	Kemendagri
1.2.7	Kelembagaan Operasional dan Pelaksanaan	Meningkatkan Kelembagaan dan Pelaksanaan yang Baik dan Efektif	Penerapan E-pid Fair dan E-pid Fair Operasional dan Pelaksanaan Berkas W.1.2.7.1	80%	36,5	Kemendagri
1.2.8	Kelembagaan Operasional dan Pelaksanaan	Meningkatkan Kelembagaan dan Pelaksanaan yang Baik dan Efektif	Penerapan E-pid Fair dan E-pid Fair Operasional dan Pelaksanaan Berkas W.1.2.8.1	80%	36,5	Kemendagri
1.2.9	Kelembagaan Operasional dan Pelaksanaan	Meningkatkan Kelembagaan dan Pelaksanaan yang Baik dan Efektif	Penerapan E-pid Fair dan E-pid Fair Operasional dan Pelaksanaan Berkas W.1.2.9.1	80%	36,5	Kemendagri
1.2.10	Kelembagaan Operasional dan Pelaksanaan	Meningkatkan Kelembagaan dan Pelaksanaan yang Baik dan Efektif	Penerapan E-pid Fair dan E-pid Fair Operasional dan Pelaksanaan Berkas W.1.2.10.1	80%	36,5	Kemendagri
1.2.11	Kelembagaan Operasional dan Pelaksanaan	Meningkatkan Kelembagaan dan Pelaksanaan yang Baik dan Efektif	Penerapan E-pid Fair dan E-pid Fair Operasional dan Pelaksanaan Berkas W.1.2.11.1	80%	36,5	Kemendagri
1.2.12	Kelembagaan Operasional dan Pelaksanaan	Meningkatkan Kelembagaan dan Pelaksanaan yang Baik dan Efektif	Penerapan E-pid Fair dan E-pid Fair Operasional dan Pelaksanaan Berkas W.1.2.12.1	80%	36,5	Kemendagri
1.2.13	Kelembagaan Operasional dan Pelaksanaan	Meningkatkan Kelembagaan dan Pelaksanaan yang Baik dan Efektif	Penerapan E-pid Fair dan E-pid Fair Operasional dan Pelaksanaan Berkas W.1.2.13.1	80%	36,5	Kemendagri

KU	STRATEGIS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKTIF	TARGET TAHUN 2013	PAGE TAHUN 2013 (Miliar Rupiah)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.3	Perbaikan Rotor Angkutan dan Rotor Angkutan EMISG	Sejumlah 5 unit rotor pengganti dan 5 unit rotor pengganti dan 5 unit rotor pengganti.	5 rotor pengganti dan 5 unit rotor pengganti.	50%	20%	EMISG
11.4	Angkutan "Pembayaran" dan "Kendaraan Khas" di Bandara	Sejumlah 5 unit rotor pengganti dan 5 unit rotor pengganti.	5 rotor pengganti dan 5 unit rotor pengganti.	50%	20%	EMISG
11.5	Perbaikan "Batas Gelombang" dan "Moli" di Bandara	Sejumlah 5 unit rotor pengganti dan 5 unit rotor pengganti.	5 rotor pengganti dan 5 unit rotor pengganti.	50%	20%	EMISG
11.6	Perbaikan "Batas Gelombang" dan "Moli" di Bandara	Sejumlah 5 unit rotor pengganti dan 5 unit rotor pengganti.	5 rotor pengganti dan 5 unit rotor pengganti.	50%	20%	EMISG
11.7	Perbaikan "Batas Gelombang" dan "Moli" di Bandara	Sejumlah 5 unit rotor pengganti dan 5 unit rotor pengganti.	5 rotor pengganti dan 5 unit rotor pengganti.	50%	20%	EMISG

NO	STRATEGIS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKTIF	TARGET TAHUN 2013	PAGE TAHUN 2013 (DILAKSANAKAN)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0.2	<p>1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p>	<p>1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p>	<p>1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p>	<p>35 kegiatan</p> <p>3 kegiatan</p> <p>3</p>	<p>17.6</p> <p>2.9</p> <p>31.5</p>	<p>17.6</p> <p>2.9</p> <p>31.5</p>
0.3	<p>1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p>	<p>1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p>	<p>1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p>	<p>50</p> <p>7 SDLP, 2 WPP</p>	<p>17.6</p> <p>2.9</p>	<p>17.6</p> <p>2.9</p>
0.4	<p>1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p>	<p>1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p>	<p>1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p>	<p>15 NLP/25 kegiatan</p>	<p>12.0</p>	<p>12.0</p>
0.5	<p>1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p>	<p>1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p>	<p>1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p>	<p>33 kegiatan, 6 KPI</p>	<p>2.9</p>	<p>2.9</p>
0.6	<p>1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p>	<p>1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p>	<p>1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum</p>	<p>1</p>	<p>3.9</p>	<p>3.9</p>

KID	STRATEGIS/TYI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKTOR	TARGET TAHUN 2013	PAGE TAHUN 2013 DOLLAR KUPILAUJ	INSTANSI PELAKSANA
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	dan "Mencapai Total Quality Management Total" dan "Mencapai Grand Slam Dengan Good Practice"		Umudhi pramudhi dan kadya pramudhi untuk pelaksanaan program, melalui data dan informasi atau sumber daya dan sarana prasarana yang selengkap		3,0	
02	Menjadi pun terintegrasi dan logistik dikawasan rawan bencana di seluruh wilayah	Terdapatnya informasi mengenai lokasi yang dilalui secara nasional dan propinsi di setiap kabupaten/kota dan kecamatan serta lokasi lokasi yang terdapat di wilayah rawan bencana	Umudhi Prasarana Logistik Logistik, Luas area, sumber bencana	2000	7,0	KABUPATEN KARAWANG
03	Menjadi pun terintegrasi dan logistik dikawasan rawan bencana di seluruh wilayah	"Mendukung dan meningkatkan kerjasama" untuk daerah bencana	Umudhi Logistik dan	11. Provisi/ 2000 Kadya etc.	800	DISP
04	Menjadi pun terintegrasi dan logistik dikawasan rawan bencana di seluruh wilayah	"Mendukung dan meningkatkan kerjasama" untuk daerah bencana	Umudhi Logistik dan	11. Provisi/ 2000 Kadya etc.	2000	DISP
05	Menjadi pun terintegrasi dan logistik dikawasan rawan bencana di seluruh wilayah	"Mendukung dan meningkatkan kerjasama" untuk daerah bencana	Umudhi Logistik dan	11. Provisi/ 100 Kadya etc.	610	DISP
06	Menjadi pun terintegrasi dan logistik dikawasan rawan bencana di seluruh wilayah	"Mendukung dan meningkatkan kerjasama" untuk daerah bencana	Umudhi Logistik dan	11. Provisi/ 100 Kadya etc.	750	DISP

NO	STRATEGIS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAGE TAHUN 2013 (MILAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
1	1	<p>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kesehatan</p>	<p>1. Jumlah Layanan Pelaksana Tingkat Dasar 2. Jumlah Layanan Manas</p>	15	15	17

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2013

PRIORITY 10	DARI ALL TERTINGGAL, TERDIDAM, TERLUAR, DAN DASCA-KOAKLIK
<p>Trima Prioritas</p> <p>Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian dan perikanan, peternakan, kehutanan serta kehutanan, perikanan, esokulturnya, esokulturnya dan esokulturnya lainnya</p> <p>Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian dan perikanan, peternakan, kehutanan, perikanan, esokulturnya, esokulturnya dan esokulturnya lainnya</p> <p>Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian dan perikanan, peternakan, kehutanan, perikanan, esokulturnya, esokulturnya dan esokulturnya lainnya</p>	<p>Pengembangan dan pelaksanaan pembangunan pertanian dan perikanan, peternakan, kehutanan serta kehutanan, perikanan, esokulturnya, esokulturnya dan esokulturnya lainnya</p> <p>Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian dan perikanan, peternakan, kehutanan, perikanan, esokulturnya, esokulturnya dan esokulturnya lainnya</p> <p>Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian dan perikanan, peternakan, kehutanan, perikanan, esokulturnya, esokulturnya dan esokulturnya lainnya</p>

NO	SUBSTANSI INTI/ KIRIATANYA PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PACU TAHUN 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PEMERINTAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
LESDI STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL						
PROGRAM PEBERKATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL						
L1	Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan pertanian dan perikanan, peternakan, kehutanan, perikanan, esokulturnya, esokulturnya dan esokulturnya lainnya	Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan pertanian dan perikanan, peternakan, kehutanan, perikanan, esokulturnya, esokulturnya dan esokulturnya lainnya	1. Jumlah Kabupaten (K) Daerah Tertinggal yang telah melaksanakan Jumlah dan Nilai Investasi 2. Jumlah (K) Daerah Tertinggal yang mendapat bantuan stimulus dalam peningkatan investasi 3. Jumlah Kabupaten (K) Daerah Tertinggal yang telah melaksanakan program peningkatan investasi	50 2005 2	6,26 3,50 0,34	KPDT
L2	Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan pertanian dan perikanan, peternakan, kehutanan, perikanan, esokulturnya, esokulturnya dan esokulturnya lainnya	Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan pertanian dan perikanan, peternakan, kehutanan, perikanan, esokulturnya, esokulturnya dan esokulturnya lainnya	1. Jumlah Kabupaten (K) Daerah Tertinggal yang telah melaksanakan program peningkatan investasi 2. Jumlah Kabupaten (K) Daerah Tertinggal yang telah melaksanakan program peningkatan investasi	4 46	10,00 166,00	KPDT

IL-100

NO	SUBSTANSI/KEJADATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PACU TANTU 2013 (MILLIAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(4)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	Perencanaan, Pelaksanaan, Koordinasi dan Realisasi Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan di Daerah Tingkat II	Meningkatkan kemampuan dan daya tertinggal dalam pengembangan desa korpodu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersentosa sebagai wilayah yang memiliki tingkat pengangguran desa terpulu 2. Aksesibilitas, aksesibilitas, aksesibilitas yang mendukung kelangkaan hasil ekonomi terhadap pengembangan kawasan pedesaan 3. Tingkat pelaksanaan koordinasi ditidang pendanaan dan pengembangan kawasan pedesaan terpulu 4. Tingkat kemampuan tertinggal yang mendapat perhatian dalam rangka pencapaian pembangunan kawasan pedesaan terpulu 	80%	4,00	KEDPT
14	Perencanaan, Pelaksanaan, Koordinasi dan Realisasi Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan di Daerah Tingkat II	Meningkatkan kemampuan dan daya tertinggal dalam rangka pencapaian pembangunan kawasan pedesaan terpulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pelaksanaan kegiatan kearifan lokal dan kearifan lokal dalam rangka pencapaian pembangunan kawasan pedesaan terpulu 2. Tingkat kemampuan tertinggal yang mendapat perhatian dalam rangka pencapaian pembangunan kawasan pedesaan terpulu 3. Tingkat kemampuan tertinggal yang mendapat perhatian dalam rangka pencapaian pembangunan kawasan pedesaan terpulu 	100	6,00	KEDPT
15	Perencanaan, Pelaksanaan, Koordinasi dan Realisasi Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan di Daerah Tingkat II	Meningkatkan kemampuan dan daya tertinggal dalam rangka pencapaian pembangunan kawasan pedesaan terpulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kemampuan dan daya tertinggal dalam rangka pencapaian pembangunan kawasan pedesaan terpulu 2. Meningkatnya kemampuan dan daya tertinggal dalam rangka pencapaian pembangunan kawasan pedesaan terpulu 3. Meningkatnya kemampuan dan daya tertinggal dalam rangka pencapaian pembangunan kawasan pedesaan terpulu 	30%	0,00	KEDPT

NO	SUBSTANSI/INTI/ KEJADATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAMBAH 2013	PACU TAMBAH 2013 MILYAR RUPIAH	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	Pengembangan Kebijakan Koordinasi Dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan	Meningkatnya persentase pembangunan daerah pembangunan infrastruktur pendidikan	<p>(1) Jumlah investasi daerah tertinggi, berdasarkan sumber pembiayaan</p> <p>(2) Jumlah investasi daerah tertinggi, berdasarkan sumber pembiayaan</p> <p>(3) Jumlah investasi daerah tertinggi, berdasarkan sumber pembiayaan</p> <p>(4) Jumlah investasi daerah tertinggi, berdasarkan sumber pembiayaan</p> <p>(5) Jumlah investasi daerah tertinggi, berdasarkan sumber pembiayaan</p> <p>(6) Jumlah investasi daerah tertinggi, berdasarkan sumber pembiayaan</p> <p>(7) Jumlah investasi daerah tertinggi, berdasarkan sumber pembiayaan</p>	50	10,75	KEMDIK
17	Pengembangan Kebijakan	Terselenggaranya pembangunan infrastruktur	<p>(1) Jumlah investasi daerah tertinggi, berdasarkan sumber pembiayaan</p> <p>(2) Jumlah investasi daerah tertinggi, berdasarkan sumber pembiayaan</p> <p>(3) Jumlah investasi daerah tertinggi, berdasarkan sumber pembiayaan</p> <p>(4) Jumlah investasi daerah tertinggi, berdasarkan sumber pembiayaan</p> <p>(5) Jumlah investasi daerah tertinggi, berdasarkan sumber pembiayaan</p> <p>(6) Jumlah investasi daerah tertinggi, berdasarkan sumber pembiayaan</p> <p>(7) Jumlah investasi daerah tertinggi, berdasarkan sumber pembiayaan</p>	60%	1,00	KEMDIK

NO	SUBSTANSI UTAMA/ KEJADATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAMBAH 2013	PACU TAMBAH 2013 INDUKER RUPIAH	INSTANSI PELAKSANA
(4)	(2) Kondisi dan Kelembutan Kondisi dan Kelembutan Kondisi dan Kelembutan	(3) Kondisi dan Kelembutan Kondisi dan Kelembutan Kondisi dan Kelembutan	(4) Kondisi dan Kelembutan Kondisi dan Kelembutan Kondisi dan Kelembutan	(5) 60%	(6) 1,00	(7) (7)
11	Kondisi dan Kelembutan Kondisi dan Kelembutan Kondisi dan Kelembutan	Kondisi dan Kelembutan Kondisi dan Kelembutan Kondisi dan Kelembutan	Kondisi dan Kelembutan Kondisi dan Kelembutan Kondisi dan Kelembutan	60	2,70	KEDPT
19	Kondisi dan Kelembutan Kondisi dan Kelembutan Kondisi dan Kelembutan	Kondisi dan Kelembutan Kondisi dan Kelembutan Kondisi dan Kelembutan	Kondisi dan Kelembutan Kondisi dan Kelembutan Kondisi dan Kelembutan	7 10	1,8 2,00	KEDPT

NO	SUBSTANSI UTAMA/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAPAK 2013	PACU TAPAN 2013 INILAK RUPIAH	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pengembangan Kebijakan Koordinasi Dan Fasilitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tertinggal	Meningkatnya Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi	1. Jumlah Kabupaten yang mendapatkan bantuan afirmasi pembangunan infrastruktur ekonomis nilai di atas Rp100 miliar 2. Persentase kabupaten tertinggal yang memiliki akses ke bidang infrastruktur ekonomi 3. Jumlah pelaksanaan kegiatan kebidayaan dan fasilitas peningkatan infrastruktur elektronika di daerah	30	35,00	KEDY
1.1	Pengembangan Kebijakan Koordinasi Dan Fasilitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tertinggal	Meningkatnya kemampuan daerah tertinggal dalam membangun infrastruktur transportasi	1. Jumlah pelaksanaan kegiatan kebidayaan dan fasilitas peningkatan infrastruktur elektronika di daerah 2. Persentase kabupaten tertinggal yang memiliki akses ke bidang infrastruktur transportasi 3. Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapat bantuan afirmasi pembangunan infrastruktur transportasi	2	3,00	KEDY
1.2	Pengembangan Kebijakan Koordinasi Dan Fasilitas Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Strategis	Meningkatnya kemampuan kawasan strategis dalam pembangunan kawasan strategis	1. Jumlah wilayah strategis dan regional management yang mendapat bantuan struktural (PABH dan operasional) pembangunan Regional Management dan revitalisasi (KORPOT) 2. Jumlah wilayah strategis dan regional management yang mendapat bantuan struktural 3. Jumlah kegiatan pengembangan wilayah strategis di daerah tertinggal	12	4,00	KEDY

IL-104

NO	SUBSTANSI UTAMA/ KEJATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PACU TAHUN 2013 INDUKER RUPIAH	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
II	PROGRAM PERADILAN DASAR Peningkatan dan Pencapaian Keseluruhan Pencapaian dan Tingkat yang Tinggi dalam Proses Pencapaian dan Tingkat yang Tinggi dalam Proses Pencapaian dan Tingkat yang Tinggi dalam Proses	Tersedianya dan Peningkatan dan Pencapaian Keseluruhan Pencapaian dan Tingkat yang Tinggi dalam Proses	Jumlah persentase penyediaan dan pencapaian keseluruhan pencapaian dan tingkat yang tinggi dalam proses	70,100	10.419	Komisioner dan Kebudayaan dan Kebudayaan
III	PROGRAM PERADILAN HENTIKAN Peningkatan dan Pencapaian Keseluruhan Pencapaian dan Tingkat yang Tinggi dalam Proses	Tersedianya dan Peningkatan dan Pencapaian Keseluruhan Pencapaian dan Tingkat yang Tinggi dalam Proses	Jumlah persentase penyediaan dan pencapaian keseluruhan pencapaian dan tingkat yang tinggi dalam proses	61,87	14,5	Komisioner dan Kebudayaan dan Kebudayaan
IV	PROGRAM PERADILAN ISLAM Peningkatan Akses, Mutu, Keseluruhan, dan Subsidi JAJARA dan Akutansi	Menyediakan akses, mutu dan keseluruhan, serta terselenggaranya subsidi JAJARA dan Akutansi	Tersedianya dan pencapaian keseluruhan pencapaian dan tingkat yang tinggi dalam proses	8,500	51,7	Komisioner dan Agama
V	PROGRAM PENGELUARAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSKRIPSI DARAT Subsidi Operasional Kementerian Angkatan	Kejelasan dan pencapaian keseluruhan pencapaian dan tingkat yang tinggi dalam proses	Jumlah persentase penyediaan dan pencapaian keseluruhan pencapaian dan tingkat yang tinggi dalam proses	1,75	65,4	Kemendiklat dan Kebudayaan

NO	SUBSTANSI/INTI/ KEJATAAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PADU TAHUN 2013 INDUKAR RUPIAH	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
VII	Perencanaan Strategi dan Pelaksanaan Monev/evaluasi SDP dan pengelompokan/penyempurnaan SDP	Belanjaan keperencanaan anggaran anggaran dan/atau penyempurnaan	Jumlah biaya keperencanaan anggaran yang terdapat dan persentase realisasi yang menunjukkan keberhasilan	90	1.72	Kemendagri
PROGRAM PENGELUARAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT						
VIII	Perencanaan dan pengembangan kegiatan di bidang pelayanan dan angkutan laut	Terselenggaranya kapal penumpang, perahu penumpang, angkutan laut Terselenggaranya keperencanaan angkutan laut	Perimbangan kapal penumpang perahu penumpang Jumlah trayek-karibehi angkutan laut perintis	19 72	3.34,0 384,0	Kemendagri Kemendagri
PROGRAM PENGELUARAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA						
VIII	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Meningkatnya pelayanan transportasi angkutan udara	Jumlah rute perintis yang ditawarkan	255 rute	581,32	Kemendagri
PROGRAM PEMBIAYAAN UPAYA RESILIANSI						
VIII	Perencanaan Upaya Mitigasi Bencana	Meningkatnya perencanaan mitigasi bencana	Jumlah Kabupaten yang dilayani oleh BSS terpasang di daerah terdampak bencana dan kabupaten (DTPB)	34	44,34	Kemendagri
PROGRAM DIKTIVAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TIGAS TERNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN						
IX	Perencanaan dan pelaksanaan	Meningkatnya pelaksanaan program-program	Jumlah tenaga kesehatan yang dilayani/pelayanan dan diawasi	5.120	2.464,34	Kemendagri
PROGRAM PEMBIAYAAN SOSIAL						
XI	Perencanaan dan pelaksanaan	Terselenggaranya kegiatan sosial dasar bagi masyarakat	Terselenggaranya program dan infrastruktur (Timb) Pembinaan (Lembaga) KIDUS (K)	21.271	225,10	Kemendagri
				53.627		

IL-106

NO	SUBSTANSI UTAMA/ KEJADIAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAPAK 2013	PADU TAPAK 2013 INDUKER RUPIAH	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
XI	PROGRAM PENGKATATAN AT TAHERAT, DAYA SAHAB, INDUSTRIAL, PEMASARAN DAN TERORISASI PERTANIAN Pengembangan program pemukiman di daerah pedesaan dan perbatasan (Pemukiman Berdaya) sumber: K221				60,4	
			Jumlah belanda dan pembangunan dan pembangunan harga kamandus (perbaikan jalan (kamandus))	10	8,2	Kementerian
			Jumlah belanda dan pembangunan dan pembangunan	10	4,1	Kementerian
			Jumlah nilai pembangunan infrastruktur pasar komoditi perbaikan (lokasi)	520	10,5	
XII	PROGRAM PEMERDAYAAN KOPERASIAN UMKM					
		Meningkatkan jumlah koperasi dalam koperasi dan UMKM di bidang Koperasi, Koperasi dan Arifin Usaha	Jumlah koperasi yang mendapat dukungan pengembangan usaha melalui pembangunan energi baru terbarukan	10	20,00	Kementerian
XIII	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
XIII.1	Subsidi Pemukiman Transmigrasi	Jetutasi wilayah pemukiman transmigrasi	Jumlah kawasan yang tidak selesai pemukiman transmigrasi di daerah perunggu/perbatasan	30 kawasan luas: 3.810 kepada kecamatan	30.555	Komisi
XIII.2	Pembinaan Tanah Transmigrasi	Transmigrasi: Tanah untuk Pemukiman Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan yang dibagikan lahannya di daerah perunggu/perbatasan	25 kawasan (5.000 Ha)	3-80	Komisi

NO	SUBSTANSI/TI/ KEJADIAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PADU TAHUN 2013 INDUKER RUPIAH	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN PEMERISMAHASI						
XIV.1	Pengembangan sarana dan prasarana kesehatan Transmigrasi	Berkembangnya sarana dan prasarana di permukiman transmigrasi dan kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan yang dikembangkan menurut dan jenis kegiatan di dalam wilayah / perhalaman	14 Kecamatan / 54 Desa	202.204	Kemendagri
XIV.2	Perawatan kesehatan di kawasan Transmigrasi	Meningkatnya peran peran dan peran kesehatan di kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan yang difasilitasi pengembalian usaha ekonominya di dalam wilayah / perhalaman	140 Kecamatan / 31 Kawasan	34.972	Kemendagri
PROGRAM Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas						
XV.1	Melakukan berbasis kompetensi dan Peningkatan Kualitas Masyarakat	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	14.000	Abadial 2011	Kemendagri
ILU STRATEGIS: PENCAPAIAN PENGEMBANGAN PERKAWASAN DAN DAERAH TERBUKA						
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PERTINGGAL						
1.1	Mengembangkan ketajaman, keorganisasian dan keaktifan transmigrasi kawasan transmigrasi di daerah tertinggal	Meningkatnya kemampuan daerah tertinggal dalam pengembangan kawasan transmigrasi	1. Peningkatan ketajaman sebagai pemangku desa, 2. Peningkatan keaktifan transmigrasi yang memiliki kemampuan baru, 3. Jumlah pelaksanaan kegiatan transmigrasi di daerah tertinggal	27 27 4	8,00 12,00 6,00	KEMPT

IL-108

NO	SUBSTANSI/KEJADIAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PACU TANTU 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
II	PROGRAM BINA PERBANGUNAN DAERAH	Meningkatkan pertumbuhan dan pencapaian hasil pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil.	<p>Jumlah pendoman/kegiatan/kegiatan dengan pengembangannya wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil. [Target: Kumudik II]</p> <p>Jumlah wilayah dan pulau-pulau kecil yang mengimplementasikan pendoman/kegiatan/kegiatan dengan pengembangannya wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil. [Target: Kumudik II]</p> <p>Prosentase Bandar yang mempunyai emporium selanjutnya baik dengan atau tanpa perbatasan (9 Provinsi, 3 Kabupaten). [Target Kumudik II]</p>	3 pendoman	4,50	Kemendagri
III	PROGRAM SUKSES DAN PEMULIAAN NASIONAL	Tersusunnya infrastruktur perbatasan kelas selaput dan martabatnya sebagai kota baru wilayah	<p>Jumlah RTF Kota baru wilayah perbatasan (Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur).</p> <p>Jumlah RTF Kota baru wilayah perbatasan (Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur).</p>	1	5,0	KEMENTERIAN RTG

NO	SUBSTANSI/TUJUAN/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013 (3)	PADU TAHUN 2013 INDIKATOR RUPIAH (6)	INSTANSI PELAKSANA (7)
(4)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
IV	PROGRAM PENGUATAN PERKUALIFIKASIAN NASIONAL					
IV.1	Mengembangkan keterampilan profesional	Dua jenis keterampilan Wilayah perikanan: Pulau-Pulau kecil, perikanan, dan wilayah tertentu (WPPWT)	Interaksi Wilayah sekitar Pulau-Pulau Kecil, Ferntasi dan Wilayah Terentu. (WFTWT)	57,5%	143	BNP
IV.2	Pengembangan Wilayah sekitar Pulau-Pulau Kecil, perikanan dan Wilayah Terentu (WPPWT) (1)	Tiga jenis keterampilan Wilayah perikanan: Pulau-Pulau kecil, perikanan, dan wilayah tertentu (WPPWT)	Insentifikasi Wilayah sekitar Pulau-Pulau Kecil, Ferntasi dan Wilayah Terentu. (WFTWT)	1 Point	6,0	
V	PROGRAM OPTIMALISASI DIPLOMASI TERIKAT DENGAN PENGELOMPOK HUKUM DAN PERHAMBAN INTERNASIONAL					
V.1	Optimalisasi Diplomasi terikat dengan Perjanjian Adfelle, Kimmance, Yessalyvar dan Keautan	Terdapat peningkatan pengantar diplomasi melalui optimalisasi perjanjian politik, keamanan, kesejahteraan dan ketubare	Jumlah pelaksanaan pertemuan yang tercatat dan perwujudan perjanjian bilateral dan regional antara: Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan F.ao	33	32,59	Kemenu
VI	PROGRAM PINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERTAMBAN					
VI.1	Seleksi dan pengadaan sarana perikanan di wilayah perikanan	Mendapatkan sarana dan prasarana perikanan di wilayah perikanan	Persentase terlaksananya sarana dan prasarana pencapaian perikanan di wilayah perikanan	20%	21,2	seperduan
VI.1.1	Optimalisasi pengadaan sarana perikanan di wilayah perikanan	Terdapat kemajuan optimalisasi sarana perikanan	Persentase kemajuan dan sarana perikanan wilayah perikanan	40%	17,0	Mabes TBK

IL-110

NO	SUBSTANSI/KEJADIAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAJU TAIUN 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
VIII	PROGRAM PERFORMANSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PITA ULUH					
VIII.1	Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kerja	Meningkatnya minat generasi muda pada dunia kerja	<p>Jumlah lulusan yang dipinjamkan, diseminasi, dan dimanfaatkan pada level nasional</p> <p>Jumlah lulusan yang terampil dan produktif</p> <p>Inisiatif dan inovasi dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja</p>	50 yulan 50 pulau	17,00	KCP
IX	PROGRAM PERAWASAN SUMBER DAYA MELAUTAN DAN PERIKANAN					
IX.1	Peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal perikanan	Meningkatnya dukungan terhadap pengalangan perikanan (MPN, SPN, PPN, PPNK) dan Uleka Haring	<p>Perentase nelayan yang melakukan pemukiman (MPN, SPN, PPN, PPNK) dan Uleka Haring</p> <p>Jumlah kapal yang dilengkapi dengan alat pemantau (GPS, AIS)</p>	24,5% (1,25 arm operasi kapal) <p>15,30 (1-25 hari operasi)</p>	21,50	KCP
IX.2	Peningkatan operasional perikanan SKK dan pemeliharaan infrastruktur perikanan	Terdapatnya layanan perikanan (SKK) pada WPP-MA secara terintegrasi dan terpadu serta peningkatan infrastruktur perikanan	<p>Jumlah perikanan skk yang beroperasi (SKK) yang terintegrasi dan terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapal perikanan (unit) • Fasilitas perikanan (unit) • Radar pantai (unit) • Transponder VMS online (unit) 	2 0 0 0	3,5,0	

NO	SUBSTANSI/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PACU TAJUK 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
X	PROGRAM PENCEKAMAN POS DAN INFORMATIKA		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Raktor pengawas (unit) ▪ Bermula (unit) ▪ Pns pengawas (unit) ▪ Kosa ARI (unit) ▪ Gudang Araya/Rukn (unit) ▪ Detektor Curam (unit) ▪ Kapal Tangkai yang berkegiatan (unit) Peningkatan pemeliharaan sumber daya manusia yang dapat dipantau : WP5 DWPP 711, 712, 713, 715.	50%		
X.1	Peningkatan pemberdayaan dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam Pengetahuan dan Pengembangan Sistem dan Peningkatan Informasi	Peningkatan akses informasi dan komunikasi di wilayah desa/kelurahan	Persentase desa yang mempunyai akses internet di desa, yaitu 33,13% desa (dari total 23.802 desa di Indonesia); Peningkatan kemampuan yang mempunyai akses internet di tingkat kecamatan (WPD) Peningkatan pemeliharaan K-TRIK (1.907)	100%	397,12	Kementrianinfo
				100%	233,73	
				100%	14,387	
				100%	80,20	
				100%	44,96	
				100%	88,19	
				100%	66,12	

NO	SUBSTANSI/TITIK/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PACU TANTU 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Prosedur penanggulangan dan penyelesaian kasus radio stasionaris pada desa tidak lebih dari 1000 radio komunikasi sampai dengan 2014		70%	7,30	
		Presentase utilitas pemanglik infrastruktur UKD kelas menengah		50%	211,38	
XI	PROGRAM PEMBIAYAAN UPAYA KESEHATAN					
XI.1	Kelembagaan Upaya Kesehatan Dasar	Membudidayakan kegiatan kesehatan dasar kepada masyarakat	jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawat dan perawat dan poliklinik keel. untuk mandiri	91	40,682 DK.3	Kemendikdas
XII	PROGRAM PANGKUTAN PENYERANGBAAAN PEMBIAYAAN UMUM					
XII.1	Program Pengujian Perawatan Wajaya Administrasi dan Perawatan	Meningkatkan kemampuan pelayanan perawat dan administrasi dan perawatan Terdapat layanan perawat dan administrasi dan perawatan Membudidayakan seluruh perawat dan administrasi dan perawatan	Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawat dan perawat dan poliklinik keel. untuk mandiri Presentase yang akan dalam puskesmas perawat dan perawat dan poliklinik keel. untuk mandiri Jumlah silyklot di puskesmas perawat dan perawat dan poliklinik keel. untuk mandiri yang akan dalam puskesmas perawat dan perawat dan poliklinik keel. untuk mandiri	3 point 7,5%	52,9	Kemendikdas
		Membudidayakan kerjasama antara puskesmas dan puskesmas perawat dan perawat dan poliklinik keel. untuk mandiri	Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawat dan perawat dan poliklinik keel. untuk mandiri	5		

NO	SUBSTANSI/KEJADIAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PACU TANTU 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
XIII	PROGRAM PENGEMBANGAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN					
XIII.1	Pengelolaan batas Wilayah Darat	Terdapat layanan penanganan, penyelesaian, pembaruan, pemeliharaan, dan pemertanian Batas Negara Wilayah Darat	Perakuisisi terdapat batas wilayah darat (bagi, HSE, Sapat) dan keberlangsungan sarana perbatasan antar wilayah darat	100 Unit	2.600	TRPF
XIII.2	Pengelolaan batas Wilayah Laut dan Udara	Terdapat layanan penanganan, penyelesaian, pembaruan, pemeliharaan, dan pemertanian Batas Negara Wilayah Laut dan Udara	Terdapatnya sarana dan prasarana informasi, komunikasi, pemantauan, pemertanian, dan pemertanian Batas Negara Wilayah Laut dan Udara.	5 unit Survey 10 unit alat komunikasi dan pemantauan	6.300	TRPF
XIII.3	Pengelolaan batas Darat Negara	Terdapat layanan penyelesaian, pemertanian, dan pemertanian batas Darat Negara	Perakuisisi sarana, prasarana, dan pemertanian batas Darat Negara (TRPF)	5 UJBN	23.10	TRPF
XIII.4	Pengelolaan batas Kawasan Perbatasan Darat	Terdapat layanan pemertanian, pemertanian, dan pemertanian Kawasan Perbatasan Darat	Perakuisisi sarana, prasarana, dan pemertanian Kawasan Perbatasan Darat	5 laporan dan 4 unit	12.300	TRPF

IL-114

NO	SUBSTANSI/KELOMPOK/KEJADIAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PACU TANTU 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1) XII.6	(2) Perbaikan Akses, Aksesibilitas, dan Fasilitas	(3) Perfasilitasi penyandang kecacatan, Dokumen Kebijakan Ruang Aksesibilitas	(4) Perencanaan, Dokumen, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi	(5) 6 dokumen kebijakan	(6) 3,20	(7) DJPP
XII.7	Perbaikan Akses, Aksesibilitas, dan Fasilitas	(3) Perfasilitasi penyandang kecacatan, Dokumen Kebijakan Ruang Aksesibilitas	(4) Perencanaan, Dokumen, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi	(5) 6 dokumen kebijakan	(6) 3,20	(7) DJPP
XII.8	Perbaikan Akses, Aksesibilitas, dan Fasilitas	(3) Perfasilitasi penyandang kecacatan, Dokumen Kebijakan Ruang Aksesibilitas	(4) Perencanaan, Dokumen, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi	(5) 6 dokumen kebijakan	(6) 3,20	(7) DJPP

NO	SUBSTANSI/KEJADIAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PADU TATUN 2013 INDIKATOR RUPIAH	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
XIII	Pengelolaan Infrastruktur Kecamatan dan Kawasan Perbatasan	Terdapatnya Monitoring, Evaluasi dan Laporan Pembangunan Infrastruktur Kecamatan dan Kawasan Perbatasan	Terdapatnya evaluasi pemantauan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial kawasan perbatasan	3 Laporan dan 2 unit	1.10	TRFF
XIII	Pengelolaan Infrastruktur Kecamatan Kawasan Perbatasan	Terdapatnya Monitoring, Evaluasi dan Laporan Pembangunan Infrastruktur Kecamatan Kawasan Perbatasan	Terdapatnya hasil evaluasi/monitoring/evaluasi pembangunan infrastruktur pemukiman perbatasan	3 Laporan	1.70	TRFF
XIV	PROGRAM PERcepatan dan PErbaikan KEmampuan Kerja					
XIV.1	Pengembangan dan penciptaan peluang kewirausahaan bagi pelaku usaha produktif pada infrastruktur dan perdagangan	Terdapatnya pendanaan di berbagai bidang usaha produktif	Jumlah bantuan/penghasilan/pendukung program kewirausahaan	19 paket di 27 Kabupaten/Kota (Kecuali Papua dan Papua Barat)	Alokasi di LN 4	Keuwirausahaan
III. PROGRAM PERcepatan PEnranginan POrtusi dan PApua BaraT						

IL-116

NO	SUBSTANSI/KEJADATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAJU TAUAN 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PROGRAM PUNTLLENGKARAN JALAN						
1.1	<p>Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan Kapasitas Jalan Nasional</p> <p>Tersedianya infrastruktur jalan raya dan plaza dan area parkir yang memadai untuk mendukung transportasi dari daerah pedesaan menuju daerah kota/area perkotaan serta untuk transportasi hasil pertanian dan perkebunan, bahan bakar, energi dan barang-barang lainnya</p>	<p>Peningkatan kemampuan jalan, pelebaran jalan, peningkatan kualitas jalan, pemeliharaan jalan, pemeliharaan sarana transportasi jalan dan jembatan.</p>	<p>Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan (2.717,51 km)</p> <p>Pembangunan dan pemeliharaan jalan (24.575 m)</p> <p>Pembangunan dan pemeliharaan jalan (1.181 km)</p>	<p>122,67</p> <p>24,06</p> <p>343,20</p>	<p>Kemendagri</p> <p>Kemendagri</p> <p>Kemendagri</p> <p>Kemendagri</p>	<p>Kemendagri</p> <p>Kemendagri</p> <p>Kemendagri</p> <p>Kemendagri</p>
				270		Kemendagri

NO	SUBSTANSI/KEJATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PACU TAIUN 2013 INDIKAR RUPPIAH	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Rekonstruksi / Perbaikan Jalan Semilir Jalan (4,70 km)	2.226,39	Kecamatan Kertosono
				Perbaikan / Rehabilitasi Jalan (2,167 km)	2.277,96	Kecamatan Kertosono
				Pembangunan Jalan Baru (1,62 km)	1.003,50	Kecamatan Kertosono
				Pembangunan Jalan Baru (226 m)	331,67	Kecamatan Kertosono
				Pelaksanaan Jalan (20 km)	1.279,89	Kecamatan Kertosono

IL-118

NO	SUBSTANSI/KEJADIAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PACU TANTU 2013 INDIKATOR RUPIAH	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PROGRAM PENGUJIAN SUMBER DAYA AIR						
1	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan pipa transmisi air minum	Pembangunan pipa dan pemeliharaan esek	Peningkatan jumlah sekunder dan primer	17000 Ha	%	Kendek
2	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan pipa transmisi air minum	Pembangunan pipa dan pemeliharaan esek	Pembangunan Saluran Sumbu dan Primer	8000 Ha	%	Kendek
3	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan pipa transmisi air minum	Pembangunan pipa dan pemeliharaan esek	Pembangunan intake dan Saluran	2000 Ha	%	Kendek
4	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan pipa transmisi air minum	Pembangunan pipa dan pemeliharaan esek	Pembangunan penyediaan Air Raku	200 m3/teknik	%	Kendek
5	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan pipa transmisi air minum	Pembangunan pipa dan pemeliharaan esek	Peningkatan sarana Pungutan Air Raku	200 m3/teknik	%	Kendek
6	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan pipa transmisi air minum	Pembangunan pipa dan pemeliharaan esek	Pembangunan Sarana Transmisi Air Raku	3500 m3/teknik	%	Kendek
7	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan pipa transmisi air minum	Pembangunan pipa dan pemeliharaan esek	Pembangunan Sumbu, Kapanasi	0,2	%	Kendek

IL-119

NO	SUBSTANSI UTAMA/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PACU TANTU 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
III						
1.1	Pengembangan Usaha UKM di Bidang Kehutanan dan Perikanan	Meningkatkan jumlah dan kualitas usaha produksi UKM dan usaha anggota koperasi pembenihan insentif bidang kehutanan dan perikanan	Jumlah koperasi di bidang produksi perahu Papua dan Papua Barat yang dipelihara	3 Koperasi	5,0	Kementerian
1.2	Pengembangan dan pembinaan lokal dan Masyarakat Wilayah III	Terdapat rangkai pembangunan Industri Tani Masyarakat (IKM)	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)	7 Komoditi	(Dalam Rp. 13)	Kementerian Perindustrian
1.3	Pengembangan dan Penguatan: Pendidikan dan Pendidikan Tinggi	Terdapat program Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi	Jumlah Koperasi Dasar dan UPP yang diwujudkan secara fisik dan administratif	2	26,80	Kementerian
IV						
1.4	Pengembangan Usaha Usaha Perikanan (Perikanan)	Terdapat usaha kegiatan Perikanan Perikanan (Perikanan)	Persentase Kelulusan unacad peserta Pendidikan Perikanan (Diklat)	77%	88,2	Kabupaten

IL-120

NO	SUBSTANSI UTAMA/ KEJADIAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAPAK 2013	PAJAK TAPAK 2013 INDUKER RUPIAH	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
V	PROGRAM PEMERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI					
V.1	Mengembangkan Pegawai Polri	Mengembangkan sebagai pendidik pembelajaran personal Polri	Mengembangkan yang menjadi anggota Polri	2.350 orang	36,7	Polri
VI	PROGRAM PENTINGKATAN KOORDINASI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN					
VI.1	Keordinasian Pemerintahan dan Keamanan	Terseleksi dan terkoordinasi kebidanan keorganisasian dan koordinasi keorganisasian	1. Jumlah Pegawai Keorganisasian dan Keamanan 2. Jumlah Pemerintahan dan Keamanan 3. Jumlah Keorganisasian dan Keamanan 4. Jumlah Keorganisasian dan Keamanan	12 4 22 4	9,9	Keorganisasian dan Keamanan
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERILAKUAN KESEMPATAN KERJA					
VII.1	Kelembagaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	Kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	Jumlah Kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	15 paket di 4 Kabupaten/Raya	Model di PK 4	Kelembagaan
VII.2	Kelembagaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	Kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	1. Kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat 2. Kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	15.1 dan 15.2 MW	Model di PK 4	Kelembagaan

NO	SUBSTANSI/TEXT/ KEJADIAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAPIL 2013	PACU TAPIL 2013 INDUKER RUPIAH	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ketenagalistrikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator: distribusi di provinsi Papua 2. Jumlah listrik yang di Provinsi Papua Barat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 450.000 MS 2. 334.750 MS 		
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Garpu distribusi di provinsi Papua 2. Garpu distribusi di provinsi Papua Barat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2.032.200 MS 2. 7.245 MS 		

* Alokasi anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp 702,21 miliar merupakan kegiatan dari lokasi kegiatan Pemeliharaan, Pemantauan, Perbaikan dan Peningkatan Sistem dan Prasarana Telekomunikasi

Terdapat 6.

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2013

PRIORITAS 1	PROGRAM AKSI BIDANG KEHUTANAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI
Tema Penguatan	5. Mengembangkan dan memanfaatkan keahliannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja.
Penganggaran, Lokasi	Manajemen Keuangan dan Anggaran
Indikator Kinerja Utama	Manajemen Keuangan dan Anggaran

NO	SUBSTANSI INTI / KEMANTAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013 (5)	PAGU TAHUN 2013 (6)	INSTANSI PELAKSANA (7)
1.	PIKAWAYAN Peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkualitas dan inovatif	(1)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya angka buta aksara dan angka melek huruf Capaian Sasaran (CSP) pada tahun 2013 dan 2014	Jumlah Cagar Budaya yang di registrasi dan yang diteliti dan diteliti	200	47,00	Kemendilbud
2.2	Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terampil dan inovatif	Jumlah pelatihan keterampilan yang diselenggarakan	10		
2.3	Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terampil dan inovatif	Jumlah pelatihan keterampilan yang diselenggarakan	10		
2.4	Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terampil dan inovatif	Jumlah pelatihan keterampilan yang diselenggarakan	31	42,13	Departas DC
2.5	Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terampil dan inovatif	Jumlah pelatihan keterampilan yang diselenggarakan	50		
2.6	Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terampil dan inovatif	Jumlah pelatihan keterampilan yang diselenggarakan	31	200,00	Departas DC
				2.238		

NO	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PADA TAHUN 2013	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	PENGUATAN Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang penelitian, pengembangan, dan Transfer of Technology	Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan teknologi	Tumbuhnya jumlah publikasi internasional	140	115,6	Kemendikbud
3.1	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas	Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan teknologi	Tumbuhnya jumlah publikasi internasional	22	30,0	Kemendikbud
4.	KERIFAKAN Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang penelitian, pengembangan, dan Transfer of Technology	Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan teknologi	Tumbuhnya jumlah publikasi internasional	25.000	34,0	Kemendikbud
4.1	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan teknologi	Tumbuhnya jumlah publikasi internasional	4	35,0	Kemendikbud
4.2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan teknologi	Tumbuhnya jumlah publikasi internasional	15		
			Tumbuhnya jumlah publikasi internasional	15		
			Tumbuhnya jumlah publikasi internasional	15		
			Tumbuhnya jumlah publikasi internasional	15		
5.	INDUSTRIKENDALI Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang penelitian, pengembangan, dan Transfer of Technology	Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan teknologi	Tumbuhnya jumlah publikasi internasional	3.000	15,5	Kemendikbud
5.1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan teknologi	Tumbuhnya jumlah publikasi internasional	30	120,0	Kemendikbud
			Tumbuhnya jumlah publikasi internasional	18,0		
			Tumbuhnya jumlah publikasi internasional	50		

NO	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAJU TAHUN 2013	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.4	Peningkatan layanan dan kualitas pelayanan	Meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pengguna	Lemah, tidak ada indikator yang terukur	100%	48,0	Kantor Etik
5.5	Peningkatan layanan dan kualitas pelayanan	Terlaksananya rencana strategis pelayanan kesehatan	Efektif, efisien, dan berkualitas	100%	85	Kantor Etik
5.6	Peningkatan layanan dan kualitas pelayanan	Terlaksananya rencana strategis pelayanan kesehatan	Efektif, efisien, dan berkualitas	100%	92,5	Kantor Etik
5.7	Peningkatan layanan dan kualitas pelayanan	Terlaksananya rencana strategis pelayanan kesehatan	Efektif, efisien, dan berkualitas	100%	7	-
5.8	Peningkatan layanan dan kualitas pelayanan	Terlaksananya rencana strategis pelayanan kesehatan	Efektif, efisien, dan berkualitas	100%	10	-
5.9	Peningkatan layanan dan kualitas pelayanan	Terlaksananya rencana strategis pelayanan kesehatan	Efektif, efisien, dan berkualitas	100%	100	Kantor Etik
5.10	Peningkatan layanan dan kualitas pelayanan	Terlaksananya rencana strategis pelayanan kesehatan	Efektif, efisien, dan berkualitas	100%	100	Kantor Etik
5.11	Peningkatan layanan dan kualitas pelayanan	Terlaksananya rencana strategis pelayanan kesehatan	Efektif, efisien, dan berkualitas	100%	100	Kantor Etik
5.12	Peningkatan layanan dan kualitas pelayanan	Terlaksananya rencana strategis pelayanan kesehatan	Efektif, efisien, dan berkualitas	100%	100	Kantor Etik
5.13	Peningkatan layanan dan kualitas pelayanan	Terlaksananya rencana strategis pelayanan kesehatan	Efektif, efisien, dan berkualitas	100%	100	Kantor Etik
5.14	Peningkatan layanan dan kualitas pelayanan	Terlaksananya rencana strategis pelayanan kesehatan	Efektif, efisien, dan berkualitas	100%	100	Kantor Etik
5.15	Peningkatan layanan dan kualitas pelayanan	Terlaksananya rencana strategis pelayanan kesehatan	Efektif, efisien, dan berkualitas	100%	100	Kantor Etik
5.16	Peningkatan layanan dan kualitas pelayanan	Terlaksananya rencana strategis pelayanan kesehatan	Efektif, efisien, dan berkualitas	100%	100	Kantor Etik
5.17	Peningkatan layanan dan kualitas pelayanan	Terlaksananya rencana strategis pelayanan kesehatan	Efektif, efisien, dan berkualitas	100%	100	Kantor Etik
5.18	Peningkatan layanan dan kualitas pelayanan	Terlaksananya rencana strategis pelayanan kesehatan	Efektif, efisien, dan berkualitas	100%	100	Kantor Etik
5.19	Peningkatan layanan dan kualitas pelayanan	Terlaksananya rencana strategis pelayanan kesehatan	Efektif, efisien, dan berkualitas	100%	100	Kantor Etik

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2013

PRIORITAS LAINNYA PROGRAM AKSI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Tema Prioritas
Peninggihan
Hak-hak asasi manusia

NO	SISTEM/REGISTRASI PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PACU TAMBAN 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ILUSTRASI: PEMILIHAN PEMILU 2014					
1.1	Keterampilan dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta kemampuan dalam menggunakan media massa dan internet.	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta kemampuan dalam menggunakan media massa dan internet.	Tingkat keberhasilan proses pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemilu, pilkada, dan pilkada serentak di seluruh Indonesia.	80%	33,0	KPU
	Keterampilan dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta kemampuan dalam menggunakan media massa dan internet.	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta kemampuan dalam menggunakan media massa dan internet.	Tingkat keberhasilan proses pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemilu, pilkada, dan pilkada serentak di seluruh Indonesia.	80%	33,0	KPU
	Keterampilan dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta kemampuan dalam menggunakan media massa dan internet.	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta kemampuan dalam menggunakan media massa dan internet.	Tingkat keberhasilan proses pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemilu, pilkada, dan pilkada serentak di seluruh Indonesia.	80%	33,0	KPU

NO	SISYUWANI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PADA TAHUN 2013 (MELAKUKAN RUPKAD)	DASAR HUKUM PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PROGRAM : PENGUSAHA PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN						
	Dukungan pengorganisasian pengusaha perusahaannya perusahaannya	Terlaksananya pelatihan pengusaha perusahaannya perusahaannya	<p>Zerocase (30) pelaksanaan sosialisasi melalui media massa dan media elektronik</p> <p>Zerocase (40) pelaksanaan sosialisasi melalui media massa dan media elektronik</p> <p>Zerocase (50) pelaksanaan sosialisasi melalui media massa dan media elektronik</p> <p>Zerocase (60) pelaksanaan sosialisasi melalui media massa dan media elektronik</p> <p>Zerocase (70) pelaksanaan sosialisasi melalui media massa dan media elektronik</p> <p>Zerocase (80) pelaksanaan sosialisasi melalui media massa dan media elektronik</p> <p>Zerocase (90) pelaksanaan sosialisasi melalui media massa dan media elektronik</p> <p>Zerocase (100) pelaksanaan sosialisasi melalui media massa dan media elektronik</p>	100%	50,9	Dapat
PROGRAM : PROGRAM PENGUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN						
Kerjasama	Kerjasama	Kerjasama	Kerjasama	Kerjasama	Kerjasama	Kerjasama

NO	SISYUWANI/ KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	POL. TAHUN 2013 (MILYAR RUPIAH)	DISTRIBUSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PROGRAM : PROGRAM POKOK KEGIATAN SASARAN PRASARANA POLRI						
I1	Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan	50%	400000	POLRI
PROGRAM : PROGRAM POKOK KEGIATAN SASARAN KEAMANAN						
II1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan	100%	100000000	POLRI
PROGRAM : PROGRAM POKOK KEGIATAN SASARAN KEAMANAN						
III1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan	100%	100000000	POLRI
PROGRAM : PROGRAM POKOK KEGIATAN SASARAN KEAMANAN						
III2	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan	100%	100000000	POLRI

NO	SISYUWAKH/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARUET TAHUN 2013	PAUL. TAHUN 2013	
					(MILYAR RUPIAH)	ENSTRESI PELAKSANA
01	Perencanaan, pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan strategis di bidang politik	(4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di bidang politik	(4) Jumlah dan persentase penyelesaian atas tugas dan tanggung jawab organisasi, kelengkapan, ketepatan, dan keakuratan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	(6) 2,3	(7) 2,3	LENGKAP
02	Perencanaan, pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan strategis di bidang ekonomi	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di bidang ekonomi	Jumlah dan persentase penyelesaian atas tugas dan tanggung jawab organisasi, kelengkapan, ketepatan, dan keakuratan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	2,8	2,8	LENGKAP
03	Perencanaan, pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan strategis di bidang sosial, budaya, dan olahraga	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di bidang sosial, budaya, dan olahraga	Jumlah dan persentase penyelesaian atas tugas dan tanggung jawab organisasi, kelengkapan, ketepatan, dan keakuratan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	3,8	3,8	LENGKAP
ISO STRATEGIS : PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENDIRIKAN ESSENSEAL FORCE						
IV	PROGRAM MODERENISASI ALUTSISTA/ MOD. ALUTSISTA/ SARANA INTEGRATIF	Percepatan modernisasi alutisista	Percepatan modernisasi alutisista	2,25	3,25	92,84%
V	PROGRAM MODERENISASI ALUTSISTA/ MOD. ALUTSISTA/ SARANA DAN PRASARANA WATRA DARAT	Percepatan modernisasi alutisista	Percepatan modernisasi alutisista	2,80	1,00	35,71%

NO	SURSAH INITI/ KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAHL. TAHUN 2013 (MILYAR RUPIAH)	ESTIMASI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
VI	Perencanaan dan pelaksanaan strategi kerjasama PROGRAM MODERNISASI LINTAS DARAT NON-ALIRSIKSA SERTA PENYEMPURNAAN FASILITAS DAN SARFAS MATA UDARA	Kecepatan pengabdian melalui Strategi serta lain	Perencanaan dan pelaksanaan Strategi Laut	100%	9500	ADDISAN / 2013
VII	Kecepatan dan kelancaran Strategi Mata Udara	Kecepatan pengabdian melalui Strategi Mata Udara	Perencanaan dan pelaksanaan Strategi Mata Udara	200%	24000	STRANAS / 2013
PRIORITY NASIONAL						
PELAKSANAAN KOORDINASI TERJADAP MEKANISME PROSEDUR PENANGANAN TEROBES						
PROGRAM PENGUKURAN KEGIATAN PERTAMAKAN INTEGRASI						
VI.1	Kecepatan dan kelancaran Strategi Mata Udara	Kecepatan pengabdian melalui Strategi Mata Udara	Perencanaan dan pelaksanaan Strategi Mata Udara	300%	6000	STRANAS / 2013
2	Kecepatan dan kelancaran Strategi Mata Udara	Kecepatan pengabdian melalui Strategi Mata Udara	Perencanaan dan pelaksanaan Strategi Mata Udara	300%	3000	STRANAS / 2013
X	Kecepatan dan kelancaran Strategi Mata Udara	Kecepatan pengabdian melalui Strategi Mata Udara	Perencanaan dan pelaksanaan Strategi Mata Udara	300%	3000	STRANAS / 2013
XI	Kecepatan dan kelancaran Strategi Mata Udara	Kecepatan pengabdian melalui Strategi Mata Udara	Perencanaan dan pelaksanaan Strategi Mata Udara	300%	3000	STRANAS / 2013
XII	Kecepatan dan kelancaran Strategi Mata Udara	Kecepatan pengabdian melalui Strategi Mata Udara	Perencanaan dan pelaksanaan Strategi Mata Udara	300%	3000	STRANAS / 2013

JL-130

NO	SURSAH INITI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAHL. TAHUN 2013 (MILYAR RUPIAH)	INDUSTRI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
XII.1	Operasi dan C25 KORPRI	Meningkatnya kinerja dan produktivitas pegawai	Persentase jumlah dan kualitas operasi, kualitas, presentasi, kualitas dan kuantitas pertumbuhan nasional	40%	300	INDUSTRI /M.483.131
XII.2	Operasi dan C25 KORPRI	Terwujudnya kegiatan olahraga dan rekreasi	Persentase jumlah dan kuantitas pertumbuhan nasional	40%	300	INDUSTRI /M.483.131
XII.3	Operasi dan C25 KORPRI	Terwujudnya kegiatan olahraga dan rekreasi	Persentase jumlah dan kuantitas pertumbuhan nasional	40%	300	INDUSTRI /M.483.131
XII.4	Operasi dan C25 KORPRI	Terwujudnya kegiatan olahraga dan rekreasi	Persentase jumlah dan kuantitas pertumbuhan nasional	40%	300	INDUSTRI /M.483.131
XIII	PROGRAM BUKINGAN RESORAN MATRA DARAT					
XIII.1	Operasi dan C25 KORPRI	Meningkatnya kinerja dan produktivitas pegawai	Persentase jumlah dan kuantitas pertumbuhan nasional	40%	300	INDUSTRI /M.483.131
XIV	PROGRAM PENGEMBANGAN PENYELIDIKAN, PERUSAHAAN, DAN PENANCIANAN KEARIFAN BUDAYA					
XIV.1	Operasi dan C25 KORPRI	Meningkatnya kinerja dan produktivitas pegawai	Persentase jumlah dan kuantitas pertumbuhan nasional	40%	300	INDUSTRI /M.483.131
XV	PEMERIKSAAN INDUSTRI STRATEGIS JUDING PERALAMAN					
XV.1	Operasi dan C25 KORPRI	Meningkatnya kinerja dan produktivitas pegawai	Persentase jumlah dan kuantitas pertumbuhan nasional	40%	300	INDUSTRI /M.483.131

NO	SISYUWANGI/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PALE TAHUN 2013	
					(6) (MILYAR RUPIAH)	(7) (%)
01	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)
XVI	PROGRAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BANTUAN STRUKTUR PERBATANAN					
XVI.1	Penyediaan Alur data, studi dan dalam negeri	Meningkatkan prosedur dan tata cara studi dalam negeri	Jumlah dan jenis studi yang dilaksanakan oleh instansi dalam negeri	43,7%	1.000,0	200,00%
XVII	PROGRAM PENYERBUKUTAN RUMAH PRASANA POLISI					
XVII.1	Penyediaan alat, perlengkapan, dan peralatan di dalam negeri	Meningkatkan kemampuan dan mutu perlengkapan dalam negeri	Jumlah dan jenis produk industri dalam negeri yang diproduksi secara lokal, validasi tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas	1 paket	150,0	100,0%
XVII.2	Penyediaan Di-type	Meningkatkan kemampuan dan mutu perlengkapan dalam negeri	Jumlah produk yang diproduksi	3	0,0	0,0%
XVIII	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBATANAN NASIONAL					
XVIII.1	Penyediaan alat, perlengkapan, dan peralatan	Meningkatkan kemampuan dan mutu perlengkapan nasional	Jumlah dan jenis produk industri nasional yang diproduksi secara lokal, validasi tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas	2 perusahaan	5,0	100,0%
XIX	PROGRAM PERUMAHAN KESYUWANGI BANTUAN STRUKTUR PERBATANAN					
XIX.1	Penyediaan alat, perlengkapan, dan peralatan	Meningkatkan kemampuan dan mutu perlengkapan nasional	Jumlah dan jenis produk industri nasional yang diproduksi secara lokal, validasi tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas	1 paket	1,4	100,0%

IL-132

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PADA TAHUN 2013 (MILYAR RUPIAH)	DISTRIBUSI PELAKSANA
		(4)	(5)	(6)	(7)	
XX	PROGRAM PENINGKATAN KEBERHASILAN BIDANG PUBLIK HUKUM					
XX.1	Meningkatkan kemampuan keadilan dan kepastian hukum	(4)	Terdapat peningkatan dalam kualitas pelayanan publik	12 kali	2,275	KEMKUMHAM
XX.2	Meningkatkan keadilan dan kepastian hukum		Terdapat peningkatan dalam kualitas pelayanan publik	12 kali	0,713	KEMKUMHAM
XX.3	Meningkatkan keadilan dan kepastian hukum		Terdapat peningkatan dalam kualitas pelayanan publik	12 kali	8,7	
XX.4	Meningkatkan keadilan dan kepastian hukum		Terdapat peningkatan dalam kualitas pelayanan publik	12 kali	2,07	

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAJAK TAHUN 2013 (MILYAR RUPIAH)	DISTRIBUSI PELAKSANA
XX.E	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan Sampainya dan Kualitas Aspal	(4)	(4) Jumlah Ruang Koordinasi Bina Lahan dan Zonasi yang dilaksanakan Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindakan teknis Koordinasi Pemasokan Perumahan Kawasan DUIT dan awal EMP	12	1,4	(7)
XX.F	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Jumlah Ruang Koordinasi Bina Lahan dan Zonasi yang dilaksanakan	12	1,4	(7)
XX.G	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Jumlah Ruang Koordinasi Bina Lahan dan Zonasi yang dilaksanakan	12	1,4	(7)
XX.H	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Jumlah Ruang Koordinasi Bina Lahan dan Zonasi yang dilaksanakan	12	1,4	(7)
XX.I	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Jumlah Ruang Koordinasi Bina Lahan dan Zonasi yang dilaksanakan	12	1,4	(7)
XX.J	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Jumlah Ruang Koordinasi Bina Lahan dan Zonasi yang dilaksanakan	12	1,4	(7)
XX.K	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Jumlah Ruang Koordinasi Bina Lahan dan Zonasi yang dilaksanakan	12	1,4	(7)
XX.L	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Jumlah Ruang Koordinasi Bina Lahan dan Zonasi yang dilaksanakan	12	1,4	(7)
XX.M	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Jumlah Ruang Koordinasi Bina Lahan dan Zonasi yang dilaksanakan	12	1,4	(7)
XX.N	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Jumlah Ruang Koordinasi Bina Lahan dan Zonasi yang dilaksanakan	12	1,4	(7)
XX.O	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Jumlah Ruang Koordinasi Bina Lahan dan Zonasi yang dilaksanakan	12	1,4	(7)
XX.P	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Jumlah Ruang Koordinasi Bina Lahan dan Zonasi yang dilaksanakan	12	1,4	(7)
XX.Q	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Jumlah Ruang Koordinasi Bina Lahan dan Zonasi yang dilaksanakan	12	1,4	(7)
XX.R	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Jumlah Ruang Koordinasi Bina Lahan dan Zonasi yang dilaksanakan	12	1,4	(7)
XX.S	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Jumlah Ruang Koordinasi Bina Lahan dan Zonasi yang dilaksanakan	12	1,4	(7)
XX.T	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Jumlah Ruang Koordinasi Bina Lahan dan Zonasi yang dilaksanakan	12	1,4	(7)
XX.U	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Jumlah Ruang Koordinasi Bina Lahan dan Zonasi yang dilaksanakan	12	1,4	(7)
XX.V	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Jumlah Ruang Koordinasi Bina Lahan dan Zonasi yang dilaksanakan	12	1,4	(7)
XX.W	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Jumlah Ruang Koordinasi Bina Lahan dan Zonasi yang dilaksanakan	12	1,4	(7)
XX.X	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Jumlah Ruang Koordinasi Bina Lahan dan Zonasi yang dilaksanakan	12	1,4	(7)
XX.Y	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Jumlah Ruang Koordinasi Bina Lahan dan Zonasi yang dilaksanakan	12	1,4	(7)
XX.Z	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Kepercayaan Masyarakat tentang Kecepatan dan Kualitas Aspal	Jumlah Ruang Koordinasi Bina Lahan dan Zonasi yang dilaksanakan	12	1,4	(7)

IL-134

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAJAK TAHUN 2013 (MILYAR RUPIAH)	DISTRIBUSI PELAKSANA
		(4)	(5)	(6)	(7)	
XXI	Peningkatan Kualitas dan Sempurna Sistem Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Kelangkaan Listrik Negara dan Transmisi		(4) Terdapatnya sistem yang dapat mengoptimalkan kinerja sistem transmisi nasional Terdapatnya sistem yang dapat mengoptimalkan kinerja sistem transmisi regional Terdapatnya penyediaan pemeliharaan preventif, korektif dan insidental (preventive, corrective and maintenance)	12 kali 12 kali		
XXII	Konektivitas dan layanan internet	(4) Terdapatnya layanan internet yang dapat meningkatkan produktivitas	(5) Terdapatnya layanan internet yang dapat meningkatkan produktivitas Terdapatnya layanan internet yang dapat meningkatkan produktivitas Terdapatnya layanan internet yang dapat meningkatkan produktivitas Terdapatnya layanan internet yang dapat meningkatkan produktivitas	12 75%	0,733	KPS/PRKD DITJUKHAM
XXIII	Peningkatan kemampuan iptek untuk penguatan sistem inovasi nasional		(4) Terdapatnya sistem yang dapat meningkatkan kemampuan iptek untuk penguatan sistem inovasi nasional	1 2	5,6	KIPF
XXIV	Program pengembangan dan penerapan teknologi		(4) Terdapatnya program pengembangan dan penerapan teknologi	1	1,8	BIPPT
XXV	Program peningkatan dan pemeliharaan RMI		(4) Terdapatnya program peningkatan dan pemeliharaan RMI	1		

NO	SISTEM INITI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAJAK TAHUN 2013 (MILYAR RUPIAH)	
					(6)	(7)
XXV.1	Kegiatan konservasi DAM	(4) Peningkatan konservasi dan perbaikan mutu lingkungan pada kawasan DAS yang terdampak pembangunan DAM dan pembangunan sumber daya perikanan yang berkelanjutan pada kawasan DAS yang terdampak DAM	(5) Tumbuh kepesertaan program dalam rangka konservasi DAS	14 Mei-20/2013	2,75	Kamuhulu Pany
			(5) 81 Busi dan 10 buah yang terdampak pembangunan DAM yang terdampak DAM			
XXV.2	Kegiatan rehabilitasi DAS	(4) Peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam rehabilitasi DAS	(5) Tumbuh angka partisipasi rehabilitasi DAS	3 dan 30	2,75	Kamuhulu Pany
			(5) 4			
			(5) 7			
			(5) 8			
XXV.3	Kegiatan Desentralisasi	(4) Peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan DAS	(5) Tumbuh angka partisipasi desentralisasi DAS	15	2,1	Kamuhulu Pany
			(5) 150			
XXV.4	Kegiatan rehabilitasi DAS	(4) Peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam rehabilitasi DAS	(5) Tumbuh angka partisipasi rehabilitasi DAS	30	1,6	Kamuhulu Pany
			(5) 30			

IL-136

NO	SISYUWAKU/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PALE. TAHUN 2013 (MILYAR RUPIAH)	DISTRIBUSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
XXVI	PROGRAM PENYIUKAN DAN PELATIHAN APARATUR MAHKAMAH AGUNG	berbagai tingkat	jumlah akses ke internet dan akses ke e-mail	3500		
XXVII	PROGRAM PENYIUKAN DAN PELATIHAN APARATUR MAHKAMAH AGUNG	Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial aparaturnya	Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial aparaturnya	100 orang	26	MA-RI
XXVIII	PROGRAM PENYIUKAN DAN PELATIHAN APARATUR MAHKAMAH AGUNG	Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial aparaturnya	Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial aparaturnya	100 orang		
XXIX	PROGRAM PENYIUKAN DAN PELATIHAN APARATUR MAHKAMAH AGUNG	Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial aparaturnya	Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial aparaturnya	100 orang	11,3	MA-RI
XXX	PROGRAM PENYIUKAN DAN PELATIHAN APARATUR MAHKAMAH AGUNG	Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial aparaturnya	Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial aparaturnya	100 orang		
XXXI	PROGRAM PENYIUKAN DAN PELATIHAN APARATUR MAHKAMAH AGUNG	Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial aparaturnya	Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial aparaturnya	100 orang	51,2	MA-RI

NO	SISYUWAN INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2012	PADA TAHUN 2012 (MILYAR RUPIAH)	INDUSTRI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
XXX	PROGRAM PEMBERANTARAN NASAJUMPAH PERADILAN SELAMA					
XXX.1	Pembinaan Masyarakat Desa dan Kecamatan yang melaksanakan program pemberantasan nasajumpa	(4)	<p>dan 24.000.000,00, perbaikan lapangan, dan perbaikan HSP</p> <p>jumlah pelaksanaan pekerjaan yang ditargetkan 2.210.100 pekerjaan tahun 2012</p> <p>jumlah persentase beban perantara Ekuitas, FK dan GPM yang diharapkan dapat tercapai 1.780 persentase</p> <p>jumlah pelaksanaan kegiatan yang dapat dilaksanakan setiap di lapangan 38.000.000,00</p>			
XXX.2	Pembinaan Masyarakat Desa dan Kecamatan yang melaksanakan program pemberantasan nasajumpa		<p>jumlah persentase beban perantara Ekuitas, FK dan GPM yang diharapkan dapat tercapai 1.780 persentase</p> <p>jumlah pelaksanaan kegiatan yang dapat dilaksanakan setiap di lapangan 38.000.000,00</p>			
XXX	PROGRAM PEMBERANTARAN NASAJUMPAH PERADILAN SELAMA					
XXX.1	Pembinaan Masyarakat Desa dan Kecamatan yang melaksanakan program pemberantasan nasajumpa		<p>jumlah persentase beban perantara Ekuitas, FK dan GPM yang diharapkan dapat tercapai 1.780 persentase</p> <p>jumlah pelaksanaan kegiatan yang dapat dilaksanakan setiap di lapangan 38.000.000,00</p>			
XXX.2	Pembinaan Masyarakat Desa dan Kecamatan yang melaksanakan program pemberantasan nasajumpa		<p>jumlah persentase beban perantara Ekuitas, FK dan GPM yang diharapkan dapat tercapai 1.780 persentase</p> <p>jumlah pelaksanaan kegiatan yang dapat dilaksanakan setiap di lapangan 38.000.000,00</p>			

NO	URUTAN INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PAJIL TAHUN 2013 (MILYAR RUPIAH)	ESTIMASI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
XXVII	Desain dan Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dan Tujuan Kinerja Strategis Lainnya di Setiap Sektor dan Daerah	Indikator Kinerja Utama dan Tujuan Kinerja Utama yang dikembangkan oleh setiap departemen dan layanan	Indikator kinerja utama yang dikembangkan oleh setiap departemen dan layanan	1.5 milyar	3.617	Kepolisian RI
XXVIII	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS UTAMA LAINNYA BERKASUSAN RI					
XXVIII.1	Kelembagaan, Pengembangan Pelayanan, Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi, Tindakan Kelembagaan, Tindakan	Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik	Indikator kinerja utama yang dikembangkan oleh setiap departemen dan layanan	1.1 milyar	4.8	Kesegelup
XXIX	PROGRAM PEMBENTANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI					
XXIX.1	Pengawasan, Tindakan Pencegahan, Tindakan	Pencegahan, Penindakan dan Pemantauan	Indikator kinerja utama yang dikembangkan oleh setiap departemen dan layanan	75	8.1	KPE
XXIX.2	Pengawasan, Tindakan	Pencegahan, Penindakan dan Pemantauan	Indikator kinerja utama yang dikembangkan oleh setiap departemen dan layanan	70	6	KPK

JL. 140

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN	PAJAK TAHUN	
				2013	2013	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
XXIII.2	Telera Kemandirian dan Berkualitas Masyarakat	Pemerintahan dan Masyarakat	Persepsi yang di tingkatkan ke Pengabdian Tipikal Persepsi: kesadaran publik akan dan keadilan	55 100%	17.4	RPK
XXIII.3	Keterampilan Masyarakat Berkelompok	Konsep, Perencanaan	Kepercayaan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki masyarakat RPK	67	26.6	RPE
XXIII.5	Kelembagaan LUDKIN	Pembangunan LUDKIN	Kepercayaan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki masyarakat RPK	706 30.000	0.00	RPK
XXIII.6	Kelembagaan LUDKIN	Pembangunan LUDKIN	Kepercayaan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki masyarakat RPK	574 300	4.1	RPK
XXIII.7	Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kemampuan masyarakat	Pembangunan, sosialisasi dan komunikasi	Kepercayaan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki masyarakat RPK	110	35	RPK
XXIII.8	Kelembagaan LUDKIN	Pembangunan LUDKIN	Kepercayaan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki masyarakat RPK	48 75	1.3	RPK

MATRIS BUKU I RKP 2013

PRIORITAS LAINNYA	
Tema Prioritas	
Panggung Jawab	
Dekeksasusana elegans	
DIDANG PEREKONOMIAN	
-	
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	
Kementerian, Badan/Lembaga, Kementerian, Badan/PT, BUMN/PT, Kementerian, Badan/Lembaga	

NO	SUBSTANSI INTI KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PANG. TAHUN 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
1	PROMOSI BUKU INDIKSI PEREKONOMIAN A. Sasaran: masyarakat umum B. Sasaran: mahasiswa/mahasiswa yang aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan C. Sasaran: mahasiswa/mahasiswa yang aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1	Penyuluhan dan Edukasi Tentang Buku Indeksi	Menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada masyarakat luas	Tumbuhnya minat masyarakat terhadap buku	4	4.0	Universitas
1.2	Kualifikasi dan Penyuluhan Edukasi K. Sasaran: Mahasiswa	Menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada masyarakat luas	Tumbuhnya minat masyarakat terhadap buku	4	4.0	Universitas
1.3	Kualifikasi dan Penyuluhan Edukasi K. Sasaran: Mahasiswa	Menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada masyarakat luas	Tumbuhnya minat masyarakat terhadap buku	4	4.0	Universitas
1.4	Kualifikasi dan Penyuluhan Edukasi K. Sasaran: Mahasiswa	Menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada masyarakat luas	Tumbuhnya minat masyarakat terhadap buku	4	4.0	Universitas
1.5	Kualifikasi dan Penyuluhan Edukasi K. Sasaran: Mahasiswa	Menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada masyarakat luas	Tumbuhnya minat masyarakat terhadap buku	4	4.0	Universitas
1.6	Kualifikasi dan Penyuluhan Edukasi K. Sasaran: Mahasiswa	Menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada masyarakat luas	Tumbuhnya minat masyarakat terhadap buku	4	4.0	Universitas
1.7	Kualifikasi dan Penyuluhan Edukasi K. Sasaran: Mahasiswa	Menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada masyarakat luas	Tumbuhnya minat masyarakat terhadap buku	4	4.0	Universitas
1.8	Kualifikasi dan Penyuluhan Edukasi K. Sasaran: Mahasiswa	Menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada masyarakat luas	Tumbuhnya minat masyarakat terhadap buku	4	4.0	Universitas
1.9	Kualifikasi dan Penyuluhan Edukasi K. Sasaran: Mahasiswa	Menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada masyarakat luas	Tumbuhnya minat masyarakat terhadap buku	4	4.0	Universitas
1.10	Kualifikasi dan Penyuluhan Edukasi K. Sasaran: Mahasiswa	Menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada masyarakat luas	Tumbuhnya minat masyarakat terhadap buku	4	4.0	Universitas

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN POKOK	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PENCAPAIAN 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kerjasama		<p>“Simpkater” kerjasama dengan instansi lain “Serasa” dalam rangka melaksanakan program Jember SMU (Jember Smart University) Jember Smart Park (Jember Smart Park) sebagai destinasi wisata budaya dan rekreasi</p>	<p>6 1.000 8 7 1</p>	<p>1.15 5.70 3.0 12.81 3.5</p>	
14	Revisi hasil dan penyusunan dan penerapan kebijakan Manajemen Kinerja Layanan	<p>“Mencapai dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan pelanggan, meningkatkan nilai pada tahun 2013”</p>	<p>Kecepatan layanan “Pelayanan” Berkualitas “Pelayanan” dan “Pelayanan” Jumlah SMU (Jember Smart University) Jumlah “Pelayanan” dan “Pelayanan”</p>	<p>100%</p>	<p>1.001 1.001 12.2</p>	<p>Sebagai mitra</p>
15	Revisi hasil dan penyusunan dan penerapan kebijakan Manajemen Pelayanan	<p>“Mencapai dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan pelanggan, meningkatkan nilai pada tahun 2013”</p>	<p>Kecepatan layanan “Pelayanan” Berkualitas “Pelayanan” dan “Pelayanan” Jumlah SMU (Jember Smart University) Jumlah “Pelayanan” dan “Pelayanan”</p>	<p>100%</p>	<p>1.001 1.001 12.2</p>	<p>Sebagai mitra</p>
16	Revisi hasil dan penyusunan dan penerapan kebijakan Manajemen Pelayanan	<p>“Mencapai dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan pelanggan, meningkatkan nilai pada tahun 2013”</p>	<p>Kecepatan layanan “Pelayanan” Berkualitas “Pelayanan” dan “Pelayanan” Jumlah SMU (Jember Smart University) Jumlah “Pelayanan” dan “Pelayanan”</p>	<p>100%</p>	<p>1.001 1.001 12.2</p>	<p>Sebagai mitra</p>
17	Revisi hasil dan penyusunan dan penerapan kebijakan Manajemen Pelayanan	<p>“Mencapai dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan pelanggan, meningkatkan nilai pada tahun 2013”</p>	<p>Kecepatan layanan “Pelayanan” Berkualitas “Pelayanan” dan “Pelayanan” Jumlah SMU (Jember Smart University) Jumlah “Pelayanan” dan “Pelayanan”</p>	<p>100%</p>	<p>1.001 1.001 12.2</p>	<p>Sebagai mitra</p>

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PARA-TALICIA 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri	Kelembagaan yang memiliki Mekanisme yang Efektif	Partisipasi dalam kegiatan nasional dan internasional	12	5,5	Sektor perantara
			Jumlah peserta dalam kegiatan nasional dan internasional	10	6,5	
			Meliputinya dalam kegiatan nasional dan internasional	500	5,5	
			Jumlah SNI	4	3,7	
			Jumlah peserta dalam kegiatan nasional dan internasional	1	2,0	
19	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri	Perkembangan industri Maritim, Keditransi dan alat Perikanan	Jumlah peserta dalam kegiatan nasional dan internasional	4	14,3	Sektor perantara
			Jumlah peserta dalam kegiatan nasional dan internasional	1		
			Jumlah peserta dalam kegiatan nasional dan internasional	3		
			Jumlah peserta dalam kegiatan nasional dan internasional	3		
20	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri	Perkembangan industri Elektronik, Listrik, Telekomunikasi dan Telekomunikasi	Jumlah peserta dalam kegiatan nasional dan internasional	3	1,33	Sektor perantara
			Meliputinya dalam kegiatan nasional dan internasional	100		
			Jumlah peserta dalam kegiatan nasional dan internasional	15		
			Jumlah peserta dalam kegiatan nasional dan internasional	3		
			Meliputinya dalam kegiatan nasional dan internasional	1		
21	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri	Perkembangan industri Teknologi dan Industri	Jumlah peserta dalam kegiatan nasional dan internasional	15		
			Jumlah peserta dalam kegiatan nasional dan internasional	4	7,1	Sektor perantara
22	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Industri	Perkembangan industri Teknologi dan Industri	Jumlah peserta dalam kegiatan nasional dan internasional	0	7,1	Sektor perantara

IL-144

NO	SUBSTANSI UTUK/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PERKUTAHAN 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
114	Pencelahan dan Pengumpulan Teknologi Karir, Karir dan Plastik	Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang karir dan plastik	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	2 1 11 2 10	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen
115	Pencelahan dan Pengumpulan Teknologi Karir, Karir dan Plastik	Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang karir dan plastik	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	10 6 0 2 3	10,0 1,5 1,5 1,5 1,5	Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen
116	Pencelahan dan Pengumpulan Teknologi Karir, Karir dan Plastik	Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang karir dan plastik	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	2 2 2 2 2	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen
117	Pencelahan dan Pengumpulan Teknologi Karir, Karir dan Plastik	Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang karir dan plastik	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	2 2 2 2 2	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen
118	Pencelahan dan Pengumpulan Teknologi Karir, Karir dan Plastik	Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang karir dan plastik	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	2 1 3 3 3	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen
119	Pencelahan dan Pengumpulan Teknologi Karir, Karir dan Plastik	Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang karir dan plastik	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	3 3 3 3 3	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen Ditjen

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PENCAPAIAN 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
121	Peningkatan Daya Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CASN) Wilayah II	CASN secara efektif dan efisien di semua lingkungan Terdapat peningkatan jumlah indikator dari data penerima jabatan	Peningkatan jumlah penerimaan jabatan	3		
122	Peningkatan Daya Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CASN) Wilayah I	CASN secara efektif dan efisien di semua lingkungan Terdapat peningkatan jumlah indikator dari data penerima jabatan	Peningkatan jumlah penerimaan jabatan	3	20,9	Kantor Pusat
123	Peningkatan Daya Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CASN) Wilayah II	CASN secara efektif dan efisien di semua lingkungan Terdapat peningkatan jumlah indikator dari data penerima jabatan	Peningkatan jumlah penerimaan jabatan	40	97,5	Kantor Pusat
124	Peningkatan Daya Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CASN) Wilayah I	CASN secara efektif dan efisien di semua lingkungan Terdapat peningkatan jumlah indikator dari data penerima jabatan	Peningkatan jumlah penerimaan jabatan	1	0,1	Kantor Pusat
II	Peningkatan Daya Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CASN) Wilayah II	CASN secara efektif dan efisien di semua lingkungan Terdapat peningkatan jumlah indikator dari data penerima jabatan	Peningkatan jumlah penerimaan jabatan	3		
III	Peningkatan Daya Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CASN) Wilayah I	CASN secara efektif dan efisien di semua lingkungan Terdapat peningkatan jumlah indikator dari data penerima jabatan	Peningkatan jumlah penerimaan jabatan	37	313,75	Kantor Pusat

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PARE-TALICIA 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Peningkatan kemampuan profesional guru (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat)	Guru yang berpartisipasi dalam penelitian, penelitian, dan pengabdian masyarakat	Peningkatan jumlah guru yang berpartisipasi dalam penelitian, penelitian, dan pengabdian masyarakat	50		
			Guru yang berpartisipasi dalam penelitian, penelitian, dan pengabdian masyarakat	70		
			Guru yang berpartisipasi dalam penelitian, penelitian, dan pengabdian masyarakat	45		
			Guru yang berpartisipasi dalam penelitian, penelitian, dan pengabdian masyarakat	9		
			Guru yang berpartisipasi dalam penelitian, penelitian, dan pengabdian masyarakat	17		
B.2	Peningkatan kemampuan profesional guru (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat)	Guru yang berpartisipasi dalam penelitian, penelitian, dan pengabdian masyarakat	Peningkatan jumlah guru yang berpartisipasi dalam penelitian, penelitian, dan pengabdian masyarakat	50	860	Kemampuan Profesional
			Guru yang berpartisipasi dalam penelitian, penelitian, dan pengabdian masyarakat	75		
			Guru yang berpartisipasi dalam penelitian, penelitian, dan pengabdian masyarakat	25		
			Guru yang berpartisipasi dalam penelitian, penelitian, dan pengabdian masyarakat	75		
			Guru yang berpartisipasi dalam penelitian, penelitian, dan pengabdian masyarakat	3		
			Guru yang berpartisipasi dalam penelitian, penelitian, dan pengabdian masyarakat	0		
B.3	Kelembagaan (kegiatan penelitian, penelitian, dan pengabdian masyarakat)	Kelembagaan (kegiatan penelitian, penelitian, dan pengabdian masyarakat)	Kelembagaan (kegiatan penelitian, penelitian, dan pengabdian masyarakat)	75	50	Kemampuan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
			Kelembagaan (kegiatan penelitian, penelitian, dan pengabdian masyarakat)	75		

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PENCAPAIAN 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
II.1	Peningkatan mutu, peran, dan kontribusi organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, baik di tingkat rumah sakit maupun di tingkat masyarakat.	Terlaksananya peningkatan mutu layanan kesehatan di tingkat rumah sakit dan di tingkat masyarakat, baik di tingkat rumah sakit maupun di tingkat masyarakat.	Sesuai dengan Rencana Kerja Nasional Kesehatan dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI 2011-2015.	75		
II.2	Peningkatan mutu, peran, dan kontribusi organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, baik di tingkat rumah sakit maupun di tingkat masyarakat.	Terlaksananya peningkatan mutu layanan kesehatan di tingkat rumah sakit dan di tingkat masyarakat, baik di tingkat rumah sakit maupun di tingkat masyarakat.	Peningkatan mutu layanan kesehatan di tingkat rumah sakit dan di tingkat masyarakat, baik di tingkat rumah sakit maupun di tingkat masyarakat.	20	1.500	Kementerian Kesehatan
III	Peningkatan mutu, peran, dan kontribusi organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, baik di tingkat rumah sakit maupun di tingkat masyarakat.	Terlaksananya peningkatan mutu layanan kesehatan di tingkat rumah sakit dan di tingkat masyarakat, baik di tingkat rumah sakit maupun di tingkat masyarakat.	Peningkatan mutu layanan kesehatan di tingkat rumah sakit dan di tingkat masyarakat, baik di tingkat rumah sakit maupun di tingkat masyarakat.	3000	1.152	Kementerian Kesehatan
III.1	Peningkatan mutu, peran, dan kontribusi organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, baik di tingkat rumah sakit maupun di tingkat masyarakat.	Terlaksananya peningkatan mutu layanan kesehatan di tingkat rumah sakit dan di tingkat masyarakat, baik di tingkat rumah sakit maupun di tingkat masyarakat.	Peningkatan mutu layanan kesehatan di tingkat rumah sakit dan di tingkat masyarakat, baik di tingkat rumah sakit maupun di tingkat masyarakat.	1.000	1.000	Kementerian Kesehatan
III.2	Peningkatan mutu, peran, dan kontribusi organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, baik di tingkat rumah sakit maupun di tingkat masyarakat.	Terlaksananya peningkatan mutu layanan kesehatan di tingkat rumah sakit dan di tingkat masyarakat, baik di tingkat rumah sakit maupun di tingkat masyarakat.	Peningkatan mutu layanan kesehatan di tingkat rumah sakit dan di tingkat masyarakat, baik di tingkat rumah sakit maupun di tingkat masyarakat.	1.000	1.000	Kementerian Kesehatan

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PARA-TALICN 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
II.5	Pelatihan Berbasis Sistem Asesmen Kinerja (SABK) Berbasis Program Pelatihan	1. Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi bagi para pejabat eselon II dan III 2. Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi bagi para pejabat eselon IV dan V	1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi 2. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi yang terdistribusi ke seluruh provinsi	50 134 220.000	100.000	Sekretariat
II.6	Peningkatan Kualitas Kedinasan, Sarana dan Perbaikan Sistem Administrasi, Pelatihan dan Evaluasi	1. Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi bagi para pejabat eselon II dan III 2. Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi bagi para pejabat eselon IV dan V	1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi 2. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi yang terdistribusi ke seluruh provinsi	50	1.302,79	Sekretariat
II.7	Peningkatan Peningkatan Peningkatan Luar Negeri	1. Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi bagi para pejabat eselon II dan III 2. Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi bagi para pejabat eselon IV dan V	1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi 2. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi yang terdistribusi ke seluruh provinsi	50.000	552,92	Sekretariat
II.8	Peningkatan Kualitas Kedinasan, Sarana dan Perbaikan Sistem Administrasi, Pelatihan dan Evaluasi	1. Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi bagi para pejabat eselon II dan III 2. Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi bagi para pejabat eselon IV dan V	1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi 2. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi yang terdistribusi ke seluruh provinsi	50.000 808	314,17	Sekretariat
II.9	Peningkatan Kualitas Kedinasan, Sarana dan Perbaikan Sistem Administrasi, Pelatihan dan Evaluasi	1. Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi bagi para pejabat eselon II dan III 2. Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi bagi para pejabat eselon IV dan V	1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi 2. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi yang terdistribusi ke seluruh provinsi	50.000 100.000	75.000	Sekretariat
II.10	Peningkatan Kualitas Kedinasan, Sarana dan Perbaikan Sistem Administrasi, Pelatihan dan Evaluasi	1. Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi bagi para pejabat eselon II dan III 2. Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi bagi para pejabat eselon IV dan V	1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi 2. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi yang terdistribusi ke seluruh provinsi	100.000 100.000	33,156 53,132	Sekretariat

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PARA TALEN 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.11	Pendidikan: Peningkatan Kualitas dan Jumlah Sarana	Terdapat peningkatan dalam jumlah dan kualitas sarana pendidikan yang berkualitas, khususnya di kawasan pedesaan yang terdampak bencana, peningkatan jumlah sarana pendidikan dan peningkatan	Jumlah proyek pembangunan di bidang pendidikan	80	2.12.342.000	Kemendiknas
01.11	Pendidikan: Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Warga Masyarakat	Terdapat peningkatan dalam jumlah dan kualitas sarana pendidikan yang berkualitas, khususnya di kawasan pedesaan yang terdampak bencana, peningkatan jumlah sarana pendidikan dan peningkatan	Jumlah proyek pembangunan di bidang pendidikan	90	333.5	Kemendiknas
01.11	Pendidikan: Peningkatan Kualitas dan Jumlah Sarana	Terdapat peningkatan dalam jumlah dan kualitas sarana pendidikan yang berkualitas, khususnya di kawasan pedesaan yang terdampak bencana, peningkatan jumlah sarana pendidikan dan peningkatan	Jumlah proyek pembangunan di bidang pendidikan	76	01.215.014	Kemendiknas
01.13	Pendidikan: Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Warga Masyarakat	Terdapat peningkatan dalam jumlah dan kualitas sarana pendidikan yang berkualitas, khususnya di kawasan pedesaan yang terdampak bencana, peningkatan jumlah sarana pendidikan dan peningkatan	Jumlah proyek pembangunan di bidang pendidikan	113	106.658.091	Kemendiknas

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PARTISIPAN 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.14	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Jumlah Pengusaha Kecil dan Menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (SKKM) bertambah jumlahnya 2. Jumlah Pegawai dan karyawan pada usaha mikro, kecil, dan menengah bertambah	80 10 laporan 20 laporan 20 laporan 3 laporan 10 konferensi dan forum 19 seminar 3 SMPK	1.2.101.00	Keproses
01.15	Salah satu manfaat dari Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Jumlah Pengusaha Kecil dan Menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (SKKM) bertambah jumlahnya 2. Jumlah Pegawai dan karyawan pada usaha mikro, kecil, dan menengah bertambah	80 10 laporan 20 laporan 20 laporan 3 laporan 10 konferensi dan forum 19 seminar 3 SMPK	1.2.101.00	Keproses
01.16	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Jumlah Pengusaha Kecil dan Menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (SKKM) bertambah jumlahnya 2. Jumlah Pegawai dan karyawan pada usaha mikro, kecil, dan menengah bertambah	80 10 laporan 20 laporan 20 laporan 3 laporan 10 konferensi dan forum 19 seminar 3 SMPK	1.2.101.00	Keproses

NO	SUBSTANSI UTUK KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PARE-TALICAN 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
01	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.17	Pengembangan literasi dan literasi, arts Festival, SDM dan publikasi, dan kampanye literasi	Terdekat dengan budaya Jidin, penelitian dan pengembangan	<p>1. Jumlah kegiatan publikasi dan kampanye literasi yang dilaksanakan</p> <p>2. Jumlah kegiatan festival dan publikasi yang dilaksanakan</p> <p>3. Jumlah kegiatan literasi yang dilaksanakan</p> <p>4. Jumlah kegiatan literasi yang dilaksanakan</p> <p>5. Jumlah kegiatan literasi yang dilaksanakan</p> <p>6. Jumlah kegiatan literasi yang dilaksanakan</p> <p>7. Jumlah kegiatan literasi yang dilaksanakan</p> <p>8. Jumlah kegiatan literasi yang dilaksanakan</p> <p>9. Jumlah kegiatan literasi yang dilaksanakan</p> <p>10. Jumlah kegiatan literasi yang dilaksanakan</p> <p>11. Jumlah kegiatan literasi yang dilaksanakan</p> <p>12. Jumlah kegiatan literasi yang dilaksanakan</p> <p>13. Jumlah kegiatan literasi yang dilaksanakan</p> <p>14. Jumlah kegiatan literasi yang dilaksanakan</p> <p>15. Jumlah kegiatan literasi yang dilaksanakan</p> <p>16. Jumlah kegiatan literasi yang dilaksanakan</p> <p>17. Jumlah kegiatan literasi yang dilaksanakan</p> <p>18. Jumlah kegiatan literasi yang dilaksanakan</p> <p>19. Jumlah kegiatan literasi yang dilaksanakan</p> <p>20. Jumlah kegiatan literasi yang dilaksanakan</p>	<p>1. 10 kegiatan</p> <p>2. 10 kegiatan</p> <p>3. 10 kegiatan</p> <p>4. 10 kegiatan</p> <p>5. 10 kegiatan</p> <p>6. 10 kegiatan</p> <p>7. 10 kegiatan</p> <p>8. 10 kegiatan</p> <p>9. 10 kegiatan</p> <p>10. 10 kegiatan</p> <p>11. 10 kegiatan</p> <p>12. 10 kegiatan</p> <p>13. 10 kegiatan</p> <p>14. 10 kegiatan</p> <p>15. 10 kegiatan</p> <p>16. 10 kegiatan</p> <p>17. 10 kegiatan</p> <p>18. 10 kegiatan</p> <p>19. 10 kegiatan</p> <p>20. 10 kegiatan</p>	1,5	Kemendikbud
01.23	Pengembangan sistem dan evaluasi, analisis, penelitian, pengembangan, dan kampanye literasi	Terdekat dengan budaya, penelitian dan pengembangan	<p>1. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>2. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>3. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>4. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>5. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>6. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>7. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>8. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>9. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>10. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>11. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>12. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>13. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>14. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>15. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>16. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>17. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>18. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>19. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>20. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p>	<p>1. 10 kegiatan</p> <p>2. 10 kegiatan</p> <p>3. 10 kegiatan</p> <p>4. 10 kegiatan</p> <p>5. 10 kegiatan</p> <p>6. 10 kegiatan</p> <p>7. 10 kegiatan</p> <p>8. 10 kegiatan</p> <p>9. 10 kegiatan</p> <p>10. 10 kegiatan</p> <p>11. 10 kegiatan</p> <p>12. 10 kegiatan</p> <p>13. 10 kegiatan</p> <p>14. 10 kegiatan</p> <p>15. 10 kegiatan</p> <p>16. 10 kegiatan</p> <p>17. 10 kegiatan</p> <p>18. 10 kegiatan</p> <p>19. 10 kegiatan</p> <p>20. 10 kegiatan</p>	1,7	Kemendikbud
01.24	Pengembangan sistem dan evaluasi, analisis, penelitian, pengembangan, dan kampanye literasi	Terdekat dengan budaya, penelitian dan pengembangan	<p>1. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>2. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>3. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>4. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>5. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>6. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>7. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>8. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>9. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>10. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>11. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>12. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>13. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>14. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>15. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>16. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>17. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>18. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>19. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p> <p>20. Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan</p>	<p>1. 10 kegiatan</p> <p>2. 10 kegiatan</p> <p>3. 10 kegiatan</p> <p>4. 10 kegiatan</p> <p>5. 10 kegiatan</p> <p>6. 10 kegiatan</p> <p>7. 10 kegiatan</p> <p>8. 10 kegiatan</p> <p>9. 10 kegiatan</p> <p>10. 10 kegiatan</p> <p>11. 10 kegiatan</p> <p>12. 10 kegiatan</p> <p>13. 10 kegiatan</p> <p>14. 10 kegiatan</p> <p>15. 10 kegiatan</p> <p>16. 10 kegiatan</p> <p>17. 10 kegiatan</p> <p>18. 10 kegiatan</p> <p>19. 10 kegiatan</p> <p>20. 10 kegiatan</p>	1,9	Kemendikbud

NO	SUBSTANSI UTUK KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PARA-TALIAN 2013 (MILYAR RUPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
IT-33	Pengembangan Sistem Data Keuangan Perbankan Syariah	Meningkatkan sistem informasi keuangan syariah	Terdapat 30 bank syariah yang telah melaksanakan sistem informasi keuangan syariah	4.623	5.17-3	Keuangan
IT-34	Pengembangan Sistem Data Keuangan Syariah	Meningkatkan sistem informasi keuangan syariah	Terdapat 30 bank syariah yang telah melaksanakan sistem informasi keuangan syariah	22.798	2E-33E	Keuangan
IT-35	Pengembangan Sistem Data Keuangan Syariah	Meningkatkan sistem informasi keuangan syariah	Terdapat 30 bank syariah yang telah melaksanakan sistem informasi keuangan syariah	4.127	35-347	Keuangan
IT-36	Pengembangan Sistem Data Keuangan Syariah	Meningkatkan sistem informasi keuangan syariah	Terdapat 30 bank syariah yang telah melaksanakan sistem informasi keuangan syariah	5.000	45-7	Keuangan
IT-37	Pengembangan Sistem Data Keuangan Syariah	Meningkatkan sistem informasi keuangan syariah	Terdapat 30 bank syariah yang telah melaksanakan sistem informasi keuangan syariah	4.810	411-377	Keuangan
IV	PELAYANAN DAN PERKULIAHAN TERASERIKAH DAN TERASERIKAH					
IT-38	Pengembangan Sistem Data Keuangan Syariah	Meningkatkan sistem informasi keuangan syariah	Terdapat 30 bank syariah yang telah melaksanakan sistem informasi keuangan syariah	0.000		Keuangan
IT-39	Pengembangan Sistem Data Keuangan Syariah	Meningkatkan sistem informasi keuangan syariah	Terdapat 30 bank syariah yang telah melaksanakan sistem informasi keuangan syariah	15.872	15-872	Keuangan

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PENCAPAIAN 2013 (MELAKUKI ROPLAK)	INSTANSI PELAKSANA
4.17	Kebudayaan Kalimantan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan	(G) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan	(B) Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan	(E) 70%	(A) 100%	(F) Kebudayaan Kalimantan
4.18	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan	(G) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan	(B) Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan	(E) 70%	(A) 100%	(F) Kebudayaan Kalimantan
4.19	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan	(G) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan	(B) Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan	(E) 70%	(A) 100%	(F) Kebudayaan Kalimantan
V	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan	(G) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan	(B) Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan Kebudayaan Kalimantan	(E) 70%	(A) 100%	(F) Kebudayaan Kalimantan

NO	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013	PARTISIPAN 2013 (MILYAR ROPIAH)	INSTANSI PELAKSANA
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.2	Peningkatan kinerja usaha koperasi (27)	Widening of the number of business units (KURUM)	1. Jumlah usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang produktif dan inovatif	5 unit (dari 100 unit) dan 100 unit yang aktif melakukan kegiatan	152,5	Kemahasiswaan
5.3	Pengembangan usaha Usaha Terpadu (11)	Berkembangnya usaha-usaha usaha terpadu (PUTU) (KURUM)	Jumlah usaha-usaha usaha terpadu (PUTU) (KURUM)	15 unit (dari 300 unit)	75,0	Kemahasiswaan
5.4	Peningkatan dan Penguatan Pasca-Skripsi (10)	Berkembangnya pasca-skripsi (KURUM)	Kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi dan tesis	11 unit (dari 100 unit)	4,0	Kemahasiswaan
5.5	Pengembangan dan Informasi Operasional (10)	Tercapainya dan terinformasinya KURUM tentang informasi dan perkembangan (KURUM)	Peningkatan aksesibilitas data dan informasi KURUM	Sistematisasi data dan informasi KURUM dan informasi KURUM	155,0	Kemahasiswaan
5.6	Peningkatan kualitas kegiatan (10)	Berkembangnya kegiatan (KURUM)	Jumlah kegiatan dan KURUM yang dilaksanakan	200 unit (dari 200 unit)	7,0	Kemahasiswaan
5.7	Peningkatan Mutu Mahasiswa (10)	Seluruh mahasiswa (KURUM)	Jumlah mahasiswa KURUM yang memenuhi persyaratan (KURUM)	1.100 mahasiswa	0,3	Kemahasiswaan
5.8	Peningkatan Kualitas (10)	Peningkatan kualitas (KURUM)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	500 kegiatan	8,5	Kemahasiswaan

* Alasan yang tercatat di atas adalah sebagai berikut: 1. Tidak semua mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan.

* Alasan yang tercatat di atas adalah sebagai berikut: 1. Tidak semua mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan.

MATRIKS BUKU I RKP 2013

PRIORITY LAWIYA	BIDANG KEMAJHATERAN KAKAYU
Tema Prioritas	
Tujuan/pengukuran	Mendaki Komunikasi Bidang Kemajhateran Kakaya.
Indikator Sama Dengan	Kemajuan di bidang Kemajhateran Kakaya oleh Bessat KIP, MA, Genselrese Hura

No.	SURSTANSI INTI/ REKORSTRAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2013 (5)	PAGO INDIKATIF 2013 (MILYAKASE)	INSTANSI PELAKSANA (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	• Pelaksanaan ibadah haji yang kerif dan lancar paling lambat pada 2013	Terdapatnya pelaksanaan ibadah haji yang lancar serta yang kerif dan lancar	Pelaksanaan ibadah haji yang kerif dan lancar Pelaksanaan ibadah haji (paling) Jumlah ibadah haji (paling)	33	70,0	Kementerian Agama
2.	• Pembinaan ibadah haji dan haji	Terdapatnya pembinaan ibadah haji dan haji	Pelaksanaan ibadah haji yang kerif dan lancar Pelaksanaan ibadah haji (paling)	15	175,7	Kementerian Agama
				15		
				1.500		

JL- 158

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	PILU		
				TARGET 2013	INDIKATIF 2013 (MILYAR RP)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Perbaikan Kualitas Air dan Lingkungan	Terlaksananya pemantauan SPM 100	b. PM10 Eselonisasi Pelayanan Air Minum (Admestasi dan Air Bersih) (orang)	100	400	Kemendagri
2.	Percepatan Ekspansi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, terutama untuk pelayanan dan pemeliharaan dan pemantauan kesehatan bagi semua penduduk	Meningkatkan pelayanan dan pelayanan kesehatan, terutama untuk pelayanan dan pemeliharaan dan pemantauan kesehatan bagi semua penduduk	Indikator pelayanan kesehatan, terutama untuk pelayanan dan pemeliharaan dan pemantauan kesehatan bagi semua penduduk	100	180,4	Kemendagri Kesehatan
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesehatan masyarakat melalui peningkatan efektivitas Fungsi Kelembagaan (FSOB) 						
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Lingkungan Kerja untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas	Terlaksananya peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui upaya-upaya yang efektif dan efisien	Indikator pelayanan kesehatan, terutama untuk pelayanan dan pemeliharaan dan pemantauan kesehatan bagi semua penduduk	100	40	Kemendagri
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Lingkungan Kerja untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas	Terlaksananya peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui upaya-upaya yang efektif dan efisien	Indikator pelayanan kesehatan, terutama untuk pelayanan dan pemeliharaan dan pemantauan kesehatan bagi semua penduduk	100	180,4	Kemendagri
3.	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Lingkungan Kerja untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas	Terlaksananya peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui upaya-upaya yang efektif dan efisien	Indikator pelayanan kesehatan, terutama untuk pelayanan dan pemeliharaan dan pemantauan kesehatan bagi semua penduduk	100	180,4	Kemendagri

• Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 3 tahun
 • Rencana 100 juta wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang berkunjung ke Bali
 • Peningkatan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana perhubungan yang memiliki nilai ekonomi
 • Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemerintah lokal untuk mencapai target omset pelayanan dan kesehatan masyarakat yang dipimpin di kawasan Asia

No.	SUBSTANSI INTI/ KEHUTAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	PILU		
				TARGET 2013	INDIKATIF 2013 (MILYAR RP)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peningkatan Daya Tahan Kehutanan	Meningkatkan daya tahan koefisien perikanan cagar budaya	1. Jumlah wilayah perikanan cagar budaya 2. Jumlah wilayah perikanan cagar budaya perikanan (perikanan)	29	12,35	Kemristihan
2.	Peningkatan EXPD Masyarakat, Budaya, dan Wisata	Mendukung, meningkatkan, dan wisata	Jumlah wisatawan budaya (wisata)	962	Dialokasikan 4,7 19,7	Kemristihan
3.	Peningkatan Kualitas Perikanan	Meningkatkan kualitas perikanan	Jumlah wisatawan budaya (wisata)	4	20,1	Kemristihan
4.	Peningkatan Kualitas dan Inovasi Perikanan	Meningkatkan kualitas dan inovasi perikanan	1. Jumlah wilayah perikanan hasil perikanan perikanan (wisata)	10	25,3	Kemristihan
			2. Jumlah wilayah perikanan hasil perikanan perikanan (wisata)	15		
			3. Jumlah wilayah perikanan hasil perikanan perikanan (wisata)	31		
5.	Peningkatan Perikanan Perikanan dan Wisata	Meningkatkan perikanan perikanan Indonesia perikanan (wisata) dan wisata	1. Jumlah wilayah perikanan hasil perikanan perikanan (wisata) dan wisata	82	167,4	Kemristihan
			2. Jumlah wilayah perikanan hasil perikanan perikanan (wisata) dan wisata	14		
6.	Peningkatan Perikanan Perikanan dan Wisata	Meningkatkan perikanan perikanan dan wisata	Jumlah perikanan perikanan perikanan (wisata)	59	92,5	Kemristihan
7.	Peningkatan Perikanan Perikanan dan Wisata	Meningkatkan perikanan perikanan dan wisata	1. Jumlah wilayah perikanan hasil perikanan perikanan (wisata) dan wisata	26	55,0	Kemristihan
8.	Peningkatan Perikanan Perikanan dan Wisata	Meningkatkan perikanan perikanan dan wisata	2. Jumlah wilayah perikanan hasil perikanan perikanan (wisata) dan wisata	2		
9.	Peningkatan Perikanan Perikanan dan Wisata	Meningkatkan perikanan perikanan dan wisata	1. Jumlah wilayah perikanan hasil perikanan perikanan (wisata) dan wisata	39	100,5	Kemristihan

IL-160

No.	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	PILU		
				TARGET 2013	INDIKATIF 2013 (MILYAR RP)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	Percepatan Perbaikan Kualitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 3. Meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik	1. Jumlah permohonan pelayanan publik yang selesai 2. Jumlah keluhan dan pengaduan pelayanan publik yang selesai 3. Jumlah pengaduan pelayanan publik yang selesai	1.15 154 8 80	56,4	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
10.	Percepatan SDM, Peningkatan dan Efisiensi Birokrasi	Mendukung kapasitas SDM bidang pemerintahan dan administrasi	Jumlah SDM yang terakumulasi di bidang pemerintahan dan administrasi	1.150	93	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
11.	Keunggulan Kompetensi dan Keahlian Pegawai	Mendukung SDM pemerintah yang memiliki kompetensi, profesionalitas, dan integritas	Jumlah SDM yang terakumulasi di bidang pemerintahan dan administrasi	9400	273	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
12.	Keunggulan dan Efisiensi Biaya Pelayanan	Mendukung SDM pemerintah yang memiliki kompetensi, profesionalitas, dan integritas	Jumlah SDM yang terakumulasi di bidang pemerintahan dan administrasi	1.000	2800	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
<p>• Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik</p> <p>1. Peningkatan dan Efisiensi Pelayanan Publik</p> <p>2. Peningkatan dan Efisiensi Pelayanan Publik</p>						
<p>• Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik</p> <p>1. Peningkatan dan Efisiensi Pelayanan Publik</p> <p>2. Peningkatan dan Efisiensi Pelayanan Publik</p>						

No.	SUBSTANSI INTI / KEHUTAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TANGGAP 2013	PALU INDIKATOR 2013 (MILYAR RP)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Penggunaan dan pemertanian lahan pertanian di bidang perikanan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.	Meningkatkan jumlah lahan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan.	Jumlah lahan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan.	5	5,5	Kementerian PP dan PA
4.	Penggunaan dan pemertanian lahan pertanian di bidang kehutanan.	Meningkatkan jumlah lahan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan.	Jumlah lahan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan.	5	5,5	Kementerian PP dan PA
5.	Penggunaan dan pemertanian lahan pertanian di bidang kehutanan.	Meningkatkan jumlah lahan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan.	Jumlah lahan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan.	5	5,5	Kementerian PP dan PA
6.	Penggunaan dan pemertanian lahan pertanian di bidang kehutanan.	Meningkatkan jumlah lahan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan.	Jumlah lahan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan.	5	5,5	Kementerian PP dan PA
7.	Penggunaan dan pemertanian lahan pertanian di bidang kehutanan.	Meningkatkan jumlah lahan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan.	Jumlah lahan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan.	5	5,5	Kementerian PP dan PA

No.	SUBSTANSI INTI / KEMENTERPRIAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2013 (MILYAR RP)	INDIKATOR 2013 (MILYAR RP)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Pengembangan dan pemertanian sumber daya manusia dan peningkatan kinerja perolehan energi	Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil dan meningkatkan kualitas tenaga kerja perolehan energi	Jumlah tenaga kerja terampil yang terampil perolehan energi Jumlah tenaga kerja terampil yang terampil perolehan energi Lulusan pendidikan perolehan energi Lulusan pendidikan perolehan energi	10 15	54	Kementerian PP dan PA
9	Pengembangan dan pemertanian sumber daya manusia dan peningkatan kinerja perolehan energi	Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil dan meningkatkan kualitas tenaga kerja perolehan energi	Jumlah tenaga kerja terampil yang terampil perolehan energi Jumlah tenaga kerja terampil yang terampil perolehan energi Lulusan pendidikan perolehan energi Lulusan pendidikan perolehan energi	10 15	10,2	Kementerian PP dan PA
10	Pengembangan dan pemertanian sumber daya manusia dan peningkatan kinerja perolehan energi	Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil dan meningkatkan kualitas tenaga kerja perolehan energi	Jumlah tenaga kerja terampil yang terampil perolehan energi Jumlah tenaga kerja terampil yang terampil perolehan energi Lulusan pendidikan perolehan energi Lulusan pendidikan perolehan energi	10 15	15,0	Kementerian PP dan PA
11	Pengembangan dan pemertanian sumber daya manusia dan peningkatan kinerja perolehan energi	Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil dan meningkatkan kualitas tenaga kerja perolehan energi	Jumlah tenaga kerja terampil yang terampil perolehan energi Jumlah tenaga kerja terampil yang terampil perolehan energi Lulusan pendidikan perolehan energi Lulusan pendidikan perolehan energi	10 15	473,0	Kementerian PP dan PA
12	Pengembangan dan pemertanian sumber daya manusia dan peningkatan kinerja perolehan energi	Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil dan meningkatkan kualitas tenaga kerja perolehan energi	Jumlah tenaga kerja terampil yang terampil perolehan energi Jumlah tenaga kerja terampil yang terampil perolehan energi Lulusan pendidikan perolehan energi Lulusan pendidikan perolehan energi	10 15	4,0	Kementerian PP dan PA

No.	SUBSTANSI INTI / KEHATI-HATI PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TANGGAP 2013	PILAU INDIKATIF 2013 (MILYAR RP)	INSTANSI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Pelayanan dan kepuasan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	1. Jumlah keluhan masyarakat yang ditanggapi dan pemenuhan	120	95,1	Kementerian
3	Peningkatan kemampuan dan kompetensi	Peningkatan kemampuan dan kompetensi	1. Jumlah peserta pelatihan dan seminar	5000	125,0	Kementerian
4	Peningkatan kemampuan dan kompetensi	Peningkatan kemampuan dan kompetensi	1. Jumlah peserta pelatihan dan seminar	900	10,2	Kementerian
5	Peningkatan kemampuan dan kompetensi	Peningkatan kemampuan dan kompetensi	1. Jumlah peserta pelatihan dan seminar	9000	4,7	Kementerian
6	Peningkatan kemampuan dan kompetensi	Peningkatan kemampuan dan kompetensi	1. Jumlah peserta pelatihan dan seminar	34	7,3	Kementerian
				60		Kementerian

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

IL-164

BAB 1 KEBIJAKAN PENGARUSTAMAAN DAN LINTAS BIDANG

1.1 Pengarustamaan

1.1.1 Pengarustamaan Pembangunan Berkelanjutan

1.1.1.1 Kondisi Saat ini

Pembangunan berkelanjutan merupakan perwujudan proses pembangunan yang menyeluruh dengan memenuhi kebutuhan saat ini maupun di masa mendatang. Dalam mewujudkan keberlanjutan tersebut, diperlukan 3 kunci dasar/ pilar utama pembangunan, yang terpadu dan bersinergi satu dengan lainnya. Pilar tersebut adalah keberlanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk memperkuat sinergi ketiga pilar tersebut, diperlukan aspek kelembagaan yang meliputi kerangka kerja kelembagaan dan kemampuan lembaga/ institusi-institusi yang ada, sebagai jaminan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip pembangunan berkelanjutan telah diterapkan mulai tahun 1997 dengan disusunya *Nasional Sustainable Development Strategy (Agenda 21)*. Dalam dokumen tersebut disebutkan rekomendasi strategi untuk sektor-sektor terkait dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2020. Sebagai tindak lanjut, pembangunan berkelanjutan terus dikembangkan dan dirasa penting untuk menjadi dasar pemikiran dan semangat pembangunan, dengan ditetapkannya kebijakan pengarusutamaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009, RPJMN 2010-2014 serta Rencana Kerja Tahunannya

Dalam RKP 2012, ditekankan strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-environment* untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan. Upaya untuk melaksanakan strategi tersebut adalah dengan mengembangkan konsep/ model pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan atau disebut sebagai *Green Economy*, yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pemahaman konsep *green economy*, kesejahteraan

masyarakat akan tidak menurun/ meningkat secara terus menerus dalam kualitas lingkungan fisik dan sosial yang tidak semakin menurun. Pemerintah Indonesia juga menyatakan bahwa *green economy paradigm* merupakan pembangunan yang berlandaskan pendekatan efisiensi sumberdaya dengan penekanan kepada internalisasi biaya depleksi dan degradasi lingkungan, usaha untuk memerangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja yang layak, dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi (disampaikan dalam pertemuan *Special Session on Governing Council* ke-11 UNEP di Bali). Beberapa inisiatif yang sudah dilakukan untuk menerapkan *green economy/* ekonomi hijau di Indonesia antara lain melalui penerapan efisiensi energi, pemakaian energi terbarukan, penerapan mekanisme pembangunan harsih, subsidi dan pajak lingkungan, peningkatan transportasi massal yang rendah karbon, penerapan penangkapan ikan berkelanjutan, penerapan pola pertanian berkelanjutan, serta pemanfaatan hasil hutan yang lestari.

Upaya lainnya, Indonesia telah mensinergikan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*-MDGs) pada tahun 2015. Indonesia telah menerapkan pembangunan sosial dan setiap tahun melaporkan kemajuan capaiannya. Untuk memastikan pencapaian tujuan MDG, Indonesia juga telah menyusun Roadmap MDG 2010-2015. Selain itu, untuk mempercepat pencapaian tujuan MDGs, yang berarti hertujuan pada peningkatan kesejahteraan, Pemerintah Pusat juga membantu Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah pencapaian MDGs. Langkah-langkah ini akan memungkinkan adanya keselarasan dalam pembangunan sosial dan lingkungan hidup. Pada aspek lingkungan hidup, Indonesia juga telah menyusun langkah-langkah konkrit untuk menurunkan dampak perubahan iklim dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang disahkan dengan landasan hukum berupa Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011, dan juga akan diikuti dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK maksimal 12 (dua belas) bulan sejak Perpres disahkan. Untuk bidang kehutanan, Indonesia telah menyusun draft Rencana Strategis Nasional *Reduction Emission from Forest Degradation and Deforestation* (REDD+). Sementara, untuk pelestarian lingkungan hidup, Indonesia juga telah memiliki *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan*

(IBSAP) 2003-2030 yang penerapannya masih perlu diperkuat dan ditingkatkan. Pada tahun 2012 dilakukan review IBSAP untuk penyesuaian terhadap isu-isu baru yang berkembang.

Dalam tataran internasional, Indonesia berperan aktif dalam forum internasional yang membahas implementasi pembangunan berkelanjutan seperti pertemuan-pertemuan para pihak untuk tiga konvensi hasil pertemuan tingkat tinggi bumi di Rio de Janeiro (UNFCCC, UNCBD, dan UNCCD) serta berbagai pertemuan terkait lainnya. Pada pertemuan *Intergovernmental Preparatory Meeting Commission Sustainable Development (IPM-CSD) ke-19* di New York pada bulan Maret 2011, dibahas enam isu tematik yang perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka pencapaian pembangunan berkelanjutan, yaitu: (i) transportasi (efisiensi energi, peningkatan alternatif mode transportasi yang rendah karbon, peningkatan teknologi, dan sistem transportasi berkelanjutan); (ii) bahan kimia (peran SAICM, sinergi antara the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions, dukungan pendanaan dan teknologi, kebijakan nasional, dan kerjasama dengan para pihak); (iii) manajemen limbah (pentingnya pendekatan 3Rs [reducing, reusing, recycling] dan pengelolaan sampah sebagai salah satu opsi untuk menyelesaikan masalah persampahan, menyediakan peluang kerja, dan menurunkan angka kemiskinan); (iv) pertambangan (kebijakan dan institusi di tingkat nasional untuk menangani dampak sosial dan lingkungan akibat penambangan, peningkatan teknologi bersih, dan efisiensi energi); (v) pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan sebagai salah satu langkah konkrit green economy (membahas proses penyusunan 10th Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production, terutama untuk sektor energi, limbah padat dan limbah B3, air dan sanitasi, serta tata kota dan mobilitasnya); dan (vi) isu lintas bidang yang mengindikasikan banyaknya keterkaitan antar lima thematic issues sebelumnya.

Pada tanggal 16-17 Juli 2011 diselenggarakan *First Workshop Asia-Europe Strategies for Earth Summit 2012* di Yogyakarta, yang merupakan bagian dari 3 (tiga) seri konsultasi informal untuk mendapatkan input dari pemangku kepentingan utama di negara-negara yang menjadi anggota Asia-Europe Meeting (ASEM), dalam rangka mempersiapkan konferensi UNCCD selanjutnya.

Sementara, pada tanggal 19-21 Juli 2011 di Solo, Jawa Tengah Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan *High Level Dialog on Institutional Framework for Sustainable Development* (HLD IFSD). Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendiskusikan berbagai alternatif kerangka kelembagaan yang paling sesuai untuk mengimplementasikan program-program pembangunan berkelanjutan, dan sebagai bahan masukan untuk pertemuan Rio+20 di Rio de Janeiro, Brazil. Dari pertemuan tersebut dihasilkan *Solo Messages* yang berisi 7 butir kesepakatan, yaitu: (i) diperlukan komitmen politik dan komitmen implementasi untuk mencapai tujuan bersama; (ii) pilar ekonomi, sosial dan lingkungan harus dapat saling bekerjasama dengan tujuan yang saling melengkapi; (iii) diperlukan organisasi di tingkat internasional untuk meningkatkan integrasi pembangunan berkelanjutan; (iv) diperlukan dukungan yang terintegrasi untuk strategi di tingkat nasional; (v) diperlukan penguatan UNEP dan opsi lain yang diperlukan; (vi) pengelolaan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal, nasional, dan regional perlu direview dan diperkuat; dan (vii) penambahan pendanaan yang ada dan baru diperlukan untuk memungkinkan implementasi untuk peningkatan kapasitas dan transfer teknologi.

Selanjutnya, Indonesia juga berperan aktif untuk mempersiapkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Berkelanjutan, yang diselenggarakan pada tanggal 13-22 Juni 2012 di Brasil (Rio+20), dengan berperan aktif memberikan masukan posisi Indonesia di dalam *zero draft* UNCED. Presiden RI akan hadir dalam Konferensi Rio+20 tersebut untuk menyampaikan pernyataan (*statement*) politik, yang memfokuskan pada isu-isu: (i) penerapan ekonomi hijau di Indonesia (*green economy*: pembangunan berkelanjutan dan penanggulangan kemiskinan); (ii) kelembagaan (pemungjang pembangunan berkelanjutan-*Institutional Framework for Sustainable Development/IFSD*); dan (iii) penerapan/ pelaksanaan 20 tahun KTT Bumi di Indonesia.

1.1.1.2 Permasalahan dan Sasaran

Secara umum dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunannya. Namun demikian, sampai saat ini, masih diperlukan sistem dan mekanisme yang efektif untuk melakukan pengintegrasian isu pembangunan berkelanjutan tersebut ke dalam implementasi /pelaksanaan program-program pembangunan secara

terjadi dan terarah.

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan perlu diaplikasikan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari di setiap bidang/ aktivitas pembangunan, untuk mengurangi pembangunan yang bertumpu pada peningkatan perekonomian yang didominasi penggunaan sumber daya alam secara berlebihan, penggunaan teknologi yang belum efisien dan tidak ramah lingkungan, yang akan menyebabkan turunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dari sisi lingkungan, walaupun sudah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup, pencemaran dan penurunan kualitas daya dukung lingkungan hidup terus terjadi. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang/ sektor yang telah mengkoordinasikan pengelolaan dampak terhadap lingkungan secara terintegrasi masih perlu terus dilakukan.

Permasalahan lain yang dihadapi dari sisi lingkungan adalah belum adanya indikator/ ukuran secara nasional yang dipakai untuk mengetahui perkembangan kondisi kualitas lingkungan di Indonesia. Saat ini, BPS dan KLH telah menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan data-data serta konsep indikator sudah disusun. Namun demikian, Indeks yang bersifat komposit tersebut masih perlu dipertajam dan disederhanakan agar mudah dan dapat dilaksanakan di lapangan sehingga monitoring dan evaluasi dapat dilakukan.

Banyaknya pemangku kepentingan dalam pembangunan berkelanjutan mengharuskan adanya koordinasi serta sinergi yang baik antar berbagai pihak tersebut. Setiap pihak mempunyai peran dan fungsi dalam menggerakkan subsistem yang membentuk sistem pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan harus bersifat transparan dan membuka akses seluruh pihak (masyarakat, swasta dan pemerintah) untuk dapat berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan itu. Pemerintah diharapkan dapat memberikan arah kebijakan, standar, manual, serta kerangka kebijakan penunjang lainnya yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.

Memperhatikan kondisi dan permasalahan di atas, sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2013 adalah: (i) Meningkatnya pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; (ii) Tepadunya pelaksanaan

program-program pembangunan yang mengarah kepada perwujudan pembangunan berkelanjutan, yaitu: MDGs, Ekonomi Hijau/Green Economy, serta Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam perencanaan pembangunan; (iii) Ditetapkannya satu alat untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berkelanjutan; serta (iv) Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparat pemerintah di Indonesia untuk penerapan Pembangunan yang Berkelanjutan.

1.1.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai arahan RPJMN 2010-2014, prinsip pengarusutamaan dilakukan dengan cara yang terstruktur dengan kriteria sebagai berikut: (i) kegiatan yang dilakukan merupakan upaya integral dalam kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan; (ii) kegiatan tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan (investasi) yang signifikan karena berasaskan koordinasi dan sinergi; (iii) pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial kemasyarakatan, kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya; dan (iv) pengarusutamaan terutama dilakukan pada sektor yang memberikan dampak besar terhadap kualitas lingkungan dan di wilayah/daerah yang rawan kerusakan lingkungan, diprioritaskan pada kegiatan strategis pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keadilan dan keberlanjutan sosial.

Sebagai kelanjutan dari capaian yang sudah diperoleh dan adanya permasalahan yang dihadapi, arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan tahun 2013 adalah:

1. Menantapkan proses internalisasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 3 (tiga) pilar utama pembangunan berkelanjutan.
2. Menjabarkan hal-hal konkrit dalam pilar kerangka kelembagaan terutama untuk memastikan berbagai pemangku kepentingan dalam kerangka kelembagaan yang tepat dan dapat mempercepat internalisasi 3 (tiga) prinsip pembangunan berkelanjutan.
3. Menyepakati ukuran-ukuran untuk pembangunan berkelanjutan yang tepat dan dapat digunakan baik di tingkat nasional dan daerah sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan dapat berjalan nyata di lapangan.

1.1.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

1.1.2.1 Kondisi Umum

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu prasyarat penting untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Selain itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing nasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi. Dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kualitas pelayanan publik, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Salah satu isu yang tertuang dalam Rencana Aksi (Renaksi) dimaksud adalah penerapan pakta integritas di instansi pusat dan daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN & RB No. 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda. Diharapkan pada tahun 2012 seluruh K/L telah menandatangani Pakta Integritas dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan bagi Pemda diharapkan telah menandatangani Pakta Integritas dengan Kejaksaan, Polri, dan *Civil Society Organisation* (CSO) setempat yang bergerak di bidang anti korupsi.

Selanjutnya, guna meningkatkan akuntabilitas di lingkungan birokrasi, pemerintah terus mendorong penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Terkait dengan hal tersebut, hingga 31 Desember 2011, 33 provinsi, 409 Kabupaten/Kota, dan 47 K/L telah memiliki peraturan internal tentang penyelenggaraan SPIP. Selain itu, sampai dengan Desember 2011 telah dilaksanakan 391 kegiatan sosialisasi SPIP di lingkungan Pemda dan 102 kegiatan sosialisasi di lingkungan K/L dengan total jumlah peserta sebanyak 42.792 orang. Kemudian untuk meningkatkan

kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), telah dilaksanakan diklat SPIP terhadap 10.240 aparat pengawasan, baik di lingkungan Pemda maupun K/L.

Upaya pencegahan KKN juga dilakukan melalui penerapan sistem *e-procurement* nasional. Sampai dengan Januari 2012 telah terbentuk 353 unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang terdiri dari 36 LPSE di instansi pusat, 32 LPSE di pemerintah provinsi, 251 LPSE di pemerintah kabupaten/kota, dan 34 LPSE di instansi lain seperti RS, Perguruan Tinggi, dan BIMK. Adapun jumlah paket yang tendernya menggunakan *e-procurement* mencapai 1.479 paket dengan nilai Rp. 4,3 triliun. Upaya ini disertai dengan penguatan SDM pengadaan melalui sertifikasi ahli pengadaan, yang hingga November 2011 jumlahnya telah mencapai 174.924 orang bersertifikat.

Di bidang pelayanan publik, penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga terus meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jumlah pemda yang menerapkan PTSP meningkat dari 417 unit pada tahun 2010 menjadi 420 unit pada tahun 2011. Untuk memberikan kepastian penyediaan pelayanan bagi masyarakat, saat ini sedang disusun 2 (dua) peraturan sebagai pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yakni 1 RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta 1 Rancangan Perpres tentang Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi dalam Pelayanan Publik. Selain itu, pada tahun 2012 diharapkan dapat dilaksanakan pilot project pengembangan sistem dan standarisasi pelayanan publik pada 20 Unit Pelayanan Publik. Terkait dengan pengaduan masyarakat, pada tahun 2012 diharapkan telah tersusun Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (*Nasional Public Service Complaint Handling Mechanism*) dan *No wrong door policy* dalam Pelayanan Publik.

Untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, mengoptimalkan kinerja SDM aparatur, serta menata organisasi birokrasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama antara Menteri PAN dan RB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011, Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan ini berlaku mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012.

Dalam masa pemudaan tersebut, instansi pusat dan daerah diharapkan melakukan penghitungan kebutuhan jumlah PNS yang tepat berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja untuk melakukan penataan organisasi (*rightsizing*) dan penataan pegawai. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tahun 2012 akan dilaksanakan diklat bagi 4.125 tenaga analisis jabatan, baik yang berasal dari K/L maupun pemda. Selanjutnya, diharapkan pada tahun 2012 telah tersusun 1 dokumen tentang rencana kebutuhan pegawai secara nasional dan kompetensi yang dibutuhkan.

1.1.2.2 Permasalahan dan Sasaran

Dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, permasalahan yang muncul diantaranya adalah masih maraknya kasus dugaan korupsi yang melibatkan jajaran birokrasi; belum terselesaikannya RUU tentang Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya menerapkan *e-procurement*; belum seluruh K/L dan Pemda yang menerapkan pakta integritas; serta kualitas pengelolaan keuangan negara belum sepenuhnya akuntabel dan transparan.

Dari sisi pelayanan publik, permasalahan yang muncul diantaranya adalah implementasi PTSP belum sepenuhnya berjalan efektif; pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik masih rendah; profesionalisme SDM pelayanan belum maksimal; SPM belum dilaksanakan secara konsisten; dan tindak lanjut pengaduan masyarakat atas pelayanan publik masih sangat rendah.

Terkait dengan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, beberapa permasalahan yang muncul diantaranya adalah: masih terjadinya tumpang tindih kewenangan, tugas pokok dan fungsi, dan pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan K/L; bisnis proses pada instansi pemerintah belum disertai dengan SOP (*Standard Operational Procedure*) utama sesuai tugas pokok dan pelayanan; serta penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian instansi pemerintah belum berjalan maksimal.

Untuk itu, sasaran kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan bidang hukum dan aparatur, yakni: (1) peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (2) Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (3) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sasaran tersebut, diuraikan lebih lanjut pada RKP 2013 Bab VIII Bidang Hukum dan Aparatur.

Untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran tersebut di atas, sasaran kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang ditandai dengan, antara lain: (i) Meningkatnya persentase penegakan disiplin PNS di seluruh instansi pemerintah; (ii) Makin meningkatnya penerapan pakta integritas bagi pejabat pemerintah; (iii) Meningkatnya kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); (iv) Meningkatnya persentase pelaporan gratifikasi; (v) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP; (vi) Meningkatnya penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa; (vii) Meningkatnya persentase tindaklanjut atas hasil pemeriksaan BPK; (viii) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran; dan (ix) Meningkatnya persentase tindaklanjut atas pengaduan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang ditandai dengan, antara lain: (i) Meningkatnya persentase penerapan Standar Pelayanan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; (ii) Meningkatnya persentase penerapan Mukdat Pelayanan pada unit pelayanan publik; (iii) Meningkatnya jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan utama dan investasi; (iv) Meningkatnya persentase penerapan manajemen pengaduan yang efektif pada unit penyelenggara pelayanan publik; (v) Tersusun dan terlaksananya rencana percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (vi) terlaksananya evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik.
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, yang ditandai dengan, antara lain: (i) Meningkatnya persentase kelembagaan dan tatalaksana instansi pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien; (ii) Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang telah menyusun SOP utama; (iii) Meningkatnya kualitas penerapan manajemen SDM (transparan dan berbasis merit/kompetensi); (iv) Tersusunnya rencana penerapan

e-Government; (v) Meningkatnya persentase penerapan manajemen kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK; dan (vi) Meningkatnya persentase penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain)

1.1.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mendorong implementasi kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik maka akan ditempuh strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan sosialisasi dan asistensi kebijakan nasional tatakelola pemerintahan yang baik;
2. Pengintegrasian implementasi kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik dalam sistem perencanaan dan penganggaran;
3. Pengembangan sistem *reward and punishment* atas implementasi kebijakan tatakelola pemerintahan yang baik;
4. Peningkatan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik.

TABEL 1.1
RENCANA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK TAHUN 2013

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan Instansi dalam Rencana Kerja K/L 2013	Indikator di setiap instansi	Target Rencana Kerja K/L 2013
1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN				
1.1	Pengakuan disiplin PNS di seluruh instansi pemerintah	Pengakuan peraturan mengenai disiplin PNS	Sistem penegakan disiplin yang efektif % Pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi	Sistem penegakan disiplin telah tersedia dan diimplementasikan Meningkatnya persentase pelanggaran disiplin yang mendapatkan sanksi
1.2	Penerapan pakta integritas bagi pejabat pemerintah	Penerapan pakta integritas bagi pejabat Eselon I, II, dan III	Sistem penerapan pakta integritas	Telah tersedia sistem penerapan pakta integritas dan diimplementasikan

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan Instansi dalam Rencana Kerja K/L 2013	Indikator di setiap instansi	Target Rencana Kerja K/L 2013
			% pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas	Meningkatnya persentase pejabat yang menandatangani pakta integritas
1.3	Kepatuhan persyaratan Layanan Harta Kekayaan Peryelenggaraan Negara (LHKPN)	Kewajiban pejabat untuk melaporkan LHKPN	% pejabat yang telah melaporkan LHKPN	Meningkatnya persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN
1.4	Kebijakan antikorupsi	Kewajiban pelaporan gratifikasi	Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi	Meningkatnya implementasi sistem pelaporan gratifikasi
1.5	Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif	Tersedianya dan dilaksanakannya sistem pengendalian internal yang efektif	Diterapkannya SPIP sesuai pedoman. Pembinaan penerapan SPIP dilakukan oleh BPKP.
1.6	Pengembangan sistem e-Procurement Nasional	Penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa	% pengadaan menggunakan e-procurement	100% K/L sudah mulai menerapkan e-procurement dalam pengadaan.
1.7	Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Peningkatan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan	% temuan yang ditindaklanjuti	Meningkatnya persentase temuan yang ditindaklanjuti.
1.8	Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya	Opini BPK atas LK K/L	75% K/L telah mendapat opini WTP
1.9	Pengaduan masyarakat	Tindak lanjut pengaduan masyarakat	Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif	-Telah tersedia sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan diimplementasikan

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan Instansi dalam Rencana Kerja K/L 2013	Indikator di setiap instansi	Target Rencana Kerja K/L 2013
			% Penyelesaian Tindak Lanjut atas pengaduan yang disampaikan masyarakat	Meningkatnya persentase penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
2.1	Penerapan Standar Pelayanan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Penerapan Standar Pelayanan Publik untuk seluruh unit penyelenggara pelayanan publik	% unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan standar pelayanan	Meningkatnya persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang telah menerapkan standar pelayanan
2.2	Penerapan maklumat pelayanan pada unit pelayanan publik	Menerapkan maklumat pelayanan untuk unit pelayanan publik	% unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat pelayanan	Meningkatnya persentase unit pelayanan publik yang telah menerapkan maklumat pelayanan
2.3	Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pelayanan utama dan investasi	Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemerintah Daerah menerapkan PTSP/One Stop Services (OSS)	Meningkatnya Pemda yang menerapkan PTSP dan berfungsi efektif
2.4	Penerapan Manajemen Pengaduan	Penerapan manajemen pengaduan yang efektif pada unit penyelenggara pelayanan publik	% unit pelayanan publik yang menerapkan manajemen pengaduan yang efektif	Meningkatnya persentase unit pelayanan publik pada K/L yang telah menerapkan manajemen pengaduan yang efektif
2.5	Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Menyusun rencana percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan melaksanakannya sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri	Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik	Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan Instansi dalam Rencana Kerja K/L 2013	Indikator di setiap instansi	Target Rencana Kerja K/L 2013
		yang bertanggung jawab di bidang pelayanan publik	Terlaksananya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang ditetapkan	Terlaksananya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik
2.6	Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang ada	Tersedianya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik	Tersusunnya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik dan diimplementasikan pada seluruh pelayanan publik yang ada di K/L dengan instrumen yang kredibel
			% Unit penyelenggara pelayanan publik yang mendapat penilaian baik	Meningkatnya persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang mendapat penilaian baik
				Setiap K/L menataplan 3-5 unit pelayanan publik sebagai Quick Wins.
3. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi				
3.1	Perataan kelembagaan instansi pemerintah	Melakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi untuk rightsizing di dasarkan visi, misi, strategi dan analisis obyektif, serta tupoksi.	% Tersedianya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif, efisien	Meningkatnya persentase kelembagaan dan tatalaksana instansi pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan Instansi dalam Rencana Kerja K/L 2013	Indikator di setiap instansi	Target Rencana Kerja K/L 2013
3.2	Penerapan ketatakelolaan instansi pemerintah	Penyederhanaan proses bisnis dan pengurusan SOP utama	% SOP utama telah disusun sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana	Tersusunnya 50% SOP utama pada setiap K/L sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana
3.3	Pemertapan kualitas manajemen SDM	Penerapan manajemen SDM yang berkualitas (transparan dan berbasis merit/kompetensi)	Tersedianya sistem rekrutmen yang transparan	Tersedia sistem rekrutmen pegawai yang transparan dan berbasis merit/kompetensi serta mulai diimplementasikan
			Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur	Tersedia sistem penilaian kinerja yang terukur dan mulai diimplementasikan
			Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan	Tersedia sistem promosi dan penempatan dalam jalur struktural yang terbuka, transparan, dan berbasis merit/kompetensi, serta diimplementasikan
			Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi	Tersedia sistem diklat berbasis merit dan kompetensi, serta merupakan bagian integral dari fungsi pembinaan kearsnasan dan karir pegawai, serta meningkatkan kinerja lembaga
			Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan <i>reward and punishment</i>	Tersedia sistem kode etik instansi, dan diimplementasikan dengan penagakannya secara efektif

No.	Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan Instansi dalam Rencana Kerja K/L 2013	Indikator di setiap instansi	Target Rencana Kerja K/L 2013
3.4	Pengembangan dan penerapan <i>e-Government</i>	Pengembangan dan penerapan <i>e-Government</i>	Tersusunnya rencana penerapan <i>e-Government</i> yang konkrit dan terukur	Tersusunnya rencana penerapan <i>e-Government</i>
3.5	Sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK	Penerapan manajemen kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK	Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK	Tersedia sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK serta diimplementasikan secara elektronik
3.6	Perycenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	% penerapan SAKIP (kesstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain)	Meningkatnya persentase penerapan SAKIP (kesstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain)

1.1.3 Pengarusutamaan Gender

1.1.3.1 Kondisi Umum

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Dengan demikian, pembangunan selayaknya memberikan akses yang memadai serta adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian pembangunan. Hal ini juga tercermin pada salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yaitu agenda kelima, pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Walaupun demikian, masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kontrol terhadap sumber daya. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menerapkan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di setiap bidang pembangunan.

PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut

pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Penerapan PUG akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam pelaksanaan PUG ke dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan, dapat dilakukan analisis gender dengan menggunakan peranti analisis seperti Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway - GAP*). Hasil analisis gender ini kemudian digunakan untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Pengintegrasian gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah akan membuat pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan adil dalam memberikan manfaat kepada perempuan dan laki-laki.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender, maka perspektif gender tidak hanya diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan tetapi juga penganggaran. Inisiatif ini dimulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.331/M.PPN/IIIK/03/2009 tentang Tim Pengarah dan Tim Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Tim ini dibentuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan PPRG lintas sektor dan lintas kementerian, yang terdiri dari 6 kementerian/lembaga, yaitu Bappenas, Depken, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP), Depdagri, Depkes, dan Depdiknas. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan (Kemendagri) bekerja sama dengan Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) telah menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 119/PMK.02/2009, tentang Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2010, yang di antaranya memuat hal-hal baru, yaitu Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG). ARG adalah penerapan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran, yang merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014.

Pada lampiran PMK tersebut dicantumkan bahwa setiap kementerian/lembaga pelaksana menyusun *gender budget statement* (GBS), yang merupakan dokumen akuntabilitas

spesifik-gender yang disusun oleh K/L, untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan sudah responsif gender, dan kemudian menyampaikannya kepada Kemenkeu sebagai bagian dari dokumen RKA-KL, yang melengkapi kerangka acuan kegiatan (TOR). ARG tersebut telah diterapkan pada 7 K/L *pilot* pada T.A. 2010 (Bappenas, Kemenkeu, KPP&PA, Kemdiknas, Kemenkes, Kementerian PL, dan Keutatan), dan pada T.A. 2011, PMK No. 104/PMK.02/2010 mencantumkan bahwa ARG diterapkan di berbagai bidang prioritas pembangunan, terutama yang terkait dengan bidang politik, sosial, hukum, dan ekonomi (tidak terbatas pada K/L *pilot*). Selanjutnya, PMK No. 93/PMK.02/2011, tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, mencantumkan bahwa ARG akan diterapkan pada 28 K/L dan 10 provinsi pada T.A. 2012.

Pada tahun 2011, Bappenas telah melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Uji Coba PPRG di 7 kementerian/lembaga dan 4 pemerintah provinsi yang telah melaksanakan PPRG dengan inisiatif sendiri. Hasil evaluasi tersebut merupakan bahan masukan untuk penyusunan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG, yang hingga saat ini sedang disusun oleh motor penggerak (Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, dan KPP&PA), dengan dikoordinasikan oleh Bappenas. Salah satu hasil evaluasi tersebut menyatakan pentingnya peningkatan kapasitas SDM, terutama di kalangan motor penggerak mengingat fungsi para motor penggerak untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PPRG di seluruh K/L, baik di tingkat nasional, maupun daerah.

1.1.3.2 Permasalahan dan Sasaran

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah sebagai berikut. *Pertama*, masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, yang antara lain, disebabkan oleh terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi, baik antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota; serta rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit.

Kedua, masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan

dari tindak kekerasan, yang ditandai dengan maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum diiringi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan terhadap para korban tindak kekerasan, masih terdapat ketidaksesuaian antarproduk hukum yang dihasilkan, termasuk antara produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan daerah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan.

Ketiga, masih lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender yang disebabkan oleh: (i) belum optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan; (ii) belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG; (iii) masih rendahnya pemahaman tentang konsep dan isu gender, nilai-nilai kesetaraan gender, manfaat PUG dalam pembangunan, baik di pusat maupun di daerah, dan (iv) minimnya ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan penggunaannya dalam siklus pembangunan.

Sasaran pengarusutamaan gender adalah meningkatnya kesetaraan gender, yang ditandai dengan: (i) meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi termasuk akses terhadap penguasaan sumber daya, politik dan pengambilan keputusan; (ii) meningkatnya persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan; dan (iii) meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah.

1.1.3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan permasalahan dan sasaran sebagaimana tersebut di atas, maka strategi dan arah kebijakan pengarusutamaan gender dilakukan melalui tiga isu nasional, yaitu:

1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, melalui peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas serta harmonisasi peraturan perundangan dan pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
2. Perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, melalui upaya-upaya pencegahan, pelayanan,

dan pemberdayaan; dan

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, termasuk peningkatan kapasitas SDM dalam rangka percepatan penerapan PLG melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).

Upaya peningkatan kesetaraan gender tersebut dilakukan secara lintasbidang, lintassektor, dan lintasdaerah yang keberhasilannya diukur antara lain dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender-related Development Index* (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *Gender Empowerment Measurement* (GEM). IPG/GDI merupakan indikator komposit yang diukur dengan angka harapan hidup sejak lahir, angka melek huruf, dan gabungan angka partisipasi sekolah dasar, menengah, tinggi, serta Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*), yang dihitung berdasarkan jenis kelamin. Sementara itu, IDG/GEM diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

TABEL 1.2
TARGET KINERJA PEMBANGUNAN PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2013

No	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
1.	Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan				
1.1	Penjaminan Kesetaraan Layanan Pendidikan SD ¹⁾	Rasio kesetaraan gender SD/SDLB	97,8	Program Pendidikan Dasar	Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
1.2	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah ¹⁾	Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MI	1	Program Pendidikan Islam	Kementrian Agama
1.3	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP ²⁾	Rasio kesetaraan gender SMP/SMPLB	> 98	Program Pendidikan Dasar	Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
1.4	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah ¹⁾	Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MTs	1	Program Pendidikan Islam	Kementrian Agama

No	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
1.5	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA ¹⁾	Rasio kesetaraan gender siswa SMA	36%	Program Pendidikan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1.6	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SVK	Peserta didik SMK berkesetaraan/ responsif gender	50,0	Program Pendidikan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1.7	Peningkatan akses dan mutu PK dan PLK SMLB	Peserta didik SMLB mendapat bantuan yang responsif gender	50,0	Program Pendidikan Menengah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1.8	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aiyah ²⁾	Rasio APM peserta didik perempuan:laki-laki pada MA	≥0,95	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama
1.9	Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa	Rasio kesetaraan gender PK	1,05	Program Pendidikan Tinggi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1.10	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam ³⁾	Rasio APM peserta didik perempuan:laki-laki pada PTA	1,12	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama
1.12	Peningkatan akses, kualitas, kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan dan tersalurkannya subsidi RA/DA dan madrasah	1 Rasio APM Peserta didik perempuan : laki-laki pada MI	1,0	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama
		2 Rasio APM peserta didik perempuan : laki-laki pada MTs	1,0	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama
		3 Rasio APM peserta didik perempuan : laki-laki pada MA	0,9	Program Pendidikan Islam	Kementerian Agama
1.13	Peningkatan akses, kualitas, kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan dan tersalurkannya subsidi PTAI	Rasio APM peserta didik perempuan : laki-laki pada PTA	1,12		
1.14	Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat ⁴⁾	1 Persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar yang memperoleh layanan kecakapan hidup	72,0	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ko	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
		Disparitas gender penduduk berkeseksamaan usia > 15 tahun minimal 2%	25,0		
		Persentase kabupaten/kota yang telah menerapkan POG bidang peradilan	98,0		
1.15	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi ²⁾	1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN)	89	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan
		2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan KK)	93		
1.16	Pembinaan Pelayanan Keperawatan dan Kefarmasian Medis ³⁾	Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai standar dan pedoman	638	Pembinaan Upaya Kesehatan	Kementerian Kesehatan
1.17	Penyelesaian Lingkungan ⁴⁾	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	63,5	Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Lingkungan	Kementerian Kesehatan
1.18	Peningkatan Krisis Kesehatan ⁵⁾	Jumlah kabupaten yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana	250	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan teknis Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan
1.19	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi ⁶⁾	Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi kualitas hidup ibu, bayi, dan anak (KHIBA) dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi (PMKR) yang dapat dioperasionalkan	6	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN

No	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
		(NSPK, pedoman, juklak/juknis, SPM, mekanisme operasional, pola kerja)			
1.20	Peningkatan aksesasi dan KIE Program Kepedululukan dan KB4)	Persentase PUS, WUS, dan remaja yang mengetahui informasi Kepedululukan dan KB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang	95	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN
1.21	Pengelolaan pembangunan KKB di Provinsi	1. Persentase komplikasi berat yang dilayani 2. Persentase kegagalan KB yang dilayani 3. Jumlah frekuensi pelayanan KB mobile di wilayah Galesas (12 kali dalam 1 tahun) (pelaksanaan kebijakan peningkatan kesetaraan KB pria) 4. Jumlah pembinaan dan pemberdayaan keluarga di provinsi	0,10 0,03 uji coba di Prov. Jabar dan Jawa uji coba di Prov. Jabar dan Jawa	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN
1.22	Pelayanan Sosial Lanjut Usia ²⁾	Jumlah lanjut usia terlantar yang berhasil dilayani, direhabilitasi, dan dihabilitasi baik di dalam maupun di luar negeri (jasa)	44.705	Program Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial
1.23	Bantuan Sosial Korban Bencana Alam ³⁾	Jumlah korban bencana alam yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)	141.935	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial
1.24	Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial ⁴⁾	Jumlah korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)	201.015	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial

Ko	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
1.25	Pedoman, petunjuk teknis dan pembangunan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih ³⁾	1. Jumlah modul pendidikan pemilu untuk kelompok perempuan, miskin, cacat, pemilih pemula, lansia 2. Jumlah kegiatan pendidikan pemilu bagi orang perempuan	5 10	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Partisipasi Proses Pemilu	KIP
1.26	Dira Ideolog dan Wawasan Kebangsaan ⁴⁾	Jumlah forum sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur pemerintahan	25	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kementrian Dalam Negeri
1.27	Dira Ideolog dan Wawasan Kebangsaan ⁴⁾	Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan	1 Modul Wawasan Kebangsaan, 1 Modul Ketahanan Bangsa, 1 Modul Bela Negara	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kementrian Dalam Negeri
1.28	Kesihitas Politik Dalam Negeri ⁵⁾	Jumlah paket kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan partisipasi politik perempuan	100	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kementrian Dalam Negeri
1.29	Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Kesehatan dan Penawaran wage/biaya pengayaktan ⁶⁾	Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akurat ⁷⁾	90%	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Penasyarakatatan	Kementrian Hukum dan HAM
1.30	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air lainnya	Jumlah buah Embung/Situ/Bangunan Penampung Air Lainnya yang dibangun	164 buah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementrian Pekerjaan Umum
1.31	Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	7 Angkatan	Pembinaan Konstruksi	Kementrian Pekerjaan Umum

No	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
1.32	Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan OPT	Pengakuan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (mel)	150	Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
1.33	Pengembangan Sistem Perindungan Tanaman Hortikultura	Pengakuan Sekolah Lapangan-Pengendalian Hama Terpadu (kelompok)	600	Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
1.34	Dukungan perlindungan perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan (kelompok)	134	Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
1.35	Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal	Peningkatan usaha budidaya ternak (kelompok)	600	Program Penerimaan swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	Kementerian Pertanian
1.36	Pengelolaan air irigasi untuk pertanian	Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan petani pemakai air	300	Program Penyediaan Dan Pengembangan	Kementerian Pertanian

No	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
		(melalui Pemberdayaan P3A dan Penguabaugan Usaha Petuswad) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.		Prasarana dan Sarana Pertanian	
1.37	Perluasan areal dan peningkatan lahan pertanian	jumlah (paket) lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi	5	Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementerian Pertanian
1.38	Pengembangan ketersediaan pangan dan peningkatan keragaman pangan	jumlah Desa yang diberdayakan/Demapan	40	Program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kementerian Pertanian
1.39	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	jumlah non aparaturnya yang ditugaskan kapasitasnya melalui pelatihan pertanian (orang)	22.200	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelangkaan Petani	Kementerian Pertanian
1.40	Penelitian dan Pengembangan Model Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	jumlah model pemrosesan/teknik pengolahan produk kelautan dan perikanan	3 (40% beserta model pemrosesan/teknik pengolahan produk perikanan)	Program Penelitian dan Pengembangan Iptek KP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
1.41	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	Jumlah pembinaan kenelayanan (lokasi)	20	Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan
1.42	Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	Jumlah pemberdayaan kelompok pembudidaya melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan	4000	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan

No	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
		(PUMIP) di lokasi PKN dan non PKN (selompok)			
1.43	Kapasitas Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	lokasi pengembangan dan pembinaan sentra pengolah hasil perikanan untuk usaha skala mikro, kecil dan menengah (lokasi)	32 (5 baru,32 lanjutan)	Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
1.44	Kapasitas Pembiayaan dan Pengembangan Usaha dan Investasi Perikanan	Jumlah tenaga kerja pada kelompok pengolah dan pemasar (POKLAHSAR) yang dilina dan dikembangkan sehingga memenuhi standar wirausaha dan ketenagakerjaan yang kompeten dan capable dalam rangka Pengemahangan Usaha Mini Pedesaan (PUMP) di lokasi PKN	5000 tenaga kerja 10000 pebisnis	Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Jumlah tenaga kerja pada kelompok pengolah dan pemasar (POKLAHSAR) yang dilina dan dikembangkan sehingga memenuhi standar wirausaha dan ketenagakerjaan yang kompeten dan capable dalam rangka Pengemahangan Usaha Mini Pedesaan (PUMP) di lokasi non PKN	2500 tenaga kerja 500 pebisnis		
1.45	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	7.097 kelompok 5.608 orang	Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	

Ko	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
1.46	Daftar Jejaring Tertinggi Pengukuran Dasar	Meningkatnya kualitas SDM bidang survey, pengukuran dan pemetaan, khususnya bidang pengukuran dasar.	1 paket	Pengembangan Pertambangan Nasional	HPN
1.47	Peningkatan pemahaman hak tanah dan ruang	Jumlah PPAI yang ditetapkan (terselenggara) dan PPAI yang berkualitas dalam rangka pelaksanaan tugas ke-PPAI-an)	1 paket	Pengembangan Pertambangan Nasional	HPN
1.48	Pengelolaan Pertambangan Pragma (Konsolidasi Tanah)	Legalisasi Aset Hasi Konsolidasi Tanah	2.400	Pengembangan Pertambangan Nasional	HPN
1.49	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Pertambangan	Peningkatan partisipasi masyarakat dan Kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat	100 kelompok	Pengembangan Pertambangan Nasional	HPN
1.50	Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Sosisiasi Bidang Pemukiman Ruang	7 Kegiatan	Program Pengembangan Pemukiman Ruang	Kementerian PU
		2. Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengembangan Perkotaan melalui penyusunan rencana detail pengembangan RTH dan perubahan RTH	05 Kab/Kota		
		3. Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja Bidang Pemukiman Ruang	2 Kegiatan		
1.51	Partisipasi Masyarakat	1. Jumlah kawasan yang terdapat partisipasi dari lembaga pemerintah di daerah tertinggal/ perbatasan	36 Kawasan (104 Lembaga)	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2. Jumlah kawasan yang terdapat partisipasi dari lembaga pemerintah di daerah strategis	18 Kawasan (11 Lembaga)		

No	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana	
1.52	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	1	Jumlah Kintaras/Kawasan yang mendapat layanan Sosial Budaya/Pendidikan, Mental Spiritual di Daerah Tertinggal/Perbatasan	19 Kintaras	Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2	Jumlah Kintaras/Kawasan yang mendapat layanan Sosial Budaya/Pendidikan, Mental Spiritual di Daerah Strategis	13 Kintaras		
		3	Jumlah kawasan yang mendapat pendampingan/ pemberdayaan di daerah tertinggal/ perbatasan	17 Kintaras		
		4	Jumlah kawasan yang mendapat pendampingan/ pemberdayaan di daerah strategis	3 Kintaras		
1.53	Pengaduan insidif masyarakat	Jumlah peserta Adwiyata	4400 sekolah	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH	
1.54	Peningkatan peran masyarakat	1	Jumlah orang target sosialisasi Kalpataru	150 orang	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
		2	Jumlah komunitas masyarakat yang aktif dalam pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim	300 komunitas		
1.56	Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri	1	Jumlah Peserta yang mengikuti pemagangan di perusahaan;	14.000 Org	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
		2. Jumlah peserta pemagangan yang mendapat sertifikat kompetensi	8.500 org	dan Produktifitas	
1.57	Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	12.000 org	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.58	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	Tersedianya sarana dan prasarana yang mampu membuka peluang usaha sehingga dapat mengurangi pengangguran	10.000 org	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.59	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan kerja	Tersedianya tenaga penggerak perluasan kesempatan kerja di pedesaan	1.500 org	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	
2. Perlindungan Perempuan terhadap Berbagai Tindak Kekerasan					
2.1	Pengusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan ¹⁾	1. Jumlah K/L dan lembaga yang dilasialisasi dalam mengembangkan data perempuan korban kekerasan	-	Program Kesetaraan Gender dan Femerdayaan Perempuan	KPP dan PA
		2. Persentase keluhan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan	80		
		3. Persentase korban anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan	100		
2.2	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik ²⁾	Tingkat penanganan isu <i>illegal migrant</i> dan <i>human trafficking</i> serta isu-isu lainnya	25%	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi	Kementerian Luar Negeri

No	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
2.3	Pemantauan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah ²⁾	Tingkat peranguman isu <i>Regionalism</i> dan <i>kurang trafficking</i> serta <i>suksu-karnya</i>	28%	Program Pemantauan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Kementerian Luar Negeri
2.4	Peningkatan perlindungan dan pelayanan WNI/BNI di luar Negeri ²⁾	Persentase pemberian bantuan hukum (advokat dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita	29,17%	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kaprotokol dan Konsuleran	Kementerian Luar Negeri
2.5	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak ²⁾	1. Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak	30%	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2. Jumlah pengawas ketenagakerjaan dalam pengawasan norma kerja perempuan dan anak yang ditingkatkan kapasitasnya	230		
		3. Jumlah pekerja anak yang ditarik dari tempat kerja/BPTA	11.000 org		
		4. Persentase pekerja anak yang ditarik yang dikembalikan ke usia pendidikan dan/atau memperoleh ketrampilan	100%		

No	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
2,5	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban ¹⁾	1. Tingkat pelatihan dan penyediaan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	30%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemdas HAM	Kemdas HAM
		2. Tingkat pelatihan dan penyediaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan	50%		
		3. Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan	50%		
		4. Jumlah penantuan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan	10		
		5. Prosentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti	50%		

No	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
		6. Persentase پوشконтингенту dan sistem pemilihan korban pelanggaran HAM yang dikendalikan.	60%		
		7. Peningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka memobilisasi lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan.	35%		
2.7	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak	Jumlah K/L dan penda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak	1 K/L	Program Perlindungan Anak	KPP dan PA
2.8	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang -)	3. Jumlah K/L, jumlah kompilasi data perlindungan korban perdagangan orang	1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	KPP dan PA
3.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				
3.1	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender -)	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan FUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	KPP dan PA
		2. Jumlah K/L dan penda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan	K/L prov 5		
		3. Jumlah K/L dan penda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di	K/L prov 2		

No	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana			
3.2	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender ²³	bidang pendidikan	1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	KPP dan PA			
		1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PJJG di bidang kesehatan	1			K/L		
		2. Jumlah K/L dari pemuda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan	5			prov		
3. Jumlah K/L dari pemuda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang kesehatan	1	K/L	7	prov				
3.3	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender ²³	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PJJG di bidang sumber daya alam dan lingkungan	1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	KPP dan PA			
		2. Jumlah K/L dari pemuda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang sumber daya alam dan lingkungan	2			K/L	5	prov
		3. Jumlah K/L dan pemuda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang sumber daya alam dan lingkungan	2			K/L	5	prov

No	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana	
3.4	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan [4]	1	Jumlah kebijakan pelaksanaan PLG di bidang politik dan pengambilan keputusan	1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	KPP dan PA
		2	Jumlah K/L dan penda yang difasilitasi dalam menerapkan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan	K/L prov 6		
		3	Jumlah K/L dan penda yang difasilitasi dalam penyusunan data terdilah di bidang politik dan pengambilan keputusan	K/L prov 3		
3.5	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang hukum yang responsif gender [5]	1	Jumlah kebijakan pelaksanaan PLG di bidang hukum	1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	KPP dan PA
		2	Jumlah K/L dan penda yang difasilitasi dalam menerapkan ARG di bidang hukum	K/L prov 8		
		3	Jumlah K/L dan penda yang difasilitasi dalam penyusunan data terdilah di bidang hukum	K/L prov 6		

Ko	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
3.5	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender ²⁾	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PJJ di bidang ketenagakerjaan	-	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	KPP dan PA
		2. Jumlah K/I. dan pemda yang difasilitasi dalam pemetaan ARS di bidang ketenagakerjaan	K/I. prov 5		
		3. Jumlah K/I. dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang ketenagakerjaan	K/I. prov -		
3.7	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan yang responsif gender ³⁾	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PJJ di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan	-	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	KPP dan PA
		2. Jumlah K/I. dan pemda yang difasilitasi dalam pemetaan ARS di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan	K/I. prov 4 4		
		3. Jumlah K/I. dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan	K/I. prov 2 4		

No	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana		
3.8	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agribisnis yang responsif gender ¹⁾	1	Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agribisnis	4	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	KPP dan PA	
		2	Jumlah K/L dan penda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agribisnis	K/L prov 33	2		
		3	Jumlah K/L dan penda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agribisnis	K/L prov 6	3		
3.9	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi yang responsif gender ¹⁾	1	Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi	1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	KPP dan PA	
		2	Jumlah K/L dan penda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi	K/L prov 6	1		

Ko	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana	
3.10	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang infrastruktur yang responsif gender 3)	2	Jumlah K/L dan pemuda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpadu di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi	K/L prov	1 3	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		1	Jumlah kebijakan pelaksanaan PIG di bidang infrastruktur		1	
		2	Jumlah K/L dan pemuda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang infrastruktur	K/L prov	1 1	
3.11	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan 4)	3	Jumlah K/L dan pemuda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpadu di bidang infrastruktur	K/L prov	1 2	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		1	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan		1	
		2	Jumlah K/L dan pemuda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	K/L prov	6 33	
3.12	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender 5)	1	Jumlah pedoman penyusunan data dan informasi gender dan anak		1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan

No	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
		2. Tersedianya sistem data gender dan anak	K/I pov	- -	Perencanaan
		3. Jumlah K/I dan Puskas yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas pengelola data gender dan anak	K/I pov	5 13	
		4. Jumlah pengelahan, pengajaran, penutuhiran, dan pengemhangan data dan informasi gender dan anak		1	
3.13	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan	1. Jumlah kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan		1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		2. Jumlah K/I dan pusda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan	K/I pov	1 5	
		3. Jumlah K/I dan pusda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan masalah sosial perempuan	K/I pov	1 2	
3.14	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja	1. Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan		1	Program Kesetaraan Gender dan

Ko	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
	perempuan *)	2. Jumlah K/L dan penda yang di hasil Gas dalam pemertaan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	K/L 2009 1 5	Program Pemberdayaan Perempuan	
		3. Jumlah kompilasi data perlindungan tenaga kerja perempuan	K/L 2009 1 2		
3.15	Fungsian dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang *)	1. Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang	1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	KPP dan PA
		2. Jumlah K/L dan penda yang di hasil Gas dalam pemertaan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang	K/L 2009 10 15		
3.16	Fungsian Kelembagaan PUG di provinsi	1. Jumlah kab/kota yang memiliki EDM yang kompeten dalam analisis FPRG	250	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	KPP dan PA
		2. Jumlah kab/kota yang memiliki kelembagaan dan jejaring PUG	100		
		3. Jumlah kab/kota yang memiliki data gender	100		
3.17	Sistem Informasi Manajemen *)	Jumlah kegiatan pendataan perkara yang disajikan berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya	1	Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Kejaksaan RI	Kejaksanaan Agung

No	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
3.18	Kegiatan Kerjasama HAM (1)	Persentase harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM	100%	Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM	Kementerian Hukum dan HAM
3.19	Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan (1)	Persentase Peraturan perundang-undangan di bidang mekanisme Perundang-uran Saks dan Pelapor	00%	Program Pembentukan Hukum	Kementerian Hukum dan HAM
3.20	Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (1)	Jumlah Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perundang-uran Saks dan Pelapor	00%	Program Pembentukan Hukum	Kementerian Hukum dan HAM
3.21	Peningkatan kesetaraan KB Galadras wlayah khusus dan sasaran khusus	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah kebijakan, strategi dan informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB Galadras, wlayah khusus, dan Sasaran Khusus yang dapat dioperasikan Jumlah kebijakan, strategi dan informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB berwawasan gender yang dapat dioperasikan Jumlah petak kerja pelayanan KB Galadras, wlayah khusus, dan Sasaran Khusus lengkap dan up to date 	<p>5 (salah satunya adalah kebijakan pengklatan akseptor KB sama)</p> <p>1</p> <p>1</p>	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBN
3.22	Penyusunan, Pengkajian, serta Pengembangan Kebijakan dan Strategis Bidang PU dan Permukiman.	Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan	2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Pekerjaan Umum

No	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
3.23	Penyusunan Perencanaan, Pencapaian, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pembinaan PHN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelompokan Rencana Kerja Program dan Anggaran Tahunan dan Khusus Bidang PU dan Permukiman	1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Pekerjaan Umum
3.24	Pengendalian, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PU Lainnya	Jumlah laporan dukungan terhadap kawasan-kawasan khusus dan pekerjaan strategis bidang PU lainnya	1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Pekerjaan Umum
3.25	Pengalangan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman	Diseleenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kemitraan, Teknis dan Fungsional di Bidang PU dan Permukiman	135	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Pekerjaan Umum
3.26	Pengalangan dan Pembinaan Informasi Publik	jumlah Publikasi melalui berbagai media	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU	Kementerian Pekerjaan Umum
3.27	Pengalangan dan Pembinaan Informasi Publik	Dokumentasi buku foto dan film ke-PU-an	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU	Kementerian Pekerjaan Umum
3.28	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU	Jumlah dukungan Fasilitasi program pemerintah Peran Aksi dalam rangka kegiatan MDG's dan pengenalan Responsif Gender di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU	Kementerian Pekerjaan Umum

No	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
3.29	Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK bidang SOSKRELING	Jumlah Nasabah Ilmiah Nasabah Litbang yang masuk bursa IPTEK	1 Buku (Nasabah Ilmiah)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	Kementerian Pekerjaan Umum
3.30	Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK bidang SOSKRELING	Jumlah Nasabah Kebijakan Hasil Litbang yang masuk Bursa IPTEK	2 Nasabah Kelujisan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	Kementerian Pekerjaan Umum
3.34	Pengelolaan Data dan Informasi Pertambangan (Larasata Daerah)	Tersedianya Data dan Informasi Pertambangan yang terintegrasi secara nasional dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertambangan Nasional (SIMTANAS)	419 kab/kota	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN RI	BPN
3.35	Pengelolaan Data dan Informasi Pertambangan (Larasata Pusat)	Tersedianya Data dan Informasi Pertambangan yang terintegrasi secara nasional dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertambangan Nasional (SIMTANAS)	1 paket	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN RI	BPN
3.35	Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Daerah)	Terselenggaranya pengelolaan Sarana dan Prasarana Kemitra BPN Provinsi dan Kecamatan Kab/kota	62 satker	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN RI	BPN
3.37	Pembinaan Ketahanan Remaja	1 Jumlah kebijakan, strategi dan materi Pembinaan Ketahanan Remaja yang dapat dioperasionalkan 2 Jumlah Grand Design program pembinaan ketahanan remaja yang dapat dioperasionalkan	2 1	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	BKKBRB

No	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
		j) Jumlah para orja Pembinaan Berjasa dan Keluarga yang aman dan tertani	t		
3.38	Pembinaan Kapasitas Aparatur	Jumlah Pembinaan Kapas Aparatur (Pelatihan Project Cycle)	4 Angkatan	Pembinaan Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum
3.39	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai standar kompetensi dan kebutuhan (orang)	800 orang	Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
3.40	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pertanian	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi pegawai di lingkungan BPN RI	2030 orang	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN RI	BPN
3.41	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Pendidikan STPN	Jumlah Lulusan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadestral	80 %	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN RI	BPN
3.42	Penyelenggaraan urusan tata usaha pimpinan, penganggaran, dan urusan keputusasaan	Presentase Urusan nya Keamanan Lingkungan Kantor BPN RI, Presentase Urusan nya Keamanan Pemukiman BPN RI	1 paket	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya di BPN RI	BPN
3.43	Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pertanian	Penyelenggaraan Tugas Belajar jenjang pendidikan SP dan SS bagi pegawai di lingkungan BPN RI	1 paket	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN RI	BPN

No	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
3.44	Kegiatan Basilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah Pensiisi dan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Dalam Peningkatan Perempuan Melalui Penyusunan Peraturan, Pedoman, Standarisasi, Buletin, Orientasi, dan Sosialisasi	20 Provinsi Kab	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
3.45	Pengembangan komunikasi lingkungan	1. Jumlah kebijakan, program, dan strategi komunikasi lingkungan 2. Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan program komunikasi lingkungan hidup di daerah	1 dokumen 60 lokasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
3.46	Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan	1. Jumlah kebijakan, program, strategi, dan model peningkatan peran organisasi kemasyarakatan lingkungan 2. Jumlah organisasi masyarakat dan profesi yang mengkat perannya dalam perlindungan dan pengelolaan LHH 3. Jumlah perusahaan yang melaksanakan CSR	3 dokumen 100 organisasi 150 perusahaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH
3.47	Pengaduan inisiatif masyarakat	1. Jumlah kebijakan, program, strategi, dan model pengaduan inisiatif masyarakat 2. Jumlah komunitas pendidikan lingkungan hidup dan komunitas keagamaan kader lingkungan hidup yang terbentuk	4 dokumen 400 komunitas	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLH

Ko	Isu/Kebijakan Nasional	Indikator	Target Tahun 2013	Program	Pelaksana
3.48	Peningkatan peran masyarakat	Jumlah kebijakan, program, strategi, dan model peningkatan peran masyarakat	3 dokumen	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup	KLH
3.49	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup daerah	1. Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pemantauan lingkungan 2. Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian kerusakan lingkungan 3. Jumlah provinsi yang menyelenggarakan peningkatan kapasitas pengelolaan KLH 4. Jumlah provinsi yang mengkoordinir pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kab/Kota	33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup	KLH

1.2 Kebijakan Lintas Bidang

1.2.1 Penanggulangan Kemiskinan

1.2.1.1 Kondisi Umum

1.2.1.1.1 Pendahuluan

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam proses pembangunan nasional. Mengingat karakteristik kemiskinan yang bersifat multi-dimensi, multi-sektor dan multi-periode, pemerintah terus berupaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui program-program penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga di tingkat pusat maupun dinas teknis di tingkat daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, swasta, maupun masyarakatnya sendiri. Upaya penurunan kemiskinan dapat tercapai jika terjadi peningkatan

dan perlakuan terhadap akses pemenuhan kebutuhan dasar dari masyarakat miskin, peningkatan kepercayaan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam proses pembangunan, serta peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mereka. Selain itu, diperlukan adanya perluasan cakupan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bersifat *affirmative*/pemihakan, baik dari sisi sasaran maupun program, sehingga dapat menjangkau kebutuhan dari seluruh lapisan masyarakat di tingkat pusat ataupun daerah. Sampai dengan tahun 2011, tingkat kemiskinan nasional telah dapat diturunkan menjadi 12,49 persen dari 13,33 persen pada tahun 2010. Pada bulan Juni 2011, BPS kembali melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) triwulan kedua yang dipublikasikan pada bulan September 2011 yang mencatat bahwa tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi 12,36 persen. Tingkat kemiskinan nasional diharapkan akan dapat diturunkan kembali pada kisaran 9,5-10,5 persen pada tahun 2013.

1.2.1.1.2 Pelaksanaan Program Tahun 2011 dan Rencana Pelaksanaan Tahun 2012

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan fokus pada masyarakat miskin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5 persen dengan laju pertumbuhan di sektor pertanian sebesar 3,0 persen. Kestabilan pertumbuhan sektor pertanian merupakan faktor penting dalam mempertahankan mata pencaharian petani dan juga menjaga serta mencukupi pasokan bahan komoditas pokok terutama bahan pangan. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,5 persen, dan sektor pertanian diharapkan tumbuh 3,6 persen.

Penyerapan tenaga kerja sebagai salah satu upaya untuk mengurangi jumlah pengangguran yang sedikit banyak juga berpengaruh pada tingkat kemiskinan juga terus ditingkatkan. Selama bulan Februari 2011 sampai dengan Februari 2012 telah dapat diciptakan 1,5 juta kesempatan kerja. Pada bulan Februari 2012 terdapat 112,8 juta tenaga kerja, dimana sebanyak 70,74 juta (62,71%) adalah tenaga kerja di sektor informal. Pada umumnya, masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan bekerja di kegiatan ekonomi informal. Dengan bekerja dan memperoleh penghasilan, maka penduduk miskin diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan mempertahankan daya belinya.

Sejalan dengan berbagai upaya perbaikan kondisi ekonomi

makro, meliputi upaya-upaya stabilisasi ekonomi termasuk penciptaan lapangan kerja, upaya penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat pemihakan (*affirmative*) kepada masyarakat miskin melalui 3 (tiga) klaster program penanggulangan kemiskinan, yaitu: klaster 1 adalah program perlindungan sosial berbasis keluarga, klaster 2 adalah program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, dan klaster 3 adalah program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Secara umum, pelaksanaan berbagai kegiatan di dalam ketiga klaster tersebut berjalan dengan baik.

Pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di atas yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sebesar 6,5 persen yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 6,4 persen, telah menyumbang pada penurunan tingkat kemiskinan dari 13,33 persen pada tahun 2010 menjadi 12,49 persen pada tahun 2011.

Secara umum, tingkat kemiskinan secara nasional mengalami penurunan meskipun cenderung melambat. Pada tahun 2008 ke 2009 terjadi penurunan sebesar 1,27 persen, kemudian pada tahun 2009 ke 2010 menurun hanya sebesar 0,82 persen. Namun dari tahun 2010 ke 2011 terjadi sedikit peningkatan penurunan kemiskinan yaitu sebesar 0,84 persen. Perkembangan angka kemiskinan disajikan dalam Gambar 1.1

GAMBAR 1.1
PERKEMBANGAN ANGKA KEMISKINAN INDONESIA TAHUN 2004-2011



Sumber: BPS, berbagai tahun (diolah)

Kluster I yang dilaksanakan dengan tujuan mengurangi beban pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota rumah tangga miskin melalui peningkatan akses pada pelayanan dasar telah terlaksana secara optimal. Realisasi program Raskin pada tahun 2011 mencapai 2,98 juta ton lagi 17,5 juta rumah tangga sasaran, dengan harga Rp 1.000,- per kg. Untuk tahun 2012, jumlah rumah tangga sasaran tetap sama yaitu sebesar 17,5 juta rumah tangga sasaran dengan alokasi sebanyak 3,15 juta ton. Untuk program Jamkesmas, realisasi pencapaian hingga Desember 2011 sebesar Rp 5.863 triliun yang sudah digunakan oleh 40,86 juta masyarakat miskin, dari target sasaran sejumlah 76,4 juta masyarakat. Pada tahun 2012, sasaran Jamkesmas tetap 76,4 juta masyarakat miskin, walaupun jumlah penduduk miskin telah menurun menjadi 60,4 juta orang sesuai data dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2008. Hal ini ditujukan untuk membuka ruang bagi penduduk miskin yang belum terdata (*exclusion error*) dan penambahan penduduk miskin baru apabila terjadi krisis. Pada tahun-tahun mendatang pelayanan dan manfaat Jamkesmas akan terus ditingkatkan

melalui penyesuaian mekanisme pelaksanaan yang berbasis asuransi sosial. Bantuan siswa miskin untuk tingkat SD sampai perguruan tinggi, pada tahun 2011 telah menghantu 6,8 juta siswa dan pada tahun 2012 direncanakan akan diberikan kepada 8,13 juta siswa.

Selanjutnya, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat miskin terus ditingkatkan pelaksanaannya dengan cakupan wilayah serta jumlah penerima yang semakin diperluas. PKH dimaksudkan untuk menjaga agar anak-anak dari rumah tangga miskin tetap berada di sekolah untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya serta memelihara kesehatan balita serta ibu yang sedang hamil agar pertumbuhan anak di masa *golden years* dapat optimal mulai dilakukan saat anak masih dalam kandungan. PKH pada tahun 2011 telah dilaksanakan bagi 1.116.000 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di 25 provinsi dan pada tahun 2012 akan ditingkatkan menjadi 1.516.000 RTSM di 33 provinsi.

Dalam program Keluarga Bencana (KB), hasil-hasil yang dicapai pada tahun 2011 antara lain: (i) meningkatnya pencapaian jumlah peserta KB baru dari sasaran sebanyak 7,2 juta menjadi sebanyak 9,58 juta yang terdiri dari jumlah peserta KB baru miskin (keluarga pra-sejahtera/KPS dan keluarga sejahtera I/KS 1) dan rentan lainnya sebanyak 4,29 juta, jumlah peserta KB baru yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebanyak 1,54 juta (16,0 persen), serta jumlah peserta KB baru pria sebanyak 773.935 (8,1 persen); dan (ii) meningkatnya pencapaian jumlah peserta KB aktif dari sasaran sebanyak 27,5 juta menjadi sebanyak 34,87 juta yang terdiri dari jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya menjadi sebanyak 14,6 juta, jumlah peserta KB aktif MKJP menjadi sebanyak 8,49 juta (24,4 persen), serta jumlah peserta KB aktif pria menjadi sebanyak 1,32 juta (3,7 persen). Selanjutnya, pada tahun 2012 sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana diharapkan akan tercapai. Diperkirakan jumlah peserta KB mencapai sasaran yang telah ditetapkan, antara lain yaitu meningkatnya jumlah peserta KB baru sebanyak 7,3 juta; meningkatnya jumlah peserta KB aktif sebanyak 28,2 juta; meningkatnya jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya sebanyak 3,89 juta; meningkatnya jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya sebanyak 12,5 juta; meningkatnya

persentase peserta KB baru MKJP sebesar 12,9 persen; meningkatnya persentase peserta KB aktif MKJP sebesar 25,9 persen; dan meningkatnya jumlah peserta KB baru pria menjadi 4,3 persen.

Pelaksanaan program Klaster II Pemberdayaan Masyarakat terus diperluas dan ditingkatkan kualitasnya agar semakin efektif dalam mewujudkan kemandirian dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pada tahun 2011 sudah dilaksanakan pelayanan PNPM Mandiri Inti di 6.625 Kecamatan di seluruh Indonesia. Pada tahun 2012 PNPM Mandiri Inti akan mencakup di 6.680 Kecamatan. Pelaksanaan PNPM Mandiri juga didukung oleh pelaksanaan PNPM Penguatan (pendukung) yaitu diantaranya: (i) PNPM Generasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan generasi penerus, yang pada tahun 2011 dilakukan di 120 kecamatan di 25 kabupaten pada 5 provinsi, dan pada tahun 2012 akan dilaksanakan di 290 kecamatan di 26 kabupaten pada 5 provinsi; (ii) PNPM Kelautan dan Perikanan (PNPM-KP) yang ditujukan untuk memberikan fasilitas bantuan sosial dan akses usaha modal, pada tahun 2011 dilaksanakan melalui Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Pelaksanaan program PUGAR di tahun 2011 dilakukan di 40 kab/kota untuk 1.670 kelompok; PUMP perikanan tangkap di 132 kab/kota untuk 1106 KUB, PUMP perikanan Budidaya di 300 kab/kota untuk 2070 pokdakan (kelompok pembudidaya ikan), dan PUMP pengolahan dan pemasaran di 53 kab/kota untuk 408 pokdahsar; (iii) Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) yang pada tahun 2011 dilaksanakan di 10.000 gapoktan (gabungan kelompok tani), dan pada tahun 2012 akan menjangkau 7.000 gapoktan lainnya, ditujukan agar usaha agribisnis berkembang dan meningkat kualitasnya; (iv) PNPM Pariwisata yang baru masuk kedalam PNPM Penguatan dengan tujuan mengembangkan kapasitas masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan, pada tahun 2011 telah melaksanakan kegiatannya di 569 desa pada 83 kabupaten/kota dan pada tahun 2012 akan dikembangkan di 978 desa.

Program penanggulangan kemiskinan di Klaster III dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan usaha masyarakat, serta peningkatan akses kepada sumber daya produktif.

Kegiatan-kegiatan tersebut diarahkan utamanya untuk membantu penguatan usaha skala mikro yang jumlahnya mencapai 98,82 persen dari 55,2 juta unit usaha mikro, kecil dan menengah/LMKM (BPS, Kementerian Koperasi dan UKM, 2011). Struktur usaha mikro sendiri didominasi oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang memiliki kegiatan ekonomi produktif informal, dan masih membutuhkan dukungan untuk meningkatkan akses permodalan, stabilitas tingkat pendapatan, dan kesejahteraan. Beberapa hasil dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di antaranya: (i) penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dan koperasi, yang sejak tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2011 mencapai Rp 63,42 triliun, dan mencakup sekitar 5,72 juta nasabah. Pada periode tahun 2011, dana KUR yang sudah disalurkan mencapai Rp 29,00 triliun dengan jumlah nasabah lebih dari 1,9 juta nasabah dan rata-rata kredit/pembiayaan sebesar Rp 15,12 juta; (ii) peningkatan jangkauan informasi program KUR pada UMKM, koperasi dan aparat pemerintah di 33 provinsi; (iii) peningkatan kapasitas permodalan 1.370 koperasi pedesaan dan perkotaan; (iv) peningkatan kapasitas 360 Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS); (v) peningkatan jumlah lembaga keuangan mikro (LKM) yang bertransformasi menjadi KSP/KJKS sebanyak 100 LKM; (vi) peningkatan kapasitas 100 LKM dalam pemanfaatan jasa keuangan; (vii) peningkatan kapasitas penjaminan kredit daerah dan lembaga modal ventura daerah untuk memberikan fasilitasi pembiayaan bagi koperasi dan UMKM; (viii) peningkatan dukungan sarana pemasaran di daerah tertinggal/ perbatasan melalui revitalisasi enam pasar tradisional yang dikelola oleh koperasi; (ix) peningkatan kapasitas dan kompetensi 760 pengelola LKM/KSP/USP melalui diklat dan sertifikasi kompetensi; dan (x) peningkatan pemahaman dan pengetahuan dari 756 peserta bimbingan teknis perkoperasian. Pada tahun 2012, penyaluran KUR direncanakan mencapai Rp 30 triliun. Pelaksanaan Klaster III juga diperluas di antaranya melalui pendampingan bagi 27.520 UMKM untuk mengakses KUR, pemasyarakatan dan diklat kewirausahaan bagi 4.400 orang, dan penyediaan sebanyak 425 tenaga/petugas lapangan untuk penyuluhan perkoperasian bagi masyarakat.

Selanjutnya pada tahun 2012, Program-program Penanggulangan Kemiskinan akan diperluas lagi menjadi 4

klaster, dengan tambahan Klaster keempat yang dinamakan Program Pro Rakyat. Program Pro Rakyat ini ditujukan untuk melengkapi berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan melalui tiga klaster program penanggulangan kemiskinan. Diharapkan program ini dapat meningkatkan dan memperluas cakupan program-program yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan termarginalkan. Selain kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pada pelayanan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, juga dilaksanakan penyediaan rumah sangat murah, air bersih dan listrik murah serta peningkatan kehidupan nelayan. Khusus untuk peningkatan kehidupan nelayan, diberikan bantuan kepada individu nelayan dan kelompok nelayan, serta dilakukan pengembangan sarana prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Bantuan tersebut menggunakan PPI sebagai basis lokasi dan dilaksanakan di 100 PPI pada tahun 2011 dan 400 PPI pada tahun 2012. Dalam rangka meningkatkan akses penguasaan dan pemilikan tanah/lahan bagi masyarakat miskin, dilakukan *land reform* melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). Pada tahun 2011, telah dilakukan redistribusi tanah sebanyak 140.365 bidang. Diperkirakan pada tahun 2012 akan didistribusikan kembali status pemilikan dan penguasaan sebanyak 149.600 bidang.

1.2.1.2 Permasalahan dan Sasaran

Permasalahan penanggulangan kemiskinan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2013 adalah: (i) adanya kecenderungan pelambatan penurunan tingkat kemiskinan secara nasional. Penurunan tingkat kemiskinan nasional sejak tahun 2008 cenderung mengalami pelambatan. Hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran penurunan kemiskinan secara jangka menengah sesuai dengan RPJMN 2010-2014, terutama apabila penanganan program penanggulangan kemiskinan tidak mengalami perubahan yang signifikan (*business as usual*); (ii) semakin besarnya jumlah penduduk yang rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan (penduduk hampir miskin), yang disebabkan terutama oleh guncangan ekonomi yang menimbulkan adanya fluktuasi harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya; (iii) dampak iklim global yang juga masih menjadi tantangan dalam penanggulangan kemiskinan yang berpengaruh pada kehidupan ekonomi nelayan seperti berkurangnya waktu melaut, maupun pada petani dengan

terjadinya banjir dan cuaca yang tidak menentu sehingga mempengaruhi waktu tanam dan hasil panen; (iv) masih rendahnya tingkat pemenuhan beberapa kebutuhan dasar (indikator kemiskinan non pendapatan) seperti pada kecukupan pangan (kalori), layanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, perumahan serta kebutuhan listrik dan bahkan terjadi ketimpangan antar golongan pendapatan; (v) masih banyaknya masyarakat miskin termarjinalkan, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan yang kurang memiliki akses terhadap sarana dan infrastruktur dasar kesehatan dan pendidikan, seperti misalnya permasalahan keadaan bangunan gedung sekolah yang kurang layak pakai; (vi) ketidaktepatan penetapan peserta program penanggulangan kemiskinan/target penerima bantuan, akibat adanya perbedaan antara data yang digunakan sebagai dasar alokasi dengan kondisi di lapangan yang cukup dinamis (perubahan dari adanya kelahiran, perpindahan/mobilitas, kematian, kondisi ekonomi, dan sebagainya); (vii) keterbatasan jangkauan atau cakupan manfaat bantuan, akibat kuota atau alokasi dana yang tidak memadai dibandingkan kebutuhan masyarakat miskin; (viii) permasalahan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan antar program penanggulangan kemiskinan. Selain dikarenakan oleh lemahnya mekanisme pembagian tugas antar instansi pemerintah terkait, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar pemerintah pusat dan daerah, terutama menyangkut sosialisasi petunjuk pelaksanaan program. Sebagai contoh dalam mengimplementasikan program-program PNPB Jati dan PNPB Penguatan masih ditemukan kurangnya sinergitas dengan program-program Pemerintah Daerah (Pemda); (ix) permasalahan disparitas jumlah dan persentase penduduk miskin antara Jawa/Bali dengan daerah lainnya di Indonesia, sehingga memerlukan penanganan yang berbeda antar wilayah; (x) kurang optimalnya keterlibatan masyarakat terutama masyarakat miskin dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, baik karena keterbatasan akses, informasi, teknologi dan budaya, juga karena terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia dalam melakukan pendampingan; (xi) masih banyaknya kelompok usia produktif yang tidak memiliki akses terhadap kesempatan kerja sehingga tidak dapat memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi; (xii) iklim usaha yang ada belum mampu mendukung kesempatan untuk berusaha khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Selain itu, rendahnya kapasitas kewirausahaan, teknis, dan manajerial membuat akses masyarakat miskin yang memiliki kegiatan produktif terhadap sumber permodalan dan pemasaran untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan masih kurang; dan (xiii) terbalasnya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari tanah negara berupa tanah terlantar dan kawasan hutan.

Selanjutnya, dengan memperhatikan perkembangan capaian tahun 2012 serta perkiraan permasalahan pada tahun 2013 sebagaimana diuraikan di atas, tingkat kemiskinan nasional ditargetkan dapat diturunkan hingga pada kisaran **9,5-10,5 persen** dari jumlah penduduk pada tahun 2013.

1.2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai visi pembangunan nasional yang menciptakan masyarakat yang maju, sejahtera dan berkeadilan, upaya-upaya penurunan tingkat kemiskinan untuk mencapai sasaran pada tahun 2013 perlu lebih diperluas baik sasaran maupun cakupan kegiatannya yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut: (i) Mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan padat karya (*pro-growth & pro-job*), khususnya pertumbuhan sektor-sektor usaha yang melibatkan orang miskin (*pro-poor*) sehingga berkontribusi secara ekonomis terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan; (ii) Menjaga kestabilan produksi, ketersediaan stok bahan pangan, serta keterjangkauan agar tingkat konsumsi masyarakat miskin tidak jatuh sehingga kualitas kehidupan masyarakat miskin tidak semakin buruk. Hal ini sejalan dengan sasaran di Prioritas Nasional 5 Ketahanan Pangan; (iii) Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat miskin untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui kemandirian ekonomi perdesaan, perbaikan pemenuhan pelayanan dasar, maupun pengoptimalan potensi daerah. Secara lebih rinci, arah kebijakan ini dijelaskan dalam Buku II Bab IX Bidang Wilayah dan Tata Ruang; (iv) Memperluas dan menyempurnakan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat miskin, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas masyarakat miskin dalam aspek akses permodalan, akses pasar, keterampilan usaha, produksi, dan kelembagaan usaha melalui koperasi; (v) Meningkatkan

efektivitas pelaksanaan program-program pro-rakyat yang bertujuan untuk menyediakan akses fasilitas dasar bagi masyarakat nelayan, miskin perkotaan, dan daerah tertinggal; dan (vi) Meningkatkan kualitas pelayanan jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Arah kebijakan pertama terkait dengan kebijakan dalam kerangka pembangunan ekonomi secara menyeluruh yang dijelaskan pada Buku 1 RKP 2012. Adapun arah kebijakan lainnya akan dilakukan melalui 5 (lima) fokus prioritas yaitu:

Fokus 1. Peningkatan dan Penyempurnaan Kualitas Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga.

Untuk tahun 2013, Fokus 1 mengenai bantuan sosial berbasis keluarga akan diarahkan pada peningkatan kualitas dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Klaster 1, dengan cara mempersiapkan secara optimal penggunaan database terpadu (*unified database*) hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 untuk penentuan sasaran/*targeting* program. Dengan adanya *database* tunggal dan terpadu, dapat direncanakan pemakaian sistem kartu kepesertaan program Klaster 1, yang memungkinkan setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) memperoleh akses ke seluruh program bantuan sosial yang diperlukan. Lebih lanjut, perlu ada mekanisme pemutakhiran data di tingkat daerah untuk mengisi kesenjangan data antar PPLS, yang saat ini dimutakhirkan setiap tiga tahun.

Selanjutnya, pada tahun 2013 akan dilakukan pula: (i) Penyempurnaan proses verifikasi kepatuhan peserta PKH; (ii) Perluasan cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 2,4 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) serta mencakup seluruh wilayah Indonesia; (iii) Peningkatan koordinasi antarprogram bantuan sosial dengan menerapkan sistem kombinasi antar program, sehingga peserta PKH juga bisa mendapatkan fasilitas Bantuan Siswa Miskin, Jamkesmas dan Raskin; (iv) Peningkatan cakupan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi 171 ribu anak dan balita telantar, anak jalanan, anak dengan kecacatan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus; pelayanan sosial bagi 44 ribu lanjut usia telantar; dan rehabilitasi sosial bagi 52 ribu penyandang disabilitas (orang dengan kecacatan); (v) Pelaksanaan redistribusi tanah sebanyak 200.833 bidang;

serta (vi) Penguatan akses dan kualitas pelayanan program KB bagi keluarga miskin di daerah tertinggal, terpendid dan perbatasan didukung dengan promosi kebijakan pengendalian kependudukan serta peningkatan dukungan sarana dan prasarana pelayanan program KB dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk miskin serta meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin.

Fokus 2. Penyempurnaan dan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan PNPB Mandiri.

Dalam Fokus 2. pada tahun 2013, penyempurnaan pelaksanaan PNPB Mandiri dilakukan dengan: (i) Melanjutkan pelaksanaan PNPB Mandiri inti di 6.035 kecamatan di seluruh Indonesia; (ii) Peningkatan efektivitas dampak PNPB Mandiri dan peningkatan kualitas lembaga keswadayaan masyarakat yang sudah terbangun melalui PNPB Mandiri; (iii) Peningkatan kualitas dan perluasan integrasi PNPB Mandiri inti dengan Penguatan, dengan pemanfaatan lembaga keswadayaan sebagai wadah partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di wilayahnya dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kecamatan; (iv) Penguatan kapasitas masyarakat pedesaan dan perkotaan dalam menyuarakan aspirasi dan menentukan kebutuhannya; (v) Penajaman distribusi BLM dengan menambah kriteria khusus dalam penentuan alokasi dana BLM per kecamatan, yaitu kriteria tingkat kesulitan geografis dan tingkat penyerapan dana BLM; (vi) Peningkatan keterkaitan perencanaan di tingkat masyarakat dengan perencanaan reguler pemerintah dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran yang herpihak pada masyarakat miskin melalui koordinasi lintas sektor; (vii) Peningkatan kegiatan ekonomi produktif dan infrastruktur skala kecil untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, salah satunya melalui kegiatan pengembangan usaha di bidang agribisnis pertanian.

Fokus 3. Peningkatan Akses Usaha Mikro dan Kecil kepada Sumberdaya Produktif.

Dukungan Pemerintah bagi pengembangan usaha mikro dan kecil pada tahun 2013 mencakup arah kebijakan yang lebih menyeluruh dalam rangka meningkatkan akses usaha mikro dan kecil kepada sumber daya produktif. Arah kebijakan

tersebut ditujukan tidak saja untuk meningkatkan akses usaha mikro dan kecil ke sumber permodalan, namun juga untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan usaha. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, langkah-langkah peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumber daya produktif akan ditempuh melalui lima strategi yaitu (i) peningkatan akses ke permodalan; (ii) peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM); (iii) peningkatan akses pemasaran; (iv) peningkatan kualitas produksi; dan (v) penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro dan kecil. Upaya-upaya tersebut difokuskan pada fasilitasi bagi peningkatan pendapatan usaha mikro yang sebagian besar masih berada dalam kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin, dan pengembangan usaha yang berkelanjutan bagi usaha kecil.

Peningkatan akses usaha mikro dan kecil ke permodalan dilaksanakan antara lain melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang penyalurannya terus diperluas melalui dukungan penjaminan, pengembangan pola kerja sama penyaluran antara bank dan lembaga keuangan masyarakat (*linkage*), dan penyediaan pendampingan bagi usaha mikro dan kecil yang akan mengakses KUR. Peningkatan akses permodalan juga dilakukan melalui peningkatan peran dan kapasitas lembaga pembiayaan non perbankan, termasuk koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro non koperasi. Skema dukungan pembiayaan juga diperkuat dengan penyediaan modal awal usaha (*start-up capital*) bagi wirausaha baru. Upaya-upaya tersebut dilengkapi dengan peningkatan kapasitas kewirausahaan, keterampilan teknis dan manajerial, dan kapasitas produksi melalui penerapan teknologi tepat guna. Dukungan juga diberikan melalui revitalisasi sarana pemasaran dan koperasi. Revitalisasi koperasi secara khusus ditujukan untuk memperkuat koperasi sehingga dapat menjadi wadah usaha bersama bagi usaha mikro dan kecil yang menjadi anggota koperasi untuk meningkatkan skala, efisiensi dan posisi tawar usaha. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat mendukung usaha mikro dan kecil untuk tumbuh menjadi usaha yang memiliki daya tahan yang tinggi sehingga mempunyai kontribusi yang signifikan tidak saja dalam penanggulangan kemiskinan, namun juga dalam pertumbuhan ekonomi.

Fokus 4. Peningkatan dan Perluasan Program-Program Pro-Rakyat

Dalam Fokus 4, pada tahun 2013 akan dilakukan peningkatan

dan perluasan program-program pro-rakyat yang tergabung dalam Klaster 4, dimana program-program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan termarjinalkan. Program-program tersebut ditujukan untuk melengkapi berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan melalui tiga klaster program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, cakupan sasaran, program dan kegiatan untuk pengurangan kemiskinan akan diperluas termasuk juga keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program. Untuk meningkatkan dukungan dari pihak-pihak terkait, maka akan diadakan peningkatan sosialisasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan dari unsur-unsur pemerintahan, swasta, universitas, dan asosiasi pekerja baik di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, maka pemerintah dapat melakukan implementasi kegiatan program-program di Klaster 4 dengan lebih baik. Khusus untuk peningkatan kehidupan nelayan, pada tahun 2013 akan difokuskan pada 200 PPI dengan kegiatan berupa pemberian bantuan kepada nelayan dan kelompok nelayan serta pengembangan sarana prasarana PPI.

Fokus 5. Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Harmonisasi antar Pelaku.

Dalam Fokus 5 pada tahun 2013 akan dilakukan: (i) revitalisasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K); (ii) peningkatan kapasitas dan fungsi Kementerian/Lembaga serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota; (iii) meningkatkan kerjasama dan partisipasi swasta melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan lembaga masyarakat lain, misalnya dana *Zakat Infak dan Sadaqah (ZIS)* dan dana masyarakat lainnya; dan (iv) penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan dan alokasi anggaran; (v) penguatan kelembagaan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada masyarakat miskin; (vi) memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; meningkatkan ketahanan desa sebagai wilayah produksi; serta meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan; dan

(vii) penanganan kantong-kantong kemiskinan terutama yang berada di daerah tertinggal, terdampar dan terluar, termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar dan pendukung (meliputi listrik, air, jalan penghubung antar pulau) di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. Uraian (vi) dan (vii) ini terkait dengan arah kebijakan pada **Bab IX Bidang Wilayah dan Tata Ruang**.

1.2.2 Perubahan Iklim Global

1.2.2.1 Kondisi Umum

Pemanasan global dan perubahan iklim merupakan fenomena yang semakin menjadi penting dalam perencanaan pembangunan nasional, karena berdampak signifikan terhadap hasil pembangunan dan keberlangsungan kehidupan. Fenomena yang terjadi seperti (i) kenaikan permukaan air laut, (ii) perubahan/ pergeseran musim hujan dan musim kering yang berdampak pada produksi pertanian, dan (iii) peningkatan frekuensi dan intensitas banjir, kekeringan dan kebakaran hutan, akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan apabila tidak ditangani secara tepat dan menyeluruh. Secara global, perubahan iklim juga telah berdampak pada gagalnya produksi komoditas pangan yang mengakibatkan naiknya harga komoditas pangan pokok dunia.

Berkaitan dengan itu, Indonesia terus berperan aktif dalam upaya menurunkan laju perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Indonesia telah mensahkan *United Nations Framework Convention on Climate Change*-UNFCCC melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 dan telah meratifikasi Protokol Kyoto atas UNFCCC melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2004, serta berperan aktif melalui berbagai kerjasama baik bilateral maupun multilateral di bidang perubahan iklim, seperti dengan Australia, Jerman, Inggris, UNDP, Bank Dunia dan sebagainya.

Sebagai wujud komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020, pada tahun 2011 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Peraturan Presiden ini berisikan rencana aksi dari sektor-sektor prioritas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. Untuk mendukung penyusunan RAN-

GRK tersebut, telah ditetapkan pula Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Di samping itu, telah diluncurkan dan disosialisasikan Program Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), yang akan memberikan arahan bagi daerah dalam menyusun RAD-GRK dalam kurun waktu 12 bulan sejak RAN-GRK ditandatangani. Pada tahun 2012 diharapkan seluruh provinsi telah menyusun RAD-GRK yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Selain mitigasi, upaya adaptasi juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi dalam mengatasi perubahan iklim global. Saat ini pemerintah sedang menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Adaptasi Perubahan Iklim, yang diharapkan selesai pada akhir tahun 2012.

Dalam hal pendanaan Pemerintah telah membentuk wadah pengelolaan dana perubahan iklim berupa *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*. Melalui ICCTF, masyarakat internasional akan dapat menyalurkan dana komitmen perubahan iklim mereka untuk dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Dana dalam ICCTF disepakati untuk digunakan bagi 3 (tiga) kegiatan yaitu: (i) pengembangan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan, (ii) langkah-langkah konservasi energi, dan (iii) penyadaran publik, pelatihan dan pendidikan untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Berkaitan dengan pengelolaan hutan, upaya menghadapi perubahan iklim dilakukan melalui penerapan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan (*Sustainable Forest Management/ SFM*) yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penyerapan gas karbon dioksida. Emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan disebabkan oleh pembukaan lahan untuk kegiatan lain, seperti pertanian dan permukiman, dan terjadinya kerusakan hutan. Dalam rangka pengurangan dorongan pembukaan hutan dan penyebab kerusakan hutan, telah dilakukan penanganan *illegal logging*, pencegahan kebakaran hutan, serta penanggulangan perambahan hutan. Di sisi lain, untuk meningkatkan penyerapan gas karbon dioksida dan stok karbon telah dilaksanakan upaya penanaman dan rehabilitasi hutan di berbagai wilayah. Pada tahun 2010 upaya tersebut diperkirakan telah mencapai 100.000 hektar. Sebagai upaya pendukung di sektor kehutanan telah dilakukan juga peningkatan *forest governance* melalui penyelesaian tata batas

222.972 km hingga tahun 2010 dan pembentukan kelembagaan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) di seluruh provinsi. Sejalan dengan hasil UNFCCC, Indonesia juga telah mengimpor mekanisme *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD) dalam bentuk *demonstration activities*, serta penyusunan strategi, kelembagaan dan mekanisme pendanaan.

Pada sektor energi, telah dilakukan upaya penerapan program efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon, pengembangan bahan bakar nabati, serta pelaksanaan program desa mandiri energi. Untuk lebih meningkatkan pemanfaatan energi bersih, sedang disusun pula draft Peraturan Pemerintah mengenai Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan. Langkah efisiensi energi telah dipercepat dengan pengesakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 70 Tahun 2009 mengenai Konservasi Energi.

Pada sektor kelautan, telah dilakukan peningkatan kapasitas dan ketahanan masyarakat di wilayah pesisir dalam mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim melalui sosialisasi, penyadaran masyarakat dan pelatihan. Selain itu, telah disusun Sistem Informasi Mitigasi Bencana Tsunami di Kab. Pesisir Selatan, yang diharapkan dapat diperluas ke daerah lain. Rehabilitasi mangrove juga dilakukan di berbagai lokasi wilayah pesisir dengan luas rehabilitasi mencapai 47 Ha. Kelembagaan pengelolaan mangrove telah diperkuat dengan adanya Kelompok Kerja Mangrove Nasional yang melibatkan berbagai institusi.

Dalam rangka peningkatan kualitas informasi, dilakukan pengembangan informasi dini di bidang iklim dan cuaca secara cepat dan akurat, sebagai instrumen untuk mengambil langkah-langkah antisipasi. Pada saat ini sedang disusun pula Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Mitigasi Bencana sebagai turunan dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Melihat kecenderungan kejadian bencana di Indonesia dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, kekeringan, tanah longsor, puting beliung dan gelombang pasang merupakan jenis bencana yang dominan di Indonesia. Berdasarkan data BNPB, tahun 2002-2011 menunjukkan bahwa sekitar 89% dari total bencana di Indonesia

diferensiasi oleh bencana hidrometeorologi. Perubahan iklim global, degradasi lingkungan, dan bertambahnya jumlah penduduk semakin memperbesar ancaman risiko bencana. Untuk itu, upaya penanggulangan bencana diarahkan kepada peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat terutama di daerah risiko tinggi bencana melalui pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Selain itu penyediaan informasi kebencanaan sangat diperlukan dalam upaya pemaduan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan dan pelaksanaan penanganan darurat yang efektif dan efisien di daerah pasca bencana.

Pengembangan upaya adaptasi dampak perubahan iklim yang telah dilaksanakan di bidang pertanian antara lain meliputi: pengembangan Sistem Intensifikasi Beras (*System of Rice Intensification - SRI*), pengembangan penelitian sumber daya lahan pertanian, penyiapan kalender tanam semi iklim untuk Kalimantan dan Sulawesi, pengujian pola integrasi tanaman-ternak, pengembangan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (*SL-PTT*) Perubahan Iklim, pengelolaan sumberdaya ikan, serta pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan.

Langkah-langkah konkrit tersebut menunjukkan adanya keseriusan masyarakat Indonesia dalam melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia sekaligus berkontribusi pada masyarakat global

1.2.2.2 Permasalahan dan Sasaran

Berkaitan dengan kelembagaan, dirasakan banyaknya pemangku kepentingan dalam penanggulangan dampak perubahan iklim, rendahnya kesiapan institusi, dan penanganan yang bersifat parsial. Pengarusutamaan dalam melaksanakan berbagai upaya adaptasi dan mitigasi tersebut di atas perlu terus didukung dengan peningkatan kapasitas, baik kelembagaan penanganan dampak perubahan iklim, dan kemampuan serta partisipasi masyarakat.

Berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, masih dihadapi: (i) rendahnya kapasitas sumber daya manusia; (ii) masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap upaya penanganan perubahan iklim; (iii) masih kurangnya kapasitas pemerintah daerah dalam memadukan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah; dan (iv) masih

kurangnya pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Di bidang instrumen penerapan, dirasakan masih kurangnya kebijakan dan peraturan yang herpihak pada pelaksana kegiatan di bidang perubahan iklim; masih terbatasnya sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan penanganan dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana; serta belum terciptanya sistem dan mekanisme insentif/disinsentif.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, sasaran pembangunan lintas bidang perubahan iklim dalam RKP 2013 adalah: (1) meningkatnya pemahaman dan kesadaran para pelaku pembangunan untuk menerapkan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dalam setiap aktivitas pembangunan yang dilakukan; (2) meningkatnya kapasitas para pelaku dan langkah-langkah konkrit adaptasi perubahan iklim di sektor pertanian, kelautan perikanan, pesisir, sarana dan prasarana, kesehatan; (3) meningkatnya pelaksanaan rencana aksi mitigasi perubahan iklim di sektor pertanian, kelautan dan lahan gambut, energi, transportasi, industri, dan pengelolaan limbah; (4) tersusunnya basis data dan indikator dalam pengukuran capaian pengendalian dampak perubahan iklim; (5) terciptanya sistem dan mekanisme untuk mendorong diberlakukannya insentif/disinsentif di bidang perubahan iklim; (6) meningkatnya sumber-sumber pendanaan alternatif bagi kegiatan perubahan iklim; (7) tersusunnya rencana aksi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah; dan (8) meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

1.2.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk itu strategi untuk mengantisipasi dampak dan mengendalikan laju perubahan iklim adalah sebagai berikut: (1) mensosialisasikan dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional (RAN) serta Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); (2) menyusun RAN Adaptasi Perubahan Iklim; (3) meningkatkan riset dan menerapkan teknologi mutakhir dan rendah emisi dalam rangka adaptasi terhadap perubahan iklim; (4) sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai perubahan iklim mitigasi dan adaptasinya kepada masyarakat luas secara langsung, maupun melalui media massa/ elektronik; (5) menyiapkan inventarisasi GRK sebagai basis data dalam menurunkan emisi GRK; (6) melakukan pemantauan melekat terhadap pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi untuk mengukur capaian target penanganan pencegahan dampak perubahan iklim; (7)

sosialisasi dan dukungan penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) di daerah; dan (viii) dukungan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui gladi, simulasi penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana.

Arah kebijakan lintas bidang untuk mengantisipasi dampak dan mengendalikan laju perubahan iklim pada tahun 2012 diarahkan untuk (i) melaksanakan inventarisasi dan penurunan emisi gas rumah kaca; (ii) meningkatkan upaya mitigasi terutama di sektor kehutanan dan energi; (iii) meningkatkan upaya adaptasi pada sektor pertanian dan perikanan, terutama dalam rangka pengamanan produksi pangan; (iv) meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi terutama di daerah-daerah; dan (v) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana.

1.2.3 Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan

1.2.3.1 Kondisi Umum

Pembangunan kelautan merupakan pembangunan multi sektor yang memerlukan peningkatan keterpaduan. RPJMN 2010-2014 mengamankan peningkatan sinergi antarsektor dan antarpemangku kepentingan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Untuk itu, berbagai langkah kebijakan telah ditempuh dalam rangka meningkatkan pembangunan kelautan berdimensi kepulauan. Langkah-langkah yang ditempuh terutama adalah akselerasi penyelesaian batas laut dengan negara tetangga, dan pengawasan dalam rangka pengendalian pelanggaran di laut serta menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Selain itu, sinergi diupayakan dalam pengelolaan sumber daya kelautan serta peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil, termasuk pulau terdepan/terluar, termasuk sarana dan prasarana penghubung antarpulau, serta meningkatkan upaya pelestarian lingkungan pesisir dan laut.

Dalam rangka akselerasi penyelesaian batas dengan negara tetangga, telah dilakukan perundingan dengan negara tetangga untuk membuat kesepakatan tentang penetapan garis batas laut teritorial, landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Penetapan batas secara tuntas telah

dilakukan dengan Papua Nugini berupa batas laut serta Australia berupa batas landas kontinen dan ZEE. Ketetapan batas laut teritorial sudah tercapai pada sebagian segmen batas laut wilayah dengan Malaysia dan Singapura, landas kontinen dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, dan Papua Nugini. Hingga tahun 2011 telah terdapat 16 (enam belas) perjanjian perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga.

Dalam rangka menekan ancaman kekerasan berupa pembajakan, perompakan, sabotase, dan teror terhadap obyek vital; ancaman navigasi berupa kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi; ancaman sumber daya berupa perusakan dan pencemaran laut; dan ancaman kedaulatan dan hukum berupa *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal mining* termasuk pengambilan harta karun, penyelundupan barang dan senjata, serta imigran gelap, pemerintah terus menerus meningkatkan upaya-upaya pengamanan perairan Indonesia, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Di tahun 2011, telah dilakukan harmonisasi serta koordinasi antarinstansi yang memiliki tugas di laut, yaitu Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), TNI-AL, TNI-AU, Polisi Air, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan dalam pengamanan dan pengawasan di laut, antara lain melalui Operasi Gurita. Selain itu, dilakukan pula operasi kapal pengawas kelautan dan perikanan serta patroli terkoordinasi dengan Australia dan Malaysia. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kemampuan operasi pengawasan, pengejaran, dan upaya keselamatan pelayaran di laut, Bakorkamla telah membangun kapal patroli katamaran; *National Picture Compilation (NPC)*, *Ground Station (GS) Kamla*, *Maritime Regional Control Center (MRCC)/Regional Control Center (RCC)*, dan menyediakan *Call Center*.

Ketuhanan dan kedaulatan wilayah NKRI perlu didukung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di pulau-pulau kecil. Untuk itu, pada tahun 2011 pengelolaan pulau-pulau kecil yang ditargetkan untuk difokuskan pada 30 pulau, dengan kegiatan yang dilakukan meliputi identifikasi potensi dan pemetaan pulau-pulau kecil, penyediaan infrastruktur, serta rehabilitasi ekosistem. Khusus untuk penyediaan infrastruktur pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terdepan/terluar, upaya yang dilakukan pada tahun 2011 antara lain melalui pembangunan sarana dan

prasarana (listrik tenaga surya, sarana air minum, jalan setapak, dan dermaga) di 34 pulau-pulau kecil dari target sebanyak 30 pulau. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut berdampak pada peningkatan aksesibilitas masyarakat pulau-pulau kecil ke sumber pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan pembangunan antara pulau besar atau negara tetangga dengan pulau-pulau kecil.

Sehubungan dengan berkembangnya kerjasama ekonomi trans regional seperti ASEAN, *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), *Asian Free Trade Area* (AFTA), dan *East Asia Summit* (EAS), yang menuntut Indonesia untuk bekerjasama dan membuka akses pasar, akses transportasi, maupun akses terhadap fasilitas prasarana dan sarana lainnya di Indonesia khususnya transportasi laut, maka penguatan konsep kedaulatan ekonomi dan wilayah harus dapat dijabarkan dalam arah dan kebijakan pembangunan berdimensi kepulauan yang ditujukan untuk memperkuat konektivitas nasional Indonesia sebelum terlanjur membuka akses yang luas terhadap regional maupun global.

Peningkatan penyediaan pelayanan jasa transportasi antara lain dilakukan melalui pembangunan baru dan lanjutan 30 unit kapal penyeberangan perintis, pengoperasian 100 lintas kapal penyeberangan perintis, serta subsidi pelayaran perintis sebanyak 61 trayek di 30 pangkalan perintis. Selain itu, pada tahun 2011 telah dilakukan (i) pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran seluas 8,17 juta m³ di 18 lokasi; (ii) peningkatan/pembangunan pelabuhan baru dan lanjutan di 255 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia; (iii) pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) yang meliputi menara suar 18 unit dan rambu suar 29 unit, pelampung suar 30 unit, dan pemasangan *Vessel Traffic Services* (VTS) di wilayah Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok; (iv) serta pembangunan kapal perintis/penumpang sebanyak 5 unit.

Selanjutnya, dalam rangka mempertahankan fungsi ekosistem pesisir dan laut sebagai pendukung kehidupan, dan mewujudkan pembangunan wilayah pesisir dan laut yang berkelanjutan, upaya yang dilakukan antara lain melalui penetapan kawasan konservasi perairan yang mencapai 15,39 juta ha sampai dengan tahun 2011, rehabilitasi dan pemeliharaan terumbu karang pada 16 kabupaten/kota di 8 provinsi, peningkatan penanaman mangrove, serta peningkatan kerja sama internasional dalam rangka

konservasi laut melalui *Carri Triangle Initiative (CTI)*, *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME)*, *Mangrove for the Future (MFF)*, *Bismarck Solomon Seas Ecoregion (BSSI)*, *Arafura and Timor Seas Action (ATSEA)*. Upaya kerja sama antardaerah juga dilakukan dalam rangka pengelolaan Teluk Bone, Teluk Tomini dan Selat Karimata.

Pembangunan kelautan berdimensi kepulauan ini perlu didukung dengan informasi geospasial kelautan yang merupakan informasi utama dalam pengelolaan lingkungan, penanganan bencana dan pengamanan serta perundingan batas yurisdiksi negara Indonesia dengan negara tetangga. Pencapaian tahun 2011 terkait pembangunan data dan informasi geospasial kelautan antara lain: (i) Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) skala 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000, dan Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) skala 1:500.000 sebanyak 61 Nomor Lembar Peta (NLP); (ii) peta resmi tingkat peringatan tsunami sebanyak 2 NLP; (iii) data survei batimetri wilayah pantai dengan *singlebeam* dan *multibeam* sebanyak 22 NLP; (iv) peta dasar kelautan sebanyak 1 NLP; dan (v) peta tematik sumber daya alam dan lingkungan hidup laut sebanyak 90 NLP. Perkiraan pencapaian pembangunan data dan informasi geospasial kelautan pada tahun 2012 antara lain: (i) Peta LPI skala 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000, dan Peta LLN skala 1:500.000 sebanyak 56 NLP; (ii) peta resmi tingkat peringatan tsunami sebanyak 3 NLP; (iii) peta dasar kelautan sebanyak 1 NLP; dan (iv) peta tematik sumber daya alam dan lingkungan hidup laut sebanyak 90 NLP.

1.2.3.2 Permasalahan dan Sasaran

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan pembangunan kelautan berdimensi kepulauan antara lain adalah masih adanya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan adanya konflik antarsektor dan antardaerah dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Dari sisi kedaulatan NKRI, permasalahan yang dihadapi adalah masih belum selesainya batas wilayah laut Indonesia dengan beberapa negara tetangga dan masih sering terjadi pelanggaran lintas batas laut, serta rendahnya tingkat keamanan di beberapa wilayah laut.

Luasnya wilayah perairan Indonesia yang dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana penjagaan dan pengawasan terutama kapal patroli, *surveillance system*, dan pos-pos keamanan mengakibatkan masih banyaknya area-area kosong (*blank spot*) yang tidak terjangkau operasi

pengawasan dan pengamanan. Akibatnya di wilayah laut yurisdiksi nasional, intensitas gangguan keamanan dan pelanggaran hukum masih tinggi dan belum sepenuhnya dapat ditangani oleh negara. Kondisi ini juga terkait dengan intensitas operasi yang sangat terbatas baik yang dilakukan secara terpadu maupun secara mandiri oleh lembaga-lembaga yang berwenang di laut. Berdasarkan data *International Maritime Bureau (IMB)*, pada tahun 2011 sampai dengan bulan September telah terjadi serangan bajak laut sebanyak 352 kali di jalur pelayaran, di mana 199 terjadi di Somalia, dan 41 insiden di Selat Malaka (sementara pada 3 tahun sebelumnya telah terjadi penurunan insiden secara drastis). Kondisi ini menyebabkan dunia pelayaran internasional masih menempatkan Selat Malaka dan perairan internasional Indonesia lainnya sebagai wilayah yang relatif berbahaya bagi pelayaran kapal-kapal asing. Pengamanan jalur pelayaran internasional yang melalui Selat Malaka dan tiga jalur ALKI adalah tanggung jawab Pemerintah Indonesia. Kelalaian dan kelemahan dalam pengamanannya, memiliki konsekuensi masuknya pasukan asing untuk turut mengamankannya sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1816 pada tanggal 2 Juni 2008 sebagaimana diterapkan di perairan Somalia.

Dalam upaya penguatan konektivitas nasional, permasalahan yang masih dihadapi dalam transportasi laut yang berperan sebagai penghubung antarpulau adalah terbatasnya jumlah kapal dan rute pelayaran penyediaan transportasi angkutan laut dan penyeberangan perintis. Hal ini menyebabkan rendahnya aksesibilitas dari dan ke pulau-pulau yang merupakan daerah terpencil dan tertinggal.

Khusus pulau-pulau kecil terluar, masih terdapat kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang tinggal di pulau-pulau tersebut dengan penduduk di negara tetangga yang dapat berdampak lagi penurunan rasa kebangsaan atau nasionalisme. Pulau-pulau kecil terluar merupakan daerah yang rawan terhadap pelanggaran wilayah kedaulatan dan pelanggaran hukum (misalnya sebagai daerah transit kegiatan penyelundupan, *illegal entry*, terorisme, dan *illegal fishing*).

Permasalahan lain yang dihadapi dalam pembangunan kelautan adalah menurunnya kualitas ekosistem pesisir dan laut, yang berakibat pada menurunnya ketersediaan sumber daya plasma nutfah. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan ekonomi di wilayah pesisir

menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan laut, seperti pencemaran lingkungan laut dan pesisir akibat limbah hasil samping kegiatan pertambangan, manufaktur dan agroindustri, limbah aktivitas kehutanan, dan pencemaran akibat tumpahan minyak. Praktik penangkapan ikan yang merusak dan penambangan terumbu karang juga telah memperparah kondisi ekosistem pesisir dan laut. Selain itu, kerusakan lingkungan juga berpotensi semakin meningkat akibat adanya pemanasan global yang menyebabkan meningkatnya muka air laut yang menyebabkan terjadinya banjir, abrasi dan intrusi air laut, serta terjadinya pemutihan terumbu karang (*coral bleaching*) akibat perubahan iklim.

Sedangkan untuk data dan informasi spasial kelautan, permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antar instansi terkait yang menyebabkan data dan informasi spasial kelautan nasional masih belum terintegrasi dengan baik. Selain itu, belum banyak survei kelautan terkait dengan pemetaan batimetri dilakukan di Indonesia karena biayanya sangat besar. Padahal, survei batimetri berpotensi memperluas wilayah Indonesia, terutama di batas landas kontinen.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka sasaran pembangunan lintas bidang pembangunan kelautan berdimensi kepulauan adalah: (i) tersusunnya kebijakan kelautan yang terpadu; (ii) terselenggarakannya penyelesaian tata batas wilayah laut dengan negara tetangga; (iii) meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau terkepung/terluar di 60 pulau serta meningkatnya aksesibilitas melalui peningkatan pelayanan transportasi; (iv) meningkatnya pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan pelanggaran di wilayah laut NKRI terutama di Selat Malaka dan jalur ALKI; (v) terkelolanya kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan seluas 3,2 juta hektar, dan terpeliharanya kerja sama antardaerah dan antarnegara dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut berupa CTI, SSME, MFF, BSSE, ATSEA, Teluk Tomini, Teluk Bone, dan Selat Karimata; dan (vi) meningkatnya SDM kelautan yang memiliki kompetensi dan daya saing di bidang industri pelayaran, kelautan dan perikanan; (vii) tersedianya data dan informasi geospasial spasial kelautan nasional yang terintegrasi antarinstansi pengelola data spasial kelautan, termasuk pelaksanaan survei batimetri di beberapa wilayah di Indonesia.

1.2.3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan permasalahan dan sasaran di atas, kebijakan pembangunan kelautan berdimensi kepulauan diarahkan pada : (i) penyelesaian penyusunan kebijakan kelautan atau peraturan perundangan tentang kelautan sebagai landasan kebijakan dalam pembangunan kelautan; (ii) mempercepat penyelesaian batas laut yang masih bermasalah; (iii) meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan; (iv) meningkatkan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terdepan/terluar termasuk pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat seperti perhubungan dan komunikasi, transportasi, air bersih, listrik; (v) meningkatkan penyediaan pelayanan transportasi perintis terutama di pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar dan perbatasan serta *public service obligation* untuk angkutan laut; dan (vi) meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan laut, melalui peningkatan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, lamun dan terumbu karang), pengendalian pencemaran, serta peningkatan kerja sama antardaerah dan antarnegara dalam pengelolaan ekosistem; (vii) meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM kelautan; (viii) menyediakan data dan informasi spasial kelautan nasional yang terintegrasi, yang meliputi perairan laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Nusantara.

1.2.4 Perlindungan Anak

1.2.4.1 Kondisi Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, definisi anak adalah semua orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 menunjukkan bahwa populasi anak mencapai 81,4 juta atau sekitar 34,3% dari populasi penduduk Indonesia. Sementara itu berdasarkan data Susenas tahun 2009, sekitar 28 persen anak tinggal di rumah tangga kuintil termiskin, 23 persen dalam kuintil termiskin kedua, sedangkan hanya 13 persen berada di kuintil terkaya (Susenas 2009, diolah SMERU).

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh sebab itu, hak-hak dasar mereka harus

dihargai, dipenuhi, dan dilindungi agar mereka dapat menegenbau tugas dan harapan yang diberikan kepada mereka. Hak dasar anak tersebut mencakup hak hidup, hak tumbuh dan berkembang secara optimal, serta hak berpartisipasi. Selain itu, setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Pemenuhan akan hak-hak anak seperti diuraikan di atas menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Sesuai dengan UU Perlindungan Anak, negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat adalah berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sedangkan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (i) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (ii) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (iii) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Melihat kebutuhan anak yang beragam, pencapaian pemenuhan hak-hak anak sangat terkait dengan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang terkait.

Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi anak tercermin dari menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup (SDKI 2002/2003 dan 2007), dan menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak balita dari 18,4 persen pada tahun 2007 menjadi 17,9 persen pada tahun 2010 (Riset Kesehatan Dasar/Riskesdas 2007 dan 2010). Meningkatnya akses anak terhadap layanan pendidikan ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS). Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengindikasikan proporsi anak usia 7-12 tahun yang duduk di bangku sekolah (APS 7-12 tahun) meningkat dari 97,95 persen pada tahun 2009 menjadi 98,02 persen pada tahun 2010. Pada kelompok usia 13-15 tahun, APS meningkat dari 85,43 persen pada tahun 2009 menjadi 86,24 persen pada tahun 2010. Pada periode tahun yang sama, APS 16-18 tahun juga mengalami peningkatan dari 55,05 persen menjadi 56,01

persen. Di samping itu, data Kemendiknas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD pada tahun 2009/2010 mencapai 53,70 persen, meningkat dari 50,62 persen pada tahun 2008/2009.

Sementara itu, dalam memenuhi hak anak untuk mendapatkan identitas dan legalitas kewarganegaraan, pada tahun 2011 telah ditandatangani nota kesepakatan antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Sosial, Menteri Agama, dan Menteri PP dan PA tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak Untuk meningkatkan perlindungan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), pada tahun 2011 RUC tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dibahas dengan Komisi III DPR. Selain itu, telah tersusun RPP Pengasuhan, Perwalian dan Pengangkatan Anak.

Dalam upaya menurunkan jumlah pekerja anak, pada tahun 2011 telah dilaksanakan penarikan terhadap 3.360 pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) dalam rangka Program Keluarga Harapan (PKH-PKH). Sebanyak 3.032 orang atau sekitar 90,2 % dari pekerja anak tersebut, telah berhasil dikembalikan ke dalam satuan pendidikan. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial bagi anak, Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) pada tahun 2011 mencakup sekitar 6.925 halita terlantar, 142.530 anak terlantar, 4.200 anak jalanan, 930 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), 1.750 Anak Dengan Kecacatan (ADK), dan 650 Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK). Kepada anak-anak tersebut diberikan subsidi untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti kesehatan, gizi, pendidikan, pakaian, akte kelahiran, penyatuan kembali dengan orang tua/keluarga, alat bantu, dan lain-lain. Selanjutnya, sampai dengan tahun 2011 sebanyak 76 kabupaten/kota telah menuju Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan gambaran pencapaian kabupaten/kota dalam hal pemenuhan hak anak, yang mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, partisipasi, serta perlindungan dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

1.2.4.2 Permasalahan dan Sasaran

Meskipun telah ada kemajuan yang dicapai di bidang perlindungan anak sebagaimana diuraikan di atas, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dan terus

menjadi perhatian pemerintah, para pembuat kebijakan, para pemangku kepentingan lain, serta masyarakat pada umumnya.

Permasalahan *pertama*, masih belum optimal dan meratanya akses anak terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang dan kelangsungan hidup. Di bidang pendidikan, antara lain ditunjukkan oleh masih rendahnya cakupan layanan pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif, akses anak kepada pendidikan menengah yang berkualitas dan relevan, serta angka partisipasi sekolah dan angka melanjutkan sekolah pada anak dari kelompok miskin. Di bidang kesehatan, permasalahan terkait anak antara lain masih rendahnya persentase anak usia 12-23 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (53,8 persen, Riskesdas 2010), disparitas cakupan imunisasi pada balita antartingkat sosial ekonomi, dan masih banyaknya provinsi dengan prevalensi kekurangan gizi di atas rata-rata nasional.

Permasalahan *kedua*, masih kurang terlindunginya anak-anak dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, kelitakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2006 sekitar 4 juta anak mengalami kekerasan setiap tahun (Susenas 2006) dan sekitar 1,8 juta pekerja anak usia 5-17 tahun (SPA 2009). Selain itu, sampai dengan akhir 2011, terdapat sekitar 500 ribu anak yang berada dalam pengasuhan dan pengawasan panti asuhan (Kemensos), sekitar 4,6 juta anak terlantar (Kemensos), sebanyak 5.513 anak berada di rumah tahanan (Ditjen Pas Kemeralukham), sebanyak 924 kasus perdagangan anak (*International Organization for Migration/IOM*). Selanjutnya, sekitar 47,5 persen anak balita tidak memiliki akta kelahiran (Susenas 2009). Hal ini antara lain karena orang tua mengalami kesulitan dalam mengurus akte kelahiran bagi anak yang usianya sudah diatas 1 tahun karena harus melalui pengadilan serta banyaknya pasangan suami istri (orang tua) yang tidak memiliki dokumen tercatat atas pernikahan dan perceraian mereka yang merupakan prasyarat dalam pengurusan akte kelahiran anak. Berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh anak-anak tersebut akan berdampak buruk bagi perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Untuk meminimalkan dampak buruk tersebut, mereka harus mendapat bantuan medis, hukum, dan psikososial yang layak. Namun demikian, akses dan kualitas pelayanan dasar yang diterima oleh anak-anak korban

kekerasan terhadap anak, ARTI, anak berkebutuhan khusus (ABK), dan anak dari keluarga miskin masih rendah. Selain itu, proses penegakan hukum atas ABH kurang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Permasalahan *ketiga*, masih rendahnya kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh belum maksimalnya peraturan perundang-undangan terkait upaya perlindungan anak dalam mengatur dan mengupayakan kepentingan terbaik anak, belum tersedianya data dan informasi yang akurat secara lengkap, masih rendahnya kapasitas tenaga pemberi layanan, dan masih kurangnya koordinasi diantara kementerian/lembaga terkait serta koordinasi pusat dan daerah.

Permasalahan *keempat*, berbagai laporan penelitian, hasil studi maupun kajian menunjukkan masih rendahnya pemahaman keluarga dan masyarakat tentang hak-hak anak. Selain itu, pengetahuan dan keterampilan keluarga tentang pengasuhan yang baik juga masih rendah. Perilaku masyarakat masih permisif terhadap KtA karena alasan " demi kebaikan si anak atau tujuannya baik". Hal ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan segala bentuk perlakuan salah sebagian besar dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan anak.

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut di atas, maka sasaran pembangunan perlindungan anak pada tahun 2013 adalah:

1. Meningkatnya akses anak atas layanan yang berkualitas untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Hal ini antara lain diukur dengan meningkatnya cakupan kunjungan neonatal, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, APK PAUD, APS7-12 tahun, APS 13-15 tahun, APS 16-18 tahun, serta menurunnya persentase balita yang kekurangan gizi;
2. Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan segala bentuk perlakuan salah. Hal ini antara lain diukur dengan meningkatnya upaya-upaya pencegahan untuk menurunkan resiko anak menjadi korban perlakuan salah, akses anak korban perlakuan salah dan anak berkebutuhan khusus atas layanan yang berkualitas, cakupan anak balita/anak yang mempunyai akte kelahiran, cakupan penanganan ABH berbasis

restorative justice, serta memurutnya pekerja anak;

3. Meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas data/informasi perlindungan anak, sinergi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak, kuantitas dan kualitas tenaga pelaksana perlindungan anak, koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan antar pusat dan daerah dalam perlindungan anak, dan pengawasan terhadap efektivitas perlindungan anak;
4. Meningkatnya pemahaman para pengambil keputusan dan masyarakat tentang hak-hak anak, dan pengetahuan dan keterampilan keluarga tentang pengasuhan anak.

1.2.4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan sasaran yang akan dicapai di atas, kebijakan peningkatan perlindungan anak diarahkan pada: (i) peningkatan akses anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak; (ii) peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan segala bentuk perlakuan salah; (iii) peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak; dan (iv) peningkatan advokasi dan sosialisasi tentang hak anak dan pengasuhan anak. Kebijakan perlindungan anak tersebut dilaksanakan melalui tiga fokus prioritas. *Pertama*, peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak. *Kedua*, perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi. *Ketiga*, peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Detil kegiatan prioritas dari 3 (tiga) fokus prioritas di atas dapat dilihat di Tabel 2.2.A tentang Target Kinerja Lintas Bidang Perlindungan Anak.

1.2.5 Pembangunan Karakter Bangsa

1.2.5.1 Kondisi Umum

Pembangunan karakter bangsa merupakan salah satu upaya kunci untuk mewujudkan bangsa yang memiliki jati diri dan bermartabat di antara bangsa-bangsa di dunia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, bahwa visi dan misi pembangunan nasional antara lain adalah mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang maju, mandiri, dan adil, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia,

bermoral, beretika dan berbudaya dan berkeadilan berdasarkan falsafah Pancasila.

Berbagai upaya untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa telah memberikan landasan bagi terbangunnya masyarakat madani, antara lain ditandai oleh: (i) semakin kokohnya konsolidasi demokrasi yang dilandasi oleh empat pilar bangsa yakni NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika; (ii) semakin berkembangnya proses internalisasi nilai-nilai luhur, pengetahuan dan teknologi tradisional, serta kearifan lokal yang relevan dengan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti nilai-nilai persaudaraan, solidaritas sosial, saling menghargai, serta rasa cinta tanah air; (iii) meningkatnya kebebasan masyarakat untuk berpendapat dan berserikat; dan (iv) meningkatnya kohesivitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap gotong-royong, toleransi, ramah tamah dan menghargai perbedaan.

1.2.5.2 Permasalahan dan Sasaran

Pembangunan karakter bangsa sampai dengan tahun 2011 telah menunjukkan berbagai kemajuan, namun masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi.

Pertama, belum optimalnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang relevan dengan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila merupakan landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa merupakan pandangan hidup yang diharapkan dapat diejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang merupakan intisari Pancasila dengan menumbuhkembangkan etika kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, meningkatnya konflik horizontal karena alasan perbedaan pandangan politik, agama, kesukuan dan kedaerahan. Perkembangan dunia global yang disertai oleh perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi menjadikan interaksi antar manusia menjadi semakin intensif. Kondisi yang sedemikian dinamis membawa

pengaruh terhadap perubahan orientasi nilai dan perilaku. Kondisi tersebut selalu dapat menjadi modal dan pendukung dalam pembangunan nasional, juga dapat memicu terjadinya konflik yang tidak sehat. Untuk itu diperlukan adanya suatu orientasi yang berkelanjutan dalam rangka internalisasi peningkatan tata nilai sosial kemasyarakatan dan budaya dalam setiap aspek pembangunan. Dengan demikian tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan upaya pelestarian dan penanaman nilai-nilai luhur budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air sebagai identitas budaya yang berfungsi sebagai perekat persatuan bangsa.

Ketiga, masih rendahnya daya saing dan kemandirian bangsa. Daya saing merupakan modal kemandirian suatu bangsa. Kemampuan bangsa untuk berdaya saing ditentukan oleh upaya bangsa tersebut untuk melestarikan dan mengembangkan pranata sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang kreatif, inovatif, efektif dan efisien. Dengan demikian tantangan yang dihadapi adalah mewujudkan bangsa yang mandiri, berdaya saing, memiliki etos kerja melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kemandirian aparatur pemerintahan dan aparatur penegak hukum.

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, maka sasaran pembangunan karakter bangsa pada tahun 2013 sebagai berikut: (a) meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya karakter bangsa yang berdasarkan falsafah Pancasila untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa; dan (b) meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang maju, mandiri, adil, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab.

1.2.5.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut di atas, kebijakan pembangunan karakter bangsa diarahkan pada (i) Pengembangan karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing, dinamis, dan berorientasi iptek yang dilandasi oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila, dan (ii) Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya karakter dan jati diri bangsa agar memiliki ketahanan budaya yang tangguh; dan (iii) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dalam rangka mewujudkan daya saing dan kemandirian bangsa dalam era globalisasi.

Kebijakan pembangunan karakter bangsa pada tahun 2013 dilaksanakan sesuai dengan Prioritas Pembangunan yang

tertuang dalam RPJMN 2010-2014, terutama yang memuat upaya-upaya strategis dalam membangun karakter bangsa seperti prioritas pembangunan di bidang Pendidikan; Kesehatan; Sarana dan Prasarana (Komunikasi dan Informatika), Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; Kesejahteraan Rakyat Lainnya (Agama, Pemuda dan Olahraga, dan Kependudukan dan Keluarga Berencana); Politik, Hukum dan Keamanan (Politik dan Komunikasi, Pertahanan dan Keamanan), serta Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (Hukum dan Aparatur).

Di bidang pendidikan, upaya peningkatan pendidikan karakter bangsa antara lain dilakukan melalui: (i) sosialisasi, edukasi dan internalisasi pentingnya bangsa yang berkepribadian unggul dan berkarakter, (ii) internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran pada pendidikan formal, nonformal, informal dalam keluarga dan di tempat bekerja, (iii) intervensi regulasi, pelatihan dan pemberdayaan, serta pembiasaan (habituasi) bagi semua kepentingan, (iv) pembudayaan berperilaku dan berkarakter yang dikuatkan dengan penanaman nilai-nilai kehidupan agar menjadi budaya, (v) membangun kerja sama yang sinergis antarpemangku kepentingan, dan (vi) peningkatan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta bahasa perhubungan luas antarbangsa.

Di bidang kesehatan, upaya pembangunan karakter bangsa antara lain dilakukan melalui peningkatan upaya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Di bidang sarana dan prasarana, khususnya sub bidang komunikasi dan informatika antara lain dilakukan melalui: (i) penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan layanan komunikasi dan informatika, serta peningkatan jangkauan dan keberlanjutan layanan komunikasi dan informatika di wilayah perbatasan, perdesaaan, terpencil, dan wilayah non-komersial lainnya, dan (ii) peningkatan e-literasi melalui peningkatan kualitas SDM TIK termasuk aparatur pemerintah serta mendukung pengembangan industri manufaktur TIK dalam negeri.

Di bidang kebudayaan, upaya pembangunan karakter bangsa antara lain dilakukan melalui: (i) pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal, (ii) pemahaman tentang kesejarahan dan wawasan

kebangsaan, (iii) pelestarian, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya bangsa, (iv) pemberdayaan masyarakat adat, dan (v) pengembangan promosi kebudayaan dengan pengiriman misi kesenian, pameran, dan pertukaran budaya.

Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi upaya pembangunan karakter bangsa antara lain dilakukan melalui: (i) penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) yang diprioritaskan pada penataan kelembagaan iptek untuk membangun tata kelola penelitian dan pengembangan yang efisien dan efektif, yang mampu mendorong kreativitas dan profesionalisme masyarakat iptek, serta mampu membangun kesadaran iptek dan partisipasi masyarakat, dan (ii) peningkatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, teknologi kesehatan, serta pengembangan teknologi material maju.

Di bidang agama, upaya pembangunan karakter bangsa antara lain dilakukan melalui: (i) peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, (ii) peningkatan layanan keagamaan, (iii) peningkatan kualitas lembaga sosial keagamaan, serta penelitian dan pengembangan agama.

Di bidang pemuda dan olahraga, upaya pembangunan karakter bangsa antara lain dilakukan melalui: (i) peningkatan character building, revitalisasi, dan konsolidasi gerakan kepemudaan, (ii) revitalisasi gerakan pramuka, (iii) pengembangan penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kreativitas pemuda, (iv) penyadaran pemuda, (v) pemberdayaan pemuda, (vi) pengembangan kepemimpinan pemuda, (vii) pengembangan kewirausahaan pemuda, (viii) pengembangan kepeloporan/kreativitas pemuda, (ix) pembinaan dan pengembangan olahraga, (x) pengelolaan keolahragaan, (xi) penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan, dan (xii) pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga.

Di bidang kependudukan dan keluarga berencana, upaya pembangunan karakter bangsa dilakukan melalui pembinaan keluarga melalui bina keluarga balita dan remaja, serta pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka

meningkatkan dan mempertahankan kesertaan ber-KB, serta meningkatkan kesertaan KB mandiri.

Di bidang politik dan komunikasi, upaya pembangunan karakter bangsa antara lain dilakukan melalui: (i) pemantapan koordinasi yang komprehensif antara lembaga negara dan masyarakat dalam penangkalan, penanggulangan dan pemberantasan infrastruktur terorisme dan tindak pidana terorisme; (ii) peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam menghadapi persoalan politik dan penegakan hukum di wilayah konflik dan pasca-konflik vertikal dan horisontal; (iii) pemantapan forum konsultasi publik antara Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konsolidasi demokrasi; (iv) pemantapan pembangunan Pusat Pendidikan Kebangsaan yang berintikan pada pengembangan dan pemahaman empat pilar bangsa; (v) pelaksanaan pendidikan pemilih secara konsisten, terutama dengan menanamkan hak dan kewajiban dalam demokrasi; (vi) pemantapan koordinasi dalam proses pemberantasan infrastruktur terorisme dan pencegahan kejahatan terorisme dengan organisasi masyarakat sipil, terutama organisasi keagamaan; (vii) penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di daerah dalam mendukung proses konsolidasi demokratisasi dan penyelesaian konflik vertikal dan horisontal; (viii) penguatan dialog publik antara Pemerintah dengan berbagai kelompok yang berbeda kepentingan di wilayah konflik dan pasca-konflik vertikal dan horisontal; (ix) peningkatan kapasitas dan kualitas SDM komunikasi dan informasi terutama di daerah; (x) peningkatan kualitas dan akurasi informasi publik, serta meningkatkan kecepatan pelayanan bagi para pengguna informasi publik; (xi) peningkatan efektivitas pelayanan media center terutama di daerah terdepan/terluar, tertinggal, terpencil, serta daerah konflik dan pasca konflik vertikal dan horisontal; dan (xii) peningkatan peran dan revitalisasi media tradisional dan peningkatan kapasitas media komunitas dalam penyebaran informasi publik.

Di bidang pertahanan dan keamanan, upaya pembangunan karakter bangsa antara lain dilakukan melalui: (i) percepatan pembentukan komponen bela negara, dan (ii) ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan narkoba,

penyediaan fasilitas terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, dan pemberantasan jaringan narkoba.

Di bidang hukum dan aparatur, upaya pembangunan karakter bangsa antara lain dilakukan melalui: (i) peningkatan kinerja lembaga penegak hukum, diantaranya melalui pelaksanaan akuntabilitas penegakan hukum, dan perbaikan pelayanan hukum yang lebih berkualitas, (ii) peningkatan penghormatan terhadap HAM, diantaranya melalui pembaruan materi hukum, (iii) peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, diantaranya melalui penegakan hukum yang kuat dan dipercaya, pencegahan KKN melalui penegakan sistem integritas aparatur negara, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

1.2.6 Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat

1.2.6.1 Kondisi Umum

Gizi masih merupakan salah satu masalah utama di Indonesia terutama pada kelompok rentan yakni ibu dan anak. Hal ini ditandai dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) yakni sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup (2007) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yakni sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup (2007). Pada tahun 2007, prevalensi anak balita yang mengalami kekurangan gizi dan tumbuh pendek (*stunting*) masing-masing 18,4 persen dan 36,8 persen. Walaupun prevalensi kekurangan gizi dan pendek (*stunting*) menurun menjadi masing-masing 17,9 persen dan 35,6 persen pada tahun 2010, tetapi masih terjadi disparitas antarprovinsi yang perlu mendapat penanganan secara spesifik dan sensitif di wilayah rawan (Riskesdas, 2010). Permasalahan gizi lainnya yang perlu mendapatkan perhatian yakni masih tingginya penduduk dengan Kekurangan Vitamin A (KVA), yodium (Gangguan Akibat Kurang Yodium/GAKY), anemia gizi besi dan kekurangan zat gizi mikro lainnya serta rendahnya pemberian ASI eksklusif. Disamping itu, status gizi pada ibu hamil perlu ditingkatkan karena masih tingginya bayi yang lahir dengan berat badan rendah (kurang dari 2.500 gram) yaitu sebesar 11,1 persen (Riskesdas, 2010).

Status gizi masyarakat yang masih rendah tersebut merupakan akibat dari masih rendahnya asupan dan mutu dari gizi masyarakat. Hal ini terkait erat dengan ketersediaan pangan. Peta penduduk rawan pangan

berdasarkan data RPS tahun 2010 masih menunjukkan situasi yang sangat memprihatinkan. Jumlah penduduk sangat rawan pangan yaitu dengan asupan kalori kurang dari 1.400 Kkal per orang per hari mencapai 15,34 persen, angka ini meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2009 yaitu 14,47 persen. Selain masih banyaknya penduduk rawan pangan, status gizi yang masih rendah ini dipengaruhi oleh faktor perilaku konsumsi pangan masyarakat yang mencakup pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola pangan keluarga. Sementara itu, kondisi keamanan pangan masih memprihatinkan. Situasi keamanan pangan pada periode 2006-2010, antara lain dapat dilihat dari adanya kenaikan produk industri pangan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Penyebab masalah keamanan tersebut antara lain : cemaran mikroba, Bahan Tambahan Pangan (RTP) pemanis berlebih, pewarna bukan untuk makanan, EUP pengawet (benzoat) berlebih, serta penyalahgunaan bahan berbahaya boraks dan formalin.

Tingginya masalah gizi juga berkaitan dengan faktor sosial budaya, antara lain kesadaran individu dan keluarga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) termasuk sadar gizi dalam hal pemberian ASI eksklusif dan asupan gizi seimbang. Hanya 41 persen keluarga yang mempunyai perilaku pemberian makanan bayi yang benar. Asupan kalori ibu hamil tidak memenuhi kebutuhan karena ditemukan 44,4 persen ibu hamil mendapat asupan kalori di bawah kebutuhan minimum. Menurut hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai 6 bulan hanya berkisar 28,6 persen (2007), 24,3 persen (2008) dan 34,3 persen (2009). Hasil Riskesdas (2010) menunjukkan bahwa persentase bayi yang diberikan ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan hanya 15,3 persen.

Dengan melihat kondisi di atas, upaya penanganan permasalahan gizi ini memerlukan koordinasi lintasbidang, lintassektor, lintasprogram, lintaspelaku, dan lintas kementerian/lembaga (K/L). Beberapa sektor dan lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

(Rappenas) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, sektor industri dan organisasi non pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Seluruh pihak terkait perlu terlihat dalam perbaikan gizi secara tepat, efisien, berdampak luas dalam upaya koordinasi antara jaringan (*networkings*) serta perlunya gerakan yang memungkinkan berbagai pemangku kepentingan bekerjasama dan berkontribusi secara berkesinambungan.

1.2.6.2 Permasalahan dan Sasaran

Beberapa permasalahan terkait status gizi masyarakat, antara lain : (i) masih rendahnya status gizi masyarakat; (ii) masih rendahnya akses pangan; (iii) masih rendahnya mutu dan keamanan pangan; (iv) masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat; serta (v) masih lemahnya kelembagaan bidang pangan dan gizi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, sasaran kebijakan lintas bidang peningkatan status gizi masyarakat, antara lain : (i) meningkatnya status gizi masyarakat dengan fokus utama pada perbaikan status gizi sejak 1.000 hari dari awal kehidupan mulai masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun; (ii) meningkatnya akses pangan; (iii) meningkatnya mutu dan keamanan pangan; (iv) meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat; serta (v) menguatnya kelembagaan pangan dan gizi.

1.2.6.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Kebijakan peningkatan status gizi masyarakat dilakukan melalui :

1. Prioritas peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan mencakup :
 - a. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, melalui : (i) peningkatan persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)); (ii) peningkatan cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1); (iii) cakupan pelayanan kesehatan bayi dan cakupan pelayanan kesehatan balita; serta (iv) perluasan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi pelayanan kesehatan primer di Puskesmas.
 - b. Peningkatan pembinaan gizi masyarakat, melalui : (i) peningkatan persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan dan (ii) balita ditimbang berat badannya (D/S).

- c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan melalui peningkatan persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
 - d. Peningkatan pengawasan pangan, melalui : (i) peningkatan pengawasan produk dan bahan berbahaya; (ii) peningkatan jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang diperiksa (dihitung dari sekitar 150.000); (iii) peningkatan jumlah produk Obat dan Makanan yang disampel dan diuji (dihitung dari sekitar 1 juta produk beredar); (iv) peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut informasi jejaring nasional, regional dan internasional terkait *rapid alert* dan *response* permasalahan keamanan makanan (dihitung dari jumlah informasi yang masuk dalam jejaring), serta (v) peningkatan persentase pangan jajanan anak sekolah (PJAS) yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi.
2. Prioritas ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kelautan, serta kehutanan mencakup pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar dilakukan, melalui : (i) keragaman pangan olahan dengan tambahan unsur gizi dan berbasis sumber pangan lokal; (ii) pemerataan distribusi dan aksesibilitas pangan olahan; (iii) pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; (iv) kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; (v) peran kelembagaan keamanan pangan.
 3. Prioritas peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan mencakup : penyediaan layanan PAUD yang mencakup peningkatan pengetahuan dan kecakapan keorangtuaan (*parenting education*).
 4. Prioritas pengendalian kuantitas penduduk melalui :
 - a. Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi, mencakup : (i) pengembangan kebijakan, strategi, dan materi informasi kualitas hidup ibu, bayi dan anak (KHIBA) dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi (PMKR) yang dapat dioperasionalkan; (ii) fasilitasi pembinaan kelangsungan hidup ibu, balita,

dan anak serta PMKR.

- b. Pembinaan Keluarga Balita dan Anak, mencakup : (i) pengembangan kebijakan, strategi dan materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang dapat dilaksanakan; (ii) peningkatan pemahaman keluarga yang memiliki balita dan anak dalam melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak; dan (iii) peningkatan sarana dan prasarana pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak.
5. Prioritas penguatan kelembagaan gizi melalui : (i) peningkatan kemitraan dan kerjasama multi-sektor dalam bidang pangan dan gizi; (ii) peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan di bidang gizi yang memadai.

1.2.7 Percepatan Pencapaian Sasaran MDGs

1.2.7.1 Kondisi Umum

Upaya pencapaian sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs) merupakan komitmen bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus memenuhi komitmen global. Untuk mempercepat pencapaian sasaran MDGs telah ditetapkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Sampai dengan tahun 2011, beberapa sasaran MDGs telah dicapai, sebagian besar akan dapat dicapai pada tahun 2015, sedangkan sebagian lagi memerlukan upaya keras untuk dapat mencapainya. Sasaran MDGs yang telah dicapai antara lain: (i) Tujuan MDG 3, dengan target rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki-laki SD/MI/Paket A, SMP/MTs./Paket B, dan di perguruan tinggi, serta rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki umur 15 - 24 tahun; (ii) Tujuan MDG 6, dengan target pengendalian penyebaran dan penurunan jumlah kasus baru Tuberkulosis (TB).

Sasaran MDGs yang telah menunjukkan kemajuan signifikan yaitu: (i) Tujuan MDG 1, dengan target Indeks kedalaman kemiskinan dan proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja; (ii) Tujuan MDG 2, dengan target Angka partisipasi murni (APM) SD, proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar, serta angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun; (iii) Tujuan MDG 3, dengan target rasio APM

perempuan/laki-laki di tingkat SMA, dan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian, serta proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR; (iv) Tujuan MDG 4, dengan target Angka kematian bayi, balita, dan proporsi anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak; (v) Tujuan MDG 5, dengan target angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah dengan menggunakan semua cara, angka kelahiran remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan usia 15-19 tahun, dan cakupan pelayanan antenatal; (vi) Tujuan MDG 7, yang mempunyai target konsumsi bahan perusak ozon, proporsi tangkapan ikan yang tidak melebihi batas biologis yang aman, dan rasio luas kawasan lindung, serta rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial; (vii) Tujuan MDG 8, dengan target rasio ekspor dan impor terhadap PDB, rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum, dan rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR, rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB, rasio pembayaran pokok utang dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor (DSR), dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta proporsi penduduk yang memiliki jaringan telepon tetap dan telepon seluler.

1.2.7.2 Permasalahan dan Sasaran

Pembangunan percepatan pencapaian MDGs terutama diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran yang masih memerlukan upaya keras yaitu: (i) Tujuan MDG 1, yaitu menurunkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional; (ii) Tujuan MDG 5, yaitu menurunkan angka kematian ibu dan menurunkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*); (iii) Tujuan MDG 6, yaitu mengendalikan prevalensi HIV/AIDS, meningkatkan penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi dan meningkatkan proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS, meningkatkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua dan menurunkan jumlah kasus baru malaria; (iv) Tujuan MDG 7, yaitu meningkatkan rasio luas kawasan tertutup pepohonan terhadap luas daratan, menurunkan jumlah emisi CO₂, serta meningkatkan proporsi rumah tangga terhadap air minum layak dan sanitasi layak; (v) Tujuan MDG 8, yaitu meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses internet dan yang memiliki komputer pribadi.

1.2.7.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan permasalahan di atas, kebijakan percepatan pencapaian sasaran MDGs diarahkan pada: (i) mempertahankan sasaran MDGs yang telah dicapai; (ii) meningkatkan upaya untuk menjamin tercapainya sasaran MDGs; (iii) melakukan upaya keras untuk mencapai sasaran MDGs yang perlu perhatian khusus. Salah satu strategi untuk mencapai sasaran MDGs pada tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Inpres No. 3 Tahun 2010 adalah dengan meningkatkan dukungan bagi daerah melalui penyediaan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs dalam bentuk pemberian insentif MDGs kepada daerah. Untuk itu, perlu dilakukan kajian pendanaan mengenai penyediaan pembiayaan dalam percepatan pencapaian MDGs. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai rencana implementasi pembiayaan percepatan MDGs, kemampuan Pemerintah dalam penyediaan pendanaan, dan mekanisme serta tata hubungan kelembagaan maupun penyaluran pembiayaan tersebut.

Pemberian insentif MDGs kepada daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada Provinsi yang menunjukkan komitmen dan kinerja pencapaian MDGs yang baik. Indikator terpilih yang digunakan untuk menilai kinerja pencapaian MDGs mencakup 10 indikator, yaitu (i) Persentase penduduk miskin; (ii) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs; (iii) Rasio AMII 15-24 perempuan terhadap laki-laki; (iv) Rasio APM perempuan/laki-laki di sekolah menengah; (SMP/MTs); (v) Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi lengkap; (vi) Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih; (vii) Proporsi jumlah penemuan penderita TB (*Case Detection Rate-CDR*); (viii) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan; (ix) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi, perkotaan dan pedesaan; dan (x) Persentase rumah tangga menurut kriteria rumah tangga kumuh perkotaan.

Kinerja pencapaian MDGs di daerah akan diamati selama tiga tahun untuk melihat kecenderungan laju pencapaiannya. Data indikator terpilih yang akan digunakan harus memenuhi kriteria yang meliputi ketersediaan, kontinuitas, dan kredibilitas data. Sebagian besar data indikator berasal dari BPS, sedangkan indikator yang tidak tersedia dari BPS, akan

digunakan data dari Kementerian terkait.

Insentif yang diberikan akan digunakan oleh Provinsi untuk: (i) melaksanakan program-program percepatan pencapaian MDGs khususnya indikator yang capaiannya masih berada dibawah rata-rata nasional; (ii) membantu kabupaten/kota yang kinerja pencapaian MDGs berada dibawah rata-rata provinsi; (iii) memperkuat sistem database MDGs di provinsi dan kabupaten/kota; (iv) memperkuat koordinasi perencanaan dan penganggaran MDGs di provinsi dan kabupaten/kota; (v) memperkuat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi MDGs di provinsi dan kabupaten/kota; dan (vi) memperkuat dan memperluas informasi terkait MDGs melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada para pemangku kepentingan utama di daerah.

BAB 2 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

2.1 Kondisi Umum

Pada periode tahun 2011, berbagai upaya pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama telah dilaksanakan dan berkontribusi pada semakin meningkatnya kualitas hidup sumber daya manusia (SDM), yang ditandai oleh antara lain membaiknya derajat kesehatan dan tingkat pendidikan penduduk Indonesia dan yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar.

Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang mencakup bidang-bidang kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan dan gizi, pendidikan, perpustakaan, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan rangkaian upaya peningkatan kualitas hidup manusia guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera.

Kependudukan dan Keluarga Berencana. Penduduk tumbuh seimbang dapat diwujudkan melalui upaya pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, dan pengendalian mobilitas penduduk. Upaya pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui Keluarga Berencana (KB). Dengan melaksanakan KB, setiap keluarga dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera, yaitu dengan membentuk keluarga kecil yang berkualitas. Selain itu, program KB juga dapat meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, sehingga derajat kesehatan ibu dan anak akan membaik, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian program KB merupakan dasar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Data Sensus Penduduk (SP) menunjukkan bahwa pada periode 10 tahun terakhir (2000-2010), jumlah penduduk Indonesia secara absolut meningkat sebanyak 32,5 juta jiwa, yaitu dari sebanyak 205,8 juta jiwa (SP 2000) menjadi sebanyak 237,6 juta jiwa (SP 2010). Sedangkan rata-rata laju

pertumbuhan penduduk (LPP) Indonesia telah menurun dari sebesar 1,97 persen (1980-1990) menjadi sebesar 1,45 persen (1990-2000), namun pada periode 10 tahun terakhir, LPP mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 1,49 persen. Peningkatan jumlah penduduk tersebut disebabkan antara lain oleh penurunan angka kelahiran total (*total fertility rate/ TFR*) pada perempuan usia reproduksi yang tidak signifikan. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan bahwa TFR sedikit menurun dari sebesar 2,63 menjadi 2,60 kelahiran per perempuan usia reproduksi (SDKI 2002/03-2007). Stagnasi TFR tersebut disebabkan oleh sedikitnya peningkatan angka prevalensi pemakaian alat dan obat kontrasepsi/alokon (*contraceptive prevalence rate/ CPR*) cara modern, yaitu sebesar 1,3 persen; dari sebesar 56,7 persen menjadi sebesar 57,4 persen SDKI 2002/03-2007). Selain itu, peningkatan jumlah penduduk yang demikian besar juga disebabkan oleh membaiknya kualitas data SP 2010 dibandingkan dengan SP 2000.

Hasil-hasil yang dicapai pada tahun 2011 antara lain adalah meningkatnya CPR yang ditandai dengan meningkatnya jumlah peserta KB, yang meliputi: (i) meningkatnya pencapaian jumlah peserta KB baru dari sasaran sebanyak 7,2 juta menjadi sebanyak 9,58 juta yang terdiri dari jumlah peserta KB baru miskin (keluarga pra-sejahtera/KPS dan keluarga sejahtera I/KS 1) dan rentan lainnya sebanyak 4,29 juta, jumlah peserta KB baru yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebanyak 1,54 juta (16,0 persen), serta jumlah peserta KB baru pria sebanyak 773.935 (8,1 persen); dan (ii) meningkatnya pencapaian jumlah peserta KB aktif dari sasaran sebanyak 27,5 juta menjadi sebanyak 34,87 juta yang terdiri dari jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya menjadi sebanyak 14,6 juta, jumlah peserta KB aktif MKJP menjadi sebanyak 8,49 juta (24,4 persen), serta jumlah peserta KB aktif pria menjadi sebanyak 1,32 juta (3,7 persen).

Sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana pada tahun 2012 diharapkan akan tercapai. Diperkirakan jumlah peserta KB mencapai sasaran yang telah ditetapkan, antara lain yaitu meningkatnya jumlah peserta KB baru sebanyak 7,3 juta; meningkatnya jumlah peserta KB aktif sebanyak 28,2 juta; meningkatnya jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya sebanyak 3,89 juta; meningkatnya jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS 1)

dan rentan lainnya sebanyak 12,5 juta; meningkatnya persentase peserta KB baru MKJP sebesar 12,9 persen; meningkatnya persentase peserta KB aktif MKJP sebesar 25,9 persen; dan meningkatnya jumlah peserta KB baru pria menjadi 4,3 persen.

Berkenaan dengan kebijakan dalam rangka mendukung pembangunan bidang Kependudukan dan KB telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Selanjutnya untuk menindaklanjuti Undang-Undang ini juga telah dilakukan proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebanyak 11 RPP. Sementara itu, yang berkaitan dengan penyerasian kebijakan pembangunan bidang Kependudukan dan KB, pada tahun 2011 telah berhasil diinventarisasi dan diidentifikasi sebanyak 31 kebijakan, sebanyak 18 kebijakan di antaranya telah bersinergi dengan program KB, dan 13 kebijakan lainnya dianggap belum bersinergi dengan program KB.

Selain itu, keberhasilan pembangunan kependudukan dan KB didukung pula oleh penguatan manajemen data dan informasi kependudukan. Sumber data utama kependudukan diperoleh melalui Sensus, Supas, Survei, dan Registrasi Penduduk, serta Pendataan Sektoral. Sampai dengan tahun 2011, telah dilakukan SP 2010, Susenas 2011, Sakernas 2011, Riskesdas 2010 (Kementerian Kesehatan), dan Pendataan Keluarga (BKKBN). Sementara itu, untuk pelayanan registrasi penduduk dan pencatatan sipil, sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) telah dibangun di 497 kabupaten/kota. Pengembangan SIAK merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan pemerintah untuk memberikan nomor induk kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk dan menggunakan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen kependudukan. Penerapan Undang-Undang tersebut dijabarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat, meliputi peningkatan akses pelayanan kesehatan

dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak, peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan, peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata, peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan, peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan serta daya saing produk dalam negeri.

Status kesehatan dan gizi masyarakat terus menunjukkan perbaikan ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup (UHH) menjadi 71,1 tahun (2011), menurunnya angka kematian ibu (AKI) menjadi sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup (2007), menurunnya angka kematian bayi (AKB) menjadi sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup (2007), menurunnya prevalensi kekurangan gizi menjadi sebesar 17,9 persen (2010), dan menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (*stunting*) menjadi sebesar 35,6 persen (2010).

Upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan telah dilakukan antara lain melalui jaminan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (*Jampersal*), peningkatan pelayanan antenatal, peningkatan kuantitas dan kualitas keluarga berencana, dan didukung oleh Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat dari 77,34 persen (*Susenas*, 2009) menjadi 82,2 persen (*Riskesdas*, 2010). Namun demikian, persalinan di fasilitas kesehatan masih rendah yaitu sebesar 55,4 persen (*Riskesdas*, 2010). Sementara itu, kunjungan ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan pada trimester pertama kehamilan (K1) mencapai 72,3 persen, lebih tinggi dari kunjungan keempat yaitu sebesar 61,4 persen (*Riskesdas*, 2010). Fasilitas kesehatan yang mampu melaksanakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar (PONED) dan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi komprehensif (PONEK) terus ditingkatkan. Persentase puskesmas perawatan yang melaksanakan PONED sebesar 54 persen (*Profil Kesehatan*, 2010) sedangkan rumah sakit kabupaten/kota yang telah melaksanakan PONEK mencapai 87,61 persen (*Kemkes*, 2011).

Sementara itu upaya peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan akan terus ditingkatkan, melalui perbaikan akses dan kualitas pelayanan imunisasi. Persentase anak usia 12-23 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (DPT, Polio, DPT-HB, DPT-HIB dan Campak) mencapai 53,8 persen dan

yang mendapat imunisasi campak mencapai 74,4 persen (Riskesmas, 2010). Selanjutnya, kunjungan ke pelayanan kesehatan pada saat bayi berumur 6-48 jam (kunjungan neonatal pertama/KN1) mencapai 71,4 persen (Riskesmas, 2010). Cakupan pelayanan kesehatan bayi mencapai 85,16 persen dan cakupan pelayanan kesehatan balita mencapai 80,95 persen (Kemkes, 2011). Sementara itu, promosi kesehatan di tingkat keluarga untuk penanganan balita sakit dan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif dan makanan pelengkap yang sesuai terus dilakukan.

Selanjutnya, upaya perbaikan gizi masyarakat terus dilakukan, antara lain melalui pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI), pemberian ASI eksklusif, pemberian kapsul vitamin A pada balita, dan pemberian tablet besi (Fe) pada ibu hamil. Permasalahan gizi yang lain adalah kurang vitamin A (KVA), kurang yodium (gangguan akibat kurang yodium/GAKY), anemia gizi besi dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, sementara itu angka bayi yang lahir dengan berat badan rendah (kurang dari 2.500 gram) masih tinggi yaitu sebesar 11,1 persen (Riskesmas, 2010). Peningkatan peran serta masyarakat untuk memantau pertumbuhan bayi dan balita menunjukkan kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi penimbangan dari 45,4 persen (Riskesmas, 2007) menjadi 49,4 (Riskesmas, 2010).

Upaya pengendalian penyakit menular difokuskan pada penyakit HIV dan AIDS, tuberkulosis (TB), malaria, DRD dan diare. Sampai dengan akhir tahun 2011, jumlah kumulatif kasus AIDS sebesar 29.879 kasus. Kasus baru AIDS menurun dari 5.744 kasus (2010) menjadi 4.162 kasus (2011). Prevalensi HIV terus dipayakani mencapai kurang dari 0,5 persen. Berbagai upaya telah dilakukan baik dalam upaya preventif dan promotif melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait HIV dan AIDS maupun aspek yang bersifat kuratif dan rehabilitatif yakni pengobatan *anti retroviral* (ARV). Selanjutnya, jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan *testing* HIV sebanyak 548.256 orang, sedangkan persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman mencapai 69,06 persen (Kemkes, 2011). Jumlah kasus TB masih tinggi yakni sebesar 289 per 100.000 penduduk sedangkan persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan dan yang disembuhkan masing-masing sebesar 75,26 persen dan 86,22 persen (Kemkes, 2011). Sementara

itu, angka penemuan kasus malaria *annual parasite index* (API) sebesar 1,75 per 1.000 penduduk, jumlah kasus diare sebanyak 411 per 1.000 penduduk, serta angka kesakitan penderita DBD (*incidence rate*) sebesar 21,29 per 100.000 penduduk (Kemkes, 2011). Selanjutnya, berdasarkan hasil Riskesdas 2007, kondisi penyakit tidak menular cenderung mengalami peningkatan antara lain prevalensi hipertensi sebesar 31,9 persen, jantung sebesar 7,2 persen, diabetes melitus sebesar 1,1 persen, gangguan mental emosional sebesar 11,6 persen, prevalensi kanker/tumor sebesar 4,3 per 1.000 penduduk, dan kasus kecelakaan sebesar 25,9 persen.

Dalam upaya penyehatan lingkungan, akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi yang layak masih rendah yaitu sebesar 44,19 persen dan 55,53 persen (Susenas, 2010). Selain akses kepada air minum, kualitas air minum juga perlu diperhatikan agar dapat memenuhi syarat kesehatan. Secara nasional, persentase kualitas air minum yang termasuk dalam kategori baik (tidak keruh, tidak bewarna, tidak berasa, tidak berbusa, dan tidak berbau) telah mencapai 90,8 persen pada tahun 2011 (Kemkes, 2011). Sementara itu, sebanyak 6.235 desa telah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/STBM (Kemkes, 2011).

Dalam rangka pemenuhan tenaga kesehatan terus ditingkatkan melalui penempatan tenaga kesehatan melalui program pegawai tidak tetap (PTT), dan penugasan khusus terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Jumlah tenaga kesehatan tercatat sebanyak 25.333 orang dokter umum (dengan rasio sebesar 10,66 dokter per 100.000 penduduk), 8.731 orang tenaga dokter gigi (dengan rasio sebesar 3,68 dokter gigi per 100.000 penduduk) dan 96.551 orang bidan (dengan rasio sebesar 40,64 bidan per 100.000 penduduk). Tenaga kesehatan ini tersebar di seluruh fasilitas layanan kesehatan di Indonesia, baik di fasilitas pelayanan dasar maupun rujukan. Sampai dengan tahun 2010, jumlah tenaga kesehatan strategis dengan status PTT aktif yang bertugas di daerah dengan kriteria biasa, terpencil, dan sangat terpencil sebanyak 32.978 tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dengan status PTT tersebut terdiri dari dokter spesialis dan dokter spesialis gigi sejumlah 86 orang, dokter umum sejumlah 3.020 orang, dokter gigi sejumlah 904 orang, dan bidan sejumlah 28.968 orang. Sementara itu, tenaga kesehatan yang telah direkrut dan ditempatkan di DTPK sebanyak 699 dokter, 189 dokter gigi PTT, 142 bidan PTT, dan

293 tenaga kesehatan penugasan khusus.

Dalam rangka meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap obat, berbagai upaya telah dilakukan mencakup : penyediaan jumlah dan jenis obat generik; evaluasi dan penilaian terhadap harga obat, khususnya obat generik; labelisasi obat generik termasuk pencantuman harga eceran tertinggi (HET); peningkatan akses kelangkaan; dan penyuluhan dan penyebaran informasi, agar obat digunakan secara tepat dan rasional. Ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan mencapai 87 persen (Kemkes, 2011). Upaya pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan terus ditingkatkan. Pada tahun 2010, sebanyak 46,8 persen sarana produksi obat telah memiliki sertifikasi *Good Manufacturing Practices* (GMP) terkini, sebanyak 38.162 sarana produksi dan distribusi obat dan makanan telah diperiksa, dan 104.159 sampel produk obat dan makanan telah diperiksa (BPOM, 2010). Sementara itu, untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku obat dari luar negeri, berbagai penelitian terkait tanaman obat asli Indonesia sudah mencapai 40 penelitian dan standar tanaman obat yang disusun sudah mencapai 50 standar (BPOM, 2010).

Dalam rangka perlindungan terhadap risiko finansial akibat masalah kesehatan, pelaksanaan Jankesmas telah berhasil mendorong peningkatan cakupan jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan. Sampai dengan bulan Juni 2011, cakupan asuransi kesehatan telah mencapai sekitar 62,94 persen. Cakupan tersebut terdiri dari asuransi kesehatan pegawai negeri sipil (PNS dan TNI/POLRI) sebesar 7,36 persen, Jamsostek sebesar 2,05 persen, asuransi perusahaan, swasta dan lainnya sebesar 7,71 persen, jaminan kesehatan masyarakat (Jankesmas) sebesar 32,30 persen, dan 13,52 persen tercalup dalam Jankesda bagi penduduk miskin. Jankesmas telah mampu meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, terutama untuk daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Dalam rangka peningkatan kinerja puskesmas mulai tahun 2010 telah disediakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi puskesmas dan jaringannya terutama dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan preventif dan promotif, yang mencakup kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana (KIA-KB), gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan pembinaan upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti

posyandu, polindes, dan poskesdes.

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes, serta rumah sakit sebagai salah satu komponen untuk perbaikan upaya kesehatan juga terus ditingkatkan. Jumlah puskesmas tahun 2011 mencapai 9.321 yang mencakup 3.019 puskesmas perawatan dan 6.302 puskesmas nonperawatan, sedangkan jumlah puskesmas pembantu (Pustu) pada tahun 2011 mencapai 23.274 unit (Rifaskes, 2011). Rasio puskesmas terhadap penduduk meningkat dari 3,92 per 100.000 penduduk pada tahun 2007 menjadi 3,79 per 100.000 penduduk pada tahun 2011 (Kemkes, 2011). Pada tahun 2011, jumlah rumah sakit pemerintah meningkat menjadi 751 rumah sakit, sedangkan rumah sakit swasta meningkat menjadi 241 rumah sakit (Profil Kesehatan, 2010). Pada tahun 2010, rasio tempat tidur (TT) rumah sakit terhadap penduduk sebesar 69,97 TT per 100.000 penduduk (Profil Kesehatan, 2010). Rasio ini masih lebih rendah jika dibandingkan target nasional tahun 2010 sebesar 80 TT per 100.000 penduduk. Selain itu, sistem rujukan belum optimal walaupun utilisasi fasilitas kesehatan meningkat pesat. Akses masyarakat dalam mencapai sarana pelayanan kesehatan dasar juga membaik, yaitu 94 persen masyarakat dapat mengakses sarana pelayanan kesehatan kurang dari 5 kilometer; dan 78,9 persen rumah tangga berada kurang dari satu kilometer dari fasilitas Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat atau UKBM (Risksedes, 2007). Untuk mendukung ketersediaan informasi terkait dengan fasilitas kesehatan, pada tahun 2010-2011 telah dilaksanakan riset fasilitas kesehatan (Rifaskes). Riset ini ditujukan untuk memperoleh peta ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan baik di RS, puskesmas dan laboratorium kesehatan termasuk sumber daya manusia dan peralatan kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memelihara derajat kesehatannya secara mandiri, dilakukan penguatan promosi kesehatan dan peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM), seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Jumlah UKBM yang berperan penting dalam sistem pelayanan kesehatan, seperti posyandu mencapai 266.827 unit dan poskesdes mencapai 51.996 unit (Profil Kesehatan, 2010). Peran posyandu dalam sistem pelayanan kesehatan cukup penting terutama dalam kegiatan imunisasi, gizi, dan upaya kesehatan ibu dan anak (KIA), KB,

penanggulangan diare, dan penyuluhan kesehatan masyarakat. Integrasi kegiatan posyandu dengan kegiatan lain seperti Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) terus ditingkatkan dalam rangka pengembangan anak usia dini secara holistik dan terintegrasi, selain untuk meningkatkan derajat kesehatan anak. Di samping itu, pencapaian sasaran PHBS pada tingkat rumah tangga sampai saat ini masih rendah yaitu 50,1 persen (Profil Kesehatan, 2010).

Dalam rangka mengurangi disparitas status kesehatan terus dilakukan upaya penanggulangan daerah bermasalah kesehatan (DBK) di 130 kabupaten/kota. Penanggulangan DBK merupakan upaya terpadu untuk menstimulasi kemandirian daerah dalam menyelesaikan masalah kesehatannya secara kreatif dan inovatif dengan optimalisasi program kesehatan dan non kesehatan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Dukungan program diberikan untuk penguatan kapasitas implementasi penanganan masalah kesehatan secara lebih fokus dan sistematis.

Pendidikan. Pembangunan pendidikan memiliki peran penting dan strategis dalam keseluruhan upaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Peningkatan taraf pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai Tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, dan melaksanakan ketertiban dunia. Melalui pendidikan akan tercipta masyarakat terpelajar yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan.

Pembangunan pendidikan hingga tahun 2011 telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2010 menjadi 7,92 tahun dan menurunnya proporsi buta aksara penduduk menjadi 5,02 persen (usia 15-59 tahun). Selain itu, angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang pendidikan juga terus meningkat. Pada tahun 2011, APM SD/MI/ sederajat mencapai 95,55 persen, dan APK SMP/MTs/ sederajat, APK SMA/SMK/MA/ sederajat,

dan APK PT masing-masing telah mencapai 99,47 persen, 76,50 persen, dan 27,09 persen.

Pelaksanaan pembangunan sampai saat ini telah berhasil menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok status ekonomi yang ditunjukkan dari tingkat pendidikan tertinggi yang pernah diikuti oleh penduduk berusia 13-15 tahun. Pada tahun 2010, sebanyak 96,3 persen penduduk di kuantil terkaya berhasil menamatkan jenjang SD/MI atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 94,2 persen. Pada kurun waktu yang sama, angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTs untuk kelompok ini juga meningkat menjadi 94,3 persen dari 92,8 persen. Hal yang sama terlihat pada penduduk di kuantil terendah, dimana angka tamat jenjang SD/MI-nya telah mencapai 82,7 persen pada tahun 2010, meningkat dari 79,5 persen pada tahun 2007. Sementara itu, angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTs juga meningkat menjadi 70,6 persen dari 61,6 persen pada periode yang sama. Capaian tersebut menggambarkan adanya perbaikan efisiensi internal pendidikan, yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan, dan mengecilnya kesenjangan angka partisipasi pendidikan antarkelompok status ekonomi.

Mengecilnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok status ekonomi tersebut merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat miskin. Selain kegiatan peningkatan daya jangkau dan daya tampung sekolah seperti pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru, penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk seluruh sekolah, madrasah, pesantren salafiyah, dan sekolah keagamaan non-Islam yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun juga telah dapat meningkatkan kemampuan masyarakat miskin menyekolahkan anaknya. Program BOS yang ditujukan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain pada tahun 2012 ditujukan untuk sekitar 44,7 juta siswa jenjang pendidikan dasar.

Untuk menjangkau siswa/mahasiswa miskin, Pemerintah juga menyediakan bantuan siswa miskin di seluruh jenjang pendidikan dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, sampai dengan perguruan tinggi. Sejak diselenggarakan pada tahun 2005, cakupan sasaran bantuan siswa miskin terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan telah

mencapai 8,18 juta siswa/mahasiswa pada tahun 2011 dari 5,54 juta pada tahun 2010. Peningkatan pemberian bantuan siswa miskin telah menurunkan persentase jumlah siswa putus sekolah untuk kurun waktu 2010-2011 dari 1,5 persen menjadi 1,3 persen untuk jenjang SD/MI; 1,8 persen menjadi 1,6 persen untuk jenjang SMP/MTs; dan 4,3 persen menjadi 4,0 persen untuk jenjang SMA/SMK/MA. Selain itu, persentase lulusan tidak melanjutkan juga mengalami penurunan untuk kurun waktu yang sama dari 8,6 persen menjadi 7,2 persen pada jenjang SD/MI; 24,0 persen menjadi 10,9 persen pada jenjang SMP/MTs; dan 51,7 persen menjadi 48,4 persen pada jenjang SMA/SMK/MA.

Peningkatan taraf pendidikan juga diikuti dengan meningkatnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan. Sampai dengan tahun 2010, telah terjadi peningkatan kualitas yang ditandai, antara lain, dengan meningkatnya rata-rata nilai ujian nasional (UN) dan pencapaian berbagai prestasi dalam berbagai kompetisi nasional dan internasional. Dalam periode tahun 2004-2011, nilai UN dan angka kelulusan siswa untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK mengalami peningkatan. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualifikasi guru dan dosen. Pada tahun 2012 direncanakan upaya peningkatan kualifikasi bagi 144 ribu guru sekolah umum dan madrasah yang meningkat dari 134 ribu pada tahun 2011. Upaya ini telah berhasil meningkatkan persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik lebih atau setara D4/S1 menjadi sebesar 58,0 persen pada tahun 2011.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan, telah dilakukan berbagai perbaikan manajemen pendidikan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) serta upaya penyelarasan kelembagaan otonomi PT. Sejak tahun 2009, telah dilakukan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sesuai amanat Konstitusi. Pada tahun 2012, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN mencapai Rp. 289,96 triliun yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 102,52 triliun, dana Transfer Daerah sebesar Rp. 186,44 triliun, dan dana pengembangan pendidikan nasional sebesar Rp. 1,0 triliun. Pemanfaatan belanja pemerintah pusat untuk fungsi pendidikan pada tahun 2013 dilaksanakan oleh 19 kementerian/lembaga seperti halnya pada tahun 2012.

Sementara itu, perpustakaan merupakan sarana dalam

mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai wahana belajar sepanjang hayat, perpustakaan mampu mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, budaya gemar membaca terus ditumbuhkan melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Berbagai upaya yang dilakukan telah menunjukkan hasil yang baik antara lain meningkatnya layanan perpustakaan dan budaya gemar membaca di masyarakat yang ditandai oleh: (i) meningkatnya jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan menjadi 4,4 juta orang; (ii) meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan menjadi sebanyak 143.000 koleksi; dan (iii) meningkatnya jumlah perpustakaan yang dikelola sesuai standar.

Pencapaian tersebut didukung oleh meningkatnya berbagai kegiatan antara lain: (i) layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan perpustakaan elektronik (*e-library*) di perpustakaan provinsi dan meningkatnya kualitas perpustakaan umum di 437 kabupaten/kota; (ii) sosialisasi dan kampanye perpustakaan dan gemar membaca melalui berbagai media; (iii) pemberian bantuan mobil perpustakaan keliling dan kapal perpustakaan keliling sebagai stimulan untuk provinsi dan kabupaten/kota; (iv) penyusunan pedoman penyelenggaraan perpustakaan, jabatan fungsional pustakawan, serta pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; (v) pengelolaan *International Standard Book Number* (ISBN), dan *International Standard Music Number* (ISMN), penerbitan Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) dan Katalog Induk Nasional (KIN), dan penerbitan literatur sekunder lain; (vi) pengelolaan 80.000 eksemplar terbitan nasional (karya cetak dan karya rekam); dan (vii) diseminasi bahan bacaan kepada perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, desa, sekolah, rumah ibadah, dan pondok pesantren.

Pemuda dan Olahraga. Pembangunan pemuda dan olahraga memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemuda merupakan komponen terbesar dari penduduk Indonesia yang akan menjadi penerus pembangunan. Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2005-2025, pada tahun 2013 jumlah pemuda diperkirakan sebanyak 62,7 juta jiwa atau 25,87 persen dari penduduk Indonesia. Dengan demikian, masa depan Indonesia ditentukan oleh kualitas pemuda saat ini. Adapun olahraga memiliki peran untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan semangat sportivitas, dan menhinggau rasa nasionalisme melalui event olahraga regional dan internasional.

Pembangunan pemuda pada tahun 2011 telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin kokohnya landasan pembangunan kepemudaan dengan disahkannya UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Selain itu, peningkatan *character building* pemuda terus ditingkatkan melalui kegiatan, antara lain: (i) fasilitasi pemuda kader dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian dan lingkungan sebanyak 4.000 pemuda; (ii) fasilitasi pengelola organisasi kepemudaan dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program sebanyak 9.000 pemuda; (iii) fasilitasi organisasi kepemudaan dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi sebanyak 120 organisasi; (iv) fasilitasi pemuda kader kepemimpinan sebanyak 900 pemuda; (v) fasilitasi pemuda kader kewirausahaan sebanyak 5.000 pemuda; dan (vi) fasilitasi pemuda dalam pendidikan kepramukaan sebanyak 5.000 pemuda.

Sementara itu, pembangunan olahraga pada tahun 2011 merupakan momentum bagi kebangkitan prestasi olahraga nasional yang ditandai dengan tercapainya peringkat ke-1 (Juara Umum) pada kejuaraan SRA Games XXVI tahun 2011 dan peringkat ke-2 pada kejuaraan ASEAN Paragames VI tahun 2011 di Indonesia. Budaya dan prestasi olahraga terus ditingkatkan melalui kegiatan, antara lain: (i) fasilitasi pelatihan bagi 1.500 olahragawan andalan nasional dalam Program Indonesia Emas (PRIMA); (ii) fasilitasi penyediaan 24 prasarana olahraga; dan (iii) fasilitasi penyediaan 60 sarana olahraga.

Agama. Kualitas kehidupan beragama masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemahaman, penghayatan, dan

pengamalan ajaran agama yang tercermin dalam perilaku dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Isu pembangunan bidang agama saat ini adalah penciptaan kerukunan umat beragama disamping isu lainnya yaitu peningkatan layanan keagamaan, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Kerukunan merupakan upaya bersama pemerintah dan masyarakat, karena itu tanggung jawab kemukunan tidak hanya dipikul oleh pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab semua pihak yakni pemerintah dan umat beragama serta seluruh komponen masyarakat.

Kondisi dan situasi harmoni kehidupan beragama di sebagian wilayah tanah air pada akhir-akhir ini cenderung kurang kondusif, hal ini merupakan patet dari kualitas keagamaan masyarakat kita. Masih adanya konflik horizontal sering kali dipicu oleh kejadian yang bernuansa agama, walaupun pada awal mulanya konflik tersebut banyak dilatarbelakangi oleh faktor kesenjangan ekonomi, politik dan lainnya. Upaya yang telah dilaksanakan adalah reharmonisasi kehidupan sosial keagamaan di daerah pascakonflik, peningkatan kemampuan penanganan trauma pascakonflik, pemberdayaan tokoh masyarakat, peningkatan efektivitas mediasi melalui forum kerukunan umat beragama (FKUB) yang sudah terdapat di seluruh provinsi dan di 421 Kabupaten/ Kota, dan pembinaan untuk pencegahan konflik di daerah rawan konflik.

Prioritas lainnya pembangunan bidang agama adalah layanan keagamaan kepada masyarakat. Pelayanan keagamaan yang secara masif dilakukan pemerintah adalah penyelenggaraan haji. Upaya yang telah dilakukan antara lain penubuhan dan penyempurnaan sistem penyelenggaraan haji yang mencakup penerbitan peraturan perundangan-undangan, penguatan prosedur dan manajemen operasional, peningkatan kualitas pembinaan jemaah, serta pelayanan dan perlindungan sejak pendaftaran di tanah air, sampai pelaksanaan haji di Tanah Suci dan kembali lagi di tanah air. Bentuk layanan keagamaan lainnya adalah bantuan rehabilitasi tempat ibadah di daerah pascabencana, penyediaan tunjangan bagi penyuluh agama, dan penyediaan sarana prasarana penerangan dan bimbingan keagamaan.

Kebudayaan. Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa, membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkuat jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, serta melestarikan budaya nusantara. Berbagai upaya untuk

meneguhkan karakter dan jati diri bangsa telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2011, hasil capaian pembangunan kebudayaan antara lain:

1. semakin berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya karakter dan jati diri bangsa berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang ditandai dengan meningkatnya upaya: (i) inventarisasi nilai-nilai tradisi dan aktualisasi karya budaya; (ii) sosialisasi pembangunan karakter bangsa, serta anugerah penghargaan terhadap pelaku budaya; (iii) pemetaan komunitas adat; (iv) kajian, pembinaan dan penyuluhan, inventarisasi dan dokumentasi sejarah serta nilai tradisional; (v) revitalisasi kesenian yang hampir punah dan inventarisasi seni budaya; (vi) pencatatan warisan budaya tak benda; (vii) layanan Lembaga Sensor Film;
2. meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap hasil karya seni budaya dan perfilman yang ditandai oleh: (i) fasilitasi sarana pengembangan, pendalaman, serta pagelaran seni dan budaya; (ii) fasilitasi pagelaran, pameran, festival, lomba dan pawai kesenian; (iii) fasilitasi penyelenggaraan event festival film di dalam dan luar negeri; (iv) perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) terhadap karya seni dan budaya; (v) pengembangan galeri nasional; (vi) fasilitasi pendukung pengembangan seni budaya di Taman Budaya;
3. meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya (BCB)/situs yang ditandai oleh: (i) pengelolaan terpadu cagar budaya: Kawasan Candi Borobudur, Kawasan Candi Prambanan dan Kawasan Situs Manusia Purba Sangiran; (ii) rehabilitasi dan penataan museum; (iii) inventarisasi dan penetapan benda cagar budaya/situs/kawasan secara nasional; (iv) identifikasi, inventarisasi, pemetaan situs bawah air; dan
4. meningkatnya dukungan sumber daya kebudayaan yang ditandai oleh: (i) pelaksanaan 21 penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan; (ii) 155 penelitian dan pengembangan bidang arkeologi; dan (iii) pendidikan dan pelatihan SDM kebudayaan.

Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Pembangunan nasional senantiasa dilaksanakan secara berkesinambungan melalui pendekatan multi bidang, baik fisik maupun non-fisik. Salah

satu aspeknya adalah pembangunan kesejahteraan sosial yang erat kaitannya dengan kemiskinan. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih sebesar 30 juta jiwa atau sekitar 12,49 persen dari jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2011). Masalah kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dan bersifat multi dimensional. Oleh karenanya, Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial melalui berbagai bentuk program dan kegiatan perlindungan sosial. Program-program terkait yang dilaksanakan saat ini adalah dalam bentuk jaminan dan bantuan sosial, pemberdayaan sosial, serta pelayanan dan rehabilitasi sosial, yang ditujukan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Salah satu program prioritas nasional bidang kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2007 adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi syarat-syarat di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemenuhan syarat tersebut ditujukan untuk mendorong percepatan pencapaian MDG's antara lain pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak (bayi dan balita), dan peningkatan kesehatan ibu (menurunkan angka kematian ibu melahirkan).

PKH pada awalnya menargetkan penerima manfaat sebanyak 500.000 RTSM. Namun realisasinya hanya mencapai 307.947 RTSM karena setelah diverifikasi tidak semua penerima bantuan memenuhi persyaratan yang ditentukan [*ineligible*]. Meskipun pelaksanaan PKH pada tahun 2011 terus bertambah menjadi 25 Provinsi, 118 Kabupaten, 1.387 Kecamatan, dan 16.154 Kelurahan, namun rata-rata realisasi pelaksanaan PKH selama lima tahun terakhir masih belum mencapai angka kinerja 100 persen. Perkembangan target dan realisasi sasaran PKH dari tahun 2007 sampai 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.1
PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI SASARAN PKI
TAHUN 2007 - 2011

Tahun	Target	Realisasi
2007	500.000	387.917
2008	642.000	620.848
2009	720.000	726.226
2010	816.000	771.203
2011	1.116.000	1.052.201

Sumber: JFPKH Pusat, Kementerian Sosial

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Upaya meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dilakukan melalui pengarusutamaan gender (PUG), yaitu dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan nasional untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaannya. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, IPG secara nasional adalah sebesar 63,94, meningkat menjadi sebesar 67,20 pada tahun 2010 (KPP&PA-BPS, 2011). Peningkatan IPG selama kurun waktu enam tahun tersebut merupakan hasil dari peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG. Hal ini berarti bahwa kualitas hidup perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan, maupun hidup layak selama kurun waktu 2004-2010 terus mengalami peningkatan, sebagai dampak dari pelaksanaan program-program pembangunan terkait. Sementara itu, IDG yang mengukur partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan, juga menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari sebesar 59,67 pada tahun 2004 menjadi sebesar 68,15 pada tahun 2010 (KPP&PA-BPS, 2011). Di samping itu, dilihat dari indikator *Gender Inequality Index* (GII) dalam *Human Development Report* (UNDP, 2010), Indonesia menduduki

peringkat ke-100 dari 138 negara, dengan nilai 0,680. Selanjutnya pada tahun 2011, Indonesia tetap menduduki peringkat 100, namun dengan nilai 0,505 (*Human Development Report, UNDP, 2011*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa telah terdapat kemajuan dalam peningkatan kesetaraan gender di Indonesia.

Kemajuan lain dalam upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender antara lain adalah: (i) ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) No. 1 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender. Strategi Nasional (Stranas) tersebut merupakan strategi pendukung keberhasilan strategi Pengarusutamaan Gender (PIUG) dengan pendekatan kultural, yaitu mencari akar permasalahan ketidaksetaraan gender melalui aspek sosial budaya; dan (ii) tersusunnya parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Di bidang pendidikan, upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pendidikan agama, antara lain pelaksanaan PUG di Madrasah dan pelaksanaan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender) dalam pendidikan Islam. Di samping itu, KPP&PA telah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Kementerian Agama, tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak di bidang keagamaan. Di bidang kesehatan, kemajuan yang telah dicapai adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui, Pencegahan dan Penanggulangan ITV-AIDS yang Responsif Gender, serta Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Keluarga Berencana.

Di bidang politik dan pengambilan keputusan publik, kemajuan yang telah dicapai antara lain: (i) telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman PPRG di Kementerian PAN dan RB; (ii) telah ditetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pendidikan Politik pada Pemilihan Umum; dan (iii) tersusunnya *Draft* RUU Kesetaraan Gender (RUU KG) sebagai masukan untuk menyusun RUU KG di DPR. Di samping itu,

pada tahun 2011, KPP&PA sebagai ketua *focal point ASEAN Committee on Women*, telah menyelenggarakan *Preliminary Ministerial Meeting on Women*, dan menghasilkan *Terms of Reference (TOR) ASEAN Ministerial Meeting on Women* yang diselujui pada level Komite Sosial Budaya, dan kecuicuan memperoleh persetujuan dari para kepala negara di kawasan ASEAN pada saat KTT ke-19 ASEAN Tahun 2011.

Di bidang ketenagakerjaan, telah tercapai penurunan angka pengangguran terbuka perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan, dari sebesar 14,71 persen pada tahun 2005 menjadi sebesar 8,74 persen pada tahun 2010 (Sakernas, 2005-2010). KPP&PA bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga telah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Peningkatan Efektivitas Pengarusutamaan Gender di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Selain itu, telah ditetapkan pula Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta telah disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Bina Keluarga TKI, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Kebijakan Bina Keluarga TKI (BKTKI), serta telah disusunnya Rancangan Undang-Undang Pembantu Rumah Tangga (RUU PRT) yang menjadi inisiatif DPR.

Dalam upaya melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan telah ditetapkan beberapa kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang bersifat pencegahan, yaitu: Pedoman Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan Dalam Didlat Teknis; Pedoman Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan dalam Pendidikan Penjenjangan; dan Pedoman Pendidikan Keluarga Untuk Pencegahan Kekerasan. Di samping itu, telah ditetapkan pula Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi, Fasilitasi dan Konsultasi pada Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Cacat (PIK-P2C), sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 23 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pembentukan PIK-P2C; yang diujicobakan di Kota Jambi dan Kota Sidoarjo.

Dalam upaya penyediaan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, telah dibentuk dan difungsikan lembaga-lembaga pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan, yaitu antara lain Pusat Pelayanan Terpadu

Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 24 provinsi dan 157 kabupaten/kota, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) sebanyak 306 yang berlokasi di Polda dan Polres; Pusat Krisis Terpadu (PKT) bagi penyempuan korban kekerasan berbasis Rumah Sakit di 22 Rumah Sakit Umum Daerah dan Vertikal, serta Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di 42 Rumah Sakit Polri; Rumah Perlindungan *Trauma Center* (RPTC) sebanyak 33 unit; Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) sebanyak 1 unit; Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) sebanyak 27 unit; dan *Crisis Center/Women Trauma Center* yang jumlahnya mencapai 42 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban perdagangan orang, hasil yang telah dicapai antara lain: (i) terbentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di 21 provinsi dan 72 kabupaten/kota sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; (ii) ditandatangani kesepakatan bersama 8 pemerintah provinsi untuk optimalisasi dan sinergi upaya pencegahan dan penanganan TPPO, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung; (iii) ditetapkannya Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang didukung dengan penetapan Surat Edaran Nomor 100/676/SJ oleh Kementerian Dalam Negeri, tertanggal 7 Maret Tahun 2011 Tentang Percepatan Penerapan SPM di daerah; (iv) ditetapkannya Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender, yang sudah diujicobakan di Kabupaten Tulung Agung dan Kota Binjai; (v) ditetapkannya Peraturan Menteri Negara PP dan PA No. 9 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Kebijakan Pencegahan TPPO melalui Pendekatan Kearifan Lokal; dan (vi) tersusunnya Modul Pendampingan bagi saksi dan/atau korban TPPO.

Upaya peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, termasuk percepatannya melalui PPRG dan penyediaan data terpilih.

Terkait dengan data gender, telah dilakukan penandatanganan MoU dengan BPS tentang Penyediaan Data dan Informasi Gender dan Anak; dan tersusunnya Pedoman Pengelolaan Data Gender di KPP&PA. Di samping itu, telah dilaksanakan pula advokasi, sosialisasi, fasilitasi PUG, dan pelatihan analisis gender di 39 kementerian/lembaga dan 33 provinsi.

Perlindungan Anak. Keberhasilan pembangunan perlindungan anak dalam memenuhi hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang telah ditunjukkan dalam capaian pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan. Seandainya keberhasilan dalam melindungi anak dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah, ditunjukkan antara lain oleh pencapaian di bidang ketenagakerjaan. Data Sakernas menunjukkan penurunan jumlah pekerja anak usia 10-17 tahun dari 1.713,2 ribu pada tahun 2008 menjadi 1.679,1 ribu pada tahun 2009. Dalam upaya menurunkan jumlah pekerja anak, pada tahun 2011 telah dilaksanakan penarikan pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) dalam rangka Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Sebanyak 3.032 orang atau sekitar 10,2 persen dari pekerja anak yang telah ditarik tersebut telah dikembalikan ke dalam satuan pendidikan. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial bagi anak, Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) pada tahun 2011 mencakup sekitar 6.925 balita terlantar, 142.530 anak terlantar, 4.200 anak jalanan, 930 Anak berhadapan dengan hukum (ABH), 1.750 anak dengan kecacatan (ADK), dan 650 anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK). Bagi anak-anak tersebut diberikan subsidi untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti kesehatan, gizi, pendidikan, pakaian, akte kelahiran, penyatuan kembali dengan orang tua/keluarga, alat bantu, dan lain-lain.

Sementara itu, dalam memenuhi hak anak untuk mendapatkan identitas dan legalitas kependudukan, pada tahun 2011 telah ditandatangani nota kesepakatan antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Sosial, Menteri Agama, dan Menteri PP dan PA tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak. Berdasarkan data Susenas 2009, cakupan anak yang tidak memiliki akte kelahiran adalah sekitar 47,5 persen.

Sedangkan untuk meningkatkan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), pada tahun 2011 RUU

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dibahas dengan Komisi III DPR.

2.2 Permasalahan dan Sasaran Tahun 2013

2.2.1 Permasalahan

Dengan berbagai kemajuan yang dicapai sampai dengan tahun 2011 dan perkiraan tahun 2012, permasalahan dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pembangunan bidang sosial dan kehidupan beragama pada tahun 2013 adalah sebagai berikut.

Laju Pertumbuhan dan Jumlah Pertambahan Penduduk. Permasalahan yang dihadapi pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana adalah masih tingginya laju pertumbuhan dan jumlah pertambahan penduduk dibandingkan dengan kondisi yang akan dicapai sebesar 1,1 persen; dan masih tingginya angka kelahiran total/TFR dibandingkan dengan kondisi ideal sebesar 2,1 anak per perempuan usia reproduksi dengan disparitas yang lebar antarprovinsi, antarwilayah desa-kota, serta antarkelompok sosial ekonomi. Permasalahan ini disebabkan oleh: antara lain:

1. belum meratanya akses pelayanan KB yang ditandai dengan: (i) masih rendah dan tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi (CPR), serta masih tingginya disparitas CPR antar-provinsi, antar-wilayah desa-kota, dan antarkelompok sosial ekonomi; (ii) masih tingginya kebutuhan her-KB yang tidak/belum terpenuhi (*unmet need*) dengan disparitas yang tinggi antarprovinsi, antarwilayah desa-kota, dan antarkelompok sosial ekonomi; dan (iii) masih rendahnya partisipasi pria dalam her-KB;
2. rendahnya kualitas pelayanan KB yang ditandai dengan (i) masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB; (ii) kurang efektifnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang/MKJP; dan (iii) masih tingginya angka drop-out (termasuk kegagalan dan komplikasi) dalam pemakaian alat kontrasepsi;
3. masih lemahnya pelaksanaan advokasi serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang ditandai oleh masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan pasangan usia subur tentang KB dan kesehatan reproduksi;

4. masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketenagaan program KKB;
5. lemahnya pembinaan dan pemberdayaan keluarga dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kesertaan ber-KB, serta meningkatkan kesertaan KB mandiri;
6. belum sinergisnya kebijakan pengendalian penduduk antara kuantitas, kualitas, dan mobilitas baik antara pusat dan daerah, antardaerah, maupun antarsektor pembangunan; dan
7. masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, terutama yang berkenaan dengan administrasi kependudukan sebagai salah satu sumber data dan informasi kependudukan. Sampai saat ini data registrasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih terbatasnya cakupan daerah dalam penerapan SIAK on-line untuk pelayanan publik, terbatasnya SDM dalam pengelolaan SIAK, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan atas peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk dan keluarganya.

Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan. Permasalahan yang harus diperbaiki dan diatasi pada tahun 2013 dalam pembangunan kesehatan adalah: (i) masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak, yang ditandai dengan masih rendahnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, masih rendahnya cakupan pelayanan antenatal, masih rendahnya cakupan imunisasi lengkap pada bayi, dan masih rendahnya cakupan kunjungan neonatal; (ii) belum optimalnya upaya perbaikan status gizi masyarakat, yang ditandai dengan masih rendahnya pemantauan pertumbuhan bayi dan balita melalui penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan; (iii) belum optimalnya upaya pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular (terutama tuberkulosis, HIV dan AIDS, malaria, diare, dan DBD) dan penyakit tidak menular serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan; (iv) sumber daya manusia kesehatan masih terbatas, yang ditandai dengan masih rendahnya jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan, terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan; (v) masih terbatasnya ketersediaan obat serta pengawasan obat dan makanan, yang ditandai dengan belum optimalnya

penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas; belum optimalnya penyediaan dan pemerataan obat esensial generik dan alat kesehatan dasar; dan belum optimalnya cakupan pengawasan sarana produksi obat, alat kesehatan dan makanan; (vi) pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat masih terbatas yang ditandai dengan masih rendahnya cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat terutama penduduk miskin dan pekerja sektor informal; (vii) belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, yang ditandai oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; (viii) masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas; (ix) belum efektifnya manajemen pembangunan kesehatan, termasuk dalam pengelolaan administrasi, hukum, dan penelitian pengembangan kesehatan; dan (x) masih adanya kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi.

Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan. Permasalahan dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2013 adalah belum optimalnya akses, kualitas, dan relevansi pendidikan. Upaya pembangunan pendidikan masih menghadapi beberapa permasalahan, yaitu: (i) belum optimalnya pendidikan karakter bangsa; (ii) masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan; (iii) masih rendahnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan; (iv) masih rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru; (v) terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan; (vi) belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan; dan (vii) belum terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan.

Di samping itu, beberapa tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2013 dalam menyelesaikan permasalahan akses dan kualitas pendidikan adalah: (i) meningkatkan pemerataan akses terhadap semua jenjang pendidikan, termasuk akses terhadap pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; (ii) meningkatkan tingkat keberaksaraan; (iii) meningkatkan kesiapan anak bersekolah; (iv) meningkatkan kemampuan kognitif, karakter, dan soft-skill lulusan; (v) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan menengah; (vi) meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan

tinggi termasuk kualitas penelitiamya; dan (vii) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Selanjutnya, terkait masalah ketenagaan serta sarana dan prasarana, pembangunan pendidikan masih menyisakan tantangan untuk: (i) meningkatkan pemerataan distribusi guru; (ii) meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru; (iii) mempercepat penuntasan rehabilitasi gedung sekolah dan ruang kelas yang rusak; (iv) meningkatkan ketersediaan buku mata pelajaran; (v) meningkatkan ketersediaan dan kualitas laboratorium dan perpustakaan; dan (vi) meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan.

Adapun tantangan yang harus dijawab dalam mewujudkan manajemen, tatakelola, serta pembiayaan pendidikan yang berkeadilan antara lain: (i) meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan; (ii) melakukan penyelarasan dalam penerapan otonomi perguruan tinggi; (iii) meningkatkan kemitraan publik dan swasta; (iv) memantapkan alokasi dan mekanisme penyaluran dana yang efisien, efektif, dan akuntabel; dan (v) menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua.

Sementara itu, pembangunan perpustakaan masih dihadapkan pada permasalahan dan tantangan antara lain: (i) koleksi perpustakaan sangat terbatas, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat; (ii) eksistensi kelembagaan dan pendanaan perpustakaan di daerah sangat tergantung pada pemerintah daerah serta sangat cepatnya mobilitas mutasi penggantian pimpinan perpustakaan, sehingga kurang mendukung percepatan program pembangunan perpustakaan dan minat baca di daerah; (iii) diversifikasi layanan perpustakaan belum dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemustaka; (iv) layanan perpustakaan belum menjangkau seluruh wilayah tanah air; perdesaan, daerah terpencil, pulau-pulau kecil, dan daerah perbatasan; (v) apresiasi terhadap perpustakaan dan pemanfaatan potensi perpustakaan belum optimal serta apresiasi terhadap penyelamatan naskah kuno sebagai warisan budaya (*memory of nation*) masih rendah; (vi) jumlah dan kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dibidang perpustakaan masih terbatas; (vii) belum optimalnya

pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Wajih Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, sehingga belum semua terbitan di Indonesia terhimpun, terkelola dan berdayaguna di Perpustakaan Nasional maupun Perpustakaan Provinsi; (viii) standarisasi prosedur penyelenggaraan perpustakaan belum dibakukan dengan SOP herstandar Internasional, seperti ISO 9001:2000.

Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan kepemudaan tahun 2013, antara lain: (i) rendahnya partisipasi pemuda dalam pendidikan; (ii) tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPPT) pemuda; (iii) rendahnya kesadaran pemuda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) lainnya, HIV dan AIDS serta kekerasan di kalangan pemuda; (iv) terbatasnya keterlibatan pemuda dalam organisasi kepemudaan; (v) belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan pemuda; (vi) terbatasnya prasarana dan sarana kepemudaan untuk mengembangkan kapasitas, kompetensi, kreativitas dan inovasi pemuda. Dengan demikian, tantangan pembangunan kepemudaan ke depan adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepemudaan dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan.

Prestasi dan Budaya Olahraga. Pembangunan keolahragaan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan sebagai berikut: (i) terbatasnya prasarana dan sarana keolahragaan untuk meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga; (ii) terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan; (iii) belum optimalnya penerapan teknologi olahraga dan kesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi; (iv) terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga dan pembina keolahragaan; (v) rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi. Dengan demikian, tantangan pembangunan keolahragaan ke depan adalah meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga yang didukung oleh prasarana dan sarana keolahragaan, serta penerapan dan pemanfaatan iptek.

Kualitas Kehidupan Beragama. Kualitas kehidupan beragama di kalangan masyarakat sangatlah beragam. Sebagian besar kelompok masyarakat telah memiliki semangat dan kemauan kuat untuk memahami, menghayati, dan menjalankan

kehidupan sesuai ajaran agamanya, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang belum menghayati dan mengamalkan ajaran agama, sehingga tidak dipungkiri masih terdapat penyimpangan ajaran agama yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Upaya peningkatan kerukunan beragama masih menghadapi beberapa permasalahan, yaitu:

1. adanya gejala ketidakserasian kehidupan sebagian masyarakat baik dalam hubungan intern umat beragama maupun hubungan antarumat beragama, sehingga kehidupan masyarakat yang harmonis belum sepenuhnya terwujud;
2. masih terdapat gejala atau kecenderungan eksklusivisme dalam beragama pada sebagian masyarakat;
3. belum optimalnya penerapan sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain: (i) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; (ii) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; dan (iii) Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri Nomor 3, KIBP-033/A/JA/6/2008, dan 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Pengikut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI); (iv) kurang maksimalnya pengelolaan partisipasi masyarakat di bidang kerukunan beragama; (v) belum memadainya pemberdayaan kearifan lokal sebagai sistem perekat sosial; dan (vi) sampai batas-batas tertentu, penerapan antisipasi dini dan penanganan konflik belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan.

Rangkaian penyelenggaraan ibadah haji dimulai sejak pendaftaran, pembinaan dan bimbingan ritual, penyelesaian dokumen dan paspor, operasional pemberangkatan haji, pelaksanaan ibadah di Arab Saudi termasuk pelayanan kesehatan, dan pemulangan jemaah haji. Walaupun upaya perbaikan terhadap penyelenggaraan haji telah dilakukan dalam berbagai kegiatan, namun masih ditemui beberapa

kekurangan dalam pelaksanaannya. Prmasalahan tersebut antara lain masih rendahnya kualitas pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji, sejak persiapan, operasional dan pascapenyelenggaraan haji. Selain itu, terkait dengan dana haji, sampai saat ini masih belum dikelola dengan baik. Dana haji yang antara lain berasal dari setoran awal calon jemaah haji sampai saat ini sudah mencapai hampir Rp 30.000,0 miliar belum dapat dikelola secara optimal mengingat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji belum mencantumkan pasal tentang pengelolaan dana haji.

Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya. Pembangunan kebudayaan dihadapkan pada beberapa permasalahan utama, sebagai berikut: (i) pengaruh negatif dari interaksi budaya antar-bangsa seperti perilaku yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa, memudarnya sikap toleransi dan nilai solidaritas; (ii) belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur bangsa; (iii) rendahnya kualitas pengelolaan cagar budaya; (iv) terbatasnya prasarana dan sarana kebudayaan; dan (v) terbatasnya kapasitas sumber daya kebudayaan.

Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan bantuan sosial masih dihadapkan pada sejumlah masalah, antara lain: (i) pemutakhiran dan pemanfaatan data yang belum sesuai dengan perubahan kondisi masyarakat; (ii) sosialisasi kepada peserta dan pemangku kepentingan yang belum optimal; (iii) peran fasilitator dan koordinator wilayah yang lemah; (iv) koordinasi lintas sektor dan antara Pusat dan Daerah yang kurang optimal; (v) sistem perlindungan sosial untuk program pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia dan penyandang cacat/orang dengan kecacatan masih dilaksanakan secara parsial atau belum komprehensif sehingga hasilnya belum optimal; dan (vi) keterbatasan sumber daya manusia yang terdidik, terlatih, dan memiliki keterampilan dalam bidang kesejahteraan sosial.

Belum Optimalnya Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Hingga saat ini, telah banyak kemajuan yang dicapai dalam peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Akan tetapi, masih ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, antara lain:

1. masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan yang antara lain, yang disebabkan oleh: (i) terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama di lapangan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota; (ii) rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi; dan (iii) rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit;
2. masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, yang ditandai dengan maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum diiringi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan terhadap para korban tindak kekerasan, masih terdapat ketidaksesuaian antarproduk hukum yang dihasilkan, termasuk antara produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan daerah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan; dan
3. masih lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender yang disebabkan oleh: (i) belum optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan; (ii) belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG; (iii) masih rendahnya pemahaman tentang konsep dan isu gender, nilai-nilai kesetaraan gender, manfaat PUG dalam pembangunan, baik di pusat maupun di daerah, dan (iv) minimnya ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan penggunaannya dalam siklus perencanaan. Sementara itu, perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan juga masih belum mencukupi, yang terlihat dari masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau.

Perlindungan Anak. Berbagai kemajuan yang dicapai di bidang perlindungan anak sampai dengan tahun 2011 sebagaimana diuraikan di atas, belum mengindikasikan bahwa pelaksanaan perlindungan anak sudah sepenuhnya efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa permasalahan yang masih akan

dihadapi pada tahun 2013, antara lain sebagai berikut.

Permasalahan pertama, masih kurang terlindunginya anak-anak dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, kekerasan seksual, penganiayaan, kelitakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Data menunjukkan bahwa sekitar 4 juta anak mengalami kekerasan setiap tahun (Susenas 2006), sekitar 1,8 juta pekerja anak usia 5-17 tahun (SPA 2009), dan sekitar 17,5 persen anak balita yang tidak memiliki akta kelahiran (Susenas 2009). Selain itu, sampai dengan akhir 2011, terdapat sekitar 500 ribu anak yang berada dalam pengasuhan dan pengawasan panti asuhan (Kemensos), sekitar 4,6 juta anak terlantar (Kemensos), sebanyak 5.513 anak berada di rumah tahanan (Ditjen Pas Kernerchukham), sebanyak 924 kasus perdagangan anak (International Organization for Migration/IOM). Berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh anak-anak tersebut akan berdampak buruk bagi perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Oleh sebab itu, untuk meminimalkan dampak buruk tersebut, mereka harus mendapat bantuan medis, hukum, dan psikososial yang layak. Namun demikian, akses dan kualitas pelayanan dasar yang diterima oleh anak-anak korban KtA, anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak berkebutuhan khusus (ABK), dan anak dari keluarga miskin masih rendah. Selain itu, proses penegakan hukum atas ABH kurang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Permasalahan kedua, masih rendahnya kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh belum maksimalnya peraturan perundang-undangan terkait upaya perlindungan anak dalam mengatur dan mengupayakan kepentingan terbaik anak, belum tersedianya data dan informasi yang akurat secara lengkap, masih rendahnya kapasitas tenaga pemberi layanan, dan masih kurangnya koordinasi diantara kementerian/lembaga terkait serta koordinasi pusat dan daerah.

Permasalahan ketiga, hasil studi maupun kajian menunjukkan masih rendahnya pemahaman keluarga dan masyarakat tentang hak-hak anak. Selain itu, pengetahuan dan keterampilan keluarga tentang pengasuhan yang baik juga masih rendah. Perilaku masyarakat masih permisif terhadap KtA karena alasan "demi kebaikan si anak/tujuannya baik". Hal ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan segala bentuk perlakuan salah sebagian besar dilakukan

oleh orang-orang terdekat dengan anak.

2.2.2 Sasaran

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan seperti tersebut di atas, sasaran pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama yang akan dicapai pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran total, yang ditandai dengan meningkatnya *contraceptive prevalence rate* (CPR) menjadi sebesar 63,8 persen dan menurunnya *unmet need* menjadi sebesar 5,6 persen dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. terlayannya peserta KB baru sebanyak 7,5 juta yang terdiri dari peserta KB baru miskin (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya sebanyak 3,97 juta, peserta KB baru dengan MKJP sebesar 13,2 persen, dan peserta KB baru pria sebesar 4,6 persen;
 - b. meningkatnya jumlah peserta KB aktif dari sasaran sebanyak 28,2 juta menjadi sebanyak 29,0 juta yang terdiri dari peserta KB aktif miskin (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya dari sebanyak 12,5 juta menjadi sebanyak 12,8 juta, dan peserta KB aktif dengan MKJP dari sebesar 25,9 persen menjadi sebesar 26,7 persen;
 - c. tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KB bagi 4.700 klinik KB pemerintah dan swasta untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB;
 - d. meningkatnya pemahaman remaja dan pasangan usia subur tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan advokasi dan KIE melalui berbagai media;
 - e. menguatnya kapasitas tenaga lini lapangan KB, Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP), serta kelembagaan KB di daerah dalam rangka meningkatkan kesertaan dan kemandirian ber-KB;
 - f. meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan dengan kebijakan kependudukan dan KB, serta tersedianya parameter dan analisis kependudukan di tingkat pusat dan daerah;
 - g. meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan

- data dan informasi kependudukan;
- e. meningkatnya ketersediaan, kualitas, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber, terutama meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai data registrasi penduduk vital dengan tertatanya peraturan pelaksana dan peraturan lainnya.
2. Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) menjadi 89 persen;
 - b. meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan kecapat/K4) menjadi 93 persen; dan
 - c. meningkatnya cakupan kunjungan neonatal pertama (KNI) menjadi 89 persen.
 3. Meningkatnya status gizi masyarakat, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan menjadi sebesar 100 persen; dan
 - b. meningkatnya persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) menjadi sebesar 80 persen.
 4. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular, yang ditandai dengan:

Sasaran	Target 2013
a. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0-11 bulan	88 persen
b. Meningkatnya imunisasi campak pada bayi usia 0-11 bulan	90 persen
c. Terkendalikannya prevalensi kasus HIV	< 0,5 persen
d. Meningkatnya jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV	600.000 orang

Sasaran	Target 2013
e. Meningkatnya persentase orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang mendapatkan <i>anti-retroviral treatment</i> (ART)	45 persen
f. Menurunnya jumlah kasus TB per 100.000 penduduk	228
g. Meningkatnya persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan	85 persen
h. Meningkatnya persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan	87 persen
i. Menurunnya angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk	1,25
j. Menurunnya jumlah kasus diare per 1.000 penduduk	315
k. Menurunnya angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk	52
l. Meningkatnya persentase kasus zoonosis yang ditemukan dan ditangani sesuai standar	85 persen
m. Meningkatnya persentase provinsi yang melakukan pembinaan, pencegahan, dan penanggulangan penyakit tidak menular (surveilans epidemiologi, deteksi dini, NIE, dan tata laksana)	90 persen

5. Meningkatnya kesehatan lingkungan, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat menjadi 100 persen; dan
 - b. meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) menjadi 16.000 desa.
6. Terpenuhiya kebutuhan tenaga kesehatan, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan di daerah bermasalah kesehatan (DBK) sebanyak 5.320 orang; dan
 - b. meningkatnya residen yang didayagunakan dan diberi insentif sebanyak 3.650 orang.

7. Meningkatnya ketersediaan obat dan pengawasan obat dan makanan, yang ditandai dengan:

Sasaran	Target 2013
a. Meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin	95 persen
b. Meningkatnya persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	37 persen
c. Meningkatnya persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	18 persen
d. Meningkatnya jumlah parameter uji obat dan makanan untuk setiap sampel	10 parameter

8. Meningkatnya cakupan pembiayaan kesehatan, yang ditandai dengan:

- a. meningkatnya persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan menjadi 75,4 persen;
- b. meningkatnya persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas menjadi 90 persen;
- c. jumlah TT Kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan Jamkesmas sebanyak 10.544 unit TT;
- d. meningkatnya jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin menjadi 9.323 puskesmas; dan
- e. meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melayani program jaminan persalinan (jampersal) menjadi 2.663 fasilitas pelayanan kesehatan.

9. Meningkatnya persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS menjadi sebesar 65 persen

10. Meningkatnya akses dan kualitas sarana pelayanan kesehatan, yang ditandai dengan:

Sasaran	Target 2013
a. Meningkatnya persentase puskesmas yang mampu melaksanakan pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar (PONED)	90 persen
b. Meningkatnya persentase RS kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pelayanan obstetrik neonatal emergensi komprehensif (PONIK)	95 persen
c. Meningkatnya jumlah puskesmas yang mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	9.323 puskesmas
d. Meningkatnya jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia	3 kota
e. Meningkatnya jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai standar dan pedoman	638 puskesmas
f. Meningkatnya persentase RSJ yang memberikan layanan sub spesialis dasar dan NAPZA sesuai standar	70 persen
g. Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan wajib lapor bagi pecandu narkoba	180 fasilitas kesehatan

11. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat yang ditandai dengan:

Sasaran	Target 2013
a. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	8,25 tahun
b. Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas	4,40 persen
c. APM SD/SDLB/MI/Paket A	95,80 persen
d. APM SMP/SMPLE/MTs/Paket B	80,10 persen
e. APK SD/SDLB/MI/Paket A	118,6 persen
f. APK SMP/SMPLE/MTs/Paket B	106,8 persen
g. APK SMA/SMK/MA/Paket C	82,0 persen
h. APK PT usia 19-23 tahun	28,7 persen
i. APS penduduk usia 7-12 tahun	99,0 persen
j. APS penduduk usia 13-15 tahun	95,0 persen
k. Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan dan menurunnya angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan	

Sasaran	Target 2013
menengah;	
1. Meratanya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.	
12. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang ditandai dengan:	
a. meningkatnya APK pendidikan anak usia dini (PAUD);	
b. meningkatnya tingkat kebelerajaan lulusan pendidikan kejuruan;	
c. meningkatnya proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi minimal B pada jenjang SD/SDLB/MI menjadi sebesar 75,0 persen; SMP/SMPLB/MTs menjadi sebesar 85,0 persen; SMA/SMALB/MA menjadi sebesar 35,8 persen; dan SMK menjadi sebesar 28,0 persen;	
d. meningkatnya proporsi program studi PT yang terakreditasi minimal B menjadi sebesar 77,0 persen dan jumlah PT masuk 500 terhak versi lembaga pemeringkatan independen internasional menjadi 8 PT; dan	
e. tercapainya Standar Pendidikan Nasional (SNP) bagi satuan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan paling lambat pada tahun 2013.	
13. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang ditandai dengan:	

Indikator	Target 2013
a. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	
• SD/SDLB/MI	68,0 persen
• SMP/SMPLB/MTs	92,3 persen
• SMA/SMALB/MA	92,3 persen
• SMK	95,4 persen
b. Persentase guru yang bersertifikat pendidik	

Indikator	Target 2013
• SD/SDLB/MI	67,5 persen
• SMP/SMPLB/MTs	68,0 persen
• SMA/SMALB/MA	79,0 persen
• SMK	78,0 persen
c. Persentase dosen PTP program sarjana/diploma/profesi berkualifikasi S2	94,5 persen
d. Persentase dosen PTM program sarjana/diploma/profesi berkualifikasi S2	75,0 persen
e. Persentase dosen PTP program pascasarjana berkualifikasi S3	26,5 persen
f. Persentase dosen PTM program pascasarjana berkualifikasi S3	5,6 persen
g. Semakin membaiknya pemerataan distribusi guru antarsatuan pendidikan dan antarwilayah termasuk terpenuhinya kebutuhan guru di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal	
h. Semakin meningkatnya kapasitas tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan	
14. Meningkatnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan yang ditandai:	
a. terselenggaranya pendidikan dasar sembilan tahun bermutu yang terjangkau bagi semua dalam kerangka pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan dasar untuk mencapai standar nasional pendidikan; dan	
b. meningkatnya proporsi peserta didik yang mendapatkan beasiswa bagi keluarga miskin untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi.	
15. Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca masyarakat serta layanan perpustakaan yang ditandai oleh:	
a. meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan;	
b. meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan; dan	
c. meningkatnya jumlah perpustakaan yang dikelola sesuai dengan standar/tipologi.	

16. Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, yang ditandai antara lain:
 - a. meningkatnya pembangunan karakter (*character building*), konsolidasi, dan revitalisasi gerakan kepemudaan dan kepramukaan;
 - b. meningkatnya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan keterampilan, kepeloporan, dan kewirausahaan pemuda;
 - c. meningkatnya pemberdayaan organisasi kepemudaan.
17. Meningkatnya prestasi dan budaya olahraga, yang ditandai oleh:
 - a. meningkatnya penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
 - b. terlaksananya penyelenggaraan *Islamic Solidarity Games* tahun 2013 di Indonesia;
 - c. meningkatnya prestasi olahraga yang ditandai dengan diperolehkannya peringkat *papua* atas pada kejuaraan SEA Games XXVII tahun 2013 di Myanmar.
18. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya kualitas dan kapasitas penyuluhan dan bimbingan tentang pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada keluarga dan masyarakat;
 - b. terwujudnya harmoni sosial yang ditandai dengan meningkatnya dialog dan kerja sama antarumat beragama;
 - c. meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelayanan ibadah haji yang ditandai dengan pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar, dan
 - d. meningkatnya tata kelola pembangunan bidang agama.
19. Mewujudkan karakter dan jati diri bangsa yang tangguh, berbudi luhur dan berakhlak mulia yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya karakter dan jati diri bangsa agar memiliki ketahanan budaya yang tangguh;

- b. meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya yang didukung oleh suasana yang kondusif dalam penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat;
 - c. meningkatnya perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap keragaman budaya;
 - d. meningkatnya penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pertunjukan seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten;
 - e. meningkatnya kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya;
 - f. meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan;
 - g. meningkatnya kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi, memudahkan akses dan penggunaan oleh masyarakat luas di bidang kebudayaan.
20. Meningkatnya cakupan sasaran penerima PKH menjadi 2,4 juta keluarga sasaran di 33 provinsi dengan perkiraan anggaran mencapai Rp 2,8 triliun rupiah.
21. Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi 172 ribu anak, pelayanan sosial bagi 45 ribu lanjut usia, dan rehabilitasi sosial bagi sekitar 52 ribu orang dengan kecacatan.
22. Meningkatnya kualitas pemberdayaan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin.
23. Meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah, yang antara lain ditandai dengan:
- a. tersusunnya kebijakan pelaksanaan PUG bidang sosial politik dan pengambilan keputusan, ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, perikanan,

- kelautan, ketahanan pangan dan agrohisnis, serta infrastruktur;
- b. tersusunnya kebijakan perlindungan perempuan dari masalah sosial perempuan;
 - c. tersusunnya kebijakan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan;
 - d. terlaksananya fasilitasi kebijakan pelaksanaan PUG, perlindungan perempuan dari masalah sosial, perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, perlindungan bagi tenaga kerja perempuan, serta penerapan sistem data terpilah gender; dan
 - e. meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan PUG dalam rangka percepatan penerapan PUG melalui PPRG, baik di tingkat nasional maupun daerah.
24. Meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah yang ditunjukkan antara lain oleh:
- a. meningkatnya sinergi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak;
 - b. meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pelaksana perlindungan anak;
 - c. meningkatnya koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan antar pusat dan daerah dalam perlindungan anak;
 - d. meningkatnya ketersediaan dan kualitas data/informasi perlindungan anak;
 - e. meningkatnya upaya advokasi dan sosialisasi perlindungan anak;
 - f. meningkatnya efektivitas pengawasan pelaksanaan perlindungan anak.

2.3 Arah Kebijakan

Dengan memperhatikan permasalahan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2013, maka arah kebijakan pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama diprioritaskan pada upaya:

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, yang ditekankan pada upaya antara lain (i) peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB melalui pembinaan akseptor KB dengan penyediaan alat dan obat kontrasepsi bagi pasangan usia subur/PUS yang berasal dari keluarga miskin (pra keluarga sejahtera dan keluarga sejahtera 1) dan rentan lainnya; (ii) penurunan disparitas akses dan kualitas pelayanan KB antar-wilayah dan antar-tingkat sosial ekonomi melalui pelayanan khusus di wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan, dan wilayah kumul miskin; (iii) peningkatan peserta KB pria dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam ber-KB; (iv) penurunan *drop-out* akseptor (termasuk kegagalan dan komplikasi penggunaan kontrasepsi) dengan penyediaan pelayanan penggunaan kontrasepsi metode jangka panjang, pelayanan efek samping, serta pelayanan KB pasca-melahirkan dan keguguran; (v) penguatan advokasi dan KIE KB guna meningkatkan pemahaman tentang KB dan kesehatan reproduksi bagi PUS dan remaja; (vi) penguatan kelembagaan KKB dan kapasitas ketenagaan KKB dengan melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam rangka pembentukan Badan KKB Daerah; (vii) penguatan unit pelayanan KB ditingkat lapangan dengan penyediaan sarana dan prasarana bagi klinik KB pemerintah maupun swasta; (viii) peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan KB dan tenaga pelayanan medis KB, serta penguatan Institusi Masyarakat Pedesaan/ Perkotaan (IMP) atau kader KB; dan (ix) pembinaan keluarga melalui bina keluarga balita dan remaja, serta pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kesertaan ber-KB, serta meningkatkan kesertaan KB mandiri.
2. Penyerasian kebijakan kependudukan dan KB, yang ditekankan pada inventarisasi dan identifikasi peraturan perundangan dan kebijakan sektor yang terkait dengan program kependudukan dan KB; perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis antara aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas; penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait; analisis dampak kependudukan; serta

peningkatan kerjasama kependudukan dalam pendidikan.

3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data-informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu, terutama pada penyediaan data kependudukan yang bersumber dari sensus penduduk, survei kependudukan, dan data sektoral bidang KKB; serta peningkatan cakupan registrasi vital dengan mendorong pemberian NIK kepada setiap penduduk dan menyelenggarakan koneksitas data kependudukan, serta penyusunan dan penyelarasan peraturan pelaksana dan peraturan daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
4. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak, antara lain melalui: (i) penyediaan sarana kesehatan yang mampu melaksanakan PONEP dan PONEK; (ii) pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan strategis untuk meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih; (iii) peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4); (iv) peningkatan cakupan pasien komplikasi kebidanan yang dirangani; (v) peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah; (vi) peningkatan cakupan kunjungan neonatal pertama; (vii) peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bayi; (viii) peningkatan cakupan pelayanan kesehatan anak balita; (ix) peningkatan cakupan persalinan di sarana pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit pemerintah; (x) pendidikan ibu tentang penimbangan balita, ASI eksklusif, garam beryodium; (xi) suplementasi gizi mikro (vitamin A dan tablet Fe); (xii) tatalaksana gizi buruk termasuk pencegahan dan penanganan kasus anak yang pendek (stunting); dan (ra) peningkatan intervensi untuk menanggulangi kekurangan zat gizi mikro terutama melalui fortifikasi.
5. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta penyehatan lingkungan, antara lain melalui: (i) peningkatan kemampuan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko; (ii) penguatan penemuan penderita dan tata laksana kasus; (iii) peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap; (iv) peningkatan KIE untuk mendorong gaya hidup sehat dan

peningkatan kemampuan deteksi dini penyakit tidak menular; dan (v) peningkatan kesehatan lingkungan dengan menekankan pada peningkatan akses dan kualitas air minum dan sanitasi yang layak serta perubahan perilaku *hygiene* dan sanitasi.

6. Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata, antara lain melalui: (i) pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan strategis, terutama dokter, bidan dan perawat di daerah-daerah sesuai kebutuhan terutama di daerah bermasalah kesehatan (DRK) dan daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan (DTPK); (ii) penyempurnaan sistem insentif dan penempatan SDM kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan; dan (iii) pemantapan standar kompetensi tenaga kesehatan, terutama tenaga dokter, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan masyarakat, gizi, dan farmasi.
7. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan, melalui: (i) peningkatan cakupan jaminan kesehatan secara bertahap; (ii) peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin; (iii) penyediaan pembiayaan jaminan persalinan (Jampersal) yang mencakup pelayanan antenatal, persalinan, nifas, dan KB; dan (iv) perluasan cakupan jaminan kesehatan melalui jaminan kesehatan kelas III di rumah sakit.
8. Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri, melalui: (i) peningkatan ketersediaan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik; (ii) perluasan pengawasan *pre market* obat dan makanan utamanya penerapan *e-registration* untuk meningkatkan pelayanan publik; (iii) peningkatan penelitian di bidang obat dan makanan; (iv) peningkatan kemandirian di bidang produksi obat, bahan baku obat, obat tradisional, kosmetika dan alat kesehatan; (v) peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat melalui revitalisasi pengujian laboratorium pengawasan obat dan makanan termasuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan penunjang laboratorium serta peningkatan kompetensi SDM; (vi) perkuatan pengawasan *post market* obat dan

makanan; (vii) peningkatan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan ilegal melalui intensifikasi operasi satuan tugas (Satgas) pemberantasan produk obat dan makanan ilegal; (viii) peningkatan status gizi masyarakat terutama anak sekolah melalui gerakan menuju pangan jajanan anak sekolah (PJAS) yang aman dan bermutu; (ix) peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan; (x) pengembangan dan penerapan *quality management system* (QMS) untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik termasuk *e-government*; (xi) pengembangan sistem *e-logistic*; dan (xii) peningkatan pelayanan kelainasian yang berkualitas.

9. Peningkatan pelayanan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan, melalui: (i) peningkatan upaya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; (ii) pelayanan kesehatan korban pada situasi bencana dan upaya kesehatan pada situasi pemulihan darurat; (iii) kemandirian masyarakat dalam menanggulangi dampak kesehatan akibat bencana; dan (iv) perluasan penerapan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya bencana dan wabah, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
10. Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier, melalui: (i) peningkatan jumlah rumah sakit dan puskesmas serta jaringannya, terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah; (ii) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan ketenagaan; (iii) peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar bertaraf internasional; (iv) peningkatan mutu pelayanan keperawatan, kebidanan dan keteknisian medik kepada masyarakat di tingkat pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier; (v) pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa yang berkualitas, aman dan terjangkau; (vi) perluasan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi pelayanan kesehatan primer di puskesmas; dan (vii) peningkatan pembinaan upaya kesehatan jiwa.

11. Peningkatan kualitas manajemen pembangunan kesehatan, sistem informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kesehatan, melalui: (i) peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi pembangunan kesehatan untuk mendukung pencapaian target MDGs; (ii) penguatan peraturan perundangan pembangunan kesehatan; (iii) peningkatan kualitas penyediaan data dan informasi kesehatan berbasis elektronik (*e-health*); (iv) peningkatan penguasaan dan penerapan iptek kesehatan dalam bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, rancang bangun alat kesehatan dan penyediaan bahan baku obat; dan (v) pelaksanaan riset kesehatan dasar.
12. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata melalui: (i) penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua dalam kerangka pelaksanaan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan; (ii) pemantapan/rasionalisasi implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (iii) peningkatan daya tampung SMP/MTs/ sederajat terutama di daerah terpencil dan kepulauan; (iv) penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang, peningkatan angka melanjutkan, serta penurunan rata-rata lama penyelesaian pendidikan di berbagai jenjang untuk mendukung peningkatan efisiensi internal pendidikan; (v) penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal; (vi) peningkatan mutu proses pembelajaran; (vii) peningkatan pendidikan inklusif untuk anak-anak cerdas dan berkebutuhan khusus; (viii) peningkatan kesempatan lulusan SD/MI/ sederajat yang berasal dari keluarga miskin untuk dapat melanjutkan ke SMP/MTs/ sederajat, dan (ix) pengembangan pendidikan karakter bangsa; serta (x) penguatan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan iklim sekolah yang mendukung tumbuhnya sikap saling menghargai, sportif, kerja sama, kepemimpinan, kemandirian, partisipatif, kreatif, dan inovatif (*soft skills*), serta jiwa kewirausahaan.
13. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal, melalui: (i) peningkatan akses

pendidikan menengah jalur formal dan nonformal; (ii) rehabilitasi ruang kelas rusak berat, serta pembangunan RKB dan USB bagi SMA/SMK/MA/ sederajat; (iii) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja; (iv) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki etos kewirausahaan; (v) harmonisasi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan untuk membangun sinergi dalam rangka merespons kebutuhan pasar yang dinamis; (vi) peningkatan kemitraan antara pendidikan kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan dengan dunia industri dalam rangka memperkuat intermediasi dan memperluas kesempatan penempatan serta penyelarasan pendidikan/pelatihan dengan dunia kerja; (vii) peningkatan pendidikan kewirausahaan untuk jenjang pendidikan menengah; dan (viii) peningkatan ketersediaan guru SMK yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal.

14. Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi, melalui: (i) peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah program studi sejalan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan masyarakat serta daerah; (ii) penguatan otonomi dan manajemen pendidikan tinggi dalam rangka membangun universitas riset (*research university*) menuju terwujudnya universitas kelas dunia (*world class university*); (iii) penataan program studi dan bidang keilmuan yang fleksibel memenuhi kebutuhan pembangunan; (iv) peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan tinggi, seperti perpustakaan dan laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan program studi; (v) pengembangan dan pelaksanaan *roadmap* penelitian sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk mendukung

terwujudnya perguruan tinggi sebagai lembaga pengembangan dan penelitian iptek; (vi) peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan S2/S3 baik di dalam maupun di luar negeri; (vii) penguatan kualitas dosen melalui peningkatan intensitas penelitian dan *academic recharging*; (viii) penguatan sistem insentif bagi dosen dan peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal internasional dan mendapatkan paten; (ix) penguatan kemitraan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri, termasuk lembaga pendidikan internasional, dalam penguatan kelembagaan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan dan penelitian iptek; (x) peningkatan pendidikan kewirausahaan, termasuk *technopreneur* bagi dosen dan mahasiswa dengan menjalin kerja sama antara institusi pendidikan dan dunia usaha; dan (xi) pemberian beasiswa perguruan tinggi untuk siswa SMA/SMK/MA yang berprestasi dan kurang mampu.

15. Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan, melalui: (i) peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru; (ii) penguatan kemampuan guru, termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah, dalam menjalankan paradigma pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan; (iii) peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan profesional berkelanjutan (*continuous professional development*); (iv) pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul; (v) revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas *quality assurance*; (vi) peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) untuk mencetak guru yang berkualitas, dengan menyelenggarakan *pre-service* dan *in-service training* yang bermutu; (vii) peningkatan pengawasan pendirian LPTK dan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan guru; (viii) peningkatan efisiensi, efektivitas, pengelolaan, dan pemerataan distribusi guru; dan (ix) penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

16. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal, melalui: (i) penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan nonformal; (ii) peningkatan pendidikan kecakapan hidup untuk warga negara usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa; (iii) peningkatan pengetahuan dan kecakapan keoranglukaan (*parenting education*) dan *homeschooling* serta pendidikan sepanjang hayat; dan (iv) peningkatan keberaksaraan penduduk yang diikuti dengan upaya pelestarian kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat baca.
17. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, melalui peningkatan jumlah dan kapasitas guru, kapasitas penyelenggara, pemberian bantuan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, serta pengembangan kurikulum dan metodologi pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan yang efektif sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional (SNP) paling lambat pada tahun 2013.
18. Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional, dengan meningkatkan: (i) percepatan penyusunan peraturan perundangan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; (ii) penataan pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundangan; dan (iii) pengembangan kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni serta perkembangan global, regional, nasional, dan lokal termasuk pendidikan agama, pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik dalam rangka mendukung pendidikan berwawasan pembangunan berkelanjutan.
19. Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan melalui: (i) pemantapan pelaksanaan desentralisasi pendidikan; (ii) pengelolaan pendanaan di tingkat pusat dan daerah yang transparan, efektif dan akuntabel serta didukung sistem pendanaan

yang andal; (iii) peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, antara lain, dalam bentuk komite sekolah; (iv) peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi pendidikan termasuk di antaranya dalam bentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota; (v) peningkatan kapasitas satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi pendidikan, termasuk manajemen berbasis sekolah (MBS); dan (vi) konsolidasi sistem informasi dan hasil penelitian dan pengembangan pendidikan untuk dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan.

20. Penguatan tata kelola pendidikan melalui: (i) penguatan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka penilaian kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional; (ii) penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjamin tercapainya pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan terjangkau; (iii) peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan didukung oleh ketersediaan buku-buku mata pelajaran yang berkualitas dan murah, untuk memenuhi standar pelayanan minimal termasuk di daerah pemekaran baru; (iv) peningkatan penerapan dan pemantauan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan termasuk penyediaan internet *ber-content* pendidikan mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
21. Peningkatan pendidikan karakter melalui: (i) sosialisasi, edukasi dan internalisasi pentingnya bangsa yang berkepribadian unggul dan berkarakter; (ii) internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran pada pendidikan formal, nonformal, informal dalam keluarga dan di tempat bekerja; (iii) intervensi regulasi, pelatihan dan pemberdayaan, serta pembiasaan (habitiasi) bagi semua kepentingan; (iv) pembudayaan berperilaku dan berkarakter yang dikuatkan dengan penanaman nilai-

nilai kehidupan agar menjadi budaya; (v) membangun kerja sama yang sinergis antarpemangku kepentingan; dan (vi) peningkatan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta bahasa perhubungan luas antarbangsa.

22. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan tersebut juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial ekonomi dengan meningkatkan: (i) pemihakan para siswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin melalui pemberian bantuan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin; (ii) pemihakan kebijakan bagi daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal (*underserved*); (iii) pengalokasian sumberdaya yang lebih memihak kepada daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal; (iv) pemihakan kebijakan pendidikan yang responsif gender di seluruh jenjang pendidikan; (v) pengembangan instrumen untuk memonitor kesenjangan antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial ekonomi; dan (vi) peningkatan advokasi dan *capacity building* bagi daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal.
23. Peningkatan budaya gemar membaca dan layanan perpustakaan, melalui: (i) penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat; (ii) revitalisasi perpustakaan; (iii) peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata; (iv) peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; (v) peningkatan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan; dan (vi) penguatan kompetensi dan profesionalitas tenaga perpustakaan.
24. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, melalui: (i) peningkatan *character building*, revitalisasi, dan konsolidasi gerakan kepemudaan; (ii) revitalisasi gerakan pramuka; (iii) pengembangan penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kreativitas pemuda; (iv) penyadaran pemuda; (v) pemberdayaan pemuda; (vi) pengembangan kepemimpinan pemuda; (vii) pengembangan

- kewirausahaan pemuda; (viii) pengembangan kepeloporan/kreativitas pemuda; (ix) peningkatan koordinasi dan kemitraan kepemudaan; (x) pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan; (xi) pemberdayaan organisasi kepemudaan; (xii) peningkatan peran serta masyarakat; dan (xiii) pengembangan penghargaan kepemudaan.
25. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, melalui: (i) peningkatan prestasi pada *SFA Games* tahun 2013; (ii) penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi; (iii) pembinaan dan pengembangan olahraga; (iv) pengelolaan keolahragaan; (v) penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan; (vi) pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; (vii) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; (viii) pengembangan iptek keolahragaan; (ix) peningkatan peran serta masyarakat; (x) pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan; (xi) pembinaan dan pengembangan industri olahraga; (xii) pengembangan standar nasional keolahragaan; (xiii) penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi olahraga; dan (xiv) pemberian penghargaan keolahragaan.
26. Peningkatan kualitas kehidupan beragama melalui peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, peningkatan layanan keagamaan, peningkatan kualitas lembaga sosial keagamaan, serta penelitian dan pengembangan agama.
27. Peningkatan kerukunan umat beragama melalui penanganan daerah pascakonflik, optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang kerukunan, kebijakan pemerintah tentang pelayanan umat agama Khonghucu, pengembangan sikap dan perilaku keagamaan yang inklusif dan toleran, *Interfaith Dialogue*, dan penanganan kasus aliran sesat.
28. Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji melalui pengembangan indikator kepuasan jemaah haji terhadap mutu penyelenggaraan haji, penyusunan rancangan undang-undang haji untuk pengelolaan dana haji, dan penerapan standar ISO untuk penyelenggaraan haji.

29. Penguatan karakter dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman budaya, dengan meningkatkan: (i) pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal; (ii) pemahaman tentang kesejarahan dan wawasan kebangsaan; (iii) pelestarian, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa; (iv) pemberdayaan masyarakat adat; dan (v) pengembangan promosi kebudayaan dengan pengiriman misi kesenian, pameran, dan pertukaran budaya.
30. Peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya, melalui (i) peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya; (ii) penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan paparan seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten; (iii) pengembangan kesenian; (iv) pemberian insentif kepada para pelaku seni dalam pengembangan kualitas seni dan budaya dalam bentuk fasilitasi, pendukung dan penghargaan; dan (v) pengembangan pertilman nasional.
31. Peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemertataan warisan budaya, melalui: (i) penetapan dan penentuan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya; (ii) perlindungan, pengembangan, dan pemertataan cagar budaya; (iii) pengembangan permuseuman sebagai sarana edukasi, rekreasi, serta pengembangan kesejarahan dan kebudayaan; dan (iv) penelitian dan pengembangan arkeologi nasional.
32. Pengembangan sumber daya kebudayaan, melalui (i) pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovas, memudahkan akses dan penggunaan oleh masyarakat luas di bidang kebudayaan (iv) peningkatan jumlah, pendayagunaan, serta kompetensi dan profesionalisme SDM kebudayaan; (iii) peningkatan pendukung sarana dan prasarana untuk pengembangan seni dan budaya masyarakat; (iv)

peningkatan penelitian dan pengembangan kebudayaan; (v) peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan; dan (vi) pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor terkait, masyarakat dan swasta.

33. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial melalui:
 - a. peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH);
 - b. peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang cacat terlantar dan/atau berat;
 - c. peningkatan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial; dan
 - d. peningkatan pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Arah kebijakan yang akan dilakukan melalui: (i) menyempurnakan kriteria, proses pentargetan, dan proses seleksi penerima bantuan sosial berdasarkan basis data terpadu; (ii) mengembangkan sistem perlindungan dan kesejahteraan sosial yang lebih komprehensif; (iii) mengembangkan sistem informasi manajemen yang berkualitas untuk mendukung kegiatan pemantauan dan evaluasi; dan (iv) meningkatkan jumlah dan perluasan cakupan sasaran program secara bertahap.

34. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh kementerian dan lembaga, peningkatan koordinasi dan kerjasama lintasbidang, lintassektor, lintasprogram, lintaspelaku, dan lintaskepentingan/lembaga (K/L), serta sistem manajemen data dan informasi gender, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; serta peningkatan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan. Dalam rangka percepatan penerapan pengarusutamaan gender, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) pada tahun 2013 akan diujicobakan pada 34 K/L dan 10 provinsi pilot.

35. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, melalui: (1) peningkatan sinergi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak; (2) peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan antar pusat dan daerah dalam perlindungan anak; (3) peningkatan ketersediaan dan kualitas data/informasi perlindungan anak; (4) peningkatan upaya advokasi dan sosialisasi tentang hak anak dan pengasuhan anak; dan (5) peningkatan efektivitas pengawasan pelaksanaan perlindungan anak.

BAB 3 EKONOMI

3.1 Kondisi Umum

Tujuan akhir dari seluruh upaya pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini keberhasilan pembangunan dipengaruhi dan ditopang oleh kemajuan di bidang ekonomi. Oleh sebab itu Pemerintah terus mendorong pembangunan ekonomi agar kesejahteraan rakyat secara terus menerus dapat ditingkatkan.

Perkembangan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari kondisi dunia. Sampai dengan awal tahun 2012, prospek ekonomi global belum terlalu membaik seiring dengan krisis utang Eropa yang masih berlanjut dan perlambatan ekonomi negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Penyelesaian krisis yang dialami negara-negara Eropa terkait utang dan defisit fiskal masih akan memakan waktu dan mengandung ketidakpastian, sementara pemulihan ekonomi AS masih lemah. Hal tersebut berdampak pada perdagangan global yang menurun dan berpengaruh pada penurunan kinerja ekonomi negara-negara mitra terkait.

Stabilitas ekonomi yang didorong oleh daya tahan domestik yang kuat di saat perekonomian dunia mulai mengalami perlambatan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2011 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,5 persen, lebih tinggi dari tahun 2010 yang besarnya 6,2 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 terutama didorong oleh daya tarik investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) serta ekspor barang dan jasa yang tumbuh masing-masing sebesar 8,8 persen dan 13,6 persen. Daya beli yang terjaga mendorong konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah tumbuh masing-masing sebesar 4,7 persen dan 3,2 persen. Sedangkan sejalan dengan peningkatan investasi, impor barang dan jasa meningkat sebesar 13,3 persen.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen terutama bersumber dari pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor

pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh masing-masing sebesar 6,8 persen, 3,0 persen, 9,2 persen dan 10,7 persen. Sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa masing-masing tumbuh sebesar 1,4 persen, 4,8 persen, 6,8 persen, dan 6,7 persen.

Pada tahun 2012, adanya pengaruh dari krisis ekonomi Eropa dan meningkatnya ketidakpastian pada akhir-akhir ini mengindikasikan bahwa perlambatan ekonomi yang sebelumnya ditargetkan sebesar 6,7 persen diperkirakan sulit untuk dicapai. Dalam kondisi seperti ini dan dengan stabilitas ekonomi yang terjaga disertai dengan upaya penguatan ekonomi domestik dalam keseluruhan tahun 2012 pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,5 persen.

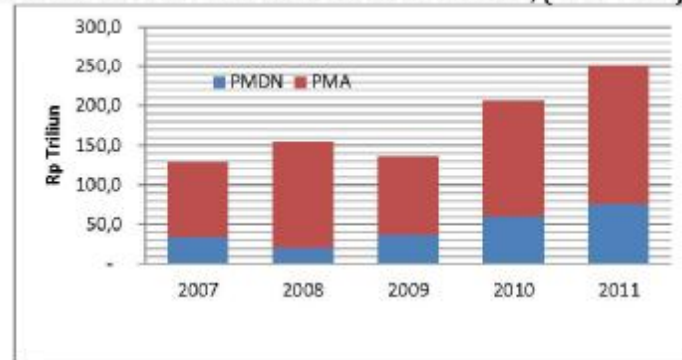
Pada triwulan I 2012, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,3 persen (*y-o-y*). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi terutama didorong pembentukan modal tetap bruto (PMTB) serta ekspor barang dan jasa yang masing-masing tumbuh sebesar 9,9 persen dan 7,8 persen. Sejalan dengan peningkatan investasi, impor barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar 8,2 persen. Adapun pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah meningkat masing-masing sebesar 4,9 persen dan 5,9 persen.

Dari sisi produksi, sektor pengangkutan dan komunikasi; perdagangan, hotel dan restoran serta keuangan, real estat dan jasa perusahaan merupakan faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang masing-masing tumbuh sebesar 10,3 persen; 8,5 persen; dan 6,3 persen. Sedangkan sektor pertanian dan industri pengolahan masing-masing tumbuh sebesar 3,9 persen dan 5,7 persen.

3.1.1 Investasi

Kinerja investasi Indonesia tahun 2011 tetap positif, sebagian didukung oleh realisasi penanaman modal domestik dan asing sektor non migas yang meningkat sebesar 21,6 persen dalam tahun 2011. Meskipun perekonomian global mengalami perlambatan, Indonesia mampu mencatat peningkatan nilai PMA pada tahun 2011 sebesar 20,1 persen karena 46,9 persen PMA yang masuk ke Indonesia berasal dari Asia.

GAMBAR 3.1
REALISASI PMDN DAN PMA SEKTOR NON MIGAS, (2007-2011)



Catatan : Nilai tukar rata-rata USD 1 =Rp 9000,00
Sumber : BKPM

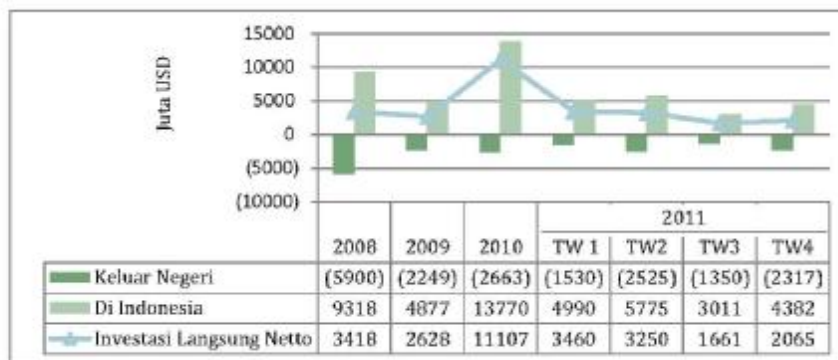
Lokasi investasi domestik dan asing sebagian besar masih di pulau Jawa yang secara total mencapai 61,1 persen pada tahun 2010 dan 58,9 persen pada tahun 2011. Penurunan persentase nilai investasi di pulau Jawa pada tahun 2011 mengindikasikan adanya peningkatan sebaran investasi ke pulau lain, terutama ke Sumatera dan Kalimantan.

Dalam upaya meningkatkan penyebaran ekonomi di seluruh wilayah Indonesia melalui investasi dalam berbagai sektor, telah disusun pengerambangan koridor di setiap pulau besar. Setiap koridor akan terkoneksi satu sama lain yang didukung oleh infrastruktur yang pendanaannya melibatkan swasta dalam skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

Arus masuk investasi asing dalam konteks Foreign Direct Investment (FDI) dalam neraca pembayaran sepanjang tahun 2011 mencapai USD 18,2 miliar atau meningkat 31,9 persen dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya USD 13,7 miliar. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya kegiatan bisnis swasta khususnya di sektor non migas. Tekanan yang cukup besar di triwulan III-2011 --sebagai imbas dari krisis Eropa-- tidak berlanjut sampai dengan triwulan IV. Akselerasi arus masuk FDI terutama didukung oleh sektor non migas yang mencapai USD 17,5 miliar atau meningkat 45,4 persen dari tahun 2010 yang hanya USD 12,3 miliar. Peningkatan investasi tersebut seiring dengan persepsi pelaku usaha yang

tercermin dari Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada akhir tahun 2011 sebesar 106,92.

GAMBAR 3.2
ALIRAN FDI, 2008 - 2011



Sumber: Bank Indonesia

Berbagai kebijakan ekonomi yang dilakukan dalam menarik investasi dan menjaga ekonomi yang berorientasi domestik, telah mampu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kredibilitas dan kemampuan otoritas perekonomian Indonesia dalam mengatasi berbagai tantangan selama tahun 2011 berhasil meningkatkan peringkat utang Indonesia menjadi layak investasi (investment grade) untuk foreign currency long-term senior debt dari BB+ menjadi BBB- dengan outlook stable dari lembaga pemeringkat internasional Fitch. Fitch menilai ada peningkatan kinerja perekonomian, likuiditas eksternal yang lebih kuat, rasio utang publik yang rendah dan terus turun dari 26 persen pada akhir tahun 2010 menjadi 25 persen pada akhir tahun 2011, serta kebijakan makro yang berhati-hati. Lembaga pemeringkat Moody's Investor Service juga menaikkan peringkat utang Indonesia ke level layak investasi dari Ba1 menjadi Baa3 dengan outlook stable. Dengan kenaikan peringkat utang ini, Indonesia sejajar dengan India. Selain itu, hasil jajak pendapat dari perusahaan Jepang dalam survei JBIC tahun 2011 juga meningkatkan peringkat Indonesia dari 8 menjadi 6. Berbagai peningkatan peringkat ini merupakan cerminan perbaikan persepsi terhadap situasi perekonomian Indonesia. Predikat investment grade akan menambah

kepercayaan investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Sementara itu, pada saat yang sama (bulan Januari 2012) seribulan negara anggota Uni Eropa yakni Cyprus, Italia, Portugal, Spanyol, Austria, Perancis, Malta, Slovakia, Slovenia telah diturunkan peringkat hutangnya oleh Standard and Poor. Untuk Belgia, Estonia, Finlandia, Jerman, Irlandia, Luxembourg, dan Belanda tidak turun tetapi keluar dari credit watch. Penurunan peringkat tersebut mengindikasikan bahwa fundamental ekonomi mereka tidak cukup aman untuk layak investasi.

Berdasarkan survey Doing Business dari International Finance Corporation/IFC Bank Dunia, Indonesia telah berhasil memangkas lamanya memulai usaha dari 60 hari pada tahun 2010 menjadi 45 hari pada tahun 2012. Namun secara keseluruhan, iklim usaha di Indonesia masih belum kompetitif dibandingkan negara lain yang tercermin dari menurunnya peringkatnya dari 126 (tahun 2011) menjadi 129 (pada tahun 2012). Posisi tersebut masih jauh dibawah Thailand yang berada pada urutan ke 16 dan 17, Malaysia ke 23 dan 18 pada periode laporan yang sama

Pada kenyataannya, terjadi gambaran yang bervariasi atas iklim usaha di beberapa daerah di Indonesia terkait dengan perijinan memulai usaha, mendirikan bangunan, dan mendaftarkan properti. Berdasarkan laporan hasil survei Sub National Doing Business (IFC - Bank Dunia, 2012) terhadap 20 kota di Indonesia dari 400 kota di dunia, hasil survey menunjukkan bahwa Yogyakarta merupakan kota termudah dalam memberikan perijinan mendirikan usaha; Balikpapan termudah untuk mendirikan bangunan; sementara Jakarta dan Bandung termudah untuk mendaftarkan properti dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Bahkan Yogyakarta secara global menduduki peringkat ke 4 untuk jumlah prosedur pendirian usaha.

Berdasarkan World Economic Forum, ketersediaan sumber daya alam, dan penduduk Indonesia yang besar menjadi pangsa pasar yang menarik bagi investor. Namun, ketersediaan dan mutu infrastruktur termasuk energi belum memenuhi kebutuhan terutama untuk pengolahan hasil alam.

Pada tahun 2012, ekonomi dunia diperkirakan hanya tumbuh 3,5 persen (World Economic Outlook, IMF, April 2012), lebih lambat dibandingkan dengan tahun 2011. Ekonomi zona

Troika diperkirakan akan terkontraksi, sementara Jepang akan meningkat menjadi 2,0 persen, dan China tumbuh melambat menjadi 8,2 persen dari 9,2 persen pada tahun sebelumnya.

Mulai tanggal 31 Januari 2012, China akan memasuki era investasi baru dengan fokus pada investasi hijau (green investment) yang mengurangi penggunaan bahan bakar minyak, dan berorientasi teknologi tinggi di wilayah barat dan tengah. Selain itu, China juga mulai menaikankan upah tenaga kerjanya sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Padahal, upah tenaga kerja di China selama ini sudah dinilai cukup tinggi setelah Thailand dan Malaysia. Kondisi ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk menarik investor masuk. Peluang ini juga didukung sinyal positif dari peringkat investment grade, upaya pemerintah untuk terus memperbaiki iklim investasi, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Untuk itu, Indonesia diperkirakan masih akan mampu memperkuat ekonomi domestiknya dengan target pertumbuhan PMDK dan PMA sektor non migas masing-masing 22,5 persen dan 13,0 persen.

3.1.2 Ekspor

Seiring dengan kondisi perekonomian global yang saat ini masih diliputi dengan resiko ketidakpastian proses pemulihan Eropa dari krisis keuangan, perekonomian dunia terlihat cenderung melambat. IMF pada *WEO/World Economic Outlook* (April, 2012) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2011 melambat, yaitu tumbuh sebesar 3,9 persen yang pada tahun sebelumnya sebesar 5,3 persen. Perlambatan ini diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2012 terutama di beberapa negara berkembang seperti China dan India serta negara-negara di Kawasan Uni Eropa, dengan peluang untuk pulih di tahun 2013. Perlambatan perekonomian dunia tersebut belum memberikan dampak yang signifikan kepada kinerja ekspor Indonesia sepanjang tahun 2011, namun dampak perlambatan ekonomi dunia ini diperkirakan akan terasa terhadap ekspor Indonesia di tahun 2012. Sepanjang tahun 2011 total ekspor Indonesia tumbuh sebesar 29,1 persen, atau mencapai nilai sebesar USD 203,61 miliar. Pertumbuhan ekspor pada tahun 2011 masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2008, yaitu periode sebelum krisis ekonomi global memberikan dampak negatif terhadap kinerja ekspor Indonesia di tahun 2009. Namun demikian, pertumbuhan ekspor tahun 2011 masih lebih rendah bila dibandingkan dengan kinerja pada

tahun 2010. Ekspor 2011 kinerjanya didorong oleh pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 24,9 persen dan ekspor migas sebesar 48,3 persen atau mencapai nilai berturut-turut sebesar USD 162,0 miliar dan USD 41,6 miliar.

**TABEL 3.1
NILAI DAN PERTUMBUHAN EKSPOR (2007-2011)**

Kumulatif	Nilai ekspor (juta USD)					Pertumbuhan				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Ekspor Migas	22.089,6	29.126,3	19.018,2	26.029,6	31.552,1	4,2%	31,9%	-34,7%	27,1%	35,2%
(pangsa terhadap total)	19,4%	21,7%	16,7%	17,8%	20,4%					
Ekspor Nonmigas	93.112,8	107.896,1	97.491,7	120.750,5	187.075,8	15,6%	17,8%	-9,5%	33,1%	24,9%
(pangsa terhadap total)	80,6%	78,3%	83,3%	82,2%	79,6%					
Persebaran	3.657,8	4.536,5	4.952,7	5.001,9	5.182,1	8,3%	25,2%	5,1%	14,9%	3,3%
(pangsa terhadap total)	3,2%	3,7%	5,0%	4,2%	2,8%					
Industri	56.460,8	68.391,5	73.026,5	86.012,1	122.189,1	17,0%	21,0%	16,9%	30,5%	29,7%
(pangsa terhadap total)	47,8%	48,8%	50,0%	54,7%	60,9%					
Perdagangan	36.652,0	39.504,6	24.465,2	34.738,4	64.886,7	8,8%	8,4%	-37,1%	35,5%	21,7%
(pangsa terhadap total)	30,8%	28,8%	25,0%	28,1%	35,0%					
Total ekspor	114.102,4	137.022,4	116.510,0	157.779,1	203.617,9	13,2%	20,1%	-15,0%	35,4%	29,1%

Sumber: BPS (diolah)

**GAMBAR 3.3
PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN IMPOR USA DAN EU DARI DUNIA DAN EKSPOR INDONESIA (2007-2011)**



Sumber: CEIC (diolah)

Kondisi perekonomian global merupakan faktor utama yang menyebabkan penurunan laju ekspor tahun 2011,

dibandingkan tahun 2010. Pasar tujuan ekspor yang memberikan kontribusi utama terhadap perlambatan kinerja ekspor Indonesia tahun 2011 adalah Jepang, ASEAN, Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Sementara itu, pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi dunia dan volume perdagangan global diperkirakan masih akan lebih lambat dibanding tahun 2011, sehingga pertumbuhan ekspor nonmigas Indonesia pun diperkirakan akan mengalami penurunan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah adanya kemungkinan penurunan konsumsi di negara tujuan ekspor utama Indonesia yang diiringi dengan kebijakan proteksionisme. Disatu sisi hal tersebut memberikan hambatan peningkatan kinerja ekspor dan disisi lain juga memberikan ancaman peningkatan masuknya barang impor dari pengalihan pasar negara mitra pesaing. Ke depan, hal yang perlu mendapat perhatian pula adalah mulai terjadinya tren penurunan harga komoditas internasional maupun menguatnya nilai tukar Rupiah seiring potensi peningkatan FDI/*Foreign Direct Investment* karena naiknya peringkat investasi global Indonesia.

Untuk itu, laju pertumbuhan ekspor nonmigas Indonesia tahun 2012 diperkirakan akan melambat dibandingkan dengan tahun 2011, dengan target pertumbuhan sebesar 11,3 persen.

3.1.3 Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pembangunan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pada umumnya menunjukkan kecenderungan pencapaian kinerja yang semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan penerimaan devisa dan semakin meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB dan tenaga kerja Nasional.

Pada tahun 2011 kunjungan wisman mencapai sebesar 7,65 juta orang atau meningkat 9,24 persen dibanding tahun 2010. Jumlah penerimaan devisa diperkirakan sebesar USD 8,55 miliar atau meningkat 12,51 persen dari penerimaan devisa tahun 2010 yang sebesar USD 7,60 miliar. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun 2011 mencapai 172,92 juta perjalanan (triwulan III), dengan pengeluaran wisnus sebesar Rp. 114,59 triliun.

TABEL 3.2
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2010-2011

URAIAN	2010	2011
Wisatawan Mancanegara (wisman)		
- Jumlah (juta orang)	7,00	7,65
- Rata-rata pengeluaran per kunjungan (US \$)	1.085,75	1.118,26
- Rata-rata lama tinggal (hari)	8,04	7,84
- Rata-rata pengeluaran per hari (US \$)	135,01	142,69
- Perkiraan penerimaan devisa (miliar US \$)	7,60	8,55
Wisatawan Nusantara (wisnus)		
- Jumlah perjalanan (juta perjalanan)	234,37	172,92
- Total pengeluaran (triliun rp)	150,41	114,59

Sumber: BPS dan Kementerian Pariwisata

Catatan:

- Data wisnus 2011 angka terowar I-III

Sementara itu, daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global mengalami peningkatan. Berdasarkan *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum (WEF)*, peringkat daya saing pariwisata Indonesia pada tahun 2011 meningkat menjadi posisi 74 dari 139 negara, dari peringkat 81 dari 133 negara pada tahun 2009.

Pencapaian tersebut didukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan: **pertama**, terselenggaranya pengelolaan destinasi pariwisata melalui:

1. Pengembangan daya tarik pariwisata berupa (i) penyelenggaraan bimbingan teknis wisata bahari, penyusunan Jalur Wisata Yacht (Indonesia Yacht Passage), *Cruise, Surfing*; (ii) penyusunan *database* jalur titik labuh wisata yacht dan surfing di Indonesia; (iii) penyusunan *database* situs selam Indonesia; (iv) penyusunan Peraturan Presiden tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia; dan (v) lomba balap kapal layar *Sail Darwin Ambon Yacht Race 2011*;
2. Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata berupa (i) penyelenggaraan aksi sapta pesona yang mencakup aspek gerakan kebersihan, penghijauan, pameran produk pariwisata, penghargaan bina seni sapta pesona, dan

- pagelaran seni budaya;(ii) pembinaan kelompok sadar wisata di kalangan Praukadand(iii) pemberian Citra Pesona Wisata (CIPTA Award) Tahun 2011;
3. Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata berupa pengembangan 596 desa wisata di 33 provinsi;
 4. Pengembangan usaha, industri dan investasi pariwisata berupa (i) penyelenggaraan fasilitasi penyusunan profil investasi pariwisata di 33 provinsi; (ii) penyusunan proposal investasi di 3 daerah; (iii) penyusunan pola perjalanan (*travel pattern*); (iv) pengesahan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIP) sebagai pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan; dan (v) pemberian *Green Hotel Award 2011*;
 5. pengembangan standarisasi pariwisata berupa (i) pemberian sertifikasi kepadatenaga kerja sektor pariwisata sebanyak 12.340 orang atau 98 persen dari target yang sebesar 12.500 orang; dan (ii) fasilitasi pendirian lembaga sertifikasi profesi (LSP) bidang pariwisata di Medan, Makassar, Batam dan Pekanbaru;
 6. Terselenggaranya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata berupa (i) pengembangan 15 *Destination Management Organization/DMO* yaitu Kota Tua Jakarta, Pangandaran, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Toba, Sabang, Kintamani, Rinjani, Komo-oro-Kelimutu-Flores, Tanjung Puting, Derawan, Toraja, Bunaken, Wakatobi, dan Raja Ampat; (ii) Konferensi Nasional *Destination Management Organisation (DMO)* di Labuhan Bajo, Flores dengan tema "*Project Conference on Destination Management in Flores*"; dan (iii) *Management Training DMO*.

Kedua, terselenggaranya promosi dan pemasaran pariwisata melalui: (i) promosi pariwisata di luar negeri yang meliputi antara lain partisipasi pada bursa pariwisata internasional sebanyak 74 *event*, pelaksanaan misi penjualan (*sales mission*) di fokus pasar wisatawan sebanyak 24 *event*, penyelenggaraan festival Indonesia di luar negeri sebanyak 13 *event*, dan penyelenggaraan Indonesia *tourism promotion representative officers* di 12 negara; (ii) promosi pariwisata di dalam negeri yang meliputi penyelenggaraan promosi langsung (*direct*

promotion) sebanyak 27 kali, dan penyelenggaraan *event* pariwisata berskala nasional dan internasional sebanyak 26 *event*; (iii) pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata berupa pengembangan kelengkapan data dan informasi pariwisata di 10 daerah, pencetakan bahan promosi sebanyak 1 juta eksemplar, pembuatan bahan promosi elektronik sebanyak 76.620 keping, publikasi melalui 78 media dalam dan luar negeri, promosi cetak yang telah terdistribusi sekitar 600 ribu eksemplar, dan bahan promosi elektronik yang terdistribusi ke fokus pasar dan berbagai daerah di tanah air; (iv) pengembangan informasi pasar pariwisata berupa tersusunya 23 naskah hasil analisis pasar dalam dan luar negeri, penyebaran 640 eksemplar informasi produk pariwisata Indonesia ke fokus pasar, penyelenggaraan *familiarization trip/fam trip* yang melibatkan 795 orang peserta, penerbitan 6.000 eksemplar *Newsletter* Pariwisata Indonesia; dan (v) penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (*meeting, incentive travel, conference, and exhibition/MICE*) yang meliputi pendukuungan *event* di Indonesia sebanyak 57 kali, penyelenggaraan *event* sebanyak 5 kali, partisipasi dalam *MICE Bidding* 19 kali.

Ketiga, pengembangan sumber daya pariwisata melalui:

1. Pengembangan SDM kebudayaan dan pariwisata berupa (i) peningkatan SDM bidang MICE sebanyak 320 orang di Jabar, Sumbar, Jateng, Kaltim, Babel, Riau, Jatim dan DKI Jakarta; (ii) pelatihan peningkatan kapasitas pelaku industri pariwisata dan masyarakat sebanyak 1.902 orang, dan (iii) pelatihan aparatur pemerintah daerah sebanyak 1453 orang; dan (iv) penyelenggaraan *Workshop ASEAN* diikuti oleh negara-negara anggota ASEAN;
2. Penelitian dan pengembangan bidang pariwisata yaitu Penelitian Industri Kreatif Berbasis Komunitas Bidang Pariwisata, Penelitian Daya Saing Pariwisata Regional, dan Pengembangan Paket Wisata Berbasis TOC (*Trail of Civilization*); dan
3. Pengembangan pendidikan tinggi bidang pariwisata yang ditunjukkan oleh (i) jumlah kelulusan sebanyak 606 orang dari STP Bandung, sebanyak 378 orang dari STP Bali, sebanyak 125 orang dari Akpar Medan dan sebanyak 127 orang dari Akpar Makassar; dan (ii) pemberian Sertifikat

ISO 9001:2008 pada Akpar Makassar, yang merupakan Sertifikat Kompetensi Manajemen yang berstandar Internasional dari Global Group oleh Sertifikasi Tenaga Kerja Bidang Kehutanan sebagai perangkat teknis dan mekanisme sertifikasi kompetensi.

Sementara itu, ekonomi kreatif yang merupakan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu, pada tahun 2010, kontribusi PDB ekonomi kreatif terhadap PDB diperkirakan mencapai sekitar 7,29 persen atau meningkat dari tahun 2009 yang sebesar 7,04 persen. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang bekerja di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2010 meningkat sekitar 4,21 persen menjadi 8.553.365 orang dibandingkan dengan tahun 2009 yang sebesar 8.207.532 orang (*berdasarkan perhitungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*)

3.1.4 Daya Beli Masyarakat

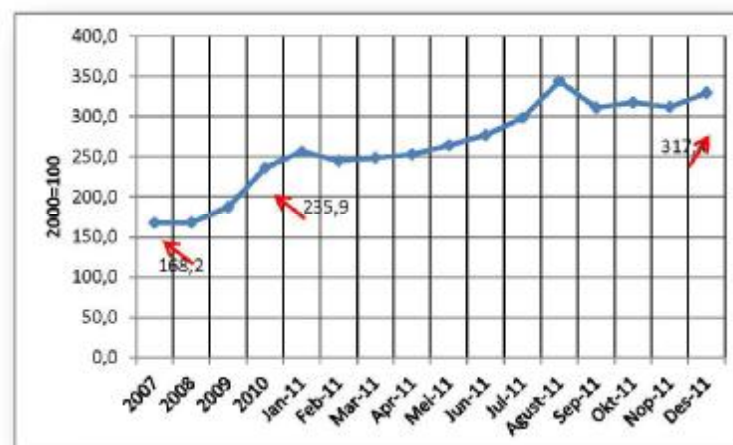
Daya beli masyarakat merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi sisi pengeluaran. Tingkat konsumsi masyarakat sebagai penopang pertumbuhan ekonomi tercermin dari peranannya yang besar dalam PDB Indonesia. Walaupun proporsinya cenderung mengalami penurunan, dalam beberapa tahun terakhir konsumsi masyarakat masih berperan cukup besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2010 proporsinya terhadap PDB mencapai 56,6 persen dan pada tahun 2011 mencapai 54,6 persen.

Di sisi lain, daya beli masyarakat juga merupakan penggerak utama sub sektor perdagangan, sebagai salah satu komponen pembentuk PDB pada sisi lapangan usaha. Pada tahun 2011 pertumbuhan PDB sub sektor perdagangan tercatat sebesar 9,2 persen, meningkat dari pertumbuhan pada tahun 2010 yang sebesar 8,7 persen. Adapun kontribusi sub sektor perdagangan terhadap total PDB (harga konstan) di tahun 2011 adalah sebesar 13,8 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 13,7 persen.

Kondisi perekonomian domestik yang baik tercermin dari tingginya tingkat konsumsi masyarakat dan kuatnya sub sektor perdagangan dalam PDB. Selain itu, tren peningkatan daya beli selama periode 2007-2011 di masyarakat juga dapat

terlihat dari semakin membaiknya indeks penjualan ritel di sepanjang tahun 2011. Artinya, ekspektasi masyarakat terhadap perekonomian Indonesia ke depan terlihat positif yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap daya belinya. Dengan demikian, efek berikutnya adalah penjualan ritel di tahun 2012 diperkirakan akan terus membaik seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat.

GAMBAR 3.4
NILAI INDEKS PENJUALAN RITEL
Tahun 2007 -2011



Sumber: CEIC (diolah)

3.1.5 Keuangan Negara

Realisasi pendapatan negara dan hibah hingga akhir tahun 2011 mencapai Rp1.199,5 triliun (16,9 persen PDB). Realisasi tersebut lebih tinggi Rp29,6 triliun dari rencana dalam APBN-Perubahan (APBN-P) tahun 2011 sebesar Rp1.169,9 triliun. Faktor utama yang mempengaruhi realisasi pendapatan negara dan hibah tersebut adalah perkembangan ekonomi yang semakin kondusif, baik dalam cakupan nasional maupun internasional, serta didukung oleh pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan negara dan hibah yang komprehensif dan konsisten. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2011 meningkat 20,5 persen. Komponen utamanya adalah penerimaan dalam

negeri yang memberikan kontribusi sekitar 99,8 persen.

Dilihat dari komponen penerimaan negara, realisasi penerimaan dalam negeri tahun 2011 mencapai Rp1.196,9 triliun (16,8 persen PDB), lebih tinggi Rp31,7 triliun bila dibandingkan dengan rencana dalam APBN-P. Realisasi tersebut juga lebih tinggi Rp204,7 triliun, atau meningkat 20,6 persen bila dibandingkan dengan realisasinya di tahun 2010. Sementara itu, realisasi penerimaan dalam negeri yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp872,6 triliun (12,3 persen PDB) yang menyumbang 68,2 persen dari total penerimaan dalam negeri. Salah satu peningkatan yang sangat berarti adalah penerimaan pajak perdagangan internasional yang mencapai Rp54,0 triliun atau meningkat sebesar 86,9 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2010.

Di sisi lain, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2011 mencapai Rp324,3 triliun (4,6 persen PDB), atau meningkat Rp37,7 triliun bila dibandingkan dengan APBN-P 2011. Realisasi tersebut terutama ditopang oleh penerimaan yang berasal dari sumber daya alam (SDA) migas. Bila dibandingkan dengan realisasi PNBP SDA migas tahun 2010, realisasi PNBP SDA migas tahun 2011 mengalami kenaikan hingga 27,5 persen. Pencapaian penerimaan SDA migas dalam tahun 2011 tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan beberapa variabel, terutama peningkatan ICP pada tahun 2011 yang realisasinya mencapai USD111,6 per barel atau lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2010 sebesar USD79,4 per barel.

Di sisi belanja, realisasi belanja negara tahun 2011 mencapai Rp1.289,6 triliun (18,1 persen PDB). Realisasi tersebut lebih rendah Rp31,2 triliun daripada rencana dalam APBN-P. Tidak terserapnya alokasi belanja negara bersumber dari rendahnya realisasi belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah bila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN-P. Realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2011 mencapai Rp878,3 triliun atau naik sebesar 25,9 persen dari realisasinya tahun 2010. Di lain pihak, realisasi belanja ke daerah mencapai Rp411,4 triliun, sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan rencana di APBN-P, yang besarnya Rp412,5 triliun.

Jika dilihat lebih rinci, tidak tercapainya target realisasi belanja pemerintah pusat dikarenakan rendahnya realisasi seluruh komponen belanja pemerintah pusat kecuali

komponen subsidi. Realisasi belanja pegawai pada tahun 2011 sebesar Rp175,5 triliun (96,0 persen dari rencana), yang antara lain berkaitan dengan pos honorarium, vakansi, serta anggaran remunerasi Kementerian/Lembaga. Selain itu, realisasi belanja barang yang mencapai 84,7 persen dari rencana, antara lain berkaitan dengan tingginya tingkat ketelitian pejabat pengadaan barang dan jasa dalam mengambil keputusan. Realisasi belanja modal yang hanya mencapai 82,2 persen, disebabkan oleh: (i) hambatan dalam pembangunan infrastruktur, terutama akibat intensitas curah hujan dan bencana alam; (ii) hambatan pengadaan lahan; (iii) penghematan anggaran dalam pelaksanaan tender; serta (iv) tidak optimalnya penarikan dan pemanfaatan pinjaman luar negeri. Khusus untuk alokasi belanja subsidi energi, pada tahun 2011 telah terjadi kenaikan yang cukup signifikan sehingga mencapai Rp255,6 triliun (meningkat 30,9 persen dari yang dialokasikan di APBN-P), dengan rincian Rp165,2 triliun untuk BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 Kg, serta Rp90,5 triliun untuk listrik. Peningkatan pada realisasi belanja subsidi energi disebabkan tingginya harga minyak dunia dan konsumsi BBM bersubsidi sepanjang tahun 2011.

Terkait defisit, dengan realisasi pendapatan negara dan hibah yang lebih baik, disertai dengan realisasi penyerapan anggaran belanja yang relatif rendah, realisasi defisit anggaran tahun 2011 (sebesar Rp 90,14 triliun) lebih rendah dari yang direncanakan (Rp150,8 triliun). Di akhir tahun 2011, realisasi defisit anggaran mencapai 1,3 persen dari PDB, lebih rendah dibandingkan dengan rencana yaitu sebesar 2,1 persen PDB. Rendahnya realisasi defisit anggaran tersebut berdampak pada menurunnya tambahan pembiayaan defisit. Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan realisasi defisit anggaran pada tahun 2010, realisasi defisit pada tahun 2011 meningkat sebesar 92,4 persen. Hal ini dikarenakan oleh kenaikan belanja negara yang cukup signifikan sepanjang tahun 2011, dimana kenaikan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan negara. Sementara itu, stok utang Pemerintah hingga Desember 2011 mencapai Rp1.804,0 triliun atau 25,4 persen dari PDB. Rasio ini menurun bila dibandingkan dengan rasio pada tahun sebelumnya yakni 26 persen dari PDB. Dengan kata lain, pada tahun 2011 Indonesia berhasil menurunkan rasio stok utang Pemerintah meskipun secara nominal masih relatif meningkat.

Di dukung oleh kondisi perekonomian Indonesia yang cukup menggenjirakan selama dua tahun terakhir ini, kebijakan alokasi anggaran belanja negara dalam APBN tahun 2012 diarahkan kepada upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan di daerah melalui pengembangan koridor ekonomi serta pembangunan infrastruktur yang mendukung terwujudnya keterhubungan antarwilayah. Selain itu, kebijakan alokasi anggaran juga tetap diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, mengoptimalkan pengelolaan pembiayaan secara hati-hati, dan meningkatkan pemanfaatannya untuk kegiatan yang lebih produktif.

Berpijak kepada arah dan strategi kebijakan fiskal di atas, maka postur pendapatan negara dan penerimaan hibah pada tahun 2012 direncanakan mencapai Rp1.358,2 triliun, yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp158,7 triliun atau 13,2 persen dari realisasi APBN tahun 2011 sebesar Rp1.199,5 triliun. Kenaikan rencana pendapatan negara dan hibah tersebut diharapkan akan didukung oleh kenaikan penerimaan perpajakan.

Total belanja negara pada tahun 2012 direncanakan sebesar Rp1.548,3 triliun dimana jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp258,7 triliun atau 20,1 persen dari realisasi anggaran belanja negara tahun 2011. Belanja pemerintah pusat tahun 2012 direncanakan sebesar Rp1069,5 triliun, yaitu meningkat sebesar Rp191,2 triliun atau 21,8 persen dari realisasi APBN tahun 2011. Sementara itu, anggaran transfer ke daerah tahun 2012 direncanakan sebesar Rp478,8 triliun, yang berarti naik sebesar Rp67,4 triliun atau 16,4 persen triliun dari realisasi APBN 2011. Sementara itu, pos belanja subsidi BBM, LPG, dan BBN pada tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp137,4 triliun. Disisi lain, besaran anggaran subsidi listrik tahun 2012 direncanakan sebesar Rp65 triliun.

Dengan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.358,2 triliun, defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp190,1 triliun atau 2,2 persen PDB. Rencana defisit anggaran ini mengalami kenaikan Rp100 triliun atau 110 persen bila dibandingkan dengan realisasi defisit anggaran tahun 2011 sebesar Rp90,1 triliun. Terkait hal ini pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga defisit anggaran pada target yang aman namun terus memberikan ruang gerak fiskal yang

bersifat ekspansif demi mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas. Untuk menutup defisit anggaran ini, Pemerintah merencanakan pembiayaan anggaran tahun 2012 sebesar Rp190,1 triliun yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp194,5 triliun. Pinjaman luar negeri yang direncanakan menurun sebesar Rp4,4 triliun mengindikasikan komitmen pemerintah untuk mempertahankan penurunan rasio utang terhadap PDB secara berkesinambungan.

3.1.6 Moneter

Krisis perekonomian dan keuangan di Eropa masih terus berlanjut dalam semester I tahun 2012. Krisis ini bersumber pada defisit fiskal Pemerintah yang cukup besar dan kurang terkendali pada masa lampau, yang terus dibiayai oleh utang Pemerintah yang kian membesar dan memberatkan pembayarannya. Terlebih lagi utang-utang Pemerintah sebagian negara-negara Eropa tersebut juga dimiliki oleh beberapa negara yang relatif besar perekonomiannya seperti Perancis dan Jerman, yang mendorong krisis utang tersebut menjadi krisis keuangan dan ekonomi.

Krisis Eropa yang meluas tersebut berdampak ke perekonomian Indonesia melalui dua jalur, jalur perdagangan dan jalur keuangan. Dari jalur perdagangan, pertumbuhan ekonomi AS dan beberapa negara maju di Eropa yang melambat memaksa penurunan ekspor dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia, di samping penurunan harga beberapa komoditas dunia non energi. Meskipun demikian penurunan pertumbuhan ekspor Indonesia belum berpengaruh pada pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011 cukup kuat seiring dengan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Pertumbuhan ekonomi 2011 yang mencapai 6,5 persen, lebih tinggi dari tahun 2010 sebesar 6,2 persen, didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang masih kuat serta pertumbuhan ekspor meskipun sedikit melambat. Dari sisi produksi, sektor-sektor yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri, sektor transportasi dan komunikasi, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Dari sisi keuangan, arus modal masuk ke Indonesia masih cukup besar yang tercermin dari surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2011 walaupun menghadapi tekanan pada akhir semester II-2011. Sebagai dampaknya,

nilai tukar Rupiah selama tahun 2011 mengalami apresiasi cukup besar, yaitu rata-rata 3,56 persen dibandingkan rata-rata 2010. Tekanan depresiasi terjadi pada semester II 2011 disebabkan oleh persepsi risiko yang memburuk akibat krisis Eropa, serta tingginya permintaan valuta asing (valas) untuk kebutuhan impor. Untuk menjaga keseimbangan pasar valas terus dimonitor perkembangan nilai tukar Rupiah dan kecukupan likuiditas Rupiah dan valas. Apresiasi nilai tukar pada tahun 2011 telah mendorong pertumbuhan PDB non migas khususnya melalui peningkatan impor, serta investasi yang terkait dengan sektor non migas.

Apresiasi nilai tukar, stabilitas harga pangan dan energi (BBM) di dalam negeri mendorong cukup rendahnya inflasi tahun 2011, yang hanya mencapai 3,79 persen (y-o-y), menurun cukup besar dibandingkan inflasi tahun 2010 sebesar 6,96 persen (y-o-y) sehingga sedikit lebih rendah dari sasarannya. Dari sisi komponennya, inflasi yang rendah ini didukung oleh relatif stabilnya inflasi inti sebesar 4,34 persen, inflasi harga barang/jasa yang bergejolak (*volatile*), dan inflasi barang/jasa yang harganya ditentukan Pemerintah/*administered prices (didukung oleh subsidi BBM yang besar)*. Inflasi inti yang stabil selain didukung oleh kebijakan moneter, juga ditentukan oleh perkembangan nilai tukar, inflasi dari barang impor, serta ekspektasi inflasi.

Setelah kebijakan moneter (BI rate) yang stabil diupayakan selama tahun 2010, meningkatnya inflasi pada bulan Januari 2011 menjadi 7,02 persen (y-o-y) diantisipasi dengan kenaikan BI rate dari 6,50 persen menjadi 6,75 persen pada bulan Februari 2011. Dengan kecenderungan harga bahan pangan dan komoditas inti yang relatif menurun dan menurunnya inflasi menjadi 4,42 persen (y-o-y) pada bulan Oktober 2011, BI rate diturunkan menjadi 6,50 persen pada bulan Oktober dan secara bertahap menjadi 5,75 persen pada bulan Februari 2012 sampai dengan April 2012. Pada bulan April 2012, inflasi mencapai 0,21 persen (m-t-m), relatif tinggi dibandingkan April 2011, sehingga inflasi April 2012 meningkat kembali menjadi 4,50 persen (y-o-y).

3.1.7 Sektor Keuangan

Pada tahun 2011, sektor keuangan domestik tak lepas dari tekanan gejala ekonomi dunia akibat masih berlanjutnya krisis Eropa dan melambatnya perekonomian dunia. Meski begitu, kondisi ketahanan sektor keuangan secara umum

relatif terjaga. Hal ini tercermin dari beberapa indikator di sektor pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya yang menunjukkan kondisi yang cukup baik.

Kondisi pasar modal Indonesia sebagaimana pasar modal lain sempat mengalami tekanan akibat kekhawatiran investor global akan krisis utang zona Eropa. Jika pada semester pertama 2011 kinerja IHSG menunjukkan kecenderungan peningkatan hingga menembus level 4.130,8 pada Juli 2011, tekanan akibat krisis utang Eropa kemudian membawa IHSG sempat turun ke level 3.549,0 pada September 2011. Tekanan terhadap IHSG tersebut dipicu oleh kepanikan sementara investor dan pergerakan indeks regional. IHSG kemudian kembali menunjukkan peningkatan menjadi 3.941,7 pada Januari 2012, ditunjang oleh kondisi fundamental ekonomi yang baik seperti prospek pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkatnya peringkat investasi menjadi peringkat layak investasi (*investment grade*). Disamping itu, peningkatan IHSG juga ditopang oleh kembali meningkatnya aksi beli investor asing.

Di sektor perbankan, meski terjadi krisis zona Eropa, kinerja sektor perbankan masih terjaga dengan baik (Tabel 3.3). Indikator rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio - CAR*) pada akhir 2011 masih berada pada tingkat 16,1 persen atau jauh dari ambang batas minimal 8 persen yang disyaratkan. Indikator lain seperti rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan - NPL*), tercatat 2,2 persen pada akhir 2011, menunjukkan kian membaiknya kinerja perbankan dan merupakan tingkat NPL terendah sejak enam tahun terakhir. Dari segi aset, total aset bank-bank umum pada tahun 2011 tercatat mampu tumbuh sebesar 21,4 persen atau tertinggi selama lima tahun terakhir.

TABEL 3.3
INDIKATOR PERBANKAN

Indikator	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Pertumbuhan (persen y-o-y)
Total Aset (Triliun Rp)	1693,5	1986,5	2310,6	2534,1	3008,9	3652,8	21,4
Simpanan DPK (Triliun Rp)	1287,0	1510,7	1753,3	1973,0	2338,8	2784,9	19,1
Kredit (Triliun Rp)	792,2	1002,0	1307,7	1437,9	1765,8	2200,1	24,6
CAR (persen)	20,5	19,3	16,2	17,4	17,0	16,1	-5,6
NPL (persen)	6,1	4,1	3,2	3,3	2,6	2,2	-16,5

Indikator	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Pertumbuhan (persen-y-o-y)
305 (persen)	2,6	2,0	2,3	2,6	2,7	3,0	12,2
353 (persen)	61,6	66,3	74,6	72,9	75,2	78,8	4,1

Sumber: Bank Indonesia

Fungsi intermediasi perbankan juga menunjukkan adanya peningkatan. Kinerja penyaluran kredit hingga Desember 2011 mencapai Rp2.200,1 triliun atau tumbuh sebesar 24,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Seiring dengan diturunkannya suku bunga acuan BI rate pada bulan Oktober 2011, kemudian November 2011 dan terakhir pada bulan Februari 2012 menjadi 5,75 persen, telah sedikit mendorong penurunan suku bunga kredit dan peningkatan intermediasi melalui penyaluran kredit. Tingkat suku bunga kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi masing-masing menurun dari 12,4 persen, 12,0 persen dan 13,8 persen pada akhir 2010 menjadi 11,9 persen, 11,7 persen dan 13,4 persen pada akhir 2011. Menurunnya suku bunga kredit tersebut bersama dengan membaiknya kondisi dan prospek perekonomian telah mendorong peningkatan penyaluran kredit. Komposisi peningkatan kredit pada tahun 2011 dibanding 2010 didorong oleh pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi yang masing-masing mencapai 21,4 persen, 33,2 persen, dan 24,2 persen (y-o-y).

Peningkatan pertumbuhan kredit juga terjadi pada kredit yang berskala Mikro, Kecil dan Menengah (Kredit MKM). Pada tahun 2011, kredit MKM yang disalurkan tercatat sebesar Rp1.151,4 triliun atau meningkat sebesar 24,2 persen dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi penghimpunan dana, pertumbuhan simpanan masyarakat terus meningkat meskipun tingkat suku bunga deposito telah mengalami penurunan. Hingga Desember 2011 simpanan masyarakat mencapai Rp2.784,9 triliun atau meningkat sebesar 19,1 persen (y-o-y). Dengan perkembangan tersebut, dimana pertumbuhan kredit sedikit lebih cepat dari pertumbuhan simpanan, maka rasio antara kredit yang disalurkan dengan simpanan pada akhir tahun 2011 menjadi 78,8 persen atau lebih tinggi dari akhir 2010 (75,2 persen).

Kinerja perbankan syariah juga terus menunjukkan

peningkatan. Pada tahun 2011 pembiayaan syariah mampu tumbuh sebesar 17,2 persen (y-o-y) atau meningkat dari Rp68,2 triliun pada 2010 menjadi Rp 102,7 triliun pada 2011. Sedangkan penghimpunan dana masyarakat melalui perbankan syariah mencapai Rp115,4 triliun atau meningkat sebesar 51,8 persen (y-o-y). Kinerja perbankan syariah juga cukup bagus bila dilihat dari potensi pembiayaan macet yang tercermin dari rasio pembiayaan berkinerja buruk (*Non Performing Financing-NPF*) yang berada pada level 2,52 persen pada akhir 2011.

Disamping pasar modal dan perbankan, perkembangan positif juga ditunjukkan oleh kinerja Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Kepercayaan masyarakat terhadap LKNB terus meningkat, ditunjukkan oleh meningkatnya aset LKNB seperti asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan (Tabel 3.4). Meskipun terjadi krisis utang Eropa, aset perusahaan *multifinance* hingga akhir 2011 mampu tumbuh sebesar 26,5 persen (yoy). Hal serupa juga terjadi pada nilai aset perusahaan asuransi dan aset bersih dana pensiun yang hingga akhir 2011 masing-masing tumbuh sebesar 18,84 dan 4,4 persen (yoy).

TABEL 3.4
PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

	2008	2009	2010	2011	Perubahan (persen, yoy)
Aset bersih dana pensiun (Triliun Rp)	90,8	112,5	130,5	136,2	4,4
Aset Perusahaan Multifinance (Triliun Rp)	158,5	174,6	230,3	291,4	26,5
Aset Perusahaan Asuransi (Triliun Rp)	243,2	321,1	405,2	461,5	18,84

Sumber: Bapepam-LK

Upaya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan sistem keuangan yang efektif dapat terganggu oleh terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Karenanya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai instansi yang merupakan *focal point* dalam rezim anti

pencucian uang di Indonesia, berupaya untuk terus melakukan upaya pencegahan TPPU. Terhitung sejak tahun 2001 hingga akhir Januari 2012, secara kumulatif sebanyak 86.264 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) telah dilaporkan kepada PPATK, dengan jumlah Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Pelapor sebanyak 359. Selanjutnya, sampai dengan Januari 2012 tercatat sudah ada sebanyak 53 kasus yang telah diputus pengadilan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Putusan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang menurut Dugaan Tindak Pidana Asal sebagian besar adalah Tindak pidana penggelapan yaitu sebanyak 11 putusan atau 20,8 persen.

3.1.8 Industri

Perkembangan industri pengolahan khususnya pengolahan non-migas menunjukkan kinerja yang menggembirakan dengan angka pertumbuhan yang terus meningkat. Jika pada tahun 2010 sektor industri pengolahan non-migas mengalami pertumbuhan 5,09 persen, pada tahun 2011 naik menjadi sebesar 6,83 persen. Membaiknya kinerja industri pengolahan non-migas utamanya didorong oleh subsektor industri logam dasar, besi dan baja, industri makanan, minuman dan tembakau, serta industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki yang masing-masing tumbuh sebesar 13,06 persen, 9,19 persen, dan 7,52 persen.

TABEL 3.3
PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS (PERSEN)

Subsektor Industri	2010	2011
1). Makanan, Minuman, Tembakau	2,73	9,19
2). Tekstil, Brg. Kulit dan Alas Kaki	1,74	7,52
3). Brg. Kayu dan Hasil Hutan	-3,53	0,33
4). Kertas dan Barang Cetak	1,04	3,50
5). Kapas, Simpul dan Barang Rami	4,67	3,93
6). Semen, Brg. Galian Non Logam	2,16	7,19
7). Logam Dasar Besi dan Baja	2,56	13,06
8). Alat Angkut, Mesin, Peralatan	10,35	7,00
9). Barang Lainnya	2,98	1,82
Industri Pengolahan Non Migas	5,09	6,83

Sumber: BPS

Sejak Triwulan IV tahun 2005, pertumbuhan industri

pengolahan non-migas selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB Nasional. Hal tersebut mengakibatkan turunnya *share* sektor industri di dalam PDB Nasional dari 24,61 persen di tahun 2004 menjadi 21,6 persen di tahun 2010. Turunnya *share* tersebut yang ditengarai adanya gejala deindustrialisasi di Indonesia. Adapun demikian, sejak Triwulan III tahun 2009, *gap* antara pertumbuhan PDB nasional dan pertumbuhan industri pengolahan non-migas semakin kecil. Pada Triwulan IV tahun 2011, pertumbuhan industri pengolahan non-migas sudah lebih tinggi dari pertumbuhan PDB Nasional. Bila perkembangan ini terus berlanjut, maka sektor industri akan bangkit kembali (reindustrialisasi).

GAMBAR 3.5
GRAFIK PERTUMBUHAN INDUSTRI NON MIGAS



Sumber: BPS

Seiring dengan pencapaian pertumbuhan sektor industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja di sektor ini juga meningkat. Berdasarkan data BPS, terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 720 ribu jiwa atau meningkat sekitar 5 persen untuk periode Agustus 2010 sampai dengan Agustus 2011. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja ini diperkirakan akan terus berlanjut dengan dukungan perbaikan iklim dan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif.

TABEL 3.6
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA
DI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Lapangan Pekerjaan	2010 (Agustus)	2011 (Agustus)
Sektor Industri (juta orang)	13,82	14,54
Total (juta orang)	108,21	109,67

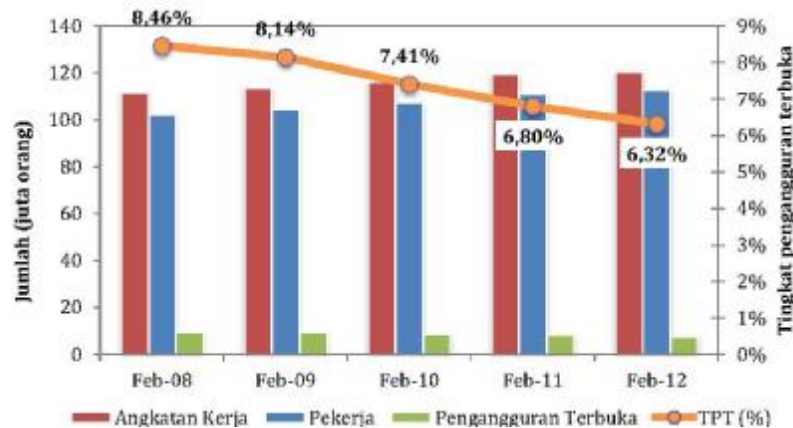
Sumber: BPS

Sementara itu, penyaluran kredit perbankan sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan sektor industri juga menunjukkan peningkatan yang baik. Nilai *outstanding* penyaluran kredit perbankan kepada sektor industri pada bulan Desember 2011 mencapai Rp. 343,0 triliun, meningkat dari nilai *outstanding* pada bulan Desember 2010 yang mencapai Rp. 274,3 triliun.

3.1.9 Ketenagakerjaan

Kecenderungan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang telah berlangsung lima tahun terakhir ini terus berlanjut. Pada bulan Februari 2012, TPT telah menurun menjadi 6,32 persen atau 7,61 juta orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 6,80 persen atau 8,12 juta orang.

GAMBAR 3.6
ANGKATAN KERJA, PEKERJA, DAN PENGANGGUR, 2007-2011



Antara tahun 2011 dan 2012, lapangan kerja yang tercipta mencapai 1,52 juta orang. Dengan peningkatan angkatan kerja yang sebesar 1,01 juta orang, maka jumlah penganggur berkurang sekitar 508 ribu orang. Dari lapangan kerja yang tercipta tersebut, lapangan kerja formal meningkat 3,95 juta orang, sedangkan lapangan kerja informal menurun 2,43 juta orang. Sementara itu, dalam kurun waktu tersebut sektor industri pengolahan mampu menyerap 510 ribu orang, sektor perdagangan dan keuangan masing-masing menyerap sekitar 780 ribu dan 720 ribu orang.

Meskipun kondisi ketenagakerjaan menunjukkan perkembangan yang positif, namun jika dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang bekerja, terlihat bahwa pekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah (49,21 persen atau 55,51 juta orang) dan disusul oleh lulusan SMP (17,99 persen atau 20,29 juta orang), sedangkan pekerja yang berpendidikan tinggi (SMA ke atas) hanya 32,8 persen atau 37 juta orang.

Jika TPT dilihat menurut jenjang pendidikan, antara 2011-2012 TPT untuk seluruh tingkat pendidikan menurun, kecuali TPT lulusan SD kebawah yang meningkat 0,32 poin

persentase dari 3,37 persen menjadi 3,69 persen. TPT lulusan SMP, SMA, SMK, Diploma I/II, dan universitas masing-masing menurun dari 7,83 persen, 12,17 persen, 10 persen, 11,59 persen dan 9,95 persen pada tahun 2011 menjadi 7,8 persen, 10,34 persen, 9,51 persen, 7,5 persen, dan 6,95 persen pada tahun 2011. Diperkirakan kecenderungan menurunnya TPT di setiap jenjang pendidikan ini dapat terus berlanjut.

Berdasarkan usia, TPT kaum muda (usia 15-29 tahun) mencapai 14,57 persen pada Agustus 2011. Angka ini lebih dari dua kali lipat TPT total yang hanya 6,56 persen. Meskipun TPT usia muda ini sudah menurun, tetapi jumlahnya masih besar, yaitu lebih dari 5,34 juta orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa kaum muda, dalam transisinya untuk masuk ke pasar kerja, lebih sulit dalam menemukan pekerjaan, sehingga jumlah penganggur kaum muda lebih tinggi dibandingkan dengan penganggur usia dewasa. Tingginya pengangguran kaum muda ini dapat memberikan pengaruh yang negatif kepada ekonomi dan masyarakat, jika dilihat pendidikan yang ditamatkan, hampir separuh dari penganggur usia muda berpendidikan rendah, yaitu hanya tamat SD dan SMP. Jumlah mereka mencapai 2,55 juta orang atau sekitar 47,79 persen dari seluruh penganggur kaum muda.

Terkait dengan iklim ketenagakerjaan, Pemerintah telah mengupayakan penyempurnaan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi sejauh ini upaya tersebut masih belum dapat terwujud karena belum adanya pembahasan yang sama tentang perubahan pasal-pasal yang menjadi inti permasalahan bagi dunia usaha dalam berinvestasi. Di sisi lain, konflik hubungan industrial masih banyak terjadi dan karena penyelesaiannya masih menghadapi kendala maka beberapa di antara konflik tersebut mengemuka dalam bentuk demonstrasi buruh. Jika hal ini terus terjadi maka akan timbul potensi melambatnya daya serap tenaga kerja yang ditandai oleh berpindahnya tenaga kerja di lapangan kerja formal ke lapangan kerja informal. Dengan demikian, dialog tripartit dan bipartit harus terus didorong untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.

Terkait dengan TKI yang bekerja ke luar negeri, sampai tahun 2012, Pemerintah terus mengupayakan peningkatan pelayanan kepada TKI dan calon TKI. Infrastruktur dan aplikasi sistem informasi layanan pekerja migran/TKI (SIM

3.1.10 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

TKI telah terhangun dan uji coba pengintegrasian sistem informasi yang dimiliki oleh K/L terkait yang mendukung pelayanan dan perlindungan TKI telah dilaksanakan di tiga kabupaten/kota. Pusat layanan pengaduan TKI 24 jam (*hotline service*) yang terbentuk sejak 2011 telah beroperasi dengan baik.

Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk berkontribusi pada pembentukan bangsa yang berdayasaing, pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Hal ini tidak terlepas dari pentingnya peran koperasi dan UMKM dalam menggerakkan usaha masyarakat, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kemajuan pemberdayaan koperasi pada tahun 2011 ditunjukkan oleh peningkatan jumlah koperasi secara kumulatif sampai akhir tahun 2011 yang mencapai 188.181 unit, atau meningkat sebesar 6,0 persen dibandingkan tahun 2010. Jumlah anggota koperasi juga meningkat sebesar 1,3 persen yaitu dari 29,1 juta orang pada tahun 2010 menjadi 30,8 juta orang pada tahun 2011. Namun perkembangan kelengkapan koperasi pada periode yang sama juga menunjukkan kinerja yang beragam. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2011 meningkat sebesar 7,1 persen, sehingga persentase koperasi aktif terhadap total jumlah koperasi mencapai 71,0 persen. Namun persentase jumlah koperasi aktif yang menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT) turun dari 44,7 persen pada tahun 2010 menjadi 43,4 persen pada tahun 2011. Kondisi ini menunjukkan akuntabilitas koperasi pada umumnya masih rendah. Sementara itu kinerja usaha koperasi menunjukkan peningkatan volume usaha dan sisa hasil usaha masing-masing sebesar 23,7 persen dan 12,7 persen. Penyerapan tenaga kerja oleh koperasi pada periode 2010-2011 juga meningkat 5,6 persen sehingga jumlah tenaga kerja di koperasi sampai akhir Desember 2011 tercatat sebanyak 377.238 orang.

Kinerja UMKM juga terus meningkat, baik dari sisi jumlah, serapan tenaga kerja, maupun sumbangannya pada Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah UMKM sampai dengan September 2011 diperkirakan mencapai 55,2 juta unit usaha, dengan jumlah tenaga kerja 101,7 juta orang. Perkembangan tersebut menunjukkan peningkatan jumlah

unit usaha dan tenaga kerja masing-masing sebesar 2,56 persen, dan 2,26 persen dibandingkan posisi pada Desember 2010. Sumbangan UMKM terhadap pertumbuhan PDB nasional pada tahun 2010 tercatat sebesar 57,8 persen, yang berarti menurun dari sumbangan pada tahun 2009 yaitu sebesar 58,1 persen. Usaha mikro masih mendominasi struktur UMKM baik dari sisi populasi unit usaha (98,9 persen), jumlah tenaga kerja (93,6 persen), dan sumbangan pada PDB (56,1 persen). Sementara itu produktivitas per unit UMKM (berdasarkan harga konstan tahun 2000) pada tahun 2010 menunjukkan peningkatan sebesar 3,7 persen dibandingkan tahun 2009. Namun sumbangan UMKM pada total nilai ekspor non migas mengalami penurunan dari 17,0 persen pada tahun 2009 menjadi 15,8 persen pada tahun 2010.

3.1.11 Jaminan Sosial

Penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga dilakukan melalui pengembangan kebijakan jaminan sosial (*social insurance*). Jaminan sosial merupakan salah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak yang diselenggarakan dengan mekanisme asuransi sosial sehingga memerlukan kontribusi dari seluruh peserta/penerima manfaat. Jaminan sosial juga ditujukan untuk melindungi masyarakat terutama yang miskin dari risiko guncangan akibat bencana seperti misalnya asuransi untuk kecelakaan kerja serta bencana alam dan akibat perubahan iklim.

Pembangunan jaminan sosial di Indonesia dimulai ketika Pemerintah mendirikan PT Taspen pada tahun 1963, PT Askes pada tahun 1968, dan PT. Asabri pada tahun 1971 sebagai penyelenggara jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kesehatan bagi PNS dan TNI/Polri. Pemerintah kemudian menambal hadan penyelenggara jaminan sosial bagi pegawai swasta dan BUMN melalui pendirian Perum ASTEK pada tahun 1977 yang kemudian berubah menjadi PT Jamsostek pada tahun 1995. Walaupun demikian, perkembangan cakupan jaminan sosial di Indonesia berjalan lambat. Hingga tahun 2011, kurang lebih setengah penduduk Indonesia belum bisa menikmati jaminan sosial yang layak dan masih terbatas pada pekerja sektor formal (PNS, TNI/Polri, dan sektor swasta). Pemerintah mulai memberikan perhatian jaminan kesehatan secara luas melalui skema Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

(Askeskin) pada tahun 2005 yang kemudian dilanjutkan menjadi program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat (Jankesmas) sejak tahun 2008. Beberapa pemerintah daerah juga berinisiatif dengan meluncurkan program jaminan kesehatan di wilayahnya. Cakupan peserta untuk keseluruhan program dapat dilihat pada Tabel 3.7.

TABEL 3.7
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2010

Jenis Jaminan Kesehatan	Jiwa	persen terhadap populasi
Peserta Askes PNS, PNS dan TNI/Polri	17.274.520	7,3
Peserta Jankesmas	76.000.000	32,1
Peserta JPK Jamastek	4.800.569	2,1
Peserta Jankesda/PJKMD	32.564.006	13,3
Jaminan Kesehatan oleh Perusahaan	6.128.714	2,7
Peserta Asuransi Kesehatan Swasta dan Lainnya	13.200.000	5,6
Total	139.424.348	63,0

Sumber: F2JK Kementerian RI, 2010

Agar hak setiap orang atas jaminan sosial dapat terwujud sesuai amanat konstitusi, kebijakan jaminan sosial perlu terus dikembangkan. Reformasi jaminan sosial di Indonesia dimulai pada tahun 2004 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menyatakan bahwa program jaminan sosial bersifat wajib dan diarahkan mencakup seluruh rakyat yang akan dicapai secara bertahap.

III SJSN mewajibkan terselainya lima macam jaminan sosial dengan cakupan universal, yaitu: (i) jaminan kesehatan; (ii) jaminan pensiun; (iii) jaminan hari tua; (iv) jaminan kecelakaan kerja; dan (v) jaminan kematian. Implementasi UU tersebut ditindaklanjuti melalui pembentukan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2008. DJSN berfungsi merumuskan kewajiban umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN. Sejak pembentukan DJSN, usaha implementasi UU SJSN terus berlanjut, diantaranya melalui penetapan fokus prioritas Penataan Kelembagaan SJSN, dengan agenda utama penataan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Di dalam RPJMN 2010-2014, selain berkomitmen untuk menata BPJS, Pemerintah juga menargetkan tercapainya cakupan semesta jaminan kesehatan pada tahun 2014.

Perkembangan proses penataan kelembagaan sampai dengan awal tahun 2012 antara lain adalah:

1. Telah disahkannya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS;
2. Tersusunnya beberapa rancangan regulasi, diantaranya: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran (RPP PBI); Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Jaminan Kesehatan. Saat ini DJSN bersama dengan Kementerian terkait sedang berupaya menyempurnakan dan mensinkronisasi rancangan regulasi-regulasi tersebut.
3. Untuk mendukung proses penataan kelembagaan tersebut di atas, DJSN sebagai perumus kebijakan umum jaminan sosial bersama dengan instansi terkait lainnya telah melaksanakan beberapa studi pendukung diantaranya adalah penyusunan Peta Jalan bagi peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan, analisis dampak pelaksanaan jaminan sosial terhadap fiskal, penghitungan premi dan manfaat jaminan sosial, dan integrasi data kepesertaan.

3.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2013

3.2.1 Investasi

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi investor untuk melakukan investasi di Indonesia adalah: (i) proses perijinan yang masih panjang dengan dokumen yang beragam di masing-masing daerah dan ditemukannya pembayaran informal; (ii) belum harmonisnya antar peraturan di tingkat pusat, dan belum sinkronnya peraturan pusat dan daerah; dan (iii) masih banyaknya peraturan daerah (perda) bermasalah sehingga menimbulkan retribusi yang membebani pengusaha. Selain itu, dari sisi hukum juga dinilai masih belum memberikan kepastian berusaha.

Meskipun Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah diterbitkan, masalah ketersediaan peta sampai dengan pendaftaran tanah berpotensi terjadinya sertifikat ganda dan sengketa lahan sehingga perlu dicarikan solusi

terbaik.

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan masalah penting untuk mendorong pertumbuhan investasi dan merekatkan keterkaitan ekonomi antar daerah. Selama ini skema pendanaan kerjasama pemerintah swasta (KPS atau PPP/Public Private Partnership) yang disusun belum sepenuhnya dapat menarik investor sehingga perlu diupayakan terobosan terkait regulasi dan penjaminannya. Sasaran pertumbuhan investasi PMDN dan PMA sektor non migas tahun 2013 masing-masing adalah 26,0 dan 16,5 persen.

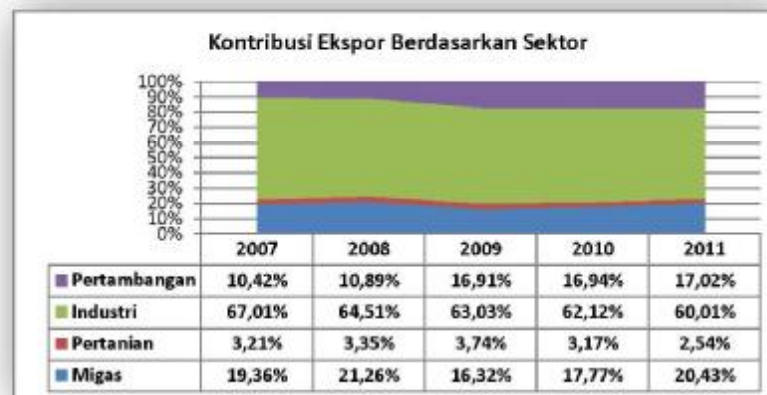
3.2.2 Ekspor

Permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi di bidang perdagangan luar negeri, tahun 2013 dikelompokkan ke dalam permasalahan eksternal dan internal. Tantangan eksternalnya adalah *pertama*, pemulihan ekonomi dan volume perdagangan dunia pada tahun 2013 diperkirakan masih akan diwarnai oleh resiko, meskipun resikonya lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2012. *Kedua*, semakin besarnya tingkat persaingan di pasar regional dan pasar global, baik persaingan produk, jasa, maupun akses pasar. *Ketiga*, komisi politik dan keamanan global yang tidak menentu di beberapa pasar tujuan ekspor akan menjadi kendala dalam upaya peningkatan akses produk Indonesia di pasar tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk memperluas pasar tujuan ekspor ke negara-negara yang potensial, seperti Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa Timur menjadi suatu hal yang perlu ditingkatkan.

Dari sisi internal upaya peningkatan kinerja perdagangan juga menghadapi beberapa tantangan. *Pertama*, peranan ekspor produk manufaktur terhadap total ekspor Indonesia selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2007, proporsi ekspor produk manufaktur terhadap total ekspor Indonesia adalah sebesar 67,0 persen, yang kemudian secara perlahan menurun dalam lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2011 proporsinya hanya mencapai 60,01 persen. Hal ini menunjukkan masih rendahnya daya saing produk ekspor manufaktur Indonesia di pasar internasional. *Kedua*, penurunan kontribusi ekspor produk manufaktur diiringi dengan naiknya kontribusi ekspor komoditas pertambangan, yang bernilai tambah kecil. Pada tahun 2007 kontribusi ekspor komoditas pertambangan terhadap total ekspor adalah sebesar 10,42 persen, yang kemudian secara perlahan

kontribusinya meningkat menjadi 17,02 persen di tahun 2011. Kondisi ini jika dibiarkan akan menyebabkan permasalahan, seperti: kinerja ekspor Indonesia akan lebih rentan terhadap volatilitas harga komoditas di pasar global dan nilai tambah pengolahan produk pertambangan licik dinikmati oleh perekonomian Indonesia. *Ketiga*, masih belum sesuai standar dan kualitas produk ekspor Indonesia dengan standar dan kualitas yang diinginkan oleh pasar tujuan ekspor. *Keempat*, masih belum efisiennya biaya produksi untuk produk ekspor.

TABEL 3.8
KONTRIBUSI BERDASARKAN SEKTOR



Sumber: BPS (diolah)

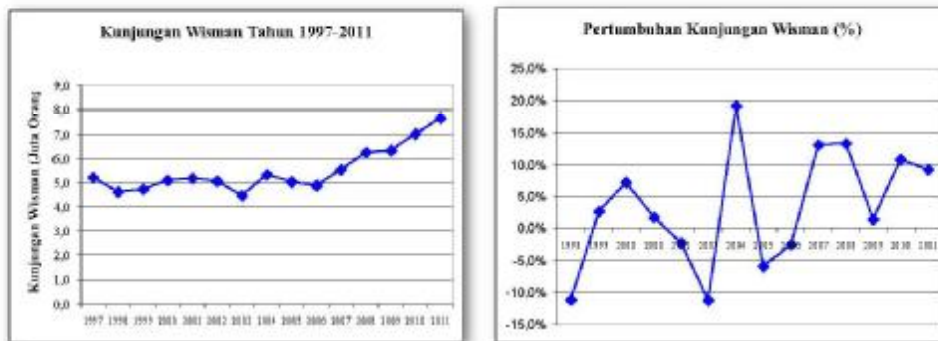
Namun demikian, prospek pemulihan ekonomi di tahun 2013 pada beberapa pasar tujuan ekspor utama Indonesia, seperti: Jepang, Amerika Serikat, China, India, dan negara berkembang lainnya, diperkirakan akan lebih baik dari tahun 2012 (World Economic Outlook, April 2012). Di sisi internal, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi proses ekspor dan impor.

Oleh sebab itu, target pertumbuhan ekspor nonmigas Indonesia pada tahun 2013 adalah sebesar 16,0 persen.

3.2.3 Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

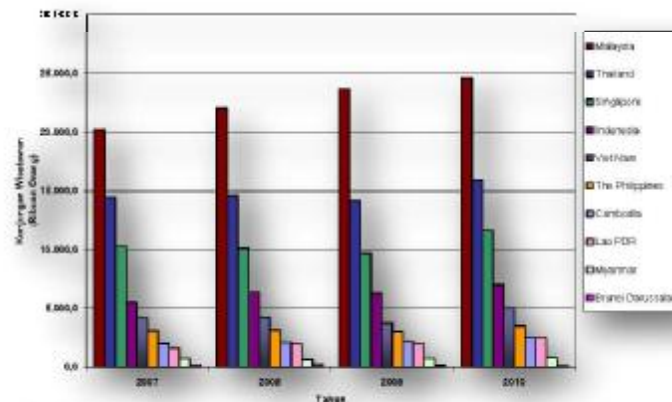
Pembangunan kepariwisataan nasional telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun pertumbuhan kunjungan wisman belum mencapai pertumbuhan tertinggi seperti pertumbuhan pada periode 2003-2004, yaitu 19,1 persen (gambar 3.7). Disamping itu, jumlah kunjungan wisman yang masih jauh tertinggal di bawah negara-negara lain di ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, menunjukkan bahwa daya saing kepariwisataan Indonesia masih rendah (gambar: 3.7).

**GAMBAR 3.7
PERKEMBANGANKUNJUNGAN WISMAN TAHUN 1997-2011**



Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 3.8
PERBANDINGAN KUNJUNGAN WISMAN ANTAR NEGARA ASEAN
TAHUN 2007-2010



Sumber: *Asean Tourism Statistic* Agustus 2011

Berbagai permasalahan yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2013 dalam pembangunan kepariwisataan antara lain: *Pertama*, destinasi pariwisata belum sepenuhnya siap bersaing di pasar global, hal tersebut antara lain disebabkan oleh (i) belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata; (ii) belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti transportasi darat, laut dan udara, dan ketersediaan fasilitas umum; (iii) belum optimalnya kemitraan dan kerja sama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (*public and private partnership*); (iv) belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi di bidang pariwisata; *Kedua*, belum efektifnya pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata yang disebabkan oleh: (i) belum memadainya ketersediaan informasi pariwisata di dalam dan luar negeri; (ii) belum optimalnya kemitraan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dan promosi; (iii) belum optimalnya pemanfaatan media massa, elektronik, dan media cetak serta teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology/ICT*) sebagai sarana promosi; dan (iv) masih terbatasnya dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung promosi pariwisata daerah; *Ketiga*, terbatasnya daya saing sumber daya pariwisata yang disebabkan antara lain oleh: (i) terbatasnya

jumlah, jenis, dan kualitas SDM di bidang pariwisata; dan (ii) belum optimalnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata; dan keempat, belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan di pusat maupun di daerah dalam mendukung pembangunan kepariwisataan.

Dengan demikian tantangan pembangunan kepariwisataan pada tahun 2013 adalah: (i) meningkatkan daya saing destinasi pariwisata; (ii) meningkatkan promosi dan pemasaran berbasis teknologi informasi dan teknologi; (iii) meningkatkan komitran pemerintah, swasta dan masyarakat (*public private partnership*) dan kerjasama lintas bidang dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat; (iv) meningkatkan profesionalisme dan kemampuan (*skill*) SDM di bidang pariwisata dalam menghadapi persaingan global dan liberalisasi tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan pelayanan prima kepada wisatawan dan meningkatkan kualitas hasil penelitian.

Dari sisi ekonomi kreatif, permasalahan utama yang dihadapi adalah: (i) kemampuan berkreasi sumber daya insani belum memadai dalam kuantitas maupun kualitas sehingga produk-produk ekonomi kreatif belum sepenuhnya mampu bersaing di pasar global; (ii) apresiasi masyarakat terhadap produk atau karya serta pelaku kreatif di Indonesia masih rendah; (iii) infrastruktur dan regulasi teknologi informasi belum optimal mendukung ekonomi kreatif; dan (iv) fasilitas pendukung bagi pengembangan ekonomi kreatif masih terbatas. Dengan demikian tantangan pembangunan ekonomi kreatif pada tahun 2013 adalah menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif sehingga mampu bersaing di pasar global, meningkatkan kualitas SDM di bidang ekonomi kreatif, dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk ekonomi kreatif.

Dengan melihat kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi, sasaran pembangunan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif adalah:

1. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,0 juta orang dan jumlah pergerakan wisatawan nusantara menjadi 250 juta perjalanan;
2. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional menjadi 8,35 juta orang;
3. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDB

- menjadi sebesar 4,2 persen;
4. Meningkatnya nilai investasi terhadap nilai investasi nasional menjadi 4,64 persen;
 5. Meningkatnya penerimaan devisa yang diperoleh dari kunjungan wisatawan menjadi USD 10,35 miliar;
 6. Meningkatnya pengeluaran wisatawan nusantara menjadi sebesar Rp. 175,0 triliun;
 7. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB sebesar 7,38 persen;
 8. Meningkatnya partisipasi tenaga kerja di bidang ekonomi kreatif sebesar 8,35 persen;
 9. Meningkatnya kontribusi unit usaha di bidang ekonomi kreatif terhadap unit usaha nasional sebesar 7,31 persen.
 10. meningkatnya kuantitas dan kualitas lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja sebesar 1.443 orang;
 11. Meningkatnya profesionalisme tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi sebesar 9.000 orang

3.2.4 Daya Beli Masyarakat

Peningkatan daya beli masyarakat merupakan faktor kunci untuk mendorong konsumsi. Untuk itu, perlu upaya di Sisi Penawaran (supply-side) agar daya beli masyarakat tetap terjaga, bahkan agar dapat meningkat. Permasalahan yang saat ini dihadapi adalah: (i) masih terdapatnya fluktuasi harga dan kelangkaan bahan pokok dan barang strategis, terutama menjelang hari besar keagamaan dan juga hari besar nasional; (ii) masih terdapatnya disparitas harga antar wilayah yang saat ini terlihat masih cukup tinggi; serta (iii) masih tingginya biaya angkut dan distribusi, sehingga biaya logistik secara keseluruhan masih tinggi.

Selain itu, beberapa tantangan lain yang dihadapi adalah pertama, peningkatan kualitas barang di pasar domestik; yang antara lain akan dilakukan melalui upaya perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas barang domestik dengan pengawasan barang beredar yang lebih intensif. Pengawasan ini juga dilakukan sebagai upaya untuk melindungi dan menjaga daya saing pasar dalam negeri dari serbuan barang impor yang tidak berkualitas dan ilegal. Kedua, peningkatan iklim persaingan usaha yang sehat, agar perekonomian menjadi lebih efisien.

3.2.5 Keuangan Negara

Meskipun kinerja perekonomian beberapa tahun terakhir ini menunjukkan prospek yang menggembirakan, namun tetap

diperlukan adanya kewaspadaan terhadap sejumlah permasalahan dan tantangan yang mungkin muncul di kemudian hari. Laju pemulihan ekonomi global yang tidak merata, krisis utang di Eropa, serta meningkatnya harga komoditas dunia terutama minyak dan pangan, merupakan tantangan eksternal yang tentunya akan sangat mempengaruhi kebijakan serta postur APBN. Dengan memperhatikan pencapaian kinerja pembangunan bidang Keuangan Negara pada tahun 2011 dan perkiraan pencapaiannya untuk tahun 2012, permasalahan yang diperkirakan masih akan dihadapi dalam pengelolaan APBN yang berkelanjutan antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, terkait sisi pendapatan negara dan laba, saat ini Pemerintah masih menghadapi kendala dalam mengoptimalkan ruang fiskal dengan sasaran yang difokuskan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan penyediaan infrastruktur. Khusus untuk masalah perpajakan, Indonesia saat ini masih tergolong sebagai negara dengan rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang rendah. Penerimaan PPh [Pajak Penghasilan] di Indonesia masih dikategorikan rendah jika dibandingkan dengan rata-rata penerimaan PPh di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, rasio efisiensi pajak juga masih dikategorikan rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia Timur atau negara berpendapatan menengah ke atas, khususnya untuk jenis pajak perusahaan dan pajak pertambahan nilai (PPn). Rendahnya rasio penerimaan pajak serta efisiensinya antara lain disebabkan oleh: (i) masih sempitnya cakupan wajib pajak baik perorangan maupun korporasi; (ii) masih kompleksnya administrasi perpajakan serta belum optimalnya kualitas pelayanan perpajakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia; (iii) belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak misalnya terkait kapasitas basis data; serta (iv) masih rendahnya kualitas SDM yang memenuhi harapan organisasi dan masyarakat.

Dilihat dari sisi PNB, permasalahan utama yang masih akan dihadapi pada tahun mendatang adalah: (i) kecenderungan penurunan lifting minyak mentah Indonesia dikarenakan penurunan secara alamiah; (ii) belum optimalnya penerimaan iuran tetap dan royalti yang bersumber dari pertambangan mineral dan batubara, yang disebabkan oleh belum optimalnya verifikasi penagihan kewajiban keuangan dan

verifikasi ekspor batu bara ke luar negeri; serta (iii) masih tingginya risiko tidak tercapainya penerimaan atas laba BUMN, terutama karena faktor kinerja BUMN, permasalahan administrasi, dan ketidakpastian kondisi ekonomi global.

Kedua, terkait dengan belanja negara, permasalahan utama yang dihadapi adalah: (i) terbatasnya ruang gerak fiskal akibat belanja-belanja yang bersifat wajib, dimana alokasi belanja pegawai, subsidi, dan pembayaran bunga utang lebih besar jika dibandingkan dengan alokasi belanja untuk investasi sehingga berdampak pada sektor riil; (ii) kualitas perencanaan yang kurang matang, terdorong dari terjadinya beberapa revisi terhadap RKA-KL; (iii) belum optimalnya pelaksanaan sistem pengelolaan belanja negara, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang antara lain meliputi sistem penganggaran terpadu (unified budget), anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), dan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework); (iv) masih terdapatnya komponen kegiatan yang tidak langsung terkait dengan pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam RKP yang diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang besar terhadap perekonomian; serta (v) masih rendahnya efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara yang dapat dilihat dari rendahnya proporsi belanja K/L untuk kegiatan prioritas nasional. Belum terwujudnya efisiensi dan efektifitas belanja negara tersebut merupakan dampak dari: (i) belum adanya sinergi antara program nasional dan kebijakan K/L di pusat dan daerah; serta (ii) belum sinkronnya dana desentralisasi dengan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, terutama dalam hal akuntabilitas pengelolaannya.

Ketiga, terkait dengan pembiayaan APBN, permasalahan yang masih dihadapi bersumber baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa permasalahan utama di bidang pembiayaan APBN dalam negeri adalah: (i) belum optimalnya pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara (SBN); (ii) belum optimalnya pasar dan infrastruktur SBN; serta (iii) masih lemahnya koordinasi pengelolaan SBN. Sementara itu, permasalahan utama yang dihadapi dalam pembiayaan luar negeri adalah: (i) tingginya beban pembayaran cicilan pokok utang dan bunga utang pemerintah yang disebabkan oleh peningkatan outstanding SBN valas dan peningkatan biaya pinjaman luar negeri; (ii) belum optimalnya efisiensi dan efektivitas

pemanfaatan utang luar negeri yang berdampak terhadap meningkatnya beban *commitment fee* akibat dari keterlambatan pemenuhan persyaratan pemberi pinjaman (*lender*), khususnya pada utang baru; serta (iv) sulitnya Indonesia saat ini memperoleh pinjaman lunak yang disebabkan oleh membaiknya *Country Risk Classification (CRC)* sehingga untuk memperoleh pembiayaan, pemerintah harus mengajukan pembiayaan *semi-concessional* atau pinjaman komersial.

Keempat, terkait dengan perbendaharaan negara, beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian ke depan adalah: (i) belum memadainya kerangka hukum (peraturan perundang-undangan) yang terkait dengan perbendaharaan negara; (ii) masih banyaknya temuan berupa rekening pemerintah di berbagai K/L yang keberadaannya tidak mencerminkan praktik yang sehat dalam pengelolaan keuangan negara; (iii) belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan kas (*cash management*), khususnya terkait dengan perencanaan penggunaan kas (*cash forecasting*) serta pemanfaatan dana pemerintah yang menganggur (*idle cash*); (iv) masih terdapat BUMN/BUMD serta pemerintah daerah yang kesulitan melunasi kewajibannya kepada pemerintah pusat atas pemberian penerusan pinjaman yang dananya bersumber dari penerusan pinjaman/SLA. Rekening Dana Investasi/RDI dan rekening pembangunan daerah; (v) kurang optimalnya efisiensi belanja barang/jasa pemerintah; serta (vi) ketimpangan dan ketidakseragaman penggunaan sarana dan prasarana antar kantor secara vertikal.

Kelima, terkait dengan pengelolaan barang milik negara, beberapa permasalahan utama yang dihadapi adalah sebagai berikut: (i) belum tersedianya peraturan perundang-undangan yang memadai terkait dengan pengelolaan kekayaan negara, termasuk penatausahaan kekayaan Negara yang dipisahkan pada BUMN dan BUMD; (ii) belum optimalnya pengamanan Barang Milik Negara (BMN), baik secara administratif, hukum, maupun fisik; (iii) belum optimalnya pemanfaatan BMN sesuai prinsip *The Highest and Best Use*; serta (iv) masih lemahnya koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait dengan penilaian barang milik Negara.

Berangkat dari berbagai permasalahan yang ada dan target yang ingin dicapai pada tahun 2013, sasaran sektor Keuangan Negara pada tahun 2013 adalah sebagai berikut. Pertama,

menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi agar tidak rentan terhadap kemungkinan perlambatan perekonomian global serta risiko ketidakpastian (*uncertainty risk*) dari sistem keuangan dunia. Kedua, memberikan dorongan terhadap percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pembangunan infrastruktur dan industri di berbagai koridor ekonomi, serta tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja negara guna meningkatkan kualitas belanja K/L dan daerah yang ditandai dengan alokasi pada prioritas yang lebih baik serta fokus pada kegiatan-kegiatan strategis, termasuk *flat policy* untuk belanja rutin. Keempat, mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, serta meningkatkan optimalisasi pengamanan BMN, baik secara administrasi, hukum, maupun fisik.

3.2.6 Stabilitas Harga dan Nilai Tukar

Krisis ekonomi dan keuangan Eropa meskipun tidak secara langsung memberikan pengaruh yang berarti pada perekonomian Indonesia, namun secara tidak langsung mempengaruhi sektor keuangan domestik pada triwulan IV tahun 2011. Sentimen negatif yang terjadi pada pasar modal dan keuangan di Eropa mendorong pelarian valas yang cukup besar pada triwulan IV ini. Gejala ini telah diantisipasi dengan baik di pasar valas oleh Bank Indonesia. Kondisi ini masih bisa berlanjut di akhir 2012 maupun pada tahun 2013. Perkembangan dan gejolak keuangan ini perlu terus dimonitor dan diwaspadai agar dapat dihindari/diantisipasi pada waktu mendatang.

Selain itu kebijakan ekonomi makro yang sehat dan berkelanjutan juga merupakan kunci/penentu dalam menjaga kestabilan di pasar keuangan. Subsidi BBM dalam negeri yang relatif besar juga dapat memberikan indikasi pelaksanaan kebijakan fiskal yang kurang konsisten dan berkelanjutan. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas di pasar keuangan. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya Pemerintah dan semua pihak untuk terus merencanakan/mendisain kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan.

Permasalahan selanjutnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi-IHK adalah menjaga kenaikan upah pekerja (provinsi/kabupaten/kota) agar tidak mendorong kenaikan inflasi daerah (provinsi) secara berarti. Dalam hubungan ini diperlukan pengkajian besarnya kenaikan upah

pekerja daerah (provinsi/kota) dan inflasi daerah (provinsi/kota), serta dampaknya terhadap inflasi nasional (IHK).

Lancarannya pasokan dan distribusi bahan pangan ke daerah ikut menentukan besarnya inflasi daerah dan nasional. Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi dapat mempengaruhi distribusi barang dan jasa ke pelosok tanah air, demikian pula dengan pengaturan lalu lintas yang tertib dan teratur juga mendorong pengangkutan barang dan jasa ke berbagai tempat/pusat-pusat distribusi di daerah. Pengembangan infra struktur di daerah terkadang dihambat oleh penyelesaian masalah pertanahan yang memakan waktu lama dan memerlukan koordinasi Pemerintah Daerah yang baik/erat. Demikian pula dengan pengembangan sarana dan prasarana perkereta api (*double track rails*, kereta barang, kereta dari/ke bandara, sarana pergudangan) perlu terus diupayakan.

Selain itu berbagai retribusi yang resmi maupun pungutan yang tidak resmi perlu diminimalkan pada jalur-jalur perhubungan darat, laut, udara, pergudangan, dan pasar. Struktur pasar yang bersifat oligopoli, terutama pada beberapa bahan pangan pokok, perlu terus diperbaiki. Sosialisasi terhadap pentingnya pengendalian inflasi, khususnya pada komoditas beras dan bahan pangan pokok lainnya perlu terus diupayakan, seiring dengan upaya peningkatan produksi pangan pokok di berbagai daerah/provinsi. Hal ini diharapkan dapat mendorong penurunan harga pangan pokok yang sulit (*rigid*) untuk menurun.

Kenaikan harga juga dapat disebabkan oleh ketidaklancaran arus barang dan jasa yang disebabkan oleh gangguan bencana alam atau ulah manusia. Upaya pencegahan dan antipasi bencana alam, baik gempa bumi, bencana banjir maupun bencana alam lainnya perlu terus disiagakan seperti normalisasi sungai-sungai dan saluran-saluran besar pembuangan limbah/kotoran, maupun saluran-saluran pembuangan air (kotor) di perkotaan, perdesaaan maupun perumahan-perumahan di perkotaan, serta kebersihan dan sanitasi lingkungan secara keseluruhan. Bencana alam seperti banjir dapat mendorong kenaikan inflasi di beberapa daerah/provinsi.

Selain itu, upaya koordinasi fiskal dan moneter, baik antara

Otoritas Fiskal (Kemenkeu), Otoritas Moneter (Bank Indonesia), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian dan Pemerintah Daerah terkait perlu terus diupayakan, baik melalui Tim Teknis Pengendali Inflasi pusat (TPI) dan daerah (TPID) maupun forum/rapat-rapat koordinasi lainnya, agar gejala kenaikan harga (pangan) di daerah dapat diantisipasi dalam waktu yang relatif singkat.

3.2.7 Sektor Keuangan

Kondisi stabilitas dan kinerja sektor keuangan memang relatif baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu disikapi guna lebih mengoptimalkan peran sektor keuangan bagi pembiayaan pembangunan tanpa harus mengesampingkan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Dengan meningkatnya peringkat investasi Indonesia menjadi *investment grade*, aliran masuk modal asing ke Indonesia berpotensi meningkat pesat. Namun perlu diwaspadai terhadap adanya risiko aliran modal keluar (*capital outflow*) terutama jika perekonomian dunia memburuk pada tahun 2012 mengingat kepemilikan asing di pasar modal masih cukup besar. Apabila terjadi *sudden reversal* (aliran balik tiba-tiba) terhadap arus modal asing yang masuk ke Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap stabilitas sektor keuangan seperti goncangan terhadap nilai tukar mata uang dan indeks saham. Karena itu tantangannya adalah bagaimana mengarahkan aliran modal masuk tersebut ke sektor riil atau instrumen investasi jangka panjang.

Dari sektor perbankan, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masih terkendalanya fungsi intermediasi perbankan yang disebabkan oleh masih tingginya Net Interest Margin (NIM) mengingat masih tingginya tingkat suku bunga kredit di Indonesia. Sektor perbankan Indonesia ditengarai belum beroperasi secara efisien jika dibandingkan dengan bank-bank di Asia Tenggara. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Indonesia mencapai 85,4 per Desember 2011, jauh lebih tinggi dibandingkan rasio BOPO perbankan di kawasan ASEAN yang berada di kisaran 40-60 persen.

Peran perbankan syariah dalam perbankan nasional masih relatif terbatas, yaitu hanya 3,6 persen dari total aset perbankan nasional, yang antara lain disebabkan oleh beberapa permasalahan, yaitu: (i) pemahaman publik yang

belum menyeluruh dan mendalam tentang perbankan syariah; (ii) jumlah SDM perbankan syariah yang belum memadai; dan (iii) pasar keuangan syariah (pasar sukuk, pasar saham, dll) yang belum berkembang.

Beberapa permasalahan di industri BPR, antara lain: (i) kondisi permodalan sebagian besar BPR yang relatif kecil dan terbatas; (ii) kesenjangan (*gap*) industri BPR yang cukup besar dari sisi aset, modal serta produk dan pelayanan membutuhkan kebijakan pengawasan dan pengaturan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi masing-masing BPR; (iii) kemampuan BPR menghimpun dana murah dari masyarakat masih terbatas yang mengakibatkan biaya dana BPR cukup tinggi.

Pada sektor pembiayaan mikro, masih terdapat beberapa persoalan seperti: (i) Belum ada dasar hukum yang mengatur keberadaan dan operasionalisasi LKM; (ii) Program-program kredit maupun inisiatif-inisiatif kebijakan sistem keuangan inklusif yang dilakukan berbagai Kementerian dan pemerintah daerah saling tumpang tindih dan kontradiktif; (iii) Belum ada sistem informasi debitur; (iv) Belum optimalnya diversifikasi skema pembiayaan; (v) Belum memadainya peran fasilitator UMKM.

Meskipun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun peran Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) masih sangat kecil dalam perekonomian, sehingga belum dapat secara optimal menjadi sumber pendanaan jangka panjang untuk menopang pembangunan nasional.

Dengan makin berkembangnya sektor keuangan baik perbankan, non bank dan keuangan mikro serta integrasi produk perbankan dan non perbankan, modus dan ancaman terjadinya tindak pidana pencucian uang juga terus meningkat. Hal tersebut bisa menjadi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan dan pengembangan sektor keuangan secara menyeluruh. Ini merupakan tantangan bagi Indonesia dalam rangka menciptakan sektor keuangan yang kredibel.

3.2.8 Industri

Pembangunan sektor industri dihadapkan pada permasalahan yang ada dalam sektor itu sendiri (masalah internal) dan permasalahan yang berada di luar sektor industri (masalah eksternal). Permasalahan umum internal industri yang harus segera diatasi adalah sebagai berikut: (i) keterkaitan antar

industri (buku-hilir, besar-menengah-kecil) rendah; (ii) industri dasar menjadi pemasok bahan baku dan bahan penolong industri masih terbatas, sehingga ketergantungan impor masih tetap tinggi; (iii) struktur ekspor semakin didominasi oleh bahan mentah; (iv) penggunaan kapasitas produksi belum optimal; (v) inovasi produk dan proses produksi masih rendah; serta (vi) penerapan standar produk masih terbatas, sehingga menjadi kendala pemasaran produk domestik di pasar ekspor dan memudahkan penetrasi produk impor ke pasar domestik.

Sementara itu, permasalahan eksternal industri secara umum meliputi: (i) ketersediaan (kualitas dan kuantitas) infrastruktur transportasi dan pembangkit energi belum memadai; (ii) lingkungan pasar global yang dinamis memunculkan risiko pengembangan pasar ekspor; (iii) birokrasi yang pro-bisnis belum optimal; (iv) aturan ketenagakerjaan (pemberian pesangon, pembayaran premi Jamsostek, penetapan UMR) tidak mendukung pertumbuhan industri; (v) ketidakpastian hukum; (vi) insentif fiskal belum bersaing dengan yang ditawarkan oleh negara tetangga; (vii) suku bunga perbankan mahal; (viii) ketentuan limbah B3 (limbah batu bara, baja, dan lain-lain) seringkali menyulitkan dunia usaha; serta (ix) kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri masih rendah.

Dengan mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta kesempatan yang ada, maka sasaran pertumbuhan industri pengolahan non migas tahun 2013 adalah 7,2 persen.

3.2.9 Ketenagakerjaan

Dari pencapaian kinerja pembangunan dan pencapaian tahun 2012, beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian di tahun 2013 adalah: (i) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka kaum muda dan masih rendahnya tingkat pendidikan; (ii) Masih terbatasnya program-program pemerintah yang ditargetkan kepada kaum muda; (iii) Masih rendahnya keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; (iv) Masih maraknya konflik hubungan industrial antara serikat pekerja dan pengusaha; dan (v) Masih tingginya jumlah TKI yang menghadapi masalah saat bekerja di luar negeri sebagai akibat dari berbagai permasalahan di dalam negeri yang antara lain berupa praktek percaloan, pemalsuan dokumen, dan penempatan ilegal di luar negeri, serta masih rendahnya pengetahuan dan kompetensi calon TKI.

Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2013 adalah: (i) Meningkatnya akses kaum muda kepada pelatihan dan pemagangan; (ii) Lebih kondusifnya iklim ketenagakerjaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik hubungan industrial antara serikat pekerja dengan pengusaha; dan (iii) Meningkatnya pelayanan dan perlindungan kepada TKI yang antara lain ditunjukkan dengan: (i) Meningkatnya peran pemerintah daerah dalam penyiapan keberangkatan calon TKI; (ii) Terwujudnya pelayanan TKI di kecamatan di 123 kabupaten/kota daerah kantong TKI; (iii) terselesaikannya seluruh masalah pengaduan yang diterima oleh *hotline service*; dan (iv) Terdaftarinya seluruh TKI yang bekerja di luar negeri sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK).

3.2.10 Koperasi dan UMKM

Permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM yaitu pertama, iklim usaha yang kurang kondusif. Masalah ini ditunjukkan oleh tingginya biaya transaksi yang disebabkan oleh ketidakjelasan perijinan, adanya pungutan tidak resmi, dan belum efektifnya pengawasan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. Kondisi ini menyebabkan koperasi dan UMKM belum mampu untuk memanfaatkan peluang usaha secara maksimal, serta mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Masalah yang kedua terkait dengan keterbatasan akses kepada sumber daya produktif seperti permodalan, bahan baku, teknologi, pasar dan informasi. Akses koperasi dan UMKM kepermodalan sudah diupayakan untuk ditingkatkan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana bergulir, dan skema pembiayaan lainnya. Namun penyediaan dukungan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM masih banyak menghadapi kendala dalam hal keterjangkauan dan jenis pembiayaan. KUR, misalnya, masih menghadapi kendala keterbatasan jangkauan, terutama kepada koperasi dan UMKM di sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan dan industri pengolahan. Skema pembiayaan lainnya juga belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan koperasi dan UMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha dan lokasi. Kondisi ini membutuhkan penguatan berbagai skema pembiayaan, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan koperasi dan UMKM sesuai dengan tingkat perkembangan usahanya. Sementara itu rendahnya akses koperasi dan UMKM pada bahan baku dan teknologi menyebabkan sistem produksi yang dijalankan belum efisien dan belum dapat menghasilkan produk dengan kuantitas

dan kualitas yang memadai. Keterbatasan infrastruktur penunjang, seperti pasar tradisional, juga menjadi kendala bagi koperasi dan UMKM untuk memasarkan produk-produknya.

Koperasi dan UMKM juga menghadapi masalah rendahnya kapasitas SDM, yang ditunjukkan oleh rendahnya kewirausahaan, keterampilan teknis dan manajerial, serta rendahnya kapasitas pemasaran. Kondisi ini menyebabkan kelayakan usaha dan produktivitas koperasi dan UMKM pada umumnya rendah. Data-rata produktivitas UMKM pada tahun 2010 menunjukkan bahwa produktivitas per unit UMKM adalah sebesar Rp 23,8 juta, sedangkan produktivitas per tenaga kerjanya adalah sebesar Rp 12,9 juta. Tingkat produktivitas UMKM tersebut masih jauh di bawah produktivitas per unit dan per tenaga kerja usaha besar yang masing-masing adalah sebesar Rp 193,3 miliar dan Rp 329,4 juta. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk peningkatan kapasitas yang telah disediakan bagi UMKM saat ini masih belum efektif untuk mendorong perkembangan kapasitas, produktivitas dan daya saing UMKM.

Selain masalah-masalah tersebut di atas, koperasi saat ini juga menghadapi tantangan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip dan praktik berkoperasi. Hal ini ditunjukkan oleh kurangnya minat masyarakat untuk memilih koperasi sebagai bentuk lembaga ekonomi lokal untuk mewujudkan dan memfasilitasi usaha ekonomi produktif. Salah satu penyebabnya yaitu bahwa informasi mengenai praktek-praktek berkoperasi yang benar masih terbatas. Sementara itu perkembangan koperasi juga masih diwarnai dengan besarnya persentase koperasi tidak aktif yaitu 29,61 persen, dan masih rendahnya persentase koperasi aktif yang menjalankan RAT yaitu 43,4 persen. Jumlah koperasi yang sudah menerapkan sistem pelaporan keuangan yang terstandarisasi juga masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan tantangan yang dihadapi koperasi untuk mencapai kemandirian dalam pengembangan usaha dan dalam merespon perubahan pasar yang dinamis masih sangat besar.

Upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi koperasi dan UMKM telah dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. Namun upaya tersebut masih belum optimal, sehingga membutuhkan akselerasi kegiatan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi. Berbagai upaya yang akan

dilaksanakan pada tahun 2013 dalam rangka menangani permasalahan dan tantangan tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran: (i) peningkatan produktivitas UMKM sebesar 5,0 persen; (ii) peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 2,0 persen; (iii) peningkatan sumbangan UMKM pada pembentukan PDB sebesar 6,0 persen; (iv) peningkatan nilai ekspor produk UMKM sebesar 15,0 persen; (v) peningkatan nilai investasi UMKM sebesar 25,0 persen; (vi) peningkatan proporsi jumlah koperasi aktif menjadi 77,0 persen dari total koperasi; (vii) peningkatan proporsi jumlah koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan menjadi 53,0 persen dari koperasi aktif; dan (viii) peningkatan volume usaha koperasi sebesar 20,0 persen.

3.2.11 Jaminan Sosial

Dalam pelaksanaan pembangunan jaminan sosial, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain adalah terkait kewajiban pemerintah untuk menyiapkan perangkat peraturan pelaksanaan BPJS ke dalam 8 PP, 7 Perpres dan 1 Keppres. Terkait dengan penyiapan operasionalisasi BPJS Kesehatan misalnya, terdapat beberapa tantangan sebagai berikut:

1. Transisi pelaksanaan program Jamkesmas, Jamkesda, dan jaminan kesehatan lainnya yang saat ini dikelola oleh PT Askes ke dalam satu pengelolaan;
2. Penyiapan pengembangan fasilitas kesehatan dan tenaga medis sejalan dengan meningkatnya jumlah peserta jaminan sosial; dan
3. Penyiapan rancangan peraturan tentang pelayanan kesehatan tertentu bagi anggota TNI/Polri karena masih cukup besarnya perbedaan paket manfaat yang diterima saat ini.

Selain tantangan diatas, usaha memperluas keanggotaan asuransi sosial juga masih terhambat oleh proporsi pekerja sektor informal yang saat ini mencapai 70 persen dari angkatan kerja dan karakteristiknya yang sangat beragam sehingga menyulitkan skema perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial.

Hal penting lainnya yang perlu dilakukan adalah perbaikan manajemen pelayanan jaminan sosial dan pengenalan asuransi kesehatan yang terintegrasi dan dikelola secara luas melalui strategi pemasaran sosial dan pendidikan masyarakat yang efektif dalam memperkenalkan konsep asuransi agar

kepercayaan masyarakat terhadap BPJS meningkat.

Merujuk pada dokumen RPJMN 2010-2014 dan menyesuaikan dengan perkembangan terakhir, maka sasaran prioritas jaminan sosial pada tahun 2013 adalah:

1. Tersusunnya berbagai perangkat hukum yang mendukung pembentukan BPJS Kesehatan mulai tahun 2014 dan pembentukan BPJS Ketenagakerjaan paling lambat Juli tahun 2015;
2. Transformasi berbagai program jaminan kesehatan ke dalam satu alat pengelolaan BPJS Kesehatan;
3. Tersedianya strategi dalam pengembangan kepesertaan jaminan kesehatan untuk pekerja sektor informal;
4. Penyelesaian pendataan sekaligus penyiapan Komor Induk Kependudukan (NIK) untuk mempermudah pencapaian cakupan semesta;
5. Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Pengelolaan dan Pengembangan Dana Jaminan Sosial, baik untuk BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan;
6. Meningkatkan pemahaman masyarakat luas tentang SJSN.

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2013

3.3.1 Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah elemen yang tidak bisa ditinggalkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi menggambarkan terjadinya peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi suatu negara. Peningkatan tersebut akan memperluas terbukanya kesempatan kerja baru bagi rakyat. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi yang positif memungkinkan suatu negara untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan akumulasi modal (baik fisik maupun modal sumber daya manusia) dan memacu inovasi teknologi yang kemudian akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Terbukanya lapangan pekerjaan baru dan peningkatan produktivitas pada akhirnya berimplikasi positif pada penghasilan yang diterima rakyat. Apabila hal ini berkelanjutan, tingkat kesejahteraan rakyat akan meningkat.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui dua sisi, yakni sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan terdapat empat komponen utama yang perlu mendapatkan perhatian. *Pertama* adalah investasi yang memegang peran penting bagi pertumbuhan ekonomi karena akan menciptakan akumulasi modal yang dapat mendorong peningkatan produktivitas. Keputusan investasi masih belum mampu dibiayai sepenuhnya oleh penanaman modal dalam negeri sehingga usaha untuk menarik investasi asing agar masuk ke Indonesia masih harus terus dilakukan, terutama melalui upaya perbaikan iklim investasi yang terus-menerus. Selain itu, investasi masih terpusat pada daerah dan industri tertentu. Dengan demikian, langkah kebijakan diversifikasi dan penyebaran investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan karakter/sifat industri dan potensi atau sumber daya spesifik yang dimiliki daerah.

Kedua adalah ekspor yang juga merupakan sumber bagi pertumbuhan ekonomi. Dari waktu ke waktu kinerja ekspor Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Namun, peningkatan kinerja ekspor pertanian dan pertambangan masih sangat dipengaruhi oleh peningkatan harga di pasar internasional. Seiring dengan peningkatan persaingan di pasar global, peningkatan ekspor akan lebih diutamakan pada produk-produk yang mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar, peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor, dan peningkatan daya saing produk ekspor. Peningkatan daya saing produk ekspor dilakukan dengan menurunkan biaya logistik, meningkatkan ketersediaan infrastruktur, mengurangi pungutan liar, dan menyederhanakan peraturan dan prosedur perizinan, sehingga biaya ekonomi dapat ditekan.

Ketiga, kebijakan menjaga daya beli. Daya beli rakyat akan dapat ditingkatkan apabila pendapatan masyarakat mengalami peningkatan. Selain itu, masyarakat akan merasa sejahtera ketika dapat membeli kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Hal ini tidak dapat terjadi apabila harga meningkat tiba-tiba, sementara penghasilannya tetap (daya beli rakyat turun). Oleh karena itu, dalam menjaga daya beli rakyat, salah satu langkah kebijakan yang perlu dilakukan adalah menjaga tingkat inflasi. Untuk itu harus diantisipasi faktor-faktor yang menimbulkan gejala inflasi, terutama yang terkait dengan proses distribusi dan pergerakan harga di pasar internasional. Apabila daya beli terjaga, tingkat

konsumsi rakyat juga akan terjaga, yang kemudian akan mendukung pula terciptanya pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi penting, terutama apabila mengingat masih tingginya kontribusi konsumsi rumah tangga bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Keempat, optimalisasi pengeluaran pemerintah dan pengelolaan kekayaan negara. Pengeluaran pemerintah memiliki peran yang tidak kalah penting apabila dibandingkan dengan komponen pertumbuhan ekonomi lainnya, terutama di saat terjadi ancaman krisis ekonomi. Pemberian stimulus fiskal diharapkan mampu mendorong peningkatan permintaan, serta menutupi penurunan permintaan akibat turunnya investasi dan ekspor. Namun, pengeluaran pemerintah juga dibatasi oleh ketersediaan anggaran (*resource envelope*) yang dimiliki. Apabila pengeluaran terlalu besar, defisit anggaran akan membesar, dan dapat mengancam keberlangsungan kebijakan fiskal ke depan. Di sisi lain, pengeluaran yang terlalu besar juga dapat mengurangi porsi konsumsi dan investasi swasta dalam perekonomian (*crowding out effect*). Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan optimalisasi pengeluarannya secara efektif dan efisien, yang didukung dengan pengelolaan aset secara akuntabel dan bertanggung jawab melalui pengelolaan kekayaan negara yang andal dan kredibel.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi akan diperoleh melalui peningkatan produksi. Sektor yang diharapkan menjadi pendorong utama peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi adalah sektor industri manufaktur. Hal ini terjadi karena sektor industri manufaktur dapat memberikan nilai tambah yang besar. Di luar sektor industri manufaktur, masih diandalkan pula sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sektor-sektor lain juga diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka terwujudnya pertumbuhan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2013 diharapkan meningkat sekitar 7,0 persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh pertumbuhan investasi sekitar 12,1 persen, pertumbuhan ekspor sekitar 11,9 persen, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sekitar 5,0 persen, dan pertumbuhan konsumsi

pemerintah sekitar 6,9 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh pertumbuhan sektor pertanian sekitar 3,9 persen dan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang tumbuh sekitar 6,7 persen.

3.3.1.1 Stabilitas Ekonomi yang Kokoh

Terciptanya stabilitas ekonomi makro merupakan kondisi yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Perekonomian nasional hanya dapat memberikan kinerja yang baik apabila didukung oleh kestabilan ekonomi yang kokoh. Ketidakstabilan pada harga barang, tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi, atau utang pemerintah dapat memberikan gangguan pada perekonomian, terutama sektor swasta, yang membutuhkan kepastian dalam menjalankan usahanya yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi yang kokoh, stabilitas harga dan stabilitas nilai tukar harus dapat dijaga. Gejolak harga yang tinggi selain mengurangi daya beli masyarakat juga akan menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha. Nilai tukar yang belfluktuasi juga akan menimbulkan ketidakpastian bagi kinerja sektor perdagangan karena ketika nilai tukar telah menguat daya saing ekspor akan menurun dan sebaliknya ketika nilai tukar melemah perekonomian akan terganggu oleh tingginya harga barang impor. Untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut langkah kebijakan moneter harus dipertajam.

Stabilitas ekonomi juga didukung oleh kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Tingkat defisit atau utang yang terlalu tinggi akan meningkatkan ketidakpercayaan swasta kepada pemerintah. Kebijakan anggaran defisit akan mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan, baik luar negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri maupun dari pinjaman dalam negeri dalam bentuk penerbitan surat berharga negara (SBN). Dengan kebijakan seperti ini, risiko memegang obligasi negara semakin meningkat yang pada gilirannya mendorong tingginya imbal hasil (*yield*) yang harus dibayar pemerintah. Bila itu terjadi, stabilitas makroekonomi dapat terganggu. Pengelolaan tingkat defisit anggaran dan utang yang baik melalui pengalihan hutang (*debt switch*) atau pembelian kembali (*buy back*) yang ada dalam kebijakan fiskal dan berkelanjutan menjadi penting dalam menyokong terciptanya stabilitas

makroekonomi.

Stabilitas ekonomi juga sangat bergantung pada sektor kebijakan sektor keuangan. Krisis ekonomi Indonesia tahun 1998 berawal dari krisis di sektor keuangan yang selanjutnya memberikan pengaruh buruk pada seluruh bidang pembangunan. Krisis ekonomi dunia yang sedang terjadi juga dipicu oleh krisis di sektor keuangan. Oleh karena itu, stabilitas sektor keuangan ini harus menjadi fokus utama dalam mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh.

Dalam rangka terciptanya stabilitas ekonomi yang kokoh, diupayakan tingkat inflasi dapat dijaga, stabilitas nilai tukar rupiah terjaga, defisit anggaran terjaga pada tingkat 1 persen dari PDB dan stok utang pemerintah terhadap PDB menurun menjadi 21 persen.

3.3.1.2 Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas ekonomi akan menjadi kurang berarti apabila hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil rakyat yang menikmati peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga tidak sesuai dengan tujuan pembangunan bidang ekonomi. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan merupakan elemen penting yang menjamin pengembangan ekonomi dapat dinikmati oleh semua rakyat secara adil.

Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang memberikan kesempatan pada seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan status yang setara, terlepas dari latar belakang mereka. Dengan demikian, pembangunan ekonomi inklusif menciptakan kesempatan bagi semua dan memastikan akses yang sama terhadap kesempatan tersebut.

Pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan didukung oleh kebijakan pada sektor tenaga kerja, kemiskinan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di sisi kebijakan tenaga kerja, kebijakan-kebijakan seperti pelatihan, pembekalan, pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat memberikan tambahan keahlian bagi tenaga kerja sehingga memudahkan untuk dapat mengisi lowongan kerja yang tersedia. Dengan begitu, semakin banyak orang terlibat dalam proses pembangunan.

Terkait dengan kebijakan pengurangan kemiskinan,

pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan memiliki kaitan yang sangat erat. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dapat memiliki dampak positif terhadap agenda pengurangan kemiskinan. Hal ini dapat ditempuh melalui pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat ketika kesenjangan berhasil diatasi. Selain itu, pembangunan ekonomi yang inklusif dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pengurangan kemiskinan dengan memfokuskan pada penciptaan dan pemberian akses yang sama pada kesempatan kerja. Dengan begitu, mereka yang selama ini miskin karena tidak pernah mendapat kesempatan kerja, dapat memanfaatkan kesempatan kerja yang ada untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kebijakan pengurangan kemiskinan melalui pemberian bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan) juga akan memberikan dukungan pada terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Di samping kebijakan di ketenagakerjaan dan kebijakan dalam pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan perlu didukung oleh kebijakan UKM. Dengan keterbatasan sektor formal untuk menampung tenaga kerja, kesempatan bagi mereka yang tidak tertampung untuk turut serta dalam proses pembangunan adalah melalui sektor-sektor informal. Oleh sebab itu, pengembangan UKM penting dilakukan, baik pengembangan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan keterbatasan dana dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam bentuk pemberian pelatihan yang memungkinkan UMKM dapat berkembang dengan kemampuannya sendiri.

3.3.1.3 Daya Tahan Perekonomian Nasional

Dalam kaitannya dengan Tema RKP 2013 yaitu memantapkan/memperkuat daya tahan ekonomi nasional (ekonomi domestik) untuk meningkatkan dan memperluas kesejahteraan rakyat, Tema tersebut mempunyai tiga titik berat, yaitu: (i) daya tahan ekonomi, (ii) daya saing, (iii) peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.

GAMBAR 3.9
DAYA TAHAN PEREKONOMIAN NASIONAL



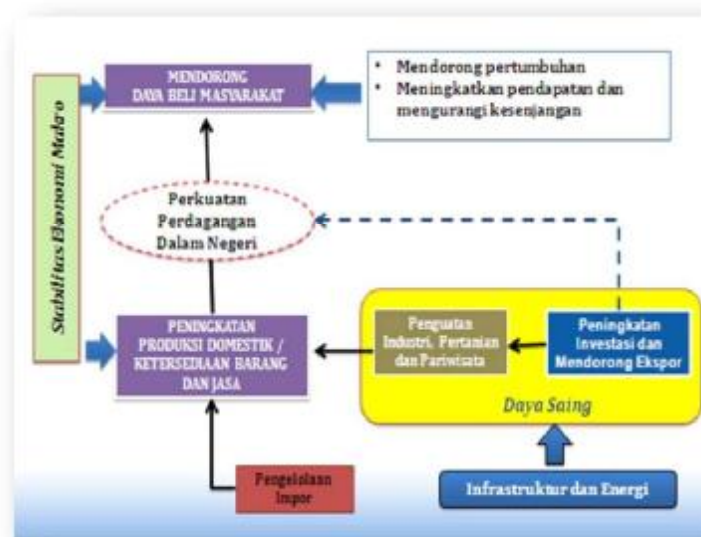
Daya tahan perekonomian nasional, paling tidak didukung oleh tiga faktor utama: a) Protokol Manajemen Krisis, yang merupakan konsep prosedur pelaksanaan yang standar dari langkah-langkah kebijakan apabila krisis keuangan terjadi dan mempengaruhi perekonomian nasional, b) Daya Tahan Makro, yang meliputi kebijakan neraca pembayaran, fiskal, moneter dan keuangan, dan c) Daya Tahan Mikro (sektor riil) meliputi daya tahan di sektor industri, pertanian, pariwisata, perdagangan, investasi, infrastruktur dan energi.

Di bidang fiskal, kebijakan-kebijakan turunannya meliputi kebijakan pengendalian defisit fiskal/APBN, pengendalian subsidi baik subsidi BBM dan non BBM, serta kebijakan pengendalian rasio hutang Pemerintah terhadap PDB yang terus menurun. Kebijakan di bidang moneter meliputi kebijakan bauran, baik pengendalian nilai tukar dan inflasi, agar berjalan dengan optimal. Kebijakan sektor keuangan meliputi kebijakan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan serta mitigasi resiko sistemik di sektor

kenangan, khususnya di sub sektor perikanan. Kebijakan neraca pembayaran meliputi kebijakan untuk menjaga surplus transaksi berjalan, menjaga kecukupan cadangan devisa dan mengelola arus modal asing yang sehat dan terkendali.

Sedangkan pola pikir Daya Tahan Sektor Riil (Mikro) terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya, dapat digambarkan pada gambar/bagan di bawah ini.

GAMBAR 3.10
DAYA TAHAN MIKRO (SEKTOR RIIL)



Peningkatan daya saing yang tercermin dari peningkatan investasi dan ekspor, serta penguatan sektor industri, pertanian dan pariwisata didukung oleh tersedianya infrastruktur dan energi. Peningkatan daya saing dan pengelolaan impor yang sehat/kondusif akan meningkatkan produksi/ketersediaan barang dan jasa di dalam negeri, di dukung oleh stabilitas ekonomi makro yang stabil. Peningkatan produksi ini akan memperkuat perdagangan dalam negeri, yang didukung pula oleh peningkatan daya saing. Pada gilirannya, perkuatan perdagangan dalam negeri dalam kondisi stabilitas ekonomi

makro yang baik/terkendali akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat ditentukan juga oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat serta penurunan kesenjangan pendapatan masyarakat.

Secara lebih rinci, kebijakan-kebijakan perekonomian, seperti investasi dan ekspor, serta indikator lainnya diuraikan sebagai berikut.

3.3.2 Peningkatan Investasi

Strategi untuk mencapai sasaran tahun 2013 antara lain adalah sebagai berikut: (i) penyederhanaan prosedur investasi melalui perangkat daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang dilakukan secara bertahap di kabupaten/kota, (ii) mendorong pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), (iii) meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengembangan KPS terutama dalam investasi penyediaan infrastruktur dan energi, dan (iv) meningkatkan efektivitas strategi promosi investasi melalui peningkatan investasi unggulan daerah dan pengembangan sektor unggulan seperti infrastruktur, energi dan pangan; dan (v) meningkatkan upaya penyebaran investasi dan alih teknologi melalui akselerasi pemanfaatan berbagai kebijakan fiskal dan non fiskal terkait peningkatan daya tarik investasi yang telah ada serta meningkatkan penggunaan komponen lokal.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan di atas, fokus prioritas Peningkatan Investasi pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Fokus Prioritas 1: Fokus Prioritas Peningkatan Harmonisasi Kebijakan dan Penyederhanaan Perijinan Investasi

Fokus Prioritas 2: Fokus Prioritas Peningkatan Fasilitasi Investasi

3.3.3 Peningkatan Ekspor

Peran ekspor, terutama ekspor nonmigas, dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih akan mendapat perhatian untuk terus ditingkatkan. Untuk mendorong upaya tersebut, kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan pada kebijakan peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas melalui diversifikasi pasar serta peningkatan kualitas dan keberagaman produk, yang didukung penguatan dan pengamanan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga, kelancaran arus barang, penciptaan iklim usaha yang sehat, dan perlindungan

konsumen.

Strategi yang akan dijalankan untuk mencapai arah kebijakan tersebut diatas adalah sebagai berikut: *Pertama*, mendorong upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor untuk mengurangi tingkat ketergantungan kepada pasar ekspor tertentu dan meningkatkan upaya untuk melakukan penetrasi di pasar negara-negara Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah dan Eropa Timur. *Kedua*, meningkatkan kualitas dan keberagaman produk ekspor terutama untuk produk-produk manufaktur yang bernilai tambah lebih besar, berbasis pada sumber daya alam, dan permintaan pasarnya besar; *Ketiga*, meningkatkan upaya ekspor produk hilir mineral dan pertambangan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. *Keempat*, meningkatkan pengurangan akses pasar, promosi, dan fasilitasi ekspor terutama nonnigas di berbagai tujuan pasar ekspor, terutama melalui optimalisasi skema kerjasama perdagangan baik bilateral, regional maupun multilateral; *Kelima*, meningkatkan pengawasan dan pengelolaan impor bagi produk-produk yang berpotensi menurunkan daya saing produk domestik di pasar dalam negeri dan membahayakan konsumen.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan di atas, fokus prioritas Peningkatan Ekspor pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Fokus Prioritas 1: Fokus Prioritas Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor

Fokus Prioritas 2: Fokus Prioritas Peningkatan Kualitas dan Keberagaman Produk Ekspor

Fokus Prioritas 3: Fokus Prioritas Peningkatan Fasilitasi Ekspor

3.3.4 Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pembangunan kepariwisataan dan pembangunan ekonomi kreatif pada tahun 2013 diarahkan untuk mendorong peningkatan penerimaan devisa dan peningkatan nilai tambah produk-produk ekonomi kreatif melalui penguatan pariwisata berbasis masyarakat dan peningkatan kualitas produk-produk kreatif, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun strategi untuk mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata nasional melalui penataan dan penguatan manajemen dan tata kelola

destinasi pariwisata, peningkatan daya tarik wisata alam, bahari dan budaya termasuk daya tarik pariwisata di pulau-pulau terdepan dan wilayah perbatasan yang mempunyai potensi pariwisata; mendorong dan memfasilitasi perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; melakukan konsolidasi akses transportasi dalam dan luar negeri; dan mengembangkan desa wisata melalui PNPB Mandiri;

2. Mengembangkan usaha, industri dan investasi pariwisata, terutama yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja antara lain melalui penciptaan iklim investasi pariwisata yang kondusif dengan penataan kebijakan usaha pariwisata, penyusunan dan penerapan pedoman sertifikasi usaha, dan pengaturan usaha;
3. Mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 (dua puluh) persen secara bertahap dalam 5 (lima) tahun terutama dengan mempromosikan ke 10 (sepuluh) destinasi pariwisata Indonesia di dalam dan di luar negeri melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif, serta menguatkan strategi pemasaran dan promosi pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan responsif terhadap pasar;
4. Mengembangkan sumber daya pariwisata dengan mendorong peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan *hospitality management* yang kompetitif di kawasan Asia; pengembangan dan penguatan kelembagaan kepariwisataan, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan kepariwisataan;
5. Meningkatkan industri berbasis kreativitas yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar dalam dan luar negeri melalui peningkatan daya tarik dan kualitas produk dan peningkatan efisiensi dan produktivitas industri, peningkatan inovasi bermuatan lokal; mendorong dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
6. Meningkatkan usaha-usaha berbasis kreativitas terutama yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan melalui penciptaan iklim yang

konvensi bagi investasi ekonomi kreatif termasuk penegakan terhadap hak kekayaan intelektual;

7. Mengembangkan pemasaran produk dan jasa kreatif unggulan melalui saluran promosi terpadu dan berkesinambungan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta responsif terhadap pasar;
8. Mengembangkan sumber daya kreatif melalui upaya mendorong peningkatan profesionalisme pelaku sektor ekonomi kreatif dan mendorong peningkatan daya cipta dan daya inovasi baru dengan memperkuat lembaga penelitian dan pengembangan ekonomi kreatif; dan
9. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk dan karya kreatif melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi kreatif dan peningkatan konsumsi produk dan jasa lokal berbasis kreatifitas.

Kebijakan dan strategi tersebut di atas didukung oleh peningkatan koordinasi lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan, terutama di bidang (i) pelayanan kepabeanan keimigrasian, dan karantina; (ii) keamanan dan ketertiban; (iii) prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; (iv) transportasi darat, laut, dan udara; dan (v) bidang promosi dan kerjasama luar negeri; (vi) koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat; dan (vii) penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif tahun 2013, fokus prioritas Peningkatan Daya Saing Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut:

Fokus Prioritas 1 : Fokus Prioritas Pengembangan Pariwisata

Fokus Prioritas 2 : Fokus Prioritas Pengembangan Ekonomi Kreatif

Fokus Prioritas 3 : Fokus Prioritas Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.3.5 Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Upaya meningkatkan daya beli masyarakat ditujukan untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat, yang ditempuh melalui beberapa kebijakan: (i) menjaga stabilitas harga barang domestik, terutama bahan kebutuhan pokok; (ii) melakukan

upaya pemberdayaan pedagang kecil dan menengah; (iii) meningkatkan kelancaran arus barang dan penataan sistem distribusinya untuk menjamin ketersediaan pasokan barang, terutama bahan pokok; dan (iv) meningkatkan iklim usaha dan perdagangan dalam negeri untuk memperluas kesempatan berusaha serta melindungi konsumen nasional. Penjelasan secara terperinci mengenai upaya menjaga stabilitas harga dapat dilihat pada prioritas bidang stabilitas moneter (harga), sedangkan program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial dapat dilihat secara lebih terperinci pada Bab I mengenai Pengarusutamaan dan Isu Lintas Bidang.

Adapun strategi yang akan dilakukan pada perdagangan dalam negeri untuk tahun 2012 adalah: (i) melanjutkan upaya mendorong integrasi perdagangan antar dan intra wilayah, melalui pengembangan jaringan informasi dan sarana distribusi perdagangan sehingga stabilitas harga dan ketersediaan barang, terutama bahan pokok dapat terjaga; (ii) melanjutkan upaya meningkatkan iklim usaha perdagangan melalui penerapan kebijakan persaingan usaha yang sehat, pengembangan usaha kecil menengah, peningkatan dan pembinaan usaha ritel tradisional, penataan usaha ritel modern, bisnis waralaba, termasuk pengembangan pola kerja sama yang saling menguntungkan antarpelaku usaha, serta peningkatan perlindungan konsumen; (iii) meningkatkan pemanfaatan perdagangan berjangka dan pengelolaan sistem informasi harga; serta (iv) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan memaksimalkan potensi pasar domestik.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan di atas, fokus prioritas Peningkatan Daya Beli Masyarakat pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Fokus Prioritas 1: Fokus Prioritas Peningkatan Jaringan Distribusi Untuk Menunjang Pengembangan Logistik Nasional.
- Fokus Prioritas 2: Fokus Prioritas Penguatan Pasar Domestik dan Efisiensi Pasar Komoditi.
- Fokus Prioritas 3: Fokus Prioritas Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Iklim Usaha Perdagangan.

3.3.6 Keuangan Negara

Berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014, kebijakan fiskal tahun 2013 akan diarahkan untuk mencapai anggaran berimbang (zero deficit) pada tahun 2014 dengan tetap memberikan dorongan terhadap

perekonomian melalui langkah-langkah konsolidasi fiskal guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, adil dan merata, serta bersifat inklusif. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan fiskal dapat mengoptimalkan kontribusinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu: penguatan daya tahan ekonomi, peningkatan daya saing, serta peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan keberlanjutan ketahanan fiskal diantaranya melalui penurunan stok utang pemerintah baik secara nominal ataupun rasionya terhadap PDB, yang diupayakan dengan cara meningkatkan penerimaan negara, terutama, penerimaan yang berasal dari perpajakan, serta peningkatan kualitas, efektivitas, dan efisiensi belanja negara melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Adapun arah kebijakan Keuangan Negara pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pertama, menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran yang difokuskan kepada peningkatan belanja modal untuk infrastruktur dengan sisi penerimaan, dalam rangka menjaga stabilitas serta memantapkan kesinambungan fiskal, melalui: (i) peningkatan penerimaan negara; (ii) peningkatan efisiensi belanja negara dan transfer ke daerah; serta (iii) merumuskan pembiayaan defisit anggaran sehingga tidak menyebabkan berkurangnya pembiayaan sektor swasta (*crowding out effect*).

Kedua, peningkatan penerimaan negara terutama ditempuh melalui: (i) intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan; (ii) reformasi kebijakan, administrasi, dan pengawasan perpajakan dan kepabeanan; serta (iii) optimalisasi PNRP, baik dari jenisnya maupun perbaikan administrasinya.

Ketiga, peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja negara terutama diarahkan untuk: (i) penajaman alokasi anggaran antara lain dengan realokasi belanja negara agar lebih terarah dan tepat sasaran sesuai dengan instruksi Presiden untuk meningkatkan efisiensi belanja barang dan belanja pegawai termasuk perjalanan dinas dan konsinyering; (ii) perbaikan sistem administrasi perbendaharaan negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; (iii) penyempurnaan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah; serta (iv) penajaman alokasi belanja negara terhadap kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), serta program perlindungan sosial.

Keempat, peningkatan pengelolaan pinjaman pemerintah

diarahkan untuk menurunkan stok pinjaman luar negeri, tidak saja relatif terhadap PDB, tetapi juga secara nominal. Sumber pembiayaan melalui pinjaman dalam negeri diarahkan untuk menjadi prioritas utama dalam memenuhi pembiayaan mengingat sumber utang dalam negeri memiliki keunggulan, antara lain; (i) biaya dan risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan sumber lainnya dan (ii) multiplier effect yang positif pada perekonomian nasional.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan di atas maka fokus prioritas optimalisasi pengeluaran pemerintah adalah:

Fokus Prioritas 1: Fokus Prioritas Optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Fokus Prioritas 2: Fokus Prioritas Pengelolaan Perimbangan Keuangan

Fokus Prioritas 3: Fokus Prioritas Pengelolaan Perbendaharaan Negara

Fokus Prioritas 4: Fokus Prioritas Pengelolaan Kekayaan Negara

Sementara itu Fokus prioritas pengelolaan APBN yang berkelanjutan adalah:

Fokus Prioritas 1: Fokus Prioritas Perumusan Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Pembiayaan Anggaran dan Pengendalian Resiko

Fokus Prioritas 2: Fokus Prioritas Peningkatan dan Optimalisasi Penerimaan Negara

Fokus Prioritas 3: Fokus Prioritas Pengelolaan dan Pembinaan BUMN

3.3.7 Stabilitas Harga

Kebijakan stabilitas harga dan nilai tukar rupiah termasuk pengamanan pasokan bahan pokok, diarahkan pada peningkatan dan pemantapan koordinasi otoritas fiskal, moneter dan keuangan serta sektor riil (produksi, perdagangan dalam negeri dan ekspor-impor). Hal tersebut disertai dengan peningkatan koordinasi kebijakan kerjasama luar negeri dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan/pertanian, energi dan infrastruktur transportasi, serta meningkatkan kapasitas dan peran aktif para pemangku kepentingan daerah dalam pengendalian stabilitas ekonomi di tingkat lokal (Propinsi dan Kabupaten /Kota). Melalui kebijakan tersebut diharapkan laju inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah dapat terjaga. Selain itu, upaya tersebut didukung pula oleh upaya pembangunan dan pengembangan sarana

distribusi dan pergudangan, pengentabangan pasar lelang daerah serta peningkatan perlindungan konsumen.

Adapun strategi secara rinci akan ditempuh sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter serta kebijakan terkait lainnya dalam rangka pengendalian inflasi sesuai dengan sasaran yang ditentukan;
2. Menjaga stabilitas harga khususnya harga makanan pokok yang mudah bergejolak antara lain melalui percepatan pelaksanaan Sistem Logistik Nasional, yang memperlancar distribusi barang dan jasa melalui pengembangan infrastruktur dan sarana perhubungan darat, laut dan udara, pergudangan, sistem informasi dan komunikasi, serta harmonisasi peraturan yang terkait dengan distribusi tersebut;
3. Meminorng keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat (Kementerian/Lembaga terkait serta asosiasi produsen/pedagang dan asosiasi konsumen) maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perkembangan harga bahan pokok secara intensif. Untuk itu akan diformong perluasan pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terkait;
4. Mengentabangkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi untuk mengatasi masalah struktural, seperti percepatan pembangunan infrastruktur serta reformasi regulasi/kebijakan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, baik di pusat (Kementerian/Lembaga) maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota);
5. Meningkatkan kualitas kelembagaan termasuk pola pikir dunia usaha dan masyarakat bahwa kenaikan harga yang rendah dan wajar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan;
6. Melakukan kajian-kajian di bidang ketahanan pangan/pertanian dan ketahanan energi dalam rangka optimalisasi subsidi pertanian dan energi, agar dapat dihasilkan kebijakan harga barang/jasa yang diatur pemerintah yang tepat waktu maupun opsi-opsi kebijakan lainnya.
7. Mendorong pengembangan bauran kebijakan moneter serta kebijakan makroprudensial terutama untuk pengelolaan akses likuiditas dan arus modal asing untuk mengurangi dampak negatif dari aliran masuk modal asing dan ketidakstabilan perekonomian global terhadap

3.3.8 Stabilitas Sektor Keuangan

perencanaan domestik dan sistem keuangan nasional.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan di atas, maka untuk Stabilitas Harga adalah diarahkan pada: Fokus Prioritas Peningkatan Stabilitas Harga dan Nilai Tukar Rupiah.

Arah kebijakan yang terkait dengan stabilitas sektor keuangan pada Tahun 2013 adalah perkuatan daya tahan, mitigasi resiko sistemik dan peningkatan daya saing sektor keuangan. Perkuatan ketahanan sektor keuangan dan mitigasi resiko sistemik ditempuh melalui:

1. Pemantapan koordinasi antara pemerintah (pemangku kebijakan fiskal), lembaga pengawas keuangan (OJK), otoritas moneter dan lembaga penjamin simpanan dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan;
2. Perkuatan pencegahan dan penanganan krisis terkait protokol dan payung hukumnya;
3. Selain koordinasi di dalam negeri, kerjasama eksternal dengan lembaga dan otoritas jasa keuangan di negara lain juga tetap ditingkatkan;
4. Perkuatan kelembagaan OJK melalui proses transisi yang berkualitas baik dari segi SDM maupun infrastrukturnya;
5. Pemantapan koordinasi penegakan hukum di sektor keuangan serta perlindungan bagi konsumen dan investor di sektor keuangan.

Arah kebijakan peningkatan daya saing sektor keuangan ditujukan untuk meningkatkan fungsi intermediasi, pembiayaan sektor riil dan perluasan akses keuangan kepada seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan layanan keuangan yang inklusif. Hal tersebut ditempuh melalui:

1. Perkuatan kualitas manajemen dan operasional lembaga jasa keuangan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kemudahan bertransaksi serta pelaporan di bidang pasar modal/lembaga jasa keuangan;
2. Pengembangan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pembiayaan pembangunan termasuk pengembangan sistem keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro (LKM);
3. Perkuatan koordinasi dan kerjasama dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait lembaga keuangan mikro dalam rangka memperluas cakupan pelayanan lembaga jasa keuangan terutama untuk sektor UMKM dan masyarakat miskin;

3.3.9 Revitalisasi Industri

4. Pengembangan aspek legal dan infrastruktur I.KM.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan di atas maka untuk Stabilitas Sektor Keuangan diutamakan; Fokus Prioritas Kesinambungan Ketahanan Sektor Keuangan, Mitigasi Resiko Sistemik dan Peningkatan Daya Saing Sektor Keuangan.

Keseimbangan antara peran pemerintah dan kekuatan industri nasional menjadi pengungkit akselerasi pertumbuhan industri nasional dalam kerangka penguatan daya saing di pasar global maupun domestik. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor industri, seperti MasterPlan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Kebijakan Industri Nasional, memainkan peran penting dalam menentukan perkembangan sektor industri di masa depan.

Untuk tahun 2013, pertumbuhan sektor industri akan dipercepat agar kinerja ekonomi tetap terjaga dalam menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu perlu adanya fokus pengembangan subsektor industri sehingga kebijakan dapat berdampak optimal pada pencapaian pembangunan industri. Arah kebijakan pembangunan sektor industri dan fokus pengembangannya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan industri pengolah sumber daya alam dan penyedia utama lapangan kerja, dengan Fokus Prioritas pengembangan industri berupa pertumbuhan industri dibawah ini:
 - a. *Tumbuhnya industri berbasis hasil tambang.*
 - i. industri aluminium di Kuala Tanjung – Sumut dan industri alumina di Kalbar;
 - ii. industri besi baja di Kulonprogo - DIY dan Batulicin - Kalsel;
 - iii. industri berbasis nilai, terabaga, batubara, petrokimia, dan migas
 - b. *Tumbuhnya industri pengolah hasil pertanian :*
 - i. industri minyak sawit di KEK Sei Mangke - Sumut, Maloy – Kaltim, dan Dumai – Riau;
 - ii. industri pengolah karet, cokelat, bubur kayu dan kertas;
 - iii. industri gula berbasis tebu, serta industri minyak dan lemak nabati.
 - c. *Tumbuhnya industri berbasis SDM dan untuk pemenuhan*

kebutuhan pasar domestik:

- i. tekstil, pakaian jadi, alas kaki;
 - ii. komponen elektronika;
 - iii. komponen dan aksesoris kendaraan bermotor, dan galangan kapal;
 - iv. alat rumah tangga, furnitur dan rotan;
 - v. industri obat dan alat kesehatan.
2. Pembangunan industri kecil dan menengah (IKM) yang kuat, sehat, dan mandiri dengan Fokus Prioritas pengembangan industri berupa:
- a. Tumbuhnya Industri Kecil dan Menengah:
 - I. meningkatnya populasi IKM;
 - II. berkembangnya inovasi pada IKM;
 - III. tumbuhnya industri kreatif;
 - IV. berkembangnya IKM sebagai pemasok bagi industri besar.

Selanjutnya kondisi yang memungkinkan perlu diciptakan agar mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan investasi untuk memperluas kapasitas produksi dan peningkatan produktivitas industri. Untuk itu harus didukung strategi sebagai berikut:

1. Dukungan infrastruktur produksi dan distribusi yang lebih memadai, seperti: (i) peningkatan kualitas jalan dan rel KA dari sentra produksi ke pabrik pengolahan; (ii) perluasan kapasitas pelabuhan laut (Relawan, Makasar, dan Bitung); (iii) peningkatan kapasitas pembangkit dan jaringan listrik; dan (iv) pengurangan 50 persen PPh selama 5 tahun dan pembebasan PPh atas pembebasan lahan untuk kawasan industri bagi perusahaan yang membangun infrastruktur (kawasan industri).
2. Kepastian regulasi dan efektivitas layanan birokrasi, seperti: (i) penghapusan Perda yang menghambat; (ii) penyerdehanaan prosedur visa dan izin kerja bagi tenaga asing; dan (iii) peningkatan kualitas layanan kepabeanan.
3. Dukungan ketersediaan bahan baku, seperti: (i) fasilitas kontrak jangka panjang untuk pembelian bahan baku; (ii) penindakan atas penyelundupan bahan mentah (kayu, batubara bijih timah, dan lainnya); dan (iii) rasionalisasi tarif keluar.

4. Dukungan ketersediaan energi, seperti: (i) penerapan **40** *persedomestic market obligation* (DMO) batubara pada harga keekonomiannya; (ii) renegotiasi kontrak ekspor gas jangka panjang; dan (iii) revisi UII No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya penyediaan tenaga listrik mandiri oleh swasta.
5. Peningkatan akses sumber pembiayaan, seperti: (i) peningkatan portofolio kredit ke sektor industri; (ii) penurunan suku bunga kredit investasi; dan (iii) fasilitasi perbankan yang membolehkan mesin produksi sebagai agunan kredit investasi.
6. Dukungan SDM industrial yang amial, seperti: perbanyak lembaga pendidikan vokasi sesuai kebutuhan industri.
7. Dukungan teknologi produksi, seperti: penerapan reduksi pajak terhadap aktivitas dan komersialisasi produk litbang.
8. Dukungan akses ke pasar domestik dan ekspor, seperti: (i) Preferensi harga pada produk lokal dibanding produk impor untuk pengadaan pemerintah dan BUMN; (ii) pengurangan biaya penanganan terminal peti kemas; dan (iii) standarisasi produk industri.
9. Dukungan pada peningkatan peran IKM, khususnya untuk mendorong keterkaitan antarindustri, pembiayaan usaha, teknologi, dan pemasaran.

3.3.10 Daya Saing Ketenagakerjaan

Sesuai dengan RPJMN 2010-2014, prioritas bidang ekonomi Daya Saing Ketenagakerjaan terdiri dari tiga Fokus Prioritas yaitu:

1. Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja;
2. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Penguatan Hubungan Industrial;
3. Peningkatan Fasilitasi dan Perlindungan untuk Mendukung Mobilitas Tenaga Kerja.

Untuk tahun 2013, kebijakan yang akan ditempuh terkait Fokus Prioritas Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja adalah meningkatkan akses pelatihan dan pemagangan terutama bagi kaum muda dan mempertajam target program-program pelatihan, pemagangan dan kewirausahaan yang dilaksanakan pemerintah kepada kaum muda. Sementara itu, terkait dengan Fokus Prioritas Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Penguatan Hubungan Industrial, upaya

yang akan dilakukan adalah penyusunan aturan yang mendukung perbaikan iklim ketenagakerjaan yang antara lain diwujudkan dalam bentuk peta jalan jaminan sosial tenaga kerja. Sosialisasi dan dialog sosial tripartit perlu diperkuat dan dilaksanakan secara lebih intensif sampai ke tingkat kabupaten/kota. Selain itu, kebijakan lain yang akan ditempuh adalah: (i) harmonisasi peraturan ketenagakerjaan dengan sinergi kebijakan pusat dan daerah; (ii) meningkatkan kemampuan negosiasi bagi serikat pekerja dan pengusaha; (iii) memperkuat lembaga kerja sama tripartit di daerah; dan (iv) meningkatkan profesionalisme ahli-ahli hubungan industrial dan hakim pengadilan hubungan industrial.

Untuk Fokus Prioritas Peningkatan Fasilitasi dan Perlindungan untuk Mendukung Mobilitas Tenaga Kerja, kebijakan yang diambil adalah meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sampai dengan tingkat kecamatan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan TKI dengan tujuan agar peran "sponsor" (calon) dalam persiapan keberangkatan TKI dapat berlutang dan calon TKI dapat dengan lebih mudah mendaftarkan dirinya untuk bekerja ke luar negeri. Sejalan dengan terwujudnya pelayanan penempatan calon TKI, termasuk penyelenggaraan pelatihan teknis dan pembekalan calon TKI, akan didelegasikan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, untuk menjamin kualitas pelayanan kepada TKI maka kapasitas aparat pemerintah daerah harus ditingkatkan.

3.3.11 Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Padatahun 2013, pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan tidak saja untuk mendorong tumbuhnya usaha masyarakat, namun juga untuk meningkatkan produktivitas usaha sehingga mampu menjadi usaha yang berdaya saing tinggi. Upaya ini diharapkan meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam perbaikan struktur pelaku usaha nasional dan penguatan perekonomian domestik.

Arah kebijakan pembangunan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2013 masih melanjutkan arah kebijakan sesuai RPJMN 2010-2014 dan dilengkapi dengan beberapa arah kebijakan untuk memfasilitasi inisiatif baru sebagai berikut:

1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, yang mencakup penataan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi dan UMKM, serta pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi.
2. Mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan

UMKM, yang mencakup penyediaan dukungan pemasaran, produksi, kemitraan, investasi dan pengembangan produk unggulan.

3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UMKM, yang mencakup pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan, kapasitas dan kompetensi SDM, penyediaan layanan pengembangan bisnis, revitalisasi pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan SDM koperasi dan UMKM.
4. Meningkatkan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif, yang meliputi peningkatan akses permodalan, pengembangan dan pengendalian koperasi simpan pinjam yang disertai dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelolanya, pengembangan jasa keuangan bagi koperasi dan UMKM, dan perluasan KUR.
5. Memperkuat kelembagaan koperasi, yang mencakup peningkatan kualitas organisasi, badan hukum, dan kelalaksanaan koperasi, pengembangan keanggotaan koperasi melalui gerakan masyarakat sadar koperasi, peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan pengembangan program pendanaan melalui koperasi.

3.3.12 Jaminan Sosial

Sesuai dengan RPJMN 2010-2014, prioritas jaminan sosial memiliki Fokus Prioritas Penataan Kelembagaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (Dewan Jaminan Sosial Nasional). Terkait dengan Peta Jalan Jaminan Kesehatan untuk mencapai cakupan menyeluruh pada asuransi kesehatan, strategi dan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2013, antara lain dilaksanakan melalui:

1. Menyempurnakan *Road Map* Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan dan mengintegrasikannya dengan dokumen *Road Map* yang disusun oleh PT Askes dan PT Jamsostek untuk menjadi panduan pelaksanaan jaminan kesehatan;
2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan terkait jaminan sosial dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dan menyusun pokok-pokok substansi yang akan diatur dalam peraturan pelaksanaan;
3. Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan secara bertahap dalam rangka pencapaian cakupan semesta (*universal coverage*) jaminan kesehatan mulai tahun 2014;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dalam

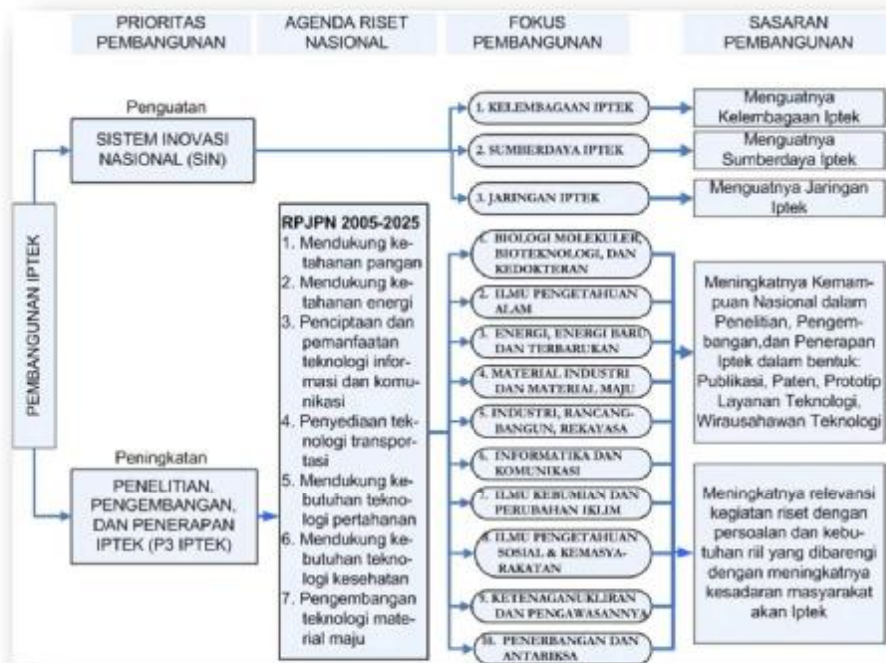
pelaksanaan program jaminan sosial seperti antara lain ketersediaan dan kualitas fasilitas kesehatan termasuk obat, perlengkapan medis, dan sumberdaya manusianya, terutama di daerah-daerah tertinggal dan terpendid;

5. Melengkapi perangkat hukum sebagai dasar pelaksanaan SJSN yang mencakup Peraturan Pemerintah turunan UU SJSN yang mencakup: (i) Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian; (ii) Peraturan Pemerintah tentang Kepesertaan; (iii) Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengembangan Dana Jaminan Sosial; dan (iv) Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan;
6. Melaksanakan harmonisasi regulasi di bidang jaminan sosial diantaranya dengan UU Dana Pensiun, UU Jamsostek, UU Pokok Kepegawaian, UU Pemerintah Daerah, UU Ketenagakerjaan, UU Kesejahteraan Sosial dan UU Penanganan Fakir Miskin;
7. Mengembangkan strategi pemasaran sosial dan pendidikan masyarakat yang efektif untuk memperkenalkan konsep asuransi agar berkembang prinsip gotong-royong dan supaya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan jaminan sosial.

BAB 4
BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dilaksanakan dengan kerangka pikir sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1. diarahkan pada (1) penguatan sistem inovasi nasional (SIN) agar mampu menjadi wahana pembangunan iptek yang efektif dan efisien; serta (2) peningkatan dukungan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek bagi pembangunan nasional.

GAMBAR 4.1
KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN IPEK



4.1 Kondisi Umum

4.1.1 Sistem Inovasi Nasional (SIN)

Penguatan SIN dalam rangka pembangunan Iptek dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan iptek, pengembangan sumber daya iptek, dan perluasan jaringan iptek. Dalam rangka penguatan kelembagaan Iptek, Kementerian Riset dan Teknologi bersama-sama dengan lembaga penelitian baik yang berada di kementerian maupun yang berbentuk non kementerian, senantiasa berupaya memperbaiki tata kelola penelitian dan pengembangan di Indonesia. Upaya ini sekaligus menjadi bagian yang terintegrasi di dalam rencana pelaksanaan reformasi birokrasi di dunia penelitian. Salah satu wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi di dunia penelitian adalah Penataan Kelembagaan Iptek, yang di dalamnya termasuk pembentukan Komite Inovasi Nasional (KIN) yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010. KIN telah banyak menyumbangkan pemikiran dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional khususnya dalam rangka penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Di samping itu, Dewan Riset Nasional (DRN) telah juga berhasil menyelesaikan Buku Putih Agenda Riset Nasional (ARN) yang secara langsung dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan riset di Indonesia.

Dalam rangka pengembangan sumber daya iptek, diperlukan dukungan fasilitas sarana dan prasarana penelitian serta ketersediaan kapasitas SDM yang semakin meningkat. Untuk itu terus dilanjutkan pembangunan berbagai sarana dan prasarana laboratorium, yang antara lain telah diselesaikan pembangunan laboratorium RPPT terpadu di Puspiptek yang meliputi 6 kluster laboratorium. Di samping itu, LIPI pun telah melaksanakan upaya revitalisasi sarana penelitian kelautan di Ambon - Maluku dan di Lambek; pembangunan inkubator teknologi; pembangunan laboratorium sistem mutu dan teknologi pengujian; serta pembangunan infrastruktur laboratorium bioteknologi peternakan modern di Cibinong Science Center. Sedangkan dalam rangka memperkuat kapasitas SDM Iptek, terus dikembangkan pemberian beasiswa bagi peneliti untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sejalan dengan itu, pembinaan fungsional peneliti terus ditingkatkan, salah satunya adalah dengan pengukuhan 35 Profesor Riset baru

pada tahun 2011. Sejak tahun 2006-2011 telah berhasil dikukuhkan 367 professor riset se-Indonesia.

Dalam rangka penguatan dan perluasan jaringan iptek telah dirintis berbagai kerjasama penelitian baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerjasama penelitian di dalam negeri dilakukan melalui program insentif tahun 2011 dengan pencapaian 38 paket Riset Dasar; 155 paket Riset Terapan; 17 paket kegiatan difusi dan pemanfaatan iptek; dan 78 paket peningkatan kapasitas iptek Sistem Produksi.

4.1.2 Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek)

4.1.2.1 Bidang Iptek dalam Agenda Riset Nasional

Uraian rinci pencapaian hasil-hasil penelitian pada setiap bidang disajikan dalam bagian berikut ini :

Untuk mendukung **Ketahanan Pangan**, BATAN telah mengujicoba varietas unggul yang ditemukan dengan menerapkan teknologi radiasi nuklir pada tahun sebelumnya antara lain padi Pandan Putri (2010), padi Inpari Sidenuk (2011), kedelai Mutiara 1 (2010) dan varietas sorgum Pahat (2011). Sementara itu LIPI melakukan pengembangan benih unggul berbasis biologi molekuler. Pada tahun 2011 kegiatan tersebut telah menghasilkan lebih dari 2000 galur mutan stabil padi siap untuk diuji kemampuan adaptasinya terhadap perubahan iklim atau keunggulan lainnya termasuk tahan terhadap hama penyakit dan kondisi lingkungan yang rentan.

Selain pengembangan bibit unggul, LIPI telah berhasil mengembangkan produk pupuk organik hayati (POH) dengan nama *Bevonic-IP*, a.l Seri *BioPasko*, *Kompenit²*, *Biomat*, *Kedelai Plus*, *Biorhizo*, *BioVom*, *Biosmik*, *StarTrak*, *Azofor* dan *Katelek*. Produk inidikembangkan dengan menggunakan mikroba Indonesia terpilih yang mampu memperbaiki kondisi lahan pertanian termasuk tambak yang telah rusak, menghilangkan hama penyakit, mengurangi polutan, menstabilkan pH tanah, menyediakan kekurangan nitrogen, fosfat, mineral, zat faktor tumbuh dan menurunkan laju emisi gas rumah kaca dari lahan pertanian.

Selain itu, LIPI telah mengembangkan bioteknologi peternakan seperti produksi sperma beku, teknologi produksi embrio dan teknologi kembar identik. Penerapan teknologinya dilaksanakan melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat, Jawa Barat

dan Sulawesi Selatan, serta perguruan tinggi (Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Andalas).

Masih berkaitan dengan pengembangan teknologi pangan, BPPT telah membuat biskuit khusus. Biskuit ini dibuat dengan tekstur yang kuat dan memenuhi persyaratan sebagai pangan darurat terutama untuk pemenuhan kebutuhan makanan saat paska bencana, memiliki energi sebesar 400 - 500 kkal/100 gram biskuit. Produk pangan darurat hasil optimasi skala komersial yang telah dikembangkan bersama ini memiliki kandungan energi sebesar 437 kkal, protein 7.1%, lemak 16%, karbohidrat 67%, mineral 4,75% dan serat 3%.

Selanjutnya, BPPT juga mengembangkan ikan Nila Salin yaitu varietas ikan nila yang toleran terhadap perairan payau maupun laut dengan salinitas > 20 ppt. Pengembangan varietas ikan Nila Salin merupakan yang pertama di Indonesia dan diharapkan keberhasilannya akan membuka peluang pemanfaatan lahan perlarabakan yang bertahun-tahun tidak dipergunakan akibat kolapsnya budidaya udang windu dan sekaligus akan mendorong akselerasi peningkatan produksi terutama untuk pasar ekspor, peningkatan ekonomi dan lapangan kerja.

Dalam bidang **Energi**, BPPT mengembangkan teknologi pemanfaatan panas bumi skala kecil. PLTP skala kecil berkapasitas 3 MW dengan teknologi *condensing turbine*, di mana seluruh prosesnya sejak dari rancang bangun sampai dengan manufaktur komponen utamanya seperti turbin, generator, condenser dilakukan di dalam negeri secara maksimal. Saat ini pekerjaan rancang bangun sistem pembangkit dan komponen-komponen utamanya telah diselesaikan. Sementara itu, manufaktur turbin dan generator di industri dalam negeri sedang berlangsung. Fase konstruksi Pilot plant PLTP ini telah dimulai pada akhir tahun 2011 di lapangan panas bumi Kamojang, Jawa Barat, bekerjasama dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).

LIPI telah melakukan penelitian untuk memanfaatkan limbah dari tandan kosong kelapa sawit untuk menjadi bahan baku *biogasoline* serta mengembangkan standarisasi teknologi pengujian kompor gas satu tungku dan regulator tekanan rendah untuk tabung gas LPG dalam rangka mendukung upaya konversi energi minyak tanah ke gas.

Pemanfaatan energi matahari melalui pengkonsentrasian

energi Pembangkit Listrik Tenaga Matahari Terfokus (PLTMT) akan menjadi salah satu kontribusi LIPI untuk produksi listrik di bagian timur Indonesia dan pulau-pulau yang cenderung menerima intensitas matahari cukup tinggi dan tidak memiliki sumber daya air. Saat ini LIPI telah berhasil mengkonsentrasikan sinar matahari untuk memanaskan media hingga 400°C, dan PLTMT skala 10 kW sedang dalam tahap penelitian. LIPI juga mengembangkankan batubara menjadi briket batubara yang lebih bersih dan penanganannya mudah. Sistem pembangkit daya bahan bakar batubara rendah kalori dan biomassa tungku siklon turbulen juga telah dihasilkan. Teknologi *fuelcell*, dengan pembuatan membran polimer, yang mampu digunakan sebagai sumber energi (sementara ini masih dalam *prototype* daya rendah). Teknologi yang telah dicapai adalah *core technology* dengan teknologi pembuatan *polymer* membran elektrolit sebagai bagian penting dari *fuelcell*.

Berkaitan dengan rencana pembangunan PLTN I di Indonesia, BATAN berperan dalam penguatan kapasitas teknologi nuklir untuk energi, dan penyusunan infrastruktur dasar persiapan tapak PLTN. Dalam kaitan itu, telah dipersiapkan hal-hal teknis berupa Studi Kelayakan, khususnya yang terkait dengan kelayakan tapak PLTN dan dokumen SER (*Site Evaluation Report*) untuk Ijin Tapak, penyusunan dokumen URD (*User Requirement Document*), dokumen PSAR (*Preliminary Safety Analysis Report*) untuk ijin konstruksi, dokumen BIS (*Bid Invitation Specification*), dokumen rencana komisioning atau DRK (untuk ijin komisioning tahun 2015), dan dokumen rencana operasi atau DRO (untuk ijin Operasi tahun 2016/2017). Hasil yang telah dicapai pada tahun 2011 adalah 3 paket dokumen pedoman penyusunan infrastruktur dasar pendukung program energi nuklir nasional yaitu: (i) dokumen Pengembangan Kebijakan Iptek Nuklir Nasional Bidang Energi dan Jaminan Mutu; (ii) Dokumen Penyiapan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), (iii) Dokumen Penyusunan Strategi Program Partisipasi Industri Nasional. Ketiga dokumen tersebut merupakan sebagian dokumen yang dipersyaratkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) untuk persiapan pembangunan PLTN I di Indonesia. Dokumen tersebut akan digunakan oleh pemangku kepentingan (ESDM, PLN, Investor).

Dalam bidang **Teknologi Kesehatan**, telah dibangun

konsorsium riset, hasil kerjasama antara Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Eijkman dan Polri. Konsorsium ini telah berhasil mengembangkan teknik DNA Forensik. Teknik ini telah diaplikasikan oleh LBW Eijkman dan POLRI dalam membantu penyelidikan untuk menuntaskan kasus rumit kurang dari dua minggu, tanpa bantuan dari luar negeri.

Hasil yang telah dicapai BATAN dalam teknologi biomedika dan kedokteran nuklir antara lain : Teknik *Fluorescence in situ hybridization (FISH) multi probe* untuk analisis sitogenetik; teknik deteksi *Biomarker Proliferasi (NOR, Ki-67)* pada Sel Kanker untuk prediksi respon sel kanker terhadap radiasi; bahan vaksin malaria dengan radiasi gamma; metoda diagnosis infeksi *Helicobacter Pylori* pada penderita *dyspepsia*, gagal ginjal, dan sirosis hati; metoda deteksi resistensi *M.Tuberculosis* terhadap obat anti TB; teknik pemeriksaan *Mikroalbuminuria (MA)-Radioimmunoassay (RIA)* untuk deteksi dini nefropati diabetik (ND) pada diabetes melitus (DM); teknik pemeriksaan limfoscintigrafi pada sumbatan kelenjar limfe menggunakan kit Sulphur Colloid; teknik deteksi hipotiroid pada kehamilan dan neonatus (bayi baru dilahirkan) secara *in vitro*; teknik pengendalian vektor penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) (*Aedes aegypti*) dan Malaria (*Anopheles sp*) dengan Teknik Serangga Mandul (TSM); teknik deteksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, Hepatitis B Virus (HBV) dan Hepatitis C Virus (HCV) berdasarkan DNA dengan teknik biologi molekuler berbasis nuklir; serta teknik analisis aktivasi neutron (AAN) untuk penentuan kandungan mikronutrisi dan konsentrasi unsur runtuhan tertentu pada sampel manusia dan lingkungan.

Selain itu BATAN telah mampu mengembangkan teknologi produksi kit radiofarmaka untuk diagnose penyakit secara *in vivo*; teknologi produksi kit RIA / *immunoradiometric assay (IRMA)* untuk diagnose penyakit secara *in vitro*; teknologi produksi radiofarmaka terapi; teknologi produksi generator radionuklida diagnose dan terapi serta sumber tertutup untuk *brachytherapy* penyakit kanker. Produk radioisotop dan radiofarmaka hasil litbang BATAN antara lain: Kit MIBI (diagnostik perfusi jantung), kit HMPAO (diagnostik perfusi otak), Kit DTPA (fungsi ginjal), Kit MDP (diagnosis kanker tulang), Kit RIA Hepatitis B-(125I) (deteksi hepatitis B, HBs Ag dan anti HBs), Na 131I (terapi kanker *thyroid*), 192Ir hair pin dan single pin yang digunakan pada *brachytherapy* (terapi kanker sebagai radiasi eksternal), dan I-125

seedbradyterapy untuk penanganan kanker prostat, yaitu sebagai sumber radiasi tertutup yang dapat ditanamkan ke dalam jaringan kanker. Perencanaan perangkat nuklir untuk aplikasi medik dan radiofarmaka yang dikembangkan seperti: Perangkat Renograf untuk diagnosis fungsi ginjal; *Tyroid uptake* untuk analisis fungsi kelenjar gondok; Perangkat Brakiterapi untuk terapi penyakit (kanker); serta Pesawat Sinar-X untuk berbagai kebutuhan diagnosis medis.

Penguasaan rekayasa genetika oleh LIPI juga berkembang dengan pesat. Pemindahan gen penyandi protein terapeutik (*erythropoetin - hEPO*) ke dalam ragi roti semakin memperlihatkan hasilnya. Demikian juga dengan produksi vaksin serta pencarian bahan baku obat malaria, artimisinin, dari sumberdaya alam. Satu molekul aktif untuk perbaikan pembuluh darah dan penyembuhan penyakit jantung berhasil diidentifikasi dari daun sulan, dan kini dalam tahap uji coba.

BPPT telah melaksanakan Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Produksi Obat Genetik Turunan Beta-laktam seperti *Penisilin G*, *6-APA* dan *Sintesa Amoksisilin*. BPPT secara aktif juga menjalankan peran intermediasi, *Technology Clearing House* dan pengkajian teknologi. Salah satu hasilnya adalah *prototype* galur mikroba kapang *Penicillium chrysogenum* penghasil *Penicillin G* dengan produktivitas mencapai 3.000 mg/L pada skala laboratorium.

Dalam bidang **Teknologi Informasi dan Komunikasi**, Kegiatan riset telah berhasil mendukung penyusunan Grand Design Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) yang berisi analisis kondisi saat ini, isu strategis dan alternatif solusi SAK, *Grand design* SAK (GDSAK), rencana implementasi GDSAK, tata kelola TIK, dan pendanaan penerapan GDSAK. Untuk implementasi SAK di tahun 2011 telah disusun Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko KTP berbasis NIK secara nasional.

BPPT telah berhasil mengembangkan *Perisalah@* yaitu perangkat yang membuat risalah dan resume pertemuan dengan menggunakan teknologi pengenalan wicara (*speech recognition*) dan peringkas dokumen (*document summarization*) dengan bahasa Indonesia. Kinerja *Perisalah@* senantiasa diperbaharui dengan mengenali sebanyak mungkin variasi gaya bicara orang-orang dalam rapat berbahasa Indonesia.

Dalam Bidang **Transportasi**, telah dikembangkan *Computer*

Based Interlocking (CBI) bekerjasama dengan LPNK terkait, PT. LEN, serta Kementerian Perhubungan dalam rangka meningkatkan kemandirian teknologi dan industri di bidang persinyalan Kereta Api. Program ini merupakan upaya Kementerian Ristek mengembangkan model sinergi pemerintah - lembaga riset - industri melalui konsorsium riset dengan pendekatan kebutuhan pasar untuk menghasilkan prototipe-prototipe yang dapat mensubstitusi import untuk meningkatkan kemandirian teknologi dan industri di bidang persinyalan Kereta Api.

Dalam kaitan penguasaan teknologi perkapalan, sedang dikembangkan penerapan teknologi *air lubrication* pada badan kapal. Tekstur badan kapal secara teoritis menjadi hambatan terbesar laju kapal, yang mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Besarnya gaya gesek yang terjadi pada badan kapal, menyebabkan besarnya gaya hambatan badan kapal. Untuk itu pemanfaatan teknologi *air lubrication* ini ditujukan agar penggunaan bahan bakar pada kapal dapat diminimalkan, namun tetap tidak mengurangi kecepatan kapal itu sendiri. Dengan kata lain, kapal ini akan hemat dalam penggunaan konsumsi energi bahan bakar. Karena dengan menggunakan *air lubrication*, konsumsi bahan bakar dapat ditekan sebanyak 30% dari kondisi biasanya.

Dalam Bidang **Pertahanan dan Keamanan**, melalui kerja sinergi antara dengan Kementerian Pertahanan, Lembaga Penelitian Pengembangan yaitu BPPT, LAPAN, Perguruan Tinggi (ITB, ITS), serta BUMA yaitu PT. Dirgantara Indonesia, PT. PINDAD dan PT. LEN, telah berhasil melakukan perencanaan roket peluru kendali, rancang bangun, rekayasa dan peluncuran roket yang disebut roket "D-230" (Dirgantara berjarak tembak 20 s/d 30 km). Roket berkaliher 122mm jenis balistik telah diuji coba peluncurannya di Pandanwangi Jawa Timur dan Baturaja Sumatera Selatan. Roket "D-230" kaliber 122mm ini telah berhasil diterbangkan dengan jarak terbang ±14,15 km untuk *single stage* dan 18-20 km untuk *double stage*.

Kerjasama sinergi antar pemangku kepentingan ini telah menghasilkan *blueprint design engineering, road map*, pembuatan *prototype*, pelaksanaan uji statik dan uji terbang secara berkesinambungan sehingga mencapai keandalan yang diinginkan. Dengan keberhasilan ini, kemudian Kementerian Pertahanan mengadopsi roket tersebut dan diberi nama "R-Han 122", dimana saat ini sedang dilakukan proses sertifikasi

untuk dimanfaatkan sebagai arsenal TNI melalui program 1.000 roket. Sebagai tindak lanjutnya telah dilakukan penandatanganan LOI (*Letter of Intent*) produksi "R-Iian 122" oleh Kementerian Pertahanan dan PT. Dinyantara Indonesia.

Penelitian dan pengembangan teknologi peroketan selanjutnya diarahkan untuk pengembangan roket jarak jelajah yang lebih jauh lagi, untuk roket balistik "D-230" sampai dengan 40 km, serta dalam rangka program penguasaan teknologi kendali (*guided*) untuk roket yang mempunyai daya jelajah 200-300 km.

Selain itu, hasil pengembangan teknologi roket di LAPAN telah dimanfaatkan derivasinya oleh konsorsium nasional yang beranggotakan Kementerian Ristek, Kemhan, ITB, IPT, DI, PTL, PINDAD, dan PT. Dahana. Roket Lapan yang dimanfaatkan untuk keperluan tersebut adalah RX-122 dengan jarak jangkau 1-1 km dan 20 km, RX-200 dengan jarak jangkau 30-40 km, dan roket kendali RXX-200. Disamping itu, LAPAN telah mengembangkan Kemandirian Produksi Bahan Baku Utama Roket (Propelan). Saat ini telah dihasilkan bahan baku propelan dengan komponen lokal 80%. Selain itu LAPAN melakukan penyediaan citra satelit pada Wilayah Perbatasan Dan Pulau Kecil / Terluar. Penyiapan proses harmonisasi RUII Keantariksaan dan Penyiapan proses harmonisasi RIII Keantariksaan.

Radar Pengawas Pantai "Isra" (*Indonesia Sea Radar*) yang dikembangkan LIPI untuk memonitor pergerakan kapal-kapal laut, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengamankan wilayah perairan RI. Radar ini telah dipasang dan di uji coba di daerah Cikoenng, Banten. Berbagai inovasi telah dilakukan untuk mengurangi ketergantungan komponen/modul dari luar negeri dan untuk produksinya telah dijalin kerjasama dengan PT INTI.

Perancangan sistem dan metode pengujian EMC (*Electromagnetic Compatibility*) untuk peralatan telekomunikasi hankam telah dilakukan. LIPI juga mengkaji kelayakan metode *Advanced Oxidation Processes (AOP)* untuk pengolahan limbah cair produksi khususnya bahan peledak. Untuk membantu para prajurit dalam memanfaatkan tumbuhan Indonesia sebagai pangan dan obat herbal darurat (*field survival*).

BPPT mengembangkan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) untuk berbagai keperluan pemantauan dari udara, seperti

pemetaan, pemantauan kebakaran hutan, mitigasi bencana, pencarian korban hingga keperluan militer. PUNA sendiri nantinya akan membawa terbang berbagai peralatan seperti kamera, alat pengintai dan sejenisnya. Kegiatan Rancang Bangun PUNA ini masih dilanjutkan dengan pengembangan PUNA tipe Sriti dengan bobot 6,5 kg dan luas jangkauan 10 km. Pengoperasian dalam jangka waktu yang sangat lama dapat meliputi patroli rutin perbatasan negara, patroli kelautan, pengamatan lalu lintas, dan lain-lain.

PUNA tipe Sriti berbahan bakar metanol seperti yang dipakai di pesawat *aeromodelling*. Jarak pengendalian maksimum Sriti adalah 45 km. Pengendalian pesawat menggunakan *ground control station* (GCS). GCS terdiri dari *remote control* yang digunakan saat lepas landas dan mendarat. Saat di udara, Sriti bergerak *autonomus*, sesuai titik-titik yang telah ditentukan di komputer. Dengan pengendalian dari jarak jauh, PUNA mampu mengerjakan berbagai misi tanpa terhambat oleh keterbatasan manusia, antara lain, pengoperasian pada daerah yang berbahaya bagi manusia, pengoperasian dalam jangka waktu yang sangat lama, pengoperasian pada kondisi terbang yang lebih murak dan uniknya resiko terhadap ancaman keselamatan awak.

Dalam Bidang **Material Maju**, telah dilakukan penayagunaan inovasi iptek nanoteknologi sistem membran tanpa listrik dalam pengolahan air bersih siap minum. *Prototype* alat ini telah berhasil dibuat (ITR) dan dalam proses sertifikasi. Selain itu pengembangan teknologi produksi Nanopartikel ZnO dan lapisan Nikel paku dari bahan baku lokal telah mulai dikembangkan untuk mendukung industri nasional.

Secara bersamaan pada beberapa tahun terakhir ini sedang dikembangkan pembuatan ingot sampai dengan *wafers silicon Polikristal* untuk industri sel surya skala laboratorium yang dilakukan oleh LIPI dan BPPT. Selain itu BPPT juga sedang mengembangkan material untuk penyimpanan Hidrogen, dan bahan komponen sel bahan bakar (*fuel cell*). Beberapa produk telah dihasilkan dan diuji coba, antara lain material baru hidrogel penyerap air dan silika termodifikasi untuk pemisahan logam berat; pembuatan baju tahan peluru, perekat kayu rendah emisi *formaldehida* berbasis lateks karet alam. Pembuatan material nanopartikel yang telah didaftarkan patennya. Modul untuk perguruan tinggi dan lembaga litbang juga telah dikomersialkan.

Penerapan nanoteknologi juga terus dikembangkan antara lain untuk perangkat teknologi informasi (*handphone*, komputer), tekstil (pakaian anti bau), lingkungan (*water purification*), pangan (*food packaging*), kesehatan (pengobatan kanker), kosmetik (pelindung kulit dari ultraviolet), energi (*high efficiency solar cell, fuel cell*) dan bidang industri kimia.

4.1.2.2 Bidang-Bidang Tematik Lainnya

Dalam Bidang **Lingkungan Hidup**, beberapa kegiatan riset, monitoring, dan mitigasi lingkungan hidup terus dikembangkan, salah satunya adalah pengembangan kebun raya yang menjadi wahana riset, konservasi dan edukasi lingkungan yang dilakukan oleh LIPI. LIPI telah melakukan pengembangan kebun raya daerah sebagai pusat konservasi ex-situ. Pengembangan Kebun Raya Daerah ini merupakan tindaklanjut amanat dalam Perpres No 93/2011 tentang Kebun Raya. Hasil yang dicapai berupa terkoleksinya 848 nomor koleksi tumbuhan untuk pengkayaan koleksi, terpeliharanya bibit hasil eksplorasi, teranainya bibit hasil kegiatan pembibitan pada tahun sebelumnya di kebun/lapangan. Terbangunnya taman tematik di dua kebun raya prioritas (kebun raya Balikpapan dan kebun raya Raturanjen).

Dalam hal survey dan riset lingkungan kelautan, LIPI telah lama mengembangkan sistem informasi dan penelitian kerusakan terumbu karang. Status kondisi terumbu karang nasional, di wilayah Barat dan Timur Indonesia secara reguler dimonitoring dan dimunculkan hasilnya oleh LIPI. Disamping itu LIPI telah melakukan studi **Benefit Monitoring and Evaluation (BME)** terbagi atas: BME kesehatan terumbu karang yang bertujuan untuk memonitor kesehatan terumbu karang di lokasi **Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP)** dan BME sosial ekonomi bertujuan mengkaji pelaksanaan dan manfaat COREMAP bagi masyarakat. Studi pada akhir pelaksanaan program COREMAP II menunjukkan hasil yang positif seperti: kenaikan persentase tutupan karangnya antara 0,08-5,64% di wilayah Provinsi Riau (Batam, Bintan, Lingga, Natuna, Nias dan Mentawai) dan di Indonesia bagian timur pada wilayah Pangkep, Raja Ampat, Sikka dan Selayar sebesar 3,15 – 7,19%.

Dalam hal pemantauan bencana, telah dilakukan rancang

bangun satelit mitigasi bencana LAPAN-A2 dan LAPAN-ORARI. Satelit kembar ini dirancang untuk menghasilkan foto daratan dan dilengkapi dengan sistem komunikasi. Kedua satelit di atas akan di luncurkan pertengahan pada tahun 2012. Selain itu telah dihasilkan data/informasi hasil libang berbasis dari satelit melalui website SIMBA LAPAN (Pemantauan hot spot untuk penanggulangan kebakaran hutan). Di samping itu, juga telah disediakan data satelit penginderaan jauh untuk pemetaan wilayah perbatasan RI dan pemetaan pulau-pulau kecil terluar berbasis data citra satelit; Penyediaan data satelit penginderaan jauh untuk pemetaan Wilayah Perbatasan RI Dengan Malaysia, PNG, Timor Leste dan Filipina dengan berkerjasama antara LAPAN, DEPDIAGR, TNI, BIN, dan Pemda.

Dalam Bidang **Standardisasi**, BSN telah melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan standar nasional antara lain harmonisasi SNI dengan standar internasional, kaji ulang dan harmonisasi SNI dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), penguatan fungsi *Notification Body* dan *Enquiry Point*, pengembangan kebijakan penerapan SNI, penguatan fungsi *Designating Body* & *Member Body IEC EE*, penyempurnaan sistem metrologi nasional, perluasan lingkup kalibrasi dan pengukuran lembaga metrologi nasional, pemberlakuan dan penerapan standardisasi, insentif industri dalam penerapan SNI, fasilitasi penerapan SNI yang diadopsi menjadi regulasi teknis, monitoring dan evaluasi integritas penerapan SNI.

Kaji ulang dan harmonisasi SNI telah dilakukan untuk membantu meningkatkan daya saing produk nasional dalam menghadapi perjanjian *China ASEAN Free Trade Agreement* (CAFTA) khususnya dalam 11 sektor prioritas, yaitu : baja, aluminium, elektronika dan kelistrikan, makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, petrokimia, mesin dan perkakas, hasil pertanian dan perkebunan, mainan anak, dan plastik.

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian yang mencakup laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang kompeten untuk penerapan SNI, BSN telah melakukan kegiatan pengembangan kebijakan penerapan SNI, penguatan fungsi BSN sebagai *designating body* dan *member body IEC EE*, pengembangan potensi lembaga penilaian kesesuaian (LPK), penyelenggaraan uji

profisiensi laboratorium secara nasional, penyempurnaan sistem metrologi nasional, perluasan lingkup kalibrasi dan pengukuran lembaga metrologi nasional serta dukungan penerapan standar bidang laboratorium dan lembaga inspeksi.

Dalam rangka memelihara kompetensi laboratorium yang diakreditasi oleh KAN, telah dilakukan penyelenggaraan uji profisiensi laboratorium secara Nasional untuk 6 komoditi yaitu mikrobiologi biakan beku kering, pangan (minuman serbuk), crude palm oil (CPO), penyakit benih tanaman, pupuk (NPK dan DAP) dan tanah. Kegiatan uji profisiensi laboratorium diikuti oleh 250 laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam rangka Penerapan Standar Bidang Laboratorium dan Lembaga Inspeksi telah dihasilkan 87 laboratorium dan lembaga inspeksi baru yang diakreditasi.

Dalam Bidang **Pengawasan Iptek Nuklir**, BAPETEN telah berperan aktif di berbagai fora internasional. Hasilnya adalah telah terjalin kerja sama yang erat antara Indonesia dengan dengan lembaga internasional seperti *Nuclear Regulatory Commission (NRC)* dan *Department Of Energi (DoE)* Amerika Serikat ; *Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA)*, dan *Australian Safeguards and Non-proliferation Offices (ASNO)* Australia; *Korean Institute of Nuclear Safety (KINS)* Korea Selatan; *Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA)* dan *Japan Nuclear Energy Safety Organisation (JNESO)* Jepang; dan *Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC)* Kanada. Komunitas Uni Eropa dan Organisasi OECD juga memberikan bantuan khusus kepada BAPETEN, utamanya dalam kesiapan Pemerintah RI untuk menjamin keselamatan PLTN di Indonesia.

Indonesia juga telah berperan dalam *Asian Nuclear Safety Network (ANSN)* yang bertujuan membangun keselamatan nuklir regional. Indonesia memelopori pemirian *Asia-Pacific Safeguards Network (APSN)* untuk menjamin perdamaian regional dan kerja sama untuk memastikan pemanfaatan tenaga nuklir untuk tujuan damai. Kerja sama teknis dengan *International Atomic Energy Agency (IAEA)* telah juga ditingkatkan terutama dalam aspek keselamatan (*safety*), keamanan (*security*) dan kedamaian (*safeguards*).

Di samping membangun jaringan dengan badan-badan internasional, BAPETEN juga telah berhasil merumuskan perencanaan bagaimana mengelola pencemaran radiasi

limbah pertambangan, yang disebut *Technologically Enhanced Naturally Occuring Radioactive Materials* (TENORM). Limbah TENORM umumnya berasal dari industri fosfat, timah, dan migas.

Dalam Bidang **Riset Kemasyarakatan dan Kemanusiaan**, LIPI telah melakukan beberapa kegiatan penelitian yang mengacu pada program strategis dan prioritas nasional, antara lain berupa kajian di bidang: regulasi ketenagakerjaan, kesejahteraan keluarga TKI, kemiskinan, sistem perekonomian, serta hubungan internasional.

4.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan

Secara umum, untuk tahun 2013 masih ada 3 (tiga) permasalahan mendasar yang menyangkut pembangunan iptek di Indonesia. *Pertama* : masih rendahnya kemampuan sisi litbang dalam menyediakan solusi-solusi teknologi, yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan sumber daya iptek (jumlah SDM, kepakaran, kekayaan intelektual, sarana dan prasarana serta anggaran); kelembagaan iptek yang belum optimal (organisasi, regulasi, koordinasi, intermediasi); serta jaringan iptek yang belum terbangun dengan baik (intrasektor, antarsektor, antar pemangku kepentingan, antarkementerian, serta antarpusat dan daerah). *Kedua* : Belum optimalnya kemampuan sisi pengguna dalam menyerap teknologi baru yang tersedia. *Ketiga* : belum terbangunnya integrasi antara sisi penyedia dan pengguna teknologi, yang antara lain disebabkan oleh: (i) masih lemahnya sinergi kebijakan iptek (integrasi program, koordinasi dan harmonisasi kegiatan, dukungan anggaran, serta intermediasi, yang terjadi baik antar lembaga/penghasil iptek, maupun antar penghasil iptek dengan pengguna iptek); (ii) masih kurangnya koordinasi dan sinergi di antara pemangku kepentingan pembangunan iptek; (iii) masih lemahnya sosialisasi regulasi yang telah ada; dan (iv) masih lemahnya budaya iptek.

Sasaran pembangunan Iptek tahun 2013 disusun menuju pencapaian sasaran RPJMN 2010-2014 sebagai berikut:

1. penguatan kelembagaan iptek yang ditunjukkan oleh peningkatan efisiensi dan produktivitas litbang;
2. pengembangan kapasitas sumber daya iptek yang semakin kuat dalam bentuk: peningkatan jumlah, dan kompetensi

peneliti, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian, dan peningkatan kualitas dan output kegiatan penelitian;

3. pengembangan jaringan iptek yang semakin kuat dan luas dalam bentuk jalinan kerjasama antar sisi penyedia; dan antara sisi penyedia teknologi dengan sisi pengguna yang lebih intensif dan lebih produktif;
4. peningkatan kemampuan nasional dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek, dalam bentuk publikasi di jurnal ilmiah internasional, paten, prototip, layanan teknologi bagi pengguna, serta meningkatnya kemampuan keteknikan nasional, serta tumbuhnya wirausahawan inovatif berbasis pengetahuan dan teknologi;
5. peningkatan pendayagunaan iptek dengan pemenuhan kebutuhan riil yang dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penghargaan masyarakat bagi kegiatan penelitian dan pengembangan iptek.

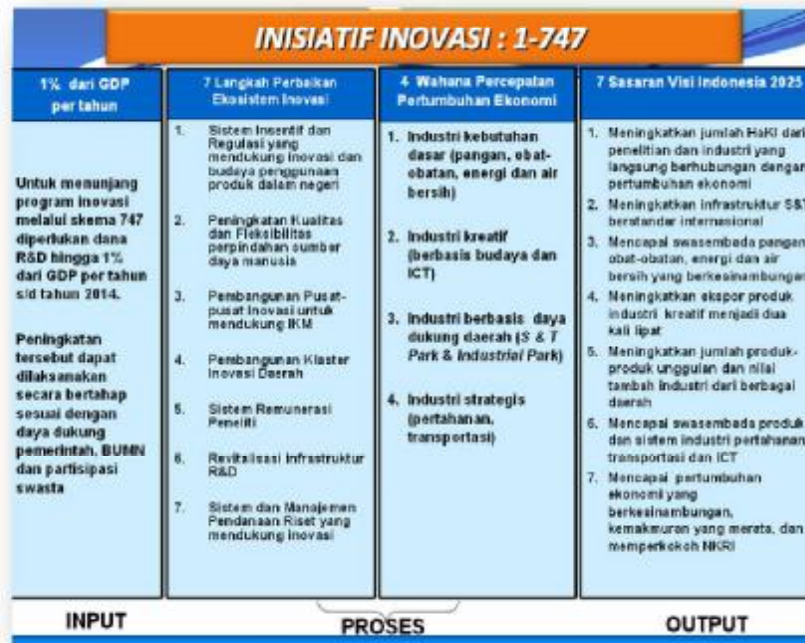
4.3 Arah Kebijakan Pembangunan

Salah satu pilar utama Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah pembangunan SDM dan Iptek. Khusus untuk pembangunan Iptek, percepatan pembangunan kemampuan iptek dilakukan melalui 6 prakarsa utama yakni:

1. Inisiatif Inovasi, 1-747.

Untuk mewujudkan peningkatan produktivitas, maka direkomendasikan usulan Inisiatif Inovasi 1-747 (Gambar 1.2) sebagai pendorong utama terjadinya proses transformasi sistem ekonomi berbasis inovasi melalui penguatan sistem pendidikan (*human capital*) dan kesiapan teknologi (*technological readiness*). Proses transformasi tersebut memerlukan input pendanaan R&D sebesar 1% dari GDP yang terus ditingkatkan secara bertahap sampai dengan 3% GDP menuju 2025. Pelaksanaannya dilakukan melalui 7 langkah perbaikan ekosistem inovasi, sedangkan prosesnya dilakukan dengan menggunakan 4 wahana percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai model penguatan aktor-aktor inovasi yang dikawal dengan ketat. Dengan demikian diharapkan 7 sasaran MP3EI di bidang SDM & IPTEK akan dapat tercapai sehingga menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

GAMBAR 4.2
INISIATIF INOVASI 1-747



2. Pengembangan Kluster Inovasi Solusi untuk 6 Koridor Ekonomi

Pengembangan 6 koridor ekonomi harus diiringi dengan penguatan kluster inovasi dalam kerangka meningkatkan keunggulan bersaing dan berinovasi. Keunggulan bersaing industri untuk berinovasi ditentukan oleh beberapa kondisi, antara lain faktor produksi, permintaan, industri pendukung, dan strategi & struktur perusahaan. Keempat faktor di atas sama lain membentuk suatu lingkungan nasional yang kondusif di mana perusahaan-perusahaan unggul dapat dilahirkan untuk berkompetisi.

3. Revitalisasi PUSPIPTEK sebagai Science & Technology Park

Merevitalisasi PUSPIPTEK sebagai S&T Park bertujuan untuk melahirkan IKM/UKM berbasis inovasi dalam berbagai bidang strategis yang mampu mengoptimalkan interaksi dan pemanfaatan sumber daya universitas, lembaga litbang, dan

- dunia industri/usaha sehingga dapat menghasilkan produk inovatif. Untuk menjaga sustainability pengelolaan S&T Park tersebut perlu dilakukan :
1. Menjadikan PUSPIITEK sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dengan manajemen profesional sehingga tercipta *link* antara bisnis dan riset.
 2. Menjadikan PUSPIITEK sebagai pusat unggulan riset berteknologi tinggi.
4. **Pembentukan Kluster Inovasi Daerah untuk Pemerataan Pertumbuhan**
- MP3EI akan mendorong dan mengikutsertakan upaya masyarakat/pelaku usaha/pemerintah provinsi/daerah yang relatif sudah memiliki inisiatif untuk memumbuhkembangkan potensi inovasi pada produk dan program unggulan daerah. Sebagai contoh antara lain sebagai berikut:
1. Model Pengembangan Kawasan Inovasi Agroindustri, Gresik Utara, Pemprov Jawa Timur seperti mangga dan tanaman hortikultura lainnya.
 2. Model pengembangan kawasan industri inovasi produk-produk hilir yang terintegrasi, antara lain kelapa sawit, kakao, dan perikanan.
 3. Model Pengembangan Kawasan Inovasi Energi Kalimantan Timur sebagai model pengembangan kawasan industri inovasi energi terkemuka berbasis *non-renewable* dan *renewable energy* meliputi minyak, gas, batubara, *bioenergy*/CPO
5. **Penguatan Aktor Inovasi**
- Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan MP3EI tergantung pada upaya cerdas dan efektif para aktor inovasi dari unsur akademisi/peneliti, dunia usaha/industri, masyarakat, legislator, dan pemerintah. Beberapa pemikiran berikut harus diupayakan dalam perencanaan dan pemanfaatan secara cerdas potensi anak bangsa dalam rangka membangun Indonesia maju dan bermartabat, antara lain:
1. Menciptakan SDM yang memiliki kompetensi, berkepribadian luhur, berharkat dan bermartabat melalui pendidikan sains teknologi, pranata sosial dan humaniora yang berkualitas.
 2. Optimalisasi sumber daya manusia berpendidikan S2 dan

53 yang telah ada, dan menambah 7.000-10.000 Ph.D di bidang sains dan teknologi secara bertahap dan terencana sampai tahun 2014.

3. Pengadaan laboratorium berstandar internasional baik di bidang ilmu-ilmu dasar maupun terapan di perguruan tinggi, lembaga litbang LPK dan LPNK serta pusat riset swasta, untuk kepentingan kemakmuran bangsa.
4. Kerjasama internasional yang mendorong pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan berbagai best practices yang sudah dikembangkan di berbagai negara.

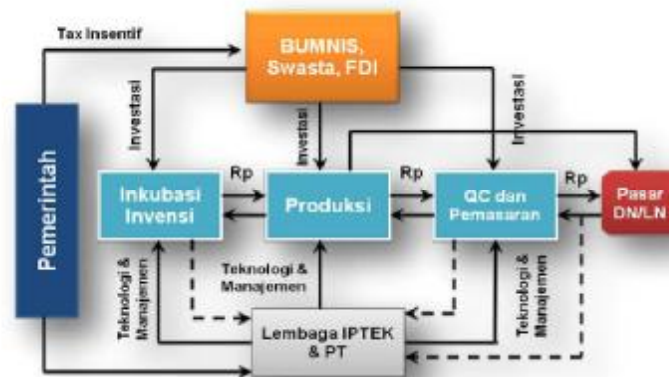
6. Memperkuat Operasionalisasi Sistem Inovasi Nasional

Pengembangan inovasi produk suatu inovasi melibatkan 3 pelaku utama dalam sistem inovasi nasional yaitu, pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha/industri sebagai pengguna hasil inovasi dan lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi sebagai penghasil produk inovasi. Seluruh aliran pengetahuan ini perlu diperkuat dan diupayakan konsensus nasional untuk menggunakan skema usulan ini sebagai dasar pengembangan produk inovasi. Pemerintah dalam hal ini akan memberikan tax insentif kepada industri, BUMNIS dan perusahaan dari luar negeri yang hendak melakukan investasi *foreign direct investment (FDI)* yang nantinya akan menggunakan teknologi dalam negeri atau mentransfer teknologi dari luar negeri ke Indonesia. Kepada pelaku inovasi pemerintah akan memberikan insentif penelitian berupa peningkatan dana penelitian dengan syarat utama bahwa pihak industri sudah berminat menggunakan teknologi yang dikembangkan. Insentif dapat diberikan oleh pemerintah jika produk inovasi sudah pasti memiliki nilai pasar yang tinggi melalui persyaratan yang ketat seperti telah memiliki *feasibility studies* dan *return of investment* yang jelas. Persyaratan ini menjadi penting sebagai awal terjadinya inovasi di dalam sebuah Negara. Selain itu Industri diminta untuk menjadi penggerak utama inovasi dengan memberikan *state of the art* kebutuhan inovasi teknologi yang memiliki nilai pasar yang baik.

Kebijakan pembangunan Iptek tahun 2013 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Iptek Nasional mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Dukungan ini akan berwujud dalam bentuk peningkatan

produktivitas menuju keunggulan kompetitif yang akan dicapai seiring dengan upaya memperkuat kemampuan sumber daya manusia berbasis inovasi. Warisan ekonomi berbasis sumber daya alam yang bertumpu pada *labor intensive* perlu ditingkalkan secara bertahap menuju *skilled labor intensive* dan kemudian menjadi *human capital intensive*. Peningkatan kemampuan modal manusia yang menguasai Iptek sangat diperlukan ketika Indonesia memasuki tahap *innovation-driven economies*.

GAMBAR 4.3
PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL INDONESIA



Untuk dapat menjalankan MP3EI pilar SDM Iptek yang diuraikan diatas, maka secara bertahap mulai pada tahun 2013 pembangunan iptek akan memusatkan upaya untuk menjawab isu strategis utama yakni bagaimana meningkatkan kemampuan iptek nasional dalam mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, dengan kerangka sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.1 dibawah ini :

TABEL 4.2
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN IPIK

NO	ISU STRATEGIS	SASARAN	KEGIATAN UTAMA
1.	Peningkatan kemampuan Iptek mendukung percepatan dan perluasan ekonomi nasional	<p>Terbangunnya peta jalan untuk mencapai pengeluaran R&D 1 (satu) persen dari GDP</p> <p>Terbangunnya pusat unggulan mendukung koridor ekonomi</p> <p>Revitalisasi Puspiptek</p> <p>Terbangunnya kluster inovasi daerah</p> <p>Menguatnya aktor inovasi</p> <p>Terbangunnya regulasi yang mendorong Sistem Inovasi Nasional</p>	<p>Kajian identifikasi pengeluaran badan usaha swasta/negara bagi R&D dan upaya peningkatannya</p> <p>Pembangunan Pusat Unggulan mendukung koridor Sumatera</p> <p>Pembangunan Pusat Unggulan mendukung koridor Jawa</p> <p>Revitalisasi Kawasan Puspiptek menuju S&T Park</p> <p>Revitalisasi Laboratorium HPTI, IPI, dan HAIAN yang berada di Puspiptek yang mampu mendukung kebutuhan dan pengembangan industri padat teknologi.</p> <p>Fasilitasi pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)</p> <p>Pendidikan S2/S3 bagi peneliti di dalam dan luar negeri</p> <p>Pelatihan / magang bagi peneliti di pusat riset dan industri unggulan dunia</p> <p>Pemetaan regulasi yang ada dan rancangan regulasi yang diperlukan</p>

Kebijakan pembangunan Iptek pada tahun 2013 yang diuraikan di atas selanjutnya diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Iptek yang dituangkan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu:

Pertama: Penguatan SIN yang difokuskan pada penguatan ketiga unsurnya, namun akan ditekankan pada penguatan sumberdaya iptek. Rincian masing-

masing pemhangunan unsur STN tersebut dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Penguatan sumberdaya iptek dengan merevitalisasi fasilitas-fasilitas riset dan melanjutkan pembangunan laboratorium-laboratorium yang baru. Di samping itu, kualitas pendidikan dan kuantitas peneliti ditingkatkan baik melalui pendidikan paska sarja di dalam maupun di luar negeri.
2. Penataan jaringan iptek dengan membangun kerja sama antar lembaga lintas (lemlit); antarlemlit dengan perguruan tinggi; dan antara lemlit dan industri/masyarakat pengguna melalui antara lain pembangunan infrastruktur komunikasi modern, institusi finansial, serta otoritas publik yang memfasilitasi struktur jaringan yang mendorong interaksi kreatif dan lingkungan yang atraktif bagi para pekerja pengetahuan (*knowledge workers*).
3. Penataan kelembagaan iptek dengan menekankan pada pematangan rencana pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian riset dan teknologi serta lembaga-lembaga penelitian non-kementerian.

Kedua: Peningkatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek (P3 Iptek) diarahkan pada peningkatan relevansi antara kegiatan iptek dengan kebutuhan masyarakat sehingga terbangun hubungan yang makin intens dan berkualitas. Di samping itu, kualitas pelaksanaan riset akan terus ditingkatkan. Arah ini berlaku untuk semua klaster puslitbang yang menjadi fokus prioritas ini, sehingga fokus-fokus dari prioritas ini diberi penekanan yang sama. Adapun klaster yang dimaksud (fokus-fokus) yang diatur dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Biologi molekuler, bioteknologi, dan kedokteran;
2. Ilmu pengetahuan alam;

3. Energi, energi baru dan terbarukan;
4. Material industri dan material maju;
5. Industri, rancang bangun, dan rekayasa;
6. Informatika dan komunikasi;
7. Ilmu kebumihan dan perubahan iklim;
8. Ilmu pengetahuan sosial dan kemasyarakatan;
9. Ketenaganukliran dan pengawasannya; dan
10. Penerbangan dan antariksa.

BAB 5 BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Pembangunan infrastruktur tahun 2013 diarahkan pada percepatan penyelesaian konektivitas nasional (*national connectivity*) dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan dan disparitas larga antarwilayah, agar tercipta pertumbuhan dan pemerataan. Hal tersebut diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana penghubung antar dan menuju koridor ekonomi dan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi, serta memperluas jangkauan pelayanan infrastruktur ke daerah marginal dan infrastruktur *broadband*.

Sejalan dengan kebijakan di atas, untuk meningkatkan kinerja infrastruktur, diperlukan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun melalui identifikasi *bottlenecking* yang terjadi pada sistem infrastruktur yang telah dioperasikan. Semua peraturan dan perundangan yang mengatur pembangunan infrastruktur yang dianggap menghambat, dijadikan target untuk dicarikan pemecahan masalahnya.

Sejak tahun 2012, telah dilakukan upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan mengacu kepada Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang terkonsentrasi kepada konektivitas, sumber daya manusia dan IITEK, serta regulasi. Ketiga pilar tersebut disinergikan pembangunannya sehingga diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional sekaligus. Disamping meningkatkan kinerja konektivitas nasional, Pemerintah juga sedang melakukan koordinasi perencanaan inter-regional dengan negara tetangga dengan membuat perencanaan terpadu dalam kerangka kerjasama ASEAN melalui "Asean Connectivity" yang memprioritaskan pembangunan konektivitas antarnegara, institusi, sumber daya manusia dan pariwisata.

Arah pembangunan tahun 2013 juga memberi prioritas pembangunan infrastruktur di kota-kota besar melalui pembenahan sistem transportasi umum perkotaan serta infrastruktur di lingkungan pemukiman masyarakat dan juga di daerah perdesaan melalui pembangunan akses transportasi

dan penyediaan air bersih. Dengan prioritas tersebut diharapkan pola distribusi komoditi daerah dapat menunjang pertumbuhan ekonomi regional di daerah yang bersangkutan, serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kerangka pikir kebijakan pembangunan infrastruktur tahun 2013 seperti pada gambar 5.1 berikut ini :

GAMBAR 5.1
KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BIDANG SARANA DAN PRASARANA



5.2 Kondisi Umum

Prioritas pembangunan infrastruktur dalam mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat adalah melalui penjaminan ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan serta penjaminan kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

Dalam upaya untuk **menjamin ketersediaan infrastruktur dasar** salah satu prioritasnya adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan target utama adalah untuk mendukung pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs). Beberapa capaian selama tahun 2011 antara lain telah dibangun 65 *Twin Blok* (TB) rumah susun sederhana sewa (rusunawa); fasilitasi pembangunan rumah swadaya sebanyak 12.353 unit; fasilitasi

peningkatan kualitas perumahan swadaya sebanyak 35.738 unit; penataan lingkungan permukiman kumuh sebanyak 69 IIa dan 221 kawasan; fasilitasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas di kawasan perumahan yang melayani 97.973 unit dan rumah swadaya bagi 35.658 unit; penyaluran FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan) untuk 109.614 unit; peningkatan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial di 237 kawasan; serta peningkatan kualitas kawasan di 88 kabupaten/kota. Pemerintah juga telah menyediakan rumah murah dan rumah sangat murah sebanyak 53.141 unit dan penanganan rumah sejumlah 7.120 unit bagi warga baru di perbatasan NTT – Timor Leste.

Selain pembangunan listrik, peningkatan penyediaan infrastruktur dasar juga dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan air minum dan sanitasi yaitu penyusunan strategi sanitasi kota di 124 kab/kota; dan rencana strategis air minum dan penyehatan lingkungan di 113 kab/kota. Terkait dengan penguatan kelerabagaan, telah terbentuk kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan di 19 provinsi dan 140 kab/kota dan pokja perumahan dan kawasan permukiman di 25 provinsi.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan air baku industri telah pula dilakukan pembangunan sarana-prasarana dasar air baku dengan kapasitas sebesar 8,60 m³/detik, diantaranya di Pidie, Palangkaraya, Palingkan-Kapuas, dan Piloliyanga-Gorontalo. Upaya tersebut terus ditingkatkan pada tahun 2012 melalui pembangunan sarana/prasarana air baku untuk meningkatkan kapasitas debit air baku sebesar 14,66 m³/det antara lain air baku Teluk Lerong-Samarinda, Telagawaja-Bali, Tasikmalaya, Maron-Pacitan, lanjutan Palingkan, Manokwari, dan air baku regional Brogas (Krebek-Tegal-Selawi).

Dalam upaya untuk menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa serta informasi guna **meningkatkan daya saing sektor riil**, selama tahun 2011 pembangunan infrastruktur terus didorong melalui upaya percepatan dan perluasan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang ada. Dalam rangka mempertahankan kualitas pelayanan transportasi serta distribusi barang dan jasa, telah dilakukan preservasi jalan nasional sepanjang 36.347 Km dan jembatan sepanjang 215.638 m, peningkatan kapasitas jalan (pelebaran) sepanjang 3.160 km dan jembatan sepanjang 8.180 m. Upaya tersebut sekaligus juga untuk mendukung peningkatan

konektivitas yang didukung oleh pelayanan prasarana transportasi secara intermoda dan antarpulau terutama melalui pembangunan dermaga penyeberangan baru sebanyak 15 unit, dermaga penyeberangan lanjutan 38 unit dan dermaga penyeberangan yang telah selesai pembangunannya 11 unit yang tersebar di 12 lokasi. Disamping itu, untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor dan impor, pemerintah melaksanakan pembangunan dan pengeribangan *National Single Window (NSW)* serta telah dilaksanakan pembangunan pelabuhan baru di 18 lokasi dan pembangunan pelabuhan lanjutan sebanyak 133 pelabuhan, serta terdapat 7 pelabuhan strategis yang telah dibangun, antara lain Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Kariangau, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Temate dan Pelabuhan Arar (Sorong).

Untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa dalam sistem logistik nasional, maka pembangunan infrastruktur perkeretaapian, selama tahun 2011 telah didorong untuk meningkatkan pangsa angkutan barang terutama guna mendukung sistem logistik di Pulau Jawa dan Sumatera. Upaya tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kelancaran dan kapasitas angkutan KA terutama yang menghubungkan pusat-pusat produksi dan pasar atau pelabuhan. Untuk itu telah dilakukan penataan kawasan jalur KA pada lintas Jakarta Kota – Tanjung Priok dan Tanjung Priok – Pasar Senen; rehabilitasi dan peningkatan jalur KA sepanjang 292,4 Km; serta pembangunan jalur KA baru termasuk Jalur Ganda sepanjang 140,98 km, diantaranya adalah untuk lintas Cirebon – Kroya antara Prepuk – Paluguran (19,7 Km), lintas Bojonegara – Sh.Pasarturi Segmen Lamongan – Duduk (13,9 Km), Lintas Serpong – Maja (4,05 Km), dan Lintas Serpong – Parungpanjang (11,75 Km); serta peningkatan kapasitas lintas dan kualitas persinyalan KA lintas Medan – Belawan.

Sementara itu, dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan sistem transportasi umum massal untuk masyarakat di perkotaan, telah mulai dilakukan penataan sistem transportasi perkotaan, diantaranya pengembangan sistem transportasi massal berbasis bus (*Bus Rapid Transit/BRT*) di 13 lokasi, yaitu Bogor, Yogyakarta, Pekanbaru, Manado, Palembang, Gorontalo, Batam, Semarang, Bandung, Solo, Tangerang, Ambon dan Denpasar. Pemerintah juga telah mulai melakukan penataan dan peningkatan pelayanan jalur kereta api untuk mendukung kelancaran akses bandara

Sukarno-Hatta, dengan diterbitkannya Ppres No.83 Tahun 2011 tentang penugasan PT. KAI untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana KA Bandar Udara Soetta dan jalur Lingkar Jakarta-Rogor-Depok-Tangerang-Bekasi, serta melakukan elektrifikasi jalur KA eksisting Serpong - Parungpanjang sepanjang 11,7 km.

Untuk meningkatkan pelayanan akibat pertumbuhan ekonomi nasional dan juga untuk mendukung pemerintah dalam peningkatan daya saing nasional, maka peran pelayanan transportasi udara sangat diperlukan terutama dalam mendukung mobilitas yang semakin cepat dan aman. Untuk itu, telah dilaksanakan pembangunan dan pengembangan bandar udara (bandara) strategis, yaitu Bandara Juanda (Surabaya), Bandara Hasanudin (Makassar), Pembangunan Bandara Kuala Namu (Medan Baru), Bandara Samarinda Baru, Bandara Internasional Lombok yang telah beroperasi pada 1 Oktober 2011, serta pengadaan 459 unit peralatan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan dan rehabilitasi 16 unit peralatan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan untuk meningkatkan keselamatan transportasi udara. Disamping itu telah dilakukan percepatan pelaksanaan pembangunan bandara baru di 24 lokasi, yang meliputi: Bandara Muara Bungo (Jambi), Muara Teweh Baru (Kalteng), Morowali (Sulteng), Tojo Una Una (Sulteng), Bone (Sulsel), Saumlaki Baru (Maluku), Tual Baru (Iria, Maluku), Surabaya II (Mbay, NTT), Miangas (Sulawesi Utara), Tebelian (Kalimantan Barat), Mna (Maluku), Werur (Papua Barat), Kuffar (Seram Bagian Timur), Namniwel (Maluku), Waisai Raja Empat (Papua Barat), Enggano (Bengkulu), Sumarorong Tahap II (Macnasa), Sinak Baru (Papua), Waghete Baru (Papua), Kamanap Baru (Papua), Purukcahu (Kalimantan Barat), Pekouserai (Lampung Barat), Bawean (Jawa Timur), dan Bandara Buntu Kunik (Sulsel).

Pembangunan komunikasi dan informatika dilaksanakan dalam upaya untuk mendorong pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika yang modern, serta menyediakan informasi dan layanan publik secara daring (online). Selama tahun 2011 telah dicapai: (i) Nusantara Internet Exchange (NIX) di Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Makassar yang sudah mencapai 100 persen, dan Jayapura dan Ternate yang dalam tahap penyelesaian, serta 64 Desa Informasi sehingga total menjadi 80 Desa Informasi; (ii) layanan *broadband* di 328 kabupaten/kota (66 persen dari

total kabupaten/kota) oleh PT Telkom; (iii) siaran televisi digital TVRI di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Batam; (iv) jasa akses internet melalui *community access point* di 165 kecamatan di Lampung, Jawa Barat, dan Banten dari total target 222 kecamatan; (v) indeks *e-government* nasional baru 2,3 dari skala 4,0.

Pada tahun 2012, diperkirakan dapat dicapai: (i) NIX di 8 kota propinsi sehingga total menjadi 16 kota, serta 120 Desa Informasi sehingga total menjadi 200 Desa Informasi; (ii) peraturan tentang pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT) Fund untuk pembangunan proyek Palapa Ring serta pelelangan proyek; (iii) layanan broadband di 379 kabupaten/kota (76 persen dari total kabupaten/kota) oleh PT Telkom; (iv) Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing sebagai penyelenggara infrastruktur TV digital yang dipilih melalui pelelangan; (v) Rencana Induk (Master Plan) *e-Government* Nasional; (vi) sistem e-pendidikan di 500 sekolah di provinsi DIY; serta (vii) indeks *e-government* nasional mencapai 2,5 dari skala 4,0.

Dalam rangka untuk mendukung perluasan pelayanan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah, diperlukan penyediaan jaringan infrastruktur di wilayah marginal melalui pembangunan transportasi yang meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan, pembangunan infrastruktur jalan di wilayah terpencil, perbatasan dan pedalaman sepanjang 294 Km, penyediaan subsidi operasi angkutan jalan perintis pada 157 trayek di 25 provinsi; serta penyelesaian pembangunan 17 kapal perintis dan kapal kerja yang melayani 21 lintasan. Disamping itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan layanan komunikasi dan informatika untuk mengurangi wilayah-wilayah *blank spot* layanan informasi. Capaian dari upaya tersebut antara lain: (i) layanan *pos Public Service Obligation* (PSO) di 2.363 Kantor Pos Cabang Luar Kota (KPCLK); (ii) layanan Program *Universal Service Obligation* (USO) yang terdiri dari jasa akses telekomunikasi di 30.413 desa (91,7 persen dari target Desa Berdering) dan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di 5.706 desa ibukota kecamatan (99,3 persen dari target PLIK). Pada tahun 2012 diperkirakan dapat dicapai layanan pos PSO di 2.515 KPCLK; layanan Program USO yang meliputi jasa akses telekomunikasi dan internet masing-masing di 33.186 desa (Desa Berdering) dan 5.748 desa ibukota kecamatan atau

keduanya mencapai 100 persen dari target.

Sedangkan untuk mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan dan upaya pencapaian surplus beras hingga 10 juta ton pada tahun 2014, selama tahun 2011 pembangunan infrastruktur irigasi dan rawa diwujudkan melalui: (i) peningkatan luas layanan area jaringan irigasi seluas 66.25 ribu hektar diantaranya di Lubuk Buaya, Kemering, Sei Sulak Beras, Toromo, Sangkub Kanan, dan Way Geren; dan (ii) mengembalikan fungsi dan kapasitas jaringan irigasi melalui rehabilitasi 204,13 ribu hektar jaringan irigasi; diantaranya di Way Seputih, Alabio, dan Way Apu. Upaya peningkatan kelestarian dan ketersediaan air juga terus dilakukan melalui kegiatan pembangunan 105 embung dan 8 waduk yaitu: Rajui (Aceh), Jatigede (Jabar), Jatibarang, Bendo (Jateng), Rajulmati (Jatin), Marangkayu (Kaltim), Titab (Bali), dan Pandanduri (NTB). Selain itu pada tahun 2011 telah diselesaikan dan difungsikannya Waduk Gonggang dengan tampungan 2,2 juta m³ di Jawa Timur. Diperkirakan pada tahun 2012 dapat dicapai perombangan/peningkatan jaringan irigasi seluas 82,64 ribu hektar diantaranya di Daerah irigasi (D.I) Batang Anai, D.I Sulak Beras, D.I Lambadia, dan D.I Way Apu; dan rehabilitasi mencapai 353,9 ribu hektar terutama di D.I Toromo, D.I Sampean, D.I Kemering, dan D.I Alabio, serta melanjutkan pembangunan 8 waduk, dan memulai proses pembangunan waduk baru, yaitu diantaranya Waduk Karian (Banten) dan Waduk Trilib (Kalimantan Timur), pembangunan 191 buah embung baru dan rehabilitasi 25 buah waduk dan 79 buah embung untuk meningkatkan tampungan air.

Upaya tersebut juga didorong dengan serangkaian kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air melalui penerbitan Perpres 30/2011 tentang Kebijakan Nasional SDA dan PP 38/2011 tentang Sungai; telah diselesaikannya 8 Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan telah dilakukan pembentukan 25 Dewan Sumber Daya Air Propinsi. Pada tahun 2012 pelaksanaan Pengelolaan SDA masih akan terus ditingkatkan melalui: (i) peningkatan fungsi Dewan Sumber Daya Air Propinsi; (ii) penetapan 8 Pola SDA yang ditetapkan oleh Menteri PU melalui keputusan menteri; (iii) melanjutkan penyusunan rencana pengelolaan SDA; (iv) penyelesaian rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Danau, Rawa, dan Hak Guna Air.

Sejalan dengan prioritas **mitigasi bencana dan penanganan**

dampak perubahan iklim, untuk mengurangi dampak kerusakan akibat banjir, selama tahun 2011 telah dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 540 km meliputi beberapa kegiatan pokok, antara lain: (i) normalisasi dan pengerukan secara multiyears di WS Ciliwung dan Citarum; (ii) pembangunan Jabung Ring Dike Bengawan Solo, dan (iii) normalisasi Kali Garang Semarang. Disamping itu, juga dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengendali lahar/sedimen sebanyak 61 buah pada daerah-daerah rawan bencana.

Pada tahun 2012 upaya tersebut akan terus ditingkatkan melalui: (i) penyelesaian pembangunan Bendung Gatak/Bojonegoro Barrage sebagai salah satu instrumen pengendali banjir di Bengawan Solo Hilir, (ii) pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 426,9 km dan pembangunan dan rehabilitasi pengaman pantai sepanjang 72,28 km, dan (iii) pembangunan dan rehabilitasi pengendali lahar/sedimen gunung berapi sejumlah total 90 buah.

Dalam upaya penanggulangan luapan lumpur Sidoarjo, pada tahun 2011 telah dilakukan: (i) penyelesaian penyempurnaan tanggul Pejajaran, Besuki, Kedungcangkring dan tanggul Kebes [Kedungcangkring-Besuki] melalui pelebaran dan peninggian tanggul untuk meningkatkan kapasitas tampungan; (ii) pembayaran/pemberian Uang Ganti Rugi di peta terdampak 9 RT sebesar Rp. 52.683 Milyar dan penyaluran bantuan sosial sebesar 2,71 Triliun; (iii) fasilitasi penyelesaian jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan oleh PT Minarak Lapindo Jaya yang mencapai 75,56% atau sebesar Rp. 2,895 Triliun; (iv) pembayaran ganti rugi tanah untuk relokasi infrastruktur sebesar 89%; dan (v) diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 68 Tahun 2011 yang mengatur penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar Peta Area Terdampak (PAT) tanggal 22 Maret 2007.

Diharapkan pada tahun 2012 dapat dilaksanakan: (i) penyelesaian sisa 11 % pembebasan tanah untuk penyelesaian pelaksanaan relokasi infrastruktur (jalan arteri Siring-Porong); (ii) mendorong diselesaikannya jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan oleh PT MLJ di area kewenangannya sesuai Perpres 14/2007 (PAT 22 Maret 2007); (iii) penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan di wilayah 3 desa (Perpres 48/2008) dan 9 RT (Perpres 68/2011); (iv)

diterbitkannya Peraturan Kepala Atas Perpres No. 14 tahun 2007 yang diharapkan dapat mengatur penyelesaian jual beli tanah dan bangunan warga pada area terdampak di 65 RT.

Untuk mendukung **kemandirian energi** dan memenuhi pasokan listrik nasional, selama tahun 2011 telah dibangun pembangkit listrik sebesar 3.430 MW dengan total kapasitas pembangkit dapat ditingkatkan menjadi 37.353 MW dan jaringan transmisi tenaga listrik sepanjang 798,2 kms serta gardu induk sebesar 120 MVA. Disamping itu terjadi penambahan kapasitas panas bumi sebesar 37 MW, sehingga secara total, kapasitas terpasang pembangkit energi panas bumi menjadi 1.226 MW dan pembangunan jaringan distribusi sebesar 17.306, 53 kms dan gardu distribusi sebesar 369,6 MVA. Upaya tersebut menambah peningkatan rasio elektrifikasi menjadi sebesar 72,95 persen dan rasio listrik pedesaan menjadi 92,58 persen. Pemerintah juga telah melakukan pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga di 5 kota yaitu rumah susun Jabodetabek, Bontang, Sengkang, Sidoarjo (lanjutan) dan Bekasi (lanjutan) untuk 17.939 sambungan rumah dan pembangunan 4 SPBG dan 1 bengkel di kota Palembang.

Pada tahun 2012 pembangunan energi dan ketenagalistrikan diperkirakan dapat dicapai: (i) pengembangan Jaringan Distribusi Gas di 4 kota (Prabumulih, Bogor, Jambi, Cirebon) dan 1 kota Sidoarjo (lanjutan tahun sebelumnya), dengan 16.000 sambungan rumah; serta FRED dan DECD di 4 kota (Subang, Sorong, Lhokseumawe, Balikpapan); (ii) pembangunan infrastruktur BRG untuk transportasi (SPBG) di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo serta FEED Pembangunan SPBG di Balikpapan dan Cillegon; (iii) berkembangnya pemanfaatan potensi energi lokal dengan memanfaatkan EBT terutama di daerah pedesaan termasuk kegiatan diseminasi dan *capacity building* guna mendukung pelaksanaan Desa Mandiri Energi (DME); (iv) terlaksananya persiapan dan pengembangan infrastruktur gas untuk transportasi; (v) terlaksananya pengaturan BBM bersubsidi; (vi) meningkatnya rasio desa berlistrik menjadi sekitar 96,7 persen; (vii) meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi sebesar 75,9 persen.

Dalam rangka untuk **meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS)** dalam pembangunan infrastruktur, beberapa investasi proyek KPS telah digulirkan selama tahun 2012 dengan perkiraan total investasi mencapai 51 Milyar US Dollar atau sekitar Rp. 500 Triliun, diantaranya adalah proyek

jalan tol yang telah mulai dilakukan pembahasan lahannya untuk 6 ruas proyek jalan Tol, yaitu Balikpapan-Samarinda, Manado-Bitung, Pandaan-Malang, Pekanbaru-Kandis-Dumai, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, dan Soreang-Pasirkoja serta 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta yang sudah dalam proses transaksi. Selain itu, sebanyak 3 proyek Pelabuhan, di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang telah disiapkan dokumen pra-studi kelayakannya, serta 1 proyek yang telah masuk tahap pelelangan, yaitu Tanah Ampo Cruise Terminal, Karang Asem dengan total investasi sebesar Rp. 500,0 milyar. Di samping itu, terdapat 3 proyek bandara di Jawa dan Bali yang telah disiapkan dokumen pra-studi kelayakannya; dan terdapat 2 proyek terminal terpadu di Sumatera dan Jawa yang telah siapkan dokumen pra-studi kelayakannya. Untuk memperlancar akses ke Bandara Soekarno Hatta maka juga telah disiapkan pra-studi kelayakan yaitu pembangunan kereta api Bandara Soekarno-Hatta.

5.3 Permasalahan dan Sasaran

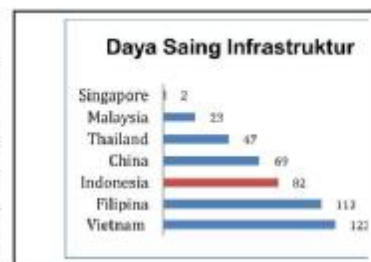
Pembangunan infrastruktur dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, masih dihadapkan pada kendala-kendala belum meratanya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan jasa sarana dan prasarana infrastruktur antardaerah, seperti listrik, transportasi yang terjangkau, telekomunikasi, irigasi, air baku, waste, serta perumahan dan permukiman yang memadai. Selubungan dengan penyediaan perumahan dan permukiman, kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR), belum dapat dipenuhi seluruhnya. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh: (i) terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap penguasaan dan legalitas lahan, (ii) terbatasnya akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan, (iii) belum optimalnya dan tersedianya kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, (iv) belum mantapnya pasar primer dan pembiayaan sekunder perumahan, (v) masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan, serta (vi) belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perumahan dan permukiman.

Di samping itu, pemenuhan terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak masih belum mampu menjangkau hingga seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil, perdesaan, perdalam dan wilayah terluar. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain: (i) aksesibilitas dan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi yang belum memadai; (ii)

perlu penyediaan lahan termasuk aspek legalitasnya oleh Pemerintah Daerah, terutama dalam pembangunan TPA; (iii) masih diperlukan peningkatan koordinasi dan penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah, terutama dalam pembangunan sarana air minum dan sanitasi yang berskala lintas wilayah; (iv) masih rendahnya optimasi kinerja sarana air minum dan sanitasi; (v) kurangnya sistem pengelolaan data untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan air minum dan sanitasi; serta (vi) belum optimalnya sinkronisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan pembangunan infrastruktur air baku di Indonesia yang tercermin dari minimnya akses masyarakat terhadap sistem air minum-air baku yang hanya sekitar 9%.

Pada sisi lain, rendahnya daya saing infrastruktur serta belum memadainya sistem logistik nasional memberikan kontribusi pada kurang lancarnya arus distribusi barang dalam menjangkau ke seluruh pelosok wilayah nusantara (*national connectivity*) dan dalam mendukung aktivitas ekspor-impor. Hal tersebut akibat dari belum memadainya jaringan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan menghubungkan lapisan wilayah serta terbatasnya infrastruktur *broadband* dan belum terhubungnya seluruh wilayah dalam jaringan *backbone* serat optik nasional. Kondisi tersebut memicu terjadinya disparitas harga dan kesenjangan antarwilayah serta menghambat terjadinya akselerasi pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan.

Pada tataran internasional, berdasarkan laporan *The Global Competitiveness 2011-2012*, daya saing infrastruktur Indonesia berada di peringkat 82 dari 142 negara yang dinilai. Dibanding dengan negara ASEAN



lainnya, Indonesia posisinya hanya lebih baik dari Filipina dan Vietnam. Laporan Bank Dunia juga menyebutkan bahwa kinerja logistik Indonesia yang diukur dari *Logistics Performance Index (LPI)* masih belum efisien. Posisi Indonesia masih jauh tertinggal dibanding China, Malaysia, bahkan Vietnam. Posisi Indonesia hanya lebih baik dibanding Laos, Kamboja, dan Myanmar.

Tidak efisiennya logistik Indonesia diindikasikan dengan tingginya biaya pengiriman ekspor Indonesia ke negara-negara Eropa serta biaya antarkontainer dari Cikarang, Jawa Barat ke Tanjung Priok saat ini mencapai US\$775, yang



lebih tinggi dari biaya Kuala Lumpur ke pelabuhan Port Klang yang hanya US\$400. Hal tersebut ditunjang dengan ukuran/kapasitas pelabuhan utama Indonesia di Tanjung Priok yang kurang memadai (*over capacity*). Kondisi ini mengakibatkan ekspor Indonesia harus mengirim ke Malaysia dan Singapura terlebih dahulu yang tentunya mengakibatkan adanya biaya tambahan. Hal tersebut menjadi tantangan yang serius bagi pemerintah dalam upaya *bottlenecking* melalui reformasi kebijakan dan regulasi, serta dalam upaya untuk pengembangan konektivitas yang terintegrasi dengan kebutuhan industri dan pembaugunan proyek *bottlenecking*.

Permasalahan infrastruktur lainnya adalah meningkatnya resiko kejadian banjir/rob di daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman dan industri, harus mampu diantisipasi dan diupayakan pemecalaannya secara maksimal, baik dari sisi sistem drainase makro dan mikro, tata guna lahan maupun faktor *land subsidence*, terutama di daerah-daerah pantai dengan volume pengambilan air tanah yang cukup tinggi seperti DKI Jakarta dan Semarang.

Permasalahan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi adalah: (a) aktivitas rehabilitasi jaringan irigasi belum mampu mengimbangi degradasi kondisi jaringan yang mencapai 340 ribu ha/tahun, (b) terbatasnya ketersediaan sumber daya lahan untuk irigasi baru, (c) terbatasnya kemampuan finansial dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya, dan (d) tingginya laju konversi lahan pertanian menjadi lahan perkotaan dan Industri serta perkebunan terutama di Pulau Jawa dan Sumatera.

Untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi di seluruh wilayah Indonesia, sistem ketenagalistrikan nasional juga masih mempunyai kendala belum mampu memberikan

pelayanan memadai dan menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah terpencil dan perdataraan. Tingkat elektrifikasi nasional baru mencapai 72,95 persen dengan rasio jumlah desa berlistrik baru mencapai 92,58 %. Kendala lain yang masih dihadapi diantaranya adalah : (i) reformasi birokrasi; (ii) bauran energi (*energy mix*) yang belum optimal; (iii) terbatasnya pasokan energi (jumlah, kualitas, dan keandalan); (iv) dominasi asing atas teknologi dan pendanaan; (v) regulasi yang masih perlu disempurnakan diikuti dengan konsistensi kebijakan; (vi) kebijakan harga (*pricing policy*) masih belum tepat; (vii) efisiensi dan konservasi energi masih belum berjalan dengan baik; dan (viii) kurangnya partisipasi pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan energi.

Dalam rangka penanggulangan Lumpur Sidoarjo, penuntasan jual beli tanah dan bangunan warga yang menjadi tanggung jawab APBN masih terkendala rendahnya kecepatan pembayaran jual beli tanah dan bangunan warga di wilayah PAT 22 Maret 2007 oleh PT. MLJ. Selain itu, belum terbitnya perubahan keempat Perpres 14/2007 dikhawatirkan akan memicu gejolak sosial yang tidak jarang mengganggu upaya penanganan Lumpur Sidoarjo oleh warga yang berharap wilayahnya segera ditetapkan sebagai area terdampak baru.

Permasalahan dan tantangan terkait dengan penyediaan infrastruktur melalui skema (KPS) antara lain: (i) masih adanya keengganan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk memasukkan anggaran penyiapan dan transaksi proyek KPS ke dalam pagu anggarannya masing-masing, tetapi masih mengharapkan *on-top* dari pagu anggaran yang sudah ada atau dari PHLA maupun badan usaha lain, seperti melalui Bantuan PDP IRSDP Bappenas dan PT. Sarana Multi Infrastruktur; (ii) masih rendahnya komitmen PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama) dalam melakukan KPS dimana dalam perkembangan penyiapan dan transaksi, ada beberapa PJPK yang mengalihkan Proyek KPS-nya ke Proyek Pemerintah melalui APBN dan PHLN serta melalui penugasan kepada BUMN; (iii) proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan melalui skema KPS merupakan proyek yang bukan prioritas sehingga proyek tersebut memiliki kelayakan keuangan yang rendah; serta (iv) masih banyak PJPK potensial yang belum tersosialisasikan tentang KPS sehingga pemahaman mengenai pelaksanaan proyek KPS masih sangat rendah.

Memperhatikan kondisi di atas, pada tahun 2013 sasaran umum pembangunan infrastruktur adalah : (i) meningkatkan

kapasitas, kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan yang difokuskan penyediaannya di Indonesia bagian timur dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; (ii) percepatan pembangunan infrastruktur irigasi dan waduk dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional; (iii) percepatan penyediaan air baku; (iv) penanggulangan banjir pada daerah pusat pertumbuhan ekonomi; (v) pemulihan dan penanggulangan daerah rawan bencana; (vi) meningkatkan keterhubungan antarwilayah (*national connectivity*) dalam mendukung pengembangan 6 koridor ekonomi nasional; (vii) memperkuat *virtual domestic interconnectivity (Indonesia connected)*; (viii) meningkatkan akses bagi rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, terjangkau dan dihidangi oleh prasarana dan sarana dasar serta utilitas yang memadai; (ix) meningkatkan ketahanan energi yang ditunjang dengan penyediaan listrik; (x) peningkatan mutu konstruksi infrastruktur dalam memenuhi rancangan usia guna/usia pelayanannya; (xi) mempercepat upaya penanggulangan luapan lumpur Sidoarjo baik dari sisi penanganan luapan lumpur, penyelesaian masalah sosial dan penuntasan relokasi infrastruktur; serta (xii) mempercepat pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS).

Secara lebih terinci sasaran pembangunan infrastruktur tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2013
Sumber Daya Air		
1.	Meningkatnya kapasitas layanan air baku untuk keperluan domestik dan industri terutama di daerah-daerah pusat pertumbuhan MP3I, dan berkurangnya potensi krisis air jangka pendek di wilayah kepulauan kecil dan kantong-kantong kekeringan	a. Peningkatan kapasitas penyediaan air baku secara nasional sebesar 10,97 m ³ /detik diantaranya : air baku BREGAS, air baku Metam Rah Tahana, air baku Malilir, Kab Tanah Toraja, air baku Kab Marokwari. b. Pembangunan tampungan air baku Galang Batang di Pulau Bintan c. Percepatan persiapan pembangunan water conveyance Jatiluhur, Karian, Wilayah Bandung, Semarang dan Cilegon. d. Pembangunan Jaringan Irigasi Pompa Air Tanah di Jawa Barat, NAD, Kalimantan Barat, dan NTT.
2.	Meningkatnya luas lahan beririgasi dan kehandalan layanan jaringan	a. Peningkatan luas lahan beririgasi teknis seluas 107 Ribu Ha , antara lain Daerah Irigasi (DI)

No	Sasaran	Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2013
	irigasi, serta meningkatnya kerjasama Pusat dan Daerah dalam pengelolaan jaringan irigasi	<p>a. Pengembangan di Jabar, DI Lampung di Sumsel, dan DI Amanit di Kalsel dan DI Srdang di Sulsel.</p> <p>b. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 370 ribu Ha antara lain: DI Sei Ulu di Sumut, DI Cikung Kanar di Sumsel, DI Jatiluhur di Jabar, DI Coto di Jateng, DI Majo di Sulsel, DI Para di NTB, dan pengembangan infrastruktur irigasi di Pulau Buru dan Seram Timur Maluku serta Modernisasi sistem irigasi, antara lain DI Rentang dan DI Jatiluhur</p> <p>c. Rehabilitasi daerah rawa, antara lain Daerah Rawa (DR) Sei Kuala di Sumut, DR Nipah Panjang di Jambi, DR Mesuji Tulang Bawang di Lampung, DR Alabio di Kalsel.</p> <p>d. Rehabilitasi daerah rawa eze PUG Kalimantan Tengah</p> <p>e. Tersesannya NSPM dan pilot project kerjasama pusat dan daerah dalam pengelolaan irigasi.</p>
3.	Memurahnya tingkat kerawanan banjir akibat hujan sungai dan/atau pasang surut terutama di kota-kota besar dan pusat pertumbuhan MP3BI dan penurasan penangan resiko banjir lahar dan sedimen di Gunung Merapi dan Bawakareng	<p>a. Penyelesaian pembangunan Bendung Gerak/Bojonegoro Barrage sebagai salah satu instrumen pengendali banjir di Bengawan Solo Hilir;</p> <p>b. Pembangunan dan rehabilitasi 407 km sarana/prasarana pengendali banjir, serta 27 km pengaman pantai.</p> <p>c. Penanganan banjir secara terpadu sungai-sungai strategis, antara lain Sungai Citaram, Bengawan Solo, Brantas, Citanduy, Sungai Pesanggrahan, Angke dan Santer</p> <p>d. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir di DAS Bengawan Solo, antara lain Jabung Ring Dike, dan Bendung Gerak Nemayat di Lamongan</p> <p>e. Review Master Plan, Studi Kelayakan, dan DED pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Kota-kota besar dan strategis, antara lain Banda Aceh, Meulaboh, Medan, Pekanbaru, Dumai, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Tangerang, Surabaya, Ambon, Mataram, Kupang, dan Pontianak</p> <p>f. Pembangunan Sabo Dam Merapi dan Bawakareng</p>
4.	Meningkatnya kapasitas tampung air per kapita sebagai sumber air	<p>a. Lanjutan Pembangunan waduk, (Waduk Jatigede, Waduk Pandanduri, Waduk Jatubarang, Waduk</p>

No	Sasaran	Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2013
	utama irigasi, air baku, pengendali banjir dan penyediaan energi hijau.	Bajulmati, Waduk Maranggayu, Waduk Rajai, Waduk Titah, Waduk Bendu, Awa, konstruksi Waduk Karian dan Waduk Tritih, serta persiapan pembangunan Waduk Pabeloreng.
5	Meningkatnya kapasitas institusi dan tata laksana pengelolaan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> a. Penuntasan Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi b. Pembentukan kelembagaan penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air c. Percepatan pembentukan PPS pada setiap Wilayah Sungai d. Menentukan zona imbuan dan pengambilan air tanah sebagai dasar penyusunan tata ruang e. Penetapan standar layanan minimal kebutuhan pokok air sehari-hari secara nasional f. Percepatan penyelesaian Rencana Pengelolaan SDA wilayah sungai
6	Penanggulangan luapan Lumpur Sidoarjo dengan penyelesaian permasalahan sosial masyarakat secara komprehensif serta percepatan relokasi infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> a. Penuntasan penbebasan tanah pada wilayah 65 RI yang nantinya akan diatur dalam revisi Perpres pada tahun 2012 b. Pembangunan frontage relokasi jalan arteri dan relokasi pipa PDAM Kota Surabaya

Transportasi

1	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi <i>bottleneck</i> maupun <i>bottleneck</i> kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antar moda dan antarpoluas yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda	<ul style="list-style-type: none"> a. kondisi mantap jalan nasional menjadi 92,5 persen; b. bertambahnya jumlah jalur-Km jalan menjadi sebanyak 101.671 Km pada jalan nasional; c. Terpenutupinya implementasi asas taboage untuk angkutan laut domestik menjadi 100 persen; d. pangsa angkutan KA barang menjadi 3 persen dan angkutan penumpang 11 persen melalui jalur ganda kereta api Lintas Semarang-Surabaya; e. pertumbuhan penumpang angkutan udara dalam negeri menjadi 11,5 persen/tahun dan angkutan udara luar negeri menjadi 13,0 persen/tahun;
2	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. terbangunnya sistem jaringan transportasi perkotaan dan perdesaan di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan dan pulau terdepan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang juga didorong melalui transportasi perintis dan DAK bidang transportasi perdesaan; b. meningkatnya pelayanan perintis untuk wilayah

No	Sasaran	Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2013
		<p>terlinggal, terpeleceh, perbatasan, terisolir, dan pelayanan transportasi bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui skema PSO;</p> <p>c. meningkatnya keterjangkauan terhadap jasa transportasi bagi golongan masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, berpendapatan rendah, dan lanjut usia.</p>
3	Meningkatnya keselamatan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi.	Menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas sampai dengan tahun 2015 sebesar 20 % persen dari kondisi eksisting tahun 2010
4	Restrukturisasi kelembagaan	Selesainya peraturan luranan dari undang-undang bidang transportasi
5	Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada transportasi	<p>a. berlakurnya emisi kendaraan bermotor;</p> <p>b. terbangunnya pelabuhan dan bandar udara yang ramah lingkungan (<i>eco port dan eco airport</i>);</p> <p>c. terbangunnya transportasi umum massal berbasis bus di perkotaan;</p> <p>d. penggunaan energi yang ramah lingkungan.</p>
Perumahan dan Permukiman		
	Meningkatkan akses bagi rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, terjangkau dan didukung oleh prasarana dan sarana dasar serta utilitas yang memadai	<p>a. Tersedianya akses bagi masyarakat terhadap perumahan, baik perumahan baru maupun peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman serta kepastian hukum bagi 4,5 juta rumah tangga;</p> <p>b. Peningkatan pelayanan air minum melalui penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang dapat melayani hingga 65,5 persen penduduk perkotaan dan pedesaan di akhir tahun 2013.</p> <p>c. Terciptanya kondisi stop buang air besar sembarangan di 90,2 persen masyarakat melalui penyediaan infrastruktur air limbah yang mencakup 58,6 persen penduduk di akhir tahun 2013.</p> <p>d. Terlayannya 70% masyarakat perkotaan terhadap layanan pengelolaan persampahan</p> <p>e. Berkurangnya genangan di kawasan strategis perkotaan di 65 kota yang sudah memiliki strategi pembangunan sanitasi kota.</p>

No	Sasaran	Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2013
Energi dan Ketenagalistrikan		
1.	Tercapainya komposisi bauran energi yang sesuai dengan menurunnya persentase pemanfaatan energi fosil dan meningkatnya persentase energi baru terbarukan (EBT) serta meningkatnya efisiensi pemanfaatan energi	<p>a. Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional sebesar 20 persen.</p> <p>b. Paragra energi primer pembangkitan menjadi : Batubara 50 persen, BBM 10 persen, Panas Bumi 2 persen, Gas Bumi 30 persen, EBT 7 persen.</p>
2.	Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan kebijakan bidang pemanfaatan energi baru terbarukan, pengembangan konservasi dan efisiensi energi serta ketenagalistrikan	Tersusunnya regulasi dan kebijakan pemanfaatan energi baru terbarukan serta pengembangan konservasi dan efisiensi energi serta ketenagalistrikan.
3.	Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana energi nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik dan komitmen ekspor	<p>a. Tercapainya pembangunan jaringan gas kota untuk 16.000 sambungan rumah.</p> <p>b. Dimulainya pelaksanaan FEED dan DECD di beberapa kota.</p> <p>c. SPBG di seherapakota</p> <p>d. Tercapainya penambahan kapasitas pemangkit listrik sebesar 3.000 MW beserta jaringan transmisi dan distribusinya.</p>
4.	Peningkatan jangkauan pelayanan setenagalistrikan	<p>a. Rasio elektrifikasi meningkat menjadi 77,6 persen di tahun 2013</p> <p>b. Meningkatnya rasio desa berlistrik menjadi 97,8 persen di tahun 2013</p> <p>c. Terlaksananya perbarugunan listrik murah dan bermut baik dari sisi pasokan maupun sisi permintaan.</p>
5.	Peningkatan efektifitas subsidi penerima	Terlaksananya subsidi yang tepat sasaran pada yang berhak menerima (<i>beneficiaries</i>)
6.	Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan sumberdaya manusia nasional yang mendukung industri energi dan ketenagalistrikan nasional	<p>a. Meningkatnya sertifikasi kompetensi bidang energi dan ketenagalistrikan</p> <p>b. Meningkatnya Tingkat Komponen Dalam Negeri sesuai peraturan yang ada</p>
Komunikasi dan Informatika		
1.	Tersedianya infrastruktur dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa,	<p>a. Jangkauan layanan pos universal mencapai 100 persen di wilayah PSO;</p> <p>b. Jangkauan layanan akses telekomunikasi</p>

No	Sasaran	Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2013
	daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk menggarangi daerah <i>blank spot</i>	universal dan akses internet mencapai 100 persen di wilayah USO; a. Jangauan siaran TVRI dan RRI terhadap populasi masing-masing mencapai 60 persen dan 70 persen.
2.	Tersedianya akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern	a. Tingkat penetrasi pengguna internet sekurang-kurangnya 40 persen; b. Tingkat penetrasi pengguna layanan <i>broadband</i> sekurang-kurangnya 20 persen; c. Tingkat penetrasi siaran TV digital terhadap populasi sekurang-kurangnya 27 persen; d. Persentase jumlah ibukota kabupaten/kota yang dilayani jaringan <i>broadband</i> mencapai 83 persen dari total ibukota kabupaten/kota. a. Persentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan <i>backbone</i> serat optik nasional 98 persen
3.	Tercapainya tingkat e-literasi masyarakat Indonesia	Tingkat e-literasi 40 persen.
4.	Tersedianya informasi dan layanan publik yang dapat diakses secara online	Nilai rata-rata <i>e-government</i> instansi pemerintah sekurang-kurangnya 2,7.
5.	Berkembangnya industri (manufaktur) penunjang TIK	a. Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi dalam negeri mencapai 20 persen; b. Persentase TADN set <i>top box</i> TV digital sekurang-kurangnya mencapai 30 persen.
Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta		
1.	Integrasi KPS dalam penyusunan RKP dan blue book	a. Terintegrasinya proses penyusunan PPT Book dengan proses RKP dan Blue Book.
2.	Tersedianya Dana untuk Dukungan Pemerintah dan Penyiapan serta Transaksi Proyek KPS	1. Tersedianya dana pengadaan lahan dan dana dukungan sebagian transaksi; 2. Terakomodasinya anggaran penyiapan dan transaksi untuk proyek KPS.
3.	Meningkatnya kapasitas kemampuan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)	Terlaksananya <i>capacity building</i> di 3 wilayah Indonesia

No	Sasaran	Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2013
4.	Pengeluaran Kerangka Hukum KPS	Terselesaikannya harmonisasi aturan terkait pelaksanaan proyek KPS dan selesainya Perpres turunan UU Pengadaan Tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

5.4 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2013

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah 2010-2014 dan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2013, maka arah kebijakan pembangunan infrastruktur difokuskan pada: (i) Meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (ii) Mendukung peningkatan daya saing sektor riil; (iii) Meningkatkan keselamatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan sarana dan prasarana transportasi; dan (iv) Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Pencapaian fokus prioritas tersebut didukung melalui peningkatan peran lembaga penelitian, lembaga pengawasan dan pembinaan mutu konstruksi, serta lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang infrastruktur.

Berdasarkan fokus prioritas tersebut arah kebijakan pembangunan tahun 2013 dikelompokkan berdasarkan isu-isu strategis pembangunan sebagai berikut : (i) Peningkatan konektivitas untuk menunjang pertumbuhan dan pemerataan (*national connectivity*); (ii) Peningkatan keselamatan transportasi sebagai pengimplementasian dari Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) 2011 - 2035; (iii) Pengembangan transportasi di Kota Metropolitan; (iv) Penyediaan infrastruktur sumber daya air (SDA) untuk peningkatan ketahanan dan ketersediaan air; (v) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman, sanitasi serta penyehatan lingkungan; dan (vi) Percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).

Dalam rangka **meningkatkan konektivitas untuk menunjang pertumbuhan dan pemerataan (*national connectivity*)**, arah kebijakan yang dilakukan meliputi :

1. Pembangunan sarana dan prasarana penghubung antar dan menuju koridor ekonomi dan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi (jalan, pelabuhan, bandar udara) untuk mendukung kelancaran distribusi bahan pokok

kebutuhan masyarakat dan kemandirian strategis lainnya dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian nasional dari dampak resesi global.

2. Memperluas jangkauan pelayanan infrastruktur ke daerah marginal dengan penyediaan angkutan umum murah, penyediaan aksesibilitas dan kegiatan keperintisan baik transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara.
3. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi *backlog* maupun *bottlenecking* kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multinoda.
4. Peningkatan konektivitas nasional sektor komunikasi dan informatika untuk dapat mengurangi wilayah *blank spot* dan menciptakan infrastruktur komunikasi dan informatika yang berdaya saing melalui pengembangan infrastruktur *broadband* dan televisi digital, serta pengembangan *e-government* untuk menyediakan informasi publik secara *online* dan memperkuat sistem *back office* pemerintah.
5. Penuntasan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap I dan dimulainya beberapa proyek pembangkit listrik 10.000 MW tahap II berikut jaringan transmisinya sehingga dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi.
6. Peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui peningkatan kapasitas, kehandalan dan efisiensi infrastruktur sistem penyediaan bahan bakar dan bahan baku industri.
7. Pengembangan energi terbarukan (EBT) lainnya yaitu bio-energi, dan aneka energi baru terbarukan, seperti biomassa, tenaga surya, tenaga angin, tenaga nuklir, dan tenaga hidrogen.
8. Pengembangan konservasi energi untuk dapat mewujudkan efisiensi energi dan penerapan teknologi energi bersih.
9. Pengembangan listrik murah dan hemat dengan meningkatkan pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik, pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik, dan mutu usaha penyediaan tenaga listrik.

Dalam rangka peningkatan daya saing dan SPM, perlu ditingkatkan pelayanan sistem transportasi nasional antara lain dengan **meningkatkan keselamatan** transportasi yang

dilakukan melalui **pengimplementasian RINK 2011 – 2015**. Beberapa arah kebijakan yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut meliputi:

1. Mewujudkan pengarusutamaan keselamatan jalan sebagai prioritas nasional.
2. Penyediaan infrastruktur jalan yang berkeselamatan dengan melakukan perbaikan pada tahap perencanaan, desain, konstruksi dan operasional jalan, sehingga infrastruktur jalan yang disediakan mampu mereduksi dan mengakomodir kesalahan dari pengguna jalan serta mewujudkan jalan yang mampu menekan tingkat fatalitas (*Safer Road*).
3. Terpenuhiya kelengkapan keselamatan dalam kendaraan (Kendaraan yang mampu menekan fatalitas).
4. Peningkatan perilaku pengguna jalan dengan mengembangkan program-program yang komprehensif termasuk di dalamnya peningkatan penegakan hukum dan pendidikan serta memenuhi syarat kecakapan dan kesehatan pengguna kendaraan (Perilaku pengguna yang menekan fatalitas).
5. Peningkatan penanganan tanggap darurat pasca kecelakaan dengan meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan terkait, baik dari sisi sistem ketanggapdaruratan maupun penanganan korban termasuk di dalamnya melakukan rehabilitasi jangka panjang untuk korban kecelakaan serta penyediaan penanganan kedaruratan yang efektif.

Kebijakan yang dilaksanakan untuk **pengembangan transportasi di kota metropolitan** diarahkan untuk meningkatkan kelancaran dan perluasan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan transportasi perkotaan/metropolitan di tahun 2013 akan difokuskan pada: Peningkatan infrastruktur dan akses untuk perbaikan sistem transportasi di 6 kota besar, yaitu: Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Makassar dan Denpasar.

Arah kebijakan **penyediaan infrastruktur sumber daya air (SDA) untuk peningkatan ketahanan dan ketersediaan air**, akan dicapai melalui:

1. Meningkatkan kapasitas tampung air per kapita dengan memanfaatkan besarnya potensi air permukaan.

2. Meningkatkan kapasitas layanan air baku untuk keperluan domestik dan industri terutama di daerah-daerah pusat pertumbuhan MP3EI, dan berkurangnya potensi krisis air jangka pendek di wilayah kepulauan kecil dan kantong-kantong kekeringan untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan, potensi yang ada serta kapasitas layanan air baku yang sudah terbangun.
3. Meningkatkan kehandalan layanan jaringan irigasi melalui sinergi infrastruktur irigasi dengan kebutuhan ekstensifikasi lahan pertanian.
4. Menurunkan tingkat kerawanan banjir akibat luapan sungai dan/atau pasang surut terutama di kota-kota besar dan pusat pertumbuhan MP3EI dan berkurangnya resiko banjir lahar di beberapa wilayah untuk mengurangi resiko dan kerugian akibat banjir, termasuk di wilayah bencana seperti Lumpur Sidoarjo dan Gunung Merapi.

Beberapa arah kebijakan untuk peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi melalui pelayanan pengelolaan air limbah bagi penduduk, penurunan luasan genangan di kawasan strategis perkotaan, pelayanan pengelolaan persampahan, serta penyediaan air minum.
2. Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sedangkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), maka akan diarahkan pada:

1. Pengintegrasian PPP Book dengan proses penyusunan Perencanaan dan penganggaran dalam RKP 2013 dan Sinkronisasi PPP Book dengan blue book dalam penyiapan dukungan.
2. Penyediaan dana pembebasan tanah, sharing dana untuk sebagian konstruksi dan dana untuk Dukungan Tanah melalui Land Capping dan BLU Tanah.
3. Pengakomodasian anggaran penyiapan dan transaksi khusus untuk proyek KPS kedalam Baseline Pagu Anggaran K/L (Bina Marga, BPJT, BPPSPAM, PKKPIJT Kemhub, BKPM) dan tersedianya dana untuk kebutuhan Penyiapan Proyek dan transaksi KPS.

4. Penyediaan dana untuk capacity building dan Mendorong pembentukan dan peningkatan kelembagaan Tim KPS (simpul KPS) baik dipusat maupun daerah.
5. Penyusunan PP yang merupakan amanat UU Pengadaan Tanah dan harmonisasi peraturan yang berkaitan dengan KPS.

BAB 6 BIDANG POLITIK

Demokrasi Indonesia sudah melewati sejumlah ujian tidak ringan sejak penyelenggaraan pemilu nasional terakhir 2009, baik berupa permasalahan dari sisi kebebasan sipil, hak-hak politik maupun lembaga demokrasi, serta persoalan sengketa antar kelompok masyarakat dalam kehidupan sosial politik dan konflik pasca pemilu yang berujung kekerasan, persoalan partisipasi masyarakat sipil, maupun persoalan fungsi parpol. Pada tahun 2013, di tengah berbagai realitas sosial politik yang ada, Indonesia kembali bersiap-siap memasuki pemilu 2014 dengan segala kompleksitas dan dinamika penyelenggaraannya.

6.1 Subbidang Politik Dalam Negeri dan Komunikasi

KERANGKA BERPIKIR SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI



6.1.1 Kondisi Umum

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) makin mendapatkan perhatian luas dalam masyarakat Indonesia, menjadi *benchmark* penting pembangunan demokrasi. Secara akumulatif, angka IDI nasional membaik dalam selang waktu antara 2007 dan 2009, dengan tantangan yang besar untuk

mempertahankan indeks kebebasan sipil, dan terus meningkatkan indeks hak-hak politik dan lembaga politik. Kebebasan sipil berada pada tingkat yang relatif sangat baik, dengan pengecualian sejumlah tindakan kekerasan sektarian dan konflik agraria yang mendapat sorotan luas, karena adanya penghilangan nyawa orang, pembakaran rumah ibadah, dan sebagainya. Pemenuhan hak-hak politik warga membaik walaupun masih terganggu oleh hak memilih dan dipilih yang bermasalah pada pemilu nasional dan daerah. Lembaga demokrasi masih di titik rendah dibandingkan aspek kebebasan sipil, dengan kredibilitas dan kapasitas parpol yang mendapatkan angka terendah dibandingkan dengan semua indikator yang diukur dalam IDI-2009 yang dipublikasikan tahun 2011.

Ada kesenjangan besar antara aspek Kebebasan Sipil dengan Hak Politik dan Lembaga Demokrasi yang secara umum terjadi di hampir semua provinsi. Angka indeks menunjukkan tingkat kebebasan sipil yang sangat tinggi, tidak diimbangi dengan kemampuan lembaga demokrasi yang masih rendah. Pembangunan politik pada tahun 2013 perlu lebih difokuskan untuk memperkecil kesenjangan yang relatif besar antara kebebasan sipil dengan kapasitas lembaga demokrasi untuk menyerap aspirasi dan kepentingan masyarakat luas, lebih khusus lagi memperkuat kredibilitas parpol dalam menjalankan fungsi-fungsi yang diberikan Konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundangan terkait.

Politik nasional pada tahun 2011 dan 2012, antara lain didominasi oleh persaingan politik semua parpol dan mitra koalisi masing-masing dalam memperjuangkan kepentingan politiknya pada proses legislasi perundang-undangan bidang politik. Hal ini tentu sangat berpengaruh secara mendasar pada perkembangan politik tahun 2013 dan penyelenggaraan serta hasil pemilu nasional 2014, terutama dengan telah ditetapkan revisi tiga perundang-undangan bidang politik yang akan menjadi dasar penyelenggaraan pemilu nasional 2014, yakni UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (revisi UU No. 22 tahun 2007), UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (revisi UU No.2 Tahun 2008) dan perubahan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang baru saja ditetapkan pertengahan April 2012. Di antara persoalan serius yang paling akhir disepakati dalam pembahasan di parlemen adalah persoalan ambang batas parlemen (*parliamentary*

threshold) baru, yakni pada 3,5%. Level ambang batas inilah yang menentukan lolos atau tidaknya sebuah parpol hasil pemilu tahun 2014 untuk dapat diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi di DPR. Berkaitan dengan penyelenggara pemilu yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 telah dibentuk dan ditetapkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang unsur keanggotaannya antara lain dari partai politik yang memiliki kursi di DPR, meskipun tanggapan dari beberapa kalangan masih menyangsikan netralitas dan independensinya. DKPP tersebut bersifat permanen dan bertugas melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan terhadap laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPLN, PPS dan KPPS/KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Luar Negeri. Disamping DKPP yang bersifat permanen, Panwaslu Provinsi ditetapkan juga sebagai badan yang bersifat permanen dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu Provinsi. DKPP dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang bersifat permanen tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen yang dapat meningkatkan kredibilitas penyelenggaraan pemilu dengan memperkecil potensi pelanggaran administrasi dan penyimpangan kode etik.

Pemilu Presiden-Wakil Presiden pada 2014 perlu diantisipasi secara lebih seksama, baik melalui proses revisi UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selain itu juga dengan memperhatikan segi-segi keamanan, karena potensi besarnya perhatian masyarakat pada proses penyelenggaraan pemilu untuk memilih pemimpin nasional ini. Siapapun yang akan terpilih menjadi presiden tahun 2014, jabatan presiden akan dipegang oleh tokoh yang baru, karena presiden yang sekarang menjabat sudah tidak dimungkinkan lagi oleh Konstitusi untuk dipilih kembali menjadi presiden.

Pengaturan tersendiri Pemilihan Kepala Daerah yang semula menjadi satu dalam UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), diharapkan segera menjadi undang-undang yang terpisah dari UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU No. 12 Tahun 2008 masih sedang dibahas di kalangan pemerintah, untuk kemudian akan diajukan pembahasannya ke DPR. Pengaturan tersendiri tersebut pada prinsipnya harus mampu menjawab beberapa permasalahan pemilukada

selama ini.

Pada tahun 2011, telah terselenggara sebanyak 87 pemilukada, dari 115 yang direncanakan. Sedangkan pada tahun 2012, direncanakan 82 pemilukada, termasuk penyelenggaraan 28 pemilukada yang tertunda pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 akan dilaksanakan 11 pemilukada provinsi dan 119 pemilukada kabupaten dan kota.

Berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih baik untuk Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada akhir tahun 2011 KPU telah mengeluarkan rekomendasi sementara terkait Sistem Pendaftaran dan Pemutakhiran Daftar Pemilih. Dari tiga metode pendaftaran pemilih yang dikenal selama ini, yakni *periodic list*, *continuous register/list*, dan *civil registry*, KPU memilih metode pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan (*continuous register/list*). Metode ini dipilih karena dianggap paling mampu menjamin terlaksananya prinsip dan kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bidang politik dan pemilu di Indonesia, serta dapat menjamin prinsip efisiensi dalam pelaksanaannya.

Partai politik merupakan instrumen terpenting dalam proses politik di Indonesia. Pemerintah berkepentingan untuk memperkuat partai politik melalui fasilitasi penyediaan bantuan keuangan parpol setiap tahunnya sejak tahun 2010, setelah menerbitkan PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Bantuan keuangan parpol untuk 2011 disampaikan pada akhir November 2011 karena keterlambatan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun sebelumnya dari parpol penerima untuk diaudit oleh BPK. Pada tahun 2012 ada kesepakatan bahwa bantuan parpol dapat dialokasikan tanpa menunggu hasil audit BPK atas laporan keuangan bantuan parpol tahun 2011.

Pemerintah terus berusaha meningkatkan keikutsertaan organisasi masyarakat sipil dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan nasional. Selain secara konsisten memberikan bantuan keuangan untuk penguatan kapasitas OMS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap masyarakat, pemerintah juga telah memulai proses pelembagaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam proses penyusunan rencana pembangunan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPJMN 2010-2014 sejak tahun 2011. Selama tahun 2011 dan tahun 2012 ini,

pemerintah terus mensosialisasikan dan menggalang dukungan bagi terbentuknya *Democracy Trust Fund* (DTF) sesuai amanat RPJMN 2010-2014, yakni satu lembaga yang antara lain berfungsi memobilisasi segala sumber daya berbagai pihak untuk memfasilitasi upaya yang berkaitan dengan penguatan demokrasi oleh organisasi masyarakat sipil, dan keberlanjutan peran masyarakat sipil.

Pada tahun 2010 dan 2011, pemerintah melakukan upaya-upaya komprehensif dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, baik melalui upaya penindakan infrastruktur teror dengan mempersempit ruang gerak mereka di seluruh wilayah NKRI, juga dengan melakukan kerjasama yang luas dengan organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi-organisasi keagamaan besar di Indonesia. Secara akumulatif, menurut BNPT, dari tahun 2000-2011, sudah sebanyak 708 tersangka teroris yang ditangkap polisi, sementara yang sudah diadili 582, dengan 525 sudah mendapatkan vonis hukuman pengadilan. Dari jumlah yang divonis, terpidana teroris yang sudah bebas sebanyak 279 orang, tapi ada yang kembali terkena kasus yakni 22 orang. Hal yang perlu dicatat, komposisi pelaku tindak pidana terorisme adalah kelas menengah ke bawah, urban, dan kaum muda. Terorisme di Indonesia merupakan bagian dari jaringan internasional.

Pemerintah pada pertengahan 2010 telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Perpres No. 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan sinergitas upaya pencegahan dan penindakan terhadap terorisme. Hasil kerja penegak hukum cukup nyata, terbukti dengan tidak adanya serangan teror yang berarti dan memakan korban jiwa besar seperti terjadi beberapa tahun lalu di berbagai wilayah Indonesia. Pada sisi lain, pendekatan persuasif Pemerintah RI sudah pula menarik bantuan sejumlah mantan teroris untuk bergabung dengan aparat penegak hukum Indonesia untuk melumpuhkan infrastruktur kekerasan dan terorisme di Indonesia.

Pada tahun 2011 tindak kekerasan antar kelompok dalam masyarakat masih terjadi, termasuk pembakaran rumah-rumah ibadah, maupun tindakan pengusiran secara melawan hukum, serta kekerasan yang berlatar belakang sengketa pertanahan dan sengketa hubungan industrial-ketenagakerjaan. Selain mengoptimalkan penegakan hukum, pemerintah masih tetap mempercayai bahwa lembaga-

lembaga yang dibentuk pemerintah seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan Forum Penahanan Kehangsaan (FPK) dapat dioptimalkan kinerjanya untuk menjadi forum dialog dan mediasi mendamaikan perbedaan kepentingan antar berbagai golongan di daerah-daerah seluruh wilayah NKRI. Pemerintah juga masih sedang dalam proses membangun Pusat Pendidikan Kebangsaan (PPK) sebagai salah satu instrumen untuk memantapkan persatuan dan meneruskan proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Disamping itu, dalam memperkuat kelembagaan yang sudah ada dan memberikan ketegasan wewenang kepada lembaga penegak hukum dalam menangani konflik sosial berskala luas, DPR telah menetapkan UU Penanganan Konflik Sosial.

Persoalan Papua kembali muncul ke permukaan dalam konstelasi politik dan keamanan nasional NKRI. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa tanah Papua dengan segala kompleksitas warisan sejarah politik, persoalan budaya dan ketidakadilan dalam pengalokasian sumber daya ekonomi, tidak dapat ditangani secara setengah-setengah. Pemerintah sangat terbuka untuk memperbaiki berbagai kekurangan dalam penerapan otonomi khusus untuk Papua, oleh karena pemerintah sudah menerbitkan Perpres No.65 dan No.66 tahun 2011 masing-masing tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B) dan Unit P4B. Pemerintah menyadari bahwa persoalan Papua adalah persoalan yang menjadi perhatian dunia internasional, walaupun persoalan Papua sesungguhnya juga merupakan persoalan yang dialami masyarakat provinsi lainnya, karena itu pemerintah pusat sangat serius untuk mengatasinya bersama pemerintah daerah. Apabila ada keluhan, ketidakpuasan, dan perasaan diperlakukan tidak adil dari sejumlah kelompok di Papua, pemerintah bersedia membicarakannya dalam kerangka NKRI, optimalisasi Otonomi Khusus Papua dan pelaksanaan P4B ini.

Sementara itu, walaupun pemerintah juga menghadapi tantangan politik di Aceh, terutama terkait perbedaan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam menafsirkan keputusan MK mengenai calon independen dalam pilukada, pilukada Aceh akhirnya dapat diselenggarakan secara damai dan demokratis pada 9 April 2012 setelah mengalami dua kali penundaan sejak

Desember 2011.

Pada bidang komunikasi dan informasi, pemerintah Indonesia makin menegaskan komitmen pada keterbukaan penyelenggaraan negara, dengan terus mempercepat penerapan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terhadap badan-badan publik. Pemerintah menyadari keterbukaan dari sisi penyelenggaraan negara perlu menjadi ujung tombak bagi dilakukannya reformasi birokrasi yang menjadi prioritas pertama pembangunan nasional. Proses membuka diri adalah proses awal menuju perbaikan yang hakiki menuju penyelenggaraan negara yang sesuai dengan amanat konstitusi. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya dorongan masyarakat sipil untuk terus berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan, serta mengontrol keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha memenuhi amanat UU No.14 tahun 2008 tentang KIP, terutama dalam pembentukan PPID di seluruh badan publik baik di pusat maupun di daerah, serta pembentukan Komisi Informasi Daerah di tingkat Provinsi. Sampai dengan tahun ketiga pelaksanaan UU KIP, data per tanggal 25 April 2012 menunjukkan jumlah PPID yang dibentuk pemerintah pusat persentasenya terbesar dari semua level pemerintahan yang ada, yakni Kementerian sebanyak 73,53%, diikuti Provinsi sebanyak 42,42%, Lembaga Negara/Lembaga Setingkat Menteri/LNS/LNP sebanyak 22,48%, Kabupaten 13,28% dan Kota 12,90%. Namun demikian, secara total PPID di seluruh lembaga negara di pusat maupun daerah yang diwajibkan membentuk PPID baru mencapai 19,77%, merupakan angka yang masih jauh dari memuaskan.

6.1.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2013

Terkait dengan kondisi umum politik di Indonesia, maka dapat dikenali sejumlah permasalahan dalam upaya menjaga proses konsolidasi demokrasi di Indonesia pada 2013.

Pertama, kapasitas dan kredibilitas penyelenggara pemilu yang relatif masih lemah dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan pemilu 2014 mendatang. Hal ini terkait dengan permasalahan krusial proses pentahapan pemilu 2014 yang harus dipenuhi dari segi ketepatan waktu dan kualitas pelaksanaannya tanpa kecuali terutama masalah pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi parpol peserta pemilu, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara yang merupakan titik-titik krusial bagi

kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Di samping itu, seleksi dan penarikan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang simultan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2014 menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjabarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 beserta implementasi teknisnya. KPU pada semua tingkat harus memiliki kapasitas yang optimal untuk melakukan pengawasan pelaksanaan amanat keterwakilan perempuan sebesar 30% dari seluruh calon yang diajukan parpol dalam pemilu. Penyelenggara pemilu harus menjadi bagian dari solusi strategis persiapan pemilu yang demokratis dan jujur, antara lain dengan pembuatan peraturan, juklak, juknis yang baik dan transparan. Penegakan hukum pemilu secara tegas perlu mendapatkan tekanan lebih besar dalam penyelenggaraan pemilu.

Permasalahan strategis pemilu lainnya adalah bagaimana melakukan proses penutakhiran data pemilih dilakukan secara lebih baik dengan hasil yang optimal, sehingga semua warga negara yang memang berhak memilih tidak terabaikan hak mereka. Penutakhiran data diharapkan seakurat mungkin berdasarkan data terpilah perempuan, laki-laki, serta penyandang disabilitas secara nondiskriminatif. KPU jelas memiliki peran sangat menentukan dalam keberhasilan penutakhiran data pemilih ini, yang dalam praktiknya jelas tidak dapat bekerja sendiri tanpa fasilitasi dan dukungan lembaga pemerintah yang diwajibkan oleh perundang-undangan untuk memberikan fasilitasi secara optimal. Hal lain yang penting adalah persoalan logistik pemilu, sebuah proses masif yang perlu dilakukan secara terencana dan terfokus sesuai dengan kebutuhan pada hari pemilu. Keterlambatan atau kesalahan dalam proses akan menyebabkan distorsi dan komplikasi dalam pelaksanaan hak para pemilih di seluruh Indonesia.

Sesuai dengan amanah UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, institusi Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota harus dibentuk seiring proses pentahapan yang telah berjalan sejak tahun 2012. Tugasnya adalah mengawasi proses pentahapan pemilu di seluruh wilayah NKRI. Pembentukan Bawaslu dan Panwaslu ini jelas merupakan persoalan yang tidak ringan untuk dipecahkan, terutama apabila dikaitkan dengan proses perekrutan, pembentukan organisasi, serta penganggarannya seperti yang

diamanatkan perundang-undangan yang baru hasil revisi.

Permasalahan penting lain dalam penyelenggaraan pemilu adalah belum meluasnya pemahaman bahwa masyarakat adalah bagian penting dalam menyukseskan pemilu, dengan meningkatkan partisipasi pemilih dalam proses pentahapan, seperti pemutakhiran data pemilih dan proses pengawasan partisipatif. Partisipasi aktif selayaknya sudah dimulai sejak awal masa pentahapan pemilu 2014 dimulai pertengahan tahun 2012 ini, diawali dengan sosialisasi seluas-luasnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan. Masyarakat perlu diberitahu seterang-terangnya tentang hak-hak mereka dalam pemilu. Hal ini menjadi kewajiban pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk meningkatkannya melalui pendidikan pemilih, sebagai bagian dari proses pendidikan politik warga, dengan tekanan utama pada konten anti-politik uang. Pemerintah diharapkan melakukan segala upaya yang diperlukan bersama para penyelenggara pemilu untuk merumuskan kebijakan untuk meredusir potensi terjadinya politik uang dalam segala aspeknya serta mengusahakan perlakuan yang seadil-adilnya bagi kaum penyandang disabilitas dalam proses penyelenggaraan pemilu 2014.

Hal yang juga perlu diperhatikan adalah penyelesaian revisi UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan revisi UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang diharapkan selesai tahun 2012 sesuai rencana semula. Hal ini diharapkan tidak tertunda sampai tahun 2013 agar tidak memberikan beban tambahan pada proses pentahapan pemilu 2014 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun 2012.

Kedua, pemilu-kada masih menyimpan sejumlah masalah krusial yang belum dapat diatasi. Salah satu masalah mendasar adalah permasalahan kompleksitas dalam pelaksanaan regulasi, apakah itu terkait dengan kesulitan pelaksanaan atau adanya ketidaksinkronan antara pasal perundangan yang satu dengan lainnya terkait masalah sumber data pemilih, misalnya dalam hal pemutakhiran data, apakah sumbernya berasal dari data pemilih pada pemilu terakhir ataukah data kependudukan yang diserahkan oleh pemerintah, hal ini seringkali menimbulkan keraguan dan kerancuan pada pemilu-kada. Persoalan lain adalah begitu banyaknya modus pemalsuan dan manipulasi atas data-data persyaratan calon peserta pemilu, termasuk dukungan ganda dan fiktif dari calon

perseorangan, sehingga memerlukan energi ekstra untuk melakukan *cross-check* data calon. Hal yang tidak kalah penting adalah lemahnya kapasitas penyelenggara pemilu/kada dalam memenuhi tugas-tugasnya secara baik, termasuk dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, serta pelanggaran para kandidat pemilu/kada, terkait masih meluasnya praktik politik uang (*money politic*) di berbagai daerah, serta masih seringnya para peserta yang mempunyai kekuasaan untuk memanipulasi aparatur birokrasi dan anggaran di daerah untuk kepentingan pemenangan mereka. Segala persoalan yang ada ini pada gilirannya mempengaruhi kualitas pemilu/kada serta terjadinya banyak penundaan pemilu/kada. Pada tahun 2013 direncanakan penyelenggaraan 119 pemilu/kada pada tingkat kabupaten dan kota, serta 11 pemilu/kada pada level provinsi. Persoalan pemilu/kada yang sudah ada tentu perlu ditangani secara lebih seksama, apalagi dengan makin dekatnya Pemilu 2014 dengan proses pentahapan yang sangat ketat sejak pertengahan tahun 2012 dan sepanjang tahun 2013.

Pemerintah menyadari sepenuhnya kompleksitas pelaksanaan pemilu/kada yang berlangsung setiap tahun di ratusan daerah baik pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Oleh karena itu, Pemerintah akan mempertimbangkan secara serius untuk melakukan pengkajian atas usulan pengaturan keserentakan penyelenggaraan pemilu nasional (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR dan DPD) dan Pemilu Lokal (Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan selisih waktu 2,5 tahun (30 bulan) dan usulan-usulan lain yang relevan dengan persoalan pemilu, baik usulan dari kelompok organisasi masyarakat sipil maupun dari kalangan akademisi.

Ketiga, persoalan rendahnya kapasitas dan kredibilitas parpol dalam mempertanggungjawabkan bantuan keuangan parpol. Kewajiban parpol adalah melaporkan program-program pendidikan politik kepada masyarakat seperti yang diamanatkan oleh perundang-undangan. Selama ini masyarakat tidak dapat memperoleh akses yang memadai terhadap pengelolaan keuangan parpol yang menggunakan dana APBN untuk menjalankan organisasi. Ke depan, perlu disiapkan sistem pelaporan keuangan yang standar untuk digunakan parpol serta perangkat aturan dan mekanisme *reward and punishment* bagi setiap parpol penerima bantuan dari APBN yang merupakan dana publik.

Keempat, permasalahan relatif rendahnya kapasitas dan *networking* untuk memanfaatkan ruang-ruang terbuka bagi masyarakat sipil secara optimal untuk memainkan peran hakiki organisasi masyarakat sipil, yakni melakukan advokasi dan pendampingan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan nyata mereka sendiri, tanpa banyak tergantung pada pemerintah. IDI tahun 2009 menginformasikan bahwa kebebasan sipil di Indonesia berkinerja sangat bagus (*high performing*), yakni 86,97, apabila diukur dalam skala IDI, jauh melampaui aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Ini berarti ruang yang sangat besar bagi OMS untuk mengisinya dengan kerja-kerja pemberdayaan, agar energi besar kebebasan sipil ini mengarah kepada energi perbaikan, bukan energi kemarahan dan kekecewaan, karena di sektor politik, lembaga yang ada masih sangat lemah. Studi terbaru dari Yappika (2011) tentang Indeks Masyarakat Sipil, hasil studi atas 16 kabupaten di Indonesia, menyebutkan bahwa sebagai produk dari desentralisasi, masyarakat sipil kita memang mengalami peningkatan yang signifikan dalam aspek *political equality*. Hasil studi Yappika antara lain menyebutkan bahwa keberadaan OMS pun semakin diapresiasi dan dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kalangan pemerintah daerah, seperti terlihat dalam proses penyusunan RPJMD maupun Musrenbang. Kualitas kemitraan antara OMS dengan kalangan pemerintah pun semakin meningkat, sehingga banyak masukan dari OMS yang diakomodasikan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Pada tingkat Pusat, Bappenas sudah melibatkan OMS dalam proses perencanaan nasional sejak dua tahun terakhir ini, termasuk juga dalam proses monitoring dan evaluasi atas hasilnya. Namun di lain pihak, OMS belum banyak berperan dalam melakukan perubahan pada aspek *local responsiveness* dan *local accountability*. Upaya OMS di daerah untuk meningkatkan sikap cepat tanggap akuntabilitas pemda masih belum banyak diikuti praktek-praktek nyata pemda. Reformasi birokrasi baru bergema di tingkat pusat, di daerah belum banyak beranjak. Pada sisi ini OMS harus mampu melakukan advokasi bagi peningkatan kesadaran untuk menolak pemimpin yang tidak akuntabel, lebih kritis menilai, serta tidak berkompromi pada politik uang. Pemerintah sudah mengajukan program penguatan kapasitas OMS melalui fasilitasi demokrasi dengan pembentukan *Democracy Trust Fund* (DTP) bagi keberlanjutan peran OMS bagi konsolidasi

demokrasi di Indonesia.

Kelima, masih belum meratanya pemahaman di sejumlah kalangan masyarakat dan belum mantapnya koordinasi dalam lembaga pemerintah sendiri untuk mengenali dan mengantisipasi bahaya penyebaran ideologi terorisme yang membenarkan penggunaan kekerasan dalam mencapai agenda politik mereka. Padahal kekerasan adalah cara-cara mencapai tujuan politik yang tidak dapat dibenarkan dalam negara demokrasi. Terorisme adalah gejala global yang jelas ada dan mengancam demokrasi.

Keenam, masih cukup tingginya angka kekerasan yang menyertai konflik antar golongan yang berbeda kepentingan politik, perselisihan terkait sektarianisme, dan yang akhir-akhir ini muncul ke permukaan adalah konflik pertanahan dan hubungan industrial-ketenagakerjaan yang menimbulkan sejumlah korban jiwa. Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila forum-forum yang dibentuk pemerintah, termasuk FKUB, FKDM, Kominda dan FPK telah berfungsi optimal dan efektif sesuai dengan tujuan pembentukannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut tentang peran forum-forum yang ada ini dan penguatannya agar dapat melaksanakan deteksi dini, agar konflik yang berujung jatuhnya korban jiwa dapat dicegah dan semua pihak dapat mengedepankan dialog dan penegakan hukum dalam menyelesaikan konflik kepentingan antara mereka. Pemerintah melihat ada persoalan dalam memaharai nilai-nilai demokrasi dan persatuan bangsa dewasa ini. Sejumlah institusi dengan ideologi tertentu sedang berusaha memperluas pengaruhnya melalui proses penanaman nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Persoalan lain, masih belum adanya *grand design* penanganan konflik sosial yang melibatkan keterkaitan kebijakan antar lembaga secara terkoordinasi dalam menangani keadaan darurat konflik dan pasca-konflik. Pemerintah diharapkan dapat merespon sejumlah keprihatinan dari masyarakat sipil terhadap keberadaan forum-forum kemasyarakatan yang dibentuk oleh pemerintah di seluruh provinsi. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mempertanyakan efektivitas forum-forum yang ada. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengharapkan negara tidak masuk terlalu jauh pada urusan keyakinan warga negara, dan tidak perlu terlibat dalam pembahasan RUU Kerukunan Umat Beragama yang berpotensi diskriminatif.

Satu hal yang sangat perlu menjadi perhatian adalah pengawasan organisasi radikal keagamaan penyebar kebencian terhadap kelompok beragama lainnya melalui keberadaan situs-situs dan ceramah berkonten kebencian (*hate speech*). Kelompok masyarakat sipil mendorong pemerintah agar lebih tegas dalam membenahi kebijakan-kebijakan yang berpotensi menyebabkan konflik yang serius. Pada lain sisi, kebijakan yang dapat mencegah konflik dapat dibuat untuk menggantikannya. Selain itu, pemerintah ditantang untuk mampu meningkatkan intensitas pendekatan kultural dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam menyelesaikan berbagai konflik yang ada di dalam masyarakat, di samping menguatkan kurikulum yang berisikan muatan Budi Pekerti. Pemerintah diharapkan menjadi pelindung semua golongan dalam menjaga ketertiban umum. Pusat Pendidikan Kebangsaan dapat menjadi salah satu alternatif bagi penguatan paham kebangsaan dan empat pilar bangsa (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika).

Ketujuh, persoalan komunikasi dan informasi masih akan terkait dengan penyediaan dan penyebaran informasi publik, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada pelaksanaan tahun keempat, selain pemenuhan target dan ketentuan yang sudah diamanatkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya oleh badan-badan publik, yang juga penting adalah transformasi pemahaman dan nilai-nilai dari para pembuat kebijakan dan badan-badan publik yang menjadi subjek peraturan perundangan. Hal ini untuk merespon kendala yang masih dihadapi sejak tahun pertama pelaksanaannya, yaitu belum efektifnya PP tentang pelaksanaannya, masih ada daerah yang belum membentuk Komisi Informasi, pembentukan PPID yang masih minim, dan penyediaan informasi termasuk pemilahan. Keterbukaan informasi publik masih dianggap beban tambahan para pejabat publik sebagai warisan sikap mental pemerintahan monolitik masa lalu, yang seharusnya menjadi modalitas penting untuk memudahkan pencapaian tugas mewujudkan badan publik yang lebih kredibel. Selain itu, keterbukaan informasi atau transparansi publik masih dipahami sebagai bagian dari fungsi kehumasan, ditambah lagi dengan kesiapan materi (*content*) informasi di tiap-tiap badan publik yang masih lemah atau belum terdokumentasi dengan baik. Pelayanan informasi juga

belum memiliki standar pelayanan minimal, apalagi SDM yang masih terbatas dalam membantu pengelolaan informasi secara modern. Persoalan lain, media tradisional, media komunitas dan *media center* belum mampu menjadi alternatif penting untuk mempercepat proses pemerataan informasi sekaligus menutup kesenjangan perolehan informasi di dalam masyarakat yang disebarkan oleh media massa modern yang berorientasi pada bisnis.

Dengan permasalahan tersebut di atas, pada tahun 2013 sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi;
2. Meningkatnya iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat;
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyebaran dan pemanfaatan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas.

6.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2013

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri dan komunikasi, prioritas bidang politik adalah pelebagaan demokrasi yang dilakukan melalui strategi (i) peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi; (ii) peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat; serta (iii) peningkatan peran informasi dan komunikasi.

Berdasarkan fokus prioritas di atas, maka untuk mencapai sasaran pada tahun 2013, arah kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga penyelenggara negara melalui fokus pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi penuntasan dan penyelesaian inisiatif DPR atas perubahan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta perubahan atas UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Fasilitasi sosialisasi UU tentang Penanganan Konflik Sosial dan penyusunan peraturan pelaksanaannya, dengan memberikan tekanan substansi pada pemihakan kepada korban, bukan sebaliknya melakukan stigma

- pada korban yang berbasis gender (*gender-based violence*).
- c. Peningkatan pemahaman masyarakat dan aparaturnya pemerintah, serta pemantapan koordinasi yang komprehensif antara lembaga negara dan masyarakat dalam penangkalan, penanggulangan dan pemberantasan infrastruktur terorisme dan tindak pidana terorisme.
 - d. Fasilitasi persiapan dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2013.
 - e. Penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu nasional dan pemilu kepala daerah, terutama dalam mempersiapkan secara lebih baik tahapan pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2013 termasuk daftar pemilih tetap (DPT), dengan berbasiskan data terpilah, mendorong keterwakilan 30 % kaum perempuan, beserta pengawasannya oleh badan/panitia pengawas pemilu.
 - f. Fasilitasi bagi pemantapan proses pemutakhiran DPT melalui penggunaan sumber daya manusia dan pendanaan secara lebih efektif dan terarah, sehingga tidak ada lagi hak masyarakat yang dihilangkan dalam pemilu 2014.
 - g. Pemantapan yang lebih terarah bagi terwujudnya partisipasi aktif masyarakat sipil dalam pemantapan pemilu dan pemilukada secara lebih efektif di seluruh Indonesia, sejak proses pentahapan dimulai.
 - h. Pemantapan koordinasi antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil dalam pembentukan *democracy trust fund* untuk mendukung keberlanjutan OMS.
 - i. Pemantapan bantuan keuangan pada partai politik dengan tekanan pada peningkatan kapasitas parpol untuk melaksanakan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat.
 - j. Pelembagaan mekanisme perumusan kebijakan pemerintah yang lebih bersifat partisipatif.
 - k. Peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam menghadapi persoalan politik dan penegakan hukum di wilayah konflik dan pasca-konflik vertikal

dan horisontal.

2. Menjaga dan menciptakan iklim politik yang dapat menjamin kebebasan sipil dan pengluaran terhadap hak-hak politik rakyat, serta berkembangnya demokrasi secara berkelanjutan, melalui fokus kebijakan sebagai berikut:
 - a. Pemantapan forum konsultasi publik antara pemerintah dan OMS dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konsolidasi demokrasi.
 - b. Pemantapan pembangunan Pusat Pendidikan Kebangsaan yang berintikan pada pengembangan dan pemahaman empat pilar dengan konten yang mengutamakan pendekatan kultural dalam menyelesaikan berbagai perbedaan, dan pendidikan budi pekerti.
 - c. Pelaksanaan pendidikan pemilih secara konsisten, terutama dengan menanamkan hak dan kewajiban dalam demokrasi dengan mengutamakan konten anti-politik uang dan persamaan hak kaum penyandang disabilitas dalam pemilu.
 - d. Peningkatan fasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kredibilitas anggota parlemen perempuan.
 - e. Pemantapan koordinasi dan kerja sama dalam proses pemberantasan infrastruktur terorisme dan pencegahan kejahatan terorisme dengan organisasi masyarakat sipil, terutama organisasi keagamaan.
 - f. Penguatan FKOB, FKDM, Kominda, FPK, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di daerah dalam mendukung proses konsolidasi demokratisasi dan penyelesaian konflik vertikal dan horizontal, termasuk merumuskan kebijakan yang lebih tegas untuk mengatasi organisasi-organisasi penyebar kebencian.
 - g. Penguatan dialog publik antara pemerintah dengan berbagai kelompok yang berbeda kepentingan di wilayah konflik dan pasca-konflik vertikal dan horisontal.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyebaran dan pemanfaatan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas, melalui:
 - a. Pemantapan pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP dan PP No. 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan UU No.14 tentang KIP, serta peraturan pelaksanaan lainnya yang menjadi modalitas penting menuju partisipasi publik yang lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik.

- b. Peningkatan pemahaman di kalangan pejabat publik atas pentingnya nilai transparansi bagi terlaksananya tugas-tugas dasar melayani masyarakat di bidang komunikasi dan informasi.
- c. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM komunikasi dan informasi terutama di daerah.
- d. Peningkatan kualitas dan akurasi informasi publik, serta meningkatkan kecepatan pelayanan bagi para pengguna informasi publik.
- e. Peningkatan efektivitas pelayanan *media center* terutama di daerah terdepan/terluar, tertinggal, terpencil, serta daerah konflik dan pasca konflik vertikal dan horisontal.
- f. Peningkatan peran dan revitalisasi media tradisional dan peningkatan kapasitas media komunitas dalam penyebaran informasi publik.

6.2 Sub Bidang Politik Luar Negeri

Indonesia terus bekerja menjalankan perannya sebagai *bridge builder* dalam menghadapi berbagai perbedaan masyarakat antar-bangsa dipandu oleh semangat mewujudkan "sejuta kawan tanpa musuh". Politik luar negeri Indonesia secara konsisten menempatkan Indonesia sebagai bagian dari penyelesaian masalah berbagai tantangan global, sebagai suatu negara yang mengedepankan titik temu dan bukannya mempertentangkan berbagai kepentingan yang ada.

GAMBAR 6.1
KERANGKA BERPIKIR SUB BIDANG POLITIK LUAR NEGERI



6.2.2 Kondisi Umum

Peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2011 telah memberi bobot pada organisasi kawasan negara-negara di Asia Tenggara, khususnya upaya untuk memastikan kesiapan negara-negara anggota bagi terwujudnya Komunitas ASEAN 2015. Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia aktif mendorong pelibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan ASEAN, serta peningkatan *people to people contact* di antara masyarakat negara-negara anggota ASEAN. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa kerja sama ASEAN dapat membawakan manfaat bagi seluruh masyarakat ASEAN. Dalam kepemimpinannya, Indonesia juga memastikan terkonsolidasinya satu tatanan kawasan baru melalui bingkai East Asia Summit. Pada tahun 2011, selain 16 negara yang telah tergabung di dalam East Asia Summit, bergabung untuk pertama kalinya Amerika Serikat dan Rusia—dua negara yang secara tradisional memiliki peran penting di kawasan Asia Timur.

Dalam mewujudkan Komunitas ASEAN 2015, Indonesia telah menyelenggarakan KTT ASEAN pada tanggal 7-8 Mei 2011 dan menggulirkan pemikiran visi ASEAN pasca 2015 mengenai peranan ASEAN di tingkat global, yang dapat mejadi tonggak ketiga proses konsolidasi ASEAN. Di bidang politik dan keamanan, dalam KTT 18, Indonesia dinilai berhasil mendorong dikeluarkannya tiga “*stand-alone*” *Joint Statement*

mengenai antara lain (i) *ASEAN Community in a Global Community of Nations*, (ii) pembentukan *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* serta (iii) peningkatan kerja sama penanggulangan *trafficking in persons* di Asia Tenggara. Kesepakatan-kesepakatan tersebut mendorong dihasilkannya produk substantif utama Keketuaan Indonesia melalui penyusunan deklarasi pada KTT ke-19 ASEAN bulan November 2011. Langkah strategis Indonesia untuk menggagas terbentuknya sebuah *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR)* sesuai dengan Cetak Biru Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN telah memperoleh dukungan negara-negara anggota ASEAN. Dengan adanya AIPR diharapkan dapat mengembangkan kapasitas ASEAN dalam penyelesaian dan manajemen konflik di kawasan.

Di bidang sosial dan budaya, pada KTT 18, para pemimpin ASEAN menyatakan tentang pentingnya partisipasi masyarakat sipil dalam pencapaian Masyarakat ASEAN pada tahun 2011, dan menyepakati untuk menjamin berjalannya Pusat Koordinasi ASEAN untuk bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana (AIIA Centre) secara efektif.

Terkait dengan pekerja migran, semua negara ASEAN berkomitmen untuk melaksanakan *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* yang telah diadopsi dalam KTT ASEAN ke 12 di Cebu, Filipina pada tahun 2007 dan menegaskan kembali komitmennya untuk mengerahkan instrumen perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran yang sesuai dengan visi ASEAN. Indonesia juga memastikan terlaksananya komitmen bersama menuju pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada 2015.

Keketuaan Indonesia dalam ASEAN telah turut mendorong pengembangan infrastruktur nasional sebagaimana tercermin dari gagasan *Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC)* dengan *physical connectivity* sebagai elemen utamanya seperti pengembangan infrastruktur fisik pelabuhan, bandar udara, jalan raya, atau pembangkit listrik. Seluruh perkembangan ini menggambarkan keinginan Indonesia untuk menjadikan ASEAN sebagai organisasi regional yang mampu menarik negara-negara utama dunia menjadi bagian dari proses soliditas ASEAN.

Di samping itu, peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia terus

ditingkatkan secara konsisten. Terkait dengan hal ini, Indonesia terus membantu perjuangan bangsa Palestina untuk mewujudkan cita-citanya menjadi negara yang merdeka, berdaulat dan utuh.

Indonesia secara konsisten menyerukan perlunya peningkatan kerja sama dan kemitraan di antara negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini diperlukan untuk menghadapi tantangan global, serta menciptakan perdamaian internasional. Indonesia terus berkontribusi terhadap pencegahan/resolusi konflik, dengan terus menjadi penyumbang aktif pasukan perdamaian PBB sejak tahun 1957. Sampai dengan Oktober 2011, Indonesia telah menyumbangkan 1976 personel militer dan polisi, sehingga kini Indonesia termasuk salah satu dari 15 negara kontributor terbesar Pasukan Perdamaian PBB.

Dalam debat umum Sidang Majelis Umum PBB ke-66 di Markas Besar PBB, Amerika Serikat 26 September 2011, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri menyampaikan dua sikap yang harus dilakukan masyarakat internasional. Pertama, dunia perlu memperkuat multilateralisme, khususnya dalam memelihara peran sentral PBB. Kedua, kerja sama dan kemitraan antara PBB dengan organisasi regional merupakan keniscayaan. Indonesia juga menegaskan bahwa harus ada sinergi antara upaya-upaya di tingkat global dengan upaya di tingkat regional. Indonesia berharap Asia Tenggara akan tetap menjadi kawasan yang memberikan kontribusi bagi keamanan dan perdamaian serta pembangunan dan kemakmuran dunia.

Terkait dengan isu terorisme, Indonesia merupakan partisipan dan pendukung aktif implementasi *United Nations Global Counter-Terrorism Strategy* (UNGCTS), yang merupakan instrumen multilateral penanggulangan terorisme. Dalam mendukung implementasi empat pilar UNGCTS (langkah-langkah mengatasi kondisi kondusif tumbuh/berkembangnya terorisme, langkah-langkah mencegah dan memberantas terorisme, langkah-langkah pengembangan kapasitas negara anggota dalam mencegah dan memberantas terorisme, langkah-langkah memastikan penghormatan HAM dan *rule of law* sebagai dasar bagi penanggulangan terorisme), Indonesia telah menginisiasi berbagai forum *interfaith dialogue* atau dialog antar-iman di level bilateral, regional, dan multilateral, termasuk dengan 18 negara di tahun 2010 dan 2011.

Perihal penyelesaian masalah perbatasan, Indonesia memiliki batas laut dengan 10 (sepuluh) negara yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste dan Australia. Sedangkan batas darat dengan 3 (tiga) negara yakni Malaysia, Timor-Leste dan Papua Nugini. Indonesia telah menetapkan secara tuntas batas darat dan laut dengan Papua Nugini, sedangkan dengan Australia telah sepakat dengan batas Landas Kontinen (LK) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Ketetapan batas maritim sudah tercapai pada sebagian segmen batas laut wilayah dengan Malaysia dan Singapura, LK dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, dan Papua Nugini. Dengan Filipina, Indonesia tengah melakukan perundingan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen (LK) di Laut Sulawesi. Dengan Palau, proses awal untuk memulai perundingan batas laut telah berhasil disepakati. Sedangkan dengan Timor Leste, batas maritim yang baru akan dirundingkan setelah batas darat dituntaskan. Sampai dengan tahun 2011 telah terdapat 16 (enam belas) perjanjian perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga.

Dalam hal jumlah pertemuan yang telah dilakukan untuk membahas masalah perbatasan negara, sepanjang tahun 2009 hingga tahun 2010, total pelaksanaan perundingan/pertemuan perbatasan maritim dan darat yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) kali perundingan/pertemuan. Pada tahun 2009 telah dilaksanakan 21 (dua puluh satu) pertemuan dengan 7 (tujuh) negara yaitu Filipina, Malaysia, Palau, Timor Leste, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan 23 (dua puluh tiga) kali pertemuan dengan 7 (tujuh) negara, yaitu: Filipina, Malaysia, Palau, Timor Leste, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan pada tahun 2011, telah dilaksanakan perundingan sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) kali dengan 6 (enam) negara.

Dalam pemberian perlindungan WNI di luar negeri, secara umum kebijakan dan upaya perlindungan dari Pemerintah RI meliputi deteksi dini atas kasus yang menimpa WNI melalui komunikasi secara proaktif dan terus menerus dengan Kemlu dan aparat kepolisian, imigrasi dan penjara, perolehan akses kekonsuleran dalam kerangka prinsip kepedulian dan keberpihakan, pendampingan dan advokasi hukum dalam rangka memastikan *due process of law*, langkah-langkah

antarapemerintah, termasuk diplomasi, untuk mengupayakan pengampunan dan atau keringanan hukuman.

Presiden RI menginstruksikan untuk membentuk tim khusus penanganan WNI terancam hukuman mati yang diketuai oleh Menteri Hukum dan HAM, memperkuat Satgas perlindungan WNI di perwakilan, melanjutkan *Joint Committee* antara Satgas PWNI KBRI dengan institusi terkait setempat yang terdiri dari kejaksaan agung, kepolisian, migrasi, tenaga kerja untuk menangani kasus-kasus WNI. Hingga tahun 2010, Indonesia telah menandatangani 10 perjanjian bilateral penempatan tenaga kerja sektor formal dan informal (*domestic workers*) dengan negara tujuan TKI, yaitu Malaysia, Jordania, Persatuan Emirat Arab, Jepang, Korea selatan, Qatar, Timor Leste, Kuwait, dan Lebanon. Pemerintah RI juga melakukan negosiasi pembuatan perjanjian bilateral di bidang ketenagakerjaan antara lain dengan Libya, Kuwait, dan New Zealand. Di samping itu, Indonesia sedang melaksanakan perundingan mengenai *Mandatory Consular Notification (MCN)* dengan negara-negara pengguna jasa TKI.

Dengan adanya vonis hukuman mati terhadap warganegara Indonesia di luar negeri, pemerintah memberikan bantuan hukum termasuk penyediaan pengacara dan akses kekonsuleran semaksimal mungkin. Pemerintah melalui Perwakilan RI terus mengawal proses hukum dengan tujuan mendapatkan keringanan hukum dan menghindari jatuhnya hukuman mati bagi mereka yang terlibat kriminal. Namun dalam beberapa kasus di beberapa negara, untuk mendapatkan akses kekonsuleran tidaklah mudah karena negara tersebut tidak mengikuti praktek internasional dimana setiap WNA yang bermasalah harus ditormasikan kepada kantor perwakilan pemerintahnya. Eksekusi hukuman mati Ruyati bt Satubi merupakan salah satu contoh walaupun sejak awal Perwakilan RI telah mengawal proses hukumnya.

Pada tahun 2011 sebanyak 16.562 WNI juga telah dipulangkan dari berbagai negara (di luar deportasi) baik melalui evakuasi maupun repatriasi. Kegiatan evakuasi tahun 2011 telah dilaksanakan bagi 3.981 orang WNI di negara-negara Timur Tengah yang dilanda krisis politik yaitu Mesir, Tunisia, Libya dan Yaman. Kegiatan evakuasi juga dilaksanakan bagi WNI yang terkena dampak bencana alam gempa dan tsunami di Jepang. Selain itu, pada tahun 2011 sebanyak 26.805 WNI juga telah dipulangkan dari berbagai negara (di luar evakuasi), baik melalui mekanisme repatriasi maupun deportasi. Pemerintah

Indonesia telah memfasilitasi penyerahan hak-hak milik WNI/TKI di luar negeri kepada yang bersangkutan ataupun pihak keluarga/ahli waris yang didahului dengan proses verifikasi data oleh Kementerian Luar Negeri.

Hingga bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 207 WNI di luar negeri yang terancam hukuman mati dan masih menjalani proses hukum. Mereka tersebar di beberapa negara di luar negeri yaitu di Arab Saudi 45 orang, Malaysia 143 orang, Cina 15 orang, Iran 1 orang, Singapura 2 orang dan Brunei Darussalam 1 orang, dengan keterlibatan dalam berbagai kasus yang antara lain kasus pembunuhan, narkoba, sibir, kepemilikan senjata api dan tindak asusila perzinahan.

Di luar angka tersebut, sepanjang tahun 2011 terdapat WNI yang terlepas dari hukuman mati, baik bebas murni maupun dengan pengurangan hukuman sebanyak 31 orang dengan rincian Arab Saudi (2 orang bebas murni dan 3 orang bebas menunggu proses deportasi), Malaysia (6 orang bebas murni, dan 8 orang mendapatkan vonis hukuman lebih ringan), Cina (10 orang mendapat vonis hukuman seumur hidup) dan Iran (2 orang mendapat vonis hukuman seumur hidup). Di antara WNI/TKI yang terbebas dari hukuman mati adalah Sdr. Darsen bt Dawud Tawar, TKI asal Subang yang dibebaskan melalui pembayaran uang diyat sebesar Rp. 4,7 miliar oleh Kementerian Luar Negeri.

Dalam upaya pengurangan hukuman bagi TKI di luar negeri yang terlibat masalah hukum, Indonesia juga telah menempuh cara-cara melalui diplomasi personal sebagai bagian dari diplomasi total.

Penanganan WNI di luar negeri juga dilakukan dengan kegiatan pemulangan para WNI yang melanggar peraturan keimigrasian dan tanpa izin tinggal yang sah (*overstayers*) di Arab Saudi. Kegiatan itu dilakukan dengan pesawat terbang dan kapal laut KM Labobar. Pada tahun 2011 pemerintah telah memfasilitasi pemulangan dengan skema repatriasi (atas biaya pemerintah Indonesia) sejumlah 7.926 WNI *overstayers* dengan menggunakan transportasi udara melalui 11 kali tahapan pemulangan dan sekali melalui jalur laut dengan menggunakan KM Labobar.

Dalam melaksanakan perannya untuk memajukan demokrasi, Indonesia telah menyelenggarakan *Bali Democracy Forum* melalui *sharing best practices* proses demokrasi negara-negara anggota. Dalam kaitan ini, menindaklanjuti keberhasilan *Bali*

Democracy Forum pada tahun 2008, 2009, dan 2010, Indonesia telah menyelenggarakan *Bali Democracy Forum IV* pada 8-9 Desember 2011 yang dihadiri oleh wakil dari 82 negara peserta dan 3 organisasi internasional sebagai *observer*. *Bali Democracy Forum IV* mengusung tema "*Enhancing Democratic Participation in a Changing World: Responding to Democratic Voices*".

Tema ini sangat relevan dengan situasi saat ini, salah satunya terkait terjadinya *Arab Spring*, fenomena gelombang demokratisasi dan reformasi di Timur Tengah dan Afrika Utara sejak akhir tahun 2010 hingga saat ini. Terkait dengan fenomena "*Arab Spring*", Indonesia sejak awal menunjukkan dukungan dan simpati yang tegas kepada rakyat yang menuntut demokratisasi di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara tersebut. Di samping memberikan dukungan melalui berbagai pernyataan diplomatik dan di forum PBB, Indonesia juga telah secara nyata berbagi pengalaman transisi demokrasi dengan negara-negara tersebut, baik melalui forum multilateral seperti BDF maupun dalam kerangka bilateral dengan negara seperti Mesir. Kiprah Indonesia ini merupakan catatan penting dalam upaya pemajuan demokrasi di tingkat internasional.

Di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia terus memperjuangkan kepentingan nasional dalam pembahasan hak asasi manusia di forum multilateral. Selama tahun 2011, Indonesia menjadi sponsor berbagai resolusi di Dewan HAM dan Majelis Umum PBB yang memiliki dampak bagi peningkatan perlindungan terhadap pekerja migran. Secara khusus Indonesia bersama-sama Filipina mempraktikkan resolusi di Majelis Umum mengenai perlindungan tenaga kerja migran wanita.

Di bidang lingkungan hidup, selama tahun 2011 Indonesia aktif menyumbangkan pemikiran untuk mengimplementasikan *Bali Action Plan* dan *Bali Road Map* yang diputuskan pada waktu Konferensi ke-13 *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Bali, Desember 2007. Pada tanggal 28 November - 9 Desember 2011, delegasi RI telah mengikuti Pertemuan para Pihak (COP) ke-17 UNFCCC serta Pertemuan para Pihak untuk Protokol Kyoto (CMP) ke-7 di Durban, Afrika Selatan.

Penguatan kemitraan strategis di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta kawasan Amerika dan Eropa semakin nyata.

Hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika mengalami perkembangan yang positif dan menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini tampak dari peningkatan kerjasama ekonomi, termasuk investasi dan perdagangan, kerjasama pertahanan, maritim dan pertanian. Proses penguatan hubungan kerjasama dengan negara-negara sahabat di kawasan Asia Pasifik juga ditujukan untuk mendukung terciptanya kawasan yang damai, aman dan stabil serta sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. Negara-negara tersebut diantaranya adalah Timor Leste, Australia, Papua Nugini, dan Selandia Baru. Hubungan bilateral antara Indonesia-Australia dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dikatakan relatif stabil. Saat ini, hubungan bilateral kedua negara semakin kuat (*strong, healthy and robust*) dan perlu terus ditingkatkan.

Hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa pada tahun 2011 menunjukkan capaian penting. Kerjasama yang dilakukan tidak hanya di bidang politik dan ekonomi, tetapi telah berkembang ke arah kerjasama kemitraan baru yang saling menguntungkan terutama untuk isu-isu strategis seperti lingkungan hidup, energi, demokrasi, *interfaith dialogue* dan HAM. Hal ini membuktikan pula bahwa peranan Indonesia di mata negara-negara di kawasan tersebut semakin penting. Sebaliknya juga Indonesia melihat kawasan tersebut memiliki nilai strategis bagi pelaksanaan hubungan luar negeri dan politik luar negeri Indonesia.

Selbagai tindak lanjut dari *Joint Declaration on US-Indonesia Comprehensive Partnership* pada tanggal 9-10 November 2010, kedua negara telah menyepakati *Plan of Action (PoA) for RI-US Comprehensive Partnership* yang merupakan cetak biru panduan prioritas kerja sama kedua negara di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, serta sosial budaya dan pendidikan. Selanjutnya, pelaksanaan *Comprehensive Partnership* Indonesia dan Amerika Serikat ditandai dengan pembentukan 6 *Working Group* termasuk *Working Group on Democracy and Civil Society* untuk melaksanakan kerjasama di bidang politik dan keamanan. Pada tahun 2010 dan 2011 telah diselenggarakan *Joint Commission Meeting (JCM)* yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri kedua negara. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat juga telah melaksanakan *Stocktaking Meeting of Civic Engagement* 2 Juli 2011 dan *Indonesia-United States*

Roundtable Discussion on Developing Civic Education Centers, dalam kerangka WGDCS, di Washington DC dan Boston pada tanggal 5-8 Juli 2011.

Dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi, Indonesia tetap berkiprah di berbagai organisasi utama internasional. Di G-20 Indonesia mengoptimalkan kerja sama untuk mendukung perbaikan ekonomi global dan peningkatan pembangunan ekonomi dalam negeri. Indonesia juga berupaya terus untuk mewujudkan cita-cita menjadi *emerging economy* di masa mendatang, dengan penempatan per kapita dan dengan nilai perekonomian yang jauh lebih tinggi.

Indonesia juga terus berupaya untuk memastikan peran Indonesia di forum G-20 dan bersinergi dengan pencapaian cita-cita reformasi di dalam negeri, menciptakan pemerintahan yang bersih untuk memerangi korupsi, dan terwujudnya prinsip-prinsip *good governance*. Untuk itu Indonesia banyak mengambil prakarsa dan berpartisipasi aktif pada kelompok kerja keuangan, kelompok kerja pembangunan, dan kelompok kerja anti-korupsi di G-20. Indonesia juga telah memainkan peran aktif untuk mendorong reformasi tata kelola ekonomi dunia sebagai upaya untuk menangani krisis ekonomi global. Peran aktif tersebut berpeluang besar dilakukan di forum multilateral seperti Kelompok 77, APEC dan G-20. Pada pertemuan Sherpa G-20 di Paris Januari 2011, Indonesia menyampaikan sikap dan pendapat agar perundingan Doha dapat segera diselesaikan.

Dalam memantapkan Kerja sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia telah melakukan berbagai kerjasama teknik atau bantuan teknik sebagai salah satu alat diplomasi Indonesia yang menggunakan *soft power*. Kerja sama ini dilaksanakan untuk mendukung upaya-upaya diplomasi yang sedang dilancarkan, antara lain dalam rangka menjaga dukungan negara lain terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dukungan terhadap posisi Indonesia di dalam isu-isu internasional. Bantuan teknik Indonesia diharapkan dapat mendorong perubahan pandangan dan sikap negara penerima bantuan terhadap Indonesia sejalan dengan kepentingan Indonesia.

Bagi Indonesia pengembangan KSS semakin penting dengan masuknya Indonesia sebagai negara dengan penghasilan menengah (*middle income country*) dan menjadi anggota G-20. Keanggotaan di G-20 memungkinkan Indonesia memberikan

kontribusi yang penting dengan menguarakan pandangan negara-negara berkembang terhadap berbagai perkembangan dunia yang dapat mempengaruhi stabilitas dan pembangunan di negara berkembang. Peran ini akan semakin penting seiring dengan prakiraan bahwa posisi Indonesia akan meningkat menjadi kekuatan ekonomi ke sepuluh pada 2020, dan kelima pada tahun 2030 (Sumber: Supencycle Report, Standard Chartered, 2010).

Kebijakan KSS telah tercantum dalam *fatarta Commitment* 2009 dan RPJMN 2010-2014. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan KSS Indonesia berdasarkan SK Menteri PPN (2 Agustus 2010 dan 26 Mei 2011). Tim Koordinasi bertugas antara lain mengembangkan *Grand Design* KSS 2011-2025 dan *Blue Print* KSS 2011-2014. Saat ini, Indonesia sudah mulai mengidentifikasi *flagship* program yang akan menjadi program KSS untuk mulai dilaksanakan pada tahun 2012 secara lebih terkoordinasi.

Kontribusi Indonesia dalam KSS sejauh ini diestimasi sebesar USD 42 juta dalam kurun waktu 2000-2010. Beberapa kegiatan telah dilakukan dan mendapat apresiasi internasional seperti antara lain program training inseminasi buatan, training keluarga berencana, pengiriman tenaga ahli dan bantuan peralatan pertanian ke Afrika, workshop *disaster management, community empowerment program (PNPM)*, dan sebagainya. Hubungan bilateral dengan negara-negara Afrika, Timur Tengah, Asia dan Pasifik juga dijalin melalui pemberian bantuan kerjasama teknik khususnya di bawah payung Kerjasama Selatan-Selatan. Dalam kaitan ini, sepanjang tahun 2011, Indonesia telah memberikan bantuan/kerjasama teknik di berbagai bidang dimana Indonesia memiliki kapasitas unggulan di bidang tersebut. Berbagai kegiatan dalam bentuk pelatihan dan penugasan yang melibatkan sejumlah besar peserta yang berasal dari wilayah Asia, Afrika, Timur Tengah dan Pasifik.

6.2.3 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2013

Perkembangan dinamika situasi global dalam dekade terakhir ditandai oleh berbagai tantangan dan ancaman yang bersifat multidimensional dan kompleks. Disamping isu-isu yang bersifat tradisional, munculnya isu-isu non-tradisional dan fenomena perkembangan geopolitik serta geoekonomi, baik di tingkat global maupun regional, merupakan tantangan yang harus dihadapi dan disikapi oleh Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan Komunitas ASEAN 2015 yang memiliki tiga pilar utama, yakni Komunitas Politik-Keanamanan, Komunitas Ekonomi, dan Komunitas Sosial-Budaya, ASEAN memerlukan dukungan yang kuat, baik dari dalam maupun dari luar, dalam rangka mendorong keterhubungan atau konektivitas (*connectivity*) bagi sesama negara anggota ASEAN. Oleh karenanya, ASEAN membutuhkan suatu cetak biru bagi terciptanya suatu keterhubungan atau konektivitas antar-anggota ASEAN dimaksud.

Pengembangan dan *progress* bagi ketiga strategi pilar Konektivitas ASEAN memerlukan sumber-sumber daya pembiayaan dan mekanisme kelembagaan yang terintegrasi serta sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, rencana aksi *Master Plan of ASEAN Connectivity* (MPAC) memerlukan sinkronisasi dalam menjalankan rencana-rencana sektoral dalam kawasan dan sub-sub kawasan. Jaringan-jaringan produksi dan distribusi juga memerlukan kedalaman, keluasan, dan keberakaran pada ekonomi Asia Pasifik dan ekonomi global secara keseluruhan.

Tantangan-tantangan lain dalam mewujudkan Konektivitas ASEAN dalam hal kesenjangan pembangunan di antara negara-negara ASEAN antara lain meliputi pendapatan, infrastruktur, dan modal manusia (*development gaps*); tenaga kerja yang tidak terlatih dan kurang terdidik (*unskilled labor*) sulit masuk untuk berintegrasi dalam pasar tenaga kerja ASEAN yang telah unggul; terjadinya beberapa bencana alam (*natural disaster*) yang tidak dapat diperkirakan mengingat kawasan Asia Tenggara berada di daerah Cincin Api Pasifik; dan pindahnya pekerja terdidik dan terlatih dari negara ASEAN yang agak terbelakang ke negara yang lebih maju (*resource drain*).

Persoalan lain masih terkait dengan kurangnya pemahaman publik domestik terhadap pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 dan masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan *action lines* di masing-masing pilar. Pelaksanaan Cetak Biru ASEAN *Political-Security Community* (APSC), hingga Oktober 2011 baru mencapai 10% dari total 147 *action lines* yang ditargetkan. Prosentase terbesar adalah *action lines* yang sedang berjalan (*on going*), yakni sebesar 69 %. Sedangkan 21% dari *action lines* ini belum diselesaikan. Masih rendahnya pencapaian *action lines* dalam Cetak Biru APSC ini disebabkan oleh sejumlah persoalan di tingkat nasional, dan juga pada tingkat regional

ASEAN, di antaranya adalah *Pertama*, adanya *action lines* yang bersifat umum, sukarela, dan tidak memiliki batas waktu/target, sehingga sulit untuk memberlakukan *score card* seperti yang dilakukan oleh pilar *ASEAN Economic Community* yang memiliki batas waktu yang jelas dan tegas terkait pencapaian *blue print*. Sifat sukarela ini juga berbeda dengan yang diterapkan oleh Uni Eropa, misalnya, yang memberlakukan hukuman dalam pelaksanaan kerja sama Kawasan. *Kedua*, adanya keterbatasan biaya untuk melaksanakan *action lines* yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaannya tidak optimal. *Ketiga*, belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan APSC di Indonesia, bahkan untuk tingkat ASEAN, sehingga permasalahan yang muncul tidak terpantau dan tidak ada *feedback* yang bisa dimanfaatkan. Ini juga terkait dengan masalah tidak tersedianya informasi tentang implementasi *action lines* di masing-masing negara. *Keempat*, masih terbatasnya koordinasi, baik internal di dalam negeri maupun antar *sectoral bodies* ASEAN yang berdampak serius mengingat banyaknya isu yang bersifat lintas bidang. *Kelima*, strategi komunikasi belum berjalan dengan optimal, padahal ini sangat penting untuk menjangkau semua pemangku kepentingan. *Keenam*, APSC masih bersifat elitis, terkesan hanya melibatkan hubungan antar pemerintah saja sehingga *action plan* sudah diadopsi namun tidak berjalan dengan optimal.

Peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional, dan perdamaian dunia perlu dilakukan dengan seksama. Tantangan yang masih dihadapi adalah upaya mengedepankan prinsip multilateralisme dalam pemecahan masalah/konflik dalam mekanisme PBB. Upaya ini masih sering terhambat oleh mekanisme pengambilan kebijakan strategis di PBB, khususnya yang terkait dengan posisi Dewan Keamanan (DK) yang lebih dominan daripada Majelis Umum (MU) dalam isu-isu keamanan dan konflik. Sepanjang 2011, DK mengeluarkan 66 resolusi terkait berbagai situasi konflik di dunia, yang menunjukkan besarnya peran DK yang tidak mewakili seluruh anggota PBB. Untuk itu, Indonesia selalu berupaya sekuat tenaga mendukung instrumen-instrumen yang disepakati melalui mekanisme multilateral, seperti misalnya UNGCTS, untuk menunjukkan bahwa instrumen multilateral dapat berfungsi secara efektif.

Terkait dengan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina di PBB, permasalahan kembali mengemuka ketika

Palestina gagal meraih dukungan suara untuk mendapatkan status negara Palestina merdeka. Kegagalan ini terkait dengan sikap sejumlah negara anggota PBB, termasuk anggota tetap DK, yang menentang status negara Palestina merdeka. Dengan belum berhasilnya upaya ini, Indonesia dan negara-negara lain perlu mempertimbangkan cara-cara lain untuk mendukung upaya Palestina di PBB.

Kerja sama internasional dalam penanggulangan tindak kejahatan terorisme masih menghadapi persoalan kurangnya mekanisme multilateral untuk penanggulangan terorisme. Dominasi inisiatif unilateral dalam isu ini berpotensi menghasilkan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap HAM. UNGCTS adalah instrumen multilateral pertama untuk kerja sama penanggulangan terorisme. Namun instrumen ini membutuhkan dukungan yang konsisten karena seringkali diragukan efektivitasnya.

Masalah perbatasan hingga saat ini masih menjadi tantangan bagi Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia dengan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta km persegi. Salah satu tantangan utama dalam diplomasi perbatasan adalah bahwa terlaksananya perundingan perbatasan sangat dipengaruhi oleh kesediaan negara mitra perbatasan untuk berunding. Perhatian khusus akan tetap diberikan pada diplomasi perbatasan guna mencapai kemajuan dalam penuntasan isu-isu yang masih ada terkait penentuan demarkasi dan garis perbatasan dengan negara-negara tetangga. Oleh karena itu, Indonesia terus mengupayakan secara intensif penetapan batas wilayah negara baik darat, udara, dan laut serta pengelolaan masalah perbatasan dalam *border diplomacy* yang dilaksanakan melalui upaya diplomatik dan melibatkan seluruh elemen bangsa Indonesia.

Strategi diplomasi harus dilakukan pemerintah untuk menegaskan garis/wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, dan Papua Nugini. Diplomasi perbatasan perlu menjadi isu penting yang memerlukan gugus tugas di dalam penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri. Kenyataan bahwa sengketa batas wilayah dengan Malaysia selalu muncul menunjukkan bahwa diplomasi perbatasan belum dilaksanakan berkelanjutan.

Sesuai dengan tingkat kepentingan kawasan termasuk faktor strategis, navigasi dan sumber kekayaan alam yang ada maka prioritas penyelesaian masalah perbatasan adalah perundingan penetapan perbatasan dengan Malaysia (batas darat dan laut), Singapura (batas laut wilayah segmen timur), Filipina (batas ZEE dan LK), Palau (batas ZEE), Vietnam (batas ZEE), Thailand (batas ZEE), dan India (batas ZEE), Timor-Leste (batas darat), dan perundingan penetapan perbatasan dengan Timor Leste (batas laut wilayah, ZEE, LK).

Terkait dengan perlindungan dan pelayanan WNI/RIH di luar negeri, permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi masih belum bergeser dari tahun-tahun sebelumnya, yang terfokus pada persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI). Dalam paruh kedua tahun 2011, masalah TKI yang menghadapi ancaman hukuman mati terus menjadi salah satu isu yang mendominasi permasalahan tenaga kerja Indonesia. Menurut Satgas TKI, hingga akhir Oktober 2011 ada sekitar 212 warga negara Indonesia (mayoritas bekerja sebagai buruh migran) terancam hukuman mati di Malaysia, Saudi Arabia, Singapura dan China. Tiga orang tenaga kerja Indonesia (Tuti Tursilawati, Salimah dan Siti Zaenab) menunggu eksekusi pancung di Saudi Arabia karena vonis pengadilan sudah final dan tidak ada pemaafan dari keluarga majikan.

Dari kondisi yang ada, sejumlah tantangan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Belum adanya cetak biru diplomasi perlindungan tenaga kerja Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari politik luar negeri Indonesia.
2. Belum adanya perjanjian pengiriman dan penerimaan TKI, khususnya untuk Saudi Arabia.
3. Masih lemahnya koordinasi antara kementerian dan lembaga negara yang memiliki portofolio mengenai *penerapatan dan perlindungan buruh migran Indonesia*.
4. Belum terakomodasi *peran sertamasyarakat sipil dalam diplomasi perlindungan buruh migran Indonesia*.
5. Tantangan pelayanan dan pemberian bantuan hukum melalui *citizen services*.
6. Adanya keterbatasan penyediaan basis data terpilah, dinamis dan sebar tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
7. Adanya kesulitan akses ke konsuleran di negara-negara

tertentu yang tidak mengikuti praktik internasional dimana setiap WNA yang bermasalah harus diinformasikan kepada kantor perwakilan dan pemerintahnya.

8. Masih lemahnya monov terkait dengan upaya perlindungan TKI.

Terkait dengan tantangan ini, seperti yang telah ditekankan oleh Presiden RI pada pidato 19 Oktober 2011 lalu, perlindungan TKI menjadi salah satu dari 7 isu besar yang perlu direspon. Bantuan hukum yang cepat, tepat dan efektif adalah langkah yang perlu dikedepankan. Di samping itu, peningkatan pemahaman para TKI mengenai hukum, aturan, dan sistem yang berlaku di negara tempat mereka bekerja juga menjadi tuntutan mendesak yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri saja tentu tidak akan mencukupi, sehingga dukungan dari K/L terkait dan pemerintah daerah perlu mendapatkan perhatian khusus.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam memajukan Demokrasi dan HAM semakin berkembang dari tahun ke tahun mengingat semakin menguatnya pengakuan internasional atas demokrasi Indonesia. Namun demikian, munculnya sejumlah persoalan baru di dalam negeri yang melibatkan kekerasan aparat terhadap masyarakat maupun kekerasan antar kelompok masyarakat di tahun 2011 merupakan persoalan-persoalan yang berpotensi memberatkan langkah Indonesia untuk berperan dalam kemajuan demokrasi dan HAM di level internasional.

Berkaitan dengan kemitraan strategis di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta kawasan Amerika dan Eropa, penandatanganan kesepakatan komprehensif dan strategis dengan berbagai negara dalam beberapa tahun terakhir merupakan capaian penting politik luar negeri Indonesia. Namun demikian, seringkali permasalahan muncul di tingkat implementasi kesepakatan tersebut mengingat tidak hanya Kemlu yang terlibat, namun juga terdapat peran besar dari berbagai K/L teknis terkait.

Krisis ekonomi global yang berpusat di Eropa menjadi salah satu sumber permasalahan yang dapat menghambat diplomasi ekonomi Indonesia, meskipun berbagai faktor terkait seperti masuknya Indonesia sebagai negara "investment grade" pada akhir tahun 2011 tentunya akan menjadi salah satu modal

positif Indonesia dalam bidang ini.

Permasalahan yang perlu segera diatasi dalam pelaksanaan Kerja sama Selatan-Selatan antara lain perlunya memasukkan isu KSS dalam kerangka perumhoangan karena memerlukan komiteo politik baik dari kalangan pemerintah maupun legislatif. Di samping itu, tantangan yang dihadapi adalah alokasi dana yang ideal untuk mendukung pelaksanaan KSS Indonesia yang bersumber dari APBN melalui optimalisasi dan penajaman alokasi anggaran, sehingga pengeluaran pemerintah dapat lebih efisien dan efektif serta lebih terarah dan tepat sasaran.

Tantangan lain adalah upaya konsolidasi dan sinergi berbagai elemen KSS yang meliputi kerjasama ekonomi, teknik, sosial budaya dan iptek sehingga dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang optimal; dan munculnya berbagai kecenderungan dan isu-isu baru dalam KSS yang menuntut peran proaktif dan antisipatif dalam perencanaan dan pengembangao KSS Indonesia. Terkait masalah kelembagaan, tantangan yang dihadapi adalah persoalan koordinasi dan kerja sama antara kementerian/lembaga terkait yang berperan mengelola pelaksanaan kebijakan KSS. Saat ini banyak pihak yang terlibat, namun belum cukup sinergis dan saling melengkapi satu sama lain dalam upaya mendukung KSS yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Hal lain adalah munculnya skema baru yang mendorong kerjasama antar kawasan dan desentralisasi KSS dengan melibatkan lembaga di luar pemerintah pusat dan juga melibatkan pemerintahan lokal. Peningkatan integrasi kerjasama di dalam kawasan maupun antar kawasan merupakan tantangan yang memerlukan suatu strategi untuk dapat memperkuat posisi Indonesia di antara banyaknya kompetitor yang kuat seperti India, Cina, dan Korea baik di kawasan pasar tradisional maupun pasar nontradisional.

Berdasarkan identifikasi berbagai permasalahan tersebut di atas dan dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, pada tahun 2013 sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meluasnya pemahaman dan partisipasi publik untuk mewujudkan Komunitas ASEAN 2015, serta meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan ASEAN.

2. Meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan kepercayaan dunia, serta mendorong reformasi DK PBB.
3. Terselesaikannya secara bertahap permasalahan perbatasan.
4. Terlindunginya WNI di luar negeri dan terselesaikannya kasus WNI bermasalah di luar negeri.
5. Meningkatnya peran Indonesia di dunia internasional dalam penajuan demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan perlindungan budaya.
6. Meningkatnya kerja sama bilateral dan regional di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata khususnya di kawasan Afrika, Eropa Tengah dan Timur.
7. Meningkatnya diplomasi ekonomi untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang dalam forum multilateral.
8. Terlembaganya pengelolaan KSS dan terakomodasinya dalam peraturan perundangan, serta meluasnya kerja sama teknik.

BAB 7 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

7.1 Kondisi Umum

Prioritas pembangunan bidang pertahanan dan keamanan tahun 2013 yang merupakan tahun keempat RPJMN 2010 – 2014 adalah : (i) Peningkatan kemampuan pertahanan menuju *minimum essential force*; (ii) Pemberdayaan industri pertahanan nasional; (iii) Pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut (*illegal fishing* dan *illegal logging*); (iv) Peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat; (v) Modernisasi deteksi dini keamanan nasional; dan (vi) Peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional. Keenam prioritas bidang tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan bidang Hankam 2010 – 2014 yaitu peningkatan kemampuan pertahanan negara dan kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif, sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.

Secara umum, pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang pertahanan dan keamanan telah menunjukkan kerberhasilannya, meskipun masih ada sasaran pokok yang belum dapat diwujudkan dan beberapa sasaran pokok yang lain capaiannya memerlukan percepatan. Dari aspek pertahanan, dengan dukungan anggaran yang semakin memadai dan adanya peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri, alutsista TNI semakin meningkat kesiapannya baik dari sisi jumlah, kualitas, maupun teknologinya. Peningkatan yang semakin membaik tersebut, diharapkan dapat meningkatkan daya penggentar sistem pertahanan Indonesia, sehingga upaya-upaya pihak asing untuk mengganggu kewibawaan dan kedaulatan NKRI dapat ditekan.

Sementara itu dari aspek keamanan, meskipun beberapa indikator keberhasilan pembangunan keamanan menunjukkan peningkatan yang lebih baik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa kasus gangguan keamanan dan ketertiban yang menimbulkan keraguan keberhasilan penciptaan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kasus kekerasan di Mesuji, demo penolakan pertambangan di Bima, penembakan pekerja di Aceh, pemblokiran jalan tol di Bekasi yang berlatar belakang masalah perburuhan, kekerasan di Papua, dan kasus-kasus ketidakadilan penegakan

hukum seperti penggantian setimpal untuk kasus-kasus kriminal ringan yang bermotif keterbatasan ekonomi, meninggalkannya tersangka dalam tahanan, atau kasus-kasus pelanggaran hak menjalankan keyakinan menjadi ganjalan keberhasilan pembangunan keamanan dan keterlibatan.

Di samping itu, adanya kasus-kasus pelanggaran disiplin dan pidana yang dilakukan oleh sejumlah aparat TNI dan Polri seperti keterlibatan dalam tindak pidana, ketidaknetralan dalam penanganan kasus-kasus perusahaan, penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba, melakukan kekerasan kepada masyarakat, atau kasus-kasus salah tembak yang mengakibatkan kematian warga masih menjadi catatan penting dalam pembangunan pertahanan dan keamanan tahun 2013. Oleh karena itu, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan akan ditekankan pada peningkatan profesionalisme yang didukung sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kesejahteraan, dan meningkatkan peran Indonesia dalam menciptakan keamanan dan perdamaian dunia.

GAMBAR 7.1
KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
2010 - 2014



Upaya percepatan pembangunan pertahanan skala *minimum essential force (MEF)* pada tahun 2011 telah mencapai 21,00 % atau meningkat 9 % dari tahun 2010 sebelumnya. Diharapkan pada tahun 2012 akan mencapai 28,67% dari rencana pencapaian postur MEF sebesar 43,67 % pada tahun 2014. Pencapaian tersebut berdampak pada kesiapan Alutsista TNI pada setiap angkatan. Secara berturut-turut kekuatan Alutsista untuk matra darat kesiapannya rata-rata mencapai 81,13%; matra laut kesiapannya rata-rata mencapai 43,25%; dan matra udara kesiapannya rata-rata mencapai 71%. Peningkatan postur tersebut relatif tidak terlalu

signifikan karena di satu sisi terjadi penambahan Alutsista, tetapi di sisi lain terjadi pengurangan akibat berakhirnya usia pakai Alutsista. Sementara itu, untuk menciptakan profesionalisme TNI di samping melalui peningkatan kesejahteraan seperti pemberian tunjangan kinerja, uang lauk pauk, pemeliharaan kesehatan, asuransi, program perumahan, santunan risiko meninggal dalam tugas, dan pemberian tunjangan khusus penugasan; juga dilakukan melalui penataan organisasi dan personel melalui kebijakan *zero growth* dan *right sizing*; serta peningkatan pendidikan dan latihan. Terkait dengan penugasan misi perdamaian PBB, pemerintah pada akhir tahun 2011 membentuk fasilitas pendidikan dan pelatihan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP). Langkah ini selain untuk meningkatkan profesionalisme penugasan prajurit, juga dalam rangka memelihara dan meningkatkan citra militer Indonesia.

Pelaksanaan operasi pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar masih terkendala dengan jumlah pos pertahanan yang belum mencukupi. Jarak pos perbatasan darat di Kalimantan Timur pada saat ini rata-rata berkisar 30,64 km, dan Kalimantan Barat rata-rata berkisar 32,7 km. Untuk Papua dan NTT jarak pos perbatasan darat relatif cukup pendek, di mana Papua rata-rata berkisar 7,55 km dan NTT rata-rata berkisar 5,08 km. Sedangkan untuk pos pulau terdepan (terluar), masih diprioritaskan pada 12 pulau (Permenhan 10/ 2010 menetapkan 92 pulau-pulau kecil terluar dengan prioritas 12 pulau). Oleh karenanya, tingkat kerawanan di wilayah perbatasan, khususnya wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, serta pulau terdepan (terluar) lainnya masih relatif tinggi. Bentuk gangguan dan pelanggaran di wilayah perbatasan tersebut diantaranya adalah *illegal logging*, *illegal mining*, *illegal fishing*, pergeseran patok perbatasan, sengketa perbatasan dan klaim pemilikan gugusan pulau, dan berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Namun dengan dibentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pemberian insentif bagi prajurit yang bertugas pada wilayah kritis seperti perbatasan, serta pemberian remunerasi mulai tahun 2010 bagi anggota TNI, maka upaya menegakkan kedaulatan dan menciptakan kesejahteraan di wilayah perbatasan diharapkan akan semakin membaik.

Peran industri pertahanan dalam negeri dalam rangka mendukung pemenuhan alutsista TNI maupun almatsus Polri

semakin meningkat. Pada tahun 2011 akuisi Alutsista TNI hasil produksi industri pertahanan dalam negeri mencapai 13,7%, dan akuisisi Alut Polri hasil produksi industri pertahanan dalam negeri mencapai 12,5 %. Diharapkan pada tahun 2012, akuisisinya meningkat menjadi 15,8 % untuk Alutsista TNI dan 14,3 % untuk Alut Polri. Dari aspek kebijakan, akselerasi industri pertahanan dalam negeri telah didukung dengan seperangkat peraturan perundang-undangan. Di samping telah dibentuk komite kebijakan industri pertahanan (KKIP), saat ini juga telah dibentuk *high level committee* (HLC) yang berwenang dalam menentukan jenis dan produk alutsista yang akan diproduksi di dalam negeri. Diharapkan pada tahun 2012, RUU Revitalisasi Industri Pertahanan dapat disahkan, sehingga kendala seperti sinergi antar kelembagaan, mekanisme pengadaan, partisipasi industri dalam negeri, insentif fiskal, pengalibangan SDM, dan jaminan pembiayaan dapat diselesaikan dan diatasi dengan baik. Beberapa produk militer produksi dalam negeri yang sudah mewarnai kelengkapan alutsista TNI dan Polri diantaranya adalah *Fast Patrol Boat* 57 M, Landing Platform Dock (LPD) 100 M, KCR 40 M, Torpedo SUT, Heli NBell 412, CN-235 MPA, Senjata SS-1 *Marinize*, dan Rampur APS 6x6. Adapun proyek kerjasama pembuatan pesawat tempur KP-X/IF-X antara Indonesia dan Korea Selatan, saat ini sudah memasuki *technical design phase* (TDP) dan diharapkan pada tahun 2013 nanti memasuki tahap *engineering and manufacturing development* (EMD).

Sebagai lintas pelayaran tersibuk dan strategis di dunia, Selat Malaka masih sangat rawan terhadap tindak kejahatan di laut terutama dari aksi perompakan, sehingga upaya pengamanannya perlu ditingkatkan. Melalui operasi dan patroli bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura melalui *Malacca Strait Sea Patrol* (MSSP) dan melalui operasi mandiri oleh TNI AL maupun operasi terpadu Bakorkamla, tindak perompakan di Selat Malaka mengalami penurunan. Pada tahun 2008 aksi perompakan di Selat Malaka tercatat ada 2 insiden, tahun 2009 sebanyak 1 insiden, dan sampai dengan Juli 2010 sama sekali tidak terjadi insiden perompakan, meskipun di perairan Pulau Mangkai yang merupakan jalur pelayaran dari Malaka menuju China dari Februari 2010 - September 2010 telah terjadi percobaan perompakan sebanyak 27 insiden. Namun demikian, pada tahun 2011, telah terjadi perompakan dan pembajakan kapal

yang menggunakan senjata sebanyak 41 insiden. Kejadian ini menunjukkan bahwa Selat Malaka masih menjadi terpadat favorit bagi pelaku kejahatan di laut dan dunia pelayaran internasional masih menempatkan perairan Indonesia sebagai wilayah yang relatif berbahaya.

Sementara itu, pengamanan perairan Indonesia, termasuk ALKI, pengamanannya terus ditingkatkan untuk menekan ancaman kekerasan (pembajakan, perompakan, sabotase, serta teror obyek vital), ancaman navigasi (kelangkaan dan pencurian sarana bantu navigasi), ancaman sumber daya (perusakan dan pencemaran laut), dan ancaman kedaulatan dan hukum (*illegal fishing, illegal logging, illegal mining* termasuk pengambilan harta karun, penyelundupan barang dan senjata, serta imigran gelap). Data mutakhir menunjukkan kerugian akibat penyelundupan pasir laut senilai Rp. 72 triliun, penyelundupan BBM senilai Rp. 50 triliun, kayu senilai Rp. 30 triliun, dan pencurian ikan senilai Rp. 38 triliun. Kondisi ini cukup memprihatinkan dan menuntut upaya sistematis dari bangsa dan pemerintah untuk terus menyelamatkan perairan Indonesia dari gangguan keamanan, hukum, dan kedaulatan.

Dari 10 (sepuluh) negara yang berbatasan dengan Indonesia, pada saat ini yang rawan konflik adalah perbatasan RI - Malaysia, RI - Philipina, dan RI - Timor Leste. Permasalahan perbatasan darat RI - Malaysia terletak di Tanjung Datu, Gunung Raya, Batu Aruni, Sungai Simantipal, Sungai Sinapai, Pulau Sebatik, dan perbatasan laut berupa klaim Blok Ambalat oleh Malaysia. Permasalahan perbatasan RI - Philipina terkait dengan belum adanya kesepakatan garis batas di wilayah perairan Miangas. Sedangkan permasalahan perbatasan RI - Timor Leste adalah belum adanya kesepakatan garis batas di daerah Memo Delta Malibaka, Subina, Bijael Sunan Oben, Delta Sungai Noesbesi, serta terdapat 31 patok batas yang hilang. Kerawanan tersebut tidak terlepas dari pembangunan wilayah perbatasan yang belum optimal.

Kondisi geografis maupun demografis Indonesia di satu sisi merupakan anugerah yang tidak ternilai, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ancaman apabila tidak dikelola dan diawasi secara baik. Wilayah yang sangat terbuka secara geografis dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, menjadikan Indonesia sebagai salah satu mata rantai perekonomian dunia, sekaligus sebagai mata rantai aktivitas kejahatan lintas negara seperti perdagangan gelap narkoba,

perdagangan dan penyelundupan manusia, terorisme, atau kejahatan lintas negara lainnya. Kondisi ini merupakan tantangan pemerintah dalam memelihara keamanan dalam negeri untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Pada tanggal 26 Juni 2011, bertepatan dengan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI), Presiden RI mencanangkan "Indonesia Negeri Bebas Narkoba", diikuti dengan mengeluarkan Impres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi di Bidang P4GN. Penceranaan ini membuktikan bahwa masalah narkoba di Indonesia masih menjadi masalah yang serius dan memerlukan kepedulian semua komponen masyarakat. Dilatapkannya UU Nomor 35/2009 Tentang Narkotika, telah ditindaklanjuti dengan diterbitkan sejumlah peraturan diantaranya PP No. 23 tentang BNN, PP No. 25/2011 tentang Wajib Laport Bagi Pecandu Narkoba, Perkep BNN No. 1/2011 tentang Teknis Penyusunan Kejasama BNN, Perkep BNN No. 2/2011 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkoba, Perkep BNN No. 5/2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika, dan Perkep BNN No. 11/2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada BNN. Sejumlah peraturan perundangan tersebut makin mempertegas tugas dan fungsi BNN dalam P4GN yang saat ini sedang memperkuat struktur organisasi vertikalnya di daerah.

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kejahatan narkoba pada tahun 2011 masih cukup tinggi. Sampai dengan November 2011, jumlah kasus yang telah diserahkan kepada penuntut umum sebanyak 26.560 kasus dengan jumlah tersangka yang ditangkap sebanyak 32.876 orang. Angka kasus ini meningkat 8,07 % dibandingkan tahun 2010 yang berjumlah 24.417 kasus. Total pelaku yang mendapatkan vonis mati berjumlah 58 orang, 41 orang diantaranya warga negara asing. Namun sampai saat ini, belum ada satupun terpidana yang dieksekusi berdasarkan UU No. 35/2009 sehingga efek jera belum dirasakan bagi para pelaku kejahatan narkoba. Sementara itu, WNI yang terlibat kasus narkoba di luar negeri mencapai 501 orang di 22 negara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 284 orang mendapat vonis hukuman mati, dengan rincian 271 orang di Malaysia dan 13 orang di China.

Sampai saat ini, Indonesia masih merupakan sumber perdagangan perempuan, anak-anak dan laki-laki untuk tujuan kerja paksa dan eksploitasi komersial seksual. Berdasarkan data *International Organization for Migration (IOM)* Indonesia, secara kumulatif dari tahun 2005 - 2011 jumlah korban kasus perdagangan manusia di Indonesia mencapai 3.943 orang, yang terdiri dari 3.559 orang perempuan dan 384 orang laki-laki. Jawa Barat masih merupakan daerah asal korban tertinggi, yaitu mencapai 920 orang atau 23,33% dari total korban perdagangan manusia yang ada di Indonesia. Kebanyakan mereka berasal dari daerah Indramayu dan Bandung. Posisi kedua adalah Kalimantan Barat yang mencapai 722 atau 18,31%, dan posisi ketiga adalah Jawa Timur yang mencapai 478 atau 12,12 %. Dibandingkan tahun sebelumnya masih terjadi peningkatan, namun dari aspek daerah asal korban dan peringkat propinsi dalam kasus perdagangan manusia tidak mengalami berubah. Kecenderungan meningkatnya kasus ini, menunjukkan bahwa perdagangan manusia masih merupakan ancaman bagi Indonesia dan memerlukan kesadaran semua pihak, terutama kepada pencari kerja agar tidak mudah tergigit ajakan-ajakan yang tidak masuk akal, seperti dijanjikan mendapatkan gaji yang tinggi.

Pemerintah semakin berhasil dalam mengungkap, mencegah, melumpuhkan, dan menangkap pelaku serta jaringan terorisme. Keberhasilan ini telah meningkatkan rasa tenteram di masyarakat dan dunia usaha, sehingga apresiasi tidak hanya datang dari dalam negeri, namun juga dari dunia internasional. Pada tahun 2011, aparat berhasil mengungkap 10 kasus aksi terorisme, diantaranya adalah bom masjid Polres Cirebon, bom buku di Jakarta, bom di ponpres Umar bin Khatah Bima, dan bom gereja Bethel Solo. Keberhasilan ini menambah daftar panjang prestasi penanganan terorisme di mana dalam kurun waktu tahun 2002 - 2011, secara kumulatif aparat keamanan berhasil menangkap 695 orang yang diduga sebagai pelaku terorisme. Dari hasil penangkapan tersebut, 66 orang tewas di TKP, 43 orang dalam proses sidang, 22 orang dalam proses penyidikan, 519 orang sudah mendapatkan vonis, 279 sedang menjalani hukuman, 240 orang selesai menjalani hukuman, dan 22 orang tersangka mengulangi tindak perkara (residivis). Mengingat masih besarnya potensi terjadinya aksi terorisme, baik oleh aktor lama maupun aktor baru, maka peran Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme (BKPT) dalam upaya deradikalisasi semakin diperlukan.

Peningkatan kinerja kepolisian dilaksanakan melalui reformasi birokrasi yang saat ini telah memasuki gelombang kedua dan disinergikan dengan revitalisasi Polri yang digariskan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Upaya tersebut menghasilkan beberapa capaian yang dianggap signifikan meningkatkan kinerja atau citra Polri di masyarakat. Pada tahun 2011, Polri telah melakukan penguatan kemampuan Densus-88; pembenahan kinerja Reserse; implementasi struktur organisasi Polri yang baru; mempercepat perubahan budaya Polri dengan memacu perubahan *mind set dan culture set* Polri; menggelar sentra pelayanan masyarakat (SPK); dan layanan pengadaan sistem elektronik (LPSE). Selanjutnya dalam proses perekrutan calon taruna (CATAR) Akademi Kepolisian (AKPOL) dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS telah menerapkan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH). Penerapan mekanisme perekrutan tersebut telah memperoleh pengakuan internasional berupa sertifikasi ISO SERI 9001 : 2000 pada tahun 2008 dan ISO SERI 9001 : 2008 pada tahun 2010.

Sepanjang tahun 2011, telah dilaksanakan pengawasan dan penindakan hukum terhadap 12.987 orang anggota Polri yang melanggar tata tertib (tahun 2010 sebanyak 26.872 orang); 3.429 orang anggota Polri yang melanggar disiplin (tahun 2010 sebanyak 6.900 orang), 376 orang anggota Polri yang melanggar kode etik (tahun 2010 sebanyak 412 orang), dan 267 orang anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana dan pelanggaran berat (tahun 2010 sebanyak 298 orang). Sementara itu, jumlah anggota Polri yang melakukan tindak pidana sebanyak 207 orang (tahun 2010 sebanyak 512 orang). Jumlah anggota polisi yang terlibat pelanggaran tata tertib, disiplin, kode etik, dan hukum secara keseluruhan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas anggota Polri semakin membaik dan penegakan hukum yang tegas mampu menurunkan tingkat pelanggaran anggota Polri.

7.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2013

7.2.1 Permasalahan

7.2.1.1 Kesenjangan Postur dan Struktur Pertahanan Negara

Meningkatnya ancaman pertahanan negara baik dari kekuatan militer negara lain maupun ancaman dalam bentuk baru (non-traditional threat) memerlukan pengembangan postur dan struktur pertahanan. Namun dengan kondisi keuangan negara yang terbatas, kekuatan pertahanan yang memungkinkan dibangun adalah pada skala *minimum essential force* (MEF). Diharapkan pada skala MEF ini kekuatan pertahanan mampu menghadapi perkembangan lingkungan strategis pertahanan, ancaman nyata yang dihadapi, serta dapat mendukung doktrin pertahanan yang dianut oleh TNI. Upaya membangun postur pertahanan dalam skala MEF tidaklah mudah. Dengan jumlah alutsista TNI yang masih kurang, tingkat kesiapan alutsista TNI yang rata-rata baru mencapai 65,13 % pada tahun 2011, serta sebagian besar alutsista TNI telah mengalami penurunan efek penggentar karena usia teknisnya yang sudah tua dan ketertinggalan teknologi, memerlukan dana yang sangat besar sekali. Oleh karena itu, pencapaian MEF tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, paling tidak membutuhkan 3 (tiga) tahapan Renstra. Selain dengan membangun Alutsista TNI, pengembangan postur dan struktur pertahanan negara dilakukan dengan membentuk prajurit TNI yang profesional, agar kedepannya para prajurit dapat menyesuaikan perkembangan teknologi dan keadaan lingkungan strategis pertahanan seiring dengan pemenuhan MEF.

7.2.1.2 Wilayah Perbatasan dan Pulau Terdepan (terluar)

Masih tingginya gangguan keamanan di wilayah perbatasan pada saat ini tidak terlepas akibat masih terbatasnya sarana dan prasarana pengamanan wilayah perbatasan. Di samping itu, perbedaan kesejahteraan dengan negara tetangga (prosperity) juga menjadi salah satu pemicu munculnya pelintas batas ilegal yang berujung pada pencurian sumber daya alam, perpindahan patok perbatasan, atau menurunnya rasa cinta tanah air. Sampai dengan akhir 2014, sarana wilayah perbatasan yang akan dibangun sebanyak 96 pos pertahanan darat dan 11 pos pulau terdepan (terluar), sehingga totalnya menjadi 295 pos pertahanan darat dan 23 pos pulau terdepan (terluar). Namun dalam dua tahun pelaksanaan RPJM 2010 - 2014, baru terbangun 7 pos pertahanan darat di wilayah Kodam VI/TPR Tanjungpura dan Kodam XVII/Cen Cendrawasih. Dengan demikian totalnya mencapai 206 pos pertahanan dari total kebutuhan minimal

sebanyak 395 pos pertahanan.

7.2.1.3 Industri Pertahanan

Hasil industri pertahanan dalam negeri secara gradual semakin mewarnai variasi dan jumlah Alutsista TNI dan Almitsus Polri. Dari tahun ke tahun belanja persenjataan hasil industri pertahanan dalam negeri semakin meningkat, terutama sejak tahun 2010 dengan ditetapkan kebijakan pinjaman dalam negeri (PDN). Secara konsep dan desain, SDM industri pertahanan Indonesia tidak kalah dengan SDM asing, seperti halnya dalam proyek pesawat tempur KP-X/TP-X, dimana tenaga ahli Indonesia mampu berkolaborasi secara baik dengan tenaga ahli Korea Selatan. Namun ketika memasuki tahap produksi, besarnya komponen impor masih menjadi kendala dalam menghasilkan produk yang memiliki daya saing tinggi. Hal tersebut akan menimbulkan kerugian ketika ada guncangan perekonomian global atau menjari alat penekan untuk mengikuti *mainstream*-nya. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan terobosan untuk memperkecil porsi bahan baku impor. Salah satu yang saat ini mendesak adalah mendorong tumbuhnya industri bahan baku pendorong (propellant) yang sangat dibutuhkan dalam industri amunisi, roket, maupun rudal yang kebutuhannya cukup besar.

7.2.1.4 Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional

Luasnya wilayah perairan Indonesia yang dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana penjagaan dan pengawasan terutama kapal patroli, *surveillance system*, dan pos-pos keamanan mengakibatkan masih banyaknya area-area kosong (*blank spot*) yang tidak terjangkau operasi pengawasan dan pengamanan. Akibatnya di wilayah laut yurisdiksi nasional, intensitas gangguan keamanan dan pelanggaran hukum masih tinggi dan belum sepenuhnya dapat ditangani oleh negara. Kondisi ini juga terkait dengan intensitas operasi yang sangat terbatas baik yang dilakukan secara terpadu maupun secara mandiri oleh lembaga-lembaga yang berwenang di laut. Banyaknya instansi yang memiliki kewenangan dalam usaha menjaga dan mengawasi wilayah laut Indonesia menuntut koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga yang berwenang di laut. Sementara itu, di masa depan ancaman dan gangguan keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional diperkirakan akan terus berkembang dan akan semakin meningkat dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi yang dikuasai oleh operator kapal laut ilegal. Apabila hal tersebut tidak mampu diimbangi, maka tindak pelanggaran hukum seperti penangkapan ikan liar dan

pembakalan liar diperkirakan akan semakin marak dan lebih sulit diatasi.

7.2.1.5 Keamanan dan Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka dan ALKI

Berdasarkan data *International Maritime Bureau* (IMB) jumlah serangan bajak laut kepada kapal perdagangan dunia meningkat dari 239 insiden pada tahun 2006 menjadi 445 insiden pada tahun 2010, dan kebanyakan terjadi di perairan pantai Somalia. Pada tahun 2011, sampai dengan bulan September telah terjadi serangan bajak laut sebanyak 352 kali, di mana 199 terjadi di Somalia, dan 41 insiden di Selat Malaka (Padahal pada 3 tahun sebelumnya telah terjadi penurunan insiden secara drastis). Kondisi ini menyebabkan dunia pelayaran internasional masih menempatkan Selat Malaka dan perairan internasional Indonesia lainnya sebagai wilayah yang relatif berbahaya bagi pelayaran kapal-kapal asing. Pengamanan jalur pelayaran internasional yang melalui Selat Malaka dan tiga jalur ALKI adalah tanggung jawab pemerintah Indonesia. Kelalaian dan kelemahan dalam pengamanannya, memiliki konsekuensi masuknya pasukan asing untuk turut mengamankannya sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1816 pada tanggal 2 Juni 2008 sebagaimana diterapkan di perairan Somalia.

7.2.1.6 Terorisme

Penegakan hukum secara tegas dalam pemberantasan terorisme nampaknya belum dapat menyurutkan aktivitas terorisme. Aksi-aksi teror seperti bom buku, bom bunuh diri di tempat-tempat ibadah, dan tempat-tempat umum lainnya dikhawatirkan masih akan terus terjadi. Tingginya tingkat kekecewaan dan keputusan turut mempengaruhi suburnya aksi terorisme. Kenyataannya pelaku tidak lagi hanya berasal dari kalangan pendidikan keagamaan atau keterbatasan ekonomi, tetapi banyak tersangka justru berasal dari kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu. Di sisi lain, adanya gerakan atau ormas keagamaan yang bersifat eksklusif dan radikal memberikan ruang untuk perekrutan pelaku teror baru. Meskipun masih sangat terbatas, di sebagian masyarakat sudah mulai ada pemahaman dan kesadaran terhadap bahaya terorisme. Sebagian masyarakat mulai memahami bahwa terorisme adalah musuh bersama dan bukan sebagai masalah persinggungan keagamaan. Oleh karena itu, peran BNPT yang selama ini lebih condong pada upaya penindakan, perlu ditingkatkan fungsi deradikalisasinya agar anasir-anasir radikal dapat ditekan sedemikian rupa sehingga negara terbebas dari aksi-aksi

7.2.1.7 Kejahatan Lintas Negara dan Kejahatan Serius (serious crime)

terorisme.

Dibandingkan tahun 2010, kejahatan lintas negara mengalami penurunan sebesar 22,86% yaitu dari 19.342 kasus menjadi 14.921 kasus pada tahun 2011. Namun demikian, kejahatan dengan kategori serius seperti narkoba, perdagangan dan penyulundupan manusia, serta kejahatan terorganisir dan terorisme masih merupakan permasalahan yang sangat mengkhawatirkan dengan intensitas kejadian yang masih cukup tinggi. Kondisi ini tidak terlepas dari sangat terbukanya wilayah Indonesia, sehingga membuka peluang dan kesempatan terjadinya tindak pidana yang bersifat lintas negara. Di samping itu, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan dihadapkan pada akses perekonomian yang terbatas, menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial sekaligus sumber rekrutmen kelompok kriminal seperti perdagangan narkoba, terorisme, perdagangan manusia. Dengan iming-iming gaji besar, pekerjaan mudah, dan bahkan dijadikan pasangan hidup, banyak perempuan Indonesia terlibat atau menjadi korban kejahatan lintas negara yang saat ini mendekam di penjara luar negeri. Permasalahan ini diperkirakan masih menjadi tantangan dalam menekan tindak kejahatan lintas negara mengingat masih lemahnya kemampuan membendung dan upaya-upaya perlindungan warga negara di luar negeri.

7.2.1.8 Intensitas dan Variasi Kejahatan Konvensional

Sepanjang tahun 2011, jumlah kejahatan konvensional yang terjadi mencapai 247.443 perkara, sedangkan pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 252.566 perkara (terjadi penurunan sebesar 2,02 %). Dari berbagai jenis kejahatan konvensional, ada enam jenis kejahatan yang banyak menimpa masyarakat, yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penipuan, penggelapan, penganiayaan berat, dan perjudian. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemicu terjadinya tindak kejahatan motifnya didorong oleh keterdesakan ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, serta upaya pemenuhan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Semakin murah dan mudahnya akses informasi dan komunikasi juga mendorong terjadinya tindak kriminalitas lewat handphone. Tidak sedikit masyarakat yang tertipu, terpedaya, atau terintimidasi oleh orang-orang yang tidak dikenal. Cara-cara pintas yang menjadi pemicu meningkatnya intensitas dan variasi kejahatan konvensional tersebut merupakan tantangan yang cukup

serius dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Di sisi lain, upaya perlindungan dan pelayanan kepolisian masih terkendala dengan rasio polisi yang belum memadai, di mana saat ini baru mencapai 1 : 608 dari standar kebutuhan rasio minimal tahun 2014 sebesar 1 : 575.

7.2.1.9 Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Keselamatan Publik

Sepanjang tahun 2011, secara umum pemerintah telah berhasil menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa rasa aman dan nyaman masyarakat masih terganggu dengan adanya beberapa kasus kekerasan di berbagai wilayah. Pemilihan Kepala Daerah yang seharusnya demokratis, masih diwarnai tindakan intimidasi dan anarkhis. Proses pemilihan bupati di Kabupaten Ilaga Puncak Jaya telah menelan korban tewas sebanyak 57 orang akibat bentrok antar pendukung calon bupati. Demikian juga proses pemilihan Gubernur Aceh, masih diwarnai intimidasi dan tindak kekerasan berupa penembakan-penembakan oleh orang tidak dikenal yang ditengarai simpatisan calon gubernur. Selanjutnya kasus kekerasan di Mesuji, Bima, Papua, Maluku, Sampang, dan daerah-daerah lainnya menunjukkan bahwa kekerasan dan anarkhis sangat mudah terjadi dengan penyebab yang kadangkala sangat sepele dan tidak masuk akal. Di samping faktor sentimen kedaerahan, golongan, suku, dan agama; faktor sosial, politik, dan ekonomi akhir-akhir ini sering menjadi latar belakang terjadinya aksi kekerasan dan anarkhis. Untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, para buruh melakukan pemblokiran jalan tol. Untuk mencegah rencana penggalian penambangan, sejumlah masyarakat harus membakar kantor pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keamanan dan ketertiban serta keselamatan publik menjadi tantangan serius bagi aparat keamanan untuk mengayomi dan melindungi aktivitas masyarakat agar dapat berlangsung aman dan nyaman.

7.2.1.10 Penanganan dan Penyelesaian Perkara

Berdasarkan RPJMN 2010 - 2014, sasaran penuntasan kejahatan konvensional, transnasional, kontingensi, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah sebesar 55 %. Namun demikian, dalam tiga tahun terakhir perkembangannya menunjukkan penurunan, meskipun berbagai pembenahan kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme Polri telah dilakukan. Secara berturut-turut penuntasan kejahatan pada tahun 2009 sebesar 64,73 %, tahun 2010 sebesar 54,61 %, dan pada tahun 2011 sebesar 53 %. Dari jenis kejahatan yang ada, kejahatan konvensional menduduki urutan rendah dalam penyelesaian perkara, yaitu 51 % pada tahun 2011. Di samping jumlah kasusnya paling

banyak, penyelesaian kejahatan konvensional relatif kurang mendapatkan perhatian publik. Masyarakat cenderung melihat penyelesaian kejahatan non konvensional yang menonjol seperti terorisme, korupsi, penyelundupan manusia, narkoba, atau tindak kriminal yang menimpa politikus, selebriti, atau kejahatan tidak biasa seperti kasus pembunuhan berantai yang berlatar belakang penyimpangan seksual. Polri terkesan lebih mengedepankan penuntasan kejahatan non konvensional yang memiliki nilai politis dibandingkan kejahatan konvensional yang kadangkala dianggap ringan dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Padahal banyak kasus-kasus kejahatan konvensional yang semestinya dapat diselesaikan secara adil yang mengedepankan sisi kemanusiaan, sehingga berpotensi meningkatkan citra kepolisian.

7.2.1.11 Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polisi

Dalam rangka meningkatkan citra kepolisian, Polri telah melaksanakan program reformasi birokrasi Polri (RBP) yang saat ini memasuki gelombang II. Road map RBP gelombang II tahun 2011-2014 telah tersusun dengan area perubahan meliputi : Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Manajemen Perubahan, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja Polri, dan Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan dan RPB gelombang II sudah berjalan di tingkat Mabes Polri dan Satker tingkat kewilayahan. Namun demikian, pernyataan keberhasilan tersebut masih menyisakan sejumlah permasalahan yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Masih tingginya tingkat pelanggaran disiplin dan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, di satu sisi hal tersebut merupakan bukti ketegasan Polri dalam menegakkan disiplin anggotanya. Di sisi lain, hal tersebut menjadi preseden negatif bahwa Polisi belum banyak melakukan perubahan. Polisi masih dianggap mudah disuap dan merta suap, kurang berpihak pada masyarakat kecil yang ditunjukkan dengan banyaknya waktu terbuang (bertelete-tele) dan biaya yang tidak sedikit ketika bermasalah dengan hukum di kepolisian.

7.2.1.12 Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terbukti sudah banyak terjadi di masyarakat. Selain menyengsarakan bagi para pengguna dan keluarganya, narkoba tetap merupakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, terutama terhadap generasi muda, kesehatan, produktivitas, bahkan kelangsungan hidup

manusia itu sendiri. Narkoba juga ditengarai memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai lincah kejahatan terorganisir di dunia termasuk pencucian uang, korupsi, terorisme, perang, perdagangan manusia, atau penyelundupan senjata. Di samping masalah *supply*, masalah yang tidak kalah penting adalah masalah pencegahan agar seseorang tidak terlibat baik dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Sulitnya upaya pencegahan dan dihadapkan pada tingginya *supply* narkoba, serta dukungan upaya-upaya pencegahan yang belum memadai, menjadikan Badan Narkotika Nasional melakukan koreksi sasaran prevalensi penyalahgunaan narkoba dari di bawah 1,5 % menjadi di bawah 2,8 % di tahun 2015.

7.2.1.13 Deteksi dini yang Masih Belum Memadai

Berbagai kasus gangguan keamanan dalam negeri, terutama yang terjadi di Papua, Aceh, Maluku, aksi terorisme, masalah perbatasan, dan masalah-masalah gangguan keamanan lainnya menunjukkan bahwa sistem deteksi dini belum secara optimal mendukung keamanan dalam negeri yang kondusif. Pemerintah dianggap telah kecolongan pada Kongres Rakyat Papua III yang menimbulkan korban. Demikian juga aksi-aksi anarkhis pada pelaksanaan Pilkada Aceh, aksi-aksi terorisme yang semakin variatif, dan serentetan unjukrasa yang berujung bentrok menunjukkan data dan informasi intelijen yang dikumpulkan belum optimal mendukung upaya pencegahan gangguan keamanan dalam negeri. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi yang sangat mungkin dapat disalahgunakan dan berpotensi mengancam keamanan nasional, perlu ditandingi dan diantisipasi dengan upaya modernisasi sistem deteksi dini, sehingga keputusan strategis yang dihasilkan dapat meredam atau menghilangkan potensi gangguan keamanan dalam negeri.

7.2.1.14 Keamanan Informasi Negara yang Masih Lemah

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen Negara, perubahan, perkembangan situasi, dan kondisi lingkungan strategis, menjadikan perlunya dilakukan peningkatan deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat kompleks serta memiliki spektrum yang sangat luas. Kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi, termasuk peralatan intelijen dan kontra intelijen yang sangat mungkin disalahgunakan, akan menjadi potensi ancaman bagi keamanan nasional, sehingga modernisasi deteksi dini sangat diperlukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis.

Namun hingga tahun 2011, cakupan pengamanan rahasia negara baru mencapai 42 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak daerah dan kota strategis yang belum terjangkau oleh sistem persandian nasional (Sisdina) yang berpotensi terjadinya kebocoran dan terganggunya komunikasi strategis di antara pimpinan pemerintah di pusat dan daerah.

7.2.1.15 Kesenjangan Kapasitas Lembaga Penyusun Kebijakan Pertahanan-Keamanan Negara

Penyelenggaraan perumusan kebijakan Keamanan Nasional dilaksanakan untuk mendukung upaya peningkatan kemampuan ketahanan nasional dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Namun demikian, penyelenggaraan perumusan kebijakan Keamanan Nasional belum terharmonisasi atau terintegrasi dengan optimal karena belum tuntas dan masih terbatasnya kerja sama antarinstansi lembaga-lembaga pertahanan keamanan negara. Kondisi ini mendorong perlu dibentuknya semacam Dewan Keamanan Nasional, sebagaimana diamanatkan dalam RUU Keamanan Nasional. Ketiadaan Dewan Keamanan Nasional menjadikan kualitas perumusan dan rekomendasi kebijakan Keamanan Nasional yang selama ini dilaksanakan oleh Dewan Ketahanan Nasional, seringkali kurang didukung secara optimal oleh lembaga pertahanan dan keamanan lainnya, sehingga hasilnya tidak secara maksimal dimanfaatkan oleh pimpinan negara.

7.2.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2013

Sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan tahun 2013 merupakan tahapan pencapaian sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 - 2014, yaitu :

1. Terwujudnya postur dan struktur Pertahanan rata-rata sebesar 30 % persen dari kekuatan pokok minimum (*minimum essential force*) yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan diharapkan memiliki efek penggentar bagi upaya-upaya mengganggu kedaulatan dan kewibawaan NKRI. Tercapainya sasaran ini ditandai dengan meningkatnya profesionalisme personel TNI, meningkatnya kuantitas dan kualitas alutsista TNI, serta terbentuknya komponen bela negara.
2. Terbangunnya 11 pos pertahanan baru di wilayah perbatasan darat dan terbangunnya 3 pos pertahanan baru di pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajuritnya. Tercapainya sasaran ini diharapkan dapat menurunkan insiden pelanggaran batas wilayah NKRI

dan angka gangguan keamanan di wilayah perbatasan darat dan wilayah perairan yurisdiksi nasional, termasuk ZEE.

3. Terlayagunakannya industri pertanian nasional bagi kelengkapan alutsista TNI sebesar 16,73 % akuisisi Alutsista TNI TA 2013 dan pemenuhan Alut Pabri produksi dalam negeri sebesar 17,00 % pada tahun 2013; terlaksananya kerjasama pengembangan teknologi baik dengan Perguruan Tinggi, dunia usaha, maupun Industri Pertahanan Luar Negeri. Pencapaian sasaran ini secara optimal akan meningkatkan kemandirian alutsista TNI dan Alut Pabri baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun variasinya; dan terselainya prototipe alutsista baik matra darat, laut, dan udara maupun prototipe alut Pabri yang siap diproduksi.
4. Menurunnya gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut di wilayah yurisdiksi perairan Indonesia termasuk di Selat Malaka. Pencapaian sasaran ini tercermin dari berkurangnya tindak perompakan di Selat Malaka dan ALKI serta berkurangnya klaim dunia pelayaran internasional terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia.
5. Terpantaunya dan terdeteksinya potensi tindak terorisme dan meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme. Tercapainya sasaran ini tercermin dari menurunnya intensitas aksi terorisme, semakin efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam koordinasi dan deradikalisasi terorisme, serta semakin meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat akan bahaya terorisme.
6. Menurunnya tingkat kejahatan (*criminal rate*) yang meliputi kejahatan konvensional, transnasional, kontingensi, kekayaan negara, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penurunan tingkat kejahatan ini akan berdampak pada terselamatkannya SDA, menurunnya tindak kriminal terhadap anak dan perempuan, serta secara umum meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang sangat dibutuhkan bagi aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
7. Tercapainya penuntasan kejahatan konvensional,

transnasional, kontingensi, kelayaan negara, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak rata-rata sebesar 55 persen. Tercapainya persentase penuntasan kejahatan tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi para tersangka, rasa adil bagi para korban, dan pemberian sanksi hukum yang tegas dan transparan dapat menekan kemauan dan kesempatan melakukan tindak kriminal.

8. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga kepolisian atas penyelenggaraan pelayanan kepolisian. Diharapkan dengan pelayanan Kamtibmas secara prima, masyarakat akan merasa nyaman dan terlindungi serta terbebas dari rasa khawatir terkena tindak kriminal, dan pada akhirnya peran serta masyarakat dalam menjaga kamtibmas semakin meningkat, termasuk kemauannya untuk melaporkan dan bersaksi atas tindak kejahatan yang terjadi di lingkungannya.
9. Menurunnya angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sejalan dengan semakin intensifnya kampanye anti narkoba, interdiksi, operasi penindakan dan pengejaran, serta terapi dan rehabilitasi dengan cakupan operasi dan pelayanan yang semakin luas. Tercapainya sasaran ini akan menurunkan tingkat prevalensi dan meningkatkan optimisme pemerintah dalam membebaskan Indonesia dari narkoba pada tahun 2015.
10. Terlaksananya pemantauan dan pendeteksian ancaman gangguan keamanan nasional. Tercapainya sasaran ini akan berdampak pada tercegahnya berbagai potensi gangguan keamanan negeri seperti kerusuhan massal, rencana aksi terorisme, kejahatan lintas negara, gerakan penentang keutuhan NKRI, dan kejahatan dunia maya yang berpotensi mengganggu kedaulatan dan kewibawaan negara.
11. Terlaksananya perlindungan informasi negara melalui perluasan Jaring Komunikasi Sandi Nasional di darat, laut maupun udara. Terlaksananya perlindungan terhadap informasi rahasia negara dari kebocoran akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan baik untuk kegiatan strategis maupun taktis di darat, laut maupun udara.
12. Terlaksananya transformasi penentu kebijakan Ketahanan Nasional dalam rangka meningkatkan kualitas

rekomendasi kebijakan nasional yang terintegrasi, tepat sasaran, dan tepat waktu. Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas akan berdampak pada presisi keputusan pimpinan negara dalam menyikapi dinamika sosial, politik, ekonomi, hukum, dan pertahanan dan keamanan.

7.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2013

Upaya peningkatan kemampuan pertahanan menuju *Minimum Essential Force* sampai dengan 2011 belum tercapai secara optimal karena masih terkendala baik secara administratif maupun kemampuan penyerapan alokasi anggaran pinjaman luar negeri dan alokasi on top sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011 tentang Pecepatan pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alutsista TNI tahun 2010 - 2014. Meskipun berbagai alutsista produksi dalam negeri semakin mewarnai kelengkapan alutsista TNI, namun upaya pemberdayaan industri pertahanan dalam belum dapat dilaksanakan secara optimal. Di samping kemampuan delivery belum memadai, riset dan pengembangan yang minim, keterbatasan modal kerja, kepercayaan user terhadap hasil produksinya; peran serta industri pertahanan belum didukung aturan mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa, insentif fiskal, pengembangan SDM, penguasaan teknologi, dan jaminan kepada lembaga keuangan yang mendukung pembiayaan industri pertahanan. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Industri Pertahanan Dalam Negeri merupakan urgensi bagi kemandirian alutsista dalam negeri.

Aktivitas gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut terutama perompakan menunjukkan peningkatan pada tahun 2011 setelah dalam beberapa tahun sebelumnya mengalami penurunan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa *teribaga sea and coast guard* (penjaga laut dan pantai) yang lebih diakui dunia internasional yang memiliki kekuatan dan kewenangan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi semakin mendesak untuk dibentuk. Di samping itu, peningkatan kapasitas dan operasional pengawasan, penindakan secara cepat dan tepat dan penegakan hukum di laut melalui intensifikasi dan ekstensifikasi patroli keamanan laut baik operasi bersama maupun operasi mandiri yang didukung oleh efektifitas komando dan pengendalian diperlukan untuk dapat menjangkau wilayah *blank spot* dari aktivitas ilegal di wilayah

laut Indonesia.

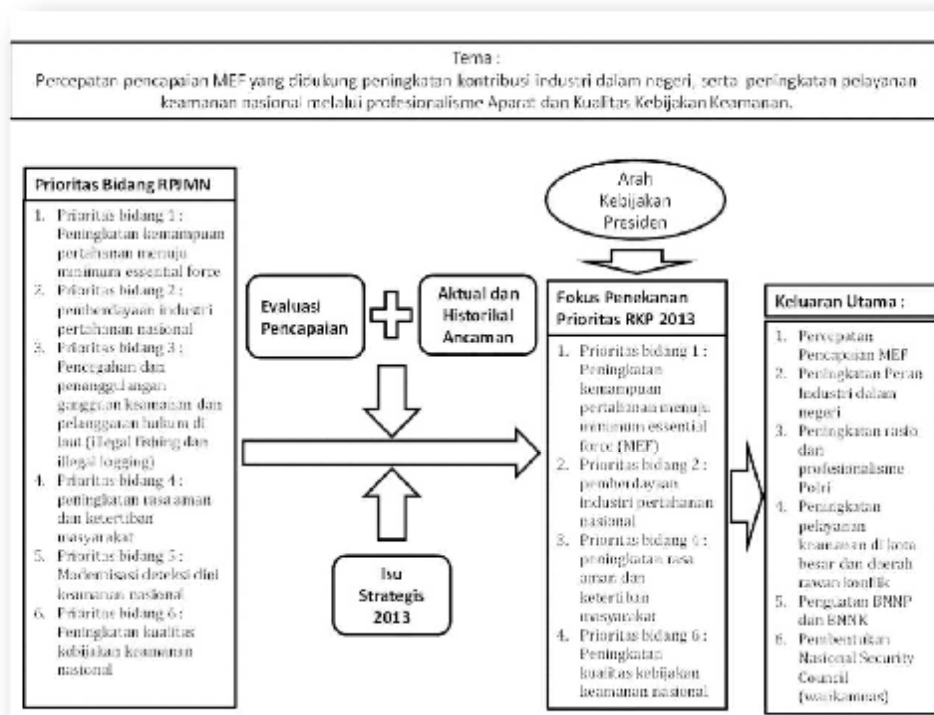
Secara umum pelaksanaan peningkatan rasa aman dan ketertihan masyarakat berhasil meningkatkan rasa aman dan nyaman di masyarakat, termasuk dunia investasi. Kinerja kepolisian dalam melindungi dan melayani masyarakat serta dalam menegakkan hukum menunjukkan peningkatan dan biaya tinggi yang selama ini menjadi stigma buruk berurusan dengan anggota polisi dan lembaga kepolisian semakin terkikis semenjak reformasi birokrasi diberlakukan. Dalam hal ini, bahkan Polri berani menyatakan bahwa di tubuh Polri sudah ada dan terus dilakukan perubahan perilaku dalam proses penyidikan secara transparan, menghilangkan budaya seloran dari hawaian kepala alasan maupun mencari dana terkait dengan penanganan kasus; serta setiap tindakan kepolisian sesuai SOP. Namun demikian keberhasilan tersebut belum terapresiasi secara penuh oleh masyarakat karena hanya kasus-kasus menonjol yang belum terselesaikan dan bahkan adanya keterlibatan sejumlah anggota Polri dalam kasus-kasus yang ditangani. Sementara itu pelaksanaan P4GN terutama di daerah belum menunjukkan perkembangan yang memadai, mengingat saat ini BNN Propinsi dan BNN Kabupaten/Kota masih dalam taraf konsolidasi.

Pelaksanaan modernisasi deteksi dini keamanan nasional sudah menunjukkan kemajuan baik yang dilaksanakan oleh BIN, LSN, maupun BANS. Namun demikian untuk meningkatkan cakupan area operasi dan penggelaran jaringan, diperlukan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana deteksi dini keamanan nasional, terutama untuk daerah-daerah yang dianggap rawan konflik dan wilayah perbatasan. Sedangkan untuk peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional pelaksanaannya berjalan sebagaimana biasanya, belum ada terobosan-terobosan baru. Hal ini dikarenakan sasaran pembentukan lembaga semacam Dewan Pertahanan Nasional sampai saat ini belum terwujud, sehingga sinergitas institusi pertahanan dan keamanan dalam mengelola ancaman keamanan nasional belum optimal.

Sesuai dengan perkembangan pelaksanaan prioritas bidang pertahanan dan keamanan tersebut, aktual dan historikal ancaman, arahan kebijakan presiden, dan isu strategis tahun 2013, maka tema khusus pembangunan bidang pertahanan dan keamanan pada tahun 2013 adalah : "Percepatan pencapaian MEF yang didukung peningkatan kontribusi industri dalam negeri, serta peningkatan pelayanan keamanan

nasional melalui profesionalisme aparat dan kualitas kebijakan keamanan". Dengan tema tersebut maka pelaksanaan Prioritas Bidang Hankam tahun 2013 ditekankan pada : (i) Peningkatan Kemampuan Pertahanan Menuju Minimum Essential Force; (ii) Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional; (iii) Peningkatan Rasa Aman dan Ketertihan Masyarakat; dan (iv) Peningkatan Kualitas Kebijakan Keamanan Nasional. Keluaran utama dari penekanan prioritas bidang ini adalah : terlaksananya percepatan pencapaian MEF, peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri, peningkatan pelayanan keamanan di kota besar dan daerah rawan konflik, terlaksananya persiapan pembentukan *national security council* (Dewan Keamanan Nasional).

GAMBAR 7.2
KERANGKA PIKIR RENCANA KERJA PEMERINTAH 2013



Kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan pada tahun 2013 pada dasarnya sama dengan kebijakan *pembangunan pertahanan dan keamanan yang tercantum dalam RPJMN 2010 - 2014*. Namun berdasarkan kondisi umum, permasalahan, dan sasaran pembangunan, maka diperlukan adanya penekanan dan percepatan pencapaian sasaran, terutama untuk program dan kegiatan prioritas yang lambat atau belum terwujud. Adapun arah kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan adalah :

1. Percepatan pencapaian MEF melalui modernisasi dan penggantian alutsista yang umur teknisnya sudah tua

untuk meningkatkan profesionalisme dan keselamatan prajurit;

2. Peningkatan profesionalisme prajurit, yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit, diantaranya melalui pemberian insentif kepecailikan rumah, tunjangan khusus operasi;
3. Akselerasi penuntasan payung hukum pembentukan komponen bela negara;
4. Percepatan pembangunan pos pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terpencil (terluar) beserta penggelaran personilnya;
5. Memperluas pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui peningkatan pengadaan alutsista TNI dan Alut Polri, dan secara simultan meningkatkan penelitian dan pengembangan, serta dukungan pendanaannya.
6. Intensifikasi dan ekstensifikasi patroli keamanan laut dengan mendorong segera terbentuknya Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang didukung oleh efektifitas komando dan pengendalian;
7. Pemanfaatan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme;
8. Akselerasi pelaksanaan program "quick win" oleh Polri sampai ke tingkat Polres di seluruh wilayah NKRI;
9. Percepatan peningkatan kapasitas SDM dan modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian penerapan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap polisi dan lembaga kepolisian;
11. Meningkatkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, penyediaan fasilitas terapi dan rehabilitasi yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat, pemberantasan jaringan narkoba; serta dengan memperkuat BNN vertikal di daerah;
12. Peningkatan kompetensi SDM intelijen yang didukung dengan modernisasi teknologi intelijen dan koordinasi intelijen yang kuat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

13. **Mempercepat penantapan Sistem Persandian Nasional (Sisdina) dan perluasan cakupan Sisdina terutama untuk wilayah NKRI dan perwakilan RI di negara-negara tertentu;**
14. **Meningkatkan kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan pertahanan keamanan negara, melalui pembentukan Dewan Keamanan Nasional.**

BAB 8 BIDANG HUKUM DAN APARATUR

Pembangunan bidang hukum merupakan kerangka pendukung dari upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional di berbagai bidang dengan berupaya mengantisipasi berbagai tantangan dan kebutuhan pembangunan di bidang lainnya. Pembangunan bidang hukum diantaranya adalah dalam rangka penegakan hukum di negara yang ber sistem hukum. Sedangkan pembangunan bidang aparatur negara, khususnya melalui reformasi birokrasi, memiliki peranan yang sangat strategis pula untuk mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan aparatur negara diarahkan untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia aparatur. Pada akhirnya, diharapkan terwujud birokrasi pemerintah yang profesional, bersih dan melayani. Di era global seperti saat ini, peran aparatur negara juga dituntut untuk menciptakan inovasi dan kreativitas bagi penciptaan daya saing nasional yang tinggi, sehingga mampu menjadi motor penggerak dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berpijak atas hal tersebut, maka pembangunan bidang hukum dan aparatur selalu menjadi prioritas pembangunan nasional, baik yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2010-2014 maupun dalam dokumen RKP tiap tahunnya.

8.1 Kondisi Umum

Pembangunan bidang hukum dan aparatur yang bersifat pembangunan multidimensi, diarahkan dalam pelaksanaan 5 (lima) tahun ke depan untuk dapat mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang lainnya. Dalam RPJMN 2010-2014 telah ditetapkan bahwa kebijakan pembangunan di Bidang Hukum dan Aparatur diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui strategi kebijakan, yakni: peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan; peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum; peningkatan penghematan, pemajuan, dan penegakan HAM; peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); peningkatan kualitas pelayanan publik; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan pematapan pelaksanaan reformasi birokrasi. Strategi tersebut diharapkan dapat mendorong pencapaian sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia dan didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta professional. Dalam RPJMN 2010-2014 telah dirumuskan kerangka pikir pembangunan hukum dan aparatur, sebagai berikut:

GAMBAR 8.1
KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN
BIDANG HUKUM DAN APARATUR



Efektivitas Peraturan Perundang-undangan. Penetapan Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 telah diikuti dengan langkah penyusunan peraturan turunan

berupa *draft* Peraturan Presiden yang ditujukan untuk memperbaiki proses penyusunan peraluran perundang-undangan menjadi lebih baik dan dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang lebih berkualitas, bersinergi dengan arah pembangunan nasional dalam penyusunan prioritas rancangan undang-undang dalam Prolegnas. Hal ini untuk mempertegas bahwa kerangka regulasi dalam proses perencanaan pembangunan nasional sudah terakomodasi disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan secara nasional. Dengan demikian diharapkan kebutuhan akan kerangka regulasi dalam bentuk undang-undang sudah dapat terakomodasi dalam Prolegnas. Undang-undang ini juga mewajibkan perlu adanya Naskah Akademik dari suatu RUU untuk dapat dilakukan pembahasan di DPR. Kewajiban adanya dokumen Naskah Akademik ini juga disyaratkan dalam rangka penyusunan Prolegnas sehingga setiap RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas sudah harus disertai dengan Naskah Akademik disamping juga sudah harus melalui tahapan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM serta telah dilakukan pembahasan secara interdep.

Kinerja Lembaga di Bidang Hukum. Kinerja lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum pada tahun 2011 telah memperlihatkan perkembangan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dalam rangka penyelesaian perkara tunggakan Mahkamah Agung merespon dengan berbagai upaya yang berjalan dan memperbaiki mekanisme pelaksanaan dalam proses pengikisan perkara, dan rencana pembatasan perkara berdasarkan cetak biru (*blue print*) Mahkamah Agung. Pada tahun 2011, Mahkamah Agung menerima sejumlah 12.990 perkara, dengan beban penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 8.424 perkara, atau total beban penyelesaian sejumlah 21.414 perkara. Dari total beban perkara tersebut yang berhasil diputus sebanyak 13.719 perkara (64,07%), sehingga sisa perkara di akhir tahun yang masih harus diselesaikan adalah sejumlah 7.695 perkara.

Progres dari pelaksanaan keterbukaan informasi peradilan, pada saat ini jumlah putusan pengadilan baik di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya yang telah dipublikasikan melalui *website* <http://putusan.mahkamahagung.go.id> sampai dengan bulan Februari 2012 berjumlah 169.153 putusan (dibandingkan dengan tahun 2010 dengan jumlah 22.269 putusan

terpublikasi di *website*), termasuk beberapa putusan yang terpilih sebagai bahan pembelajaran baik kepada lingkungan peradilan dan masyarakat pada umumnya di tiap jenis perkara yang ditangani oleh lembaga peradilan.

Di bidang pengawasan, pengaduan yang diterima tahun 2010 berjumlah 2.204 pengaduan dan telah dilaksanakan proses sesuai dengan SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengadilan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Selain itu, untuk kelancaran proses pengawasan terhadap lembaga peradilan termasuk hakim dan aparat peradilan lainnya diatur melalui Keputusan Ketua MA No. 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS).

Selain itu, sepanjang tahun 2011 Komisi Yudisial telah menerima 1710 laporan masyarakat yang sebagian besar terkait dengan dugaan adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim seperti putusan hakim yang dianggap tidak adil, semena-mena, tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (termasuk melanggar hukum acara dan hukum pembuktian), sampai dugaan adanya manipulasi fakta hukum dan lain-lain. Berdasarkan laporan tersebut, telah dilakukan berbagai kegiatan investigasi pemeriksaan hakim, sampai akhirnya memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk diberi sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan oleh Komisi Yudisial terhadap 64 hakim, Mahkamah Agung telah mengeluarkan 34 rekomendasi yang bersifat teknis yudisial dan dialihkan sebagai bahan pemeriksaan, kemudian 2 rekomendasi sebagai bahan tindak lanjut dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim, 4 rekomendasi untuk ditindaklanjuti dengan hukuman disiplin, dan 1 rekomendasi yang ditolak, serta 18 rekomendasi yang masih dipelajari.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan penanganan perkara tindak pidana umum Tahun 2011, jumlah perkara pidana umum dan menjadi Berkas Perkara Tahap Pertama yang masuk sebanyak 109.817 perkara dan ditambah sisa perkara pada tahun sebelumnya sebanyak 25.235 perkara, sehingga berjumlah 135.052 perkara. Dari total perkara tersebut Kejaksaan Agung menyelesaikan sebanyak 115.733 (85,69%). Sedangkan

penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya telah dilakukan penuntutan antara lain pada penanganan Tindak Pidana Kepabeanan, Tindak Pidana Perikanan, dan Tindak Pidana Cukai. Untuk penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, keuangan negara yang diselamatkan pada perkara Perdata sebesar Rp. 34,82 Triliun dan 4 unit truk, serta keuangan negara yang dapat dipulihkan (perkara PPT) adalah sebesar Rp. 124,9 Miliar dan US \$ 76.258. Terkait dengan pengawasan internal aparaturnya Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan laporan pengaduan (Lapdu) pada Tahun 2011 sebanyak 1.611 Lapdu dan sisa Lapdu tahun sebelumnya sebanyak 910 Lapdu, sehingga berjumlah 2.521 Lapdu. Dari jumlah tersebut telah diselesaikan sebanyak 1.571 Lapdu, sedangkan sisanya masih dalam proses.

Kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani perkara terkait konstitusi meliputi penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPU/D) pada tahun 2011 menghasilkan 131 putusan dari 138 perkara yang ditangani dan pada tahun 2012 mendatang Mahkamah Konstitusi diperkirakan akan menangani 56 perkara PHPU/D (termasuk sisa perkara pada tahun 2011). Dalam menangani perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), MK telah memutuskan 94 perkara dari 145 perkara PUU yang ditangani dan terkait dengan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) telah ditangani 7 perkara dengan 4 diantaranya telah berhasil diputus.

Peningkatan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka untuk menyatukan gerak langkah dalam pembangunan hak asasi manusia di Indonesia maka melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 telah ditetapkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014. Rencana Aksi Nasional ini merupakan pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia. Rencana aksi yang ada di dalam dokumen ini melibatkan Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah untuk ikut dan melaksanakan pembangunan HAM sesuai dengan ruang lingkup tugas fungsinya masing-masing.

Implementasi SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum di tahun 2011 belum berjalan secara optimal. Pada prakteknya, bantuan hukum di lingkungan peradilan umum hanya menjalankan pembebasan biaya perkara pidana sebanyak 2.939 perkara dan terhadap sejumlah perkara

tersebut diberikan bantuan jasa advokat. Lain halnya di lingkungan peradilan agama, pelaksanaan prodeo, sidang keliling dan posbakum sudah dilaksanakan cukup baik dengan memperlihatkan permintaan masyarakat yang kurang mampu yang cukup besar. Sedangkan di lingkungan peradilan TUN, penjabaran SIGMA 10/2010 belum dilaksanakan karena terkendala aturan teknis yang belum tersedia. Dengan adanya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka secara umum pelaksanaannya akan melalui satu pintu, yaitu melalui Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahun waktu setelah UU Bantuan Hukum disahkan dan sepanjang tahun 2012, Kementerian Hukum dan HAM bersama-sama dengan pemangku kepentingan termasuk lembaga/organisasi penyedia bantuan hukum sedang membahas peraturan mengenai tata cara pelaksanaan bantuan hukum termasuk proses akreditasi dan verifikasi untuk lembaga/organisasi bantuan hukum dalam memberikan jasa pendampingan.

Di sisi lain, dalam rangka peningkatan penghormatan terhadap HAM, penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi pelanggaran HAM terus diupayakan. Sebagaimana mandat Komnas HAM untuk menangani pengaduan tersebut, pengaduan yang terkait dengan pelanggaran HAM yang masuk ke Komnas HAM pada tahun 2011 adalah sebanyak 6.358 berkas aduan, dengan klasifikasi pelanggaran HAM terbanyak adalah hak atas kesejahteraan sebanyak 2.465 berkas, dan hak memperoleh keadilan, sebanyak 2.428 berkas. Sedangkan pihak yang paling banyak diaudikan adalah POLRI yakni sebanyak 1.839 aduan, Perusahaan Swasta sebanyak 1.068 aduan, dan Pemerintah Daerah sebanyak 830 aduan. Berdasarkan klasifikasi jenis kasus, sengketa lahan merupakan jenis kasus yang banyak yakni 1.064 berkas, dan kasus kepegawaian sebanyak 390 berkas. Dari 6.358 berkas aduan yang diterima, pengaduan sebagian besar datang dari DKI Jakarta dan Sumatera Utara yaitu masing-masing sebanyak 1.234 dan 629 berkas aduan.

Kondisi penghormatan HAM khususnya bagi kelompok tertentu seperti perempuan memiliki gambaran tersendiri. Tindak kekerasan yang terjadi di wilayah publik dan privat bukan hanya meningkat secara kuantitas, namun juga secara kualitas. Dari data pengaduan yang diterima Komnas Perempuan tahun 2011 keseluruhan berjumlah 795 kasus. Jenis kasus yang paling banyak yaitu kira-kira 56% atau 446 kasus adalah jenis kekerasan terhadap istri. Sebagai upaya

untuk melakukan pemulihan dan akses kebenaran serta keadilan bagi korban, dilakukan kerjasama dengan 143 lembaga penyedia layanan yang tergabung dalam Forum Belajar Lembaga yang tersebar di seluruh Indonesia. Forum ini berperan dalam proses pemulihan korban kekerasan, korban KDRT, kekerasan seksual, kekerasan dalam komunitas hingga kekerasan dalam konflik sehingga membantu pemulihan fisik, psikis, sosial dan hukum bagi kelompok korban. Dari total kasus yang ditindaklanjuti baik dengan merujuk maupun dengan memberikan surat dukungan, total yang dirujuk adalah 540 kasus atau 68% dari total penerimaan kasus, kepada 79 lembaga penyedia layanan di Indonesia.

Terkait dengan upaya peningkatan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia termasuk penghormatan terhadap hak anak yang termasuk dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) terutama dalam proses peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak diharuskan melindungi dan perlunya sistem peradilan yang ramah terhadap anak sebagai bagian dari upaya untuk melindungi hak anak dalam proses peradilan. Proses Diversi (*Diversi*) dan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) di beberapa daerah telah dilakukan oleh beberapa aparat penegak hukum dengan tidak memberikan sanksi pidana secara formal bagi anak yang bermasalah dengan hukum namun memberikan solusi pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, walaupun peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan Diversi dan Keadilan Restoratif masih dalam proses pembahasan di DPR. Hal ini merupakan salah satu wujud dan upaya melindungi hak asasi manusia khususnya terhadap anak.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Berbagai langkah penting telah berhasil dicapai, sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Langkah-langkah tersebut, tidak semata-mata dari aspek penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, namun lebih mendasar lagi diperkuat langkah-langkah pencegahan. Selain itu, upaya lainnya yang ditempuh antara lain penerapan sistem integritas aparatur, pengelolaan keuangan negara secara *accountable* dan *auditable*, penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian yang efektif pada birokrasi pemerintah, perbaikan sistem dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta upaya-upaya lainnya. Hasilnya, beberapa

kemajuan ditunjukkan dari berbagai indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

TABEL 8.1
PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
YANG BERSIH DAN BEBAS KKN

No	Indikator	Sumber	Satuan	Capaian			Target 2014
				2009	2010	2011	
1.	Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia	TI	skor (0-10)	2,8	2,8	3,0	5,0
2.	Opini WTP audit BPK atas LKKL (%)*	BPK	%	41%	50,41%	63%*	100%
3.	Opini WTP audit BPK atas LKPD (%)*	BPK	%	2,64%	3%	7%*	60%
4.	Jumlah K/L yang telah memiliki peraturan tentang SPIP	BPKP	Jumlah (% K/L)		7 (8,75%)	47 (58,75%)	100% (80 KL)
5.	Jumlah Pemda yang telah memiliki peraturan tentang SPIP	BPKP	Jumlah (% pemda)		325	442	100% (524 Pemda)
6.	Jumlah Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)**	LKPP	Jumlah Unit LPSE	33	137	353	600
7.	Jumlah Paket Pengadaan melalui LPSE dan Nilai Pagu Pengadaan	LKPP	Paket Miliar Rp.	1.724 3.137,5	6.397 12.971,8	24.475 38.163,4	

Keterangan: * Berdasarkan IHPS II, Maret 2012

** Data LKPP Januari 2012

Untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagai salah satu upaya untuk

melaksanakan *United Nation Conventian Against Corruption* (UNCAC). Sebagai kelanjutannya di tahun 2012, telah diterbitkan lagi Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Jumlah aksi yang tertuang dalam Inpres Nomor 17/2011 adalah 106 aksi dengan 13 fokus kegiatan; dan 6 strategi dengan melibatkan 24 kementerian/lembaga, dengan titik berat pada Strategi Pencegahan sebanyak 82 aksi. Diharapkan CPI Indonesia dapat meningkat dari tahun 2011 dari 3 menjadi 3.2 sejalan dengan target RKP 2012. Selain rencana aksi yang tertuang didalam Inpres tersebut, upaya-upaya pencegahan dalam pemberantasan korupsi juga terus ditingkatkan oleh berbagai kementerian lembaga di berbagai sektor.

Untuk mensinergikan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada bulan Maret Tahun 2012 telah diluncurkan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi oleh Presiden Republik Indonesia, dimana strategi ini secara nasional dilaksanakan bersinergi-sama oleh seluruh pemangku kepentingan. Penetapan sasaran baik jangka menengah maupun jangka panjang melalui 6 (enam) strategi pelaksanaan telah berhasil dirumuskan untuk dilaksanakan secara terkonsolidasi oleh berbagai pihak.

Dalam kaitannya untuk meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan transparansi penyelenggaraan negara kepada masyarakat, KPK terus melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan aparatur pemerintah untuk menyusun Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Integritas SDM aparatur akan terus ditingkatkan. Setelah diterbitkannya PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang memberikan landasan bagi peningkatan disiplin, integritas, dan kinerja pegawai, maka pada tahun 2011 diintensifkan sosialisasi dan penerapan disiplin yang lebih ketat di lingkungan instansi pemerintah. Selain itu, telah diterbitkan PermenPAN & RB No.49/2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan K/L dan Pemda, yang mewajibkan seluruh pejabat melaksanakan pakta integritas. Upaya lainnya telah dicanangkan gerakan nasional pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan K/L/Pemda.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas dan

akuntabilitas keuangan negara. Selanjutnya, agar ditempuh langkah-langkah yang terukur dan implementatif, maka telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. Selain itu, dibawah koordinasi BPKP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari inspektorat jenderal kementerian, inspektorat utama LPNK, dan inspektorat provinsi/ kabupaten/kota diharapkan dapat lebih berperan untuk mendorong penerapan sistem pengendalian intern di tiap-tiap instansi pemerintah secara efektif, termasuk bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP yang telah dilaksanakan sampai dengan Desember 2011 adalah sebagaimana terdapat di dalam tabel berikut:

TABEL 8.2
KEGIATAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP
TAHUN 2010 – DESEMBER 2011

No	Kegiatan	Jumlah
1.	Penyusunan Pedoman Teknis SPIP	2 pedoman
2.	Sosialisasi SPIP	3 K/L dan Pemda
3.	Pendidikan dan Pelatihan SPIP	10.240 peserta K/L dan Pemda
4.	Pemetaan (<i>diagnostic assessment</i>) Penerapan SPIP	5 K/L dan Pemda
5.	Bimbingan dan Konsultasi SPIP	269 K/L dan Pemda
6.	Bimtek Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)/ Peraturan K/L tentang SPIP	442 perkada 47 Per-K/L tentang SPIP

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Data s.d. Desember 2011.

Di bidang pengadaan barang dan jasa, setelah diterbitkannya Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada tahun 2011 telah disusun pedoman/petunjuk teknis sebanyak 9 dokumen. Disamping itu, telah diterbitkan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebanyak 24 dokumen, Standar Dokumen Pengadaan Elektronik (*SBD e-Procurement*) sebanyak 8 dokumen serta 1 dokumen penyusunan *e-catalogue* kendaraan roda empat. LKPP juga telah

menyusun Pedoman Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan 3 dokumen Perka LKPP yang terdiri dari: (i) Pedoman Pemutusan Kontrak, (ii) Pedoman Addendum Kontrak, (iii) Pedoman *National Competitive Bidding*, (iv) Pedoman Penyesuaian Harga, dan (v) Pedoman Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Dalam rangka terus menyempurnakan kebijakan pengadaan barang dan jasa, pada tahun 2012 pemerintah melakukan *review* atas pelaksanaan Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Review* ini dimaksud untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah, serta merumuskan rekomendasi bagi penyempurnaan nya. Di sisi lain, penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa terus dilanjutkan, yang nantinya menjadi landasan hukum yang lebih kuat guna mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan, dan bebas KKN. Sejalan hal tersebut, peningkatan kompetensi SDM aparatur dalam mengelola pengadaan barang/jasa pemerintah terus ditingkatkan, beserta penguatan kelembagaan unit layanan pengadaan (ULP) dan perluasan *e-procurement* di K/L/Pemda.

Pelayanan publik. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik langkah-langkah yang ditempuh pemerintah antara lain meliputi penyempurnaan kebijakan, pengembangan manajemen pelayanan, peningkatan kapasitas dan integritas aparat pemberi layanan, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar pelayanan minimal, penanganan pengaduan masyarakat atas pelayanan, dan penyelenggaraan kompetisi antar pemda/unit penyelenggara pelayanan publik. Melalui langkah-langkah tersebut, berbagai kemajuan telah berhasil dicapai. Namun demikian, masih perlu kerja keras untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Kemajuan dalam pelayanan publik, tercermin dari beberapa indikator sebagaimana dalam tabel berikut.

TABEL 8.3
PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PELAYANAN PUBLIK

No	Indikator	Sumber	Satuan	Capaian			Target
				2009	2010	2011	2014
1	Integritas Pelayanan Publik (Pusat)	KPK	Skor [1-10]	6,64	6,16	7,07	8,0
2	Integritas Pelayanan Publik (Daerah)	KPK	Skor	6,46	5,26	6,00	8,0
3	Jumlah unit pelayanan terpadu satu pintu (OSS) di daerah (prov/kab/kota)	Kemend PAN & RR	Unit	360	394	420	100% (530)
4	Peringkat Kemudahan Berusaha (Ease Doing Business Index)	IFC/WE	Peringkat	115	126	129	75

Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) disamping meningkat dari aspek kuantitas, yakni pembentukan PTSP di instansi pemerintah daerah, namun dari aspek kualitas terus ditingkatkan. Kemenpan RR, BKPM dan Kemendagri melalui berbagai kegiatan yang dikoordinasikannya, melakukan pembinaan terhadap PTSP. Upaya-upaya tersebut, diharapkan memberikan dampak pada iklim investasi dan berusaha, sehingga turut memperbaiki peringkat kemudahan berusaha di Negara Indonesia.

Penyusunan peraturan sebagai pelaksanaan dari UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yakni 1 (satu) RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta 1 (satu) R-Perpres tentang Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi dalam Pelayanan Publik, selama tahun 2011 masih harus disinkronisasikan karena bersinggungan dengan peraturan di sektor lainnya. Diharapkan pada tahun 2012 ini sudah dapat diterbitkan. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, telah diterbitkan Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun

2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Publik.

Untuk memastikan kualitas pelayanan di daerah, hingga tahun 2011 telah diterbitkan 15 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ditargetkan pada tahun 2012 dapat difasilitasi penerapan untuk 9 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkup Urusan Pemerintahan Daerah I dan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkup Urusan Pemerintahan Daerah II.

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, serta Pemanfaatan Reformasi Birokrasi. Langkah-langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi meliputi penataan kelembagaan, pengembangan sistem ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, pengembangan manajemen SDM aparatur, pemanfaatan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas. Beberapa capaian yang telah berhasil, antara lain ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagaimana dalam tabel berikut.

TABEL 8.4
PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS BIROKRASI, SERTA REFORMASI BIROKRASI PADA INSTANSI PEMERINTAH

No	Indikator	Sumber	Satuan	Capaian			Target 2014
				2009	2010	2011	
1.	K/L yg Telah Melaksanakan RB	Kemen PAN & RB	Jumlah (K/L)	5	14	16	100%K/L, 100% Prov, 60% Kab/Kota
2.	Instansi Pusat yg Akuntabel	Kemen PAN & RB	%	47,37%	63,29%	82,93%	100%
3.	Instansi Provinsi yg Akuntabel	Kemen PAN & RB	%	3,76%	31,03%	63,33%	80%
4.	Instansi Kab/Kota yg Akuntabel	Kemen PAN & RB	%	5,08%	8,77%	12,78%	60%

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada kementerian/lembaga terus dimantapkan kualitasnya dan

diperluas pada instansi lainnya. Pelaksanaan RB pada instansi pemerintah harus berpedoman pada Perpres Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014. Sampai dengan tahun 2011, sebanyak 16 Kementerian/Lembaga (K/L) telah melaksanakan RB dan 20 K/L sedang dalam proses persetujuan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi. Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, pada tahun 2012 diharapkan seluruh K/L telah melaksanakan Reformasi Birokrasi. Sedangkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah, pada tahun 2012 ditargetkan terlaksana *pilot project* di 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota.

Penataan kelembagaan instansi pemerintah terus dilakukan, untuk mewujudkan kelembagaan birokrasi pemerintah secara tepat fungsi dan tepat ukuran. Beberapa kebijakan yang telah diterbitkan, antara lain: (i) PermenPAN & RB No.65/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Kelembagaan Pemerintah, (ii) PermenPAN & RB No.66/2011 tentang SOP Penataan Kelembagaan Pemerintah, (iii) PermenPAN & RB No.67/2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah, dan (iv) PermenPAN & RB No.68/2011 tentang Pedoman Umum Kelembagaan Instansi yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Konsolidasi struktural Kementerian PAN dan RB, dengan BKN dan LAN terus disempurnakan, dan diharapkan dapat dituntaskan pembagian tupoksi dan sinkronisasi hubungan kerja antara K/L tersebut. Atas hal tersebut telah diterbitkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Struktural Kementerian PAN dan RB, BKN, LAN, BPKP, dan ANRI, dengan perluasan instansi yang berkaitan dengan penanganan aparatur negara yaitu BPKP dan ANRI. Disamping itu, terus dilakukan penataan kelembagaan khususnya lembaga non struktural (LNS) yang cenderung memiliki tupoksi yang tumpang tindih dengan lembaga lainnya, atau keberadaannya sudah tidak efektif lagi sejalan dengan perkembangan reformasi birokrasi. Sejalan dengan penataan kelembagaan, juga dilaksanakan penataan sistem ketatalaksanaan yang antara lain mencakup pengembangan proses bisnis yang sederhana, pengembangan sistem elektronik (*e-government*), perbaikan manajemen kearsipan, dan lainnya.

Bidang SDM Aparatur, pada tahun 2011 telah mulai dilakukan pembahasan antara pemerintah dengan DPR dalam rangka

penyusunan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyusunan RUU ini untuk menggantikan UU No. 43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini. Beberapa perubahan mendasar yang akan diatur melalui RUU ini adalah terlaksananya rekrutmen dan promosi jabatan secara terbuka (*pilot project* sudah dilaksanakan), pengenalan jabatan eksekutif senior (*senior executive service*), pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan perubahan posisi Pejabat Pembina Kepegawaian.

Disamping itu, beberapa penyempurnaan kebijakan di bidang SDM Aparatur terus dilakukan sehingga pada tahun 2012 diharapkan sudah diterbitkan, antara lain RPP tentang Pengisian (Rotasi/Promosi) dalam Jabatan secara Terbuka; RPP tentang Pengukuran Kinerja Pegawai; RPP tentang Pelaksanaan Diklat Aparatur berbasis sertifikasi keahlian; R-Perpres Pola Dasar Karir; R-Permenpan dan RB tentang Revitalisasi Sistem *National Assessment Center* untuk rekrutmen, pelatihan dan promosi jabatan Aparatur Negara; dan R-Permenpan dan RB tentang sertifikasi kompetensi Profesi. Sedangkan kebijakan yang telah berhasil diterbitkan, antara lain: PP 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, PP 44/2011 tentang Pemberhentian PNS, dan Permenpan & RB No. 63/2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan moratorium penerimaan PNS yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama antara Menteri PAN & RB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan No. 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, No. 800-632 Tahun 2011, No. 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan ini berlaku mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Dalam masa penundaan tersebut, instansi pusat dan daerah diharapkan dapat melakukan penghitungan kebutuhan jumlah PNS yang tepat berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja untuk melakukan penataan organisasi (*rightsizing*) dan penataan PNS dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagai dasarnya, telah diterbitkan PermenPAN & RB Nomor 26 tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah. Tindak lanjutnya, pada tahun 2012 ini akan diselenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 4.125 tenaga Analisis Jabatan (Anjab) di K/L/Pemda yang nantinya diharapkan dapat disusun peta

jabatan dan profil kebutuhan PNS pada seluruh instansi.

Selanjutnya, dilakukan langkah-langkah penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara nasional dan kompetensi yang dibutuhkan antara lain melalui penghitungan kebutuhan pegawai di 524 instansi daerah dan 75 instansi pusat, penyempurnaan sistem rekrutmen melalui kerjasama dengan 10 (sepuluh) perguruan tinggi negeri, serta akan diterbitkan Permenpan dan RB yang mengatur *Computer Assisted Test (CAT)* untuk seleksi PNS. Secara simultan, pengembangan sistem informasi dan database kepegawaian terus disempurnakan, pengembangan *assessment center* ditingkatkan kualitasnya dan diperluas pada instansi pusat dan daerah; sistem pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai disempurnakan dan ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat (K/L) tahun 2011, memperlihatkan adanya kemajuan yang cukup berarti. K/L yang akuntabilitas kinerjanya baik, telah mencapai 62,93%. Sedangkan untuk instansi pemerintah daerah memperlihatkan hasil bahwa pemerintah provinsi yang akuntabilitas kinerjanya baik, sebesar 63,33%. Untuk pemerintah kabupaten/kota, memperlihatkan hasil yang masih jauh dari harapan, yakni baru sebesar 12,78% pemerintah kabupaten/kota yang akuntabilitas kinerjanya baik. Kondisi ini masih sangat jauh dari target RPJMN pada tahun 2014, yakni 80% instansi pemerintah pusat dan daerah yang akuntabilitas kinerjanya baik. Dengan demikian, masih perlu upaya peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Pada tahun 2012, pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, melalui berbagai langkah, yakni penataan struktur birokrasi; penataan jumlah, distribusi dan kualitas PNS; sistem seleksi dan promosi secara terbuka; profesionalisme PNS; pengembangan sistem pemerintahan elektronik (*e-government*); penyederhanaan perijinan usaha; pelaporan harta kekayaan pegawai negeri; peningkatan kesejahteraan pegawai negeri; dan efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri. Program percepatan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran reformasi birokrasi, sebagaimana tertuang

dalam RPJMN 2010-2014.

8.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2013

8.2.1 Permasalahan

Meskipun upaya mewujudkan sasaran pembangunan hukum dan aparatur telah menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun, namun disadari bahwa masih terdapat permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan.

Efektivitas Peraturan Perundang-undangan. Permasalahan utama yang dihadapi di bidang perundang-undangan adalah jumlah peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang yang terlalu banyak dan masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang bermasalah atau berpotensi bermasalah ditunjukkan oleh ketidakjelasan/multitafsir maupun konflik antar peraturan perundang-undangan baik yang setingkat maupun yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi. Banyaknya Undang-Undang disebabkan pola pikir yang menganggap bahwa semua permasalahan pembangunan harus diselesaikan dengan membentuk Undang-Undang, padahal materi muatan yang diatur tersebut sebenarnya bukan merupakan materi muatan Undang-Undang.

Kinerja Lembaga di Bidang Hukum. Proses penanganan perkara lembaga di lingkungan penegak hukum masih terkendala oleh mekanisme yang belum sepenuhnya terbuka dan akuntabel kepada masyarakat luas. Keterbukaan informasi penanganan perkara sangat diperlukan oleh masyarakat dan merupakan prasyarat dari rangkaian proses penegakan hukum sehingga hal tersebut bukan menjadi persoalan yang menakutkan di negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum. Hal ini perlu didukung melalui keterbukaan proses yang memanfaatkan dukungan IT di berbagai tahapan proses penegakan hukum. Di bidang konstitusi, permasalahan yang dihadapi masih terkait dengan penanganan perkara Pemilukada yang jumlahnya masih fluktuatif sehingga mempengaruhi kebutuhan operasional di Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya memproses perkara yang masuk.

Dalam rangka mendukung kinerja pelaksanaan dan memperlancar upaya penegakan hukum masih perlu untuk ditingkatkan. Seperti contohnya dalam penanganan perkara pidana umum di Kejaksaan yang dirasakan masih kurang

memadai penganggarnya, hal ini dikarenakan kurang seimbang dukungan anggaran dibandingkan dengan rata-rata perkara yang masuk dan harus diselesaikan di Kejaksaan. Selain itu dukungan sarana prasarana yang menunjang kinerja penyelesaian penanganan perkara di Kejaksaan kurang didukung dalam pelaksanaannya. Tidak adanya ruang pemeriksaan tersendiri bagi terdakwa juga merupakan kendala tersendiri bagi jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam rangkaian penanganan perkara korupsi juga masih terkendala oleh anggaran yang berkaitan dengan pelacakan aset dan serta penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi.

Peningkatan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Terkait dengan pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, permasalahan yang dihadapi adalah mempersiapkan masa transisi pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan melalui Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan kebijakan satu pintu dan merupakan langkah peralihan dari Mahkamah Agung yang selama ini melaksanakan kegiatan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Diperlukan kesiapan konsep pelaksanaan bantuan hukum yang integratif, didukung oleh kinerja lembaga lainnya dalam proses penegakan hukum (seperti lembaga POLRI dalam proses awal penanganan kasus, lembaga Kejaksaan dalam proses penuntutan perkara, dan lembaga Mahkamah Agung dalam meningkatkan pelayanan peradilan bagi masyarakat).

Beberapa permasalahan terkait penegakan HAM yang diperkirakan masih dihadapi pada tahun 2013 adalah masih banyaknya aksi dan upaya kekerasan yang berakibat masyarakat belum sepenuhnya merasakan rasa aman tentram dalam menjalankan kehidupannya. Selain itu, secara khusus, permasalahan yang dihadapi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan adalah belum terbangunnya instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap pengintegrasian perspektif HAM dan Gender di masing-masing institusi Aparat Penegak Hukum dan belum efektifnya sinergitas di kalangan aparat penegak hukum terkait proses penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Munculnya berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun lokal yang tidak harmonis sehingga mengakibatkan adanya peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan juga merupakan permasalahan yang diperkirakan masih

terjadi di tahun 2013.

Berkaitan dengan penghormatan hak asasi manusia terhadap anak, permasalahan yang dihadapi terkait dengan penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum bahwa masih adanya aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penanganan perkara untuk mengupayakan proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi ramah anak dan melindungi kepentingan terbaik anak. Pada umumnya aparat penegak hukum masih menggunakan ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat sebagai dasar untuk menyidik atau memutuskan perkara yang dilakukan oleh anak serta menunggu untuk ditetapkannya terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit berlaku sebagai dasar hukum dalam pemberlakuan upaya Diversi dan Restoratif Justice (keadilan restoratif).

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Berdasarkan pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan perkiraan pencapaian tahun 2012, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus ditangani dari sisi pencegahan dan pemberantasan korupsi, antara lain: (a) perumusan pendekatan represif yang memiliki dampak mengurangi perilaku koruptif dan praktek koruptif yang sistematis dan masif; (b) inkonsistensi penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi; (c) tumpang tindih peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang belum sejalan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi; (d) masih belum optimalnya pengembalian aset hasil korupsi; dan (e) integritas aparat pemerintahan dan masyarakat yang masih belum menunjukkan peningkatan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Strategi pencegahan korupsi, masih menjadi prioritas untuk mewujudkan penyelenggaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Namun demikian, masih menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya belum tuntasnya berbagai landasan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, pengelolaan keuangan negara belum sepenuhnya dikelola secara akuntabel dan transparan, baik karena faktor integritas SDM aparatur maupun karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang ada. Peranan auditor internal untuk mencegah praktek penyalahgunaan keuangan negara, masih

belum optimal khususnya pada aspek preventif. Dalam praktek pengadaan barang/jasa pemerintah, disamping karena permasalahan kompetensi SDM aparatur, juga disebabkan masih seringnya pelanggaran prosedur dan mekanisme pengadaan barang/jasa yang dilakukan para pejabat pengadaan (ULP).

Pelayanan Publik. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik masih menghadapi berbagai permasalahan. Peraturan peraturan pelaksana UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik belum diterbitkan, sehingga belum sepenuhnya dapat memberikan kepastian pelayanan. Masalah lainnya, masih dijumpai manajemen pelayanan yang belum dikelola secara profesional, baik dari aspek kompetensi dan integritas SDM aparatur; pemanfaatan TIK; dan mata rantai prosedur pelayanan yang masih panjang. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterbitkan, dalam implementasinya belum didukung dengan koordinasi yang sinergis antara K/L sektor pelayanan dan pemda. Permasalahan tersebut menjadi tantangan untuk dapat diselesaikan pada tahun 2013.

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, masih menghadapi permasalahan pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM Aparatur dan implementasi manajemen kinerja pada instansi pemerintah. Kelembagaan birokrasi pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sampai saat ini belum dapat diwujudkan. Tumpang tindih tupoksi, benturan kepentingan yang menonjolkan ego sektoral, dan sulitnya membina koordinasi yang sinergis antar K/L/Pemda masih sering dijumpai. Sistem ketatalaksanaan juga belum didesain secara sederhana, terukur, dan cepat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Pada aspek SDM aparatur; penataan PNS mulai dari sistem rekrutmen, penempatan, promosi dan mutasi dan evaluasi kinerjanya masih harus dibenahi. Sampai saat ini, masih sulit untuk menentukan jumlah kebutuhan pegawai secara tepat pada suatu instansi, berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi yang ada. Di sisi lain jumlah tenaga analis jabatan di K/L/pemda masih sangat terbatas, sehingga peta jabatan dan profil kebutuhan pegawai belum tersedia secara rinci dan valid. Sistem rekrutmen PNS masih harus dilakukan penyempurnaan mendasar agar berjalan secara kredibel, transparan dan profesional, serta mengarah pada kompetensi

yang dibutuhkan. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, pengukuran kinerja pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada sistem *reward and punishment*. Selain itu, implikasi dari reformasi birokrasi di instansi pemerintah, maka manajemen kinerja harus diterapkan secara konsisten, teratur dan berorientasi pada peningkatan kinerja secara optimal baik kinerja pegawai maupun kinerja birokrasi. Namun, disadari bahwa kondisi birokrasi belum sepenuhnya mampu melaksanakan manajemen kinerja secara baik, khususnya dari sisi akuntabilitas kerjanya pada publik. Di sisi lain, masyarakat/publik semakin kritis dan selalu mengawasi kinerja birokrasi dan meminta pertanggungjawaban kerjanya.

8.2.2 Sasaran

Dalam RPJMN 2010-2014 Bidang Hukum dan Aparatur telah dirumuskan bahwa sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur adalah terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Pencapaian sasaran ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pada RKP 2013 sasaran pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur adalah:

1. Memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kinerja di bidang hukum dengan sarana dan prasarana yang memadai serta mendukung kinerja lembaga sesuai dengan fungsi masing-masing.
2. Mewujudkan pemenuhan, perlindungan, penghormatan HAM melalui keterbukaan akses masyarakat terhadap keadilan di beberapa bidang (termasuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin).
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, melalui: (i) pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka menengah; (ii) penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi di provinsi/kabupaten/kota; dan (iii) meningkatnya opini WTP hasil audit BPK atas LKKL dan LKPD TA 2012.
4. meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang ditandai dengan: (i) meningkatnya integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan (ii) meningkatnya peringkat indeks kemudahan berusaha.
5. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

birokrasi, yang ditandai dengan: (i) makin meningkatnya skor Indeks Efektivitas Pemerintahan, dan (ii) meningkatnya prosentase instansi pemerintah yang dinilai akuntabel.

8.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2013

Upaya mencapai sasaran Bidang Hukum dan Aparatur tahun 2013 akan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

8.3.1 Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh untuk meningkatkan efektivitas peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut

1. Peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan

Peningkatan pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada maupun peningkatan kualitas dari rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Untuk tahun 2013 ini, akan diupayakan prasyarat adanya Naskah Akademis yang menyertai konsep peraturan perundang-undangan yang akan diajukan dalam daftar Prolegnas serta dilakukannya seleksi berdasarkan prioritas perencanaan pembangunan dan kebutuhan hukum masyarakat untuk menentukan RRII yang masuk dalam daftar Prolegnas untuk menyesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional.

2. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan turunan UU No. 12 Tahun 2011 dalam rangka sinergitas antara prioritas perencanaan pembangunan dan kebutuhan kerangka regulasi dalam proses penyusunan Prolegnas.

3. Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan

Melaksanakan mekanisme awal untuk menemukenali kerangka regulasi yang diperlukan oleh masing-masing lembaga dan merevisi dan/atau menghapus regulasi yang tumpang tindih antar lembaga dan sektor.

4. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan proses yang partisipatif dalam rangkaian penyusunan peraturan perundang-undangan yang

melihatkan seluruh pemangku kepentingan dan memperluas ruang partisipasi untuk melakukan pengawasan dalam implementasi peraturan perundang-undangan.

8.3.2 Peningkatan Kinerja Lembaga Penegak Hukum

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh untuk meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum adalah sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan sistem manajemen penanganan perkara yang akuntabel dan transparan
Peningkatan keterbukaan *business process* dan alur penanganan perkara yang di dukung oleh sistem manajemen perkara yang transparan dengan dukungan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat.
2. Meningkatkan upaya perbaikan mekanisme seleksi, promosi, dan mutasi serta kapasitas aparat penegak hukum yang berbasis kompetensi.
Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu integritas aparat penegak hukum, akan dilaksanakan melalui perbaikan pelaksanaan rekrutmen aparatur penegak hukum yang berbasis kompetensi, promosi dan mutasi yang berbasis merit dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.
3. Meningkatkan upaya pengawasan terhadap kinerja lembaga dan aparat penegak hukum.
Upaya penegakan kode etik profesi dan pengawasan yang menyeluruh baik secara internal maupun eksternal akan menjadi fokus pelaksanaan tahun 2013 untuk memperkuat integritas aparat penegak hukum sebagai input dalam pelaksanaan tugas dan kinerja. Pemberian sanksi yang tegas terhadap aparatur penegak hukum dan upaya menindaklanjuti laporan pengaduan yang terkait dengan kinerja akan dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam proses penegakan hukum.
4. Peningkatan kualitas pelayanan hukum.
Upaya peningkatan pelayanan hukum terus dilakukan dengan mengedepankan berbagai inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel.

3. Perbaikan dukungan sarana dan prasarana lembaga penegak hukum.

Perbaikan kinerja aparat penegak hukum akan terus dilakukan melalui upaya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai yang mendukung pelaksanaan kinerja aparat penegak hukum.

8.3.3 Peningkatan Penghormatan terhadap HAM

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM adalah sebagai berikut:

1. Pembaruan materi hukum.

Pengarusutamaan prinsip-prinsip internasional hak asasi manusia akan terus dilakukan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional dalam rangka peningkatan dalam pemberian penghormatan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

2. Peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan.

Akses masyarakat terhadap keadilan perlu diberikan secara proporsional baik dalam rangka penguatan masyarakat (*empowerment*) maupun peningkatan pelayanan kelembagaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di tahun 2013, akses masyarakat terhadap keadilan akan dilaksanakan antara lain melalui kegiatan bantuan hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 yang dilaksanakan melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengelola kepada organisasi bantuan hukum yang akan memberikan jasa bantuan hukum melalui proses/mekanisme yang terbuka dan akuntabel.

8.3.4 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kerangka pikir sebagai landasan arah dan strategi kebijakan pada RKP 2013 adalah sebagai berikut:

GAMBAR 8.2
KERANGKA PIKIR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
YANG BERSIH DAN BEBAS KKN PADA RKP 2013



Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Proses Pencegahan dan Penegakan Hukum yang terkoordinasi dan terintegrasi.

Dalam melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum yang terintegrasi, diperlukan peningkatan koordinasi yang memadai antar aparat penegak hukum khususnya dalam berbagai upaya pencegahan yang integrali serta penanganan kasus-kasus yang mendapat perhatian masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian yang besar kepada negara sehingga diharapkan upaya penegakan hukum dilakukan terpadu dan saling bersinergi.

2. Pencegahan KKN melalui penegakan sistem integritas aparaturnegara.

Dalam tahun 2013, langkah-langkah penegakan sistem integritas antara lain penegakan disiplin PNS secara ketat; pemberlakuan bagi pegawai khususnya yang memangku jabatan structural dan tugas strategis untuk menyampaikan laporan harta kekayaan; diterapkannya pakta integritas dan

zona integritas pada K/L/Pemda. Penerapan penegakan kode etik dan penanganan konflik kepentingan terus diperkuat, sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai.

Perbaikan kualitas pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui perluasan penerapan SPIP pada instansi pemerintah. Kompetensi auditor internal dan pengelola keuangan negara terus ditingkatkan, untuk mendorong pengelolaan keuangan negara secara *accountable* dan *auditable*. Langkah ini didukung pula melalui inisiatif baru khususnya pelaksanaan program gelar dan *capacity development* (non gelar) bagi auditor APIP dan pengelola keuangan di K/L/Pemda melalui kegiatan *state accountability revitalization* (STAR).

Pada aspek pengadaan barang/jasa pemerintah, pembentukan LPSE pada instansi pemerintah terus dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya. Peningkatan kompetensi SDM pengadaan, khususnya pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditingkatkan baik melalui bimbingan teknis maupun sertifikasi. Langkah lainnya, penyusunan RRU Pengadaan Barang/jasa pemerintah sebagai landasan hukum/kebijakan bidang pengadaan terus dilanjutkan, dan dapat dibahas di DPR.

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Pengawasan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan terus ditingkatkan. Disadari bahwa peran masyarakat dalam pengawasan memiliki peran strategis untuk mendorong transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, mencegah praktek KKN dan menciptakan iklim takut korupsi. Hasil pengawasan masyarakat menjadi salah satu masukan perbaikan, disamping juga hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

8.3.5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, kerangka pikir sebagai landasan arah dan strategi kebijakan pada RKP 2013 adalah sebagai berikut:

GAMBAR 8.3
KERANGKA PIKIR PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
PADA RKP 2013



Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka langkah-langkah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan manajemen dan sistem pelayanan publik nasional.

Langkah yang dilakukan antara lain implementasi sistem pengaduan pelayanan publik nasional dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan. Selain itu membenahan manajemen pelayanan pada instansi pemerintah terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Pada tahun 2013 diharapkan seluruh pemerintah daerah telah menerapkan PTSP/*one stop services* (OSS). Demikian pula penerapan teknologi informasi dan komunikasi terus dikembangkan. Peningkatan kapasitas SDM pelayanan akan ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan secara intensif, yang antara lain berpedoman pada Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Publik. Selanjutnya,

ditempuh pula upaya pengembangan inovasi pelayanan publik di daerah.

2. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik.

Setiap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada publik, harus didasarkan standar pelayanan yang jelas. Sebagai implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka akan dilakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui penerapan standar pelayanan pada sektor strategis yang secara bertahap diperluas pada sektor lainnya dan pemerintah daerah. Disamping itu, 15 standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan, akan diterapkan pada instansi pemerintah daerah, sebagai bagian dari upaya menjamin penyediaan pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat.

3. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.

Evaluasi dilaksanakan sebagai bagian dari perbaikan kualitas dan kinerja penyelenggaraan pelayanan. Langkah yang ditempuh antara lain melakukan pemeringkatan pelayanan publik secara bertahap di seluruh K/L/Pemda. Unit pelayanan terbaik, diharapkan dapat menjadi *best practices* bagi pengembangan kualitas pelayanan publik di K/L/Pemda.

8.3.6 Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah, kerangka pikir sebagai landasan arah dan strategi kebijakan pada RKP 2013 adalah sebagai berikut:

GAMBAR B.4
KERANGKA PIKIR PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA RKP 2013



Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka langkah-langkah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan instansi pemerintah.

Langkah penataan kelembagaan dilaksanakan sejalan dengan prinsip *structure follow function*. Pada tahun 2013, penataan kelembagaan terus dilanjutkan dengan target 80% dari seluruh instansi pemerintah pusat (kementerian/lembaga) sudah tertata kelembagaannya. Sejalan hal tersebut, akan tempuh langkah-langkah antara lain: penataan jabatan struktural di birokrasi pemerintah; evaluasi kelembagaan unit pengelola teknis (UPT) pada kementerian/lembaga, dan evaluasi lembaga non struktural (LNS) yang berpotensi tumpang tindih dengan lembaga lainnya. Disamping itu, proses konsolidasi struktural pada kementerian/lembaga yang pada awalnya dalam lingkungan bidang aparatur negara, yakni Kemenpan dan RB; LAN, dan BKN, terus dilanjutkan dan diperluas pada kementerian/lembaga lainnya.

2. Pengembangan sistem ketatalaksanaan.

Manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien harus didukung dengan sistem ketatalaksanaan (proses bisnis) yang sederhana, transparan dan akuntabel. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem ketatalaksanaan, diharapkan telah diterbitkan dan dilaksanakan pada tahun 2013, seperti RUU tentang Administrasi Pemerintahan dan RUU tentang Etika Penyelenggara Negara menjadi UU. Selanjutnya, secara bertahap dilakukan penataan sistem ketatalaksanaan yang efektif dan efisien termasuk di dalamnya mengakselerasi pengembangan sistem elektronik pemerintah (*e-government*). Peranan manajemen kearsipan yang dikelola secara modern, turut pula memberikan dukungan bagi terselenggaranya sistem ketatalaksanaan yang baik di lingkungan birokrasi pemerintah. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka terus dilaksanakan upaya perbaikan manajemen kearsipan pada K/L/Pemda secara bertahap. Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK) terus diperluas. Selanjutnya, akan ditempuh pula peningkatan kapasitas jabatan fungsional arsiparis.

3. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM Aparatur.

SDM Aparatur merupakan pendorong utama reformasi birokrasi. Dalam rangka memberikan landasan yang kuat, sejalan dengan perkembangan peranan birokrasi dan PNS dalam sistem pemerintahan saat ini, diharapkan RUU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat segera diterbitkan tahun 2012, dan segera dilindiajdijuli dengan peraturan pelaksanaannya, sosialisasi dan implementasi pada tahun 2013. Langkah-langkah yang ditempuh untuk perbaikan manajemen kepegawaian berbasis merit, antara lain penataan jumlah, distribusi dan kualitas PNS, yang meliputi penyusunan rencana kebutuhan pegawai nasional; pelatihan tenaga analis jabatan; dan perbaikan sistem seleksi penerimaan CPNS secara obyektif berdasarkan kebutuhan dan kompetensi. Di samping itu, akan terus ditingkatkan profesionalisme PNS yang mencakup pengukuran kinerja pegawai; perbaikan sistem diklat dan kualitas pelaksanaannya yang mencakup sertifikasi

widyaiswara dan akreditasi lembaga diklat. Di sisi lain, upaya penataan pegawai dan profesionalismenya, akan diimbangi pula dengan perbaikan sistem kesejahteraan PNS, yang meliputi penggajian berbasis kinerja; perbaikan pengelolaan dana pensiun; dan pemenuhan sarana dan prasarana kerja bagi pegawai secara memadai.

Sebagai bagian dari manajemen kepegawaian, ditempuh pula upaya pengembangan sistem informasi dan pengolahan data kepegawaian; penerbitan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) bagi PNS; penilaian kompetensi calon pejabat struktural dan konseling kepegawaian; pengembangan *Computer Assisted test* (CAT) untuk Seleksi PNS; revitalisasi sistem nasional *Assessment Center* untuk rekrutmen, pelatihan dan promosi jabatan; dan pengkajian peningkatan kinerja pegawai.

4. Peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terus meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Landasan hukumnya terus diperkuat melalui penyusunan RUU tentang Akuntabilitas Penyelenggara Negara. Diharapkan tahun 2013, RUU ini sudah dapat diterbitkan, dan selanjutnya disosialisasikan, disusun peraturan pelaksanaannya, dan diimplementasikan secara konsisten. Langkah yang saat ini sedang dan terus dilanjutkan di tahun 2013, antara lain perbaikan manajemen kinerja di instansi K/L/Pemda. Perencanaan kinerja terus diperbaiki sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penetapan kinerja bagi pejabat dan unit kerja, terus diperluas penerapannya dan sebagai tolok ukur penilaian pencapaian. Setiap instansi pemerintah harus memiliki indikator kinerja utama (IKU) yang terukur. Pelaporan kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan terus disempurnakan, sebagai instrumen untuk mengukur dan menilai kualitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran beserta target yang ditetapkan. Pada akhirnya, diharapkan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dapat menerapkan manajemen kinerja secara baik dan makin akuntabel.

8.3.7 Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi, kerangka pikir sebagai landasan arah dan strategi kebijakan pada RKP 2013 adalah sebagai berikut:

GAMBAR 8.5
KERANGKA PIKIR PEMANTAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA RKP 2013



Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka langkah-langkah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah berpedoman pada kebijakan nasional yang tertuang pada Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014. Dalam rangka sinkronisasi, konsistensi dan efektivitas pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi nasional, perlu dilakukan penguatan kelembagaan pelaksana reformasi birokrasi di tingkat nasional. Penguatan yang penting dilakukan adalah peningkatan kapasitas Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), Tim Independen dan Tim *Quality Assurance* agar dapat mengkoordinasikan, mengendalikan dan memastikan kualitas pelaksanaan RB nasional. Sedangkan pelaksanaan program *quick wins*, diharapkan dapat meningkatkan akselerasi kualitas pelayanan publik, yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Sejalan dengan penuntasan reformasi birokrasi di pusat dan perluasan di daerah, maka monitoring dan evaluasi pada K/L/Pemda yang telah melaksanakan RB terus ditingkatkan dengan instrumen yang kredibel oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) dan Tim *Quality Assurance*. Disamping itu, untuk memastikan kualitas pelaksanaan RB pada instansi masing-masing, telah ditetapkan PermenPAN dan RB nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini untuk mengejar target kualitas pelaksanaan RB sebesar 90% untuk instansi pusat.

- 2.. PEMBERDAYAAN SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.

Reformasi birokrasi memiliki dampak yang sangat signifikan pada pegawai, baik untuk pegawai yang tetap dapat memenuhi standar kompetensi dan kinerja, maupun pada pegawai yang tidak memiliki standar kompetensi dan kinerja secara memadai. Oleh karena itu, akan ditempuh langkah-langkah peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai, agar dapat meningkat kinerjanya sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Bentuknya adalah pendidikan dan pelatihan bagi upaya penanganan dampak reformasi birokrasi dan peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai. Disamping itu, untuk membentuk kader-kader penggerak Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah, akan diterapkan pendidikan dan pelatihan *Reform the Reformers (Reform Leaders Academy)* bagi SDM aparatur. Penyelenggaraan *Reform Leader Academy* diharapkan mampu meningkatkan dan mempersiapkan para pemimpin dalam lingkungan birokrasi yang memiliki kemampuan handal untuk menghadapi berbagai tantangan pada masing-masing instansinya, lokal, regional, nasional maupun global.

- 3.. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan penuntasan reformasi birokrasi pada instansi pusat dan perluasan pada instansi pemerintah daerah. Pada tahun 2013, diharapkan seluruh instansi pusat (K/L) dan pemerintah provinsi telah melaksanakan reformasi birokrasi. Sedangkan untuk di daerah, diharapkan 40% dari

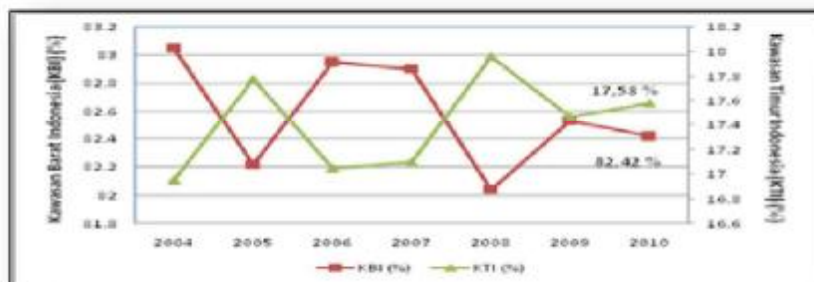
kabupaten/kota telah melaksanakan reformasi birokrasi. Untuk mendukung target tersebut, akan ditingkatkan konsultasi, asistensi dan bimbingan pada instansi secara intensif. Dengan arah kebijakan tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan makin meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB 9 BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

9.1 Kondisi Umum

Pembangunan nasional di tahun 2013 masih menghadapi tantangan kesenjangan antar wilayah dan belum optimalnya daya saing perekonomian daerah dalam mendukung perekonomian nasional. Masalah utama kesenjangan antarwilayah, adalah kesenjangan dalam perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial, antara wilayah barat (Sumatera, Jawa dan Bali) dan wilayah timur Indonesia, serta antara pusat-pusat pertumbuhan utama dan kota, dengan wilayah kabupaten dan perdesaan sekitarnya. Masih cukup besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dan belum optimalnya pembangunan di daerah-daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau terluar di daerah perdesaan di satu sisi, serta masih terpusatnya akumulasi investasi di wilayah Jawa-Bali dan sebagian Sumatera, serta di kota-kota besar dan metropolitan, menggambarkan besarnya kesenjangan tersebut. Sementara upaya pengembangan kawasan-kawasan strategis dan pembangunan perkotaan yang diharapkan dapat menyebarkan pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya dan pembangunan ekonomi lokal dan daerah belum memberikan peran yang cukup berarti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat secara nasional.

GAMBAR 9.1
KONTRIBUSI PDRB KBI DAN KTI TAHUN 2004-2010



Sumber : BPS, 2011

Di sisi lain, posisi daya saing Indonesia yang masih kurang kompetitif, masih belum optimal dalam memanfaatkan sumber daya dan kapasitas nasional. Masalah utama pada daya saing nasional adalah pada aspek-aspek korupsi dan inefisiensi birokrasi pemerintahan, ketidakmerataan infrastruktur dan akses kepada pembiayaan, belum memadainya kualitas SDM yang berpendidikan dan berkemampuan (Global Competitiveness Report, 2011-2012). Dengan dampak krisis ekonomi di Eropa dan Amerika yang diperkirakan akan serapi di kawasan ASEAN dan Asia pada pertengahan 2012, maka persaingan antarnegara ASEAN dan Asia akan semakin ketat. Menurunnya kemampuan daya beli Amerika dan Eropa Barat akan memaksa Indonesia mengalihkan atau mendiversifikasikan pasar ekspornya ke Asia dan Timur Tengah. Hal yang sama juga akan dilakukan oleh produsen di negara dalam lingkup ASEAN dan Asia.

Dalam rangka pengurangan kesenjangan antarwilayah, sekaligus meningkatkan daya saing daerah dan nasional pula, pembangunan terhadap 6 (enam) koridor ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025 akan terus dilaksanakan pada tahun 2013 di koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Kep.Maluku. Hal ini menjadi prioritas utama untuk meningkatkan percepatan pembangunan dan menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia, dengan mengintegrasikan pendekatan regional dan sektoral ke dalam pembangunan.

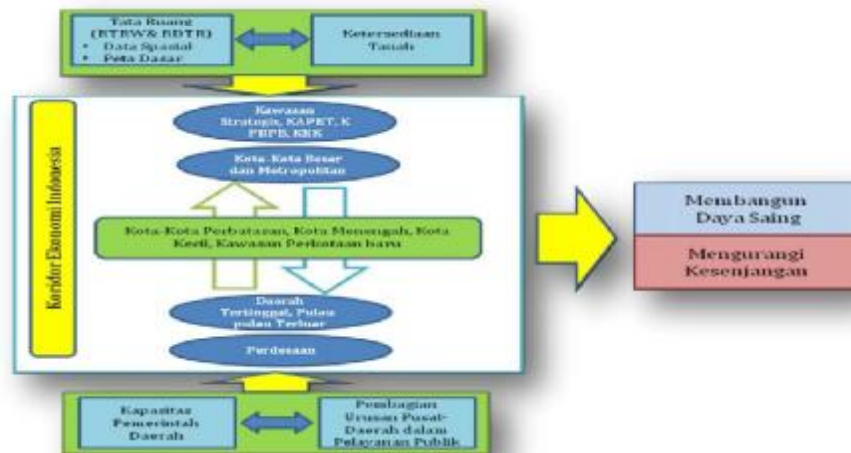
Dalam kerangka tersebut, maka prioritas pembangunan kewilayahan dan tata ruang pada tahun 2013 adalah pengembangan wilayah yang terfokus pada kawasan-kawasan strategis yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta pembangunan kota-kota besar dan metropolitan terutama di luar Jawa dan Bali, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yang dapat menggerakkan pertumbuhan wilayah sekitarnya. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pembangunan wilayah perdesaan di daerah-daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan pulau-pulau terluar, yang masih tetap

merupakan agenda utama pengembangan kewilayahan dan tata ruang. Pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di sekitar daerah tertinggal dan perbatasan termasuk kawasan transmigrasi semakin dipercepat, untuk meningkatkan keterkaitan antardaerah termasuk di dalamnya meningkatkan keterkaitan antara kota dan desa, dan dengan pusat-pusat pertumbuhan utama dalam koridor ekonomi.

Dalam upaya mendukung hal tersebut di atas, perlu didukung dengan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang kuat. Oleh karena itu, ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang yang didukung dengan data dan informasi geospasial serta peta dasar yang akurat sangat diperlukan. Selain itu, kebijakan Pemerintah akan didukung dengan penyediaan peta pertanahan, perizinan legalisasi aset tanah, dan penertiban tanah, baik untuk menghindari konflik kepemilikan lahan antara pemerintah dengan masyarakat dan antarmasyarakat yang mengakibatkan pembangunan fasilitas publik menjadi terhambat, maupun untuk menghindari ketidakjelasan kepemilikan lahan yang mengakibatkan iklim dunia usaha menjadi tidak pasti dan meningkatkan resiko berusaha.

Seluruh upaya yang akan dilakukan perlu didukung dengan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah. Pada tahun 2013, diharapkan pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan lebih konsisten dan efektif melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur daerah serta peningkatan kapasitas keuangan daerah, khususnya dalam pelayanan publik di daerah.

GAMBAR 9.2
ALUR PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG TA 2013



9.1.2 Data dan Informasi Spasial

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi dimaksud mencakup data dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (images), termasuk di dalamnya data dan informasi spasial. Amanat Undang-undang tersebut menunjukkan pentingnya data dan informasi spasial dalam proses perencanaan pembangunan.

Saat ini telah ditetapkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang mengatur mengenai penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut, penyelenggaraan informasi geospasial dasar dilakukan oleh Badan yang disebut Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai pengganti nama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Sementara itu, informasi geospasial tematik dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa Instansi Pemerintah dan Pemerintah daerah harus menggunakan informasi geospasial yang akurat

dalam pengambilan keputusan dan/atau penentuan kebijakan yang berhubungan dengan ruang kebunian. Lebih lanjut, perlu ada upaya untuk mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Saat ini, Pemerintah Pusat berinisiatif melakukan terobosan baru untuk melakukan kegiatan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI) dengan mengintegrasikan pendekatan regional dan sektoral ke dalam pembangunan 6 (enam) koridor ekonomi di seluruh Indonesia dengan mempertimbangkan penanggulangan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup. Implementasi pembangunan wilayah koridor ekonomi menuntut ketersediaan basisdata informasi geospasial sebagai basis percepatan pembangunan wilayah koridor ekonomi. Untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan P3EI di wilayah koridor ekonomi dibutuhkan data spasial yang rinci dengan skala data spasial memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Sampai saat ini ketersediaan data spasial tersebut, yaitu data geospasial dengan skala 1:10,000 masih sangat terbatas sehingga dibutuhkan suatu inisiatif baru dengan melakukan terobosan melalui upaya percepatan penyediaannya di wilayah koridor ekonomi Indonesia.

Sampai dengan tahun 2011, telah tersedia data dan informasi spasial yang dihasilkan oleh beberapa instansi pusat untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam menyusun perencanaan pembangunan, antara lain sebagai berikut:

Terkait infrastruktur geospasial dasar, hasil yang dicapai antara lain: (i) perawatan 260 pilar jaring kontrol geodesi dan geodinamika; (ii) perawatan 100 pilar stasiun tetap Global Positioning System (GPS); (iii) perawatan 112 stasiun pasang surut laut; (iv) perawatan 1 pilar stasiun permanen gaya berat; (v) Peta Rupabumi Skala 1:10,000 (Sumatera dan Selatan Jawa) sebanyak 72 Nomor Lembar Peta (NLP); (vi) Peta Rupabumi Skala 1:50,000 Wilayah Gap sebanyak 175 NLP; (vii) Peta Rupabumi Skala 1:250,000 Wilayah Gap sebanyak 50 NLP; (viii) Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:250,000, 1:50,000, 1:25,000 dan Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500,000 sebanyak 61 NLP; (ix) Peta Lingkungan Bandara Indonesia (LBI) sebanyak 2 NLP; (x) Peta Navigasi Udara (Aeronautical Chart) sebanyak 15 NLP; (xi) peta resmi tingkat peringatan tsunami sebanyak 2 NLP; (xii) Peta Batas Wilayah Negara (Joint Mapping) Koridor Perbatasan

Darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50,000 sebanyak 12 NLP; (xiii) Peta Kecamatan Kawasan Perbatasan Darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50,000 serta skala 1:25,000 sebanyak 89 NLP; (xiv) pemetaan pulau-pulau terluar sebanyak 20 pulau; dan (xv) pemeliharaan 40 Border Sign Post (BSP) batas RI-RDTL;

Terkait infrastruktur geospasial tematik, hasil yang dicapai antara lain: (i) peta tematik matra darat sebanyak 538 NLP; (ii) peta tematik matra laut sebanyak 112 NLP; (iii) atlas sumberdaya dan kajian pengembangan wilayah; dan (iv) Gasetir dan Model penataan ruang provinsi sebanyak 300 NLP;

Terkait infrastruktur informasi geospasial, hasil yang dicapai antara lain: (i) pembentukan simpul jaringan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 76 simpul; dan (ii) metadata simpul jaringan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 2580 dataset.

Adapun perkiraan pencapaian pembangunan data dan informasi spasial tahun 2012 antara lain adalah:

Terkait infrastruktur geospasial dasar, perkiraan hasil yang dicapai antara lain: (i) perawatan 200 pilar jaring kontrol geodesi dan geodinamika; (ii) perawatan 90 pilar stasiun tetap Global Positioning System (GPS); (iii) perawatan 95 stasiun pasang surut laut; (iv) perawatan 1 pilar stasiun permanen gaya berat; (v) Peta Rupabumi Skala 1:10,000 (Sumatera dan Selatan Jawa) sebanyak 60 NLP; (vi) Peta Rupabumi Skala 1:50,000 Wilayah Gap sebanyak 28 NLP; (vii) Peta Rupabumi Skala 1:250,000 Wilayah Gap sebanyak 30 NLP; (viii) Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:250,000, 1:50,000, 1:25,000 dan Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500,000 sebanyak 56 NLP; (ix) Peta Lingkungan Bandara Indonesia (LBI) sebanyak 3 NLP; (x) Peta Navigasi Udara (Aeronautical Chart) sebanyak 15 NLP; (xi) peta resmi tingkat peringatan tsunami sebanyak 3 NLP; (xii) Peta Batas Wilayah Negara (Joint Mapping) Koridor Perbatasan Darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50,000 sebanyak 12 NLP; (xiii) pemetaan pulau-pulau terluar sebanyak 13 pulau; dan (xiv) pemeliharaan 50 Border Sign Post (BSP) batas RI-RDTL;

Terkait infrastruktur geospasial tematik, perkiraan hasil yang dicapai antara lain: (i) peta tematik matra darat; (ii) peta tematik matra laut; (iii) atlas sumberdaya dan kajian pengembangan wilayah; dan (iv) Gasetir dan Model penataan

ruang provinsi sebanyak 300 NLP;

Terkait infrastruktur informasi geospasial, perkiraan hasil yang dicapai antara lain: (i) pembentukan simpul jaringan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 116 simpul; dan (ii) metadata simpul jaringan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 5140 dataset.

9.1.3 Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang dilakukan melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan (turbinlakwas) penataan ruang. Selain itu, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga memperkuat aspek pengelompokan penataan ruang, integrasi pengaturan ruang, kewenangan, hirarki fungsional rencana tata ruang, konsep peran masyarakat dan aspek sanksi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun demikian, fakta empirik dan yuridis menunjukkan masih adanya berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang terjadi, seperti semakin tingginya konversi penggunaan lahan; meningkatnya permasalahan bencana banjir dan longsor; urban sprawl; semakin meningkatnya kemacetan lalu lintas dan permukiman kumuh, serta semakin berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di perkotaan; kurang memadainya kapasitas kawasan metropolitan dalam menampung pertumbuhan jumlah penduduk; dan kurang seimbang pembangunan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dan untuk mencapai tujuan penataan ruang, RPJMN 2010-2014 maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang Penataan Ruang mengarahkan 4 (empat) fokus prioritas pembangunan. Adapun keempat Fokus Prioritas untuk Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang diamanatkan oleh RPJMN 2010-2014 tersebut adalah: (i) penyelesaian peraturan perundangan sesuai amanat Undang-undang Penataan Ruang; (ii) peningkatan kualitas produk rencana tata ruang; (iii) sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang; dan (iv) peningkatan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang. Dampak pelaksanaan kegiatan di dalam Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan

Ruang diharapkan berkurangnya konflik pemanfaatan ruang antar sektor dan daerah.

Kemajuan yang dicapai pada tahun 2011 dan awal tahun 2012 antara lain adalah ditetapkannya beberapa Rencana Tata Ruang amanat UU 26/2007 dan PP 26/2008 berupa 4 (empat) RTR Pulau yaitu Perpres 88/2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi, Perpres 3/2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan, Perpres 13/2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, dan Perpres 28/2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali; dan 4 (empat) RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu Perpres 45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Bandung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagila), Perpres 55/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Macundasata), Perpres 62/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro), dan Perpres 87/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Balari, Bintan dan Karimun (BBK). Selain Perpres, UU 26/2007 juga mengamanatkan penyusunan dan revisi Perda RTRWP dan RTRWK. Pada Tahun 2011 telah ditetapkan 3 RTRW Provinsi, 72 RTRW Kabupaten dan 23 RTRW Kota yang disusun dengan merujuk pada UU 26/2007 dan PP 26/2008 tentang RTRWN. Pada awal Tahun 2012 telah ditetapkan 1 RTRW Provinsi, 17 RTRW Kabupaten dan 8 RTRW Kota yang disusun dengan merujuk pada UU 26/2007 dan PP 26/2008 tentang RTRWN.

Perkiraan pencapaian 2012 antara lain adalah: (i) ditetapkannya RPP tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPP tentang RTR Wilayah Pertahanan Negara; (ii) ditetapkannya 3 Raperpres RTR Pulau/Kepulauan, yaitu RTR Kepulauan Maluku, RTR Kepulauan Nusa Tenggara, dan RTR Pulau Papua; (iii) ditetapkannya 1 (satu) Raperpres RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan, yaitu RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dan 9 (sembilan) Raperpres RTR KSN Non Perkotaan, yaitu RTR Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan (Kasaba), RTR Kawasan Perbatasan NTT, RTR Kawasan Perbatasan Papua, RTR Kawasan Perbatasan Maluku, RTR Kawasan Perbatasan Maluku Utara-Papua Barat, RTR KSN Danau Toba, RTR KSN Merapi, RTR KSN Borobudur, RTR KSN Heart of Borneo (HOB); (iv) Legalisasi 11 (sebelas) RTR KSN Non Perkotaan, yaitu RTR Perbatasan NAD-Sumut, RTR Kawasan Perbatasan Sulut-Gorontalo-Sulteng, RTR Kawasan

Perbatasan Riau-Kepri, RTR KSN Pacangsanak, RTR KSN KPBPB Sabang; RTR KSN Selat Sunda, RTR KSN Timika, RTR KSN Soroako, Kawasan RTR KAPET Sasambo, RTR KAPET Manado-Bitung, dan RTR KAPET Para-Para; (v) disetujui substansi teknis RTRW untuk 64 kabupaten dan 47 kota oleh BKPRN.

9.1.4 Pertanahan

Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), pemanfaatan bumi (tanah) harus dilakukan secara berkeadilan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk itu, pelaksanaan program pengelolaan pertanahan perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.

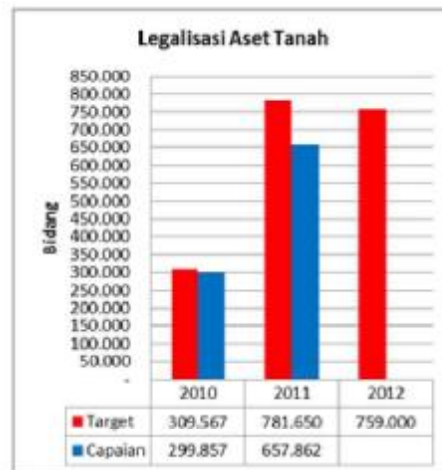
Untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah, kepastian lokasi bidang tanah serta mengurangi resiko sertifikat ganda dan juga potensi sengketa maka perlu adanya ketersediaan peta pertanahan. Pada Tahun 2011 telah dilakukan pembuatan peta dasar pertanahan seluas 4,61 juta hektar, sehingga total ketersediaan peta dasar tersebut mencapai 16,71 juta hektar, atau baru sebesar 8,71 persen dari 191,9 juta ha total luas daratan Indonesia. Pada tahun 2012 penyediaan peta pertanahan ditargetkan mencakup luasan 2,5 juta hektar, sehingga diharapkan akhir tahun 2012 peta pertanahan telah mencapai 19,21 juta hektar.

Pada tahun 2012 juga telah disahkan UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diharapkan dapat mendukung iklim investasi serta percepatan pembangunan infrastruktur yang selama ini terkendala oleh pengadaan tanah dan di sisi lain dapat menjamin kepastian hak masyarakat atas tanah. Kemudian terkait dengan pendaftaran tanah (sertifikasi), pada tahun 2011 telah dilaksanakan percepatan pendaftaran tanah yang dibiayai Pemerintah sebanyak 657.862 bidang. Dengan demikian sampai Tahun 2011, telah disertifikasi 40.639.558 bidang atau sekitar 46,79 persen dari total 86.845.839 bidang tanah di Indonesia. Sertifikasi tersebut diharapkan dapat memberi akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan, untuk kalangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), petani, transmigran dan nelayan. Pada Tahun 2012 target pendaftaran tanah (sertifikasi) sebesar 759.000 bidang.

GAMBAR 9.3
TARGET DAN CAPAIAN PEMBUATAN PETA
PERTANAHAN TAHUN 2010-2012



GAMBAR 9.4
TARGET DAN CAPAIAN LEGALISASI ASET
TANAH TAHUN 2010-2012



Sumber : BPN, 2011-2012

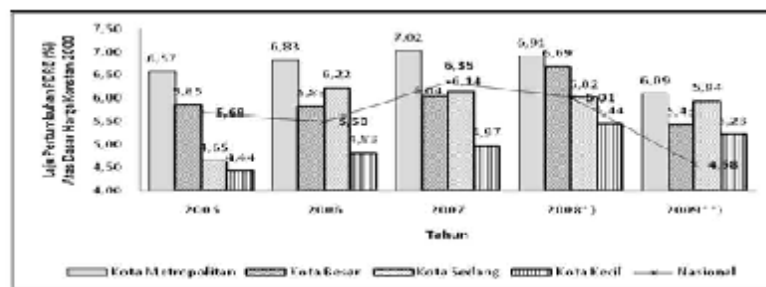
Berkaitan dengan tanah terlantar, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, maka perlu adanya pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar untuk kepentingan masyarakat dan negara. Tanah terlantar ini nantinya akan menjadi obyek tanah untuk kegiatan redistribusi tanah dalam mendukung program reforma agraria. Pendayagunaan tanah terlantar juga dapat mendukung untuk pengembangan sektor pangan dan energi. Pada Tahun 2011 telah dilaksanakan identifikasi dan penertiban tanah terlantar seluas 166 Satuan Pekerjaan (SP) (1 SP = 500 ha), dan pada Tahun 2012 ditargetkan seluas 446 SP.

9.1.5 Perkotaan

Pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi sangat mempengaruhi pembangunan perkotaan di Indonesia. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025, penduduk perkotaan akan mencapai 67,5 persen dari total jumlah penduduk pada 2025. Peran kota-kota menjadi

semakin semakin terhadap perekonomian nasional. Walaupun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil. Pada tahun 2009, laju pertumbuhan PDRB tertinggi terdapat pada kota-kota metropolitan, diikuti oleh kota menengah, kota besar, dan kota kecil.

GAMBAR 9.5
Laju Pertumbuhan PDRB
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Tipologi Kota,
Tahun 2005-2009 (%)



Sumber : BPS, 2005-2009

Upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa diantaranya telah dilakukan melalui penyusunan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, dan diterbitkannya tidak saja Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, namun juga Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Mchidangro (Mecan dsk), Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 tentang RTR Kawasan Perkotaan Sarbagita (Denpasar dsk), serta Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2011 tentang RTR Kawasan Perkotaan Maminasata (Makassar dsk).

Upaya mengurangi kesenjangan antar kota perlu dilakukan dengan memberikan perhatian pada kota-kota selain kota metropolitan dan kota besar, dan sinkronisasi berbagai kebijakan dan peraturan terkait pembangunan perkotaan yang telah ada. Saat ini telah tersusun rancangan akhir Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN), sebagai penjabaran

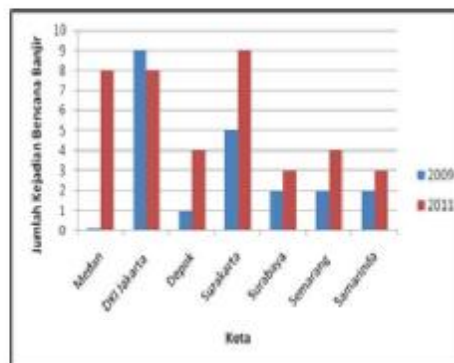
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 bidang pembangunan perkotaan serta Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang memuat perlu dipenuhinya minimal Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) bagi kota metropolitan, kota besar dan khususnya kota-kota menengah dan kecil. Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Perkotaan (SPP).

Masalah pembangunan perkotaan masih terfokus pada tidak selarasnya kapasitas pemenuhan pelayanan publik dengan penambahan jumlah penduduk dan kebutuhannya. Rata-rata persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak di perkotaan pada tahun 2009 sebesar 49,82 persen, serta rata-rata persentase rumah tangga dengan kondisi sanitasi layak sebesar 69,51 persen (BPS, 2009). Selain telah ditetapkannya standar minimal pemenuhan kebutuhan pelayanan publik perkotaan melalui Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), telah juga dilaksanakan fasilitasi penyediaan kebutuhan perencanaan pembangunan perkotaan sesuai SPP di 33 provinsi dan 60 kab/kota, fasilitasi penyediaan pelayanan publik melalui dukungan sarana dan prasarana pada pemukiman tradisional dan bersejarah di 55 kawasan, fasilitasi Kelompok Kerja Sanitasi Perkotaan di 17 provinsi dan 58 kabupaten/kota, fasilitasi penyelenggaraan penyerahan aset prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dari pengembang ke pemerintah daerah di 1 provinsi dan 2 kabupaten/kota, fasilitasi penyusunan Perda terkait PSU di 3 provinsi dan 10 kabupaten/kota, penyiapan pedoman standar pengukuran besaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan, pembangunan 6 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional yang melayani 17 kabupaten/kota, pengembangan sistem drainase kota besar/metropolitan dan Drainase Primer Perkotaan di 33 kabupaten/kota, fasilitasi pembangunan prasarana sanitasi di 11 kabupaten/kota, serta pembangunan sistem pengolahan air limbah dengan sistem on-site di 15 provinsi (35 kawasan).

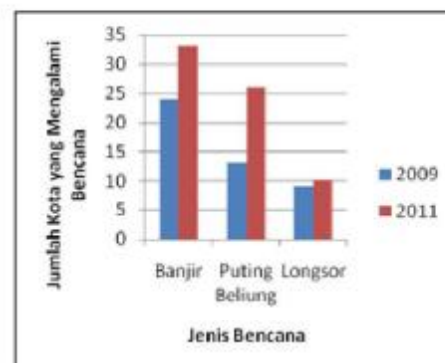
Penurunan kualitas lingkungan serta meningkatnya kerentanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim juga merupakan masalah pokok yang dihadapi kota-kota di Indonesia. Kualitas air sungai yang mengalir di kota-kota besar terutama di Pulau Jawa dan Sumatera semakin menurun karena masukan bahan-bahan pencemar (polutan) yang semakin meningkat. Timbulan sampah terbesar terjadi di Pulau Jawa di mana kota-kotanya memiliki populasi penduduk

yang padat. Pada tahun 2007 timbulan sampah mencapai hampir 65.000 m³ dan meningkat menjadi mendekati 70.000 m³ pada tahun 2008. Dari total volume sampahnya tersebut, hanya sekitar 70% dapat terangkut ke landfill. Selain itu, kota-kota di Jawa, Bali dan Lombok, serta di Sumatera dan beberapa kota di Kalimantan yang relatif padat penduduk atau kegiatan industrinya menunjukkan konsentrasi NO₂ yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia Bagian Timur. Trend meningkat untuk parameter CO dan HC juga terjadi di 12 kota yang dipantau di tahun 2007-2008, sedangkan untuk parameter NO₂ terjadi di 7 dari 12 kota, dan SO₂ di 9 dari 12 kota. Hal ini mengindikasikan terjadi peningkatan pemakaian bahan bakar, termasuk kemungkinan bahan bakar solar. Kota-kota besar juga akan semakin sering menghadapi bencana dengan frekuensi yang semakin meningkat, khususnya bencana kebakaran, diikuti dengan banjir, puting beliung, kekeringan, dan tanah longsor.

GAMBAR 9.6
JUMLAH KEJADIAN BENCANA
BANJIR DI KOTA-KOTA
TAHUN 2009-2011



GAMBAR 9.7
JUMLAH KOTA YANG MENGALAMI
KEJADIAN BENCANA BANJIR, PUTING
BELIUNG, DAN LONGSOR
TAHUN 2009-2011



Sumber : www.djib.bnpb.go.id

Pada Gambar 9.6 diatas terlihat terdapat kecenderungan peningkatan jumlah kejadian bencana banjir pada tahun 2009-2011 di beberapa kota-kota di Indonesia. Selain itu, seperti terlihat pada Gambar 9.7, terdapat peningkatan jumlah kota

yang mengalami kejadian bencana banjir, puting beliung, dan longsor pada tahun 2009-2011. Upaya penanganan polusi lingkungan serta mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di perkotaan, yang telah diinisiasi secara nasional melalui Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (RAN-PRB) dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), perlu diintegrasikan dengan Kebijakan dan Strategi Perkotaan di Daerah, dan menjadi acuan bagi kota-kota dalam melaksanakan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim. Upaya lain juga telah dilakukan antara lain dukungan terhadap sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau skala kota di 86 kawasan, fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau di 26 kota dan 34 kabupaten, peningkatan pelaksanaan penataan Kota Bukittinggi, Blitar, Tanahbun, dan Jayapura, peningkatan pelaksanaan penataan kota pusaka (Kota Sawahlunto), kajian tapak ekologis pada KSN perkotaan, fasilitasi Forum Sustainable Urban Development (SUD), fasilitasi program Kota Cerdas Perubahan Iklim (KCPI), serta peningkatan kelembagaan dan kualitas tata ruang kota untuk 3 kota pemenang Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) yaitu Banda Aceh, Yogyakarta, Ambon. Upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim juga telah banyak dilakukan oleh pemerintah kota di Indonesia, seperti pengembangan sarana transportasi umum untuk mengurangi penggunaan energi seperti Trans Jogja di Kota Yogyakarta, Trans Musi di Kota Palembang, dan Trans Jakarta di Kota Jakarta, perluasan dan perbaikan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya, serta pengembangan koridor hijau dan hutan kota di Kota Balikpapan. Pengelolaan lingkungan perkotaan untuk adaptasi dampak perubahan iklim juga dilakukan antara lain melalui program pembersihan kanal di Kota Makassar, dan program Kampung Ramah Lingkungan di Kota Palembang.

Pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi kinerja dan pemenuhan SPM pembangunan perkotaan juga belum optimal dilaksanakan di kota-kota. Hal ini diantaranya ditunjukkan dari konversi lahan yang terus terjadi dan tidak terkendali. Pulau Jawa mengalami pengurangan luas area bervegetasi antara tahun 2007-2010. Tren pengurangan area bervegetasi tersebut dari seluas 6,69 juta hektar pada tahun 2007 menjadi 6,48 juta hektar pada tahun 2010. Dengan kata lain Pulau Jawa kehilangan areal bervegetasi seluas ± 203 ribu hektar. Dalam upaya

meningkatkan implementasi rencana tata ruang perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di perkotaan, telah dilaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah berkaitan dengan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di 26 kota besar/metropolitan, fasilitasi dalam penyelenggaraan perencanaan dikawasan perkotaan di 10 kab/kota, pembinaan teknis PMU Jabodetabekjur, pengembangan kapasitas penataan ruang kawasan metropolitan Sarbagita, Mebidangro, Maminasata, fasilitasi penyelesaian Perpres KSN Cekungan Bandung, Gerbangkertasusila, Kedungsepur, peningkatan kualitas tata ruang Kota Lestari (Bogor, Bandung, DKI Jakarta, Pekalongan, Palu, Kep. Seribu, DIY, Sukoharjo, Raubau), serta penataan kawasan Banjir Kanal Timur sebagai contoh pengembangan infrastruktur terpadu.

Sementara itu, di kota-kota menengah dan kecil, permasalahan utama adalah belum optimalnya pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2008, kota menengah yang jumlahnya mencapai 62,22 persen terhadap jumlah seluruh kota hanya mampu menyumbangkan 7,82 persen terhadap jumlah PDRB seluruh kota. Untuk pengembangan ekonomi di kota-kota menengah dan kecil, telah dilaksanakan upaya-upaya seperti disusunya Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Tradisional; serta dilaksanakannya pembangunan pasar tradisional, pelaksanaan agenda reformasi dasar perkotaan, serta fasilitasi penyusunan strategi pengembangan ekonomi lokal melalui Urban Sector Development Reform Program (USD RP) di 10 kabupaten/kota.

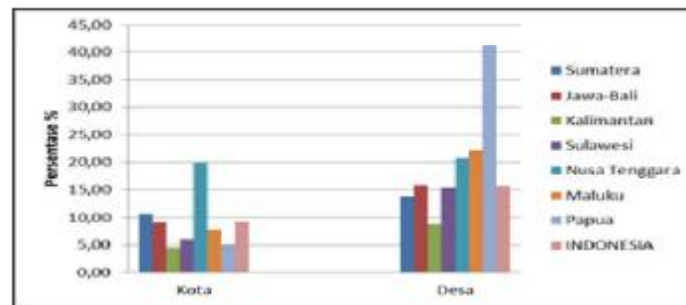
Di atas semua itu, pemerintah kota belum optimal dalam pengelolaan perkotaan baik dari aspek perencanaan, inovasi pembiayaan perkotaan, maupun pelaksanaan kerjasama/kelembagaan pengelolaan kota yang terintegrasi dengan kota/kawasan lain di sekitarnya. Dalam upaya penguatan kelembagaan dan kerja sama antarkota, telah disusun rancangan kebijakan/pedoman pembentukan forum koordinasi pembangunan perkotaan di tingkat Provinsi, serta kajian Penyusunan Model Pelaksanaan Kerja sama Antardaerah/Kawasan Perkotaan Bertetangga. Sedangkan dalam upaya meningkatkan kapasitas pemerintah kota, telah dilaksanakan pemberian penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Award pada tahun 2010 kepada 15 Pemerintah Kota/Kabupaten yang dinilai berhasil dalam

melaksanakan inovasi pengelolaan kota di bidang pengelolaan pasar tradisional, penataan PKL, penataan permukiman kumuh, pengelolaan tata ruang, dan sanitasi perkotaan.

9.1.6 Perdesaan

Sejak tahun 2005, perkembangan jumlah desa/kelurahan meningkat pesat, mulai dari 68.814 desa/kelurahan pada tahun 2003 menjadi 78.609 desa/kelurahan pada tahun 2011. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2005-2008 yaitu sebesar 7,79 persen. Berdasarkan klasifikasinya, pada tahun 2011 masih terdapat 73,22 persen desa/kelurahan swadaya, namun sudah 25,91 persen desa/kelurahan swasembada (data pokok 2011 dikonversi sesuai dengan Permendagri No 12 Tahun 2007 tentang Profil Desa). Berdasarkan penanganannya, sebagian besar desa-desa tersebut masih membutuhkan prioritas penanganan masalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan sebagian desa lainnya sudah lebih maju dan menuju kepada prioritas penanganan masalah keamanan dan ketertiban, kesadaran politik, dan kehangsaan, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan kinerja lembaga masyarakat, beserta prioritas penanganan kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Dari 120,33 juta penduduk hidup di perdesaan, sekitar 15,72 persen nya masih tergolong miskin dengan gaji/upah Rp 960.296/bulan jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan di perkotaan sebesar 1.509.826/bulan. Dari gambar 9.8 terlihat bahwa persentase penduduk miskin di desa paling besar terdapat di wilayah Indonesia Timur (Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara), walaupun jumlah penduduk miskin di desa mayoritas tetap berada di pulau Jawa-Rali yaitu 9,28 juta jiwa atau 48,9 persen dari total penduduk miskin di desa (18,97 juta jiwa).

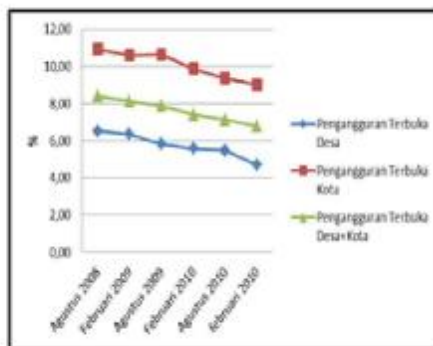
GAMBAR 9.8
PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK MISKIN DESA-KOTA TAHUN 2011



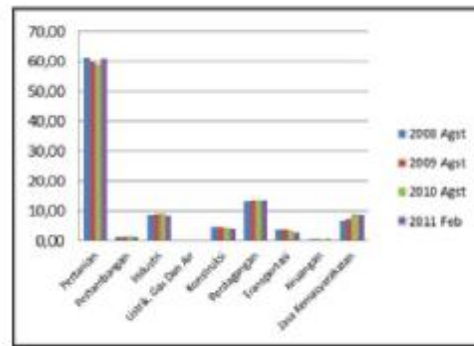
Sumber: Podes, BPS 2011

Secara statistik, sejak 1993 hingga 2008 daerah pedesaan unggul secara signifikan pada sektor-sektor pertanian, namun kontribusi sektor pertanian yang menjadi ciri perekonomian dan daya tarik/saing pedesaan cenderung menurun, dan secara signifikan dan perlahan digantikan oleh sektor perdagangan dan jasa. Jumlah pengangguran terbuka di pedesaan diperkirakan di tahun 2011 mencapai 2,9 juta jiwa. Trend pengangguran di pedesaan semakin menurun pada tahun 2008-2011, bersamaan dengan semakin meningkatnya pengangguran di perkotaan. Kejadian ini dapat disebabkan dengan adanya migrasi ke kota, atau meningkatnya anggota rumah tangga pedesaan yang menjadi TKI (meningkat 18,6 persen pada tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2006). Jumlah pekerja di sektor pertanian di pedesaan yang rendah (sebesar Rp. 628.364 jauh lebih kecil dibandingkan di perkotaan sebesar Rp. 754.779), peningkatan lahan nonpertanian sebesar 74,26 persen, berkurangnya lahan pertanian dari tahun 2003 hingga tahun 2008 sebesar 11,1persen seiring dengan peningkatan konversi lahan pertanian menjadi nonpertanian sebesar 74,26 persen, serta rendahnya produktivitas pertanian akibat perubahan iklim dan pola penggunaan lahan, turut memicu semakin meningkatnya peralihan lapangan pekerjaan di pedesaan menjadi ke arah non pertanian. Hal ini dapat mengancam turunya produktivitas pertanian dan jika tidak segera ditangani akan berdampak pada menurunnya ketahanan pangan.

GAMBAR 9.9
PERSENTASE PENGANGGURAN MENURUT
DAERAH
TAHUN 2008-2011



GAMBAR 9.10
PERSENTASE PENDUDUK PERDESAAN YANG
BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG
BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN
UTAMA



Sumber : Sakernas, BPS, 2011 diolah pused:tinaker

Kualitas sumber daya manusia di pedesaan baik kesehatan dan pendidikan mengalami peningkatan dan penurunan di beberapa aspek. Kualitas kesehatan penduduk di desa membaik, dengan jumlah penderita gizi buruk menurun dari 24.958 jiwa (tahun 2008) menjadi 22.022 jiwa (tahun 2010), angka kesakitan usia produktif menurun dari 7,90 persen (2008) menjadi 6,63 persen (2010). Namun kualitas pendidikan kurang optimal, dengan tingkat buta huruf di desa meningkat dari 12,52 persen (tahun 2005) menjadi 13,14 persen (tahun 2010), sejumlah 11,07 juta jiwa Angka Partisipasi Murni (APM) di Sekolah Dasar menurun dari 93,58 persen (tahun 2005) menjadi 91,82 persen (tahun 2010), walaupun APM Sekolah Menengah Pertama meningkat dari 58,94 persen (tahun 2005) menjadi 63,83 persen (tahun 2010), dan Sekolah Menengah Atas meningkat dari 32,74 persen (tahun 2005) menjadi 43,67 persen (tahun 2010). Pencapaian kualitas SDM pedesaan yang semakin membaik tersebut belum optimal, memperhatikan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh penduduk di desa paling banyak masih di tingkat SD (33,97 persen), tidak berijazah (20,47 persen) dan SMP (16,33 persen).

Pembangunan sarana prasarana/infrastruktur di desa semakin

meningkat di tahun 2010, dengan meluasnya keberadaan jalan aspal meningkat dari 55,8 persen (tahun 2008) menjadi 61,44 persen (tahun 2010), meningkatnya rumah tangga pengguna listrik PLN meningkat dari 94,03 persen (tahun 2003) menjadi 94,91 persen (tahun 2008), dan meningkatnya penggunaan sanitasi /air bersih serta jamban dari 52,26 persen (tahun 2008) menjadi 60,58 persen (tahun 2010) dari total keseluruhan rumah tangga di desa. Keberadaan fasilitas kantor pos meningkat dari 11,59 persen (tahun 2008) menjadi 11,93 persen (tahun 2010), telepon umum meningkat dari 1,79 persen (tahun 2008) menjadi 4,74 persen (tahun 2010). Namun demikian beberapa jaringan komunikasi menurun, keterjangkauan siaran TVRI menurun dari 54,88 persen (tahun 2008) menjadi 48,67 persen (tahun 2010). Untuk mendukung prioritas nasional dalam percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan perbatasan pada tahun 2011, dilakukan penempatan transmigran di 31 kawasan, penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Rencana Penataan Persebaran Penduduk di 5 Kawasan Transmigrasi, pembangunan permukiman di kawasan transmigrasi dengan terbangunnya Rumah Tinggal dan Jamban Keluarga (RIJK) sebanyak 5.358 unit 4.173 bidang lahan telah disertifikasi, pengembangan sarana di 25 kimtrans, dan pengembangan prasarana di 41 kimtrans.

Pembangunan ekonomi perdesaan belum optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Selain dukungan infrastruktur jalan belum optimal, dukungan akses kepada sarana prasarana produksi, teknologi, dan modal pun belum optimal, meskipun dari aspek kelembagaan ekonomi lokal/koperasi telah meningkat dari 38.943 unit (tahun 2005) menjadi sebanyak 45.221 unit (tahun 2008). Selain melalui koperasi, pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan dilakukan dengan replikasi pengembangan model Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM) di 20 desa di 10 provinsi, pemberian bantuan langsung masyarakat untuk stimulus pemberdayaan ekonomi masyarakat di 12 desa, dan pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat usaha perkreditan dan simpan pinjam serta lembaga keuangan mikro perdesaan. Melalui pembangunan kawasan transmigrasi telah dilaksanakan dukungan fasilitasi dan pendampingan melalui pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, untuk pembentukan 60 kelembagaan kimtrans, fasilitasi 1.220 orang dalam pengembangan kewirausahaan, penyiapan 6 kawasan

sebagai Agro Industri di daerah tertinggal, dan pemberian bantuan layanan pendidikan, dan mental spiritual di 6 kawasan dan 156 kimtrans.

Dalam upaya meningkatkan daya tarik dan daya saing perdesaan, selain pembangunan beberapa sektor di atas, telah dilaksanakan program-program penguatan terhadap pemberdayaan masyarakat dan penguatan terhadap Pemerintahan Desa. Untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, telah disusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembangunan Desa dan akan segera dibahas pada tahun 2012. Upaya untuk meningkatkan Kemandirian Masyarakat Perdesaan dilakukan terutama melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPMMP) di 4.493 kecamatan di 30 provinsi. Melalui Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW), telah diupayakan peningkatan kemampuan lokal, mengatasi masalah kemiskinan serta pengangguran dengan kegiatan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi di 34 kabupaten di 9 Provinsi Sumut, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalsel, Kalbar, Sulsel, Sulbar, dan NTB). Untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, telah dilakukan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) di 78 kecamatan di 31 kabupaten di 10 provinsi, dan terlaksananya orientasi, pelatihan, koordinasi, bimtek air minum, dan kesehatan lingkungan termasuk penyediaan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di 109 kab/kota di 15 provinsi. Untuk meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan telah dilakukan fasilitasi untuk pengelolaan pemerintahan desa termasuk pengelolaan keuangan dan aset desa di 64 Kabupaten di 33 Provinsi.

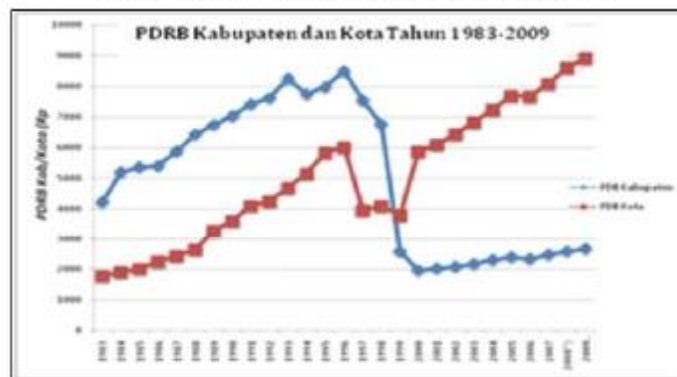
Kejadian bencana dan semakin meningkatnya gejala perubahan iklim juga berdampak pada sekitar 10.472 desa pesisir, dimana 7.362 desa diantaranya rawan tanah longsor, banjir, gempa bumi, tsunami, gelombang pasang, angin puting beliung, erupsi, dan kebakaran. Jenis bencana alam yang paling sering terjadi adalah bencana alam banjir yaitu sebanyak 27,66 persen (tahun 2011) meningkat dari angka 17,04 persen (tahun 2003) dari total kejadian bencana. Belum optimalnya antisipasi baik mitigasi dan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim yang cepat akan berpengaruh buruk terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan. Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia Tahun 2009,

menunjukkan bahwa dari 346 kabupaten yang dianalisis, terdapat 100 kabupaten atau sekitar 28,90 persen rentan terhadap kerawanan pangan. Untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat pedesaan telah dilaksanakan Pembinaan teknis dan pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) di 20 kabupaten.

9.1.7 Ekonomi Lokal dan Daerah

Kesenjangan antardaerah masih menjadi isu dalam pembangunan nasional. Kesenjangan terlihat dari rendahnya kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten terhadap nasional yaitu hanya sekitar hanya 23,07 persen dibandingkan dengan PDRB kota yang mencapai 76,93 persen terhadap nasional (BPS, 2009). Selain itu, juga terdapat kesenjangan antara desa dan kota yang dicerminkan dari lebih tingginya persentase penduduk miskin di desa pada tahun 2011 yaitu 15,59 persen dari jumlah penduduk desa dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di kota yang mencapai 9,09 persen (BPS, 2012) dan rendahnya rasio nilai tambah sektor primer (pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan, pertambangan dan penggalian) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yaitu sekitar 26,5 persen pada tahun 2010.

GAMBAR 9.11
PDRB KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 1983-2009



Sumber : BPS, 2010

Dalam upaya meningkatkan daya saing, sebagaimana arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, sekaligus untuk mengurangi kesenjangan yang semakin meningkat, pemerintah telah menyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011 - 2025 dengan menetapkan 6 (enam) pusat-pusat pertumbuhan di Koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, serta Papua-Maluku. Upaya peningkatan iklim investasi dan iklim usaha dilakukan melalui percepatan perijinan di daerah dengan (i) penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilaksanakan oleh 394 daerah (71 persen) pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 434 daerah dari 530 daerah (80 persen) pada tahun 2011 terdiri dari 17 provinsi, 324 kabupaten, dan 93 kota, serta dilanjutkan dengan 43 daerah lainnya pada tahun 2012, (ii) penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPPISE) oleh 134 daerah pada tahun 2011, (iii) fasilitasi daerah dalam menyusun perbaikan atas penyempurnaan Perda yang teridentifikasi bermasalah sebanyak 75 daerah, serta (iv) pengurangan biaya untuk berusaha oleh 200 kabupaten/ kota pada tahun 2011.

Fasilitasi dalam upaya peningkatan daya saing daerah dan mengurangi kesenjangan antardaerah pun dilakukan melalui pendekatan Produk Unggulan Daerah (PUD) di 8 (delapan) daerah percontohan yaitu 5 (lima) daerah dengan pendekatan klaster dan 3 (tiga) daerah dengan pendekatan One Village One Product (OVOP) pada tahun 2011 yang akan dilanjutkan fasilitasinya pada tahun 2012. Beberapa daerah tersebut merupakan daerah yang mendukung pengembangan Koridor Ekonomi, yaitu Kota Denpasar di Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara, Kabupaten Lombok Barat di Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara, dan Kabupaten Wakatobi di Koridor Ekonomi Sulawesi. Dorongan peningkatan daya saing dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota di daerah juga dilakukan dengan pengembangan Kerjasama Antar daerah (KAD) melalui penyusunan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3576/SJ/2011 tahun 2011 tentang Kerjasama Pengembangan Ekonomi Daerah yang dilanjutkan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Instrumen Fasilitasi Kerjasama Ekonomi Daerah pada tahun 2012. Selain itu, upaya tersebut juga dilakukan melalui pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) di 9 provinsi dan 1 kota pada tahun 2010-2011.

Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di sekitar kawasan perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah juga dilakukan melalui pembangunan sarana prasarana permukiman, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan lembaga perekonomiannya. Pada tahun 2011, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di daerah strategis dilakukan melalui Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan penempatan transmigran di 12 kawasan, penyusunan rencana pembangunan kawasan transmigrasi di daerah strategis pada 2 kawasan dan 113.868 bidang lahan telah disertifikasi, serta melalui Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dengan 280 orang wirausaha telah berkembang di permukiman transmigrasi (kimtrans), 33 kelembagaan ekonomi yang berfungsi di kimtrans, serta 6 kimtrans telah dikembangkan sarannya dan 9 kimtrans telah dikembangkan prasarannya. Sedangkan, pada tahun 2012, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di daerah strategis dilakukan melalui Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan penempatan transmigran di 24 kawasan, penyusunan rencana pembangunan kawasan transmigrasi di daerah strategis pada 2 kawasan dan 38.850 bidang lahan telah disertifikasi, serta melalui Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dengan 280 orang wirausaha telah berkembang di permukiman transmigrasi (kimtrans), 18 kelembagaan ekonomi yang berfungsi di kimtrans, serta 6 kimtrans telah dikembangkan sarannya dan 15 kimtrans telah dikembangkan prasarannya.

Sementara itu, upaya mendekatkan wilayah-wilayah produksi dengan pusat-pusat pertumbuhannya dan peningkatan konektivitas antara desa dan kota, dilakukan dengan membangun Kawasan Perkotaan Baru (sebelumnya disebut Kota Terpadu Mandiri/ KTM) pada 22 kawasan di 13 provinsi pada tahun 2011, dan dilanjutkan pengembangannya pada 22 kawasan lainnya pada tahun 2012. Pengembangan keterkaitan antara kota dan desa juga dilakukan melalui percepatan pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan yang mengintegrasikan kawasan desa sebagai wilayah produksi dengan pusat-pusat pertumbuhannya sesuai dengan prinsip pengembangan ekonomi lokal dan daerah melalui kegiatan pembangunan jalan poros/usaha tani, talud/ saluran, jembatan, STA/kios/pasar, lantai jemur, sarana air baku, gudang/sarana produksi, dan tambatan perahu. Pada tahun 2011 telah dibangun 65 kawasan terdiri dari 30 kawasan

agropolitan dan 35 kawasan minapolitan di 32 provinsi dengan 50,77 persen lokasi berada di Kawasan Tisur Indonesia (KTI). Sedangkan, pada tahun 2012 dihangun 35 kawasan terdiri dari 6 kawasan agropolitan dan 29 kawasan minapolitan di 32 provinsi berada dengan 48,57 persen berada di KTI, khususnya dalam pengembangan minapolitan.

Dalam rangka meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangala kepentingan pengembangan ekonomi lokal dan daerah telah dilaksanakan fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah di daerah-daerah percontohan dengan kegiatan antara lain melakukan review master plan, penyusunan studi rantai nilai, pengembangan forum stakeholder lokal, dan pendampingan oleh fasilitator. Hal ini dilakukan dengan dukungan kerjasama lintas sektor dan lintas stakeholder melalui Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah (TKPED) dan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Non Pemerintah (FPNP). TKPED bekerjasama dengan FPNP di tingkat nasional telah menyepakati 6 (enam) provinsi (7 kabupaten dan 2 kota) sebagai daerah percontohan tahun 2011-2014. Terkait Kerjasama TKPED dengan Lembaga Non Pemerintah, hasil yang dicapai diantaranya (i) telah dijalinnya kerjasama dengan GIZ melalui Program *Regional Economic Development* (RED) di Jateng, Kalbar, dan NTB, (ii) telah dijalinnya kerjasama dengan CIDA melalui *Program Enhanced Local and Regional Economic Development in Sulawesi* (ELREDS) di Gorontalo dan Sultra, serta telah dijalinnya kerjasama dengan UNDP melalui pelaksanaan studi rantai nilai di Kepri, Sumbar, dan Kalsel.

9.1.8 Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagai upaya memacu pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dalam rangka pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi diselenggarakan melalui Pengembangan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Selama ini, pengembangan dan pengusaha Kawasan lebih bersifat parsial dan kurang mendapat dukungan program serta penganggaran lintas sektor. Dalam tataran yang lebih luas, diperlukan kebijakan yang menjaga sinergi ketiga kawasan strategis tersebut ke dalam *mainstream* Koridor Ekonomi, sebagaimana yang ditetapkan dalam Master Plan Percepatan

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), baik dalam konteks spasial dan konseptualitas kawasan maupun perumusan peran kawasan (KAPET, KEK, KPBPB) dalam pengembangan ekonomi wilayah dengan *back bone* konsep MP3EI.

Saat ini, kebijakan KAPET masih dalam proses revitalisasi, pasca dibubarkannya Badan Pengembangan KAPET oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada akhir 2011. Dengan lahirnya konsep KEK dan MP3EI, maka perlu didudukkan kembali peran dan fungsi KAPET dalam konteks interaksi spasial (lokasi) dan non spasial (konseptual) dengan berbagai konsep lainnya. Selain permasalahan penyelesaian revitalisasi konsep Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), diperlukan pula pembenahan kelembagaan baik dipusat maupun di daerah, serta perumusan strategi khusus dan penambahan infrastruktur untuk meningkatkan promosi dan investasi. Sementara itu, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) pada tahun 2012 menunjukan kinerja yang cukup baik. Dengan ditetapkannya anggaran khusus, baik untuk Badan Pengusahaan Batam dan Badan Pengusahaan Sabang yang dimulai pada tahun anggaran 2012, maka tuntutan akan kinerja KPBPB ditahun 2013 semakin tinggi. Namun demikian KPBPB Sabang masih membutuhkan kontribusi lintas sektor, terutama untuk mengatasi hambatan struktural dimana keterbatasan dan minimnya kemajuan penyediaan infrastruktur menjadi hambatan utama. Sedangkan KPBPB Batam yang dinilai sudah lebih maju, pada awal pengembangannya telah didukung dengan pola otorita yang memberikan kewenangan dan pendanaan penuh untuk penyediaan infrastruktur penunjang kawasannya, oleh karenanya program dan kegiatannya lebih dibekankan pada pengembangan bisnis dan peningkatan promosi investasi. Dalam pihak, pemilihan Sei Mangke dan Tanjung Lesung pada awal tahun 2012 sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) harus segera ditindaklanjuti dengan penyiapan berbagai dokumen pendukung, diantaranya: rencana aksi, rencana tata ruang dan pemenuhan dokumen AMDAL. Penetapan masing-masing KEK terpilih ini masih menunggu disahkan dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Capaian kegiatan pengembangan kawasan strategis pada Tahun 2012 yang diperkirakan berdasarkan kinerja triwulan pertama adalah 50%, diantaranya, dengan terselesainya

kajian akademis dan hasil legal (penyusunan Raperpres RTR, KLHS, dan peta lampiran Raperpres) untuk revitalisasi KAPET untuk KIK dengan terselesainya Rencana Induk Nasional KIK, terselesainya Renaksi KIK tahun 2011 dan dipilihnya lokasi KIK baru pada tahun 2012 (menyusul ditetapkannya Sei Mangke dan Tanjung Lesung) serta inisiasi penyusunan Renaksi untuk lokasi KIK terpilih pada tahun 2012; serta untuk KPBPB dilaksanakannya 100% target kinerja KPBPB Batam dan Sabang sesuai dengan baseline target indikator yang telah disepakati, diantaranya terbangunnya beberapa infrastruktur pendukung untuk mendukung KPBPB Sabang, dan meningkatnya laju investasi di KPRPB dengan target investasi untuk KPBPB Batam sebesar 160 juta US\$ dan KPBPB Sabang sebesar 6,8 Milyar. Berdasarkan capaian Tahun 2012 tersebut, diketahui masih terdapat sejumlah kendala, terutama minimnya infrastruktur pendukung KAPET dan KPBPB, rendahnya koordinasi lintas sektor dan daerah dalam mengintegrasikan kawasan, terutama terkait dalam kontribusi anggaran dalam penyediaan infrastruktur dasar dan ekonomi serta tersedianya moda transportasi dan jalan penghubung. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan stagnansi pengembangan kawasan yang sedianya berperan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah *hinterland*-nya. Serta masih lemahnya koordinasi untuk perumusan program dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan yang efektif baik antarsektor dan lintas daerah.

9.1.9 Kawasan Perbatasan

Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis sebagai pintu gerbang untuk berinteraksi secara langsung dengan negara tetangga serta memiliki nilai strategis bagi kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan nasional. Sesuai dengan arahan pembangunan jangka panjang nasional, upaya pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan dengan mengubah arah kebijakan yang selama ini cenderung berorientasi ke dalam (*inward looking*), yaitu memandang kawasan perbatasan semata-mata sebagai wilayah pertahanan dan keamanan, menjadi berorientasi ke luar (*outward looking*) yaitu dengan juga memanfaatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas perdagangan dan sosial-ekonomi dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang digunakan selain dengan pendekatan keamanan juga dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan lingkungan. Fokus prioritas pembangunan kawasan perbatasan meliputi : (i) Penyelesaian dan penetapan batas wilayah negara; (ii)

Peningkatan upaya pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum; (iii) Peningkatan pertumbuhan ekonomi; (iv) Peningkatan pelayanan sosial dasar; dan (v) Penguatan kapasitas kelembagaan dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi.

Sampai tahun 2011 Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) telah menyusun dokumen pengelolaan perbatasan yang akan menjadi acuan bagi seluruh kementerian/lembaga terkait. Dokumen pengelolaan perbatasan diwujudkan dalam kerangka 3 (tiga) dokumen pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan meliputi: (i) Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2025, (ii) Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2014, serta (iii) Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 dan 2012. Ketiga dokumen tersebut merupakan instrumen untuk mewujudkan keterpaduan di dalam pengelolaan perbatasan, dengan tujuan agar tercapai hubungan kerjasama yang lebih erat antar sektor terkait dalam pengelolaan perbatasan dibawah koordinasi BNPP, penyiapan kelembagaan di daerah, koordinasi pelaksanaan program berdasarkan Rencana Induk dan Rencana Aksi, serta pelaksanaan berbagai program lintas sektor di kecamatan prioritas sesuai dengan Rencana Aksi 2011. Capaian lainnya pada tahun 2011 adalah telah ditetapkannya lokasi prioritas (lokpri) penanganan pembangunan kawasan perbatasan untuk tahun 2010-2014 sebanyak 111 kecamatan lokpri di 38 kabupaten/kota di 12 provinsi dan kajian potensi di beberapa lokpri.

Dalam upaya pengamanan wilayah perbatasan, pada tahun 2011 juga telah dilaksanakan: (i) penyediaan sarana dan prasarana perbatasan sebanyak 206 pos pertahanan dari total kebutuhan minimal sebanyak 396 pos pertahanan; (ii) melaksanakan penggelaran satuan TNI di pos-pos penjagaan di wilayah perbatasan RI - Malaysia, RI - Philipina, RI - Timor Leste, dan RI - Papua Nugini; operasi bakti TNI secara terpilih di wilayah perbatasan melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD); (iii) pengamanan sumber daya kelautan melalui operasi mandiri, patroli terkoordinasi Ausindo dan Malindo (dengan Australia dan Malaysia), operasi bersama dengan Bakorkamla; dan penangkapan 104 unit kapal perikanan yang melakukan tindak pelanggaran bidang perikanan.

Capaian lainnya pada tahun 2011 terkait dengan pemetaan

batas wilayah adalah: (i) penyusunan Peta Batas Wilayah Negara (*Joint Mapping*) Koridor Perbatasan Darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50.000 sebanyak 12 Nomor Lembar Peta (NLP), (ii) pemetaan Kawasan Perbatasan Darat RI-PNG, RI-Malaysia, RI-RDTL (Skala 1:50.000 dan 1:25.000) sebanyak 89 NLP, (iii) tersusunnya 94 wilayah penataan batas provinsi/kabupaten/kota, 40 *Border Sign Post* RI-RDTL, 77 pilar terdiri dari 12 pilar batas RI-Malaysia, lima pilar batas RI-PNG, dan 60 pilar batas RI-RDTL, (iv) tersusunnya 255 NLP basis data batas wilayah, tersedianya data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) sebanyak 160 satuan pekerjaan (SP), (v) telah tersusunnya kebijakan inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) sebanyak satu paket; (vi) terlaksananya 29 kali perundingan: lima kali perundingan antara RI-RDTL; 17 kali perundingan antara RI-Malaysia; tiga kali perundingan antara RI-PNG; dua kali perundingan antara RI-Filipina; satu kali perundingan antara RI-Singapura; dan satu kali perundingan antara RI-Vietnam.

Capaian pengelolaan perbatasan pada tahun 2012 yang dilakukan oleh BNPP adalah kajian potensi di beberapa lokpri, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) atau Cetak Biru (*Blue Print*) di beberapa lokpri, penyusunan Renaksi Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan Tahun 2013 – 2014, dan dimulainya pembangunan di 39 kecamatan lokpri, terdiri dari 28 lokpri darat dan 11 lokpri laut. Pembangunan di 39 di kecamatan lokpri adalah untuk membuka keterisolasian wilayah dan masyarakat melalui pembangunan sarana prasarana pelayanan sosial-ekonomi dasar.

9.1.10 Daerah Tertinggal

Capaian pembangunan daerah tertinggal selama tahun 2011 dan perkiraan tahun 2012, diperkirakan memberikan hasil perbaikan kondisi perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal. Perkembangan aspek perekonomian daerah tertinggal menurut indikator rata-rata PDRB Perkapita pada tahun 2011 diharapkan dapat mencapai Rp 9,8 juta, dan rata-rata laju pertumbuhan PDRB di daerah tertinggal diharapkan meningkat menjadi 6,7 persen pada tahun 2011. Kondisi rata-rata tingkat kemiskinan di daerah tertinggal diharapkan berkurang hingga mencapai 17,6 persen pada tahun 2011.

Perkembangan kondisi kualitas sumberdaya manusia menurut

indikator rata-rata IPM di daerah tertinggal, diharapkan dapat meningkat menjadi 69,6 pada tahun 2011. Komponen pembentuk IPM berdasarkan Umur Harapan Hidup diharapkan meningkat menjadi 67,8 tahun pada tahun 2011, rata-rata lama sekolah diharapkan meningkat menjadi 7,1 tahun pada tahun 2011, sementara angka melek huruf diharapkan meningkat menjadi 98,3 persen pada tahun 2011.

TABEL 9.1
KEMAJUAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

INDIKATOR	2010	Perkiraan 2011
PDRB	Rp. 9.377 ribu	Rp. 9.800 ribu
Pertumbuhan PDRB	6,37 persen	6,4 persen
Angka Kemiskinan	19,4 persen	17,4 persen
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69	69,6

Sumber: BPS (2010), diolah

Perbaiki kondisi perekonomian daerah dan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal, secara umum dihadapi oleh setiap daerah, walaupun dengan kondisi percepatan pembangunan yang berbeda. Percepatan pembangunan antardaerah tersebut, secara umum memiliki kaitan erat dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian dan sosial dasar, serta kinerja pemerintahan yang baik. Bagi daerah yang telah memiliki dukungan sarana dan prasarana dan memiliki kinerja pembangunan relatif konsisten positif, akan berpeluang menjadi bagian dari 50 kabupaten tertinggal yang dapat terentaskan pada tahun 2014.

Koordinasi dan fasilitasi dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, masih perlu terus ditingkatkan efektifitasnya, dengan diikuti peningkatan kontribusi pelaksanaan program/kegiatan Kementerian/Lembaga, serta perbaikan iklim investasi swasta di daerah tertinggal. Melalui RKP 2013 ini, agenda peningkatan efektifitas koordinasi, sinergitas kebijakan dan program antar sektor merupakan kunci serta fasilitasi pembangunan daerah tertinggal perlu menjadi prioritas kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Upaya tersebut perlu didukung oleh peningkatan kualitas instrumen koordinasi yang akan menjadi pedoman

hagi pihak terkait dalam mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Saat ini telah terdapat beberapa instrumen koordinasi jangka menengah dan tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan daerah tertinggal yang tertuang dalam RPJMN dan RKP. Untuk menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang ada, revitalisasi Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas PPD1) yang berjangka menengah dan Rencana Aksi Nasional (RAK PPD1) yang berjangka tahunan masih perlu dilakukan, dengan diikuti revitalisasi Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang berjangka tahunan. Revitalisasi dokumen perencanaan tersebut didukung dengan basis data yang menggambarkan kondisi keteringgalan daerah beserta total kebutuhan dalam rangka pengentasan daerah tertinggal dan tahapan pemenuhan kebutuhan per tahunnya. Dokumen perencanaan tersebut merupakan instrumen yang berperan strategis dalam mengarahkan seluruh sektor terkait untuk berpartisipasi dalam membangun daerah tertinggal secara komprehensif.

9.1.11 Papua dan Papua Barat

Kebijakan Otonomi Khusus melalui Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk lebih berperan mengatur dan membangun daerahnya. Prioritas pembangunan Papua dan Papua Barat adalah upaya rekonsiliasi dan penyelesaian masalah yang di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara menyeluruh, memberikan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.

Sebagai tindak lanjut dalam mewujudkan pembangunan Papua dan Papua Barat, maka dilakukan: (i) evaluasi pelaksanaan Inpres 5/2007; (ii) penyusunan Rancangan Peraturan (Instruksi) Presiden tentang percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B); (iii) penyusunan kerangka kelembagaan unit pelaksana percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B); dan (iv) penyusunan Rencana Aksi percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) untuk kurun waktu 2011-2014.

Evaluasi pelaksanaan Inpres 5/2007 menunjukkan, bahwa percepatan pembangunan yang dilakukan terutama dalam kaitannya dengan program prioritas pengurangan kemiskinan,

peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, masih belum memberikan peningkatan yang signifikan karena tersendatnya pembangunan infrastruktur, belum terlaksananya sistem pendidikan khusus yang menjangkau masyarakat Papua, dan terkendalanya penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan serta masih terisolirnya wilayah-wilayah sasaran.

TABEL 9.2
TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT

Area	2007	2008	2009	2010	2011
Papua (%)	40,8	37,1	37,5	36,8	31,2
Papua Barat (%)	39,3	35,1	35,7	34,9	28,5
Nasional	16,6	15,4	14,1	13,3	12,4

Dalam tabel 9.2 di atas, terlihat bahwa persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami trend penurunan setiap tahunnya, namun dibandingkan rata-rata nasional masih menjadi dua provinsi paling tinggi persentase penduduk miskinnya dibandingkan 31 provinsi lain.

Meskipun transfer dana pembangunan dari Pemerintah Pusat mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun kinerja (percepatan) pembangunan di kedua provinsi, masih belum memuaskan seluruh pemangku kepentingan. Penyebab lambatnya upaya percepatan (pelaksanaan Inpres 5/2007) adalah belum optimalnya pengelolaan dana yang ada, terutama terkait sinkronisasi program/kegiatan serta anggaran pusat dan daerah termasuk pendanaan sektoral pusat melalui K/LAMPK dan pemanfaatan dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur di kedua Provinsi.

Melalui optimalisasi sinkronisasi untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, maka capaian pada tahun 2011 adalah :

Tersusunnya Kebijakan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan telah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Terbentuknya kelembagaan yang melakukan "pengawasan"

kebijakan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) melalui ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B).

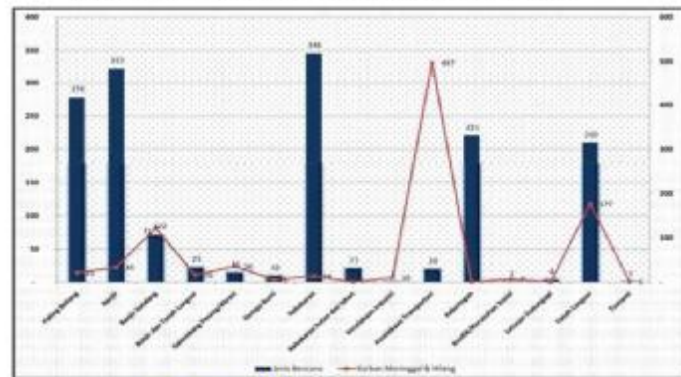
Telah disusun Rancangan/Draft Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan telah ditetapkan sebagai lampiran Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

9.1.12 Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekitar 378 kabupaten/kota di Indonesia merupakan daerah risiko tinggi terhadap bencana. Pada tahun 2011 upaya penanggulangan bencana lebih ditekankan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, aparatur dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sampai dengan tahun 2011, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di 33 Provinsi dan 456 Kabupaten/Kota. Melalui koordinasi Bappenas bersama dengan BNPB, telah dilakukan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana banjir bandang di Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2011, rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2011, dan Peraturan Kepala BNPB No. 5 Tahun 2011 tentang rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah bencana erupsi Gunung Merapi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Pada bulan Mei 2011, Presiden RI telah mendapat penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai Global Champion for Disaster Risk Reduction, penghargaan tersebut diberikan atas upaya dan keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan nasional.

GAMBAR 9.12
KEJADIAN BENCANA DI INDONESIA TAHUN 2011



Sumber : www.bnpb.go.id

Pada tahun 2011, kegiatan Kesenambungan Rekonstruksi Aceh dan Nias (KRAN) mengalami jumlah penurunan kegiatan dan pengalokasian pendanaan APBN, terutama yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sesuai PP No. 10 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, dimana pendanaan kegiatan yang bersumber dari PHLN terdiri dari pendanaan multilateral dari MDIFAN, dan bilateral dari non MDIFAN (JICA, AFD, dan USAID), kemajuan setiap kegiatan perlu dilaporkan secara reguler ke Pemerintah Pusat, khususnya isu-isu mengenai: (i) penyelesaian aset; (ii) kelembagaan; (iii) mekanisme pendanaan; (iv) operasi dan pemeliharaan aset KRAN; (v) persiapan pengalihan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan (vi) strategi percepatan pembangunan paska 2012, maka pelaksanaan KRAN pada tahun 2012, perlu mempertimbangkan adanya koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Donor/NGO, sehingga penentuan *exit strategy* ke depan dapat memperlancar percepatan pembangunan di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, perkiraan pencapaian pada tahun 2012 adalah terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran serta pengurangan risiko bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terutama pada daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi, pembangunan sarana dan prasarana

dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana di 14 lokasi, tersusunnya peta risiko di tingkat kabupaten/kota, Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) dan terlaksananya Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (ACMDRR) ke-5 di Yogyakarta pada bulan 25 - 27 Oktober 2012. Untuk penanganan wilayah pasca bencana, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir bandang Wasior diharapkan dapat selesai pada tahun 2012 sesuai dengan dokumen rencana aksi, sedangkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai dan pasca erupsi Merapi, diharapkan pemulihan sektor perumahan dapat segera terselesaikan, yang diikuti dengan pemulihan sektor infrastruktur, ekonomi, sosial dengan menerapkan *build back better* melalui pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

9.1.13 Desentralisasi, Hubungan Pusat-Daerah, dan Antardaerah

Dalam lingkup Desentralisasi, Hubungan Pusat Daerah, dan Antardaerah, terdapat beberapa isu terkait Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan, Penataan Daerah, serta Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah.

Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan merupakan aspek yang penting dalam pemantapan desentralisasi, hubungan pusat daerah, dan antar daerah. Upaya sinergi pusat dan daerah melalui penataan pembagian urusan difokuskan dalam rangka mengurangi dan menghilangkan tumpang tindih kewenangan antar tingkat pemerintahan, yang dilakukan melalui kajian perda, penyempurnaan PP 38 Tahun 2007 mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK).

Adapun capaian pada tahun 2011 dan perkiraan capaian terkait dengan fokus prioritas Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal regulasi, telah dibahas draft RUU Pemerintah Daerah di tingkat Pemerintah dan telah disampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara untuk penerbitan Ampres. Selain itu, telah dilakukan pengkajian 9000 Perda dan berdasarkan kajian tersebut ditemukan sebanyak 351 Perda yang bermasalah.

2. Terkait dengan penataan urusan pemerintahan daerah diperlukan adanya peraturan pemerintah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai turunan dari revisi UU No. 32 Tahun 2004. Berkaitan dengan hal tersebut, telah dilakukan upaya untuk penyempurnaan PP 38 Tahun 2007 mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Saat ini, telah ada masukan-masukan dari beberapa bidang dan Kementerian/Lembaga (Pertanahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Catatan Sipil, Lingkungan Hidup, Pemuda dan Olah Raga, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Kependudukan dan Keluarga Berencana) serta daerah sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan pemerintah tersebut.
3. Sementara itu, terdapat 70% provinsi dan kabupaten/kota yang sudah menyelesaikan perda mengenai kewenangan/urusan (wajib dan pilihan), dan telah dilakukan evaluasi terhadap 70% perda kewenangan/urusan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota tersebut. Pada tahun 2012, diharapkan terdapat 80% provinsi dan kabupaten/kota yang sudah menyelesaikan perda mengenai kewenangan/urusan (wajib dan pilihan), dan 80% dari Perda tersebut terevaluasi.
4. Terkait dengan penataan pembagian urusan, dilakukan penyusunan NSPK oleh Kementerian/Lembaga (K/L) serta fasilitasi implementasinya. Bidang urusan yang telah disusun NSPK nya sebanyak 11 bidang urusan dari target pencapaian 18 bidang urusan. NSPK yang telah disusun adalah Bidang Penanaman Modal, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pendidikan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perdagangan, Perumahan, Pertanahan, dan Perindustrian. Sementara itu, pada tahun 2012, ditargetkan akan selesai tersusun 22 NSPK, yaitu 11 NSPK pada lingkup Unit Pelaksana Daerah (UPD) 1, dan 11 NSPK pada lingkup UPD 2.
5. Langkah lain yang dilakukan terkait penataan pembagian urusan, yaitu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah.

Ridang yang telah diharmonisasi yaitu Bidang Perdagangan, Pendidikan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, Perumahan, dan BPN. Diharapkan pada tahun 2012, harmonisasi perundang-undangan ini terus ditingkatkan hingga mencapai 40%.

Fokus prioritas selanjutnya adalah penataan daerah, terkait dengan isu ini masih banyak usulan pemekaran/pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang berasal dari daerah, baik yang diusulkan oleh legislatif maupun masyarakat sendiri. Sejalan dengan target moratorium pembentukan DOB/pemekaran wilayah, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap semua usulan pembentukan DOB/pemekaran wilayah. Pada tahun 2011 terdapat 33 usulan pembentukan provinsi, 133 usulan pembentukan kabupaten dan 17 usulan pembentukan kota, walaupun sedang dilakukan moratorium pemekaran wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat motivasi daerah untuk melakukan pemekaran. Selain itu, sebagai upaya penataan daerah telah dilakukan evaluasi terhadap 57 DOB yang berusia kurang dari 3 tahun dan penyusunan Desartada (Desain Besar Penataan Daerah). Saat ini Desartada telah selesai disusun dan salah satu babnya akan masuk dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini dalam tahap pembahasan di DPR-RI. Desain Besar ini mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Saat ini Desartada telah selesai disusun dan sedang menunggu persetujuan DPR RI untuk dapat dilaksanakan.

Selain itu, fokus prioritas lainnya yaitu kerjasama antar daerah. Kerjasama antar daerah ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang potensial dikerjasamakan antar pemerintah daerah, pemda dengan swasta, dan pemda dengan kelompok masyarakat. Pada era desentralisasi dan otonomi daerah, kerjasama antar daerah menjadi semakin penting terutama yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan lingkungan dan tata ruang, dan kerjasama ekonomi yang bersifat lintas daerah. Hingga saat ini, kerjasama antar daerah masih perlu ditingkatkan, terutama kerjasama di bidang ekonomi, prasarana, dan pelayanan publik.

Berikut ini adalah capaian peningkatan kerjasama antar daerah pada tahun 2011 :

Terdapat peningkatan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana, dan pelayanan publik, yaitu sebesar 25%. Peningkatan tersebut melebihi yang telah ditargetkan yaitu sebesar 15%. Penerima manfaat dari kerjasama daerah tersebut yaitu 9 daerah dari target 60%. Pada tahun 2012, diharapkan kerjasama daerah ini terus meningkat dan penerima manfaat dari kerjasama tersebut meningkat menjadi 10 daerah dan terlaksananya 1 paket penelaan pelaksanaan kerjasama daerah yang baik maupun yang gagal.

Terkait dengan pelaksanaan administrasi terpadu kecamatan, telah terdapat 66 kabupaten/kota pada 33 provinsi yang telah melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATRN), dimana 3 provinsi (Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Selatan) telah melakukan lokalatih PATEN. Diharapkan pada tahun 2012 terdapat 20 kabupaten/kota di 6 provinsi yang melaksanakan administrasi pelayanan terpadu kecamatan.

Untuk menentukan kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dan memacu pertumbuhan daerah, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan kegiatan peningkatan kapasitas daerah. Untuk itu, lebih dahulu harus diketahui kesenjangan kemampuan antar satu daerah dengan daerah lainnya yang meliputi aspek sistem, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2008 mengenai Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), dalam rangka menjamin agar tujuan pembangunan di daerah dapat tercapai maka pemerintah (Kemendagri) harus mengetahui kinerja Pemerintah Daerah melalui suatu mekanisme yang terintegrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap daerah harus mampu melakukan pengukuran evaluasi kinerja secara mandiri dengan suatu sistem dan format pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2009, telah terdapat 33 provinsi, 344 kabupaten, dan 86 kota yang telah dievaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahannya. Selain itu, 70% daerah meningkat kinerja pemerintahannya dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah.

9.1.14 Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah

Fokus prioritas tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah diarahkan kepada Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD, serta Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah dengan uraian sebagai berikut:

- I. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD ditujukan untuk mendorong pemerintah daerah dalam mencapai tujuan utama desentralisasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, demokrasi, dan daya saing daerah. Upaya yang ditempuh oleh pemerintah terkait fokus prioritas di atas, yaitu terkait dengan penataan kelembagaan, penerapan indikator utama pelayanan publik, dan pembinaan administrasi pejabat daerah dan DPRD. Adapun capaian tahun 2011 dan perkiraan capaian 2012, sebagai berikut:
 - a. Terkait dengan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pelaporan kinerja; sedang disusun Peraturan Pemerintah (PP) pengganti PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang saat ini juga sedang menunggu revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Dalam kegiatan prioritas penerapan indikator utama pelayanan publik di daerah, sampai tahun 2011 telah dilakukan sosialisasi dan fasilitasi ke daerah terhadap 10 SPM yaitu SPM bidang Kesehatan, SPM bidang Lingkungan Hidup, SPM bidang Sosial, SPM bidang BKKB, SPM bidang Pemberdayaan Perempuan, SPM bidang Ketahanan Pangan, SPM bidang Pendidikan, SPM bidang Ketenagakerjaan, SPM bidang Pekerjaan Umum dan SPM bidang Perumahan Rakyat. Selain itu, telah diterbitkan SR Kemendagri No. 100/1023/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah. Pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 15 SPM telah diterapkan oleh daerah, yaitu 9 SPM di lingkup UPD I dan 6 SPM di lingkup UPD II.
 - c. Terkait dengan pembinaan administrasi pejabat negara di daerah dan DPRD, pada tahun 2011 dilakukan kegiatan orientasi bagi peningkatan kemampuan dalam menjalankan fungsi-fungsi

kepemimpinan daerah, legislasi, penganggaran, dan pengawasan, serta inovasi pemerintahan dan pembangunan. Kegiatan ini telah berjalan dengan optimal (100%), dengan pencapaian sebanyak 113 kepala daerah di 113 kabupaten/kota dan Pimpinan DPRD di 326 Kab/Kota yang mengikuti kegiatan tersebut. Pada tahun 2012 ditargetkan dilaksanakan kegiatan serupa di 56 Kab/Kota. Kemudian terkait diklat review analisa dampak regulasi atau harmonisasi peraturan perundangan, pada tahun 2011 telah terlaksana sesuai target dimana telah dilakukan diklat untuk 165 perwakilan Komisi DPRD di 165 Kab/Kota.

2. Dimensi aparatur menjadi hal penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, aspek pengembangan kapasitas aparatur masih harus terus ditingkatkan sejalan dengan tantangan pembangunan yang bersifat dinamis. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD perlu dilakukan terkait dengan kondisi saat ini, yaitu penyebaran PNS daerah yang tidak merata, masih rendahnya jumlah PNS daerah (1,3 % dari jumlah penduduk Indonesia), lebih rendah dari beberapa negara tetangga (i.e. Thailand, Singapura, Brunei), dan kualitas dan kompetensi PNS dan Legislatif daerah yang masih rendah (berdasarkan data BKN, 2011). Adapun capaian pada tahun 2011 dan perkiraan capaian 2012 adalah:
 - a. Telah dilaksanakan sosialisasi Grand Strategy Penyelenggaraan Diklat dengan jumlah daerah pelaksana sebanyak 3 provinsi. Kemudian pada tahun 2012, ditargetkan sebanyak 33 provinsi berhasil melaksanakan Grand Strategy Penyelenggaraan Diklat.
 - b. Jumlah Camat peserta Diklat Teknis Pemerintahan sebanyak 90 Ahummi. Pada tahun 2012, diharapkan selain dilaksanakan diklat camat sebanyak 11 angkatan, akan dilaksanakan pula diklat calon camat sebanyak 2 angkatan.
 - c. 17 provinsi berpartisipasi dalam Diklat Penguatan Pemerintahan dan Politik bagi anggota DPRD, pejabat pemerintahan Provinsi dan Kabupaten dan Kota, Kecamatan, Kelurahanserta Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, politik dan SPM. Kemudian pada tahun 2012 ditargetkan 51 angkatan

- akan berpartisipasi dalam diklat tersebut.
- d. Telah dilaksanakan kegiatan Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati dan DPRD dengan peserta sebanyak 5 angkatan dengan jumlah perangkatannya 40 orang, dari yang ditargetkan sebanyak 6 angkatan dengan jumlah perangkatannya 50 orang. Kemudian pada tahun 2012 ditargetkan terlaksana dengan peserta sebanyak 2 angkatan.
3. Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah dapat diupayakan melalui dua sisi, yakni dari sisi pengelolaan atas penerimaan daerah dan juga dari sisi belanja daerah. Salah satu langkah yang dapat ditempuh yaitu melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi keuangan daerah masih sangat tergantung dengan Dana Perimbangan sehingga penggunaan Dana Perimbangan yang efektif dan efisien akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Selain pengelolaan atas Dana Perimbangan, kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola belanja daerah juga masih perlu ditingkatkan sehingga pemanfaatan dana akan sesuai dengan tujuan pembangunan pemerintah daerah. Upaya peningkatan ini antara lain dengan meningkatkan proporsi belanja langsung terhadap belanja tidak langsung dan belanja modal terhadap total belanja daerah (provinsi). Adapun capaian tahun 2011 dan perkiraan capaian 2012, yaitu sebagai berikut:
 - a. Persentase daerah yang telah memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai petunjuk pelaksanaan mencapai 90% atau 31 provinsi, hal ini melebihi target tahun 2011 yaitu sebanyak 75% atau 25 provinsi dimana 75% DAK tersebut terserap optimal oleh daerah. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan 1 Surat Edaran (SE) mengenai Dana Perimbangan sesuai dengan yang ditargetkan pada tahun 2011. Terkait dengan hal tersebut, maka ditargetkan pada tahun 2012 pemanfaatan DAK yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan akan naik dengan target penyerapan sebesar 80%, dan untuk mendukung target tersebut pada tahun 2012 juga ditargetkan pemerintah akan

- mengeluarkan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- b. Dalam rangka pembinaan administrasi anggaran daerah, kualitas belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah berhasil ditingkatkan, yaitu pada tahun 2011, terdapat 188 daerah (18 provinsi dan 170 kabupaten/kota) atau 57% daerah memiliki proporsi belanja langsung yang lebih besar dari proporsi belanja tidak langsung. Artinya, pada tahun 2011, hanya terdapat 35,87% daerah yang memiliki belanja langsung lebih besar daripada belanja tidak langsung. Jika menggunakan persentase provinsi, maka target sebesar 40% di tahun 2011 telah tercapai sebab 18 provinsi atau sekitar 54% dari daerah provinsi memiliki porsi belanja langsung lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung. Terkait dengan hal tersebut, maka ditargetkan pada tahun 2012 terjadi peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD dengan proporsi 50%. Peningkatan ini juga didukung dengan persentase jumlah APBD yang disahkan tepat waktu sebesar 84% dari yang ditargetkan sebesar 70%. Kemudian Persentase rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah (Provinsi) baru mencapai 21% dari yang ditargetkan 27%.
 - c. Dalam rangka pembinaan administrasi pendapatan dan investasi daerah, pada tahun 2011 baru tercapai sebesar 6% untuk persentase rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD Kab/Kota dari yang ditargetkan sebesar 7,3%. Pencapaian berikutnya yaitu perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD Provinsi yaitu sebesar 13%. Kemudian untuk persentase rata-rata hasil penerimaan investasi dan barang milik daerah terhadap PAD tercapai sebesar 9% dari yang ditargetkan untuk tahun 2011 sebesar 4%.
 - d. Dalam rangka pembinaan dan fasilitasi pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, berdasarkan data BPK pada tahun 2011 dari 358 daerah yang diperiksa terdapat 32 daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2010 dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian tersebut didukung dengan penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu dengan persentase sebesar 90% atau sebanyak 30 provinsi. Hal tersebut melebihi yang ditargetkan yaitu 20 provinsi (60%). Terkait dengan hal tersebut, maka dilargetkan pada tahun 2012 terjadi peningkatan standar kualitas pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah mengenai LKPD dengan status WTP menjadi 50%. Kemudian untuk penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan tepat waktu juga ditargetkan menjadi 70% atau sebanyak 23 daerah.

9.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan

9.2.1 Permasalahan

9.2.1.1 Data dan Informasi Spasial

Dilihat dari pencapaian kinerja pembangunan prioritas bidang data dan informasi spasial di tahun 2011 dan perkiraan pencapaian tahun 2012 serta dengan memperhatikan tema RKP tahun 2013, yaitu memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, tantangan yang dihadapi dalam penyiapan data dan informasi spasial pada tahun 2013 adalah penyediaan data spasial untuk wilayah-wilayah prioritas pembangunan nasional (koridor ekonomi Indonesia, KEK, dan KAPET). Berdasarkan tantangan tersebut, permasalahan yang paling mendesak untuk ditangani pada tahun 2013 adalah: (i) koordinasi kegiatan survei dan pemetaan nasional; (ii) kuantitas dan kualitas data dan informasi spasial, termasuk ketersediaan data spasial untuk mendukung pembangunan wilayah koridor ekonomi Indonesia dan wilayah prioritas pembangunan nasional lainnya (KEK dan KAPET); (iii) akses terhadap data dan informasi spasial; dan (iv) sumberdaya manusia di bidang survei dan pemetaan.

9.2.1.2 Penataan Ruang

Mengingat pencapaian kinerja Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Tahun 2010 dan 2011, permasalahan yang paling mendesak untuk ditangani pada Tahun 2013 adalah (i) belum ditetapkannya seluruh peraturan perundangan pelaksanaan UU 26/2007; (ii) belum serasinya peraturan perundangan sektoral yang berkaitan dengan UU 26/2007 termasuk diantaranya adalah UU 41/1999 tentang Kehutanan, UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU 41/2009

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (iv) belum disusunnya peraturan tentang pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai acuan pelaksanaan RTRW; (v) belum memadainya perangkat pengendalian pemanfaatan ruang antara lain jumlah PPNS yang belum mencukupi; (vi) masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia di bidang penataan ruang di pusat dan daerah; serta (vii) belum mantapnya kelembagaan penataan ruang yang diharapkan dapat menyerasikan rencana pembangunan dengan RTR. Penetapan peraturan pelaksanaan UU 26/2007, keserasiannya UU 26/2007 dengan berbagai UU sektoral tersebut di atas, mantapnya kelembagaan dan tingginya kualitas aparat berperan penting untuk mengurangi konflik pemanfaatan ruang serta untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pengguna ruang yaitu masyarakat dan sektor swasta.

9.2.1.3 Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pertanahan adalah :

1. Belum memadainya ketersediaan peta pertanahan. Pengelolaan dan administrasi pertanahan, termasuk di dalamnya pelayanan pertanahan, membutuhkan data dan informasi spasial untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas obyek bidang tanah yang disertifikatkan. Peta dasar pertanahan yang baru mencakup 8,71 persen dari luas daratan Indonesia berimplikasi pada ketidakpastian jaminan hak atas tanah dan meningkatnya resiko sengketa pertanahan. Penyediaan peta pertanahan sangat diperlukan untuk mendukung percepatan legalisasi aset tanah.
2. Belum kuatnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Sampai dengan Tahun 2011, jumlah bidang tanah yang telah disertifikatkan mencapai 41.639.558 bidang atau sekitar 46,79 persen dari total 86.845.839 bidang tanah di Indonesia. Percepatan sertifikasi tanah merupakan langkah awal bagi masyarakat agar mempunyai akses terhadap sumber daya produktif (*access reform*) seperti permodalan, pendampingan dan pemberdayaan. Sertifikasi tanah yang dibiayai pemerintah tersebut dilakukan melalui Prona, sertifikasi tanah lintas kementerian/lembaga (UMKM, petani, nelayan, transmigran, masyarakat berpenghasilan rendah). Pelaksanaan kegiatan meliputi: penyuluhan, pengumpulan, data yuridis, pengukuran bidang pemeriksaan tanah, penertiban SK Hak dan penerbitan sertipikat.
3. Luas tanah terindikasi terlantar. Tanah terlantar

seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penclantaran tanah dapat menirahulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejableraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan, sehingga perlu pengaturan kembali penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

9.2.1.4 Perkotaan

Tantangan pembangunan perkotaan ke depan adalah:

1. Kota besar dan metropolitan, perlu meningkatkan daya saing di tingkat internasional, agar mampu berperan sebagai tempat beraktivitas yang nyaman, layak huni, serta bertaraf internasional, melalui pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaan dari kota-kota besar/metropolitan dan kawasan perkotaan.
2. Kota-kota, khususnya yang terkena dampak langsung perubahan iklim, perlu meningkatkan kemampuan dan kapasitas mengarusutamakan mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim dalam seluruh kegiatan pembangunan dan pengelolaan perkotaan, melalui fasilitasi penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, dan antisipasi dampak perubahan iklim dalam pengelolaan perkotaan di kota-kota, serta peningkatan kualitas pengembangan perkotaan melalui penyusunan rencana detail pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTIH) dan percontohan RTIH dan pengkajian kerentanannya.
3. Kota-kota perlu meningkatkan kemampuan dan kapasitas untuk penyelenggaraan pengelolaan perkotaan pada era desentralisasi dan demokratisasi, melalui koordinasi pengawasan dan pengendalian pembangunan perkotaan serta evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan perkotaan.

Untuk meningkatkan daya saing sekaligus daya tahan kota-kota, dengan tetap berupaya mencapai kesejahteraan dan kenyamanan penduduk perkotaan, maka masalah pembangunan perkotaan yang mendesak untuk ditangani tahun 2013 adalah:

1. Pemanfaatan ruang yang tidak terkendali serta kerentanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim.
2. Pengembangan kota-kota menengah dan kecil dalam upaya percepatan pemenuhan Standar Pelayanan

Perkotaan (SPP).

3. Pelayanan publik yang belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan yang terus bertambah.
4. Pengelolaan kawasan perkotaan/metropolitan terutama pada aspek kelembagaan.
5. instrumen operasionalisasi kebijakan perkotaan serta penyesuaian kebijakan dan rencana yang terkait pembangunan perkotaan.

9.2.1.5 Perdesaan

Memperhatikan berbagai kondisi umum perdesaan tersebut diatas, maka seyogyanya upaya-upaya perlu ditingkatkan untuk membangun keberpihakan kepada pembangunan desa dan membangun daya tarik perdesaan. Beberapa tantangan di dalam pembangunan perdesaan kedepan adalah:

1. Keberpihakan kebijakan nasional terhadap pembangunan perdesaan, terintegrasinya perencanaan dengan penganggaran pembangunan perdesaan, serta mengoptimalkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di desa, serta di kabupaten/kota dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat desa.
2. Fokus kegiatan pembangunan perdesaan yang bertujuan memperkuat ketahanan desa.
3. Pelibatan kelembagaan lokal di desa oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam memberdayakan potensi desanya.

Dalam mewujudkan kemandirian dan daya saing desa sehingga menjadi daya tarik desa, masalah pembangunan perdesaan yang mendesak untuk ditangani di tahun 2013 diantaranya :

1. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa dan kelembagaan desa didalam mengakomodasi pembangunan desa.
2. Koherdayaan masyarakat perdesaan dan kelembagaan yang ada baik di dalam perencanaan maupun pembangunan desa
3. Pengembangan ekonomi perdesaan yang dapat meningkatkan kesempatan dan kualitas kerja di perdesaan serta mengurangi laju urbanisasi/migrasi dan tenaga kerja perdesaan
4. Akses masyarakat untuk memperoleh berbagai pelayanan dasar maupun akses penunjang kegiatan ekonomi perdesaan
5. Meningkatkan pemahaman pemerintah maupun

masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan dan peran desa sebagai pusat produksi yang perlu didorong sebagai aktor utama dalam peningkatan ketahanan pangan tanpa mengorbankan kesempatan desa untuk meningkatkan nilai ekonomi yang dimilikinya.

9.2.1.6 Ekonomi Lokal dan Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah tahun 2013 adalah perlunya peningkatan koordinasi antarstakeholder, baik di pusat, daerah, maupun antara pusat dan daerah dan lebih didorongnya peningkatan daya saing daerah melalui upaya-upaya sinkronisasi dan integrasi seluruh kegiatan terkait ekonomi lokal.

Masalah mendasar yang perlu ditangani dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah tahun 2013, meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah (desa) di sekitarnya adalah :

1. Kapasitas tata kelola ekonomi daerah, mencakup : (i) peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan ekonomi daerah dalam perizinan usaha, (ii) data dan informasi, dan (iii) akses masyarakat terhadap data dan informasi tersebut.
2. Kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan ekonomi lokal secara lintas sektor dan lintas wilayah, mencakup : (i) kapasitas SDM aparatur daerah dalam mengelola ekonomi lokal secara lintas sektor, dan (ii) partisipasi stakeholder lokal/daerah dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan ekonomi daerah.
3. Fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah, mencakup : (i) kapasitas tenaga fasilitator, (ii) fungsi lembaga fasilitasi ekonomi daerah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, baik dari segi kapasitas, jumlah, maupun jangka waktunya, dan (iii) perencanaan pengembangan suatu kawasan, baik dari ketersediaan lahan yang *clear and clean*, keterkaitan antara penduduk pendatang dengan penduduk setempat, dan keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan wilayah produksinya.
4. Berkembangnya kerjasama antardaerah dan kemitraan pemerintah-swasta dalam upaya pengembangan ekonomi lokal dan daerah.
5. Akses sarana dan prasarana fisik pendukung kegiatan ekonomi lokal dan daerah, khususnya akses transportasi yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan kota-

kota dengan desa-desa sebagai wilayah produksinya.

9.2.1.7 Kawasan Strategis

Tantangan pengembangan kawasan strategis dalam konteks KAPET, KPBPB dan KEK kedepannya adalah membangun kebijakan dan strategi yang komprehensif sehingga pengembangan kebijakan antar kawasan dapat sinergi dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta bersinergi dengan konsep koridor ekonomi nasional yang telah ditetapkan. Tumpang tindih pemahaman atas peran dan fungsi berbagai tipe kawasan strategis menjadikan pembangunan kawasan menjadi stagnan. Untuk menjawab tantangan tersebut, kebijakan diarahkan untuk menjawab permasalahan pokok tahun 2013, yaitu:

1. Aspek kelembagaan dan pengelolaan kawasan baik ditingkat pusat maupun daerah yang mampu mengawal sinergisitas kontribusi penganggaran lintas sektor.
2. Infrastruktur di kawasan strategis, terutama infrastruktur yang terkait dengan pasokan dan pemasaran produk, seperti: konsistensi pasokan energi dan ketersediaan air bersih, fasilitas kepelabuhan laut dan udara, jalan penghubung dan moda transportasi.
3. Sejumlah kebijakan peraturan ditingkat pusat yang menjadi acuan penyelenggaraan kawasan dan pelimpahan wewenang, terutama yang terkait kebijakan insentif (fiskal dan non fiskal) yang dapat mendorong perwujudan iklim usaha yang kondusif.
4. Pelayanan pengembangan investasi di daerah, terutama dikaitkan dengan banyaknya peraturan yang menghambat investasi dan kemudahan penyediaan (pembebasan) lahan.

Permasalahan tersebut dapat dijabarkan sesuai dengan spesifikasi tipe kawasan sebagai berikut: untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) tantangan pengembangan kawasan meliputi: (i) perlu penegasan belum jelasnya peran dan kewenangan lembaga pengelola di daerah terutama terkait dengan jaminan keamanan usaha, pemangkasan jalur perijinan illegal, informasi terpadu mengenai peluang bisnis; (ii) belum memadai dukungan infrastruktur; (iii) belum jelasnya agenda revitalisasi terkait review dan penyesuaian substansial terhadap Kepres No.150/2000 yang dikaitkan dengan perkembangan kebijakan terkini (KEK dan MP3EI).

Untuk Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas

tantangan pengembangan kawasan sebagai berikut: (i) lemahnya aspek kelembagaan dan pengelolaan kawasan terutama pengelolaan beberapa infrastruktur perhubungan; (ii) belum optimal pelayanan investasi secara terpadu.

Untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tantangan pengembangan kawasan sebagai berikut: (i) belum ada penetapan secara legal terhadap 2 (dua) lokasi KEK terpilih di tahun 2011; (ii) belum terselesaikan dokumen Renaksi Penyelenggaraan KEK terpilih 2012; (iii) proses pendelegasian kewenangan terhambat oleh karena belum diputuskan peraturan dan mekanismenya.

9.2.1.8 Kawasan Perbatasan

Pembangunan kawasan perbatasan terutama di wilayah kecamatan terluar perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) hingga tahun 2013 secara umum masih menghadapi beberapa isu utama yaitu: (i) keterisolasian wilayah sebagai penghambat aksesibilitas dan mobilitas barang/jasa dan orang serta pertumbuhan ekonomi lokal, (ii) pelayanan pendidikan yang belum terjangkau oleh masyarakat perbatasan, (iii) pelayanan kesehatan yang belum terjangkau oleh masyarakat perbatasan, (iv) ketersediaan energi yang belum memadai dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan, dan (v) kualitas pengelolaan batas wilayah yang masih rendah.

Permasalahan diharapkan dapat ditangani pada tahun 2013, meliputi:

1. Kualitas SDM, kapasitas kelembagaan, dan keluarga prasejahtera di kawasan perbatasan serta kesenjangan pembangunan dan sosial ekonomi dengan masyarakat di wilayah perbatasan negara tetangga di beberapa kawasan.
2. Hambatan dalam pengembangan infrastruktur dan perekonomian kawasan perbatasan yang disebabkan belum tuntasnya Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan, serta peraturan yang masih menghambat investasi.
3. Keterbatasan infrastruktur wilayah dan fasilitas sosial ekonomi, seperti infrastruktur transportasi (darat, laut, udara), energi (terutama listrik dan bahan bakar), air bersih, pendidikan, kesehatan, pasar, telekomunikasi, dll.
4. Hambatan dalam menentukan skala prioritas dan pentahapannya dalam pengembangan kecamatan lokpri karena belum semua lokpri memiliki Rencana Induk.
5. Keterkaitan pengelolaan perbatasan dengan kerjasama sub

- regional, maupun regional dan kerjasama antarnegara dalam penanggulangan pelanggaran hukum di perbatasan.
6. Kualitas pengelolaan batas wilayah dan beberapa patok batas wilayah yang kondisinya kurang memadai yang berpotensi menimbulkan konflik dengan negara tetangga.
 7. Pengawasan di sepanjang garis perbatasan di darat maupun perairan di sekitar pulau-pulau terluar, yang mengakibatkan kegiatan ilegal dan kejahatan lainnya.
 8. Beberapa segmen garis batas baik di darat maupun di laut belum disepakati secara menyeluruh oleh negara-negara yang berbatasan dengan wilayah NKRI.

9.2.1.9 Daerah Tertinggal

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah tertinggal tahun 2012 secara garis besar masih relevan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana rendahnya kinerja perekonomian daerah dan rendahnya kesejahteraan masyarakat masih menjadi isu-isu utama. Hal tersebut disebabkan oleh: (i) Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah tertinggal, yang disebabkan : rendahnya kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal; lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan di daerah tertinggal dan belum dimanfaatkannya kerjasama antardaerah tertinggal pada aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan; (ii) Belum optimalnya tindakan afirmatif kepada daerah tertinggal, khususnya pada aspek kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan; (iii) Rendahnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah, khususnya terhadap sentra-sentra produksi dan pemasaran karena belum didukung oleh sarana dan prasarana angkutan barang dan penumpang yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tertinggal; dan (iv) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung ekonomi lainnya, yang meliputi energi listrik, telekomunikasi, irigasi dan air bersih.

Permasalahan pembangunan daerah tertinggal yang mendesak untuk diselesaikan di tahun 2013 adalah :

1. Koordinasi lintas sektor dan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah dalam pengarusutamaan percepatan pembangunan daerah tertinggal.
2. Fasilitasi dalam upaya percepatan pembangunan daerah

tertinggal, terutama menghadapi beragamnya bentuk dan intensitas permasalahan antardaerah tertinggal.

9.2.1.10 Papua dan Papua Barat

Dengan memperhitungkan tingginya kesenjangan hasil pembangunan di kedua provinsi, dengan provinsi-provinsi lainnya, maka permasalahan yang mendesak untuk segera ditangani di provinsi Papua dan Papua Barat adalah:

1. Tingginya angka kemiskinan di kedua provinsi, yang lebih tinggi dari pada angka kemiskinan di provinsi-provinsi lainnya;
2. Rendahnya kualitas kesehatan di kedua provinsi, yang tercermin pada angka prevalensi HIV/AIDS, dan penyakit-penyakit endemik seperti malaria dan infeksi saluran pernapasan bagian atas (ISPA) di kedua provinsi, yang meningkat dari tahun ke tahun;
3. Tingginya angka kematian ibu dan anak yang tinggi di kedua provinsi;
4. Rendahnya kualitas lulusan sekolah, baik tingkat dasar dan menengah, yang belum setara dengan kualitas lulusan sekolah di daerah lainnya;
5. Kurangnya akses transportasi dari dan ke daerah di kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah pegunungan tengah, dengan daerah lainnya di pesisir utara dan selatan pulau Papua, yang menyebabkan tingginya biaya distribusi barang-barang modal dan barang-barang konsumsi di wilayah pegunungan tengah;
6. Ketersediaan prasarana dan sarana umum yang masih belum memadai, seperti belum tersedianya listrik, air bersih dan juga pengolahan sanitasi air; maupun rendahnya mutu bekalan yang telah ada;
7. Rendahnya mutu sumber daya manusia yang ada di kedua provinsi, utamanya sumber daya manusia yang merupakan masyarakat asli Papua, sehingga kinerja pembangunan menjadi terlambat.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka, untuk tahun 2013, program yang mendesak untuk dilakukan adalah:

1. Pengurangan angka kemiskinan melalui peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat;
2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan prioritas penanganan penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile clinic), dan penyediaan tenaga medik dan

- paramedik;
3. Penyediaan pendidikan berpola asrama dan pemberian tambahan materi di luar waktu sekolah;
 4. Penyediaan tenaga pengajar berkualitas, dengan sertifikasi tenaga pengajar dan pemberian jaminan kebutuhan dasar bagi pengajar yang ditempatkan di kedua provinsi;
 5. Pembangunan dan peningkatan beberapa ruas jalan darat yang menembus dari pesisir selatan hingga ke pegunungan tengah, utamanya dari Agats, Kabupaten Asmat, menuju ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
 6. Pembangunan pusat distribusi Bahan Bakar Minyak untuk meningkatkan transportasi sungai;
 7. Pembangunan Pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga yang terharukan seperti PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB/Bayu=Angin), untuk memenuhi kebutuhan energi tingkat rumah tangga dan industri kecil rumah tangga;
 8. Kegiatan yang bersifat keberpihakan kepada masyarakat asli Papua (*affirmative actions*) berupa: (i) penerimaan masyarakat asli Papua di institusi pendidikan tinggi unggulan di luar Papua, (ii) penerimaan masyarakat asli Papua di instansi-instansi pemerintah strategis seperti Kepolisian dan Militer serta, (iii) penerimaan masyarakat asli Papua untuk program pemagangan di instansi-instansi pemerintah di luar Papua.

9.2.1.11 Kawasan Rawan Bencana

Permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan pada tahun 2013 adalah:

1. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran di daerah dan masyarakat melalui sosialisasi pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat dan penyediaan sarana dan parasarana penanggulangan bencana di daerah rawan bencana tinggi maupun di wilayah pasca bencana.
2. Dengan memperhatikan ancaman bencana yang masih akan terus terjadi maka kapasitas tanggap darurat yang meliputi penanganan korban bencana dan penanganan pengungsi, masih perlu untuk ditingkatkan dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penanganan darurat bencana.
3. Penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Mentawai dan erupsi Gunung Merapi di wilayah Provinsi DI

Yogyakarta dan Jawa Tengah; serta keberlanjutan pemulihuan pasca berakhirnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

4. Koordinasi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan, komitmen alokasi anggaran, serta tata kelola dan manajemen aset.
5. Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kinerja penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.
6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintah: bidang penanggulangan bencana, perlu mempercepat proses pelaksanaan penyaluran anggaran melalui Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan.
7. Kejadian gempa bumi 8,5 SR yang melanda wilayah pantai barat Pulau Sumatera tanggal 11 April 2012, menunjukkan bahwa sistem peringatan dini gempabumi dan tsunami belum berfungsi sebagaimana mestinya dan masih kurangnya kesiapsiagaan aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

9.2.1.12 Desentralisasi, Hubungan Pusat-Daerah, dan Antardaerah

Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan desentralisasi dan peningkatan kualitas hubungan pusat daerah dan antardaerah, mencakup permasalahan penataan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan, penataan daerah, kerjasama daerah, dan pengawasan evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Penataan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan, mencakup:
 - a. Kendala dalam melakukan revisi PP No. 38 Tahun 2007 dimana masih menunggu revisi UU No. 32 Tahun 2004. Namun demikian, diharapkan revisi PP No 38 Tahun 2007 akan ditetapkan tidak terlalu lama setelah selesainya revisi UU No. 32 Tahun 2004 (RUU Pemda). Saat ini telah terdapat masukan dari beberapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai bahan penyusunan Rancangan PP Pembagian Urusan.
 - b. Perlu adanya pematangan konsep instrumen evaluasi terhadap peraturan daerah sesuai dengan Permendagri No. 53 Tahun 2007 mengenai Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2. Penataan daerah, mencakup:
 - a. Masih banyaknya desakan untuk melaksanakan pemekaran daerah dari berbagai elemen masyarakat, hal ini ditandai dari masih terapatnya usulan pemekaran wilayah walaupun telah adanya kebijakan moratorium Daerah Otonom Baru (DOB) didalam RPJMN 2010-2014.
 - b. Disahkannya Desartada sebagai salah satu acuan evaluasi usulan pembentukan DOB.
3. Peningkatan kerjasama daerah, mencakup:
 - a. Belum semua daerah memiliki unit di bawah Setda yang membidangi kerjasama daerah.
 - b. Kerjasama antar-Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya dalam penanganan kawasan perbatasan, pengurangan kesenjangan antarwilayah dan penyediaan pelayanan publik.
4. Pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, mencakup pelaporan kinerja pemerintahan oleh pemerintah daerah yang tidak tepat waktu.

9.2.1.13 Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah

Dalam hal tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah, beberapa masalah yang perlu ditangani menyangkut Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD, Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD, serta Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, dengan pokok permasalahan yang perlu ditangani tahun 2013 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD, mencakup:
 - a. Revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang saat ini masih menunggu revisi UU 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.
 - b. Mengintegrasikan semua SPM dengan dokumen perencanaan, perhitungan standar pembiayaan (costing) dan target SPM yang terlalu tinggi tanpa diimbangi kemampuan keuangan daerah.
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD, mencakup:

Sosialisasi *Grand Strategy* Penyelenggaraan Diklat yang hanya terlaksana di 3 provinsi akan mempengaruhi kinerja dan pencapaian dari penyelenggaraan *Grand Strategy* Penyelenggaraan Diklat.

3. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, mencakup:
 - a. Kualitas pengalokasian dalam APBD, serta kualitas pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (LKPD)
 - b. Optimalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah sehingga dapat menjadi sumber utama penerimaan daerah sekaligus tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi di daerah.

9.2.2 Sasaran

9.2.2.1 Data dan Informasi Spasial

Sasaran prioritas bidang data dan informasi spasial yang akan dicapai pada tahun 2013 adalah: (i) meningkatnya koordinasi kegiatan survei dan pemetaan nasional; (ii) meningkatnya kuantitas dan kualitas data dan informasi spasial, dengan memprioritaskan pada tersedianya data spasial untuk mendukung pembangunan wilayah koridor ekonomi Indonesia dan wilayah prioritas pembangunan nasional lainnya (KEK dan KAPET); (iii) meningkatnya akses terhadap data dan informasi spasial; dan (iv) meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia di bidang survei dan pemetaan.

9.2.2.2 Penataan Ruang

Sasaran yang akan dicapai oleh Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Tahun 2013 adalah: (i) penyelesaian dan terlengkapinya peraturan operasionalisasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (ii) pelaksanaan pembinaan penataan ruang, khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendalian pemanfaatan ruang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif; (iii) perwujudan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan; (iv) perwujudan peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan zonasi, perijinan dan pemberian insentif serta penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (v) pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang baik di tingkat pusat dan daerah dalam rangka menjamin kesesuaian antara rencana tata

ruang dan implementasinya; dan (vi) sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

9.2.2.3 Pertanian

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan pertanian agar lebih berkontribusi dalam pembangunan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat umum, sasaran yang perlu dicapai pada tahun 2013 adalah :

1. Peningkatan penyediaan peta pertanian. Oleh karena peta dasar pertanian harus mencapai sekitar 8,71 persen dari total luas daratan Indonesia, maka diperlukan penyediaan peta pertanian sebesar 2,8 juta hektar di Tahun 2013 untuk mencapai 11,5 persen dari 191,9 juta ha total luas daratan Indonesia.
2. Percepatan legalisasi aset tanah. Selain memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, sertifikat hak atas tanah juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengakses sumberdaya produktif seperti perikanan. Pada Tahun 2013, legalisasi aset tanah yang dibiayai pemerintah ditargetkan sekitar 884.050 bidang. Pada akhir Tahun 2013 diharapkan 48,68 persen dari total bidang tanah di Indonesia telah disertifikatkan.
3. Penertiban tanah terindikasi terlantar. Tanah terlantar terindikasi masih cukup luas, pada Tahun 2008 tercatat 7,3 juta hektar. Di sisi lain, kebutuhan tanah untuk pembangunan terus meningkat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi. Pada Tahun 2013 ditargetkan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar seluas 463 SP.

9.2.2.4 Perkotaan

Sasaran pembangunan perkotaan pada tahun 2013 adalah tersusunnya kebijakan pembangunan perkotaan yang dapat menjadi pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan pembangunan perkotaan oleh pemerintah pusat, sektor maupun pemerintah daerah; serta terlaksananya upaya-upaya pengurangan kesenjangan pembangunan antara kota metropolitan, besar, menengah melalui:

1. Pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan melalui peningkatan kelembagaan dan kerjasama pengelolaan kawasan metropolitan, penyediaan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mendukung peningkatan daya saing di tingkat nasional dan internasional, pengembangan forum-forum komunikasi antarkota, peningkatan upaya-upaya pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, dan antisipasi

capak perubahan iklim yang diurutkan dalam setiap kegiatan pengelolaan perkotaan, serta peningkatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.

2. Percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil, melalui pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan iklim investasi, serta penyediaan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) terutama untuk mendukung mendorong pengembangan perekonomian di kota-kota menengah dan kecil.

9.2.2.5 Perdesaan

Sasaran pembangunan perdesaan yang akan dicapai tahun 2013 adalah :

1. Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemerintahan desa.
2. Meningkatnya fasilitasi keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat, termasuk meningkatnya taraf pendidikan, dan status kesehatan.
3. Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan ekonomi perdesaan, melalui bantuan permodalan/kredit, peningkatan kesempatan berusaha, penyediaan sarana dan prasarana produksi-pengolahan-pemasaran.
4. Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan dalam pembangunan sarana prasarana perdesaan melalui peningkatan akses dan ketersediaan sarana prasarana transportasi, perumahan, permukiman, listrik, energi, dan komunikasi.
5. Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan dalam peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang dan berkelanjutan serta berwawasan mitigasi bencana.

9.2.2.6 Ekonomi Lokal dan Daerah

Sasaran dari pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk 2013 adalah:

1. Terwujudnya iklim investasi pengembangan ekonomi daerah yang kondusif dengan: (i) bertambah dan berfungsinya kelembagaan pengelolaan ekonomi daerah dalam perizinan usaha, (ii) bertambahnya jumlah informasi.
2. Meningkatnya kemandirian dan keberlanjutan program/kegiatan pengembangan ekonomi daerah, terutama di

daerah dengan : (i) terlaksananya peningkatan wawasan aparatur dalam bidang pengembangan ekonomi lokal dan daerah, dan (ii) terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah.

3. Terintegrasinya sumber daya dari berbagai stakeholder (pemerintah, dunia usaha, dan akademisi) dalam upaya fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah dengan: (i) terwujudnya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kawasan transmigrasi di kawasan tertinggal, perbatasan, dan strategis, termasuk kawasan agropolitan, minapolitan, dan lain-lain, dan (ii) tersusunnya perencanaan pengembangan wilayah yang komperhensif.
4. Meningkatnya hubungan kerjasama antar daerah dan kemitraan pemerintah-swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah dengan mewujudkan fasilitasi kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi kawasan di kawasan tertinggal, perbatasan, dan strategis, termasuk kawasan agropolitan, minapolitan, dan lain-lain.
5. Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana fisik pendukung kegiatan ekonomi lokal dan daerah dengan terbangunnya kawasan yang didukung oleh infrastruktur ekonomi dan sosial wilayah.

9.2.2.7 Kawasan Strategis

Sasaran pengembangan kawasan strategis Tahun 2013, antara lain: (i) tersedianya infrastruktur dasar dan pendukung bagi pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis pada 13 KAPET, 4 KPBPB, dan KEK; (ii) terselesaikannya sejumlah peraturan lintas kementerian dan pemerintah daerah yang sinergi dalam mendukung pengelolaan dan kelembagaan di 13 KAPET, 4 KPBPB, dan KEK, diantaranya melalui kebijakan insentif fiskal dan insentif non fiskal, pelimpahan kewenangan, dan kemudahan penyediaan (pembebasan) lahan; dan (iii) pertumbuhan aktivitas ekonomi dan nilai investasi kawasan pada 13 KAPET, 4 KPBPB, dan KEK

Fokus sasaran tersebut dapat dijabarkan secara spesifik berdasarkan tipe kawasan sebagai berikut: untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), sasaran tahun 2013 meliputi: (i) dihasilkannya dokumen akademik dan basis legal (RTR dan Masterplan) sebagai landasan agenda kerja revitalisasi KAPET kedepan; (ii) terselesaikannya komitmen program/kegiatan dan pendanaan lintas sektor dan kerjasama

antara daerah (APBN&APBD) terkait pengembangan KAPET, dan (iii) Penjelasan status Kelembagaan KAPET pasca dibubarkannya Badan Pengembangan KAPET

Untuk Kawasan Pelabuhan Bebas dan Pertapangan Bebas (KPBB), sasaran tahun 2013 meliputi: (i) terselesainya sejumlah peraturan lintas kementerian dan daerah; (ii) tercapainya kapasitas dan kompetensi pnegelolaan KPBB Batam, Peningkatan laju investasi KPBB Batam dengan target 460 juta US\$; (iii) penambahan fasilitas crane KPBB Sabang untuk pemingkatan laju investasi.

Untuk Kawasan Ekonomi Khusus, sasaran di tahun 2013 meliputi: (i) terlaksananya koordinasi masalah kawasan strategis dibidang pengembangan KEK; (ii) peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KEK; (iii) terpromosikannya lokasi-lokasi KEK ;(iv) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renaksi KEK.

9.2.2.8 Kawasan Perbatasan

Pembangunan kawasan perbatasan pada tahun 2013 di fokuskan di 71 kecamatan lokpri, terdiri atas 39 kecamatan lokpri I (tahap lanjutan) dan 32 kecamatan lokpri II (tahap awal). Sasaran prioritas bidang pembangunan kawasan perbatasan pada tahun 2013 merupakan kelanjutan dari sasaran pembangunan tahun 2012 sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional 2010-2014, antara lain:

1. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur transportasi di 71 kecamatan Lokpri perbatasan.
2. Terpenuhinya kebutuhan bahan pokok secara mudah dan murah di 71 kecamatan Lokpri perbatasan.
3. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana logistik di 71 kecamatan Lokpri perbatasan.
4. Terpenuhinya dokumen rencana detil tata ruang di 71 kecamatan Lokpri perbatasan.
5. Terkelolanya potensi laut dan potensi darat di 71 kecamatan lokpri perbatasan.
6. Terbangunnya infrastruktur ekonomi dan kesra di 71 kecamatan lokpri perbatasan.
7. Terbangunnya infrastruktur pemerintahan di 71 kecamatan lokpri perbatasan.
8. Terpenuhinya kebutuhan tenaga pengajar berkualitas beserta insentifnya (rumah dinas, tunjangan khusus) di 71 kecamatan lokpri perbatasan.
9. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pendidikan di 71 kecamatan Lokpri permasalahan.

10. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan secara berkesinambungan di 71 kecamatan lokpri perbatasan.
11. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat di 71 kecamatan lokpri perbatasan.
12. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik secara berkesinambungan dan murah di 71 kecamatan lokpri perbatasan.
13. Terpenuhinya penyediaan bahan bakar minyak (BBM) di 71 kecamatan lokpri perbatasan.
14. Terbangunnya patok batas, tugu batas, prasasti batas, dan pos lintas batas tradisional serta pos lintas batas di 71 kecamatan lokpri perbatasan.
15. Terlaksananya pemeliharaan batas wilayah negara di 71 kecamatan lokpri perbatasan.

9.2.2.9 Daerah Tertinggal

Sasaran-sasaran pokok pembangunan daerah tertinggal pada tahun 2013 adalah meningkatnya kinerja pembangunan daerah tertinggal yang tercermin dari:

1. Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,9 persen pada tahun 2013.
2. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal hingga mencapai rata-rata sebesar 15,4 persen pada tahun 2013.
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang diindikasikan oleh rata-rata Indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2013 menjadi 71,2.

9.2.2.10 Papua dan Papua Barat

Sasaran percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2013, antara lain: (i) terlaksananya pengembangan peternakan di Kawasan Pegunungan Tengah, Bomberai, dan Kebar; (ii) tersedianya permodalan UMKM usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat melalui PNPM Mandiri, KUR, dan Respek; (iii) terbangunnya industri pengolahan sagu rakyat; (iv) Tersedianya pendidikan gratis sampai SMU hingga menjangkau seluruh distrik dan kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat; (v) tersedianya pelayanan kesehatan gratis hingga menjangkau seluruh distrik dan kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat; (vi) Tersedianya sumber energi alternatif terbarukan (PLTMH, PLTS) dan terbangunnya pabrik semen di Timika dan Manokwari; dan (vii) pemberian kuota

khusus bagi putra-putri asli Papua.

9.2.2.11 Kawasan Rawan Bencana

Pada tahun 2013, sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam upaya peningkatan kemampuan pengelolaan bencana, meliputi:

1. Meningkatnya kapasitas aparaturnya dan kelembagaan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran di daerah terutama di daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, serta terintegrasinya kebijakan pengurangan risiko bencana baik dalam sistem perencanaan pembangunan daerah maupun dalam perencanaan pemulihan pasca bencana.
2. Terlaksananya penanganan kedaruratan yang efektif dan efisien melalui peningkatan kapasitas sumber daya penanggulangan bencana daerah dan koordinasi antar pemangku kepentingan.
3. Meningkatnya kapasitas dan pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.
4. Terlaksananya percepatan pemulihan wilayah pasca bencana melalui peningkatan kapasitas koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta peningkatan partisipasi berbagai pemangku kepentingan.
5. Peningkatan koordinasi dan konsultasi di antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga terkait, terutama dalam pelaksanaan program/kegiatan di daerah, komitmen terhadap alokasi anggaran baik di kementerian/lembaga terkait maupun di pemerintah daerah provinsi/kabupaten dan kota. Tata kelola dan manajemen aset rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih memerlukan perhatian bersama antar stakeholder.

9.2.2.12 Desentralisasi, Hubungan Pusat-Daerah, dan Antardaerah

Dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi, hubungan pusat daerah, dan antar daerah ini, terdapat beberapa hal yang menjadi sasaran fokus pada tahun 2013, yaitu sebagai berikut:

1. Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan, mencakup: (i) terselesaikannya peraturan pelaksana atas Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (ii) meningkatnya pelaksanaan urusan yang sesuai dengan

pembagian urusan pemerintah dan pemerintahan daerah; (iii) terlaksananya harmonisasi peraturan perundang-undangan sektor dengan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah (iv) tersusunya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) seluruh bidang (31 bidang) urusan oleh K/L dan fasilitasi implementasi NSPK.

2. Penataan Daerah, mencakup: Terlaksananya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Daerah Otonom Baru dengan tetap memfokuskan pada program moratorium (DOR).
3. Peningkatan Kerja Sama Daerah, mencakup: (i) optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah yang tertokus pada bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik; (ii) pemuktahiran pemetaan tentang kesuksesan dan kegagalan pelaksanaan kerjasama daerah; (iii) Meningkatnya daerah yang menerima manfaat dari kerja sama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana, dan pelayanan publik.
4. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, mencakup: (i) peningkatan kinerja pemerintahan daerahnya dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah; (ii) makin sempurnanya peraturan pelaksana dan perangkat evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

9.2.2.13 Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah

Dalam upaya peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah, terdapat beberapa hal yang menjadi sasaran fokus pada tahun 2013, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD, mencakup: tersusun dan terlaksananya PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya di seluruh daerah; (ii) terlaksananya penerapan SPM yang efektif dan efisien oleh daerah; (iii) meningkatnya kemampuan SDM daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan daerah, legislasi, penganggaran, pengawasan, inovasi pemerintahan dan pembangunan serta kemampuan mengharmonisasi peraturan perundangan.
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD, mencakup: Pelaksanaan *Grand Strategy* Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan (Diklat) di 33 provinsi.
3. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, mencakup: (i) peningkatan persentase jumlah Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan DAK sesuai petunjuk pelaksanaan dan meningkatkan persentase daerah yang telah optimal dalam penyerapan DAK; (ii) peningkatan pencapaian jumlah kabupaten/kota yang jumlah persentase rata-rata belanja langsung lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung; (iii) peningkatan jumlah APBD yang disahkan secara tepat waktu; (iv) peningkatan persentase rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD kabupaten/kota dan provinsi, serta hasil penerimaan investasi dan barang milik daerah terhadap PAD; (v) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

9.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2013

9.3.1 Pembangunan Data dan Informasi Spasial

Pada tahun 2013, kebijakan yang akan ditempuh adalah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pemetaan seluruh wilayah nasional serta memperkuat daya saing perekonomian nasional melalui penyediaan data dan informasi spasial, dengan memusatkan perhatian pada penyediaan data spasial untuk wilayah-wilayah prioritas pembangunan nasional (koridor ekonomi Indonesia, KKK dan KAPET). Berdasarkan arah kebijakan tersebut, strategi prioritas bidang data dan informasi spasial yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 adalah: (i) meningkatkan koordinasi kegiatan survei dan pemetaan nasional; (ii) meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi spasial, dengan memprioritaskan pada upaya menyediaan data spasial berupa peta dasar dan tematik untuk mendukung percepatan penyusunan RDTR selagian Kabupaten/Kota di wilayah koridor ekonomi Indonesia dan wilayah prioritas pembangunan nasional lainnya (KKK dan KAPET); (iii) meningkatkan akses terhadap data dan informasi spasial; dan (iv) meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia di bidang survei dan pemetaan.

9.3.2 Penyelenggaraan Penataan Ruang

Arah kebijakan 2013 difokuskan pada:

1. Penetapan **11** (sebelas) Raperpres untuk RTR KSN Non Perkotaan, yaitu RTR Kawasan Perbatasan NAD-Sumut, RTR Kawasan Perbatasan Sulut-Gorontalo-Sulteng, RTR Kawasan Perbatasan Riau-Kepri, RTR KSN Pacangsanak, RTR KSN KPBPB Sabang, RTR KSN Selat Sunda, RTR KSN Timika, RTR KSN Soroako, Kawasan RTR KAPET Sasamba,

- RTR KAPET Manado-Bitung, dan RTR KAPET Pam-Pam.
2. Legalisasi 13 (tiga belas) Raperpres RTR Kawasan Non Perkotaan, yaitu: RTR KAPET Batulicin, RTR KAPET Khatulistiwa, RTR KAPET Serang, RTR KAPET Mbay, RTR KAPET Banda Aceh Darussalam, RTR KAPET Bima, RTR KAPET Biak, RTR KAPET DAS Kahayan Kapuas dan Barito, RTR KAPET Bank Sejahtera Sultra, RTR KAPET Palapas, RTR PBPB Sabang, RTR KSN Sorowako, dan RTR KSN Timika.
 3. Penyiapan dan legalisasi 15 (lima belas) Raperpres RTR Kawasan Non Perkotaan, yaitu: RTR Kawasan Taman Nasional Komodo, RTR Kawasan Taman Nasional Tanjung Puling, RTR Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni, RTR Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, RTR Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabulu, RTR Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat, RTR Kawasan Konservasi dan Wisata Daerah Aliran Sungai Toméano, RTR Kawasan Gunung Rinjani, RTR Kawasan Kritis Lingkungan Balingara, RTR Kawasan Kritis Lingkungan Buai Lambunu, RTR Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa - Watumohai dan Rawa Tinondo, RTR Kawasan Toraja dan Sekitarnya, RTR Kawasan Laut Banda, RTR Kawasan Ekosistem Lensoni, RTR Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas.
 4. Penyiapan 5 (lima) Raperpres RTR Kawasan Non Perkotaan, yaitu: RTR Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat, RTR Kawasan Taman Nasional Lorentz, RTR Kawasan Candi Prambanan, RTR 2 KSN Teknologi Tinggi.
 5. Penyusunan materi teknis 6 (enam) RTR KSN Non Perkotaan yaitu RTR KSN Kawasan Industri Llokseumawe, RTR KSN Mahato, RTR KSN Bukit Duabelas, RTR KSN Bukit Tiga puluh, RTR KSN Berbak, dan RTR KSN Betung Kerihun.
 6. Pendampingan legalisasi Perda RTRW untuk 86 kabupaten.
 7. Pendampingan penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten di 38 kabupaten.
 8. Pendampingan penyusunan Peraturan Zonasi di 38 kabupaten dan 15 kota (dilaksanakan bersamaan dengan pendampingan penyusunan rencana rinci tata ruang).
 9. Penyerasian peraturan pelaksanaan UU 26/2007 dengan peraturan pelaksanaan UU sektoral terkait.
 10. Penguatan kelembagaan penataan ruang, salah satunya melalui pelatihan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
 11. Review Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

9.3.3 Pengelolaan Pertanahan

Arah kebijakan prioritas Bidang Reforma Agraria adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan pertanahan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya melalui strategi:

1. Peningkatan penyediaan peta pertanahan.

Ketersediaan peta pertanahan yang baru mencakup 8,71 persen dari luas daratan Indonesia akan dapat berakibat pada ketidakpastian jaminan hak atas tanah dan meningkatnya resiko sengketa pertanahan. Secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap iklim investasi dan iklim usaha. Untuk itu peningkatan penyediaan peta pertanahan agar mencapai 11,5 persen dari 191,9 juta ha total luas daratan Indonesia menjadi hal yang penting untuk mendukung kegiatan legalisasi (sertifikasi) aset tanah. Peningkatan penyediaan peta pertanahan dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang ada serta dengan penggunaan dan penguasaan teknologi penginderaan jauh dan citra satelit. Lokasi penyelesaian peta pertanahan dapat difokuskan pada wilayah koridor percepatan pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana MP3EI.

2. Percepatan legalisasi aset tanah.

Kepastian legalitas aset tanah masyarakat dalam bentuk sertifikat hak atas tanah disamping dapat memberikan jaminan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber-sumber ekonomi masyarakat terutama dalam rangka penguatan modal usaha, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu percepatan legalisasi aset tanah merupakan hal yang penting untuk mewujudkan fokus dari arah pembangunan nasional dibidang pertanahan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat legalisasi aset tanah adalah dengan mensinergikan antar kegiatan sertifikasi seperti swadaya, PRONA, larasita, dan sertifikasi nelayan, petani, IMKM, dan MBR melalui kerjasama dengan K/L lain untuk tahap persiapan pra sertifikasi. Disamping itu, dapat juga dilakukan melalui pengurangan biaya tambahan bagi masyarakat untuk memperoleh bukti-bukti pendukung alas hak atas tanahnya serta menyesuaikan besaran BPHTB yang harus dibayar masyarakat.

3. Penertiban tanah terindikasi terlantar.

Berdasarkan data dari BPN tahun 2009, dari 7,3 juta ha Tanah Hak yang telah di inventarisasi, terdapat indikasi

terlantar seluas: 4,8 juta ha. Angka ini menunjukkan besarnya luas lahan yang terindikasi terlantar yang dapat dimanfaatkan oleh negara untuk mendukung program-program yang telah ditetapkan seperti ketahanan pangan dan energi. Sesuai dengan amanat PP 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendedayagunaan Tanah Terlantar, maka penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar harus didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria, program strategis negara, serta untuk cadangan negara lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar menjadi sangat penting karena yang menjadi salah satu sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) adalah tanah terlantar. Mengingat sumber tanah obyek reforma agraria (TORA) berasal dari: (i) pelepasan tanah hutan pada kawasan lindung yang memiliki batas minimum kawasan hutan; dan (ii) tanah terlantar, maka upaya penertiban tanah terindikasi terlantar dititikatkan melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi kegiatan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).

9.3.4 Pembangunan Perkotaan

Dalam upaya menyeimbangkan pertumbuhan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil, serta mempercepat pembangunan kota menengah dan kecil, maka arah kebijakan pembangunan perkotaan adalah meningkatkan peran kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota.

Fokus prioritas pembangunan perkotaan pada tahun 2013 adalah *pengendalian pembangunan kota-kota metropolitan dan kota-kota besar*, dengan:

1. Menyiapkan kebijakan pembangunan perkotaan, yang dilakukan dengan :
 - a. Penyusunan peraturan perundangan tentang perkotaan
 - b. Penyusunan NSPK Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan
 - c. Penyusunan program terpadu dan pelaksanaannya untuk penguatan peran kota PKN, PKW, PKSN
2. Memperkuat kelembagaan dan kerjasama antarkota, yang

- dilakukan dengan :
- a. Pemutakhiran basis data informasi perkotaan
 - b. Pembentukan forum koordinasi pembangunan perkotaan di tingkat provinsi
 - c. Revitalisasi Badan Kerjasama Kawasan Metropolitan yang sudah terbentuk
3. Meningkatkan penanganan polusi lingkungan dan mitigasi bencana dalam pengelolaan perkotaan, yang dilakukan dengan :
- a. Fasilitasi penyusunan Perda pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana serta Perda pengelolaan sampah
 - b. Peningkatan kualitas pengembangan perkotaan melalui fasilitasi pengembangan Kota Hijau
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir di perkotaan
Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum; kegiatan ini dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang terkait Bab V Bidang Sarana dan Prasarana.
 - d. Penyelenggaraan transportasi ramah lingkungan di perkotaan
Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Perhubungan; kegiatan ini dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang terkait Bab V Bidang Sarana dan Prasarana.
 - e. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di perkotaan
Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana; kegiatan ini dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang terkait Bab IX Bidang Wilayah dan Tata Ruang Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana.
4. Menyediakan pelayanan publik untuk peningkatan daya saing pada tingkat internasional di kota-kota metropolitan dan besar, yang dilakukan dengan :
- a. Fasilitasi penyiapan kebutuhan perencanaan pembangunan perkotaan sesuai Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)
 - b. Fasilitasi penyusunan Perda terkait RTH di kawasan perkotaan
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan

perumahan, transportasi, komunikasi dan informatika, serta energi dan ketenagalistrikan di perkotaan. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo, dan Kementerian ESDM; kegiatan ini dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang terkait Bab V Bidang Sarana dan Prasarana.

5. Meningkatkan implementasi rencana tata ruang perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan, yang dilakukan dengan :
 - a. Fasilitasi penyusunan Perda berkaitan dengan pemberian IMB;
 - b. Fasilitasi penyelenggaraan perencanaan di kawasan perkotaan;
 - c. Pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan perkotaan dan kapasitas lembaga KSK perkotaan;
 - d. Fasilitasi persetujuan substansi perda RUPK kota, serta pengawasan teknis bidang penataan ruang.

Fokus prioritas pembangunan kota-kota menengah dan kecil pada tahun 2013 adalah :

1. Meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi di perkotaan, yang dilakukan dengan :
 - a. Fasilitasi penyusunan Perda tentang pengelolaan pasar tradisional
 - b. Fasilitasi pelaksanaan agenda reformasi dasar, pembangunan pasar dan terminal, dan fasilitasi pengembangan ekonomi lokal melalui Urban Sector Development Reform Project (USDRP)
 - c. Peningkatan iklim usaha komersial di kota-kota kecil dan menengah melalui pembangunan kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Dalam Negeri; kegiatan ini dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang terkait Bab IX Bidang Wilayah dan Tata Ruang Prioritas Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah.
2. Menyediakan pelayanan publik, yang dilakukan dengan :
 - a. Fasilitasi penyiapan kebutuhan perencanaan pembangunan perkotaan sesuai Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)

- b. Fasilitasi penyusunan Perda terkait RTU di kawasan perkotaan
- c. Peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, transportasi, komunikasi dan informatika, serta energi dan ketenagalistrikan di perkotaan. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo, dan Kementerian ESDM; kegiatan ini dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi yang terkait Bab V Bidang Sarana dan Prasarana.

9.3.5 Pembangunan Perdesaan

Dalam rangka mewujudkan sasaran, kebijakan pembangunan perdesaan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu pembangunan perdesaan dalam rangka memenuhi pelayanan dasar masyarakat dan wilayah perdesaan yang berkualitas melalui kecukupan penyediaan sarana prasarana dan pembangunan perdesaan dalam upaya membangun desa mandiri menuju daya saing desa. Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, selain Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, telah dilaksanakan juga berbagai program pembangunan perdesaan oleh berbagai sektor atau Kementerian/Lembaga diantaranya melalui Program Bina Desa Hutan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan ditujukan sebagai upaya pembinaan di desa-desa sekitar areal hutan yang digarap oleh perusahaan Hak Pengelolaan Hutan (HPH); Program Bedah Desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; Program Desa Berdering dan Desa Pintar yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, Program Desa Mandiri Pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian, Program Desa Mandiri Energi (DME) yang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Program Desa Wisata yang dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Program Desa Siaga yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, dan lainnya

Arah kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2013 adalah meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan berbasis keunggulan daerah

masing-masing. Arah kebijakan tersebut diwujudkan dalam beberapa strategi yaitu:

1. Memperkuat kapasitas, peran, dan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan.
2. Meningkatkan kualitas dasar sumber daya manusia perdesaan, termasuk peningkatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan dasar dan kesehatan dasar.
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan.
4. Meningkatkan ekonomi perdesaan, termasuk membangun kerjasama antar desa.
5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar perdesaan, termasuk peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi desa.
6. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perdesaan.
7. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana.

9.3.6 Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah

Arah kebijakan pengembangan ekonomi lokal pada tahun 2013 adalah meningkatkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota atau antara wilayah produksi dengan wilayah pusat pertumbuhan (hulu-hilir). Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem tata kelola ekonomi yang baik dan dengan meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Arah kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan daerah tersebut diwujudkan dalam 5 (lima) fokus prioritas sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola ekonomi daerah, dilakukan dengan: (i) Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan usaha ekonomi daerah dalam perizinan usaha, Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi terkait Bab III Bidang Perekonomian Prioritas Bidang Peningkatan Investasi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi terkait Bab VIII Bidang Hukum dan Aparatur Prioritas Bidang Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan (ii) Meningkatkan

jumlah informasi.

2. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola ekonomi daerah, dilakukan dengan (i) Meningkatkan wawasan aparatur dalam bidang pengembangan ekonomi lokal dan daerah, Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi terkait Bab IX Bidang Wilayah dan Tata Ruang Prioritas Bidang Perbaikan Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah, dan (ii) Membentuk forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah.
3. Mengintegrasikan sumber daya dari berbagai stakeholder (pemerintah, dunia usaha, dan akademisi) dalam upaya fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah, dilakukan dengan: (i) mewujudkan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kawasan transmigrasi di kawasan terlinggal, perbatasan, dan strategis, termasuk kawasan agropolitan, metropolitan, dan lain-lain, dan (ii) menyusun perencanaan pengembangan wilayah yang komperheensif.
4. Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah, dilakukan dengan: (i) Meningkatkan kerjasama ekonomi antardaerah yang memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah dengan daerah belakangnya, antara daerah tersebut dengan daerah lainnya, Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi terkait Bab IX Bidang Wilayah dan Tata Ruang Prioritas Bidang Pemantapan Desentralisasi Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat-Daerah dan Antardaerah, dan (ii) Meningkatkan kemitraan pemerintah-swasta dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah.
5. Meningkatkan akses terhadap sarana dan prasarana fisik pendukung kegiatan ekonomi lokal dan daerah, dilakukan dengan: membangun kawasan yang didukung oleh infrastruktur ekonomi dan sosial wilayah, Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi terkait Bab V Bidang Sarana dan Prasarana Prioritas Bidang Menjamin

Ketersediaan Infrastruktur Dasar untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan.

9.3.7 Pengembangan Kawasan Strategis

Berdasarkan identifikasi masalah dan sasaran capaian, maka arah kebijakan Berdasarkan identifikasi masalah dan sasaran capaian, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2013, difokuskan pada: (i) terciptanya efektifitas koordinasi dalam rangka pengembangan kawasan melalui sinergi penganggaran program/kegiatan lintas sektor, lintas pelaku usaha dan lintas wilayah terutama bagi penyediaan infrastruktur; (ii) penyelesaian peraturan pendukung terkait dengan kebijakan insentif fiskal, non fiskal, pelimpahan kewenangan dan penyediaan (pembahasan) lahan; (iii) peningkatan laju investasi dan PDRB wilayah.

Fokus kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan secara spesifik berdasarkan tipe kawasan, sebagai berikut: untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), kebijakan tahun 2013 diarahkan pada bidang Pengembangan Kawasan meliputi: (i) penyusunan RTR KSN KAPET (13 KAPET) sebagai acuan pengembangan KAPET (ii) penyusunan program dan arahan pemanfaatan KAPET (Master Plan) yang selaras dengan kebijakan Master Plan sebagai dasar pengembangan KAPET 25 tahun ke depan (iii) Menyiapkan rencana terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah (RPJIZM) untuk 13 KAPET (iv) penyusunan Master Plan pengembangan KAPET.

Arah kebijakan KAPET pada bidang Kelembagaan meliputi: (i) inisiasi pembentukan Sekretariat Nasional Badan Pengusahaan KAPET sebagai pengganti Badan Pengusahaan KAPET, yang bertanggung jawab terhadap perumusan arahan kebijakan dan sinkronisasi kebijakan nasional, wilayah, dan sektoral; (ii) Badan Pengusahaan di level Kawasan akan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kesepakatan kerjasama korporasi antara Kabupaten/Kota di kawasan KAPET (mengacu pada PP No. 50 Tahun 2007) (iii) Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) memfasilitasi hubungan kerja antara Badan Pengusahaan KAPET dan Pemerintahan Daerah. (iv) pengembangan sumber daya manusia (SDM) terutama yang terkait dengan pengelolaan dan penerapan teknologi yang memberikan nilai tambah dan daya saing produk-produk unggulan.

Arah kebijakan KAPET pada bidang Promosi Investasi meliputi: (i) melaksanakan promosi di level pusat, kelancaran

distribusi, dan pemasaran produk-produk unggulan lokal dengan membentuk front office promotional investent; dan (ii) penyiapan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), kebijakan tahun 2012 diarahkan pada: (i) penyusunan peraturan pelimpahan wewenang yang mendorong penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), bagi fasilitas kepabeanan, cukai, dan kerjasama perpajakan khususnya bagi KPBPB Bintan dan KPBPB Karimun; (ii) tersusunnya strategi dan kebijakan penganggaran lintas sektor dan wilayah terkait dengan penyediaan dan peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur dasar energi dan telekomunikasi, serta penyediaan fasilitas kepelabuhan laut dan udara yang memenuhi standar internasional; (iii) penyediaan jaringan jalan transportasi yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan industri sekitarnya; (iv) terbentuknya kawasan Industri dan Perdagangan Bebas di Balohan dan Sabang serta Pulau Breuh; (v) penyelesaian masalah pembebasan dan status lahan; (vi) pemenuhan target-target capaian sesuai dokumen kesepakatan.

Sementara, oleh karena Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) masih dalam tahap persiapan, maka kebijakan lebih diarahkan pada bidang Pengembangan Kawasan meliputi: (i) pemilihan lokasi KEK baru; (ii) pematangan konsep dan rencana KEK yang telah terpilih; (iii) percepatan penyelesaian dasar hukum dalam kemudahan perijinan, insentif fiskal dan fasilitas cukai lainnya sehingga dapat meningkatkan promosi (iv) inisiasi penerapan Electronic Government dan Electronic Monitoring; (v) pengembangan kerjasama dalam peningkatan kapasitas SDM. Arah kebijakan KEK pada bidang investasi meliputi: (i) pelaksanaan promosi di 4 (empat) negara dan 4 (empat) daerah; (ii) pelaksanaan kerjasama dengan negara lain (2 (dua) negara) terutama terkait dengan lokasi KEK yang telah ditetapkan; (iii) pelaksanaan review dan penyempurnaan peraturan perundangan yang terkait dengan kebijakan pengembangan investasi di KEK; (v) inisiasi dan pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

9.3.8 Pengembangan Kawasan Perbatasan

Berdasarkan isu strategis dan sasaran pembangunan kawasan perbatasan tahun 2013, kebijakan pembangunan kawasan perbatasan tahun 2013 akan diarahkan untuk "Penguatan

dukungan dan konsolidasi kontribusi seluruh stakeholders dalam upaya mengurangi keterisolasian, pembangunan infrastruktur wilayah, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sosial-ekonomi dasar, pemanfaatan potensi sumberdaya perbatasan secara optimal, dan peningkatan kualitas pengelolaan batas wilayah Negara di 71 kecamatan prioritas perbatasan”.

Sebagai penjabaran operasional dari strategi dan arah kebijakan tahun 2013 tersebut, Prioritas Bidang Pengembangan Kawasan Perbatasan tahun 2013 akan memuat 5 (lima) kegiatan prioritas yang merupakan lanjutan kegiatan tahun 2012. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya anggota BNPP sebagaimana tercantum dalam Perpres no. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Kegiatan prioritas selengkapnya pada masing-masing fokus prioritas adalah sebagai berikut:

1. Fokus prioritas pembukaan keterisolasian wilayah sebagai penghambat aksesibilitas dan mobilitas barang/jasa dan orang serta pertumbuhan ekonomi lokal melalui 7 (tujuh) kegiatan prioritas: (i) penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi prioritas) dengan PKSN dan pusat pertumbuhan lainnya, (ii) Penyediaan Sarana pendukung pengalihan bahan pokok dan barang kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi prioritas) yang terisolasi, (iii) pengembangan sistem keberlanjutan pengadaan logistik (stok pangan) di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas), (iv) pengembangan Rencana Detil Tata Ruang kecamatan lokasi prioritas dan Pulau-pulau Kecil Terluar, (v) pengembangan potensi laut dan potensi darat di kecamatan lokpri dan PPKT, dan (vi) pengelolaan infrastruktur sosial ekonomi di kecamatan lokpri dan PPKT, (vii) pengembangan infrastruktur pemerintahan di kecamatan lokpri dan PPKT.
2. Fokus prioritas peningkatan keterjangkauan pelayanan pendidikan berkualitas di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas) melalui 3 (tiga) kegiatan prioritas: (i) penyediaan tenaga pengajar berkualitas beserta insentifnya (rumah dinas, tunjangan khusus) di

kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi prioritas), (ii) rehabilitasi sekolah dan penyediaan kelengkapan sarana belajar mengajar di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas), (iii) pembangunan sekolah satu atap berasrama di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas).

3. Fokus prioritas peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan berkualitas di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas) melalui 2 (dua) kegiatan prioritas: (i) penyediaan tenaga kesehatan berkualitas beserta insentifnya (rumah dinas, tunjangan khusus) di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi prioritas) dan (ii) pembangunan puskesmas rawat inap di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas).
4. Fokus prioritas peningkatan keterjangkauan pelayanan energi (listrik dan bahan bakar) di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas) melalui 2 (dua) kegiatan prioritas: (i) penyediaan pembangkit energi listrik alternatif di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas) dan (ii) distribusi BBM subsidi hingga kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas).
5. Fokus prioritas peningkatan kualitas pengelolaan batas wilayah negara di kecamatan lokpri dan PPKT melalui 2 (dua) kegiatan prioritas: (i) penegasan dan pembangunan batas wilayah negara di kecamatan lokpri dan PPKT dan (ii) peningkatan kualitas pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana pengamanan Batas Wilayah Negara di kecamatan lokpri dan PPKT.

9.3.9 Pembangunan Daerah Tertinggal

Memperhatikan permasalahan dan tantangan serta sasaran pembangunan daerah tertinggal pada tahun 2013, dan sejalan dengan tema RKP tahun 2013 yang menekankan pada pemantapan ekonomi domestik, maka arah kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada aspek pengembangan perekonomian lokal di daerah tertinggal melalui peningkatan kapasitas, produktivitas dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal secara berkesinambungan beserta sarana prasarana pendukungnya. Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh melalui strategi pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut.

1. Strategi pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal di daerah tertinggal, diperlukan:
 - a. Dukungan penguatan sentra produksi/klaster usaha skala mikro dan kecil.
 - b. Pengembangan kawasan transmigrasi yang berada di daerah tertinggal, baik dari segi kualitas sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana kawasan transmigrasi.
 - c. Dukungan pengembangan dan pendayagunaan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal.Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh sektor-sektor terkait dalam Bidang Ekonomi pada Bab III, Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Bab IV, dan Bidang Wilayah dan Tata Ruang dalam bab ini.
2. Strategi penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal. Untuk meningkatkan perekonomian daerah tertinggal, diperlukan:
 - a. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kelembagaan sosial masyarakat dan lembaga perekonomian lokal di daerah tertinggal.
 - b. Penguatan kelembagaan perlu didukung dengan kerjasama antarlembaga, sehingga terjadi sinergi peran yang baik dan terpadu dalam rangka mengoptimalkan pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal.
3. Strategi peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, diperlukan:
 - a. Pelayanan kesehatan khusus untuk daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terdepan (terluar) melalui pelayanan medik spesialis di RS bergerak.
 - b. Pemberian insentif khusus terhadap tenaga kesehatan yang didayagunakan di daerah tertinggal dan pulau kecil terdepan (terluar), serta pemberian Jamkesmas.Kegiatan tersebut merupakan koridor dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terdapat dalam Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama pada Bab II dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

4. Strategi peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal. Untuk mengatasi rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja di daerah tertinggal, diperlukan:
 - a. Penyediaan pendidikan dasar, menengah dan kejuruan, terutama pada pendidikan luar sekolah berupa pendidikan keterampilan hidup (*life-skill*) melalui lembaga kursus dan pelatihan lainnya yang berorientasi untuk meningkatkan kemampuan keterampilan ekonomi produktif.
 - b. Keberpihakan kepada daerah tertinggal untuk mendukung pemerataan tenaga pendidik melalui pemberian insentif khusus terhadap tenaga pendidik yang berada di daerah tertinggal, serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik di daerah tertinggal.

Kegiatan tersebut merupakan koridor dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terdapat dalam Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama pada Bab II, dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.
5. Strategi peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kondisi perekonomian masyarakat, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yaitu pembangunan pasar tradisional, pembangunan jalan dan jembatan, transportasi keperintisan, permukiman, serta pembangunan sarana dan prasarana informatika di daerah tertinggal. Kegiatan tersebut merupakan koridor dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terdapat dalam Bidang Sarana dan Prasarana pada Bab V, dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

9.3.10 Pembangunan Papua dan Papua Barat

Arah kebijakan percepatan dengan prinsip pengembangan kawasan yang diarahkan untuk keterpaduan dan sinergi lintas bidang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua dan Papua Barat adalah:

1. Penguatan ketahanan pangan.
2. Penanggulangan kemiskinan.

3. Pengembangan ekonomi rakyat.
4. Peningkatan pelayanan pendidikan.
5. Peningkatan pelayanan kesehatan.
6. Pengembangan infrastruktur dasar.
7. Pemihakan terhadap masyarakat asli Papua dan Papua Barat.

Dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diperlukan dukungan dari kebijakan yang bersifat regulasi dan kelembagaan sebagai berikut:

1. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertanahan.
2. Keamanan dan ketertiban.
3. Pengembangan kapasitas kelembagaan.

Selain melalui dukungan program-program di atas, Percepatan Pembangunan Provinsi Papua, juga didukung program-program yang terkait dengan agenda pelaksanaan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025, koridor ekonomi Papua-kepulauan Maluku. UP4B bertindak untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi antar Kementerian/Lembaga dalam rangka mewujudkan keterpaduan 10 (sepuluh) program kebijakan pokok percepatan tersebut di atas, secara sinergi lintas bidang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kebijakan yang bersifat regulasi dan kelembagaan.

9.3.11 Penanggulang an Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana

Berdasarkan isu strategis dan sasaran penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana tahun 2013 serta memperhatikan Direktif Presiden terkait kebencanaan, kebijakan pembangunan bidang Penanggulangan Bencana dan Pengurangan risiko bencana, akan diarahkan untuk peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana serta bahaya kebakaran di daerah, melalui:

1. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas pembangunan nasional dan daerah, melalui: (i) penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB); (ii) penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana (RAD-PRB) dan (iii) penyusunan peta risiko (*risk map*) sebagai masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan penataan ruang yang berbasis pengurangan risiko bencana.

2. Penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah, melalui: (i) sosialisasi pengurangan risiko bencana; (ii) penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran; (iii) penyusunan rencana kontinjensi dalam menghadapi bencana dan (iv) simulasi dan gladi penanggulangan bencana yang dilengkapi dengan protokol yang jelas dalam menghadapi bencana.
3. Mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, melalui: (i) kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan bencana tinggi dan pasca bencana; (ii) penguatan dan peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana; dan (iii) pembentukan dan penguatan forum-forum masyarakat pengurangan risiko bencana dengan memperhatikan kearifan lokal setempat.
4. Peningkatan koordinasi dan sumber daya penanganan ke darurat dan bantuan kemanusiaan, melalui: (i) koordinasi dan penentuan kebutuhan dasar; dan (ii) koordinasi dan pemulihan sarana vital dan layanan dasar di wilayah pasca bencana.
5. Percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana, yang meliputi koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah Kepulauan Mentawai, pasca bencana erupsi Gunung Merapi dan banjir lahar dingin di Provinsi DI. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah serta wilayah pasca bencana alam lainnya.
6. Percepatan proses pelaksanaan penyaluran anggaran terkait penyelenggaraan urusan pemerintah bidang penanggulangan bencana melalui Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan dalam upaya peningkatan kinerja dan penguatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah.
7. Penyusunan master plan kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini dalam rangka antisipasi gempa bumi dan tsunami

Melalui arah kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi peningkatan kinerja penanggulangan bencana serta peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

9.3.12 Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat-Daerah dan Antardaerah

Untuk dapat mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2013 terkait pemantapan desentralisasi, hubungan pusat daerah, dan antar daerah tersebut, arah kebijakan dilakukan dengan :

1. Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan, mencakup: (i) memfasilitasi seluruh implementasi NSPK; (ii) meningkatkan pelaksanaan, penyusunan, dan pengevaluasian perda mengenai kewenangan/urusan pemerintah daerah; (iii) mewujudkan harmonisasi yang optimal antara peraturan sektoral dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah.
2. Penataan Daerah, mencakup: (i) mewujudkan kesadaran moratorium Daerah Otonom Baru (DOB) bagi para pemangku kepentingan; (ii) mengoptimalkan kapasitas daerah otonom baru agar dapat memberikan pelayanan publik yang berbasis SDM yang berkualitas dengan mendorong kompetisi daerah secara mandiri
3. Peningkatan Kerja Sama Daerah, mencakup: (i) mewujudkan optimalisasi jumlah daerah yang melaksanakan kerja sama daerah terfokus pada bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik; (ii) meningkatkan jumlah daerah yang menerima manfaat dari kerja sama daerah dengan kegiatan kerjasama yang efektif dan efisien; (iii) memfasilitasi kerja sama daerah yang diusulkan dengan mendorong ke arah pengembangan koridor ekonomi yang sesuai dengan koridor ekonomi wilayah.

Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, mencakup: (i) Mengoptimalkan pelaksanaan sistem Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) termasuk peraturan pelaksana, metode, alat dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terintegrasi dengan sistem evaluasi dan pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah lainnya; (ii) Peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan.

9.3.13 Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah

Untuk dapat mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2013, terkait tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah tersebut, arah kebijakan dilakukan dengan :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

dan DPRD, mencakup: (i) menyusun dan merealisasikan pelaksanaan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007 diseluruh daerah; (ii) merealisasikan penerapan seluruh SPM (15 SPM) yang ditargetkan oleh RPJMN 2010-2014 oleh Kementerian/Lembaga terkait dan memfasilitasi serta memantau implementasi di daerah; (iii) meningkatkan kapasitas kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui orientasi kepemimpinan, legislasi, penganggaran, pengawasan, serta dilidat review analisa dampak regulasi.

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD, yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan *Grand Strategy Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan (Dilidat)* di 33 provinsi.
3. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, mencakup: (i) Meningkatkan kualitas pemanfaatan DAK sesuai petunjuk teknis dan mengoptimalkan penyerapan DAK; (ii) Meningkatkan kualitas APBD terkait dengan ketepatan waktu penetapan dan proporsi dalam pengalokasian belanja daerah APBD; (iii) Meningkatkan jumlah daerah dengan LKPD yang berstatus WTP; (iv) Meningkatkan proporsi PAD dalam APBD untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Transfer dengan mengoptimalkan sumber penerimaan daerah seperti pajak dan retribusi daerah, terutama dengan adanya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB 10 BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

10.1 Kondisi Umum

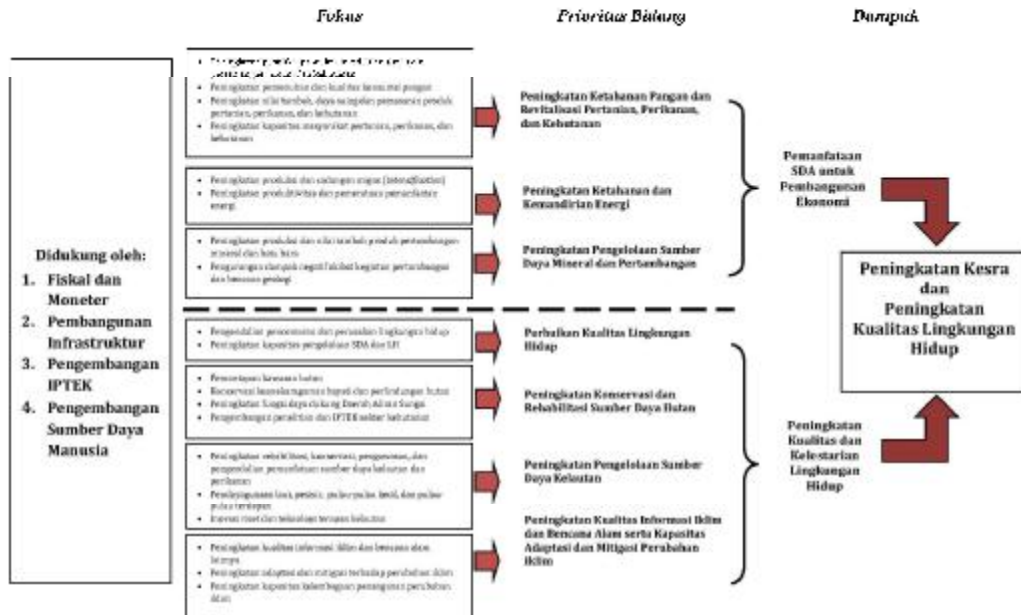
Dalam pembangunan nasional, bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA dan LH) berperan penting sebagai penyedia bahan baku bagi sektor produksi untuk pembangunan ekonomi dan sebagai pendukung sistem kehidupan. Untuk itu, pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan LH harus dilakukan secara rasional, efisien, bijaksana, dan berkelanjutan agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlanjut. Sehubungan dengan itu, dan sesuai amanat RPJMN 2010-2014 arah pembangunan bidang SDA dan LH dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (i) Pengelolaan SDA dan LH untuk mendukung pembangunan ekonomi; dan (ii) Pengelolaan SDA dan LH untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Arah kebijakan pengelolaan SDA dan LH untuk mendukung pembangunan ekonomi dijabarkan lebih lanjut ke dalam 3 [tiga] prioritas, yaitu: (i) Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; (ii) Prioritas Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi; dan (iii) Prioritas Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan. Sedangkan pembangunan SDA LH untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian LH dijabarkan lebih lanjut pada 4 [empat] prioritas, yaitu: (i) Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup; (ii) Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Tumbuhan; (iii) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; serta (iv) Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Kerangka pikir pembangunan bidang SDA dan LH dijelaskan dalam Gambar 1.

Beberapa sasaran pokok di dalam RPJMN 2010-2014 untuk arah kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi antara lain adalah: (i) Meningkatnya rata-rata pertumbuhan produksi bahan pangan terutama padi (3,22 persen per tahun), jagung (10,02 persen per tahun), kedelai (20,05 persen per tahun), gula (12,55 persen per tahun), daging sapi (7,30 persen per tahun), dan ikan (20,16 persen per tahun); (ii) Tercapainya pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan rata-rata 3,6-3,7 persen per tahun; (iii) Meningkatnya indeks Nilai Tukar Petani (NTP)

dan indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) masing-masing menjadi sebesar 115-120; (iv) Tercapainya produksi minyak bumi 1,01 juta barel per hari, produksi gas bumi 1.633 ribu Setara Barel Minyak (SBM) per hari atau 9.000 *Million Standard Cubic Feet* (MMSCF) per hari, gas metana batubara 113 ribu SBM per hari serta meningkatnya cadangan minyak, gas bumi dan gas metana batubara; (v) Tercapainya penggunaan panas bumi (PLTP) 5.807 MW, mikrohidro (PLTMH) 1.897 MW, tenaga surya (PLTS) 6.120 MWp, tenaga angin (PLT Angin) 0,6 MW; (vi) Tercapai produksi batubara 309 juta ton, dengan penggunaan domestik (*Domestic Market Obligation*) sebanyak 110 juta ton; serta (vii) Tercapainya produksi timah sebesar 110,25 ribu ton, nikel sebesar 12,32 juta ton, bauksit sebesar 11,46 juta ton dan hasil tambang lainnya. Selanjutnya sasaran pokok untuk mendukung peningkatan kualitas dan kelestarian LH adalah: (i) Terjaganya kelestarian SDA dan LH dan kemampuan SDA dalam mendukung pembangunan berkelanjutan; (ii) Terkendalinya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; (iii) Meningkatnya penanganan *illegal logging* dan *illegal fishing*; (iv) Meningkatkan kegiatan rehabilitasi dan konservasi lahan hutan serta dilakukannya pembatasan pembukaan lahan di kawasan; (v) Meningkatnya pengelolaan konservasi dan pencaayaan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya; (vi) Terwujudnya upaya rehabilitasi, konservasi dan preservasi ekosistem pesisir dan laut; (vi) Terwujudnya pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan yang menjadi batas wilayah NKRI; (v) Menurunnya emisi karbon; (vi) Meningkatnya kelayakan, keakuratan dan kecepatan sistem informasi iklim dan bencana alam; serta (vii) Meningkatnya kesiapan sektor pembangunan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

GAMBAR 10.1
KEUANGKA PIKIR PEMBANGUNAN SDA DAN LH



Berdasarkan peranannya dalam pembangunan nasional, beberapa hasil capaian pelaksanaan pembangunan bidang SDA dan LH adalah sebagai berikut:

A. Sebagai pendukung fungsi produksi dalam perekonomian nasional:

1. Produksi padi sebesar 65,7 juta ton Gabah Kering Giling/GKG (Angka Sementara BPS) ini menurun sekitar 1,1 persen dari tahun 2010. Sementara untuk produk perikanan meningkat sebesar 6,2 persen menjadi 12,38 juta ton;
2. Pada tahun 2011, PDB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan meningkat 3,0 persen;
3. Nilai perolehan investasi pemanfaatan hutan produksi, pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan satwa liar mencapai Rp 24 triliun dan USD 1,98 triliun pada tahun 2010, dan sebesar Rp 52 triliun dan USD 3,1 triliun pada tahun 2011;
4. Jumlah produksi kayu dan kayu olahan dari sektor kehutanan mencapai 55,90 juta m³ pada tahun 2010 dan 60,41 juta m³ pada tahun 2011. Volume ekspor produk kehutanan meningkat dari sebesar 2,76 juta m³ (nilai ekspor USD 1,49 miliar) pada tahun 2010 menjadi 3,98 juta m³ (nilai ekspor USD 2,3 miliar) pada tahun 2011;
5. Penerimaan pendapatan negara dari sektor migas mencapai angka Rp 272,4 triliun. Produksi minyak bumi mencapai 902 ribu barel per hari dan produksi gas bumi 1.516 ribu SBM per hari.
6. Penggunaan panas bumi PLTP naik menjadi 1.226 MW, mikrohidro PLTMH 347 MW, dan Biomassa PLT 20 MW.
7. Sektor pertambangan mineral dan batubara mencapai berbagai hasil dan kemajuan pada tahun 2011. Penerimaan negara yang didapat dari sektor pertambangan umum diperkirakan mencapai Rp 77,4 triliun atau meningkat sebesar Rp 10,6 triliun dari realisasi pencapaian pendapatan negara dari sektor ini sebesar Rp 66,8 triliun pada tahun 2010. Produksi batubara pada tahun 2011 mencapai 293 juta ton, dengan *Domestic Market Obligation* sebanyak 65 juta ton.
8. Pada tahun 2011 ini produksi pertambangan juga meningkat, dengan rincian produksi timah sebesar 60

ribu ton, bijih nikel sebesar 8,5 juta ton, bauksit sebesar 10,89 juta *metric ton* (mt).

B. Sebagai pendukung peningkatan kualitas dan kelestarian LH:

1. Pada tahun 2011, telah dilakukan pemantauan tingkat pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup melalui program Adipura di 380 kota;
2. Pada tahun 2011, telah dilakukan upaya penanganan *illegal fishing* berupa penanganan pelanggaran terhadap tindak pidana perikanan sebanyak 88 kasus dan penangkapan terhadap 104 unit kapal perikanan yang melakukan tindak pelanggaran bidang perikanan;
3. Sampai dengan akhir tahun 2011, tata batas kawasan hutan (batas luar dan batas dalam) berhasil diselesaikan secara kumulatif dari tahun 2010 sepanjang 8.514 km dan beroperasi 40 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
4. Untuk menurunkan luasan lahan kritis pada DAS prioritas telah dilaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan dengan capaian kumulatif dari tahun 2010 sebesar 705.562 ha serta penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu pada 50 DAS;
5. Telah berhasil diselesaikannya 109 kasus dari 177 kasus baru tindak pidana kehutanan yaitu *illegal logging*, perambahan, perdagangan satwa liar *illegal*, penambangan *illegal* dan kebakaran pada tahun 2010 serta 137 kasus dari 162 kasus baru pada tahun 2011;
6. Pengendalian kebakaran hutan pada tahun 2011 telah berhasil menurunkan jumlah *hotspot* di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi hingga sebesar 51,65 persen menjadi sebanyak 28.474 titik dari rerata *hotspot* tahun 2005-2009 (58.890 titik);
7. Terwujudnya upaya rehabilitasi, konservasi dan preservasi ekosistem pesisir dan laut, diantaranya melalui pengelolaan kawasan konservasi perairan pada 14 kawasan dengan luasan mencapai 2,5 juta ha pada tahun 2011. Luas kawasan konservasi perairan laut di Indonesia, saat ini mencapai 15,4 juta hektar;
8. Terwujudnya pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan yang menjadi batas wilayah NKRI melalui identifikasi potensi dan penyediaan infrastruktur;

9. Meningkatnya upaya pengendalian dampak perubahan iklim dan kesiapan sektor pembangunan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Secara rinci, capaian pada masing-masing prioritas diuraikan sebagai berikut.

10.1.2 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Pada tahun 2011, pencapaian sasaran produksi beberapa bahan pangan mengalami berbagai tantangan. Produksi padi, jagung, kedelai dan gula tahun 2011 lebih rendah daripada target yang ditetapkan dan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2010. Menurut angka Sementara BPS 2011, capaian produksi padi tahun 2011 sebesar 65,74 juta ton gabah kering giling (GKG), yang berarti turun 1,1 persen dari tahun 2010 sebesar 66,47 juta ton GKG. Sementara untuk jagung, produksi tahun 2011 sebesar 17,23 juta ton pipilan kering, yang berarti turun sebesar 6 persen dari tahun 2010 sebesar 18,33. Produksi kedelai pada tahun 2011 mencapai 0,87 juta ton biji kering atau menurun 4,08 persen dibanding produksi tahun 2010, yang mencapai 907 juta ton.

Produksi gula, yang pada tahun 2011 mencapai 2,22 juta ton, mengalami penurunan sebesar 3,0 persen dibanding produksi tahun 2010 yang mencapai 2,29 juta ton. Kondisi tersebut disebabkan oleh faktor iklim yang telah mengakibatkan terganggunya siklus tanam, hama pengganggu, dan bencana banjir yang berpengaruh terhadap produksi.

Sementara itu, produksi pangan sumber protein hewani mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, produksi daging sapi mengalami peningkatan sebesar 5,0 persen dari tahun 2010 sebesar 443 ribu ton menjadi 465,8 ribu ton pada tahun 2011, produksi telur meningkat sebesar 4,4 persen dari 1.372 ribu ton pada tahun 2010 menjadi 1.432,2 ribu ton pada tahun 2011, dan susu juga mengalami peningkatan sebesar 0,3 persen dari 923 ribu ton pada tahun 2010 menjadi 925,8 ribu ton pada tahun 2011.

Produksi perikanan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 6,2 persen dari tahun 2010, yaitu dari 11,66 juta ton menjadi 12,38 juta ton yang terdiri dari 5,41 juta ton perikanan tangkap dan 6,97 juta ton perikanan budidaya. Peningkatan produksi perikanan budidaya, terutama terjadi pada beberapa komoditas utama seperti: rumput laut (*seaweeds*), bandeng, *catfish* (patin dan lele), dan nila.

Sementara itu, komoditi perikanan tangkap yang utama adalah tuna, udang, tongkol, kembung, dan cumi. Dengan semakin meningkatnya usaha perikanan budidaya di Indonesia, maka diperkirakan produksi perikanan pada tahun 2012 akan mampu mencapai target 14,86 juta ton yang terdiri dari 5,44 juta ton perikanan tangkap dan 9,42 juta ton perikanan budidaya.

Peningkatan produksi perikanan juga diikuti dengan peningkatan konsumsi ikan oleh masyarakat sebesar 3,84 persen, yaitu dari 30,48 kg/kapita/tahun pada tahun 2010 menjadi 31,64 kg/kapita/tahun pada tahun 2011. Peningkatan ini antara lain merupakan hasil dari upaya peningkatan pengembangan informasi dan promosi hasil perikanan, serta adanya gerakan Gemar Makan Ikan. Pada tahun 2012, konsumsi ikan masyarakat Indonesia diupayakan akan meningkat menjadi 32,70 kg/kapita/tahun.

Perkembangan kualitas konsumsi pangan masyarakat dicerminkan pada skor Pola Pangan Harapan (skor PPH), pada tahun 2011 diperkirakan mampu mencapai 88,1 meningkat dari tahun 2010 yang mencapai 80,6. Dari sisi harga bahan pangan, selama tahun 2011, harga beras cenderung meningkat dari Rp 7.500 - 8.800 per kg pada awal tahun, menjadi Rp 9.300 - 10.350 per kg pada akhir tahun. Dibandungkan dengan kondisi harga regional dan internasional, harga bahan pangan dalam negeri tersebut lebih tinggi namun relatif lebih stabil.

Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan juga memproduksi komoditas yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti perkebunan dan hortikultura. Pada tahun 2011, produksi (angka sementara) komoditas perkebunan antara lain, minyak sawit sekitar 22,5 juta ton, karet sekitar 3,09 juta ton, kopi sekitar 634 ribu ton, dan kakao sekitar 712,23 ribu ton. Capaian produksi komoditas cabe adalah sekitar 1,37 juta ton, bawang merah sekitar 1,08 juta ton, kentang sekitar 1,09 juta ton, pisang sekitar 6,36 juta ton, jeruk sekitar 2,12 juta ton. Capaian produksi komoditas perikanan tuna adalah sebesar 230 ribu ton, udang sebesar 642 ribu ton, bandeng sebesar 585 ribu ton, nila sebesar 481 ribu ton, dan rumput laut sebesar 4,3 juta ton.

Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan juga masih berperan penting dalam pembentukan PDB nasional dengan kontribusi sekitar 12,7 persen. Kontribusi ini menurun 3,3 persen dibandingkan tahun 2010 yang kontribusinya masih

sekitar 13,2 persen. Pada tahun 2011, PDR sektor pertanian tumbuh sekitar 3,0 persen dibandingkan tahun 2010. Pertumbuhan masing-masing sub sektor adalah tanaman bahan makanan sebesar 1,26 persen, tanaman perkebunan 3,04 persen, peternakan dan hasilnya sebesar 4,19 persen, kehutanan 0,65 persen, serta perikanan 6,72 persen.

Pada tahun 2011, nilai ekspor pertanian yang terutama berasal dari minyak sawit, kakao, kopi, dan rempah-rempah mengalami sedikit penurunan, yaitu sekitar 0,2 persen dari tahun 2010. Pada tahun 2011, nilai ekspor pertanian tersebut diupayakan terus meningkat seiring dengan semakin tingginya permintaan dunia terhadap produk pertanian dan membaiknya harga komoditas pertanian.

Selanjutnya, peningkatan terjadi pula pada ekspor komoditas perikanan sebesar 11,89 persen dari USD 2,86 miliar pada tahun 2010 menjadi USD 3,2 miliar pada tahun 2011. Komoditas ekspor utama perikanan adalah tuna, udang, mutiara dan rumput laut. Pada tahun 2012 diperkirakan nilai ekspor komoditas perikanan akan mencapai USD 3,6 miliar.

Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, kesejahteraan petani dan nelayan yang dicerminkan pada peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga mengalami perbaikan. Pada tahun 2011, NTP sebesar 105,73, yang berarti telah memenuhi target RKP 2011 yaitu sebesar lebih dari 105; dan lebih tinggi dari capaian tahun 2010 yaitu sebesar 100,8. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami peningkatan dari 105,5 pada tahun 2010 menjadi 106,24 pada tahun 2011. Seiring dengan semakin kondusifnya sistem perekonomian nasional, diupayakan pada tahun 2012, NTN akan mencapai nilai 110. Peningkatan kesejahteraan nelayan tersebut juga didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) di 100 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada tahun 2011. Program PKN merupakan program perbaikan kehidupan nelayan secara komprehensif yang menjadi bagian dari program Klaster IV Penanggulangan Kemiskinan. Program PKN tersebut meliputi pemberian bantuan pada: (i) individu nelayan, berupa sertifikasi hak atas tanah nelayan dan perlindungan; (ii) kelompok nelayan, berupa pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP), bantuan kapal penangkap ikan dan alat tangkap, sarana pengolahan perikanan, dan pendampingan kelompok; serta (iii) sarana dan prasarana perikanan di PPI. Selain itu terdapat pula

peningkatan pelayanan kesehatan (Puskemas), perbaikan rumah nelayan, serta akses terhadap listrik dan air bersih. Pada tahun 2012, program PKN ini akan diperluas ke 400 PPI.

Selanjutnya, produksi hasil hutan dikonsentrasikan pada hutan produksi dan kawasan hutan yang ditetapkan sehingga produksi kayu dapat dilakukan dengan berkelanjutan. Luas kawasan hutan produksi adalah sebesar 77,7 juta ha, yang terdiri dari Hutan Produksi (33,9 juta ha), Hutan Produksi Terbatas (22,7 juta ha), dan Hutan Produksi Konversi (20,9 juta ha). Dari total luasan hutan produksi tersebut, seluas 33,8 juta ha telah dapat dimanfaatkan dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam (IA), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), serta Hutan Tanaman Industri (HTI), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT). Sementara itu, 43,9 juta ha berstatus "open access", dan akan terus dilakukan penetapan kawasan dan izin usaha.

Sementara itu, pemanfaatan hutan dalam bentuk hutan tanaman industri mencapai total luasan 10 juta ha, dan hutan tanaman rakyat sebesar 132.445 ha dengan penanaman sebesar 661.150 ha. Selain untuk pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan produksi juga dimanfaatkan IUPHHBK-HT Sagu sebanyak satu unit di Kabupaten Bengkalis dengan luas 21.620ha dan restorasi ekosistem melalui HPH-RE sebanyak 4 (empat) unit (PT. Restorasi Habitat Orang Utan Indonesia seluas 86.450 ha, PT. Restorasi Ekosistem Indonesia Sumatera Selatan seluas 52.170 ha, PT. Restorasi Ekosistem Indonesia Jambi seluas 46.385 ha, dan PT. Ekosistem Khatulistiwa Lestari seluas 14.080 ha) dengan total luas 199.085 ha. Pola penguasaan hutan ini untuk memfasilitasi akan meluasnya pengelolaan hutan untuk restorasi dan reforestasi dalam rangka peningkatan serapan karbon dan peningkatan keanekaragaman hayati.

Untuk tahun 2011, pemanfaatan hutan alam mencapai 292 unit dengan total luas 23,4 juta ha, menurun dari tahun 2010 yang besarnya 24,95 juta ha. Penurunan disebabkan adanya izin yang tidak diperpanjang, tidak terpenuhinya persyaratan administrasi oleh pemohon baru, serta penundaan pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Jumlah investasi (nilai perolehan) pada tahun 2011 yang berasal dari pemanfaatan hutan produksi adalah sebesar Rp 51,6 triliun dan USD 3,1 triliun, serta pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan satwa liar mencapai sebesar Rp 600 miliar. Pemanfaatan bahan baku untuk industri secara nasional dari sektor kehutanan pada tahun 2011 mencapai 47,40 juta m³. Jumlah ini meningkat tahun 2009 yang hanya sebesar 37,5 juta m³ dan pada tahun 2010 sebesar 44,26 juta m³. Seiring dengan hal tersebut, jumlah tenaga kerja yang terserap menjadi sebesar 310.515 orang.

Produksi kayu olahan juga mengalami peningkatan dengan total sebesar 12,7 juta m³ dengan kombinasi dari jenis pulp sebesar 6,1 juta m³, dan diikuti oleh *plywood* dan *laminated veneer lumber* (LVL) sebesar 3,3 juta m³. Produksi kayu olahan lainnya adalah serpih kayu sebesar 1,7 juta m³, gergajian sebesar 0,9 juta m³ dan *veneer* sebesar 0,8 juta m³. Dengan peningkatan produksi kayu dan kayu olahan, maka volume ekspor produk kehutanan pada tahun 2011 juga meningkat menjadi sebesar 3,9 juta m³ dari sebelumnya 2,7 juta m³ dengan nilai ekspor sebesar USD 2,3 miliar. Kayu lapis tetap menjadi penyumbang ekspor terbesar dengan nilai USD 1,6 miliar, diikuti oleh *moulding* sebesar USD 406 juta dan kayu pertukangan sebesar USD 218 juta.

Dengan masih tingginya kebutuhan terhadap kayu baik di pasar domestik maupun pasar internasional dan seiring dengan pentingnya pemanfaatan hutan secara lestari, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menerapkan pengelolaan hutan produksi yang berkelanjutan, yaitu: (i) di hutan alam, telah diterapkan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia dan Tebang Pilih Tanam Jalur. Sistem silvikultur ini efektif untuk meningkatkan riap tumbuh dan produktivitas hasil hutan kayu dengan tetap mempertahankan keanekaragaman hayati dan fungsi lingkungan; (ii) dalam rangka menjaga pemerataan kayuhari hutan lestari, pemerintah meningkatkan produksi penebangan bersertifikat legalitas kayu. Pada tahun 2011, penebangan bersertifikat legal sebesar 10 persen dan meningkatkan produksi industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu di 59 unit manajemen IUPHHK; serta (iii) meningkatkan keragaman produk kehutanan bukan kayu dengan produk unggulan seperti sutera alam, rotan, bambu, lebah madu, gaharu, dan nyamplung.

Partisipasi dan akses masyarakat dalam produksi hasil hutan

terus dilakukan melalui pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKM) dan hutan desa dengan luas 528.507 ha pada tahun 2010 dan 508.170 ha pada tahun 2011. Pembangunan HKM dan hutan desa akan terus ditingkatkan di tahun 2012 dengan target sebesar 500.000 ha. Selain itu, pemerintah juga membangun hutan rakyat kemitraan untuk bahan kayu industri pertukangan seluas 50.652 ha pada tahun 2011 dan akan ditingkatkan lagi sebesar 50.000 ha pada tahun 2012. Fasilitasi izin usaha pengelolaan HKM dilakukan pada 101 kelompok dan kemitraan usaha HKM pada 10 unit usaha di 13 provinsi.

Untuk mendukung partisipasi dan akses masyarakat tersebut, pemerintah terus mengupayakan untuk meningkatkan penyuluhan kehutanan. Peningkatan partisipasi kelompok tani hutan dalam kemitraan antara industri dan rakyat telah dilaksanakan pada 19 perusahaan di 6 (enam) provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara itu, sosialisasi kelembagaan penyuluhan kehutanan dilaksanakan di seluruh provinsi dan fasilitasi lima provinsi model juga dilakukan di Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Untuk meningkatkan kualitas penyuluhan, sebanyak 189 orang telah dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas kerjasama, pada tahun 2011 telah dilakukan diklat pendampingan masyarakat sebanyak 5.000 orang dari seluruh Indonesia.

10.1.3 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi

Peningkatan ketahanan dan kemandirian energi dilakukan melalui peningkatan ketersediaan energi, diversifikasi dan peningkatan akses serta efisiensi energi.

Seperti pada tahun sebelumnya, produksi minyak bumi digunakan sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM). Produksi minyak bumi pada tahun 2011 adalah sebesar 902 ribu barel per hari sedangkan untuk tahun 2012 diupayakan meningkat menjadi 930 ribu barel per hari. Sedangkan produksi BBM pada tahun 2011 adalah sebesar 37,23 juta kilo liter. Sampai saat ini produksi BBM tersebut belum dapat memenuhi permintaan BBM yang mencapai 56 juta kilo liter. Sedangkan produksi gas bumi untuk tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 1590 MBOEPD dan 1516 MBOEPD. Volume LPG bersubsidi pada tahun 2010 sebesar

2,71 juta ton dan tahun 2011 sebesar 3,28 juta ton.

Untuk meningkatkan ketahanan energi diperlukan peningkatan produksi dan cadangan minyak dan gas bumi. Pada tahun 2011 cadangan minyak bumi yang terbukti adalah sebesar 7.732,27 *Million Metric Stock Tank Barrels* (MMSTB), yang terdiri dari cadangan terbukti (*proven*) sebesar 4.039,57 MMSTB dan cadangan potensial sebesar 3.692,70 MMSTB, sedangkan cadangan gas bumi sebesar 152,89 *Trillions Cubic of Feet* (TSCF).

Sejalan dengan usaha untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi. Upaya-upaya penganekaragaman (diversifikasi) sumber energi primer dilakukan dengan meningkatkan produksi Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti tenaga air, panas bumi, matahari, biomassa, biofuel dan nuklir serta Bahan Bakar Nabati (BBN) dan gas (*liquefied* dan *gasified fuel*). Peningkatan diversifikasi energi primer ini juga dilakukan sebagai salah satu langkah untuk penurunan emisi. Sejak tahun 2008, berdasarkan Permen ESDM No. 32 Tahun 2008 Penyediaan, Pemantapan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, untuk tahun 2011 telah tersalurkan BBN dengan volume sebesar 336,6 ribu kilo liter atau 58 persen terhadap target tahun 2011. Kontribusi EBT pada tahun 2011 ini telah meningkatkan kapasitas pembangkit listrik sebesar 1.593 MW. Pembangkit listrik tenaga panas bumi menyumbang kapasitas listrik terbesar yaitu 1.226 MW, tenaga air sebagai penyimpan potensi EBT terbesar di Indonesia, menyumbang kapasitas listrik sebesar 347 MW dan tenaga biomassa sebesar 20 MW. Potensi panas bumi sebesar 29,1 GW yang tersebar di 276 lokasi, baru 1.226 MW (+4,22 persen dari potensi yang ada) yang telah berproduksi dan diusahakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Untuk meningkatkan pemanfaatan potensi panas bumi, sampai saat ini telah ditetapkan sebanyak 50 Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang terdiri dari 19 WKP *existing* dan 31 WKP baru. Dari 19 WKP *existing* terdapat 7 lapangan panas bumi yang berproduksi.

Untuk meningkatkan pasokan BBM dalam negeri, telah dibangun kapasitas penyimpanan dalam negeri sebesar 1,37 juta kilo liter. Selain itu telah dilakukan peningkatan kapasitas pengangkutan BBM sebesar 6,3 persen dan peningkatan jumlah niaga gas bumi melalui pipa menjadi 11 usaha niaga. Dalam rangka meningkatkan akses terhadap sumber energi

dengan harga yang terjangkau, pemerintah masih menerapkan subsidi BBM dan listrik. Pada tahun 2011, subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 168,26 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 93,3 triliun. Nilai subsidi ini terus meningkat seiring dengan peningkatan harga rata-rata minyak mentah di pasar internasional.

Upaya untuk meningkatkan efisiensi energi telah dilakukan melalui: (i) Penyusunan draft regulasi dan kebijakan konservasi energi; (ii) Penyusunan program pemanfaatan energi; (iii) Pelaksanaan audit energi dan monitoring di sektor industri, komersial dan pemerintah; (iv) Penyusunan data harga energi dan konsep mekanisme insentif konservasi energi; (v) Pelaksanaan penerapan teknologi energi bersih dan efisien; dan (vi) melaksanakan bimbingan teknis dan kerjasama konservasi energi. Sebagai hasil, tingkat intensitas energi pada tahun 2009 adalah sebesar 565 TOE (*ton oil equivalent*) per USD 1 juta.

10.1.4 Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Mineral dan Pertambangan

Pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan hasil tambang dan mineral serta pendapatan negara. Pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan dilakukan dengan: (i) meningkatkan produksi batubara; (ii) meningkatkan produksi mineral logam dan non-logam; (iii) meningkatkan sumber daya dan cadangan mineral logam dan non-logam; dan (iv) meningkatkan daya dukung pertambangan.

Pada tahun 2011 produksi batubara mengalami peningkatan sekitar 6,5 persen dari tahun sebelumnya menjadi 293 juta ton. Sebesar 20,5 persen produksi batubara atau sebesar 60.15 juta ton digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebagian besar batubara tersebut digunakan untuk pembangkit listrik (51,35 persen), industri (35,79 persen) sedangkan sisanya sebesar 12,86 persen digunakan untuk industri pengolahan. Sumber daya dan cadangan batubara adalah sebesar 105,2 miliar ton dan 21,1 miliar ton. Cadangan terutama tersebar di 10 (sepuluh) wilayah potensi sumber daya batubara yakni Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Dibandingkan tahun sebelumnya, produksi mineral logam dan non-logam yang mengalami peningkatan antara lain : (i) logam timah dari sebesar 49.496 ton menjadi 60.002 ton; (ii) bijih nikel dari sebesar 7.522.759 ton menjadi 8.500.000 ton;

dan (iii) bijih besi dari sebesar 3.865.385 mt menjadi 5.000.000 mt. Namun ada beberapa jenis mineral mengalami penurunan antara lain (i) tembaga dari sebesar 878.377 ton menjadi 618.297 ton; (ii) emas dari sebesar 104.535 kg menjadi 78.148 kg; (iii) perak dari sebesar 278.781 kg menjadi 223.078 kg; dan (iv) bauksit dari sebesar 15.595.048 mt menjadi 10.000.000 mt.

Dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 diperlukan renegotiasi kontrak mineral dan batubara yang ditandatangani pada saat UU tersebut belum diberlakukan. Renegosiasi mulai dilakukan pada Triwulan ke empat tahun 2009 untuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan mulai awal tahun 2010 untuk Kontrak Karya (KK). Sampai 2011, proses renegotiasi sudah dilakukan terhadap 37 pemegang Kontrak Karya (KK) dan 76 pemegang PKP2B. Sebanyak 9 (sembilan) perusahaan pemegang KK menyepakati semua pasal/ketentuan yang diamandemen. Sementara 23 perusahaan lainnya baru menyetujui sebagian pasal/ketentuan untuk diamandemen. 5 perusahaan lainnya masih belum menyetujui semua pasal/ketentuan untuk diamandemen. Untuk pemegang PKP2B, sebanyak 63 perusahaan sudah menyepakati pasal/ketentuan yang diamandemen. Sebagian besar perusahaan itu merupakan generasi II dan III. Sementara 13 perusahaan baru menyetujui sebagian pasal/ketentuan untuk diamandemen. Pengaturan penyesuaian KK dan PKP2B diatur dalam pasal 169 s.d 172 Undang-undang No. 4 Tahun 2009, antara lain mengatur hal-hal yang berkaitan dengan: (i) Peningkatan nilai tambah untuk mineral dan batubara dengan memberlakukan kewajiban untuk membangun fasilitas industri hilir di dalam negeri; (ii) Peningkatan penerimaan negara melalui penyesuaian tarif iuran tetap dan iuran produksi menjadi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2003; serta (iii) Penggunaan usaha jasa yang memprioritaskan usaha jasa lokal dan nasional sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 tentang Usaha Jasa Pertambangan.

10.1.5 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Pesatnya aktivitas pembangunan memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain memberikan tekanan pula terhadap kondisi lingkungan dengan semakin meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi lingkungan yang terdegradasi berakibat kepada menurunnya kondisi kesehatan lingkungan dan

masyarakat serta meningkatnya kejadian bencana seperti kekeringan, banjir, dan longsor. Situasi ini akan menimbulkan kerugian ekonomi, materi, dan korban jiwa, terutama di daerah yang rawan bencana. Sehubungan dengan itu, kualitas lingkungan hidup terus diperbaiki melalui: (i) pengendalian pencemaran air; (ii) penanganan limbah padat; (iii) pengendalian pencemaran udara.

Dalam rangka pengendalian pencemaran air, upaya perbaikan pelaksanaan Program Kali Bersih (PROKASIH) terus dilakukan. Pada tahun 2011, tercatat sebanyak 100 industri mengikuti PROKASIH. Di samping itu, terkait dengan pemantauan kualitas air, pada tahun 2011 telah dilakukan pemantauan kualitas air di sebanyak 27 kota (metropolitan dan besar). Melalui ketiga kegiatan tersebut diharapkan pencemaran air dapat terus ditekan seiring terus ditingkatnya jumlah peserta dan lokasi pemantauan.

Untuk menangani masalah limbah padat (sampah) upaya penerapan metode *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) masih terus dilakukan. Selain itu, upaya revitalisasi program Adipura tengah dilakukan dengan memperkuat kriteria evaluasi dan penilaiannya, serta meningkatkan efektifitas instrumen Adipura. Pada tahun 2011, sebanyak 63 kota mendapatkan penghargaan Adipura, dari sebanyak 300 kota yang telah berhasil dipantau. Upaya penanganan penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3 yang telah dilakukan pada tahun 2011, antara lain melalui pembinaan teknis verifikasi pengelolaan B3 di 15 provinsi, sebanyak 1.002 perusahaan telah mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), pengaturan izin pembuangan limbah B3 yang semakin dipertegas, dan penanganan *illegal traffic* limbah B3.

Berkaitan dengan upaya pengendalian pencemaran udara, sejak tahun 1996 telah dilaksanakan program langit biru. Pada tahun 2011, telah dilakukan pemantauan kualitas udara di 26 kota. Untuk meningkatkan pengendalian pencemaran udara, diharapkan jumlah kota yang dipantau ditahun berikutnya terus mengalami peningkatan. Selanjutnya, pada tahun 2011, telah dilakukan berbagai kegiatan untuk menjaga kualitas dan kelestarian lahan/tanah, antara lain, melalui pemantauan kerusakan tanah di beberapa kabupaten/kota. Hasil pemantauan ini merupakan bahan penting untuk penyusunan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah

untuk produksi biomassa. Selain kegiatan di atas, sejak tahun 2006 telah dilakukan Program Menuju Indonesia Hijau (MIH), dimana untuk tahun 2011, tercatat sebanyak 103 kabupaten yang mengikuti program tersebut. Dari sejumlah peserta tersebut, terdapat 88 Kabupaten yang berhasil mempertahankan tutupan vegetasi berhutan pada kawasan lindung.

Sebagai kelanjutan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011 dan 2012 dilaksanakan berbagai kegiatan konservasi, antara lain: (i) Identifikasi kerusakan dan rehabilitasi daerah penyangga di beberapa Taman Nasional; (ii) Pengembangan kebijakan pemanfaatan sumber daya genetik melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang untuk meratifikasi Protocol Nagoya; (iii) RLU Pelestarian Sumber Daya Genetik (PSDG) dan kebijakan pengelolaan spesies asing; (iv) Pengembangan *database* dan sistem informasi keanekaragaman hayati; serta (v) Pengelolaan 15 danau dan situ di Jabodetabek. Selain itu, dalam upaya mendukung peningkatan pelestarian lingkungan hidup, Indonesia telah memiliki *Indonesia Biodiversity Strategy Action Plan (IBSAP) 2003-2020*. Pada tahun 2012 sedang dilakukan proses penelaahan dan pembaharuan atas IBSAP.

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup juga menekankan pentingnya tata kelola pembangunan lingkungan hidup melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup juga terus ditingkatkan kualitas sistem AMDAL dan kapasitas infrastruktur pengendalian dampak lingkungan, seperti laboratorium uji lingkungan, metode kalibrasi dan pengujian. Pada tahun 2011 telah terbina sebanyak 69 laboratorium uji lingkungan. Dalam rangka meningkatkan tata kelola lingkungan yang baik, pada tahun 2011 telah disusun laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2010 dan evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2010.

Selanjutnya, terkait dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah, telah disusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang lingkungan yang harus dipenuhi untuk setiap daerah. Untuk membantu kabupaten/kota dalam melakukan pemantauan dan pengendalian pencemaran, pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup telah dibangun dan dilengkapi sarana dan prasarana pemantauan air dan udara serta laboratorium dan peralatannya. Pada tahun 2012, jumlah kabupaten/kota yang

telah menerima DAK dan total anggaran DAK Bidang Lingkungan Hidup mengalami peningkatan dari tahun 2011. Tercatat, jumlah kabupaten/kota penerima DAK meningkat dari sebanyak 418 kabupaten/kota di tahun 2011 menjadi 442 kabupaten/kota di tahun 2012. Dari sisi total anggaran, tercatat mengalami peningkatan dari sebesar Rp 400 miliar di tahun 2011, menjadi sebesar Rp 479,73 miliar di tahun 2012.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, mulai tahun 2012 dilaksanakan mekanisme dekonsentrasi dengan lingkup: (i) pengendalian pencemaran lingkungan hidup; (ii) pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan (iii) peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 2012, sebanyak 32 provinsi yang telah menerima dana dekonsentrasi, dengan anggaran total yang dialokasikan sebesar Rp 200 miliar.

10.1.6 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan dilakukan melalui program-program utama yaitu perencanaan makro dan pemantapan kawasan hutan, konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan, serta peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat. Program-program utama tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan hutan yang lestari.

Sebagai arahan perencanaan makro penyelenggaraan kehutanan, pemerintah telah menyelesaikan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. 49 Tahun 2011. RKTN tersebut berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. RKTN ini akan menjadi acuan bagi perencanaan kehutanan pada tingkat yang lebih rendah yaitu di wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan KPH.

Untuk memantapkan kawasan hutan, pemerintah telah menyelesaikan penataan batas luar dan batas fungsi kawasan hutan sepanjang 5.148,83 km pada tahun 2011 dari target sebesar 4.600 km. Pada tahun 2012, target tata batas yang akan diselesaikan adalah sebesar 16.000 km. Peningkatan

target penyelesaian tata batas ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan konflik pemanfaatan kawasan hutan dan mempercepat penyelesaian RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. Sampai dengan tahun 2011 telah diselesaikan persetujuan substansi kehutanan pada 24 Provinsi, sementara itu untuk tahun 2012 diharapkan selesai persetujuan substansi untuk provinsi Maluku Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat.

Selain penyelesaian tata batas, pemerintah fokus untuk membangun kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di seluruh kawasan hutan di Indonesia. Sampai dengan tahun 2011, telah dibentuk 413 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di sebanyak 25 Provinsi. Penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) telah diselesaikan sebesar 40 persen dari target RPJMN 2010-2014 dengan ditetapkannya 30 unit KPHK melalui Keputusan Menteri Kehutanan. Perancangan KPH terus dilanjutkan dengan operasionalisasi KPH yang telah ditetapkan hingga akhir tahun 2011 sebanyak 40 unit KPH telah beroperasi. Operasionalisasi KPH tersebut akan terus ditingkatkan dengan tambahan sebesar 60 unit KPH pada tahun 2012.

Sejalan dengan arah kebijakan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan, beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Strategi REDD+ meliputi: (i) Penyempurnaan peraturan dan kebijakan, terutama yang diprioritaskan untuk menyelesaikan penyebab terjadinya konflik kawasan hutan dan lahan dalam rangka mengaktifkan manajemen pengelolaan kawasan konservasi dan hutan lindung; (ii) Evaluasi terhadap perijinan kehutanan, terutama yang diprioritaskan untuk memberikan solusi atas keberadaan hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan hutan berijin; (iii) Penerapan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian tata batas kawasan hutan, operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan, pemetaan hutan adat; dan (iv) Pendampingan bagi adopsi Strategi Daerah REDD+ dan RAD GRK ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati, pemerintah berhasil menurunkan konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, dan hutan lindung) sebesar

3,20 persen atau setara dengan 16 ribu ha dari total 25 ribu ha yang harus diselesaikan. Selain itu, pengelolaan kawasan konservasi berbasis *resort* telah ditingkatkan efektivitasnya pada 20 taman nasional prioritas. Untuk meningkatkan populasi spesies terancam punah, pemerintah telah menetapkan 14 spesies prioritas yaitu Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak Jawa, Ranteng, Drangutan Kalimantan, Komodo, Owa Jawa, Bekantan, Anoa, Babirusa, Jalak Bali, Elang Jawa, Maleo, dan Kakatua Kecil Jambul Kuning. Pada tahun 2011, populasi spesies terancam punah tersebut berhasil ditingkatkan sebanyak 165 spesies dari basis data tahun 2008 sebanyak 20.240 spesies.

Untuk meningkatkan perlindungan dan pengamanan berbagai hutan, telah diselesaikan sebanyak 137 kasus baru dan 7 kasus tunggakan perkara tindak pidana kehutanan yaitu *illegal logging*, perambahan, peredaran tumbuhan satwa liar ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran. Dalam rangka pengendalian kebakaran hutan, penurunan jumlah *hotspot* di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi terus digiatkan. Peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan terus dilakukan di 12 DAOPS melalui kegiatan Temu Karya Manggala Agni dan dukungan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan.

Dalam rangka pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan, telah dilakukan kerjasama/izin usaha baru untuk pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 9 (sembilan) unit yaitu di TN Manupen Tanaularu, TN Gunung Halimun Salak, TN Gunung Rinjani dan di TN Gunung Gede Pangrango. Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang pengusahaan pariwisata alam berhasil ditingkatkan menjadi sekitar Rp 22,2 miliar pada tahun 2011 dari sebesar Rp 5,9 miliar pada tahun 2008.

Pada tahun 2011, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS terus diupayakan melalui rehabilitasi kawasan hutan konservasi/lindung sebesar 100.743 ha dan rehabilitasi lahan kritis, termasuk penanaman hasil Kebun Bibit Rakyat Tahun 2010 sebesar 400.608 ha. Rehabilitasi hutan mangrove, gambut, dan rawa terus digiatkan dengan capaian sebesar 10.401 ha. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini akan terus ditingkatkan dengan target sebesar 500.000 ha pada tahun 2012. Pada tahun 2011, kegiatan Kebun Bibit Rakyat berhasil direalisasikan sebanyak 10.208 unit dan persemaian

10.1.7 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

permanen sebanyak 25 unit. Sementara itu, untuk mewujudkan pengelolaan DAS terpadu, pada tahun 2011 telah disusun Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) pada 36 DAS prioritas.

Sesuai amanat RPJMN 2010-2014 untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan dan juga meningkatkan fungsi laut sebagai sistem penyangga kehidupan, terus dilakukan upaya-upaya meliputi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir dan laut (terumbu karang dan mangrove), pengelolaan pulau-pulau kecil, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta pengembangan riset dan teknologi kelautan.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan sumber daya laut dari berbagai kegiatan yang merusak dan ilegal, terus dilakukan upaya untuk penanganan *illegal fishing* dan pelanggaran lainnya. Langkah yang dilakukan adalah: (i) Pelaksanaan operasi/pengawasan rutin dan gelar operasi bersama; (ii) Pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat; serta (iii) Peningkatan kerjasama dengan negara tetangga. Pada tahun 2011, sampai dengan bulan November telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3.287 kapal perikanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 104 kapal yang terdiri dari 29 kapal perikanan Indonesia dan 75 kapal perikanan asing, diduga melakukan tindak pelanggaran bidang perikanan berupa: (i) beroperasi tanpa dokumen perijinan; (ii) penggunaan alat tangkap terlarang; serta (iii) pelanggaran wilayah operasi penangkapan. Dalam rangka menjaga keamanan di kawasan perairan RI, selain operasi mandiri yang dilakukan secara rutin, juga dilakukan gelar operasi bersama dengan TNI-AL, POLRI, dan Bakortamla dalam Operasi Gurita dan Operasi Sepanjang Tahun Bakorkamla. Selain itu, dilakukan pula kerjasama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan negara tetangga yaitu berupa Patroli Terkoordinasi (Patkor) Ausindo dengan Australia, dan Patkor Malindo dengan Malaysia. Dalam rangka pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat, sudah dibentuk 1.453 kelompok masyarakat pengawas yang tersebar di 33 provinsi.

Upaya untuk memelihara fungsi lingkungan di wilayah perairan dilakukan melalui rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Sebagai hasilnya,

pada tahun 2011 dicapai: (i) pengelolaan kawasan konservasi perairan seluas 2,5 juta hektar dan penetapan kawasan konservasi perairan seluas 15,4 juta hektar sampai dengan tahun 2011, termasuk kawasan konservasi laut daerah (KKLD); (ii) pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang pada 16 kabupaten/kota di 8 provinsi yang menghasilkan kondisi terumbu karang adalah 6 persen dalam kondisi sangat baik, 23 persen kondisi baik, 29 persen dalam kondisi sedang, dan 42 persen dalam kondisi rusak; (iii) rehabilitasi mangrove seluas 90 hektar; serta (iv) peningkatan kerjasama dengan negara tetangga (Filipina, Malaysia, Solomon, Papua New Guinea, dan Timor Leste) di wilayah segitiga terumbu karang (*Coral Triangle*) dalam upaya pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi terumbu karang. Kegiatan ini menjadi komitmen ke-6 (enam) Kepala Negara pada saat GTI diresmikan di Manado pada tahun 2009. Dalam kerjasama GTI, dilakukan pula peningkatan pengendalian penangkapan ikan ilegal (IUU fishing) dan pengawasan pemanfaatan sumber daya di wilayah ini. Kerjasama lainnya yang melibatkan antardaerah dan negara tetangga adalah dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut seperti *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion* (SSME), *Arafura and Timor Seas Action* (ATSEA), *Mangrove For the Future* (MPF), Selat Karimata, Teluk Tomini, Teluk Bone, dan lain-lain.

Sementara itu, dalam rangka peningkatan manfaat dan hasil dari kawasan konservasi ekosistem dan pesisir dilakukan program pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya agar tercipta alternatif usaha dan pengurangan eksploitasi sumberdaya ikan yang berlebihan. Adapun kegiatan pemberdayaan yang dilakukan antara lain adalah: (i) pengembangan usaha alternatif bagi nelayan; (ii) bantuan modal dan sarana usaha seperti bibit, alat tangkap, dan lain-lain; serta (iii) pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR). Sebagai hasil, pada tahun 2011, pemberdayaan masyarakat petambak garam telah mencakup 1.670 kelompok. Pada tahun 2012 pemberdayaan masyarakat petambak garam akan diperkuat ke 40 kab/kota. Upaya PUGAR dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian swasembada garam konsumsi pada tahun 2012.

Selanjutnya, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil dan untuk menegakkan eksistensi NKRI di wilayah tersebut, terus dilakukan identifikasi potensi dan pemetaan di 36 pulau-pulau kecil dan

penyediaan infrastruktur di 34 pulau-pulau kecil, termasuk rehabilitasi ekosistem dan fasilitasi investasi. Sarana yang dibangun di pulau-pulau kecil tersebut di antaranya adalah listrik tenaga surya (LTS), sarana air minum, dermaga, jalan selapak, dan vegetasi pantai. Pada tahun 2012 akan dilakukan identifikasi potensi pada 60 pulau-pulau kecil dan fasilitasi penyediaan infrastrukturnya pada 30 pulau-pulau kecil.

Dalam rangka meningkatkan potensi laut yang belum dimanfaatkan secara optimal, terus dilakukan pengembangan riset dan iptek kelautan. Pada tahun 2011 telah dihasilkan penelitian dan pemetaan kerentanan kawasan pesisir akibat kenaikan muka air laut sebagai dampak perubahan iklim di beberapa kawasan pesisir, pengkajian stok sumber daya perairan laut di 3 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yaitu Laut Cina Selatan, Teluk Tomini dan Laut Arafura. Pada tahun 2012 kegiatan ini diperkirakan terus dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas.

10.1.8 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan ancaman yang cukup serius bagi bagi Indonesia. Dampak perubahan iklim yang signifikan dirasakan adalah naiknya permukaan air laut, bergesernya musim hujan dan kemarau, meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini akan berdampak pada ketersediaan sumber daya air, ketahanan pangan dan energi, serta berkembangnya hama dan penyakit.

Dalam rangka berkontribusi dalam mengendalikan laju perubahan iklim, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020. Untuk itu, pada tanggal 20 September 2011 telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang menjadi pedoman penurunan emisi di 5 (lima) sektor utama dan rencana aksi daerah. Untuk melakukan pengukuran dan pemantauan penurunan emisi, telah diterbitkan Perpres Nomor 71 Tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Dalam rangka membantu daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), telah disusun pedoman penyusunan RAD-GRK yang diterbitkan melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Lingkungan Hidup. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi harus

menyelesaikan penyusunan RAD-GRK dalam tahun 2012 ini.

Selagai penjabaran lebih lanjut dari RAN GRK, untuk sektor kehutanan dan lahan gambut telah disusun rancangan Strategi Nasional *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+)*. Rancangan tersebut sampai dengan saat ini masih disempurnakan oleh Satuan Tugas REDD+ (yang dibentuk melalui Keppres No. 25 Tahun 2011) untuk diturunkan menjadi Rencana Aksi Nasional (RAN) REDD+. Penyelesaian Stranas REDD dilakukan oleh Satgas REDD. Untuk pelaksanaan REDD+ sedang mempersiapkan pula sembilan provinsi percontohan REDD+ dimulai dengan kegiatan *Demonstration Activities (DA) REDD+* yaitu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jawa Timur (TN Meru Retiri), Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan. Kegiatan DA REDD+ tersebut didukung pula oleh Pemerintah Australia, Jerman, Korea, *The International Tropical Timber Organization (ITTO)*, dan *The Nature Conservancy (TNC)*.

Dalam rangka mengkoordinasikan dukungan mitra internasional untuk penanganan perubahan iklim, pada tahun 2009 telah dibentuk wadah pengelolaan dana dalam *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*. Melalui ICCTF, masyarakat internasional dapat menyalurkan dana komitmen perubahan iklim untuk dimanfaatkan secara efisien dan efektif mendukung kegiatan di bidang energi; kegiatan berbasis lahan (kehutanan dan pertanian); dan adaptasi dan resiliensi terhadap perubahan iklim. Sampai dengan tahun 2011, ICCTF telah mendanai 3 (tiga) proyek percontohan yang mewakili 3 (tiga) *window* ICCTF, yaitu *energy, forestry and peatlands, adaptation and resilience*. Ketiga proyek tersebut adalah: (i) *Implementation of Energy Conservation and CO2 Emission Reduction in Industrial Sector - Phase I* (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral); (ii) *Research and Technology Development of sustainable peat land management to enhance carbon sequestration and mitigation of greenhouse gas emission* (Kementerian Pertanian); dan (iii) *Implementing a public awareness, training and education program on climate change issue for all level of societies in mitigation and adaptation* (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika).

Untuk mendukung penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta penanganan bencana, maka sistem peringatan dini cuaca, pengembangan meteorologi penerbangan dan maritim, pengembangan sistem peringatan

dini iklim dan tsunami, serta peningkatan penelitian dan pengembangan meteorologi, klimatologi dan geofisika terus ditingkatkan cakupan dan kualitasnya. Kecepatan waktu penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami saat ini telah dapat ditingkatkan menjadi di bawah 5 (lima) menit. Telah dilakukan pula percepatan penyebarluasan informasi cuaca dan gempa bumi, bekerjasama dengan media massa dan media elektronika untuk informasi cuaca dan kejadian gempa bumi segera sampai ke masyarakat. Selanjutnya terkait dengan mitigasi bencana dan pengalaman kejadian gempa bumi 8.5 SR di wilayah pantai barat daya Pulau Sumatera 11 April 2012, BNPB dan BMKG serta kementerian/lembaga terkait akan menyusun *master plan* kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini dalam rangka antisipasi gempa bumi dan tsunami.

Untuk mendukung peningkatan kualitas informasi iklim bagi pengamanan produksi beras nasional, pada tahun 2011 telah diselesaikan: (i) pemasangan peralatan pengamatan pos agroklimat sebanyak 42 lokasi di daerah sentra produksi pangan; (ii) pelaksanaan kegiatan sekolah iklim di 11 provinsi sentra pangan; dan (iii) pemberian informasi iklim bulanan kepada instansi terkait paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Langkah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2011 tentang pengamanan produksi beras nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim.

10.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2013

10.2.1 Permasalahan

Dalam peranannya pada pembangunan nasional sebagai penyedia bahan baku dan pendukung sistem kehidupan, upaya peningkatan pemanfaatan SDA dan kualitas LH terus dilakukan. Namun demikian, permasalahan terkait penurunan daya dukung dan kualitas sumber daya dan lingkungan masih tetap terjadi, seperti masih maraknya praktek pembalakan liar (*illegal logging*), meluasnya kebakaran lahan dan hutan, praktek penambangan liar, serta rusaknya wilayah laut akibat penangkapan ikan yang melanggar dan merusak (*illegal and destructive fishing*).

Sementara itu, dalam upaya untuk mendukung pembangunan ekonomi, masih terdapat beberapa permasalahan berupa belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan seperti masih kurang optimalnya usaha

pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendorong ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

Secara rinci, permasalahan pada masing-masing prioritas diuraikan sebagai berikut.

10.2.1.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Dengan semakin meningkatnya tantangan perubahan iklim, produksi bahan pangan dalam negeri perlu ditingkatkan guna memantapkan ketahanan dan kemandirian pangan dalam negeri. Peningkatan produksi dalam negeri tersebut sangat diperlukan untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan yang terus meningkat. Peningkatan produksi dalam negeri juga sangat diperlukan dengan semakin besarnya kekhawatiran penurunan pasokan dan produksi pangan global. Peningkatan kebutuhan pangan dalam negeri disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan penduduk, peningkatan daya beli, dan pergeseran pola pangan masyarakat. Selain itu, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mencapai surplus beras 10 juta ton per tahun mulai tahun 2014. Dengan demikian, peningkatan produktivitas dan luas panen komoditas pangan merupakan tantangan besar ke depan, terutama masalah: penyediaan input produksi, alih fungsi lahan pertanian, perlindungan lahan pertanian pangan, penurunan kualitas sumberdaya lahan dan air, dukungan infrastruktur, dan perubahan iklim.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat masih menjadi tantangan berat ke depan. Konsumsi pangan masyarakat masih didominasi oleh kelompok padi-padian, khususnya beras. Untuk itu, upaya penganeekaragaman konsumsi pangan dari pangan lokal perlu dipercepat. Kualitas konsumsi pangan juga didorong oleh peningkatan konsumsi hewani dan ikan yang selama ini terus meningkat. Tantangan lain adalah kualitas konsumsi pangan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, demikian pula dengan sistem mutu pangan, keamanan pangan (termasuk penanggulangan penyakit zoonosis), higienisasi, serta pengawasan terhadap penggunaan bahan berbahaya dalam produk pangan olahan. Selain itu, masalah rawan pangan dan gizi buruk juga masih perlu penanganan terus-menerus.

Tantangan berikutnya adalah masih relatif rendahnya daya saing hasil pertanian, perikanan dan kehutanan, yang sebagian besar masih merupakan produk mentah. Volume dan nilai

ekspor juga masih didominasi produk mentah. Industri pengolahan dalam negeri masih belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. Lebih lanjut, nilai tambah hasil pertanian, perikanan dan kehutanan masih terbatas pada produk budidaya. Selain itu, daya saing dan nilai tambah pertanian, perikanan dan kehutanan menghadapi kendala mutu produk yang perlu dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan dan standar konsumen. Dalam rantai perdagangan, pelaku budidaya pertanian, perikanan dan kehutanan belum memperoleh distribusi pendapatan yang adil. Ke depan, daya saing, nilai tambah, dan pemasaran pertanian, perikanan dan kehutanan masih memerlukan pengembangan dan pennebenalan. Kapasitas pelaku pertanian, perikanan dan kehutanan masih juga merupakan tantangan besar ke depan. Selain tingkat kemiskinan yang masih tinggi, sumberdaya manusia pertanian, perikanan dan kehutanan masih dicirikan oleh rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Tingkat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kapasitas kelembagaan pertanian, perikanan dan kehutanan masih perlu diperkuat, terutama untuk meningkatkan posisi tawar pelakunya. Peningkatan kapasitas ini memerlukan dukungan penuh melalui penyuluhan dan diseminasi teknologi. Selanjutnya, bidang pertanian, perikanan dan kehutanan masih menjadi tumpuan utama sebagai sumber pendapatan dan sumber lapangan kerja masyarakat. Pada tahun 2011, sekitar 39,3 juta orang atau 33,5 persen angkatan kerja nasional bekerja di sektor pertanian secara luas.

Pada tahun 2012, permasalahan yang dihadapi oleh perikanan terkait produksi adalah terjadinya *overfishing* di beberapa wilayah penangkapan perikanan (WPP) yang dilandai dengan tingkat produksi perikanan tangkap yang mendekati *Maximum Sustainable Yield* (MSY). Saat ini produksi perikanan tangkap telah mencapai 77,65 persen dari MSY (6,52 juta ton per tahun). Sehingga diperlukan pengelolaan penangkapan perikanan tangkap yang mengarah pada pemanfaatan yang berkesinambungan. Sementara itu, disparitas produksi dan kebutuhan antara wilayah barat dan timur Indonesia juga masih terjadi.

Perubahan iklim yang terjadi sejak beberapa tahun ini member dampak pada produksi perikanan nasional sehingga pasokan bahan baku untuk pengolahan/industri mengalami

gangguan. Untuk menjaga pasokan, pada beberapa waktu tertentu diperlukan tambahan pasokan yang berasal dari luar negeri (impor). Namun seringkali terjadi pula retribusi impor ke pasar-pasar tradisional sehingga menyebabkan tertekannya harga jual ikan hasil tangkapan/budidaya yang berdampak pada pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan.

Permasalahan lainnya adalah di bidang infrastruktur masih terdapat beberapa pelabuhan perikanan yang belum berfungsi secara optimal/*idle* karena belum dipatuhinya pentahapan "SIDCOM" (*survey, identification, design, construction, operation* dan *maintenance*) dalam pembangunannya. Sementara itu, masih terdapat tambak-tambak yang juga belum berfungsi secara optimal karena keterbatasan akses terhadap input produksi, sehingga peran BBI sangat diperlukan terutama dalam penyediaan benih yang berkualitas dan kontinu.

Kurangnya akses terhadap permodalan untuk mengembangkan usaha perikanan; keterbatasan akses terhadap benih/induk yang berkualitas dan tersedia secara kontinu; serta harga pakan yang fluktuatif dan cenderung terus meningkat karena mayoritas bahan bakunya yang masih harus diimpor, merupakan permasalahan lainnya yang harus diperhatikan. Di samping itu, masih diperlukan peningkatan peran penyuluh perikanan dalam hal pendampingan/transfer teknologi melalui peningkatan kapasitas SDM perikanan.

Selanjutnya, permasalahan utama bidang kebutuhan dalam meningkatkan produksi kayu adalah belum seluruh kawasan hutan produksi terkelola dalam lembaga pengelola kawasan hutan produksi (KPHP). Hal ini mengakibatkan kawasan hutan produksi tidak terkelola dengan baik dan masih terdapat kawasan hutan produksi *open access* sehingga rentan terhadap perambahan dan pencahangan liar. Hal ini juga mempersulit langkah penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran di bidang kehutanan. Minat investasi di bidang kehutanan kurang kondusif karena sering terhambat permasalahan tenurial, tumpang tindih peraturan (pusat dan daerah), serta kurangnya insentif permodalan dan perpajakan.

10.2.1.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi

Keterbatasan infrastruktur energi telah mengakibatkan terhambatnya proses distribusi energi ke seluruh wilayah nusantara sehingga mempengaruhi tingkat pelayanan, efisiensi dan keandalan sistem penyediaan dan penyaluran energi di seluruh Indonesia. Kondisi tersebut diperburuk

dengan rendahnya tingkat investasi yang disebabkan oleh besarnya resiko investasi di sektor energi. Selain itu, harga energi yang belum ekonomis, kurang tepatnya penerapan metode subsidi pada beberapa jenis energi, minimnya penguasaan teknologi dan rendahnya akses masyarakat terhadap energi menambah permasalahan dalam sektor energi.

Permasalahan lain adalah masih tingginya ketergantungan terhadap minyak bumi yang mencapai sekitar 49,7 persen dari komposisi penyediaan energi saat ini. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap minyak bumi diiringi dengan menurunnya sumber daya dan cadangan minyak bumi. Menurunnya produksi minyak mentah dalam beberapa tahun terakhir karena 90 persen kegiatan eksplorasi dilakukan pada lapangan minyak tua (*mature*). Pembukaan ladang minyak bumi yang baru terkendala oleh masih belum harmonisnya beberapa legislasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan pemprov/pemkab/pemkot. Pemanfaatan gas bumi masih terkendala oleh belum berkembangnya pembangunan infrastruktur gas bumi, disamping penerapan tarif di dalam negeri yang belum mencerminkan ongkos produksi gas. Pemanfaatan sumber energi panas bumi terkendala belum lengkapnya data geosains panas bumi yang diperlukan untuk mendukung penetapan WKP baru dan mempercepat investasi pada sektor panas bumi. Sedangkan untuk sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) dari bahan bakar nabati, kendala yang dihadapi adalah sempitnya lahan untuk melakukan budidaya tanaman sehingga produksi tanaman tidak dapat maksimal. Selain masalah lahan, EBT belum dapat dimaksimalkan dikarenakan masih tingginya biaya produksi dan pasar yang belum jelas.

Saat ini impor BBM telah mencapai 25.317 ribu KL. Ketergantungan terhadap BBM impor terutama dipengaruhi oleh terbalasnya fasilitas kilang minyak. Saat ini, hanya tersedia 10 (sepuluh) unit kilang pengolahan BBM dengan kapasitas kilang sebesar 1,16 juta BPH. Kapasitas kilang ini masih berada di bawah tingkat konsumsi BBM nasional. Distribusi gas bumi dilakukan melalui jaringan pipa transmisi yang mencapai 4,27 ribu km dan pipa distribusi yang mencapai 3,21 ribu km, namun jaringan pipa transmisi tersebut belum menjangkau semua wilayah yang membutuhkan.

Efisiensi dalam penyediaan dan pemanfaatan energi masih

tergolong rendah. Hal ini diperlihatkan dengan tingginya angka elastisitas energi sebesar 1,6 persen dan intensitas energi nasional yakni sebesar 565 TOE (*ton oil equivalent*) per USD 1 juta. Tingginya angka elastisitas dan intensitas energi ini menunjukkan bahwa pemakaian energi di Indonesia masih tidak efisien/boros dan mempengaruhi daya saing industri karena inefisiensi energi berdampak pada tingginya biaya produksi. Pemanfaatan subsidi yang tidak tepat sasaran juga menghambat konservasi energi, menghalangi diversifikasi ke jenis energi EBT seperti tenaga surya, angin, BBN dan sebagainya.

10.2.1.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

Pada sektor pertambangan, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah belum berkembangnya usaha peningkatan nilai tambah hasil pertambangan. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya sistem insentif fiskal untuk menarik masuknya investor baru dalam usaha pengolahan hasil pertambangan. Rendahnya nilai investasi tersebut diakibatkan oleh rendahnya kepastian hukum, dibandingkan negara-negara lain sudah semakin memberikan iklim yang lebih kondusif. Selain masalah fiskal, minimnya data dan informasi geologi sumber daya mineral secara lengkap dan rinci juga menghambat laju investasi di bidang pertambangan. Keterbatasan kapasitas teknologi, database dan infrastruktur daerah menjadi faktor penyebab tidak maksimalnya pengumpulan data dan informasi sumber daya geologi yang ada.

Pemanguman di bidang pertambangan dihadapkan juga pada terbatasnya jumlah dan kemampuan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan daerah dengan telah diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terbatasnya sarana dan prasarana serta dana pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan menyebabkan kegiatan eksplorasi dan pengusahaan pertambangan di daerah lebih sulit. Terbatasnya kemampuan aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan juga menimbulkan permasalahan dalam proses perijinan, pengawasan eksploitasi dan produksi, serta pengendalian dampak lingkungan.

Meningkatnya harga minyak mentah dunia membuat permintaan akan komoditas energi selain minyak bumi, terutama batubara dari luar negeri meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan permintaan dari luar negeri diikuti dengan

peningkatan produksi dan ekspor batubara. Hal ini mengakibatkan pasar batubara didalam negeri menjadi terancam. Kebutuhan batubara dalam negeri juga mengalami peningkatan terutama digunakan menjadi bahan bakar pembangkit listrik.

Selain mempunyai cadangan mineral berskala besar, Indonesia juga memiliki cadangan mineral berskala kecil dan tersebar di banyak tempat. Cadangan mineral tersebut sering tidak efisien jika diusahakan secara modern dan menggunakan teknologi canggih, tetapi masih ekonomis jika diusahakan oleh pertambangan rakyat. Namun pertambangan jenis ini sering diusahakan oleh rakyat setempat tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, keselamatan kerja maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kendala lain yang menghambat pengembangan usaha pertambangan adalah tata ruang nasional yang belum sepenuhnya mengkoordinasi wilayah pertambangan yang memiliki potensi lahan tambang. Tumpang tindih lahan antara kawasan tambang dan kawasan hutan lindung/konservasi telah menghambat pertumbuhan investasi eksplorasi tambang, dan dirasakan perlu adanya *road map* penyusunan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) sehingga konflik lahan dapat dihindari.

10.2.1.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Aktivitas yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup masih terus berlangsung, di samping terus dilakukannya upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kurangnya terpadunya program/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing institusi menyebabkan penanganan lingkungan masih bersifat sektoral dan parsial. Situasi ini menyebabkan penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak dapat terselesaikan secara tuntas, dan sering menyebabkan timbulnya konflik pada tingkat implementasinya..

Permasalahan lain yang dihadapi adalah bervariasinya pemahaman masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan sehingga kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memperbaiki kerusakan lingkungan belum memadai.

Tingginya variasi ketersediaan data dan informasi di berbagai institusi juga menjadi kendala. Tingkat akurasi data dan informasi berdampak pada tinggi atau rendahnya ketepatan

dalam monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan hidup serta penyusunan pengelolaan lingkungan pada periode berikutnya. Untuk itu, peningkatan kualitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup, kapasitas sumber daya manusia, serta sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi dengan baik masih sangat diperlukan.

Keberhasilan pembangunan juga menimbulkan kerusakan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem. Rendahnya kesadaran masyarakat dan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati yang belum terintegrasi dengan baik, merupakan kendala yang berarti untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Oleh karena itu, upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang berkelanjutan perlu didukung semua pemangku kepentingan.

Penurunan kualitas lingkungan juga telah menimbulkan timbulnya konflik antar daerah. Penanganan konflik ini terus menjadi perhatian dan prioritas dalam perencanaan pembangunan tahunan, namun masih belum ada kejelasan hak dan kewenangan tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu dan pelaksanaan dalam kegiatan yang nyata. Untuk itu, diperlukan upaya perumusan kembali peraturan-peraturan mengenai perlindungan lingkungan dan penegakan hukumnya secara detil dan konsisten; penataan ruang secara terpadu dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan pemanfaatan SDA dan LH oleh semua pihak; dan membangun mekanisme penyelesaian konflik dan mencegah kemungkinan timbulnya konflik dalam hal pemanfaatan SDA. Untuk itu, peraturan pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu segera diselesaikan.

10.2.1.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan, menghadapi permasalahan utama yaitu penetapan tata batas kawasan hutan (batas luar dan batas dalam) dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Belum selesainya tata batas dan belum beroperasinya KPH mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan kehutanan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS, rehabilitasi hutan, dan lahan dan perlindungan hutan. Tata batas yang belum selesai menyebabkan ketidakjelasan status kawasan hutan yang rentan memicu terjadinya konflik kawasan hutan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Tata batas yang belum definitif juga menghambat

persetujuan substantif untuk penyelesaian rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten. Kawasan hutan yang masih menjadi "open access" menyebabkan kawasan hutan berpotensi menjadi rentan terhadap pembukaan liar, perambahan hutan, dan okupasi kawasan hutan. Tanpa adanya pengelola hutan di tingkat tapak melalui KPH, maka kerusakan hutan sulit untuk dimonitor, ditindak/dihentikan, sehingga rehabilitasi hutan dan lahan kritis sulit untuk dipantau kemajuan dan akuntabilitasnya. Perubahan yang terus meningkat akan semakin mengganggu ekosistem kehutanan yang berdampak kepada penyelamatan tanah dan air yang berdampak lanjut kepada ketahanan pangan nasional dan kelangsungan hidup masyarakat.

10.2.1.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan untuk menjaga pemanfaatan dan fungsi laut sebagai sistem penyangga kehidupan dan memelihara kekayaan plasma nutfah. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya praktek pencurian ikan (*illegal fishing*) baik oleh kapal-kapal domestik maupun kapal-kapal asing di perairan teritorial maupun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kurangnya sarana prasarana pengawasan menyulitkan penegakan hukum dan penanganan *illegal fishing*. Dari berbagai kasus *illegal fishing* selama ini, masih dijumpai kapal berbendera asing yang menangkap ikan di wilayah perikanan Indonesia dan banyaknya kegiatan tanpa ijin dan penggunaan alat tangkap terlarang.

Permasalahan lain adalah tingginya tingkat kerusakan ekosistem pesisir dan laut yang telah mengganggu pertumbuhan dan menurunkan stok ikan, kerusakan mangrove dan terumbu karang. Kerusakan terjadi karena *destructive fishing*, pembuangan bahan berbahaya dan perusakan ekosistem yang menyebabkan menurunnya ketersediaan sumber daya plasma nutfah. Pencemaran laut di daerah pesisir dan jalur lalu lintas pelayaran yang padat serta tumpahan minyak di laut juga menyebabkan terjadinya pencemaran laut. Selain itu, abrasi pantai yang disebabkan karena degradasi mangrove yang terjadi akibat alih fungsi lahan dan penebangan, telah menurunkan habitat dan pertumbuhan stok ikan.

Permasalahan selanjutnya adalah belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil yang sebagian besar merupakan kawasan tertinggal dan kantong-kantong

kemiskinan. Sarana dan prasarana dasar di pulau-pulau kecil seperti listrik, air, alat komunikasi dan transportasi yang menghubungkan antar pulau-pulau kecil dan dengan pulau besarnya, juga masih belum memadai. Dengan tidak terkelolanya pulau-pulau kecil terutama di pulau terdepan, dapat membuat penduduknya berorientasi ke negara tetangga yang lebih maju sehingga dapat mendorong rendahnya nasionalisme mereka. Konflik pemanfaatan ruang antarsektor karena tata ruang/zonasi yang masih belum dipatuhi mengakibatkan kurang terpadunya pengelolaan di laut karena banyaknya *stake holders* dengan berbagai peraturan yang berbeda-beda. Minimnya riset teknologi kelautan dan penerapannya juga masih membatasi pemanfaatan sumber daya kelautan untuk berbagai kebutuhan, termasuk usaha mendukung ketahanan energi.

10.2.1.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Penanganan isu perubahan iklim (*climate change*) pada saat ini baru pada tahap awal. Program adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim harus dilakukan untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu, diperlukan perubahan paradigma pembangunan yang mengarah pada pembangunan rendah emisi, yang disertai dengan penyiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Dengan telah terbitnya Perpres No. 71 tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca, masalah data untuk monitoring, pelaporan, dan verifikasi emisi GRK menjadi sangat penting.

Untuk mendukung penanganan perubahan iklim dan bencana alam tersebut di atas, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas data dan penyediaan sistem informasi yang cepat, tepat dan akurat. Terkait dengan itu, upaya peningkatan teknologi instrumentasi untuk penyampaian informasi; penambahan sebaran peralatan observasi dan kalibrasi; dan pengembangan peraturan perundangan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan integrasi informasi dari aspek Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika (MKKuG), serta metoda diseminasi informasi potensi tsunami, dan produk informasi MKKuG lainnya kepada masyarakat yang lebih luas sangat diperlukan. Selanjutnya, tantangan untuk data penurunan emisi GRK dan sistem MRV-nya adalah belum adanya kesepakatan penggunaan sumber data yang akan digunakan secara nasional. Permasalahan lain adalah masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola yang sadar terhadap resiko dampak

perubahan iklim dan yang memiliki kemampuan serta kapasitas untuk penurunan emisi GRK.

10.2.2 Sasaran

Secara umum, sasaran pokok yang ingin dicapai dalam pembangunan SDA dan LH pada RKP 2013 adalah sebagai berikut: (i) meningkatnya produksi bahan pangan dalam negeri; (ii) Meningkatnya ketersediaan sumber daya energi dan pasokan energi; serta (iii) Tetap terjaganya kualitas air, udara, lahan dan hutan.

10.2.2.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Sasaran utama prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pada tahun 2013 adalah: (i) meningkatnya pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 3,9 persen, (ii) meningkatnya produksi padi sebesar 6,25 persen, jagung 8,3 persen, kedelai 18,4 persen, gula 9,2 persen, daging sapi/kerbau 9,5 persen, dan ikan 24,43 persen; (iii) Meningkatnya cadangan pangan pemerintah menjadi minimal 1 juta ton beras, serta berkembangnya cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat; (iv) Membaiknya kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan pencapaian skor PPI sebesar 91,5; (v) Meningkatnya kualitas hasil pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai mutu dan standar yang ditetapkan; (vi) meningkatnya cakupan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, serta (vii) Meningkatnya pertumbuhan kelembagaan pelaku pertanian, perikanan dan kehutanan.

Sementara itu, sasaran utama di bidang perikanan adalah: (i) meningkatnya produksi perikanan menjadi 18,49 juta ton yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 5,47 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 13,02 juta ton; (ii) meningkatnya konsumsi ikan menjadi 35,14 kg per kapita per tahun; (iii) meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan mencapai sebesar USD 4,2 miliar; (iv) meningkatnya kehidupan nelayan, terutama di 200 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) serta meningkatnya kesejahteraan nelayan/pembudidaya yang dicerminkan melalui pencapaian Indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) sekitar 112.

Sasaran utama pembangunan untuk peningkatan produksi di bidang kehutanan adalah: (i) tertatanya areal hutan produksi ke dalam unit-unit pengelolaan berupa KPHP di 18 provinsi sebesar 80 persen; (ii) meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan sebesar

masing-masing 1 persen; (iii) terbitnya IUPITIK-ITA/RE pada areal bekas tebangan (*logged over area*) seluas 650.000 ha; (v) meningkatnya luas areal pencadangan ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman sebesar 750.000 ha dan areal tanaman sebesar 600.000 ha; (vi) terpenuhinya bahan baku dari hutan tanaman dan limbah meningkat (kumulatif) sebesar 60 persen; (vii) terbangunnya hutan kemasyarakatan dan hutan desa seluas 500.000 ha; (viii) terbangunnya hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 50.000 ha; (ix) sertifikasi penyuluh kehutanan sebesar 500 orang; dan (x) terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya sebanyak 3.000 orang.

10.2.2.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan ketahanan dan kemandirian energi pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: (i) tercapainya produksi minyak bumi sebesar 910 MBOPD dan produksi gas bumi sebesar 1320 MBOEPD; (ii) meningkatnya produksi BBM 45,9 juta KL, LPG 2 juta ton, LNG 23,81 MMTPA; (iii) meningkatnya cadangan minyak bumi menjadi 7,79 miliar STB, gas bumi 159,1 TSCF; (iv) tercapainya produksi bioethanol dan biodiesel sebesar 1,6 juta KL, dan pemakaian BBN pada BBM transportasi 7,5 persen; dan (v) tercapainya pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG sebesar 79,8 persen; (vi) tercapainya penggunaan panas bumi PLTP 1.341 MW dan tenaga biomassa 15 MW.

10.2.2.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

Sasaran produksi pertambangan mineral dan batubara yang akan dicapai pada tahun 2013 adalah: (i) tercapainya produksi batubara 337 juta ton, dengan *Domestic Market Obligation* sebanyak 84 juta ton; (ii) tercapainya produksi timah sebesar 105 ribu ton; (iii) tercapainya produksi bijih nikel sebesar 11,7 juta ton, feronikel sebesar 19,4 ribu mt, dan nikel matte sebesar 87,5 ribu ton; (iv) tercapainya produksi bauksit sebesar 10,9 juta mt; (v) tercapainya produksi konsentrat tembaga sebesar 899,9 ribu ton; (vi) tercapainya produksi emas sebesar 112,1 ton dan perak sebesar 261,3 ton; dan (vii) tercapainya produksi bijih besi sebesar 4,4 juta mt.

10.2.2.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran utama perbaikan kualitas lingkungan hidup adalah meningkatnya daya dukung dan membaiknya kualitas daya tampung lingkungan hidup. Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah: (i) terkendalinya pencemaran dan pencegahan perusakan lingkungan hidup; (ii) terjaganya kelestarian SDA-

TI dan kemampuan sumber daya alam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan; serta (iii) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan yang responsif gender, menguatnya kelembagaan pengelola lingkungan hidup, karcionisnya peraturan perundang-undangan dan terlaksananya kepastian hukum, serta tersedianya data dan informasi kualitas SDA-LH sebagai dasar perencanaan pembangunan.

10.2.2.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

Untuk peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan, sasaran utama pembangunan yang akan dicapai adalah: (i) terselesaikannya tata batas kawasan hutan (batas luar dan fungsi) sepanjang 19.000 km, (ii) beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan sebanyak 30 unit, (iii) meningkatnya hasil rehabilitasi hutan dan lahan seluas 500.000 ha, dan (iv) penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di 11 DAS prioritas. Sasaran utama pembangunan lainnya adalah: (v) menurunnya konflik dan tekanan terhadap kawasan Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya (cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, hutan lindung) sebesar 1 persen, (vi) meningkatnya populasi spesies prioritas utama yang terancam punah sebesar 0,5 persen, dan (vii) menurunnya *hotspot* di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi sebesar 59,20 persen dan luas kebakaran hutan sebesar 40 persen dari rerata tahun 2005-2008.

10.2.2.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Sasaran yang akan dicapai dalam pengelolaan sumber daya kelautan adalah: (i) meningkatnya kebijakan pengelolaan kelautan secara terpadu; (ii) meningkatnya wilayah yang bebas dari *illegal fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan menjadi sebesar 41 persen; (iii) pengelolaan kawasan konservasi laut dan perairan seluas 3,6 juta hektar; (iv) terpeliharanya kerja sama internasional, regional, dan antardaerah dalam bidang pengelolaan sumber daya laut (CTI, SSME, BSSE, ATSEA, MFF, Teluk Tomini, Teluk Bone, Selat Karimata, dan lain-lain); (v) tersusunnya rencana pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di 60 lokasi; (vi) terwujudnya pengelolaan dan pengembangan potensi pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan/terluar di 60 pulau; (vi) berkembangnya usaha kelautan antara lain garam rakyat dengan produksi sebanyak 1.845 juta ton; dan (vii) meningkatnya riset pengembangan teknologi kelautan dan penerapannya untuk mendukung pembangunan kelautan.

10.2.2.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Sasaran untuk peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam adalah meningkatnya kualitas informasi iklim dan bencana alam terkait dengan keakuratan dan kemampuan jangkauan informasi ke seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan sasaran untuk peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tahun 2013 ini adalah meningkatnya pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), tersedianya status dan tingkat emisi GRK hasil inventarisasi, dan terlaksananya rencana aksi adaptasi di tingkat nasional yang meliputi beberapa sektor terkait.

10.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2013

Dengan memperhatikan permasalahan dan sasaran yang akan dicapai, maka kebijakan pembangunan SDA dan LH diarahkan untuk: (i) mendukung peningkatan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 3,9 persen, mewujudkan daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat; serta (ii) meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pembangunan perekonomian nasional, peningkatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, arah kebijakan pembangunan SDA dan LH pada tahun 2013 adalah: (i) meningkatkan produksi pangan terutama daging sapi dan ikan serta mencapai surplus produksi padi untuk memantapkan ketahanan pangan; (ii) meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan; serta (iii) meningkatkan produksi hasil tambang dan mineral serta lifting runtuq bumi untuk mendukung peningkatan ketahanan energi. Untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, arah kebijakan difokuskan pada: (i) meningkatkan peran serta masyarakat dan Pemda dalam penurunan emisi GRK serta rehabilitasi dan konservasi untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; (ii) penguatan dan peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas mitigasi bencana, terutama di daerah-daerah rawan bencana; (iii) meningkatkan kualitas informasi iklim dan cuaca untuk pertanian; (iv) meningkatkan kualitas pengendalian pencemaran dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup; serta (v) meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan. Upaya-upaya pembangunan SDA dan LH tersebut didukung dengan penerapan rencana tata ruang terutama di daerah-

10.3.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

daerah, termasuk penggunaannya sebagai dasar instrumen dalam penyelesaian konflik dan pengelolaan SDA-LH yang berkelanjutan.

Secara rinci, arah kebijakan pada masing-masing prioritas diuraikan sebagai berikut.

Pada tahun 2013, arah kebijakan peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan difokuskan pada:

3. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu komoditas pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan, terutama ditekankan pada upaya menuju surplus beras 10 juta ton per tahun mulai tahun 2014. Dalam arah kebijakan ini, penekanan akan dilakukan dalam: (i) konservasi sumber daya lahan dan air untuk pertanian, perikanan dan kehutanan; (ii) meningkatkan ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas input produksi pertanian, perikanan dan kehutanan, terutama pupuk dan benih/bibit berkualitas; (iii) merehabilitasi dan membangun jaringan irigasi pertanian dan perikanan; (iv) meningkatkan dukungan penelitian, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan; (v) meningkatkan pengendalian organisme pengganggu tanaman, kesehatan hewan/ikan, dan penguatan fungsi perkarantinaan pertanian, perikanan dan kehutanan; (vi) mendorong investasi industri pengolahan pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berbasis produk lokal terutama di pedesaan; (vii) harmonisasi peraturan perundangan di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan; (viii) meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
4. Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat akan dilakukan melalui: (i) peningkatan ketersediaan sumber pangan hewani dan ikan; (ii) memasyarakatkan pola pangan yang sehat, bergizi dan seimbang; (iii) melakukan langkah percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat; serta (iv) meningkatkan cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah, dan cadangan pangan masyarakat.

5. Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kebijakan dan strategi ini diarahkan untuk: (i) meningkatkan mutu produk pertanian, perikanan dan kehutanan, serta efisiensi produksi; (ii) mengembangkan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta industri pangan olahan berbasis pangan lokal; (iii) mengembangkan sentra usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan secara terpadu; (iv) mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan internasional yang mendukung peningkatan daya saing pertanian, perikanan dan kehutanan nasional; (v) meningkatkan pengendalian, pengawasan dan advokasi tentang mutu, keamanan, dan kehalalan produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta meningkatkan sertifikasi mutu bahan pangan sesuai dengan standar nasional Indonesia dan standar negara importir; (vi) menyempurnakan kebijakan fiskal untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri yang berbasis pangan, pertanian, perikanan dan kehutanan; (vii) mendukung penyediaan sarana dan prasarana perdagangan dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan.
6. Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kebijakan dan strategi kebijakan yang ditujukan untuk mencapai arah kebijakan tersebut adalah: (i) meningkatkan pengetahuan petani/petani hutan/nelayan/pembudidaya melalui pendidikan dan pelatihan; (ii) meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan petani/petani hutan/nelayan/pembudidaya; (iii) meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan, serta bimbingan teknologi pertanian, perikanan, dan kehutanan; (iv) mengembangkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta diseminasinya kepada petani/nelayan/petambak; (v) merumuskan kebijakan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang mendukung petani/petani hutan/nelayan/petambak; (vi) mengembangkan sistem data dan informasi pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang integratif dan mudah diakses oleh petani/nelayan/pembudidaya ikan; (vii) meningkatkan kemampuan/ keterampilan serta penguatan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan; serta (viii) memfasilitasi dan

memerong pengembangan kelembagaan pembiayaan dan asuransi bagi masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan yang terjangkau.

Dengan terbitnya Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam primer dan Lahan Gambut, maka arah kebijakan untuk peningkatan produksi di bidang kehutanan adalah perbaikan tata kelola hutan produksi melalui operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), penerapan multi sistem silvikultur dan silvikultur intensif, pemanfaatan hutan produksi berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), prioritas penanaman pada lahan kosong, serta pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan desa. Selain itu, untuk mendukung peningkatan produksi di bidang kehutanan, kebijakan akan difokuskan pula pada pengembangan penyuluhan, peningkatan pelayanan penyuluhanserta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk sumber daya manusia kehutanan.

10.3.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi

Arah kebijakan untuk menjamin dan meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi difokuskan pada tiga hal pokok, yaitu: (i) intensifikasi kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan optimasi produk energi fosil serta meningkatkan cadangan energi fosil; (ii) diversifikasi jenis energi dengan memanfaatkan EBT serta energi bersih yang dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil; dan (iii) efisiensi dan konservasi energi baik pada sisi penyediaan (*supply side management*) dan pemanfaatan (*demand side management*)

Intensifikasi ketersediaan energi akan dilakukan dengan menerapkan kebijakan pada pra kontrak kerjasama dan pelaksanaan kontrak kerjasama. Beberapa kebijakan dan strategi pada pra kontrak kerjasama yaitu: (i) mempercepat pengambilan dan pengolahan data potensi sumber daya minyak dan gas bumi melalui pengolahan data seismik 2D, terutama di daerah lepas pantai dan *remote*; (ii) meningkatkan pelayanan publik melalui pengelolaan, penyediaan serta penyebarluasan data dan informasi geologi sumber daya minyak dan gas bumi; (iii) meningkatkan daya tarik investasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi; (iv) menyiapkan dan mempromosikan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi. Sementara dari sisi pelaksanaan kontrak kerja sama, kebijakan dan strategi yang

akan digunakan adalah: (i) meminimalisasi jumlah *unplanned shutdowns*; (ii) mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi tinggi seperti *Enhanced Oil Recovery (EOR)* terutama untuk peningkatan produksi di sumbu-sumbu yang sudah tua/marginal; dan (iii) meningkatkan kualitas monitoring volume produksi minyak dan gas bumi.

Beberapa kebijakan diversifikasi energi yang akan dilakukan adalah: (i) meningkatkan persentase pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri; (ii) meningkatkan kapasitas terpasang panas bumi; dan (iii) menyempurnakan sistem subsidi BBM dan listrik. Strategi untuk meningkatkan persentase pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri antara lain: (i) meningkatkan pasokan alokasi gas bumi untuk kebutuhan pembangkit listrik, pupuk/non-pupuk, industri petrokimia, rumah tangga, dan transportasi; (ii) membangun *Small Scale LNG Receiving Terminal* guna menerima dan menyimpan pasokan/penyediaan gas pembangkit listrik, dan kilang mini LPG untuk memasok gas rumah tangga; (iii) membangun sistem jaringan distribusi gas (SPBG) untuk angkutan umum dan jaringan distribusi pipa gas kota untuk melayani rumah tangga; dan (iv) mengembangkan penggunaan bahan bakar gas untuk transportasi. Sementara itu, strategi yang akan diterapkan untuk meningkatkan kapasitas terpasang panas bumi adalah: (i) *revolving fund* terkait dengan pembangunan PLTP; (ii) peningkatan kualitas data cadangan/*reserves*; (iii) peningkatan penjelasan prosedur pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi; (iv) pelaksanaan kesepakatan mengenai PPA (*Power Purchase Agreement*); dan (v) penyelesaian konflik tumpang tindih lahan antara kawasan hutan dengan WKP panas bumi. Untuk kebijakan penyempurnaan sistem subsidi BBM dan listrik, strategi yang akan dilakukan adalah: (i) peningkatan penggunaan bahan bakar gas di sektor ketenagalistrikan, transportasi, industri, dan rumah tangga; (ii) peningkatan pembangkit listrik berbahan bakar gas, batubara, dan panas bumi; dan (iii) peningkatan bahan bakar nabati dan non nabati sebagai sumber energi.

Efisiensi dan konservasi energi dari sisi pemanfaatan dapat dilakukan melalui 2 (dua) kebijakan yaitu: (i) meningkatkan kesadaran perilaku hemat energi; dan (ii) meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Strategi untuk meningkatkan perilaku hemat energi yang digunakan adalah: (i) meningkatkan kesadaran perilaku hemat energi bagi aparat

pemerintah, badan usaha, dan masyarakat; (ii) memfasilitasi bantuan pinjaman finansial yang murah melalui bank lokal bagi pelaksanaan efisiensi energi untuk badan usaha dan masyarakat; (iii) menerapkan insentif dan disinsentif bagi sektor industri termasuk labelisasi hemat dan audit energi dalam rangka mendukung mandatori manajemen dan penghematan energi; dan (iv) memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral dalam rangka mitigasi perubahan iklim guna mendukung *green energy* dan *green growth*. Sedangkan strategi untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan adalah: (i) mengembangkan regulasi untuk mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan terutama pemberian insentif dan kebijakan harga agar dapat bersaing dengan energi konvensional; (ii) meningkatkan investasi untuk pengembangan dan pembangunan energi baru dan terbarukan; dan (iii) mengembangkan industri dan jasa pendukung.

Prioritas bidang Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi, dituangkan dalam 2 fokus prioritas, yaitu: (i) Peningkatan produksi dan cadangan minyak bumi; serta (ii) Peningkatan produktivitas pemanfaatan dan pemerataan energi.

10.3.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

Arah kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan difokuskan pada dua hal pokok yaitu: (i) Peningkatan nilai tambah potensi keekonomian, pemanfaatan bahan galian dan mineral ikutan pada daerah dan bekas daerah pertambangan; dan (ii) Optimalisasi penerapan kaidah konservasi dalam pengusahaan pertambangan baik pada tahap eksplorasi, eksploitasi dan pasca tambang.

Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan diarahkan untuk: (i) Mendorong pembangunan sarana dan prasarana pengangkutan batubara untuk keperluan pasar dalam negeri; (ii) Menjamin keamanan pasokan batubara dalam negeri melalui *Domestic Market Obligation (DMO)* terutama sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik sesuai dengan UU 30 Tahun 2007; (iii) Mengatur harga batubara di dalam negeri dengan mengacu kepada indeks harga batubara ekspor; (iv) Memberikan kepastian dan transparansi di dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai Undang-undang No. 4 Tahun 2009 dengan sanksi pelanggaran ketentuan, dll; (v) Melaksanakan peningkatan pembinaan dan

pengawasan; (vi) Mengusahakan penambahan nilai tambah hasil pertambangan dengan Mengembangkan industri pengolahan dan pemurnian (*smelter*) untuk mengubah bahan-bahan mentah mineral logam dan non logam menjadi bahan setengah jadi atau bahkan menjadi bahan final; dan (vii) Mendorong peningkatan penerimaan negara dan investasi.

Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk mengurangi dampak negatif usaha pertambangan yaitu: (i) mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pembinaan lingkungan, keselamatan operasi, dan usaha penunjang bidang migas; (ii) mencegah kerusakan cadangan mineral dan batubara serta mengembangkan wilayah pencadangan tambang nasional dengan melakukan *best mining practices* dan menerapkan mekanisme *depletisa premium*; (iii) meningkatkan rehabilitasi kawasan bekas tambang; dan (iv) mitigasi, pengembangan teknologi, dan fasilitasi dalam rangka penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis energi dan bencana geologi.

Prioritas Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan diuraikan dalam 2 (dua) fokus yaitu: (i) Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertambangan mineral dan batubara; dan (ii) Pengurangan dampak negatif akibat kegiatan pertambangan dan bencana geologi.

10.3.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Kebijakan umum dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas pengelolaan daya dukung lingkungan hidup agar kemampuannya dapat pulih kembali dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pada tahun 2013, arah kebijakan tersebut terus dilanjutkan, yang terutama difokuskan pada: (i) penurunan beban pencemaran lingkungan dan penekanan laju kerusakan SDA dan lingkungan hidup, dengan perkuatan peran aktif daerah melalui mekanisme Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK); (ii) peningkatan kerangka kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati dan rehabilitasi kawasan yang rusak (hutan, pesisir dan perairan darat); dan (iii) penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup yang responsif gender, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup. Dengan arahan ini diharapkan pola pembangunan yang dilakukan memenuhi kaidah keberlanjutan (*pro-environment*) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

rakyat yang berkelanjutan.

Secara operasional arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui strategi: (i) pengendalian dan pemantauan pencemaran air, tanah/lahan, udara, dan atmosfer; (ii) peningkatan upaya rehabilitasi serta pembangunan kawasan konservasi; (iii) penyelesaian review dokumen *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP); (iv) perbaikan kerangka regulasi dan penegakan hukum lingkungan secara konsisten; (v) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup; (vi) pengembangan penelitian lingkungan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan; (vii) peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup; dan (vi) kampanye penyadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup.

10.3.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

Kebijakan dalam peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan pada tahun 2013 tetap diarahkan pada: (i) Percepatan penyelesaian persoalan dalam pengelolaan hutan konservasi, dan (ii) Peningkatan upaya konservasi dan penyelamatan hutan konservasi serta rehabilitasi sumber daya hutan.

Percepatan penyelesaian persoalan pengelolaan hutan konservasi difokuskan pada percepatan pengukuhan dan pemantapan kawasan hutan, percepatan beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan penyediaan sumber daya manusia pengelola KPH yang profesional, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi potensi sumber daya hutan. Pemantapan kawasan hutan melalui penyelesaian tata batas kawasan hutan akan menurunkan konflik kawasan hutan terutama dengan masyarakat sekitar hutan. Operasionalisasi KPH akan mengurangi perambahan dan penebangan liar, dan meningkatkan pengelolaan hutan di tingkat tapak secara lestari. Ketersediaan data dan informasi potensi sumber daya hutan yang akurat akan mendukung pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang lestari.

Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan difokuskan pada peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan, peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan. Peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan

akan dilakukan melalui pengembangan dan pengelolaan Taman Nasional dan kawasan konservasi sumber daya alam lainnya (suaka margasatwa, cagar alam, taman buru, dan hutan lindung). Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS utamanya akan dilakukan melalui penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan serta pengelolaan DAS. Sementara itu, pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan iptek akan didukung melalui hasil penelitian dan pengembangan iptek sektor kehutanan.

10.3.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mendukung pembangunan dan memfungsikan laut sebagai penyedia pangan dunia. Sehubungan dengan itu, arah kebijakan yang akan dilakukan meliputi: (i) peningkatan rehabilitasi, konservasi, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan; (ii) peningkatan pendayagunaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta tata kelola sumber daya kelautan; dan (iii) pengembangan iptek kelautan. Pada tahun 2013 masing-masing arah kebijakan akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

Arah kebijakan peningkatan rehabilitasi, konservasi, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan melalui upaya: (i) peningkatan aktivitas sistem pengendalian dan pengawasan terpadu dalam penanganan *illegal fishing* dan kegiatan-kegiatan yang merusak ekosistem; (ii) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; (iii) peningkatan konservasi, rehabilitasi ekosistem pesisir, khususnya penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan; serta (iv) peningkatan kerja sama internasional, regional, dan antar daerah dalam bidang konservasi dan rehabilitasi kawasan pesisir, terutama di wilayah segitiga terumbu karang (*coral triangle*).

Arah kebijakan peningkatan pendayagunaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta tata kelola sumber daya kelautan akan difokuskan pada: (i) penetapan kebijakan pembangunan kelautan dan negara kepulauan melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan secara terpadu di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (ii) identifikasi potensi sumber daya dan kebutuhan masyarakat di pulau-pulau kecil, serta pengembangan investasi di pulau-pulau kecil

dan pulau-pulau terdepan bekerja sama dengan swasta; (iii) penyusunan Rencana Tata Ruang/Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (iv) pengembangan produk kelautan, terutama garam, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan secara bertahap menurunkan ketergantungan terhadap garam impor; (v) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat di wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam; serta (vi) peningkatan kerja sama pengelolaan sumber daya kelautan antar daerah, baik di kawasan ASEAN, maupun lingkup internasional.

Arah kebijakan pengembangan iptek kelautan dilakukan untuk meningkatkan sumbangan sumber daya kelautan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu, arah kebijakannya difokuskan pada: (i) peningkatan kuantitas dan kualitas riset dan pengembangan teknologi kelautan; (ii) peningkatan penerapan dan diseminasi hasil-hasil riset teknologi kelautan terutama dikaitkan dengan perubahan iklim; serta (iii) peningkatan sarana dan prasarana pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

10.3.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Pada tahun 2013, kebijakan umum dalam upaya peningkatan kualitas dan kecepatan penyampaian informasi iklim, cuaca dan bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas penanganan dampak perubahan iklim dan pengelolaan resiko bencana alam secara cepat, tepat dan akurat. Perhatian terutama ditujukan untuk wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim.

Selanjutnya, kebijakan dan strategi dalam peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam diarahkan untuk: (i) peningkatan akurasi, kecepatan, dan jangkauan penyampaian informasi dengan menambah dan membangun jaringan observasi, telekomunikasi dan sistem kalibrasi; (ii) pendirian Pusat Basis Data dan informasi yang terintegrasi; dan (iii) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sistem informasi. Di samping itu, dalam upaya penguasaan dan pengelolaan resiko bencana, terutama diarahkan pada: upaya pengintegrasian pengurangan resiko bencana; peningkatan kemampuan tanggap darurat; dan percepatan pemulihan di wilayah pasca bencana.

Sementara, beberapa kebijakan dan strategi dalam peningkatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim diarahkan untuk: (i) internalisasi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di seluruh sektor dan daerah; (ii) inventarisasi gas rumah kaca dan pemantauan perubahan iklim; (iii) penyusunan peta kerentanan wilayah Indonesia terhadap dampak perubahan iklim; (iv) peningkatan pemahaman dan kapasitas dalam penanganan perubahan iklim; (v) penyusunan instrumen kebijakan tentang perubahan iklim; dan (vi) pengembangan penelitian dan inovasi teknologi untuk penurunan gas rumah kaca.

BAB 11 SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL

11.1 Kondisi Umum

Manajemen pembangunan yang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pengawasan dan pemantauan), serta evaluasi kinerja merupakan satu sistem yang saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya membutuhkan sistem pendukung manajemen yang baik, antara lain terkait dengan perencanaan pembangunan, ketersediaan data dan informasi statistik, serta pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Perencanaan pembangunan mempunyai posisi strategis dalam memberikan arahan yang jelas dan terukur bagi proses pembangunan melalui pilihan prioritas dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya. Di sini upaya penguatan bidang perencanaan pembangunan nasional menjadi hal sangat penting.

Upaya penguatan perencanaan pembangunan nasional yang telah dilakukan antara lain dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan fokus utama pada penguatan proses dan penajaman perumusan rencana pembangunan dalam musyawarah perencanaan pembangunan, baik pada tingkat daerah (kabupaten/kota dan provinsi) maupun nasional termasuk penguatan hubungan kelembagaan perencanaan dan keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta peningkatan kapasitas para perencana pembangunan di daerah dan kementerian/lembaga.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional yang (i) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (ii) mendorong terciptanya *integrasi, sinkronisasi dan sinergi* antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (iv) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (v) menuju tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan di Indonesia ditujukan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Dokumen rencana

pembangunan tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Upaya penguatan perencanaan pembangunan senantiasa dilakukan dan sejak tahun 2009 oleh Kementerian PPN/Bappenas, dilakukan persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode tahun 2010—2014. Upaya peningkatan kualitas penyusunan RPJMN yang sudah dilakukan pada tahun 2009, antara lain, meliputi penajaman dalam perumusan rencana pembangunan jangka menengah serta penguatan proses perencanaan melalui peningkatan kualitas keterlibatan para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya penguatan hubungan kementerian-perencanaan. Upaya-upaya tersebut tercermin dari berbagai kegiatan dan keterlibatan Kementerian PPN/Bappenas dalam berbagai proses pembangunan nasional.

Kegiatan-kegiatan dalam penajaman perumusan rencana pembangunan, antara lain, meliputi (i) identifikasi awal visi dan misi presiden terpilih yang selanjutnya dituangkan dalam RPJMN periode 2010—2014; (ii) penyusunan RPJMN Tahun 2010—2014; (iii) pengembangan proses *bottom up* dan *top down* yang melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah; (iv) berbagai kajian substantif yang berkaitan dengan bidang ke depannya di Kementerian PPN/Bappenas yang berupa *background study* sesuai bidang masing-masing kedeputian; (v) forum koordinasi yang secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan dan yang dimintakan pendapat serta masukan untuk bahan penyusunan RPJMN 2010—2014.

Beberapa hasil strategis yang dicapai dalam perencanaan pembangunan sejak tahun 2009 adalah evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004—2009, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, RPJPN Tahun 2005-2025 (Undang-undang Nomor 17 tahun 2007), RPJMN 2010-2014 (Perpres No. 5 Tahun 2010), RKP Tahun 2010 (Perpres No. 21 Tahun 2009), RKP Tahun 2011 (Perpres No. 29 Tahun 2010), dan RKP Tahun 2012 (Perpres No. 29 Tahun 2011). Dalam penyusunan RKP dan RPJM, Kementerian PPN/Bappenas melakukan rapat-rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik tingkat pusat maupun nasional (musrenbangnas) yang sebelumnya telah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat

provinsi, kabupaten bahkan sampai ke desa.

Dalam rangka meletakkan landasan implementasi anggaran berbasis kinerja, *unified budget* dan kerangka pengeluaran jangka menengah yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran RPJMN 2010—2014 dan Restra-K/L 2010—2014, RKP 2011, Renja-K/L 2011 dan RKA K/L 2011, telah dilakukan restrukturisasi program dan kegiatan dan anggaran kementerian dan lembaga yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di samping itu, di dalam penyusunan RPJMN 2010—2014 dan RKP 2012 telah diperkuat implementasi dari prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Hal ini tercermin pada hal-hal berikut.

1. Penyempurnaan indikator dan keluaran pada masing-masing program dan kegiatan,
2. Penguatan akuntabilitas program dan kegiatan dengan pencantuman pelaksana dari masing-masing program dan kegiatan,
3. Penerapan *pagu baseline* dari program dan kegiatan yang merupakan upaya agar perencanaan yang disusun merupakan rencana kerja yang dapat diimplementasikan dan terukur.

Selain itu, dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan terkait isu prioritas nasional dan sinergitas antar daerah, antarruang dan antarwaktu, Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2012 telah aktif turut mengawasi berbagai kebijakan pembangunan nasional antara lain langkah-langkah Pelaksanaan RAN/RAD Gas dan Rumah Kaca, RAN/RAD MDGs, koordinasi *Millennium Challenge Cooperation (MCC)*, perencanaan MP3EI, isu-isu *national connectivity*, serta berbagai kebijakan pembangunan nasional lainnya.

Penyusunan perencanaan pembangunan nasional menggunakan data dan informasi statistik sebagai rujukan, baik untuk perumusan kebijakan, pemantauan, maupun untuk evaluasi pencapaian pembangunan. Demikian juga dengan penyusunan perencanaan pembangunan daerah provinsi, dan kabupaten/kota. Data dan informasi statistik ini juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat serta

akademisi guna memenuhi kebutuhan untuk pengembangan usaha maupun beragam kebutuhan lainnya. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (*faster*), lebih murah (*cheaper*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan yang terpenting adalah yang lebih berkualitas (*better*). Untuk itu Pemerintah terus berupaya agar data dan informasi statistik tersedia dalam kualitas yang baik dan keragaman data yang memadai.

Untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik, diupayakan berbagai peningkatan terhadap jenis, ragam, serta kualitas data dan informasi statistik. Selain itu, pengembangan metodologi dan sistem informasi juga terus ditingkatkan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern. Jaringan informasi selalu ditingkatkan agar tuntutan akan kebutuhan data yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diperoleh dapat terpenuhi.

Sejalan dengan keinginan untuk menyediakan data dan informasi statistik yang lebih baik, maka pembangunan bidang statistik terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan data yang berkesinambungan. Kegiatan-kegiatan rutin terus dilaksanakan setiap tahunnya seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Survei Upah, Survei Industri Besar dan Sedang, Survei Pertambangan, Energi dan Konstruksi, Survei Harga Konsumen, Survei Harga Perdagangan Besar, Survei Transportasi, Survei Bidang Jasa dan Pariwisata, Penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan lain sebagainya. Demikian juga untuk kegiatan kompilasi statistik, seperti kegiatan kompilasi data statistik ekspor dan impor.

Pada tahun 2011 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendataan yang bersifat *ad hoc* seperti Survei Kehidupan Bernegara (SKB) dan Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK). SKB menyajikan data dan informasi tentang pemahaman masyarakat terhadap pentingnya 4 (empat) pilar kehidupan bernegara (Pancasila, UUD1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika), serta pendapat masyarakat tentang cara yang paling tepat dan efektif agar masyarakat Indonesia dapat memahami dan menjalankan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun kegiatan PSPK menghasilkan *output* data populasi dasar, komposisi, posisi

stok, dan *database* ternak sapi dan kerbau di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, kegiatan statistik rutin dengan periode ulangan lebih dari satu tahun yang dilakukan meliputi Pendataan Potensi Desa (Podes) dan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Podes menyajikan statistik wilayah kecil yang diharapkan dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan wilayah yang bertumpu pada kondisi lokal, sedangkan PPLS menghasilkan *database* kemiskinan mikro/rumah tangga sasaran penerima program bantuan dan perlindungan sosial. Selain dua kegiatan tersebut, pada tahun 2011 juga telah diselenggarakan kegiatan uji coba untuk persiapan kegiatan statistik rutin dengan periode ulangan lebih dari satu tahun, yaitu Uji Coba Sensus Pertanian (SP) 2013 dan Uji Coba Survei Biaya Hidup (SBH) 2012. Keduanya menghasilkan *draft instrument* yang akan digunakan pada pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan data inflasi dengan cakupan komoditi yang lebih banyak, pada tahun 2012 diselenggarakan dua kegiatan statistik dengan skala cukup besar, yaitu Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 dan Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (NTP). SBH bertujuan memperoleh diagram timbang yang baru serta memperluas cakupan penghitungan Indeks Harga Konsumen, sehingga diperoleh angka tingkat inflasi yang lebih akurat, yang dilaksanakan pada 88 kota. Adapun Penyempurnaan Diagram NTP bertujuan memperbaharui diagram timbang NTP.

Disamping itu, pada tahun 2012 dilaksanakan serangkaian survei untuk penyempurnaan data statistik produksi dan konsumsi beras serta Survei Sektor Informal. Yang pertama terdiri atas tiga aktivitas, yaitu Sensus Perusahaan Penggilingan Padi yang bertujuan untuk mengetahui jumlah dan keberadaan perusahaan penggilingan padi beserta karakteristiknya dengan referensi waktu satu tahun; Survei Konversi Gabah ke Beras yang bertujuan untuk memperoleh besaran angka konversi gabah ke beras dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; Survei Konsumsi Beras yang bertujuan untuk memperkirakan volume dan tingkat konsumsi beras yang diolah oleh bukan rumah tangga. Kegiatan-kegiatan ini sangat dibutuhkan terkait dengan penyediaan data dan informasi guna mendukung program ketahanan pangan yang

dicanangkan Pemerintah.

Guna memenuhi kebutuhan akan data ketenagakerjaan di Indonesia, tahun 2012 dilaksanakan Survei Sektor Informal. Survei ini ditujukan untuk mendapatkan data keadaan ketenagakerjaan yang bekerja di sektor informal serta memperbaiki penghitungan kontribusi sektor informal terhadap lapangan kerja.

Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RPJMN-2010-2014, diperlukan sistem pengadaan barang/jasa yang cukup memadai. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan prioritas untuk menyempurnakan dan memperkuat peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa melalui penerbitan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Keppres No. 80 Tahun 2003, serta menyusun R.L. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut terbinya Perpres No. 54 Tahun 2010, LKPP telah menyusun pedoman/petunjuk teknis sebanyak 9 dokumen pada tahun 2011. LKPP juga telah menerbitkan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebanyak 24 dokumen, Standar Dokumen Pengadaan Elektronik (*SDU e-Procurement*) sebanyak 8 dokumen serta 1 dokumen penyusunan *e-catalogue* kendaraan roda empat. Selain berbagai pedoman/petunjuk teknis tersebut, LKPP juga telah menyusun Pedoman Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan 5 dokumen Perka LKPP yang terdiri dari: (i) Pedoman Penutupan Kontrak, (ii) Pedoman Addendum Kontrak, (iii) Pedoman *National Competitive Bidding*, (iv) Pedoman Penyusunan Harga, dan (v) Pedoman Harga Perkiraan Sendiri (JTPS).

Upaya meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam bidang pengadaan barang/jasa telah dilakukan melalui penyusunan standar kompetensi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada tahun 2011, LKPP telah menyusun standar kompetensi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 49 unit kompetensi pengadaan yang terdiri dari: 4 unit kompetensi umum, 10 unit kompetensi perencanaan, 16 unit kompetensi pemilihan penyedia, 17 unit kompetensi manajemen kontrak, 2 unit kompetensi manajemen asset, serta 2 unit kompetensi khusus (ahli hukum kontrak dan auditor pengadaan PBJP). Standar kompetensi tersebut dijadikan acuan dalam pelaksanaan ujian sertifikasi pengadaan. Sampai dengan November 2011, sebanyak 174.294 orang telah lulus ujian dan dinyatakan sebagai ahli

pengadaan barang/jasa Pemerintah.

SDM pengadaan barang/jasa yang profesional dan bermartabat tentunya membutuhkan pengakuan profesi dan jejaring karir yang jelas. Untuk itu, pada tahun 2011, LKPP melalui koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB serta BKN mulai merintis pembentukan jabatan fungsional di bidang pengadaan. Diharapkan pada tahun 2012 jabatan fungsional pengadaan tersebut dapat ditetapkan.

Peningkatan penggunaan teknologi dalam proses pengadaan barang dan jasa telah dilakukan melalui pengembangan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*). Dengan *e-procurement* maka penyelenggaraan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat lebih transparan, efektif, terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif. Dalam mewujudkan hal tersebut, LKPP memfasilitasi pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hingga akhir Januari 2012, telah terbentuk 353 LPSE yang terdiri dari 36 instansi pemerintah pusat, 32 provinsi, 251 kabupaten/kota, serta 34 instansi lainnya (PTN/RS/BUMN). Dampak makro penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa adalah terjadinya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Rata-rata penghematan anggaran dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2011 melalui *e-procurement* adalah sebesar 12 persen atau sebesar Rp 4,4 triliun.

Sebagai upaya perbaikan sistem pengawasan dalam rangka pemberantasan korupsi serta penanganan permasalahan hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, pada tahun 2011, telah ditetapkan Perka LKPP No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Orang Dalam (*Whistleblower*) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, SOP Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Orang Dalam (*Whistleblower*) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Aplikasi Sistem Elektronik *Whistleblower* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

11.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan

Permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia semakin kompleks dari waktu ke waktu. Oleh karenanya dibutuhkan peningkatan kualitas rencana pembangunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. RKP Tahun 2013 merupakan tahun ke empat dalam kerangka RPJMN 2010-2014, yang memuat evaluasi paruh waktu atas

RPJMN 2010-2014 dan diharapkan dapat memberikan gambaran bagi persiapan penyusunan RPJMN 2015-2019.

Penekanan pada penajaman evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang antara lain memuat permasalahan dan tantangan perencanaan pembangunan nasional seperti integrasi, sinkronisasi, dan sinergi atas berbagai isu pembangunan dan prioritas nasional menjadi penting dilakukan pada tahun 2013. Tidak hanya itu penajaman evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan memuat pula penanganan isu strategis pembangunan dan prioritas nasional dalam kerangka tinjauan antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah dan pemerintah daerah. Di mana di dalamnya terdapat: (i) koordinasi antarpelaku pembangunan; (ii) keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi; (iii) penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; serta (iv) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Sasaran perencanaan pembangunan di tahun 2013 adalah untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan yang dilihat dari: (i) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; (ii) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; (iii) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta (iv) adanya integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Retja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPMD/RKPD/ Renstra SKPD).

Dalam hal meningkatkan penyediaan data dan informasi statistik, pada tahun 2011 permasalahan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran responden di Indonesia dalam memberikan informasi dengan benar, khususnya terkait dengan survei pada perusahaan. Di sisi lain kebutuhan akan data dan informasi statistik dalam cakupan wilayah yang lebih kecil, seperti data susenas dan sakernas dengan cakupan wilayah kecamatan, PDRB kab/kota dari sisi produksi dan sisi pengeluaran, peningkatan cakupan komoditi dan cakupan

kota perhitungan inflasi semakin meningkat.

Adapun sasaran pembangunan bidang statistik untuk tahun 2013 meliputi:

1. Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro, statistik sosial, dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu;
2. Peningkatan hubungan dengan pengguna data;
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik; dan
4. Peningkatan Kualitas Pengolahan Data dan Informasi Statistik

Dalam hal pengadaan barang/jasa, permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah adalah belum adanya pengaturan/regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi, kekuatan memaksa yang lebih kuat, maupun *legal standing* yang lebih kuat terhadap peraturan perundangan lainnya yang terkait.

Selain itu, permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya kompetensi aparatur dalam mengelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini ditandai dengan masih tingginya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh aparat dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan juga masih tersendalnya proses pengadaan barang/jasa yang berakibat pada rendahnya realisasi fisik maupun keuangan.

Rendahnya kompetensi menimbulkan masalah lain yang menonjol, yaitu masih banyaknya kasus-kasus korupsi terkait proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditemukan dan ditangani oleh KPK dan KPPU. Kasus korupsi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah mencakup sekitar 44 persen dari seluruh kasus yang ditangani kedua lembaga tersebut.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, sasaran yang akan dicapai dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2013 adalah:

1. Peningkatan kelembagaan/regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Pengembangan sistem monitoring, evaluasi, dan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Peningkatan pelayanan penanganan pengaduan dan

permasalahan hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

11.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

11.3.1 Perkuatan Perencanaan dan Pengembangan

Arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, untuk jangka menengah maupun tahunan. Arah kebijakan tersebut dapat dicapai antara lain melalui:

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
2. Penerapan seutuhnya perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja (*performance based budgeting*);
3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan;
4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan; dan
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Peningkatan kualitas proses perencanaan pembangunan diharapkan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, dalam artian lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun; terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan tersebut harus terkait dengan fungsi sistem manajemen pembangunan lainnya yaitu: sistem penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan bahkan pengawasannya. Keterkaitan ini sangat penting agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, akuntabel dan berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

11.3.2 Perkuatan Data dan Informasi Statistik

Strategi dalam rangka menghasilkan rencana pembangunan yang semakin baik kualitasnya adalah dengan mengkoordinasikan para pelaku pembangunan, termasuk dengan pihak swasta; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan melakukan berbagai upaya untuk (i) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarlungsir pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; (ii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan (iii) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Strategi perencanaan pembangunan diarahkan agar mampu menjawab berbagai permasalahan melalui (i) evaluasi secara terus-menerus terhadap peraturan perundangan dan kebijakan sistem manajemen pembangunan sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan pembangunan nasional; (ii) peningkatan kapasitas SDM perencana juga akan dilakukan melalui pendidikan gelar tingkat pasca sarjana Strata 2 dan 3 untuk para perencana di berbagai instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta melalui pendidikan dan pelatihan non-gelar terkait perencanaan pembangunan dan kesempatan untuk mengikuti magang (internship) di instansi perencanaan lainnya; dan (iii) peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah untuk menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait permasalahan lingkungan hidup, pemanfaatan sumberdaya alam, penggolongan kemiskinan secara terpadu dan komprehensif.

Pencapaian sasaran pembangunan di tahun 2013 akan dilakukan terutama dengan peningkatan kualitas belanja pemerintah melalui perbaikan pengalokasian anggaran pada prioritas pembangunan, peningkatan efisiensi belanja kementerian dan lembaga, perbaikan sinergi atas belanja pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.

Beberapa langkah kebijakan strategis yang diperlukan pada tahun 2013 dan seterusnya, antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun dan menyempurnakan draft Manual Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan perkuatan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*)

ataupun dokumen lain yang terkait,

2. Meningkatkan koordinasi dalam rangka integrasi, sinkronisasi, dan sinergi rencana pembangunan, baik antardarah, antarmang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah (Dalam rangka sinergi antara pusat dan daerah, pada tahun 2013 tetap dilanjutkan pemberian dana dekonsentrasi perencanaan pembangunan nasional yang memuat antara lain peningkatan kualitas musrenbangnas).
3. Menyusun evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional dua tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 sebagai bahan penyusunan RPJMN 2015-2019.
4. Melakukan kajian sebagai *background study* dalam penyusunan kerangka kebijakan RPJMN 2015-2019.

Arah kebijakan bidang statistik yang ditetapkan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Mereview Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik berikut peraturan perundang-undangan pelaksanaannya dalam upaya meningkatkan *response rate* dan kesadaran masyarakat akan pentingnya data statistik.
2. Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan kemutakhiran.
3. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik.
4. Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statistik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas data statistik yang dihasilkan, maka penyerahan dan pelayanan informasi statistik di berbagai tingkat perlu dilanjutkan. Fokus peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik pada tahun 2013 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan keragaman data dan informasi statistik ekonomi, antara lain melalui kegiatan Survei Industri Besar/Sedang, Sensus Pertanian 2013 (ST 2013), penyajian diagram timbang hasil SBH 2012, Penyajian hasil penyempurnaan diagram timbang NTP 2012, Penyusunan PDB dan PDRB, dan Survei Sektor Informal. Penyelenggaraan Sensus Pertanian ditujukan untuk mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan

akurat supaya diperoleh gambaran yang jelas tentang beragam usaha pertanian di Indonesia. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperoleh berbagai informasi tentang populasi rumah tangga pertanian, rumah tangga petani gurem, jumlah pohon dan ternak, serta distribusi penguasaan dan pengusahaan lahan.

2. Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat, antara lain melalui kegiatan SUSENAS, SAKERNAS, Survei Upah dan Struktur Upah.
3. Meningkatkan manajemen survei, antara lain melalui kegiatan perbaikan *response rate*, dan perbaikan metoda pengumpulan data dan *monitoring/* pemantauan.
4. Meningkatkan metodologi sensus dan survei melalui kegiatan antara lain dengan perbaikan kerangka sampel bagi survei berbasis rumah tangga maupun perusahaan/usaha, perbaikan peta wilayah kerja statistik dan wilayah administrasi (desa/kelurahan) untuk keperluan pengumpulan serta penyajian data dan informasi statistik, penyempurnaan klasifikasi dan standarisasi statistik untuk keperluan pengumpulan, penyajian, dan analisis statistik, menerapkan desain sensus dan survei yang optimal.
5. Meningkatkan dan mengemban analisis statistik, antara lain melalui kegiatan peningkatan kualitas analisis statistik lintas sektor, peningkatan konsistensi statistik lintas sektor, dan pembangunan sistem manajemen kualitas total.
6. Meningkatkan hubungan dengan pengguna data, antara lain melalui kegiatan peningkatan kepuasan pelanggan, kemitraan dengan penyedia data, serta komunikasi antara pengguna data dengan penyedia data.
7. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik, antara lain melalui kegiatan perbaikan kemudahan akses terhadap data, perbaikan kualitas layanan dan hasil-hasil (data dan informasi statistik) serta peningkatan penggunaan Sistem Rujukan Statistik dan kompilasi metadata.

11.3.3 Perkuatan Pengadaan Barang dan Jasa

Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan guna mewujudkan sasaran pembangunan di bidang pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2013 adalah:

1. Percepatan penyelesaian RUU Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Pemerintah pendukungnya, melalui pembahasan dan harmonisasi secara intensif di

- lingkungan internal dan eksternal IKPP.
2. Implementasi jabatan fungsional pengadaan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi lainnya.
 3. Melaksanakan pengadaan barang/jasa secara lebih terintegrasi/terpadu melalui pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi lainnya.
 4. Standardisasi LPSK serta pembinaan pengelolaan LPSK.
 5. Memperkuat perencanaan pengadaan serta implementasi sistem monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara *online*.
 6. Pelaksanaan bitubing teknis dan advokasi permasalahan hukum terkait pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemberian bantuan, nasihat, pendapat hukum, kesaksian ahli, serta rekomendasi penyelesaian sengketa dan sengketa banding.
 7. Pelayanan penanganan pengaduan melalui implementasi *whistleblower system* pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bidang: Lulus Bidang Penanggulangan Kemiskinan

No	Program/Tabung, Fasilitas/Kontribusi	Indikator	Kerangka Kerja 2012	Indikator Kinerja Utama 2012	Tercapai/Realisasi			Tercapai/Realisasi 2012	Tercapai/Realisasi	Tercapai/Realisasi	Tercapai/Realisasi	Tercapai/Realisasi
					2012	2013	2014					
1	Program Tabung, Fasilitas/Kontribusi	Indikator Kinerja Utama 2012	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kemiskinan
2	Program Tabung, Fasilitas/Kontribusi	Indikator Kinerja Utama 2012	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kemiskinan
3	Program Tabung, Fasilitas/Kontribusi	Indikator Kinerja Utama 2012	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kemiskinan
4	Program Tabung, Fasilitas/Kontribusi	Indikator Kinerja Utama 2012	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kemiskinan
5	Program Tabung, Fasilitas/Kontribusi	Indikator Kinerja Utama 2012	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kemiskinan
6	Program Tabung, Fasilitas/Kontribusi	Indikator Kinerja Utama 2012	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kemiskinan
7	Program Tabung, Fasilitas/Kontribusi	Indikator Kinerja Utama 2012	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kemiskinan
8	Program Tabung, Fasilitas/Kontribusi	Indikator Kinerja Utama 2012	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kemiskinan

DIKEMAS

Bidang: Iritus Bidang Pengembangan Kemitraan

No.	Proses/Tabung/Profilis/Konduktor/Prizma	Indikator	Kerangka 2012	Indikator 2013	Kerangka 2014	Nilai/Target			Tingkat Keberhasilan	Indikator
						2012	2013	2014		
1	Indikator: Jumlah Kegiatan	Indikator: Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, organisasi, lembaga, dan individu lain yang berkaitan dengan kegiatan	10.000	10.000	10.000	100%	100%	100%	100%	Kemampuan
2	Indikator: Jumlah Kegiatan	Indikator: Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, organisasi, lembaga, dan individu lain yang berkaitan dengan kegiatan	10.000	10.000	10.000	100%	100%	100%	100%	Kemampuan
3	Indikator: Jumlah Kegiatan	Indikator: Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, organisasi, lembaga, dan individu lain yang berkaitan dengan kegiatan	10.000	10.000	10.000	100%	100%	100%	100%	Kemampuan
4	Indikator: Jumlah Kegiatan	Indikator: Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, organisasi, lembaga, dan individu lain yang berkaitan dengan kegiatan	10.000	10.000	10.000	100%	100%	100%	100%	Kemampuan
5	Indikator: Jumlah Kegiatan	Indikator: Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, organisasi, lembaga, dan individu lain yang berkaitan dengan kegiatan	10.000	10.000	10.000	100%	100%	100%	100%	Kemampuan
6	Indikator: Jumlah Kegiatan	Indikator: Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, organisasi, lembaga, dan individu lain yang berkaitan dengan kegiatan	10.000	10.000	10.000	100%	100%	100%	100%	Kemampuan
7	Indikator: Jumlah Kegiatan	Indikator: Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, organisasi, lembaga, dan individu lain yang berkaitan dengan kegiatan	10.000	10.000	10.000	100%	100%	100%	100%	Kemampuan
8	Indikator: Jumlah Kegiatan	Indikator: Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, organisasi, lembaga, dan individu lain yang berkaitan dengan kegiatan	10.000	10.000	10.000	100%	100%	100%	100%	Kemampuan
9	Indikator: Jumlah Kegiatan	Indikator: Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, organisasi, lembaga, dan individu lain yang berkaitan dengan kegiatan	10.000	10.000	10.000	100%	100%	100%	100%	Kemampuan
10	Indikator: Jumlah Kegiatan	Indikator: Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, organisasi, lembaga, dan individu lain yang berkaitan dengan kegiatan	10.000	10.000	10.000	100%	100%	100%	100%	Kemampuan

EMA 4

Bidang: Lintas Bidang Peningkatan Kemampuan

No.	Program/Unit/Instansi/Kategori/Prinsip	Indikator	Kerangka Kerja 2012	Indikator Kinerja Utama 2012	Tercapai/Realisasi			Tercapai/Realisasi	Tingkat Pencapaian	Tipe Kegiatan
					2012	2013	2014			
22	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	1. Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan selesai 2. Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan selesai 3. Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan selesai	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	100%	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
23	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	1. Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan selesai 2. Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan selesai 3. Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan selesai	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	100%	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
24	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	1. Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan selesai 2. Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan selesai 3. Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan selesai	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	100%	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
25	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	1. Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan selesai 2. Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan selesai 3. Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan selesai	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	100%	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
26	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	1. Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan selesai 2. Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan selesai 3. Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan selesai	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	100%	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

11/11/12

Bidang: Litmus Bidang Pengembangan Kemitraan

No	Pencapaian, Peningkatan, dan Peluang	Indikator	Kerangka 2012	Indikator 2013	Nilai Mula			Tercapai	Tingkat	Indikator
					2012	2013	2014			
1	Peningkatan dan Penguatan Proses Kerja	1. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan 2. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan 3. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2	Peningkatan dan Penguatan Proses Kerja	1. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan 2. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan 3. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
3	Peningkatan dan Penguatan Proses Kerja	1. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan 2. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan 3. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
4	Peningkatan dan Penguatan Proses Kerja	1. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan 2. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan 3. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
5	Peningkatan dan Penguatan Proses Kerja	1. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan 2. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan 3. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
6	Peningkatan dan Penguatan Proses Kerja	1. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan 2. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan 3. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
7	Peningkatan dan Penguatan Proses Kerja	1. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan 2. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan 3. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
8	Peningkatan dan Penguatan Proses Kerja	1. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan 2. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan 3. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
9	Peningkatan dan Penguatan Proses Kerja	1. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan 2. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan 3. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
10	Peningkatan dan Penguatan Proses Kerja	1. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan 2. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan 3. Jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

LAMA 8

Bidang: Literasi, Rihang, Pengembangan Kemampuan

No.	Pencapaian, Peningkatan dan Pelajaran	Indikator	Kerangka Kerja 2012	Indikator Kinerja Utama 2012	Tipe	Tingkat	Indikator Kinerja Utama 2013	Tipe	Tingkat
1.	Peningkatan literasi dan kemampuan komunikasi melalui pelatihan dan pendampingan	Peningkatan literasi dan kemampuan komunikasi melalui pelatihan dan pendampingan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.	Peningkatan kemampuan komunikasi melalui pelatihan dan pendampingan	Peningkatan kemampuan komunikasi melalui pelatihan dan pendampingan	500	500	500	500	500	500	500
3.	Peningkatan kemampuan komunikasi melalui pelatihan dan pendampingan	Peningkatan kemampuan komunikasi melalui pelatihan dan pendampingan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Peningkatan kemampuan komunikasi melalui pelatihan dan pendampingan	Peningkatan kemampuan komunikasi melalui pelatihan dan pendampingan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

KLMA 9

Bidang: Litmus Bidang Pengembangan Kemitraan

No.	Proses/Tabung Penelitian/Keputusan	Indikator	Kerangka 2012	Indikator 2012	Kerangka 2013	Tahun 2014			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
						1.1	1.2	1.3			
1		Salah satu bentuk indikator ke partisipasi dalam perencanaan strategi	2012: 100% (100%)	2013: 100% (100%)	2014: 100% (100%)	2015: 100% (100%)	2016: 100% (100%)	2017: 100% (100%)	2018: 100% (100%)	2019: 100% (100%)	2020: 100% (100%)
2		Salah satu bentuk indikator ke partisipasi dalam perencanaan strategi	2012: 100% (100%)	2013: 100% (100%)	2014: 100% (100%)	2015: 100% (100%)	2016: 100% (100%)	2017: 100% (100%)	2018: 100% (100%)	2019: 100% (100%)	2020: 100% (100%)
3		Salah satu bentuk indikator ke partisipasi dalam perencanaan strategi	2012: 100% (100%)	2013: 100% (100%)	2014: 100% (100%)	2015: 100% (100%)	2016: 100% (100%)	2017: 100% (100%)	2018: 100% (100%)	2019: 100% (100%)	2020: 100% (100%)
4		Salah satu bentuk indikator ke partisipasi dalam perencanaan strategi	2012: 100% (100%)	2013: 100% (100%)	2014: 100% (100%)	2015: 100% (100%)	2016: 100% (100%)	2017: 100% (100%)	2018: 100% (100%)	2019: 100% (100%)	2020: 100% (100%)
5		Salah satu bentuk indikator ke partisipasi dalam perencanaan strategi	2012: 100% (100%)	2013: 100% (100%)	2014: 100% (100%)	2015: 100% (100%)	2016: 100% (100%)	2017: 100% (100%)	2018: 100% (100%)	2019: 100% (100%)	2020: 100% (100%)
6		Salah satu bentuk indikator ke partisipasi dalam perencanaan strategi	2012: 100% (100%)	2013: 100% (100%)	2014: 100% (100%)	2015: 100% (100%)	2016: 100% (100%)	2017: 100% (100%)	2018: 100% (100%)	2019: 100% (100%)	2020: 100% (100%)

11111111

Bidang: Lulus Bidang Penanggulangan Kemiskinan

No.	Pencapaian, Peningkatan, dan Perbaikan	Indikator	Kategori 2011	Indikator 2012	Kategori 2012	Tercapai			Tercapai	Tercapai
						2011	2012	2013		
1.	Peningkatan Pendapatan Perseorangan	1) Jumlah penduduk miskin absolut (548.711 jiwa)	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
2.	Peningkatan Pendapatan Perseorangan	2) Jumlah penduduk miskin relatif (1.146.000 jiwa)	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000
3.	Peningkatan Pendapatan Perseorangan	3) Jumlah penduduk miskin absolut (548.711 jiwa)	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
4.	Peningkatan Pendapatan Perseorangan	4) Jumlah penduduk miskin relatif (1.146.000 jiwa)	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000
5.	Peningkatan Pendapatan Perseorangan	5) Jumlah penduduk miskin absolut (548.711 jiwa)	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
6.	Peningkatan Pendapatan Perseorangan	6) Jumlah penduduk miskin relatif (1.146.000 jiwa)	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000
7.	Peningkatan Pendapatan Perseorangan	7) Jumlah penduduk miskin absolut (548.711 jiwa)	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
8.	Peningkatan Pendapatan Perseorangan	8) Jumlah penduduk miskin relatif (1.146.000 jiwa)	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000
9.	Peningkatan Pendapatan Perseorangan	9) Jumlah penduduk miskin absolut (548.711 jiwa)	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
10.	Peningkatan Pendapatan Perseorangan	10) Jumlah penduduk miskin relatif (1.146.000 jiwa)	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000
11.	Peningkatan Pendapatan Perseorangan	11) Jumlah penduduk miskin absolut (548.711 jiwa)	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
12.	Peningkatan Pendapatan Perseorangan	12) Jumlah penduduk miskin relatif (1.146.000 jiwa)	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000

Bilang: 1 luas Bidang Pengembangan Kesehatan

No.	Tugas/Tujuan, Fungsi/Kepada dan RT/RS	Indikator	Kerangka Waktu 2012	Indikator 2013	Tahun 2014		Tanggung Jawab	Indikator
					2014	2015		
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pasien di RSUD	Terdapat 500-550 pasien mendapat pelayanan prima, sesuai dengan kriteria	500-550	500-550	500-550	500-550	500-550	Kepala Rawat Jalan dan Dokter
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Rawat Jalan di RSUD	Peningkatan jumlah pasien rawat jalan yang dirawat di RSUD	500-550	500-550	500-550	500-550	500-550	Kepala Rawat Jalan dan Dokter
3.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Rawat Inap di RSUD	Peningkatan jumlah pasien rawat inap yang dirawat di RSUD	500-550	500-550	500-550	500-550	500-550	Kepala Rawat Inap dan Dokter
4.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Rawat Gawat Darurat di RSUD	Peningkatan jumlah pasien rawat gawat darurat yang dirawat di RSUD	500-550	500-550	500-550	500-550	500-550	Kepala Rawat Gawat Darurat dan Dokter
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Rawat Gawat Darurat di RSUD	Peningkatan jumlah pasien rawat gawat darurat yang dirawat di RSUD	500-550	500-550	500-550	500-550	500-550	Kepala Rawat Gawat Darurat dan Dokter
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Rawat Gawat Darurat di RSUD	Peningkatan jumlah pasien rawat gawat darurat yang dirawat di RSUD	500-550	500-550	500-550	500-550	500-550	Kepala Rawat Gawat Darurat dan Dokter
7.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Rawat Gawat Darurat di RSUD	Peningkatan jumlah pasien rawat gawat darurat yang dirawat di RSUD	500-550	500-550	500-550	500-550	500-550	Kepala Rawat Gawat Darurat dan Dokter
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Rawat Gawat Darurat di RSUD	Peningkatan jumlah pasien rawat gawat darurat yang dirawat di RSUD	500-550	500-550	500-550	500-550	500-550	Kepala Rawat Gawat Darurat dan Dokter
9.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Rawat Gawat Darurat di RSUD	Peningkatan jumlah pasien rawat gawat darurat yang dirawat di RSUD	500-550	500-550	500-550	500-550	500-550	Kepala Rawat Gawat Darurat dan Dokter
10.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Rawat Gawat Darurat di RSUD	Peningkatan jumlah pasien rawat gawat darurat yang dirawat di RSUD	500-550	500-550	500-550	500-550	500-550	Kepala Rawat Gawat Darurat dan Dokter

11.12.2012

Bidang: Irtis, Bidang: Penguatan Kegiatan

No.	Pencapaian, Peningkatan, dan Peningkatan	Indikator	Kerangka Struktur	Indikator Peningkatan	Kerangka Struktur	Tahun 2012			Indikator Peningkatan
						1	2	3	
1	Peningkatan, Peningkatan, dan Peningkatan	Indikator Peningkatan	2012	2012	2012	1	2	3	Indikator Peningkatan
2	Peningkatan, Peningkatan, dan Peningkatan	Indikator Peningkatan	2012	2012	2012	1	2	3	Indikator Peningkatan
3	Peningkatan, Peningkatan, dan Peningkatan	Indikator Peningkatan	2012	2012	2012	1	2	3	Indikator Peningkatan
4	Peningkatan, Peningkatan, dan Peningkatan	Indikator Peningkatan	2012	2012	2012	1	2	3	Indikator Peningkatan

11.11.11.11

Bilang: 1 luas Bidang Penanggulangan Kematian

No	Pasca-Tuban, Pasca-Korona Pulau.	Indikator	Berkas 2011	Berkas 2012	Nilai dan Mula			Fransia	Indikator
					1.1.1	1.1.2	2011		
4	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan (kegiatan keagamaan) untuk memperingati 1000 hari wafat di Kabupaten	Indikator kegiatan keagamaan (kegiatan keagamaan) untuk memperingati 1000 hari wafat di Kabupaten	2011	2012	1.1.1	1.1.2	2011	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan (kegiatan keagamaan) untuk memperingati 1000 hari wafat di Kabupaten	K.P
5	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan (kegiatan keagamaan) untuk memperingati 1000 hari wafat di Kabupaten	Indikator kegiatan keagamaan (kegiatan keagamaan) untuk memperingati 1000 hari wafat di Kabupaten	2011	2012	1.1.1	1.1.2	2011	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan (kegiatan keagamaan) untuk memperingati 1000 hari wafat di Kabupaten	K.P
6	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan (kegiatan keagamaan) untuk memperingati 1000 hari wafat di Kabupaten	Indikator kegiatan keagamaan (kegiatan keagamaan) untuk memperingati 1000 hari wafat di Kabupaten	2011	2012	1.1.1	1.1.2	2011	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan (kegiatan keagamaan) untuk memperingati 1000 hari wafat di Kabupaten	K.P
7	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan (kegiatan keagamaan) untuk memperingati 1000 hari wafat di Kabupaten	Indikator kegiatan keagamaan (kegiatan keagamaan) untuk memperingati 1000 hari wafat di Kabupaten	2011	2012	1.1.1	1.1.2	2011	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan (kegiatan keagamaan) untuk memperingati 1000 hari wafat di Kabupaten	K.P
8	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan (kegiatan keagamaan) untuk memperingati 1000 hari wafat di Kabupaten	Indikator kegiatan keagamaan (kegiatan keagamaan) untuk memperingati 1000 hari wafat di Kabupaten	2011	2012	1.1.1	1.1.2	2011	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan (kegiatan keagamaan) untuk memperingati 1000 hari wafat di Kabupaten	K.P

1111111111

Bidang: Litmus Bidang Pengembangan Kemitraan

No.	Proses/Tabung/Pusat/Kelembagaan/Program	Indikator	Kerangka Kerja 2012	Indikator Kinerja Utama 2012	Tercapai		Tercapai	Tercapai	Tercapai
					2012	2013			
1.	Program Pengembangan Kemitraan								
2.	Program Pengembangan Kemitraan	1. Jumlah mitra usaha yang bekerjasama dengan pemerintah	2	2	2	2	2	2	2
3.	Program Pengembangan Kemitraan	2. Jumlah mitra usaha yang bekerjasama dengan pemerintah	1	1	1	1	1	1	1
4.	Program Pengembangan Kemitraan	3. Jumlah mitra usaha yang bekerjasama dengan pemerintah	1	1	1	1	1	1	1
5.	Program Pengembangan Kemitraan	4. Jumlah mitra usaha yang bekerjasama dengan pemerintah	1	1	1	1	1	1	1
6.	Program Pengembangan Kemitraan	5. Jumlah mitra usaha yang bekerjasama dengan pemerintah	1	1	1	1	1	1	1
7.	Program Pengembangan Kemitraan	6. Jumlah mitra usaha yang bekerjasama dengan pemerintah	1	1	1	1	1	1	1
8.	Program Pengembangan Kemitraan	7. Jumlah mitra usaha yang bekerjasama dengan pemerintah	1	1	1	1	1	1	1
9.	Program Pengembangan Kemitraan	8. Jumlah mitra usaha yang bekerjasama dengan pemerintah	1	1	1	1	1	1	1

Keterangan:

1. Jumlah mitra usaha yang bekerjasama dengan pemerintah

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013

No	Program/Isi Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012	Perkiraan Pencapaian Tahun 2012	Rencana Tahun 2013	Perkiraan Maju			Pelaksanaan
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
1.	Prioritas: Peningkatan Kualitas							
A.	Kokus Prioritas: Peningkatan dan Peningkatan Kualitas Kebijakan Pertumbuhan Sosial Berbasis Keluarga							
1	Program Dukungan, Monev dan Pelaksanaan: Inga Leles Leles	122,0	122,0	119,9	119,9	119,9	119,9	Kemendes
2	Program Pemenuhan T. P. dan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat N. K. (berkesmas)	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	Kemendes
	Selanjutnya Kesehatan dan Peningkatan Masyarakat N. K. (berkesmas)	4.955,5	4.955,5	5.092,2	5.092,2	5.092,2	5.092,2	Kemendes
	Dukung Monev dan Pelaksanaan Inga Leles Leles pada Program Pembinaan Uprya Kesehatan	-	-	548,3	-	-	-	Kemendes
3	Program Kesehatan dan Keluarga Berencana							

II / M B / I

Bidang Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

No	Program/kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012	Perkiraan Pencapaian Tahun 2012	Rencana Tahun 2013	Perkiraan Maju			Pelaksana
					Tahun 2011	Tahun 2015	Tahun 2016	
	1) Mengalokasikan kembali Keseluruhan Dana (13) ke Persepsi	541,9	541,9	545,9	649,8	658,5	667,9	URK IN
	2) Mengalokasikan sumber dana ke Kabupaten, Wilayah Khusus dan Siswasi Khusus	1,8	1,8	1,7	1,9	1,9	1,9	BKKS
	3) Membentuk Tim Koordinasi Keseluruhan	0,6	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	URK IN
	4) Mengalokasikan Dana Bantuan Keseluruhan ke Kabupaten dan Provinsi	87,1	87,1	88,1	87,9	87,9	87,9	URK IN Provinsi
4	Program Realiditas Dasar							
	1) Mengalokasikan Keseluruhan Dana ke Kabupaten	1.285,0	1.285,0	3.117,7	4.117,7	4.117,7	3.174,7	Kemendiknas
	2) Mengalokasikan Keseluruhan Dana ke Kabupaten	777,3	777,3	1.941,7	1.941,7	1.941,7	1.941,7	Kemendiknas
5	Program Pendidikan Menengah							
	1) Mengalokasikan Dana ke Kabupaten	4.110	4.110	6.892	6.892	6.892	6.892	Kemendiknas
	2) Mengalokasikan Dana ke Kabupaten	4.866	4.866	1.641,7	1.641,7	1.641,7	1.641,7	Kemendiknas
6	Program Pendidikan Tinggi							
	1) Mengalokasikan Dana ke Kabupaten dan Provinsi	302,5	302,5	1.433,7	1.433,7	1.433,7	1.433,7	Kemendiknas
	2) Mengalokasikan Dana ke Kabupaten							
	3) Mengalokasikan Dana ke Kabupaten dan Provinsi							
	4) Mengalokasikan Dana ke Kabupaten dan Provinsi							

TJMB 2

(dalam miliar rupiah)

No	Program/kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012	Perkiraan Pencapaian Tahun 2012	Rencana Tahun 2013	Perkiraan Maju			Pelaksana
					Tahun 2011	Tahun 2015	Tahun 2016	
	Siswa triakty MA pemerintah	700,0	370,0	645,9	645,9	645,9	645,9	
	- Siswa triakty MA pemerintah swasta	422,0	132,0	70,2	875,2	875,2	875,2	
	- Siswa triakty MA pemerintah umum	301,0	307,0	400,0	400,0	400,0	400,0	
	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Jarak Jauh							Kemendiknas
	- Mahasiswa usia dini penerima beasiswa	70,6	70,6	123,0	123,0	123,0	123,0	
8	Program Berdaya Unggul dan Berkeadilan Sosial							
	butiran Dana Bersahabat	2.081,9	2.081,9	2.081,96	2.391,80	2.742,52	2.782,82	Kemendiknas
9	Program Rehabilitasi Sosial							
	Rehabilitasi dan Peningkatan Sosial Anak	305,7	305,7	338,82	538,82	263,44	304,57	Kemendiknas
	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	133,5	133,5	145,86	1-5,86	11,556	13,111	Kemendiknas
	Alat Bantu Sosial Orang Dengan Gangguan	223,9	223,9	306,77	306,77	241,61	277,86	Kemendiknas
10	Program Kefinansian dan Kelembagaan Sosial							
	Bantuan Sosial Korban Bencana Alam	316,9	346,9	292,87	292,87	295,09	295,09	Kemendiknas
	Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial	120,4	120,4	118,37	118,37	111,17	114,17	Kemendiknas

T I M B 3

(dalam miliar rupiah)

No	Program/kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012	Perkiraan Pencapaian Tahun 2012	Rencana Tahun 2013	Perkiraan Maju			Pelaksana
					Tahun 2011	Tahun 2015	Tahun 2016	
11	Program Pemertayaan Sosial dan Peningkatan Ketertarikan Peninggalan Kemiskinan	224,9	224,9	225,08	225,08	241,29	241,29	Kemensos
12	Program Koordinasi Pengalangan Kebijakan Desa/ Kecamatan/Kabupaten (KASATRA)	15.640,3	17.515,0	16.438,4	16.438,4	16.438,4	16.438,4	Kemendagri Korwasda Sosial/ Purnu Polog
13	Program melindungi Tenaga Kerja dan Pengembang Sistem Pengawasan Kelangkaan dan peningkatan keberlanjutan Perikanan (keleju Arak)	71,2	71,2	76,8	72,0	77,6	77,6	Kemertanian
14	Program Pengelolaan Perikanan Nasional	128,9	128,9	131,5	141,8	141,8	141,8	BPX
TOTAL		30.051,3	32.859,6	32.867,7	43.148,4	48.490,3	57.490,8	

11/11/11

Bidang Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

No	Program/kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012	Pencapaian Pencapaian Tahun 2012	Rencana Tahun 2013	Perkiraan Maju			Pelaksana
					Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	
B	Makas Primordia: Menyempurnakan dan Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan PNM Mandiri							
D	Program Nasional: Pelaksanaan Infrastruktur Perumahan	1.710,0	1.710,0	1.948,8	1.948,0	1.879,8	1.879,8	
	Perumahan, Perumahan, Penyusutan, dan Pelaksanaan Perumahan Berguna dan Cangkupan Pelaksanaan Gedung dan Rumah Negara							Ketren 2012
E	Program Pembiayaan Masyarakat dan Perumahan Desa							
	Perumahan, Pemukiman Masyarakat	10.494,7	10.494,7	10.492,8	10.492,8	10.492,8	10.492,8	Ketren 2012
	a. PNPM-Ltd	9.597,6	9.597,6	9.636,5	9.636,5	9.636,5	9.636,5	
	b. PNPM-aktif Pedesaan:							
	- PNPM-MU Terbatas	89,9	89,9	89,6	89,6	89,9	89,9	
	- PNPM-MU Inklusif (KIPN)	469,4	469,4	469,8	469,8	469,8	469,8	
	- PNPM-MU Kespex Pedesaan	408,9	408,9	408,9	408,9	408,9	408,9	

TUMBS

(dalam Rp. triliun)

No	Program/Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012	Perkiraan Pencapaian Tahun 2012	Rencana Tahun 2013	Perkiraan Maju			Pelaksana
					Tahun 2011	Tahun 2015	Tahun 2016	
	Unit Bina Perbibliotekan Jalan Jend. Sudirman Medan	402,3	402,3	402,3	402,3	402,3	402,3	Kerendayan
	Unit Bina Perbibliotekan Jalan Jend. Sudirman Medan	11,8	11,8	-	-	-	-	Kerendayan
	Unit Bina Perbibliotekan Jalan Jend. Sudirman Medan	99,6	99,6	-	-	-	-	Kerendayan
	Unit Bina Perbibliotekan Jalan Jend. Sudirman Medan	500,5	500,5	1.300,0	-	-	-	Kerendayan
	Unit Bina Perbibliotekan Jalan Jend. Sudirman Medan	467,5	467,5	770,4	981,4	387,5	587,5	Kerendayan

11/11/15

Bidang Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

No	Program/Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012	Pencapaian Tahun 2012	Rencana Tahun 2013	Perkiraan Maju			Pelaksana
					Tahun 2011	Tahun 2015	Tahun 2016	
18	Program Bina Perumahan Desa Kualitas Pengembang Warga Perumahan	300	311	317	339			Kemendagri
19	Program Peningkatan Masyarakatan dan Peningkatan Desa	387	389					Kemendagri
20	Program Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Perumahan Pengembangan Perumahan, Pengawasan dan Pengembangan Sistem Perumahan dan Kebijakan, serta Pengembangan Pengembangan Perumahan dan Pengembangan	3260	3259	3333	3329	3320	3330	Kemendagri
21	Program Penyediaan dan Pengembangan Perumahan dan Sistem Perumahan Pengembangan Perumahan, Pengawasan dan Pengembangan Sistem Perumahan dan Pengembangan Perumahan dan Pengembangan	3333	3333	3333	3333	3333	3333	Kemendagri

TJMB 7

(dalam miliar rupiah)

No	Program/Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012	Perkiraan Pencapaian Tahun 2012	Rencana Tahun 2013	Perkiraan Maju			Pelaksana
					Tahun 2011	Tahun 2015	Tahun 2016	
22	Program Persiapan Pembangunan Kereta Betongol							
	Pelaksanaan Subjekaal Koordinasi dan Asistensi Pengujian Kelembagaan Perencanaan Daerah Tertinggal, Terdepan, Tertinggal, dan Dasar Kautik	47,3	47,3	50,0	470,2			KPDT
23	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata							
	Kelembagaan INPK Kabupaten dengan Zelindak	124,5	121,5	120,5	90,0	93,0	120,0	Kel. Sumsel
24	Program Pemertujuan dan Pelaksanaan Koridor, Korf, &							
	Pengembangan dan Pemeliharaan Perhubungan Kesejahteraan Sosial	174,1	174,1	305,7	261,6	261,6	261,6	Keremkominfo-5
25	Program Pengabdian Masyarakat Pemerintah dan Masyarakat							
	Kelembagaan Masyarakat Persepsi dan Pengembangan Lokal			70,0	120,0	140,0	185,0	KKI
26	Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat							
	Pengembangan Usaha Persepsi dan dan Pengembangan Masyarakat			100,0	160,0	160,0	100,0	KKI

T I M B K

(dalam triliun rupiah)

No	Program/kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012	Perkiraan Pencapaian Tahun 2012	Rencana Tahun 2013	Perkiraan Maju			Pelaksana
					Tahun 2011	Tahun 2015	Tahun 2016	
27	Program Pengembangan Proses Perkerato (Mading)							
	Pengembangan Sistem Usaha Perikanan Hutan	195,0	195,0	200,0	267,5	267,0	225,8	KKP
28	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan							
	Fasilitas, peninjauan dan pengembangan usaha dan investasi sertifikasi	-	-	25,0	30,0	25,0	100,0	KKP
	TOTAL	15.438,4	15.438,4	15.450,0	16.266,9	15.285,7	15.480,5	

TUMAS

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

No	Program/kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012	Perkiraan Pencapaian Tahun 2012	Rencana Tahun 2013	Perkiraan Maju			Pelaksana
					Tahun 2011	Tahun 2015	Tahun 2016	
1	Tokus Priority: Peningkatan Akses Usaha Mikro dan kecil kepada Sumberdaya Produktif							
Peningkatan Akses ke Permodalan								
29	Peningkatan Perjumlahan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	Keremban (Anggaran 99)
30	Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Koordinasi Persektorannya
31	Pengembangan dan penguatan anggaran pendanaan bagi koperasi dan UMKM bagi upaya usaha mikro, kecil dan	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	Keremban GURK
32	Pembelahan dan pelepasan akses permodalan bagi upaya usaha mikro, kecil dan	65,6	65,6	65,6	65,6	65,6	65,6	Koordinasi KURK
33	Pengembangan dan penguatan anggaran pendanaan bagi koperasi dan UMKM	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	Keremban GURK
34	Pengembangan, pelepasan, penguatan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi usaha dan UMKM	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	Koordinasi KURK
35	Perluasan KUR	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	Keremban GURK
Peningkatan Kapasitas UKM								
36	Peningkatan akses dan pengembangan UKM	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	Koordinasi KURK
37	Kapasitas dan pengembangan lembaga pendanaan dan pelatihan UMKM	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	Koordinasi KURK

RUMAH

Bidang Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

No	Program/kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012	Perkiraan Pencapaian Tahun 2012	Rencana Tahun 2013	Perkiraan Maju			Pelaksana
					Tahun 2011	Tahun 2015	Tahun 2016	
	Peningkatan Akses Pemukiman							
38	Pengembangan rumah sewa perusahaan KUMKM	2,0	2,0	36,2	51,3	51,3	51,3	Korwil KUMKM
	Peningkatan Kualitas Produksi							
39	Peningkatan produktivitas pertanian KUMKM	2,6	2,6	2,6	4,0	4,1	4,1	Korwil KUMKM
	Peningkatan Kemampuan Koperasi dan UMK							
40	Peningkatan kualitas organisasi dan bidang usaha koperasi	0,3	0,3	0,3	0,9	0,9	0,9	Korwil KUMKM
41	Pengembangan kemampuan koperasi dan penyediaan bahan baku/gabakan musyarakat untuk koperasi (GUMKASKOP)	14,1	14,1	21,6	24,0	25,7	25,7	Korwil KUMKM
42	Pengembangan, pengembangan dan pengawasan KUMKOP Koperasi KUMKOP-Koperasi dan KUMKOP	0,5	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9	Korwil KUMKM
43	Revitalisasi sarana pendidikan, pelatihan dan perbaikan pos/koordinasi	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	Korwil KUMKM
44	Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM-KES-SP	0,5	0,5	0,5	1,4	1,4	1,4	Korwil KUMKM
	TOTAL	2.166,2	2.166,2	2.246,1	2.292,1	2.309,5	2.309,5	

ITUMH 2012

Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan

No	Program/Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012	Perkiraan Pencapaian Tahun 2012	Rencana Tahun 2013	Perkiraan Maju			Pelaksana
					Tahun 2011	Tahun 2015	Tahun 2016	
10	10. Fokus Prioritas: Peningkatan dan Perluasan Program-Program Pro Rakyat							
23	Program Peneguhan Keterpaduan Pelaksanaan Kebijakan dan Program Sektoral	288,0	233,0	200,0	240,0	240,0	200,0	Kemendagri
24	Program Pengembangan Peran Sektor dan Kawasan Perumahan							
25	15. Fokus Prioritas: Pemberdayaan Perumahan Sektor Perumahan Masyarakat	640,0	640,0	3.200,0	330,0	330,0	1.470	Kemendagri
26	Program Pengembangan Perumahan Masyarakat							
27	Program Pengembangan Perumahan Masyarakat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Kemendagri
28	Program Pengembangan Sektor Daya Tahan Pangan dan Pangan Lokal							
29	Program Pengembangan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perumahan dan Kawasan Permukiman	670,0	450,0	200,0	140,0	170,0	170,0	KKP
30	Program Pengembangan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perumahan dan Kawasan Permukiman	670,0	450,0	200,0	140,0	170,0	170,0	KKP

(dalam juta rupiah)

No	Program/kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012	Perkiraan Pencapaian Tahun 2012	Rencana Tahun 2013	Perkiraan Maju			Pelaksana
					Tahun 2011	Tahun 2015	Tahun 2016	
50	Program Pengembangan Produk dan Perikanan Budidaya							
	Pengembangan Sistem Usaha Perikanan Modern	39,0	39,0	19,5	22,7	26,0	29,3	KKP
51	Program Penyiapan D. ya Saling Produktif Perikanan							
	Peningkatan kemampuan pengelolaan sistem usaha perikanan dan peningkatan sistem usaha perikanan	78,0	110,0	50,0	50,0	50,0	50,0	KKP
52	Program Kemitraan dan Pengembangan Usaha Perikanan							
	Pengembangan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Perikanan Air Minum	2.163,0	2.163,0	3.330,2	6.569,2	6.849,0	6.602,8	Kerem. P.
	JADWAL	5.763,0	5.791,5	6.149,0	6.687,9	7.187,5	7.289,6	

ITUMHUB

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2013

KEMENTERIAN / LEMBAGA	INDIKATOR	MATERI INTI	KUALITAS	KANTOR	TANGGUNG JAWAB	TANGGUNG JAWAB		TANGGUNG JAWAB	TANGGUNG JAWAB	TANGGUNG JAWAB	TANGGUNG JAWAB	TANGGUNG JAWAB
						INDIKATOR	TANGGUNG JAWAB					
KEMENTERIAN LINGKUNGAN, PERUBAHAN IKLIM DAN KEHUTANAN	1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.1.1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.1.1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.1.1.1.1.2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.1.1.1.1.3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.1.1.1.1.4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.1.1.1.1.5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.1.1.1.1.6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.1.1.1.1.7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
						1.1.1.1.1.8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.1.1.1.1.9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.1.1.1.1.10. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.1.1.1.1.11. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.1.1.1.1.12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.1.1.1.1.13. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.1.1.1.1.14. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
KEMENTERIAN LINGKUNGAN, PERUBAHAN IKLIM DAN KEHUTANAN	2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	2.1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.1.1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.1.1.1.2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.1.1.1.3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.1.1.1.4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.1.1.1.5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.1.1.1.6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.1.1.1.7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
						2.1.1.1.1.8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.1.1.1.9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.1.1.1.10. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.1.1.1.11. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.1.1.1.12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.1.1.1.13. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.1.1.1.14. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

1. 1.1.1.1.1.

KERJASAMA LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

No	URAIAN PROJEK/KELOMPOK/KEPERUSAHAAN	TOPIC/CORE	Materi Pokok		Materi Pokok		Materi Pokok		REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI
			Penyusunan	Penyusunan	Penyusunan	Penyusunan	Penyusunan	Penyusunan							
1	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup
2	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan lingkungan hidup

J. 1.M&2

KEJAMAKAN LIRYAS BIDANG PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

No	URAIAN PROJEK/KELOMPOK/LOKASI	TITIK CORE	Masa Kerja			Masa Kerja			REVISI	REVISI	REVISI	REVISI
			Awal	Akhir	Awal	Akhir	Awal	Akhir				
1	Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan kampanye lingkungan hidup di tingkat desa/kelurahan	1. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kampanye lingkungan hidup di tingkat desa/kelurahan	10/01/2012	31/03/2012	10/01/2012	31/03/2012	10/01/2012	31/03/2012	10/01/2012	31/03/2012	10/01/2012	31/03/2012
2	Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan kampanye lingkungan hidup di tingkat kecamatan	2. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kampanye lingkungan hidup di tingkat kecamatan	10/01/2012	31/03/2012	10/01/2012	31/03/2012	10/01/2012	31/03/2012	10/01/2012	31/03/2012	10/01/2012	31/03/2012
3	Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan kampanye lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota	3. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kampanye lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota	10/01/2012	31/03/2012	10/01/2012	31/03/2012	10/01/2012	31/03/2012	10/01/2012	31/03/2012	10/01/2012	31/03/2012
4	Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan kampanye lingkungan hidup di tingkat provinsi	4. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kampanye lingkungan hidup di tingkat provinsi	10/01/2012	31/03/2012	10/01/2012	31/03/2012	10/01/2012	31/03/2012	10/01/2012	31/03/2012	10/01/2012	31/03/2012
5	Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan kampanye lingkungan hidup di tingkat nasional	5. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kampanye lingkungan hidup di tingkat nasional	10/01/2012	31/03/2012	10/01/2012	31/03/2012	10/01/2012	31/03/2012	10/01/2012	31/03/2012	10/01/2012	31/03/2012

1. 1.1.1.1.1.1

KERJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

No	URAIAN PROBLEMA/KEPERLUAN/KEHENDAK	TITIK-COPE	Berkas/Kelemb. 2012				Perencanaan 2012				REVISI/REVISI	KEMUNGKINAN/ALTERNATIF	
			Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012			
1	Perubahan iklim global yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca (GRK) yang menyebabkan pemanasan global. Hal ini akan berdampak pada perubahan iklim yang akan mempengaruhi kehidupan manusia.	Perubahan iklim global yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca (GRK) yang menyebabkan pemanasan global. Hal ini akan berdampak pada perubahan iklim yang akan mempengaruhi kehidupan manusia.	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012
2	Perubahan iklim global yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca (GRK) yang menyebabkan pemanasan global. Hal ini akan berdampak pada perubahan iklim yang akan mempengaruhi kehidupan manusia.	Perubahan iklim global yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca (GRK) yang menyebabkan pemanasan global. Hal ini akan berdampak pada perubahan iklim yang akan mempengaruhi kehidupan manusia.	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012
3	Perubahan iklim global yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca (GRK) yang menyebabkan pemanasan global. Hal ini akan berdampak pada perubahan iklim yang akan mempengaruhi kehidupan manusia.	Perubahan iklim global yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca (GRK) yang menyebabkan pemanasan global. Hal ini akan berdampak pada perubahan iklim yang akan mempengaruhi kehidupan manusia.	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012
4	Perubahan iklim global yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca (GRK) yang menyebabkan pemanasan global. Hal ini akan berdampak pada perubahan iklim yang akan mempengaruhi kehidupan manusia.	Perubahan iklim global yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca (GRK) yang menyebabkan pemanasan global. Hal ini akan berdampak pada perubahan iklim yang akan mempengaruhi kehidupan manusia.	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012	Kelemb. 2012

J. LIMAS-E

KERJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

No	URAIAN PROJEK/KEGIATAN	TITIK-COPE	Mencapai target	Mencapai	Periode Pelaksanaan					REVISI	KEMUNGKINAN MELAKUKAKAN	
					2012	2013	2014	2015	2016			
1	Penelitian dan pengumpulan data untuk analisis dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian di Kabupaten Bogor	Penelitian dan pengumpulan data untuk analisis dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian di Kabupaten Bogor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penelitian dan pengumpulan data untuk analisis dampak perubahan iklim terhadap sektor perikanan di Kabupaten Bogor	Penelitian dan pengumpulan data untuk analisis dampak perubahan iklim terhadap sektor perikanan di Kabupaten Bogor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penelitian dan pengumpulan data untuk analisis dampak perubahan iklim terhadap sektor kehutanan di Kabupaten Bogor	Penelitian dan pengumpulan data untuk analisis dampak perubahan iklim terhadap sektor kehutanan di Kabupaten Bogor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Penelitian dan pengumpulan data untuk analisis dampak perubahan iklim terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Bogor	Penelitian dan pengumpulan data untuk analisis dampak perubahan iklim terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Bogor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penelitian dan pengumpulan data untuk analisis dampak perubahan iklim terhadap sektor kesehatan di Kabupaten Bogor	Penelitian dan pengumpulan data untuk analisis dampak perubahan iklim terhadap sektor kesehatan di Kabupaten Bogor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penelitian dan pengumpulan data untuk analisis dampak perubahan iklim terhadap sektor pendidikan di Kabupaten Bogor	Penelitian dan pengumpulan data untuk analisis dampak perubahan iklim terhadap sektor pendidikan di Kabupaten Bogor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penelitian dan pengumpulan data untuk analisis dampak perubahan iklim terhadap sektor transportasi di Kabupaten Bogor	Penelitian dan pengumpulan data untuk analisis dampak perubahan iklim terhadap sektor transportasi di Kabupaten Bogor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Penelitian dan pengumpulan data untuk analisis dampak perubahan iklim terhadap sektor energi di Kabupaten Bogor	Penelitian dan pengumpulan data untuk analisis dampak perubahan iklim terhadap sektor energi di Kabupaten Bogor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Penelitian dan pengumpulan data untuk analisis dampak perubahan iklim terhadap sektor lingkungan di Kabupaten Bogor	Penelitian dan pengumpulan data untuk analisis dampak perubahan iklim terhadap sektor lingkungan di Kabupaten Bogor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Penelitian dan pengumpulan data untuk analisis dampak perubahan iklim terhadap sektor sosial di Kabupaten Bogor	Penelitian dan pengumpulan data untuk analisis dampak perubahan iklim terhadap sektor sosial di Kabupaten Bogor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KERJAKAN LINTAS BIDANG PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

No	URAIAN PROJEK/KELOMPOK/ORGANISASI	TITIK-COPE	Masa Kerja (Bulan)	Masa Kerja (Masa Kerja)	Tahun 2012			Tahun 2013			REMARK	KEMUNGKINAN BERHASIL		
					1	2	3	4	5	6				
1	KEMUNGKINAN BERHASIL	KEMUNGKINAN BERHASIL	1	1	1	2	3	4	5	6	1	1		
					2	3	4	5	6	7			8	9
					3	4	5	6	7	8			9	10
					4	5	6	7	8	9			10	11
					5	6	7	8	9	10			11	12
					6	7	8	9	10	11			12	13
					7	8	9	10	11	12			13	14
					8	9	10	11	12	13			14	15
					9	10	11	12	13	14			15	16
					10	11	12	13	14	15			16	17
2	KEMUNGKINAN BERHASIL	KEMUNGKINAN BERHASIL	1	1	1	2	3	4	5	6	1	1		
					2	3	4	5	6	7			8	9
					3	4	5	6	7	8			9	10
					4	5	6	7	8	9			10	11
					5	6	7	8	9	10			11	12
					6	7	8	9	10	11			12	13
					7	8	9	10	11	12			13	14
					8	9	10	11	12	13			14	15
					9	10	11	12	13	14			15	16
					10	11	12	13	14	15			16	17

1. 1.1.1.1.1

KEMAMPAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

No	URAIAN PROJEK/KELOMPOK/KEPERUSAHAAN	TITIK TOPIK	Materi Pokok Bahasan	Durasi (jam)				Tahap			REVISI	KEMAMPAKAN LINTAS			
				1	2	3	4	1	2	3					
1	Perubahan iklim global dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat	Perubahan iklim global dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat	1. Perubahan iklim global dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Perubahan iklim global dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat	Perubahan iklim global dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat	2. Perubahan iklim global dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Perubahan iklim global dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat	Perubahan iklim global dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat	3. Perubahan iklim global dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Perubahan iklim global dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat	Perubahan iklim global dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat	4. Perubahan iklim global dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Perubahan iklim global dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat	Perubahan iklim global dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat	5. Perubahan iklim global dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

1. 1.1.1.1.1.1

KEJAMAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

No	URAIAN PERUBAHAN BIDANG	TITIK-COPE	Masa Simulasi	Masa Simulasi	Periode Simulasi			Periode Simulasi	Klasifikasi	Klasifikasi
					Tahun 2020	Tahun 2030	Tahun 2040			
1	Perubahan iklim global akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yang menyebabkan pemanasan global, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem.	Meningkatnya suhu permukaan bumi, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem.	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2	Perubahan iklim global akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yang menyebabkan pemanasan global, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem.	Meningkatnya suhu permukaan bumi, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem.	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
3	Perubahan iklim global akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yang menyebabkan pemanasan global, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem.	Meningkatnya suhu permukaan bumi, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem.	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
4	Perubahan iklim global akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yang menyebabkan pemanasan global, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem.	Meningkatnya suhu permukaan bumi, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem.	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
5	Perubahan iklim global akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yang menyebabkan pemanasan global, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem.	Meningkatnya suhu permukaan bumi, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem.	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
6	Perubahan iklim global akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yang menyebabkan pemanasan global, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem.	Meningkatnya suhu permukaan bumi, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem.	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
7	Perubahan iklim global akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yang menyebabkan pemanasan global, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem.	Meningkatnya suhu permukaan bumi, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem.	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
8	Perubahan iklim global akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yang menyebabkan pemanasan global, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem.	Meningkatnya suhu permukaan bumi, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem.	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
9	Perubahan iklim global akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yang menyebabkan pemanasan global, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem.	Meningkatnya suhu permukaan bumi, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem.	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
10	Perubahan iklim global akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yang menyebabkan pemanasan global, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem.	Meningkatnya suhu permukaan bumi, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrem.	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

1. 1.1.1.1.1.1.1

KERJAKAN LIRIKAS BIDANG PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

No	URAIAN PROJEK/KELOMPOK/PEKERJAAN	TITIK CORE	Mencakup MUSKOP MUSKOP	Mencakup MUSKOP MUSKOP	Mencakup MUSKOP MUSKOP			Mencakup MUSKOP MUSKOP	Mencakup MUSKOP MUSKOP	Mencakup MUSKOP MUSKOP
					2012	2013	2014			
1	Penelitian dan pengujian teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi di sektor industri.	Penelitian dan pengujian teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi di sektor industri.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penelitian dan pengujian teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi di sektor transportasi.	Penelitian dan pengujian teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi di sektor transportasi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penelitian dan pengujian teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi di sektor perumahan.	Penelitian dan pengujian teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi di sektor perumahan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Penelitian dan pengujian teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi di sektor perdagangan.	Penelitian dan pengujian teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi di sektor perdagangan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penelitian dan pengujian teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi di sektor jasa.	Penelitian dan pengujian teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi di sektor jasa.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

J. H. H. H.

KEJAMAKAN LIRYAS BIDANG PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

No	URAIAN PROJEK/KELOMPOK/KEPERUSAHAAN	TITIK-COPE	Maksimal Nilai	Program Penerimaan	Realisasi			Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Realisasi			Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	RESTRUKTURISASI	KEMERDEKAAN
					2012	2013	2014				2012	2013	2014							
		1. Mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan cara menanam pohon.	500	200	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
		2. Mengembangkan budaya hemat energi dan air.	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		3. Mengembangkan budaya hemat energi dan air.	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		4. Mengembangkan budaya hemat energi dan air.	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		5. Mengembangkan budaya hemat energi dan air.	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		6. Mengembangkan budaya hemat energi dan air.	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		7. Mengembangkan budaya hemat energi dan air.	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		8. Mengembangkan budaya hemat energi dan air.	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		9. Mengembangkan budaya hemat energi dan air.	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		10. Mengembangkan budaya hemat energi dan air.	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

J. B. B. B.

KEMAMPUAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

No	URAIAN PROJEK/KELOMPOK/KEPERUSAHAAN/LOKASI	TITIK-COPE	Masa Depan 2012			Masa Depan 2014			Masa Depan 2015			Masa Depan 2020	Masa Depan 2025	Masa Depan 2030	Masa Depan 2035	Masa Depan 2040	Masa Depan 2045	Masa Depan 2050
			Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian							
1	Kelembutan dan Ketahanan Pangan dan Air	Kelembutan dan Ketahanan Pangan dan Air	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kelembutan dan Ketahanan Pangan dan Air	Kelembutan dan Ketahanan Pangan dan Air	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kelembutan dan Ketahanan Pangan dan Air	Kelembutan dan Ketahanan Pangan dan Air	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kelembutan dan Ketahanan Pangan dan Air	Kelembutan dan Ketahanan Pangan dan Air	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kelembutan dan Ketahanan Pangan dan Air	Kelembutan dan Ketahanan Pangan dan Air	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Kelembutan dan Ketahanan Pangan dan Air	Kelembutan dan Ketahanan Pangan dan Air	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelembutan dan Ketahanan Pangan dan Air	Kelembutan dan Ketahanan Pangan dan Air	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Kelembutan dan Ketahanan Pangan dan Air	Kelembutan dan Ketahanan Pangan dan Air	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Kelembutan dan Ketahanan Pangan dan Air	Kelembutan dan Ketahanan Pangan dan Air	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Kelembutan dan Ketahanan Pangan dan Air	Kelembutan dan Ketahanan Pangan dan Air	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KERJAKAN LIRYAS BIDANG PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

No	URAIAN PROJEK/KEGIATAN/PEKERJAAN	TITIK COOR	Masa Kerja	Masa Kerja					KLUASUR/DAKAR/ALAMADA
				2012	2013	2014	2015	2016	
22	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
23	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
24	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
25	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
26	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
27	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
28	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
29	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
30	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
31	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
32	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
33	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
34	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
35	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
36	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
37	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
38	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
39	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
40	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
41	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
42	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
43	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
44	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
45	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
46	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
47	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
48	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
49	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI
50	Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisis Data	Yogyakarta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	REKREASI

J. H. H. H.

KEMAMAKLUMATAN BIDANG PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

No	TITIK FOKUS	MATERI	Masa Pelaksanaan				Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan
			1	2	3	4						
1	Perubahan Iklim	Perubahan Iklim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Perubahan Iklim	Perubahan Iklim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Perubahan Iklim	Perubahan Iklim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Perubahan Iklim	Perubahan Iklim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Perubahan Iklim	Perubahan Iklim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Perubahan Iklim	Perubahan Iklim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

J. H. A. 21

KERJAKAN LIRYAS BIDANG PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

No	URAIAN PROJEK/KELOMPOK/KEPERUSAHAAN	TITIK COOR	Berkas/lebar				Rak. s. s. Rak.				REVISI/PERUBAHAN	KEMUNGKINAN/ALAMAT		
			1/2012	3/2012	5/2012	7/2012	1/2013	3/2013	5/2013	7/2013				
1	1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.	PT. Sinar Dunia Utama Tbk	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.	PT. Sinar Dunia Utama Tbk	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.	PT. Sinar Dunia Utama Tbk	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	4. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.	PT. Sinar Dunia Utama Tbk	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

11/11/2012

KERJAMAK LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

No	URAIAN PROBLEMA/KEPERMASALAHAN	TITIK FOKUS	Mencapai target				Mencapai target				REVISI/AMENDAMAN	KEMUKAKIPAN/ALAMAT	
			2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015			
8	Strategi Pembangunan Berkelanjutan	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 4. Meningkatkan kualitas tata kota	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Perwujudan Wilayah Metropolitan	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 4. Meningkatkan kualitas tata kota	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Perwujudan Wilayah Metropolitan	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 4. Meningkatkan kualitas tata kota	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Perwujudan Wilayah Metropolitan	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 4. Meningkatkan kualitas tata kota	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

KERJAKAN LINTAS BIDANG: PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

No	URAIAN PROBLEMA/LOKASI/DAERAH	TITIK FOKUS	Masa Pelaksanaan			Masa Pelaksanaan			Masa Pelaksanaan			REVISI/AMALAN	REVISI/AMALAN
			2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014		
12	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus
13	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus
14	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus
15	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus	10 Agustus

JL. Raya 25

MATRIKS 2.1.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013

KEMERDEKAAN, LINTAS BUDANG, PERUBAHAN, BELIM, GALORAL

NO	TOKYU PRIORITAS, KEGYATAN, PRIORITY	Rencana Tahun 2013 (Rp. Milyar)	Perkiraan Pelaksanaan Tahun 2012 (Rp. Milyar)	Pembelian Modal (Rp. Milyar)		
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
KERJAYA ADAFTAR						
BUDANG SOSIAL BUDAYA DAN KALAHIDU PAK, BERKAGAMA						
1	Unggulan, Pendidikan, dan Kebudayaan	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20
2	Unggulan, Pendidikan, dan Kebudayaan	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90
BUDANG PERTANIAN						
BUDANG SAKMATA DAN BERKAGAMA						
1	Unggulan, Pendidikan, dan Kebudayaan	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
BUDANG SAKMATA DAN BERKAGAMA						
1	Unggulan, Pendidikan, dan Kebudayaan	4,70,00	4,70,00	4,70,00	4,70,00	4,70,00
2	Unggulan, Pendidikan, dan Kebudayaan	2,20,00	2,20,00	2,20,00	2,20,00	2,20,00
3	Unggulan, Pendidikan, dan Kebudayaan	2,30,00	2,30,00	2,30,00	2,30,00	2,30,00
4	Unggulan, Pendidikan, dan Kebudayaan	1,27,00	1,27,00	1,27,00	1,27,00	1,27,00
BUDANG SAKMATA DAN BERKAGAMA						
1	Unggulan, Pendidikan, dan Kebudayaan	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
2	Unggulan, Pendidikan, dan Kebudayaan	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
3	Unggulan, Pendidikan, dan Kebudayaan	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
4	Unggulan, Pendidikan, dan Kebudayaan	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
BUDANG SAKMATA DAN BERKAGAMA						
1	Unggulan, Pendidikan, dan Kebudayaan	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
2	Unggulan, Pendidikan, dan Kebudayaan	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
3	Unggulan, Pendidikan, dan Kebudayaan	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
4	Unggulan, Pendidikan, dan Kebudayaan	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
5	Unggulan, Pendidikan, dan Kebudayaan	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
6	Unggulan, Pendidikan, dan Kebudayaan	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

II.1.14.1-1

KUALIFIKASI DAN BIDANG STUDI/KELOMPOK/KELOMPOK

NO	LOKUS/PROBLEMAS/KELOMPOK/PELOMPOK	Rencana Tahun 2013 (Rp. Milyar)	Perkiraan Pelaksanaan Tahun 2012 (Rp. Milyar)	Perkiraan Nilai (Rp. Milyar)		
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
KUALIFIKASI/KELOMPOK						
BIDANG STUDI/KELOMPOK						
1	Kontribusi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum	10,00	10,00	12,13	5,11	7,3
2	Kontribusi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum	1,30	1,30	1,30	1,19	1,19
3	Kontribusi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum	1,30	1,30	1,30	1,19	1,19
4	Kontribusi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum	7,40	7,40	7,43	2,72	2,91
BIDANG STUDI/KELOMPOK/KELOMPOK						
1	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Infrastruktur	5,00	5,00	5,17	2,27	2,97
2	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Infrastruktur	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
3	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Infrastruktur	2,10	2,10	2,10	1,97	1,97
5	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Infrastruktur	2,85	2,85	2,86	2,56	2,56
BIDANG STUDI/KELOMPOK/KELOMPOK/KELOMPOK						
1	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Infrastruktur	10,20	10,20	10,20	9,09	9,09
2	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Infrastruktur	0,25	0,25	0,25	0,23	0,23
3	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Infrastruktur	2,40	2,40	2,40	2,17	2,17
4	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Infrastruktur	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90
5	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Infrastruktur	6,55	6,55	6,55	5,82	5,82
6	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Infrastruktur	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
7	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Infrastruktur	5,00	5,00	5,00	4,50	4,50

11.14.4-2

KORUPSI DAN TANGGAPAN HUKUM DALAM ASPEK PERALIHAN

No	LOKUS/PROBLEMAS KEGIATAN PERUBAHAN	Rencana Tahun 2013 (Rp. Milyar)	Pembinaan/ Pengawasan (Rp. Milyar)	Pembinaan/ Pengawasan (Rp. Milyar)		
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2016
11	Keberhasilan program/kegiatan dalam meningkatkan daya saing nasional	17,44	17,44	14,32	14,32	14,32
12	Penyediaan/ Pengalokasian/ Kelengkapan/ Kinerja/ Pemeliharaan/ Tindakan	1,52	1,52	1,54	1,54	1,54
13	Keberhasilan/ Peningkatan/ Keberhasilan/ Keberhasilan/ Keberhasilan	10,71	10,71	10,62	10,62	10,62
14	Keberhasilan/ Peningkatan/ Keberhasilan/ Keberhasilan/ Keberhasilan	15,21	15,21	15,82	15,82	15,82
15	Keberhasilan/ Peningkatan/ Keberhasilan/ Keberhasilan/ Keberhasilan	20,71	20,71	20,81	20,81	20,81
16	Keberhasilan/ Peningkatan/ Keberhasilan/ Keberhasilan/ Keberhasilan	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22
17	Keberhasilan/ Peningkatan/ Keberhasilan/ Keberhasilan/ Keberhasilan	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
18	Keberhasilan/ Peningkatan/ Keberhasilan/ Keberhasilan/ Keberhasilan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
19	Keberhasilan/ Peningkatan/ Keberhasilan/ Keberhasilan/ Keberhasilan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
20	Keberhasilan/ Peningkatan/ Keberhasilan/ Keberhasilan/ Keberhasilan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
21	Keberhasilan/ Peningkatan/ Keberhasilan/ Keberhasilan/ Keberhasilan	480,31	480,31	5,414,43	5,414,43	5,414,43
22	Keberhasilan/ Peningkatan/ Keberhasilan/ Keberhasilan/ Keberhasilan	30,22	30,22	42,22	42,22	42,22
23	Keberhasilan/ Peningkatan/ Keberhasilan/ Keberhasilan/ Keberhasilan	42,22	42,22	5,02,22	5,02,22	5,02,22
24	Keberhasilan/ Peningkatan/ Keberhasilan/ Keberhasilan/ Keberhasilan	202,40	202,40	212,40	212,40	212,40
25	Keberhasilan/ Peningkatan/ Keberhasilan/ Keberhasilan/ Keberhasilan	800,00	800,00	912,00	912,00	912,00
26	Keberhasilan/ Peningkatan/ Keberhasilan/ Keberhasilan/ Keberhasilan	22,22	22,22	22,00	22,00	22,00
27	Keberhasilan/ Peningkatan/ Keberhasilan/ Keberhasilan/ Keberhasilan	81,41	81,41	81,82	81,82	81,82
28	Keberhasilan/ Peningkatan/ Keberhasilan/ Keberhasilan/ Keberhasilan	9,50	9,50	10,22	10,22	10,22
29	Keberhasilan/ Peningkatan/ Keberhasilan/ Keberhasilan/ Keberhasilan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Keberhasilan/ Peningkatan/ Keberhasilan/ Keberhasilan/ Keberhasilan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.10.1.1-2

KUALIFIKASI DAN KEMAMPUAN HARIAN DAN BULANAN

No	LOKUS/PROBLEMAS KEGLIAAN PRIORITAS	Rencana Tahun 2013 (Rp. jutaan)	Perkiraan Yacutimeper Tahun 2012 (Rp. Milyar)	Tahun 2013		Perkiraan Ngar (Rp. Milyar)		Tahun 2016
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2013	Tahun 2014	
KEMAMPUAN HARIAN								
KEMAMPUAN BULANAN								
1	1. Kemampuan Berpikir Kritis	5,50	5,50	1,500	5,003	8,32	8,32	8,32
2	2. Kemampuan Berpikir Kreatif	5,50	5,50	2,50	3,503	4,51	4,51	4,51
KEMAMPUAN BULANAN								
1	1. Kemampuan Berpikir Kritis	-	-	414,5	55,603	55,59	55,59	55,59
2	2. Kemampuan Berpikir Kreatif	-	-	3,55	13,553	13,543	13,543	13,543
3	3. Kemampuan Berpikir Kritis	-	-	6,48	7,62	7,62	7,62	7,62
4	4. Kemampuan Berpikir Kreatif	-	-	10,55	38,78	38,78	38,78	38,78
5	5. Kemampuan Berpikir Kritis	-	-	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
6	6. Kemampuan Berpikir Kreatif	-	-	4,50	5,003	5,003	5,003	5,003
7	7. Kemampuan Berpikir Kritis	-	-	5,00	5,003	5,003	5,003	5,003
8	8. Kemampuan Berpikir Kreatif	-	-	1,75	4,003	4,003	4,003	4,003
9	9. Kemampuan Berpikir Kritis	-	-	1,70	3,30	3,30	3,30	3,30
10	10. Kemampuan Berpikir Kreatif	-	-	1,25	2,50	2,50	2,50	2,50
11	11. Kemampuan Berpikir Kritis	-	-	6,80	56,20	56,20	56,20	56,20
12	12. Kemampuan Berpikir Kreatif	-	-	40,38	40,38	40,38	40,38	40,38
13	13. Kemampuan Berpikir Kritis	-	-	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10
14	14. Kemampuan Berpikir Kreatif	-	-	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
15	15. Kemampuan Berpikir Kritis	-	-	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
16	16. Kemampuan Berpikir Kreatif	-	-	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
17	17. Kemampuan Berpikir Kritis	-	-	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
18	18. Kemampuan Berpikir Kreatif	-	-	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
19	19. Kemampuan Berpikir Kritis	-	-	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20

11.11.11.11.11

KERANGKA ACUAN BUDAJET PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

No	LOKUS/PROBLEMAS KEGLANAN PRIORITAS	Rencana Tahun 2013 (Rp. Milyar)	Perkiraan Pelaksanaan TAHAP 2012-13 (Rp. Milyar)	Pembacaan Negeri (Rp. Milyar)		
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA						
1	Perencanaan dan	1.334	1.334	10.00	1.000	1.334
2	Perencanaan dan	1.500	1.500	15.00	15.00	1.500
3	Perencanaan dan	25.113	25.113	25.10	25.10	25.113
4	Perencanaan dan	16.84	16.84	16.84	16.84	16.84
5	Perencanaan dan	26.61	26.61	26.61	26.61	26.61
6	Perencanaan dan	16.05	16.05	16.05	16.05	16.05
7	Perencanaan dan	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511
8	Perencanaan dan	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Perencanaan dan	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
10	Perencanaan dan	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Perencanaan dan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Perencanaan dan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Perencanaan dan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Perencanaan dan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Perencanaan dan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Perencanaan dan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Perencanaan dan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

11.14.14-5

MATRIKS 2.2 A TARGET KLERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2013

REHABILITASI LIRIAS BUDAYA : KECUALIYA BERUMUMSIHI KIPUKULAN

No	Priority/Pada ke Prioritas	Indikator	Komunitas/2012	Pembinaan/2012	Tawaran/2013	Pembinaan 2013			Tercapai	Pelaksanaan
						Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
01	REHABILITASI LIRIAS BUDAYA : KECUALIYA BERUMUMSIHI KIPUKULAN	Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Indikator 5 Indikator 6 Indikator 7 Indikator 8 Indikator 9 Indikator 10 Indikator 11 Indikator 12	8 5 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1	8 5 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1	31 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1	29 1 12 5 1 1 1 1 1 1 1 1	29 1 12 5 1 1 1 1 1 1 1 1	100%	100%	
02	REHABILITASI LIRIAS BUDAYA : KECUALIYA BERUMUMSIHI KIPUKULAN	Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Indikator 5 Indikator 6 Indikator 7 Indikator 8 Indikator 9 Indikator 10 Indikator 11 Indikator 12	8 5 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1	8 5 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1	31 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1	29 1 12 5 1 1 1 1 1 1 1 1	29 1 12 5 1 1 1 1 1 1 1 1	100%	100%	

IIIXA-1

REPERBUAN LINTAS BIDANG: KEGIATAN BERTUMBUKSI KEPILIHAN

No	Poin/Time Keluar Peristiwa Kegiatan Pelaksana	Indikator	Konsolidasi 2012	Praktikan Periode 2012	Kosmas 2012	Praktikum Visi 4			Program	Praktikan
						Feb 2014	Mar 2015	Jul 2016		
11.	23	1) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 2) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 3) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 4) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 5) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis	14	31	6	7	8	9	10	11
12.	24	1) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 2) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 3) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 4) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 5) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis	15	32	7	8	9	10	11	12
13.	25	1) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 2) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 3) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 4) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 5) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis	16	33	8	9	10	11	12	13
14.	26	1) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 2) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 3) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 4) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 5) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis	17	34	9	10	11	12	13	14
15.	27	1) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 2) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 3) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 4) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 5) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis	18	35	10	11	12	13	14	15
16.	28	1) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 2) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 3) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 4) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 5) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis	19	36	11	12	13	14	15	16
17.	29	1) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 2) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 3) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 4) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 5) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis	20	37	12	13	14	15	16	17
18.	30	1) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 2) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 3) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 4) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis 5) Berkomunikasi secara lisan dan tertulis	21	38	13	14	15	16	17	18

1111A-3

REPERATURAN BIDANG: KUALITAS BERDIRI KEMILITAN

No	Fungsi/Unit/Kelompok/Perencanaan Keperawatan/Program	Indikator	Komunikasi 2012	Praktik Praktisi Tahun 2012	Kualitas 2012	Praktisi/Visi			Program	Praktisi	
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016			
11.	(2) BIDANG WILAYAH KEMILITAN	(3)	14	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
12	Rencana Perawatan dan Keperawatan	Kelengkapan, ketepatan, keakuratan, prosedur dan biaya, serta keselamatan prosedur keperawatan	2	2	2	2	2	0	2	2	2
		Keberhasilan prosedur keperawatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Keberhasilan prosedur keperawatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		Keberhasilan prosedur keperawatan	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Keberhasilan prosedur keperawatan	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Keberhasilan prosedur keperawatan	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		Keberhasilan prosedur keperawatan	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		Keberhasilan prosedur keperawatan	9	9	9	9	9	9	9	9	9
		Keberhasilan prosedur keperawatan	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Keberhasilan prosedur keperawatan	11	11	11	11	11	11	11	11	11
		Keberhasilan prosedur keperawatan	12	12	12	12	12	12	12	12	12

1111111-5

PERJANJIAN LINTAS BIDANG: KUALITAS BERINFORMASI KEPOLITIKAN

No	Kategori	Indikator	Komunikasi 2012	Praktisi Press 2012	Kualitas 2012	Praktisi 2012			Praktisi 2012	Praktisi 2012	Praktisi 2012	Praktisi 2012
						Januari	Februari	Maret				
11	Perilaku Publik Pegawai Kedua-Pihak	(3) berdasarkan indikator yang ada pada tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa:	14	3	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Perilaku Publik Pegawai Kedua-Pihak	berdasarkan indikator yang ada pada tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa:	15	4	7	8	9	10	11	12	13	14
			16	5	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Perilaku Publik Pegawai Kedua-Pihak	berdasarkan indikator yang ada pada tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa:	17	6	9	10	11	12	13	14	15	16
			18	7	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Perilaku Publik Pegawai Kedua-Pihak	berdasarkan indikator yang ada pada tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa:	19	8	11	12	13	14	15	16	17	18
			20	9	12	13	14	15	16	17	18	19

11111111

REKAPITULASI RENCANA KERJA DAN RENCANA BELANJA

No	Kategori Kegiatan	Indikator	Konsentrasi 2012	Praktik Peningkatan Tahun 2012	Konsentrasi 2013	Praktik Peningkatan Tahun 2013			Program	Praktik
						Tahun 2013	Tahun 2013	Tahun 2013		
11	Kategori Kegiatan Kegiatan Peningkatan	(3) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kendari	14	3	6	7	3	9	10 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kendari	11
12			11	1	1	1	1	1		
13	Kategori Kegiatan Kegiatan Peningkatan	(4) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kendari	15	4	1	1	1	1	11 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kendari	12
16			11	1	1	1	1	1		

REPERYAN LINTAS BIDANG: KETAUTAN BERINFORMASI KEPILIHAN

No	Fungsi/Unit/Kelompok/Program/Keproses	Indikator	Konsentrasi tahun 2012	Praktisitas Perencanaan Tahun 2012	Kualitas tahun 2012	Praktisitas Yajaja			Program	Praktisitas
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		
11	Strategi Pengembangan Organisasi/Kelembagaan	(3) Meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat	14	3	66	17	31	69	100 Tahun Wawasan 2000 Kemampuan Publikasi Laporan KIP	11
12		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	30	30	26	30	30	30		
13		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	20	20	22	20	20	22		
14		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	20	20	22	20	20	22		
15	Strategi Pengembangan Organisasi/Kelembagaan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	14	3	66	17	31	69	100 Tahun Wawasan 2000 Kemampuan Publikasi Laporan KIP	11
16		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	30	30	26	30	30	30		
17		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	20	20	22	20	20	22		
18	Strategi Pengembangan Organisasi/Kelembagaan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	14	3	66	17	31	69	100 Tahun Wawasan 2000 Kemampuan Publikasi Laporan KIP	11
19		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	30	30	26	30	30	30		
20	Strategi Pengembangan Organisasi/Kelembagaan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	14	3	66	17	31	69	100 Tahun Wawasan 2000 Kemampuan Publikasi Laporan KIP	11
21		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	30	30	26	30	30	30		
22	Strategi Pengembangan Organisasi/Kelembagaan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	14	3	66	17	31	69	100 Tahun Wawasan 2000 Kemampuan Publikasi Laporan KIP	11
23		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	30	30	26	30	30	30		
24	Strategi Pengembangan Organisasi/Kelembagaan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	14	3	66	17	31	69	100 Tahun Wawasan 2000 Kemampuan Publikasi Laporan KIP	11
25		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	30	30	26	30	30	30		
26	Strategi Pengembangan Organisasi/Kelembagaan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	14	3	66	17	31	69	100 Tahun Wawasan 2000 Kemampuan Publikasi Laporan KIP	11
27		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	30	30	26	30	30	30		
28	Strategi Pengembangan Organisasi/Kelembagaan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	14	3	66	17	31	69	100 Tahun Wawasan 2000 Kemampuan Publikasi Laporan KIP	11
29		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	30	30	26	30	30	30		
30	Strategi Pengembangan Organisasi/Kelembagaan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	14	3	66	17	31	69	100 Tahun Wawasan 2000 Kemampuan Publikasi Laporan KIP	11
31		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	30	30	26	30	30	30		

1111111111

REPERYAN LINTAS BIDANG: KETAHAPAN BERINFORMASI KEPILIHAN

No	Fungsi/Unit Kerja/Program Kecamatan Pabuaran	Indikator	Konsentrasi 2012	Praktisi Fokus 2012	Konsentrasi 2013	Praktisi Visi 1			Program	Praktisi
						Feb 2014	Mar 2015	Jan 2016		
11.		(3)	14	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
12.	YPT/abang/Unit Kerja/Program Lingkungan Kecamatan	berita/banyar mumpung/papir/pesawat jajanan/kegiatan/kegiatan/kegiatan kegiatan/kegiatan/kegiatan/kegiatan kegiatan/kegiatan/kegiatan/kegiatan	5	5	11	11	11	11	110	K.P.P
13.	YPT/abang/Unit Kerja/Program Lingkungan Kecamatan	berita/banyar mumpung/papir/pesawat jajanan/kegiatan/kegiatan/kegiatan kegiatan/kegiatan/kegiatan/kegiatan kegiatan/kegiatan/kegiatan/kegiatan	5	5	11	11	11	11	110	K.P.P
14.	YPT/abang/Unit Kerja/Program Lingkungan Kecamatan	berita/banyar mumpung/papir/pesawat jajanan/kegiatan/kegiatan/kegiatan kegiatan/kegiatan/kegiatan/kegiatan kegiatan/kegiatan/kegiatan/kegiatan	5	5	11	11	11	11	110	K.P.P
15.	YPT/abang/Unit Kerja/Program Lingkungan Kecamatan	berita/banyar mumpung/papir/pesawat jajanan/kegiatan/kegiatan/kegiatan kegiatan/kegiatan/kegiatan/kegiatan kegiatan/kegiatan/kegiatan/kegiatan	5	5	11	11	11	11	110	K.P.P
16.	YPT/abang/Unit Kerja/Program Lingkungan Kecamatan	berita/banyar mumpung/papir/pesawat jajanan/kegiatan/kegiatan/kegiatan kegiatan/kegiatan/kegiatan/kegiatan kegiatan/kegiatan/kegiatan/kegiatan	5	5	11	11	11	11	110	K.P.P
17.	YPT/abang/Unit Kerja/Program Lingkungan Kecamatan	berita/banyar mumpung/papir/pesawat jajanan/kegiatan/kegiatan/kegiatan kegiatan/kegiatan/kegiatan/kegiatan kegiatan/kegiatan/kegiatan/kegiatan	5	5	11	11	11	11	110	K.P.P

11111111

PERJANJIAN LINTAS BIDANG: KETAUTAN BERINFORMASI KEPILIHAN

No	Poin/Two-Parti/Other Keputusan Pengadilan	Indikator	Konsolidasi 2012	Praktisi Prinsip Tahun 2012	Korupsi 2012	Praktisi Tahun 2012			Praktisi Prinsip Tahun 2013	Praktisi Prinsip Tahun 2013	Praktisi Prinsip Tahun 2013
						Prinsip	Prinsip	Prinsip			
11	121 Menyampaikan informasi yang diperoleh secara sah kepada publik.	(3) Tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat.	14	(5) 100%	(6) 100%	(7) 100%	(8) 100%	(9) 100%	(10) 100%	(11) 100%	Praktisi Prinsip Tahun 2013
12	Pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah.	(4) Tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat.	15	(6) 100%	(7) 100%	(8) 100%	(9) 100%	(10) 100%	(11) 100%	(12) 100%	Praktisi Prinsip Tahun 2013
13	Pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah.	(5) Tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat.	16	(7) 100%	(8) 100%	(9) 100%	(10) 100%	(11) 100%	(12) 100%	(13) 100%	Praktisi Prinsip Tahun 2013
14	Pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah.	(6) Tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat.	17	(8) 100%	(9) 100%	(10) 100%	(11) 100%	(12) 100%	(13) 100%	(14) 100%	Praktisi Prinsip Tahun 2013
15	Pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah.	(7) Tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat.	18	(9) 100%	(10) 100%	(11) 100%	(12) 100%	(13) 100%	(14) 100%	(15) 100%	Praktisi Prinsip Tahun 2013
16	Pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah.	(8) Tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat.	19	(10) 100%	(11) 100%	(12) 100%	(13) 100%	(14) 100%	(15) 100%	(16) 100%	Praktisi Prinsip Tahun 2013
17	Pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah.	(9) Tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat.	20	(11) 100%	(12) 100%	(13) 100%	(14) 100%	(15) 100%	(16) 100%	(17) 100%	Praktisi Prinsip Tahun 2013
18	Pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah.	(10) Tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat.	21	(12) 100%	(13) 100%	(14) 100%	(15) 100%	(16) 100%	(17) 100%	(18) 100%	Praktisi Prinsip Tahun 2013
19	Pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah.	(11) Tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat.	22	(13) 100%	(14) 100%	(15) 100%	(16) 100%	(17) 100%	(18) 100%	(19) 100%	Praktisi Prinsip Tahun 2013
20	Pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah.	(12) Tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat.	23	(14) 100%	(15) 100%	(16) 100%	(17) 100%	(18) 100%	(19) 100%	(20) 100%	Praktisi Prinsip Tahun 2013

REPERYAN LINTAS BIDANG: KETAUTAN BERINFORMASI KEPILIHAN

No	Poin/Diras/Kebijakan/Peraturan	Indikator	Komunikasi 2012	Praktik dan Perilaku Tahun 2012	Korupsi Tahun 2012	Praktik dan Perilaku Tahun 2013			Program	Perkiraan
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		
11.	12) NPD sebagai sumber informasi dan komunikasi	13) Peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi	14) Peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi	15) Peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi	16) Peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi	17) Peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi	18) Peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi	19) Peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi	20) Peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi	21) Peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi
12	Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan	14) Peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi	15) Peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi	16) Peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi	17) Peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi	18) Peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi	19) Peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi	20) Peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi	21) Peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi	22) Peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi

11/11/2012

REKAM LINTAS BIDANG: MELATIAK BERDINAMI KEBILANGAN

No	Pimpinan/Keluarga Perorangan/Kepala Keluarga	Indikator	Kontinuitas 2012	Praktik dan Perilaku Tahun 2012	Kualitas Tahun 2013	Perkiraan Visi 4		Program	Perkiraan	
						Tahun 2014	Tahun 2015 Tahun 2016			
11.	121	(3)	14	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12.	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131
13.	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141

REPERATURAN BIDANG: KUALITAS BERINFORMASI KEMILITAN

No	Poin/Diras, Klausur, Penguasaan Kemampuan Penalaran	Indikator	Kompetensi tahun 2012	Praktikum Penguasaan Tahun 2012	Kuis tahun 2012	Praktikum Uji Coba			Program	Praktikum
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		
11.		(3) Mendeskripsikan konsep, prinsip, dan prosedur pelaksanaan kegiatan komunikasi militer.	14 12	(3) 12	(6) 12	(7) 12	(8) 12	(9) 12	(10) 12	(11) 12
12.	Menjelaskan konsep, prinsip, dan prosedur pelaksanaan kegiatan komunikasi militer.	Menjelaskan konsep, prinsip, dan prosedur pelaksanaan kegiatan komunikasi militer. Menjelaskan konsep, prinsip, dan prosedur pelaksanaan kegiatan komunikasi militer. Menjelaskan konsep, prinsip, dan prosedur pelaksanaan kegiatan komunikasi militer.	14 12	(3) 12	(6) 12	(7) 12	(8) 12	(9) 12	(10) 12	(11) 12
13.	Menjelaskan konsep, prinsip, dan prosedur pelaksanaan kegiatan komunikasi militer.	Menjelaskan konsep, prinsip, dan prosedur pelaksanaan kegiatan komunikasi militer. Menjelaskan konsep, prinsip, dan prosedur pelaksanaan kegiatan komunikasi militer. Menjelaskan konsep, prinsip, dan prosedur pelaksanaan kegiatan komunikasi militer.	14 12	(3) 12	(6) 12	(7) 12	(8) 12	(9) 12	(10) 12	(11) 12

II.11.14.23

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013

KERJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERTIMBANGSI KEPERLUAN

No	Prioritas Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012 (Rp Milyar)	Pulihkan Penopang Tahun 2012 (Rp Milyar)	Rencana Tahun 2013 (Rp Milyar)	Perkiraan Maju		
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	BUDANG LINTAS PEMBANGUNAN YAKHUMKUMH	55,3	35,0	13,5	35,0	35,0	35,0
2	BUDANG PERIKANAN DAN PERKALAKA	658	629,1	1.033,3	301,2	990,7	990,7
3	Peningkatan kemampuan perikanan budidaya melalui peningkatan kualitas benih	34,3	30,8	32,3	27,9	49,7	200,7
4	Peningkatan kemampuan perikanan budidaya melalui peningkatan kualitas benih	4,8	4,4	9,3	5,0	10,0	5,0
5	Peningkatan kemampuan perikanan budidaya melalui peningkatan kualitas benih	4,2	4,2	1,9	3,6	6,7	3,6
6	Peningkatan kemampuan perikanan budidaya melalui peningkatan kualitas benih	10,3	10,1	2,6	10,0	10,0	10,0
7	Peningkatan kemampuan perikanan budidaya melalui peningkatan kualitas benih	20,3	19,9	28,3	26,8	59,1	20,1
8	Peningkatan kemampuan perikanan budidaya melalui peningkatan kualitas benih	3,5	3,5				
9	BUDANG PERIKANAN	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1

HALAM B-1

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIRIMENSI KEPERILAIAN

No	Prioritas Fokus/Prioritas/Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012 (Rp Milyar)	Profilisasi Pencapaian Tahun 2012 (Rp Milyar)	Rencana Tahun 2013 (Rp Milyar)	Profilisasi Maju		
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	BIDANG PERKABANGSARANSAN						
12	Peningkatan Upaya Usaha Kelautan Lokal	24	281	281	281	281	281
1	Peningkatan Usaha Perikanan Tangkap	22	105	105	105	105	105
	BIDANG PERKABANGSARANSAN						
13	Peningkatan Usaha Perikanan Tangkap	22	105	105	105	105	105
14	Peningkatan Usaha Perikanan Tangkap	22	105	105	105	105	105
15	Peningkatan Usaha Perikanan Tangkap	22	105	105	105	105	105
16	Peningkatan Usaha Perikanan Tangkap	22	105	105	105	105	105
17	Peningkatan Usaha Perikanan Tangkap	22	105	105	105	105	105
18	Peningkatan Usaha Perikanan Tangkap	22	105	105	105	105	105
19	Peningkatan Usaha Perikanan Tangkap	22	105	105	105	105	105
20	Peningkatan Usaha Perikanan Tangkap	22	105	105	105	105	105
21	Peningkatan Usaha Perikanan Tangkap	22	105	105	105	105	105
22	Peningkatan Usaha Perikanan Tangkap	22	105	105	105	105	105
23	Peningkatan Usaha Perikanan Tangkap	22	105	105	105	105	105
24	Peningkatan Usaha Perikanan Tangkap	22	105	105	105	105	105
25	Peningkatan Usaha Perikanan Tangkap	22	105	105	105	105	105
26	Peningkatan Usaha Perikanan Tangkap	22	105	105	105	105	105
27	Peningkatan Usaha Perikanan Tangkap	22	105	105	105	105	105

LILIM B-2

KERJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPILIHAN

No	Prioritas Fokus/Prioritas/Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012 (Rp Milyar)	Pulihkan Penempatan Tahun 2012 (Rp Milyar)	Rencana Tahun 2013 (Rp Milyar)	Proyeksi Maju		
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
23	Penerapan Sistem Keamanan dan Keamanan Perikanan	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3
24	Pengembangan Sistem Kerja Perikanan	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
25	Pengembangan Sistem Kerja dan Kerja Perikanan	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
26	Pengembangan Sistem Kerja dan Kerja Perikanan	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7
27	Pengembangan Sistem Kerja dan Kerja Perikanan	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
28	Pengembangan Sistem Kerja dan Kerja Perikanan	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
29	Pengembangan Sistem Kerja dan Kerja Perikanan	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1
30	Pengembangan Sistem Kerja dan Kerja Perikanan	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
31	Pengembangan Sistem Kerja dan Kerja Perikanan	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
32	Pengembangan Sistem Kerja dan Kerja Perikanan	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
33	Pengembangan Sistem Kerja dan Kerja Perikanan	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
34	Pengembangan Sistem Kerja dan Kerja Perikanan	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0

ILM B-3

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERTIMBANGSI KEPERLUAN

No	Prioritas Fokus/Prioritas/Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012 (Rp Miliar)	Pudiran Peningkatan Tahun 2012 (Rp Miliar)	Rencana Tahun 2013 (Rp Miliar)	Proyeksi Maju		
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Penerapan Undang-Undang tentang Sektoral	100	50	150	90	30	90
2.	Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan	100	100	50	100	100	100
3.	Penerapan Undang-Undang tentang Sektoral	50	50	50	50	50	50
4.	Penerapan Undang-Undang tentang Sektoral	50	50	50	50	50	50
5.	Penerapan Undang-Undang tentang Sektoral	50	50	50	50	50	50
6.	Penerapan Undang-Undang tentang Sektoral	50	50	50	50	50	50
7.	Penerapan Undang-Undang tentang Sektoral	50	50	50	50	50	50
8.	Penerapan Undang-Undang tentang Sektoral	50	50	50	50	50	50
9.	Penerapan Undang-Undang tentang Sektoral	50	50	50	50	50	50
10.	Penerapan Undang-Undang tentang Sektoral	50	50	50	50	50	50
11.	Penerapan Undang-Undang tentang Sektoral	50	50	50	50	50	50
12.	Penerapan Undang-Undang tentang Sektoral	50	50	50	50	50	50
13.	Penerapan Undang-Undang tentang Sektoral	50	50	50	50	50	50
14.	Penerapan Undang-Undang tentang Sektoral	50	50	50	50	50	50
15.	Penerapan Undang-Undang tentang Sektoral	50	50	50	50	50	50
16.	Penerapan Undang-Undang tentang Sektoral	50	50	50	50	50	50
17.	Penerapan Undang-Undang tentang Sektoral	50	50	50	50	50	50
18.	Penerapan Undang-Undang tentang Sektoral	50	50	50	50	50	50
19.	Penerapan Undang-Undang tentang Sektoral	50	50	50	50	50	50
20.	Penerapan Undang-Undang tentang Sektoral	50	50	50	50	50	50
21.	Penerapan Undang-Undang tentang Sektoral	50	50	50	50	50	50
22.	Penerapan Undang-Undang tentang Sektoral	50	50	50	50	50	50
		850000	850000	1440000	1080000	1170000	1170000

LILAM B-4

MATRIK 2.2A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2013

LENYAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Kelas Prioritas/Kegiatan Prioritas	Indikator	Rencana Tahun 2012	Praktisi Peningkatan Tahun 2012	Rencana Tahun 2013	Prestasi tahun ini			Program	Pelaksana	
						2014	2015	2016			
(1)	23	(%)	14	15	16	17	18	19		11	
1	Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak	1. APK PAUD (L.K, KB, TPA, NPS)	37,8%	47,8%	41,4%	43,050%	51%	50%			
		2. APK SMP/SMK/PT/Poltek A	45,1%	45,1%	45,84%	45,82%	45,84%	45,84%			
		3. APK SMP/SMK/PT/Poltek B	43,7%	43,7%	45,74%	44,2%	40,6%	43,6%			
		4. APK SMP/SMK/PT/Poltek C	40,4%	40,4%	40,00%	43%	45,1%	47,3%			
		5. APK MT	10,2%	10,2%	10,61%	10,64%	10,64%	10,64%			
		6. APK MI	13,59%	13,59%	13,64%	13,49%	13,49%	13,49%			
		7. APK KTS	14,02%	14,02%	14,81%	14,91%	14,91%	14,91%			
		8. APK DTS	20,22%	20,22%	20,74%	21,41%	21,41%	21,41%			
		9. APK DAI	3,33%	3,33%	3,28%	3,26%	3,26%	3,26%			
		10. Cakupan kunjungan nenasat pertama	0	0	0	0	0	0			
		11. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan mesak disart lengkap	45	45	48	44	42	42			
1.1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Bawah 5	1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi usia 0-11 bulan yang mendapat mesak disart lengkap	48	48	47	47	47				
		2. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi usia 0-11 bulan yang mendapat mesak disart lengkap	90	90	96	96	96	96			
1.2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 0-11	1. Cakupan kunjungan mesak disart pertama	0	0	0	0	0				
		2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi	86	90	87	90	92	92			
		3. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	82	82	83	85	87	87			

11/11/11

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Pelaku Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Lustikahar	Kerangka Tahun 2012	Praktisi/Penelitian Tahun 2012	Kerangka Tahun 2013	Pelaksanaan			Inisiatif	Pelaksanaan
						2014	2015	2016		
1.1	1.1.1. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan	1.1.1.1. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan	104	104	104	104	104	104	104	104
1.2	1.2.1. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan	1.2.1.1. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan	75	75	75	75	75	75	75	75
1.3	1.3.1. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan	1.3.1.1. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan	86	86	86	86	86	86	86	86
1.4	1.4.1. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan	1.4.1.1. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan	86	86	86	86	86	86	86	86
1.5	1.5.1. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan	1.5.1.1. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.6	1.6.1. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan	1.6.1.1. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan	60	60	60	60	60	60	60	60
1.7	1.7.1. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan	1.7.1.1. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan	60	60	60	60	60	60	60	60
1.8	1.8.1. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan	1.8.1.1. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
1.9	1.9.1. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan	1.9.1.1. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152
1.10	1.10.1. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan	1.10.1.1. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.11	1.11.1. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan	1.11.1.1. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223

11 M A 2

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Keluaran Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Lustikhat	Kerangka Tahun 2012	Praktisi/ Penguji Tahun 2012	Kerangka Tahun 2013	Pelaksanaan Anggaran			Inisiatif	Fidelsitas
						2014	2015	2016		
110	Keamanan Kehidupan Keluarga Anak	(2) 1. Jumlah keluarga yang sadar akan pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak-anak, desa/kelurahan 2. Persentase keluarga yang mempunyai kesadaran akan keselamatan dan kesejahteraan prajurit/pembina rumah tangga keluarga desa/kelurahan 3. Jumlah keluarga yang memiliki pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak-anak	141	151	161	171	181	191	Program Penguatan Keluarga Masyarakat	100%
111	Pelayanan/Praktik Disabilitas Anak	1. Jumlah keluarga yang sadar akan pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak-anak, desa/kelurahan 2. Persentase keluarga yang mempunyai kesadaran akan keselamatan dan kesejahteraan prajurit/pembina rumah tangga keluarga desa/kelurahan 3. Jumlah keluarga yang memiliki pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak-anak	141	151	161	171	181	191	Program Penguatan Keluarga Masyarakat	100%
112	Pelayanan/Praktik Disabilitas Anak	1. Jumlah keluarga yang sadar akan pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak-anak, desa/kelurahan 2. Persentase keluarga yang mempunyai kesadaran akan keselamatan dan kesejahteraan prajurit/pembina rumah tangga keluarga desa/kelurahan 3. Jumlah keluarga yang memiliki pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak-anak	141	151	161	171	181	191	Program Penguatan Keluarga Masyarakat	100%
113	Pelayanan/Praktik Disabilitas Anak	1. Jumlah keluarga yang sadar akan pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak-anak, desa/kelurahan 2. Persentase keluarga yang mempunyai kesadaran akan keselamatan dan kesejahteraan prajurit/pembina rumah tangga keluarga desa/kelurahan 3. Jumlah keluarga yang memiliki pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak-anak	141	151	161	171	181	191	Program Penguatan Keluarga Masyarakat	100%
114	Pelayanan/Praktik Disabilitas Anak	1. Jumlah keluarga yang sadar akan pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak-anak, desa/kelurahan 2. Persentase keluarga yang mempunyai kesadaran akan keselamatan dan kesejahteraan prajurit/pembina rumah tangga keluarga desa/kelurahan 3. Jumlah keluarga yang memiliki pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak-anak	141	151	161	171	181	191	Program Penguatan Keluarga Masyarakat	100%

11/11/12

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Rencana Prioritas/Kegiatan Terdetail	Lustikatur	Kerangka Tahun 2012	Praktisitas Pencapaian Tahun 2013	Kerangka Tahun 2013	Pembinaan Insitu			Desain	Fidelsitas	
						2014	2015	2016			
1.15	Perencanaan Kegiatan Pendidikan SD	1. APPE (APPE) dan PPA (APPE) 2. Peningkatan Peserta Didik SD (SD) dan LK (LK) 3. Peningkatan dan Peningkatan (SD) dan LK (LK) 4. Peningkatan dan Peningkatan (SD) dan LK (LK) 5. Peningkatan dan Peningkatan (SD) dan LK (LK) 6. Peningkatan dan Peningkatan (SD) dan LK (LK)	48,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	15,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	16,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	17,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	18,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	19,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	20,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	21,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	22,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%
1.16	Perencanaan Kegiatan Pendidikan SD	1. APPE (APPE) dan PPA (APPE) 2. Peningkatan Peserta Didik SD (SD) dan LK (LK) 3. Peningkatan dan Peningkatan (SD) dan LK (LK) 4. Peningkatan dan Peningkatan (SD) dan LK (LK) 5. Peningkatan dan Peningkatan (SD) dan LK (LK) 6. Peningkatan dan Peningkatan (SD) dan LK (LK)	48,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	15,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	16,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	17,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	18,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	19,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	20,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	21,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	22,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%
1.17	Perencanaan Kegiatan Pendidikan SD	1. APPE (APPE) dan PPA (APPE) 2. Peningkatan Peserta Didik SD (SD) dan LK (LK) 3. Peningkatan dan Peningkatan (SD) dan LK (LK) 4. Peningkatan dan Peningkatan (SD) dan LK (LK) 5. Peningkatan dan Peningkatan (SD) dan LK (LK) 6. Peningkatan dan Peningkatan (SD) dan LK (LK)	48,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	15,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	16,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	17,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	18,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	19,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	20,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	21,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%	22,10% 1,10% 94,30% 28,90% 3,64%

11 M.A.4

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Pelaku Prioritas/Kegiatan Prioritas	Lustika ter	Kerangka Tahun 2012	Praktisi/Pencapaian Tahun 2012	Kerangka Tahun 2013	Pelaksanaan anggi			Inisiatif	Fidelsitas
						2014	2015	2016		
21	21.1	21.1.1	41,4%	41,4%	41,4%	47,1%	48,1%	49,1%	1,0%	11,1
		1. Peningkatan SMK yang beroperasi, tercapai 41,4% dari target	41,4%	41,4%	41,4%	46,7%	46,7%	47,0%		
		2. Peningkatan jumlah terdapat, tercapai 41,4% dari target	41,4%	41,4%	41,4%	46,7%	46,7%	47,0%		
22	22.1	22.1.1	42,4%	42,4%	42,4%	47,1%	48,1%	49,1%	1,0%	11,1
		1. APK SMK	42,4%	42,4%	42,4%	46,7%	46,7%	47,0%		
		2. Peningkatan jumlah SMK yang beroperasi, tercapai 42,4% dari target	42,4%	42,4%	42,4%	46,7%	46,7%	47,0%		
		3. Peningkatan jumlah terdapat, tercapai 42,4% dari target	42,4%	42,4%	42,4%	46,7%	46,7%	47,0%		
23	23.1	23.1.1	43,4%	43,4%	43,4%	47,1%	48,1%	49,1%	1,0%	11,1
		1. APK SMK	43,4%	43,4%	43,4%	46,7%	46,7%	47,0%		
		2. Peningkatan jumlah SMK yang beroperasi, tercapai 43,4% dari target	43,4%	43,4%	43,4%	46,7%	46,7%	47,0%		
		3. Peningkatan jumlah terdapat, tercapai 43,4% dari target	43,4%	43,4%	43,4%	46,7%	46,7%	47,0%		
24	24.1	24.1.1	44,4%	44,4%	44,4%	47,1%	48,1%	49,1%	1,0%	11,1
		1. APK SMK	44,4%	44,4%	44,4%	46,7%	46,7%	47,0%		
		2. Peningkatan jumlah SMK yang beroperasi, tercapai 44,4% dari target	44,4%	44,4%	44,4%	46,7%	46,7%	47,0%		
		3. Peningkatan jumlah terdapat, tercapai 44,4% dari target	44,4%	44,4%	44,4%	46,7%	46,7%	47,0%		
25	25.1	25.1.1	45,4%	45,4%	45,4%	47,1%	48,1%	49,1%	1,0%	11,1
		1. APK SMK	45,4%	45,4%	45,4%	46,7%	46,7%	47,0%		
		2. Peningkatan jumlah SMK yang beroperasi, tercapai 45,4% dari target	45,4%	45,4%	45,4%	46,7%	46,7%	47,0%		
		3. Peningkatan jumlah terdapat, tercapai 45,4% dari target	45,4%	45,4%	45,4%	46,7%	46,7%	47,0%		

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Kelus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Lustikatur	Kerangka Tahun 2012	Praktisi/Pencapaian Tahun 2013	Kerangka Tahun 2013	Pelaksanaan maju			Inisiatif	Pelaksana
						2014	2015	2016		
1.1	Unit dan keluarga (Kerangka Subkegiatan 1)	[2]	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1	Unit dan keluarga (Kerangka Subkegiatan 1)	Perubahan model program berbasis keluarga di Yogyakarta	1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Program Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga	1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga	1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga	1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga	1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga	1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga, 1 Modul: Kerangka Keluarga	Program Kerangka Keluarga Berbasis Keluarga	Gubernur dan Bupati Yogyakarta
1.1.2	Unit dan keluarga (Kerangka Subkegiatan 1)	Perubahan model program berbasis keluarga di Yogyakarta	5	5	5	5	5	5	5	5
1.2	Unit dan keluarga (Kerangka Subkegiatan 2)	Perubahan model program berbasis keluarga di Yogyakarta	1.516.430	1.516.430	2.440.140	1.403.400	1.565.000	2.362.140	Program Kerangka Keluarga Berbasis Keluarga	Gubernur dan Bupati Yogyakarta
2	Program Kerangka Keluarga Berbasis Keluarga (Kerangka Subkegiatan 1)	Perubahan model program berbasis keluarga di Yogyakarta	90%	90%	100%	100%	100%	100%	Program Kerangka Keluarga Berbasis Keluarga	Gubernur dan Bupati Yogyakarta
3.1	Unit dan keluarga (Kerangka Subkegiatan 1)	Perubahan model program berbasis keluarga di Yogyakarta	90%	90%	100%	100%	100%	100%	Program Kerangka Keluarga Berbasis Keluarga	Gubernur dan Bupati Yogyakarta

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Peluas Prioritas/kegiatan Prioritas	Lustikatur	Kerucut Tahun 2012	Praktisi Pendidikan Tahun 2012	Kerucut Tahun 2013	Pelaksanaan 2013			Pencapaian	Pelaksana
						2014	2015	2016		
2.2	Program Pengembangan Masyarakat	[2]	204	4.03	2.30	161	171	181	100%	Gerakan Masyarakat Peduli Anak
2.3	Strategi Pengembangan Pendidikan Masyarakat Asia Timur dan Pasifik	Kejadian kekerasan pada perempuan dan anak yang disebabkan oleh budaya patriarki dan budaya kekerasan berbasis gender	25%	2.03%	2.03%	25%	25%	25%	25%	Program Kerja dan Pelaksanaan Tahunan Direktorat Pendidikan Masyarakat
2.4	Penelitian Ilmiah dan Penelitian Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Pasifik	Kejadian kekerasan pada perempuan dan anak yang disebabkan oleh budaya patriarki dan budaya kekerasan berbasis gender	25%	2.03%	2.03%	25%	25%	25%	25%	Program Kerja dan Pelaksanaan Tahunan Direktorat Pendidikan Masyarakat
2.5	Penelitian Ilmiah dan Penelitian Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Pasifik	Kejadian kekerasan pada perempuan dan anak yang disebabkan oleh budaya patriarki dan budaya kekerasan berbasis gender	25%	2.03%	2.03%	25%	25%	25%	25%	Program Kerja dan Pelaksanaan Tahunan Direktorat Pendidikan Masyarakat
2.6	Penelitian Ilmiah dan Penelitian Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Pasifik	Kejadian kekerasan pada perempuan dan anak yang disebabkan oleh budaya patriarki dan budaya kekerasan berbasis gender	25%	2.03%	2.03%	25%	25%	25%	25%	Program Kerja dan Pelaksanaan Tahunan Direktorat Pendidikan Masyarakat

21 M.A.S

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Peluas Prioritas/kegiatan Prioritas	Lustikatur	Kerangka Tahun 2012	Praktisi/Pencapaian Tahun 2012	Kerangka Tahun 2013	Pelayanan maju			Inisiatif	Pelaksanaan
						2014	2015	2016		
2.1	2.1	2.1	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%
2.2	2.2	2.2	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%
2.3	2.3	2.3	17,000	171,000	171,921	171,921	171,921	171,921	Program Rukhmitas Sosial	Komunikasi Sosial
2.4	2.4	2.4	35%	35%	35%	35%	35%	35%	Program Rukhmitas Sosial	Komunikasi Sosial
2.5	2.5	2.5	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Program Rukhmitas Sosial	Komunikasi Sosial
2.6	2.6	2.6	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Program Rukhmitas Sosial	Komunikasi Sosial
2.7	2.7	2.7	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Program Rukhmitas Sosial	Komunikasi Sosial
2.8	2.8	2.8	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Program Rukhmitas Sosial	Komunikasi Sosial

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Kelas Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Kerangka Tahun 2012	Praktisi Tahun 2012	Kerangka Tahun 2013	Pelaksanaan target			Inisiatif	Pelaksana
						2014	2015	2016		
3	Peningkatan Kelenyapan Perindungan Anak	(2)	141	151	161	171	181	191	201	121
3.1	Sistem Referensi Anak Kerasukan dan Psikologi Anak (2)	Persentase jumlah kunjungan dan perorangan pemanggilan terintegrasi di seluruh kabupaten/kota yang diadukan di dalam negeri pada tahun 2012 yang terintegrasi dengan sistem referensi anak kerasukan dan psikologi anak (2)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Majelis Adat
3.2	Operasi Kurban HCV (3)	Jumlah kunjungan dan kunjungan terintegrasi ke 12 yang terintegrasi dengan HCV	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Zekungat, Baiturrahman, Majelis Ulama Indonesia
3.3	Kelembagaan Perindungan Anak (3)	Persentase jumlah kunjungan dan perorangan pemanggilan terintegrasi di seluruh kabupaten/kota yang diadukan di dalam negeri pada tahun 2012 yang terintegrasi dengan sistem referensi anak kerasukan dan psikologi anak (2)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Perlindungan Anak, Peningkatan Perindungan Anak, Peningkatan Perindungan Anak
3.4	Operasi Kurban HCV (3)	Jumlah kunjungan dan kunjungan terintegrasi ke 12 yang terintegrasi dengan HCV	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Perlindungan Anak, Peningkatan Perindungan Anak, Peningkatan Perindungan Anak

11.11.11.11.11

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Pelaku Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Lustikator	Kerencana Tahun 2012	Praktisi/Pencapaian Tahun 2012	Kerencana Tahun 2013	Pelayanan/Aspek			Indikator	Pelaksanaan	
						2014	2015	2016			
21	23 Program pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan anak	23 1. Jumlah kejadian dan persambutan anak pada tingkat awal 2. Jumlah G/L dan pemdatanya w/w 3. Jumlah kejadian dan persambutan anak pada tingkat anak 4. Jumlah G/L dan pemdatanya w/w 5. Jumlah kasus yang masuk ke dalam pelayanan dan jumlah persambutan	1	15	16	17	18	19	Program dan indikator awal	Gerakan dan PPK	
2			2	3	4	5	6	7	8	9	
3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
4			5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	24 Program pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan anak	24 1. Jumlah kejadian dan persambutan anak pada tingkat awal 2. Jumlah G/L dan pemdatanya w/w 3. Jumlah kejadian dan persambutan anak pada tingkat anak 4. Jumlah kasus yang masuk ke dalam pelayanan dan jumlah persambutan	1	15	16	17	18	19	Program dan indikator awal	Gerakan dan PPK	
2			2	3	4	5	6	7	8	9	
3			4	5	6	7	8	9	10	11	12

11.11.11.1

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Pelaku Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Lustikalor	Kerencana Tahun 2012	Praktikan Pelaksanaan Tahun 2012	Kerencana Tahun 2013	Pelaksanaan 2013			Berkas	Pelaksanaan
						2014	2015	2016		
3.1	Program prioritas: Strategi Kebijakan Pencegahan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah kejadian kekerasan terhadap perempuan 2. Jumlah korban pemerkosaan 3. Jumlah korban perdagangan manusia 4. Perkiraan korban HIV/AIDS	141	151	161	171	181	191	Program dan anggaran Anak	Kerangka acuan PPD 12
3.2	Program prioritas: Strategi Kebijakan Pengawasan dan Penyelamatan Anak	1. Jumlah kejadian pelanggaran yang layak 2. Jumlah korban pelanggaran yang layak 3. Jumlah kejadian pelanggaran yang layak 4. Jumlah korban pelanggaran yang layak	1	1	1	1	1	1	Program dan anggaran Anak	Kerangka acuan PPD 13
3.3	Program prioritas: Strategi Kebijakan Pencegahan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah kejadian pelanggaran yang layak 2. Jumlah korban pelanggaran yang layak 3. Jumlah kejadian pelanggaran yang layak 4. Jumlah korban pelanggaran yang layak	10	10	10	10	10	10	Program dan anggaran Anak	Kerangka acuan PPD 14

11/11/2012

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Pelus Prioritas/ Kegiatan Terpadu	Lustikator	Kerangka Tahun 2012	Praktisi/Penanggung Jawab 2012	Kerangka Tahun 2013	Pelaksanaan			Daerah	Pelaksana
						2014	2015	2016		
3.10	Program melek huruf dan literasi (Literacy Campaign) Gerakan Literasi Anak (GLA)	1. Jumlah kegiatan literasi yang dilaksanakan di berbagai desa/arek 2. Jumlah K/L dan pendamping yang terlibat dalam kegiatan literasi 3. Jumlah K/L dan pendamping yang terlibat dalam penyusunan buku literasi 4. Pelaksanaan survey Demografi K/L	1	151	161	171	181	191	Program Literasi Anak	Gerakan Literasi Anak
3.11	Program melek huruf dan literasi (Literacy Campaign) Gerakan Literasi Anak (GLA)	1. Jumlah kegiatan literasi yang dilaksanakan di berbagai desa/arek 2. Jumlah K/L dan pendamping yang terlibat dalam kegiatan literasi 3. Jumlah K/L dan pendamping yang terlibat dalam penyusunan buku literasi 4. Pelaksanaan survey Demografi K/L	1	151	161	171	181	191	Program Literasi Anak	Gerakan Literasi Anak

11/11/2012

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Peluas Prioritas/kegiatan Prioritas	Lustikatur	Kerangka Tahun 2012	Praktisi/Pencapaian Tahun 2012	Kerangka Tahun 2013	Pelaksanaan			Berkas	Pelaksanaan
						2014	2015	2016		
3.12	Program prioritas: Strategi Nasional Anak yang Aman, Sehat, dan Berprestasi	1. Jumlah kegiatan pembinaan anak yang berhasil mencapai target 2. Jumlah KGI dan proyek yang berhasil dilaksanakan sesuai yang direncanakan 3. Jumlah KGI dan proyek yang berhasil dilaksanakan 4. Jumlah masalah yang terakumulasi	2	4	161	171	181	191	Program dan Laporan Grafik	121
3.13	Program prioritas: Strategi Nasional Anak yang Aman, Sehat, dan Berprestasi	1. Jumlah kegiatan pembinaan anak yang berhasil mencapai target 2. Jumlah KGI dan proyek yang berhasil dilaksanakan sesuai yang direncanakan 3. Jumlah KGI dan proyek yang berhasil dilaksanakan 4. Jumlah masalah yang terakumulasi	2	4	161	171	181	191	Program dan Laporan Grafik	121

11.11.11.14

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Kelas Prioritas/kegiatan Prioritas	Lustika/ku	Kerangka Tahun 2012	Praktisi/Pencapaian Tahun 2012	Kerangka Tahun 2013	Pelayanan/layanan			Berkas	Pelibatan
						2014	2015	2016		
3.11	Kelembagaan dan kerjasama Subjawan dan Supjawan	1. Jumlah lembaga yang siap untuk 2. Jumlah K/L dan pelaksana 3. Jumlah tenaga kerja siap anak 4. Jumlah K/L dan pelaksana yang sudah siap dan siap untuk 5. Jumlah K/L dan pelaksana yang sudah siap dan siap untuk	14	15	16	17	18	19	20	21
3.15	Perencanaan dan pelaksanaan Perlindungan Anak (PDA)	1. Jumlah lembaga yang siap untuk 2. Jumlah K/L dan pelaksana 3. Jumlah tenaga kerja siap anak 4. Jumlah K/L dan pelaksana yang sudah siap dan siap untuk 5. Jumlah K/L dan pelaksana yang sudah siap dan siap untuk	16	16	17	18	19	20	21	22

Keterangan:

- 1. Laporan kelembagaan pada RAK III (PDA) dan RAK IV (PDA) dan RAK V (PDA)
- 2. Laporan kelembagaan pada RAK III (PDA) dan RAK IV (PDA) dan RAK V (PDA)
- 3. Laporan kelembagaan pada RAK III (PDA) dan RAK IV (PDA) dan RAK V (PDA)
- 4. Laporan kelembagaan pada RAK III (PDA) dan RAK IV (PDA) dan RAK V (PDA)
- 5. Laporan kelembagaan pada RAK III (PDA) dan RAK IV (PDA) dan RAK V (PDA)

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK (Dalam Rp. Miliar)

No	Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012	Praktisn Pencapaian Tahun 2012	Rencana Tahun 2013	Praktisn Meju		
					2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak	23.548,0	23.548,0	32.024,4	44.056,3	46.634,7	49.509,4
1.1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi ¹	119,9	119,9	224,0	140,0	140,0	140,0
1.2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak ¹	104,1	104,1	124,2	122,7	122,7	121,1
1.3	Peningkatan Gizi Masyarakat ¹	314,5	314,5	268,0	309,8	332,5	359,7
1.4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Kebahagiaan Media ¹	35,0	35,0	36,8	41,3	43,5	45,8
1.5	Peningkatan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Mata ¹	132,5	132,5	93,9	150,7	160,7	160,7
1.6	Pengendalian Penyakit Menular Langsung ¹	99,1	99,1	220,0	132,3	132,3	132,3
1.7	Pengendalian Lipidemia ¹	141,2	141,2	200,0	135,9	183,6	216,4
1.8	Peningkatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan ¹	113,6	113,6	119,8	201,1	231,2	243,3
1.9	Peningkatan Kesehatan Mental ¹	2,5	2,5	9,0	9,2	9,2	9,3
1.10	Peningkatan Kesehatan Balita dan Anak ¹	5,3	5,3	5,0	6,3	6,3	6,3
1.11	Pengembangan Diseminasi Informasi, PIGN ⁴	27,6	27,6	27,6	28,6	28,6	28,6
1.12	Penggiatan Lembaga Keahliantaraan Pemerintah ²	44,0	44,0	98,0	190,1	190,1	190,1
1.13	Penggiatan Lembaga Keahliantaraan Masyarakat ³	13,0	13,0	13,0	13,9	13,9	14,3

II.M.B-1

(Dalam Rp. Miliar)

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012 (3)	Pencapaian Tahun 2012 (4)	Rencana Tahun 2013 (5)	Pra-draan Maju		
					2014 (6)	2015 (7)	2016 (8)
(1)	(2)						
1.14	Penyediaan Layanan PAUD ¹	1.363,0	1.363,0	1.206,0	1.237,8	1.387,0	1.547,5
1.15	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan SD ²	2.971,1	2.971,1	4.081,6	5.613,3	6.155,3	7.423,6
1.16	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan SMP ³	4.112,0	4.112,0	4.040,2	4.616,3	5.363,2	6.144,7
1.17	Peningkatan Akses dan Mutu FK dan PLK SD/SLU/SMP/PLU ⁴	351,1	351,1	674,7	775,9	392,3	1.026,1
1.18	Peningkatan dan Peningkatan Pendidikan SMK ⁵	2.173,1	2.173,1	3.067,4	7.036,5	8.237,5	8.649,8
1.19	Peningkatan dan Peningkatan Pendidikan SMA ⁶	1.695,9	1.695,9	2.468,1	7.416,7	7.967,9	8.261,5
1.20	Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB ⁷	258,9	258,9	313,8	365,7	427,3	483,2
1.21	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pelatihan ⁸	360,0	360,0	363,5	519,6	593,7	593,3
1.22	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah ⁹	531,4	531,4	326,2	374,2	374,2	374,2
1.23	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah ¹⁰	585,0	585,0	338,8	385,1	385,1	385,1

II.1.MB-2

(Unit: Rp. Miliar)

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012	Pencapaian Tahun 2012	Rencana Tahun 2013	Pra-drajan Maju		
					2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.24	Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu ¹	4.552,9	4.552,9	3.634,0	9.262,0	9.262,0	9.262,0
1.25	Peningkatan Akses dan Mutu Kelembagaan Akademi ¹	939,2	939,2	659,0	709,6	709,6	709,6
1.26	Penyediaan Subsidi Pendidikan Agama Islam Bermutu	236,2	236,2	199,4	199,4	199,4	199,4
1.27	Bina Masyarakat dan Masyarakat Keluarga ⁹	31,0	31,0	39,7	36,7	39,0	39,0
1.28	Padanan, Pemupukan Teknik, dan Peningkatan Teknis/Supervisi/Politisasi/Sosialisasi/Perencanaan Pembiayaan dan Pendidikan Pemilih ⁷	99,0	99,0	91,0	80,0	80,0	80,0
1.29	Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunjai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) ¹	2.094,9	2.094,9	2.084,9	2.694,9	2.782,5	2.792,5
2	Peningkatan Perlindungan Anak dari Berbagai Tindakan Kekerasan dan Diskriminasi	477,1	477,1	504,9	516,4	575,5	605,8
2.1	Pengawasan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan ¹¹	17,0	17,0	10,5	14,0	13,6	13,6
2.2	Penganggulangan Kasus Kekerasan ¹¹	79,1	79,1	70,5	77,5	85,3	93,0
2.3	Pemantauan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik ²	6,0	6,0	6,0	6,7	7,7	8,2
2.4	Pemantauan, Huluangan, dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tenggara ²	3,7	3,7	3,7	4,9	5,9	6,4
2.5	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Pengawasan Pekerja Anak ¹¹	71,2	71,2	72,0	82,0	82,0	82,0
2.6	Beladiah dan Perlindungan Anak ¹⁰	305,7	305,7	336,8	357,5	377,1	397,9

III.M.B-3

(Dalam Rp. Miliar)

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012 (3)	Pencapaian Tahun 2012 (4)	Rencana Tahun 2013 (5)	Pra-drajan Maju		
					2014 (6)	2015 (7)	2016 (8)
(1)	(2)						
2.7	Pertumbuhan Penyelenggaraan: Kegiatan di Bidang Kesehatan dan Pevsatan Waygo Binaan Dewasarakatan ¹⁾	1,5	1,5	2,0	2,5	2,5	2,5
2.8	Pertumbuhan Penyelenggaraan: Kegiatan di Bidang Bimbingan Konseling dan Anak ²⁾	1,9	1,9	1,4	1,4	1,4	1,4
3	Peningkatan Kelenbagaan Perlindungan Anak	97,6	97,6	104,8	114,1	114,8	114,8
3.1	Sistem Informasi Manajemen dan Teknologi Informasi ³⁾	30,2	30,2	30,6	30,6	30,6	30,6
3.2	Kegiatan Karangmas HAM ⁴⁾	1,8	1,8	2,4	2,4	2,4	2,4
3.3	Kegiatan Perencanaan, Perencanaan Perundang-undangan ⁵⁾	13,4	13,4	14,6	15,9	16,2	16,2
3.4	Kegiatan Harmonisasi Perundang-undangan ⁶⁾	5,7	5,7	14,6	15,9	16,2	16,2
3.5	Pelayanan dan Harmonisasi Kebijakan Pemecahan Hak Peradilan Anak ⁷⁾	3,4	3,4	2,4	5,1	5,1	5,1
3.6	Pelayanan dan Harmonisasi Kebijakan Pemecahan Hak Kesehatan Anak ⁸⁾	2,8	2,8	2,0	3,9	3,9	3,9
3.7	Pelayanan dan Harmonisasi Kebijakan Pemecahan Hak Peradilan Anak ⁹⁾	1,8	1,8	2,5	2,4	2,4	2,4

II.M.B.4

(Dalam Rp. Miliar)

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK

No	Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012 (3)	Pencapaian Tahun 2012 (4)	Rencana Tahun 2013 (5)	Pra-Rencana Maju		
					2014 (6)	2015 (7)	2016 (8)
(1)	(2)						
3.8	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan yang Layak untuk Anak ¹⁾	1,7	1,7	1,7	2,4	2,4	2,4
3.9	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup (KALH) di Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ¹⁾	10,2	10,2	7,4	8,4	0,1	8,4
3.10	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Pada Anak ²⁾	2,1	2,1	6,2	2,1	2,1	2,1
3.11	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Tentang Masalah Sosial Anak ³⁾	3,2	3,2	3,2	4,0	4,0	4,0
3.12	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan untuk Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum ⁴⁾	3,9	3,9	2,9	5,9	5,9	5,9
3.13	Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus ⁵⁾	2,6	2,6	2,1	3,6	3,6	3,6

ILUMIR-5

LINTAS BIDANG : PERLINDUNGAN ANAK
(Dalam Rp. Miliar)

No	Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012	Pencapaian Tahun 2012	Rencana Tahun 2013	Pra-draan Maju		
					2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.14	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Hak Sipil Anak ¹⁾	1,2	1,2	1,2	1,8	1,9	1,0
3.15	Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI) ²⁾	0,6	0,6	10,0	10,0	10,0	10,0

Keterangan:

¹⁾ Angka Acuan di 5 tahun (2013-2017);

²⁾ Kegiatan ini tercantum pada Bab II (Bidang Sosial, Budaya, dan Kehidupan Beragama);

³⁾ Kegiatan ini tercantum pada Bab III (Bidang Keamanan);

⁴⁾ Kegiatan ini tercantum pada Bab VI (Bidang Budaya);

⁵⁾ Kegiatan ini tercantum pada Bab VII (Bidang Pemerintahan dan Keamanan);

⁶⁾ Kegiatan ini tercantum pada Bab VIII (Bidang Infrastruktur Aparatur);

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

NO	PRORITAS/FOKUS PROGRAM/ASPEK ACU/TAHAP/PR. GINTAS	INDIKATOR	STADIUM TAHUN 2012	STADIUM TAHUN 2013	STADIUM TAHUN 2014	RTR, PASARIPAL			KEMERDEKAAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						TOTAL	TAHAP 2014	TAHAP 2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	Demokrasi - Adanya warga yang	Demokrasi sebagai nilai yang dipegang oleh masyarakat sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	2	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

11.11.11

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

NO	PENGITIHAN FOKUS POMBAK ACARA/KEPERCANTAN	INDIKATOR	SIMPANA TAHUN 2012	PRAMUKA REKORDBUKU TAHUN 2012	SIMPANA TAHUN 2013	RTR, PASARIBALL			REKORDBUKU
						TUM. 2014	TAHUN 2014	TAHUN 2015	
1	1. Membaca, Peningkatan dan Keterampilan Berbahasa								
	A. Tokoh nasional Peningkatan kemampuan dan keterampilan berbahasa	Menyebutkan tokoh-tokoh nasional yang berprestasi dalam berbagai bidang kehidupan	600	600	600	700	700	700	
1	1. Meningkatkan kemampuan dan prestasi diri	Menyebutkan tokoh-tokoh nasional yang berprestasi dalam berbagai bidang kehidupan	600	600	600	700	700	700	Menyebutkan tokoh-tokoh nasional yang berprestasi dalam berbagai bidang kehidupan
1	1. Peningkatan kemampuan dan prestasi diri	Menyebutkan tokoh-tokoh nasional yang berprestasi dalam berbagai bidang kehidupan	600	600	600	700	700	700	Menyebutkan tokoh-tokoh nasional yang berprestasi dalam berbagai bidang kehidupan
	A. Fokus Fokus: Peningkatan kemampuan dan prestasi diri	Menyebutkan tokoh-tokoh nasional yang berprestasi dalam berbagai bidang kehidupan	600	600	600	700	700	700	Menyebutkan tokoh-tokoh nasional yang berprestasi dalam berbagai bidang kehidupan
1	1. Peningkatan kemampuan dan prestasi diri	Menyebutkan tokoh-tokoh nasional yang berprestasi dalam berbagai bidang kehidupan	600	600	600	700	700	700	Menyebutkan tokoh-tokoh nasional yang berprestasi dalam berbagai bidang kehidupan
2	2. Peningkatan kemampuan dan prestasi diri	Menyebutkan tokoh-tokoh nasional yang berprestasi dalam berbagai bidang kehidupan	600	600	600	700	700	700	Menyebutkan tokoh-tokoh nasional yang berprestasi dalam berbagai bidang kehidupan

11.11.11.3

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

R/O	PROGRAM/FOKUS POMBA/AS/2 ACSI/AT/AN/PP/GRIT/ES	INDIKATOR	SIMPANA TAHUN 2012	PRAMUKA REKORDBUK TAHUN 2012	SIMPANA TAHUN 2013	RFR : PAKSI/PAJAL			FRUGSI/AM	REKORDBUK
						TOTAL 2013	TAHUN 2013	TAHUN 2013		
B	Teknik Perencanaan dan Pengorganisasian Kecak. Kemandirian dan Religiusitas Pendidikan Karakteristik	Kemampuan dan A/yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan Kemandirian dan Religiusitas Pendidikan Karakteristik	2.000	2.000	5.700	5.000	6.204	1.508		Kemandirian
1	Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat	Murid yang dapat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat	2.000	2.000	5.700	5.000	6.204	1.508	Program Pendidikan Masyarakat	Kemandirian
2	Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat	Murid yang dapat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat	100	100	300	300	300	100		
C	Program Perencanaan dan Pengorganisasian Kecak. Kemandirian dan Religiusitas Pendidikan Karakteristik	Murid yang dapat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat	20.000	20.000	26.274	30.000	31.126			Kemandirian dan Religiusitas Pendidikan
1	Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat	Murid yang dapat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat	200	200	200	200	200	200	Program Pendidikan Masyarakat	Kemandirian
2	Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat	Murid yang dapat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat	100	100	100	100	100	100		
3	Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat	Murid yang dapat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat	100	100	100	100	100	100		

11.11.11.4

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

NO	PROGRAM/ASPEK/POHON/ASPEK/INDIKATOR	INDIKATOR	SIMPANA TAHAP 2012	SIMPANA TAHAP 2013	RTR, RASBIRPAL			REGRASAM	RE-PROGRAM
					TOTAL 2014	TAHAP 2014	TAHAP 2015		
0	PRORITAS/FOKUS/POHON/ASPEK/INDIKATOR	Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan							terintegrasi
1	Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan	Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
2	Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan	Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
3	Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan	Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
4	Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan	Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%

11111111

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

R/O	PRORITAS/FOKUS PROGRAM/ASPEK ACARA/KEPERCANTOS	INDIKATOR	SIMPANA TAHUN 2012	PRORITAS/FOKUS PROGRAM/ASPEK ACARA/KEPERCANTOS TAHUN 2012	SIMPANA TAHUN 2012	RFR, PASARISAL			PROGRAM	SE-DEKAPAK
						TOTAL 2011	7-AUGUSTUS	7-AUGUSTUS		
		1. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
		2. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
		3. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
		4. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
		5. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
1	Pedagogis, Sosial, dan Budaya, dan Kelembagaan	1. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
2	Pedagogis, Sosial, dan Budaya, dan Kelembagaan	1. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
3	Pedagogis, Sosial, dan Budaya, dan Kelembagaan	1. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
4	Pedagogis, Sosial, dan Budaya, dan Kelembagaan	1. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
5	Pedagogis, Sosial, dan Budaya, dan Kelembagaan	1. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
6	Pedagogis, Sosial, dan Budaya, dan Kelembagaan	1. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
7	Pedagogis, Sosial, dan Budaya, dan Kelembagaan	1. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
8	Pedagogis, Sosial, dan Budaya, dan Kelembagaan	1. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
9	Pedagogis, Sosial, dan Budaya, dan Kelembagaan	1. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
10	Pedagogis, Sosial, dan Budaya, dan Kelembagaan	1. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
11	Pedagogis, Sosial, dan Budaya, dan Kelembagaan	1. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
12	Pedagogis, Sosial, dan Budaya, dan Kelembagaan	1. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
13	Pedagogis, Sosial, dan Budaya, dan Kelembagaan	1. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
14	Pedagogis, Sosial, dan Budaya, dan Kelembagaan	1. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
15	Pedagogis, Sosial, dan Budaya, dan Kelembagaan	1. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
16	Pedagogis, Sosial, dan Budaya, dan Kelembagaan	1. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
17	Pedagogis, Sosial, dan Budaya, dan Kelembagaan	1. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
18	Pedagogis, Sosial, dan Budaya, dan Kelembagaan	1. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
19	Pedagogis, Sosial, dan Budaya, dan Kelembagaan	1. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		
20	Pedagogis, Sosial, dan Budaya, dan Kelembagaan	1. Mengetahui bahwa SRM-A sudah terdistribusi dan dilaksanakan di seluruh	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%		

Urutan Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

R/O	PRORITAS/FOKUS PROGRAM/ASPEK KEGIATAN/PRORITAS	INDIKATOR	STRUKTUR TAHUN 2012	PRORAMA/REKORDESIAN TAHUN 2012	STRUKTUR TAHUN 2013	RFR : RASIONALISASI			REKORDESIAN	REKORDESIAN
						TOTAL 2014	TOTAL 2015	TOTAL 2016		
1	Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Profesionalitas dan Kompetensi	1. Tim pelaksana kegiatan dibentuk 2. Tim pelaksana kegiatan dibentuk 3. Tim pelaksana kegiatan dibentuk 4. Tim pelaksana kegiatan dibentuk	200	200	200	200	200	200	200	200
2	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1. Tim pelaksana kegiatan dibentuk 2. Tim pelaksana kegiatan dibentuk 3. Tim pelaksana kegiatan dibentuk 4. Tim pelaksana kegiatan dibentuk	3.000	3.000	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1. Tim pelaksana kegiatan dibentuk 2. Tim pelaksana kegiatan dibentuk 3. Tim pelaksana kegiatan dibentuk 4. Tim pelaksana kegiatan dibentuk	3.000	3.000	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1. Tim pelaksana kegiatan dibentuk 2. Tim pelaksana kegiatan dibentuk 3. Tim pelaksana kegiatan dibentuk 4. Tim pelaksana kegiatan dibentuk	3.000	3.000	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1. Tim pelaksana kegiatan dibentuk 2. Tim pelaksana kegiatan dibentuk 3. Tim pelaksana kegiatan dibentuk 4. Tim pelaksana kegiatan dibentuk	3.000	3.000	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

11.11.11.11.11.11

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

NO	PROGRAM/ASPEK/POHON/ASPEK/INDIKATOR	INDIKATOR	STRUKTUR TAHUN 2012	STRUKTUR TAHUN 2013	RFR : RASIONALISASI			REVISI	
					TOTAL 2014	2014-2015	2015-2016		
4	Program/Aspek/POHON/ASPEK/INDIKATOR 1. Indikator 1: ... 2. Indikator 2: ...	1. Indikator 1: ... 2. Indikator 2: ...	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Program/Aspek/POHON/ASPEK/INDIKATOR		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Program/Aspek/POHON/ASPEK/INDIKATOR		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Program/Aspek/POHON/ASPEK/INDIKATOR		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Program/Aspek/POHON/ASPEK/INDIKATOR		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Program/Aspek/POHON/ASPEK/INDIKATOR		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Program/Aspek/POHON/ASPEK/INDIKATOR		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Program/Aspek/POHON/ASPEK/INDIKATOR		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Program/Aspek/POHON/ASPEK/INDIKATOR		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Program/Aspek/POHON/ASPEK/INDIKATOR		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Program/Aspek/POHON/ASPEK/INDIKATOR		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Program/Aspek/POHON/ASPEK/INDIKATOR		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Program/Aspek/POHON/ASPEK/INDIKATOR		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Program/Aspek/POHON/ASPEK/INDIKATOR		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Program/Aspek/POHON/ASPEK/INDIKATOR		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Program/Aspek/POHON/ASPEK/INDIKATOR		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Program/Aspek/POHON/ASPEK/INDIKATOR		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

D.1.1.A-11

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

R/O	PRORITAS/FOKUS PROGRAM/ASPEK ACUAN/ANPR/ONTOS	INDIKATOR	SIMPANA TAHUN 2012	PRORITAS/FOKUS PROGRAM/ASPEK ACUAN/ANPR/ONTOS TAHUN 2012	SIMPANA TAHUN 2012	RFR. NASIONAL			REGRASAM	RE-ORIENTASIK
						TOTAL 2014	TAHUN 2014	TAHUN 2014		
B	Polisi Prakeras	1. Dampak positif 2. JITA PEHU 3. Tidak Penderita, karena dia Kembangkan di-galeri	510 20 20	510 20 20	407 20 20	510 20 20	407 20 20	510 20 20	407 20 20	510 20 20
1	Pan Liris Berorientasi Apresiasi Berprestasi dan Berprestasi di Dunia Internasional	1. Dampak positif 2. JITA PEHU 3. Tidak Penderita, karena dia Kembangkan di-galeri	510 20 20	510 20 20	407 20 20	510 20 20	407 20 20	510 20 20	407 20 20	510 20 20
2	Pan Liris Berorientasi Apresiasi Berprestasi dan Berprestasi di Dunia Internasional	1. Dampak positif 2. JITA PEHU 3. Tidak Penderita, karena dia Kembangkan di-galeri	510 20 20	510 20 20	407 20 20	510 20 20	407 20 20	510 20 20	407 20 20	510 20 20
M	Prinsip, Perilaku, dan Budaya Pendidikan Nasional	1. Dampak positif 2. JITA PEHU 3. Tidak Penderita, karena dia Kembangkan di-galeri	510 20 20	510 20 20	407 20 20	510 20 20	407 20 20	510 20 20	407 20 20	510 20 20
A	Prinsip, Perilaku, dan Budaya Pendidikan Nasional	1. Dampak positif 2. JITA PEHU 3. Tidak Penderita, karena dia Kembangkan di-galeri	510 20 20	510 20 20	407 20 20	510 20 20	407 20 20	510 20 20	407 20 20	510 20 20
1	Pan Liris Berorientasi Apresiasi Berprestasi dan Berprestasi di Dunia Internasional	1. Dampak positif 2. JITA PEHU 3. Tidak Penderita, karena dia Kembangkan di-galeri	510 20 20	510 20 20	407 20 20	510 20 20	407 20 20	510 20 20	407 20 20	510 20 20

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

NO	PRORITAS/ASPEK/POKOK SAJ/ACHTA/ANPR/CONTES	INDIKATOR	SIMPANAN TAHAP 2012	SIMPANAN TAHAP 2013	RFR, PASARISAL			REVISI
					TOTAL 2014	2014-2015	2014-2015	
VII Pendidikan, Sifat, dan Nilai								
A Fokus Prioritas: Perwujudan Sifat Bangsa								
1	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran (PMP)	Adanya perencanaan pembelajaran yang terencana	20	20	20	20	20	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran (PMP)
2	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran (PMP)	Adanya pelaksanaan pembelajaran yang terencana	40	40	40	40	40	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran (PMP)
VIII Pendidikan, Bidang, Materi, dan Kegiatan								
A Fokus Prioritas: Nurturing and Enrichment								
1. Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pembelajaran (PMP)								
1	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembelajaran (PMP)	Adanya perencanaan dan pelaksanaan program pembelajaran yang terencana	100 person	100 person	100 person	100 person	100 person	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembelajaran (PMP)
2	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembelajaran (PMP)	Adanya pelaksanaan dan pelaksanaan program pembelajaran yang terencana	60 person	60 person	60 person	60 person	60 person	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembelajaran (PMP)
3	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembelajaran (PMP)	Adanya pelaksanaan dan pelaksanaan program pembelajaran yang terencana	60 person	60 person	60 person	60 person	60 person	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembelajaran (PMP)
2. Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pembelajaran (PMP)								
1	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembelajaran (PMP)	Adanya perencanaan dan pelaksanaan program pembelajaran yang terencana	100 person	100 person	100 person	100 person	100 person	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembelajaran (PMP)
2	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembelajaran (PMP)	Adanya pelaksanaan dan pelaksanaan program pembelajaran yang terencana	60 person	60 person	60 person	60 person	60 person	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembelajaran (PMP)
3	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembelajaran (PMP)	Adanya pelaksanaan dan pelaksanaan program pembelajaran yang terencana	60 person	60 person	60 person	60 person	60 person	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembelajaran (PMP)
3. Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pembelajaran (PMP)								
1	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembelajaran (PMP)	Adanya perencanaan dan pelaksanaan program pembelajaran yang terencana	100 person	100 person	100 person	100 person	100 person	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembelajaran (PMP)
2	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembelajaran (PMP)	Adanya pelaksanaan dan pelaksanaan program pembelajaran yang terencana	60 person	60 person	60 person	60 person	60 person	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembelajaran (PMP)
3	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembelajaran (PMP)	Adanya pelaksanaan dan pelaksanaan program pembelajaran yang terencana	60 person	60 person	60 person	60 person	60 person	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembelajaran (PMP)

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

NO	PROGRAM/ASPEK/POKOK KATA/ACRIB/ANPR/CONTES	INDIKATOR	STRUKTUR TABEL 2012	PRAGRAM/ACRIB/ANPR/CONTES TAHUN 2012	STRUKTUR TABEL 2013	RFR, RASBIP/PAJL			FROG/SEKOLAH	SALURAN/ALOKASI
						TOTAL APTM	TOTAL MPA	TOTAL PPA		
1	Pembinaan dan Pengembangan Literasi	1. Memiliki kemampuan membaca dan memahami bacaan 2. Memiliki kemampuan berdiskusi dan berargumentasi 3. Memiliki kemampuan berkolaborasi	1000 orang 1000 orang 1000 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang	200 orang 200 orang 200 orang	200 orang 200 orang 200 orang	200 orang 200 orang 200 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang
2	Peningkatan Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Memiliki kemampuan menggunakan perangkat lunak dan hardware 2. Memiliki kemampuan menggunakan perangkat lunak dan hardware 3. Memiliki kemampuan menggunakan perangkat lunak dan hardware	1000 orang 1000 orang 1000 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang	200 orang 200 orang 200 orang	200 orang 200 orang 200 orang	200 orang 200 orang 200 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang
3	Peningkatan Penguasaan Keterampilan Berpikir Kritis	1. Memiliki kemampuan menganalisis masalah 2. Memiliki kemampuan membuat keputusan 3. Memiliki kemampuan memecahkan masalah	1000 orang 1000 orang 1000 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang	200 orang 200 orang 200 orang	200 orang 200 orang 200 orang	200 orang 200 orang 200 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang
4	Peningkatan Penguasaan Keterampilan Berkomunikasi	1. Memiliki kemampuan menyampaikan informasi 2. Memiliki kemampuan mendengarkan 3. Memiliki kemampuan berkolaborasi	1000 orang 1000 orang 1000 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang	200 orang 200 orang 200 orang	200 orang 200 orang 200 orang	200 orang 200 orang 200 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang
5	Peningkatan Penguasaan Keterampilan Berkeadilan	1. Memiliki kemampuan memahami konsep keadilan 2. Memiliki kemampuan menerapkan konsep keadilan 3. Memiliki kemampuan membela keadilan	1000 orang 1000 orang 1000 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang	200 orang 200 orang 200 orang	200 orang 200 orang 200 orang	200 orang 200 orang 200 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang
6	Peningkatan Penguasaan Keterampilan Berkehidupan Berkelanjutan	1. Memiliki kemampuan memahami konsep keberlanjutan 2. Memiliki kemampuan menerapkan konsep keberlanjutan 3. Memiliki kemampuan membela keberlanjutan	1000 orang 1000 orang 1000 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang	200 orang 200 orang 200 orang	200 orang 200 orang 200 orang	200 orang 200 orang 200 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang	1000 orang 1000 orang 1000 orang

11.11.12.15

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

NO	PRORITAS/FOKUS POMDIAS ACHTAHPPRONTOS	INDIKATOR	SIMPANA TAHUN 2012	PRORAMA ACHTAHPPRONTOS TAHUN 2012	SIMPANA TAHUN 2012	RTR, PASARISAL			PROGRES	REKAMERSAL
						TOTAL 2014	7-10-2014	7-10-2014		
3	1. Meningkatkan dan memperkuat literasi	1. Di selenggarakan sosialisasi, diskusi, dialog dan pertemuan dengan masyarakat 2. Timbulnya minat masyarakat terhadap literasi	1. 1 kali 2. 1 kali	1. 1 kali 2. 1 kali	1. 1 kali 2. 1 kali	1. 1 kali 2. 1 kali	1. 1 kali 2. 1 kali	1. 1 kali 2. 1 kali	1. 1 kali 2. 1 kali	1. 1 kali 2. 1 kali
		3.1.1. Meningkatkan minat baca masyarakat 3.1.2. Meningkatkan literasi masyarakat 3.1.3. Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat 3.1.4. Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat	1. 1 kali 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 1 kali	1. 1 kali 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 1 kali	1. 1 kali 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 1 kali	1. 1 kali 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 1 kali	1. 1 kali 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 1 kali	1. 1 kali 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 1 kali	1. 1 kali 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 1 kali	1. 1 kali 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 1 kali

11.11.12

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

R/O	PROGRAM/ASPEK/POKOK ASAS/ACSI/ASPEK/PRONITIS	INDIKATOR	SIMPULAN TAHUN 2012	SIMPULAN TAHUN 2013	RFR, PASANG PAKAL			PROGRAM	SE-OK/AMK
					TOTAL 2014	2014/2013	2014/2013		
3	Pembinaan dan Pengembangan Sistem dan Organisasi	<p>1. memiliki informasi yang akurat (fakta) sebagai perantara dan tempat bertanya</p> <p>2. memiliki kemampuan berorganisasi dan pemertanian (religius) yang baik serta dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak lain (misal: media massa dan lain-lain) secara profesional</p>	Melaksanakan kegiatan	Melaksanakan kegiatan	Melaksanakan kegiatan	100%	100%	Program Pengembangan dan Pemertanian R/O	<p>1. memiliki kemampuan berorganisasi dan pemertanian (religius) yang baik serta dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak lain (misal: media massa dan lain-lain) secara profesional</p>
XI	Pembinaan dan Pengembangan Karakter Bangsa								
A	Pembinaan dan Pengembangan Karakter Bangsa								
1	Pembinaan dan Pengembangan Karakter Bangsa	Melaksanakan kegiatan	100%	100%	100%	100%	Program Pengembangan dan Pemertanian R/O	100%	
2	Pembinaan dan Pengembangan Karakter Bangsa	Melaksanakan kegiatan	100%	100%	100%	100%	Program Pengembangan dan Pemertanian R/O	100%	
3	Pembinaan dan Pengembangan Karakter Bangsa	Melaksanakan kegiatan	100%	100%	100%	100%	Program Pengembangan dan Pemertanian R/O	100%	
4	Pembinaan dan Pengembangan Karakter Bangsa	Melaksanakan kegiatan	100%	100%	100%	100%	Program Pengembangan dan Pemertanian R/O	100%	
5	Pembinaan dan Pengembangan Karakter Bangsa	Melaksanakan kegiatan	100%	100%	100%	100%	Program Pengembangan dan Pemertanian R/O	100%	
6	Pembinaan dan Pengembangan Karakter Bangsa	Melaksanakan kegiatan	100%	100%	100%	100%	Program Pengembangan dan Pemertanian R/O	100%	
7	Pembinaan dan Pengembangan Karakter Bangsa	Melaksanakan kegiatan	100%	100%	100%	100%	Program Pengembangan dan Pemertanian R/O	100%	

11.11.12.10

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

R/O	PRORITAS/POKOK KEGIATAN/ACHTAKAN PRORITAS	INDIKATOR	SIMPULAN TAHAP 2012	PRORAS/ACHTAKAN TAHAP 2012	SIMPULAN TAHAP 2013	RFR, PASANG PAKAL			REVISI	
						TAHAP 2014	TAHAP 2015	TAHAP 2016		
XII Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran										
A	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran									
1	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran	Indikator: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran	Indikator: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran	Indikator: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran	Indikator: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran	Indikator: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran	Indikator: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran	Indikator: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran	Indikator: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran	Indikator: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran
2	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran	Indikator: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran	Indikator: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran	Indikator: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran	Indikator: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran	Indikator: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran	Indikator: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran	Indikator: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran	Indikator: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran	Indikator: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran

11.11.12.20

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

R/O	PROGRAM/ASPEK/POHON/AS/KEGIATAN/PRORITAS	INDIKATOR	TAMBAH TAHAP/2012	PRAMUKA/REKORSDUN/TAHAP/2012	TAMBAH TAHAP/2012	RTR, RASR/RAL			REVISI/2012
						TAMBAH TAHAP/2012	TAMBAH TAHAP/2012	TAMBAH TAHAP/2012	
		1. Mengetahui dan memahami konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip dasar kepramukaan dan keorganisasian sebagai bentuk pendidikan yang mempersiapkan para pemuda untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan di masyarakat.	2014	2014	2014	2014	2014	2014	
6	Keaktifan dan Partisipasi dalam Kegiatan								
1	Keaktifan Kejujuran dan Kejujaban	1. Mengetahui dan memahami konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip dasar kepramukaan dan keorganisasian sebagai bentuk pendidikan yang mempersiapkan para pemuda untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan di masyarakat.	2014	2014	2014	2014	2014	2014	Revisi/2012
2	Keaktifan Partisipasi dalam Kegiatan	1. Mengetahui dan memahami konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip dasar kepramukaan dan keorganisasian sebagai bentuk pendidikan yang mempersiapkan para pemuda untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan di masyarakat.	2014	2014	2014	2014	2014	2014	Revisi/2012

11.11.11.11

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

NO	PILGRI/AS/FOKUS PILGRI/AS/ ACSI/AT/PP/CRIT/CS	INDIKATOR	STANDAR TAHUN 2012	PRAMUKA REVISI TAHUN 2012	STANDAR TAHUN 2013	RTR, RASRI/RAL			REVISI TAHUN 2013	REVISI TAHUN 2013	REVISI TAHUN 2013
						TUM. 1/2014	TUM. 2014	TUM. 2014			
		1. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya 2. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya 3. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya 4. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya	3	3	4	4	4	4			
3	Regenerasi Pramuka P-2/2	1. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya 2. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya 3. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya 4. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu
4	Regenerasi Pramuka P-2/2	1. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya 2. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya 3. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya 4. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu
5	Regenerasi Pramuka P-2/2	1. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya 2. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya 3. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya 4. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu
6	Regenerasi Pramuka P-2/2	1. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya 2. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya 3. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya 4. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu
7	Regenerasi Pramuka P-2/2	1. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya 2. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya 3. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya 4. Memiliki kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu	34 tahun 50 pers-ulu

11.11.12

Lintas Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

R/O	PROGRAM/ASPEK/POHON/AS/AC/ILUSTRASI/PR/GRATIS	INDIKATOR	SIMPULAN TAHUN 2012	PRAGRAM/AC/GRUP/ILUSTRASI/PR/GRATIS TAHUN 2012	SIMPULAN TAHUN 2012	RFR. PASARIPAL			REGRISASI	RE-PRASARIK
						TUL. 1 2014	14JUN 2014	14JUN 2014		
C	Eska dan Pustaka Pembangunan Persekitaran YMP/ESKTH dan Unback IN									
1	Pengembangan Program Sekolah, dan Praktikum Sekolah, dan Kemahasiswaan, dan KIR, dan	1. Jumlah dan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa 2. Jumlah dan jenis kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa 3. Jumlah dan jenis kegiatan KIR yang dilaksanakan oleh mahasiswa	50 30 20	50 30 20	100 50 50	100 50 50	100 50 50	100 50 50	100 50 50	RFR

11.11.12

MATRIS 2.2.3 ALOKASI PENDANAAN PERUBAHAN TAHUN 2013

(dalam miliar Rupiah)

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS KUALITAS PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2012	PENCAPAIAN TAHUN 2012	RENCANA TAHUN 2013	PERUBAHAN PADJ	
					TAHUN 2013	TAHUN 2014
I Prioritas Pengendalian Kualitas Perilaku						
A	Fokus Prioritas : Realisasi Program Keluarga Berencana	12,8	12,8	15,0	15,5	15,6
1	Pertumbuhan kelahiran rendah	7,5	7,5	9,0	9,2	9,3
2	Persentase keluarga sadar jiwa :	5,3	5,3	6,0	6,3	6,3
II Kualitas, Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan						
A	Fokus Prioritas : Pambinaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan	144,0	144,0	149,8	151,1	144,8
1	Service dayak bencana (not don F = yes, sehat)	143,8	143,8	149,8	151,1	143,8
III Kualitas : Peningkatan Akses, Kualitas, dan Responsivitas Pelayanan						
A	Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sundaletan Tulun Yang	7.113,1	7.113,1	6.921,8	6.821,8	5.567,2
1.	Perbaikan Kapasitas Layanan Pendidikan DU	2.511,1	2.511,1	2.321,8	2.221,8	1.812,2
2.	Perbaikan Kapasitas Layanan Pendidikan SMP	4.602,0	4.602,0	4.600,0	4.600,0	3.755,0

JLMB 1

Lampiran no.ber.46.2011

Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

NO	PRIORITY/TOPIK PRIORITY INTEGRATED PRIORITIES	REKORD TAILUM 2012	PRAKSIAN PENCAPAIAN TAILUM 2012	REKORD TAILUM 2013	PERKIRAAN RABUB		
					TAHUN 2014	APRIL 2015	TAHUN 2016
B	Fokus Prioritas: Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan Menengah	3.874,0	3.874,0	5.335,5	5.335,5	3.295,0	6.520,9
1	Persebaran dan Peningkatan Kualitas	685,8	1.952,9	2.468,1	2.468,1	1.468,1	2.658,5
2	Persebaran dan Peningkatan Kualitas	2.179,-	2.179,-	4.007,4	4.007,4	2.007,4	5.259,0
C	Fokus Prioritas: Peningkatan Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi	444,3	540,3	16.242,7	16.242,7	6.889,4	7.889,4
1	Persebaran dan Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pendidikan	1.981,3	2.981,3	11.856,0	11.856,0	3.296,7	4.896,7
2	Peningkatan Akses dan Peningkatan Kualitas	959,7	394,7	4.314	4.314	4.314	4.314
3	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi	862,4	1.347,4	915,7	1.515,7	1.015,7	1.815,7
D	Fokus Prioritas: Peningkatan Penguasaan dan Pemanfaatan Distribusi Guna dan Tenaga	770,0	770,0	881,8	881,8	679,8	679,8
1	Peningkatan Layanan Pendidikan : Jelang 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022	110,3	110,3	765,0	765,0	552,0	552,0
2	Peningkatan Layanan Tenaga Kejuruan	110,3	110,3	178,8	178,8	118,8	118,8
E	Fokus Prioritas: Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1.863,0	1.863,0	1.206,1	1.206,1	323,7	323,7
1	Persebaran dan Peningkatan Kualitas	545,3	1.568,0	306,1	1.766,1	493,7	593,7

JL. M.B.2

(dalam miliar rupiah)

NO	PRIORITY/TOPIK PRIORITY/INDICATOR PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2012	PENCAPAIAN PENCAPAIAN TAHUN 2012	RENCANA TAHUN 2013	PERKIRAAN PADJ		
					TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014
1	Fokus Prioritas: Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan	527,8	527,8	506,2	380,7	380,7	380,7
2	Pertumbuhan Akademi dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah	107,9	107,9	107,9	-	-	-
3	Perencanaan dan Pembinaan Pendidikan Kejuruan	175,4	175,4	107,5	128,5	138,5	138,5
4	Perencanaan dan Pembinaan Pendidikan Kejuruan	82,4	82,4	84,2	84,2	84,2	84,2
5	Perencanaan dan Pembinaan Pendidikan Tinggi	82,9	82,9	84,3	84,3	84,3	84,3
6	Perencanaan dan Pembinaan Pendidikan dan Kejuruan/Keagamaan	82,7	82,7	78,0	78,0	78,0	78,0
7	Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan	3,5	3,5	4,3	4,3	4,3	4,3
8	Fokus Prioritas: Peningkatan Pendidikan Karakter Bangsa	171,9	171,9	-	-	-	-
9	Peningkatan Kualitas Sistem Pendidikan Nasional	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5
10	Peningkatan Kapasitas Layanan Pendidikan SD	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
11	Peningkatan Kapasitas Layanan Pendidikan SMP	56,4	56,4	4,1	4,6	4,7	4,7
12	Peningkatan Fasilitas Pendidikan SMA/SMK	28,8	28,8	3,7	3,7	3,7	3,7
13	Peningkatan Fasilitas Pendidikan SMA/SMK	22,5	22,5	7,3	7,3	7,3	7,3

JL. M. B. 9

(dalam miliar rupiah)

NO	PRIORITY/TKUIS PRIORITY/INDICATOR PRIORITAS	RENCANA TAHUN 2012	PRAKARAN PENCAPAIAN TAHUN 2012	RENCANA TAHUN 2013	PERKIRAAN PADU		
					TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014
IV	Prioritas : Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prastasi Olahraga	110,4	110,4	610,7	505,6	488,0	507,7
A	Fokus Prioritas : Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda dalam Berbagai Bidang Pembangunan	4,0	4,0	10,2	10,2	10,2	10,2
1	Persempitan Kesenjangan Pemuda	4,0	4,0	43,0	42,0	42,0	42,0
2	Peringatan Yayasan Pemuda	4,0	4,0	11,2	11,2	11,2	11,2
3	Peringatan Pemberi Sumbat Daya Pemuda	4,0	4,0	12,8	12,8	12,0	12,0
4	Peringatan Yayasan Kepemudaan	4,0	4,0	95,0	95,0	96,0	96,0
C	Persempitan Kesenjangan Pemuda	62,4	62,4	112,7	111,9	112,0	112,0
1	Persempitan Kesenjangan Pemuda	4,0	4,0	15,2	15,2	15,2	15,2
2	Persempitan Kesenjangan Pemuda	4,0	4,0	75,3	75,5	71,8	71,8
3	Persempitan Kesenjangan Pemuda	4,0	4,0	15,3	15,3	15,2	15,2
4	Persempitan Kesenjangan Pemuda	4,0	4,0	75,3	75,5	70,8	70,8
B	Fokus Prioritas : Peningkatan Budaya dan Prastasi Olahraga	36,0	36,0	246,7	246,7	246,7	246,7
1	Persempitan Olahraga Pemuda dan Pemuda	4,0	4,0	21,0	21,0	21,0	21,0
2	Persempitan Olahraga Pemuda dan Pemuda	4,0	4,0	30,7	30,7	30,7	30,7
3	Persempitan Pemuda dan Pemuda	4,0	4,0	55,0	55,0	55,0	55,0
4	Persempitan Pemuda dan Pemuda	4,0	4,0	140,0	140,0	140,0	140,0

(dalam miliar rupiah)

NO	PRIORITY/TOPIK PRIORITY/INTEGRATED PRIORITIES	RENCANA TAHUN 2012	PRAKTIK PENCAPAIAN TAHUN 2012	RENCANA TAHUN 2013	PERKIRAAN PADJ		
					TAHUN 2012	PAJUR 2013	TAHUN 2013
V	Prioritas Bidang: Peningkatan Kualitas Kelembagaan Beragama						
A	Isi: Fokus Prioritas: Peningkatan Kualitas Beribadah dan Penguatan Agama Islam	303,0	104,0	395,0	374,0	374,0	374,0
1	Persepsi dan Pembinaan Umat Islam	135,7	134,7	274,4	274,4	274,4	274,4
2	Persepsi dan Pembinaan Umat Agama Kristen	16,2	12,1	47,1	47,1	47,1	47,1
3	Persepsi dan Pembinaan Umat Agama Katolik	6,9	7,9	20,4	-	-	-
4	Persepsi dan Pembinaan Umat Agama Hindu	5,6	5,6	31	31	31	31
5	Persepsi dan Pembinaan Umat Agama Buddha	2,7	2,7	23,1	22	22,1	22,1
B	Isi: Fokus Prioritas: Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama	302	302	461	52,9	53,4	53,8
1	Perilaku dan Budaya Beragama	3,5	3,5	4,9	5	5,2	5,2
2	Perilaku dan Kerukunan Umat Beragama	26,7	26,7	41,5	47,9	48,2	48,2
VI	Prioritas: Penguatan Isi Peribondan dan Pelaksanaan Budaya						
A	Isi: Fokus Prioritas: Peningkatan Kesadaran akan Identitas dan Kelembagaan Beragama sebagai Heragaman Budaya	62,4	62,4	100,0	100,0	100,0	100,0
1	Pembinaan Gerakan "Berhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Toleransi"	23,6	23,6	21,0	21,0	21,0	21,0

JILM.B.3

Tabel no.ber.46.2011

Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

NO	PRIORITY/TEMUS PRIORITY/INICIA/NOU PRIORITIS	REKADA TAILUM 2012	PRAKASA PENCAPAIAN TAILUM 2012	REKADA TAILUM 2013	PERKIRAAN PAJU		
					TAILUM 2012	PAJU 2013	TAILUM 2013
2	Persebaran Rura Sas Kita dan Diakses budaya	15,2	15,2	20,3	20,0	21,0	40,0
2	Perngitan Samsor Pllir	21,7	21,7	30,2	25,0	30,0	29,0
VII Prioritas Sistem Inovasi Nasional							
A	Fokus Prioritas : Penguatan Sumber Daya (ptek dan Inovasi)	35,0	35,0	65,0	65,0	65,0	65,0
1	Perngitan keseluruhan (ptek, Inovasi dan Inovasi)	35,0	35,0	65,0	65,0	65,0	65,0
B	Fokus Prioritas: Penguatan Jaringan (ptek dan Inovasi)	30,0	30,0	120,0	120,0	120,0	120,0
1	Pelaksanaan Program (ptek dan Inovasi dan Inovasi) (PIL)	30,0	30,0	120,0	120,0	120,0	120,0
VIII Prioritas: Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesajahteraan							
A	Fokus Prioritas: Penguatan Kebijakan Infrastruktur Sosial SPN	617,79	617,79	771,77	771,77	771,77	771,77
1	Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sosial (PIL) (PIL)	617,79	617,79	771,77	771,77	771,77	771,77
2	Pelaksanaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sosial (PIL) (PIL)	112,95	112,95	62,33	62,33	62,33	154,88
3	Pelaksanaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sosial (PIL) (PIL)	222,70	222,70	142,74	142,74	142,74	202,74

J.L.M.B.C

Lampiran no.ber: 46/2011

Bidang : Peningkatan Karakter Bangsa

NO	PRIORITY/OKUS PRIORITY/ INFORMASI PRIORITY	RENCANA TAHUN 2012	PENCAPAIAN TAHUN 2012	RENCANA TAHUN 2013	PEKERJAAN TAHUN		TAHUN 2013	TAHUN 2014
					TAHUN 2012	TAHUN 2013		
II	Prioritas: Meningkatkan distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional	437,94	437,94	437,94	437,94	437,94	437,94	437,94
A	Pulus Prioritas: Dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
1	Pembinaan dan Pengembangan E-Diraja	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54	21,54
4	Pembinaan dan Pengembangan IKT untuk Pemberdayaan Masyarakat	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
2	Pelatihan car. pengembangan teknologi informasi	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
3	Pengembangan program dan Produk Sistem Radio Publik	272,90	272,90	272,90	272,90	272,90	272,90	272,90
5	Pengembangan Program dan Produk Sistem TV Publik							
J	Prioritas: Melirik Dalam Megeri dan Komunikasi serta Pemanfaatan Diplomasia	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9
A	Pulus Prioritas: Peningkatan Akumulabilitas Bangsa Demokrasi	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9
1	Facilitas Lahan sari budaya, agama dan kebudayaan	88,81	88,81	88,81	88,81	88,81	88,81	88,81
B	Pulus Prioritas: Peningkatan Ilmu Kemandirian Bagi Kesejahterannya Keladayaan Sipil dan Hak-Hak Politik Rakyat							

JL. M. B. 7

Lampiran no.ber.46.2011

Bidang : Pembangunan Karakter Bangsa

NO	PRIORITY/TKUS PRIORITY/ INDIKATOR PRIORITY	RENCANA TAHUN 2012	PENCAPAIAN TAHUN 2012	RENCANA TAHUN 2013	PEKERJAAN TAHUN		
					TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014
1	Koordinasi pemerintah dengan instansi lain dalam sasaran	11,93	11,93	8,73	4,48	27,46	22,21
2	Koordinasi kerjasama pembangunan	1,82	1,82	0,72	1,72	2,84	0,95
3	Penyediaan dan akses layanan	51,1	51,0	59,7	50,1	49,0	49,0
4	Facilitasi politik dalam agenda	24,3	44,2	50,7	47,5	50,6	51,6
5	Fokus Prioritas: Peningkatan Riset Informatika dan Komunitas	51,816	51,06	49,46	57,67	37,67	37,67
1	Perencanaan dan penjabaran informasi	19,53	19,62	18,32	26,34	23,24	24,32
2	Pelatihan informasi dan komunikasi	5,74	5,74	6,74	5,74	5,74	6,74
3	Partisipasi dan pengembangan lembaga dan organisasi	20,59	20,59	22,59	20,59	20,59	21,59
21	Monitor, Pertahanan dan Keamanan						
A	Salah Prioritas Nasional pembangunan	11,7	11,4	11,7	11,8	21,8	23,8
1	komponen bela negara	4,3	4,5	4,3	6,7	8,7	8,7
2	Perencanaan dan Pembinaan Komponen	3,0	3,0	3,7	8,3	8,3	8,3
3	Partisipasi dan Pembinaan Komponen	2,6	3,6	3,2	6,8	6,8	6,8

J.L.M.B.E

Bidang : Pembinaan Karakter Bangsa (dalam ribuan Rp,000)

NO	PRIORITY/TOPIK PRIORITY/INDICATOR PRIORITAS	REKADA TAHUN 2012	PRAKARAN PENCAPAIAN TAHUN 2012	REKADA TAHUN 2013	PERKIRAAN PAJIB		
					TAHUN 2012	PAJIB 2013	TAHUN 2013
B	Fokus Prioritas Mencah dan Menanggulangi Kematangan dan Keadatan Gelas Kerkoba	26,3	26,3	27,0	28,1	38,6	38,0
I	Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan di Universitas	26,3	26,3	27,5	28,1	38,6	38,0
XII Prioritas Penyelenggaraan Tera Kelain Pemerintahan yang Baik							
A	Fokus Prioritas Peningkatan Efektifitas Peraturan dan perundangan	8,7	8,7	88,1	10,3	10,5	10,5
1	Kejatan Penyelenggaraan Pelajaran T-kebis, Pergambilan Keputusan, uk, m der Pembinaan, Sediaan Hukum Nasional	8,8	8,8	81,8	8,	9,1	8,1
2	Pembinaan, Revisi, maupun kegiatan Kelidng	1,9	1,9	1,3	1,4	1,4	1,4
B	Timbangan Penyelenggaraan, dan Satek	7,0	7,0	7,4	7,9	7,9	8,5
1	Terhadap HMM	1,2	1,4	2	2,	2,1	2,2
2	Kejatan Penyelenggaraan HMM	5,1	5,1	5,2	5,4	5,4	5,6
3	Kejatan Penyelenggaraan HMM	1,2	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8
4	Kejatan Informasi HMM	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,8
C	Fokus Prioritas Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
1	Pergerakan dan Penyelenggaraan, dan Penyelenggaraan	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMRANTUNAN TAHUN 2013

Lantas Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat

No	Prioritas/Pelaku Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Kemampuan Tahun 2012	Prestasi Pencapaian Tahun 2012	Rencana Tahun 2013	Prestasi yang diinginkan			Program	Pelaksanaan
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		
1	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	110)	111)
Indeks Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan										
1	Produksi/Perawatan Kesehatan Reproduksi	1. Persentase perempuan yang mendapatkan pelayanan sterilisasi (calistung) yang berkualitas (capaian >90%)	90	90	95	95	95	95	95	95
2	Pelayanan Kesehatan Anak	1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KNN) 2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi 3. Cakupan pelayanan kesehatan ibu	95 96 97	99 96 91	99 97 95	99 97 95	99 97 95	99 97 95	99 97 95	99 97 95
3	Revisi/Revisi/Revisi Kesehatan	Pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat (KMS) dan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya yang meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat	92,46	93,46	93,46	93,46	93,46	93,46	93,46	93,46

...LAKA...

Uraian Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat

No	Prioritas/Isi/Isi Pencapaian Kegiatan Pribadi	Indikator	Rencana Tahun 2012	Rencana Tahun 2013	Praktisi Menu			Program	Pelaksana	
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016			
11	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	
Polusi Prioritas : Perbaikan status gizi masyarakat										
9	Pembinaan Gizi Masyarakat	1. Persentase balok air buruk yang terdapat di rumah-rumah 2. Persentase balok air yang terdapat di rumah-rumah (1/2012)	100	100	100	100	100	100	Edukasi Gizi dan Kesehatan Balok Air	Rekreasi Kesehatan
Polusi Prioritas : Peningkatan status gizi masyarakat										
5	Pembinaan Masyarakat dan Program Kesehatan	1. Persentase rumah tangga yang melaksanakan PTBS	80	85	90	95	95	95	75 Puskorasi 30 rumah Rekreasi Kesehatan	Rekreasi Kesehatan
Polusi Prioritas : Peningkatan status gizi masyarakat										
6	Pembinaan Masyarakat dan Program Kesehatan	1. Persentase rumah tangga yang melaksanakan PTBS (1/2012)	80	85	90	95	95	95	75 Puskorasi 30 rumah Rekreasi Kesehatan	Rekreasi Kesehatan
7	Pembinaan Masyarakat	1. Persentase rumah tangga yang melaksanakan PTBS (1/2012)	80	85	90	95	95	95	75 Puskorasi 30 rumah Rekreasi Kesehatan	Rekreasi Kesehatan
8	Pembinaan Masyarakat dan Program Kesehatan	1. Persentase rumah tangga yang melaksanakan PTBS (1/2012)	80	85	90	95	95	95	75 Puskorasi 30 rumah Rekreasi Kesehatan	Rekreasi Kesehatan

Uraian Bidang : Peningkatan Status Ilmu Masyarakat

No	Prioritas/Isi/Isi Kegiatan	Indikator	Relevansi Tahun 2012	Relevansi Pelaksanaan Tahun 2012	Praktikum Menuju			Program	Pelaksanaan
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		
1	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	20)
III Peningkatan Akses, Kualitas dan Relevansi Pendidikan Polres Peningkatan Kualitas World Belajar Pendidikan dasar sembilan tahun yang nyata									
1	Pengembangan Sistem Pendidikan yang lebih berkualitas	Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1811141	1810110	1810101	1810101	1810101	1810101	1810101
2	Pengembangan layanan, akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1811141	1810110	1810101	1810101	1810101	1810101	1810101
IV Prioritas : Peningkatan kualitas pendidikan									
Polres Peningkatan Kualitas Program Keluarga Bercerita									
1	Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan	Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1811141	1810110	1810101	1810101	1810101	1810101	1810101

Uraian Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat

No	Prioritas/Isi Pokok Bahasan	Indikator	Revisi Tahun 2012	Praktisi/Pejabat Tahun 2012	Revisi Tahun 2012	Praktisi/Pejabat			Program	Pelaksanaan
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pendidikan, Ketrampilan dan Anak	<p>1. Jumlah anak berprestasi di bidang akademik, keterampilan, seni, olahraga, dan lainnya.</p> <p>2. Jumlah anak berprestasi di bidang akademik, keterampilan, seni, olahraga, dan lainnya.</p>	1	2	1	1	1	1	1	1
2	Pendidikan, Ketrampilan dan Anak	<p>1. Jumlah anak berprestasi di bidang akademik, keterampilan, seni, olahraga, dan lainnya.</p> <p>2. Jumlah anak berprestasi di bidang akademik, keterampilan, seni, olahraga, dan lainnya.</p>	1	2	1	1	1	1	1	1

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013

LINTAS BIDANG PENINGKATAN STATUS GIZI MASYARAKAT

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012 (3)	Pencapaian Tahun 2012 (4)	Rencana Tahun 2013 (5)	Praktoran Maju (Miliar Rupiah)		
					Tahun 2014 (6)	Tahun 2015 (7)	Tahun 2016 (8)
1	Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	610,1	579,6	545,4	439,0	313,5	307,7
Fokus Prioritas : Peningkatan kesadaran ibu, bayi dan balita yang menjamin <i>exclusive breastfeeding</i>							
1	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Remaduku	18,2	17,3	15,3	15,3	8,6	9,5
2	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	100,4	95,3	94,1	94,1	52,8	58,1
3	Bantuan Operasional Kesehatan	1.228,8	1.167,2	1.228,8	1.228,8	680,1	757,7
Fokus Prioritas : Peningkatan status gizi masyarakat							
4	Pembinaan Gizi Masyarakat	314,5	298,8	288,0	288,0	161,5	177,5
Fokus Prioritas : Peningkatan Masyarakat dan Peningkatan Keselamatan							
5	Peningkatan Masyarakat dan Peningkatan Kesehatan	143,5	135,4	135,3	135,3	66,9	73,6

III.MB-1

LINTAS BIDANG PENINGKATAN STATUS GIZI MASYARAKAT

No	Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Rencana Tahun 2012 (3)	Pencapaian Tahun 2012 (4)	Rencana Tahun 2013 (5)	Prakiraan Maju (Miliar Rupiah)		
					Tahun 2014 (6)	Tahun 2015 (7)	Tahun 2016 (8)
1,1	1,1						
Fokus: Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, pemanfaatan, mutu dan pengurangan obat dan makanan							
6	Surveilans dan Pemantauan Keamanan Makanan	14,9	13,3	9,0	8,9	7,9	9,9
7	Pemilihan Makanan	5,9	4,9	7,5	5,7	6,6	7,5
8	Pemilihan Obat dan Produk Biologi	7,4	7,0	7,0	6,3	7,3	9,2
9	Pemilihan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk	7,1	6,7	4,5	3,2	3,7	4,2
10	Prioritas : Ketahanan pangan dan vitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan	197,4	197,5	243,0	201,0	294,-	300,8
Fokus: Peningkatan pemerataan, kesehatan, konsumsi pangan							
1	Peningkatan pengetahuan, keterampilan, konsumsi pangan dan kesehatan masyarakat	187,4	197,4	243,0	201,0	294,-	300,8
III	Peningkatan Akses, Kualitas dan Relevansi Pendidikan	9,5	9,0	2.296,1	26,9	11,9	13,0
Fokus: Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan untuk usia dini dan pemeliharaan kesehatan dan gizi masyarakat							
I	Keperawatan	9,5	9,5	2.296,1	26,9	11,0	12,9
II	Prioritas : Pengembangan kualitas pendidikan	10,3	9,0	8,4	8,8	7,0	7,5
Fokus: Peningkatan kualitas, program, kualitas, pemerataan							
1	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	5,0	4,9	2,7	3,9	3,2	5,2
2	Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi	5,3	5,0	3,7	1,0	1,0	1,8

III.MB-2

**Matriks Target Kinerja dan
Alokasi Pendanaan Pembangunan
BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN
KEHIDUPAN BERAGAMA**

MATRIKS 2.2.A. TARGET RENCANA PEKERJAAN: ONAN TAHUN 2013

Bidang: Sosial Budaya dan Kependidikan, Beringin

NO	PEMBINA/PEKERJAAN	INDIKATOR	RENCANA PEKERJAAN		PEKERJAAN MAJU		PROGRAM	DILAKUKAN
			2012	2013	2013	2014		
1	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
2	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
3	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
4	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
5	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
6	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
7	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
8	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
9	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
10	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
11	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
12	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
13	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
14	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
15	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
16	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
17	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
18	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
19	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
20	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
21	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
22	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
23	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
24	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
25	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
26	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
27	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
28	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
29	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%
30	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	1	1	1	Program Pengembangan	100%

12/2/2011

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

NO	INDUKASI/INDUKER	INDIKATOR	RENTANA LOKASI/TAHAP	PERAKSIAN BUKU			PROG RAM	PIL (KEMAS)
				3319	2014	2015		
1	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur KTI	1. Berdiskusi, berkolaborasi, dan bekerjasama dengan masyarakat sipil dan swasta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik	1	3	2	2012	1	Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2012
		2. Berdiskusi dan berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan swasta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik	2	5	2	3		
2	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur KTI	1. Berdiskusi, berkolaborasi, dan bekerjasama dengan masyarakat sipil dan swasta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik	3	3	3	3	3	
		2. Berdiskusi dan berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan swasta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik	3	3	3	3		
3	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur KTI	1. Berdiskusi, berkolaborasi, dan bekerjasama dengan masyarakat sipil dan swasta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik	3	3	3	3	3	
		2. Berdiskusi dan berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan swasta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik	3	3	3	3		
4	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur KTI	1. Berdiskusi, berkolaborasi, dan bekerjasama dengan masyarakat sipil dan swasta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik	3	3	3	3	3	
		2. Berdiskusi dan berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan swasta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik	3	3	3	3		

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

NO	INDUKASI/BUKLA/PROPOSAL	INDUKSI/BUKLA/PROPOSAL	RENTANA (LUBA) 2012	PRAKTIKAS BUKLA			PROG RAM	PIL/INSTRUM
				3319	2014	2015		
5	Pembinaan Keluarga Sakinah dan Penguatan Keagamaan Masyarakat	1. Bina keluarga Sakinah dan Penguatan Keagamaan Masyarakat	1	5	6	6	Papan K. perantara POKK: MPPK Bina...	BID.281
		2. Bina keluarga Sakinah dan Penguatan Keagamaan Masyarakat	1	5	6			
6	Pembinaan Keluarga Sakinah dan Penguatan Keagamaan Masyarakat	1. Bina keluarga Sakinah dan Penguatan Keagamaan Masyarakat	1	5	6	Papan K. perantara POKK: MPPK Bina...	BID.281	
		2. Bina keluarga Sakinah dan Penguatan Keagamaan Masyarakat	1	5	6			
7	Pembinaan Keluarga Sakinah dan Penguatan Keagamaan Masyarakat	1. Bina keluarga Sakinah dan Penguatan Keagamaan Masyarakat	1	5	6	Papan K. perantara POKK: MPPK Bina...	BID.281	
		2. Bina keluarga Sakinah dan Penguatan Keagamaan Masyarakat	1	5	6			

12/PL/12

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

NO	INDUKSASI BUKU PROBING	INDUKSATOR	RENTANA LAIN LAIN	# BUKU BAKAN			# BUKU BAKAN M AJI			PROG RAM	PILIOKSI/MA
				3313	3314	3315	3316	3317	3318		
8	Buku dan E-Book Kontemporer	1. Buku dan E-Book, "Membaca dan Berpikir"	1	1	1	1	1	1	1	Pusat Kerjasama Buku	BUTIR
		2. Buku dan E-Book, "Membaca dan Berpikir"	1	1	1	1	1	1	1		
9	Buku dan E-Book Kontemporer	1. Buku dan E-Book, "Membaca dan Berpikir"	1	1	1	1	1	1	1	Pusat Kerjasama Buku	BUTIR
		2. Buku dan E-Book, "Membaca dan Berpikir"	1	1	1	1	1	1	1		

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

NO	INDUK BANGUNAN PROGRAM	INDUK SUBUR	RENTANA LOKASI BUKU	REKORSAKSI TALIBUN 2012	PERAKHIRAN BUKU				PROG RAM	PULOKSAMA
					2013	2014	2015	2012		
1	1. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	1. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	1. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	1	1	1	1	1	1	1
2	2. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	2. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	2. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	2	2	2	2	2	2	2
3	3. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	3. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	3. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	3	3	3	3	3	3	3
4	4. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	4. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	4. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	4	4	4	4	4	4	4
5	5. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	5. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	5. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	5	5	5	5	5	5	5
6	6. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	6. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	6. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	6	6	6	6	6	6	6
7	7. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	7. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	7. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	7	7	7	7	7	7	7
8	8. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	8. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	8. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	8	8	8	8	8	8	8
9	9. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	9. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	9. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	9	9	9	9	9	9	9
10	10. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	10. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	10. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	10	10	10	10	10	10	10
11	11. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	11. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	11. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	11	11	11	11	11	11	11
12	12. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	12. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	12. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	12	12	12	12	12	12	12
13	13. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	13. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	13. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	13	13	13	13	13	13	13
14	14. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	14. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	14. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	14	14	14	14	14	14	14
15	15. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	15. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	15. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	15	15	15	15	15	15	15
16	16. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	16. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	16. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	16	16	16	16	16	16	16
17	17. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	17. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	17. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	17	17	17	17	17	17	17
18	18. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	18. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	18. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	18	18	18	18	18	18	18
19	19. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	19. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	19. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	19	19	19	19	19	19	19
20	20. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	20. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	20. Pendidikan, Ke- budayaan, dan Kerohanian	20	20	20	20	20	20	20

Lampiran 5

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

NO	INDUKSI/ASPEK/KELOMPOK/PROBLEMA	INDUKSI/TOPIK	RENTANSA LOKASI/LOKASI	REKOR/DAFTAR TAMBAH/BAKAR	REKOR/DAFTAR/REKOR					PROGRAM	PELAKSANA	
					2012	2013	2014	2015	2016			
1	Pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terhadap kehidupan beragama	1. Bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan beragama?	1	10	1	1	1	1	1	1	Pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terhadap kehidupan beragama	DJK/DPH
		2. Bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan beragama?	1	10	1	1	1	1	1	1		
		3. Bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan beragama?	1	10	1	1	1	1	1	1		
		4. Bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan beragama?	1	10	1	1	1	1	1	1		
		5. Bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan beragama?	1	10	1	1	1	1	1	1		
		6. Bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan beragama?	1	10	1	1	1	1	1	1		
		7. Bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan beragama?	1	10	1	1	1	1	1	1		
		8. Bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan beragama?	1	10	1	1	1	1	1	1		
		9. Bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan beragama?	1	10	1	1	1	1	1	1		
		10. Bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan beragama?	1	10	1	1	1	1	1	1		

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

NO PROGRAM/KELOMPOK PROJEK/AS	INDIKATOR	RENTANA LOKASI/TAHAP	# KEMERDEKAAN TANAMAN/TAHAP	# KEMERDEKAAN MUSI			PROG RAM	PULOK/NSM
				2011	2012	2013		
7	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
8	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
9	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
10	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
11	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
12	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
13	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
14	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
15	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
16	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
17	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
18	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
19	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
20	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
21	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
22	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
23	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
24	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
25	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
26	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
27	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
28	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
29	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
30	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
31	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
32	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
33	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
34	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
35	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
36	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
37	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
38	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
39	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
40	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
41	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
42	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
43	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
44	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
45	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
46	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
47	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
48	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
49	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0
50	Indikator: ...	1	1	0	0	0	0	0

LAMPA 7

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

NO PROPOSAL/KELENGKAPAN	INDIKATOR	RENTANSA LOKASI/LOKASI	# KEMERDEKAAN TUMBUH/TAJUK	3319	# KEMERDEKAAN MUKTI			PENCAPAIAN 2012	PENCAPAIAN 2013	PENCAPAIAN 2014
					2014	2015	2016			
21	1. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif 2. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	1. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif 2. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	2	2	2	2	2	2	2	2	2
23	1. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif 2. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24	1. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif 2. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	1. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif 2. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	5	5	5	5	5	5	5	5	5
26	1. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif 2. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	6	6	6	6	6	6	6	6	6
27	1. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif 2. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	7	7	7	7	7	7	7	7	7
28	1. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif 2. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	8	8	8	8	8	8	8	8	8
29	1. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif 2. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	9	9	9	9	9	9	9	9	9
30	1. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif 2. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31	1. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif 2. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	11	11	11	11	11	11	11	11	11
32	1. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif 2. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	12	12	12	12	12	12	12	12	12
33	1. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif 2. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	13	13	13	13	13	13	13	13	13
34	1. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif 2. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	14	14	14	14	14	14	14	14	14
35	1. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif 2. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	15	15	15	15	15	15	15	15	15
36	1. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif 2. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	16	16	16	16	16	16	16	16	16
37	1. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif 2. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	17	17	17	17	17	17	17	17	17
38	1. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif 2. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	18	18	18	18	18	18	18	18	18
39	1. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif 2. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	19	19	19	19	19	19	19	19	19
40	1. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif 2. Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

NO	INDUKSI/ASPEK/URAIAN PROBLEMA	INDUKSI/URAIAN	RENTANSA LOKASI/LOKASI	# KEMERDEKAAN TARIK/URAIAN	3319	# KEMERDEKAAN MATA			PROGNOSE	PILIHAN/REKOMENDASI
						2014	2015	2012		
1	1. Bidang Budaya, Kepercayaan, Keajaiban, Tradisi, dan Ritual 2. Keragaman Kepercayaan 3. Kepercayaan	1. Bidang Budaya, Kepercayaan, Keajaiban, Tradisi, dan Ritual 2. Keragaman Kepercayaan 3. Kepercayaan	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1. Bidang Kepercayaan, Kepercayaan, Keajaiban, Tradisi, dan Ritual 2. Keragaman Kepercayaan 3. Kepercayaan	1. Bidang Kepercayaan, Kepercayaan, Keajaiban, Tradisi, dan Ritual 2. Keragaman Kepercayaan 3. Kepercayaan	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1. Bidang Kepercayaan, Kepercayaan, Keajaiban, Tradisi, dan Ritual 2. Keragaman Kepercayaan 3. Kepercayaan	1. Bidang Kepercayaan, Kepercayaan, Keajaiban, Tradisi, dan Ritual 2. Keragaman Kepercayaan 3. Kepercayaan	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1. Bidang Kepercayaan, Kepercayaan, Keajaiban, Tradisi, dan Ritual 2. Keragaman Kepercayaan 3. Kepercayaan	1. Bidang Kepercayaan, Kepercayaan, Keajaiban, Tradisi, dan Ritual 2. Keragaman Kepercayaan 3. Kepercayaan	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1. Bidang Kepercayaan, Kepercayaan, Keajaiban, Tradisi, dan Ritual 2. Keragaman Kepercayaan 3. Kepercayaan	1. Bidang Kepercayaan, Kepercayaan, Keajaiban, Tradisi, dan Ritual 2. Keragaman Kepercayaan 3. Kepercayaan	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1. Bidang Kepercayaan, Kepercayaan, Keajaiban, Tradisi, dan Ritual 2. Keragaman Kepercayaan 3. Kepercayaan	1. Bidang Kepercayaan, Kepercayaan, Keajaiban, Tradisi, dan Ritual 2. Keragaman Kepercayaan 3. Kepercayaan	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1. Bidang Kepercayaan, Kepercayaan, Keajaiban, Tradisi, dan Ritual 2. Keragaman Kepercayaan 3. Kepercayaan	1. Bidang Kepercayaan, Kepercayaan, Keajaiban, Tradisi, dan Ritual 2. Keragaman Kepercayaan 3. Kepercayaan	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1. Bidang Kepercayaan, Kepercayaan, Keajaiban, Tradisi, dan Ritual 2. Keragaman Kepercayaan 3. Kepercayaan	1. Bidang Kepercayaan, Kepercayaan, Keajaiban, Tradisi, dan Ritual 2. Keragaman Kepercayaan 3. Kepercayaan	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1. Bidang Kepercayaan, Kepercayaan, Keajaiban, Tradisi, dan Ritual 2. Keragaman Kepercayaan 3. Kepercayaan	1. Bidang Kepercayaan, Kepercayaan, Keajaiban, Tradisi, dan Ritual 2. Keragaman Kepercayaan 3. Kepercayaan	1	1	1	1	1	1	1	1

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

NO	INDUKAHIBELAS PRIORITAS/KEGAWAN PROBLEMA	INDUKATOR	RENTANA 1.001.5.007	# BARUKAN TALUNAN 2012	# BAKIRAN MAJU			PROGNOSE	RUKUN
					2012	2014	2015		
1	1. Penerapan dan penguatan	1. Mendorong penguatan pelaksanaan kegiatan dan pembangunan berbasis kearifan lokal	1	1	1	1	1	1	1
2	2. Pemberdayaan komunitas	2. Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan masyarakat sipil dalam melaksanakan pembangunan berbasis kearifan lokal	2	2	2	2	2	2	2
3	3. Peningkatan partisipasi	3. Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam kegiatan pembangunan berbasis kearifan lokal	3	3	3	3	3	3	3
4	4. Penguatan kelembagaan	4. Meningkatkan kelembagaan masyarakat sipil dalam kegiatan pembangunan berbasis kearifan lokal	4	4	4	4	4	4	4
5	5. Peningkatan kelembagaan	5. Meningkatkan kelembagaan masyarakat sipil dalam kegiatan pembangunan berbasis kearifan lokal	5	5	5	5	5	5	5
6	6. Peningkatan kelembagaan	6. Meningkatkan kelembagaan masyarakat sipil dalam kegiatan pembangunan berbasis kearifan lokal	6	6	6	6	6	6	6
7	7. Peningkatan kelembagaan	7. Meningkatkan kelembagaan masyarakat sipil dalam kegiatan pembangunan berbasis kearifan lokal	7	7	7	7	7	7	7
8	8. Peningkatan kelembagaan	8. Meningkatkan kelembagaan masyarakat sipil dalam kegiatan pembangunan berbasis kearifan lokal	8	8	8	8	8	8	8
9	9. Peningkatan kelembagaan	9. Meningkatkan kelembagaan masyarakat sipil dalam kegiatan pembangunan berbasis kearifan lokal	9	9	9	9	9	9	9
10	10. Peningkatan kelembagaan	10. Meningkatkan kelembagaan masyarakat sipil dalam kegiatan pembangunan berbasis kearifan lokal	10	10	10	10	10	10	10

L. 2011. 7

Bidang: Sosial Budaya dan Keluhan/Beranggus

NO URUTAN/NO URUTAN PROGRAM	INDIKATOR	RENTAN LOKASI	PILIHAN TARIKH	PERIODE WAKTU				PROGRAM	PILIHAN TARIKH
				2011	2012	2013	2014		
1	1. Indeks dan skor prestasi belajar	1. 1	1. 1	1. 1	1. 1	1. 1	1. 1	1. 1	1. 1
2	2. Jumlah dan jenis kegiatan kepramukaan	2. 1	2. 1	2. 1	2. 1	2. 1	2. 1	2. 1	2. 1
3	3. Indeks dan skor prestasi belajar	3. 1	3. 1	3. 1	3. 1	3. 1	3. 1	3. 1	3. 1

L. 2.1.1.1.1

MATRIS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2013

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Utusan Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Kemajuan Tahun 2012	Pra-tindakan/ Peninjauan Tahun 2012	Kemajuan Tahun 2013	Uraian Realisasi				Program	Belanja	
						Tahun 2011	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013			
11	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
II	Pembinaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Keagamaan											
A	Peningkatan Keselamatan dan Ketertarikan Masyarakat Terhadap Kegiatan Keagamaan											
1	Peningkatan Keselamatan dan Ketertarikan Masyarakat Terhadap Kegiatan Keagamaan	1. Persentase ibu-ibu yang mengikuti kegiatan keagamaan berbasis (komunitas) perempuan adat (KAWA) (PAK)	85	85	80	90	90	90	90	90	90	90
		2. Cairupan kunjungan minimal pertama (KKT)	88	88	89	90	91	91	91	91	91	91
2	Peningkatan Keselamatan dan Ketertarikan Masyarakat Terhadap Kegiatan Keagamaan	1. Persentase ibu-ibu yang mengikuti kegiatan keagamaan berbasis (komunitas) perempuan adat (KAWA) (PAK)	93	93	92	90	90	90	90	90	90	90
		2. Persentase Fair yang diperkenalkan (kegiatan keagamaan berbasis (komunitas) perempuan adat (KAWA) (PAK))	90	90	95	95	95	95	95	95	95	95
		3. Persentase realisasi pelayanan keagamaan yang diselenggarakan (KAWA) (PAK)	75	75	90	90	90	90	90	90	90	90
3	Peningkatan Keselamatan dan Ketertarikan Masyarakat Terhadap Kegiatan Keagamaan	1. Jumlah kegiatan keagamaan berbasis (komunitas) perempuan adat (KAWA) (PAK)	88	88	89	90	91	91	91	91	91	91
		2. Jumlah pelayanan keagamaan berbasis (komunitas) perempuan adat (KAWA) (PAK)	90	90	92	90	92	92	92	92	92	92
		3. Jumlah pelayanan keagamaan berbasis (komunitas) perempuan adat (KAWA) (PAK)	87	87	88	88	88	88	88	88	88	88
		4. Jumlah realisasi pelayanan keagamaan berbasis (komunitas) perempuan adat (KAWA) (PAK)	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91

Rentang: Sustin Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Polas Prioritas/ Regulasi Prioritas	Indikator	Kontena Tahun 2012	Praktisi Perwakilan Tahun 2012	Kontena Tahun 2013	Evaluasi Masi			Program	Pelaksana
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		
4	12) Padi dan Padi dan Keragaman dan Keragaman Modis	1) Jumlah buku-buku yang diterbitkan mengenai Keragaman: Gotong Royong dan stabilitas dan kestabilan 2) Jumlah yang menanggapi pelajaran kepercayaan dan kehidupan, nilai-nilai dan pelajaran 3) Jumlah yang menanggapi buku-buku kepercayaan, nilai-nilai, keragaman, baik secara pedagogis Persentase buku-buku yang diterbitkan (jumlah buku-buku yang diterbitkan [100%])	13) 468	45) 466	46) 453	17) 531	18) 533	19) 533	120) Padi dan Padi dan Keragaman	111) Keragaman dan Keragaman
5	Perbaikan status guru masyarakat	1) Persentase guru yang mendapat pendidikan 2) Persentase guru yang mendapat pendidikan	73	73	80	85	87	87		
1	Penerapan dan Monev		111	100	100	100	100	100	100	100

Lampiran 13

Daftar: Saran Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Pondok/Pokas/Prioritas/ Regulasi/Prioritas	Indikator	Kontes Tahun 2012	Praktisi Perwakilan Tahun 2012	Kontes Tahun 2012	Praktisi Baru			Program	Pelaksana
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
C	Pengembangan persekitar mentar serta penyalak tidak zenukar, dilanta penerbitan lingkungan	1. Persentase long (0-1) dan mendapat himikan dasar long 2. Angka penerbitan kasus Makaria per penduduk 3. Jumlah karu TB per 100.000 penduduk 4. Persentase kawaharu TB baru (RTA positif) yang dituntun 5. Persentase kawaharu TB baru (RTA positif) yang dituntun 6. Angka besikan penerbitan TB per 100.000 penduduk 7. Persentase insidensi HIV 8. Jumlah kasus penerbitan TB 9. Jumlah desa yang mendasak Tatal Berhulu Masyarakat (TBM)	85	85	86	171	101	102	120	112
			1,5	1,5	1,25	1	1,9	1,9		
			224	224	224	226	224	224		
			0	0	0	0	0	0		
			87	87	87	88	88	88		
			53	53	52	51	50	50		
			<0,3	<0,5	<0,5	<0,5	<0,3	<0,3		
			345	345	315	300	285	285		
			11.000	11.000	10.000	20.000	20.000	20.000		
			80	80	90	100	100	100		

Lampiran 1-

Rincian: Sustinjau Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Pokok Prioritas/ Regulasi Prioritas	Indikator	Kontesna Tahun 2012	Praktisitas Pencapaian Tahun 2012	Kontesna Tahun 2013	Evaluasi Madya			Program	Pelaksana
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		
1	12)	12)	12)	42)	62)	17)	10)	12)	12)	12)
	Pendidikan, Sains, dan Teknologi, Pendidikan, dan Kebudayaan	1. Peningkatan jumlah dan kualitas lembaga pendidikan dan penelitian 2. Peningkatan jumlah dan kualitas lembaga penelitian	85	82	88	90	92	93	94	95
2	Pengendalian Penyakit, Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah kasus TBC per 100.000 penduduk 2. Desentralisasi layanan kesehatan 3. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat 4. Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue 5. Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan 6. Jumlah kasus malaria per 100.000 penduduk 7. Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan	220	220	220	220	220	220	220	220
			95	95	95	90	90	90	90	95
			17	17	17	18	18	18	18	18
			315	315	315	315	315	315	315	315
			50	50	50	50	50	50	50	50
			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
			-	-	85	90	95	95	95	95

Lampiran 15

Daftar: Sasaran Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Pokok Prioritas; Regulasi Prioritas	Indikator	Kontesna Tahun 2012	Praktisitas Pencapaian Tahun 2012	Kontesna Tahun 2013	Pencapaian Madya			Program	Pelaksana
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		
1	12)	13)	12)	13)	12)	171	101	192	120)	112)
2	Peningkatan Perilaku Berkemajuan Beragama	1. Angka kerakianitas per keluarga (PK) di tingkat provinsi	53	55	53	51	50	50	Peningkatan Perilaku dan Pergerakan Lingkungan	Kementerian Kesehatan
		2. Angka kerakianitas per desa/kelurahan (DK)	45	45	45	45	45	45		
		3. Persentase masyarakat yang dibarengi dengan dukungan pemerintah	90	90	90	90	90	90		
4	Peningkatan Lingkungan	1. Persentase perilaku yang memiliki akses terhadap air minum yang bersih	63	64	63,5	62	62	62	Peningkatan Perilaku dan Pergerakan Lingkungan	Kementerian Kesehatan
		2. Persentase perilaku yang memiliki akses ke sanitasi layak	45	45	46	46	46	46		
		3. Persentase perilaku yang menggunakan kabel listrik	60	60	62	65	65	65		
5	Peningkatan Perilaku Mendaur	1. Jumlah kegiatan keagamaan/ sosial di lingkungan masyarakat	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
		2. Persentase perilaku yang memiliki akses ke layanan kesehatan	90	90	90	90	90	90		
		3. Persentase perilaku yang memiliki akses ke layanan kesehatan	80	80	80	80	80	80		

Lampiran 16

Rincian: Sustinj Dndaya dan Kehidupan Beragama

No	Pusat: Pokus Prioritas; Region: Prioritas	Indikator	Kontena Tahun 2012	Praktisi Pencapaian Tahun 2012	Kontena Tahun 2013	Praktisi Baru			Program	Pelaksana
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		
1	13)	13)	13)	43)	16)	17)	101)	19)	129)	112)
5	Pendidikan dan pelatihan Pengembangan sumber daya manusia kesehatan	Indikator: Peringkat 5, 4 dan 3 pada ranking dan penerapannya	50	50	50	50	50	50	Pembiayaan, pelatihan dan penelitian kegiatan	Yogyakarta Solo
10	Pengembangan sumber daya manusia kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi	60	40	60	80	80	80		
11	Sertifikasi, sertifikasi dan Fasilitas, jalinan bagi SDK kesehatan	Persentase persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikasi kompetensi	60	60	60	60	60	60	Pengembangan SDM Fasilitas, jalinan bagi SDK kesehatan	Jember Banyuwangi
12	Pendidikan dan pelatihan Pengembangan sumber daya manusia kesehatan	Indikator: SPM kelas 1 dan 2 pada ranking yang telah dilaksanakan dan penerapannya melalui pelaksanaan penelitian	60	60	60	60	60	60	Pengembangan SDM Fasilitas, jalinan bagi SDK kesehatan	Jember Banyuwangi
13	Pendidikan dan pelatihan Pengembangan sumber daya manusia kesehatan	Indikator: SPM kelas 1 dan 2 pada ranking yang telah dilaksanakan dan penerapannya melalui pelaksanaan penelitian	60	60	60	60	60	60	Pengembangan SDM Fasilitas, jalinan bagi SDK kesehatan	Jember Banyuwangi
14	Pendidikan dan pelatihan Pengembangan sumber daya manusia kesehatan	Indikator: SPM kelas 1 dan 2 pada ranking yang telah dilaksanakan dan penerapannya melalui pelaksanaan penelitian	60	60	60	60	60	60	Pengembangan SDM Fasilitas, jalinan bagi SDK kesehatan	Jember Banyuwangi

Lampiran 17

Ringkasan: Sustinai Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Kategori/Politik Prioritas; Regulasi Prioritas	Indikator	Kontesna Tahun 2012	Praktisitas Perencanaan Tahun 2012	Kencapaian Tahun 2012	Evaluasi Madya				Program	Pelaksanaan
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		
4	12)	12)	12)	43)	62)	17)	10)	19)	122)		112)
5	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kelembagaan	1) Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan dan kesehatan 2) Peningkatan kualitas layanan dan pelayanan publik dan pelayanan masyarakat 3) Peningkatan kualitas layanan publik dan pelayanan masyarakat	80	57	85	90	95	95		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pelayanan Masyarakat	Kelembagaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pelayanan Masyarakat
6	Peningkatan ketahanan, ketertinggalan, pemerataan, dan daya penghidupan obrol serta penghidupan sosial dan masyarakat	1) Peningkatan ketahanan, ketertinggalan, pemerataan, dan daya penghidupan sosial dan masyarakat 2) Peningkatan ketahanan, ketertinggalan, pemerataan, dan daya penghidupan sosial dan masyarakat	90	90	95	100	100	100			
7	Peningkatan Kualitas dan Kelembagaan Masyarakat	Peningkatan kualitas dan kelembagaan masyarakat	60	57	65	70	75	75		Kemajuan Masyarakat Kelembagaan	Peningkatan Kualitas dan Kelembagaan Masyarakat
8	Peningkatan Kualitas dan Kelembagaan Masyarakat	Peningkatan kualitas dan kelembagaan masyarakat	75	72	80	85	85	85		Kemajuan Masyarakat Kelembagaan	Peningkatan Kualitas dan Kelembagaan Masyarakat
9	Peningkatan Kualitas dan Kelembagaan Masyarakat	Peningkatan kualitas dan kelembagaan masyarakat	85	83	90	95	95	95		Kemajuan Masyarakat Kelembagaan	Peningkatan Kualitas dan Kelembagaan Masyarakat

Lampiran III

Rentang: Sustinii Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Pokok Prioritas/ Regulasi Prioritas	Indikator	Kontesna Tahun 2012	Praktisitas Perencanaan Tahun 2012	Kontesna Tahun 2013	Evaluasi Madya			Program	Pelaksanaan
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		
4	12) Penguatan Perilaku Dewasa Temporer Perilaku kepercayaan keluarga (PRKT)	12) Penguatan perilaku Dewasa Temporer Perilaku kepercayaan keluarga (PRKT)	12)	45)	62)	171	101	19)	122)	112)
		1) Penguatan perilaku Dewasa Temporer Perilaku kepercayaan keluarga (PRKT)	75	57	85	85	85	85	Pengawasan Obat dan Racun	300%
5	Berprestasi dalam Monev di 3 level keseluruhan POM	1) Penguatan perilaku Dewasa Temporer Perilaku kepercayaan keluarga (PRKT)			10	10	10	10	Pengawasan Obat dan Racun	400%
		2) Penguatan perilaku Dewasa Temporer Perilaku kepercayaan keluarga (PRKT)			37	53	50	50		
		3) Penguatan perilaku Dewasa Temporer Perilaku kepercayaan keluarga (PRKT)			18	32	40	50		
6	Penyusunan proses kepercayaan keluarga (PRKT)	1) Penguatan perilaku Dewasa Temporer Perilaku kepercayaan keluarga (PRKT)	60	57	55	30	130	100	Pengawasan Obat dan Racun	300%
		2) Penguatan perilaku Dewasa Temporer Perilaku kepercayaan keluarga (PRKT)			80	90	85	100		
7	Berprestasi dan Berprestasi dalam Monev	1) Penguatan perilaku Dewasa Temporer Perilaku kepercayaan keluarga (PRKT)	75	57	30	90	90	90	Pengawasan Obat dan Racun	300%
		2) Penguatan perilaku Dewasa Temporer Perilaku kepercayaan keluarga (PRKT)								

Lampiran 14

Rentang: Sustin Dayaya dan Kehidupan Beragama

No	Pondasi/Polas Prioritas/ Regulasi Prioritas	Indikator	Kontena Tahun 2012	Praktisi/Perwakilan Tahun 2012	Kontena Tahun 2013	Praktisi/Perwakilan Baru			Program	Pelaksana
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		
11	13)	13)	13)	13)	16)	17)	18)	19)	120)	111)
12	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Kelembagaan, dan Pengembangan Kelembagaan	1) Persiapan dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan yang akan dilaksanakan di tingkat Kabupaten 2) Persiapan dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan yang akan dilaksanakan di tingkat Kecamatan	10	10	10	10	10	10	Pengembangan Kelembagaan	112)
13	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan	Pembinaan dan pengembangan kelembagaan kelembagaan yang akan dilaksanakan di tingkat Kecamatan	10	10	10	10	10	10	Pengembangan Kelembagaan	113)
14	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan	Pembinaan dan pengembangan kelembagaan kelembagaan yang akan dilaksanakan di tingkat Kecamatan	10	10	10	10	10	10	Pengembangan Kelembagaan	114)
15	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan	Pembinaan dan pengembangan kelembagaan kelembagaan yang akan dilaksanakan di tingkat Kecamatan	10	10	10	10	10	10	Pengembangan Kelembagaan	115)

11/11/2012

Rentang: Sustin Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Polah Prioritas/ Regulasi Prioritas	Indikator	Kontena Tahun 2012	Praktisi/Perwakilan Tahun 2012	Kontena Tahun 2013	Evaluasi Madya			Program	Pelaksana
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		
1	Pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan	13) Proses penyelesaian masalah pemaduan layanan kesehatan	13) 67,5	43) 67,5	16) 95,4	17) 80,1	18) 80,1	19) 80,1	120)	112)
1	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Program Kerja dan Kegiatan	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja dan kegiatan	67,2	67,2	75,4	80,1	80,1	80,1	Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan	Menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan
2	Pelayanan Kesehatan dan Rehabilitasi	Pelayanan kesehatan dan rehabilitasi	85	85	89	85	85	85	Pelayanan Kesehatan dan Rehabilitasi	Menyusun dan melaksanakan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi
3	Masyarakat Sehat dan Berkualitas	Masyarakat sehat dan berkualitas	65,6	65,6	63,3	65,6	65,6	65,6	Promosi Kesehatan	Menyusun dan melaksanakan promosi kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan dan Rehabilitasi	Pelayanan kesehatan dan rehabilitasi	67,9	67,9	76,3	76,3	76,3	76,3	Pelayanan Kesehatan dan Rehabilitasi	Menyusun dan melaksanakan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi
5	Dukungan dan Pengembangan	Dukungan dan pengembangan	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	Dukungan dan Pengembangan	Menyusun dan melaksanakan dukungan dan pengembangan

12/10/2012

Rentang: Sustinjir Budaya dan Kehidupan Beragama

No	Pondasi-Pilaris Prioritas; Regulasi Primarias	Indikator	Kontena Tahun 2012	Praktisi/Perwakilan Tahun 2012	Kontena Tahun 2013	Evaluasi Madya			Program	Pelaksana
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		
I	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Pemberdayaan masyarakat dan membangun bangsa dan bangsa keadilan	1. Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 2. Jumlah keluarga yang mempunyai kemampuan tinggi dalam pemanfaatan bencana	60 300	60 300	65 350	70 300	75 350	75 350	Dukungan Kegiatan oleh P. Kesmas dan P. Desa KEMENTERIAN KESEHATAN	Yogyakarta Kendari
2	Pembelajaran Masyarakat P. Kesmas	1. Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS 2. Persentase Desa yang tidak 3. Jumlah keluarga yang mempunyai kemampuan tinggi dalam pemanfaatan bencana	60 300	60 300	65 350	70 300	75 350	75 350	Dukungan Kegiatan oleh P. Kesmas dan P. Desa KEMENTERIAN KESEHATAN	Yogyakarta Kendari
3	Peningkatan upaya kesehatan yang terjangkau dan berkualitas kegiatan primer, sekunder dan tersier	1. Jumlah kota di Indonesia yang memiliki 5S standar kelas dunia (world class) 2. Jumlah perusahaan yang menjadi pemasok pelayanan di perusahaan dan publik-publik yang berproduksi	300	300	350	300	350	350	Dukungan Kegiatan oleh P. Kesmas dan P. Desa KEMENTERIAN KESEHATAN	Yogyakarta Kendari

Rincian: Sustinjabilitas dan Kehidupan Beragama

No	Pondok-Pondok Prioritas; Regulasi Prioritas	Indikator	Kontesna Tahun 2012	Praktisai Persepsiabian Tahun 2012	Kontesna Tahun 2013	Evaluasian Maju			Program	Pelaksanaan
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		
1	1) Pondok Pesantren Al-Furqan Bontolene	1) Jumlah mahasiswa yang memiliki pekerjaan di perusahaan yang terdaftar di BPPK. 2) Desentralisasi absensi, pendaftaran, pelayanan (diikuti); Bermodal Berprestasi (BPPK).	120	45	160	170	180	190	1200	1120
2	Pondok Pesantren Al-Furqan Bontolene	1) Jumlah mahasiswa yang memiliki pekerjaan di perusahaan yang terdaftar di BPPK. 2) Desentralisasi absensi, pendaftaran, pelayanan (diikuti); Bermodal Berprestasi (BPPK).	3	5	6	5	5	5	Pondok Pesantren Al-Furqan Bontolene	1120
3	Pondok Pesantren Al-Furqan Bontolene	1) Jumlah mahasiswa yang memiliki pekerjaan di perusahaan yang terdaftar di BPPK. 2) Desentralisasi absensi, pendaftaran, pelayanan (diikuti); Bermodal Berprestasi (BPPK).	40	50	60	70	80	100	Pondok Pesantren Al-Furqan Bontolene	1120
4	Pondok Pesantren Al-Furqan Bontolene	1) Jumlah mahasiswa yang memiliki pekerjaan di perusahaan yang terdaftar di BPPK. 2) Desentralisasi absensi, pendaftaran, pelayanan (diikuti); Bermodal Berprestasi (BPPK).	500	520	550	580	600	620	Evaluasian, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	1120
5	Pondok Pesantren Al-Furqan Bontolene	1) Jumlah mahasiswa yang memiliki pekerjaan di perusahaan yang terdaftar di BPPK. 2) Desentralisasi absensi, pendaftaran, pelayanan (diikuti); Bermodal Berprestasi (BPPK).	44	44	45	45	45	45	Pondok Pesantren Al-Furqan Bontolene	1120

Rentang: Sustinj Dndaya dan Kehidupan Beragama

No	Prioritas/Polas Prioritas; Region Prioritas	Indikator	Konsren Tahun 2012	Praktisn Perseptasn Tahun 2012	Konsren Tahun 2013	Praktisn Maju			Program	Pelaksana
						Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		
44	12)	12)	12)	12)	12)	17)	10)	19)	12)	12)
5	Peningkatan Kelembagaan Jemaat; Haji	1. Peningkatan Kelembagaan Jemaat; peningkatan dan pambinaan keasas kerahaji sekaligus 2. Angkanya pambinaan keasas kerahaji jemaat	70	57	60	33	137	107	Peningkatan Kelembagaan dan Pambinaan keasas kerahaji Peningkatan Kelembagaan dan Pambinaan keasas kerahaji	Kelembagaan Jemaat
5	Peningkatan Upaya Keselamatan Jemaat	1. Peningkatan Keselamatan Jemaat; peningkatan dan pambinaan keasas kerahaji sekaligus 2. Angkanya pambinaan keasas kerahaji jemaat	50	33	70	90	100	100	Peningkatan Upaya Keselamatan	Peningkatan Keselamatan

Lampiran 2-

MATRIX 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2013

No	Pola bayangan Kegiatan	Indikator	Kerangka Tahun 2012	Program	Kerangka Tahun 2013	Kerangka Tahun 2014	Realisasi 2012			14-09-2013	15	Program	Pola bayangan			
							14-09-2012	10	11							
A	Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat	Efektivitas Pelayanan Masyarakat dan Kepuasan Masyarakat - skor layanan masyarakat - jumlah keluhan masyarakat - jumlah komplain dan keluhan yang diproses	94.853	Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat	96.113	96.006	101.874	120.027	131.124	131.124	131.124	131.124	131.124	131.124		
			102.028		102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028		
			102.028		102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	
			102.028		102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	
			102.028		102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	
			102.028		102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	
			102.028		102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028
			102.028		102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028
			102.028		102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028
			102.028		102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028
			102.028		102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028
			102.028		102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028	102.028

E-2013-25

MATRIKS 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2013

Bidang: Sosial Budaya dan Kelengkapan Berapapun

No	Kategori Kegiatan / Kegiatan Prioritas	Indikator	Kerangka Tahun 2012	Prinsip Tahun 2012	Kerangka Tahun 2013	Prinsip Tahun 2013	Kerangka Tahun 2013	Prakiraan Nilai			Program	Pola Kerja	
								Jan 2013	Jan 2013	Jan 2013			
a	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

MATRIS 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2013

Bidang : Sosial, Budaya dan Kelengkapan Berapapun

No	Kategori Kegiatan/Program/Proyek/Unit Kerja	Indikator	Kerangka Tahun 2012	Program/Proyek/Unit Kerja	Kategori Tujuan	Realisasi 2012			Program	Peta-rata
						1 Juli 2012	31 Desember 2012	12/01/2013		
A	Sempadan Pantai dan Perikanan SMPN 10000000000	1. Meningkatkan Kualitas Perikanan 2. Meningkatkan Kualitas Perikanan 3. Meningkatkan Kualitas Perikanan 4. Meningkatkan Kualitas Perikanan 5. Meningkatkan Kualitas Perikanan 6. Meningkatkan Kualitas Perikanan 7. Meningkatkan Kualitas Perikanan 8. Meningkatkan Kualitas Perikanan 9. Meningkatkan Kualitas Perikanan 10. Meningkatkan Kualitas Perikanan	31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%
			31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%
			31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%
			31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%
			31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%
			31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%
			31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%
			31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%
			31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%
			31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%
B	Sempadan Pantai dan Perikanan SMPN 10000000000	1. Meningkatkan Kualitas Perikanan 2. Meningkatkan Kualitas Perikanan 3. Meningkatkan Kualitas Perikanan 4. Meningkatkan Kualitas Perikanan 5. Meningkatkan Kualitas Perikanan 6. Meningkatkan Kualitas Perikanan 7. Meningkatkan Kualitas Perikanan 8. Meningkatkan Kualitas Perikanan 9. Meningkatkan Kualitas Perikanan 10. Meningkatkan Kualitas Perikanan	31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%
			31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%
			31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%
			31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%
			31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%
			31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%
			31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%
			31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%
			31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%
			31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%

MATRIKS Z.L.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2013

Bidang : Sosial, Budaya dan Kelengkapan Berapapun

No	Pencapaian Pegawai/Pimpinan	Indikator	Kerangka Tahun 2012	Program Pencapaian Tahun 2012	Kategori Sifat	Pencapaian M.u.			Program	Peta-rata
						1 Juli 2012	31 Desember 2012	1 Januari 2013		
1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	1	1
2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	2	2
3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	3	3
4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	4	4
5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	5	5
6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	6	6
7	7	7	7	7	7	100%	100%	100%	7	7
8	8	8	8	8	8	100%	100%	100%	8	8
9	9	9	9	9	9	100%	100%	100%	9	9
10	10	10	10	10	10	100%	100%	100%	10	10
11	11	11	11	11	11	100%	100%	100%	11	11
12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	12	12
13	13	13	13	13	13	100%	100%	100%	13	13
14	14	14	14	14	14	100%	100%	100%	14	14
15	15	15	15	15	15	100%	100%	100%	15	15
16	16	16	16	16	16	100%	100%	100%	16	16
17	17	17	17	17	17	100%	100%	100%	17	17
18	18	18	18	18	18	100%	100%	100%	18	18
19	19	19	19	19	19	100%	100%	100%	19	19
20	20	20	20	20	20	100%	100%	100%	20	20
21	21	21	21	21	21	100%	100%	100%	21	21
22	22	22	22	22	22	100%	100%	100%	22	22
23	23	23	23	23	23	100%	100%	100%	23	23
24	24	24	24	24	24	100%	100%	100%	24	24
25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	25	25
26	26	26	26	26	26	100%	100%	100%	26	26
27	27	27	27	27	27	100%	100%	100%	27	27
28	28	28	28	28	28	100%	100%	100%	28	28
29	29	29	29	29	29	100%	100%	100%	29	29
30	30	30	30	30	30	100%	100%	100%	30	30
31	31	31	31	31	31	100%	100%	100%	31	31
32	32	32	32	32	32	100%	100%	100%	32	32
33	33	33	33	33	33	100%	100%	100%	33	33
34	34	34	34	34	34	100%	100%	100%	34	34
35	35	35	35	35	35	100%	100%	100%	35	35
36	36	36	36	36	36	100%	100%	100%	36	36
37	37	37	37	37	37	100%	100%	100%	37	37
38	38	38	38	38	38	100%	100%	100%	38	38
39	39	39	39	39	39	100%	100%	100%	39	39
40	40	40	40	40	40	100%	100%	100%	40	40
41	41	41	41	41	41	100%	100%	100%	41	41
42	42	42	42	42	42	100%	100%	100%	42	42
43	43	43	43	43	43	100%	100%	100%	43	43
44	44	44	44	44	44	100%	100%	100%	44	44
45	45	45	45	45	45	100%	100%	100%	45	45
46	46	46	46	46	46	100%	100%	100%	46	46
47	47	47	47	47	47	100%	100%	100%	47	47
48	48	48	48	48	48	100%	100%	100%	48	48
49	49	49	49	49	49	100%	100%	100%	49	49
50	50	50	50	50	50	100%	100%	100%	50	50
51	51	51	51	51	51	100%	100%	100%	51	51
52	52	52	52	52	52	100%	100%	100%	52	52
53	53	53	53	53	53	100%	100%	100%	53	53
54	54	54	54	54	54	100%	100%	100%	54	54
55	55	55	55	55	55	100%	100%	100%	55	55
56	56	56	56	56	56	100%	100%	100%	56	56
57	57	57	57	57	57	100%	100%	100%	57	57
58	58	58	58	58	58	100%	100%	100%	58	58
59	59	59	59	59	59	100%	100%	100%	59	59
60	60	60	60	60	60	100%	100%	100%	60	60
61	61	61	61	61	61	100%	100%	100%	61	61
62	62	62	62	62	62	100%	100%	100%	62	62
63	63	63	63	63	63	100%	100%	100%	63	63
64	64	64	64	64	64	100%	100%	100%	64	64
65	65	65	65	65	65	100%	100%	100%	65	65
66	66	66	66	66	66	100%	100%	100%	66	66
67	67	67	67	67	67	100%	100%	100%	67	67
68	68	68	68	68	68	100%	100%	100%	68	68
69	69	69	69	69	69	100%	100%	100%	69	69
70	70	70	70	70	70	100%	100%	100%	70	70
71	71	71	71	71	71	100%	100%	100%	71	71
72	72	72	72	72	72	100%	100%	100%	72	72
73	73	73	73	73	73	100%	100%	100%	73	73
74	74	74	74	74	74	100%	100%	100%	74	74
75	75	75	75	75	75	100%	100%	100%	75	75
76	76	76	76	76	76	100%	100%	100%	76	76
77	77	77	77	77	77	100%	100%	100%	77	77
78	78	78	78	78	78	100%	100%	100%	78	78
79	79	79	79	79	79	100%	100%	100%	79	79
80	80	80	80	80	80	100%	100%	100%	80	80
81	81	81	81	81	81	100%	100%	100%	81	81
82	82	82	82	82	82	100%	100%	100%	82	82
83	83	83	83	83	83	100%	100%	100%	83	83
84	84	84	84	84	84	100%	100%	100%	84	84
85	85	85	85	85	85	100%	100%	100%	85	85
86	86	86	86	86	86	100%	100%	100%	86	86
87	87	87	87	87	87	100%	100%	100%	87	87
88	88	88	88	88	88	100%	100%	100%	88	88
89	89	89	89	89	89	100%	100%	100%	89	89
90	90	90	90	90	90	100%	100%	100%	90	90
91	91	91	91	91	91	100%	100%	100%	91	91
92	92	92	92	92	92	100%	100%	100%	92	92
93	93	93	93	93	93	100%	100%	100%	93	93
94	94	94	94	94	94	100%	100%	100%	94	94
95	95	95	95	95	95	100%	100%	100%	95	95
96	96	96	96	96	96	100%	100%	100%	96	96
97	97	97	97	97	97	100%	100%	100%	97	97
98	98	98	98	98	98	100%	100%	100%	98	98
99	99	99	99	99	99	100%	100%	100%	99	99
100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100	100

MATRIS 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2013

Bidang : Sosial, Budaya dan Kelengkapan Berapapun

No.	Program/ Kegiatan/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Kerangka Tahun 2012	Program/ Kegiatan Tahun 2012	Kerangka Tahun 2013	Realisasi 2012			Program	Pencapaian
						1 Juli 2012	31 Desember 2012	31 Desember 2012		
5.1	Pengembangan Kawasan Berencana (KAWASAN BERENCANA) di Kabupaten Cirebon	5.1.1	25.000	25.700	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.1.2		5.100	5.100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.1.3		5.800	5.800	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.1.4		5.500	5.500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.1.5		8.400	8.400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.1.6		5.100	5.100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.1.7		67.200	67.200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.1.8		70.200	70.200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.1.9		107.700	107.700	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.1.10		107.700	107.700	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Pengembangan Kawasan Berencana (KAWASAN BERENCANA) di Kabupaten Cirebon	5.2.1	30.000	30.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2.2		30.000	30.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

E-2014-35

MATRIKS Z.L.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2013

Bidang : Sosial, Budaya dan Kelitupaan Beragama

No	Kategori Kegiatan / Kegiatan	Indikator	Kerangka Tahun 2012	Program / Kegiatan Tahun 2012	Kerangka Tahun 2013	Kerangka Tahun 2014	Kerangka Tahun 2015	Realisasi 2012			Program	Peta-rata
								Jan 2012	Jun 2012	Des 2012		
11		1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Masyarakat Berkebutuhan Khusus (MBK) dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan 2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan MBK dalam berwirausaha 3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan MBK dalam mencari dan mendapatkan tempat tinggal 4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan MBK dalam mencari dan mendapatkan layanan kesehatan 5. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan MBK dalam mencari dan mendapatkan layanan pendidikan	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG
		1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Masyarakat Berkebutuhan Khusus (MBK) dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG
		2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan MBK dalam berwirausaha	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG
		3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan MBK dalam mencari dan mendapatkan tempat tinggal	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG
		4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan MBK dalam mencari dan mendapatkan layanan kesehatan	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG
		5. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan MBK dalam mencari dan mendapatkan layanan pendidikan	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG	30 ORG

